Laporan Akhir Riset Fasilitas Kesehatan 2011

PUSKESMAS

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jakarta 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya Laporan Hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 telah dapat diselesaikan. Dalam laporan ini dimunculkan gambaran fasilitas kesehatan di Indonesia khususnya pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pelaksanaan pengumpulan data Risfaskes 2011 dilakukan pada bulan Mei-Desember 2011, di 33 provinsi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) mengerahkan sekitar 4000 enumerator yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, seluruh peneliti Balitbangkes, dosen Poltekkes, Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perguruan Tinggi.

Proses manajemen data mulai dari data dikumpulkan, kemudian dientri ke komputer, selanjutnya data *cleaning* dilakukan di Badan Litbangkes. Proses pengumpulan data dan manajemen data ini sungguh memakan waktu, stamina dan pikiran, sehingga tidaklah mengherankan bila diwarnai dengan dinamika kehidupan yang indah dalam dunia ilmiah.

Perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan yang tinggi serta terima kasih yang tulus atas semua kerja cerdas dan penuh dedikasi dari seluruh peneliti, litkayasa dan staf Balitbangkes, rekan sekerja dari BPS, para pakar dari Perguruan Tinggi, Penanggung Jawab Operasional dari jajaran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh enumerator serta semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan Risfaskes. Simpati mendalam disertai doa kami haturkan kepada mereka yang mengalami kecelakaan sewaktu melaksanakan Rifaskes.

Secara khusus, perkenankan ucapan terima kasih kami dan para peneliti kepada Ibu Menteri Kesehatan yang telah memberi kepercayaan kepada kita semua, anak bangsa, dalam menunjukkan karya baktinya.

Kami telah berupaya maksimal, namun pasti masih banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan. Untuk itu kami mohon kritik, masukan dan saran, demi penyempurnaan Risfaskes dimasa yang akan datang.

Billahit taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 25 Juli 2012
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

DR. dr. Trihono, MSc.

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL RISET FASILITAS KESEHATAN (RIFASKES) PUSKESMAS 2011
BADAN LITBANGKES, KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kemkes RI, disamping Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Riset Khusus Kesehatan (Rikus). Rifaskes 2011 dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda), Puskesmas dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). *Supply* tersebut termasuk gedung, persediaan air bersih, listrik, kendaraan, peralatan, obat, Sumber Daya Manusia (SDM), pedoman, pelatihan, anggaran dan sebagainya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan di RSU Pemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. Rifaskes 2011 melakukan pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder untuk mengetahui situasi terkini kecukupan dan ketepatan *supply* pada institusi-institusi pelaksana upaya kesehatan tersebut diatas.

Kerangka pikir riset ini dikembangkan atas dasar konsep *Blum* (1974), *Donabedian* (2002), *Jacab* dan *WHO* 2000. Pada prinsipnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan ini dilakukan didalam dan diluar gedung institusi pelayanan kesehatan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Semua kegiatan tersebut mempunyai komponen asupan (*input*), proses, luaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Komponen asupan inilah yang menjadi fokus utama Rifaskes 2011. Disamping itu, dalam Rifaskes 2011 ini dikumpulkan pula data esensial yang berhubungan dengan komponen proses dan luaran dari berbagai jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan baik oleh Puskesmas, RSU Pemerintah/Pemda maupun LKM.

Dengan demikian, Rifaskes 2011 memberikan gambaran/potret dan pemetaan ketersediaan *supply* di Puskesmas, RSU Pemerintah/Pemda dan LKM, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Gambaran/potret dan pemetaan ketersediaan *supply* tersebut tentunya disesuaikan dengan fungsi yang diemban oleh ke tiga institusi pelaksana upaya kesehatan tersebut. Diharapkan riset ini juga akan menghasilkan Indeks Fasilitas dan Indeks Kinerja RSU Pemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. Rifaskes 2011 mulai dilaksanakan sejak 2010. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2010, sedangkan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2011 dan dilanjutkan dengan sosialisasi hasil dan analisis lanjut pada tahun 2012. Rifaskes 2011 dilaksanakan dengan menggunakan dana yang berasal dari DIPA Badan Litbangkes Kementerian kesehatan RI.

Laporan ini merupakan laporan hasil dari data fasilitas Puskesmas yang telah dikumpulkan melalui Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Puskesmas 2011. Sedangkan hasil Rifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah/Pemda dan LKM dilaporkan secara tersendiri.

Rancangan Rifaskes Puskesmas 2011 adalah studi potong lintang *(cross sectional)*. Dilakukan secara sensus terhadap 9005 Puskesmas (berdasarkan data Ditjen BUK dan

Pusdatin tahun 2010). Rancangan ini merupakan salah satu bagian dari rancangan Rifaskes 2011 secara keseluruhan.

Data yang dikumpulkan meliputi data input, proses, dan output upaya kesehatan di Puskesmas yang antara lain terdiri dari data fasilitas, Sumber Daya Manusia (SDM), alat kesehatan, organisasi dan manajemen, pelayanan kesehatan yang berjalan, output esensial dan pelayanan kesehatan, fungsi serta Indikator Mutu Esensial Puskesmas tahun 2010. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner Rifaskes Puskesmas 2011 yang terdiri dari 16 Blok. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penilaian terhadap data sekunder.

Pengumpul data adalah peneliti Badan Litbangkes, politeknik kesehatan (Poltekkes), universitas (perguruan tinggi), organisasi profesi, ataupun institusi penelitian kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilakukan : 1. Telaah dokumen (*document review*), 2. Pertemuan konsinyasi lintas program dan organisasi profesi, 3. Pertemuan pakar, 4. Penyusunan draft instrumen Rifaskes 2011, 5. Uji coba Instrumen, 6. Perbaikan dan finalisasi instrumen Rifaskes Puskesmas 2011, 7. Penyusunan *Plan of Action* (POA) pelaksanaan Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 8. Penyusunan pedoman instrumen Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 9. Pertemuan Tim Manajemen Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 10. Rapat Koordinasi tingkat Provinsi, 11. Workshop/Pelatihan Fasilitator (*Master of Trainers*/MOT) Rifaskes 2011 tingkat Pusat (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 12. Workshop/Pelatihan Penanggung Jawab Teknis/PJT (*Training of Trainers*/ TOT) Kabupaten/Kota Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 13. Workshop/Pelatihan Rifaskes Puskesmas 2011 untuk enumerator, 14. Pengumpulan data Rifaskes Puskesmas 2011, 15. Validasi studi, 16. Data RB/Editing/ Cleaning, 17. Analisa data, 18. Penulisan laporan akhir, 19. Diseminasi hasil Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), dan 20. Analisis lanjut

Pengorganisasian Rifaskes 2011 meliputi tingkat Pusat, tingkat Koordinator Wilayah I – IV (1 Korwil bertanggung jawab atas 8-9 Provinsi), tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Rifaskes 2011 tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Harian, Tim Manajemen, Tim Teknis RS Pemerintah, Puskesmas, LKM, Manajemen Data (Mandat) dan Analisis Data (Andat).

Validasi studi ini dilaksanakan oleh tiga Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) terkemuka di Indonesia yaitu FKM UI, FKM Unair dan FKM Unhas. Proses validasi dilaksanakan 1-2 minggu setelah enumerator mengumpulkan data. Hasilnya baik proses pengumpulan data dan data yang dikumpulkan mempunyai validitas rata 80% lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengumpulan data dan data yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 adalah valid.

Dari kuesioner Puskesmas yang telah terkumpul sebanyak 9188, sebanyak 8981 merupakan kuesioner Puskesmas yang memenuhi kriteria Rifaskes 2011 dan dipergunakan untuk analisis data dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Kurang lebih tiga perempat dari Puskesmas yang dianalisis oleh Rifaskes 2011 (8981 Puskesmas) tercatat sebagai Puskesmas wilayah perdesaan dan sepertiga merupakan Puskesmas Non-perawatan. Hanya 18,6% Puskesmas yang merupakan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar). Sebagian besar Puskesmas masuk pada klasifikasi biasa (73,5%), selebihnya masuk pada klasifikasi sangat terpencil (9,5%), dan terpencil (17,0%). Disamping itu 6,4% dari Puskesmas tersebut terletak di kepulauan dan 1,2% di daerah perbatasan. Berdasarkan tahun dibangun dan berfungsi, dapat dikategorikan menjadi tiga: sebelum tahun 1976 (18,3%), antara tahun 1976 – 1999 (50,8%), tahun 2000 sampai sekarang (24,9%), dan 6,1% yang tidak bisa menjawab.
- Analisis diskriptif juga menunjukkan bahwa 92,5% bangunan Puskesmas merupakan bangunan permanen dan semi permanen dan 81,2% dari semua bangunan kondisinya baik atau rusak ringan. Sedangkan 12,3% fisik bangunan utama dan 18,5% seluruh bangunan ditemukan dalam kondisi rusak sedang dan berat.
- 43% Puskesmas mempunyai minimal 8 ruangan untuk pelayanan kesehatan esensial yaitu ruang untuk poliklinik umum, KIA/KB, poli gigi, farmasi, laboratorium, P2M/imunisasi, klinik konsultasi). Sedangkan 39,7% Puskesmas mempunyai minimal 4 ruangan untuk kegiatan esensial non-pelayanan kesehatan (ruang rapat, ruang tunggu, gudang dan toilet). Hanya 39,1% Puskesmas yang mempunyai ruang konseling gabungan dan 31,8% mempunyai ruang konseling gizi. Sedangkan ruang gawat darurat dimiliki oleh 56% Puskesmas. Selanjutnya 93,5% Puskesmas telah mempunyai gudang obat dan 75,7% memiliki laboratorium.
- Secara nasional 71,7% puskesmas di Indonesia mempunyai sarana air bersih dan 44,5% Puskesmas yang mempunyai SPAL dengan saluran tertutup. Sejumlah 64,6% puskesmas telah melakukan pemisahan limbah medis dan non medis serta hanya 26.8% dari jumlah puskesmas yang memiliki alat incenerator.
- Pada tingkat nasional 17,7 % puskesmas tidak mempunyai listrik selama 24 jam. hanya 25,6% Puskesmas yang memiliki alat kantor lengkap (alat baik dan berfungsinya komputer/mesin ketik, AC/kipas angin, printer dan lemari/ filling cabinet). Sekitar 56,7% Puskesmas tidak memiliki minimum salah satu dari ketiga jenis alat komunikasi (telepon/HP Dinas/ Radio Komunikasi). Hanya 17,2% Puskesmas yang mempunyai sambungan internet.
- Kendaraan roda dua dimiliki oleh hampir 72% Puskesmas. Puskesling tersedia pada 45,8% Puskesmas. Sedangkan ambulans hanya tersedia di 37,6% Puskesmas Perawatan. Kira-kira 39,4% Puskesmas yang memiliki alat transportasi kendaraan roda dua bermotor (minimal tiga buah) dan puskesmas keliling/perahu bermotor.
- Sebanyak 53,4% Puskesmas mempunyai 3 buku pedoman esensial (pedoman perencanaan Puskesmas, pedoman lokmin Puskesmas, dan pedoman penilaian kinerja Puskesmas). Sedangkan 59,4% Puskesmas mempunyai dokumen Kepmenkes 128/2004 tentang Puskesmas.
- Sebesar 89,3% Puskesmas mempunyai dokumen perencanaan tahunan. Sedangkan sebanyak 91,9% Puskesmas memiliki dokumen RUK (Rencana Usulan Kegiatan) dan RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan). Sumber data untuk penyusunan rencana

tahunan Puskesmas, 92,1% Puskesmas memakai data berasal dari Puskesmas tersebut dan 66,8% Puskesmas menggunakan data yang diberi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sebesar 69,2% Puskesmas membahas rencana kerja tahunan melalui Musrenbang dan 80,9% Puskesmas melakukan pembahasan rencana tersebut melalui Rapat Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- Lokakarya Mini bulanan dan tiga bulanan diketemukan secara berurutan pada 82,9% dan 38,5% Puskesmas. Sedangkan Puskesmas yang melakukan penilaian kerja diketemukan pada 75,3% Puskesmas dan 69,2% Puskesmas dapat menunjukan dokumen umpan balik dari Dinas Kesehatan setempat terhadap kinerja Puskesmas
- Tenaga yang ada di Puskesmas dikelompokkan menjadi: 1) Tenaga Medis: Dokter dan Dokter Gigi; 2) Tenaga Keperawatan: Perawat, Bidan, dan Perawat Gigi; 3) Tenaga Kefarmasian: Apoteker dan Teknis Kefarmasian; 4) Tenaga Gizi; 5) Sanitarian; 6) Tenaga Penyuluh Kesehatan/Promkes; 7) Tenaga Rekam Medis; 8) Analis Kesehatan; 9)Tenaga Kesehatan Lain; dan 10) Tenaga Non Kesehatan: Tenaga Administrasi/Pekarya. Jumlah seluruh tenaga yang bekerja di 8980 Puskesmas adalah 339,413 orang, dan berdasarkan pengelompokan di atas, maka distribusinya adalah sbb. : 7,4% adalah tenaga medis, 65,9% tenaga keperawatan, 3,0% tenaga kefarmasian, 2,9% tenaga gizi, 3,3% sanitarian, dan 1,2% promkes, 0,3% tenaga rekam medis dan 2% analis kesehatan, serta 13,9% tenaga kesehaatan lainnya, termasuk tenaga adminsitrasi/pekarya. Disparitas tenaga yang bekerja di Puskesmas sangat jelas terlihat.
- Tenaga perawat dan bidan yang merupakan tenaga inti di Puskesmas, Untuk masing-masing tenaga kesehatan bisa dilihat dari kisaran jumlah tenaga tersebut. Variasinya cukup lebar: 0-27 misalnya untuk dokter, artinya ada Puskesmas yang tidak ada dokter, akan tetapi dijumpai pula Puskesmas dimana dokternya sampai 27 orang. Gambaran disparitas yang sama terlihat juga untuk tenaga kesehatan lainnya. Kisaran yang lebar adalah untuk perawat : 0-97, atau ada Puskesmas yang tidak ada perawat, akan tetapi ada Puskesmas yang jumlah perawatnya sampai 97 orang.
- Banyak informasi lain yang dapat dikaji lebih dalam terkait dengan tenaga Puskesmas, antara lain: a. sebaran tenaga berdasarkan lokasi Puskesmas di Perkotaan dan Perdesaan; b. sebaran tenaga kesehatan berdasarkan jenis Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan; c. sebaran Puskesmas menurut keberadan tenaga kesehatan dan Upaya Kesehatan Wajib, atau Upaya Kesehatan Pengembangan.
- Seperti diketahui, Puskesmas mempunyai minimal tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, dan sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Hampir 94% Puskesmas di Indonesia telah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan berupa Enam Upaya Kesehatan Wajib yaitu: Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA/KB, Perbaikan Gizi Masyarakat, P2 Penyakit, dan Pengobatan. Tetapi apabila dilihat kecukupan sumber daya program secara lengkap (yaitu adanya kegiatan, petugas, pelatihan, pedoman, dan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kab/Kota) maka persentasenya menjadi jauh berkurang yaitu promosi kesehatan hanya 34%, kesehatan lingkungan 18,2%, kesehatan ibu 58,7%, kesehatan anak 60,9%, keluarga

berencana 32,2%, perbaikan gizi masyarakat 45,8%, pencegahan dan pemberantasan penyakit 61,2%, dan pengobatan umum hanya 21,3%.

- Persentase Puskesmas di Indonesia yang mempunyai kecukupan sumber daya untuk melaksanakan fungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan masih rendah yaitu hanya 28,3% Puskesmas yang mempunyai petugas, 9,9% petugasnya telah mengikuti pelatihan, 14,6% Puskesmas mempunyai pedoman, 12,1% mempunyai s.o.p/protap, 13,5% mempunyai peraturan dan 10,4% yang mempunyai dana khusus. Sedangkan kegiatan Puskesmas dalam pembangunan berwawasan kesehatan bervariasi sebagai berikut advokasi (41,5%), pertemuan lintas sektoral (44,5%) dan program kemitraan (41,2%)
- Pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat Indonesia mempunyai kecukupan sumber daya yang lebih baik yaitu 49,1% Puskesmas mempunyai petugas khusus untuk pemberdayaan masyarakat, 24,2% petugasnya telah mengikuti pelatihan, 33,7% Puskesmas mempunyai pedoman, 20,2% mempunyai s.o.p/protap dan peraturan dan 17,6% yang mempunyai dana khusus pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kegiatan Puskesmas dalam proses pemberdayaan masyarakat bervariasi sebagai berikut SMD (50%), MMD (60,4%), pertemuan kader (67,1%), pelatihan kader baru (44%), pelatihan kader lama (54,4%), pelatihan toma (29,5%), pelatihan LSM (9.6%), supervisi (54,4%) dan pembinaan (57,9%). Kegiatan nyata dalam pemberdayaan masyarakat dimanifestasikan sebagai UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) dilakukan Puskesmas secara bervariasi misalnya Posyandu (97,5%), Posyandu Lansia (78,8%), Dana Sehat (30,2%), Poskestren (32,1%) dan sebagainya.
- Sekitar 26,3% Puskesmas memiliki kelengkapan alat kesehatan poliklinik umum kurang dari 40% jumlah standard alat poliklinik umum (56 alat). Untuk peralatan esensial poliklinik umum, ternyata masih terdapat 3,7% Puskesmas yang tidak memiliki stetoskop, 6,3% Puskesmas tidak memiliki tensi meter, 6,1% Puskesmas tidak memiliki timbangan dewasa dan 6,4% Puskesmas tidak memiliki tempat tidur periksa. Sebanyak 16,1% Puskesmas memiliki kelengkapan alkes poliklinik KIA kurang dari 40% jumlah standard alat Poliklinik KIA (59 alat). Juga untuk peralatan esensial Poliklinik KIA, terdapat 12,7% Puskesmas tidak memiliki stetoskop, 13,6% Puskesmas tidak memiliki tensi meter, 7,1% Puskesmas tidak memiliki tempat tidur periksa, 34,0% Puskesmas tidak mempunyai termometer klinis, 12% Puskesmas tidak memiliki timbangan bayi, 8,7% Puskesmas tidak memiliki timbangan dewasa, 32,2% Puskesmas tidak memiliki dopler dan 53,7% Puskesmas tidak memiliki HB Sahli. Sekitar 56,6% puskesmas memiliki kelengkapan alkes laboratorium kurang dari 40% standard alat laboratorium Puskesmas (58 alat). Hampir 55% Puskesmas tidak mempunyai alat immunisasi lengkap.
- Kit-kit peralatan Puskesmas yang dipergunakan untuk kegiatan keluar gedung, misalnya Kit UKGS dimiliki oleh 25,4% Puskesmas, Kit Puskesmas Keliling lebih dari 95% Kit Puskesling hanya mempunyai kelengkapan 40% dari standard.
- Hampir 40% Puskesmas PONED mempunyai peralatan PONED yang jumlahnya kurang dari 40% standard alat PONED yang harus dipunyai oleh Puskesmas PONED. Demikian

juga kurang lebih 20% dari Puskesmas Perawatan mempunyai alat perawatan yang jumlahnya kurang dari 40% standard alat keperawatan.

- Ketersediaan obat umum di Poliklinik Umum cukup baik, hanya kurang dari 5% Puskesmas yang jumlah ketersediaan obat umumnya kurang dari 40% standard. Sebaliknya ketersediaan obat PONED di Puskesmas PONED amat kurang, lebih dari 80% Puskesmas PONED menyediakan obat kurang dari 40% standard obat yang semestinya ada di Puskesmas PONED.
- Sebagian besar data output pada Rifaskes 2011, seperti halnya data cakupan dan pencapaian program Puskesmas tidak dapat dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh karena rendahnya validitas data tersebut dan periode yang berbeda-beda dari data tersebut.

Dari hasil-hasil diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Rifaskes Puskesmas 2011 telah menghasilkan gambaran input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang sangat kaya, rinci dan cukup valid untuk membuat potret fasilitas kesehatan di Puskesmas mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun individual Puskesmas; 2. Baik input, dan proses upaya kesehatan di Puskesmas antara lain fasilitas, SDM, alat kesehatan, organisasi dan manajemen, pelayanan kesehatan yang berjalan, fungsi serta Indikator Mutu Esensial Puskesmas tahun 2010 diketemukan masih banyak berada dibawah standar yang telah ditentukan dalam buku Pedoman Puskesmas dan kebijakan Kementerian Kesehatan lainnya; 3. Dilihat dari input dan proses yang menunjang tiga fungsi Puskesmas, maka input dan proses yang mendukung keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan fungsi Puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan masih jauh dari harapan; 4. Dari sudut program wajib upaya kesehatan Puskesmas, maka input dan proses program wajib kesehatan ibu dan anak, terutama program PONED, masih jauh dibandingkan standar minimal yang harus dipenuhi; dan 5. Terdapat disparitas input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang cukup tajam berdasarkan geografi, kota/desa dan regional.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah: 1. Perlu dilakukan analisis lanjut terhadap data yang dihasilkan oleh Rifaskes Puskesmas 2011; 2. Perlu pemenuhan dan pengembangan segera dan secara prioritisasi terhadap input dan proses upaya kesehatan Puskesmas; 3. Pemenuhan dan pengembangan input dan proses upaya Puskesmas yang menunjang fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan perlu mendapatkan prioritas tinggi; 4. Pemenuhan dan penyempurnaan input dan proses pada program PONED pada seluruh Puskesmas perawatan harus segera dilaksanakan guna pencapaian RPJMN dan MDG; dan 5. Kesenjangan geografi, kota/desa dan regional dari input dan proses upaya kesehatan Puskesmas harus segera dipikirkan pemecahannya dengan meningkatkan integritas dan kejelasan peran Kementerian Kesehatan, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

DAFTAR SINGKATAN

AC	: Air Conditioner
AFP	: Acute Flaccid Paralysis
AIDS	: Acquired Immunodeficiency Syndrome
Akbid	: Akademi Kebidanan
AKL	: Akademi Kesehatan Lingkungan
Akper	: Akademi Keperawatan
Akzi	: Akademi Gizi
Alkes	: Alat Kesehatan
AMP	: Audit Maternal Perinatal
ANC	: Antenatal Care
APN	: Asuhan Persalinan Normal
Askes	: Asuransi Kesehatan
Astek	: Asuransi Tenaga Kerja
Balita	: Bawah Lima Tahun
Balkesmas	: Balai Kesehatan Masyarakat
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BCG	: Bacille Calmete Guerin
Bimtek	: Bimbingan Teknis
Binfar	: Bina Farmasi
BLU	: Badan Layanan Umum
BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
BOR	: Bed Occupancy Rate
BP	: Balai Pengobatan
BPP	: Badan Penyantun Puskesmas
BSL	: Bio Safety Level
BTA	: Basil Tahan Asam
CMHN	: Community Mental Health Nursing
D1 Keb	: Diploma-1 Kebidanan
DIII	: Diploma-3
D-IV	: Diploma-4
DBD	: Demam Berdarah Dengue
DHF	: Dengue Hemorrhagic Fever
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DP3	: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
DPT	: Difteri Pertusis Tetanus
DTP	: Dengan Tempat Perawatan

EKG : Elektro Kardiogram
Email : Electronic Mail

FIFO : First In First Out
FEFO : First Expired First Out
FK : Fakultas Kedokteran
FKG : Fakultas Kedokteran Gigi
FKM : Fakultas Kesehatan Masyarakat

Gakin : Keluarga Miskin
GKM : Gugus Kendali Mutu
HB : Hepatitis B
HIV : Human Immunodeficiency Virus
HP : Handphone

ID : Identitas
IMD : Insiasi Menyusu Dini
ISO : International Standard Organization
ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Akut
IUD : Intrauterine Device

Jamkesda : Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jampersal : Jaminan Persalinan
Jamsostek : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Juklak : Petunjuk Pelaksanaan
Juknis : Petunjuk Teknis

KB : Keluarga Berencana
Kemenkes : Kementerian Kesehatan
Kepmenkes : Keputusan Menteri Kesehatan
Kesling : Kesehatan Lingkungan
Kesmas : Kesehatan Masyarakat
KN : Kunjungan Neonatus
Keswa : Kesehatan Jiwa
KIA : Kesehatan Ibu dan Anak
KIPI : Kejadian Ikutan Paska Imunisasi
KLB : Kejadian Luar Biasa
KMS : Kartu Menuju Sehat
Korwil : Koordinator Wilayah
KTA : Kekerasan Terhadap Anak

Lansia : Lanjut Usia
LB : Laporan Bulanan
Lokmin : Lokakarya Mini
LOS : Length of Stay
LP LPO : Laporan Penerimaan dan Lembar Permintaan Obat
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

MDGs : Millennium Development Goals
MMD : Musyawarah Masyarakat Desa
Monev : Monitoring dan Evaluasi
MP ASI : Makanan Pendamping Air Susu Ibu
MTBM : Manajemen Terpadu Bayi Muda
MTBS : Manajemen Terpadu Balita Sakit
Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Ormas : Organisasi Massa

P2M : Pengendalian Penyakit Menular
P4K : Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
PA : Pembantu Administrasi
PAH : Penampungan Air Hujan
PAM : Perusahaan Air Minum
PE : Penyelidikan Epidemiologis
Perkesmas : Perawatan Kesehatan Masyarakat
Permenkes : Peraturan Menteri Kesehatan
PGPS : Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHN : Public Health Nursing
PINERE : Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
PJO : Penanggungjawab Operasional
PJT : Penanggungjawab Teknis
PKPR : Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
PLN : Perusahaan Listrik Negara
PMT : Pemberian Makanan Tambahan
PMK : Pengembangan Manajemen Kinerja
PMTCT : Prevention of Mother to Child Transmission
PNS : Pegawai Negeri Sipil
POA : Plan of Action
POD : Pos Obat Desa
Podes : Potensi Desa
Polindes : Pondok Bersalin Desa
PONED : Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar
PONEK : Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif
Posbindu : Pos Pembinaan Terpadu

Poskesdes : Pos Kesehatan Desa
Poskestren : Pos Kesehatan Pesantren
Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
Promkes : Promosi Kesehatan
Protap : Prosedur Tetap
PTT : Pegawai Tidak Tetap
PUS : Pasangan Usia Subur
Pusdatin : Pusat Data dan Informasi
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat
Pusling : Puskesmas Keliling
Pustu : Puskesmas Pembantu
PWS : Pemantauan Wilayah Setempat
QA : Quality Assurance

Rekmed : Rekam Medik
Renstra : Rencana Strategis
RI : Rawat Inap
Rifas : Riset Fasilitas
Rifaskes : Riset Fasilitas Kesehatan
Rikhus : Riset Khusus
Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar
RJ : Rawat Jalan
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPK : Rencana Pelaksanaan Kegiatan
RS : Rumah Sakit
RUK : Rencana Usulan Kegiatan
RW : Rukun Warga

S1 Kes : Sarjana Strata-1 Kesehatan
S2 Kes : Sarjana Strata-2 Kesehatan
SAA : Sekolah Asisten Apoteker
SBH : Saka Bhakti Husada
SD : Sekolah Dasar
SDM : Sumber Daya Manusia
SDIDTK : Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang
SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional
SIMPUS : Sistem Manajemen Puskesmas
SK : Surat Keputusan
SKp : Sarjana Keperawatan
SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMD : Survei Mawas Diri
SMU : Sekolah Menengah Umum
SOP : Standard Operational Procedures

SP2TP	: Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas
SPAG	: Sekolah Pembantu Ahli Gizi
SPAL	: Sistem Pembuangan Air Limbah
SPK	: Sekolah Perawat Kesehatan
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPM-BK	: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
SPPH	: Sekolah Pembantu Penilik Hygiene
SPR	: Sekolah Pengatur Rawat
SPRG	: Sekolah Pengatur Rawat Gigi
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
Tb	: Tuberkulosis
THT	: Telinga, Hidung, Tenggorokan
TOGA	: Tanaman Obat Keluarga
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
TPM	: Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman
TT	: Tetanus Toksoid
TTU	: Tempat-tempat Umum
UCI	: Universal Child Immunization
UKBM	: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UKGS	: Usaha Kesehatan Gigi Sekolah
UKGMD	: Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa
UKK	: Usaha Kesehatan Kerja
UKS	: Usaha Kesehatan Sekolah
UKP	: Upaya Kesehatan Pengembangan
UKW	: Upaya Kesehatan Wajib
USG	: Ultrasonografi
Usila	: Usia Lanjut
VCCM	: Vaccine Cold Chain Monitor
VCT	: Voluntary Counseling and Testing
Vit-A	: Vitamin A
VVM	: Vaccine Vial Monitor
WOD	: Warung Obat Desa
Yankes	: Pelayanan Kesehatan
Yankespro	: Pelayanan Kesehatan Reproduksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR SINGKATAN ix
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xxi
DAFTAR GAMBAR xxxix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. PERTANYAAN KEBIJAKAN 2
1.3. PERTANYAAN PENELITIAN 3
1.4. TUJUAN PENELITIAN 3
1.5. MANFAAT PENELITIAN 3
1.6. RUANG LINGKUP 3

BAB II KERANGKA KONSEP DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR

2.1. BATASAN 5
2.2. KERANGKA KONSEP 5
2.3. PENGEMBANGAN INDIKATOR PUSKESMAS
2.3.1. Indikator Input 7
2.3.2. Indikator Proses 8
2.3.3. Indikator Output 9

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN 11
3.2. POPULASI dan SAMPEL
3.2.1. Populasi Penelitian 11
3.2.2. Sampel Penelitian 11
3.3. RESPONDEN 11
3.4. PENGUMPULAN DATA
3.4.1. Jenis Data yang Dikumpulkan 13
3.4.2. Pengumpul Data 13
3.4.3. Cara Pengumpulan Data 14
3.5. PENGOLAHAN DATA 15
3.6. RINCIAN KEGIATAN
3.6.1. Tahap Persiapan 15
3.6.1.1. Telaah Dokumen (document review) 15
3.6.1.2. Pertemuan Konsinyasi Lintas Program dan Organisasi Profesi 15
3.6.1.3. Pertemuan Pakar 15
3.6.1.4. Penyusunan Instrumen 15
3.6.1.5. Uji coba instrumen 16
3.6.1.6. Penyusunan Plan of Action (POA) Pelaksanaan 16

3.6.2. Tahap Pelaksanaan 16
3.6.2.1. Pengorganisasian Lapangan 16
3.6.2.2. Penyusunan Pedoman Instrumen 17
3.6.2.3. Pertemuan Tim Manajemen 17
3.6.2.4. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi 17
3.6.2.5. Workshop Fasilitator Tingkat Pusat 18
3.6.2.6. Workshop Penanggungjawab Teknis Kabupaten/Kota 18
3.6.2.7. Workshop Enumerator 19
3.6.2.8. Pengumpulan Data 19
3.6.2.9. Validasi Studi 20
3.6.2.10. Pengolahan Data 20
3.6.2.11. Analisa Data 20

BAB IV HASIL

4.1. JUMLAH PUSKESMAS 21
4.2. KARAKTERISTIK PUSKESMAS
4.2.1. Topografi Wilayah Kerja Puskesmas 24
4.2.2. Tahun Puskesmas Berdiri/Berfungsi 26
4.2.3. Fasilitas PONED di Puskesmas 27
4.3. SUMBER DAYA MANUSIA
4.3.1. SDM Puskesmas 29
4.3.1.1. Tenaga Medis 29
4.3.1.2. Tenaga Keperawatan 36
4.3.1.3. Tenaga Kefarmasian 47
4.3.1.4. Tenaga Gizi 52
4.3.1.5. Tenaga Sanitarian 55
4.3.1.6. Tenaga Penyuluh Kesehatan / Promkes 58
4.3.1.7. Tenaga Rekam Medis 62
4.3.1.8. Tenaga Analis Kesehatan 65
4.3.1.9. Tenaga Kesehatan Lain 68
4.3.1.10. Tenaga Non Kesehatan 71
4.3.2. Penempatan dan Rotasi 75
4.3.3. Tunjangan / Insentif Daerah 79
4.4. FASILITAS FISIK
4.4.1. Fisik Bangunan 81
4.4.2. Ruangan 85
4.4.3. Air Bersih 98
4.4.4. Pengelolaan Limbah 99
4.4.5. Sumber Daya Listrik 101
4.5. KETATAUSAHAAN
4.5.1 Alat Kantor 102
4.5.2. Alat Komunikasi 106
4.5.3 Alat Transportasi 110

4.6. MANAJEMEN PUSKESMAS
4.6.1. Perencanaan Tahunan 114
4.6.2. Lokakarya Mini 119
4.6.3. Penilaian Kinerja Puskesmas 122
4.6.4. Pedoman Kerja Puskesmas 125

4.7. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
4.7.1. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Wajib 127
4.7.2. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan 137

4.8. PELAYANAN KESEHATAN
4.8.1. Program Promosi Kesehatan..... 144
4.8.1.1. Kegiatan Program Promosi Kesehatan..... 144
4.8.1.2. Pelatihan Program Promosi Kesehatan..... 147
4.8.1.3. Pedoman Program Promosi Kesehatan..... 150
4.8.1.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan..... 153

4.8.2. Program Kesehatan Lingkungan..... 157
4.8.2.1. Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan..... 157
4.8.2.2. Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan..... 162
4.8.2.3. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan..... 165
4.8.2.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan..... 168

4.8.3. Program Kesehatan Ibu.....171
4.8.3.1. Kegiatan Program Kesehatan Ibu..... 171
4.8.3.2. Pelayanan Pertolongan Persalinan Dalam Gedung Puskesmas..... 174
4.8.3.3. Pelatihan Program Kesehatan Ibu..... 175
4.8.3.4. Pedoman Program Kesehatan Ibu 177
4.8.3.5. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu..... 183

4.8.4. Program Kesehatan Bayi dan Anak 188
4.8.4.1. Kegiatan Program Kesehatan Bayi dan Anak..... 188
4.8.4.2. Pelatihan Program Kesehatan Bayi dan Anak..... 193
4.8.4.3. Pedoman Program Kesehatan Bayi dan Anak..... 197
4.8.4.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Bayi dan Anak..... 202

4.8.5. Program Keluarga Berencana..... 205
4.8.5.1. Kegiatan Program Keluarga Berencana..... 205
4.8.5.2. Pelatihan Program Keluarga Berencana..... 208
4.8.5.3. Pedoman Program Keluarga Berencana..... 210
4.8.4.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Keluarga Berencana..... 214

4.8.6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 218
4.8.6.1. Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat..... 218
4.8.6.2. Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat..... 222
4.8.6.3. Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat..... 225
4.8.6.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat..... 232

4.8.7. Program Pengendalian Penyakit Menular..... 236
4.8.7.1. Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular..... 236
4.8.7.2. Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular..... 242
4.8.7.3. Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular..... 249
4.8.7.4. Pengawasan, Evalusi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular.... 256

4.8.8. Program Imunisasi..... 258
4.8.8.1. Program Imunisasi di Puskesmas..... 258
4.8.8.2. Pelatihan Program Imunisasi..... 260
4.8.8.3. Pedoman Program Imunisasi..... 262
4.8.8.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi..... 265

4.8.9. Pelayanan Pengobatan 268
4.8.9.1. Kegiatan Pelayanan Pengobatan..... 268
4.8.9.2. Pelatihan Pelayanan Pengobatan..... 270
4.8.9.3. Pedoman Pelayanan Pengobatan..... 272
4.8.9.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Pengobatan..... 273

4.8.10. Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)..... 276
4.8.10.1. Kegiatan Program UKS..... 276
4.8.10.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program UKS..... 278
4.8.10.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program UKS..... 281

4.8.11. Program Kesehatan Olahraga 284
4.8.11.1. Kegiatan Program Kesehatan Olahraga..... 284
4.8.11.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Olahraga..... 286
4.8.11.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Olahraga..... 289

4.8.12. Program Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) 292
4.8.12.1. Kegiatan Program Perkesmas..... 292
4.8.12.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Perkesmas..... 295
4.8.12.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perkesmas..... 297

4.8.13. Program Kesehatan Kerja..... 300
4.8.13.1. Kegiatan Program Kesehatan Kerja..... 300
4.8.13.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Kerja..... 301
4.8.13.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Kerja..... 304

4.8.14. Program Kesehatan Gigi dan Mulut 307
4.8.14.1. Kegiatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut..... 307
4.8.14.2. Pelatihan Program Kesehatan Gigi dan Mulut..... 311
4.8.14.3. Pedoman Program Kesehatan Gigi dan Mulut 313
4.8.14.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Gigi dan Mulut..... 315

4.8.15. Program Kesehatan Jiwa..... 318
4.8.15.1. Kegiatan Program Kesehatan Jiwa..... 318
4.8.15.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Jiwa..... 320
4.8.15.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Jiwa..... 323

4.8.16. Program Kesehatan Mata..... 325
4.8.16.1. Kegiatan Program Kesehatan Mata..... 325
4.8.16.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Mata..... 328
4.8.16.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Mata..... 330

4.8.17. Program Kesehatan Usia Lanjut..... 332
4.8.17.1. Kegiatan Program Kesehatan Usia Lanjut..... 332
4.8.17.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Usia Lanjut..... 335
4.8.17.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Usia Lanjut..... 337

4.8.18. Pembinaan Pengobatan Tradisional..... 340
4.8.18.1. Kegiatan Pembinaan Pengobatan Tradisional..... 340
4.8.18.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Pengobatan Tradisional..... 343
4.8.18.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Pengobatan Tradisional..... 345

4.8.19. Pelayanan Kesehatan Haji 348
4.8.19.1. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji 348
4.8.19.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Pelayanan Kesehatan Haji 351
4.8.19.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kesehatan Haji 353

4.8.20. Pelayanan Laboratorium 356
4.8.20.1. Kegiatan Pelayanan Laboratorium 356
4.8.20.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Pelayanan Laboratorium 361
4.8.20.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Laboratorium 365

4.8.21. Pelayanan Kefarmasian 368
4.8.21.1. Petugas Pelaksana Pelayanan Kefarmasian 368
4.8.21.2. Pelatihan Petugas dan Pedoman Pelayanan Kefarmasian 372
4.8.21.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kefarmasian 375

4.8.22. Pelayanan Puskesmas Keliling 377
4.8.22.1. Kegiatan Pelayanan Puskesmas Keliling 377
4.8.22.2. Jenis Kegiatan Pelayanan Puskesmas Keliling 378
4.8.22.3. Petugas Pelayanan Puskesmas Keliling 381
4.8.22.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Puskesmas Keliling 384

4.8.23. Program Tanggap Darurat Bencana 386
4.8.23.1. Kegiatan Program Tanggap Darurat Bencana 386
4.8.23.2. Petugas Pelaksana dan Pelatihan Program Tanggap Darurat Bencana 389
4.8.23.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Tanggap Darurat Bencana 391

4.9. PELAYANAN RAWAT INAP
4.9.1. Fasilitas Fisik 393
4.9.2. Pelayanan Rawat Inap 398
4.9.3 Pelayanan PONED 414

4.10. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.10.1. Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat 423
4.10.2. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 439

4.11. KEGIATAN PENGGERAK PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN
4.11.1 Tenaga Pelaksana 444
4.11.2 Pelatihan Tenaga dan Ketersediaan Pedoman 445
4.11.3 SOP dan Peraturan Tertulis 447
4.11.4 Alokasi Dana Khusus 449
4.11.5 Jenis Kegiatan 450
4.11.6 Keberadaan Input dan Proses 452

4.12 PUSKESMAS PEMBANTU DAN BIDAN DESA
4.12.1 Puskesmas Pembantu 454
4.12.2 Bidan Desa 456

4.13. ALAT KESEHATAN DALAM GEDUNG
4.13.1. Poliklinik Umum 458
4.13.2. Poliklinik Gigi..... 465
4.13.3. Poliklinik KIA..... 470
4.13.4. Alat-alat Laboratorium 479
4.13.5. Alat-alat Imunisasi..... 483
4.13.6. Alat-alat Puskesmas Perawatan 488
4.13.7. Alat-alat Puskesmas PONED..... 492

.

4.14. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
4.14.1. Obat Umum..... 496
4.14.2. Obat Gigi 500
4.14.3. Obat / Alat KB 504
4.14.4. Obat PONED..... 507
4.14.5. Vaksin..... 510

4.15. ALAT KESEHATAN LUAR GEDUNG
4.15.1. Kit Pelayanan Puskesmas keliling (Pusling)..... 513
4.15.2. Kit Pelayanan Luar Gedung Lainnya..... 516

KESIMPULAN 521

SARAN-SARAN..... 523

DAFTAR PUSTAKA 525

LAMPIRAN SK TIM RIFASKES 2011 527

LAMPIRAN SK TIM RIFASKES 2012 533

LAMPIRAN KUESIONER PUSKESMAS RIFASKES 2011 537

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 3.1.	Jumlah Puskesmas per Propinsi	12
Tabel 4.1.1.	Jumlah Puskesmas di Indonesia, Rifaskes 2011	21
Tabel 4.1.2.	Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Lokasi, Rifaskes 2011	22
Tabel 4.1.3.	Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Jenis Puskesmas, Rifaskes 2011	23
Tabel 4.2.1.1	Persentase Puskesmas menurut Keterpencilan, Rifaskes 2011	24
Tabel 4.2.1.2.	Persentase Puskesmas menurut Kepulauandan Perbatasan, Rifaskes 2011	25
Tabel 4.2.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Tahun Berdiri/Berfungsi, Rifaskes 2011	26
Tabel 4.2.3.1.	Persentase Puskesmas dengan Fasilitas PONED menurut Jenis Puskesmas, Rifaskes 2011	27
SUMBER DAYA MANUSIA		
Tabel 4.3.1.1.1.a	Keberadaan dan Distribusi Tenaga Dokter, Rifaskes 2011	29
Tabel 4.3.1.1.2.	Tenaga Dokter di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	31
Tabel 4.3.1.1.3.	Tenaga Dokter di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	32
Tabel 4.3.1.1.4.a	Keberadaan dan Distribusi Tenaga Dokter Gigi Provinsi, Rifaskes 2011	33
Tabel 4.3.1.1.5.	Tenaga Dokter Gigi di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	35
Tabel 4.3.1.1.6.	Tenaga Dokter Gigi di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	36
Tabel 4.3.1.2.1	Keberadaan dan distribusi Tenaga Perawat di Puskesmas, Rifaskes 2011	37
Tabel 4.3.1.2.2.a	Tenaga Perawat di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	38
Tabel 4.3.1.2.3.b	Tenaga Perawat di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	40
Tabel 4.3.1.2.4.a	Keberadaan dan distribusi Tenaga Bidan di Puskesmas,	41

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
	Rifaskes 2011	
Tabel 4.3.1.2.6	Tenaga Bidan di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	43
Tabel 4.3.1.2.7	Tenaga Bidan di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	44
Tabel 4.3.1.2.8	Keberadaan dan distribusi Tenaga Perawat Gigi di Puskesmas, Rifaskes 2011	45
Tabel 4.3.1.2.9	Tenaga Perawat Gigi di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	46
Tabel 4.3.1.2.10	Tenaga Perawat Gigi di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	47
Tabel 4.3.1.3.1	Keberadaan dan distribusi Apoteker di Puskesmas, Rifaskes 2011	48
Tabel 4.3.1.3.2	Tenaga Apoteker di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir dan Status Ketenagaan per Provinsi, Rifaskes 2011	49
Tabel 4.3.1.3.3	Keberadaan dan distribusi Tenaga Teknis Kefarmasian di Puskesmas, Rifaskes 2011	50
Tabel 4.3.1.3.4	Tenaga Teknis Kefarmasian menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	51
Tabel 4.3.1.3.5	Tenaga Teknis Kefarmasian menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	52
Tabel 4.3.1.4.1	Keberadaan dan distribusi Tenaga Gizi di Puskesmas, Rifaskes 2011	53
Tabel 4.3.1.4.2	Tenaga Gizi menurut Tingkat Pendidikan Terkakhir, Rifaskes 2011	54
Tabel 4.3.1.4.3	Tenaga Gizi menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	55
Tabel 4.3.1.5.1	Keberadaan dan distribusi Tenaga Sanitarian di Puskesmas, Rifaskes 2011	56
Tabel 4.3.1.5.2	Tenaga Sanitarian menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	57
Tabel 4.3.1.5.3	Tenaga Sanitarian menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	58
Tabel 4.3.1.6.1.a	Keberadaan dan distribusi Tenaga Penyuluh Kesehatan/Promkes di Puskesmas, Rifaskes 2011	59
Tabel 4.3.1.6.2	Tenaga Penyuluh Kesehatan/Promkes menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	61
Tabel 4.3.1.6.3	Tenaga Penyuluh Kesehatan/Promkes menurut Status	62

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
	Ketenagaan, Rifaskes 2011	
Tabel 4.3.1.7.1	Keberadaan dan Distribusi Tenaga Rekam Medis di Puskesmas, Rifaskes 2011	63
Tabel 4.3.1.7.2	Tenaga Rekam Medis menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	64
Tabel 4.3.1.7.3	Tenaga Rekam Medis menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	65
Tabel 4.3.1.8.1	Keberadaan dan Distribusi Tenaga Analis Kesehatan di Puskesmas, Rifaskes 2011	66
Tabel 4.3.1.8.2	Tenaga Analis Kesehatan menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	67
Tabel 4.3.1.8.3	Tenaga Analis Kesehatan menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	68
Tabel 4.3.1.9.1	Keberadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan Lain di Puskesmas, Rifaskes 2011	69
Tabel 4.3.1.9.2	Tenaga Kesehatan Lain menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	70
Tabel 4.3.1.9.3	Tenaga Kesehatan Lain menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	71
Tabel 4.3.1.10.1	Keberadaan dan Distribusi Tenaga Administrasidan Pekarya di Puskesmas, Rifaskes 2011	72
Tabel 4.3.1.10.2.	Tenaga Administrasi dan Pekarya di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir per Provinsi, Rifaskes 2011	73
Tabel 4.3.1.10.3.	Tenaga Administrasi dan Pekarya di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011	74
Tabel 4.3.2.1.	Persentase Puskesmas Menurut Penanggung Jawab Program Tidak Sesuai Dengan Pendidikan di Perkotaan dan Perdesaan, Rifaskes 2011	76
Tabel 4.3.2.2	Persentase Puskesmas menurut Pimpinan Puskesmas dengan Rotasi Kurang dari Satu Tahun di Lokasi Perkotaan dan Perdesaan, Rifaskes 2011	77
Tabel 4.3.2.3	Persentase Puskesmas menurut Tenaga yang Pindah Setelah Dilatih di Perkotaan dan Perdesaan, Rifaskes 2011	79
Tabel 4.3.3.	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Insentif Daerah di Perkotaan dan Perdesaan, Rifaskes 2011	80

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
FASILITAS FISIK		
Tabel 4.4.1.1	Persentase Puskesmas menurut Keadaan Fisik semua Bangunan Puskesmas, Rifaskes 2011	81
Tabel 4.4.1.2	Persentase Puskesmas menurut Jenis dan kondisi semua Bangunan Puskesmas, Rifaskes 2011	82
Tabel 4.4.1.3	Persentase Puskesmas menurut Kondisi Fisik Bangunan Utama, Rifaskes 2011	84
Tabel 4.4.2.1	Persentase Puskesmas menurut Jumlah Ruangan Pelayanan, Rifaskes 2011	85
Tabel 4.4.2.2.a	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Ruangan Poliklinik, Rifaskes 2011	87
Tabel 4.4.2.2.b	Persentase Puskesmas menurut keberadaan Ruangan Poliklinik, RIFASKES 2011	88
Tabel 4.4.2.3.a	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Ruangan Pelayanan Penunjang (Ruangan Farmasi dan Laboratorium), Rifaskes 2011	90
Tabel 4.4.2.3.b	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Ruangan Pelayanan Penunjang (Gawat Darurat dan Konsultasi Gizi), Rifaskes 2011	91
Tabel 4.4.2.3.c	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Ruangan Pelayanan Penunjang (Ruang Konsultasi Kesling dan Ruang Konsultasi Keperawatan), Rifaskes 2011	93
Tabel 4.4.2.3.d	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Ruangan Pelayanan Penunjang (Ruang Konseling Gabungan dan Lengkap), Rifaskes 2011	94
Tabel 4.4.2.4.a	Persentase Puskesmas menurut Jumlah Ruangan Non Pelayanan (Ruangan Rapat, Ruang Tunggu dan Gudang Obat), Rifaskes 2011	96
Tabel 4.4.2.4.b	Persentase Puskesmas menurut Jumlah Ruangan Non Pelayanan (Toilet dan Lengkap), Rifaskes 2011	97
Tabel 4.4.3.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Air Bersih sepanjang tahun , Rifaskes 2011	98
Tabel 4.4.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengelolaan Limbah, Rifaskes 2011	100
Tabel 4.4.5.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Sumber Daya Listrik, Rifaskes 2011	101
ALAT KANTOR		
Tabel 4.5.1.1.a	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Kantor	103

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
	(Komputer dan Printer), Rifaskes 2011	
Tabel 4.5.1.1.b	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Kantor (Mesin Tik dan AC/Kipas Angin), Rifaskes 2011	104
Tabel 4.5.1.1.c	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Kantor (Lemari/Filling Kabinet dan Lengkap), Rifaskes 2011	105
ALAT KOMUNIKASI		
Tabel 4.5.2.1.a	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Sarana Komunikasi (Telepon dan HP), RIFASKES 2011	107
Tabel 4.5.2.1.b	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Sarana Komunikasi (Radio Komunikasi), RIFASKES 2011	108
Tabel 4.5.2.1.c	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Sarana Komunikasi (Koneksi Internet), RIFASKES 2011	109
ALAT TRANSPORTASI		
Tabel 4.5.3.1.a	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Sarana Transportasi, Rifaskes 2011	110
Tabel 4.5.3.1.b	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Sarana Transportasi, Rifaskes 2011	111
Tabel 4.5.3.1.c	Persentase Puskesmas Perawatan Menurut Ketersediaan Ambulans, Rifaskes 2011	112
MANAJEMEN PUSKESMAS		
Tabel 4.6.1.1	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Rencana Kerja Tahunan tahun 2010, Rifaskes 2011	114
Tabel 4.6.1.2	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Dokumen Perencanaan Tahunan tahun 2010, Rifaskes 2011	115
Tabel 4.6.1.3	Persentase Puskesmas menurut Sumber Data Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rifaskes 2011	116
Tabel 4.6.1.4	Persentase Puskesmas menurut Keterlibatan Penanggung Jawab Program dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rifaskes 2011	117
Tabel 4.6.1.5	Persentase Puskesmas menurut Pembahasan Rencana Kerja Tahunan, Rifaskes 2011	118
Tabel 4.6.2.1	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan, Rifaskes 2011	120
Tabel 4.6.2.2	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Lokakarya Mini Triwulan, Rifaskes 2011	121

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.6.3.1	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Penilaian Kinerja, Rifaskes 2011	122
Tabel 4.6.3.2	Persentase Puskesmas menurut Pembahasan Penilaian Kinerja dengan Staf, Rifaskes 2011	123
Tabel 4.6.3.3	Persentase Puskesmas menurut Umpan Balik Penilaian Kinerja, Rifaskes 2011	124
Tabel 4.6.4.1.a	Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Buku Pedoman Manajemen Puskesmas, Rifaskes 2011	125
Tabel 4.6.4.1.b	Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Pedoman Manajemen Puskesmas, Kebijakan Dasar Puskesmas dan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Mutu, Rifaskes 2011	126
Tabel 4.7.1.1	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan 6 Program Upaya Kesehatan Wajib, Rifaskes 2011	127
Tabel 4.7.1.2.a.	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Wajib (Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan), Rifaskes 2011	128
Tabel 4.7.1.2.b.	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Wajib (KIA/KB dan Perbaikan Gizi Masyarakat), Rifaskes 2011	130
Tabel 4.7.1.2.c.	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Wajib (P2P dan Pengobatan), Rifaskes 2011	131
Tabel 4.7.1.3.a.	Persentase Puskesmas menurut Kesesuaian Pendidikan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Wajib (Promkes dan Kesling), Rifaskes 2011	133
Tabel 4.7.1.3.b.	Persentase Puskesmas menurut Kesesuaian Pendidikan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Wajib (KIA/KB dan Perbaikan Gizi Masyarakat), Rifaskes 2011	134
Tabel 4.7.1.3.c.	Persentase Puskesmas menurut Kesesuaian Pendidikan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Wajib (P2P dan Pengobatan), Rifaskes 2011	136
Tabel 4.7.2.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan (UKS dan Kes OR), Rifaskes 2011	137
Tabel 4.7.2.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan (Perkesmas dan Kes Kerja), Rifaskes 2011	138
Tabel 4.7.2.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan (Kes Gilut dan Kes Jiwa), Rifaskes 2011	140
Tabel 4.7.2.1.d.	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan (Kes Mata dan Kes Usila), Rifaskes 2011	141

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.7.2.1.e.	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan (Pembinaan Batra dan Kes Haji), Rifaskes 2011	142
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN		
Tabel 4.8.1.1.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Promosi Kesehatan, Rifaskes 2011	145-146
Tabel 4.8.1.2.a-b	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Program Promosi Kesehatan pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011	148-150
Tabel 4.8.1.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Pedoman Program Promosi Kesehatan, Rifaskes2011	151-152
Tabel 4.8.1.4.a-b	Persentase Puskesmas menurut Penerimaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan, Rifaskes 2011	155-156
PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN		
Tabel 4.8.2.1.a-c	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, Rifaskes 2011	158-161
Tabel 4.8.2.2.a-b	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011	163-164
Tabel 4.8.2.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan, Rifaskes 2011	166-167
Tabel 4.8.2.4.a-b	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan BimbinganProgram Kesehatan Lingkungan, Rifaskes 2011	169-170
PROGRAM KESEHATAN IBU		
Tabel 4.8.3.1.a-b	Persentase Puskesmas menurut KegiatanProgram Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011	172-173
Tabel 4.8.3.2	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pelayanan Persalinan di Dalam Gedung Puskesmas, Rifaskes 2011	174
Tabel 4.8.3.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Program Kesehatan Ibu pada Tahun 2009-2010, Rifaskes 2011	176-177
Tabel 4.8.3.4.a-d	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman untuk Melaksanakan Program Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011	178-181
Tabel 4.8.3.5.a-c	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011	184-187
PROGRAM KESEHATAN BAYI DAN ANAK		
Tabel 4.8.4.1.a-c	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan	189-192

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
	Bayi dan Anak, Rifaskes 2011	
Tabel 4.8.4.2.a-c	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011	194-196
Tabel 4.8.4.3.a-c	Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Rifaskes 2011	199-201
Tabel 4.8.4.4.a-b	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Rifaskes 2011	203-204
PROGRAM KELUARGA BERENCANA		
Tabel 4.8.5.1.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana, Rifaskes 2011	206-207
Tabel 4.8.5.2.a-b	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan Pelatihan Pelayanan Keluarga Berencana pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011	208-209
Tabel 4.8.5.3.a-c	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana, Rifaskes 2011	211-213
Tabel 4.8.5.4.a-b	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Keluarga Berencana, Rifaskes 2011	216-217
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT		
Tabel 4.8.6.1. a-c	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifakes 2011	219-221
Tabel 4.8.6.2.a-b	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011	223-224
Tabel 4.8.6.3.a-e	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifaskes 2011	226-231
Tabel 4.8.6.4.a-b	Persentase Puskesmasmenurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifaskes 2011	233-234
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR		
Tabel 4.8.7.1.a-d	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Upaya Pengendalian Penyakit Menular, Rifaskes 2011	237-240
Tabel 4.8.7.2.a-d	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dalam Upaya Pengendalian Penyakit Menular, Rifaskes 2011	243-246
Tabel 4.8.7.3.a-d	Persentase Puskesmas menurut Pedoman Upaya Pengendalian Penyakit Menular, Rifaskes 2011	250-233

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.8.7.4	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evalusi dan Bimbingan dalam Upaya Program Pengendalian Penyakit Menular, Rifaskes 2011	257
PROGRAM IMUNISASI		
Tabel 4.8.8.1	Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Pelayanan Imunisasi di Dalam dan Luar Gedung Pelayanan Imunisasi, Rifaskes 2011	260
Tabel 4.8.8.2	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Pelayanan Imunisasi tahun 2009-2010, Rifaskes 2011	261
Tabel 4.8.8.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Imunisasi, Rifaskes 2011	263-264
Tabel 4.8.8.4	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi, Rifaskes 2011	266
PELAYANAN PENGOBATAN		
Tabel 4.8.9.1	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Pengobatan dan Surveilans Penyakit Tidak Menular, Rifaskes 2011	269
Tabel 4.8.9.2	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Program Pengobatan, Rifaskes 2011	271
Tabel 4.8.9.3	Persentase Puskesmas menurut Pedoman Program Pengobatan, Rifaskes 2011	272
Tabel 4.8.9.4	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evalusi Dan Bimbingan Program Pengobatan, Rifaskes 2011	274
PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH		
Tabel 4.8.10.1.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Usaha Kesehatan Sekolah, Rifaskes 2011	276-278
Tabel 4.8.10.2.1	Persentase Puskesmas menurut Jumlah Petugas pelaksana Program Usaha Kesehatan Sekolah, Rifaskes 2011	279
Tabel 4.8.10.2.2	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan dan keberadaan Pedoman Program Usaha Kesehatan Sekolah, Rifaskes 2011	280
Tabel 4.8.10.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Usaha Kesehatan Sekolah, Rifaskes 2011	282-283
PROGRAM KESEHATAN OLAHRAGA		
Tabel 4.8.11.1.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Olahraga, Rifaskes 2011	284-285
Tabel 4.8.11.2.1	Persentase Puskesmas menurut Petugas Program Kesehatan Olahraga, Rifaskes 2011	287

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.8.11.2.2	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Olahraga, Rifaskes 2011	288
Tabel 4.8.11.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Olahraga, Rifaskes 2011	290-291
PROGRAM PERKESMAS		
Tabel 4.8.12.1.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat, Rifaskes 2011	293-294
Tabel 4.8.12.2.1	Persentase Puskesmas menurut Petugas Program Perawatan Kesehatan Masyarakat Rifaskes 2011	295
Tabel 4.8.12.2.2	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Perawatan Kesehatan Masyarakat , Rifaskes 2011	296
Tabel 4.8.12.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Perawatan Kesehatan Masyarakat , Rifaskes 2011	298-299
PROGRAM KESEHATAN KERJA		
Tabel 4.8.13.1	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Kerja, Rifaskes 2011	300
Tabel 4.8.13.2.1	Persentase Puskesmas menurut Petugas Program Kesehatan Kerja, Rifaskes 2011	302
Tabel 4.8.13.2.2	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Kerja, Rifaskes 2011	303
Tabel 4.8.13.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Bimbingan Teknis Program Kesehatan Kerja, Rifaskes 2011	305-306
PROGRAM KESEHATAN GIGI DAN MULUT		
Tabel 4.8.14.1.a-d	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011	307-310
Tabel 4.8.14.2.a-b	Persentase Puskesmas Mengikuti Pelatihan Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011	311-312
Tabel 4.8.14.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Pedoman untuk Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011	314-315
Tabel 4.8.14.4.a-b	Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan bimbingan teknis untuk Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011	316-317
PROGRAM KESEHATAN JIWA		
Tabel 4.8.15.1.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan	318-320

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
	Jiwa, Rifaskes 2011	
Tabel 4.8.15.2.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Petugas Program Kesehatan Jiwa, Rifaskes 2011	321
Tabel 4.8.15.2.2	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Jiwa, Rifaskes 2011	322
Tabel 4.8.15.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Jiwa, Rifaskes 2011	323-324
PROGRAM KESEHATAN MATA		
Tabel 4.8.16.1.a-b	Persentase Puskesmas menurut Program Kesehatan Mata, Rifaskes 2011	326-327
Tabel 4.8.16.2.1	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Mata, Rifaskes 2011	328
Tabel 4.8.16.2.2	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Mata, Rifaskes 2011	329
Tabel 4.8.16.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Mata, Rifaskes 2011	330-331
PROGRAM KESEHATAN USIA LANJUT		
Tabel 4.8.17.1.a-b	Persentase Puskesmas menurut Jenis Kegiatan Program Kesehatan Usia Lanjut, Rifaskes2011	333-334
Tabel 4.8.17.2.1	Persentase Puskesmas menurut Petugas Program Kesehatan Usila Lanjut, Rifaskes 2011	335
Tabel 4.8.17.2.2	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Petugas dan Pedoman Program Kesehatan Usila Lanjut, Rifaskes2011	336
Tabel4.8.17.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Usia Lanjut, Rifaskes 2011	338-339
PEMBINAAN PENGOBATAN TRADISIONAL		
Tabel 4.8.18.1.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pembinaan Pengobatan Tradisional, Rifaskes 2011	341-342
Tabel 4.8.18.2.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Petugas Program Pembinaan Pengobatan Tradisional, Rifaskes 2011	343
Tabel 4.8.18.2.2	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Petugas dan Pedoman Pengobatan Tradisional, Rifaskes 2011	344
Tabel4.8.18.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Pembinaan Pengobatan	346-347

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
	Tradisional, Rifaskes 2011	
PELAYANAN KESEHATAN HAJI		
Tabel 4.8.19.1.a-b	Persentase Puskesmas menurut Jenis Kegiatan Program Kesehatan Haji, Rifaskes 2011	349-350
Tabel 4.8.19.2.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan PetugasPelaksana Program Kesehatan Haji, Rifaskes2011	351
Tabel 4.8.19.2.2	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Petugas dan Pedoman Program Kesehatan Haji, Rifaskes 2011	352
Tabel 4.8.19.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Bimbingan Teknis Program Kesehatan Haji, Rifaskes2011	354-355
PELAYANAN LABORATORIUM		
Tabel 4.8.20.1.a	Persentase Puskesmas menurut Jenis Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Darah Rutin, Urine Rutin, Kadar Gula Darah, Rifaskes 2011	357
Tabel 4.8.20.1.b	Persentase Puskesmas menurut Jenis Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Kolesterol, Feses, Darah Malaria, Rifaskes 2011	358
Tabel 4.8.20.1.c	Persentase Puskesmas menurut Jenis Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Sputum, Pemeriksaan Lainnya, dan Kegiatan Lengkap, Rifaskes 2011	360
Tabel4.8.20.2.1	Persentase Puskesmas menurut Jumlah Petugas Pelaksana Pelayanan Laboratorium dan yang ikut Pelatihan Tata Laksana Laboratorium, Rifaskes2011	362
Tabel 4.8.20.2.2	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Laboratorium dan Keberadaan Pedoman , Rifaskes 2011	364
Tabel 4.8.20.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan,Evaluasi dan Bimbingan Terhadap Pelayanan Laboratorium, Rifaskes2011	366-367
PELAYANAN KEFARMASIAN		
Tabel4.8.21.1.1	Persentase Puskesmas menurut Jumlah Petugas Pelaksana Pelayanan Kefarmasian, Rifaskes 2011	369
Tabel 4.8.21.1.2.a-b	Persentase Puskesmas menurut Pendidikan Petugas Pelaksana Pelayanan Kefarmasian, Rifaskes 2011	370-371
Tabel 4.8.21.2.1	Persentase Puskesmas menurut Jenis Pelatihan Petugas Kefarmasian, RIFASKES 2011	373
Tabel 4.8.21.2.2	Persentase Puskesmas menurut keberadaan Pedoman Pelayanan Kefarmasian, Rifaskes 2011	374
Tabel 4.8.21.3.1	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kefarmasian, Rifaskes 2011	376

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
PELAYANAN PUSKESMAS KELILING		
Tabel 4.8.22.1.	Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Kegiatan Pusling di Puskesmas, Rifaskes 2011	377
Tabel 4.8.22.2.a-b	Persentase Puskesmas menurut Jenis Pelayanan Pusling, Rifaskes 2011	379-380
Tabel 4.8.22.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Jumlah Petugas Pelaksana Pusling, Rifaskes 2011	381
Tabel 4.8.22.3.2.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kategori Petugas Pelaksana Pusling, Rifaskes 2011	382-383
Tabel 4.8.22.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Bimbingan Teknis Pusling dari Dinkes Kab/Kota, Rifaskes 2011	384
Tabel 4.8.22.4.2.	Persentase Puskesmas menurut Pertemuan Monitoring Evaluasi Puslingdari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rifaskes 2011	385
PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA		
Tabel4.8.23.1.1	Persentase Puskesmas menurut KeberadaanData Desa Rawan Bencana, Pelatihan Tanggap Darurat kepada Masyarakatdan Surveilans, Rifaskes 2011	387
Tabel 4.8.23.1.2	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana, Rifaskes 2011	388
Tabel 4.8.23.2.1	Persentase Puskesmas menurut Jumlah Petugas, dan keikutsertaan pada Pelatihan Tanggap Darurat Bencana,Rifaskes 2011	390
Tabel4.8.23.3.1	Persentase Puskesmas Menurut KeberadaanMonitoring dan Bimbingan Teknis KegiatanTanggap Darurat Bencana, Rifaskes 2011	392
PELAYANAN RAWAT INAP		
Tabel 4.9.1.1.a-b	Persentase Puskesmas perawatan menurut Ruang Rawat Inap, Rifaskes 2011	394-395
Tabel 4.9.1.2	Persentase Puskesmas perawatan menurut Ruangan Rawat Inap Lengkap, Rifaskes 2011	396
Tabel 4.9.1.3	Persentase Puskesmas perawatan menurut Ruangan Petugas Jaga, Rifaskes 2011	397
Tabel 4.9.2.1.a-b	Persentase Puskesmas perawatan menurut Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Rifaskes 2011	398-400
Tabel 4.9.2.2	Persentase Puskesmas Perawatan menurut Jumlah Petugas Pelaksana Pelayanan Rawat Inap, Rifaskes 2011	401

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.9.2.3.a-b	Persentase Puskesmas perawatan menurut Jenis Tenaga yang Terlibat dalam Rawat Inap, Rifaskes 2011	404-405
Tabel 4.9.2.4.a-b	Persentase Puskesmas perawatan menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Pelayanan Rawat Inap, Rifaskes 2011	406-407
Tabel 4.9.2.5	Persentase Puskesmas perawatan menurut kepemilikan Pedoman Pelayanan Rawat Inap, Rifaskes 2011	410
Tabel 4.9.2.6.a-b	Persentase Puskesmas perawatan menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Rawat Inap, Rifaskes 2011	412-413
PELAYANAN PONED		
Tabel 4.9.3.1	Presentase Puskesmas PONED menurut Pelayanan PONED 24 Jam, Rifaskes 2011	414
Tabel 4.9.3.2	Persentase Puskesmas PONED menurut Jumlah Petugas Pelaksana, Rifaskes 2011	416
Tabel4.9.3.3	Persentase Puskesmas PONED menurut Keterlibatan Tenaga, Rifaskes 2011	417
Tabel 4.9.3.4	Persentase Puskesmas PONED menurut keberadaan Pelatihan dan PedomanPONED, Rifaskes 2011	420
Tabel 4.9.3.5	Persentase Puskesmas PONED menurut Pengawasan, Evaluasi dan BimbinganPONED, Rifaskes 2011	421
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
Tabel 4.10.1.1	Persentase Puskesmas Menurut keberadaan Petugas Khusus Pemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011	423
Tabel 4.10.1.2.	Persentase Puskesmas menurut Petugas Yang Dilatih Pemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011	424
Tabel 4.10.1.3	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pedoman, SOP dan Peraturan tentang Pemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011	426
Tabel 4.10.1.4.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alokasi Dana Khusus Pemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011	427
Tabel 4.10.1.5.a-b	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Forum Masyarakat, Rifaskes 2011	428-429
Tabel 4.10.1.6.a-d	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011	431-434
Tabel 4.10.1.7	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan UKBM, Rifaskes 2011	436
Tabel 4.10.1.8	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Input dan Proses Pemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011	438

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.10.2.a-c	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat, Rifaskes 2011	440-442
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PENGGERAK PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN		
Tabel 4.11.1	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Petugas yang Menangani Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Rifaskes 2011	444
Tabel 4.11.2	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Pada Kegiatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Rifaskes 2011	446
Tabel 4.11.3	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan SOP dan Peraturan tertulis Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Rifaskes 2011	448
Tabel 4.11.4	Persentase Puskesmas menurut ketersediaan Dana Khusus Untuk Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Rifaskes 2011	449
Tabel 4.11.5	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Rifaskes 2011	451
Tabel 4.11.6	Persentase Puskesmas Dengan Keberadaan Input dan Proses Kegiatan Penggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan	453
PUSKESMAS PEMBANTU dan BIDAN DESA		
Tabel 4.12.1	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Kegiatan Bimtek ke Pustu, Rifaskes 2011	455
Tabel 4.12.2	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Bidan Desa, Bides dengan wilayah kerja >1 desa, Bimtek ke Polindes/Poskesdes, Rifaskes 2011	457
ALAT KESEHATAN DALAM GEDUNG		
Tabel 4.13.1.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Poliklinik Umum, Rifaskes 2011	458
Tabel 4.13.1.2	Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Jenis Alat Poliklinik Umum yang digunakan, Rifaskes 2011	460
Tabel 4.13.1.3	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Esensial Poliklinik Umum, Rifaskes 2011	462
Tabel 4.13.1.4	Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Jenis Alat Esensial yang digunakan pada Pelayanan Poliklinik Umum , Rifaskes 2011	464
Tabel 4.13.2.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Poliklinik Gigi, Rifaskes 2011	466
Tabel 4.13.2.2	Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Jenis Alat Poliklinik Gigi yang digunakan, Rifaskes 2011	468

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.13.3.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Poliklinik KIA, Rifaskes 2011	470
Tabel 4.13.3.2	Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Jenis Alat Poliklinik KIA yang digunakan, Rifaskes 2011	472
Tabel 4.13.3.3.a-b	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Esensial Poliklinik KIA, Rifaskes 2011	473-474
Tabel 4.13.3.4.a-b	Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Jenis Alat Esensial yang digunakan pada Pelayanan Poliklinik KIA, Rifaskes 2011	476-477
Tabel 4.13.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Kesehatan Laboratorium, Rifaskes 2011	480
Tabel 4.13.4.2	Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Jenis Alat Kesehatan Laboratorium yang digunakan, Rifaskes 2011	481
Tabel 4.13.5.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Alat Imunisasi, Rifaskes 2011	483
Tabel 4.13.5.2	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Kesehatan Imunisasi, Rifaskes 2011	485
Tabel 4.13.5.3	Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Jenis Alat Imunisasi yang berfungsi, Rifaskes 2011	486
Tabel 4.13.5.4	Persentase Puskesmas menurut ketersediaan Alat Kesehatan Imunisasi yang berfungsi, Rifaskes 2011	487
Tabel 4.13.6.1	Persentase Puskesmas Perawatan menurut Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan DTP, Rifaskes 2011	488
Tabel 4.13.6.2	Persentase Puskesmas Perawatan menurut Kelengkapan Jenis Alat Kesehatan DTP yang digunakan, Rifaskes 2011	490
Tabel 4.13.7.1	Persentase Puskesmas PONED menurut Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan PONED, Rifaskes 2011	492
Tabel 4.13.7.2	Persentase Puskesmas PONED menurut Kelengkapan Jenis Alat Kesehatan PONED yang digunakan, Rifaskes 2011	494
KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN		
Tabel 4.14.1.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Obat Umum, Rifaskes 2011	497
Tabel 4.14.1.2	Persentase Puskesmas menurut Kecukupan Jenis Obat Umum, Rifaskes 2011	498
Tabel 4.14.2.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Obat Gigi, Rifaskes 2011	500
Tabel 4.14.2.2	Persentase Puskesmas menurut Kecukupan Jenis Obat Gigi selama tahun 2010, Rifaskes 2011	502

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.14.3.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Obat/Alat KB, Rifaskes 2011	504
Tabel 4.14.3.2	Persentase Puskesmas menurut Kecukupan Jenis Obat/Alat KB selama tahun 2010, Rifaskes 2011	506
Tabel.4.14.4.1	.Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Obat PONED, Rifaskes 2011	507
Tabel 4.14.4.2	Persentase Puskesmas menurut Kecukupan Jenis Obat PONED yang tersedia selama tahun 2010, Rifaskes 2011	509
Tabel 4.14.5.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Vaksin, Rifaskes 2011	511
Tabel 4.14.5.2	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Vaksin, Rifaskes 2011	512
ALAT KESEHATAN LUAR GEDUNG		
Tabel 4.15.1.1	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Alat Kit Puskesmas Keliling, Rifaskes 2011	513
Tabel 4.15.1.2	Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Jenis Alat Kit Peralatan Pusling yang digunakan, Rifaskes 2011	515
Tabel 4.15.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kit Pelayanan Luar Gedung, Rifaskes 2011	517
Tabel 4.15.2.2.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kit, Rifaskes 2011	518

.

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Hal.
Gambar 2.1.	Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011	6
Gambar 4.3.1.1.1.b	Rata-rata Jumlah Tenaga Dokter per Puskesmas, Rifaskes 2011	30
Gambar 4.3.1.1.4.b	Persentase Puskesmas yang Tidak ada Tenaga Dokter Gigi, Rifaskes 2011	34
Gambar 4.3.1.2.2.b	Persentase Perawat dengan Pendidikan Terakhir Sarjana (SKP-S1-S2), Rifaskes 2011	39
Gambar 4.3.1.2.3.a	Persentase Perawat dengan Status Ketenagaan Honorer, Rifaskes 2011	39
Gambar 4.3.1.2.4.b	Rata-rata Jumlah Bidan per Puskesmas, Rifaskes 2011	42
Gambar 4.3.1.2.5	Persentase Bidan menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011	42
Gambar 4.3.1.6.1.b	Rata-rata Jumlah Tenaga Penyuluh Kesehatan, Rifaskes 2011	60
Gambar 4.3.1.10.4	Persentase Tenaga Kesehatan menurut Jenis Ketenagaan di Puskesmas, Rifaskes 2011	75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hak atas kesehatan setiap warga negara dijamin oleh konstitusi. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A menyatakan bahwa, *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*. Selanjutnya, dalam pasal 28 H ayat 1, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*, pasal 34 ayat 1, *"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara"*, dan pasal 34 ayat 3, *"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"*.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 (pasal 10) dan PP Nomor 38 tahun 2007, penyelenggaraan urusan kesehatan di Indonesia merupakan sinergi antara peran pemerintah daerah dan pusat. Sistem Kesehatan Nasional menetapkan Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan (Kepmenkes 274 tahun 2009). Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan bagian dari pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keberadaan Rumah Sakit dan Puskesmas juga menjadi bagian dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setidaknya terkait dengan Bab V (Bagian Kedua) mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Bab VI mengenai Upaya Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas mengatur hal yang esensial tentang Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas **Kesehatan Kabupaten /Kota** yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu Kecamatan, tapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah desa/kelurahan/RW. Masing masing Puskesmas tersebut bertanggung jawab lansung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling. Untuk daerah yang jauh dari sarana pelayanan rujukan puskesmas dilengkapi dengan fasilitas rawat inap

Fungsi puskesmas

1. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
   Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap pembangunan di wilayah kerjanya.
2. Pusat pemberdayaan Masyarakat
   Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat , keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif

dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan berdayaan masyarakat diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.

3. Pusat Pelayanan kesehatan Strata pertama, yang meliputi:
   - Pelayanan kesehatan perorangan
   - Pelayannan kesehatan masyarakat

Dalam upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra – Kemenkes) 2010 -2014, maka dukungan kebijakan yang tepat dalam hal Upaya Kesehatan menjadi suatu hal yang penting. Kebijakan yang tepat hanya akan diperoleh bila didasarkan pada bukti yang kuat dan sahih (*evidence based policy*). Melalui kebijakan yang tepat maka perencanaan program secara konkuren di setiap tingkat administrasi Pemerintahan dan intervensi yang dilakukan akan lebih efektif.

Informasi yang dibutuhkan agar penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilakukan secara tepat, belum tersedia secara akurat, *up to date* dan memadai. Selain itu, saat ini belum tersedia peta status terkini tentang fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas dan Laboratorium) dan kinerjanya pada pada tingkat wilayah dan nasional. Penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan di masa datang yang kompleks (Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Jamkesmas) memerlukan informasi tentang *supply* pelayanan kesehatan agar tujuan tercapai optimal.

Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI, disamping Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Riset Khusus Kesehatan (Rikus). Rifaskes 2011 dilaksanakankan dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu pada fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). Buku ini membahas secara khusus mengenai pelaksanaan dan hasil Riset Fasilitas Kesehatan pada fasilitas kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan tahun 2011.

1.2. PERTANYAAN KEBIJAKAN

Supply apa yang dibutuhkan (fasilitas, SDM, peralatan kesehatan dan pelayanan kesehatan) agar institusi pelayanan kesehatan baik pusat maupun daerah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara optimal untuk mencapai tujuan RPJMN Bidang Kesehatan 2010-2014, MDGs 2015, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK), *Universal Coverage*, dan akselerasi pencapaian pembangunan kesehatan.

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu Puskesmas, termasuk SDM, alat kesehatan (alkes) penting dan canggih dan penyediaan pelayanannya pada pada tingkat wilayah dan nasional
2. Bagaimana distribusi *supply* pelayanan kesehatan di berbagai wilayah

1.4. TUJUAN PENELITIAN

1. Diperolehnya informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas (puskesmas), termasuk Sumber Daya Manusia, peralatan kesehatan penting dan penyediaan pelayanannya pada tingkat wilayah dan nasional (*stock opname*).
2. Diperolehnya peta ketersediaan *supply* fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) di berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi)
3. Diperolehnya Indeks Kinerja Puskesmas

1.5. MANFAAT PENELITIAN

1. Mendukung pencapaian Universal Coverage Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan menyediakan data fasilitas (puskesmas) terkait dengan paket pelayanan kesehatan yang dapat diberikan (*benefit package*).
2. Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan revitalisasi Puskesmas.
3. Memungkinkan Pemerintah Pusat/provinsi mengalokasi bantuan/peran kepada daerah berdasar evidens secara optimal.
4. Memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan supply pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
5. Dapat digunakan dasar bagi perencanaan fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai tingkat administrasi pemerintahan.
6. Menghasilkan peta yang terintegrasi antara masalah kesehatan dan penyediaan pelayanan kesehatan berdasarkan berbagai riset/informasi yang relevan (riskesdas, Rifaskes, Podes, Susenas dll)
7. Mendorong kegiatan riset *follow up* yang lebih tajam dan terarah

1.6. RUANG LINGKUP

Secara keseluruhan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) ini dilakukan di seluruh Rumah Sakit Umum Pemerintah, di seluruh Puskesmas, dan di seluruh Laboratorium Klinik Mandiri di Indonesia. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2010, sedangkan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2011.

BAB II

KERANGKA KONSEP
DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR

2.1. BATASAN

Riset Fasilitas Kesehatan merupakan pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder tentang kecukupan (adekuasi) dan ketepatan (appropriateness) penyediaan fasilitas kesehatan dan kinerjanya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh swasta yang dilakukan secara berkala.

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan, baik yang ditujukan untuk memberikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), rawat jalan, rawat inap, serta melingkupi strata I, II, dan III. Fasilitas kesehatan strata pertama meliputi antara lain puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan serta fasilitas laboratorium Pelayanan Mandiri. Termasuk fasilitas kesehatan strata kedua dan ketiga antara lain Balai kesehatan mata masyarakat, Balai pengobatan penyakit paru, Balai kesehatan indera masyarakat, Balai besar kesehatan paru masyarakat, RS Pemerintah dan swasta.

Berdasarkan tingkat kepentingannya (urgensi), maka Riset Fasilitas Kesehatan pertama ini ditujukan untuk Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium pelayanan kesehatan mandiri.

2.2. KERANGKA KONSEP

Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan mengacu pada Konsep HL. Blum mengenai *"Health Determinant"*, Konsep *"Organization System"* Donabedian dan Konsep Jakab mengenai *"Organizational Reform"*.

Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan kerangka konsep seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011.

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011

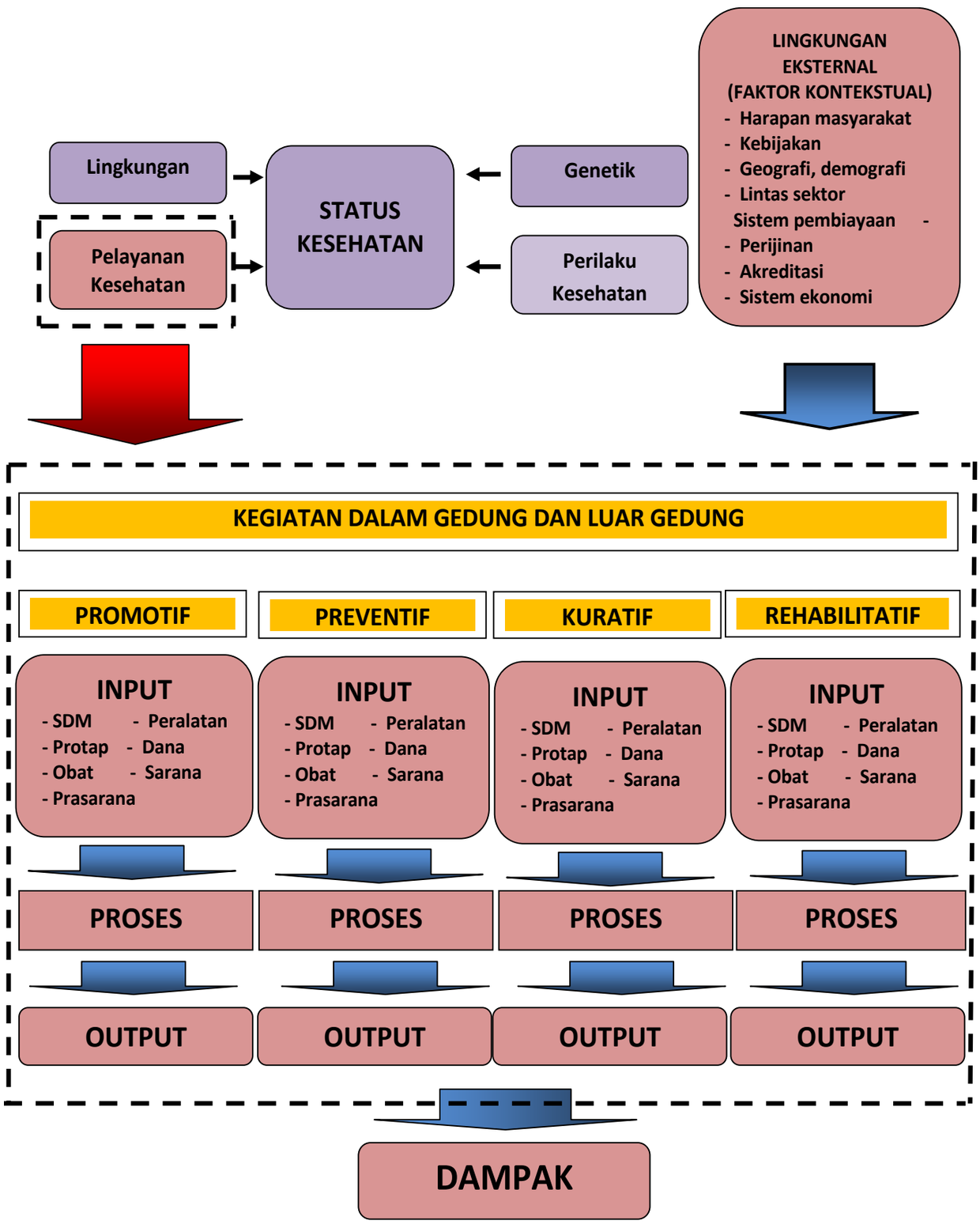

Dimodifikasi dari : ***Blum, Donabedian, dan Jakab***

HL. Blum menyebutkan bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 4 (empat) determinan kesehatan, yakni Perilaku Kesehatan, Genetik, Lingkungan, dan Pelayanan Kesehatan. Riset Fasilitas terkait erat dengan determinan pelayanan kesehatan seperti yang dimaksud oleh Blum. Konsep ini dipadukan dengan pendekatan kesisteman organisasi yang dikemukakan oleh Donabedian, yang meliputi Input (Masukan), Proses, Output (Luaran), dan *Outcome* (Dampak). Secara khusus, Jakab menjabarkan komponen kesisteman organisasi Donabedian dalam konteks elemen-elemen yang mempengaruhi Fasilitas Kesehatan.

2.3. PENGEMBANGAN INDIKATOR PUSKESMAS

2.3.1. INDIKATOR INPUT

Indikator-indikator Input untuk puskesmas diklasifikasikan ke dalam kelompok:

A. Organisasi, meliputi:
   1. Struktur
   2. Fungsi
   3. Jejaring
   4. Luas wilayah
   5. Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa

B. Peraturan/kebijakan, meliputi:
   1. SPO/Protap pelayanan
   2. Surat Edaran, Pedoman, Surat Keputusan

C. Sumber Daya Puskesmas, meliputi:
   1. Sumber Daya Manusia: jumlah, kualifikasi, status kepegawaian, pendidikan, pelatihan
   2. Fasilitas bangunan: kondisi bangunan, jenis ruang pelayanan, jenis ruang non pelayanan, sarana air, toilet, listrik, jaringan telepon, internet
   3. Alat transportasi: kendaraan roda empat, roda dua, perahu bermotor, dan lain-lain. Penilaian mengenai alat transportasi ini termasuk jumlah dan kondisi dari alat transportasi tersebut.
   4. Alat kesehatan: jenis, jumlah, dan kondisi
   5. Obat-obatan: jenis dan jumlah
   6. Buku Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Standar Prosedur Operasional untuk Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan
   7. Dana operasional Puskesmas: Alokasi dan Realisasi

2.3.2. INDIKATOR PROSES

Indikator-indikator proses untuk Puskesmas diklasifikasikan ke dalam kelompok:

A. Perencanaan (P1), meliputi keberadaan dokumen perencanaan:
   1. Bulanan,
   2. Tribulanan, dan
   3. Tahunan

B. Penggerakan dan Pelaksanaan, meliputi:
   1. Dokumen pencatatan dan pelaporan, Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP) dan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)
   2. Pembagian tugas/pekerjaan jelas dan tertulis
   3. Pembagian daerah binaan
   4. Penetapan penanggung jawab Program

C. Pembinaan dan pengawasan penilaian, meliputi:
   1. Bimbingan
   2. Monitoring: Terencana, Insidentil, metode
   3. Evaluasi: Penilaian Kinerja

D. Manajemen operasional Puskesmas, meliputi:
   1. Membuat data pencapaian/cakupan kegiatan pokok tahun lalu
   2. Menyusun RUK melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas
   3. Menyusun RPK secara rinci dan lengkap
   4. Melaksanakan lokakarya mini bulanan
   5. Melaksanakan lokakarya mini tribulanan (lintas sektoral)
   6. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan ke Kabupaten/kota
   7. Program Jaminan Mutu
   8. Penilaian kepuasan pasien

E. Manajemen alat dan obat, meliputi:
   1. Membuat kartu inventarisasi dan menempatkan di masing-masing ruangan
   2. Melaksanakan up dating daftar inventaris alat
   3. Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat/bahan di gudang secara rutin
   4. Menerapkan pendekatan *First In First Out* (FIFO) dan FEFO

2.3.3. INDIKATOR OUTPUT

A. Utilisasi *(outreach)*

1. Dalam gedung, artinya kegiatan-kegiatan upaya kesehatan yang dilakukan didalam gedung, misalnya pemeriksaan gigi.
2. Luar gedung, artinya kegiatan-kegiatan upaya kesehatan di masyarakat, misalnya puskesmas keliling, imunisasi.

B. Target cakupan pelayanan kesehatan

1. Upaya kesehatan wajib
   (1) Promosi Kesehatan,
   (2) Kesehatan lingkungan,
   (3) KIA,
   (4) Upaya perbaikan gizi masyarakat,
   (5) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular,
   (6) Upaya pengobatan.

2. Upaya kesehatan pengembangan (penambahan atau inovasi) :
   (1) Rawat inap dan PONED
   (2) Usaha Kesehatan Sekolah
   (3) Kesehatan Gigi dan Mulut
   (4) Kesehatan usia lanjut,
   (5) Upaya kesehatan mata,
   (6) Kesehatan jiwa,
   (7) Kesehatan olah raga,
   (8) Perawatan Kesehatan Masyarakat,
   (9) Pembinaan Pengobatan Tradisional,
   (10) Kesehatan kerja
   (11) Kesehatan haji

3. Layanan Penunjang, meliputi:
   (1) Laboratorium
   (2) Farmasi
   (3) Gawat darurat bencana
   (4) Puskesmas keliling

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan Riset Fasilitas Kesehatan adalah studi potong lintang *(cross sectional)*.

3.2. POPULASI dan SAMPEL

3.2.1. POPULASI PENELITIAN

Populasi penelitian adalah puskesmas di seluruh Indonesia.

3.2.2. SAMPEL PENELITIAN

Pada perencanaan awal, sampel penelitian adalah seluruh puskesmas yang terdaftar di Pusdatin seperti terlihat pada tabel 3.1. Namun sesudah dilaksanakan rapat kordinasi teknis dengan dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disepakati sampel Puskesmas adalah semua Puskesmas yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Sensus). Puskesmas yang akan didatangi hanya Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum bulan Februari 2010, sedangkan puskesmas lainnya informasinya diambil di Dinas kesehatan Kabupaten/Kota saja. Hasil pengumpulan data dari 9.188 puskesmas, 8.981 puskesmas yang dianalisis yaitu Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Januari 2010.

3.3. RESPONDEN

Responden di puskesmas meliputi :

1. Kepala Puskesmas
2. Staf puskesmas terkait
3. Pengelola informasi puskesmas

Tabel 3.1. Jumlah Puskesmas Per Propinsi

NO	PROPINSI	JUMLAH PUSKESMAS
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	315
2	SUMATERA UTARA	506
3	SUMATERA BARAT	246
4	RIAU	193
5	JAMBI	169
6	SUMATERA SELATAN	293
7	BENGKULU	170
8	LAMPUNG	265
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	58
10	KEPULAUAN RIAU	66
11	DKI JAKARTA	341
12	JAWA BARAT	1028
13	JAWA TENGAH	867
14	DI YOGYAKARTA	121
15	JAWA TIMUR	946
16	BANTEN	217
17	BALI	114
18	NUSA TENGGARA BARAT	150
19	NUSA TENGGARA TIMUR	309
20	KALIMANTAN BARAT	231
21	KALIMANTAN TENGAH	174
22	KALIMANTAN SELATAN	214
23	KALIMANTAN TIMUR	217
24	SULAWESI UTARA	170
25	SULAWESI TENGAH	160
26	SULAWESI SELATAN	416
27	SULAWESI TENGGARA	233
28	GORONTALO	76
29	SULAWESI BARAT	81
30	MALUKU	156
31	MALUKU UTARA	100
32	PAPUA	297
33	PAPUA BARAT	106
	JUMLAH	9005

Sumber: Pusdatin, Desember 2010.

3.4. PENGUMPULAN DATA

3.4.1. JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Secara umum data yang dikumpulkan meliputi: Identitas tempat, karakteristik, Input (sumber daya manusia, fasilitas fisik, peralatan, pedoman dan ketatausahaan), proses (perencanaan, penggerakan-pelaksanaan, pengawasan penilaian dan pengendalian), dan out kegiatan.

Kuesioner Puskesmas terdiri dari 16 Blok sebagai berikut :

Blok I	:	Pengenalan Tempat
Blok II	:	Keterangan Pengumpul Data
Blok III	:	Karakteristik Puskesmas
Blok IV	:	Sumber Daya Manusia
Blok V	:	Fasilitas Fisik
Blok VI	:	Ketatausahaan (Tu)
Blok VII	:	Manajemen
Blok VIII	:	Pelayanan Kesehatan
Blok IX	:	Pelayanan Rawat Inap
Blok X	:	Puskesmas Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat
Blok XI	:	A. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat B. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Puskesmas Sebagai Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Blok XII	:	Pustu Dan Bidan Desa
Blok XIII	:	Jaringan Pelayanan Kesehatan Dasar
Blok XIV	:	Rumah Dinas
Blok XV	:	Alat Kesehatan Dalam Gedung
Blok XVI	:	Alat Kesehatan Luar Gedung

3.4.2. PENGUMPUL DATA

Pengumpul data adalah petugas yang direkrut Badan Litbangkes, yang berasal dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes), kalangan Universitas (perguruan tinggi), Dinas kesehatan Kabupaten/Kota ataupun masyarakat umum yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, baik di tingkat Pusat maupun daerah. Petugas pengumpul data di Puskesmas harus memenuhi kualifikasi latar belakang pendidikan D3 di bidang kesehatan. Sebelum melakukan pengumpulan data, setiap petugas mendapat pelatihan terlebih dahulu.

3.4.3. CARA PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan faktor penentu dan bagian penting dari rangkaian kegiatan survei sehingga data yang dikumpulkan terhindar dari dan bias, akurat, valid dan dapat diandalkan. Pengumpulan data dilakukan melalui :

1. *Interview* (wawancara) dengan menggunakan kuesioner
2. Pengamatan/ observasi lansung
3. Data sekunder, dikumpulkan dengan memperhatikan/ *check* dokumen yang ada di puskesmas.

Pada pengumpulan data, enumerator/ pengumpul data diharuskan memperhatikan etika sebagai berikut

1. Tim pengumpul data harus menghormati norma sosial setempat. Upayakan agar kunjungan ke Puskesmas dapat diatur sedemikian rupa sehingga seluruh responden sedang berada di tempat. Oleh karena itu, enumerator harus membuat perjanjian waktu terlebih dahulu sebelum berkunjung.
2. Pada waktu menggali informasi dari responden, pewawancara harus menciptakan suasana yang baik. memperhatikan dan bersikap netral terhadap respons dari responden, tidak memberi kesan memaksa. tidak emosi, tidak mengarahkan, dapat menghindari percakapan yang menyimpang atau bertele-tele. meminta izin sebelumnya untuk pertanyaan yang sensitif.
3. Setelah selesai melakukan wawancara, mengucapkan terima kasih pada saat berpamitan.

Untuk mengendalikan mutu hasil wawancara dilakukan hal seperti berikut:

1. Tim pewawancara harus bekerjasama dengan baik selama melaksanakan tugas di lapangan. Ketua Tim (Katim) harus dapat membagi tugas lapangan (dalam proses pengumpulan data) secara seimbang, baik untuk dirinya sendiri dan maupun untuk anggota tim pengumpul data yang lain.
2. Semua enumerator bertanggung jawab melakukan editing terhadap hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan harus diverifikasi oleh Katim, segera setelah pengumpulan data dianggap selesai. Ketua tim meneliti ***kelengkapan dan konsistensi*** jawaban pada kuesioner yang telah diisi, segera setelah diserahkan oleh pewawancara.
3. Kualitas yang tinggi dari data yang dikumpulkan dapat dicapai apabila wawancara sudah diverifikasi dengan observasi yang cermat dan dilakukan mengikuti prosedur yang benar.
4. Apabila dalam hal-hal tertentu ada permasalahan dalam pengisian kuesioner yang tidak bisa diselesaikan oleh tim, maka tim segera menghubungi Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kabupaten/Kota dan akan didiskusikan bersama dengan PJO Kabupaten/Kota, jika perlu berkoordinasi dengan PJT dan atau PJO Provinsi.

Kuesioner yang sudah selesai diedit oleh Ka Tim, diserahkan pada PJT Kab/Kota untuk selanjutnya dibawa ke Tim Manajemen Data. Sementara kuesioner yang belum terisi lengkap saat PJT Kab/Kota kembali ke Pusat, dilengkapi dan diserahkan kepada PJT Kab/Kota. Untuk selanjutnya dikirim via pos/paket ke Tim Manajemen Data.

3.5. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data yang direncanakan meliputi:

1. Deskriptif nasional dan provinsi
2. Peta wilayah
3. Analisis untuk menghasilkan berbagai indikator adekuasi, *apropriateness*, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu.
4. Penyusunan Indeks Kinerja Puskesmas

Buku ini hanya memuat hasil analisis deskriptif.

3.6. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan di dalam Riset Fasilitas Kesehatan ini meliputi:

3.6.1. TAHAP PERSIAPAN

3.6.1.1. Telaah Dokumen (*document review*)

Kegiatan ini diperlukan untuk menyusun protokol pelaksanaan penelitian, agar data yang dkumpulkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3.6.1.2. Pertemuan Konsinyasi Lintas Program dan Organisasi Profesi

Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan lintas program dalam persiapan dan pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011. Pada pertemuan ini antara lain menghasilkan:

a. Indikator-indikator kinerja Puskesmas dari unit-unit utama Kementerian Kesehatan yang terkait dan Organisasi Profesi
b. Tersosialisasinya rencana kegiatan Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011
c. Adanya pemahaman tentang perlu dan manfaat dari kegiatan Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011

3.6.1.3. Pertemuan Pakar

Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan dari para pakar dalam pengembangan indikator RIFAS 2011.

Pada pertemuan ini dihasilkan antara lain:

a. Perumusan indikator Rifas 2011 untuk Puskesmas
b. Sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
c. Pengembangan jejaring dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
d. Masukan pakar dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011

3.6.1.4. Penyusunan Instrumen

Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun instrumen penelitian Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011, meliputi instrumen RIFAS Puskesmas. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan dan berbagai masukan yang diterima melalui serangkaian pertemuan (diskusi). Kuesioner Puskesmas dikembangkan

dengan mempertimbangkan jenis (Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan non rawat inap) dan lokasi (perkotaan dan perifer) Puskesmas.

3.6.1.5. Uji coba instrumen

Uji coba instrumen dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai validitas dan realiabilitas draft instrumen Riset Fasilitas 2011. Tujuan kegiatan uji coba instrumen adalah:

a. Diperoleh hasil uji coba instrumen riset fasilitas pelayanan kesehatan
b. Diperolehnya gambaran untuk manajemen data hasil penelitian
c. Diperolehnya masukan-masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan instrumen

Uji coba kuesioner Puskesmas dilakukan di 21 Puskesmas yang berbeda dengan mempertimbangkan keterwakilan Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap (dengan tempat tidur) dan Puskesmas non rawat inap (non tempat tidur), daerah perkotaan (urban) dan daerah perifer (*remote*). Puskesmas yang menjadi sampel dalam uji coba instrumen untuk masing-masing provinsi: 1 Puskesmas perawatan dan 2 *non*perawatan (1 di perkotaan dan 1 di *remote area*) di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur.

3.6.1.6. Penyusunan *Plan of Action* (POA) Pelaksanaan

Tujuan pertemuan ini adalah tersusunnya perencanaan pelaksanaan *(plan of action)* Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011.

3.6.2. TAHAP PELAKSANAAN

Riset Fasilitas dilaksanakan pada tahun 2011. Pengumpulan data dilakukan antara bulan Juli sampai dengan pertengahan Oktober 2011. Pengorganisasian Rifaskes 2011 meliputi tingkat Pusat, tingkat Wilayah, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Rifaskes tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Harian, Tim Manajemen, Tim Teknis, Tim Manajemen Data (Mandat) dan Tim Analisis Data (Andat).

3.6.2.1. Pengorganisasian Lapangan

Untuk memudahkan pengumpulan data dan menjaga kualitas data pelaksanaan pengumpulan dibagi dalam 4 wilayah. Setiap koordinator wilayah bertanggung jawab pada 8-9 propinsi. Koordinator Wilayah (korwil) terdiri dari Ketua, 1-2 orang Wakil Ketua, Penanggung Jawab Teknis Provinsi (PJT) dan Penanggung Jawab Administrasi.

Korwil 1. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (Pusat 1) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Papua

Korwil 2. Pusat Teknologi Kesehatan Terapan dan Epidemiologi Klinik (Pusat 2) bertanggung jawab menggkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: Aceh, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua.

Korwil 3. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat (Pusat 3) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di Sembilan (9) provinsi, yaitu: Banten,

Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Korwil 4. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusat 4) bertanggung jawab menggkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.

3.6.2.2. Penyusunan Pedoman Instrumen

Sebagai perlengkapan pengumpulan data terlebih dahulu disiapkan formulir yang akan diisi oleh petugas. Sebagai pedoman cara pengisian formulir dibuat pedoman teknis instrumen Riset Fasilitas 201. Pada pengumpulan data ini dibuat 4 pedoman teknis yaitu: pedoman teknis instrumen Puskesmas Riset Fasilitas 2011, serta pedoman teknis pertanggungjawaban keuangan Riset Fasilitas 2011. Pedoman Instrumen Riset fasilitas 2011 diperlukan sebagai acuan agar terjadi kesamaan di dalam definisi operasional dan pemaknaan dari instrumen yang sudah disusun.

Penyusunan pedoman instrumen dimaksudkan sebagai bagian dari upaya jaga mutu yang dilakukan agar data yang dikumpulkan didasarkan pada kesamaan pemahaman dari enumerator yang akan menghasilkan data yang valid. Penyusunan pedoman instrumen dilakukan melalui serangkaian diskusi yang melibatkan narasumber terkait dan kerja tim sehingga menghasilkan pedoman instrumen yang meliputi instrumen untuk pengambilan data Puskesmas.

3.6.2.3. Pertemuan Tim Manajemen

Tujuan dari kegiatan ini adalah menjamin pelaksanaan Riset Fasilitas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada pertemuan ini dihasilkan yaitu :

a. Rencana teknis pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.
b. Identifikasinya potensi permasalahan dan masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.
c. Identifikasinya alternatif-alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.

Pertemuan tim manajemen merupakan salah satu bentuk dari upaya jaga mutu pelaksanaan Riset Fasilitas 2011. Pada tahap-tahap awal, pertemuan tim manajemen dilakukan untuk mematangkan perencanaan dan mempersiapkan penunjang pelaksanaan Rifas. Ketika Rifas berjalan, pertemuan tim manajemen dilakukan dengan maksud melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan Riset Fasilitas 2011 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pertemuan tim internal manajemen melibatkan tim inti, tim manajemen data, dan tim administrasi. Pelaksana kegiatan adalah Tim Riset Fasilitas 2011

3.6.2.4. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi

Rapat koordinasi tingkat provinsi bertujuan untuk koordinasi persiapan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa tujuan khusus rapat Koordinasi antara lain :

a. Sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
b. Teridentifikasinya faktor penghambat dalam pelaksanaan Rifas 2011

c. Teridentifikasinya faktor penunjang dan potensi untuk pelaksanaan Riset Fasilitas 2011

d. Tersusunnya alternatif pemecahan untuk mengatasi faktor penghambat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011

e. Tersusunnya rencana pelaksanaan dan mekanisme kerja Riset Fasilitas 2011 di setiap daerah

f. Tersedianya tenaga penanggungjawab operasional Rifas 2011 di setiap daerah

Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 tingkat Provinsi dilaksanakan di seluruh provinsi dan dilakukan di ibukota provinsi. Rapat ini diikuti oleh pelaksana Riset Fasilitas 2011 (tim pusat yang terdiri dari ketua dan wakil penanggungjawab propinsi, tim administrasi , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi.

Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 diikuti oleh pimpinan instiitusi terkait dengan harapan akan dilakukan sosialisasi dan persiapan pelaksanaan Riset Fasilitas di masing-masing fasilitas kesehatan yang dipimpinnya atau di setiap puskesmas yang berada di wilayah kerjanya. Kegiatan Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 dilakukan di ibukota 33 provinsi di Indonesia. Sebagai pelaksana kegiatan adalah seluruh Satuan kerja (satker) di lingkungan Badan Litbang Kesehatan.

3.6.2.5. *Workshop* Fasilitator Tingkat Pusat

Workshop fasilitator Riset Fasilitas dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya pendelegasian dan penyebarluasan pemahaman substansi Riset Fasilitas 2011 mengingat rentang kendali *(span of control)* kegiatan Rifas 2011 yang cukup lebar. Tujuan dari kegiatan ini agar peserta *workshop* mampu untuk memberikan materi dan arahan mengenai Riset Fasilitas pada Penanggungjawab Teknis (PJT) kabupaten/kota dan enumerator Riset Fasilitas 2011, dan memahami substansi, instrumen yang digunakan, serta mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011. Melalui kegiatan ini peserta mampu memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi.

Workshop diikuti oleh seluruh Penanggungjawab Teknis (PJT) Provinsi Riset Fasilitas 2011, Koordinator Wilayah, dan panitia. Pelatihan dilakukan selama 5 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum Puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

3.6.2.6. *Workshop* Penanggung jawab Teknis Kabupaten/Kota

Tujuan *workshop* agar peserta *workshop* mampu untuk memberikan pemahaman mengenai substansi dan pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011 pada enumerator. Melalui kegiatan ini, peserta *workshop* mampu memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011

Workshop penanggungjawab teknis kabupaten/kota diikuti oleh seluruh Penanggungjawab Teknis (PJT) kabupaten/kota, Koordinator Wilayah, pembantu

administrasi (PA) dan panitia. Pelatihan dilakukan selama 7 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Workshop ini khususnya ditujukan untuk PJT kabupaten/kota dan tenaga Pembantu Administrasi (PA). *Workshop* untuk PJT kabupaten/kota dilakukan oleh fasilitator tingkat pusat dengan dukungan dari Tim Manajemen Rifas 2011. Peserta *workshop* dapat memberikan pengarahan dan pemahaman untuk enumerator. Hal ini dilakukan mengingat akan ada sekitar 3352 enumerator Riset Fasilitas 2011 yang direkrut sehingga perlu adanya penyebarluasan pemahaman pelaksanaan Riset Fasilitas kepada PJT kabupaten/kota yang selanjutnya akan terlibat di dalam pelaksanaan *workshop* untuk enumerator.

3.6.2.7. *Workshop* Enumerator

Workshop untuk enumerator dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya penyebarluasan pemahaman substansi Riset Fasilitas 2011 kepada enumerator Rifas 2011. Dengan pemahaman yang baik, enumerator dapat mengumpulkan data dengan benar sehingga akan menghasilkan kualitas data yang baik. Tujuan umum dari *workshop* ini agar peserta workshop mampu untuk melakukan pengumpulan data Riset Fasilitas 2011 dengan baik, memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011

Workshop enumerator diikuti oleh seluruh enumerator Riset Fasilitas, enumerator untuk Puskesmas. *Workshop* dilakukan selama 5 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggung jawaban keuangan.

Workshop enumerator dilakukan terhadap 3352 enumerator Rifas 2011, dengan rincian 2186 enumerator puskesmas dan 498 orang tim entri data. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi paparan/presentasi dan tanya jawab, diskusi, dan praktek lapangan. *Workshop* dilakukan di ibukota propinsi. Pelaksanaan workshop dilakukan sesuai dengan kesediaan waktu masing-masing propinsi.

3.6.2.8. Pengumpulan Data

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data Riset Fasilitas di Puskesmas yang meliputi data input, proses, dan output. Kegiatan pengumpulan data riset fasilitas kesehatan, dilaksanakan di seluruh Puskesmas sebanyak 9.188 buah.

Riset fasilitas kesehatan untuk Puskesmas dilakukan secara total *coverage*. Ruang lingkup kegiatan meliputi: input, proses, output dan outcome pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pengumpulan data dilakukan di setiap Puskesmas dengan cara mendatangi langsung fasilitas kesehatan tersebut dan melakukan wawancara terhadap responden terkait, pengamatan (observasi) dan telaah terhadap data sekunder yang ada.

3.6.2.9. Validasi Studi

Kegiatan validasi studi merupakan salah satu bentuk dari upaya jaga mutu pelaksanaan Riset Fasilitas 2011. Dilakukan oleh Akademisi dari beberapa universitas (perguruan tinggi), untuk melihat gambaran seberapa valid hasil Riset Fasilitas Kesehatan 2011. Validasi studi dilakukan oleh tim khusus dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.

3.6.2.10. Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi *data editing*, *data entry*, *data cleaning*, dan *data processing*. Pelaksanaan pengolahan data dilakukan oleh 2 tim yaitu tim manajemen data dan tim analisis data. Tim manajemen data (mandat) bertanggung jawab pada data sejak diterima dari enumerator hingga data siap dianalisa. Sedangkan tim analisis data bertanggung jawab pada pembuatan *syntax*, *dummy table* dan mengeluarkan hasil.

3.6.2.11. Analisa Data

Analisa data meliputi: deskriptif nasional dan wilayah, Peta wilayah, analisis untuk menghasilkan berbagai indikator adekuasi, apropriateness, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu, dan penyusunan Indeks Kinerja Puskesmas.

BAB IV
HASIL

4.1. JUMLAH PUSKESMAS

Jumlah Puskesmas yang didata melalui Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Tahun 2011 adalah sejumlah 9.188 Puskesmas yang tersebar di 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun tidak seluruh Puskesmas tersebut dikunjungi dan dianalisis, karena sebanyak 189 Puskesmas baru beroperasi setelah bulan Januari 2010, sebanyak 3 Puskesmas sudah berubah fungsi menjadi Rumah Sakit, dan 15 Puskesmas tidak dikunjungi karena merupakan daerah sulit. Jumlah Puskesmas yang dikunjungi dan kemudian dianalisis adalah Puskesmas yang beroperasi sebelum Februari 2010, yaitu sejumlah 8.981 Puskesmas. Pada tabel 4.1.1.disajikan distribusi Puskesmas tersebut.

Tabel 4.1.1.
Jumlah Puskesmas di Indonesia, Rifaskes 2011

No	Uraian	Puskesmas beroperasi sebelum Februari 2010 dan dikunjungi	Puskesmas tidak dikunjungi karena beroperasi setelah Januari 2010	Puskesmas tidak dikunjungi karena merupakan daerah sulit	Puskesmas tidak dikunjungi karena sudah berganti fungsi menjadi Rumah Sakit	Total Jumlah Puskesmas
	Provinsi					
1	DI Aceh	311	6	0	0	317
2	Sumatera Utara	506	14	0	2	522
3	Sumatera Barat	248	5	0	0	253
4	Riau	195	7	0	0	202
5	Jambi	171	3	0	0	174
6	Sumatera Selatan	298	7	0	0	305
7	Bengkulu	173	1	0	0	174
8	Lampung	265	2	0	0	267
9	Bangka Belitung	57	1	0	0	58
10	Kepulauan Riau	65	0	0	0	65
11	DKI Jakarta	336	1	0	0	337
12	Jawa Barat	1031	8	3	0	1042
13	Jawa Tengah	861	5	0	1	867
14	DI Yogyakarta	121	0	0	0	121
15	Jawa Timur	949	0	0	0	949
16	Banten	206	13	0	0	219
17	Bali	114	0	0	0	114
18	Nusa Tenggara Barat	149	2	0	0	151
19	Nusa Tenggara Timur	302	21	4	0	327
20	Kalimantan Barat	233	1	0	0	234
21	Kalimantan Tengah	176	4	0	0	180
22	Kalimantan Selatan	217	6	0	0	223
23	Kalimantan Timur	213	2	3	0	218
24	Sulawesi Utara	167	6	0	0	173
25	Sulawesi Tengah	163	5	0	0	168
26	Sulawesi Selatan	406	12	0	0	418
27	Sulawesi Tenggara	233	14	0	0	247
28	Gorontalo	74	10	0	0	84
29	Sulawesi Barat	81	3	0	0	84
30	Maluku	161	4	0	0	165
31	Maluku Utara	101	1	0	0	102
32	Papua Barat	104	13	1	0	118
33	Papua	294	12	4	0	310
	Lokasi					
1	Perkotaan	2321	43	5	2	2371
2	Perdesaan	6660	146	10	1	6817
	INDONESIA	**8981**	**189**	**15**	**3**	**9188**

Pada tabel 4.1.2. dan 4.1.3. disajikan mengenai jumlah Puskesmas di Indonesia berdasarkan lokasi dan jenisnya. Berdasarkan lokasi dibedakan menjadi Puskesmas Perkotaan dan Puskesmas Perdesaan, sedangkan berdasarkan jenisnya, dibedakan menjadi Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan.

Tabel 4.1.2.
Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Lokasi, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jumlah Puskesmas	Perkotaan		Perdesaan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
	Provinsi					
1	DI Aceh	311	81	26,0	230	74,0
2	Sumatera Utara	506	132	26,1	374	73,9
3	Sumatera Barat	248	90	36,3	158	63,7
4	Riau	195	53	27,2	142	72,8
5	Jambi	171	42	24,6	129	75,4
6	Sumatera Selatan	298	81	27,2	217	72,8
7	Bengkulu	173	40	23,1	133	76,9
8	Lampung	265	62	23,4	203	76,6
9	Bangka Belitung	57	21	36,8	36	63,2
10	Kepulauan Riau	65	32	49,2	33	50,8
11	DKI Jakarta	336	336	100,0	0	0
12	Jawa Barat	1031	278	27,0	753	73,0
13	Jawa Tengah	861	142	16,5	719	83,5
14	DI Yogyakarta	121	24	19,8	97	80,2
15	Jawa Timur	949	166	17,5	783	82,5
16	Banten	206	67	32,5	139	67,5
17	Bali	114	31	27,2	83	72,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	27	18,1	122	81,9
19	Nusa Tenggara Timur	302	29	9,6	273	90,4
20	Kalimantan Barat	233	54	23,2	179	76,8
21	Kalimantan Tengah	176	48	27,3	128	72,7
22	Kalimantan Selatan	217	56	25,8	161	74,2
23	Kalimantan Timur	213	74	34,7	139	65,3
24	Sulawesi Utara	167	47	28,1	120	71,9
25	Sulawesi Tengah	163	26	16,0	137	84,0
26	Sulawesi Selatan	406	79	19,5	327	80,5
27	Sulawesi Tenggara	233	40	17,2	193	82,8
28	Gorontalo	74	15	20,3	59	79,7
29	Sulawesi Barat	81	8	9,9	73	90,1
30	Maluku	161	44	27,3	117	72,7
31	Maluku Utara	101	27	26,7	74	73,3
32	Papua Barat	104	19	18,3	85	81,7
33	Papua	294	50	17,0	244	83,0
	INDONESIA	**8981**	**2321**	**25,8**	**6660**	**74,2**

Dari 8.981 Puskesmas di Indonesia, sebanyak 2.321 atau 25,8% Puskesmas merupakan Puskesmas Perkotaan, dan 6.660 (74,2%) merupakan Puskesmas Perdesaan. Yang dimaksud dengan Puskesmas Perkotaan adalah Puskesmas yang berlokasi di ibukota propinsi, kota, dan ibukota kabupaten, sedangkan Puskesmas yang berlokasi selain di tempat-tempat tersebut, disebut sebagai Puskesmas Perdesaan. Provinsi dengan persentase Puskesmas Perkotaan tertinggi adalah DKI Jakarta (100%), Kepulauan Riau (49,2%), dan Bangka Belitung (36,8%).Provinsi dengan persentase Puskesmas Perdesaan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (90,4%), Sulawesi Barat (90,1%), dan Sulawesi Tengah (84,0%).

Tabel 4.1.3.
Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Jenis Puskesmas, Rifaskes 2011

	Uraian	Jumlah Puskesmas	Perawatan		Non Perawatan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
	Provinsi					
1	DI Aceh	311	126	40,5	185	59,5
2	Sumatera Utara	506	140	27,7	366	72,3
3	Sumatera Barat	248	87	35,1	161	64,9
4	Riau	195	58	29,7	137	70,3
5	Jambi	171	66	38,6	105	61,4
6	Sumatera Selatan	298	97	32,6	201	67,4
7	Bengkulu	173	40	23,1	133	76,9
8	Lampung	265	60	22,6	205	77,4
9	Bangka Belitung	57	20	35,1	37	64,9
10	Kepulauan Riau	65	24	36,9	41	63,1
11	DKI Jakarta	336	46	13,7	290	86,3
12	Jawa Barat	1031	178	17,3	853	82,7
13	Jawa Tengah	861	294	34,1	567	65,9
14	DI Yogyakarta	121	43	35,5	78	64,5
15	Jawa Timur	949	475	50,1	474	49,9
16	Banten	206	50	24,3	156	75,7
17	Bali	114	30	26,3	84	73,7
18	Nusa Tenggara Barat	149	83	55,7	66	44,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	134	44,4	168	55,6
20	Kalimantan Barat	233	92	39,5	141	60,5
21	Kalimantan Tengah	176	55	31,3	121	68,8
22	Kalimantan Selatan	217	47	21,7	170	78,3
23	Kalimantan Timur	213	91	42,7	122	57,3
24	Sulawesi Utara	167	78	46,7	89	53,3
25	Sulawesi Tengah	163	75	46,0	88	54,0
26	Sulawesi Selatan	406	217	53,4	189	46,6
27	Sulawesi Tenggara	233	64	27,5	169	72,5
28	Gorontalo	74	21	28,4	53	71,6
29	Sulawesi Barat	81	37	45,7	44	54,3
30	Maluku	161	58	36,0	103	64,0
31	Maluku Utara	101	29	28,7	72	71,3
32	Papua Barat	104	43	41,3	61	58,7
33	Papua	294	94	32,0	200	68,0
	Lokasi					
1	Perkotaan	2.321	480	20,7	1.841	79,3
2	Perdesaan	6.660	2.572	38,6	4.088	61,4
	INDONESIA	**8981**	**3052**	**34,0**	**5929**	**66,0**

Dari tabel 4.1.3. terlihat bahwa sebanyak 3.052 (34,0%) Puskesmas di Indonesia merupakan Puskesmas Perawatan dan 5.929 (66,0%) Puskesmas Non Perawatan. Provinsi dengan persentase Puskesmas Perawatan tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat (55,7%), Sulawesi Selatan (53,4%), dan Jawa Timur (50,1%). Sedangkan provinsi dengan Puskesmas Non Perawatan tertinggi adalah DKI Jakarta (86,3%), Jawa Barat (82,7%), dan Kalimantan Selatan (78,3%). Menurut lokasi, sebesar 38,6% Puskesmas Perawatan ada di Perdesaan dan 20,7% diantaranya ada di Perkotaan. Sedangkan 79,3% Puskesmas Non Perawatan ada di perkotaan dan 61,4% di perdesaan.

4.2. KARAKTERISTIK PUSKESMAS

4.2.1. Topografi Wilayah Kerja Puskesmas

Berdasarkan topografi wilayah kerja puskesmas, dilakukan analisis menurut keterpencilan, kepulauan, dan perbatasan. Untuk keterpencilan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sangat terpencil, terpencil, dan biasa. Topografi wilayah kerja ini diisi sesuai dengan Surat Keputusan Pemda setempat, dan apabila tidak ada maka digunakan PermenkesNo. 949/Menkes/Per/VIII/2007.

Tabel 4.2.1.1
Persentase Puskesmas menurut Keterpencilan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Keterpencilan			
			% Sangat terpencil	% Terpencil	% Biasa	% TAD*
	Provinsi					
1	DI Aceh	311	18,6	40,8	40,5	0,0
2	Sumatera Utara	506	5,1	19,2	75,7	0,0
3	Sumatera Barat	248	4,4	16,1	79,4	0,0
4	Riau	195	5,6	24,6	69,7	0,0
5	Jambi	171	11,1	20,5	68,4	0,0
6	Sumatera Selatan	298	4,0	15,8	80,2	0,0
7	Bengkulu	173	9,8	24,3	65,9	0,0
8	Lampung	265	6,0	15,5	78,5	0,0
9	Bangka Belitung	57	1,8	7,0	91,2	0,0
10	Kepulauan Riau	65	6,2	41,5	52,3	0,0
11	DKI Jakarta	336	0,6	1,8	97,6	0,0
12	Jawa Barat	1031	0,7	7,4	91,9	0,0
13	Jawa Tengah	861	0,3	2,2	97,3	0,1
14	DI Yogyakarta	121	0,0	0,0	100,0	0,0
15	Jawa Timur	949	0,6	2,0	97,0	0,3
16	Banten	206	1,5	10,2	88,3	0,0
17	Bali	114	0,0	2,6	97,4	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	8,1	17,4	73,8	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	22,5	41,7	35,8	0,0
20	Kalimantan Barat	233	14,6	32,2	53,2	0,0
21	Kalimantan Tengah	176	15,9	37,5	46,6	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	13,4	25,8	60,8	0,0
23	Kalimantan Timur	213	8,5	21,6	70,0	0,0
24	Sulawesi Utara	167	13,8	25,1	61,1	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	16,6	31,3	52,1	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	6,4	11,1	82,3	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	36,1	34,8	29,2	0,0
28	Gorontalo	74	16,2	35,1	48,6	0,0
29	Sulawesi Barat	81	27,2	30,9	42,0	0,0
30	Maluku	161	30,4	28,6	41,0	0,0
31	Maluku Utara	101	38,6	36,6	24,8	0,0
32	Papua Barat	104	40,4	38,5	21,2	0,0
33	Papua	294	47,6	28,2	23,8	0,3
	Lokasi					
1	Perkotaan	2321	2,1	6,0	91,9	0,0
2	Perdesaan	6660	12,0	20,8	67,1	0,1
	INDONESIA	**8981**	**9,5**	**17,0**	**73,5**	**0,1**

*% TAD = persentase Tidak Ada Data

Di dalam Permenkes No. 949/Menkes/Per/VIII/2007 dikatakan bahwa suatu wilayah dikatakan sangat terpencil apabila secara geografis berada di wilayah yang sulit dijangkau, pegunungan, pedalaman dan rawa-rawa, rawan bencana alam baik gempa, longsor maupun gunung berapi, pulau-pulau kecil, atau berada di wilayah perbatasan negara lain, baik darat

maupun di pulau-pulau kecil terluar.Termasuk juga sangat terpencil apabila transportasi yang umum digunakan (darat/air/udara) rutin maksimal 1 (satu) kali seminggu, waktu tempuh memerlukan waktu pulang pergi lebih dari 8 (delapan) jam perjalanan, hanya tersedia transportasi dengan pesawat udara, transportasi yang ada sewaktu-waktu terhalang kondisi iklim/cuaca, dan tidak ada transportasi umum, serta secarasosial ekonomi mengalami kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan.

Dapat dilihat pada tabel 4.2.1.1, terdapat 9,5%Puskesmas termasuk sangat terpencil. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk Puskesmas Sangat Terpencil adalah Papua (47,6%), Papua Barat (40,4%), dan Maluku Utara (38,6%). Sejumlah 17,0% Puskesmas di Indonesia merupakan Puskesmas Terpencil. Persentase provinsi dengan Puskesmas Terpencil yang tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (41,7%), Kepulauan Riau (41,5%), dan Aceh (40,8%).

Tabel 4.2.1.2
Persentase Puskesmas menurut Kepulauandan Perbatasan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jumlah Puskesmas	% Kepulauan	% Perbatasan
	Provinsi			
1	DI Aceh	311	3,5	0,3
2	Sumatera Utara	506	4,0	0,4
3	Sumatera Barat	248	3,6	0,0
4	Riau	195	10,3	0,0
5	Jambi	171	2,3	0,6
6	Sumatera Selatan	298	1,0	0,3
7	Bengkulu	173	1,2	0,0
8	Lampung	265	0,8	0,0
9	Bangka Belitung	57	7,0	0,0
10	Kepulauan Riau	65	84,6	4,6
11	DKI Jakarta	336	3,0	0,0
12	Jawa Barat	1031	1,1	0,0
13	Jawa Tengah	861	1,4	0,0
14	DI Yogyakarta	121	0,0	0,0
15	Jawa Timur	949	1,5	0,0
16	Banten	206	1,0	0,0
17	Bali	114	6,1	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	2,7	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	7,6	3,6
20	Kalimantan Barat	233	3,9	5,6
21	Kalimantan Tengah	176	0,6	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	4,6	0,0
23	Kalimantan Timur	213	8,0	7,0
24	Sulawesi Utara	167	21,6	2,4
25	Sulawesi Tengah	163	10,4	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	4,4	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	21,5	0,9
28	Gorontalo	74	1,4	0,0
29	Sulawesi Barat	81	1,2	1,2
30	Maluku	161	63,4	0,0
31	Maluku Utara	101	53,5	3,0
32	Papua Barat	104	22,1	2,9
33	Papua	294	8,2	11,2
	Lokasi			
1	Perkotaan	2321	4,7	0,4
2	Perdesaan	6660	7,0	1,5
	INDONESIA	**8981**	**6,4**	**1,2**

Pada tabel 4.2.1.2. dapat dilihat bahwa 6,4% Puskesmas di Indonesia merupakan Puskesmas Kepulauan dan 1,2% merupakan Puskesmas Perbatasan. Persentase tertinggi provinsidengan Puskesmas Kepulauan adalah Kepulauan Riau (84,6%), Maluku (63,4%), dan MalukuUtara (53,5%). Sedangkan persentase tertinggi provinsi dengan Puskesmas Perbatasan adalah Papua (11,2%), Kalimantan Timur (7,0%), dan Kalimantan Barat (5,6%).

4.2.2. Tahun Puskesmas Berdiri/ Berfungsi

Konsep Puskesmas diperkenalkan oleh Menteri Kesehatan Pertama, DR. J. Leimena sejak 1968, dan mulai dikembangkan secara nasional pada tahun 1976. Berdasarkan Rifaskes 2011, dari 8981 Puskesmas yang tersebar di 33 Provinsi, dilakukan klasifikasi jumlah Puskesmas menurut tahun berdiri atau berfungsi: sebelum tahun 1976, tahun 1976-1999, dan tahun 2000 sampai 2010, serta yang tidak tahu kapan Puskesmas berdiri/berfungsi, seperti yang terlihat pada tabel 4.2.2.1.

Tabel 4.2.2.1.
Persentase Puskesmas menurut Tahun Berdiri/ Berfungsi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jumlah Puskesmas	Tahun Puskesmas Berdiri/Berfungsi			
			% Tidak Tahu	% <1976	% 1976-1999	% >= 2000
	Provinsi					
1	DI Aceh	311	7,7	9,6	30,2	52,4
2	Sumatera Utara	506	4,7	21,1	47,6	26,5
3	Sumatera Barat	248	4,8	17,7	55,2	22,2
4	Riau	195	3,6	10,3	37,4	48,7
5	Jambi	171	5,3	12,9	52,0	29,8
6	Sumatera Selatan	298	3,0	16,1	51,7	29,2
7	Bengkulu	173	3,5	6,4	52,0	38,2
8	Lampung	265	4,2	17,4	53,2	25,3
9	Bangka Belitung	57	0,0	17,5	61,4	21,1
10	Kepulauan Riau	65	1,5	10,8	29,2	58,5
11	DKI Jakarta	336	15,5	23,2	53,9	7,4
12	Jawa Barat	1031	4,0	18,5	64,6	12,9
13	Jawa Tengah	861	7,3	25,2	59,5	8,0
14	DI Yogyakarta	121	21,5	23,1	43,8	11,6
15	Jawa Timur	949	6,3	30,6	56,9	6,2
16	Banten	206	1,9	16,0	53,4	28,6
17	Bali	114	1,8	21,9	67,5	8,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	18,1	16,1	38,3	27,5
19	Nusa Tenggara Timur	302	5,6	18,5	43,4	32,5
20	Kalimantan Barat	233	2,1	15,0	57,5	25,3
21	Kalimantan Tengah	176	9,1	10,2	46,0	34,7
22	Kalimantan Selatan	217	7,8	15,2	51,2	25,8
23	Kalimantan Timur	213	4,2	12,7	47,4	35,7
24	Sulawesi Utara	167	3,6	22,2	34,1	40,1
25	Sulawesi Tengah	163	3,1	11,0	60,7	25,2
26	Sulawesi Selatan	406	3,2	21,7	49,5	25,6
27	Sulawesi Tenggara	233	6,9	9,0	37,8	46,4
28	Gorontalo	74	1,4	20,3	27,0	51,4
29	Sulawesi Barat	81	3,7	6,2	42,0	48,1
30	Maluku	161	6,8	11,2	45,3	36,6
31	Maluku Utara	101	3,0	6,9	29,7	60,4
32	Papua Barat	104	10,6	7,7	31,7	50,0
33	Papua	294	11,6	8,5	34,0	45,9
	Lokasi					
1	Perkotaan	2321	7,2	18,2	54,0	20,6
2	Perdesaan	6660	5,7	18,3	49,7	26,4
	INDONESIA	**8.981**	**6,1**	**18,3**	**50,8**	**24,9**

Pada Tabel 4.2.2.1 terlihat bahwa 18,3% Puskesmas berdiri atau berfungsi sebelum tahun 1976, 50,8% Puskesmas yang berdiri/berfungsi pada kurun waktu 1976-1999, dan 24,9% Puskesmas yang berdiri/berfungsi tahun 2000-an, dan terdapat 6,1% Puskesmas yang tidak memberi jawaban kapan Puskesmasnya berdiri/berfungsi. Persentase provinsi tertinggi yang Puskesmasnya berdiri/berfungsi antara 1976-1999 adalah Bali (67,5%), Jawa Barat (64,6%), dan Bangka Belitung (61,4%). Sedangkan Maluku Utara (60,4%), Kepulauan Riau (58,5%), dan Aceh (52,4%) merupakan provinsi dengan persentase tertinggi dengan Puskesmas yang berdiri/berfungsi setelah tahun 2000.

4.2.3. Fasilitas PONED di Puskesmas

Pada tabel 4.2.3.1. dapat dilihat mengenai fasilitas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar) di Puskesmas.

Tabel 4.2.3.1.
Persentase Puskesmas dengan Fasilitas PONED menurut Jenis Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Perawatan		Puskesmas Non Perawatan	
			% PONED	% Non PONED	% PONED	% Non PONED
	Provinsi					
1	DI Aceh	311	12,2	28,3	2,9	56,6
2	Sumatera Utara	506	12,5	15,2	1,0	71,3
3	Sumatera Barat	248	20,6	14,5	3,6	61,3
4	Riau	195	11,3	18,5	4,1	66,2
5	Jambi	171	21,6	17	1,2	60,2
6	Sumatera Selatan	298	14,8	17,8	2,0	65,4
7	Bengkulu	173	12,7	10,4	1,2	75,7
8	Lampung	265	12,5	10,2	3,4	74,0
9	Bangka Belitung	57	14	21,1	0,0	64,9
10	Kepulauan Riau	65	23,1	13,8	10,8	52,3
11	DKI Jakarta	336	6,3	7,4	4,5	81,8
12	Jawa Barat	1031	10,8	6,5	3,6	79,1
13	Jawa Tengah	861	17,7	16,5	2,1	63,8
14	DI Yogyakarta	121	22,3	13,2	0,8	63,6
15	Jawa Timur	949	24,3	25,7	1,9	48,1
16	Banten	206	18,4	5,8	4,9	70,9
17	Bali	114	23,7	2,6	2,6	71,1
18	Nusa Tenggara Barat	149	32,9	22,8	4,7	39,6
19	Nusa Tenggara Timur	302	19,5	24,8	2,3	53,3
20	Kalimantan Barat	233	13,3	26,2	0,4	60,1
21	Kalimantan Tengah	176	13,6	17,6	1,1	67,6
22	Kalimantan Selatan	217	12,4	9,2	1,8	76,5
23	Kalimantan Timur	213	16,4	26,3	3,8	53,5
24	Sulawesi Utara	167	15,6	31,1	0,0	53,3
25	Sulawesi Tengah	163	33,1	12,9	0,6	53,4
26	Sulawesi Selatan	406	18,5	35	1,0	45,6
27	Sulawesi Tenggara	233	15,9	11,6	2,1	70,4
28	Gorontalo	74	21,6	6,8	2,7	68,9
29	Sulawesi Barat	81	18,5	27,2	3,7	50,6
30	Maluku	161	9,3	26,7	1,2	62,7
31	Maluku Utara	101	9,9	18,8	5,0	66,3
32	Papua Barat	104	6,7	34,6	3,8	54,8
33	Papua	294	8,8	23,1	4,8	63,3
	Lokasi					
1	Perkotaan	2321	11,2	9,5	3,7	75,6
2	Perdesaan	6660	17,8	20,8	2,1	59,2
	INDONESIA	**8981**	**16,1**	**17,9**	**2,5**	**63,5**

Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan fasilitas pelayanan obstetrik (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar. Pada umumnya, Puskesmas PONED mempunyai fasilitas rawat inap, namun ternyata menurut hasil Rifaskes 2011, terdata bahwa fasilitas PONED juga dimiliki oleh 2,5% Puskesmas Non Perawatan, sedangkan Puskesmas Perawatan yang mempunyai fasilitas PONED hanya terdapat pada 16,1% Puskesmas Perawatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Persentase tertinggi provinsi yang mempunyai Puskesmas Perawatan dengan fasilitas PONED adalah Sulawesi Tengah (33,1%), Nusa Tenggara Barat (32,9%), dan Jawa Timur (24,3%). Sedangkan Provinsi dengan persentase terendah untuk Puskesmas Perawatan dengan fasilitas PONED adalah DKI Jakarta (6,3%), Papua Barat (6,7%), dan Papua (8,8%). Provinsi dengan persentase tertinggi yang memiliki Puskesmas Non Perawatan dengan fasilitas PONED adalah Kepulauan Riau (10,8%), Maluku Utara (5,0%), dan Banten (4,9%).

4.3. SUMBER DAYA MANUSIA

4.3.1. SDM PUSKESMAS

Puskesmas merupakan unit pelaksana pembangunan kesehatan terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang ada. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan di Puskesmas adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan professional di bidang kesehatan. Selain itu dalam memberikan pelayanan kesehatan perlu pula dipertimbangkan distribusi tenaga kesehatan tersebut.

Analisis deskriptif tenaga kesehatan di Puskesmas dari hasil Rifaskes 2011 ditujukan untuk mengetahui ketersediaan tenaga Puskesmas dan penyebarannya di 33 Provinsi. Rifaskes 2011 mengunjungi seluruh Puskesmas yang ada di seluruh Provinsi. Analisis dilakukan pada 8981 Puskesmas dari 9188 Puskesmas yang dikunjungi di 497 kabupaten. Analisis disepakati hanya pada Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010. Perlu diperhatikan pula, tidak seluruh Puskesmas (8981) mempunyai informasi lengkap untuk masing-masing variabel.

Analisis dilakukan pada seluruh tenaga yang ada di Puskesmas, yang dikelompokkan menjadi: 1) Tenaga Medis: Dokter dan Dokter Gigi; 2) Tenaga Keperawatan: Perawat, Bidan, dan Perawat Gigi; 3) Tenaga Kefarmasian: Apoteker dan Teknis Kefarmasian; 4) Tenaga Gizi; 5) Sanitarian; 6) Tenaga Penyuluh Kesehatan/Promkes; 7) Tenaga Rekam Medis; 8) Analis Kesehatan; 9)Tenaga Kesehatan Lain; dan 10) Tenaga Non Kesehatan: Tenaga Administrasi/Pekarya. Untuk setiap jenis tenaga dilihat keberadaanya menurut klasifikasi Puskesmas, jumlah, kisaran, dan rata-rata per Puskesmas. Untuk menilai mutu dan profesionalisme, dikaji masing-masing tenaga berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, serta status kepegawaian (PNS, PTT, Penugasan Khusus, Honorer, Lainnya). Dilakukan juga analisis tentang penempatan / rotasi dan tunjangan/insentif Daerah.

4.3.1.1. Tenaga Medis

Untuk tenaga medis, analisis dilakukan berdasarkan keberadaan Dokter dan Dokter Gigi. Untuk keberadaan Dokter (Tabel 4.3.1.1.1.a) dilakukan berdasarkan 8980 Puskesmas (n) dari 8981 Puskesmas (N). Ada 1 Puskesmas yang tidak ada informasi keberadaan dokter, yaitu 1 Puskesmas di Sumatera Utara. Hampir seluruh Puskesmas ada tenaga dokter (95,8%), dan masih ada 4,2 persen Puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter.

Tabel 4.3.1.1.1.a
Keberadaan dan Distribusi Tenaga Dokter, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Keberadaan Dokter						
		N	n	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	307	98,7	4	1,3	693	0-8	2,23
2	Sumatera Utara	522	505	483	95,6	22	4,4	1372	0-20	2,72
3	Sumatera Barat	253	248	245	98,8	3	1,2	537	0-7	2,17
4	Riau	202	195	195	100,0	0	,0	548	1-9	2,81
5	Jambi	174	171	167	97,7	4	2,3	335	0-6	1,96
6	Sumatera Selatan	305	298	274	91,9	24	8,1	455	0-7	1,53
7	Bengkulu	174	173	167	96,5	6	3,5	271	0-5	1,57
8	Lampung	267	265	265	100,0	0	,0	463	1-6	1,75
9	Bangka Belitung	58	57	57	100,0	0	,0	144	1-6	2,53
10	Kepulauan Riau	65	65	65	100,0	0	,0	305	1-14	4,69
11	DKI Jakarta	337	336	332	98,8	4	1,2	755	0-27	2,25
12	Jawa Barat	1042	1031	1010	98,0	21	2,0	1964	0-12	1,90
13	Jawa Tengah	867	861	856	99,4	5	,6	1942	0-10	2,26
14	DI Yogyakarta	121	121	121	100,0	0	,0	381	1-9	3,15
15	Jawa Timur	949	949	941	99,2	8	,8	1838	0-11	1,94
16	Banten	219	206	202	98,1	4	1,9	452	0-10	2,19
17	Bali	114	114	114	100,0	0	,0	391	1-12	3,43
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	147	98,7	2	1,3	242	0-7	1,62
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	288	95,4	14	4,6	464	0-11	1,54
20	Kalimantan Barat	234	233	201	86,3	32	13,7	274	0-7	1,18
21	Kalimantan Tengah	180	176	166	94,3	10	5,7	259	0-4	1,47
22	Kalimantan Selatan	223	217	214	98,6	3	1,4	434	0-5	2,00
23	Kalimantan Timur	218	213	213	100,0	0	,0	507	1-10	2,38
24	Sulawesi Utara	173	167	162	97,0	5	3,0	466	0-9	2,79
25	Sulawesi Tengah	168	163	145	89,0	18	11,0	225	0-5	1,38
26	Sulawesi Selatan	418	406	387	95,3	19	4,7	727	0-10	1,79
27	Sulawesi Tenggara	247	233	211	90,6	22	9,4	308	0-5	1,32
28	Gorontalo	84	74	69	93,2	5	6,8	140	0-10	1,89
29	Sulawesi Barat	84	81	77	95,1	4	4,9	116	0-4	1,43
30	Maluku	165	161	146	90,7	15	9,3	210	0-4	1,30
31	Maluku Utara	102	101	86	85,1	15	14,9	133	0-5	1,32
32	Papua Barat	118	104	87	83,7	17	16,3	150	0-11	1,44
33	Papua	310	294	200	68,0	94	32,0	375	0-9	1,28
	INDONESIA	9188	8980	8600	95.8	380	4.2	17876	0-27	1.99

Puskesmas tanpa keberadaan Dokter masih dominan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua dan Papua Barat sampai lebih dari 16 persen dari jumlah Puskesmas yang ada didaerah tersebut. Beberapa provinsi dimana 10-15 persen dari Puskesmas masih tidak ada dokter dijumpai di Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Puskesmas yang tidak ada tenaga Dokter seharusnya tidak terjadi jika distribusinya bisa merata di seluruh Puskesmas, dari tabel 4.3.1.1.1.a di atas dapat dilihat kisaran tenaga dokter di Puskesmas bervariasi dari tidak ada sama sekali sampai dijumpai ada 27 tenaga dokter di Puskesmas. Seperti Puskesmas di DKI, misalnya, masih ada 4 Puskesmas yang tidak ada tenaga dokter, dan ada Puskesmas dengan 27 tenaga dokter. Kisaran keberadaan tenaga

dokter menurut Provinsi sangat bervariasi dari 0-4 per Puskesmas sampai 0-27 per Puskesmas. Selanjutnya pada tabel yang sama bisa dilihat juga ada beberapa provinsi seperti: Riau, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, Di Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timur, dimana seluruh Puskesmas sudah memiliki tenaga dokter. Untuk rata-rata jumlah tenaga Dokter per Puskesmas bisa dilihat pada Gambar 4.3.1.1.1.a yang bervariasi dari 1,18 di Kalimantan Barat dan 4,7 di Kepulauan Riau, dengan rata-rata nasional 1,99 dokter per Puskesmas.

Gambar 4.3.1.1.1.b
Rata-rata Jumlah Tenaga Dokter per Puskesmas, Rifaskes 2011

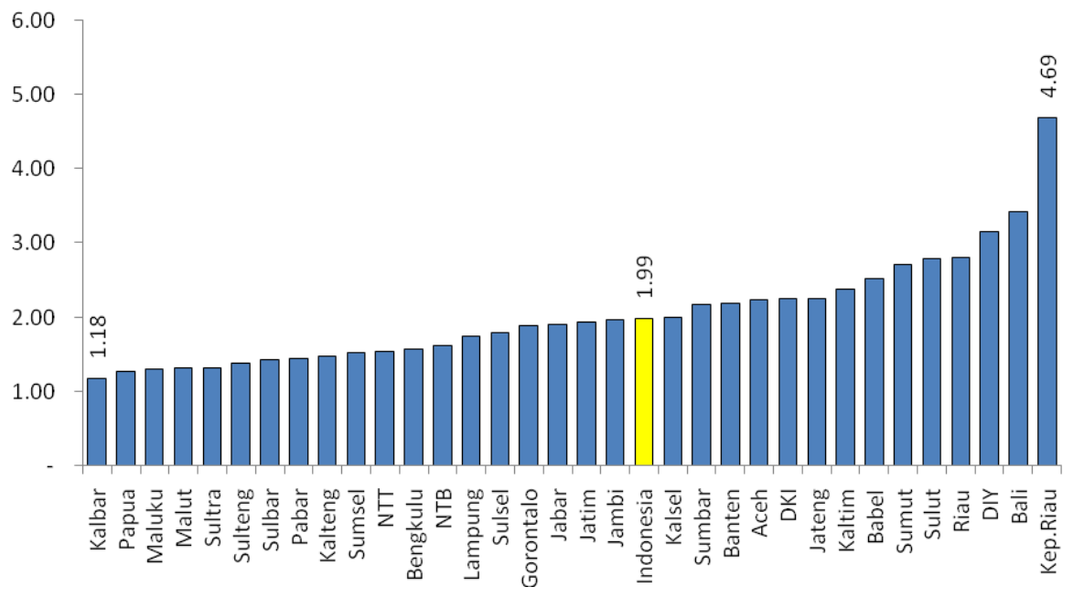

Kualitas tenaga dokter Puskesmas dikaji berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Dapat dilihat pada tabel 4.3.1.1.2 dimana masih sebagian besar pendidikan terakhir adalah dari Dokter umum sudah ada yang menjadi Dokter Spesialis, dan dari lulusan S2-Kesehatan dan S2-Non Kesehatan. Angka nasional, dari 17876 dokter yang tersebar di Puskesmas, 96,6 persen adalah lulusan Dokter umum, 1,0 persen dokter spesialis, 2,0 persen dari S2-Kesehatan, dan 0,4 persen lulusan S2 – Non Kesehatan. Jumlah dokter spesialis terbanyak yang bekerja di Puskesmas ada di provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Berdasarkan status ketenagaan (Tabel 4.3.1.1.2.), sebagian besar dokter Puskesmas adalah PNS (79,3%), dan 17,9 persen adalah PTT, dan selebihnya (2,8%) adalah honorer. Untuk Provinsi di wilayah Indonesia Timur, status ketenagaan Puskesmas lebih banyak tenaga PTT dari PNS seperti di Provinsi NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat, dan juga di Sulawesi Tenggara (Tabel 4.3.1.1.3.).

Tabel 4.3.1.1.2

Tenaga Dokter di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir			
		dr umum	dr. Spesialis	S2-Kes	S2-Non Kes
1	Aceh	686	1	6	0
2	Sumatera Utara	1336	17	16	3
3	Sumatera Barat	533	1	3	0
4	Riau	543	3	0	2
5	Jambi	332	1	2	0
6	Sumatera Selatan	419	18	18	0
7	Bengkulu	270	0	0	1
8	Lampung	454	4	4	1
9	Bangka Belitung	143	0	1	0
10	Kepulauan Riau	301	3	1	0
11	DKI Jakarta	698	24	29	4
12	Jawa Barat	1885	22	51	6
13	Jawa Tengah	1849	11	64	18
14	DI Yogyakarta	369	2	10	0
15	Jawa Timur	1752	33	35	18
16	Banten	432	2	13	5
17	Bali	362	3	25	1
18	Nusa Tenggara Barat	239	3	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	459	5	0	0
20	Kalimantan Barat	271	2	1	0
21	Kalimantan Tengah	255	1	3	0
22	Kalimantan Selatan	431	0	2	1
23	Kalimantan Timur	499	2	5	1
24	Sulawesi Utara	453	2	11	0
25	Sulawesi Tengah	223	0	2	0
26	Sulawesi Selatan	672	7	42	6
27	Sulawesi Tenggara	304	0	4	0
28	Gorontalo	129	7	4	0
29	Sulawesi Barat	113	0	3	0
30	Maluku	209	1	0	0
31	Maluku Utara	130	1	2	0
32	Papua Barat	149	1	0	0
33	Papua	373	1	1	0
	INDONESIA	**17273**	**178**	**358**	**67**

Tabel 4.3.1.1.3.
Tenaga Dokter di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan		
		PNS/CPNS	PTT	Honorer
1	Aceh	466	205	22
2	Sumatera Utara	1238	123	11
3	Sumatera Barat	475	61	1
4	Riau	477	56	15
5	Jambi	261	67	7
6	Sumatera Selatan	372	74	9
7	Bengkulu	191	78	2
8	Lampung	388	74	1
9	Bangka Belitung	113	28	3
10	Kepulauan Riau	187	104	14
11	DKI Jakarta	659	4	92
12	Jawa Barat	1656	294	14
13	Jawa Tengah	1878	42	22
14	DI Yogyakarta	360	5	16
15	Jawa Timur	1606	78	154
16	Banten	400	47	5
17	Bali	367	15	9
18	Nusa Tenggara Barat	188	45	9
19	Nusa Tenggara Timur	96	366	2
20	Kalimantan Barat	171	103	0
21	Kalimantan Tengah	174	85	0
22	Kalimantan Selatan	335	93	6
23	Kalimantan Timur	382	92	33
24	Sulawesi Utara	370	96	0
25	Sulawesi Tengah	131	93	1
26	Sulawesi Selatan	641	68	18
27	Sulawesi Tenggara	128	177	3
28	Gorontalo	85	46	9
29	Sulawesi Barat	66	50	0
30	Maluku	64	146	0
31	Maluku Utara	72	61	0
32	Papua Barat	39	109	2
33	Papua	139	221	15
	INDONESIA	**14175**	**3206**	**495**

Tenaga Medis lainnya yang bekerja di Puskesmas adalah Dokter Gigi, yang dikaji dari 8980 dari 8981 Puskesmas. Seperti terlihat pada tabel 4.3.1.1.4.a, terdapat 60,6 persen Puskesmas yang memiliki tenaga Dokter Gigi, dan masih terdapat 39,4 persen Puskesmas yang tidak memiliki tenaga Dokter Gigi. Jika diperhatikan dari gambar 4.3.1.1.4.b, dapat dilihat provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi dimana persentase tertinggi Puskesmas tidak ada tenaga Dokter Gigi (80,8%), sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan DI Yogyakarta (1,6%) yang tidak ada tenaga Dokter Gigi.

Jumlah tenaga Dokter Gigi yang terekam bekerja di Puskesmas adalah 7158 orang yang tersebar di Puskesmas, dengan kisaran 0 – 20, atau dengan rata-rata per Puskesmas kurang dari 1 Dokter Gigi per Puskesmas. Provinsi DKI menunjukkan terdapat 20 Dokter Gigi per Puskesmas, walaupun dijumpai juga Puskesmas yang tidak ada Dokter Gigi.

Tabel 4.3.1.1.4.a

Keberadaan dan Distribusi Tenaga Dokter Gigi Provinsi, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Keberadaan Dokter Gigi						
		N	n	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	150	48,2	161	51,8	161	0-3	0,52
2	Sumatera Utara	522	505	342	67,7	163	32,3	551	0-9	1,09
3	Sumatera Barat	253	248	210	84,7	38	15,3	272	0-5	1,10
4	Riau	202	195	157	80,5	38	19,5	226	0-4	1,16
5	Jambi	174	171	101	59,1	70	40,9	112	0-2	0,65
6	Sumatera Selatan	305	298	98	32,9	200	67,1	102	0-2	0,34
7	Bengkulu	174	173	65	37,6	108	62,4	67	0-2	0,39
8	Lampung	267	265	118	44,5	147	55,5	136	0-4	0,51
9	Bangka Belitung	58	57	44	77,2	13	22,8	48	0-2	0,84
10	Kepulauan Riau	65	65	57	87,7	8	12,3	91	0-4	1,40
11	DKI Jakarta	337	336	317	94,3	19	5,7	576	0-20	1,71
12	Jawa Barat	1042	1031	619	60,0	412	40,0	790	0-5	0,77
13	Jawa Tengah	867	861	631	73,3	230	26,7	745	0-4	0,87
14	DI Yogyakarta	121	121	119	98,3	2	1,7	189	0-3	1,56
15	Jawa Timur	949	949	795	83,8	154	16,2	1013	0-5	1,07
16	Banten	219	206	153	74,3	53	25,7	247	0-5	1,20
17	Bali	114	114	111	97,4	3	2,6	222	0-7	1,95
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	96	64,4	53	35,6	104	0-2	0,70
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	136	45,0	166	55,0	148	0-2	0,49
20	Kalimantan Barat	234	233	66	28,3	167	71,7	68	0-2	0,29
21	Kalimantan Tengah	180	176	47	26,7	129	73,3	53	0-2	0,30
22	Kalimantan Selatan	223	217	124	57,1	93	42,9	142	0-2	0,65
23	Kalimantan Timur	218	213	162	76,1	51	23,9	232	0-5	1,09
24	Sulawesi Utara	173	167	32	19,2	135	80,8	33	0-2	0,20
25	Sulawesi Tengah	168	163	57	35,0	106	65,0	61	0-2	0,37
26	Sulawesi Selatan	418	406	287	70,7	119	29,3	385	0-4	0,95
27	Sulawesi Tenggara	247	233	104	44,6	129	55,4	114	0-2	0,49
28	Gorontalo	84	74	24	32,4	50	67,6	24	0-1	0,32
29	Sulawesi Barat	84	81	45	55,6	36	44,4	50	0-2	0,62
30	Maluku	165	161	62	38,5	99	61,5	67	0-2	0,42
31	Maluku Utara	102	101	28	27,7	73	72,3	33	0-4	0,33
32	Papua Barat	118	104	25	24,0	79	76,0	32	0-4	0,31
33	Papua	310	294	57	19,4	237	80,6	64	0-3	0,22
	INDONESIA	9188	8980	5439	60.6	3541	39.4	7158	0-20	0.80

Gambar 4.3.1.1.4.b
Persentase Puskesmas yang Tidak ada Tenaga Dokter Gigi, Rifaskes 2011

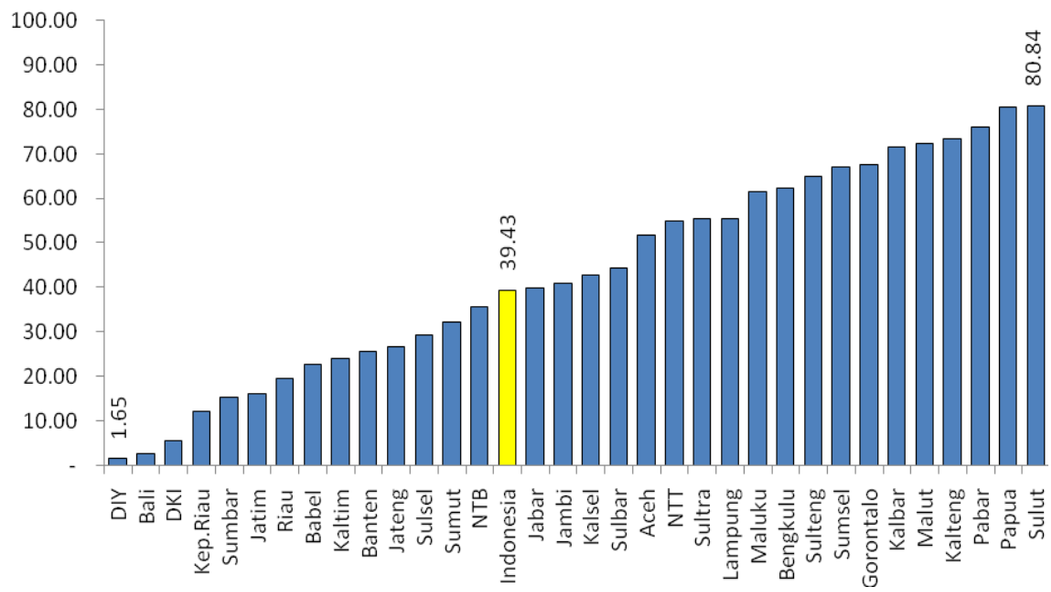

Analisis yang sama juga dilakukan untuk kualitas tenaga Dokter Gigi yang dilihat dari pendidikan terakhir dan status ketenagaan. Dari 7158 tenaga Dokter Gigi yang bekerja di Puskesmas, sebagian besar pendidikan terakhir mereka adalah Dokter Gigi (96,2%), dan terdapat 1,8 persen dengan pendidikan terakhir sudah Drg. Spesialis; dan 2,0 persen dengan pendidikan terakhir S2 keatas, dan bahkan dijumpai yang sudah S3. Jumlah terbanyak untuk dokter gigi spesialis dijumpai di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan jumlah Dokter Gigi dengan pendidikan terakhir S2 Kesehatan terbanyak dijumpai di provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk status ketenagaan, dari 7158 tenaga dokter gigi yang terekam bekerja di Puskesmas, 85,6 persen berstatus PNS, 12,8 persen adalah PTT, dan selebihnya (1,6%) adalah yang berstatus honorer. Gambaran yang hampir sama seperti tenaga dokter, untuk dokter gigi dimana status ketenagaan PTT lebih banyak dari PNS adalah di Provinsi NTT, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Tabel 4.3.1.1.5.
Tenaga Dokter Gigi di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir				
		drg	drg. Spesialis	S2-Kes	S2-Non Kes	S3
1	Aceh	154	4	3	0	0
2	Sumatera Utara	542	6	3	0	0
3	Sumatera Barat	269	1	0	1	1
4	Riau	224	0	1	1	0
5	Jambi	110	0	1	0	1
6	Sumatera Selatan	96	5	1	0	0
7	Bengkulu	64	2	0	1	0
8	Lampung	134	2	0	0	0
9	Bangka Belitung	47	0	1	0	0
10	Kepulauan Riau	88	2	1	0	0
11	DKI Jakarta	553	16	5	2	0
12	Jawa Barat	762	14	14	0	0
13	Jawa Tengah	703	20	17	5	0
14	DI Yogyakarta	174	7	8	0	0
15	Jawa Timur	970	27	12	4	0
16	Banten	232	4	9	2	0
17	Bali	211	2	8	1	0
18	Nusa Tenggara Barat	104	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	144	4	0	0	0
20	Kalimantan Barat	65	1	2	0	0
21	Kalimantan Tengah	53	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	141	0	0	1	0
23	Kalimantan Timur	226	4	2	0	0
24	Sulawesi Utara	32	1	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	58	1	2	0	0
26	Sulawesi Selatan	357	2	24	2	0
27	Sulawesi Tenggara	110	1	3	0	0
28	Gorontalo	20	3	1	0	0
29	Sulawesi Barat	49	0	1	0	0
30	Maluku	65	2	0	0	0
31	Maluku Utara	32	1	0	0	0
32	Papua Barat	32	0	0	0	0
33	Papua	63	0	0	1	0
	INDONESIA	**6884**	**132**	**119**	**21**	**2**

Tabel 4.3.1.1.6.
Tenaga Dokter Gigi di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan		
		PNS/CPNS	PTT	Honorer
1	Aceh	101	59	1
2	Sumatera Utara	515	33	3
3	Sumatera Barat	244	27	1
4	Riau	195	30	1
5	Jambi	83	29	0
6	Sumatera Selatan	88	13	1
7	Bengkulu	42	25	0
8	Lampung	116	20	0
9	Bangka Belitung	35	10	3
10	Kepulauan Riau	72	19	0
11	DKI Jakarta	558	1	17
12	Jawa Barat	722	62	6
13	Jawa Tengah	736	7	2
14	DI Yogyakarta	181	8	0
15	Jawa Timur	909	48	56
16	Banten	233	13	1
17	Bali	203	16	3
18	Nusa Tenggara Barat	87	17	0
19	Nusa Tenggara Timur	40	108	0
20	Kalimantan Barat	49	19	0
21	Kalimantan Tengah	39	14	0
22	Kalimantan Selatan	96	44	2
23	Kalimantan Timur	190	36	6
24	Sulawesi Utara	28	5	0
25	Sulawesi Tengah	38	22	1
26	Sulawesi Selatan	353	28	4
27	Sulawesi Tenggara	41	70	3
28	Gorontalo	10	13	1
29	Sulawesi Barat	39	11	0
30	Maluku	16	51	0
31	Maluku Utara	13	20	0
32	Papua Barat	17	14	1
33	Papua	37	27	0
	INDONESIA	**6126**	**919**	**113**

4.3.1.2. Tenaga Keperawatan

Yang dimaksud tenaga keperawatan di Puskesmas terdiri dari tenaga perawat, bidan, dan perawat gigi. Tenaga perawat dan bidan merupakan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbanyak diantara jenis tenaga kesehatan lainnya. Hampir seluruh Puskesmas memiliki tenaga perawat dan bidan.

Seperti terlihat pada tabel 4.3.1.2.1 terdapat 105.699 perawat yang tersebar di seluruh Indonesia, dan ada 1 Puskesmas yang tidak ada data (Sumatera Utara). Dari jumlah 8980 Puskesmas yang dapat memberikan jumlah perawat, hanya 25 Puskesmas (0,3%) yang tidak ada tenaga perawat.

Tabel 4.3.1.2.1
Keberadaan dan distribusi Tenaga Perawat di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Perawat						
		N	n	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	310	99,7	1	0,3	6775	0-85	21,78
2	Sumatera Utara	522	505	504	99,8	1	0,2	6261	0-96	12,40
3	Sumatera Barat	253	248	248	100,0	0	0,0	2726	2-41	10,99
4	Riau	202	195	194	99,5	1	0,5	2958	0-62	15,17
5	Jambi	174	171	168	98,2	3	1,8	2208	0-40	12,91
6	Sumatera Selatan	305	298	297	99,7	1	0,3	4986	0-63	16,73
7	Bengkulu	174	173	173	100,0	0	0,0	1926	3-31	11,13
8	Lampung	267	265	264	99,6	1	0,4	3114	0-32	11,75
9	Bangka Belitung	58	57	57	100,0	0	0,0	937	7-35	16,44
10	Kepulauan Riau	65	65	65	100,0	0	0,0	986	6-44	15,17
11	DKI Jakarta	337	336	331	98,5	5	1,5	1263	0-52	3,76
12	Jawa Barat	1042	1031	1028	99,7	3	0,3	9319	0-37	9,04
13	Jawa Tengah	867	861	861	100,0	0	0,0	7699	2-47	8,94
14	DI Yogyakarta	121	121	121	100,0	0	0,0	882	3-19	7,29
15	Jawa Timur	949	949	948	99,9	1	0,1	11152	0-51	11,75
16	Banten	219	206	206	100,0	0	0,0	1838	1-27	8,92
17	Bali	114	114	114	100,0	0	0,0	1203	4-33	10,55
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	148	99,3	1	0,7	2781	0-81	18,66
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	302	100,0	0	0,0	4064	1-95	13,46
20	Kalimantan Barat	234	233	233	100,0	0	0,0	2833	1-32	12,16
21	Kalimantan Tengah	180	176	176	100,0	0	0,0	2326	2-31	13,22
22	Kalimantan Selatan	223	217	217	100,0	0	0,0	2031	2-30	9,36
23	Kalimantan Timur	218	213	213	100,0	0	0,0	2720	2-43	12,77
24	Sulawesi Utara	173	167	167	100,0	0	0,0	2222	2-32	13,31
25	Sulawesi Tengah	168	163	163	100,0	0	0,0	2557	2-43	15,69
26	Sulawesi Selatan	418	406	406	100,0	0	0,0	6176	1-97	15,21
27	Sulawesi Tenggara	247	233	232	99,6	1	0,4	2984	0-45	12,81
28	Gorontalo	84	74	73	98,6	1	1,4	630	0-25	8,51
29	Sulawesi Barat	84	81	81	100,0	0	0,0	1301	4-55	16,06
30	Maluku	165	161	161	100,0	0	0,0	1881	1-49	11,68
31	Maluku Utara	102	101	101	100,0	0	0,0	920	1-27	9,11
32	Papua Barat	118	104	104	100,0	0	0,0	1399	1-76	13,45
33	Papua	310	294	289	98,3	5	1,7	2641	0-55	8,98
	INDONESIA	9188	8980	8955	99.7	25	0.3	105699	0-97	11.77

Sedikit janggal, di DKI Jakarta, masih ada 5 Puskesmas yang tidak ada perawat. Selanjutnya dengan kisaran jumlah 1 sampai 3 Puskesmas yang tidak ada tenaga perawat tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua. Rata-rata jumlah perawat per Puskesmas untuk angka nasional adalah 11,77, dijumpai angka rata-rata terendah di DKI Jakarta (3,76/Puskesmas), dan tertinggi di Aceh (21,78/Puskesmas). Kisaran terlebar untuk jumlah Perawat di Puskesmas dijumpai di Sulawesi Selatan (1-97), Sumatera Utara (0-96), dan NTT (1-95). Jumlah kisaran perawat per Puskesmas yang cukup baik (tidak terlalu lebar), dijumpai di DI Yogyakarta (3-19), Bangka Belitung (7-35), dan Bali (4-33).

Kualitas tenaga perawat di Puskesmas yang dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.3.1.2.2. Untuk gambaran nasional, 66,2 persen perawat dengan pendidikan terakhir dari Akademi perawat; 25,5 persen lulusan SPR/SPK; 1,3 persen dari Akademi Kebidanan, dan 7,0 persen lulusan S1 keatas (SKP, S1 Kesehatan/Non Kesehatan, dan S2 Kesehatan/Non Kesehatan).

Tabel 4.3.1.2.2.a

Tenaga Perawat di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir							
		SPR/SPK	Akper	Akbid	SKP	S1 Kes Lain	S1 Non Kes	S2 Kes	S2 Non Kes
1	Aceh	1979	4495	127	100	69	5	0	0
2	Sumatera Utara	2283	3588	95	184	99	6	5	1
3	Sumatera Barat	660	1855	25	148	33	3	1	1
4	Riau	610	2168	52	72	50	5	1	0
5	Jambi	465	1565	18	87	66	4	3	0
6	Sumatera Selatan	892	3625	94	193	171	8	0	3
7	Bengkulu	457	1158	7	156	131	15	0	2
8	Lampung	601	2100	32	214	151	7	8	1
9	Bangka Belitung	299	606	0	20	11	0	0	1
10	Kepulauan Riau	142	785	0	45	12	2	0	0
11	DKI Jakarta	366	784	29	57	24	3	0	0
12	Jawa Barat	2056	6252	107	551	306	18	23	6
13	Jawa Tengah	1323	5585	104	468	191	6	18	4
14	DI Yogyakarta	259	532	18	57	14	1	0	1
15	Jawa Timur	1435	8765	179	598	146	13	15	1
16	Banten	383	1177	46	65	128	27	7	5
17	Bali	523	602	31	36	8	2	0	1
18	Nusa Tenggara Barat	698	1776	37	201	61	3	5	0
19	Nusa Tenggara Timur	1359	2560	12	92	38	2	1	0
20	Kalimantan Barat	1163	1569	13	49	32	7	0	0
21	Kalimantan Tengah	790	1367	39	84	40	5	0	1
22	Kalimantan Selatan	413	1416	28	119	49	3	1	2
23	Kalimantan Timur	802	1810	6	30	65	5	2	0
24	Sulawesi Utara	890	1150	7	156	13	5	1	0
25	Sulawesi Tengah	858	1584	14	39	53	8	1	0
26	Sulawesi Selatan	764	4570	106	486	224	7	18	1
27	Sulawesi Tenggara	809	1887	54	81	122	27	4	0
28	Gorontalo	185	384	10	17	23	2	8	1
29	Sulawesi Barat	262	967	5	38	25	0	4	0
30	Maluku	975	845	16	26	11	8	0	0
31	Maluku Utara	232	596	42	32	16	2	0	0
32	Papua Barat	590	738	24	31	15	1	0	0
33	Papua	1451	1078	36	25	47	2	2	0
	INDONESIA	26974	69939	1413	4557	2444	212	128	32

Kualitas perawat, dapat diperhatikan dari perawat dengan pendidikan terakhir Sarjana Keperawatan (SKP), dan lulusan S1-Kesehatan lain, bahkan sampai S2 Kesehatan/Non Kesehatan. Pada gambar 4.3.1.2.2.b dapat dilihat, perawat di Puskesmas dengan pendidikan terakhir di jenjang S1 keatas yang terbanyak dijumpai di Bengkulu (15,8%), dan terendah di Maluku (2,4%).

Gambar 4.3.1.2.2.b
Persentase Perawat dengan Pendidikan Terakhir Sarjana (SKP-S1-S2), Rifaskes 2011

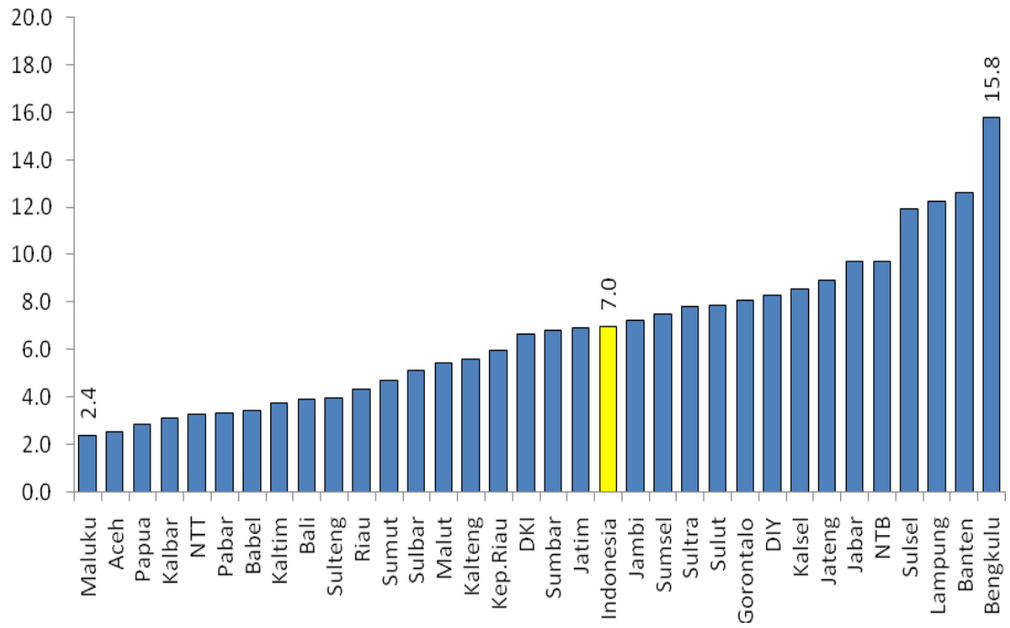

Untuk status ketenagaan perawat di Puskesmas, sebagian besar adalah PNS (73,7%). Akan tetapi yang berstatus honorer, masih cukup tinggi (25,5%). Pada tabel 4.3.1.2.3.a dapat dilihat distribusi status ketenagaan perawat di Puskesmas per provinsi. Cukup menarik untuk disimak, seperti pada gambar 4.3.1.2.3.b tenaga honorer ini untuk tenaga perawat sangat dominan di Provinsi Sumatera Selatan (41,8%), sementara yang terendah di Provinsi Sulawesi Utara (1,5%).

Gambar 4.3.1.2.3.a
Persentase Perawat dengan Status Ketenagaan Honorer, Rifaskes 2011

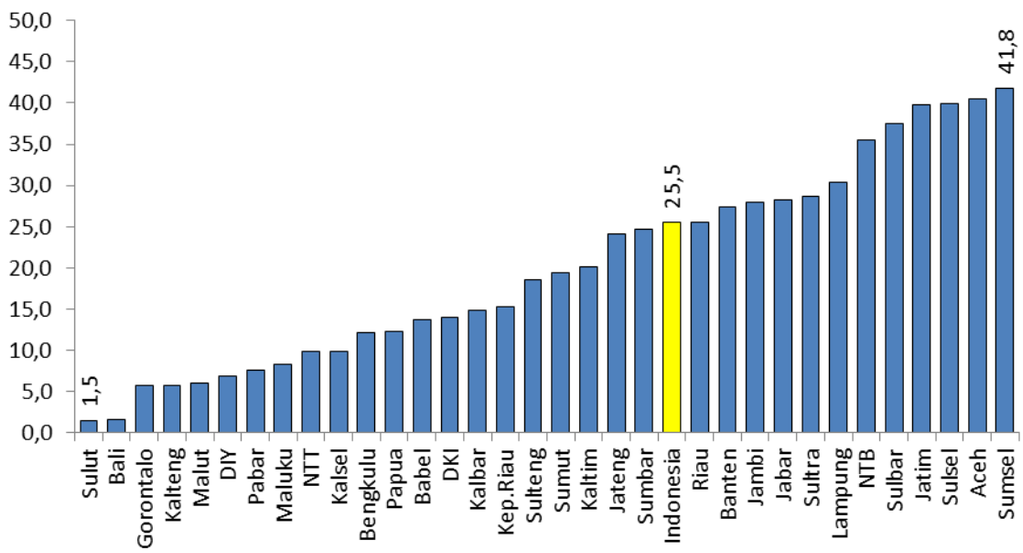

Tabel 4.3.1.2.3.b
Tenaga Perawat di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan		
		PNS/CPNS	Tugas Khusus	Honorer
1	Aceh	4018	10	2747
2	Sumatera Utara	5028	20	1213
3	Sumatera Barat	2045	9	672
4	Riau	2179	22	757
5	Jambi	1589	0	619
6	Sumatera Selatan	2863	38	2085
7	Bengkulu	1669	22	235
8	Lampung	2161	5	948
9	Bangka Belitung	809	0	128
10	Kepulauan Riau	821	14	151
11	DKI Jakarta	1078	8	177
12	Jawa Barat	6618	67	2634
13	Jawa Tengah	5795	42	1862
14	DI Yogyakarta	821	0	61
15	Jawa Timur	6405	310	4437
16	Banten	1318	16	504
17	Bali	1184	0	19
18	Nusa Tenggara Barat	1790	2	989
19	Nusa Tenggara Timur	3636	24	404
20	Kalimantan Barat	2381	32	420
21	Kalimantan Tengah	2189	2	135
22	Kalimantan Selatan	1817	12	202
23	Kalimantan Timur	2170	2	548
24	Sulawesi Utara	2176	13	33
25	Sulawesi Tengah	2061	21	475
26	Sulawesi Selatan	3704	10	2462
27	Sulawesi Tenggara	2110	18	856
28	Gorontalo	589	5	36
29	Sulawesi Barat	739	75	487
30	Maluku	1723	1	157
31	Maluku Utara	864	0	56
32	Papua Barat	1287	6	106
33	Papua	2281	34	326
	INDONESIA	**77918**	**840**	**26941**

Analisis berikut terkait dengan kelompok tenaga Keperawatan adalah tenaga bidan. Jumlah bidan yang tersebar di 33 Provinsi adalah 108.364 orang. Tenaga bidan merupakan tenaga yang sangat penting di Puskesmas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan tenaga bidan, seperti juga perawat, diharapkan ada di seluruh Puskesmas. Akan tetapi dari 8981 Puskesmas, ada 1 Puskesmas yang datanya tidak tersedia, sehingga jumlah Puskesmas yang bisa memberikan informasi ada tidaknya bidan dilakukan hanya pada 8980 Puskesmas. Secara nasional, dapat dilihat pada tabel 4.3.1.2.4 masih ada 105 Puskesmas yang tidak ada bidan, dan mayoritas berada di Sumatera Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua, masing-masing 6 Puskesmas atau lebih.

Tabel 4.3.1.2.4.a
Keberadaan dan distribusi Tenaga Bidan di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Bidan							
		N	N	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskesmas
1	Aceh	317	311	311	100,0	0	,0	8738	2-88	28,10
2	Sumatera Utara	522	505	495	98,0	10	2,0	11353	0-86	22,48
3	Sumatera Barat	253	248	248	100,0	0	,0	4132	2-43	16,66
4	Riau	202	195	194	99,5	1	,5	3059	0-71	15,69
5	Jambi	174	171	171	100,0	0	,0	2037	1-55	11,91
6	Sumatera Selatan	305	298	296	99,3	2	,7	4753	0-59	15,95
7	Bengkulu	174	173	173	100,0	0	,0	2176	3-39	12,58
8	Lampung	267	265	265	100,0	0	,0	4021	2-43	15,17
9	Bangka Belitung	58	57	57	100,0	0	,0	529	2-21	9,28
10	Kepulauan Riau	65	65	64	98,5	1	1,5	786	0-26	12,09
11	DKI Jakarta	337	336	334	99,4	2	,6	1121	0-34	3,34
12	Jawa Barat	1042	1031	1029	99,8	2	,2	10304	0-31	9,99
13	Jawa Tengah	867	861	860	99,9	1	,1	12441	0-46	14,45
14	DI Yogyakarta	121	121	121	100,0	0	,0	945	2-18	7,81
15	Jawa Timur	949	949	947	99,8	2	,2	12365	0-42	13,03
16	Banten	219	206	206	100,0	0	,0	2597	3-28	12,61
17	Bali	114	114	114	100,0	0	,0	1604	3-29	14,07
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	148	99,3	1	,7	1688	0-41	11,33
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	301	99,7	1	,3	2511	0-39	8,31
20	Kalimantan Barat	234	233	233	100,0	0	,0	1964	1-25	8,43
21	Kalimantan Tengah	180	176	176	100,0	0	,0	1484	1-26	8,43
22	Kalimantan Selatan	223	217	217	100,0	0	,0	2303	1-31	10,61
23	Kalimantan Timur	218	213	213	100,0	0	,0	1554	1-27	7,30
24	Sulawesi Utara	173	167	165	98,8	2	1,2	1073	0-23	6,43
25	Sulawesi Tengah	168	163	163	100,0	0	,0	1846	1-41	11,33
26	Sulawesi Selatan	418	406	405	99,8	1	,2	4514	0-38	11,12
27	Sulawesi Tenggara	247	233	233	100,0	0	,0	1788	1-23	7,67
28	Gorontalo	84	74	74	100,0	0	,0	426	2-14	5,76
29	Sulawesi Barat	84	81	78	96,3	3	3,7	765	0-22	9,44
30	Maluku	165	161	150	93,2	11	6,8	949	0-31	5,89
31	Maluku Utara	102	101	101	100,0	0	,0	742	1-33	7,35
32	Papua Barat	118	104	98	94,2	6	5,8	516	0-34	4,96
33	Papua	310	294	235	79,9	59	20,1	1280	0-50	4,35
	INDONESIA	9188	8980	8875	98.8	105	1.2	108364	0-88	12.07

Bisa pula diperhatikan dari tabel 4.3.1.2.4.a di atas, jumlah 108,364 bidan ini tersebar di masing-masing Puskesmas dengan rata-rata 12,07 bidan, dengan kisaran 0-88 bidan. Jumlah bidan terbanyak sampai 88 bidan di Puskesmas berada di Aceh. Jumlah rata-rata bidan per Puskesmas bervariasi untuk masing-masing Provinsi, mulai dari 3,34/Puskesmas di DKI Jakarta sampai dengan 28,1/Puskesmas di Aceh. Lebih jelas disparitas rata-rata jumlah bidan per Puskesmas bisa dilihat pada Gambar 4.3.1.2.4.b.

Gambar 4.3.1.2.4.b
Rata-rata Jumlah Bidan per Puskesmas, Rifaskes 2011

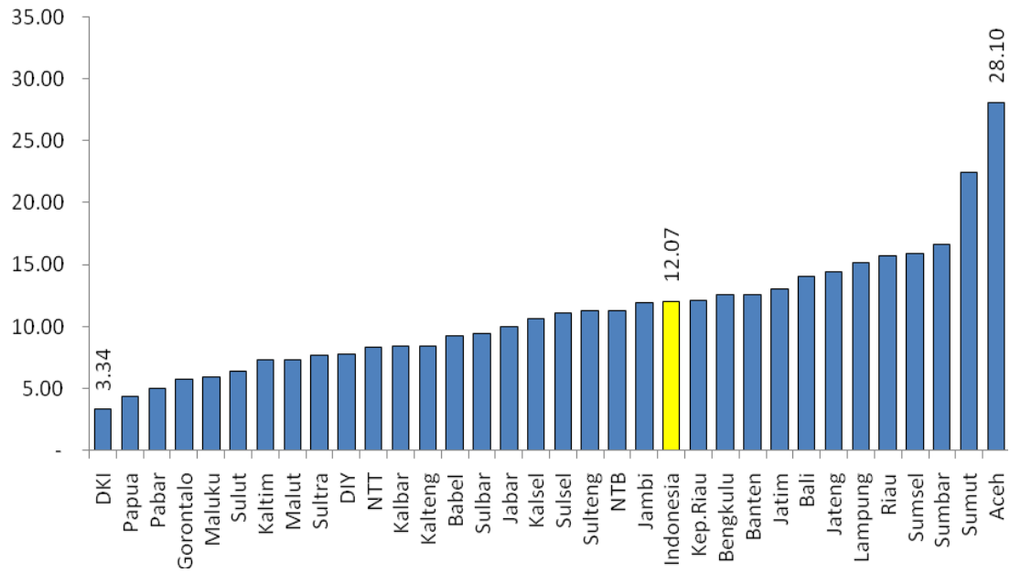

Dari tingkat pendidikan terakhir, bidan di Puskesmas sebagian besar dari Akademi Kebidanan (69,2%), 26,7 persen lulusan D1 Kebidanan, dan ada 4,1 persen dengan tingkat pendidikan terakhir DIV-S2 (Gambar 4.3.1.2.5).

Gambar 4.3.1.2.5
Persentase Bidan menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

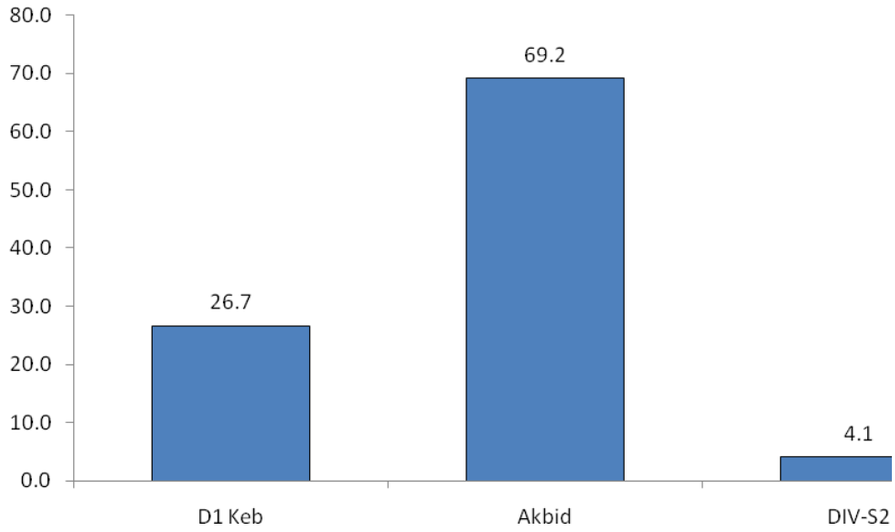

Gambaran menurut Provinsi, dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.3.1.2.6 Persentase terbanyak tenaga bidan dengan pendidikan terakhir D1 Kebidanan yang terbanyak ada di provinsi Papua (71,1%), diikuti Maluku (65,3%). Untuk persentase bidan dengan tingkat pendidikan terakhir dari Akademi Kebidanan adalah di Sulawesi Barat (89,8%), Sulawesi Selatan (84,8%), dan Riau (84,5%). Untuk tingkat pendidikan terakhir DIV-S2 tertinggi ada di Provinsi Bengkulu (11,2%).

Tabel 4.3.1.2.6
Tenaga Bidan di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir							Total	Persen		
		D1 Keb	Akbid	D-IV-Bidan	S1 Kes Lain	S1 Non Kes	S2 Kes	S2 Non kes		D1 Keb	Akbid	D-IV-S2
1	DI Aceh	3043	5420	234	35	0	0	6	8738	34,8	62,0	3,1
2	Sumatera Utara	3652	7201	419	76	4	1	0	11353	32,2	63,4	4,4
3	Sumatera Barat	1091	2938	71	31	1	0	0	4132	26,4	71,1	2,5
4	Riau	429	2585	24	21	0	0	0	3059	14,0	84,5	1,5
5	Jambi	574	1412	42	7	2	0	0	2037	28,2	69,3	2,5
6	Sumatera Selatan	1088	3405	171	82	6	1	0	4753	22,9	71,6	5,5
7	Bengkulu	667	1266	130	108	5	0	0	2176	30,7	58,2	11,2
8	Lampung	702	3148	129	39	0	3	0	4021	17,5	78,3	4,3
9	Bangka Belitung	173	337	17	2	0	0	0	529	32,7	63,7	3,6
10	Kepulauan Riau	154	614	15	3	0	0	0	786	19,6	78,1	2,3
11	DKI Jakarta	393	673	32	18	1	1	3	1121	35,1	60,0	4,9
12	Jawa Barat	1667	8234	292	86	5	20	0	10304	16,2	79,9	3,9
13	Jawa Tengah	2910	9081	390	40	6	8	6	12441	23,4	73,0	3,6
14	DI Yogyakarta	224	660	54	5	0	2	0	945	23,7	69,8	6,5
15	Jawa Timur	2175	9557	579	29	9	15	1	12365	17,6	77,3	5,1
16	Banten	426	2031	98	35	4	3	0	2597	16,4	78,2	5,4
17	Bali	461	1091	45	7	0	0	0	1604	28,7	68,0	3,2
18	Nusa Tenggara Barat	408	1211	57	12	0	0	0	1688	24,2	71,7	4,1
19	Nusa Tenggara Timur	1487	952	68	3	0	1	0	2511	59,2	37,9	2,9
20	Kalimantan Barat	872	1048	21	14	1	0	8	1964	44,4	53,4	2,2
21	Kalimantan Tengah	728	715	32	7	2	0	0	1484	49,1	48,2	2,8
22	Kalimantan Selatan	646	1533	108	16	0	0	0	2303	28,1	66,6	5,4
23	Kalimantan Timur	369	1150	21	12	1	1	0	1554	23,7	74,0	2,3
24	Sulawesi Utara	618	402	37	13	3	0	0	1073	57,6	37,5	4,9
25	Sulawesi Tengah	917	813	72	23	8	0	13	1846	49,7	44,0	6,3
26	Sulawesi Selatan	503	3830	105	62	2	12	0	4514	11,1	84,8	4,0
27	Sulawesi Tenggara	404	1317	44	20	3	0	0	1788	22,6	73,7	3,7
28	Gorontalo	129	263	16	16	1	1	0	426	30,3	61,7	8,0
29	Sulawesi Barat	68	687	7	2	0	1	0	765	8,9	89,8	1,3
30	Maluku	620	307	11	10	1	0	0	949	65,3	32,3	2,3
31	Maluku Utara	137	584	9	12	0	0	0	742	18,5	78,7	2,8
32	Papua Barat	283	207	24	1	0	1	0	516	54,8	40,1	5,0
33	Papua	910	325	42	2	1	0	0	1280	71,1	25,4	3,5
	INDONESIA	28928	74997	3416	849	66	71	37	108364	26.7	69.2	4.1

Untuk status ketenagaan para bidan di Puskesmas, untuk angka nasional dapat dilihat sebagian besar adalah PNS (66%), selanjutnya PTT (27,5%), dan 6,5 persen adalah honorer. Gambaran menurut Provinsi secara rinci terurai pada tabel 4.3.1.2.7.

Tabel 4.3.1.2.7
Tenaga Bidan di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan		
		PNS/CPNS	PTT	Honorer
1	Aceh	5047	2971	720
2	Sumatera Utara	6521	4542	290
3	Sumatera Barat	2597	1414	121
4	Riau	1608	1131	320
5	Jambi	1315	669	53
6	Sumatera Selatan	2910	1005	838
7	Bengkulu	1638	508	30
8	Lampung	2260	1489	272
9	Bangka Belitung	428	65	36
10	Kepulauan Riau	539	235	12
11	DKI Jakarta	887	9	225
12	Jawa Barat	6754	2937	613
13	Jawa Tengah	7865	4379	197
14	DI Yogyakarta	715	221	9
15	Jawa Timur	8139	2909	1317
16	Banten	1497	1001	99
17	Bali	1181	382	41
18	Nusa Tenggara Barat	1091	286	311
19	Nusa Tenggara Timur	2159	286	66
20	Kalimantan Barat	1614	314	36
21	Kalimantan Tengah	1365	103	16
22	Kalimantan Selatan	2037	257	9
23	Kalimantan Timur	1227	184	143
24	Sulawesi Utara	1065	8	0
25	Sulawesi Tengah	1511	316	19
26	Sulawesi Selatan	2588	984	942
27	Sulawesi Tenggara	1178	557	53
28	Gorontalo	374	45	7
29	Sulawesi Barat	378	288	99
30	Maluku	812	123	14
31	Maluku Utara	623	100	19
32	Papua Barat	478	17	21
33	Papua	1158	44	78
	INDONESIA	71559	29779	7026

Bagian dari Keperawatan yang lain. adalah keberadaan tenaga perawat gigi, dimana jumlahnya 9599 orang dari 8980 Puskesmas yang dapat memberikan keberadaan perawat gigi. Rincian keberadaan perawat gigi menurut provinsi bisa dilihat pada tabel 4.3.1.2.8. Ada 30,0 persen Puskesmas yang tidak mempunyai tenaga perawat gigi. Kisaran per Puskesmas bervariasi dari 0-32 tenaga, sedangkan jumlah rata-rata tenaga perawat gigi per Puskesmas adalah 1,07. Perentase terbanyak dimana Puskesmas yang tidak mempunyai tenaga perawat gigi, konsisten di wilayah Indonesia Timur, seperti di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Tabel 4.3.1.2.8
Keberadaan dan distribusi Tenaga Perawat Gigi di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Perawat Gigi						
		N	N	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	239	76,8	72	23,2	487	0-6	1,57
2	Sumatera Utara	522	505	319	63,2	186	36,8	452	0-8	0,90
3	Sumatera Barat	253	248	222	89,5	26	10,5	339	0-4	1,37
4	Riau	202	195	132	67,7	63	32,3	189	0-4	0,97
5	Jambi	174	171	147	86,0	24	14,0	340	0-32	1,99
6	Sumatera Selatan	305	298	200	67,1	98	32,9	397	0-8	1,33
7	Bengkulu	174	173	77	44,5	96	55,5	90	0-3	0,52
8	Lampung	267	265	209	78,9	56	21,1	309	0-4	1,17
9	Bangka Belitung	58	57	56	98,2	1	1,8	101	0-5	1,77
10	Kepulauan Riau	65	65	39	60,0	26	40,0	56	0-3	0,86
11	DKI Jakarta	337	336	127	37,8	209	62,2	182	0-6	0,54
12	Jawa Barat	1042	1031	782	75,8	249	24,2	1103	0-6	1,07
13	Jawa Tengah	867	861	771	89,5	90	10,5	931	0-5	1,08
14	DI Yogyakarta	121	121	118	97,5	3	2,5	240	0-5	1,98
15	Jawa Timur	949	949	695	73,2	254	26,8	838	0-4	0,88
16	Banten	219	206	146	70,9	60	29,1	175	0-3	0,85
17	Bali	114	114	110	96,5	4	3,5	256	0-6	2,25
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	113	75,8	36	24,2	199	0-4	1,34
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	261	86,4	41	13,6	453	0-10	1,50
20	Kalimantan Barat	234	233	207	88,8	26	11,2	379	0-6	1,63
21	Kalimantan Tengah	180	176	142	80,7	34	19,3	213	0-6	1,21
22	Kalimantan Selatan	223	217	200	92,2	17	7,8	412	0-6	1,90
23	Kalimantan Timur	218	213	128	60,1	85	39,9	156	0-3	0,73
24	Sulawesi Utara	173	167	139	83,2	28	16,8	249	0-5	1,49
25	Sulawesi Tengah	168	163	74	45,4	89	54,6	103	0-3	0,63
26	Sulawesi Selatan	418	406	330	81,3	76	18,7	541	0-5	1,33
27	Sulawesi Tenggara	247	233	95	40,8	138	59,2	149	0-5	0,64
28	Gorontalo	84	74	34	45,9	40	54,1	48	0-3	0,65
29	Sulawesi Barat	84	81	45	55,6	36	44,4	54	0-3	0,67
30	Maluku	165	161	43	26,7	118	73,3	47	0-4	0,29
31	Maluku Utara	102	101	22	21,8	79	78,2	26	0-2	0,26
32	Papua Barat	118	104	26	25,0	78	75,0	32	0-2	0,31
33	Papua	310	294	39	13,3	255	86,7	53	0-6	0,18
	INDONESIA	9188	8980	6287	70.0	2693	30.0	9599	0-32	1.07

Jika keberadaan perawat gigi di Puskesmas ini disajikan dengan keberadaan Dokter gigi, secara nasional, ada 48,2 persen dari Puskesmas yang ada dokter gigi dan perawat gigi, dan 17,6 persen Puskesmas yang tidak ada kedua tenaga ini; selebihnya adalah variasi dari 12,4 persen Puskesmas ada dokter gigi, tapi tidak ada perawat gigi, serta 21,8 persen Puskesmas ada perawat gigi, tapi tidak ada dokter gigi.

Untuk melihat tenaga perawat gigi berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan status ketenagaan dapat dilihat pada tabel 4.3.1.2.9. dan tabel 4.3.1.2.10.

Tabel 4.3.1.2.9
Tenaga Perawat Gigi di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir							
		SPRG	AKG	Akper	D-IV-Kes Gigi	S1-Kes Lain	S1-Non-Kes	S2-Kes	S2-Non Kes
1	Aceh	225	249	3	6	3	1	0	0
2	Sumatera Utara	232	203	3	4	10	0	0	0
3	Sumatera Barat	156	178	1	1	2	1	0	0
4	Riau	93	88	0	0	6	1	0	1
5	Jambi	132	183	14	9	2	0	0	0
6	Sumatera Selatan	210	149	9	0	26	3	0	0
7	Bengkulu	50	28	3	0	8	1	0	0
8	Lampung	151	144	2	0	8	4	0	0
9	Bangka Belitung	31	68	0	1	1	0	0	0
10	Kepulauan Riau	37	19	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	124	48	5	0	5	0	0	0
12	Jawa Barat	474	555	17	18	33	4	0	2
13	Jawa Tengah	399	462	24	32	12	0	1	1
14	DI Yogyakarta	102	112	6	19	1	0	0	0
15	Jawa Timur	446	346	17	17	6	4	2	0
16	Banten	77	86	5	1	5	1	0	0
17	Bali	135	114	5	0	1	1	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	117	69	2	2	5	3	1	0
19	Nusa Tenggara Timur	231	212	8	1	1	0	0	0
20	Kalimantan Barat	186	188	5	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	151	60	0	1	0	1	0	0
22	Kalimantan Selatan	201	196	4	3	5	2	1	0
23	Kalimantan Timur	97	54	1	1	2	1	0	0
24	Sulawesi Utara	137	111	0	0	0	1	0	0
25	Sulawesi Tengah	51	46	2	3	1	0	0	0
26	Sulawesi Selatan	198	301	17	8	15	1	1	0
27	Sulawesi Tenggara	68	72	3	0	6	0	0	0
28	Gorontalo	36	7	0	0	5	0	0	0
29	Sulawesi Barat	24	26	3	0	1	0	0	0
30	Maluku	24	20	1	1	0	1	0	0
31	Maluku Utara	16	9	0	1	0	0	0	0
32	Papua Barat	21	7	3	0	1	0	0	0
33	Papua	29	12	8	4	0	0	0	0
	INDONESIA	4661	4422	171	133	171	31	6	4

Tabel 4.3.1.2.10
Tenaga Perawat Gigi di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan		
		PNS/CPNS	Tugas Khusus	Honorer
1	Aceh	412	1	74
2	Sumatera Utara	441	0	11
3	Sumatera Barat	319	0	20
4	Riau	177	1	11
5	Jambi	297	0	43
6	Sumatera Selatan	350	0	47
7	Bengkulu	89	0	1
8	Lampung	244	1	64
9	Bangka Belitung	99	0	2
10	Kepulauan Riau	53	0	3
11	DKI Jakarta	160	0	22
12	Jawa Barat	929	2	172
13	Jawa Tengah	878	1	52
14	DI Yogyakarta	238	0	2
15	Jawa Timur	733	2	103
16	Banten	168	0	7
17	Bali	244	0	12
18	Nusa Tenggara Barat	169	0	30
19	Nusa Tenggara Timur	434	0	19
20	Kalimantan Barat	343	1	35
21	Kalimantan Tengah	208	2	3
22	Kalimantan Selatan	384	0	28
23	Kalimantan Timur	153	0	3
24	Sulawesi Utara	248	0	1
25	Sulawesi Tengah	99	1	3
26	Sulawesi Selatan	452	1	88
27	Sulawesi Tenggara	134	0	15
28	Gorontalo	46	2	0
29	Sulawesi Barat	50	0	4
30	Maluku	47	0	0
31	Maluku Utara	24	0	2
32	Papua Barat	31	1	0
33	Papua	38	0	15
	INDONESIA	**8691**	**16**	**892**

4.3.1.3. Tenaga Kefarmasian

Tenaga Kefarmasian dinilai menurut keberadaan tenaga Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tabel 4.3.1.3.1 menunjukkan gambaran tenaga apoteker di Puskesmas, dan diketahui jumlah Apoteker dari 8980 Puskesmas yang dapat memberikan informasi adalah 1819 orang. Tenaga Apoteker ini termasuk kurang sekali, karena hanya 17,5 persen Puskesmas yang ada tenaga apoteker. Kisaran jumlah yang terbatas ini, masih ada juga Puskesmas yang mempunyai lebih dari 1 tenaga apoteker. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, dan status ketenagaan, hampir seluruh Apoteker adalah lulusan fakultas kefarmasian dan PNS (Tabel 4.3.1.3.2).

Tabel 4.3.1.3.1
Keberadaan dan distribusi Apoteker di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Apoteker							
		N	N	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	26	8,4	285	91,6	35	0-5	0,11
2	Sumatera Utara	522	505	44	8,7	461	91,3	53	0-3	0,10
3	Sumatera Barat	253	248	44	17,7	204	82,3	48	0-2	0,19
4	Riau	202	195	41	21,0	154	79,0	50	0-3	0,26
5	Jambi	174	171	21	12,3	150	87,7	21	0-1	0,12
6	Sumatera Selatan	305	298	49	16,4	249	83,6	66	0-3	0,22
7	Bengkulu	174	173	20	11,6	153	88,4	21	0-2	0,12
8	Lampung	267	265	39	14,7	226	85,3	39	0-1	0,15
9	Bangka Belitung	58	57	7	12,3	50	87,7	8	0-2	0,14
10	Kepulauan Riau	65	65	19	29,2	46	70,8	20	0-2	0,31
11	DKI Jakarta	337	336	56	16,7	280	83,3	84	0-4	0,25
12	Jawa Barat	1042	1031	130	12,6	901	87,4	142	0-3	0,14
13	Jawa Tengah	867	861	139	16,1	722	83,9	148	0-4	0,17
14	DI Yogyakarta	121	121	22	18,2	99	81,8	22	0-1	0,18
15	Jawa Timur	949	949	201	21,2	748	78,8	222	0-6	0,23
16	Banten	219	206	30	14,6	176	85,4	32	0-2	0,16
17	Bali	114	114	18	15,8	96	84,2	20	0-2	0,18
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	28	18,8	121	81,2	41	0-5	0,28
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	40	13,2	262	86,8	46	0-3	0,15
20	Kalimantan Barat	234	233	35	15,0	198	85,0	37	0-2	0,16
21	Kalimantan Tengah	180	176	37	21,0	139	79,0	40	0-2	0,23
22	Kalimantan Selatan	223	217	48	22,1	169	77,9	49	0-2	0,23
23	Kalimantan Timur	218	213	61	28,6	152	71,4	68	0-3	0,32
24	Sulawesi Utara	173	167	22	13,2	145	86,8	22	0-1	0,13
25	Sulawesi Tengah	168	163	47	28,8	116	71,2	59	0-3	0,36
26	Sulawesi Selatan	418	406	163	40,1	243	59,9	215	0-5	0,53
27	Sulawesi Tenggara	247	233	53	22,7	180	77,3	63	0-4	0,27
28	Gorontalo	84	74	16	21,6	58	78,4	18	0-2	0,24
29	Sulawesi Barat	84	81	26	32,1	55	67,9	28	0-2	0,35
30	Maluku	165	161	14	8,7	147	91,3	14	0-1	0,09
31	Maluku Utara	102	101	27	26,7	74	73,3	29	0-2	0,29
32	Papua Barat	118	104	22	21,2	82	78,8	25	0-2	0,24
33	Papua	310	294	29	9,9	265	90,1	34	0-3	0,12
	INDONESIA	9188	8980	1574	17.5	7406	82.5	1819	0-6	0.20

Tabel 4.3.1.3.2
Tenaga Apoteker di Puskesmas menurut
Tingkat Pendidikan Terakhir dan Status Ketenagaan per Provinsi, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir			Status Ketenagaan	
		Fak. Farmasi	S2-Kes	S2-Non Kes	PNS/CPNS	Honorer
1	Aceh	35	0	0	35	0
2	Sumatera Utara	53	0	0	51	2
3	Sumatera Barat	48	0	0	41	7
4	Riau	49	1	0	44	6
5	Jambi	21	0	0	17	4
6	Sumatera Selatan	66	0	0	52	14
7	Bengkulu	21	0	0	20	1
8	Lampung	38	1	0	36	3
9	Bangka Belitung	8	0	0	8	0
10	Kepulauan Riau	20	0	0	17	3
11	DKI Jakarta	80	4	0	64	20
12	Jawa Barat	138	2	2	107	35
13	Jawa Tengah	143	5	0	129	19
14	DI Yogyakarta	22	0	0	20	2
15	Jawa Timur	216	6	0	148	74
16	Banten	32	0	0	29	3
17	Bali	20	0	0	20	0
18	Nusa Tenggara Barat	40	1	0	32	9
19	Nusa Tenggara Timur	44	2	0	44	2
20	Kalimantan Barat	36	1	0	34	3
21	Kalimantan Tengah	39	1	0	40	0
22	Kalimantan Selatan	49	0	0	48	1
23	Kalimantan Timur	67	1	0	51	17
24	Sulawesi Utara	21	1	0	22	0
25	Sulawesi Tengah	55	4	0	57	2
26	Sulawesi Selatan	209	5	1	156	59
27	Sulawesi Tenggara	60	3	0	51	12
28	Gorontalo	18	0	0	18	0
29	Sulawesi Barat	28	0	0	26	2
30	Maluku	14	0	0	14	0
31	Maluku Utara	29	0	0	29	0
32	Papua Barat	25	0	0	24	1
33	Papua	33	1	0	29	5
	INDONESIA	1777	39	3	1513	306

Untuk tenaga teknis kefarmasian, keberadaannya lebih baik jika dibanding tenaga apoteker, dimana 38,0 persen Puskesmas tidak ada tenaga ini. Jumlah keseluruhan adalah 8221 tenaga teknis kefarmasian yang dijumpai di 5565 Puskesmas. Kisaran tenaga, juga tidak merata, karena dijumpai ada Puskesmas yang mempunyai tenaga teknis kefarmasian sampai 9 orang di Aceh.

Jika tenaga apoteker dikombinasikan dengan tenaga teknis kefarmasian, dijumpai terdapat 11,7% dari Puskesmas yang ada kedua tenaga apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian, dan ada 32,2 persen Puskesmas yang tidak ada kedua tenaga kefarmasian ini. Selebihnya adalah variasi Puskesmas yang ada apotker/tidak ada teknis kefarmasian (5,8%), dan Puskesmas yang tidak ada Apoteker/ada tenaga teknis kefarmasian (50,3%).

Tabel 4.3.1.3.3
Keberadaan dan distribusi Tenaga Teknis Kefarmasian di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Tenaga Teknis Kefarmasian							
		N	N	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	236	75,9	75	24,1	444	0-9	1,43
2	Sumatera Utara	522	505	306	60,6	198	39,2	504	0-8	1,00
3	Sumatera Barat	253	248	220	88,7	28	11,3	373	0-6	1,50
4	Riau	202	195	144	73,8	51	26,2	240	0-5	1,23
5	Jambi	174	171	122	71,3	49	28,7	229	0-5	1,34
6	Sumatera Selatan	305	298	211	70,8	87	29,2	393	0-7	1,32
7	Bengkulu	174	173	95	54,9	78	45,1	145	0-3	0,84
8	Lampung	267	265	144	54,3	121	45,7	182	0-4	0,69
9	Bangka Belitung	58	57	50	87,7	7	12,3	76	0-6	1,33
10	Kepulauan Riau	65	65	47	72,3	18	27,7	76	0-4	1,17
11	DKI Jakarta	337	336	100	29,8	236	70,2	167	0-7	0,50
12	Jawa Barat	1042	1031	572	55,5	459	44,5	699	0-4	0,68
13	Jawa Tengah	867	861	654	76,0	207	24,0	834	0-6	0,97
14	DI Yogyakarta	121	121	112	92,6	9	7,4	151	0-3	1,25
15	Jawa Timur	949	949	651	68,6	298	31,4	877	0-5	0,92
16	Banten	219	206	78	37,9	128	62,1	98	0-3	0,48
17	Bali	114	114	96	84,2	18	15,8	133	0-3	1,17
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	99	66,4	50	33,6	150	0-4	1,01
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	222	73,5	80	26,5	349	0-6	1,16
20	Kalimantan Barat	234	233	167	71,7	66	28,3	227	0-7	0,97
21	Kalimantan Tengah	180	176	94	53,4	82	46,6	105	0-2	0,60
22	Kalimantan Selatan	223	217	197	90,8	20	9,2	284	0-4	1,31
23	Kalimantan Timur	218	213	140	65,7	73	34,3	197	0-5	0,92
24	Sulawesi Utara	173	167	90	53,9	77	46,1	152	0-3	0,91
25	Sulawesi Tengah	168	163	110	67,5	53	32,5	211	0-7	1,29
26	Sulawesi Selatan	418	406	273	67,2	133	32,8	425	0-8	1,05
27	Sulawesi Tenggara	247	233	125	53,6	108	46,4	205	0-8	0,88
28	Gorontalo	84	74	28	37,8	46	62,2	40	0-4	0,54
29	Sulawesi Barat	84	81	33	40,7	48	59,3	40	0-2	0,49
30	Maluku	165	161	34	21,1	127	78,9	40	0-3	0,25
31	Maluku Utara	102	101	35	34,7	66	65,3	51	0-3	0,50
32	Papua Barat	118	104	25	24,0	79	76,0	41	0-5	0,39
33	Papua	310	294	55	18,7	239	81,3	83	0-6	0,28
	INDONESIA	9188	8980	5565	62.0	3414	38.0	8221	0-9	0.92

Untuk status tenaga teknis kefamarmasian berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan status ketenagaan dapat dilihat masing-masing pada tabel 4.3.1.3.4 dan tabel 4.3.1.3.5, dimana sebagian besar adalah lulusan D3-Farmasi dan PNS.

Tabel 4.3.1.3.4

Tenaga Teknis Kefarmasian menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir					
		SAA/SMF	D3-Farmasi	Fak.Farmasi	S1-Kes	S1-Non Kes	S2
1	DI Aceh	189	241	8	4	2	0
2	Sumatera Utara	304	181	12	5	2	0
3	Sumatera Barat	206	162	3	1	1	0
4	Riau	117	110	9	2	2	0
5	Jambi	88	130	8	2	1	0
6	Sumatera Selatan	152	196	25	15	2	3
7	Bengkulu	86	30	12	16	1	0
8	Lampung	77	85	16	2	2	0
9	Bangka Belitung	29	45	0	2	0	0
10	Kepulauan Riau	46	29	0	0	1	0
11	DKI Jakarta	118	41	8	0	0	0
12	Jawa Barat	487	154	48	7	3	0
13	Jawa Tengah	425	372	24	9	4	0
14	DI Yogyakarta	112	29	6	3	1	0
15	Jawa Timur	579	266	15	10	7	0
16	Banten	32	52	11	2	1	0
17	Bali	112	18	1	0	2	0
18	Nusa Tenggara Barat	83	48	15	3	0	1
19	Nusa Tenggara Timur	115	208	25	1	0	0
20	Kalimantan Barat	54	162	11	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	42	59	3	1	0	0
22	Kalimantan Selatan	229	47	3	2	1	2
23	Kalimantan Timur	99	87	8	2	1	0
24	Sulawesi Utara	47	85	18	2	0	0
25	Sulawesi Tengah	29	118	54	10	0	0
26	Sulawesi Selatan	76	181	150	14	2	2
27	Sulawesi Tenggara	33	103	51	17	1	0
28	Gorontalo	6	16	16	2	0	0
29	Sulawesi Barat	2	20	14	4	0	0
30	Maluku	11	17	12	0	0	0
31	Maluku Utara	12	16	22	0	0	1
32	Papua Barat	19	16	4	2	0	0
33	Papua	47	25	11	0	0	0
	INDONESIA	**4063**	**3349**	**623**	**140**	**37**	**9**

Tabel 4.3.1.3.5
Tenaga Teknis Kefarmasian menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan	
		PNS/CPNS	Honorer
1	DI Aceh	360	84
2	Sumatera Utara	474	30
3	Sumatera Barat	349	24
4	Riau	211	29
5	Jambi	213	16
6	Sumatera Selatan	304	89
7	Bengkulu	140	5
8	Lampung	159	23
9	Bangka Belitung	74	2
10	Kepulauan Riau	70	6
11	DKI Jakarta	101	66
12	Jawa Barat	566	133
13	Jawa Tengah	781	53
14	DI Yogyakarta	149	2
15	Jawa Timur	732	145
16	Banten	81	17
17	Bali	130	3
18	Nusa Tenggara Barat	119	31
19	Nusa Tenggara Timur	304	45
20	Kalimantan Barat	219	8
21	Kalimantan Tengah	103	2
22	Kalimantan Selatan	274	10
23	Kalimantan Timur	165	32
24	Sulawesi Utara	151	1
25	Sulawesi Tengah	153	58
26	Sulawesi Selatan	290	135
27	Sulawesi Tenggara	177	28
28	Gorontalo	38	2
29	Sulawesi Barat	37	3
30	Maluku	40	0
31	Maluku Utara	49	2
32	Papua Barat	36	5
33	Papua	80	3
	INDONESIA	**7129**	**1092**

4.3.1.4. Tenaga Gizi

Jumlah tenaga gizi yang bekerja di Puskesmas adalah 9874 orang, yang tersebar di 8980 Puskesmas yang bisa memberikan informasi keberadaan tenaga gizi. Jumlah ini berkisar antara 0 – 11 tenaga gizi per Puskesmas. Terdapat 24,4 persen Puskesmas yang tidak memiliki tenaga gizi di Puskesmas. Keberadaan tenaga gizi yang terbanyak ada di NTB sampai 2,63 orang per Puskesmas.

Tabel 4.3.1.4.1
Keberadaan dan distribusi Tenaga Gizi di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Tenaga Gizi						
		N	n	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	235	75,6	76	24,4	379	0-5	1,22
2	Sumatera Utara	522	505	362	71,7	143	28,3	554	0-11	1,10
3	Sumatera Barat	253	248	230	92,7	18	7,3	329	0-4	1,33
4	Riau	202	195	133	68,2	62	31,8	175	0-5	0,90
5	Jambi	174	171	98	57,3	73	42,7	123	0-4	0,72
6	Sumatera Selatan	305	298	218	73,2	80	26,8	312	0-5	1,05
7	Bengkulu	174	173	109	63,0	64	37,0	148	0-3	0,86
8	Lampung	267	265	155	58,5	110	41,5	176	0-2	0,66
9	Bangka Belitung	58	57	55	96,5	2	3,5	84	0-4	1,47
10	Kepulauan Riau	65	65	52	80,0	13	20,0	69	0-3	1,06
11	DKI Jakarta	337	336	84	25,0	252	75,0	150	0-7	0,45
12	Jawa Barat	1042	1031	732	71,0	299	29,0	795	0-3	0,77
13	Jawa Tengah	867	861	767	89,1	94	10,9	844	0-3	0,98
14	DI Yogyakarta	121	121	118	97,5	3	2,5	162	0-3	1,34
15	Jawa Timur	949	949	741	78,1	208	21,9	913	0-4	0,96
16	Banten	219	206	137	66,5	69	33,5	160	0-3	0,78
17	Bali	114	114	104	91,2	10	8,8	153	0-4	1,34
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	146	98,0	3	2,0	392	0-7	2,63
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	225	74,5	77	25,5	353	0-7	1,17
20	Kalimantan Barat	234	233	208	89,3	25	10,7	307	0-7	1,32
21	Kalimantan Tengah	180	176	164	93,2	12	6,8	232	0-3	1,32
22	Kalimantan Selatan	223	217	207	95,4	10	4,6	326	0-5	1,50
23	Kalimantan Timur	218	213	160	75,1	53	24,9	198	0-5	0,93
24	Sulawesi Utara	173	167	142	85,0	25	15,0	247	0-4	1,48
25	Sulawesi Tengah	168	163	90	55,2	73	44,8	112	0-5	0,69
26	Sulawesi Selatan	418	406	372	91,6	34	8,4	714	0-7	1,76
27	Sulawesi Tenggara	247	233	215	92,3	18	7,7	500	0-8	2,15
28	Gorontalo	84	74	71	95,9	3	4,1	161	0-9	2,18
29	Sulawesi Barat	84	81	60	74,1	21	25,9	83	0-4	1,02
30	Maluku	165	161	125	77,6	36	22,4	238	0-6	1,48
31	Maluku Utara	102	101	84	83,2	17	16,8	180	0-8	1,78
32	Papua Barat	118	104	62	59,6	42	40,4	89	0-4	0,86
33	Papua	310	294	125	42,5	169	57,5	216	0-7	0,73
	INDONESIA	9188	8980	6786	75.6	2194	24.4	9874	0-11	1.10

Sebaran berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan status ketenagaan dapat dilihat pada tabel 4.3.1.4.2 dan tabel 4.3.1.4.3. Sebagian besar tenaga gizi adalah lulusan Akademi Gizi (69,2%), selebihnya adalah lulusan SPAG (16,4%), dan ada yang lulusan DIV/S1 – S2 (14,3%). Untuk status ketenagaan, sebagian besar adalah PNS (91,5%).

Tabel 4.3.1.4.2
Tenaga Gizi menurut Tingkat Pendidikan Terkakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir					
		SPAG	Akzi	DIV/S1	S1 Kes Lain	S1 Non-Kes	S2
1	Aceh	53	298	15	8	5	0
2	Sumatera Utara	166	338	23	25	2	0
3	Sumatera Barat	8	281	28	10	2	0
4	Riau	37	109	9	17	3	0
5	Jambi	38	73	7	2	2	1
6	Sumatera Selatan	45	238	6	20	1	2
7	Bengkulu	28	95	11	12	2	0
8	Lampung	63	98	5	8	2	0
9	Bangka Belitung	14	64	4	2	0	0
10	Kepulauan Riau	9	56	3	1	0	0
11	DKI Jakarta	54	74	11	10	1	0
12	Jawa Barat	248	412	81	43	7	4
13	Jawa Tengah	111	617	80	33	1	2
14	DI Yogyakarta	9	118	29	6	0	0
15	Jawa Timur	205	623	60	15	9	1
16	Banten	22	114	15	8	1	0
17	Bali	23	98	18	14	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	33	313	25	20	1	0
19	Nusa Tenggara Timur	33	277	36	7	0	0
20	Kalimantan Barat	55	238	11	3	0	0
21	Kalimantan Tengah	29	199	2	1	1	0
22	Kalimantan Selatan	45	253	12	14	2	0
23	Kalimantan Timur	25	148	15	9	1	0
24	Sulawesi Utara	12	202	29	4	0	0
25	Sulawesi Tengah	13	77	9	12	1	0
26	Sulawesi Selatan	45	384	214	62	2	7
27	Sulawesi Tenggara	85	334	36	36	8	1
28	Gorontalo	4	136	14	7	0	0
29	Sulawesi Barat	4	47	19	10	1	2
30	Maluku	56	171	9	0	2	0
31	Maluku Utara	11	129	23	17	0	0
32	Papua Barat	14	63	9	3	0	0
33	Papua	25	159	26	6	0	0
	INDONESIA	1622	6836	894	445	57	20

Tabel 4.3.1.4.3
Tenaga Gizi menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan		
		PNS/CPNS	Tugas Khusus	Honorer
1	Aceh	325	3	51
2	Sumatera Utara	544	2	8
3	Sumatera Barat	298	0	31
4	Riau	163	0	12
5	Jambi	117	0	6
6	Sumatera Selatan	290	1	21
7	Bengkulu	141	2	5
8	Lampung	170	0	6
9	Bangka Belitung	83	0	1
10	Kepulauan Riau	62	2	5
11	DKI Jakarta	135	0	15
12	Jawa Barat	753	0	42
13	Jawa Tengah	805	2	37
14	DI Yogyakarta	158	0	4
15	Jawa Timur	847	4	62
16	Banten	154	0	6
17	Bali	143	0	10
18	Nusa Tenggara Barat	298	4	90
19	Nusa Tenggara Timur	319	5	29
20	Kalimantan Barat	293	1	13
21	Kalimantan Tengah	228	0	4
22	Kalimantan Selatan	305	0	21
23	Kalimantan Timur	194	0	4
24	Sulawesi Utara	247	0	0
25	Sulawesi Tengah	105	1	6
26	Sulawesi Selatan	557	11	146
27	Sulawesi Tenggara	435	3	62
28	Gorontalo	141	0	20
29	Sulawesi Barat	70	0	13
30	Maluku	213	3	22
31	Maluku Utara	169	0	11
32	Papua Barat	80	1	8
33	Papua	191	1	24
	INDONESIA	9033	46	795

4.3.1.5. Tenaga Sanitarian

Analisis keberadaan tenaga Sanitarian dilakukan berdasarkan 8980 Puskesmas yang bisa memberikan informasi dari jumlah 8981 Puskesmas. Pada tabel 4.3.1.5.1., dapat dilihat 77,7 persen Puskesmas yang ada tenaga sanitarian. Untuk DKI Jakarta, dijumpai 80,4 persen Puskesmas tidak ada tenaga Sanitarian, diikuti provinsi di wilayah Indonesia Timur (Maluku Utara, Papua Barat dan Papua), yang masing-masing 43,6 persen, 50 persen dan 63,3 persen. Jumlah rata-rata tenaga sanitarian terbanyak per Puskesmas dijumpai di NTB, Aceh, dan Bali.

Tabel 4.3.1.5.1
Keberadaan dan distribusi Tenaga Sanitarian di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Sanitarian						
		N	n	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	265	85,2	46	14,8	814	0-21	2,62
2	Sumatera Utara	522	505	279	55,2	226	44,8	398	0-20	0,79
3	Sumatera Barat	253	248	222	89,5	26	10,5	323	0-4	1,30
4	Riau	202	195	128	65,6	67	34,4	181	0-4	0,93
5	Jambi	174	171	137	80,1	33	19,3	291	0-9	1,72
6	Sumatera Selatan	305	298	253	84,9	45	15,1	516	0-13	1,73
7	Bengkulu	174	173	99	57,2	74	42,8	136	0-10	0,79
8	Lampung	267	265	218	82,3	47	17,7	325	0-5	1,23
9	Bangka Belitung	58	57	52	91,2	5	8,8	79	0-4	1,39
10	Kepulauan Riau	65	65	55	84,6	10	15,4	69	0-2	1,06
11	DKI Jakarta	337	336	66	19,6	270	80,4	115	0-5	0,34
12	Jawa Barat	1042	1031	826	80,1	205	19,9	927	0-4	0,90
13	Jawa Tengah	867	861	785	91,2	76	8,8	928	0-3	1,08
14	DI Yogyakarta	121	121	117	96,7	4	3,3	140	0-2	1,16
15	Jawa Timur	949	949	739	77,9	210	22,1	857	0-5	0,90
16	Banten	219	206	158	76,7	48	23,3	177	0-3	0,86
17	Bali	114	114	111	97,4	3	2,6	278	0-5	2,44
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	142	95,3	7	4,7	424	0-9	2,85
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	282	93,4	20	6,6	576	0-8	1,91
20	Kalimantan Barat	234	233	207	88,8	26	11,2	325	0-6	1,39
21	Kalimantan Tengah	180	176	140	79,5	36	20,5	187	0-3	1,06
22	Kalimantan Selatan	223	217	200	92,2	17	7,8	399	0-5	1,84
23	Kalimantan Timur	218	213	173	81,2	40	18,8	231	0-4	1,08
24	Sulawesi Utara	173	167	143	85,6	24	14,4	329	0-7	1,97
25	Sulawesi Tengah	168	163	142	87,1	21	12,9	373	0-9	2,29
26	Sulawesi Selatan	418	406	366	90,1	40	9,9	675	0-7	1,66
27	Sulawesi Tenggara	247	233	205	88,0	28	12,0	446	0-9	1,91
28	Gorontalo	84	74	65	87,8	9	12,2	135	0-7	1,82
29	Sulawesi Barat	84	81	62	76,5	19	23,5	89	0-3	1,10
30	Maluku	165	161	122	75,8	39	24,2	225	0-8	1,40
31	Maluku Utara	102	101	57	56,4	44	43,6	90	0-4	0,89
32	Papua Barat	118	104	52	50,0	52	50,0	73	0-10	0,70
33	Papua	310	294	108	36,7	186	63,3	169	0-5	0,57
	INDONESIA	9188	8980	6976	77.7	2003	22.3	11300	0-21	1.26

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, seperti tercantum pada tabel 4.3.1.5.2 sebagian besar tenaga sanitarian adalah lulusan dari Akademi Kesehatan Lingkungan, dan sebagian besar PNS (Tabel 4.3.1.5.3).

Tabel 4.3.1.5.2
Tenaga Sanitarian menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir					
		SPPH	AKL	S1-Kes	S1-Non Kes	S2-Kes	S2-Non Kes
1	Aceh	201	546	64	3	0	0
2	Sumatera Utara	159	196	39	3	1	0
3	Sumatera Barat	31	247	42	2	1	0
4	Riau	56	96	29	0	0	0
5	Jambi	127	135	27	1	1	0
6	Sumatera Selatan	164	308	38	5	1	0
7	Bengkulu	52	60	16	7	1	0
8	Lampung	76	206	36	6	1	0
9	Bangka Belitung	14	58	6	1	0	0
10	Kepulauan Riau	12	49	8	0	0	0
11	DKI Jakarta	29	64	20	1	1	0
12	Jawa Barat	263	505	143	11	3	2
13	Jawa Tengah	154	566	197	7	3	1
14	DI Yogyakarta	17	99	23	0	1	0
15	Jawa Timur	270	414	137	34	1	1
16	Banten	30	112	28	6	0	1
17	Bali	113	114	41	8	2	0
18	Nusa Tenggara Barat	75	279	53	17	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	81	453	39	2	1	0
20	Kalimantan Barat	103	179	40	3	0	0
21	Kalimantan Tengah	62	108	14	2	1	0
22	Kalimantan Selatan	172	185	34	6	1	1
23	Kalimantan Timur	63	132	32	4	0	0
24	Sulawesi Utara	133	172	23	1	0	0
25	Sulawesi Tengah	166	157	46	4	0	0
26	Sulawesi Selatan	91	324	244	7	8	1
27	Sulawesi Tenggara	43	312	84	5	2	0
28	Gorontalo	62	49	22	2	0	0
29	Sulawesi Barat	10	54	24	0	1	0
30	Maluku	68	144	13	0	0	0
31	Maluku Utara	13	58	18	1	0	0
32	Papua Barat	15	50	8	0	0	0
33	Papua	27	126	15	1	0	0
	INDONESIA	2952	6557	1603	150	31	7

Tabel 4.3.1.5.3
Tenaga Sanitarian menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan		
		PNS/CPNS	Tugas Khusus	Honorer
1	Aceh	701	0	113
2	Sumatera Utara	385	2	11
3	Sumatera Barat	300	1	22
4	Riau	175	0	6
5	Jambi	262	0	29
6	Sumatera Selatan	429	1	86
7	Bengkulu	135	0	1
8	Lampung	284	0	41
9	Bangka Belitung	78	0	1
10	Kepulauan Riau	63	3	3
11	DKI Jakarta	109	0	6
12	Jawa Barat	833	3	91
13	Jawa Tengah	876	2	50
14	DI Yogyakarta	138	0	2
15	Jawa Timur	792	3	62
16	Banten	168	3	6
17	Bali	268	0	10
18	Nusa Tenggara Barat	294	1	129
19	Nusa Tenggara Timur	514	3	59
20	Kalimantan Barat	306	0	19
21	Kalimantan Tengah	187	0	0
22	Kalimantan Selatan	378	0	21
23	Kalimantan Timur	193	0	38
24	Sulawesi Utara	325	2	2
25	Sulawesi Tengah	324	1	48
26	Sulawesi Selatan	524	3	148
27	Sulawesi Tenggara	405	3	38
28	Gorontalo	134	0	1
29	Sulawesi Barat	76	2	11
30	Maluku	204	0	21
31	Maluku Utara	89	0	1
32	Papua Barat	70	0	3
33	Papua	152	0	17
	INDONESIA	10171	33	1096

4.3.1.6. Tenaga Penyuluh Kesehatan / Promkes

Tenaga Penyuluh Kesehatan termasuk temaga di Puskesmas yang mempunyai peran penting untuk kontirbusi pelayanan kesehatan masyarakat. Akan tetapi tenaga penyuluh kesehatan ini termasuk tenaga yang jumlahnya hanya sedikit, yaitu 4144 tenaga di seluruh Indonesia yang diperoleh informasinya dari 8980 Puskesmas. Tenaga penyuluh kesehatan ini hanya berada di 3085 Puskesmas (34,4%). Kisaran tenaga juga tidak seimbang, sementara banyak Puskesmas yang tidak ada tenaga, tapi ada Puskesmas yang memiliki 5 tenaga atau lebih per Puskesmas. (Tabel 4.3.1.6.1.a).

Tabel 4.3.1.6.1.a

Keberadaan dan distribusi Tenaga Penyuluh Kesehatan/Promkes di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Tenaga Penyuluh Kesehatan/Promkes						
		N	n	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	154	49,5	157	50,5	318	0-10	1,02
2	Sumatera Utara	522	505	136	26,9	369	73,1	179	0-4	0,35
3	Sumatera Barat	253	248	136	54,8	112	45,2	168	0-4	0,68
4	Riau	202	195	44	22,6	151	77,4	58	0-4	0,30
5	Jambi	174	171	49	28,7	122	71,3	61	0-3	0,36
6	Sumatera Selatan	305	298	126	42,3	172	57,7	340	0-14	1,14
7	Bengkulu	174	173	53	30,6	120	69,4	68	0-7	0,39
8	Lampung	267	265	75	28,3	190	71,7	90	0-4	0,34
9	Bangka Belitung	58	57	28	49,1	29	50,9	41	0-4	0,72
10	Kepulauan Riau	65	65	18	27,7	47	72,3	22	0-4	0,34
11	DKI Jakarta	337	336	48	14,3	288	85,7	86	0-7	0,26
12	Jawa Barat	1042	1031	306	29,7	725	70,3	325	0-5	0,32
13	Jawa Tengah	867	861	348	40,4	513	59,6	385	0-5	0,45
14	DI Yogyakarta	121	121	49	40,5	72	59,5	49	0-1	0,40
15	Jawa Timur	949	949	300	31,6	649	68,4	320	0-3	0,34
16	Banten	219	206	58	28,2	148	71,8	65	0-3	0,32
17	Bali	114	114	29	25,4	85	74,6	34	0-2	0,30
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	98	65,8	51	34,2	165	0-6	1,11
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	116	38,4	186	61,6	148	0-4	0,49
20	Kalimantan Barat	234	233	73	31,3	160	68,7	85	0-4	0,36
21	Kalimantan Tengah	180	176	43	24,4	133	75,6	44	0-2	0,25
22	Kalimantan Selatan	223	217	102	47,0	115	53,0	116	0-2	0,53
23	Kalimantan Timur	218	213	58	27,2	155	72,8	70	0-3	0,33
24	Sulawesi Utara	173	167	61	36,5	106	63,5	80	0-4	0,48
25	Sulawesi Tengah	168	163	59	36,2	104	63,8	84	0-5	0,52
26	Sulawesi Selatan	418	406	212	52,2	194	47,8	305	0-8	0,75
27	Sulawesi Tenggara	247	233	115	49,4	118	50,6	178	0-10	0,76
28	Gorontalo	84	74	26	35,1	48	64,9	31	0-2	0,42
29	Sulawesi Barat	84	81	48	59,3	33	40,7	65	0-5	0,80
30	Maluku	165	161	17	10,6	144	89,4	19	0-2	0,12
31	Maluku Utara	102	101	51	50,5	50	49,5	67	0-4	0,66
32	Papua Barat	118	104	24	23,1	80	76,9	35	0-5	0,34
33	Papua	310	294	25	8,5	269	91,5	43	0-6	0,15
	INDONESIA	9188	8980	3085	34.4	5895	65.6	4144	0-14	0.46

Menurut Provinsi, kelangkaan tenaga Promkes, yang hanya 0,12 per Puskesmas dijumpai di Maluku, dan yang mempunyai tenaga lebih dari 1 orang per Puskesmas dijumpai di Aceh, NTB dan Sumatera Selatan (gambar 4.3.1.6.1.b)

Gambar 4.3.1.6.1.b
Rata-rata Jumlah Tenaga Penyuluh Kesehatan, Rifaskes 2011

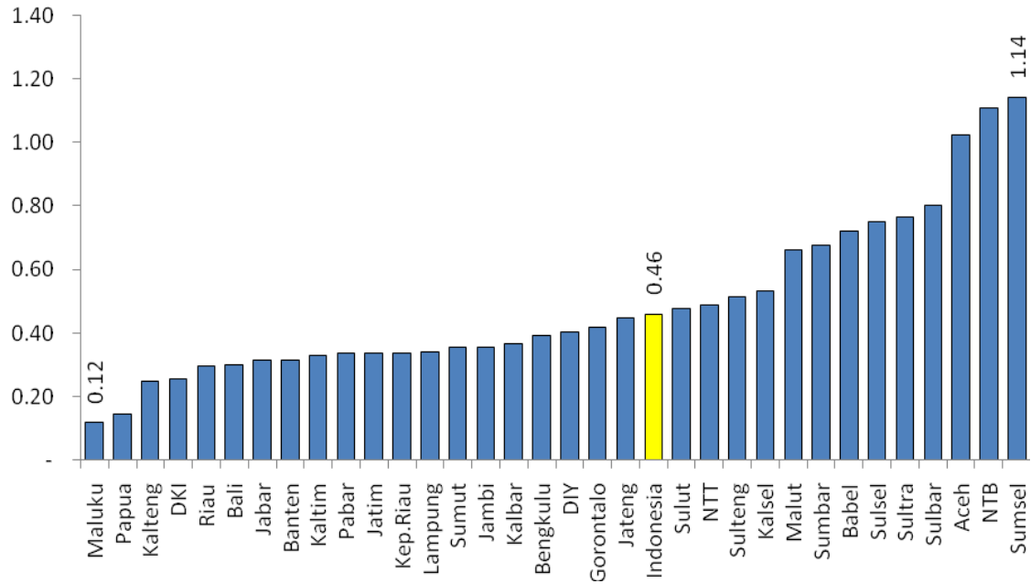

Untuk kualitas tenaga yang dinilai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagaian besar tenaga penyuluh kesehatan berpendidikan S1 Kesehatan (Tabel 4.3.1.6.2). Sedangkan menurut status ketenagaan. Sebagian besar tenaga penyuluh kesehatan adalah PNS. (Tabel 4.3.1.6.3).

Tabel 4.3.1.6.2
Tenaga Penyuluh Kesehatan/ Promkes menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir				
		D3-Promkes	D3-Kes Lain	S1 Kes	S1 Non Kes	S2-Kes
1	Aceh	6	41	259	11	1
2	Sumatera Utara	18	33	128	0	0
3	Sumatera Barat	2	32	131	1	2
4	Riau	0	6	45	7	0
5	Jambi	4	15	42	0	0
6	Sumatera Selatan	7	33	289	2	9
7	Bengkulu	1	10	55	1	1
8	Lampung	7	23	55	2	3
9	Bangka Belitung	3	8	30	0	0
10	Kepulauan Riau	2	5	11	4	0
11	DKI Jakarta	1	16	67	2	0
12	Jawa Barat	18	119	181	4	3
13	Jawa Tengah	39	108	227	6	5
14	DI Yogyakarta	3	20	25	1	0
15	Jawa Timur	42	91	171	14	2
16	Banten	4	11	44	3	3
17	Bali	1	7	25	0	1
18	Nusa Tenggara Barat	12	31	115	7	0
19	Nusa Tenggara Timur	7	2	138	1	0
20	Kalimantan Barat	1	6	75	3	0
21	Kalimantan Tengah	2	6	36	0	0
22	Kalimantan Selatan	9	18	89	0	0
23	Kalimantan Timur	2	6	60	2	0
24	Sulawesi Utara	0	3	74	0	3
25	Sulawesi Tengah	0	7	76	0	1
26	Sulawesi Selatan	8	45	234	2	16
27	Sulawesi Tenggara	12	39	127	0	0
28	Gorontalo	0	2	29	0	0
29	Sulawesi Barat	3	6	54	0	2
30	Maluku	4	8	7	0	0
31	Maluku Utara	3	3	61	0	0
32	Papua Barat	1	9	24	1	0
33	Papua	0	5	38	0	0
	INDONESIA	**222**	**774**	**3022**	**74**	**52**

Tabel 4.3.1.6.3
Tenaga Penyuluh Kesehatan/Promkes menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan	
		PNS/CPNS	Honorer
1	Aceh	242	76
2	Sumatera Utara	175	4
3	Sumatera Barat	154	14
4	Riau	53	5
5	Jambi	58	3
6	Sumatera Selatan	274	66
7	Bengkulu	65	3
8	Lampung	86	4
9	Bangka Belitung	39	2
10	Kepulauan Riau	20	2
11	DKI Jakarta	79	7
12	Jawa Barat	300	25
13	Jawa Tengah	363	22
14	DI Yogyakarta	47	2
15	Jawa Timur	299	21
16	Banten	51	14
17	Bali	34	0
18	Nusa Tenggara Barat	111	54
19	Nusa Tenggara Timur	142	6
20	Kalimantan Barat	80	5
21	Kalimantan Tengah	44	0
22	Kalimantan Selatan	114	2
23	Kalimantan Timur	55	15
24	Sulawesi Utara	80	0
25	Sulawesi Tengah	77	7
26	Sulawesi Selatan	241	64
27	Sulawesi Tenggara	161	17
28	Gorontalo	31	0
29	Sulawesi Barat	54	11
30	Maluku	18	1
31	Maluku Utara	65	2
32	Papua Barat	34	1
33	Papua	40	3
	INDONESIA	**3686**	**458**

4.3.1.7. Tenaga Rekam Medis

Peran tenaga rekam medis di Puskesmas sangat penting untuk melakukan pencatatan dan pelaporan Puskesmas. Akan tetapi tenaga yang berperan sangat penting ini, terlihat hanya berada di 10 persen dari total Puskesmas yang ada di Indonesia, bahkan seluruh Puskesmas di Gorontalo tidak ada satupun Puskesmas yang memiliki tenaga rekam medis. Jumlah total keseluruhan adalah 1101 orang, dengan kisaran 0-9 tenaga per Puskesmas (Tabel 4.3.1.7.1).

Tabel 4.3.1.7.1
Keberadaan dan Distribusi Tenaga Rekam Medis di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Tenaga Rekam Medis						
		N	n	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	46	14,8	265	85,2	86	0-9	0,28
2	Sumatera Utara	522	505	22	4,4	483	95,6	28	0-4	0,06
3	Sumatera Barat	253	248	103	41,5	145	58,5	132	0-4	0,53
4	Riau	202	195	25	12,8	170	87,2	32	0-4	0,16
5	Jambi	174	171	5	2,9	166	97,1	8	0-3	0,05
6	Sumatera Selatan	305	298	26	8,7	272	91,3	30	0-2	0,10
7	Bengkulu	174	173	6	3,5	167	96,5	6	0-1	0,03
8	Lampung	267	265	11	4,2	254	95,8	13	0-2	0,05
9	Bangka Belitung	58	57	6	10,5	51	89,5	9	0-2	0,16
10	Kepulauan Riau	65	65	4	6,2	61	93,8	4	0-1	0,06
11	DKI Jakarta	337	336	15	4,5	321	95,5	25	0-5	0,07
12	Jawa Barat	1042	1031	42	4,1	989	95,9	43	0-2	0,04
13	Jawa Tengah	867	861	194	22,5	667	77,5	211	0-3	0,25
14	DI Yogyakarta	121	121	71	58,7	50	41,3	75	0-2	0,62
15	Jawa Timur	949	949	101	10,6	848	89,4	107	0-2	0,11
16	Banten	219	206	35	17,0	171	83,0	44	0-3	0,21
17	Bali	114	114	3	2,6	111	97,4	4	0-2	0,04
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	10	6,7	139	93,3	17	0-4	0,11
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	32	10,6	270	89,4	44	0-3	0,15
20	Kalimantan Barat	234	233	2	,9	231	99,1	2	0-1	0,01
21	Kalimantan Tengah	180	176	15	8,5	161	91,5	17	0-2	0,10
22	Kalimantan Selatan	223	217	3	1,4	214	98,6	3	0-1	0,01
23	Kalimantan Timur	218	213	5	2,3	208	97,7	9	0-5	0,04
24	Sulawesi Utara	173	167	8	4,8	159	95,2	8	0-1	0,05
25	Sulawesi Tengah	168	163	18	11,0	145	89,0	32	0-6	0,20
26	Sulawesi Selatan	418	406	54	13,3	352	86,7	64	0-4	0,16
27	Sulawesi Tenggara	247	233	15	6,4	218	93,6	16	0-2	0,07
28	Gorontalo	84	74	0	,0	74	100,0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	84	81	2	2,5	79	97,5	2	0-1	0,02
30	Maluku	165	161	3	1,9	158	98,1	3	0-1	0,02
31	Maluku Utara	102	100	5	5,0	95	95,0	7	0-3	0,07
32	Papua Barat	118	104	5	4,8	99	95,2	7	0-3	0,07
33	Papua	310	294	9	3,1	285	96,9	13	0-2	0,04
	INDONESIA	9188	8979	901	10.0	8078	90.0	1101	0-9	0.12

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, dan status kesehatan dapat dilihat pada Tabel 4.3.1.7.2 dan Tabel 4.3.1.7.3. Sebagian besar tenaga rekam medis adalah lulusan D3-Rekam Medis, dan PNS.

Tabel 4.3.1.7.2
Tenaga Rekam Medis menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir				
		D3-Rekam Medis	D3-Kes Lain	S1 Kes	S1 Non Kes	S2-Kes
1	Aceh	36	43	7	0	0
2	Sumatera Utara	12	15	1	0	0
3	Sumatera Barat	128	3	1	0	0
4	Riau	28	3	1	0	0
5	Jambi	6	2	0	0	0
6	Sumatera Selatan	25	3	2	0	0
7	Bengkulu	2	1	3	0	0
8	Lampung	9	4	0	0	0
9	Bangka Belitung	2	7	0	0	0
10	Kepulauan Riau	4	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	14	9	2	0	0
12	Jawa Barat	32	7	4	0	0
13	Jawa Tengah	187	18	6	0	0
14	DI Yogyakarta	73	0	1	1	0
15	Jawa Timur	89	8	10	0	0
16	Banten	31	9	4	0	0
17	Bali	4	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	16	0	1	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	43	0	1	0	0
20	Kalimantan Barat	1	1	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	12	2	2	1	0
22	Kalimantan Selatan	1	2	0	0	0
23	Kalimantan Timur	7	1	0	1	0
24	Sulawesi Utara	1	3	4	0	0
25	Sulawesi Tengah	9	19	4	0	0
26	Sulawesi Selatan	43	7	14	0	0
27	Sulawesi Tenggara	10	3	2	1	0
28	Gorontalo	0	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	0	1	1	0	0
30	Maluku	2	0	1	0	0
31	Maluku Utara	3	2	2	0	0
32	Papua Barat	2	4	1	0	0
33	Papua	6	7	0	0	0
	INDONESIA	838	184	75	4	0

Tabel 4.3.1.7.3
Tenaga Rekam Medis menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan	
		PNS/CPNS	Honorer
1	Aceh	34	18
2	Sumatera Utara	28	0
3	Sumatera Barat	118	0
4	Riau	29	2
5	Jambi	6	2
6	Sumatera Selatan	24	3
7	Bengkulu	5	0
8	Lampung	5	2
9	Bangka Belitung	4	5
10	Kepulauan Riau	4	0
11	DKI Jakarta	14	8
12	Jawa Barat	38	3
13	Jawa Tengah	179	12
14	DI Yogyakarta	73	0
15	Jawa Timur	49	40
16	Banten	35	6
17	Bali	4	0
18	Nusa Tenggara Barat	12	1
19	Nusa Tenggara Timur	41	1
20	Kalimantan Barat	2	0
21	Kalimantan Tengah	15	1
22	Kalimantan Selatan	3	0
23	Kalimantan Timur	6	3
24	Sulawesi Utara	8	0
25	Sulawesi Tengah	27	4
26	Sulawesi Selatan	59	1
27	Sulawesi Tenggara	13	1
28	Gorontalo	0	0
29	Sulawesi Barat	1	1
30	Maluku	3	0
31	Maluku Utara	6	1
32	Papua Barat	6	1
33	Papua	10	3
	INDONESIA	861	240

4.3.1.8. Tenaga Analis Kesehatan

Deskripsi tenaga analis kesehatan diperoleh dari 8980 Puskesmas. Jumlah Analis Kesehatan untuk seluruh Indonesia adalah 6937 orang yang bekerja di 5054 Puskesmas (56,3%). Kisaran tenaga rekam medis adalah dari yang tidak ada sampai 9 orang di Puskesmas (Tabel 4.3.1.8.1). Mayoritas, tingkat pendidikan terkhir dari tenaga analis kesehatan adalah D-3 Analis, dan status ketenagaan adalah PNS (Tabel 4.3.1.8.2 dan Tabel 4.3.1.8.3).

Tabel 4.3.1.8.1

Keberadaan dan Distribusi Tenaga Analis Kesehatan di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Tenaga Analis Kesehatan						
		N	n	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	237	76,2	74	23,8	412	0-5	1,32
2	Sumatera Utara	522	505	274	54,3	231	45,7	368	0-7	0,73
3	Sumatera Barat	253	248	224	90,3	24	9,7	327	0-5	1,32
4	Riau	202	195	151	77,4	44	22,6	222	0-5	1,14
5	Jambi	174	171	129	75,4	42	24,6	216	0-4	1,26
6	Sumatera Selatan	305	298	183	61,4	115	38,6	253	0-4	0,85
7	Bengkulu	174	173	78	45,1	95	54,9	89	0-3	0,51
8	Lampung	267	265	168	63,4	97	36,6	216	0-4	0,82
9	Bangka Belitung	58	57	54	94,7	3	5,3	79	0-3	1,39
10	Kepulauan Riau	65	65	47	72,3	18	27,7	66	0-3	1,02
11	DKI Jakarta	337	336	48	14,3	288	85,7	87	0-4	0,26
12	Jawa Barat	1042	1031	384	37,2	647	62,8	454	0-6	0,44
13	Jawa Tengah	867	861	674	78,3	187	21,7	817	0-4	0,95
14	DI Yogyakarta	121	121	119	98,3	2	1,7	183	0-4	1,51
15	Jawa Timur	949	949	657	69,2	292	30,8	825	0-4	0,87
16	Banten	219	206	82	39,8	124	60,2	92	0-2	0,45
17	Bali	114	114	62	54,4	52	45,6	69	0-3	0,61
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	122	81,9	27	18,1	232	0-6	1,56
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	195	64,6	107	35,4	296	0-8	0,98
20	Kalimantan Barat	234	233	186	79,8	47	20,2	254	0-4	1,09
21	Kalimantan Tengah	180	176	80	45,5	96	54,5	96	0-3	0,55
22	Kalimantan Selatan	223	217	187	86,2	30	13,8	262	0-4	1,21
23	Kalimantan Timur	218	213	112	52,6	101	47,4	135	0-4	0,63
24	Sulawesi Utara	173	167	8	4,8	159	95,2	8	0-1	0,05
25	Sulawesi Tengah	168	163	37	22,7	126	77,3	40	0-2	0,25
26	Sulawesi Selatan	418	406	273	67,2	133	32,8	365	0-4	0,90
27	Sulawesi Tenggara	247	233	55	23,6	178	76,4	70	0-4	0,30
28	Gorontalo	84	74	5	6,8	69	93,2	6	0-2	0,08
29	Sulawesi Barat	84	81	35	43,2	46	56,8	38	0-3	0,47
30	Maluku	165	161	13	8,1	148	91,9	14	0-2	0,09
31	Maluku Utara	102	101	22	21,8	79	78,2	26	0-2	0,26
32	Papua Barat	118	104	35	33,7	69	66,3	65	0-5	0,63
33	Papua	310	294	118	40,1	176	59,9	255	0-9	0,87
	INDONESIA	9188	8980	5054	56.3	3926	43.7	6937	0-9	0.77

Tabel 4.3.1.8.2
Tenaga Analis Kesehatan menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir					
		SMAK	D3-Analis	D3-Kes Lain	S1 Kes	S1 Non Kes	S2-Kes
1	Aceh	163	237	2	10	0	0
2	Sumatera Utara	100	238	6	19	5	0
3	Sumatera Barat	109	211	4	3	0	0
4	Riau	122	94	3	1	2	0
5	Jambi	94	116	1	2	3	0
6	Sumatera Selatan	61	171	4	13	4	0
7	Bengkulu	18	63	2	6	0	0
8	Lampung	38	161	8	9	0	0
9	Bangka Belitung	9	68	0	2	0	0
10	Kepulauan Riau	22	43	1	0	0	0
11	DKI Jakarta	45	42	0	0	0	0
12	Jawa Barat	76	357	9	10	2	0
13	Jawa Tengah	143	637	18	16	2	1
14	DI Yogyakarta	60	113	4	5	1	0
15	Jawa Timur	164	630	11	12	8	0
16	Banten	9	74	6	3	0	0
17	Bali	17	50	2	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	66	145	3	11	6	1
19	Nusa Tenggara Timur	29	263	2	2	0	0
20	Kalimantan Barat	109	139	2	4	0	0
21	Kalimantan Tengah	23	72	1	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	64	194	0	4	0	0
23	Kalimantan Timur	27	104	1	3	0	0
24	Sulawesi Utara	4	3	1	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	16	19	0	5	0	0
26	Sulawesi Selatan	94	222	13	33	2	1
27	Sulawesi Tenggara	14	52	1	2	1	0
28	Gorontalo	1	4	1	0	0	0
29	Sulawesi Barat	11	25	2	0	0	0
30	Maluku	4	10	0	0	0	0
31	Maluku Utara	3	23	0	0	0	0
32	Papua Barat	40	25	0	0	0	0
33	Papua	206	36	6	4	3	0
	INDONESIA	1961	4641	114	179	39	3

Tabel 4.3.1.8.3
Tenaga Analis Kesehatan menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan	
		PNS/CPNS	Honorer
1	Aceh	345	67
2	Sumatera Utara	353	15
3	Sumatera Barat	300	27
4	Riau	193	29
5	Jambi	196	20
6	Sumatera Selatan	210	43
7	Bengkulu	80	9
8	Lampung	187	29
9	Bangka Belitung	79	0
10	Kepulauan Riau	61	5
11	DKI Jakarta	61	26
12	Jawa Barat	367	87
13	Jawa Tengah	724	93
14	DI Yogyakarta	178	5
15	Jawa Timur	652	173
16	Banten	87	5
17	Bali	68	1
18	Nusa Tenggara Barat	188	44
19	Nusa Tenggara Timur	237	59
20	Kalimantan Barat	249	5
21	Kalimantan Tengah	92	4
22	Kalimantan Selatan	259	3
23	Kalimantan Timur	117	18
24	Sulawesi Utara	8	0
25	Sulawesi Tengah	37	3
26	Sulawesi Selatan	343	22
27	Sulawesi Tenggara	60	10
28	Gorontalo	6	0
29	Sulawesi Barat	37	1
30	Maluku	14	0
31	Maluku Utara	26	0
32	Papua Barat	61	4
33	Papua	220	35
	INDONESIA	6095	842

4.3.1.9. Tenaga Kesehatan Lain

Tenaga Kesehatan Lain di Puskesmas, tidak diketahui secara pasti peran yang mereka lakukan. Bisa saja tenaga kesehatan lain ini difungsikan sebagai tenaga gizi, atau promkes, atau rekam medis, maupun analis kesehatan. Tentunya tenaga kesehatan lain ini memerlukan tambahan pelatihan untuk memfungsikan berbagai macam pelayanan masyarakat. Pada tabel 4.3.1.9.1 dapat dilihat jumlah mereka cukup besar yaitu 4913 orang, tersebar di 2485 Puskesmas dengan kisaran 0-15 orang per Puskesmas.

Tabel 4.3.1.9.1
Keberadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan Lain di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Tenaga Kesehatan Lain						
		N	N	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	Aceh	317	311	145	46,6	166	53,4	314	0-12	1,01
2	Sumatera Utara	522	505	115	22,8	390	77,2	260	0-15	0,51
3	Sumatera Barat	253	248	96	38,7	152	61,3	174	0-7	0,70
4	Riau	202	195	56	28,7	139	71,3	99	0-5	0,51
5	Jambi	174	170	50	29,2	120	70,2	94	0-7	0,55
6	Sumatera Selatan	305	298	120	40,3	178	59,7	369	0-14	1,24
7	Bengkulu	174	173	75	43,4	98	56,6	154	0-9	0,89
8	Lampung	267	265	45	17,0	220	83,0	86	0-8	0,32
9	Bangka Belitung	58	57	26	45,6	31	54,4	42	0-4	0,74
10	Kepulauan Riau	65	65	23	35,4	42	64,6	39	0-4	0,60
11	DKI Jakarta	337	336	32	9,5	304	90,5	58	0-6	0,17
12	Jawa Barat	1042	1030	261	25,3	769	74,6	384	0-7	0,37
13	Jawa Tengah	867	861	269	31,2	592	68,8	405	0-13	0,47
14	DI Yogyakarta	121	121	72	59,5	49	40,5	128	0-7	1,06
15	Jawa Timur	949	949	176	18,5	773	81,5	313	0-10	0,33
16	Banten	219	206	43	20,9	163	79,1	64	0-5	0,31
17	Bali	114	114	22	19,3	92	80,7	30	0-3	0,26
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	50	33,6	99	66,4	95	0-5	0,64
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	83	27,5	219	72,5	141	0-9	0,47
20	Kalimantan Barat	234	233	31	13,3	202	86,7	47	0-4	0,20
21	Kalimantan Tengah	180	176	26	14,8	150	85,2	29	0-3	0,16
22	Kalimantan Selatan	223	217	63	29,0	154	71,0	93	0-8	0,43
23	Kalimantan Timur	218	213	88	41,3	125	58,7	159	0-8	0,75
24	Sulawesi Utara	173	167	36	21,6	131	78,4	62	0-5	0,37
25	Sulawesi Tengah	168	163	78	47,9	85	52,1	175	0-10	1,07
26	Sulawesi Selatan	418	406	209	51,5	197	48,5	536	0-10	1,32
27	Sulawesi Tenggara	247	233	95	40,8	138	59,2	202	0-10	0,87
28	Gorontalo	84	74	42	56,8	32	43,2	109	0-8	1,47
29	Sulawesi Barat	84	81	21	25,9	60	74,1	33	0-4	0,41
30	Maluku	165	161	25	15,5	136	84,5	30	0-3	0,19
31	Maluku Utara	102	101	47	46,5	54	53,5	101	0-8	1,00
32	Papua Barat	118	104	16	15,4	88	84,6	32	0-10	0,31
33	Papua	310	294	37	12,6	257	87,4	56	0-4	0,19
	INDONESIA	9188	8978	2485	29.3	5978	70.6	4913	0-15	0.55

Tingkat pendidikan terakhir dari tenaga kesehatan lain itu, cukup baik karena sebagian besar dari mereka berpendidikan D3 dan S1-Kesehatan, bahkan diantara mereka ada yang sudah S-2 di bidang kesehatan (Tabel 4.3.1.9.2), dan juga status tenaga kesehatan mereka sebagian besar juga sudah PNS. (Tabel 4.3.1.9.3).

Tabel 4.3.1.9.2

Tenaga Kesehatan Lain menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir			
		D3	S1-Kes	S1-Non Kes	S2-Kes
1	Aceh	133	179	2	0
2	Sumatera Utara	152	108	0	0
3	Sumatera Barat	76	88	6	4
4	Riau	16	78	3	2
5	Jambi	39	53	0	2
6	Sumatera Selatan	72	280	10	7
7	Bengkulu	26	124	3	1
8	Lampung	25	57	4	0
9	Bangka Belitung	11	28	3	0
10	Kepulauan Riau	13	24	1	1
11	DKI Jakarta	35	21	0	2
12	Jawa Barat	90	237	24	33
13	Jawa Tengah	221	141	18	25
14	DI Yogyakarta	60	33	13	22
15	Jawa Timur	183	96	26	8
16	Banten	23	31	5	5
17	Bali	13	15	1	1
18	Nusa Tenggara Barat	24	62	7	2
19	Nusa Tenggara Timur	62	78	1	0
20	Kalimantan Barat	18	27	2	0
21	Kalimantan Tengah	4	22	3	0
22	Kalimantan Selatan	28	51	5	9
23	Kalimantan Timur	22	128	0	9
24	Sulawesi Utara	17	43	0	2
25	Sulawesi Tengah	6	164	4	1
26	Sulawesi Selatan	72	405	29	30
27	Sulawesi Tenggara	14	185	1	2
28	Gorontalo	14	87	3	5
29	Sulawesi Barat	5	25	1	2
30	Maluku	13	17	0	0
31	Maluku Utara	11	88	1	1
32	Papua Barat	18	13	1	0
33	Papua	8	42	6	0
	INDONESIA	1524	3030	183	176

Tabel 4.3.1.9.3
Tenaga Kesehatan Lain menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan	
		PNS/CPNS	Honorer
1	Aceh	193	121
2	Sumatera Utara	194	66
3	Sumatera Barat	146	28
4	Riau	75	24
5	Jambi	64	30
6	Sumatera Selatan	263	106
7	Bengkulu	140	14
8	Lampung	57	29
9	Bangka Belitung	35	7
10	Kepulauan Riau	33	6
11	DKI Jakarta	48	10
12	Jawa Barat	299	85
13	Jawa Tengah	347	58
14	DI Yogyakarta	60	68
15	Jawa Timur	214	99
16	Banten	54	10
17	Bali	28	2
18	Nusa Tenggara Barat	64	31
19	Nusa Tenggara Timur	120	21
20	Kalimantan Barat	33	14
21	Kalimantan Tengah	26	3
22	Kalimantan Selatan	84	9
23	Kalimantan Timur	119	40
24	Sulawesi Utara	61	1
25	Sulawesi Tengah	128	47
26	Sulawesi Selatan	320	216
27	Sulawesi Tenggara	151	51
28	Gorontalo	94	15
29	Sulawesi Barat	24	9
30	Maluku	28	2
31	Maluku Utara	94	7
32	Papua Barat	26	6
33	Papua	45	11
	INDONESIA	3667	1246

4.3.1.10. Tenaga Non Kesehatan

Keberadaan tenaga administrasi dan pekarya merupakan urutan ketiga terbanyak di Puskesmas, setelah tenaga Perawat dan Bidan. Jumlah keseluruhan dari tenaga ini adalah 42408 orang yang tersebar di 8977 Puskesmas (Tabel 4.3.1.10.1). Hampir dari 90% Puskesmas mempekerjakan tenaga adminsitrasi dan pekarya ini, dengan kisaran yang sangat lebar, mulai dari 0 sampai 49. Jumlah rata-rata tenaga per Puskesmas adalah 4,72 orang per Puskesmas, bervariasi dari 10,75 orang per Puskesmas di DI Yogyakarta, sampai 1,40 orang per Puskesmas di Papua Barat.

Tabel 4.3.1.10.1
Keberadaan dan Distribusi Tenaga Administrasidan Pekarya di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Tenaga Administrasi dan Pekarya						
		N	n	Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Kisaran	Rata-rata/ Puskemas
1	DI Aceh	317	311	299	96,1	12	3,9	1447	0-21	4,65
2	Sumatera Utara	522	504	356	70,5	148	29,3	810	0-19	1,61
3	Sumatera Barat	253	248	241	97,2	7	2,8	926	0-12	3,73
4	Riau	202	195	177	90,8	18	9,2	603	0-18	3,09
5	Jambi	174	170	143	83,6	27	15,8	405	0-9	2,38
6	Sumatera Selatan	305	298	274	91,9	24	8,1	1170	0-22	3,93
7	Bengkulu	174	173	142	82,1	31	17,9	441	0-11	2,55
8	Lampung	267	265	238	89,8	27	10,2	839	0-25	3,17
9	Bangka Belitung	58	57	56	98,2	1	1,8	378	0-21	6,63
10	Kepulauan Riau	65	65	63	96,9	2	3,1	382	0-26	5,88
11	DKI Jakarta	337	336	314	93,5	22	6,5	1338	0-49	3,98
12	Jawa Barat	1042	1031	996	96,6	35	3,4	4763	0-19	4,62
13	Jawa Tengah	867	860	858	99,7	2	,2	6537	0-36	7,60
14	DI Yogyakarta	121	121	121	100,0	0	,0	1301	2-25	10,75
15	Jawa Timur	949	949	944	99,5	5	,5	9009	0-49	9,49
16	Banten	219	206	200	97,1	6	2,9	983	0-15	4,77
17	Bali	114	114	111	97,4	3	2,6	716	0-25	6,28
18	Nusa Tenggara Barat	151	149	145	97,3	4	2,7	1243	0-27	8,34
19	Nusa Tenggara Timur	327	302	278	92,1	24	7,9	1005	0-14	3,33
20	Kalimantan Barat	234	233	196	84,1	37	15,9	706	0-18	3,03
21	Kalimantan Tengah	180	176	136	77,3	40	22,7	406	0-10	2,31
22	Kalimantan Selatan	223	217	193	88,9	24	11,1	615	0-20	2,83
23	Kalimantan Timur	218	213	209	98,1	4	1,9	1293	0-28	6,07
24	Sulawesi Utara	173	167	123	73,7	44	26,3	277	0-11	1,66
25	Sulawesi Tengah	168	163	145	89,0	18	11,0	507	0-14	3,11
26	Sulawesi Selatan	418	406	362	89,2	44	10,8	1459	0-34	3,59
27	Sulawesi Tenggara	247	233	181	77,7	52	22,3	674	0-42	2,89
28	Gorontalo	84	74	69	93,2	5	6,8	513	0-26	6,93
29	Sulawesi Barat	84	81	69	85,2	12	14,8	213	0-14	2,63
30	Maluku	165	161	111	68,9	50	31,1	388	0-15	2,41
31	Maluku Utara	102	101	81	80,2	20	19,8	267	0-11	2,64
32	Papua Barat	118	104	61	58,7	43	41,3	146	0-13	1,40
33	Papua	310	294	173	58,8	121	41,2	648	0-49	2,20
	INDONESIA	9188	8977	8065	89.8	912	10.2	42408	0-49	4.72

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir (Tabel 4.3.1.10.2), tenaga administrasi ini adalah SMP (18,6%), dan SMA (71%), dan hanya 10,4 persen berpendidikan D3 – S2 Kesehatan. Sedangkan status ketenagaan, hampir 60 persen adalah PNS (Tabel 4.3.1.10.3).

Tabel 4.3.1.10.2.
Tenaga Administrasi dan Pekarya di Puskesmas menurut
Tingkat Pendidikan Terakhir per Provinsi, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Pendidikan terakhir					
		SMP	SMA	D3	S1-Kes	S1-Non Kes	S2-Kes
1	Aceh	259	1088	49	18	33	0
2	Sumatera Utara	102	607	53	16	32	0
3	Sumatera Barat	291	576	22	19	18	0
4	Riau	103	451	22	7	20	0
5	Jambi	85	293	18	1	8	0
6	Sumatera Selatan	138	885	62	33	52	0
7	Bengkulu	68	275	14	38	37	9
8	Lampung	116	621	50	17	33	2
9	Bangka Belitung	76	245	42	6	9	0
10	Kepulauan Riau	113	237	17	4	10	1
11	DKI Jakarta	216	890	94	71	67	0
12	Jawa Barat	852	3391	172	118	213	17
13	Jawa Tengah	1372	4460	299	143	258	5
14	DI Yogyakarta	279	847	65	56	46	8
15	Jawa Timur	1762	6350	187	154	533	23
16	Banten	221	624	42	38	52	6
17	Bali	78	586	10	12	30	0
18	Nusa Tenggara Barat	157	905	80	31	70	0
19	Nusa Tenggara Timur	249	714	17	9	16	0
20	Kalimantan Barat	112	552	17	12	12	1
21	Kalimantan Tengah	49	322	13	2	20	0
22	Kalimantan Selatan	95	455	32	8	24	1
23	Kalimantan Timur	243	945	38	21	46	0
24	Sulawesi Utara	23	232	6	1	15	0
25	Sulawesi Tengah	58	406	13	17	13	0
26	Sulawesi Selatan	188	1044	66	85	72	4
27	Sulawesi Tenggara	33	603	8	16	13	1
28	Gorontalo	40	424	22	13	14	0
29	Sulawesi Barat	25	170	4	3	11	0
30	Maluku	46	336	3	1	2	0
31	Maluku Utara	16	232	6	2	11	0
32	Papua Barat	45	91	4	3	3	0
33	Papua	367	260	10	4	7	0
	INDONESIA	7877	30117	1557	979	1800	78

Tabel 4.3.1.10.3.
Tenaga Administrasi dan Pekarya di Puskesmas menurut Status Ketenagaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Status Ketenagaan	
		PNS/CPNS	Honorer
1	Aceh	701	746
2	Sumatera Utara	567	243
3	Sumatera Barat	478	448
4	Riau	301	302
5	Jambi	241	164
6	Sumatera Selatan	651	519
7	Bengkulu	254	187
8	Lampung	393	446
9	Bangka Belitung	160	218
10	Kepulauan Riau	120	262
11	DKI Jakarta	583	755
12	Jawa Barat	2815	1948
13	Jawa Tengah	4885	1652
14	DI Yogyakarta	956	345
15	Jawa Timur	6106	2903
16	Banten	383	600
17	Bali	475	241
18	Nusa Tenggara Barat	578	665
19	Nusa Tenggara Timur	484	521
20	Kalimantan Barat	557	149
21	Kalimantan Tengah	303	103
22	Kalimantan Selatan	389	226
23	Kalimantan Timur	578	715
24	Sulawesi Utara	179	98
25	Sulawesi Tengah	201	306
26	Sulawesi Selatan	709	750
27	Sulawesi Tenggara	180	494
28	Gorontalo	141	372
29	Sulawesi Barat	117	96
30	Maluku	183	205
31	Maluku Utara	98	169
32	Papua Barat	70	76
33	Papua	189	459
	INDONESIA	25025	17383

Dari uraian ketenagaan kesehatan di Puskesmas, masih memerlukan kajian lebih dalam lagi, terutama memperhatikan unsur jumlah penduduk dan luas wilayah. Beberapa hal dari kajian di atas, dapat disimpulkan seperti yang dapat terlihat pada gambar 4.3.1.10.4. Secara nasional jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas adalah 339.371 orang. Untuk jumlah ini, ada 7,38 persen adalah Tenaga Medis (Dokter, dan Dokter Gigi), 65,89 persen adalah tenaga keperawatan (perawat, bidan dan perawat gigi), 2,96 persen tenaga kefarmasian (apoteker, dan teknis kefarmasian), 7,46 persen adalah tenaga gizi/ sanitarian/ promkes, 2,37 persen tenaga rekam medis dan analis kesehatan, dan 13,94 persen adalah tenaga kesehatan lainnya, administrasi dan pekarya.

Gambar 4.3.1.10.4
Persentase Tenaga Kesehatan menurut Jenis Ketenagaan di Puskesmas, Rifaskes 2011

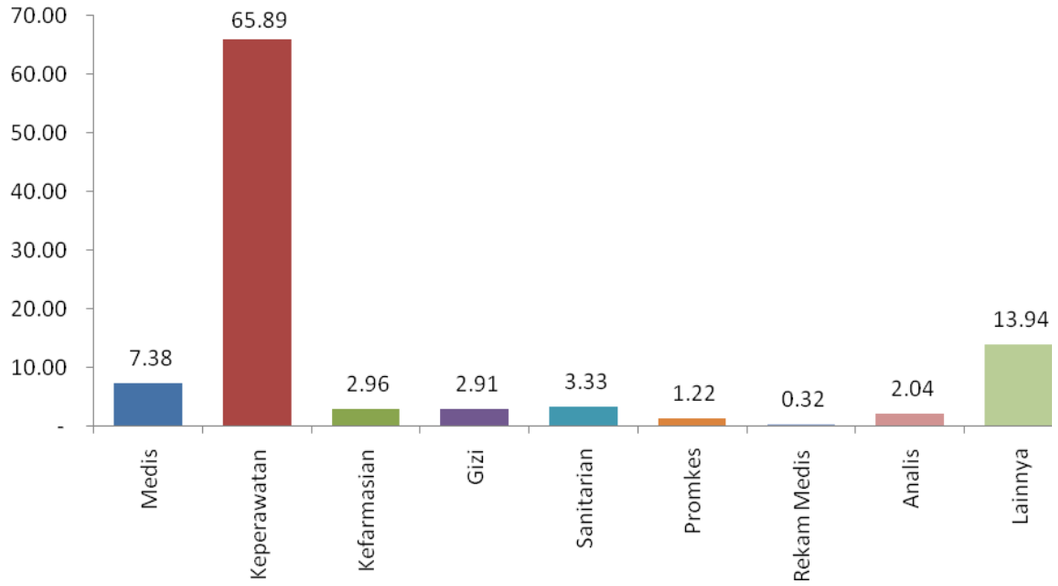

4.3.2. PENEMPATAN DAN ROTASI

Tabel berikut akan menjelaskan tenaga Puskesmas yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan riwayat pendidikannya, tenaga Puskesmas yang pindah ke tempat kerja lain dan pergantian Kepala Puskesmas sebelum bekerja satu tahun, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Yang dimaksud tenaga/petugas Puskesmas yang melaksanakan tugas tidak sesuai riwayat pendidikannya atau ditempatkan/dipekerjakan tidak sesuai dengan riwayat pendidikan (misalnya tenaga teknis kesehatan, seperti perawat, bidan, dsb ditugaskan sebagai tenaga administratif).

Tabel 4.3.2.1 memperlihatkan persentase Puskesmas yang memiliki penanggung jawab program tidak sesuai dengan pendidikan yang dibedakan atas Puskesmas perkotaan dan perdesaan.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 62,8 persen Puskesmas di perkotaan memiliki pemegang program yang tidak sesuai dengan pendidikannya dan di Puskesmas perdesaan sebanyak 69,0 persen. Puskesmas perkotaan yang memiliki pemegang program sesuai pendidikan sebanyak 37,0 persen dan di Puskesmas perdesaan sebanyak 30,9 persen.

Tabel 4.3.2.1
Persentase Puskesmas Menurut Penanggung Jawab Program Tidak Sesuai Dengan Pendidikan di Perkotaan dan Perdesaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Perkotaan			Perdesaan		
		Jml pusk	% Tidak Sesuai	% Sesuai	Jml pusk	% Tidak Sesuai	% Sesuai
1	Aceh	81	80,2	19,8	230	77,8	22,2
2	Sumatera Utara	132	69,7	29,5	374	74,1	25,1
3	Sumatera Barat	90	53,3	46,7	158	65,2	34,8
4	Riau	53	79,2	20,8	142	74,6	25,4
5	Jambi	42	57,1	42,9	129	81,4	18,6
6	Sumatera Selatan	81	51,9	48,1	217	59,4	40,1
7	Bengkulu	40	72,5	27,5	133	81,2	18,8
8	Lampung	62	53,2	46,8	203	78,3	21,7
9	Bangka Belitung	21	81,0	19,0	36	80,6	19,4
10	Kepulauan Riau	32	68,8	31,3	33	75,8	24,2
11	DKI Jakarta	336	68,2	31,5	0	0	0
12	Jawa Barat	278	66,5	33,1	753	81,4	18,5
13	Jawa Tengah	142	54,2	45,8	719	56,6	43,4
14	DI Yogyakarta	24	54,2	45,8	97	55,7	44,3
15	Jawa Timur	166	52,4	47,6	783	66,7	33,2
16	Banten	67	80,6	19,4	139	81,3	18,7
17	Bali	31	64,5	35,5	83	71,1	28,9
18	Nusa Tenggara Barat	27	66,7	33,3	122	68,9	31,1
19	Nusa Tenggara Timur	29	82,8	17,2	273	68,1	31,9
20	Kalimantan Barat	54	42,6	57,4	179	61,5	38,5
21	Kalimantan Tengah	48	58,3	39,6	128	60,2	39,8
22	Kalimantan Selatan	56	32,1	67,9	161	37,3	62,7
23	Kalimantan Timur	74	56,8	43,2	139	76,3	23,7
24	Sulawesi Utara	47	61,7	38,3	120	78,3	21,7
25	Sulawesi Tengah	26	69,2	30,8	137	81,8	18,2
26	Sulawesi Selatan	79	58,2	41,8	327	61,5	38,5
27	Sulawesi Tenggara	40	60,0	40,0	193	78,2	21,8
28	Gorontalo	15	53,3	46,7	59	79,7	20,3
29	Sulawesi Barat	8	87,5	12,5	73	71,2	28,8
30	Maluku	44	63,6	36,4	117	71,8	28,2
31	Maluku Utara	27	66,7	33,3	74	75,7	24,3
32	Papua Barat	19	52,6	47,4	85	49,4	50,6
33	Papua	50	76,0	24,0	244	59,0	41,0
	INDONESIA	**2321**	**62.8**	**37.0**	**6660**	**69.0**	**30.9**

Terdapat lebih dari 65 persen provinsi di Indonesia (22 provinsi), yang Puskesmasnya memiliki pemegang program tidak sesuai dengan pendidikannya di atas angka nasional (67,4 persen). Puskesmas perkotaan yang memiliki pemegang program tidak sesuai dengan pendidikan dapat dilihat tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat (87,5%) disusul oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (82,8%), sementara terendah dijumpai pada Provinsi

Kalimantan Selatan (32,1%) dan Provinsi Kalimantan Barat (42,6%). Puskesmas perdesaan yang memiliki pemegang program tidak sesuai dengan pendidikan dapat dilihat tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah (81,8%) disusul oleh Provinsi Jawa Barat dan Jambi (81,4%), sementara terendah dijumpai pada Provinsi Kalimantan Selatan (37,3%) dan Provinsi Papua Barat (62,7%).

Tabel 4.3.2.2
Persentase Puskesmas menurut Pimpinan Puskesmas dengan Rotasi Kurang dari Satu Tahun di Lokasi Perkotaan dan Perdesaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Perkotaan			Perdesaan		
		Jml pusk	% Ada	% Tidak Ada	Jml pusk	% Ada	% Tidak Ada
1	Aceh	81	32,1	67,9	230	28,3	70,9
2	Sumatera Utara	132	15,9	83,3	374	26,2	72,7
3	Sumatera Barat	90	32,2	67,8	158	32,9	67,1
4	Riau	53	34,0	66,0	142	51,4	48,6
5	Jambi	42	23,8	76,2	129	47,3	52,7
6	Sumatera Selatan	81	21,0	79,0	217	29,5	70,5
7	Bengkulu	40	45,0	55,0	133	38,3	61,7
8	Lampung	62	27,4	72,6	203	36,5	63,1
9	Bangka Belitung	21	47,6	52,4	36	33,3	66,7
10	Kepulauan Riau	32	43,8	56,3	33	42,4	57,6
11	DKI Jakarta	336	19,3	80,4	0	0	0
12	Jawa Barat	278	34,9	64,4	753	30,7	68,5
13	Jawa Tengah	142	32,4	66,9	719	25,2	74,7
14	DI Yogyakarta	24	16,7	83,3	97	17,5	82,5
15	Jawa Timur	166	19,9	80,1	783	23,2	76,5
16	Banten	67	22,4	77,6	139	45,3	54,7
17	Bali	31	16,1	83,9	83	15,7	83,1
18	Nusa Tenggara Barat	27	48,1	51,9	122	38,5	59,0
19	Nusa Tenggara Timur	29	37,9	62,1	273	34,1	65,9
20	Kalimantan Barat	54	24,1	75,9	179	19,0	81,0
21	Kalimantan Tengah	48	25,0	75,0	128	19,5	80,5
22	Kalimantan Selatan	56	16,1	83,9	161	16,8	83,2
23	Kalimantan Timur	74	31,1	68,9	139	22,3	77,7
24	Sulawesi Utara	47	38,3	61,7	120	23,3	76,7
25	Sulawesi Tengah	26	34,6	65,4	137	17,5	81,8
26	Sulawesi Selatan	79	25,3	74,7	327	36,4	63,6
27	Sulawesi Tenggara	40	22,5	77,5	193	45,1	54,4
28	Gorontalo	15	53,3	46,7	59	32,2	67,8
29	Sulawesi Barat	8	50,0	37,5	73	34,2	65,8
30	Maluku	44	25,0	75,0	117	23,9	76,1
31	Maluku Utara	27	25,9	74,1	74	41,9	55,4
32	Papua Barat	19	57,9	42,1	85	43,5	55,3
33	Papua	50	32,0	68,0	244	42,6	57,4
	INDONESIA	**2321**	**27.5**	**72.2**	**6660**	**30.2**	**69.4**

Tabel 4.3.2.2 memperlihatkan persentase Puskesmas yang Pimpinan Puskesmas di rotasi kurang satu tahun yang dibedakan atas Puskesmas perkotaan dan perdesaan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 27,5 persen Kepala Puskesmas di perkotaan mengalami rotasi dan sebanyak 30,2 persen di Puskesmas perdesaan. Kepala Puskesmas yang tidak di rotasi selama kurang satu tahun di Puskesmas perkotaan sebanyak 72,2 persen dan di Puskesmas perdesaan sebanyak 69,4 persen.

Terdapat lebih dari 50 persen provinsi di Indonesia (18 provinsi) Kepala Puskesmas yang rotasi di atas angka nasional (29,5%). Puskesmas perkotaan yang kepala Puskesmas dirotasi kurang dari satu tahun dapat dilihat tertinggi di Provinsi Papua Barat (57,9%) disusul oleh Provinsi Gorontalo (53,3%), sementara terendah dijumpai pada Provinsi Sumatera Utara (15,9%) dan Bali (16,1%) dibawah angka Nasional (27,5%). Puskesmas perdesaan yang kepala Puskesmas dirotasi kurang dari satu tahun dapat dilihat tertinggi di Riau (51,4%) disusul oleh Provinsi Jambi (47,3%), sementara terendah dijumpai pada Provinsi Bali (15,7%), Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan (16,8%) dibawah angka Nasional (30,2%).

Tabel 4.3.2.3 memperlihatkan persentase Puskesmas yang mengalami perpindahan tenaga yang sudah dilatih berdasarkan jenis Puskesmas dan provinsi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 28,7% Puskesmas di perkotaan mengalami perpindahan petugas yang sudah dilatih dan di Puskesmas perdesaan sebanyak 29,3%. Puskesmas perkotaan yang tidak mengalami perpindahan petugas yang sudah dilatih sebanyak 71,2% dan di Puskesmas perdesaan sebanyak 70,5%.

Terdapat lebih dari 50% provinsi di Indonesia (18 provinsi), Puskesmas mengalami perpindahan petugas yang sudah dilatih di atas angka nasional (29,2%). Puskesmas perkotaan yang mengalami perpindahan petugas yang sudah dilatih dapat dilihat tertinggi di Provinsi Maluku Utara (55,6%) disusul oleh Provinsi Gorontalo (53,3%), sementara terendah dijumpai pada Provinsi Kalimantan Tengah (14,6%) dan Provinsi DI Yogyakarta (16,7%). Puskesmas perdesaan yang mengalami perpindahan petugas yang sudah dilatih dapat dilihat tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (52,8%) disusul oleh Provinsi Sulawesi Barat (52,1%), sementara terendah dijumpai pada Provinsi Papua Barat (15,3%) dan Provinsi Lampung (19,7%).

Tabel 4.3.2.3
Persentase Puskesmas menurut Tenaga yang Pindah Setelah Dilatih di Perkotaan dan Perdesaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Perkotaan			Perdesaan		
		jml pusk	% ada	% tidak ada	jml pusk	% ada	% Tidak Ada
1	Aceh	81	25,9	74,1	230	38,3	61,3
2	Sumatera Utara	132	22,0	78,0	374	27,0	72,2
3	Sumatera Barat	90	38,9	61,1	158	38,6	61,4
4	Riau	53	39,6	60,4	142	31,0	69,0
5	Jambi	42	23,8	76,2	129	41,1	58,9
6	Sumatera Selatan	81	21,0	79,0	217	26,7	73,3
7	Bengkulu	40	35,0	65,0	133	31,6	68,4
8	Lampung	62	33,9	66,1	203	19,7	79,3
9	Bangka Belitung	21	42,9	57,1	36	52,8	47,2
10	Kepulauan Riau	32	50,0	50,0	33	48,5	51,5
11	DKI Jakarta	336	17,3	82,4	0	0	0
12	Jawa Barat	278	31,3	68,7	753	24,0	75,7
13	Jawa Tengah	142	27,5	72,5	719	21,4	78,4
14	DI Yogyakarta	24	16,7	83,3	97	27,8	72,2
15	Jawa Timur	166	33,1	66,9	783	20,3	79,6
16	Banten	67	37,3	62,7	139	51,8	48,2
17	Bali	31	19,4	80,6	83	28,9	71,1
18	Nusa Tenggara Barat	27	37,0	63,0	122	44,3	54,1
19	Nusa Tenggara Timur	29	27,6	72,4	273	46,2	53,5
20	Kalimantan Barat	54	35,2	64,8	179	31,8	68,2
21	Kalimantan Tengah	48	14,6	83,3	128	28,9	71,1
22	Kalimantan Selatan	56	32,1	67,9	161	34,8	65,2
23	Kalimantan Timur	74	24,3	75,7	139	28,1	71,9
24	Sulawesi Utara	47	36,2	63,8	120	30,8	69,2
25	Sulawesi Tengah	26	50,0	50,0	137	38,0	62,0
26	Sulawesi Selatan	79	30,4	69,6	327	32,1	67,9
27	Sulawesi Tenggara	40	25,0	75,0	193	29,0	71,0
28	Gorontalo	15	53,3	46,7	59	44,1	55,9
29	Sulawesi Barat	8	25,0	75,0	73	52,1	47,9
30	Maluku	44	29,5	70,5	117	25,6	74,4
31	Maluku Utara	27	55,6	44,4	74	43,2	56,8
32	Papua Barat	19	21,1	78,9	85	15,3	84,7
33	Papua	50	28,0	72,0	244	23,4	76,6
	INDONESIA	**2321**	**28.7**	**71.2**	**6660**	**29.3**	**70.5**

4.3.3. TUNJANGAN / INSENTIF DAERAH

Tunjangan/insentif daerah adalah tunjanagan khusus yang diterima dari APBD I atau APBD II diluar gaji. Tunjangan yang ada dapat berdasarkan jenis profesi yaitu tunjangan fungsional yang berdasarkan pekerjaan profesi kesehatan sebagai contoh: dokter, perawat, dokter gigi dsb. Tunjangan yang lain berdasarkan golongan yaitu tunjangan berdasarkan golongan pegawai negeri menurut PGPS (gol I, II, III, dan IV). Disamping itu ada pula tunjangan berdasarkan jabatan yaitu tunjangan berdasarkan jabatan struktural dalam kepemerintahan (eselon I, eselon II, dst) misal: kepala Puskesmas adalah pejabat eselon IVa, dan kepala TU pejabat eselon IVb.

Tabel 4.3.3.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Insentif Daerah di Perkotaan dan Perdesaan, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Perkotaan			Perdesaan		
		jml pusk	% ada	% tidak ada	jml pusk	% ada	% tidak ada
1	Aceh	81	85,2	14,8	230	72,2	27,8
2	Sumatera Utara	132	92,4	6,8	374	83,7	15,5
3	Sumatera Barat	90	97,8	1,1	158	98,7	1,3
4	Riau	53	100,0	0	142	99,3	,7
5	Jambi	42	9,5	90,5	129	31,0	69,0
6	Sumatera Selatan	81	21,0	79,0	217	59,4	40,6
7	Bengkulu	40	67,5	32,5	133	38,3	61,7
8	Lampung	62	35,5	64,5	203	51,2	47,8
9	Bangka Belitung	21	100,0	0	36	100,0	0
10	Kepulauan Riau	32	100,0	0	33	100,0	0
11	DKI Jakarta	336	96,7	3,0	0	0	0
12	Jawa Barat	278	94,6	5,4	753	92,2	7,7
13	Jawa Tengah	142	91,5	8,5	719	83,4	16,6
14	DI Yogyakarta	24	95,8	4,2	97	94,8	5,2
15	Jawa Timur	166	72,3	27,7	783	42,1	57,3
16	Banten	67	98,5	1,5	139	98,6	1,4
17	Bali	31	100,0	,0	83	97,6	2,4
18	Nusa Tenggara Barat	27	85,2	14,8	122	66,4	33,6
19	Nusa Tenggara Timur	29	48,3	48,3	273	64,8	35,2
20	Kalimantan Barat	54	90,7	9,3	179	82,7	16,8
21	Kalimantan Tengah	48	93,8	6,3	128	94,5	5,5
22	Kalimantan Selatan	56	96,4	3,6	161	97,5	2,5
23	Kalimantan Timur	74	100,0	0	139	99,3	0,7
24	Sulawesi Utara	47	80,9	19,1	120	81,7	18,3
25	Sulawesi Tengah	26	57,7	42,3	137	23,4	76,6
26	Sulawesi Selatan	79	50,6	49,4	327	41,9	57,8
27	Sulawesi Tenggara	40	45,0	55,0	193	58,0	42,0
28	Gorontalo	15	80,0	20,0	59	74,6	25,4
29	Sulawesi Barat	8	75,0	25,0	73	67,1	32,9
30	Maluku	44	68,2	31,8	117	68,4	30,8
31	Maluku Utara	27	74,1	25,9	74	89,2	10,8
32	Papua Barat	19	89,5	10,5	85	76,5	23,5
33	Papua	50	78,0	22,0	244	83,6	16,4
	INDONESIA	**2321**	**82.2**	**17.7**	**6660**	**72.3**	**27.6**

Tabel 4.3.3 memperlihatkan persentase Puskesmas yang mendapat Insentif dibedakan atas Puskesmas perkotaan dan perdesaan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 82,2 persen Puskesmas yang mendapat Insentif di perkotaan dan sebanyak 72,3 persen di Puskesmas perdesaan. Puskesmas yang tidak mendapat Insentif di Puskesmas perkotaan sebanyak 17,7 persen dan di Puskesmas perdesaan sebanyak 27,6 persen.

Terdapat lebih dari 60 persen provinsi di Indonesia (18 provinsi) Puskesmas yang mendapat Insentif di bawah angka nasional (74,8%). Puskesmas perkotaan yang mendapat Insentif dapat dilihat tertinggi di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali dan Kalimantan Timur masing-masing (100%) diatas angka Nasional. Sementara terendah dijumpai pada Provinsi Jambi (9,5%) dibawah angka Nasional Puskesmas Perkotaan (82,2%). Puskesmas perdesaan yang mendapat insentif Daerah dilihat tertinggi di Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau masing-masing (100%), sementara terendah dijumpai pada Provinsi Sulawesi Tengah (23,4%) dibawah angka Nasional Puskesmas Pedesaan (72,3%).

4.4. FASILITAS FISIK

4.4.1. FISIK BANGUNAN

Tabel 4.4.1.1 menyajikan data menurut Kondisi Fisik Bangunan, (baik dan rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat), Jenis Bangunan (permanen, tidak permanen) dan Keadaan Fisik Bangunan (Baik dan Tidak Baik).

Tabel 4.4.1.1
Persentase Puskesmas menurut Keadaan Fisik semua Bangunan Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Keadaan Fisik Bangunan		
			% Baik	% Tidak Baik	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	85.2	14.8	0
2	Sumatera Utara	506	83.2	16.8	0
3	Sumatera Barat	248	79.8	20.2	0
4	Riau	195	73.3	26.7	0
5	Jambi	171	79.5	20.5	0
6	Sumatera Selatan	298	78.9	21.1	0
7	Bengkulu	173	76.3	23.7	0
8	Lampung	265	77.0	22.6	0.4
9	Bangka Belitung	57	84.2	15.8	0
10	Kepulauan Riau	65	84.6	15.4	0
11	DKI Jakarta	336	83.0	16.4	0.6
12	Jawa Barat	1031	76.1	23.8	0.1
13	Jawa Tengah	861	81.8	18.2	0
14	DI Yogyakarta	121	81.8	18.2	0
15	Jawa Timur	949	80.1	19.8	0.1
16	Banten	206	86.4	13.1	0.5
17	Bali	114	85.1	14.9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	81.9	16.1	2.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	66.6	33.4	0
20	Kalimantan Barat	233	76.4	23.6	0
21	Kalimantan Tengah	176	70.5	29.5	0
22	Kalimantan Selatan	217	75.6	24.4	0
23	Kalimantan Timur	213	66.2	33.8	0
24	Sulawesi Utara	167	73.1	26.9	0
25	Sulawesi Tengah	163	68.1	31.9	0
26	Sulawesi Selatan	406	81.5	18.5	0
27	Sulawesi Tenggara	233	75.5	24.5	0
28	Gorontalo	74	90.5	9.5	0
29	Sulawesi Barat	81	70.4	28.4	1.2
30	Maluku	161	66.5	33.5	0
31	Maluku Utara	101	77.2	22.8	0
32	Papua Barat	104	62.5	36.5	1.0
33	Papua	294	38.4	61.6	0
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	82.9	17.0	0.2
2	Perdesaan	6660	74.7	25.2	0.1
	INDONESIA	**8.981**	**76,8**	**23,1**	**0,1**

*Keadaan fisik bangunan dikatakan baik jika jenis bangunan permanen/semi permanen, dan kondisi bangunan dalam keadaan baik/rusak ringan

Tabel 4.4.1.2
Persentase Puskesmas menurut Jenis dan kondisi semua Bangunan Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Jenis Bangunan			Kondisi Bangunan		
			% Permanen	% Tidak Permanen	% TAD	% Baik& rusak ringan	% rusak sedang & berat	%TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	94.5	5.5	0	89.1	10.9	0
2	Sumatera Utara	506	94.1	5.9	0	86.6	13.2	0.2
3	Sumatera Barat	248	97.2	2.8	0	81.0	19.0	0
4	Riau	195	87.7	12.3	0	82.1	17.4	0.5
5	Jambi	171	91.8	8.2	0	84.2	15.2	0.6
6	Sumatera Selatan	298	96.0	4.0	0	81.5	18.5	0
7	Bengkulu	173	93.1	6.9	0	79.2	20.8	0
8	Lampung	265	95.8	3.4	0.8	79.6	20.0	0.4
9	Bangka Belitung	57	94.7	5.3	0	87.7	12.3	0
10	Kepulauan Riau	65	92.3	7.7	0	87.7	12.3	0
11	DKI Jakarta	336	94.9	4.5	0.6	84.8	14.0	1.2
12	Jawa Barat	1031	96.8	3.1	0.1	77.4	22.3	0.3
13	Jawa Tengah	861	97.8	2.2	0	82.5	17.4	0.1
14	DI Yogyakarta	121	95.0	5.0	0	86.0	14.0	0
15	Jawa Timur	949	97.5	2.4	0.1	81.1	18.8	0.1
16	Banten	206	97.1	2.4	0.5	87.4	12.1	0.5
17	Bali	114	97.4	2.6	0	85.1	14.9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	94.6	3.4	2.0	82.6	15.4	2.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	97.4	2.6	0	66.6	33.4	0
20	Kalimantan Barat	233	91.0	9.0	0	81.5	18.5	0
21	Kalimantan Tengah	176	74.4	25.6	0	87.5	11.9	0.6
22	Kalimantan Selatan	217	81.6	18.4	0	91.2	8.8	0
23	Kalimantan Timur	213	75.6	24.4	0	79.8	20.2	0
24	Sulawesi Utara	167	84.4	15.6	0	82.6	17.4	0
25	Sulawesi Tengah	163	96.9	3.1	0	69.3	30.1	0.6
26	Sulawesi Selatan	406	96.6	3.4	0	82.3	17.2	0.5
27	Sulawesi Tenggara	233	99.1	0.9	0	75.5	23.6	0.9
28	Gorontalo	74	98.6	1.4	0	90.5	9.5	0
29	Sulawesi Barat	81	90.1	8.6	1.2	74.1	24.7	1.2
30	Maluku	161	94.4	5.6	0	69.6	30.4	0
31	Maluku Utara	101	92.1	7.9	0	82.2	17.8	0
32	Papua Barat	104	76.0	24.0	0	78.8	21.2	0
33	Papua	294	45.6	53.7	0.7	79.6	20.1	0.3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	95.8	4.0	0.2	85.0	14.6	0.4
2	Perdesaan	6660	91.3	8.5	0.1	79.9	19.8	0.2
	INDONESIA	**8.981**	**92,5**	**7,4**	**0,1**	**81,2**	**18,5**	**0,3**

Puskesmas di kategorikan dalam keadaan fisik bangunan baik bila Puskesmas tersebut mempunyai jenis bangunan permanen atau semi permanen dan kondisi bangunan dalam keadaan baik atau rusak ringan. Dan dikategorikan tidak baik bila Puskesmas tersebut mempunyai jenis bangunan tidak permanen atau tidak semi permanen atau kondisi bangunan dalam keadaan rusak sedang atau rusak berat.

Persentase Puskesmas menurut kondisi bangunan secara nasional 81,2% dalam keadaan baik atau rusak ringan. Terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan (91,2%), diikuti provinsi Gorontalo (90,5%) dan Aceh (89,1%). Sedangkan terendah di Provinsi NTT (66,6%) diikuti Sulawesi Tengah (69,3%) dan Maluku (69,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki kondisi bangunan baik atau rusak ringan sebanyak 85,0 persen, sementara diperdesaan 79,9 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki jenis bangunan permanen secara nasional 92,5 persen. Terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara (99,1%) diikuti Provinsi Gorontalo (98,6%) dan Provinsi Jawa Tengah (97,8%). Sedangkan terendah di Provinsi Papua(45,6%), diikuti Provinsi Kaimantan Tengah (74,4%) dan Kalimantan Timur (75,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki jenis bangunan permanen sebanyak 95,8 persen, sementara Puskesmas perdesaan 91,3 persen.

Persentase Puskesmas menurut keadaan fisik bangunan secara nasional 76,8 persen dalam keadaan baik (jenis bangunan permanen dan semi permanen serta kondisi bangunan dalam keadaan baik dan rusak ringan). Terbesar di Provinsi Gorontalo (90,5%), diikuti Provinsi Banten (86,4%) dan Provinsi Aceh (85,2%). Sedangkan terendah di Provinsi Papua (38,4%), Papua Barat (62,5%) dan Kaltim (66,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas diperkotaan yang memiliki keadaan fisik bangunan baik sebanyak 82,9 persen, sementara diperdesaan 74,7 persen.

Bila dilihat hanya kondisi fisik bangunan utama Puskesmas saja, seperti pada tabel 4.4.1.3. terlihat bahwa Persentase Puskesmas dengan kondisi fisik bangunan utama dalam keadaan baik, secara nasional sebanyak 63,0 persen. Terbesar di provinsi DIY (85,1%), diikuti provinsi Bali (80,7%) dan Bangka Belitung (78,9%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Bengkulu (42,8%), diikuti provinsi Maluku (44,7%) dan Sulawesi Tengah (45,4%). Bila dilihat dari lokasi, Puskesmas perkotaan dengan kondisi bangunan utama dalam keadaan baik ada sebanyak 66,9 persen, sedangkan Puskesmas perdesaan 61,7 persen. Secara nasional Puskesmas yang memiliki kondisi bangunan utama dalam keadaan rusak ringanada 24,3 persen, rusak sedang 9,9 persen dan rusak berat 2,4 persen. Persentase rusak berat, terbesar ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (8,6%), diikutii Provinsi Sulawesi Tenggara (5,2%) dan Kalimantan Barat (4,7%).

Tabel 4.4.1.3
Persentase Puskesmas menurut Kondisi Fisik Bangunan Utama, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kondisi Fisik Bangunan Utama Puskesmas %				
			% Baik	% Rusak Ringan	% Rusak Sedang	% Rusak Berat	% TAD
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	64,3	28,9	6,4	0,3	0
2	Sumatera Utara	506	60,3	30,0	8,1	1,4	0,2
3	Sumatera Barat	248	62,5	25,0	10,1	2,4	0
4	Riau	195	57,4	27,7	11,8	2,6	0,5
5	Jambi	171	62,0	28,1	7,6	1,2	1,2
6	Sumatera Selatan	298	63,8	22,5	12,4	1,3	0
7	Bengkulu	173	42,8	41,0	15,0	0,6	0,6
8	Lampung	265	54,7	30,2	12,1	2,6	0,4
9	Bangka Belitung	57	78,9	15,8	5,3	0	0
10	Kepulauan Riau	65	72,3	21,5	4,6	1,5	0
11	DKI Jakarta	336	69,0	17,3	8,6	3,9	1,2
12	Jawa Barat	1031	61,9	23,4	11,3	2,9	0,5
13	Jawa Tengah	861	71,9	17,7	8,8	1,5	0,1
14	DI Yogyakarta	121	85,1	5,0	7,4	2,5	0
15	Jawa Timur	949	68,0	20,5	9,6	1,8	0,1
16	Banten	206	72,3	19,9	4,4	2,4	1,0
17	Bali	114	80,7	12,3	4,4	1,8	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	66,4	23,5	7,4	0,7	2,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	48,7	29,8	12,6	8,6	0,3
20	Kalimantan Barat	233	56,2	29,6	9,4	4,7	0
21	Kalimantan Tengah	176	66,5	25,0	6,8	1,1	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	72,8	21,2	5,5	0,5	0
23	Kalimantan Timur	213	54,0	30,5	11,7	3,3	0,5
24	Sulawesi Utara	167	66,5	23,4	7,2	3,0	0
25	Sulawesi Tengah	163	45,4	33,1	17,8	3,1	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	63,3	23,9	9,9	2,5	0,5
27	Sulawesi Tenggara	233	61,4	21,5	11,2	5,2	0,9
28	Gorontalo	74	73,0	21,6	4,1	1,4	0
29	Sulawesi Barat	81	51,9	32,1	11,1	3,7	1,2
30	Maluku	161	44,7	32,3	20,5	2,5	0
31	Maluku Utara	101	47,5	39,6	9,9	3,0	0
32	Papua Barat	104	54,8	30,8	11,5	1,0	1,9
33	Papua	294	61,2	23,8	11,2	3,4	0,3
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	66,9	22,0	9,0	1,6	0,5
2	Perdesaan	6660	61,7	25,0	10,2	2,7	0,4
INDONESIA		**8.981**	**63,0**	**24,3**	**9,9**	**2,4**	**0,4**

4.4.2. RUANGAN

Dikaitkan dengan Upaya Kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas maka Puskesmas diasumsikan minimal punya 8 ruangan pelayanan, yaitu untuk Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik KIA-KB, Pelayanan,P2M, Klinik Konsultasi, Pelayanan farmasi, Pelayanan Laboratorium dan Pelayanan Gawat Darurat.

Tabel 4.4.2.1
Persentase Puskesmas menurut Jumlah Ruangan Pelayanan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Ruangan		
			% < 8	% >= 8	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	30,2	69,8	0
2	Sumatera Utara	506	64,8	34,8	0,4
3	Sumatera Barat	248	28,2	71,4	0,4
4	Riau	195	46,7	53,3	0
5	Jambi	171	48,5	51,5	0
6	Sumatera Selatan	298	44,3	55,4	0,3
7	Bengkulu	173	68,2	31,2	0,6
8	Lampung	265	59,6	40,0	0,4
9	Bangka Belitung	57	21,1	78,9	0
10	Kepulauan Riau	65	47,7	52,3	0
11	DKI Jakarta	336	64,0	34,5	1,5
12	Jawa Barat	1031	44,9	54,7	0,4
13	Jawa Tengah	861	33,1	66,9	0
14	DI Yogyakarta	121	11,6	86,8	1,7
15	Jawa Timur	949	33,1	65,1	1,8
16	Banten	206	29,1	70,9	0
17	Bali	114	36,8	62,3	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	16,1	83,2	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	33,8	66,2	0
20	Kalimantan Barat	233	40,3	59,7	0
21	Kalimantan Tengah	176	55,7	43,8	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	24,9	74,2	0,9
23	Kalimantan Timur	213	34,7	65,3	0
24	Sulawesi Utara	167	49,1	50,9	0
25	Sulawesi Tengah	163	42,9	56,4	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	35,5	64,3	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	56,2	43,3	0,4
28	Gorontalo	74	44,6	55,4	0
29	Sulawesi Barat	81	44,4	54,3	1,2
30	Maluku	161	68,9	28,6	2,5
31	Maluku Utara	101	66,3	32,7	1,0
32	Papua Barat	104	60,6	37,5	1,9
33	Papua	294	57,5	41,2	1,4
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	38,9	60,5	0,6
2	Perdesaan	6660	44,4	55,0	0,6
INDONESIA		**8.981**	**43,0**	**56,4**	**0,6**

Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 8 ruangan secara nasional ada sebanyak 56,4 persen. Terbesar ada di Provinsi DIY (86,8%), diikuti Provinsi NTB (83,2%) dan Bangka Belitung (78,9%). Terendah ada di Provinsi Bengkulu (31,2%) diikuti Provinsi Maluku utara (32,7%) dan Provinsi DKI Jakarta (34,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan minimal 8 ruang ada sebanyak 60,5 persen, sementara Puskesmas perdesaan 55 persen.

Tabel 4.4.2.2.a dan 4.4.2.2.b menunjukkan persentase Puskesmas menurut keberadaan ruangan poliklinik. Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan poli umum secara nasional sebanyak 98,7 persen. Seluruh Puskesmas yang terdapat pada Provinsi Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DIY dan Sulawesi Utara telah memiliki ruangan poli umum. Bila dilihat dari lokasi, secara nasional 98,9 persen Puskesmas perkotaan telah memiliki ruangan poli umum, sementara puskesmas perdesaan 98,6 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan poli gigi secara nasional ada sebanyak 79,7 persen. Seluruh Puskesmas yang terdapat pada Provinsi DIY telah memiliki ruangan poli gigi, diikuti provinsi Bali (99,1%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (96,8%). Kepemilikan ruangan poli gigi terendah ada di provinsi Papua (22,4%) diikuti Provinsi Papua Barat (31,7%) dan Maluku Utara (33,7%). Bila dilihat dari lokasi, secara nasional 93,1 persen Puskesmas perkotaan telah memiliki ruangan poli gigi, sementara Puskesmas perdesaan 75,0 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan Poli KIA secara nasional 95,0 persen. Terbesar di Provinsi DIY (99,2%) diikuti Provinsi NTB (99,1%) dan Jawa Tengah (99%). Sedangkan terendah di Provinsi Papua (75,2%) diikuti Provinsi Maluku (82%) dan Kepulauan Riau (83,1%). Dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan Poli KIA sebanyak 96 persen, sementara diperdesaan 94,6 persen.

Persentase Pusekesmas yang memiliki ruangan Poli khusus KB secara nasional 32,6 persen, terbesar di Provinsi DKI Jakarta (66,4%), diikuti provinsi DI Aceh (51,4%) dan Sumatera Barat (45,6%), sedangkan terendah ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (12,9%), diikuti Provinsi Gorontalo (16,2%) dan Maluku (20,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan poli khusus KB ada sebanyak 43,2 persen sementara Puskesmas perdesaan 29,0 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan Poli imunisasi secara nasional 62,6 persen. Terbesar di Provinsi DI Aceh (86,2%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (82,5%) dan Kalimantan Timur (77,5%). Terendah di Provinsi Riau (45,6%) diikuti Provinsi Papua (47,6%) dan Maluku Utara (49,5%). Bila dilihat dari Lokasi, persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan poli imunisasi 60,5 persen sementara Puskesmas perdesaan 63,3 persen.

Tabel 4.4.2.2.a
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Ruangan Poliklinik, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Poli Umum			Poli Gigi			Poli KIA		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	99.4	0.3	0.3	77.5	3.5	19.0	96.5	1.0	2.6
2	Sumatera Utara	506	99.4	0.4	0.2	72.7	4.0	23.3	90.1	0.6	9.3
3	Sumatera Barat	248	98.8	0.0	1.2	95.2	0.8	4.0	97.2	0.0	2.8
4	Riau	195	99.5	0.5	0.0	91.8	5.6	2.6	96.4	0.5	3.1
5	Jambi	171	100.0	0.0	0.0	90.6	5.8	3.5	96.5	0.0	3.5
6	Sumatera Selatan	298	98.3	1.0	0.7	64.4	3.7	31.9	94.6	0.3	5.0
7	Bengkulu	173	99.4	0.0	0.6	56.1	9.8	34.1	93.1	1.2	5.8
8	Lampung	265	99.2	0.0	0.8	79.6	3.8	16.6	96.2	0.4	3.4
9	Bangka Belitung	57	100.0	0.0	0.0	96.5	1.8	1.8	98.2	0.0	1.8
10	Kepulauan Riau	65	100.0	0.0	0.0	92.3	0.0	7.7	83.1	0.0	16.9
11	DKI Jakarta	336	97.6	0.3	2.1	93.8	0.3	6.0	96.1	0.3	3.6
12	Jawa Barat	1,031	99.1	0.1	0.8	82.3	1.2	16.6	96.5	0.5	3.0
13	Jawa Tengah	861	99.4	0.5	0.1	93.4	0.6	6.0	99.0	0.1	0.9
14	DI Yogyakarta	121	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	99.2	0.0	0.8
15	Jawa Timur	949	99.5	0.1	0.4	96.0	1.1	3.0	98.3	0.1	1.6
16	Banten	206	99.5	0.5	0.0	86.4	4.4	9.2	97.1	0.0	2.9
17	Bali	114	98.2	1.8	0.0	99.1	0.9	0.0	99.1	0.0	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	98.7	0.0	1.3	85.2	4.7	10.1	95.3	0.7	4.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	98.0	1.0	1.0	77.8	5.6	16.6	98.0	0.0	2.0
20	Kalimantan Barat	233	98.7	0.0	1.3	82.4	4.7	12.9	92.7	0.4	6.9
21	Kalimantan Tengah	176	99.4	0.6	0.0	77.3	13.1	9.7	92.0	0.0	8.0
22	Kalimantan Selatan	217	99.5	0.0	0.5	96.8	1.4	1.8	98.2	0.0	1.8
23	Kalimantan Timur	213	99.1	0.0	0.9	84.5	6.1	9.4	95.3	0.5	4.2
24	Sulawesi Utara	167	100.0	0.0	0.0	68.9	6.6	24.6	91.0	1.2	7.8
25	Sulawesi Tengah	163	98.8	0.0	1.2	52.1	3.7	44.2	95.7	0.0	4.3
26	Sulawesi Selatan	406	98.5	0.2	1.2	87.4	3.9	8.6	95.8	0.5	3.7
27	Sulawesi Tenggara	233	97.9	0.4	1.7	55.4	6.4	38.2	94.0	0.4	5.6
28	Gorontalo	74	98.6	0.0	1.4	54.1	13.5	32.4	95.9	0.0	4.1
29	Sulawesi Barat	81	95.1	2.5	2.5	70.4	7.4	22.2	93.8	1.2	4.9
30	Maluku	161	95.7	0.0	4.3	47.2	7.5	45.3	82.0	2.5	15.5
31	Maluku Utara	101	98.0	1.0	1.0	33.7	3.0	63.4	91.1	3.0	5.9
32	Papua Barat	104	95.2	3.8	1.0	31.7		68.3	91.3	1.9	6.7
33	Papua	294	92.5	3.7	3.7	22.4	6.8	70.7	75.2	11.2	13.6
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	98,9	0,1	1,0	93,1	0,9	5,9	96,0	0,3	3,8
2	Perdesaan	6660	98,6	0,6	0,8	75,0	4,2	20,8	94,6	1,0	4,4
	INDONESIA	**8981**	**98,7**	**0,5**	**0,8**	**79,7**	**3,4**	**17,0**	**95,0**	**0,8**	**4,3**

Tabel 4.4.2.2.b
Persentase Puskesmas menurut keberadaan Ruangan Poliklinik, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Poli KB			Poli Imunisasi		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	51.4	1.3	47.3	86.2	0.6	13.2
2	Sumatera Utara	506	26.7	0.0	73.3	73.7	1.2	25.1
3	Sumatera Barat	248	45.6	1.2	53.2	77.4	0.8	21.8
4	Riau	195	38.5	0.0	61.5	45.6	0.5	53.8
5	Jambi	171	35.1	0.0	64.9	60.2	0.0	39.8
6	Sumatera Selatan	298	29.2	1.3	69.5	71.1	1.3	27.5
7	Bengkulu	173	31.2	0.0	68.8	75.1	1.2	23.7
8	Lampung	265	20.4	0.4	79.2	55.1	1.9	43.0
9	Bangka Belitung	57	36.8	0.0	63.2	82.5	0.0	17.5
10	Kepulauan Riau	65	40.0	0.0	60.0	36.9	0.0	63.1
11	DKI Jakarta	336	66.4	0.0	33.6	55.4	0.0	44.6
12	Jawa Barat	1,031	28.5	0.3	71.2	57.6	0.9	41.5
13	Jawa Tengah	861	41.8	0.3	57.8	68.4	0.1	31.5
14	DI Yogyakarta	121	39.7	0.0	60.3	57.0	2.5	40.5
15	Jawa Timur	949	32.0	0.1	67.9	57.2	0.7	42.0
16	Banten	206	23.8	0.0	76.2	63.1	0.5	36.4
17	Bali	114	35.1	0.0	64.9	71.1	0.9	28.1
18	Nusa Tenggara Barat	149	31.5	0.7	67.8	65.8	0.7	33.6
19	Nusa Tenggara Timur	302	33.4	0.0	66.6	55.0	1.0	44.0
20	Kalimantan Barat	233	24.0	0.0	76.0	60.5	0.4	39.1
21	Kalimantan Tengah	176	35.8	0.0	64.2	53.4	2.3	44.3
22	Kalimantan Selatan	217	28.6	0.0	71.4	70.0	0.0	30.0
23	Kalimantan Timur	213	39.9	0.9	59.2	77.5	0.0	22.5
24	Sulawesi Utara	167	28.1	0.0	71.9	61.1	0.0	38.9
25	Sulawesi Tengah	163	25.8	0.0	74.2	63.2	1.2	35.6
26	Sulawesi Selatan	406	21.2	1.0	77.8	70.2	0.5	29.3
27	Sulawesi Tenggara	233	12.9	0.4	86.7	57.9	0.4	41.6
28	Gorontalo	74	16.2	0.0	83.8	54.1	1.4	44.6
29	Sulawesi Barat	81	22.2	2.5	75.3	55.6	0.0	44.4
30	Maluku	161	20.5	1.9	77.6	38.5	2.5	59.0
31	Maluku Utara	101	27.7	0.0	72.3	49.5	3.0	47.5
32	Papua Barat	104	26.9	0.0	73.1	61.5	4.8	33.7
33	Papua	294	31.0	5.1	63.9	47.6	7.1	45.2
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	43,2	0,4	56,4	60,5	0,6	38,9
2	Perdesaan	6660	29,0	0,6	70,5	63,3	1,2	35,6
	INDONESIA	**8981**	**32,6**	**0,5**	**66,8**	**62,6**	**1,0**	**36,4**

Tabel 4.4.2.3.a menunjukkan persentase puskesmas menurut keberadaan Ruangan Pelayanan Farmasi, Ruangan Pelayanan Laboratorium, tabel 4.4.2.3.b menunjukkan persentase puskesmas menurut keberadaan Ruangan Pelayanan Gawat Darurat dan Ruangan Pelayanan Konsultasi Gizi. Sedangkan Tabel 4.4.2.3.c. menunjukkan persentase puskesmas menurut keberadaan ruangan pelayanan, Konsultasi Kesehatan Lingkungan, Ruangan Pelayanan Konsultasi Keperawatan Ruangan Pelayanan Konseling Gabungan, dan Lengkap mempunyai semua Ruangan Pelayanan Penunjang tersebut diatas.

Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan Pelayanan Farmasi secara nasional 94,8 persen. Terbesar di Provinsi Bangka Belitung (100,0%) , diikuti Provinsi Jawa Tengah (98,7%) dan Provinsi Aceh (98,4%). Terendah di Provinsi Papua (79,3%), di ikuti Provinsi Sumatera Utara (89,5%) dan Provinsi Bengkulu (90,2%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan Pelayanan Farmasi 96,1 persen sementara Puskesmas pedesaan 94,4 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan Pelayanan Laboratorium secara nasional 75,7 persen. Terbesar di Provinsi DIY (99,2%) , diikuti Provinsi Bangka Belitung (98,2%) dan Provinsi Kalimantan Barat (93,6%). Terendah di Provinsi DKI Jakarta (25%), diikuti Provinsi Papua (45,9%) dan Provinsi Sumatera Utara (51,2%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan Pelayanan Laboratorium 76,7 persen sementara Puskesmas pedesaan 75,4 persen.

Persentase puskesmas yang memiliki ruangan gawat darurat secara nasional 56,0 persen. Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan (83,5%) , diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (83,2%) dan Provinsi DIY (80,2%). Terendah di Provinsi Bengkulu (19,7%), diikuti Provinsi Sumatera Utara (21,1%) dan Provinsi lampung (30,6%). Bila dilihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan gawat darurat 48,6 persen sementara Puskesmas pedesaan 58,6 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan konsultasi gizi secara nasional 31,8 persen. Terbesar di Provinsi Bangka Belitung (59,6%) , diikuti Provinsi Kalimantan Selatan (57,1%) dan Provinsi Sumatera Barat (48,0%). Terendah di Provinsi Maluku (11,2%), diikuti Provinsi Sulawesi Barat (14,8%) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (17,2%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan konsultasi gizi 29,2 persen sementara Puskesmas pedesaan 39,0 persen.

Tabel 4.4.2.3.a
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Ruangan Pelayanan Penunjang, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Ruangan Farmasi			Laboratorium		
			% Ada	% Tdk Ada	% TAD	% Ada	% Tdk Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	98.4	0.0	1.6	77.5	2.3	20.3
2	Sumatera Utara	506	89.5	0.6	9.9	51.2	2.8	46.0
3	Sumatera Barat	248	97.6	1.2	1.2	88.3	1.2	10.5
4	Riau	195	96.9	0.5	2.6	84.1	2.1	13.8
5	Jambi	171	96.5	0.0	3.5	84.8	5.8	9.4
6	Sumatera Selatan	298	94.0	0.7	5.4	72.5	5.0	22.5
7	Bengkulu	173	90.2	0.0	9.8	74.0	3.5	22.5
8	Lampung	265	94.7	0.4	4.9	78.5	2.3	19.2
9	Bangka Belitung	57	100.0	0.0	0.0	98.2	0.0	1.8
10	Kepulauan Riau	65	96.9	0.0	3.1	86.2	1.5	12.3
11	DKI Jakarta	336	93.5	0.3	6.3	25.0	2.1	72.9
12	Jawa Barat	1,031	93.6	0.6	5.8	73.2	2.6	24.2
13	Jawa Tengah	861	98.7	0.1	1.2	91.4	0.5	8.1
14	DI Yogyakarta	121	98.3	0.0	1.7	99.2	0.0	0.8
15	Jawa Timur	949	95.9	0.0	4.1	84.3	1.2	14.5
16	Banten	206	97.1	0.0	2.9	89.3	1.5	9.2
17	Bali	114	95.6	0.9	3.5	91.2	2.6	6.1
18	Nusa Tenggara Barat	149	95.3	0.7	4.0	89.9	1.3	8.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	96.0	0.7	3.3	83.1	3.6	13.2
20	Kalimantan Barat	233	97.0	0.0	3.0	93.6	1.7	4.7
21	Kalimantan Tengah	176	96.0	0.0	4.0	79.0	4.5	16.5
22	Kalimantan Selatan	217	97.7	0.0	2.3	88.9	1.8	9.2
23	Kalimantan Timur	213	97.2	0.0	2.8	87.8	3.8	8.5
24	Sulawesi Utara	167	96.4	0.0	3.6	69.5	2.4	28.1
25	Sulawesi Tengah	163	96.3	0.0	3.7	83.4	1.2	15.3
26	Sulawesi Selatan	406	94.3	1.0	4.7	76.4	1.5	22.2
27	Sulawesi Tenggara	233	93.6	0.9	5.6	62.2	1.7	36.1
28	Gorontalo	74	90.5	0.0	9.5	52.7	5.4	41.9
29	Sulawesi Barat	81	93.8	0.0	6.2	69.1	2.5	28.4
30	Maluku	161	92.5	0.0	7.5	56.5	2.5	41.0
31	Maluku Utara	101	95.0	1.0	4.0	67.3	11.9	20.8
32	Papua Barat	104	95.2	1.9	2.9	55.8	5.8	38.5
33	Papua	294	79.3	5.4	15.3	45.9	8.8	45.2
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	96,1	0,5	3,4	76,7	1,6	21,7
2	Perdesaan	6660	94,4	0,5	5,1	75,4	2,9	21,7
	INDONESIA	8981	94,8	0,5	4,7	75,7	2,5	21,7

Tabel 4.4.2.3.b
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Ruangan Pelayanan Penunjang, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Gawat Darurat			Konsultasi Gizi		
			% Ada	% Tdk Ada	% TAD	% Ada	% Tdk Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	78.5	0.6	20.9	28.9	0.3	70.7
2	Sumatera Utara	506	21.1	0.4	78.5	30.0	1.4	68.6
3	Sumatera Barat	248	71.8	0.8	27.4	48.0	2.0	50.0
4	Riau	195	48.2	1.0	50.8	39.0	2.1	59.0
5	Jambi	171	50.9	0.0	49.1	24.0	1.2	74.9
6	Sumatera Selatan	298	43.3	0.7	56.0	39.9	1.0	59.1
7	Bengkulu	173	19.7	1.2	79.2	19.7	0.0	80.3
8	Lampung	265	30.6	1.5	67.9	18.1	0.4	81.5
9	Bangka Belitung	57	75.4	0.0	24.6	59.6	1.8	38.6
10	Kepulauan Riau	65	75.4	0.0	24.6	33.8	0.0	66.2
11	DKI Jakarta	336	32.4	0.0	67.6	21.7	0.3	78.0
12	Jawa Barat	1,031	46.0	0.8	53.2	21.5	0.4	78.1
13	Jawa Tengah	861	56.8	0.3	42.9	38.1	0.2	61.7
14	DI Yogyakarta	121	80.2	0.0	19.8	43.8	0.0	56.2
15	Jawa Timur	949	67.9	0.4	31.7	40.8	0.6	58.6
16	Banten	206	51.0	1.0	48.1	45.1	1.0	53.9
17	Bali	114	64.0	0.0	36.0	23.7	0.0	76.3
18	Nusa Tenggara Barat	149	83.2	0.7	16.1	46.3	0.7	53.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	56.3	0.3	43.4	28.1	0.0	71.9
20	Kalimantan Barat	233	53.2	0.4	46.4	47.2	0.0	52.8
21	Kalimantan Tengah	176	60.2	0.6	39.2	35.2	1.1	63.6
22	Kalimantan Selatan	217	44.2	0.5	55.3	57.1	1.4	41.5
23	Kalimantan Timur	213	69.0	0.5	30.5	33.8	0.9	65.3
24	Sulawesi Utara	167	47.3	0.0	52.7	19.8	0.0	80.2
25	Sulawesi Tengah	163	76.1	0.0	23.9	25.2	0.0	74.8
26	Sulawesi Selatan	406	83.5	1.0	15.5	33.5	0.7	65.8
27	Sulawesi Tenggara	233	77.7	0.0	22.3	17.2	0.4	82.4
28	Gorontalo	74	56.8	0.0	43.2	40.5	0.0	59.5
29	Sulawesi Barat	81	75.3	0.0	24.7	14.8	0.0	85.2
30	Maluku	161	55.9	0.6	43.5	11.2	0.0	88.8
31	Maluku Utara	101	65.3	1.0	33.7	20.8	0.0	79.2
32	Papua Barat	104	74.0	2.9	23.1	24.0	0.0	76.0
33	Papua	294	56.1	5.8	38.1	19.4	1.7	78.9
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	48,6	0,4	51,0	39,0	0,5	60,5
2	Perdesaan	6660	58,6	0,8	40,6	29,2	0,7	70,1
	INDONESIA	8981	56,0	0,7	43,3	31,8	0,6	67,6

Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan Konsultasi Kesehatan Lingkungan (Kesling) secara nasional 20,6 persen. Terbesar di Provinsi kalimantan selatan (49,3%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (45,6%) dan Provinsi Sumatera barat (36,7%). Terendah di Provinsi Maluku (8.1%), di ikuti Provinsi Kepulauan Riau (9,2%) dan Provinsi Papua barat (9,6%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan Konsultasi Kesling 25,9 persen sementara Puskesmas pedesaan 18,7 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan konsultasi keperawatan secara nasional 8.5 persen. Terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (27,5%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (15,8%)dan Provinsi Kalimantan Selatan (15,2%). Terendah di Provinsi Sumatera Utara (1,4%), di ikuti Provinsi Bali (1,8%) dan Provinsi Maluku (1,9%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan konsultasi keperawatan 8,4 persen sementara Puskesmas pedesaan 8,5 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan klinik konsultasi secara nasional 39,1 persen. Terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan (72,8%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (68,4%) dan Provinsi Sumatera barat (56,9%). Terendah di Provinsi Maluku (17,4%), di ikuti Provinsi Sulawesi Tenggara (20,6%) dan Provinsi Bali (24,6%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan klinik konsultasi 45,7 persen sementara Puskesmas pedesaan 36,8 persen. Dilihat dari jenis, pesentase Puskesmas perawatan yang memiliki ruangan klinik konsultasi 47,4 persen sementara Puskesmas non perawatan 34,8 persen.

Persentase puskesmas yang memiliki Lengkap ruangan Pelayanan penunjang secara nasional 16,5 persen. Terbesar di Provinsi Bangka Belitung (43,9%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (35,6%) dan Provinsi Sumatera barat (34,3%). Terendah di Provinsi Maluku (5,0%), diikuti Provinsi Bengkulu (5,2%) dan Provinsi Sumatera Utara (6,9%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan adekuat 17,9 persen sementara Puskesmas pedesaan 16,0 persen.

Tabel 4.4.2.3.c
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Ruangan Pelayanan Penunjang, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Ruang Konsultasi Kesling			Ruang Konsultasi Keperawatan		
			% Ada	% Tdk Ada	% TAD	% Ada	% Tdk Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	15.1	0.3	84.6	5.1	0.0	94.9
2	Sumatera Utara	506	15.4	1.4	83.2	1.4	0.2	98.4
3	Sumatera Barat	248	36.7	1.2	62.1	7.7	0.0	92.3
4	Riau	195	29.2	2.1	68.7	6.2	0.0	93.8
5	Jambi	171	25.7	0.0	74.3	3.5	0.6	95.9
6	Sumatera Selatan	298	25.2	1.0	73.8	9.4	0.0	90.6
7	Bengkulu	173	12.7	0.6	86.7	4.6	0.0	95.4
8	Lampung	265	17.0	0.0	83.0	7.5	0.0	92.5
9	Bangka Belitung	57	45.6	1.8	52.6	15.8	0.0	84.2
10	Kepulauan Riau	65	9.2	0.0	90.8	9.2	0.0	90.8
11	DKI Jakarta	336	9.8	0.3	89.9	9.2	0.0	90.8
12	Jawa Barat	1,031	16.1	0.3	83.6	8.6	0.1	91.3
13	Jawa Tengah	861	24.4	0.7	74.9	11.0	0.0	89.0
14	DI Yogyakarta	121	29.8	0.0	70.2	9.9	0.0	90.1
15	Jawa Timur	949	19.5	0.1	80.4	11.1	0.1	88.8
16	Banten	206	19.9	0.5	79.6	3.4	0.0	96.6
17	Bali	114	12.3	0.0	87.7	1.8	0.0	98.2
18	Nusa Tenggara Barat	149	33.6	0.7	65.8	27.5	0.7	71.8
19	Nusa Tenggara Timur	302	24.8	1.0	74.2	9.9	0.3	89.7
20	Kalimantan Barat	233	23.2	0.4	76.4	5.2	0.0	94.8
21	Kalimantan Tengah	176	15.3	0.6	84.1	5.1	0.6	94.3
22	Kalimantan Selatan	217	49.3	0.5	50.2	15.2	0.0	84.8
23	Kalimantan Timur	213	20.7	0.0	79.3	4.2	0.0	95.8
24	Sulawesi Utara	167	17.4	0.0	82.6	9.0	0.0	91.0
25	Sulawesi Tengah	163	26.4	0.6	73.0	4.3	0.0	95.7
26	Sulawesi Selatan	406	27.6	0.2	72.2	14.8	0.2	85.0
27	Sulawesi Tenggara	233	13.7	0.0	86.3	3.4	0.4	96.1
28	Gorontalo	74	18.9	2.7	78.4	6.8	0.0	93.2
29	Sulawesi Barat	81	12.3	0.0	87.7	8.6	0.0	91.4
30	Maluku	161	8.1	0.0	91.9	1.9	0.0	98.1
31	Maluku Utara	101	16.8	0.0	83.2	7.9	0.0	92.1
32	Papua Barat	104	9.6	1.0	89.4	13.5	1.9	84.6
33	Papua	294	12.6	1.0	86.4	10.5	0.7	88.8
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	25,9	0,6	73,5	8,4	0,0	91,5
2	Perdesaan	6660	18,7	0,5	80,8	8,5	0,2	91,3
	INDONESIA	**8981**	**20,6**	**0,5**	**78,9**	**8,5**	**0,1**	**91,3**

Tabel 4.4.2.3.d
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Ruangan Pelayanan Penunjang, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Ruang Konseling Gabungan			Lengkap Ruang Pelayanan Penunjang*	
			% Ada	% Tdk Ada	% TAD	% Ya	% Tidak
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	32.5	0.0	67.5	23.5	76.5
2	Sumatera Utara	506	36.6	0.0	63.4	6.9	93.1
3	Sumatera Barat	248	56.9	0.0	43.1	34.3	65.7
4	Riau	195	47.7	0.0	52.3	16.4	83.6
5	Jambi	171	33.3	0.0	66.7	10.5	89.5
6	Sumatera Selatan	298	49.0	0.0	51.0	16.1	83.9
7	Bengkulu	173	30.6	0.0	69.4	5.2	94.8
8	Lampung	265	27.5	0.0	72.5	6.0	94.0
9	Bangka Belitung	57	68.4	0.0	31.6	43.9	56.1
10	Kepulauan Riau	65	35.4	0.0	64.6	13.8	86.2
11	DKI Jakarta	336	25.6	0.0	74.4	8.0	92.0
12	Jawa Barat	1,031	28.4	0.1	71.5	10.4	89.6
13	Jawa Tengah	861	44.4	0.0	55.6	22.8	77.2
14	DI Yogyakarta	121	50.4	0.0	49.6	20.7	79.3
15	Jawa Timur	949	47.8	0.0	52.2	21.0	79.0
16	Banten	206	49.5	0.0	50.5	17.0	83.0
17	Bali	114	24.6	0.0	75.4	16.7	83.3
18	Nusa Tenggara Barat	149	53.0	0.0	47.0	35.6	64.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	41.1	0.0	58.9	14.2	85.8
20	Kalimantan Barat	233	51.5	0.0	48.5	20.6	79.4
21	Kalimantan Tengah	176	38.1	0.0	61.9	15.3	84.7
22	Kalimantan Selatan	217	72.8	0.0	27.2	23.5	76.5
23	Kalimantan Timur	213	39.4	0.0	60.6	19.7	80.3
24	Sulawesi Utara	167	28.1	0.0	71.9	10.8	89.2
25	Sulawesi Tengah	163	36.8	0.0	63.2	14.1	85.9
26	Sulawesi Selatan	406	43.8	0.0	56.2	29.6	70.4
27	Sulawesi Tenggara	233	20.6	0.0	79.4	8.6	91.4
28	Gorontalo	74	48.6	0.0	51.4	10.8	89.2
29	Sulawesi Barat	81	28.4	0.0	71.6	16.0	84.0
30	Maluku	161	17.4	0.0	82.6	5.0	95.0
31	Maluku Utara	101	29.7	0.0	70.3	12.9	87.1
32	Papua Barat	104	29.8	0.0	70.2	13.5	86.5
33	Papua	294	27.9	0.7	71.4	7.5	92.5
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	45,7	0	54,3	17,9	82,1
2	Perdesaan	6660	36,8	0,0	63,2	16,0	84,0
	INDONESIA	**8981**	**39,1**	**0,0**	**60,9**	**16,5**	**83,5**

Tabel 4.4.2.4.a dan table 4.4.2.4.b menyajikan persentase Puskesmas menurut ketersedian ruangan non Pelayanan. Tabel 4.4.2.4.a menunjukkan persentase Puskesmas yang memiliki ruangan rapat secara nasional 59,9 persen. Terbesar di Provinsi DI Yogyakarta (97,5%), diikuti Provinsi Bali (86,8%) dan Provinsi Banten (75,7%). Terendah di Provinsi Papua Barat (34,6%), di ikuti Provinsi Maluku (37,9%) dan Provinsi Sulawesi Barat (38,3%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan rapat 62,8 persen sementara Puskesmas pedesaan 58,9 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan tunggu secara nasional 71,6 persen. Terbesar di Provinsi DI Yogyakarta (100%) , diikuti Provinsi Jawa Tengah (97,7%) dan Provinsi Bali (97,4%). Terendah di Provinsi Kalimantan Barat (20,6%), di ikuti Provinsi Sumatera Barat (21,8%) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (41,1%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan tunggu 76,7 persen sementara Puskesmas pedesaan 69,8 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki gudang obat secara nasional 93,5 persen. Terbesar di Provinsi Jawa Tengah (98,6%), diikuti Provinsi Lampung (98,5%) dan Provinsi Bangka Belitung serta Bali (98,2%). Terendah di Provinsi DI Aceh (78,5%), di ikuti Provinsi DKI Jakarta (81,8%) dan Provinsi Papua Barat (87,5%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki gudang obat 91,0 persen sementara Puskesmas pedesaan 94,3 persen.

Tabel 4.4.2.4.a
Persentase Puskesmas menurut Jumlah Ruangan Non Pelayanan, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Ruangan Rapat			Ruang Tunggu			Gudang Obat		
			% Ada	% Tdk Ada	% TAD	% Ada	% Tdk Ada	% TAD	% Ada	% Tdk Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	56.9	42.8	0.3	72.7	27.3	0.0	78.5	21.5	0.0
2	Sumatera Utara	506	66.6	33.4	0.0	49.6	50.0	0.4	83.8	15.6	0.6
3	Sumatera Barat	248	65.7	34.3	0.0	21.8	78.2	0.0	97.6	2.4	0.0
4	Riau	195	53.3	46.7	0.0	73.3	26.7	0.0	94.9	5.1	0.0
5	Jambi	171	48.0	52.0	0.0	56.7	43.3	0.0	95.3	4.1	0.6
6	Sumatera Selatan	298	48.0	52.0	0.0	52.7	47.3	0.0	96.3	3.0	0.7
7	Bengkulu	173	41.0	59.0	0.0	85.0	14.5	0.6	96.0	4.0	0.0
8	Lampung	265	58.1	41.9	0.0	65.3	34.7	0.0	98.5	1.5	0.0
9	Bangka Belitung	57	66.7	33.3	0.0	84.2	15.8	0.0	98.2	1.8	0.0
10	Kepulauan Riau	65	53.8	46.2	0.0	53.8	46.2	0.0	92.3	7.7	0.0
11	DKI Jakarta	336	56.3	43.8	0.0	97.3	2.7	0.0	81.8	17.9	0.3
12	Jawa Barat	1,031	60.7	39.2	0.1	58.9	40.9	0.2	93.8	6.0	0.2
13	Jawa Tengah	861	75.0	25.0	0.0	97.7	2.3	0.0	98.6	1.3	0.1
14	DI Yogyakarta	121	97.5	2.5	0.0	100.0	0.0	0.0	97.5	2.5	0.0
15	Jawa Timur	949	73.3	26.7	0.0	95.5	4.5	0.0	97.0	3.0	0.0
16	Banten	206	75.7	24.3	0.0	50.0	50.0	0.0	97.6	1.9	0.5
17	Bali	114	86.8	13.2	0.0	97.4	2.6	0.0	98.2	0.9	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	60.4	39.6	0.0	74.5	25.5	0.0	98.0	2.0	0.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	42.7	57.3	0.0	41.1	58.6	0.3	93.4	6.6	0.0
20	Kalimantan Barat	233	56.2	43.8	0.0	20.6	79.4	0.0	95.3	4.7	0.0
21	Kalimantan Tengah	176	48.3	51.7	0.0	68.8	31.3	0.0	92.6	6.8	0.6
22	Kalimantan Selatan	217	51.6	48.4	0.0	85.3	14.7	0.0	91.7	8.3	0.0
23	Kalimantan Timur	213	54.5	45.5	0.0	57.7	42.3	0.0	93.9	6.1	0.0
24	Sulawesi Utara	167	65.3	34.7	0.0	84.4	15.6	0.0	96.4	3.6	0.0
25	Sulawesi Tengah	163	54.6	45.4	0.0	57.1	42.9	0.0	97.5	2.5	0.0
26	Sulawesi Selatan	406	55.4	44.6	0.0	90.4	9.6	0.0	91.6	7.9	0.5
27	Sulawesi Tenggara	233	55.8	44.2	0.0	83.3	16.7	0.0	93.1	6.9	0.0
28	Gorontalo	74	54.1	45.9	0.0	97.3	2.7	0.0	97.3	2.7	0.0
29	Sulawesi Barat	81	38.3	61.7	0.0	71.6	28.4	0.0	93.8	6.2	0.0
30	Maluku	161	37.9	62.1	0.0	73.9	26.1	0.0	90.7	8.7	0.6
31	Maluku Utara	101	48.5	51.5	0.0	90.1	9.9	0.0	93.1	5.9	1.0
32	Papua Barat	104	34.6	65.4	0.0	63.5	36.5	0.0	87.5	12.5	0.0
33	Papua	294	38.8	60.9	0.3	57.8	41.8	0.3	89.8	9.9	0.3
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	62,8	37,2	0,0	76,7	23,2	0,1	91,0	8,6	0,3
2	Perdesaan	6660	58,9	41,1	0,0	69,8	30,1	0,1	94,3	5,5	0,2
	INDONESIA	**8.981**	**59,9**	**40,1**	**0,0**	**71,6**	**28,3**	**0,1**	**93,5**	**6,3**	**0,2**

Persentase Puskesmas yang memiliki toilet untuk pengunjung secara nasional 96,7 persen. Terbesar di Provinsi DI Yogyakarta dan Bali (100%), diikuti Provinsi DKI (99,4%) dan Provinsi Kalimantan selatan (99,1%). Terendah di Provinsi Papua Barat (84,6%), di ikuti Provinsi Maluku (85,1%) dan Provinsi Papua (86,1%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki toilet 98,1 persen sementara Puskesmas pedesaan 96,2 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki lengkap ruangan non pelayanan (memiliki Ruang Rapat, Ruang Tunggu, Gudang Obat dan Toilet) secara nasional 39,7 persen. Terbesar di Provinsi DI Yogyakarta (80,2%), diikuti Provinsi Jawa Timur (65,5%) dan Provinsi Jawa tengah (63,8%). Terendah di Provinsi Kalimantan Barat (13,3%), di ikuti Provinsi Sumatera Barat (14,5%) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (20,2%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki lengkap ruangan non pelayanan adekuat 43,6 persen sementara Puskesmas pedesaan 38,3 persen.

Tabel 4.4.2.4.b
Persentase Puskesmas menurut Jumlah Ruangan Non Pelayanan, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Toilet			Ruangan non pelayanan lengkap*		
			% Ada	% Tdk Ada	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	96.8	3.2	0.0	28.6	71.4	0.0
2	Sumatera Utara	506	97.4	2.4	0.2	28.9	71.1	0.0
3	Sumatera Barat	248	98.4	1.6	0.0	14.5	85.5	0.0
4	Riau	195	95.4	4.6	0.0	34.4	65.6	0.0
5	Jambi	171	95.3	4.7	0.0	30.4	69.6	0.0
6	Sumatera Selatan	298	94.6	5.0	0.3	25.5	74.5	0.0
7	Bengkulu	173	97.7	2.3	0.0	24.3	75.7	0.0
8	Lampung	265	98.1	1.9	0.0	34.7	65.3	0.0
9	Bangka Belitung	57	98.2	1.8	0.0	54.4	45.6	0.0
10	Kepulauan Riau	65	95.4	3.1	1.5	26.2	73.8	0.0
11	DKI Jakarta	336	99.4	0.6	0.0	47.6	52.4	0.0
12	Jawa Barat	1,031	97.5	2.3	0.2	35.8	64.1	0.1
13	Jawa Tengah	861	98.1	1.9	0.0	63.8	36.2	0.0
14	DI Yogyakarta	121	100.0	0.0	0.0	80.2	19.8	0.0
15	Jawa Timur	949	98.7	1.3	0.0	65.5	34.5	0.0
16	Banten	206	99.0	1.0	0.0	39.3	60.7	0.0
17	Bali	114	100.0	0.0	0.0	56.1	43.9	0.0
18	Nusa Tenggara Barat	149	97.3	2.7	0.0	38.3	61.7	0.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	94.0	5.6	0.3	20.2	79.8	0.0
20	Kalimantan Barat	233	98.7	1.3	0.0	13.3	86.7	0.0
21	Kalimantan Tengah	176	98.9	1.1	0.0	23.3	76.7	0.0
22	Kalimantan Selatan	217	99.1	0.9	0.0	36.4	63.6	0.0
23	Kalimantan Timur	213	99.5	0.5	0.0	33.8	66.2	0.0
24	Sulawesi Utara	167	97.0	3.0	0.0	52.1	47.9	0.0
25	Sulawesi Tengah	163	93.3	6.7	0.0	32.5	67.5	0.0
26	Sulawesi Selatan	406	96.3	3.7	0.0	44.8	55.2	0.0
27	Sulawesi Tenggara	233	94.0	6.0	0.0	40.8	59.2	0.0
28	Gorontalo	74	98.6	1.4	0.0	43.2	56.8	0.0
29	Sulawesi Barat	81	92.6	7.4	0.0	29.6	70.4	0.0
30	Maluku	161	85.1	14.9	0.0	23.0	77.0	0.0
31	Maluku Utara	101	94.1	5.9	0.0	37.6	62.4	0.0
32	Papua Barat	104	84.6	15.4	0.0	23.1	76.9	0.0
33	Papua	294	86.1	13.6	0.3	20.7	79.3	0.0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	98,1	1,8	0,1	43,6	56,4	0,0
2	Perdesaan	6660	96,2	3,8	0,1	38,3	61,7	0,0
	INDONESIA	8.981	96,7	3,3	0,1	39,7	60,3	0,0

*lengkap, jika ada R. rapat, R. Tunggu, Gudang, Toilet

4.4.3. AIR BERSIH

Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih sepanjang tahun secara nasional 71,7 persen. Terbesar di Provinsi Jawa Timur (89,0%), di ikuti Provinsi Bali (87,7%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (85,9%). Terendah di Provinsi Papua (39,5%) di ikuti Provinsi Sulawesi Barat (44,4%) dan Kalimantan Barat (48,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ketersediaan sarana air bersih sepanjang tahun 80,8 persen sementara Puskesmas pedesaan 68,5 persen.

Tabel 4.4.3.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Air Bersih Sepanjang Tahun, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Air Bersih sepanjang tahun		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	56.3	43.7	0.0
2	Sumatera Utara	506	66.4	33.4	0.2
3	Sumatera Barat	248	68.1	31.9	0.0
4	Riau	195	55.4	44.6	0.0
5	Jambi	171	65.5	34.5	0.0
6	Sumatera Selatan	298	62.1	37.9	0.0
7	Bengkulu	173	68.8	31.2	0.0
8	Lampung	265	72.5	27.5	0.0
9	Bangka Belitung	57	66.7	33.3	0.0
10	Kepulauan Riau	65	60.0	40.0	0.0
11	DKI Jakarta	336	85.7	14.3	0.0
12	Jawa Barat	1,031	77.5	22.3	0.2
13	Jawa Tengah	861	85.6	14.4	0.0
14	DI Yogyakarta	121	80.2	19.8	0.0
15	Jawa Timur	949	89.0	11.0	0.0
16	Banten	206	76.7	23.3	0.0
17	Bali	114	87.7	12.3	0.0
18	Nusa Tenggara Barat	149	85.9	14.1	0.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	65.9	34.1	0.0
20	Kalimantan Barat	233	48.5	51.5	0.0
21	Kalimantan Tengah	176	58.5	41.5	0.0
22	Kalimantan Selatan	217	73.3	26.7	0.0
23	Kalimantan Timur	213	70.0	30.0	0.0
24	Sulawesi Utara	167	72.5	27.5	0.0
25	Sulawesi Tengah	163	63.8	36.2	0.0
26	Sulawesi Selatan	406	73.4	26.6	0.0
27	Sulawesi Tenggara	233	63.5	36.5	0.0
28	Gorontalo	74	73.0	27.0	0.0
29	Sulawesi Barat	81	44.4	53.1	2.5
30	Maluku	161	65.8	34.2	0.0
31	Maluku Utara	101	57.4	42.6	0.0
32	Papua Barat	104	49.0	50.0	1.0
33	Papua	294	39.5	60.2	0.3
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	80,8	19,1	0,1
2	Perdesaan	6660	68,5	31,4	0,1
	INDONESIA	**8.981**	**71,7**	**28,2**	**0,1**

4.4.4. PENGELOLAAN LIMBAH

Tabel4.4.4.1 menyajikan persentase Puskesmas menurut Pengelolaan Limbah di puskesmas. Persentase Puskesmas yang memiliki SPAL secara nasional 44,5 persen. Terbesar di Provinsi DI Yogyakarta (90,1%), diikuti Provinsi Bali (88,6%)dan Provinsi Jawa Timur (70,3%). Terendah di Provinsi Sulawesi Barat (6,2%), di ikuti Provinsi Papua Barat (9,6%) dan Provinsi Maluku Utara (9,9%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki SPAL 55,3 persen sementara Puskesmas pedesaan 40,8 persen.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemisahan limbah medis dan non medis secara nasional 64,6 persen. Terbesar di Provinsi DI Yogyakarta (100%), diikuti Provinsi Bali (97,4%) dan Provinsi DKI Jakarta (94,3%). Terendah di Provinsi Maluku (23,6%), di ikuti Provinsi Papua (27,2%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (30,1%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang melaksanakan pemisahan limbah medis dan non medis 82,0 persen sementara Puskesmas pedesaan 58,5 persen.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan penanganan limbah medis dengan incenerator secara nasional 26,8 persen. Terbesar di Provinsi DI Yogyakarta (89,3%) , diikuti Provinsi Bali (59,6%) dan Provinsi Jawa Tengah (47,2%). Terendah di Provinsi Maluku (0,6%), di ikuti Provinsi Sulawesi Barat (1,2%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (4,3%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang melaksanakan penanganan limbah medis dengan incenerator 51,4 persen sementara Puskesmas pedesaan 18,3 persen.

Tabel 4.4.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Pengelolaan Limbah, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	SPAL		Pemisahan Limbah Medis dan Non Medis			Penanganan Limbah Medis dengan Incenerator		
			% Ya	% Tidak	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi									
1	DI Aceh	311	38.9	61.1	56.9	43.1	0.0	18.6	81.0	0.3
2	Sumatera Utara	506	42.5	57.5	50.2	49.2	0.6	15.8	83.8	0.4
3	Sumatera Barat	248	48.4	51.6	58.9	41.1	0.0	29.4	70.2	0.4
4	Riau	195	35.4	64.6	59.5	38.5	2.1	21.5	78.5	0.0
5	Jambi	171	24.0	76.0	52.6	47.4	0.0	7.6	92.4	0.0
6	Sumatera Selatan	298	24.8	75.2	66.1	33.9	0.0	21.1	78.5	0.3
7	Bengkulu	173	18.5	81.5	54.3	45.7	0.0	14.5	85.5	0.0
8	Lampung	265	40.8	59.2	63.0	37.0	0.0	23.4	75.8	0.8
9	Bangka Belitung	57	43.9	56.1	87.7	12.3	0.0	38.6	61.4	0.0
10	Kepulauan Riau	65	29.2	70.8	80.0	20.0	0.0	40.0	60.0	0.0
11	DKI Jakarta	336	56.5	43.5	94.3	5.7	0.0	41.4	58.3	0.3
12	Jawa Barat	1,031	68.6	31.4	81.3	18.3	0.4	34.4	65.5	0.1
13	Jawa Tengah	861	67.0	33.0	84.1	15.6	0.3	47.2	52.8	0.0
14	DI Yogyakarta	121	90.1	9.9	100.0	0.0	0.0	89.3	10.7	0.0
15	Jawa Timur	949	70.3	29.7	87.4	12.4	0.2	39.6	60.4	0.0
16	Banten	206	52.4	47.6	72.8	27.2	0.0	40.3	59.7	0.0
17	Bali	114	88.6	11.4	97.4	2.6	0.0	59.6	40.4	0.0
18	Nusa Tenggara Barat	149	58.4	41.6	51.0	48.3	0.7	15.4	84.6	0.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	20.5	79.5	38.1	61.9	0.0	7.3	92.7	0.0
20	Kalimantan Barat	233	23.2	76.8	52.8	45.9	1.3	8.6	91.4	0.0
21	Kalimantan Tengah	176	22.2	77.8	42.0	58.0	0.0	13.1	86.9	0.0
22	Kalimantan Selatan	217	38.7	61.3	59.0	41.0	0.0	33.2	66.8	0.0
23	Kalimantan Timur	213	31.0	69.0	68.1	31.9	0.0	26.8	73.2	0.0
24	Sulawesi Utara	167	16.8	83.2	52.7	46.7	0.6	25.7	74.3	0.0
25	Sulawesi Tengah	163	20.2	79.8	30.1	69.9	0.0	4.3	95.7	0.0
26	Sulawesi Selatan	406	26.4	73.6	58.1	41.9	0.0	19.5	80.3	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	18.5	81.5	35.6	63.9	0.4	9.0	91.0	0.0
28	Gorontalo	74	36.5	63.5	54.1	44.6	1.4	16.2	83.8	0.0
29	Sulawesi Barat	81	6.2	93.8	30.9	69.1	0.0	1.2	98.8	0.0
30	Maluku	161	18.6	81.4	23.6	75.8	0.6	0.6	99.4	0.0
31	Maluku Utara	101	9.9	90.1	31.7	68.3	0.0	5.0	95.0	0.0
32	Papua Barat	104	9.6	90.4	31.7	68.3	0.0	10.6	89.4	0.0
33	Papua	294	10.2	89.8	27.2	72.8	0.0	5.1	94.9	0.0
	Lokasi									
1	Perkotaan	2321	55,3	44,7	82,0	17,8	0,2	51,4	48,4	0,2
2	Perdesaan	6660	40,8	59,2	58,5	41,2	0,3	18,3	81,6	0,1
INDONESIA		**8981**	**44.5**	**55.5**	**64.6**	**35.2**	**0.3**	**26.8**	**73.0**	**0.1**

4.4.5. SUMBER DAYA LISTRIK

Tabel 4.4.5.1 menunjukkan persentase Puskesmas yang tersedia listrik PLN 24 jam, secara nasional 82,3 persen. Terbesar di Provinsi Banten (99,5%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (99,3%) dan Provinsi Bali (98,2%). Terendah di Provinsi Papua dan Papua Barat (22,1%), di ikuti Provinsi Maluku Utara (27,7%) dan Provinsi Maluku (39,8%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang tersedia listrik PLN 24 Jam 94,2 persen sementara Puskesmas pedesaan 78,1 persen.

Tabel 4.4.5.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Sumber Daya Listrik, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Sumber dari PLN					Ketersediaan Listrik dari semua sumber		
			% Tidak Ada	% 1- 5 jam	% 6 - 11 jam	% 12 - 23 jam	% 24 jam	% 24 jam	% Tidak 24 jam	% TAD
	Provinsi									
1	DI Aceh	311	1.9	0.6	3.2	4.8	89.4	93.2	6.1	0.6
2	Sumatera Utara	506	4.9	0.2	0.4	3.0	91.5	92.7	4.0	3.4
3	Sumatera Barat	248	1.6	0.4	1.2	8.5	88.3	97.2	2.8	0.0
4	Riau	195	14.9	2.1	8.7	9.7	64.6	75.4	23.1	1.5
5	Jambi	171	15.2	0.6	1.8	2.9	79.5	83.6	14.0	2.3
6	Sumatera Selatan	298	10.1	0.0	2.0	2.0	85.9	87.9	10.4	1.7
7	Bengkulu	173	8.7	0.0	2.3	16.8	72.3	75.7	23.1	1.2
8	Lampung	265	9.4	0.0	0.4	1.5	88.7	90.9	7.9	1.1
9	Bangka Belitung	57	5.3	0.0	1.8	3.5	89.5	94.7	5.3	0.0
10	Kepulauan Riau	65	23.1	0.0	15.4	1.5	60.0	76.9	18.5	4.6
11	DKI Jakarta	336	1.5	0.0	0.9	3.3	94.3	95.5	3.3	1.2
12	Jawa Barat	1,031	0.4	0.1	0.1	1.6	97.8	98.1	1.7	0.2
13	Jawa Tengah	861	0.3	0.0	0.0	0.3	99.3	99.8	0.2	0.0
14	DI Yogyakarta	121	0.8	0.0	0.0	1.7	97.5	97.5	1.7	0.8
15	Jawa Timur	949	0.8	0.0	0.5	1.1	97.6	98.4	1.4	0.2
16	Banten	206	0.0	0.0	0.5	0.0	99.5	99.5	0.5	0.0
17	Bali	114	0.0	0.0	0.0	1.8	98.2	98.2	1.8	0.0
18	Nusa Tenggara Barat	149	2.7	0.7	3.4	1.3	91.9	97.3	1.3	1.3
19	Nusa Tenggara Timur	302	27.2	0.7	12.9	6.3	53.0	63.2	33.8	3.0
20	Kalimantan Barat	233	6.0	0.4	13.3	10.3	70.0	82.8	16.7	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	17.0	2.8	17.0	6.3	56.8	81.3	17.6	1.1
22	Kalimantan Selatan	217	2.8	0.0	5.1	3.2	88.9	93.5	6.5	0.0
23	Kalimantan Timur	213	17.4	0.9	9.4	6.6	65.7	78.9	20.2	0.9
24	Sulawesi Utara	167	5.4	0.6	4.2	8.4	81.4	94.0	6.0	0.0
25	Sulawesi Tengah	163	11.0	9.8	16.6	1.8	60.7	69.9	29.4	0.6
26	Sulawesi Selatan	406	5.4	0.0	1.2	2.7	90.6	94.6	4.7	0.7
27	Sulawesi Tenggara	233	23.2	0.4	11.2	2.6	62.7	68.2	27.0	4.7
28	Gorontalo	74	8.1	0.0	0.0	16.2	75.7	86.5	8.1	5.4
29	Sulawesi Barat	81	43.2	1.2	2.5	0.0	53.1	63.0	32.1	4.9
30	Maluku	161	28.6	1.9	22.4	7.5	39.8	50.9	41.6	7.5
31	Maluku Utara	101	38.6	1.0	19.8	12.9	27.7	42.6	53.5	4.0
32	Papua Barat	104	57.7	10.6	9.6	0.0	22.1	35.6	58.7	5.8
33	Papua	294	65.0	5.1	5.1	2.7	22.1	42.5	29.6	27.9
	Lokasi									
1	Perkotaan	2321	2,2	0,2	1,2	2,2	94,2	96,2	3,0	0,8
2	Perdesaan	6660	12,0	1,0	4,9	4,0	78,1	84,3	13,1	2,6
INDONESIA		**8981**	**9.5**	**0.8**	**3.9**	**3.5**	**82.3**	**87.4**	**10.5**	**2.1**

Sedangkan persentase Puskesmas yang tersedia listrik 24 Jam dari berbagai sumber, secara nasional 87,4 persen. Terbesar di Provinsi Jawa Tengah (99,8%), diikuti Provinsi Banten (99,5%) dan Provinsi Jawa Timur (98,4%). Terendah di Provinsi Papua barat (35,6%), di ikuti Provinsi Papua (42,5%) dan Provinsi Maluku Utara (42,6%). Bila dilihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang tersedia listrik dari berbagai sumber 24 Jam 96,2 persen sementara Puskesmas pedesaan 84,3 persen.

4.5. KETATAUSAHAAN

4.5.1 ALAT KANTOR

Pada Rifaskes 2011, Alat kantor yang ditanyakan antara lain adalah komputer, printer, mesin tik, AC/Kipas, Lemari/Filing kabinet. Dikatakan memiliki alat kantor lengkap jika punya komputer, printer, mesin tik, AC/Kipas, Lemari/Filing kabinet. Pada tabel 4.5.1.1a sampai 4.5.1.1.c terlihat persentase puskesmas dengan ketersediaan alat kantor per provinsi.

Dari 8981 Puskesmas menunjukkan bahwa 78,4 persen Puskesmas di Indonesia sudah memiliki komputer. Terbesar di Provinsi Kepulauan riau (98,5%), diikuti Provinsi DIY (98,3%) dan Provinsi Jawa Tengah (94,4%). Terendah di Provinsi Papua (30,6%), di ikuti Provinsi Maluku (32,3%) dan Provinsi Sulawesi Barat (40,7%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki komputer 88,2 persen sementara Puskesmas pedesaan 75,0 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki printer secara nasional 70,3 persen. Terbesar di Provinsi DI Yogyakarta (95,9%), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (95,4%) dan Provinsi NTT (89,9%). Terendah di Provinsi Maluku (29,2%), di ikuti Provinsi Papua (31,3%) dan Provinsi Sulawesi Barat (35,8%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki printer 80,7 persen sementara Puskesmas pedesaan 66,7 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki mesin tik secara nasional 49,6 persen. Terbesar di Provinsi DIY (86,8%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (75,8%) dan Provinsi Sumatra Barat (70,3%). Terendah di Provinsi Sulawesi Utara (18%), di ikuti Provinsi Papua (21,1%) dan Provinsi Maluku Utara (22,8%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki mesin tik 54,8 persen sementara Puskesmas pedesaan 47,8 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki ruangan AC dan atau Kipas secara nasional 51,4 persen. Terbesar di Provinsi DKI Jakarta (93,5%), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (92,3%) dan Provinsi DIY (90,1%). Terendah di Provinsi Sulawesi Barat (11,1%), diikuti Provinsi Papua (11,2%) dan Provinsi NTT (13,2%). Bila di lihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki ruangan AC atau Kipas 72,1 persen sementara Puskesmas pedesaan 44,2 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki Lemari dan atau Filling Kabinet secara nasional 90,5 persen. Terbesar di Provinsi DI Yogyakarta (100%), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (96,9%) dan Provinsi Jawa Tengah (96,7%). Terendah di Provinsi Papua Barat (60,6%), diikuti Provinsi Papua (62,5%) dan Provinsi Kalbar (79,8%). Bila dilihat dari lokasi persentase

Puskesmas perkotaan yang memiliki Lemari dan atau Filling cabinet 92,4 persen sementara Puskesmas pedesaan 89,8 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki Alat kantor lengkap secara nasional 25,6 persen. Terbesar di Provinsi DI Yogyakarta (79,3%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (51,3%) dan Provinsi Kepulauan Riau (46,2%). Terendah di Provinsi Sulawesi Barat (1,2%), diikuti Provinsi NTT (3%) dan Provinsi Sulawesi Utara (3%). Bila dilihat dari lokasi persentase Puskesmas perkotaan yang memiliki alat kantor lengkap 37,4 persen sementara Puskesmas pedesaan 21,5 persen.

Tabel 4.5.1.1.a
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Kantor, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Komputer			Printer		
			% Ada	% Tidak	% TAD	% Ada	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	89,4	10,6	0	81,7	18,3	0
2	Sumatera Utara	506	66,2	33,8	0	56,7	43,3	0
3	Sumatera Barat	248	88,3	11,7	0	77,8	22,2	0
4	Riau	195	70,8	29,2	0	61,5	38,5	0
5	Jambi	171	72,5	27,5	0	67,8	31,6	0,6
6	Sumatera Selatan	298	62,8	36,9	0,3	50,7	49,0	0,3
7	Bengkulu	173	65,3	34,7	0	56,1	43,9	0
8	Lampung	265	74,3	25,7	0	63,8	36,2	0
9	Bangka Belitung	57	93,0	7,0	0	84,2	15,8	0
10	Kepulauan Riau	65	98,5	1,5	0	95,4	4,6	0
11	DKI Jakarta	336	86,0	14,0	0	85,1	14,9	0
12	Jawa Barat	1031	87,9	12,0	0,1	78,3	21,6	0,1
13	Jawa Tengah	861	94,4	5,6	0	87,5	12,5	0
14	DI Yogyakarta	121	98,3	1,7	0	95,9	4,1	0
15	Jawa Timur	949	93,6	6,3	0,1	86,1	13,7	0,2
16	Banten	206	92,2	7,8	0	72,8	27,2	0
17	Bali	114	87,7	12,3	0	80,7	19,3	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	94,0	6,0	0	89,9	10,1	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	72,2	27,5	0,3	60,3	39,7	0
20	Kalimantan Barat	233	77,3	22,7	0	71,7	28,3	0
21	Kalimantan Tengah	176	79,5	20,5	0	68,2	31,8	0
22	Kalimantan Selatan	217	89,9	10,1	0	79,3	20,7	0
23	Kalimantan Timur	213	81,2	18,8	0	77,5	22,5	0
24	Sulawesi Utara	167	56,9	43,1	0	44,9	55,1	0
25	Sulawesi Tengah	163	65,6	34,4	0	58,3	41,7	0
26	Sulawesi Selatan	406	84,0	15,8	0,2	69,7	30,0	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	48,1	51,9	0	39,5	60,5	0
28	Gorontalo	74	85,1	14,9	0	71,6	28,4	0
29	Sulawesi Barat	81	40,7	59,3	0	35,8	64,2	0
30	Maluku	161	32,3	67,1	0,6	29,2	70,2	0,6
31	Maluku Utara	101	46,5	53,5	0	44,6	55,4	0
32	Papua Barat	104	42,3	57,7	0	44,2	55,8	0
33	Papua	294	30,6	68,0	1,4	31,3	67,3	1,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	88,2	11,8	0	80,7	19,3	0
2	Perdesaan	6660	75,0	24,8	0,2	66,7	33,2	0,2
	INDONESIA	**8.981**	**78,4**	**21,5**	**0,1**	**70,3**	**29,6**	**0,1**

Tabel 4.5.1.1.b
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Kantor, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Mesin Ketik			AC atau Kipas		
			% Ada	% Tidak	% TAD	% Ada	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	55,6	44,4	0	71,4	28,6	0
2	Sumatera Utara	506	51,8	48,2	0	27,5	72,3	0,2
3	Sumatera Barat	248	70,2	29,8	0	57,7	42,3	0
4	Riau	195	45,1	54,9	0	52,8	47,2	0
5	Jambi	171	50,9	49,1	0	36,8	62,6	0,6
6	Sumatera Selatan	298	48,0	51,7	0,3	40,3	59,4	0,3
7	Bengkulu	173	37,6	62,4	0	30,6	69,4	0
8	Lampung	265	42,3	57,7	0	46,0	54,0	0
9	Bangka Belitung	57	49,1	50,9	0	64,9	35,1	0
10	Kepulauan Riau	65	50,8	49,2	0	92,3	7,7	0
11	DKI Jakarta	336	42,9	57,1	0	93,5	6,3	0,3
12	Jawa Barat	1031	48,0	51,9	0,1	50,3	49,5	0,2
13	Jawa Tengah	861	75,8	24,2	0	71,2	28,7	0,1
14	DI Yogyakarta	121	86,8	13,2	0	90,1	9,9	0
15	Jawa Timur	949	56,6	43,2	0,2	75,3	24,1	0,5
16	Banten	206	48,5	51,5	0	66,0	34,0	0
17	Bali	114	47,4	52,6	0	47,4	50,9	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	42,3	57,7	0	49,0	51,0	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	37,4	62,6	0	13,2	86,8	0
20	Kalimantan Barat	233	54,5	45,5	0	50,6	49,4	0
21	Kalimantan Tengah	176	42,6	57,4	0	42,0	58,0	0
22	Kalimantan Selatan	217	56,2	43,8	0	64,1	35,9	0
23	Kalimantan Timur	213	67,6	32,4	0	70,4	29,6	0
24	Sulawesi Utara	167	18,0	82,0	0	17,4	82,6	0
25	Sulawesi Tengah	163	47,9	52,1	0	31,9	68,1	0
26	Sulawesi Selatan	406	39,2	60,6	0,2	53,9	45,8	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	34,8	65,2	0	18,5	81,5	0
28	Gorontalo	74	23,0	77,0	0	62,2	37,8	0
29	Sulawesi Barat	81	32,1	67,9	0	11,1	88,9	0
30	Maluku	161	34,2	65,2	0,6	19,3	80,1	0,6
31	Maluku Utara	101	22,8	77,2	0	19,8	80,2	0
32	Papua Barat	104	26,9	73,1	0	17,3	82,7	0
33	Papua	294	21,1	77,9	1,0	11,2	87,4	1,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	54,8	45,2	0	72,1	27,7	0,2
2	Perdesaan	6660	47,8	52,1	0,1	44,2	55,6	0,2
	INDONESIA	**8.981**	**49,6**	**50,3**	**0,1**	**51,4**	**48,4**	**0,2**

Tabel 4.5.1.1.c
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Kantor, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Lemari /Filling Kabinet			Alat Kantor lengkap		
			% Ada	% Tidak	% TAD	% Ada	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	95,5	2,3	2,3	35,0	65,0	0
2	Sumatera Utara	506	90,3	4,5	5,1	12,3	87,7	0
3	Sumatera Barat	248	94,0	4,0	2,0	29,8	70,2	0
4	Riau	195	81,5	13,3	5,1	22,1	77,9	0
5	Jambi	171	94,7	4,1	1,2	15,2	84,8	0
6	Sumatera Selatan	298	92,3	3,0	4,7	13,1	86,6	0,3
7	Bengkulu	173	92,5	6,4	1,2	13,3	86,7	0
8	Lampung	265	86,0	7,2	6,8	21,1	78,9	0
9	Bangka Belitung	57	94,7	5,3	0	28,1	71,9	0
10	Kepulauan Riau	65	96,9	0	3,1	46,2	53,8	0
11	DKI Jakarta	336	83,3	9,2	7,4	32,7	67,3	0
12	Jawa Barat	1031	92,5	2,2	5,2	21,2	78,7	0,1
13	Jawa Tengah	861	96,7	2,0	1,3	51,3	48,7	0
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0	0	79,3	20,7	0
15	Jawa Timur	949	94,1	3,4	2,5	42,9	57,1	0
16	Banten	206	93,7	2,9	3,4	36,4	63,6	0
17	Bali	114	96,5	3,5	0	22,8	77,2	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	95,3	2,7	2,0	24,2	75,8	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	95,4	4,0	0,7	3,0	97,0	0
20	Kalimantan Barat	233	79,8	8,6	11,6	24,0	76,0	0
21	Kalimantan Tengah	176	90,9	2,8	6,3	11,9	88,1	0
22	Kalimantan Selatan	217	91,7	4,6	3,7	31,8	68,2	0
23	Kalimantan Timur	213	91,1	3,3	5,6	41,3	58,7	0
24	Sulawesi Utara	167	88,6	6,6	4,8	3,0	97,0	0
25	Sulawesi Tengah	163	89,0	6,7	4,3	15,3	84,7	0
26	Sulawesi Selatan	406	91,1	5,9	3,0	19,5	80,3	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	87,6	9,4	3,0	4,7	95,3	0
28	Gorontalo	74	94,6	4,1	1,4	12,2	87,8	0
29	Sulawesi Barat	81	85,2	8,6	6,2	1,2	98,8	0
30	Maluku	161	86,3	5,6	8,1	5,0	94,4	0,6
31	Maluku Utara	101	91,1	5,9	3,0	8,9	91,1	0
32	Papua Barat	104	60,6	17,3	22,1	8,7	91,3	0
33	Papua	294	62,9	9,5	27,6	3,1	95,9	1,0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	92,4	3,7	3,8	37,4	62,6	0
2	Perdesaan	6660	89,8	5,1	5,1	21,5	78,4	0,1
INDONESIA		**8.981**	**90,5**	**4,7**	**4,8**	**25,6**	**74,3**	**0,1**

4.5.2. ALAT KOMUNIKASI

Sarana komunikasi yang ditanyakan adalah kepemilikan telepon, Handphone Dinas, Radio komunikasi, salah satu dari telepon atau HP atau radio komunikasi, dan koneksi internet. Pada tabel 4.5.2.1.a sampai 4.5..2.1.c dapat terlihat persentase Puskesmas dengan ketersediaan sarana komunikasi per provinsi. Dari 8981 Puskesmas menunjukkan bahwa 37,7 persen Puskesmas di Indonesia sudah memiliki telepon. Dari 33 provinsi di seluruh Indonesia, Puskesmas yang memiliki telepon di atas angka nasional yaitu DI Yogyakarta (81,8%), Jawa Timur (78,5%), Bali (76,3%), DKI Jakarta (75,6%), Jawa Tengah (71,9%), Jawa Barat (57,9%), Banten (47,6%), Sumatera Barat (44,4%), dan Kalimantan Timur (39,4%). Menurut lokasi Puskesmas, sebanyak 60,2 persen dari 2321 Puskesmas Perkotaan sudah tersedia telepon, dan hanya sebanyak 29,9 persen dari 6660 Puskesmas Perdesaan yang mempunyai telepon Telepon.

Berdasarkan ketersediaan handphone dinas, secara nasional sebanyak 4,0 persen puskesmas di Indonesia sudah memiliki handphone dinas yang digunakan oleh Puskesmas. Provinsi dengan persentase kepemilikan handphone diatas angka nasional yaitu Di Yogyakarta (22,3%), Kepulauan Riau (10,8%), Jawa Timur (10,0%), Kalimantan Selatan (6,5%), Bangka Belitung (5,3%), Kalimantan Timur (5,2%), Kalimantan Tengah (5,1%), dan Riau (4,1%). Sebanyak 4,3 persen dari 2321 Puskesmas Perkotaan dan 3,9 persen dari 6660 Puskesmas Perdesaan di seluruh Indonesia yang mempunyai handphone dinas.

Sebanyak 8,2 persen Puskesmas di seluruh Indonesia sudah memiliki radio komunikasi. Ada 13 provinsi dengan ketersediaan radio komunikasi di atas angka nasional dan 20 provinsi lainnya memiliki radio komunikasi di bawah angka nasional. Puskesmas perkotaan 8,4 persen dan puskesmas perdesaan sebanyak 8,1 persen yang memiliki radio komunikasi.

Sebanyak 43,1 persen Puskesmas di seluruh Indonesia sudah tersedia telepon atau handphone atau radio komunikasi. Provinsi dengan ketersediaan telepon atau handphone atau radio komunikasi di atas angka nasional yaitu DI Yogyakarta (87,6%), Jawa Timur (85,2%), Jawa Tengah (78,4%), Bali (78,1%), DKI Jakarta (76,8%), Jawa Barat (61,5%), Sumatera Barat (51,2%), dan Kalimantan Timur (46,5%). Sebanyak 63,7 persen Puskesmas Perkotaan dan 36,0 persen Puskesmas Perdesaan di seluruh Indonesia telah tersedia telepon atau handphone atau radio komunikasi.

Tabel 4.5.2.1.a
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Sarana Komunikasi, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Telepon			HP		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	10.3	89.1	0.6	2.3	97.4	0.3
2	Sumatera Utara	506	11.9	88.1	0.0	0.6	99.4	0.0
3	Sumatera Barat	248	44.4	55.6	0.0	2.4	97.6	0.0
4	Riau	195	21.0	79.0	0.0	4.1	95.9	0.0
5	Jambi	171	5.3	94.7	0.0	0.6	99.4	0.0
6	Sumatera Selatan	298	14.8	84.9	0.3	0.3	99.3	0.3
7	Bengkulu	173	11.6	88.4	0.0	1.2	98.8	0.0
8	Lampung	265	20.8	79.2	0.0	3.0	97.0	0.0
9	Bangka Belitung	57	24.6	75.4	0.0	5.3	94.7	0.0
10	Kepulauan Riau	65	35.4	64.6	0.0	10.8	87.7	1.5
11	DKI Jakarta	336	75.6	24.1	0.3	1.8	97.9	0.3
12	Jawa Barat	1,031	57.9	42.0	0.1	5.8	94.0	0.2
13	Jawa Tengah	861	71.9	28.0	0.1	7.7	92.2	0.1
14	DI Yogyakarta	121	81.8	18.2	0.0	22.3	76.9	0.8
15	Jawa Timur	949	78.5	21.4	0.1	10.0	88.2	1.8
16	Banten	206	47.6	52.4	0.0	1.0	99.0	0.0
17	Bali	114	76.3	23.7	0.0	0.0	98.2	1.8
18	Nusa Tenggara Barat	149	26.2	73.8	0.0	0.7	98.7	0.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	3.0	97.0	0.0	1.0	99.0	0.0
20	Kalimantan Barat	233	18.0	82.0	0.0	1.7	98.3	0.0
21	Kalimantan Tengah	176	21.6	78.4	0.0	5.1	94.9	0.0
22	Kalimantan Selatan	217	25.8	74.2	0.0	6.5	93.5	0.0
23	Kalimantan Timur	213	39.4	60.6	0.0	5.2	94.4	0.5
24	Sulawesi Utara	167	5.4	94.6	0.0	0.6	99.4	0.0
25	Sulawesi Tengah	163	12.9	87.1	0.0	1.2	98.8	0.0
26	Sulawesi Selatan	406	29.1	70.7	0.2	1.5	98.3	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	3.9	96.1	0.0	0.9	99.1	0.0
28	Gorontalo	74	9.5	90.5	0.0	0.0	100.0	0.0
29	Sulawesi Barat	81	6.2	93.8	0.0	0.0	100.0	0.0
30	Maluku	161	7.5	91.9	0.6	0.0	99.4	0.6
31	Maluku Utara	101	10.9	89.1	0.0	0.0	100.0	0.0
32	Papua Barat	104	5.8	94.2	0.0	0.0	100.0	0.0
33	Papua	294	5.8	93.5	0.7	1.4	98.0	0.7
	Lokasi							
1.	Perkotaan	2321	60.2	39.7	0.1	4.3	95.4	0.3
2.	Perdesaan	6660	29.9	69.9	0.1	3.9	95.7	0.4
	INDONESIA	**8,981**	**37.7**	**62.1**	**0.1**	**4.0**	**95.6**	**0.4**

Tabel 4.5.2.1.b
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Sarana Komunikasi, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Radio Komunikasi			Telepon/HP/Radio Komunikasi		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	2.6	97.4	0.0	14.1	85.2	0.6
2	Sumatera Utara	506	1.8	98.2	0.0	12.8	87.2	0.0
3	Sumatera Barat	248	12.9	86.7	0.4	51.2	48.8	0.0
4	Riau	195	0.0	99.5	0.5	23.6	76.4	0.0
5	Jambi	171	0.0	100.0	0.0	5.8	94.2	0.0
6	Sumatera Selatan	298	2.3	97.3	0.3	16.4	83.2	0.3
7	Bengkulu	173	5.2	94.8	0.0	17.9	82.1	0.0
8	Lampung	265	3.4	96.6	0.0	24.9	75.1	0.0
9	Bangka Belitung	57	1.8	98.2	0.0	31.6	68.4	0.0
10	Kepulauan Riau	65	0.0	98.5	1.5	41.5	58.5	0.0
11	DKI Jakarta	336	9.2	90.5	0.3	76.8	22.9	0.3
12	Jawa Barat	1,031	2.4	97.3	0.3	61.5	38.4	0.1
13	Jawa Tengah	861	10.3	89.5	0.1	78.4	21.5	0.1
14	DI Yogyakarta	121	18.2	81.0	0.8	87.6	12.4	0.0
15	Jawa Timur	949	22.1	76.3	1.6	85.2	14.5	0.2
16	Banten	206	1.0	99.0	0.0	48.5	51.5	0.0
17	Bali	114	17.5	80.7	1.8	78.1	21.1	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	0.7	98.7	0.7	27.5	71.8	0.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	4.6	95.4	0.0	7.9	92.1	0.0
20	Kalimantan Barat	233	5.6	94.4	0.0	24.9	75.1	0.0
21	Kalimantan Tengah	176	1.1	98.9	0.0	27.3	72.7	0.0
22	Kalimantan Selatan	217	22.1	77.9	0.0	38.7	61.3	0.0
23	Kalimantan Timur	213	4.7	94.8	0.5	46.5	53.1	0.5
24	Sulawesi Utara	167	7.8	92.2	0.0	13.2	86.8	0.0
25	Sulawesi Tengah	163	6.1	93.9	0.0	19.0	81.0	0.0
26	Sulawesi Selatan	406	8.4	91.4	0.2	33.3	66.5	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	1.7	98.3	0.0	6.4	93.6	0.0
28	Gorontalo	74	10.8	89.2	0.0	17.6	82.4	0.0
29	Sulawesi Barat	81	14.8	85.2	0.0	21.0	79.0	0.0
30	Maluku	161	8.1	91.3	0.6	14.9	84.5	0.6
31	Maluku Utara	101	9.9	90.1	0.0	20.8	79.2	0.0
32	Papua Barat	104	9.6	90.4	0.0	15.4	84.6	0.0
33	Papua	294	19.0	80.3	0.7	24.8	74.5	0.7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	8,4	91,3	0,3	63,7	36,2	0,1
2	Perdesaan	6660	8,1	91,5	0,4	36,0	63,8	0,2
	INDONESIA	**8981**	**8,2**	**91,5**	**0,4**	**43,1**	**56,7**	**0,2**

Tabel 4.5.2.1.c
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Sarana Komunikasi, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Koneksi Internet		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	8.0	89.7	2.3
2	Sumatera Utara	506	6.3	90.7	3.0
3	Sumatera Barat	248	25.0	75.0	0.0
4	Riau	195	7.7	86.7	5.6
5	Jambi	171	9.9	83.6	6.4
6	Sumatera Selatan	298	5.0	90.6	4.4
7	Bengkulu	173	1.7	92.5	5.8
8	Lampung	265	6.8	90.6	2.6
9	Bangka Belitung	57	14.0	82.5	3.5
10	Kepulauan Riau	65	36.9	63.1	0.0
11	DKI Jakarta	336	57.7	37.8	4.5
12	Jawa Barat	1,031	15.8	82.1	2.1
13	Jawa Tengah	861	34.8	62.3	2.9
14	DI Yogyakarta	121	53.7	45.5	0.8
15	Jawa Timur	949	30.3	65.6	4.0
16	Banten	206	32.0	64.6	3.4
17	Bali	114	21.9	73.7	4.4
18	Nusa Tenggara Barat	149	16.8	76.5	6.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	5.0	91.7	3.3
20	Kalimantan Barat	233	7.7	90.1	2.1
21	Kalimantan Tengah	176	17.6	76.7	5.7
22	Kalimantan Selatan	217	10.6	88.0	1.4
23	Kalimantan Timur	213	23.5	72.3	4.2
24	Sulawesi Utara	167	6.0	91.6	2.4
25	Sulawesi Tengah	163	2.5	92.0	5.5
26	Sulawesi Selatan	406	6.9	88.9	4.2
27	Sulawesi Tenggara	233	0.9	94.8	4.3
28	Gorontalo	74	12.2	81.1	6.8
29	Sulawesi Barat	81	1.2	93.8	4.9
30	Maluku	161	0.0	94.4	5.6
31	Maluku Utara	101	1.0	94.1	5.0
32	Papua Barat	104	1.0	96.2	2.9
33	Papua	294	1.0	94.2	4.8
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	28,9	68,5	2,5
2	Perdesaan	6660	13,1	83,1	3,9
	INDONESIA	**8981**	**17,2**	**79,3**	**3,5**

4.5.3 ALAT TRANSPORTASI

Puskesmas sebagai penanggung jawab kesehatan masyarakat yang tinggal di wilayah kerjanya, berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan keluar gedung bagi masyarakat yang tidak bisa menjangkau pelayanan dalam gedung. Untuk itu diberikan fasilitas kendaraan bermotor roda dua, Puskesmas keliling roda 4 dan perahu bermotor/pukesmas keliling air. Puskesmas keliling dalam keadaan emergensi juga difungsikan sebagai sarana transportasi rujukan pasien bila tidak tersedia ambulans.

Tabel 4.5.3.1a
Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Sarana Transportasi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kendaraan Bermotor Roda Dua			Ketersediaan Pusling Roda 4			Ketersediaan Perahu Bermotor		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	Aceh	311	90.0	10.0	0.0	30,9	68,2	1,0	0.3	99.0	0.6
2	Sumatera Utara	506	71.3	28.7	0.0	40,7	59,3	-	0.4	99.4	0.2
3	Sumatera Barat	248	84.3	15.7	0.0	53,6	46,4	-	2.4	97.6	0.0
4	Riau	195	48.7	51.3	0.0	32,8	66,2	1,0	2.1	97.4	0.5
5	Jambi	171	80.1	19.9	0.0	51,5	48,0	0,6	1.2	98.2	0.6
6	Sumatera Selatan	298	72.5	27.2	0.3	31,9	67,4	0,7	1.3	97.7	1.0
7	Bengkulu	173	69.9	29.5	0.6	58,4	41,6	-	0.0	100.0	0.0
8	Lampung	265	86.0	14.0	0.0	67,5	32,5	-	0.0	99.2	0.8
9	Bangka Belitung	57	93.0	7.0	0.0	47,4	50,9	1,8	3.5	96.5	0.0
10	Kepulauan Riau	65	61.5	38.5	0.0	23,1	76,9	-	21.5	76.9	1.5
11	DKI Jakarta	336	9.5	90.5	0.0	4,2	95,5	0,3	0.9	98.8	0.3
12	Jawa Barat	1031	64.7	35.2	0.1	45,2	54,6	0,2	0.2	99.5	0.3
13	Jawa Tengah	861	79.4	20.6	0.0	70,2	29,7	0,1	0.2	99.0	0.8
14	DI Yogyakarta	121	93.4	6.6	0.0	71,1	28,1	0,8	0.0	98.3	1.7
15	Jawa Timur	949	83.6	16.3	0.1	60,0	39,0	1,1	0.0	97.6	2.4
16	Banten	206	70.4	29.6	0.0	29,1	70,9	-	0.5	99.0	0.5
17	Bali	114	89.5	10.5	0.0	78,9	21,1	-	0.0	99.1	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	89.9	9.4	0.7	64,4	35,6	-	2.0	96.6	1.3
19	Nusa Tenggara Timur	302	72.8	27.2	0.0	45,7	53,6	0,7	0.7	98.3	1.0
20	Kalimantan Barat	233	82.4	17.6	0.0	28,3	71,7	-	17.6	82.4	0.0
21	Kalimantan Tengah	176	83.0	17.0	0.0	50,0	48,9	1,1	14.8	83.5	1.7
22	Kalimantan Selatan	217	88.9	11.1	0.0	62,2	37,8	-	4.6	94.0	1.4
23	Kalimantan Timur	213	73.2	26.8	0.0	31,5	67,6	0,9	11.7	87.8	0.5
24	Sulawesi Utara	167	64.1	35.9	0.0	50,3	49,7	-	9.0	91.0	0.0
25	Sulawesi Tengah	163	89.0	11.0	0.0	57,7	42,3	-	4.3	95.7	0.0
26	Sulawesi Selatan	406	87.2	12.8	0.0	53,0	47,0	-	2.0	97.3	0.7
27	Sulawesi Tenggara	233	79.0	21.0	0.0	27,9	72,1	-	0.9	98.3	0.9
28	Gorontalo	74	90.5	9.5	0.0	45,9	54,1	-	4.1	95.9	0.0
29	Sulawesi Barat	81	85.2	14.8	0.0	24,7	72,8	2,5	0.0	98.8	1.2
30	Maluku	161	34.2	65.8	0.0	20,5	79,5	-	14.9	85.1	0.0
31	Maluku Utara	101	49.5	50.5	0.0	9,9	88,1	2,0	25.7	74.3	0.0
32	Papua Barat	104	27.9	72.1	0.0	22,1	77,9	-	15.4	84.6	0.0
33	Papua	294	27.6	71.8	0.7	18,4	81,0	0,7	13.9	85.4	0.7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	65.8	34,2	0,0	40,1	59,6	0,3	1.4	98.1	0,5
2	Perdesaan	6660	74,0	25,9	0,1	47,8	51,7	0,5	3,9	95.2	0,9
	INDONESIA	**8981**	**71,9**	**28,0**	**0,1**	**45,8**	**53,8**	**0,4**	**3,3**	**96,0**	**0,8**

Tabel 4.5.3.1b
Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Sarana Transportasi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	3 Roda Dua + 1 Pusling/Perahu Motor			Ketersediaan Pusling/ Ambulans			Ketersediaan Pusling/ Ambulans/ Perahu Bermotor		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	Aceh	311	29.3	70.7	0.0	83,9	16,1	-	84,2	15,8	-
2	Sumatera Utara	506	32.6	67.4	0.0	59,3	40,5	0,2	59,5	40,3	0,2
3	Sumatera Barat	248	48.8	51.2	0.0	79,4	20,6	-	81,5	18,5	-
4	Riau	195	22.1	77.9	0.0	61,0	38,5	0,5	61,0	38,5	0,5
5	Jambi	171	43.3	56.7	0.0	69,0	31,0	-	70,2	29,8	-
6	Sumatera Selatan	298	26.8	73.2	0.0	64,8	34,9	0,3	65,1	34,6	0,3
7	Bengkulu	173	45.1	54.9	0.0	69,4	30,6	-	69,4	30,6	-
8	Lampung	265	58.5	41.5	0.0	77,0	22,6	0,4	77,0	22,6	0,4
9	Bangka Belitung	57	47.4	52.6	0.0	96,5	3,5	-	96,5	3,5	-
10	Kepulauan Riau	65	24.6	75.4	0.0	67,7	32,3	-	76,9	23,1	-
11	DKI Jakarta	336	2.7	97.3	0.0	11,3	88,4	0,3	11,6	88,1	0,3
12	Jawa Barat	1031	33.3	66.6	0.1	66,1	33,9	0,1	66,1	33,9	0,1
13	Jawa Tengah	861	56.9	43.1	0.0	90,2	9,8	-	90,2	9,8	-
14	DI Yogyakarta	121	68.6	31.4	0.0	93,4	6,6	-	93,4	6,6	-
15	Jawa Timur	949	51.2	48.8	0.0	87,4	11,5	1,2	87,4	11,3	1,4
16	Banten	206	24.3	75.7	0.0	64,1	35,4	0,5	64,1	35,4	0,5
17	Bali	114	71.9	28.1	0.0	93,9	6,1	-	93,9	6,1	-
18	Nusa Tenggara Barat	149	61.7	38.3	0.0	73,8	24,2	2,0	73,8	24,2	2,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	35.4	64.6	0.0	58,6	40,4	1,0	58,9	40,4	0,7
20	Kalimantan Barat	233	35.6	64.4	0.0	50,2	49,8	-	61,4	38,6	-
21	Kalimantan Tengah	176	51.1	48.9	0.0	66,5	33,0	0,6	70,5	29,0	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	59.9	40.1	0.0	82,0	18,0	-	84,3	15,7	-
23	Kalimantan Timur	213	35.7	64.3	0.0	66,2	33,3	0,5	72,3	27,2	0,5
24	Sulawesi Utara	167	34.7	65.3	0.0	61,1	38,9	-	65,9	34,1	-
25	Sulawesi Tengah	163	55.8	44.2	0.0	67,5	32,5	-	70,6	29,4	-
26	Sulawesi Selatan	406	49.3	50.7	0.0	76,6	23,4	-	77,8	22,2	-
27	Sulawesi Tenggara	233	24.9	75.1	0.0	51,9	47,2	0,9	52,4	46,8	0,9
28	Gorontalo	74	47.3	52.7	0.0	71,6	28,4	-	73,0	27,0	-
29	Sulawesi Barat	81	22.2	77.8	0.0	48,1	49,4	2,5	48,1	49,4	2,5
30	Maluku	161	11.8	88.2	0.0	37,3	62,7	-	50,9	49,1	-
31	Maluku Utara	101	18.8	81.2	0.0	31,7	66,3	2,0	50,5	47,5	2,0
32	Papua Barat	104	17.3	82.7	0.0	30,8	69,2	-	41,3	58,7	-
33	Papua	294	16.7	82.7	0.7	27,2	72,1	0,7	38,4	60,9	0,7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	33.6	33.6	0	63.7	35.9	0.3	64.1	35.5	0.3
2	Perdesaan	6660	41.4	58.6	0.0	68.9	30.7	0.4	71.4	28.2	0.4
	INDONESIA	**8981**	**39,4**	**60,6**	**0,0**	**67,6**	**32,1**	**0,4**	**69,5**	**30,1**	**0,4**

Tabel 4.5.3.1c

Persentase Puskesmas Perawatan menurut Ketersediaan Ambulans, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Perawatan	Ketersediaan Ambulans		
			% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi				
1	Aceh	126	72,2	27,8	0
2	Sumatera Utara	140	26,7	69,2	4,1
3	Sumatera Barat	87	37,5	61,4	1,1
4	Riau	58	44,8	55,2	0
5	Jambi	66	33,3	66,7	0
6	Sumatera Selatan	97	41,2	58,8	0
7	Bengkulu	40	17,5	82,5	0
8	Lampung	60	25,0	75,0	0
9	Bangka Belitung	20	90,0	10,0	0
10	Kepulauan Riau	24	58,3	41,7	0
11	DKI Jakarta	46	52,2	47,8	0
12	Jawa Barat	178	53,9	45,5	0,6
13	Jawa Tengah	294	45,8	52,9	1,4
14	DI Yogyakarta	43	65,1	34,9	0
15	Jawa Timur	475	43,8	53,9	2,3
16	Banten	50	48,1	42,6	9,3
17	Bali	30	46,7	53,3	0
18	Nusa Tenggara Barat	83	15,5	79,8	4,8
19	Nusa Tenggara Timur	134	14,2	83,6	2,2
20	Kalimantan Barat	92	33,7	66,3	0
21	Kalimantan Tengah	55	21,8	76,4	1,8
22	Kalimantan Selatan	47	25,5	72,3	2,1
23	Kalimantan Timur	91	45,1	54,9	0
24	Sulawesi Utara	78	11,3	86,3	2,5
25	Sulawesi Tengah	75	13,3	86,7	0
26	Sulawesi Selatan	217	35,9	61,8	2,3
27	Sulawesi Tenggara	64	32,8	65,6	1,6
28	Gorontalo	21	33,3	66,7	0
29	Sulawesi Barat	37	32,4	67,6	0
30	Maluku	58	25,9	74,1	0
31	Maluku Utara	29	41,4	58,6	0
32	Papua Barat	43	13,6	84,1	2,3
33	Papua	94	20,8	76,0	3,1
	Lokasi				
1	Perkotaan	480	44.7	53.1	2.3
2	Perdesaan	2.572	36.2	62.3	1.5
	INDONESIA	**3.052**	**37.6**	**60.8**	**1.6**

Tabel 4.5.3.1a dan 4.5.3.1b menunjukkan persentase puskesmas dengan ketersediaan sarana transportasi. Dari 8981 puskesmas menunjukkan hanya 71,9 persen Puskesmas di Indonesia memiliki kendaraan bermotor roda dua, dengan kisaran 9,5 persen 93,4 persen. Persentase terendah ada di provinsi DKI Jakarta (9,5%), Papua (27,6%), Papua Barat (27,9%), Maluku (34,2%), dan yang tertingi ada di provinsi DI Yogyakarta (93,4%), Bangka Belitung (93,0%) dan Gorontalo (90,5%). Dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas yang memiliki kendaraan bermotor roda dua di perkotaan lebih rendah dari perdesaan, yaitu 65,8 persen di perkotaan, dan 74,0 persen di perdesaan.

Secara nasional, 45,8 persen puskesmas sudah memiliki kendaraan Puskesmas Keliling (Pusling) roda 4. Tiga provinsi dengan persentase puskesmas yang memiliki kendaraan pusling roda 4 tertinggi adalah provinsi Bali (78,9%), DI Yogyakarta (71,1%) dan Jawa Tengah (70,2%), Sementara 3 Provinsi Persentase terendah adalah DKI Jakarta (4,2%), Maluku Utara (9,9%) dan Papua (18,4%). Menurut lokasi persentase Puskesmas yang memiliki kendaraan Pusling roda empat 40,1 persen di perkotaan dan 47,8 persen di perdesaan. Sedangkan yang memiliki perahu bermotor, secara nasional ada sebanyak 3,3 persen. Persentase tertinggi adalah provinsi Maluku Utara (25,7%), Kepulauan Riau (21,5%) dan Kalimantan Barat (17,6%). Hal ini sesuai dengan kondisi geografisnya yang mempunyai banyak pulau.

Tabel 4.5.3.1b menunjukkan persentase puskesmas yang memiliki sarana transportasi tiga (3) kendaraan bermotor roda 2 (yang masing-masing diasumsikan digunakan oleh Sanitarian, Perawat dan Bidan untuk pelayanan luar gedung) dan pusling roda 4 atau perahu bermotor, secara nasional hanya 39,4 persen. Dilihat menurut lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas yang memiliki tiga (3) kendaraan bermotor roda 2 dan Pusling roda 4 atau perahu bermotor sebesar 33,6 persen di perkotaan dan 41,4 persen di perdesaan. Tabel 4.5.3.1b menunjukkan juga sarana transportasi berupa persentase Puskesmas yang memiliki ambulans atau pusling roda empat dan yang memiliki ambulans atau pusling roda empat atau perahu bermotor. Ambulans merupakan sarana transportasi pasien untuk kasus yang tidak bisa ditangani Puskesmas dan memerlukan rujukan ke sarana pelayanan yang lebih mampu seperti ke rumah sakit. Puskesmas Keliling walaupun tidak didesain seperti ambulans, namun bila tidak ada ambulans digunakan juga sebagai kendaraan ambulans, yaitu membawa pasien yang memerlukan rujukan segera. Secara nasional persentase Puskesmas yang memiliki ambulans atau pusling roda empat secara nasional sebesar 67,6 persen. Sementara yang memiliki ambulans atau pusling roda empat atau perahu bermotor secara nasional sebanyak 69,5 persen.

Tabel 4.5.3.1c menunjukkan persentase Puskesmas Perawatan yang memiliki ambulans. Secara nasional hanya 37,6 persen Puskesmas Perawatan di seluruh Indonesia yang memiliki ambulans. Persentase terendah ada di Sulawesi Utara (11,3%), Sulawesi Tengah (13,3%), Papua Barat (13,6%), Nusa Tenggara Timur (14,2%) dan Nusa Tenggara Barat (15,5%). Dilihat menurut lokasi persentase Puskesmas Perkotaan yang memiliki ambulans sebanyak 44,7 persen dan di Perdesaan 36,2 persen.

4.6. MANAJEMEN PUSKESMAS

4.6.1. Perencanaan Tahunan

Pada Rifaskes 2011 ditanyakan apakah Puskesmas mempunyai dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2010, bila ada dilihat apakah dokumennya berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).

Tabel 4.6.1.1
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan
Rencana Kerja Tahunan tahun 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Rencana Kerja Tahunan		
			% ada	% tidak	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	83,6	16,4	-
2	Sumatera Utara	506	74,7	25,1	0,2
3	Sumatera Barat	248	96,4	3,6	-
4	Riau	195	96,9	3,1	-
5	Jambi	171	84,8	15,2	-
6	Sumatera Selatan	298	91,9	8,1	-
7	Bengkulu	173	83,2	16,2	0,6
8	Lampung	265	93,2	6,8	-
9	Bangka Belitung	57	91,2	8,8	-
10	Kepulauan Riau	65	90,8	9,2	-
11	DKI Jakarta	336	86,9	13,1	-
12	Jawa Barat	1031	96,4	3,5	0,1
13	Jawa Tengah	861	96,4	3,6	-
14	DI Yogyakarta	121	99,2	0,8	-
15	Jawa Timur	949	93,4	6,6	-
16	Banten	206	98,5	1,5	-
17	Bali	114	90,4	9,6	-
18	Nusa Tenggara Barat	149	96,6	3,4	-
19	Nusa Tenggara Timur	302	91,4	8,6	-
20	Kalimantan Barat	233	94,4	5,6	-
21	Kalimantan Tengah	176	88,1	11,9	-
22	Kalimantan Selatan	217	79,7	20,3	-
23	Kalimantan Timur	213	95,3	4,2	0,5
24	Sulawesi Utara	167	82,0	18,0	-
25	Sulawesi Tengah	163	84,7	15,3	-
26	Sulawesi Selatan	406	93,6	6,4	-
27	Sulawesi Tenggara	233	88,4	11,6	-
28	Gorontalo	74	97,3	2,7	-
29	Sulawesi Barat	81	87,7	12,3	-
30	Maluku	161	80,7	18,6	0,6
31	Maluku Utara	101	73,3	26,7	-
32	Papua Barat	104	64,4	35,6	-
33	Papua	294	53,7	46,3	-
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	92,1	7,8	0,1
2	Perdesaan	6660	88,3	11,6	0,0
	Indonesia	**8981**	**89,3**	**10,7**	**0,1**

Tabel 4.6.1.2
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan
Dokumen Perencanaan Tahunan tahun 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Dokumen RUK (n=8019)			Dokumen RPK (n=8019)		
			% ada	% tidak	% TAD	% ada	% tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	260	88,8	11,2	-	90,8	9,2	-
2	Sumatera Utara	378	87,8	11,9	0,3	81,5	18,3	0,3
3	Sumatera Barat	239	94,6	5,4	-	95,0	5,0	-
4	Riau	189	97,4	2,6	-	97,4	2,6	-
5	Jambi	145	92,4	7,6	-	91,0	9,0	-
6	Sumatera Selatan	274	93,4	6,2	0,4	91,2	8,8	-
7	Bengkulu	144	93,1	6,9	-	79,9	20,1	-
8	Lampung	247	92,3	7,7	-	93,1	6,9	-
9	Bangka Belitung	52	98,1	1,9	-	96,2	3,8	-
10	Kepulauan Riau	59	94,9	5,1	-	96,6	3,4	-
11	DKI Jakarta	292	87,0	13,0	-	88,7	11,3	-
12	Jawa Barat	994	95,6	4,4	-	94,9	5,1	-
13	Jawa Tengah	830	92,4	7,6	-	94,8	5,2	-
14	DI Yogyakarta	120	97,5	2,5	-	96,7	3,3	-
15	Jawa Timur	886	93,0	6,8	0,2	94,0	5,8	0,2
16	Banten	203	97,0	3,0	-	96,1	3,9	-
17	Bali	103	95,1	4,9	-	94,2	5,8	-
18	Nusa Tenggara Barat	144	97,9	2,1	-	97,2	2,8	-
19	Nusa Tenggara Timur	276	96,0	4,0	-	94,6	5,1	0,4
20	Kalimantan Barat	220	93,2	6,8	-	91,8	8,2	-
21	Kalimantan Tengah	155	91,0	9,0	-	91,0	9,0	-
22	Kalimantan Selatan	173	85,0	15,0	-	87,3	12,7	-
23	Kalimantan Timur	203	94,1	5,9	-	92,1	7,9	-
24	Sulawesi Utara	137	81,0	19,0	-	84,7	15,3	-
25	Sulawesi Tengah	138	92,8	7,2	-	92,0	8,0	-
26	Sulawesi Selatan	380	91,6	8,4	-	92,4	7,6	-
27	Sulawesi Tenggara	206	93,7	6,3	-	93,2	6,8	-
28	Gorontalo	72	93,1	6,9	-	93,1	6,9	-
29	Sulawesi Barat	71	70,4	28,2	1,4	78,9	19,7	1,4
30	Maluku	130	74,6	25,4	-	80,0	20,0	-
31	Maluku Utara	74	74,3	25,7	-	83,8	16,2	-
32	Papua Barat	67	89,6	10,4	-	86,6	13,4	-
33	Papua	158	84,8	15,2	-	84,2	15,8	-
	Lokasi							
1	Perkotaan	2137	92,7	7,3	-	91,9	8,1	0,0
2	Perdesaan	5882	91,7	8,3	0,1	91,9	8,1	0,1
	Indonesia	**8019**	**91,9**	**8,0**	**0,1**	**91,9**	**8,1**	**0,1**

Dari 8981 Puskesmas yang dianalisis Persentase puskesmas yang mempunyai Rencana Kerja Tahunan secara nasional sebanyak 89,3% (8019 puskesmas). Terbesar di provinsi DIY (99,2%), diikuti provinsi Banten (98,5%) dan Gorontalo (97,3%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Papua (53,7%), diikuti provinsi Papua Barat (64,4%) dan Maluku Utara (73,3%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas perkotaan dengan keberadaan rencana tahunan sebanyak 92,1%, sedangkan puskesmas perdesaan 88,3%.

Dari 8019 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, secara nasional terdapat 91,9% yang memiliki dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK). Terbesar di provinsi Bangka Belitung (98,1%), diikuti provinsi Nusa Tenggara Barat (97,9%) dan DIY (97,5%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat (70,4%), diikuti provinsi Maluku Utara (74,3%) dan

Maluku (74,6%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas perkotaan dengan keberadaan RUK sebanyak 92,7%, sedangkan puskesmas perdesaan 91,7%.

Bila Dilihat dari keberadaan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), dari 8019 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, secara nasional terdapat 91,9% yang memiliki dokumen RPK. Terbesar di provinsi Riau (97,4%), diikuti provinsi Nusa Tenggara Barat (97,2%) dan DIY (96,7%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat (78,9%), diikuti provinsi Bengkulu (79,9%) dan Maluku (80,0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perkotaan dan perdesaan dengan keberadaan RPK adalah sama, yaitu sebanyak 91,9%.

Tabel 4.6.1.3
Persentase Puskesmas menurut Sumber Data Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Data Hasil Analisis Puskesmas			Data dari Dinas Kesehatan		
			% ada	% tidak	% TAD	% ada	% tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	260	93,5	5,8	0,8	61,2	34,2	4,6
2	Sumatera Utara	378	91,8	7,9	0,3	74,3	23,0	2,6
3	Sumatera Barat	239	95,0	5,0	-	82,8	16,7	0,4
4	Riau	189	93,1	4,8	2,1	70,4	25,4	4,2
5	Jambi	145	80,7	17,9	1,4	79,3	17,9	2,8
6	Sumatera Selatan	274	93,4	5,5	1,1	73,7	25,5	0,7
7	Bengkulu	144	83,3	16,7	-	74,3	24,3	1,4
8	Lampung	247	93,1	6,9	-	68,8	30,0	1,2
9	Bangka Belitung	52	94,2	5,8	-	73,1	26,9	-
10	Kepulauan Riau	59	76,3	22,0	1,7	76,3	23,7	-
11	DKI Jakarta	292	90,4	7,2	2,4	63,4	33,2	3,4
12	Jawa Barat	994	95,2	4,7	0,1	70,2	28,9	0,9
13	Jawa Tengah	830	94,1	5,3	0,6	70,2	28,6	1,2
14	DI Yogyakarta	120	94,2	5,8	-	79,2	20,8	-
15	Jawa Timur	886	94,8	4,6	0,6	66,7	32,4	0,9
16	Banten	203	92,6	6,4	1,0	75,4	24,6	-
17	Bali	103	97,1	1,9	1,0	49,5	45,6	4,9
18	Nusa Tenggara Barat	144	95,8	2,1	2,1	70,8	26,4	2,8
19	Nusa Tenggara Timur	276	94,2	5,1	0,7	47,8	50,0	2,2
20	Kalimantan Barat	220	90,9	9,1	-	71,8	28,2	-
21	Kalimantan Tengah	155	91,0	7,1	1,9	56,8	38,1	5,2
22	Kalimantan Selatan	173	78,6	21,4	-	72,3	27,7	-
23	Kalimantan Timur	203	88,7	10,8	0,5	62,6	36,5	1,0
24	Sulawesi Utara	137	89,8	10,2	-	62,8	37,2	-
25	Sulawesi Tengah	138	92,0	8,0	-	52,9	46,4	0,7
26	Sulawesi Selatan	380	94,7	4,5	0,8	61,8	36,8	1,3
27	Sulawesi Tenggara	206	94,7	5,3	-	64,1	35,9	-
28	Gorontalo	72	91,7	8,3	-	62,5	31,9	5,6
29	Sulawesi Barat	71	93,0	7,0	-	62,0	38,0	-
30	Maluku	130	87,7	12,3	-	42,3	56,9	0,8
31	Maluku Utara	74	94,6	5,4	-	32,4	66,2	1,4
32	Papua Barat	67	80,6	16,4	3,0	56,7	38,8	4,5
33	Papua	158	74,1	23,4	2,5	57,6	39,2	3,2
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	92,9	6,6	0,5	67,6	30,7	1,7
2	Perdesaan	6660	91,9	7,4	0,7	66,5	32,0	1,5
	Indonesia	**8019**	**92,1**	**7,2**	**0,6**	**66,8**	**31,6**	**1,5**

Tabel 4.6.1.3. menunjukkan persentase puskesmas menurut sumber data yang digunakan dalam menyusun rencana kerja tahunan. Dari 8019 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, secara nasional 92,1% menggunakan data dari hasil analisis puskesmas. Terbesar di provinsi Bali (97,1%), diikuti provinsi Nusa Tenggara Barat (95,8%) dan Jabar (95,2%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Papua (74,1%), diikuti provinsi Kepulauan Riau (76,3%) dan Kalimantan Selatan (78,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perkotaan yang menggunakan data dari hasil analisis puskesmas sebanyak 92,9%, sedangkan puskesmas perdesaan 91,9%.

Tabel 4.6.1.4
Persentase Puskesmas menurut Keterlibatan Penanggung Jawab Program dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Keterlibatan PJ Program		
			% ada	% tidak	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	260	91,5	8,1	0,4
2	Sumatera Utara	378	97,4	2,6	-
3	Sumatera Barat	239	97,9	2,1	-
4	Riau	189	97,9	2,1	-
5	Jambi	145	91,7	8,3	-
6	Sumatera Selatan	274	94,5	5,5	-
7	Bengkulu	144	84,0	16,0	-
8	Lampung	247	95,1	4,9	-
9	Bangka Belitung	52	96,2	3,8	-
10	Kepulauan Riau	59	96,6	3,4	-
11	DKI Jakarta	292	94,9	4,8	0,3
12	Jawa Barat	994	98,4	1,5	0,1
13	Jawa Tengah	830	97,1	2,8	0,1
14	DI Yogyakarta	120	98,3	1,7	-
15	Jawa Timur	886	97,9	2,0	0,1
16	Banten	203	99,5	0,5	-
17	Bali	103	98,1	1,9	-
18	Nusa Tenggara Barat	144	95,8	4,2	-
19	Nusa Tenggara Timur	276	97,5	2,5	-
20	Kalimantan Barat	220	95,5	4,5	-
21	Kalimantan Tengah	155	95,5	4,5	-
22	Kalimantan Selatan	173	90,8	9,2	-
23	Kalimantan Timur	203	93,6	6,4	-
24	Sulawesi Utara	137	98,5	1,5	-
25	Sulawesi Tengah	138	92,8	7,2	-
26	Sulawesi Selatan	380	97,4	2,6	-
27	Sulawesi Tenggara	206	95,6	4,4	-
28	Gorontalo	72	94,4	5,6	-
29	Sulawesi Barat	71	94,4	5,6	-
30	Maluku	130	86,2	13,8	-
31	Maluku Utara	74	97,3	2,7	-
32	Papua Barat	67	85,1	14,9	-
33	Papua	158	76,6	23,4	-
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	96,2	3,7	0,1
2	Perdesaan	6660	95,4	4,5	0,1
	Indonesia	**8019**	**95,6**	**4,3**	**0,1**

Sedangkan Persentase Puskesmas yang menggunakan data yang berasal dari Dinas Kesehatan secara nasional 66,8%. Terbesar di provinsi Sumatra Barat (82,8%), diikuti provinsi Jambi (79,3%) dan DIY (79,2%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Maluku Utara (32,4%), diikuti provinsi Maluku (42,3%) dan Nusa Tenggara Timur (47,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perkotaan yang menggunakan data dari dinas kesehatan sebanyak 67,6%, sedangkan puskesmas perdesaan 66,5%.

Tabel 4.6.1.5
Persentase Puskesmas menurut Pembahasan Rencana Kerja Tahunan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Musrenbang Kecamatan			Rapat Perencanaan Dinkes		
			% ada	% tidak	% TAD	% ada	% tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	260	40,4	59,2	0,4	70,4	28,8	0,8
2	Sumatera Utara	378	74,1	25,7	0,3	85,7	14,3	-
3	Sumatera Barat	239	68,2	31,8	-	89,5	10,5	-
4	Riau	189	77,2	22,8	-	81,5	18,0	0,5
5	Jambi	145	70,3	29,7	-	89,0	11,0	-
6	Sumatera Selatan	274	70,4	29,6	-	84,7	15,3	-
7	Bengkulu	144	41,0	59,0	-	68,1	31,9	-
8	Lampung	247	57,1	42,9	-	77,3	22,7	-
9	Bangka Belitung	52	65,4	34,6	-	92,3	7,7	-
10	Kepulauan Riau	59	62,7	37,3	-	89,8	10,2	-
11	DKI Jakarta	292	82,9	16,4	0,7	74,7	24,7	0,7
12	Jawa Barat	994	86,3	13,7	-	88,6	11,3	0,1
13	Jawa Tengah	830	71,2	28,7	0,1	81,4	18,4	0,1
14	DI Yogyakarta	120	88,3	11,7	-	89,2	10,8	-
15	Jawa Timur	886	71,8	28,1	0,1	82,4	17,4	0,2
16	Banten	203	82,8	17,2	-	89,7	10,3	-
17	Bali	103	64,1	35,9	-	77,7	22,3	-
18	Nusa Tenggara Barat	144	66,0	34,0	-	89,6	10,4	-
19	Nusa Tenggara Timur	276	73,2	26,8	-	84,8	15,2	-
20	Kalimantan Barat	220	72,7	27,3	-	75,5	24,5	-
21	Kalimantan Tengah	155	54,8	44,5	0,6	76,1	23,2	0,6
22	Kalimantan Selatan	173	65,9	34,1	-	73,4	26,6	-
23	Kalimantan Timur	203	49,8	50,2	-	83,3	16,7	-
24	Sulawesi Utara	137	77,4	22,6	-	69,3	30,7	-
25	Sulawesi Tengah	138	56,5	43,5	-	71,7	28,3	-
26	Sulawesi Selatan	380	74,5	25,5	-	86,1	13,9	-
27	Sulawesi Tenggara	206	65,0	34,5	0,5	73,3	26,2	0,5
28	Gorontalo	72	55,6	44,4	-	73,6	26,4	-
29	Sulawesi Barat	71	59,2	40,8	-	67,6	32,4	-
30	Maluku	130	51,5	47,7	0,8	50,8	48,5	0,8
31	Maluku Utara	74	56,8	43,2	-	58,1	41,9	-
32	Papua Barat	67	29,9	70,1	-	70,1	29,9	-
33	Papua	158	34,2	64,6	1,3	70,9	27,8	1,3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	66,6	33,2	0,2	82,9	16,9	0,2
2	Perdesaan	6660	70,2	29,7	0,1	80,1	19,7	0,2
	Indonesia	**8019**	**69,2**	**30,7**	**0,1**	**80,9**	**19,0**	**0,2**

Dari 8019 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, secara nasional terdapat 95,6% yang mengikutsertakan penanggung jawab program dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Terbesar di provinsi Banten (99,5%), diikuti provinsi Sulawesi Utara (98,5%) dan Jabar (98,4%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Papua (76,6%), diikuti provinsi Bengkulu (84,0%) dan Papua Barat (85,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perkotaan an yang mengikutsertakan penanggung jawab program dalam menyusun rencana kerja tahunan sebanyak 96,2%, sedangkan puskesmas perdesaan 95,4%.

Tabel 4.6.1.5. menggambarkan persentase puskesmas menurut pembahasan rencana kerja Tahunan, Dari 8019 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, secara nasional terdapat 69,2% yang membahas rencana kerja tahunan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Terbesar di provinsi DIY (88,3%), diikuti provinsi Jawa Barat (86,3%) dan DKI Jakarta (82,9%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Papua Barat (29,9%), diikuti provinsi Papua (34,2%) dan Aceh(40,4%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas perkotaan yang membahas rencana kerja tahunan dalam Musrenbang Kecamatan sebanyak 66,6%, sedangkan puskesmas perdesaan 70,2%.

Sementara Persentase Puskesmas yang membahas rencana kerja tahunan dalam Rapat Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara nasional ada sebanyak 80,9%. Terbesar di provinsi Babel (92,3%), diikuti provinsi Kepulauan Riau (89,8%) dan Banten (89,7%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Maluku (50,8%), diikuti provinsi Maluku Utara (58,1%) dan Sulawesi Barat (67,6%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas perkotaan yang membahas rencana kerja tahunan dalam rapat perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebanyak 82,9%, sedangkan puskesmas perdesaan 80,1%.

4.6.2. Lokakarya Mini

Tabel 4.6.2.1. menggambarkan persentase puskesmas menurut pelksanaan lokakarya mini bulanan. Secara nasional ada 82,9% puskesmas yang melaksanakan lokakarya mini bulanan dan ada dokumennya. Terbesar di provinsi Jawa Tengah(94,1%), diikuti provinsi Nusa Tenggara Barat (94,0%) dan Bangka Belitung (93,0%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Papua (30,6%), diikuti provinsi Papua Barat (36,5%) dan Maluku (37,3%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas perkotaan yang melaksanakan lokakarya mini bulanan dan ada dokumennya sebanyak 86,5%, sedangkan puskesmas perdesaan 81,7%.

Sedangkan yang mengatakan melaksanakan lokakarya mini bulanan ,tapi tidak dapat memperlihatkan dokumennya secara nasional ada 9,4 persen, 7,2 persen di perkotaan dan 10,1 persen di perdesaan

Tabel 4.6.2.1
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Melaksanakan Lokakarya Mini Bulanan			
			%Ya, ada dokumen	%Ya, tidak ada dokumen	% tidak	% TAD
	Provinsi					
1	DI Aceh	311	65,0	23,2	11,9	-
2	Sumatera Utara	506	87,5	10,9	1,4	0,2
3	Sumatera Barat	248	87,5	9,7	2,8	-
4	Riau	195	77,9	15,4	6,7	-
5	Jambi	171	92,4	5,8	1,8	-
6	Sumatera Selatan	298	91,6	5,7	2,7	-
7	Bengkulu	173	87,3	8,7	3,5	0,6
8	Lampung	265	87,2	8,7	4,2	-
9	Bangka Belitung	57	93,0	3,5	3,5	-
10	Kepulauan Riau	65	67,7	12,3	20,0	-
11	DKI Jakarta	336	88,4	7,7	3,6	0,3
12	Jawa Barat	1031	91,9	4,2	3,7	0,3
13	Jawa Tengah	861	94,1	3,8	2,1	-
14	DI Yogyakarta	121	86,8	4,1	9,1	-
15	Jawa Timur	949	92,6	4,6	2,7	-
16	Banten	206	92,2	4,9	2,9	-
17	Bali	114	86,0	7,9	6,1	-
18	Nusa Tenggara Barat	149	94,0	5,4	0,7	-
19	Nusa Tenggara Timur	302	86,8	9,6	3,6	-
20	Kalimantan Barat	233	63,1	17,6	19,3	-
21	Kalimantan Tengah	176	49,4	21,0	29,5	-
22	Kalimantan Selatan	217	92,6	5,5	1,8	-
23	Kalimantan Timur	213	80,3	7,0	12,2	0,5
24	Sulawesi Utara	167	67,7	22,2	10,2	-
25	Sulawesi Tengah	163	87,7	9,8	2,5	-
26	Sulawesi Selatan	406	87,4	10,6	2,0	-
27	Sulawesi Tenggara	233	86,7	10,7	2,6	-
28	Gorontalo	74	78,4	13,5	8,1	-
29	Sulawesi Barat	81	85,2	6,2	8,6	-
30	Maluku	161	37,3	14,3	48,4	-
31	Maluku Utara	101	61,4	19,8	18,8	-
32	Papua Barat	104	36,5	30,8	32,7	-
33	Papua	294	30,6	21,1	48,3	-
	Lokasi					
1	Perkotaan	2321	86,5	7,2	6,1	0,2
2	Perdesaan	6660	81,7	10,1	8,2	0,0
	Indonesia	**8981**	**82,9**	**9,4**	**7,6**	**0,1**

Tabel 4.6.2.2
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Lokakarya Mini Triwulan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Melaksanakan Lokakarya Mini Triwulan			
			%Ya, ada dokumen	%Ya, tidak ada dokumen	% tidak	% TAD
	Provinsi					
1	DI Aceh	311	41,2	18,0	40,8	-
2	Sumatera Utara	506	21,5	9,5	68,8	0,2
3	Sumatera Barat	248	44,0	10,1	46,0	-
4	Riau	195	52,8	7,7	38,5	1,0
5	Jambi	171	17,5	9,4	70,8	2,3
6	Sumatera Selatan	298	20,8	9,7	69,1	0,3
7	Bengkulu	173	15,6	4,0	78,0	2,3
8	Lampung	265	41,5	15,1	43,4	-
9	Bangka Belitung	57	22,8	8,8	68,4	-
10	Kepulauan Riau	65	40,0	9,2	50,8	-
11	DKI Jakarta	336	19,3	8,9	71,4	0,3
12	Jawa Barat	1031	65,6	9,1	25,1	0,2
13	Jawa Tengah	861	31,9	7,1	60,9	0,1
14	DI Yogyakarta	121	66,1	5,0	28,1	0,8
15	Jawa Timur	949	38,5	7,3	53,4	0,8
16	Banten	206	55,8	14,1	29,6	0,5
17	Bali	114	28,1	22,8	49,1	-
18	Nusa Tenggara Barat	149	45,6	6,0	48,3	-
19	Nusa Tenggara Timur	302	57,3	8,9	33,4	0,3
20	Kalimantan Barat	233	55,8	14,2	29,6	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	34,7	15,9	48,9	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	36,4	4,6	59,0	-
23	Kalimantan Timur	213	48,4	10,3	40,4	0,9
24	Sulawesi Utara	167	28,7	23,4	47,9	-
25	Sulawesi Tengah	163	19,0	8,6	72,4	-
26	Sulawesi Selatan	406	44,6	14,5	40,9	-
27	Sulawesi Tenggara	233	22,3	10,7	67,0	-
28	Gorontalo	74	67,6	18,9	13,5	-
29	Sulawesi Barat	81	45,7	3,7	50,6	-
30	Maluku	161	22,4	19,9	57,1	0,6
31	Maluku Utara	101	32,7	16,8	50,5	-
32	Papua Barat	104	11,5	12,5	76,0	-
33	Papua	294	14,3	13,3	72,4	-
	Lokasi					
1	Perkotaan	2321	39,3	8,9	51,6	0,2
2	Perdesaan	6660	38,3	11,1	50,2	0,4
	Indonesia	**8981**	**38,5**	**10,5**	**50,6**	**0,4**

Tabel 4.6.2.2. menggambarkan persentase puskesmas menurut Pelaksanaan Lokakarya Mini Triwulan. Secara nasional terdapat 38,5% puskesmas yang melaksanakan lokakarya mini triwulan dan ada dokumennya. Terbesar di provinsi Gorontalo(67,6%), diikuti provinsi DIY(66,1%) dan Jawa Barat (65,6%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Papua Barat (11,5%), diikuti provinsi Papua (14,3%) dan Bengkulu (15,6%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas perkotaan yang melaksanakan lokakarya mini triwulan dan ada dokumennya sebanyak 39,3%, sedangkan puskesmas perdesaan 38,3%. Sementara yang menyatakan melaksanakan Lokakaryamini Triwulanan tapi tidak dapat menunjukkan dokumennya sebesar 10,5 persen

4.6.3. Penilaian Kinerja Puskesmas

Tabel 4.6.3.1. menggambarkan persentase puskesmas yang melaksanakan Penilaian Kinerja dan melakukan pembahasan penilaian kinerja tersebut dengan staf puskesmas. Secara nasional dari 8981 puskesmas yang dianalisis hanya 6762 (75,3%) puskesmas yang melaksanakan Penilaian Kinerjanya. Terbesar di provinsi DKI Jakarta(95,2%), diikuti provinsi Jawa Barat(93,6%) dan DIY (93,4%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Papua (32,0%), diikuti provinsi Papua Barat (32,7%) dan Maluku Utara (38,6%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas perkotaan yang melaksanakan penilaian kinerja sebanyak 81,7%, sedangkan puskesmas perdesaan 73,1%.

Tabel 4.6.3.1
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Penilaian Kinerja, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelaksanaan Penilaian Kinerja		
			%Ada	%Tidak	%TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	64,6	35,4	-
2	Sumatera Utara	506	69,2	30,6	0,2
3	Sumatera Barat	248	89,5	10,5	-
4	Riau	195	80,0	19,5	0,5
5	Jambi	171	74,9	25,1	-
6	Sumatera Selatan	298	70,8	28,9	0,3
7	Bengkulu	173	52,6	47,4	-
8	Lampung	265	77,0	22,6	0,4
9	Bangka Belitung	57	91,2	8,8	-
10	Kepulauan Riau	65	64,6	35,4	-
11	DKI Jakarta	336	95,2	4,8	-
12	Jawa Barat	1031	93,6	6,3	0,1
13	Jawa Tengah	861	85,6	14,4	-
14	DI Yogyakarta	121	93,4	6,6	-
15	Jawa Timur	949	90,3	9,5	0,2
16	Banten	206	80,1	19,9	-
17	Bali	114	66,7	33,3	-
18	Nusa Tenggara Barat	149	71,8	28,2	-
19	Nusa Tenggara Timur	302	57,6	42,4	-
20	Kalimantan Barat	233	66,5	33,5	-
21	Kalimantan Tengah	176	52,8	46,6	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	71,0	29,0	-
23	Kalimantan Timur	213	66,2	33,8	-
24	Sulawesi Utara	167	67,7	32,3	-
25	Sulawesi Tengah	163	42,9	57,1	-
26	Sulawesi Selatan	406	91,9	8,1	-
27	Sulawesi Tenggara	233	58,8	41,2	-
28	Gorontalo	74	73,0	27,0	-
29	Sulawesi Barat	81	72,8	27,2	-
30	Maluku	161	46,6	52,8	0,6
31	Maluku Utara	101	38,6	61,4	-
32	Papua Barat	104	32,7	67,3	-
33	Papua	294	32,0	68,0	-
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	81,7	18,3	0,0
2	Perdesaan	6660	73,1	26,8	0,1
	Indonesia	**8981**	**75,3**	**24,6**	**0,1**

Dari 6762 puskesmas yang melaksanakan penilaian kinerja, secara nasional sebanyak 5914 (87,5%) melaksanakan pembahasan penilaian kinerja tersebut dengan staf puskesmas. Terbesar di Sulawesi Selatan(94,4%), diikuti provinsi DKI (94,1%) dan DIY (93,8%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Kalimantan Tengah(74,2%), diikuti provinsi Bali (76,3%) dan Kalimantan Selatan (76,6%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas perkotaan yang melaksanakan pembahasan penilaian kinerja dengan staf puskesmas sebanyak 89,7%, sedangkan puskesmas perdesaan 86,6%. Dari 6762 puskesmas yang melaksanakan penilaian kinerja, secara nasional terdapat 5510 (81,5%)yang mengirim penilaian kinerja tersebut ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Terbesar di DIY (94,7%), diikuti provinsi Jawa Barat (91,1%) dan Sulawesi Selatan (90,3%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Maluku Utara(53,8%), diikuti provinsi Sulawesi Tengah (58,6%) dan Bengkulu (61,5%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas perkotaan dan perdesaan yang mengirim penilaian kinerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sama yaitu sebanyak 81,5%.

Tabel 4.6.3.2
Persentase Puskesmas menurut Pembahasan Penilaian Kinerja dengan Staf, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml	Pembahasan dgn Staf			Mengirimkan ke Dinkes		
		Pusk	%Ada	%Tidak	%TAD	%Ada	%Tidak	%TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	201	83,1	15,4	1,5	70,1	28,9	1,0
2	Sumatera Utara	350	79,1	20,6	0,3	72,6	27,1	0,3
3	Sumatera Barat	222	86,5	13,5	-	90,1	9,9	-
4	Riau	156	91,7	8,3	-	86,5	13,5	-
5	Jambi	128	88,3	11,7	-	74,2	25,8	-
6	Sumatera Selatan	211	89,6	10,4	-	82,5	17,5	-
7	Bengkulu	91	87,9	11,0	1,1	61,5	37,4	1,1
8	Lampung	204	88,2	11,8	-	80,4	19,6	-
9	Bangka Belitung	52	80,8	19,2	-	69,2	30,8	-
10	Kepulauan Riau	42	88,1	11,9	-	78,6	21,4	-
11	DKI Jakarta	320	94,1	5,9	-	77,2	22,5	0,3
12	Jawa Barat	965	93,8	6,1	0,1	91,1	8,9	-
13	Jawa Tengah	737	82,1	17,6	0,3	83,9	16,0	0,1
14	DI Yogyakarta	113	93,8	6,2	-	94,7	5,3	-
15	Jawa Timur	857	91,1	8,8	0,1	90,0	9,8	0,2
16	Banten	165	88,5	10,9	0,6	81,8	17,6	0,6
17	Bali	76	76,3	23,7	-	78,9	21,1	-
18	Nusa Tenggara Barat	107	85,0	15,0	-	74,8	25,2	-
19	Nusa Tenggara Timur	174	86,2	12,6	1,1	73,6	26,4	-
20	Kalimantan Barat	155	82,6	17,4	-	76,1	23,9	-
21	Kalimantan Tengah	93	74,2	25,8	-	81,7	18,3	-
22	Kalimantan Selatan	154	76,6	23,4	-	73,4	26,6	-
23	Kalimantan Timur	141	77,3	22,7	-	68,1	31,9	-
24	Sulawesi Utara	113	88,5	11,5	-	69,0	31,0	-
25	Sulawesi Tengah	70	84,3	15,7	-	58,6	41,4	-
26	Sulawesi Selatan	373	94,4	5,6	-	90,3	9,7	-
27	Sulawesi Tenggara	137	86,1	13,9	-	65,0	34,3	0,7
28	Gorontalo	54	87,0	13,0	-	83,3	16,7	-
29	Sulawesi Barat	59	83,1	16,9	-	76,3	23,7	-
30	Maluku	75	78,7	21,3	-	68,0	32,0	-
31	Maluku Utara	39	92,3	7,7	-	53,8	46,2	-
32	Papua Barat	34	82,4	17,6	-	73,5	26,5	-
33	Papua	94	84,0	14,9	1,1	66,0	34,0	-
	Lokasi							
1	Perkotaan	1896	89,7	10,3	0,1	81,5	18,4	0,1
2	Perdesaan	4866	86,6	13,2	0,2	81,5	18,4	0,2
	Indonesia	**6762**	**87,5**	**12,3**	**0,2**	**87,5**	**81,5**	**18,4**

Dari 5510 puskesmas yang mengirim penilaian kinerja tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, secara nasional 69,2% menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan. Terbesar di provinsi Jawa Timur (78,5%), diikuti provinsi Jawa Barat (77,7%) dan Papua (77,4%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Bali(41,7%), diikuti provinsi Lampung (51,2%) dan Aceh (52,5%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas perkotaan yang menerima umpan balik dari dinas kesehatan kabupaten/kota sebanyak 68,7% dan perdesaan sebanyak 69,4%.

Tabel 4.6.3.3
Persentase Puskesmas menurut Umpan Balik Penilaian Kinerja, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Memperoleh Umpan Balik dari Dinkes (n=5510)		
			%Ada	%Tidak	%TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	141	52,5	47,5	-
2	Sumatera Utara	254	71,3	28,7	-
3	Sumatera Barat	200	54,5	45,5	-
4	Riau	135	74,8	23,7	1,5
5	Jambi	95	55,8	44,2	-
6	Sumatera Selatan	174	74,1	25,9	-
7	Bengkulu	56	75,0	25,0	-
8	Lampung	164	51,2	48,8	-
9	Bangka Belitung	36	58,3	41,7	-
10	Kepulauan Riau	33	72,7	27,3	-
11	DKI Jakarta	247	71,7	27,9	0,4
12	Jawa Barat	879	77,7	22,2	0,1
13	Jawa Tengah	618	67,0	32,8	0,2
14	DI Yogyakarta	107	73,8	26,2	-
15	Jawa Timur	771	78,5	21,5	-
16	Banten	135	72,6	27,4	-
17	Bali	60	41,7	56,7	1,7
18	Nusa Tenggara Barat	80	61,3	38,8	-
19	Nusa Tenggara Timur	128	56,3	43,0	0,8
20	Kalimantan Barat	118	66,9	32,2	0,8
21	Kalimantan Tengah	76	56,6	43,4	-
22	Kalimantan Selatan	113	69,9	30,1	-
23	Kalimantan Timur	96	57,3	42,7	-
24	Sulawesi Utara	78	75,6	23,1	1,3
25	Sulawesi Tengah	41	61,0	39,0	-
26	Sulawesi Selatan	337	64,1	35,9	-
27	Sulawesi Tenggara	89	69,7	30,3	-
28	Gorontalo	45	68,9	31,1	-
29	Sulawesi Barat	45	66,7	33,3	-
30	Maluku	51	64,7	35,3	-
31	Maluku Utara	21	76,2	23,8	-
32	Papua Barat	25	72,0	28,0	-
33	Papua	62	77,4	22,6	-
	Lokasi				
1	Perkotaan	1546	68,7	31,0	0,3
2	Perdesaan	3964	69,4	30,5	0,1
	Indonesia	**5510**	**69,2**	**30,6**	**0,2**

4.6.4. Pedoman Kerja Puskesmas

Tabel 4.6.4.1a. menunjukkan persentase Puskesmas yang memiliki buku pedoman Manajemen Puskesmas yaitu: Pedoman Perencanaan, Lokakarya Mini, dan Penilaian Kinerja Puskesmas, secara nasional berturut-turut adalah 69,3%, 69,3% dan 66,5%.

Tabel 4.6.4.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Buku Pedoman Manajemen Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Perencanaan Tingkat puskesmas			Pedoman Lokakarya Mini			Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas		
			% Ada	%Tidak ada	% TAD	% Ada	%Tidak ada	% TAD	% Ada	%Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	53,1	46,9	0,0	62,1	37,0	1,0	43,4	55,9	0,6
2	Sumatera Utara	506	53,2	46,8	0,0	63,6	36,2	0,2	50,4	49,2	0,4
3	Sumatera Barat	248	76,2	23,8	0,0	61,7	38,3	0,0	69,4	30,6	0,0
4	Riau	195	81,5	17,9	0,5	82,1	17,4	0,5	76,9	22,6	0,5
5	Jambi	171	63,7	36,3	0,0	69,6	29,2	1,2	63,7	35,7	0,6
6	Sumatera Selatan	298	82,9	17,1	0,0	82,9	16,8	0,3	74,5	25,2	0,3
7	Bengkulu	173	49,7	50,3	0,0	52,0	47,4	0,6	31,8	67,6	0,6
8	Lampung	265	81,9	18,1	0,0	72,5	27,5	0,0	72,8	27,2	0,0
9	Bangka Belitung	57	78,9	21,1	0,0	86,0	14,0	0,0	77,2	22,8	0,0
10	Kepulauan Riau	65	66,2	33,8	0,0	67,7	32,3	0,0	66,2	33,8	0,0
11	DKI Jakarta	336	65,5	34,2	0,3	66,7	32,7	0,6	70,8	28,6	0,6
12	Jawa Barat	1031	85,1	14,7	0,2	80,4	19,5	0,1	89,8	10,1	0,1
13	Jawa Tengah	861	78,6	21,4	0,0	78,4	21,6	0,0	75,0	25,0	0,0
14	DI Yogyakarta	121	97,5	2,5	0,0	93,4	6,6	0,0	95,9	4,1	0,0
15	Jawa Timur	949	72,0	28,0	0,0	68,4	31,5	0,1	80,9	19,1	0,0
16	Banten	206	76,2	23,8	0,0	77,7	22,3	0,0	76,2	23,8	0,0
17	Bali	114	71,9	28,1	0,0	66,7	32,5	0,9	60,5	38,6	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	81,9	17,4	0,7	83,9	15,4	0,7	77,9	21,5	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	66,9	33,1	0,0	68,2	31,8	0,0	55,3	44,7	0,0
20	Kalimantan Barat	233	73,0	27,0	0,0	76,4	23,2	0,4	63,5	36,1	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	60,2	39,8	0,0	60,8	38,6	0,6	50,6	48,3	1,1
22	Kalimantan Selatan	217	67,7	32,3	0,0	75,1	24,9	0,0	70,5	29,5	0,0
23	Kalimantan Timur	213	77,5	22,5	0,0	71,8	27,2	0,9	65,7	33,3	0,9
24	Sulawesi Utara	167	43,7	56,3	0,0	43,7	56,3	0,0	34,7	65,3	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	54,6	45,4	0,0	67,5	32,5	0,0	48,5	51,5	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	80,0	19,7	0,2	77,1	22,9	0,0	79,1	20,9	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	54,1	45,9	0,0	53,6	46,4	0,0	43,8	56,2	0,0
28	Gorontalo	74	66,2	33,8	0,0	66,2	33,8	0,0	47,3	52,7	0,0
29	Sulawesi Barat	81	70,4	29,6	0,0	75,3	24,7	0,0	59,3	40,7	0,0
30	Maluku	161	38,5	61,5	0,0	45,3	54,7	0,0	41,6	58,4	0,0
31	Maluku Utara	101	42,6	57,4	0,0	41,6	57,4	1,0	32,7	66,3	1,0
32	Papua Barat	104	45,2	54,8	0,0	49,0	51,0	0,0	35,6	64,4	0,0
33	Papua	294	34,0	66,0	0,0	34,7	65,3	0,0	26,2	73,8	0,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	74,3	25,7	0,0	72,0	27,7	0,3	71,6	28,1	0,3
2	Perdesaan	6660	67,6	32,3	0,1	68,4	31,4	0,2	64,7	35,2	0,2
	INDONESIA	**8981**	**69,3**	**30,6**	**0,1**	**69,3**	**30,5**	**0,2**	**66,5**	**33,3**	**0,2**

Tabel 4.6.4.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan 3 Buku Pedoman Manajemen Puskesmas, Kebijakan Dasar Puskesmas dan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Mutu,Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Lengkap 3 Buku Pedoman Manajemen			Kebijakan dasar puskesmas			Pedoman Pelaksanaan Jaminan Mutu		
			% Ada	%Tidak ada	% TAD	% Ada	%Tidak ada	% TAD	% Ada	%Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	34,4	65,6	0,0	49,2	50,8	0,0	21,9	77,5	0,6
2	Sumatera Utara	506	37,2	62,8	0,0	48,2	51,8	0,0	26,3	73,5	0,2
3	Sumatera Barat	248	52,0	48,0	0,0	67,3	32,7	0,0	35,9	64,1	0,0
4	Riau	195	68,2	31,8	0,0	64,6	34,4	1,0	39,5	60,0	0,5
5	Jambi	171	49,1	50,9	0,0	55,6	44,4	0,0	36,3	63,2	0,6
6	Sumatera Selatan	298	66,8	33,2	0,0	78,9	20,8	0,3	50,0	49,7	0,3
7	Bengkulu	173	28,9	71,1	0,0	39,3	60,7	0,0	18,5	80,9	0,6
8	Lampung	265	61,1	38,9	0,0	67,5	32,5	0,0	34,7	65,3	0,0
9	Bangka Belitung	57	66,7	33,3	0,0	66,7	33,3	0,0	0,0	0,0	100,0
10	Kepulauan Riau	65	52,3	47,7	0,0	60,0	40,0	0,0	18,5	81,5	0,0
11	DKI Jakarta	336	50,0	50,0	0,0	71,1	28,9	0,0	52,7	46,4	0,9
12	Jawa Barat	1031	72,6	27,4	0,0	77,8	21,9	0,3	55,5	44,0	0,5
13	Jawa Tengah	861	64,3	35,7	0,0	64,8	35,2	0,0	42,9	57,1	0,0
14	DI Yogyakarta	121	91,7	8,3	0,0	84,3	15,7	0,0	52,9	47,1	0,0
15	Jawa Timur	949	56,8	43,2	0,0	62,4	37,5	0,1	43,2	56,6	0,2
16	Banten	206	63,6	36,4	0,0	58,7	41,3	0,0	43,2	56,8	0,0
17	Bali	114	57,0	43,0	0,0	71,9	28,1	0,0	17,5	81,6	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	71,1	28,2	0,7	73,2	26,2	0,7	38,9	60,4	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	48,0	52,0	0,0	45,7	54,0	0,3	25,2	74,8	0,0
20	Kalimantan Barat	233	57,1	42,9	0,0	59,7	40,3	0,0	29,6	70,0	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	38,1	61,9	0,0	48,3	51,1	0,6	37,5	61,4	1,1
22	Kalimantan Selatan	217	53,5	46,5	0,0	63,6	36,4	0,0	25,3	74,2	0,5
23	Kalimantan Timur	213	54,5	45,5	0,0	68,1	31,9	0,0	32,9	66,2	0,9
24	Sulawesi Utara	167	30,5	69,5	0,0	40,7	59,3	0,0	16,8	83,2	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	36,2	63,8	0,0	40,5	59,5	0,0	16,0	84,0	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	66,0	34,0	0,0	59,9	40,1	0,0	36,9	62,8	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	34,8	65,2	0,0	41,2	58,8	0,0	18,5	81,5	0,0
28	Gorontalo	74	43,2	56,8	0,0	41,9	58,1	0,0	18,9	81,1	0,0
29	Sulawesi Barat	81	49,4	50,6	0,0	58,0	42,0	0,0	25,9	74,1	0,0
30	Maluku	161	23,6	76,4	0,0	25,5	74,5	0,0	8,7	91,3	0,0
31	Maluku Utara	101	20,8	79,2	0,0	30,7	69,3	0,0	9,9	89,1	1,0
32	Papua Barat	104	26,0	74,0	0,0	26,9	73,1	0,0	19,2	80,8	0,0
33	Papua	294	19,7	80,3	0,0	31,3	68,7	0,0	11,6	88,4	0,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	58,4	41,6	0,0	68,0	31,9	0,0	36,3	62,9	0,9
2	Perdesaan	6660	51,7	48,3	0,0	56,4	43,4	0,1	34,8	64,2	1,0
	INDONESIA	**8981**	**53,4**	**46,6**	**0,0**	**59,4**	**40,5**	**0,1**	**35,3**	**63,8**	**0,9**

Tabel 4.6.4.1b. menunjukkan Persentase Puskesmas yang memiliki lengkap ketiga buku Manajemen Puskesmas , Kebijakan Dasar Puskesmas (Kepmenkes No.128/2004) dan Pedoman pelaksanaan Jaminan Mutu, secara nasional berturut-turut adalah 53,4%, 59,4% dan 35,3%. Persentase kepemilikan di perkotaan lebih besar dari di Perdesaan.

4.7. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Di dalam melaksanakan fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, sesuai Kepmenkes No. 128/2004, seluruh Puskesmas di Indonesia diharapkan melaksanakan program Upaya Kesehatan Wajib. Sedangkan Upaya Kesehatan Pengembangan di setiap Puskesmas disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana masing-masing Puskesmas, juga dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Untuk kelancaran pelaksanaan setiap upaya atau program kegiatan ditentukan siapa penanggung jawabnya dan dibuatkan Surat Keputusannya oleh pejabat yang berwenang menetapkan.

4.7.1. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Wajib

Tabel 4.7.1.1
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan 6 Program Upaya Kesehatan Wajib, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelaksanaan UKW		
			% Ada 6 Program	% Ada < 6 Program	% Tidak Menjawab
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	92,3	7,7	0
2	Sumatera Utara	506	95,1	4,9	0
3	Sumatera Barat	248	99,2	0,8	0
4	Riau	195	94,9	5,1	0
5	Jambi	171	99,4	0,6	0
6	Sumatera Selatan	298	94,6	5,4	0
7	Bengkulu	173	94,8	5,2	0
8	Lampung	265	97,7	2,3	0
9	Bangka Belitung	57	100,0	0	0
10	Kepulauan Riau	65	95,4	4,6	0
11	DKI Jakarta	336	89,6	10,4	0
12	Jawa Barat	1031	97,4	2,5	0,1
13	Jawa Tengah	861	99,1	0,9	0
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0	0
15	JawaTimur	949	98,1	1,9	0
16	Banten	206	99,5	0,5	0
17	Bali	114	99,1	0,9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	100,0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	99,3	0,7	0
20	Kalimantan Barat	233	94,4	5,6	0
21	Kalimantan Tengah	176	89,8	10,2	0
22	Kalimantan Selatan	217	97,2	2,8	0
23	Kalimantan Timur	213	97,2	2,8	0
24	Sulawesi Utara	167	94,0	6,0	0
25	Sulawesi Tengah	163	98,2	1,8	0
26	Sulawesi Selatan	406	98,0	2,0	0
27	Sulawesi Tenggara	233	95,3	4,7	0
28	Gorontalo	74	94,6	5,4	0
29	Sulawesi Barat	81	88,9	11,1	0
30	Maluku	161	79,5	20,5	0
31	Maluku Utara	101	89,1	10,9	0
32	Papua Barat	104	61,5	38,5	0
33	Papua	294	36,1	63,9	0
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	95,6	4,4	0
2	Perdesaan	6660	93,3	6,7	0,0
	INDONESIA	**8981**	**93,9**	**6,1**	**0,0**

Menurut Kepmenkes No. 128/2004, ada 6 (enam) Upaya Kesehatan Wajib (UKW) yang harus/ wajib dilaksanakan oleh seluruh puskesmas di Indonesia, yaitu Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA/KB, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pengobatan.

Secara nasional persentase Puskesmas yang melaksanakan 6 program Upaya Kesehatan Wajib (UKW) adalah 93,9 persen dan yang kurang dari 6 adalah 6,1 persen. Terdapat tiga provinsi yang mencapai 100,0 persen dalam pelaksanaan 6 program UKW, yaitu: Provinsi Bangka Belitung, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Persentase puskesmas terendah yang melaksanakan 6 program UKW dapat ditemukan pada Provinsi Papua (36,1%), Papua Barat (61,5%), dan Maluku (79,5%).

Tabel 4.7.1.2.a.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Wajib, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Promosi Kesehatan			Kesehatan Lingkungan		
			% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab	% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	95,5	4,5	0	97,4	2,6	0
2	Sumatera Utara	506	97,4	2,6	0	97,4	2,6	0
3	Sumatera Barat	248	100	0	0	99,2	0,8	0
4	Riau	195	98,5	1,5	0	97,4	2,6	0
5	Jambi	171	100	0	0	99,4	0,6	0
6	Sumatera Selatan	298	97,7	2,3	0	98,3	1,7	0
7	Bengkulu	173	97,7	2,3	0	96	4	0
8	Lampung	265	100	0	0	98,5	1,5	0
9	Bangka Belitung	57	100	0	0	100	0	0
10	Kepulauan Riau	65	100	0	0	98,5	1,5	0
11	DKI Jakarta	336	99,7	0,3	0	92	8	0
12	Jawa Barat	1031	99,7	0,2	0,1	98,1	1,8	0,1
13	Jawa Tengah	861	99,9	0,1	0	99,4	0,5	0,1
14	DI Yogyakarta	121	100	0	0	100	0	0
15	JawaTimur	949	99,6	0,4	0	98,9	1,1	0
16	Banten	206	100	0	0	99,5	0,5	0
17	Bali	114	100	0	0	100	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	100	0	0	100	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	100	0	0	99,7	0,3	0
20	Kalimantan Barat	233	97,4	2,6	0	96,1	3,9	0
21	Kalimantan Tengah	176	94,9	5,1	0	95,5	4,5	0
22	Kalimantan Selatan	217	99,5	0,5	0	98,6	1,4	0
23	Kalimantan Timur	213	99,5	0,5	0	98,6	1,4	0
24	Sulawesi Utara	167	97	3	0	97	3	0
25	Sulawesi Tengah	163	99,4	0,6	0	98,8	1,2	0
26	Sulawesi Selatan	406	99,3	0,7	0	98,5	1,5	0
27	Sulawesi Tenggara	233	97,9	2,1	0	96,1	3,9	0
28	Gorontalo	74	97,3	2,7	0	95,9	4,1	0
29	Sulawesi Barat	81	96,3	3,7	0	95,1	4,9	0
30	Maluku	161	84,5	15,5	0	85,1	14,9	0
31	Maluku Utara	101	97	3	0	92,1	7,9	0
32	Papua Barat	104	78,8	21,2	0	72,1	27,9	0
33	Papua	294	61,9	38,1	0	46,6	53,4	0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	98,9	1,1	0	97	2,9	0
2	Perdesaan	6660	96,7	3,3	0	95,3	4,7	0
	INDONESIA	**8981**	**97,2**	**2,8**	**0**	**95,8**	**4,2**	**0**

Pada tabel 4.7.1.2.a. sampai dengan 4.7.1.2.c. dapat dilihat tentang keberadaan dari masing-masing program Upaya Kesehatan Wajib (UKW), yaitu Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA/KB, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, serta Pengobatan. Pada tabel tersebut, Program UKW dikategorikan ada dan tidak ada. Dikatakan ada apabila puskesmas melaksanakan program UKW yang dimaksud dan dikatakan tidak ada apabila puskesmas tidak melaksanakan program UKW yang dimaksud.

Pada tabel 4.7.1.2.a. dapat dilihat bahwa secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Promosi Kesehatan adalah sebesar 97,2 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Promosi Kesehatan sebesar 2,8 persen. Dari 33 provinsi di Indonesia, terdapat 10 provinsi yang mencapai 100,0 persen dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Persentase puskesmas terendah melaksanakan Program Promosi Kesehatan adalah Provinsi Papua (61,9%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (78,8%) dan Provinsi Maluku (84,5%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Promosi Kesehatan yaitu 98,9 persen pada Puskesmas perkotaan dan 96,7 persen pada Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, pada tabel 4.7.1.2.a. menunjukkan bahwa persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Kesehatan Lingkungan adalah sebesar 95,8 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Kesehatan Lingkungan sebesar 4,2 persen. Dari 33 provinsi di Indonesia, terdapat 4 provinsi yang mencapai 100,0 persen dalam pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan, yaitu Provinsi Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat. Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Kesehatan Lingkungan adalah Provinsi Papua (46,6%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (72,1%) dan Provinsi Maluku (85,1%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Kesehatan Lingkungan yaitu 97,0 persen pada Puskesmas perkotaan dan 95,3 persen pada Puskesmas perdesaan.

Pada tabel 4.7.1.2.b. dapat dilihat bahwa secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan Program KIA/KB adalah sebesar 99,2 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program KIA/KB hanya sebesar 0,8 persen. Dari 33 provinsi di Indonesia, hanya 10 provinsi yang tidak mencapai 100,0 persen dalam pelaksanaan Program KIA/KB, yaitu Provinsi DI Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program KIA/KB adalah Provinsi Papua (81,6%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (94,2%) dan Provinsi Maluku (96,9%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan melaksanakan Program KIA/KB hampir 100,0 persen yaitu 99,9 persen sedangkan pada Puskesmas perdesaan 98,9 persen.

Secara nasional, pada tabel 4.7.1.2.b. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 98,3 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat sebesar 1,6 persen. Dari 33 provinsi di Indonesia, terdapat 12 provinsi yang mencapai 100,0 persen dalam pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah Provinsi Papua (72,1%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (85,6%) dan Provinsi Maluku (93,8%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu 99,4 persen pada Puskesmas perkotaan dan 98,0 persen pada Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.7.1.2.b.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Wajib, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	KIA/KB			Perbaikan Gizi Masyarakat		
			% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab	% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	99,7	0,3	0	99,0	1,0	0
2	Sumatera Utara	506	99,4	0,6	0	98,8	1,2	0
3	Sumatera Barat	248	100	0	0	100,0	0	0
4	Riau	195	100	0	0	100,0	0	0
5	Jambi	171	100	0	0	100,0	0	0
6	Sumatera Selatan	298	100	0	0	99,7	0,3	0
7	Bengkulu	173	100	0	0	100,0	0	0
8	Lampung	265	100	0	0	99,6	0,4	0
9	Bangka Belitung	57	100	0	0	100,0	0	0
10	Kepulauan Riau	65	98,5	1,5	0	96,9	3,1	0
11	DKI Jakarta	336	100	0	0	97,3	2,7	0
12	Jawa Barat	1031	99,8	0	0,2	99,6	0,3	0,1
13	Jawa Tengah	861	100	0	0	99,9	0,1	0
14	DI Yogyakarta	121	100	0	0	100,0	0	0
15	JawaTimur	949	99,9	0	0,1	99,7	0,3	0
16	Banten	206	100	0	0	100,0	0	0
17	Bali	114	100	0	0	100,0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	100	0	0	100,0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	100	0	0	99,7	0,3	0
20	Kalimantan Barat	233	100	0	0	99,6	0,4	0
21	Kalimantan Tengah	176	100	0	0	99,4	0,6	0
22	Kalimantan Selatan	217	99,5	0,5	0	99,5	0,5	0
23	Kalimantan Timur	213	100	0	0	99,5	0,5	0
24	Sulawesi Utara	167	100	0	0	100,0	0	0
25	Sulawesi Tengah	163	100	0	0	100,0	0	0
26	Sulawesi Selatan	406	100	0	0	99,8	0,2	0
27	Sulawesi Tenggara	233	100	0	0	98,3	1,7	0
28	Gorontalo	74	100	0	0	98,6	1,4	0
29	Sulawesi Barat	81	100	0	0	100,0	0	0
30	Maluku	161	96,9	3,1	0	93,8	6,2	0
31	Maluku Utara	101	99	1	0	99,0	1,0	0
32	Papua Barat	104	94,2	5,8	0	85,6	14,4	0
33	Papua	294	81,6	18,4	0	72,1	27,9	0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	99,9	0	0	99,4	0,6	0
2	Perdesaan	6660	98,9	1,1	0	98,0	2,0	0
	INDONESIA	**8981**	**99,2**	**0,8**	**0**	**98,3**	**1,6**	**0**

Tabel 4.7.1.2.c.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Wajib, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			Pengobatan		
			% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab	% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	99,4	0,6	0	100,0	0	0
2	Sumatera Utara	506	99,6	0,4	0	100,0	0	0
3	Sumatera Barat	248	100,0	0	0	100,0	0	0
4	Riau	195	99,5	0,5	0	99,5	0,5	0
5	Jambi	171	100,0	0	0	100,0	0	0
6	Sumatera Selatan	298	98,7	1,3	0	99,7	0,3	0
7	Bengkulu	173	100,0	0	0	100,0	0	0
8	Lampung	265	99,6	0,4	0	100,0	0	0
9	Bangka Belitung	57	100,0	0	0	100,0	0	0
10	Kepulauan Riau	65	100,0	0	0	98,5	1,5	0
11	DKI Jakarta	336	98,8	1,2	0	99,7	0,3	0
12	Jawa Barat	1031	99,6	0,3	0,1	99,8	0,1	0,1
13	Jawa Tengah	861	99,9	0,1	0	99,9	0,1	0
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0	0	100,0	0	0
15	JawaTimur	949	99,8	0,2	0	99,9	0,1	0
16	Banten	206	100,0	0	0	100,0	0	0
17	Bali	114	99,1	0,9	0	100,0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	100,0	0	0	100,0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	100,0	0	0	100,0	0	0
20	Kalimantan Barat	233	99,6	0	0	100,0	0	0
21	Kalimantan Tengah	176	98,9	1,1	0	98,9	1,1	0
22	Kalimantan Selatan	217	99,1	0,9	0	100,0	0	0
23	Kalimantan Timur	213	99,5	0,5	0	100,0	0	0
24	Sulawesi Utara	167	99,4	0,6	0	99,4	0	0,6
25	Sulawesi Tengah	163	100,0	0	0	100,0	0	0
26	Sulawesi Selatan	406	100,0	0	0	100,0	0	0
27	Sulawesi Tenggara	233	99,6	0,4	0	100,0	0	0
28	Gorontalo	74	98,6	1,4	0	100,0	0	0
29	Sulawesi Barat	81	98,8	1,2	0	96,3	3,7	0
30	Maluku	161	96,3	3,7	0	98,8	1,2	0
31	Maluku Utara	101	100,0	0	0	100,0	0	0
32	Papua Barat	104	89,4	10,6	0	96,2	3,8	0
33	Papua	294	71,8	28,2	0	98,0	2,0	0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	99,5	0,5		99,5	0,5	0
2	Perdesaan	6660	98,2	1,8	0,0	98,2	1,8	0,0
	INDONESIA	**8981**	**98,5**	**1,5**	**0,0**	**99,7**	**0,3**	**0,0**

Secara nasional, pada tabel 4.7.1.2.c. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular adalah sebesar 98,5 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular sebesar 1,5 persen. Dari 33 provinsi di Indonesia, terdapat 12 provinsi yang mencapai 100,0 persen dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengedalian Penyakit menular, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Pencegahan dan Pengedalian Penyakit menular

adalah Provinsi Papua (71,8%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (89,4%) dan Provinsi Maluku (96,3%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Pencegahan dan Pengedalian Penyakit menular yaitu 99,5 persen pada Puskesmas perkotaan dan 98,2 persen pada Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, pada tabel 4.7.1.2.c. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Pengobatan adalah sebesar 99,7 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Pengobatan sebesar 0,3 persen. Dari 33 provinsi di Indonesia, terdapat 13 provinsi yang tidak mencapai 100,0 persen dalam pelaksanaan Program Pengobatan, yaitu Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Pengobatan adalah Provinsi Papua Barat (96,2%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (96,3%) dan Provinsi Papua (98,0%). Secara nasional, persentase puskesmas perkotaan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Pengobatan yaitu 99,5 persen pada Puskesmas perkotaan dan 98,2 persen pada Puskesmas perdesaan.

Selanjutnya pada tabel 4.7.1.3.a. sampai dengan 4.7.1.3.c. dapat kita lihat tentang kesesuaian latar belakang pendidikan penanggung jawab program Upaya Kesehatan Wajib. Secara nasional, pada tabel 4.7.1.3.a. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 25,4 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai adalah sebesar 71,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Maluku Utara (53,5%), Sulawesi Barat (48,1%), dan Sulawesi Selatan (44,8%). Persentase Puskesmas terendah mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Provinsi Papua (6,1%), diikuti oleh Provinsi Maluku (7,5%) dan Provinsi DKI Jakarta (9,5%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu 25,9 persen pada Puskesmas perkotaan dan 25,3 persen pada Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, pada tabel 4.7.1.3.a. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 74,5 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai adalah sebesar 20,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Bali (97,4%), Kalimantan Selatan (94,0%), dan DI Yogyakarta (93,4%). Persentase Puskesmas terendah mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Provinsi DKI Jakarta (17,6%), diikuti oleh Provinsi Papua (28,6%) dan Provinsi Papua Barat (44,2%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas

perdesaan dalam hal mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu 75,6 persen pada Puskesmas perkotaan dan 74,1 persen pada Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.7.1.3.a.
Persentase Puskesmas menurut Kesesuaian Pendidikan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Wajib, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	PJ Promkes			PJ Kesling		
			% Sesuai	% Tidak Sesuai	% Tidak Menjawab	% Sesuai	% Tidak Sesuai	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	37,3	57,6	5,1	82,6	14,5	2,9
2	Sumatera Utara	506	15,0	82,4	2,6	53,6	43,7	2,8
3	Sumatera Barat	248	31,0	69,0	0,0	87,1	11,7	1,2
4	Riau	195	21,5	76,9	1,5	63,1	34,4	2,6
5	Jambi	171	15,8	84,2	0,0	78,4	21,1	0,6
6	Sumatera Selatan	298	29,5	67,4	3,0	78,2	19,8	2,0
7	Bengkulu	173	26,6	70,5	2,9	60,1	35,8	4,0
8	Lampung	265	20,4	79,6	0,0	78,1	20,4	1,5
9	Bangka Belitung	57	29,8	70,2	0,0	73,7	26,3	0,0
10	Kepulauan Riau	65	23,1	73,8	3,1	76,9	21,5	1,5
11	DKI Jakarta	336	9,5	89,3	1,2	17,6	70,8	11,6
12	Jawa Barat	1031	19,6	80,1	0,3	75,7	21,8	2,5
13	Jawa Tengah	861	27,8	71,7	0,6	87,2	11,7	1,0
14	DI Yogyakarta	121	30,6	69,4	0,0	93,4	6,6	0,0
15	Jawa Timur	949	21,6	77,9	0,5	70,5	28,1	1,4
16	Banten	206	19,4	80,6	0,0	76,7	23,3	0,0
17	Bali	114	21,9	78,1	0,0	97,4	2,6	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	37,6	62,4	0,0	91,9	8,1	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	32,1	67,5	0,3	92,1	7,3	0,7
20	Kalimantan Barat	233	27,0	69,1	3,9	85,8	9,9	4,3
21	Kalimantan Tengah	176	24,4	69,3	6,3	80,7	13,6	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	37,3	62,2	0,5	94,0	3,7	2,3
23	Kalimantan Timur	213	29,1	70,4	0,5	81,2	17,4	1,4
24	Sulawesi Utara	167	28,7	67,1	4,2	87,4	9,6	3,0
25	Sulawesi Tengah	163	36,8	62,6	0,6	88,3	10,4	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	44,8	54,4	0,7	87,2	11,3	1,5
27	Sulawesi Tenggara	233	36,1	61,8	2,1	86,3	9,0	4,7
28	Gorontalo	74	39,2	58,1	2,7	91,9	4,1	4,1
29	Sulawesi Barat	81	48,1	48,1	3,7	70,4	24,7	4,9
30	Maluku	161	7,5	76,4	16,1	68,9	16,1	14,9
31	Maluku Utara	101	53,5	42,6	4,0	65,3	24,8	9,9
32	Papua Barat	104	18,3	58,7	23,1	44,2	27,9	27,9
33	Papua	294	6,1	53,1	40,8	28,6	16,7	54,8
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	25,9	72,7	1,5	75,6	20,9	3,6
2	Perdesaan	6660	25,3	71,0	3,7	74,1	20,8	5,1
	INDONESIA	**8981**	**25,4**	**71,4**	**3,2**	**74,5**	**20,8**	**4,7**

Tabel 4.7.1.3.b.
Persentase Puskesmas menurut Kesesuaian Pendidikan Penanggung Jawab
Upaya Kesehatan Wajib, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	PJ KIA/KB			PJ Perbaikan Gizi Masyarakat		
			% Sesuai	% Tidak Sesuai	% Tidak Menjawab	% Sesuai	% Tidak Sesuai	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	97,7	1,9	0,3	70,4	28,6	1,0
2	Sumatera Utara	506	95,7	3,6	0,8	64,0	34,8	1,2
3	Sumatera Barat	248	98,4	1,2	0,4	87,5	12,5	0,0
4	Riau	195	97,9	1,5	0,5	62,1	36,9	1,0
5	Jambi	171	98,8	1,2	0,0	50,3	49,7	0,0
6	Sumatera Selatan	298	97,3	2,7	0,0	69,5	29,9	0,7
7	Bengkulu	173	97,7	2,3	0,0	60,1	39,3	0,6
8	Lampung	265	98,9	1,1	0,0	57,0	42,6	0,4
9	Bangka Belitung	57	100,0	0,0	0,0	91,2	8,8	0,0
10	Kepulauan Riau	65	96,9	1,5	1,5	76,9	20,0	3,1
11	DKI Jakarta	336	97,6	2,1	0,3	21,4	73,2	5,4
12	Jawa Barat	1031	98,1	1,8	0,1	67,6	31,9	0,5
13	Jawa Tengah	861	99,5	0,5	0,0	85,2	14,5	0,2
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0,0	0,0	96,7	3,3	0,0
15	Jawa Timur	949	98,9	1,1	0,0	72,8	26,7	0,5
16	Banten	206	99,5	0,5	0,0	61,7	38,3	0,0
17	Bali	114	98,2	0,9	0,9	86,8	13,2	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	99,3	0,7	0,0	95,3	4,7	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	98,7	1,3	0,0	71,5	27,8	0,7
20	Kalimantan Barat	233	98,7	1,3	0,0	85,0	14,6	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	98,9	1,1	0,0	89,8	9,7	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	98,6	0,9	0,5	94,5	4,6	0,9
23	Kalimantan Timur	213	98,6	1,4	0,0	74,2	24,9	0,9
24	Sulawesi Utara	167	97,0	3,0	0,0	82,0	18,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	96,9	3,1	0,0	55,8	43,6	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	98,3	1,7	0,0	88,2	11,6	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	97,9	1,7	0,4	90,1	8,2	1,7
28	Gorontalo	74	98,6	1,4	0,0	97,3	1,4	1,4
29	Sulawesi Barat	81	95,1	4,9	0,0	71,6	28,4	0,0
30	Maluku	161	91,3	5,0	3,7	65,2	28,0	6,8
31	Maluku Utara	101	96,0	4,0	0,0	79,2	19,8	1,0
32	Papua Barat	104	88,5	4,8	6,7	52,9	32,7	14,4
33	Papua	294	71,1	8,8	20,1	37,4	32,0	30,6
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	98,2	1,6	0,1	79,3	19,6	1,1
2	Perdesaan	6660	96,7	2,0	1,2	68,8	28,9	2,3
	INDONESIA	**8981**	**97,1**	**1,9**	**0,9**	**71,5**	**26,5**	**2,0**

Secara nasional, pada tabel 4.7.1.3.b. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 97,1 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai adalah sebesar 1,9 persen. Terdapat 2 provinsi dengan persentase 100,0 persen dalam hal penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, yaitu Provinsi Bangka Belitung dan DI Yogyakarta. Persentase Puskesmas terendah mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Provinsi Papua (71,1%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (88,5%) dan Provinsi Maluku

(91,3%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu 98,2 persen pada Puskesmas perkotaan dan 96,7 persen pada Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, pada tabel 4.7.1.3.b. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 71,5 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai adalah sebesar 26,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mempunyai penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Gorontalo (97,3%), DI Yogyakarta (96,7%), dan Nusa Tenggara Barat (95,3%). Persentase Puskesmas terendah mempunyai penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Provinsi DKI Jakarta (21,4%), diikuti oleh Provinsi Papua (37,4%) dan Provinsi Jambi (50,3%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal mempunyai penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu 79,3 persen pada Puskesmas perkotaan dan 68,8 persen pada Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, pada tabel 4.7.1.3.c. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 79,7 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai adalah sebesar 18,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mempunyai penanggung jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Provinsi Kalimantan Selatan (92,2%), Kalimantan Tengah (90,3%), dan Jawa Timur (90,2%). Persentase Puskesmas terendah mempunyai penanggung jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Provinsi Papua (58,2%), diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara (58,3%) dan Provinsi DI Aceh (59,2%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal mempunyai penanggung jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu 81,6 persen pada Puskesmas perkotaan dan 79,7 persen pada Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, pada tabel 4.7.1.3.c. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 67,2 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai adalah sebesar 32,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Provinsi DI Yogyakarta (88,4%), Banten (86,9%), dan Bangka Belitung (84,2%). Persentase Puskesmas terendah mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Provinsi Jawa Timur (36,2%), Nusa Tenggara Timur (39,7%), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (40,9%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal mempunyai penanggung

jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu 74,3 persen pada Puskesmas perkotaan dan 64,7 persen pada Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.7.1.3.c.
Persentase Puskesmas menurut Kesesuaian Pendidikan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Wajib, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	PJ Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			PJ Pengobatan		
			% Sesuai	% Tidak Sesuai	% Tidak Menjawab	% Sesuai	% Tidak Sesuai	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	59,2	38,9	1,9	76,8	23,2	0,0
2	Sumatera Utara	506	58,3	40,5	1,2	77,3	22,5	0,2
3	Sumatera Barat	248	81,9	18,1	0,0	55,6	44,4	0,0
4	Riau	195	79,5	19,0	1,5	78,5	21,0	0,5
5	Jambi	171	83,0	17,0	0,0	80,7	19,3	0,0
6	Sumatera Selatan	298	73,2	25,5	1,3	65,1	34,6	0,3
7	Bengkulu	173	78,6	20,8	0,6	75,7	24,3	0,0
8	Lampung	265	72,5	27,2	0,4	68,7	31,3	0,0
9	Bangka Belitung	57	78,9	21,1	0,0	84,2	14,0	1,8
10	Kepulauan Riau	65	75,4	24,6	0,0	73,8	24,6	1,5
11	DKI Jakarta	336	84,8	12,5	2,7	86,6	12,8	0,6
12	Jawa Barat	1031	84,2	15,4	0,4	74,6	24,9	0,5
13	Jawa Tengah	861	83,4	16,4	0,2	70,7	29,2	0,1
14	DI Yogyakarta	121	78,5	21,5	0,0	88,4	11,6	0,0
15	Jawa Timur	949	90,2	9,5	0,3	36,2	63,8	0,0
16	Banten	206	85,0	15,0	0,0	86,9	13,1	0,0
17	Bali	114	71,9	27,2	0,9	49,1	50,9	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	84,6	15,4	0,0	40,9	58,4	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	87,7	12,3	0,0	39,7	60,3	0,0
20	Kalimantan Barat	233	79,0	20,6	0,4	69,1	30,5	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	90,3	7,4	2,3	80,7	17,6	1,7
22	Kalimantan Selatan	217	92,2	6,9	0,9	80,6	18,9	0,5
23	Kalimantan Timur	213	84,5	14,6	0,9	86,4	13,6	0,0
24	Sulawesi Utara	167	82,0	17,4	0,6	69,5	30,5	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	77,3	22,1	0,6	65,6	33,1	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	70,0	29,8	0,2	76,1	23,9	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	82,0	17,2	0,9	72,5	27,0	0,4
28	Gorontalo	74	73,0	24,3	2,7	71,6	28,4	0,0
29	Sulawesi Barat	81	81,5	17,3	1,2	70,4	25,9	3,7
30	Maluku	161	90,7	5,6	3,7	65,2	33,5	1,2
31	Maluku Utara	101	87,1	12,9	0,0	72,3	26,7	1,0
32	Papua Barat	104	76,9	9,6	13,5	51,0	42,3	6,7
33	Papua	294	58,2	10,2	31,6	44,9	48,0	7,1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	81,6	17,6	0,8	74,3	25,2	0,5
2	Perdesaan	6660	79,0	18,7	2,3	64,7	34,6	0,7
	INDONESIA	**8981**	**79,7**	**18,4**	**1,9**	**67,2**	**32,2**	**0,6**

4.7.2. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan

Sama halnya dengan Upaya Kesehatan Wajib, pada Upaya Kesehatan Pengembangan (UKP) juga dikategorikan menjadi pelaksanaan program yang ada dan tidak ada. Suatu program dikatakan ada apabila puskesmas melaksanakan Program UKP yang dimaksud. Sedangkan dikatakan tidak ada apabila puskesmas tidak melaksanakan program UKP yang dimaksud.

Tabel 4.7.2.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Program UKS			Program Kesehatan Olahraga		
			% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab	% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	95,8	4,2	0,0	2,6	97,4	0,0
2	Sumatera Utara	506	88,9	11,1	0,0	5,1	94,9	0,0
3	Sumatera Barat	248	97,6	2,4	0,0	42,3	57,7	0,0
4	Riau	195	96,9	3,1	0,0	16,4	83,6	0,0
5	Jambi	171	94,7	5,3	0,0	7,6	92,4	0,0
6	Sumatera Selatan	298	95,6	4,4	0,0	31,9	68,1	0,0
7	Bengkulu	173	87,3	12,7	0,0	9,8	90,2	0,0
8	Lampung	265	93,2	6,8	0,0	18,1	81,9	0,0
9	Bangka Belitung	57	98,2	1,8	0,0	29,8	70,2	0,0
10	Kepulauan Riau	65	95,4	4,6	0,0	9,2	90,8	0,0
11	DKI Jakarta	336	98,8	1,2	0,0	15,2	84,8	0,0
12	Jawa Barat	1031	98,6	1,3	0,1	36,4	63,5	0,1
13	Jawa Tengah	861	99,8	0,2	0,0	13,7	86,1	0,2
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0,0	0,0	36,4	63,6	0,0
15	Jawa Timur	949	99,7	0,3	0,0	39,1	60,9	0,0
16	Banten	206	98,5	1,5	0,0	18,9	81,1	0,0
17	Bali	114	100,0	0,0	0,0	81,6	18,4	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	99,3	0,7	0,0	20,8	79,2	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	93,4	6,6	0,0	2,6	97,0	0,3
20	Kalimantan Barat	233	88,0	12,0	0,0	13,7	86,3	0,0
21	Kalimantan Tengah	176	82,4	17,6	0,0	10,8	89,2	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	96,8	3,2	0,0	32,7	67,3	0,0
23	Kalimantan Timur	213	93,9	6,1	0,0	10,8	88,7	0,5
24	Sulawesi Utara	167	89,8	10,2	0,0	2,4	97,6	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	84,7	15,3	0,0	6,7	93,3	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	97,0	3,0	0,0	7,6	92,4	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	57,9	42,1	0,0	2,1	97,9	0,0
28	Gorontalo	74	95,9	4,1	0,0	1,4	98,6	0,0
29	Sulawesi Barat	81	75,3	24,7	0,0	3,7	96,3	0,0
30	Maluku	161	67,1	32,9	0,0	4,3	95,7	0,0
31	Maluku Utara	101	62,4	37,6	0,0	0,0	100,0	0,0
32	Papua Barat	104	54,8	45,2	0,0	0,0	100,0	0,0
33	Papua	294	35,0	65,0	0,0	1,4	98,6	0,0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	96,6	3,4	0,0	28,0	71,9	0,1
2	Perdesaan	6660	89,5	10,5	0,0	15,9	84,1	0,0
	INDONESIA	**8981**	**91,3**	**8,6**	**0,0**	**19,0**	**80,9**	**0,1**

Secara nasional, pada tabel 4.7.2.1.a. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah sebesar 91,3 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program UKS adalah sebesar 8,6 persen. Terdapat 2 provinsi yang mencapai 100,0 persen dalam hal melaksanakan Program UKS, yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Bali. Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program UKS adalah Provinsi Papua (35,5%), Papua Barat (54,8%), dan Provinsi Sulawesi Tenggara (57,9%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program UKS, yaitu 96,6 persen pada Puskesmas perkotaan dan 89,5 persen pada Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.7.2.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Program Perkesmas			Program Kesehatan Kerja		
			% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab	% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	18,0	82,0	0,0	5,8	94,2	0,0
2	Sumatera Utara	506	34,4	65,6	0,0	10,9	89,1	0,0
3	Sumatera Barat	248	83,5	16,5	0,0	42,7	57,3	0,0
4	Riau	195	62,6	37,4	0,0	32,8	67,2	0,0
5	Jambi	171	53,2	46,8	0,0	22,8	77,2	0,0
6	Sumatera Selatan	298	64,8	35,2	0,0	35,6	64,4	0,0
7	Bengkulu	173	56,1	43,9	0,0	20,2	79,8	0,0
8	Lampung	265	64,9	35,1	0,0	28,3	71,7	0,0
9	Bangka Belitung	57	87,7	12,3	0,0	77,2	22,8	0,0
10	Kepulauan Riau	65	38,5	61,5	0,0	55,4	44,6	0,0
11	DKI Jakarta	336	91,4	8,3	0,3	17,3	82,7	0,0
12	Jawa Barat	1031	80,9	19,0	0,1	43,4	56,5	0,1
13	Jawa Tengah	861	78,6	21,4	0,0	54,8	45,2	0,0
14	DI Yogyakarta	121	96,7	3,3	0,0	55,4	44,6	0,0
15	Jawa Timur	949	72,8	27,2	0,0	51,0	48,9	0,1
16	Banten	206	63,1	36,9	0,0	48,5	51,5	0,0
17	Bali	114	98,2	1,8	0,0	89,5	10,5	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	58,4	41,6	0,0	38,9	61,1	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	44,4	55,3	0,3	6,6	92,7	0,7
20	Kalimantan Barat	233	48,5	51,5	0,0	16,7	83,3	0,0
21	Kalimantan Tengah	176	33,0	67,0	0,0	19,9	80,1	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	78,8	21,2	0,0	30,0	70,0	0,0
23	Kalimantan Timur	213	40,4	59,6	0,0	12,7	87,3	0,0
24	Sulawesi Utara	167	55,1	44,9	0,0	14,4	85,6	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	56,4	43,6	0,0	29,4	70,6	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	79,3	20,7	0,0	42,4	57,6	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	27,9	72,1	0,0	9,9	90,1	0,0
28	Gorontalo	74	41,9	58,1	0,0	51,4	48,6	0,0
29	Sulawesi Barat	81	23,5	76,5	0,0	9,9	90,1	0,0
30	Maluku	161	31,7	68,3	0,0	11,8	88,2	0,0
31	Maluku Utara	101	16,8	83,2	0,0	14,9	85,1	0,0
32	Papua Barat	104	21,2	78,8	0,0	1,9	98,1	0,0
33	Papua	294	22,4	77,6	0,0	5,1	94,9	0,0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	73,8	26,1	0,0	40,9	59,1	0,0
2	Perdesaan	6660	56,6	43,4	0,0	29,5	70,4	0,1
	INDONESIA	**8981**	**61,0**	**38,9**	**0,0**	**32,5**	**67,5**	**0,0**

Secara nasional, pada tabel 4.7.2.1.a. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Kesehatan Olahraga adalah sebesar 19,0 persen, sedangkan persentase puskesmas yang tidak melaksanakan Program Kesehatan adalah sebesar 80,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melaksanakan Program Kesehatan Olahraga adalah Provinsi Bali (81,6%), Sumatera Barat (42,3%), dan Jawa Timur (39,1%). Terdapat 2 provinsi yang sama sekali tidak melaksanakan Program Kesehatan Olahraga (0,0%), yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Kesehatan Olahraga yaitu 28,0 persen pada Puskesmas perkotaan dan 15,9 persen pada Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, pada tabel 4.7.2.1.b. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) adalah sebesar 61,0 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Perkesmas adalah sebesar 38,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang melaksanakan Program Perkesmas dengan adalah Provinsi Bali (98,2%), DI Yogyakarta (96,7%) dan DKI Jakarta (91,4%). Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Perkesmas adalah Provinsi Maluku Utara (16,8%), DI Aceh (18,0%), dan Papua Barat (21,2%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Perkesmas, yaitu 73,8 persen pada Puskesmas perkotaan dan 56,6 persen pada Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, pada tabel 4.7.2.1.b. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Kesehatan Kerja adalah sebesar 32,5 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Kesehatan Kerja adalah sebesar 67,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang melaksanakan Program Kesehatan Kerja adalah Provinsi Bali (89,5%), Bangka Belitung (77,2%), Kepulauan Riau (55,4%), dan DI Yogyakarta (55,4%). Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Kesehatan Kerja adalah Provinsi Papua Barat (1,9%), Papua (5,1%), dan DI Aceh (5,8%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Kesehatan Kerja, yaitu 40,9 persen pada Puskesmas perkotaan dan 29,5 persen pada Puskesmas perdesaan.

Pada tabel 4.7.2.1.c. dapat dilihat bahwa secara nasional persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Kesehatan Gigi dan Mulut adalah sebesar 84,0 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Kesehatan Gigi dan Mulut adalah sebesar 16,0 persen. Terdapat 2 provinsi yang mencapai 100,0 persen dalam melaksanakan Program Kesehatan Gigi dan Mulut, yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Bali. Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Kesehatan Gigi dan Mulut adalah Provinsi Papua (27,6%), Papua Barat (33,7%), dan Maluku Utara (37,6%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Kesehatan Gigi dan Mulut, yaitu 94,4 persen pada Puskesmas perkotaan dan 80,4 persen pada Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.7.2.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Program Kesehatan Gigi dan Mulut			Program Kesehatan Jiwa		
			% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab	% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	80,1	19,9	0,0	96,5	3,5	0,0
2	Sumatera Utara	506	85,0	15,0	0,0	34,4	65,6	0,0
3	Sumatera Barat	248	96,8	3,2	0,0	95,6	4,4	0,0
4	Riau	195	91,8	8,2	0,0	60,5	39,5	0,0
5	Jambi	171	90,6	9,4	0,0	50,9	49,1	0,0
6	Sumatera Selatan	298	79,2	20,8	0,0	66,8	33,2	0,0
7	Bengkulu	173	67,6	32,4	0,0	52,6	47,4	0,0
8	Lampung	265	84,2	15,8	0,0	40,4	59,6	0,0
9	Bangka Belitung	57	98,2	1,8	0,0	100,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	65	92,3	7,7	0,0	23,1	76,9	0,0
11	DKI Jakarta	336	94,6	5,1	0,3	83,9	16,1	0,0
12	Jawa Barat	1031	85,3	14,6	0,1	79,7	20,2	0,1
13	Jawa Tengah	861	95,4	4,6	0,0	70,8	29,2	0,0
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0,0	0,0	96,7	3,3	0,0
15	Jawa Timur	949	98,0	2,0	0,0	97,9	2,1	0,0
16	Banten	206	87,4	12,6	0,0	59,7	40,3	0,0
17	Bali	114	100,0	0,0	0,0	99,1	0,9	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	87,9	12,1	0,0	63,8	36,2	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	91,1	8,9	0,0	8,3	91,4	0,3
20	Kalimantan Barat	233	89,3	10,7	0,0	35,2	64,8	0,0
21	Kalimantan Tengah	176	79,5	20,5	0,0	38,6	61,4	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	96,8	3,2	0,0	58,1	41,9	0,0
23	Kalimantan Timur	213	83,6	16,4	0,0	38,5	61,5	0,0
24	Sulawesi Utara	167	78,4	21,6	0,0	28,7	71,3	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	63,8	36,2	0,0	57,7	42,3	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	90,9	9,1	0,0	70,4	29,6	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	58,8	41,2	0,0	24,0	76,0	0,0
28	Gorontalo	74	59,5	40,5	0,0	47,3	52,7	0,0
29	Sulawesi Barat	81	75,3	24,7	0,0	27,2	72,8	0,0
30	Maluku	161	57,8	41,6	0,6	39,8	60,2	0,0
31	Maluku Utara	101	37,6	62,4	0,0	20,8	79,2	0,0
32	Papua Barat	104	33,7	66,3	0,0	1,0	99,0	0,0
33	Papua	294	27,6	72,4	0,0	4,8	95,2	0,0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	94,4	5,56	0,04	73,7	26,3	0,0
2	Perdesaan	6660	80,4	19,61	0,03	56,9	43,1	0,0
	INDONESIA	**8981**	**84,0**	**16,0**	**0,0**	**61,2**	**38,7**	**0,0**

Pada tabel 4.7.2.1.c. dapat dilihat bahwa secara nasional persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Kesehatan Jiwa adalah sebesar 61,2 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Kesehatan Jiwa adalah sebesar 38,7 persen. Hanya terdapat 1 provinsi yang mencapai 100,0 persen dalam melaksanakan Program Kesehatan Jiwa, yaitu Provinsi Bangka Belitung. Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Kesehatan Jiwa adalah Provinsi Papua Barat (1,0%), Papua (4,8%), dan Nusa Tenggara Timur (8,3%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Kesehatan Jiwa, yaitu 73,7 persen pada Puskesmas perkotaan dan 56,9 persen pada Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.7.2.1.d.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Program Kesehatan Mata			Program Kesehatan Usila		
			% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab	% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	11,9	88,1	0,0	77,2	22,8	0,0
2	Sumatera Utara	506	48,4	51,6	0,0	90,7	9,3	0,0
3	Sumatera Barat	248	83,1	16,9	0,0	95,6	4,4	0,0
4	Riau	195	56,9	43,1	0,0	88,2	11,8	0,0
5	Jambi	171	38,6	61,4	0,0	83,6	16,4	0,0
6	Sumatera Selatan	298	67,1	32,9	0,0	91,3	8,7	0,0
7	Bengkulu	173	32,9	67,1	0,0	83,8	16,2	0,0
8	Lampung	265	30,2	69,8	0,0	87,2	12,8	0,0
9	Bangka Belitung	57	70,2	29,8	0,0	98,2	1,8	0,0
10	Kepulauan Riau	65	18,5	81,5	0,0	93,8	6,2	0,0
11	DKI Jakarta	336	41,7	58,3	0,0	88,4	11,6	0,0
12	Jawa Barat	1031	78,9	21,0	0,1	96,0	3,9	0,1
13	Jawa Tengah	861	54,7	45,3	0,0	98,7	1,3	0,0
14	DI Yogyakarta	121	88,4	11,6	0,0	100,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	949	89,0	10,9	0,1	98,8	1,2	0,0
16	Banten	206	66,0	34,0	0,0	90,3	9,7	0,0
17	Bali	114	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	76,5	23,5	0,0	85,2	14,8	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	6,6	93,0	0,3	61,3	38,4	0,3
20	Kalimantan Barat	233	27,0	73,0	0,0	72,1	27,9	0,0
21	Kalimantan Tengah	176	30,1	69,9	0,0	71,0	29,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	55,8	44,2	0,0	94,9	5,1	0,0
23	Kalimantan Timur	213	51,6	48,4	0,0	82,6	17,4	0,0
24	Sulawesi Utara	167	43,1	56,9	0,0	84,4	15,6	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	17,8	82,2	0,0	87,7	12,3	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	53,7	46,3	0,0	92,6	7,4	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	15,5	84,5	0,0	42,9	57,1	0,0
28	Gorontalo	74	14,9	85,1	0,0	70,3	29,7	0,0
29	Sulawesi Barat	81	22,2	77,8	0,0	64,2	35,8	0,0
30	Maluku	161	14,9	85,1	0,0	55,9	44,1	0,0
31	Maluku Utara	101	1,0	99,0	0,0	65,3	34,7	0,0
32	Papua Barat	104	4,8	95,2	0,0	17,3	82,7	0,0
33	Papua	294	4,1	95,9	0,0	8,8	91,2	0,0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	61,1	38,9	0,0	91,9	8,1	0,0
2	Perdesaan	6660	47,6	52,4	0,0	81,5	18,4	0,0
	INDONESIA	**8981**	**51,1**	**48,9**	**0,0**	**84,2**	**15,8**	**0,0**

Pada tabel 4.7.2.1.d. dapat dilihat bahwa secara nasional persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Kesehatan Mata adalah sebesar 51,1 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Kesehatan Mata adalah sebesar 48,9 persen. Hanya terdapat 1 provinsi yang mencapai 100% dalam melaksanakan Program Kesehatan Mata, yaitu Provinsi Bali. Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Kesehatan Mata adalah Provinsi Maluku Utara (1,0%), Papua (4,1%), dan Papua Barat (4,8%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Kesehatan Mata, yaitu 61,1 persen pada Puskesmas perkotaan dan 47,6 persen pada Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.7.2.1.e.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pengembangan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Program Pembinaan Pengobatan Tradisional			Program Kesehatan Haji		
			% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab	% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	6,1	93,9	0,0	61,7	38,3	0,0
2	Sumatera Utara	506	22,1	77,9	0,0	20,0	80,0	0,0
3	Sumatera Barat	248	60,1	39,9	0,0	86,7	12,9	0,4
4	Riau	195	47,2	52,8	0,0	62,1	37,9	0,0
5	Jambi	171	42,1	57,9	0,0	63,7	36,3	0,0
6	Sumatera Selatan	298	51,7	48,3	0,0	30,5	69,5	0,0
7	Bengkulu	173	43,9	56,1	0,0	48,6	51,4	0,0
8	Lampung	265	69,8	30,2	0,0	35,5	64,2	0,4
9	Bangka Belitung	57	93,0	7,0	0,0	75,4	24,6	0,0
10	Kepulauan Riau	65	33,8	66,2	0,0	52,3	47,7	0,0
11	DKI Jakarta	336	26,8	73,2	0,0	12,5	87,2	0,3
12	Jawa Barat	1031	50,4	49,5	0,1	75,8	24,0	0,2
13	Jawa Tengah	861	68,9	31,1	0,0	94,9	5,1	0,0
14	DI Yogyakarta	121	69,4	30,6	0,0	91,7	8,3	0,0
15	Jawa Timur	949	70,6	29,3	0,1	94,0	5,9	0,1
16	Banten	206	54,9	45,1	0,0	99,5	0,5	0,0
17	Bali	114	92,1	7,9	0,0	24,6	75,4	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	23,5	76,5	0,0	94,0	6,0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	4,0	95,7	0,3	4,0	95,7	0,3
20	Kalimantan Barat	233	21,5	78,5	0,0	31,8	68,2	0,0
21	Kalimantan Tengah	176	22,2	77,3	0,6	25,6	73,9	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	50,2	49,8	0,0	59,4	40,6	0,0
23	Kalimantan Timur	213	17,4	82,6	0,0	43,2	56,8	0,0
24	Sulawesi Utara	167	28,1	71,9	0,0	15,0	85,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	14,1	85,9	0,0	49,7	50,3	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	49,3	50,7	0,0	57,1	42,9	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	9,9	90,1	0,0	19,7	80,3	0,0
28	Gorontalo	74	44,6	55,4	0,0	29,7	70,3	0,0
29	Sulawesi Barat	81	6,2	93,8	0,0	24,7	75,3	0,0
30	Maluku	161	21,1	78,9	0,0	4,3	95,7	0,0
31	Maluku Utara	101	4,0	96,0	0,0	6,9	93,1	0,0
32	Papua Barat	104	0,0	100,0	0,0	6,7	93,3	0,0
33	Papua	294	2,0	98,0	0,0	3,7	96,3	0,0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	50,7	49,3	0,0	63,0	37,0	0,0
2	Perdesaan	6660	38,9	61,1	0,1	51,8	48,1	0,1
	INDONESIA	**8981**	**41,9**	**58,0**	**0,0**	**54,7**	**45,2**	**0,1**

Pada tabel 4.7.2.1.d. dapat dilihat bahwa secara nasional persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Kesehatan Usia Lanjut (Usila) adalah sebesar 84,2 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Kesehatan Usila adalah sebesar 15,8 persen. Terdapat 2 provinsi yang mencapai 100,0 persen dalam melaksanakan Program Kesehatan Usila, yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Bali. Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Kesehatan Usila adalah Provinsi Papua (8,8%), Papua Barat (17,3%), dan Sulawesi Tenggara (42,9%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Kesehatan Usila, yaitu 91,9 persen pada Puskesmas perkotaan dan 81,5 persen pada Puskesmas perdesaan.

Pada tabel 4.7.2.1.e. dapat dilihat bahwa secara nasional persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Pembinaan Pengobatan Tradisional adalah sebesar 41,9 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Pembinaan Pengobatan Tradisional adalah sebesar 58,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang melaksanakan Program Pembinaan Pengobatan Tradisional adalah Provinsi Bangka Belitung (93,0%), Bali (92,1%), dan Jawa Timur (70,6%). Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Pembinaan Pengobatan Tradisional adalah Provinsi Papua Barat (0,0%), Papua (2,0%), dan Maluku Utara (4,0%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Pembinaan Pengobatan Tradisional, yaitu 50,7 persen pada Puskesmas perkotaan dan 38,9 persen pada Puskesmas perdesaan.

Pada tabel 4.7.2.1.e. dapat dilihat bahwa secara nasional persentase Puskesmas yang melaksanakan Program Kesehatan Haji adalah sebesar 54,7 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Kesehatan Haji adalah sebesar 45,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang melaksanakan Program Kesehatan Haji adalah Provinsi Banten (99,5%), Jawa Tengah (94,9%), dan Jawa Timur (94,0%). Persentase Puskesmas terendah melaksanakan Program Kesehatan Haji adalah Provinsi Papua (3,7%), Nusa Tenggara Timur (4,0%), dan Maluku (4,3%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam hal melaksanakan Program Kesehatan Haji, yaitu 63,0 persen pada Puskesmas perkotaan dan 51,8 persen pada Puskesmas perdesaan.

4.8. PELAYANAN KESEHATAN

4.8.1. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

4.8.1.1. Kegiatan Program Promosi Kesehatan

Kegiatan dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi, Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pembinaan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pembinaan Forum Desa Siaga, dan Pembinaan Program Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Secara nasional, dari keempat jenis kegiatan Program promosi kesehatan kegiatan, penyuluhan PHBS merupakan presentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (93,0%) dan disusul oleh kegiatan Pembinaan Program Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) (76,0%), Pembinaan Forum Desa Siaga (75,3%), dan Pembinaan di Poskesdes (96,2%). Secara nasional sebesar 53,7 persen Puskesmas melakukan lengkap keempat kegiatan dalam Program Promosi Kesehatan, sementara 45,6 persen tidak lengkap(Tabel 4.8.1.1.a-b).

Secara nasional persentase Puskesmas melakukan kegiatan Penyuluhan PHBS adalah sebesar 93,0 persen, sedangkan 6,3 persen tidak melakukan. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan penyuluhan PHBS terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (100%), kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (99,3%), dan Provinsi Banten (98,6%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan penyuluhan PHBS ditemukan di Provinsi Papua (58,8%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (70,2%) dan Provinsi Maluku (76,4%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan sedikit lebih tinggi dalam melakukan kegiatan penyuluhan PHBS dibandingan pada Puskesmas perdesaan, yaitu 95,6 persen di perkotaan dan 92,1 persen di perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas melakukan kegiatan pembinaan di Poskesdes adalah sebesar 69,2 persen, sedangkan 30,1 persen tidak melakukan. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan di Poskesdes terdapat di Provinsi Lampung (93,6%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah (89,6%), dan Provinsi Jawa Timur (89,3%). Sedangkanpersentase terendah ditemukan di puskesmas Provinsi Papua (22,4%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (26,0%) dan Provinsi DKI Jakarta (33,0%). Secara nasional, persentase Puskesmas perdesaan lebih tinggi melakukan kegiatan Pembinaan diPoskesdes dibandingan pada Puskesmas perkotaan yaitu 73,2 persen di perdesaan dan 57,8 persen di perkotaan.

Tabel 4.8.1.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Promosi Kesehatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)			Pembinaan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)			Pembinaan Forum Desa Siaga		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	85.2	11.3	3.5	48.9	47.6	3.5	61.1	35.4	3.5
2	Sumatera Utara	506	89.7	10.1	0.2	71.7	28.1	0.2	71.1	28.7	0.2
3	Sumatera Barat	248	97.6	2.4	0	82.3	17.7	0	70.2	29.8	0
4	Riau	195	96.9	3.1	0	84.1	15.4	0.5	79.0	20.5	0.5
5	Jambi	171	94.2	4.7	1.2	79.5	19.3	1.2	80.7	18.1	1.2
6	Sumatera Selatan	298	92.6	6.4	1.0	87.9	11.1	1.0	80.9	18.1	1.0
7	Bengkulu	173	90.2	9.2	0.6	71.1	28.3	0.6	76.9	22.5	0.6
8	Lampung	265	97.0	3.0	0	93.6	6.4	0	78.5	21.5	0
9	Bangka Belitung	57	96.5	3.5	0	78.9	21.1	0	68.4	31.6	0
10	Kepulauan Riau	65	90.8	9.2	0	67.7	32.3	0	87.7	12.3	0
11	DKI Jakarta	336	94.9	4.2	0.9	33.0	65.8	1.2	77.4	21.4	1.2
12	Jawa Barat	1031	98.2	1.5	0.4	67.5	32.1	0.4	93.2	6.4	0.4
13	Jawa Tengah	861	97.3	2.6	0.1	81.9	18.0	0.1	91.2	8.7	0.1
14	DI Yogyakarta	121	100.0	0	0	86.8	13.2	0	99.2	0.8	0
15	Jawa Timur	949	96.1	3.6	0.3	89.3	10.4	0.3	92.2	7.5	0.3
16	Banten	206	98.5	1.5	0	59.2	40.8	0	88.3	11.7	0
17	Bali	114	97.4	2.6	0	88.6	11.4	0	85.1	14.9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	99.3	0	0.7	86.6	12.8	0.7	93.3	6.0	0.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	97.4	2.6	0	42.7	57.3	0	60.9	39.1	0
20	Kalimantan Barat	233	88.8	10.7	0.4	64.8	34.8	0.4	56.7	42.9	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	86.4	11.4	2.3	47.2	50.6	2.3	39.2	58.5	2.3
22	Kalimantan Selatan	217	98.6	1.4	0	84.3	15.7	0	77.9	22.1	0
23	Kalimantan Timur	213	95.8	4.2	0	40.8	59.2	0	57.7	42.3	0
24	Sulawesi Utara	167	91.6	8.4	0	52.7	47.3	0	55.1	44.3	0.6
25	Sulawesi Tengah	163	95.7	3.1	1.2	89.6	9.2	1.2	85.3	13.5	1.2
26	Sulawesi Selatan	406	96.3	3.4	0.2	80.8	18.7	0.5	85.0	14.5	0.5
27	Sulawesi Tenggara	233	91.4	8.6	0	60.1	39.5	0.4	59.7	39.9	0.4
28	Gorontalo	74	95.9	2.7	1.4	68.9	29.7	1.4	70.3	28.4	1.4
29	Sulawesi Barat	81	87.7	9.9	2.5	74.1	23.5	2.5	50.6	46.9	2.5
30	Maluku	161	76.4	18.0	5.6	47.2	47.2	5.6	29.8	64.6	5.6
31	Maluku Utara	101	80.2	17.8	2.0	43.6	54.5	2.0	44.6	53.5	2.0
32	Papua Barat	104	70.2	28.8	1.0	26.0	73.1	1.0	23.1	75.0	1.9
33	Papua	294	58.8	39.1	2.0	22.4	75.5	2.0	15.0	83.0	2.0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	95.6	4.0	0.5	57.8	41.7	0.5	75.6	23.8	0.6
2	Perdesaan	6660	92.1	7.1	0.7	73.2	26.1	0.8	75.1	24.1	0.8
	INDONESIA	**8981**	**93.0**	**6.3**	**0.7**	**69.2**	**30.1**	**0.7**	**75.3**	**24.0**	**0.7**

Tabel 4.8.1.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Promosi Kesehatan, Rifaskes 2011

	Uraian	Jml Pusk	Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)			Kegiatan Lengkap Promosi Kesehatan		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	45.0	51.1	3.9	26.0	70.1	3.9
2	Sumatera Utara	506	61.5	38.3	0.2	48.0	51.8	0.2
3	Sumatera Barat	248	87.9	12.1	0	62.1	37.9	0
4	Riau	195	83.1	16.4	0.5	68.2	31.8	0
5	Jambi	171	77.8	20.5	1.8	58.5	39.8	1.8
6	Sumatera Selatan	298	70.5	28.5	1.0	61.4	37.6	1.0
7	Bengkulu	173	73.4	26.0	0.6	50.3	49.1	0.6
8	Lampung	265	88.3	11.7	0	72.1	27.9	0
9	Bangka Belitung	57	89.5	10.5	0	56.1	43.9	0
10	Kepulauan Riau	65	83.1	16.9	0	61.5	38.5	0
11	DKI Jakarta	336	78.3	20.8	0.9	27.7	71.1	1.2
12	Jawa Barat	1031	89.9	9.7	0.4	61.4	38.2	0.4
13	Jawa Tengah	861	89.2	10.7	0.1	71.0	28.9	0.1
14	DI Yogyakarta	121	97.5	2.5	0	85.1	14.9	0
15	Jawa Timur	949	92.4	7.2	0.4	79.7	19.9	0.4
16	Banten	206	85.9	14.1	0	49.0	51.0	0
17	Bali	114	92.1	7.9	0	74.6	25.4	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	90.6	8.7	0.7	78.5	20.8	0.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	67.5	32.5	0	26.8	73.2	0
20	Kalimantan Barat	233	69.1	30.5	0.4	33.0	66.5	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	46.0	51.7	2.3	18.8	79.0	2.3
22	Kalimantan Selatan	217	82.9	17.1	0	66.8	33.2	0
23	Kalimantan Timur	213	62.0	38.0	0	28.6	71.4	0
24	Sulawesi Utara	167	57.5	41.9	0.6	28.7	70.7	0.6
25	Sulawesi Tengah	163	85.3	13.5	1.2	73.6	25.2	1.2
26	Sulawesi Selatan	406	80.8	19.0	0.2	65.3	34.5	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	68.7	31.3	0	40.3	59.2	0.4
28	Gorontalo	74	75.7	23.0	1.4	56.8	41.9	1.4
29	Sulawesi Barat	81	56.8	40.7	2.5	38.3	59.3	2.5
30	Maluku	161	47.8	46.6	5.6	19.9	74.5	5.6
31	Maluku Utara	101	50.5	47.5	2.0	21.8	76.2	2.0
32	Papua Barat	104	34.6	64.4	1.0	13.5	84.6	1.9
33	Papua	294	23.1	74.8	2.0	5.4	92.5	2.0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	79.4	20.1	0.5	45.5	53.9	0.6
2	Perdesaan	6660	74.8	24.4	0.8	56.6	42.6	0.8
	INDONESIA	**8981**	**76.0**	**23.3**	**0.7**	**53.7**	**45.6**	**0.7**

Secara nasional persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga adalah sebesar 75,3 persen, sedangkan 24,0 persen tidak melakukan. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (99,2%), kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (93,3%), dan Provinsi Jawa Barat (93,2%). Sementara persentase Puskesmas terendah ditemukan pada Provinsi Papua (15,0%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (23,1%) dan Provinsi Maluku (29,8%). Secara nasional, persentase Puskesmas perdesaan dan perkotaan tidak ada perbedaan dalam melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga yaitu 75,6 persen pada perkotaan dan 75,1 persen pada perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) adalah sebesar 76,0 persen, sedangkan 23,3 persen tidak melakukan. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan UKBM terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (97,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (92,4%), dan Provinsi Bali (92,1%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah ditemukan pada Provinsi Papua (23,1%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (34,6%) dan Provinsi DI Aceh (45,0%). Dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dibandingan pada Puskesmas perdesaan yaitu 79,4 persen pada perkotaan dan 74,8 persen pada perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas melakukan lengkap empat kegiatan terkait dengan Program Promosi Kesehatan adalah sebesar 53,7 persen, sedangkan 45,6 persen tidak melakukan. Persentase puskesmas tertinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Promosi Kesehatan (keempat kegiatan tersebut di atas dilakukan) terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (85,1%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (79,7%), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (78,5%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan lengkap dalam Program Promosi Kesehatan ditemukan pada Provinsi Papua (5,4%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (13,5%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (18,8%).Secara nasional, persentase Puskesmas perdesaan lebih tinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Promosi Kesehatan (keempat kegiatan tersebut di atas dilakukan) dibandingan pada Puskesmas perkotaan yaitu 56,6 persen pada perdesaan dan 45,5 persen pada perkotaan.

4.8.1.2. Pelatihan Program Promosi Kesehatan

Pelatihan petugas dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pelatihan Desa Siaga, dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2009 dan 2010. Secara nasional, dari ketiga jenis pelatihan Program Promosi Kesehatan, Pelatihan Desa Siaga merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (48,2%) dan disusul oleh Pelatihan PHBS (37,2%), dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat. Secara nasional, sebesar 16,8 persen Puskesmas melakukan lengkap ketiga pelatihan dalam Program Promosi Kesehatan, sementara 82,3 persen tidak lengkap ketiga jenis pelatihan(Tabel 4.8.1.2).

Secara nasional persentase puskesmasmengikuti Pelatihan PHBS adalah sebesar 37,2 persen, sedangkan 62,0 persen tidak mengikuti. Persentase puskesmastertinggi mengikuti Pelatihan PHBS terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah (67,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jambi (63,2%), dan Provinsi Riau (59,5%). Persentase puskesmas terendah mengikuti Pelatihan PHBS ditemukan pada Provinsi Papua (11,6%), diikuti oleh Provinsi Maluku (15,5%) dan Provinsi Sulawesi Utara (16,2%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi mengikuti Pelatihan PHBS dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 39,8 persen pada perkotaan dan 36,3 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.1.2.a
Persentase Puskesmasmenurut Pelatihan Program Promosi Kesehatan pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan PHBS			Pelatihan Desa Siaga			Pelatihan Pember-dayaan Masyarakat		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	40.8	55.6	3.5	48.6	47.9	3.5	14.1	82.0	3.9
2	Sumatera Utara	506	25.7	73.9	0.4	39.3	60.3	0.4	13.0	86.6	0.4
3	Sumatera Barat	248	31.0	69.0	0	53.2	46.8	0	19.0	81.0	0
4	Riau	195	59.5	40.0	0.5	65.6	33.8	0.5	28.2	70.8	1.0
5	Jambi	171	63.2	35.7	1.2	70.8	28.1	1.2	31.0	67.8	1.2
6	Sumatera Selatan	298	53.0	46.0	1.0	56.0	43.0	1.0	23.8	75.2	1.0
7	Bengkulu	173	23.1	75.1	1.7	46.2	52.6	1.2	12.7	85.0	2.3
8	Lampung	265	50.9	49.1	0	49.8	50.2	0	23.0	76.6	0.4
9	Bangka Belitung	57	47.4	52.6	0	49.1	50.9	0	26.3	73.7	0
10	Kepulauan Riau	65	33.8	66.2	0	60.0	40.0	0	21.5	78.5	0
11	DKI Jakarta	336	36.6	62.5	0.9	39.3	59.8	0.9	29.8	69.3	0.9
12	Jawa Barat	1031	50.2	49.4	0.4	66.8	32.8	0.4	41.3	58.2	0.5
13	Jawa Tengah	861	28.0	71.9	0.1	40.2	59.7	0.1	25.3	74.6	0.1
14	DI Yogyakarta	121	37.2	62.8	0	61.2	38.8	0	36.4	63.6	0
15	Jawa Timur	949	32.8	66.8	0.4	44.9	54.6	0.5	25.8	73.7	0.5
16	Banten	206	44.7	55.3	0	68.0	32.0	0	34.5	65.5	0
17	Bali	114	42.1	57.0	0.9	57.0	43.0	0	27.2	71.9	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	48.3	51.0	0.7	62.4	36.2	1.3	30.2	68.5	1.3
19	Nusa Tenggara Timur	302	28.8	71.2	0	33.4	66.6	0	12.6	87.4	0
20	Kalimantan Barat	233	40.3	59.2	0.4	52.4	46.8	0.9	15.9	83.7	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	25.6	71.6	2.8	34.1	63.1	2.8	8.5	88.1	3.4
22	Kalimantan Selatan	217	53.0	47.0	0	51.6	48.4	0	28.1	71.9	0
23	Kalimantan Timur	213	43.7	56.3	0	40.8	59.2	0	13.6	86.4	0
24	Sulawesi Utara	167	16.2	83.8	0	28.7	71.3	0	6.0	94.0	0
25	Sulawesi Tengah	163	67.5	31.3	1.2	55.8	42.9	1.2	29.4	69.3	1.2
26	Sulawesi Selatan	406	33.5	66.3	0.2	52.0	47.8	0.2	20.4	79.3	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	28.8	71.2	0	56.2	43.8	0	16.7	83.3	0
28	Gorontalo	74	44.6	54.1	1.4	48.6	50.0	1.4	20.3	78.4	1.4
29	Sulawesi Barat	81	38.3	58.0	3.7	35.8	60.5	3.7	24.7	71.6	3.7
30	Maluku	161	15.5	78.3	6.2	24.2	68.9	6.8	6.2	87.0	6.8
31	Maluku Utara	101	17.8	80.2	2.0	57.4	40.6	2.0	11.9	86.1	2.0
32	Papua Barat	104	31.7	67.3	1.0	23.1	76.0	1.0	13.5	85.6	1.0
33	Papua	294	11.6	85.4	3.1	12.6	84.4	3.1	6.8	90.1	3.1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	39.8	59.7	0.6	48.0	51.4	0.6	25.0	74.4	0.6
2	Perdesaan	6660	36.3	62.9	0.9	48.3	50.8	0.9	22.5	76.5	1.0
	INDONESIA	**8981**	**37.2**	**62.0**	**0.8**	**48.2**	**51.0**	**0.8**	**23.1**	**76.0**	**0.9**

Secara nasional persentase Puskesmas mengikuti Pelatihan Desa Siaga adalah sebesar 48,2 persen, sedangkan 51,0 persen tidak mengikuti. Persentase puskesmas tertinggi mengikuti Pelatihan Desa Siaga terdapat di Provinsi Jambi (70,8%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jambi (68,0%), dan Provinsi Jawa Barat (66,8%). Persentase puskesmas terendah mengikuti Pelatihan Desa Siaga ditemukan pada Provinsi Papua (12,6%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (23,1%) dan Provinsi Maluku (24,2%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan dan perdesaan hampir mendekati nilai yang sama yaitu 48,0 persen pada perkotaan dan 48,3 persen pada perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar 23,1 persen, sedangkan 76,0 persen tidak mengikuti. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat terdapat di Provinsi Jawa Barat (41,3%), kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (36,4%), dan Provinsi Banten (34,5%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dapat ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (6,0%), diikuti oleh Provinsi Maluku (6,2%) dan Provinsi Papua (6,8%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 25,0 persen pada perkotaan dan 22,5 persen pada perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas mengikuti pelatihan lengkap ketiga jenis pelatihan Program Promosi Kesehatan adalah sebesar 16,8 persen, sedangkan 82,3 persen tidak mengikuti.Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan secara lengkap (ketiga jenis pelatihan tersebut di atas) adalah di Provinsi Jawa Barat (33,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah (27,6%), dan Provinsi Banten (27,2%). Persentase puskesmas terendah mengikuti pelatihan secara lengkap dalam Program Promosi Kesehatan ada di Provinsi Papua (2,7%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (4,2%) dan Provinsi Maluku (4,3%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi mengikuti pelatihan lengkap dalam Program Promosi Kesehatan dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 17,4 persen pada perkotaan dan 16,7 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.1.2.b
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Program Promosi Kesehatan pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Lengkap Promosi Kesehatan		
			% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	11.9	84.2	3.9
2	Sumatera Utara	506	9.1	90.5	0.4
3	Sumatera Barat	248	10.1	89.9	0
4	Riau	195	26.7	72.3	1.0
5	Jambi	171	25.7	73.1	1.2
6	Sumatera Selatan	298	19.8	79.2	1.0
7	Bengkulu	173	8.1	89.6	2.3
8	Lampung	265	18.1	81.5	0.4
9	Bangka Belitung	57	14.0	86.0	0
10	Kepulauan Riau	65	7.7	92.3	0
11	DKI Jakarta	336	20.2	78.9	0.9
12	Jawa Barat	1031	33.5	66.1	0.5
13	Jawa Tengah	861	15.7	84.2	0.1
14	DI Yogyakarta	121	21.5	78.5	0
15	Jawa Timur	949	16.8	82.7	0.5
16	Banten	206	27.2	72.8	0
17	Bali	114	19.3	79.8	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	23.5	74.5	2.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	7.0	93.0	0
20	Kalimantan Barat	233	9.4	89.7	0.9
21	Kalimantan Tengah	176	6.8	89.8	3.4
22	Kalimantan Selatan	217	22.6	77.4	0
23	Kalimantan Timur	213	11.3	88.7	0
24	Sulawesi Utara	167	4.2	95.8	0
25	Sulawesi Tengah	163	27.6	71.2	1.2
26	Sulawesi Selatan	406	15.5	84.2	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	14.2	85.8	0
28	Gorontalo	74	16.2	82.4	1.4
29	Sulawesi Barat	81	14.8	81.5	3.7
30	Maluku	161	4.3	88.8	6.8
31	Maluku Utara	101	5.9	92.1	2.0
32	Papua Barat	104	6.7	92.3	1.0
33	Papua	294	2.7	94.2	3.1
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	17.4	81.9	0.7
2	Perdesaan	6660	16.7	82.4	1.0
	INDONESIA	**8981**	**16.8**	**82.3**	**0.9**

4.8.1.3. Pedoman Program Promosi Kesehatan

Pedoman Program Promosi Kesehatan diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Program Promosi Kesehatan, buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi, Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes, Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga. Secara nasional pedoman Program Promosi Kesehatan terbanyak dimiliki oleh puskesmas adalah Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga (65,9%) kemudian berturut turut Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga (50,4%) dan Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes (48,6%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki ketiga jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 40,6 persen sementara 58,5 persen memiliki pedoman yang tidak lengkap(Tabel 4.8.1.3).

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki petunjuk teknis pengembangan dan penyelenggaraan Poskesdes adalah sebesar 48,6 persen, sedangkan 50,6 persen tidak memiliki.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (72,7%) dan diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (71,8%) dan Provinsi Jawa Timur (63,9%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (17,9%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (24,6%) dan Provinsi Papua (24,8%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes di perdesaan lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perkotaan, yaitu 49,3 persen di Puskesmas perdesaan dan 46,8 persen di Puskesmas perkotaan.

Tabel 4.8.1.3.a
Persentase Puskesmasmenurut Pedoman Program Promosi Kesehatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes			Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga			Juknis Penggerakan & Pemberdayaan Masayarakat dalam Pengembangan Desa Siaga		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	27.0	69.5	3.5	45.3	51.1	3.5	31.8	64.6	3.5
2	Sumatera Utara	506	38.1	61.7	0.2	51.6	48.2	0.2	39.5	60.3	0.2
3	Sumatera Barat	248	54.4	45.6	0	66.5	33.5	0	52.4	47.2	0.4
4	Riau	195	50.8	48.2	1.0	63.6	35.4	1.0	51.3	47.2	1.5
5	Jambi	171	49.7	48.5	1.8	71.3	26.9	1.8	52.6	45.6	1.8
6	Sumatera Selatan	298	56.7	42.3	1.0	68.1	30.9	1.0	55.4	43.6	1.0
7	Bengkulu	173	44.5	54.3	1.2	52.6	46.2	1.2	42.8	56.1	1.2
8	Lampung	265	57.7	42.3	0	66.4	33.6	0	56.2	43.8	0
9	Bangka Belitung	57	35.1	64.9	0	68.4	31.6	0	40.4	59.6	0
10	Kepulauan Riau	65	63.1	36.9	0	83.1	16.9	0	63.1	36.9	0
11	DKI Jakarta	336	35.7	63.4	0.9	57.4	41.7	0.9	44.3	54.8	0.9
12	Jawa Barat	1031	58.0	41.6	0.4	80.2	19.4	0.4	64.0	35.6	0.4
13	Jawa Tengah	861	54.8	45.1	0.1	84.1	15.8	0.1	61.6	38.3	0.1
14	DI Yogyakarta	121	72.7	27.3	0	95.0	5.0	0	76.9	23.1	0
15	Jawa Timur	949	63.9	35.8	0.3	81.0	18.7	0.3	64.9	34.7	0.4
16	Banten	206	60.7	39.3	0	74.3	25.7	0	59.2	40.8	0
17	Bali	114	55.3	44.7	0	78.9	21.1	0	55.3	44.7	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	71.8	27.5	0.7	81.9	17.4	0.7	73.8	25.5	0.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	17.9	81.8	0.3	41.7	57.9	0.3	26.2	73.5	0.3
20	Kalimantan Barat	233	45.5	54.1	0.4	59.2	40.3	0.4	41.6	57.9	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	40.9	55.7	3.4	43.2	53.4	3.4	30.7	65.9	3.4
22	Kalimantan Selatan	217	61.3	38.7	0	71.4	28.6	0	56.7	42.9	0.5
23	Kalimantan Timur	213	50.7	49.3	0	66.2	33.8	0	49.8	50.2	0
24	Sulawesi Utara	167	24.6	75.4	0	44.3	55.7	0	30.5	69.5	0
25	Sulawesi Tengah	163	54.6	43.6	1.8	71.8	27.0	1.2	57.1	41.1	1.8
26	Sulawesi Selatan	406	44.3	55.4	0.2	71.2	28.6	0.2	44.6	55.2	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	43.8	56.2	0	62.7	37.3	0	45.9	54.1	0
28	Gorontalo	74	36.5	62.2	1.4	50.0	48.6	1.4	37.8	60.8	1.4
29	Sulawesi Barat	81	39.5	55.6	4.9	51.9	43.2	4.9	39.5	55.6	4.9
30	Maluku	161	24.8	68.9	6.2	34.2	59.6	6.2	19.3	74.5	6.2
31	Maluku Utara	101	36.6	61.4	2.0	45.5	52.5	2.0	29.7	68.3	2.0
32	Papua Barat	104	38.5	59.6	1.9	37.5	60.6	1.9	35.6	62.5	1.9
33	Papua	294	24.8	72.8	2.4	23.5	74.1	2.4	21.4	76.2	2.4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	46.8	52.7	0.5	66.6	32.9	0.5	50.7	48.7	0.6
2	Perdesaan	6660	49.3	49.8	0.9	65.7	33.5	0.9	50.3	48.8	0.9
	INDONESIA	**8981**	**48.6**	**50.6**	**0.8**	**65.9**	**33.3**	**0.8**	**50.4**	**48.8**	**0.8**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga adalah sebesar 65,9 persen, sedangkan 33,3 persen tidak memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dapat ditemukan di Provinsi DI Yogyakarta (95,0%) dan diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (84,1%) dan Provinsi Kepulauan Riau (83,1%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga ditemukan pada Provinsi Papua (23,5%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku (34,2%) dan Provinsi Papua Barat (37,5%). Secara nasional persentase kepemilikan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga di perkotaan sedikit lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 66,6 persen di Puskesmas perkotaan dan 65,7 persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.1.3.b
Persentase Puskesmasmenurut Pedoman Program Promosi Kesehatan, Rifaskes2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Lengkap Promosi Kesehatan		
			% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	22.2	74.3	3.5
2	Sumatera Utara	506	30.4	69.4	0.2
3	Sumatera Barat	248	41.5	58.5	0
4	Riau	195	42.6	55.9	1.5
5	Jambi	171	42.1	56.1	1.8
6	Sumatera Selatan	298	48.0	51.0	1.0
7	Bengkulu	173	35.8	63.0	1.2
8	Lampung	265	49.4	50.6	0
9	Bangka Belitung	57	28.1	71.9	0
10	Kepulauan Riau	65	52.3	47.7	0
11	DKI Jakarta	336	30.4	68.8	0.9
12	Jawa Barat	1031	50.1	49.5	0.4
13	Jawa Tengah	861	46.6	53.3	0.1
14	DI Yogyakarta	121	60.3	39.7	0
15	Jawa Timur	949	56.3	43.3	0.4
16	Banten	206	48.5	51.5	0
17	Bali	114	48.2	51.8	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	62.4	36.9	0.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	12.9	86.8	0.3
20	Kalimantan Barat	233	35.2	64.4	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	29.0	67.6	3.4
22	Kalimantan Selatan	217	51.2	48.4	0.5
23	Kalimantan Timur	213	42.3	57.7	0
24	Sulawesi Utara	167	19.8	80.2	0
25	Sulawesi Tengah	163	47.2	50.9	1.8
26	Sulawesi Selatan	406	36.2	63.5	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	36.5	63.5	0
28	Gorontalo	74	29.7	68.9	1.4
29	Sulawesi Barat	81	38.3	56.8	4.9
30	Maluku	161	16.8	77.0	6.2
31	Maluku Utara	101	20.8	77.2	2.0
32	Papua Barat	104	33.7	64.4	1.9
33	Papua	294	19.4	78.2	2.4
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	38.8	60.6	0.6
2	Perdesaan	6660	41.3	57.8	0.9
	INDONESIA	**8981**	**40.6**	**58.5**	**0.8**

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Petunjuk Teknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga adalah sebesar 50,4 persen, sedangkan 48,8 persen tidak memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (76,9%) dan diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (73,8%) dan Provinsi Jawa Timur (64,9%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masayarakat dalam Pengembangan Desa Siaga ditemukan pada Provinsi Papua (23,5%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku (34,2%) dan Provinsi Papua Barat (37,5%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masayarakat dalam Pengembangan Desa Siaga di perkotaan dan diperdesaan hampir mendekati nilai yang sama, yaitu 50,7 persen di Puskemas perkotaan dan 50,3 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap (yaitu memiliki ketiga jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) adalah sebesar 40,6 persen, sedangkan 58,5 persen tidak memiliki lengkap. Persentase tertinggi Puskesmasmemiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkapditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (62,4%) dan diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (60,3%) dan Provinsi Jawa Timur (56,3%). Persentase terendah Puskesmasmemiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap (yaitu memiliki ketiga jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (12,9%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku (16,8%) dan Provinsi Papua Barat (19,4%). Secara nasional persentase kepemilikan pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap di Puskesmas perdesaan lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perkotaan, yaitu 41,3 persen di Puskemas perdesaan dan 38,8 persen di Puskesmasperkotaan.

4.8.1.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis diperlukan dalam Program Promosi Kesehatan untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Promosi Kesehatan. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis dapat berupa kunjungan supervise atau bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi (monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Secara nasional bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam Program Promosi Kesehatan yang paling banyak diterima Puskesmas adalah pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan (64,2%) dan supervisi oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas (64,1%) kemudian umpan balik (50,6%). Secara nasional persentase Puskesmas menerima lengkap ketiga bentuk evaluasi dan bimbingan (kunjungan supervisi, umpan balik tertulis dan pertemuan monev) adalah sebesar 39,4 persen, sementara 59,7 persen menerima tidak lengkap (Tabel 4.8.1.4.a-b).

Pada tingkat nasional, dari 8.981 Puskesmassebesar 64,1 persen puskesmas menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan, sementara 35,1 persen tidak menerima. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan pada Provinsi Banten (83,0%) kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (81,8%) dan Provinsi Gorontalo (81,1%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah ditemukan pada Provinsi Maluku (18,6%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua Barat (21,2%) dan Provinsi Papua (24,1%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 64,1 persen di perkotaan dan 63,9 persen di perdesaan.

Pada tingkat nasional, dari 8.981 Puskesmas sebesar 50,6 persen Puskesmas menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan, sementara 48,5 persen tidak menerima. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan pada Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DI Yogyakarta (77,7%) kemudian diikuti oleh Provinsi Banten (69,4%). Sedangkan persentase Puskesmasterendah ditemukan pada Provinsi Papua (15,6%) kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku Utara (16,8%) dan Provinsi Maluku (18,0%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan sedikit lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan, yaitu 51,8 persen di perkotaan dan 50,2 persen di perdesaan.

Pada tingkat nasional, dari 8.981 Puskesmas sebesar 64,2% Puskesmas mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi Program Promosi Kesehatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan, sementara 34,7 persen tidak mengikuti. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Promosi Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (93,4%) kemudian diikuti oleh Provinsi Banten (90,3%) dan Provinsi Jawa Barat (88,6%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan pada Provinsi Maluku (6,2%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua (19,0%) dan Provinsi Maluku Utara (22,8%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Promosi Kesehatan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan, yaitu 68,2 persen di perkotaan dan 62,8 persen di perdesaan.

Pada tingkat nasional, dari 8.981 Puskesmas, sebesar 39,4 persen Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap (ketiga jenis) dari Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan, sementara 35,1 persen tidak menerima. Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi, dan Bimbingan secara lengkap untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (65,3%) kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (65,3%) dan Provinsi Banten (61,7%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap ditemukan pada Provinsi Maluku (1,2%) kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku Utara (6,9%) dan Provinsi Papua Barat (8,7%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 41,0 persen di perkotaan dan 38,9 persen di perdesaan.

Tabel 4.8.1.4.a
Persentase Puskesmas menurut Penerimaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Supervisi Dinkes			Umpan balik			Pertemuan Monev		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	43.1	53.7	3.2	29.6	66.9	3.5	42.4	53.1	4.5
2	Sumatera Utara	506	52.2	47.2	0.6	30.0	69.2	0.8	51.0	47.4	1.6
3	Sumatera Barat	248	66.9	33.1	0	52.4	47.6	0	72.6	27.4	0
4	Riau	195	68.2	31.3	0.5	57.9	41.5	0.5	64.1	34.9	1.0
5	Jambi	171	69.0	29.8	1.2	48.0	50.3	1.8	70.2	28.1	1.8
6	Sumatera Selatan	298	67.1	31.9	1.0	51.7	47.3	1.0	59.1	39.3	1.7
7	Bengkulu	173	65.3	33.5	1.2	39.3	59.5	1.2	49.1	49.1	1.7
8	Lampung	265	71.7	28.3	0	46.4	52.8	0.8	70.6	29.1	0.4
9	Bangka Belitung	57	61.4	38.6	0	56.1	43.9	0	45.6	54.4	0
10	Kepulauan Riau	65	66.2	33.8	0	52.3	47.7	0	60.0	40.0	0
11	DKI Jakarta	336	64.9	33.9	1.2	50.9	47.9	1.2	66.4	32.1	1.5
12	Jawa Barat	1031	75.9	23.6	0.5	77.7	21.8	0.5	88.6	10.7	0.8
13	Jawa Tengah	861	79.6	20.2	0.2	66.3	33.6	0.1	85.7	14.1	0.2
14	DI Yogyakarta	121	81.8	18.2	0	77.7	22.3	0	93.4	6.6	0
15	Jawa Timur	949	80.2	19.5	0.3	64.3	35.1	0.6	82.7	16.9	0.4
16	Banten	206	83.0	17.0	0	69.4	30.1	0.5	90.3	9.2	0.5
17	Bali	114	70.2	29.8	0	34.2	65.8	0	64.0	36.0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	78.5	20.8	0.7	58.4	40.9	0.7	71.1	27.5	1.3
19	Nusa TenggaraTimur	302	48.3	51.3	0.3	36.1	63.6	0.3	44.4	55.6	0
20	Kalimantan Barat	233	47.6	51.9	0.4	41.6	57.9	0.4	46.4	53.2	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	31.3	65.3	3.4	25.0	71.6	3.4	30.1	66.5	3.4
22	Kalimantan Selatan	217	74.7	25.3	0	53.5	46.5	0	74.2	25.8	0
23	Kalimantan Timur	213	53.5	46.5	0	33.3	66.7	0	52.6	47.4	0
24	Sulawesi Utara	167	38.9	60.5	0.6	32.3	67.1	0.6	31.7	67.1	1.2
25	Sulawesi Tengah	163	54.0	44.8	1.2	38.0	60.7	1.2	58.3	39.3	2.5
26	Sulawesi Selatan	406	74.9	24.9	0.2	47.3	52.5	0.2	68.0	31.3	0.7
27	Sulawesi Tenggara	233	58.4	41.6	0	47.2	52.8	0	40.3	58.8	0.9
28	Gorontalo	74	81.1	17.6	1.4	66.2	32.4	1.4	85.1	13.5	1.4
29	Sulawesi Barat	81	55.6	39.5	4.9	42.0	53.1	4.9	39.5	55.6	4.9
30	Maluku	161	18.6	75.8	5.6	18.0	75.8	6.2	6.2	87.6	6.2
31	Maluku Utara	101	36.6	61.4	2.0	16.8	81.2	2.0	22.8	75.2	2.0
32	Papua Barat	104	21.2	77.9	1.0	20.2	78.8	1.0	30.8	68.3	1.0
33	Papua	294	24.1	73.8	2.0	15.6	82.3	2.0	19.0	78.6	2.4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	64.4	34.9	0.6	51.8	47.5	0.7	68.2	30.8	0.95
2	Perdesaan	6660	64,0	35.2	0.8	50.2	48.8	1,0	62.8	36,0	1.2
	INDONESIA	**8981**	**64.1**	**35.1**	**0.8**	**50.6**	**48.5**	**0.9**	**64.2**	**34.7**	**1.1**

Tabel 4.8.1.4.b
Persentase Puskesmas menurut Penerimaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	16.1	80.7	3.2
2	Sumatera Utara	506	23.3	76.1	0.6
3	Sumatera Barat	248	42.7	57.3	0
4	Riau	195	42.6	56.4	1.0
5	Jambi	171	36.3	62.6	1.2
6	Sumatera Selatan	298	38.6	60.4	1.0
7	Bengkulu	173	29.5	69.4	1.2
8	Lampung	265	39.2	60.8	0
9	Bangka Belitung	57	28.1	71.9	0
10	Kepulauan Riau	65	38.5	61.5	0
11	DKI Jakarta	336	42.3	56.5	1.2
12	Jawa Barat	1031	65.3	34.1	0.6
13	Jawa Tengah	861	56.7	43.1	0.2
14	DI Yogyakarta	121	65.3	34.7	0
15	Jawa Timur	949	53.4	45.9	0.6
16	Banten	206	61.7	37.9	0.5
17	Bali	114	26.3	73.7	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	47.0	51.7	1.3
19	Nusa TenggaraTimur	302	21.5	78.5	0
20	Kalimantan Barat	233	28.8	70.8	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	11.9	85.2	2.8
22	Kalimantan Selatan	217	43.3	56.7	0
23	Kalimantan Timur	213	24.4	75.6	0
24	Sulawesi Utara	167	16.2	83.2	0.6
25	Sulawesi Tengah	163	27.6	71.2	1.2
26	Sulawesi Selatan	406	38.2	61.3	0.5
27	Sulawesi Tenggara	233	24.5	75.5	0
28	Gorontalo	74	60.8	37.8	1.4
29	Sulawesi Barat	81	24.7	70.4	4.9
30	Maluku	161	1.2	93.2	5.6
31	Maluku Utara	101	6.9	91.1	2.0
32	Papua Barat	104	8.7	90.4	1.0
33	Papua	294	10.2	87.8	2.0
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	41.0	58.3	0.7
2	Perdesaan	6660	38.9	60.2	0.9
	INDONESIA	**8981**	**39.4**	**59.7**	**0.9**

4.8.2. PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN

4.8.2.1. Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan

Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah, Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelola Makanan/Minuman (TPM), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga, Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Pemberantasan Sarang Nyamuk atau Pemeriksaan Jentik Nyamuk, dan Pelayanan Klinik Sanitasi. Secara nasional, dari ketujuh jenis kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh puskesmas (88,1%) dan disusul oleh kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga (86,1%), Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah (83,1%), Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelola Makanan/Minuman (TPM) (81,4%), Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik Nyamuk (75,9%), Pelayanan Klinik Sanitasi (50,2%), dan Kunjungan/Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (23,9%). Secara nasional sebesar 12,3 persenpuskesmas melakukan lengkap ketujuh kegiatan dalam Program Kesehatan Lingkungan, sementara 86,6 persen tidak lengkap ketujuh kegiatan (Tabel 4.8.2.1.a-b-c).

Secara nasional persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kunjungan/ Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah adalah sebesar 83,1 persen, sedangkan 15,8 persen tidak melakukan. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (97,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi Bali (97,4%), dan Provinsi Sumatera Barat (96,4%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah ditemukan pada Provinsi Papua (26,2%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (46,2%) dan Provinsi Maluku (61,5%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan pemeriksaan sanitasi lingkungan sekolah dibandingan pada Puskesmas perdesaan yaitu 87,5 persen pada perkotaan dan 81,6 persen pada perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah sebesar 88,1 persen, sedangkan 10,9 persen tidak melakukan. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TTU ditemukan di Provinsi Bali (100,0%), kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (99,2%), dan Provinsi Jawa Tengah (98,8%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemeriksaan sanitasi TTU ditemukan pada Provinsi Papua (26,2%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (49,0%) dan Provinsi Maluku (68,9%)Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TTU dibandingan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 90,1 persen pada perkotaan dan 87,3 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan/ Minuman (TPM) adalah sebesar 81,4 persen, sedangkan 17,5 persen tidak melakukan. Persentase Puskesmastertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan TPM ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (100,0%), kemudian diikuti oleh Provinsi Bali (99,1%), dan Provinsi Jawa Tengah (97,0%). Persentase puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPM ditemukan pada Provinsi Papua (20,7%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (39,4%) dan Provinsi Maluku (41,0%). Secara nasional, persentase

Puskesmasperkotaan lebih tinggi melakukan Pemeriksaan Sanitasi TPM dibandingan dengan Puskesmasperdesaan, yaitu 87,7 persen pada perkotaan dan 79,2 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.2.1.a
Persentase Puskesmasmenurut Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	PemeriksaanSanitasi Lingkungan Sekolah			Pemeriksaan Sanitasi TTU			Pemeriksaan Sanitasi Tempat TPM		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	68.2	31.2	0.6	78.8	20.6	0.6	67.8	31.5	0.6
2	Sumatera Utara	506	66.4	33.4	0.2	81.2	18.6	0.2	74.1	25.7	0.2
3	Sumatera Barat	248	96.4	3.6	0	97.2	2.8	0	94.4	5.6	0
4	Riau	195	87.7	10.3	2.1	93.3	4.6	2.1	91.8	6.2	2.1
5	Jambi	171	82.5	17.0	0.6	90.6	8.8	0.6	88.3	11.1	0.6
6	Sumatera Selatan	298	90.3	9.1	0.7	89.6	10.1	0.3	85.6	14.1	0.3
7	Bengkulu	173	67.1	29.5	3.5	70.5	26.0	3.5	64.2	32.4	3.5
8	Lampung	265	86.4	12.1	1.5	92.1	6.4	1.5	89.8	8.7	1.5
9	Bangka Belitung	57	91.2	8.8	0	96.5	3.5	0	91.2	8.8	0
10	Kepulauan Riau	65	75.4	24.6	0	83.1	16.9	0	81.5	18.5	0
11	DKI Jakarta	336	71.1	25.9	3.0	72.6	24.4	3.0	65.2	31.8	3.0
12	Jawa Barat	1031	92.1	6.8	1.1	95.7	3.2	1.1	93.8	5.0	1.2
13	Jawa Tengah	861	95.9	3.9	0.1	98.8	1.0	0.1	97.0	2.9	0.1
14	DI Yogyakarta	121	97.5	2.5	0	99.2	0.8	0	100.0	0	0
15	Jawa Timur	949	94.3	4.8	0.8	96.6	2.5	0.8	94.1	5.1	0.8
16	Banten	206	91.3	8.7	0	95.1	4.9	0	82.5	17.5	0
17	Bali	114	97.4	2.6	0	100.0	0	0	99.1	0.9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	94.0	6.0	0	98.0	2.0	0	92.6	7.4	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	84.8	14.9	0.3	91.4	8.3	0.3	45.4	54.3	0.3
20	Kalimantan Barat	233	81.5	18.5	0	85.8	14.2	0	82.4	17.6	0
21	Kalimantan Tengah	176	71.6	25.0	3.4	72.2	24.4	3.4	72.7	23.9	3.4
22	Kalimantan Selatan	217	94.0	5.5	0.5	97.2	2.3	0.5	94.0	5.5	0.5
23	Kalimantan Timur	213	78.4	21.6	0	86.9	13.1	0	81.7	18.3	0
24	Sulawesi Utara	167	79.6	20.4	0	92.2	7.8	0	79.6	20.4	0
25	Sulawesi Tengah	163	81.6	17.8	0.6	92.0	7.4	0.6	84.7	14.7	0.6
26	Sulawesi Selatan	406	93.6	5.7	0.7	96.8	2.5	0.7	92.4	6.9	0.7
27	Sulawesi Tenggara	233	76.0	24.0	0	89.3	10.7	0	74.2	25.8	0
28	Gorontalo	74	85.1	13.5	1.4	94.6	4.1	1.4	87.8	10.8	1.4
29	Sulawesi Barat	81	84.0	14.8	1.2	84.0	14.8	1.2	75.3	23.5	1.2
30	Maluku	161	61.5	32.9	5.6	68.9	25.5	5.6	41.0	53.4	5.6
31	Maluku Utara	101	64.4	28.7	6.9	75.2	17.8	6.9	49.5	43.6	6.9
32	Papua Barat	104	46.2	52.9	1.0	49.0	50.0	1.0	39.4	59.6	1.0
33	Papua	294	26.2	69.7	4.1	26.2	69.7	4.1	20.7	75.2	4.1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	87.5	11.5	1.0	90.1	8.9	1.0	87.7	11.3	1.0
2	Perdesaan	6660	81.6	17.3	1.1	87.3	11.6	1.0	79.2	19.7	1.0
	INDONESIA	**8981**	**83.1**	**15.8**	**1.0**	**88.1**	**10.9**	**1.0**	**81.4**	**17.5**	**1.0**

Secara nasional persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga adalah sebesar 86,1 persen, sedangkan 12,8 persen tidak melakukan. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (100,0%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (97,6%), dan Provinsi Bali (97,4%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga ditemukan pada Provinsi Papua (26,2%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (47,1%) dan Provinsi DKI Jakarta (60,7%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 86,8 persen pada perkotaan dan 85,9 persen pada perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah adalah sebesar 23,9 persen, sedangkan 73,1 persen tidak melakukan. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah ditemukan pada Provinsi Riau (38,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (36,9%), dan Provinsi Maluku Utara (33,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah ditemukan pada Provinsi Papua (9,9%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (10,6%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (10,8%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah dibandingan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 26,4 persen pada perkotaan dan 23,0 persen pada perdesaan.

Secara nasional persentase kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jenis Nyamuk adalah sebesar 75,9 persen, sedangkan 23,0 persen tidak melakukan.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik Nyamuk ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (98,3%), kemudian diikuti oleh Provinsi Bali (92,1%), dan Provinsi Jawa Tengah (92,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik Nyamuk ditemukan pada Provinsi Papua (18,0%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (24,0%) dan Provinsi Maluku (42,2%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik Nyamuk dibandingan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 86,1 persen pada perkotaan dan 72,4 persen pada perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Klinik Sanitasi adalah sebesar 50,2 persen, sedangkan 48,7 persen tidak melakukan. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pelayanan Klinik Sanitasi ditemukan pada Provinsi Bangka Belitung (89,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (83,5%), dan Provinsi Kalimantan Selatan (82,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pelayanan Klinik Sanitasi ditemukan pada Provinsi DI Aceh (11,6%), diikuti oleh Provinsi Papua (12,2%) dan Provinsi Papua Barat (15,4%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan Pelayanan Klinik Sanitasi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 57,0 persen pada perkotaan dan 47,8 persen pada perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas melakukan kegiatan lengkap (melaksanakan ketujuh kegiatan tersebut di atas) dalam Program Kesehatan Lingkungan adalah sebesar 12,3 persen, sedangkan 86,6 persen tidak melakukan. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Provinsi Riau (23,6%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (22,1%), dan Provinsi Sumatera Barat (17,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan lengkap dalam Program Kesehatan Lingkungan ditemukan pada Provinsi Papua (1,4%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat dan Provinsi Maluku (1,9%).Secara nasional, persentase Puskesmas perdesaan lebih tinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Kesehatan Lingkungan dibandingkan dengan Puskesmas perkotaan yaitu 15,7 persen pada perdesaan dan 11,1 persen pada perkotaan.

Tabel 4.8.2.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga			Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah			Pemberantasan Sarang Nyamuk / Pemeriksaan Jentik Nyamuk		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	77,5	21,9	0,6	19,6	79,7	0,6	51,8	47,6	0,6
2	Sumatera Utara	506	75,9	23,9	0,2	25,9	73,9	0,2	64,4	35,4	0,2
3	Sumatera Barat	248	97,6	2,4	0	21,4	78,6	0	82,3	17,7	0
4	Riau	195	85,6	12,3	2,1	38,5	59,5	2,1	82,1	15,4	2,6
5	Jambi	171	90,6	8,8	0,6	23,4	76,0	0,6	66,1	33,3	0,6
6	Sumatera Selatan	298	88,9	10,7	0,3	31,2	68,5	0,3	77,2	22,5	0,3
7	Bengkulu	173	69,4	27,2	3,5	17,3	79,2	3,5	54,3	42,2	3,5
8	Lampung	265	89,4	9,1	1,5	19,2	79,2	1,5	86,0	12,5	1,5
9	Bangka Belitung	57	87,7	12,3	0	24,6	75,4	0	75,4	24,6	0
10	Kepulauan Riau	65	78,5	21,5	0	21,5	78,5	0	64,6	35,4	0
11	DKI Jakarta	336	60,7	36,3	3,0	27,4	69,6	3,0	87,5	9,5	3,0
12	Jawa Barat	1031	95,4	3,5	1,1	24,2	74,7	1,1	85,5	13,5	1,1
13	Jawa Tengah	861	96,9	3,0	0,1	26,8	73,1	0,1	92,0	7,8	0,2
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0	0	19,8	80,2	0	98,3	1,7	0
15	Jawa Timur	949	95,2	3,9	0,9	36,9	62,2	0,9	91,7	7,4	0,9
16	Banten	206	95,1	4,9	0	21,4	78,6	0	87,4	12,6	0
17	Bali	114	97,4	2,6	0	23,7	76,3	0	92,1	7,9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	94,0	6,0	0	27,5	71,8	0,7	89,3	10,7	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	92,7	7,0	0,3	10,9	88,7	0,3	63,9	35,8	0,3
20	Kalimantan Barat	233	86,3	13,7	0	12,4	87,6	0	84,5	15,5	0
21	Kalimantan Tengah	176	75,0	21,6	3,4	10,8	85,8	3,4	59,7	36,9	3,4
22	Kalimantan Selatan	217	92,6	6,9	0,5	18,9	80,6	0,5	68,2	31,3	0,5
23	Kalimantan Timur	213	82,6	17,4	0	16,0	84,0	0	73,2	26,8	0
24	Sulawesi Utara	167	88,0	12,0	0	15,0	85,0	0	72,5	27,5	0
25	Sulawesi Tengah	163	90,8	8,6	0,6	21,5	77,9	0,6	60,1	39,3	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	96,1	3,2	0,7	26,6	72,7	0,7	82,5	16,7	0,7
27	Sulawesi Tenggara	233	89,7	10,3	0	23,2	76,8	0	78,1	21,9	0
28	Gorontalo	74	94,6	4,1	1,4	25,7	73,0	1,4	82,4	16,2	1,4
29	Sulawesi Barat	81	85,2	13,6	1,2	21,0	77,8	1,2	55,6	43,2	1,2
30	Maluku	161	66,5	28,0	5,6	20,5	73,9	5,6	42,2	52,2	5,6
31	Maluku Utara	101	74,3	18,8	6,9	33,7	59,4	6,9	58,4	34,7	6,9
32	Papua Barat	104	47,1	51,9	1,0	10,6	88,5	1,0	24,0	75,0	1,0
33	Papua	294	26,2	69,7	4,1	9,9	86,1	4,1	18,0	77,9	4,1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	86,8	12,2	1,0	26,4	72,6	1,0	86,1	12,9	1,0
2	Perdesaan	6660	85,9	13,0	1,1	23,0	76,0	1,1	72,4	26,5	1,1
	INDONESIA	**8981**	**86,1**	**12,8**	**1,0**	**23,9**	**75,1**	**1,0**	**75,9**	**23,0**	**1,1**

Tabel 4.8.2.1.c
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelayanan Klinik Sanitasi			Kegiatan Lengkap Program Kesehatan Lingkungan		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	11,6	87,8	0,6	3,2	96,1	0,6
2	Sumatera Utara	506	39,5	60,3	0,2	9,7	90,1	0,2
3	Sumatera Barat	248	77,4	22,6	0	17,7	82,3	0
4	Riau	195	65,6	32,3	2,1	23,6	74,4	2,1
5	Jambi	171	45,6	53,2	1,2	12,3	86,5	1,2
6	Sumatera Selatan	298	61,7	37,9	0,3	14,8	84,9	0,3
7	Bengkulu	173	16,8	79,8	3,5	5,8	90,8	3,5
8	Lampung	265	55,8	42,3	1,9	11,7	86,4	1,9
9	Bangka Belitung	57	89,5	10,5	0	17,5	82,5	0
10	Kepulauan Riau	65	20,0	80,0	0	9,2	90,8	0
11	DKI Jakarta	336	20,2	76,5	3,3	10,4	86,3	3,3
12	Jawa Barat	1031	60,6	38,3	1,1	14,2	84,8	1,1
13	Jawa Tengah	861	63,3	36,5	0,2	17,4	82,5	0,1
14	DI Yogyakarta	121	83,5	16,5	0	13,2	86,8	0
15	Jawa Timur	949	50,7	48,5	0,8	21,1	78,0	0,9
16	Banten	206	52,9	47,1	0	9,7	90,3	0
17	Bali	114	55,3	44,7	0	13,2	86,8	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	78,5	21,5	0	17,4	81,9	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	58,9	40,7	0,3	4,0	95,7	0,3
20	Kalimantan Barat	233	60,5	39,5	0	9,4	90,6	0
21	Kalimantan Tengah	176	25,6	70,5	4,0	2,8	93,8	3,4
22	Kalimantan Selatan	217	82,0	17,5	0,5	14,7	84,8	0,5
23	Kalimantan Timur	213	41,3	58,7	0	8,0	92,0	0
24	Sulawesi Utara	167	38,9	61,1	0	4,8	95,2	0
25	Sulawesi Tengah	163	64,4	35,0	0,6	9,8	89,6	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	62,8	36,5	0,7	13,8	85,5	0,7
27	Sulawesi Tenggara	233	34,3	65,7	0	8,6	91,4	0
28	Gorontalo	74	51,4	45,9	2,7	13,5	85,1	1,4
29	Sulawesi Barat	81	33,3	65,4	1,2	8,6	90,1	1,2
30	Maluku	161	32,9	60,9	6,2	1,9	92,5	5,6
31	Maluku Utara	101	34,7	58,4	6,9	11,9	81,2	6,9
32	Papua Barat	104	15,4	83,7	1,0	1,9	97,1	1,0
33	Papua	294	12,2	83,7	4,1	1,4	94,6	4,1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	57,0	41,9	1,1	15,7	83,2	1,1
2	Perdesaan	6660	47,8	51,1	1,1	11,1	87,8	1,1
	INDONESIA	**8981**	**50,2**	**48,7**	**1,1**	**12,3**	**86,6**	**1,1**

4.8.2.2. Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan

Pelatihan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Lingkunganyang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi Pelatihan Air Minum/Bersih, Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman, Pelatihan Pengelolaan Sampah, dan Pelatihan Pengelolaan Air Limbahyang diikuti petugas puskesmas pada tahun 2009 dan 2010 . Secara nasional, dari keempat jenis pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, Pelatihan air bersih/minum merupakan persentase tertinggi yang diikuti petugas (28,3%) disusul oleh Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman (19,3%), Pelatihan Pengelolaan Air Limbah (11,8%) dan Pelatihan Pengelolaan Sampah (11,6%). Secara nasional sebesar 7,4 persen Puskesmas mengikuti lengkap keempat jenis pelatihan tersebut, sementara 19,5 persen tidak lengkap(Tabel 4.8.2.2.a-b).

Secara nasional persentase Puskesmas mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/ Minum adalah sebesar 28,3 persen, sedangkan 70,6 persen tidak mengikuti. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/ Minum terdapat di Provinsi Sumatera Selatan (49,3%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (47,2%), dan Provinsi Sulawesi Barat (44,4%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/ Minum ditemukan pada Provinsi Bali (2,6%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (10,3%) dan Provinsi Papua (10,9%). Secara nasional, persentase puskesmas perdesaan lebih tinggi mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/ Minum dibandingan dengan Puskesmas perkotaan yaitu 28,18 persen pada perdesaan dan 27,1 persen pada perkotaan.

Secara nasional persentase Puskesmas mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/ Minum adalah sebesar 19,3 persen, sedangkan 79,6 persen tidak mengikuti. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan Sanitasi Makanan/ Minuman terdapat di Provinsi Bangka Belitung (56,1%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan (34,9%), dan Provinsi Banten (34,0%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pelatihan Sanitasi Makanan/ Minuman dapat ditemukan pada Provinsi Bali (3,5%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (5,6%) dan Provinsi Papua (5,8%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan mengikuti pelatihan Sanitasi Makanan/ Minuman lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 22,58 persen pada perkotaan dan 18,1 persen pada perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah adalah sebesar 11,6 persen, sedangkan 87,3 persen tidak mengikuti.Persentase Puskesmastertinggi mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (24,0%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (22,0%), dan Provinsi Sumatera Selatan (20,8%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah ditemukan pada Provinsi Sulawesi Tenggara (1,7%), diikuti oleh Provinsi Maluku Utara (3,0%) dan Provinsi Kepulauan Riau (3,1%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 14,6 persen pada perkotaan dan 10,5 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.2.2.a
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Air Minum/Bersih			Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman			Pelatihan Pengelolaan Sampah		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	33.4	65.6	1.0	15.1	83.9	1.0	18.0	81.0	1.0
2	Sumatera Utara	506	16.2	83.4	0.4	14.8	84.8	0.4	7.5	92.1	0.4
3	Sumatera Barat	248	47.2	52.8	0	22.2	77.8	0	12.1	87.9	0
4	Riau	195	34.9	63.1	2.1	24.1	73.3	2.6	10.8	86.7	2.6
5	Jambi	171	43.3	56.1	0.6	23.4	76.0	0.6	14.6	84.8	0.6
6	Sumatera Selatan	298	49.3	50.3	0.3	34.9	64.8	0.3	20.8	78.9	0.3
7	Bengkulu	173	30.1	66.5	3.5	15.6	80.3	4.0	7.5	88.4	4.0
8	Lampung	265	14.7	83.8	1.5	18.9	79.6	1.5	6.0	92.1	1.9
9	Bangka Belitung	57	33.3	66.7	0	56.1	43.9	0	3.5	96.5	0
10	Kepulauan Riau	65	16.9	83.1	0	15.4	84.6	0	3.1	96.9	0
11	DKI Jakarta	336	19.9	77.1	3.0	15.2	81.8	3.0	11.6	85.4	3.0
12	Jawa Barat	1031	32.2	66.6	1.2	32.8	66.1	1.1	22.5	76.4	1.1
13	Jawa Tengah	861	35.7	64.1	0.2	16.0	83.7	0.2	9.9	89.9	0.2
14	DI Yogyakarta	121	31.4	68.6	0	20.7	79.3	0	24.0	76.0	0
15	Jawa Timur	949	16.1	83.1	0.7	18.0	81.2	0.7	11.4	87.9	0.7
16	Banten	206	33.5	66.5	0	34.0	66.0	0	20.4	79.6	0
17	Bali	114	2.6	96.5	0.9	3.5	95.6	0.9	3.5	95.6	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	24.2	75.8	0	19.5	80.5	0	8.7	91.3	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	38.7	60.9	0.3	10.3	89.4	0.3	12.3	87.4	0.3
20	Kalimantan Barat	233	39.1	60.9	0	23.6	76.4	0	10.3	89.7	0
21	Kalimantan Tengah	176	31.3	64.8	4.0	13.6	83.0	3.4	5.7	90.3	4.0
22	Kalimantan Selatan	217	29.5	70.0	0.5	25.3	74.2	0.5	9.2	90.3	0.5
23	Kalimantan Timur	213	30.0	70.0	0	19.2	80.3	0.5	8.5	91.1	0.5
24	Sulawesi Utara	167	12.0	88.0	0	7.2	92.8	0	3.6	96.4	0
25	Sulawesi Tengah	163	38.7	60.1	1.2	22.1	76.7	1.2	14.1	84.7	1.2
26	Sulawesi Selatan	406	35.0	64.3	0.7	18.7	80.5	0.7	6.2	93.1	0.7
27	Sulawesi Tenggara	233	10.3	89.7	0	5.6	94.4	0	1.7	98.3	0
28	Gorontalo	74	41.9	56.8	1.4	18.9	79.7	1.4	9.5	89.2	1.4
29	Sulawesi Barat	81	44.4	54.3	1.2	16.0	81.5	2.5	11.1	86.4	2.5
30	Maluku	161	29.8	64.0	6.2	7.5	86.3	6.2	7.5	86.3	6.2
31	Maluku Utara	101	20.8	73.3	5.9	6.9	87.1	5.9	3.0	91.1	5.9
32	Papua Barat	104	13.5	85.6	1.0	9.6	89.4	1.0	9.6	89.4	1.0
33	Papua	294	10.9	85.0	4.1	5.8	90.1	4.1	5.1	90.8	4.1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	27.1	71.7	1.1	22.5	76.4	1.1	14.6	84.3	1.2
2	Perdesaan	6660	28.7	70.2	1.1	18.1	80.8	1.1	10.5	88.3	1.1
	INDONESIA	**8981**	**28.3**	**70.6**	**1.1**	**19.3**	**79.6**	**1.1**	**11.6**	**87.3**	**1.1**

Tabel 4.8.2.2.b
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jml Pusk	Pelatihan Pengelolaan Air Limbah			Pelatihan Lengkap KesLing		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	16.7	82.3	1.0	6.8	92.3	1.0
2	Sumatera Utara	506	9.1	90.5	0.4	5.9	93.7	0.4
3	Sumatera Barat	248	14.1	85.9	0	8.1	91.9	0
4	Riau	195	13.3	84.1	2.6	7.7	89.7	2.6
5	Jambi	171	14.0	85.4	0.6	11.1	88.3	0.6
6	Sumatera Selatan	298	18.5	81.2	0.3	14.1	85.6	0.3
7	Bengkulu	173	11.0	85.0	4.0	6.4	89.6	4.0
8	Lampung	265	6.8	91.3	1.9	5.7	92.5	1.9
9	Bangka Belitung	57	5.3	94.7	0	3.5	96.5	0
10	Kepulauan Riau	65	7.7	92.3	0	3.1	96.9	0
11	DKI Jakarta	336	13.4	83.6	3.0	8.0	89.0	3.0
12	Jawa Barat	1031	20.6	78.4	1.1	13.6	85.3	1.2
13	Jawa Tengah	861	11.0	88.7	0.2	7.3	92.5	0.2
14	DI Yogyakarta	121	24.0	76.0	0	10.7	89.3	0
15	Jawa Timur	949	12.2	87.0	0.7	6.1	93.2	0.7
16	Banten	206	15.5	84.5	0	10.2	89.8	0
17	Bali	114	3.5	95.6	0.9	2.6	96.5	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	9.4	90.6	0	6.0	94.0	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	12.9	86.8	0.3	6.6	93.0	0.3
20	Kalimantan Barat	233	10.7	89.3	0	7.7	92.3	0
21	Kalimantan Tengah	176	7.4	88.6	4.0	4.5	91.5	4.0
22	Kalimantan Selatan	217	7.4	92.2	0.5	5.1	94.5	0.5
23	Kalimantan Timur	213	7.5	92.0	0.5	6.6	93.0	0.5
24	Sulawesi Utara	167	3.6	96.4	0	1.2	98.8	0
25	Sulawesi Tengah	163	17.8	81.0	1.2	11.7	87.1	1.2
26	Sulawesi Selatan	406	7.9	91.4	0.7	4.9	94.3	0.7
27	Sulawesi Tenggara	233	2.1	97.9	0	1.3	98.7	0
28	Gorontalo	74	10.8	87.8	1.4	9.5	89.2	1.4
29	Sulawesi Barat	81	13.6	84.0	2.5	8.6	88.9	2.5
30	Maluku	161	4.3	89.4	6.2	3.7	90.1	6.2
31	Maluku Utara	101	3.0	91.1	5.9	2.0	92.1	5.9
32	Papua Barat	104	6.7	92.3	1.0	4.8	94.2	1.0
33	Papua	294	4.8	91.2	4.1	3.1	92.9	4.1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	13.8	85.0	1.2	8.6	90.3	1.2
2	Perdesaan	6660	11.1	87.8	1.1	7.0	91.9	1.1
	INDONESIA	**8981**	**11.8**	**87.1**	**1.1**	**7.4**	**91.5**	**1.1**

4.8.2.3. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan

Pedoman Program Kesehatan Lingkungan diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Buku pedoman Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, dan Permenkes Tentang Persyaratan Kualitas Air minum. Secara nasional pedoman Program Kesehatan Lingkungan terbanyak dimiliki oleh puskesmas adalah Pedoman penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan (46,8%) kemudian berturut turut Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (45,1%) dan Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah (37,3%). Secara nasional persentase Puskesmasmemiliki lengkap ketiga jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 29,4 persen sementara 69,5 persen memiliki pedoman yang tidak lengkap (Tabel 4.8.2.3a-b).

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah adalah sebesar 37,3 persen, sedangkan 61,7 persen tidak memiliki. Persentase tertinggi puskesmas memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (64,5%) dan diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (56,9%) dan Provinsi Jawa Tengah (53,2%). Persentase terendah puskesmas memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah dapat ditemukan pada Provinsi Papua (17,0%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku (17,4%) dan Provinsi Sulawesi Tengara (18,0%). Secara nasional persentase kepemilikan pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah di perkotaan lebih tinggi dibandingan pada Puskesmas perdesaan yaitu 41,2% di Puskesmas perkotaan dan 35,9% di puskesmas perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air adalah sebesar 46,8 persen, sedangkan 52,1 persen tidak memiliki dan 1,1 persen tidak memiliki data. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air dapat ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (73,6%) dan diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (69,4%) dan Provinsi Kalimantan Timur (63,4%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air dapat ditemukan pada Provinsi Maluku (19,3%) dan diikuti oleh Provinsi Papua (19,4%) dan Provinsi Maluku Utara (21,1%). Secara nasional persentase kepemilikan Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air di perkotaan lebih tinggi dibandingan pada Puskesmas perdesaan yaitu 50,1 persen di Puskesmas perkotaan dan 43,4 persen di puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.2.3.a
Persentase Puskesmasmenurut Kepemilikan Pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Penyelenggaraan Kesling di Sekolah			Pedoman Penyelenggaraan Kesling			Permenkes ttg Persyaratan Kualitas Air		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	21.2	77.8	1.0	28.0	71.1	1.0	29.3	69.8	1.0
2	Sumatera Utara	506	22.5	77.1	0.4	30.6	69.0	0.4	25.9	73.7	0.4
3	Sumatera Barat	248	56.9	43.1	0	74.6	25.0	0.4	69.4	30.6	
4	Riau	195	41.5	56.4	2.1	48.7	49.2	2.1	48.2	49.2	2.6
5	Jambi	171	32.2	67.3	0.6	49.7	49.7	0.6	48.0	51.5	0.6
6	Sumatera Selatan	298	45.6	54.0	0.3	52.7	47.0	0.3	50.0	49.7	0.3
7	Bengkulu	173	27.2	69.4	3.5	34.7	61.8	3.5	32.9	63.6	3.5
8	Lampung	265	35.5	63.0	1.5	52.8	45.3	1.9	49.8	48.3	1.9
9	Bangka Belitung	57	28.1	71.9	0	40.4	59.6	0	57.9	42.1	0
10	Kepulauan Riau	65	21.5	78.5	0	24.6	75.4	0	29.2	70.8	0
11	DKI Jakarta	336	34.5	62.5	3.0	35.1	61.9	3.0	31.5	65.2	3.3
12	Jawa Barat	1031	52.1	46.8	1.1	60.1	38.8	1.1	56.2	42.8	1.1
13	Jawa Tengah	861	53.2	46.6	0.2	62.4	37.4	0.2	56.2	43.6	0.2
14	DI Yogyakarta	121	64.5	35.5	0	76.0	24.0	0	73.6	26.4	0
15	Jawa Timur	949	42.4	57.0	0.6	54.8	44.6	0.6	54.6	44.8	0.6
16	Banten	206	44.7	55.3	0	59.2	40.8	0	55.3	44.7	0
17	Bali	114	34.2	65.8	0	47.4	52.6	0	63.2	36.8	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	38.3	61.7	0	51.0	49.0	0	45.6	53.7	0.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	27.2	72.5	0.3	34.1	65.6	0.3	32.8	66.9	0.3
20	Kalimantan Barat	233	36.5	63.1	0.4	46.8	52.8	0.4	47.6	51.9	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	23.9	72.7	3.4	34.1	61.9	4.0	36.4	60.2	3.4
22	Kalimantan Selatan	217	40.1	59.4	0.5	54.4	45.2	0.5	53.9	45.6	0.5
23	Kalimantan Timur	213	40.4	59.6	0	57.3	42.7	0	63.4	36.6	0
24	Sulawesi Utara	167	19.8	80.2	0	28.1	71.9	0	29.3	70.7	0
25	Sulawesi Tengah	163	30.1	68.1	1.8	39.9	58.9	1.2	43.6	54.6	1.8
26	Sulawesi Selatan	406	30.8	68.5	0.7	36.9	62.3	0.7	41.6	57.6	0.7
27	Sulawesi Tenggara	233	18.0	82.0	0	31.8	68.2	0	23.6	76.4	0
28	Gorontalo	74	20.3	78.4	1.4	32.4	66.2	1.4	29.7	68.9	1.4
29	Sulawesi Barat	81	35.8	61.7	2.5	35.8	61.7	2.5	40.7	56.8	2.5
30	Maluku	161	17.4	77.0	5.6	20.5	73.9	5.6	19.3	75.2	5.6
31	Maluku Utara	101	19.8	74.3	5.9	28.7	65.3	5.9	21.8	72.3	5.9
32	Papua Barat	104	30.8	68.3	1.0	31.7	67.3	1.0	26.9	72.1	1.0
33	Papua	294	17.0	78.9	4.1	22.1	73.8	4.1	19.4	76.5	4.1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	41.2	57.7	1.0	51.3	47.7	1.0	50.1	48.9	1.1
2	Perdesaan	6660	35.9	63.0	1.1	45.2	53.6	1.1	43.4	55.5	1.1
	INDONESIA	**8981**	**37.3**	**61.7**	**1.1**	**46.8**	**52.1**	**1.1**	**45.1**	**53.8**	**1.1**

Tabel 4.8.2.3.b
Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Lengkap Kesehatan Lingkungan		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	18.0	81.0	1.0
2	Sumatera Utara	506	15.6	84.0	0.4
3	Sumatera Barat	248	45.2	54.4	0.4
4	Riau	195	33.8	64.1	2.1
5	Jambi	171	26.3	73.1	0.6
6	Sumatera Selatan	298	35.6	64.1	0.3
7	Bengkulu	173	21.4	75.1	3.5
8	Lampung	265	30.2	67.9	1.9
9	Bangka Belitung	57	21.1	78.9	0
10	Kepulauan Riau	65	18.5	81.5	0
11	DKI Jakarta	336	24.1	72.6	3.3
12	Jawa Barat	1031	40.0	59.0	1.1
13	Jawa Tengah	861	41.7	58.1	0.2
14	DI Yogyakarta	121	51.2	48.8	0
15	Jawa Timur	949	33.8	65.5	0.6
16	Banten	206	37.9	62.1	0
17	Bali	114	29.8	70.2	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	30.9	69.1	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	18.5	81.1	0.3
20	Kalimantan Barat	233	30.0	69.5	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	19.3	76.7	4.0
22	Kalimantan Selatan	217	31.8	67.7	0.5
23	Kalimantan Timur	213	33.3	66.7	0
24	Sulawesi Utara	167	16.2	83.8	0
25	Sulawesi Tengah	163	25.2	73.0	1.8
26	Sulawesi Selatan	406	22.9	76.4	0.7
27	Sulawesi Tenggara	233	15.9	84.1	0
28	Gorontalo	74	16.2	82.4	1.4
29	Sulawesi Barat	81	29.6	67.9	2.5
30	Maluku	161	14.9	79.5	5.6
31	Maluku Utara	101	16.8	77.2	5.9
32	Papua Barat	104	24.0	75.0	1.0
33	Papua	294	13.6	82.3	4.1
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	32.7	66.2	1.1
2	Perdesaan	6660	28.2	70.7	1.1
	INDONESIA	**8981**	**29.4**	**69.5**	**1.1**

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki petunjuk teknis dan pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap sebesar 29,4 persen, sedangkan 69,5 persen tidak lengkap. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki pedoman Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap (yaitu memiliki ketiga jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) dapat ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (51,2%) dan diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (45,2%) dan Provinsi Jawa Tengah (41,7%). Persentase terendah Puskesmas memiliki pedoman Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap dapat ditemukan pada Provinsi Papua (13,6%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku (14,9%) dan Provinsi Sumatera Utara (15,6%). Secara nasional persentase kepemilikan pedoman Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap di perdesaan lebih tinggi dibandingan pada Puskesmas perkotaan yaitu 32,7 persen di Puskesmas perdesaan dan 28,2 persen di puskesmas perkotaan.

4.8.2.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Kesehatan Lingkungan untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi (monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Secara nasional bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Program Kesehatan Lingkungan adalah dalam bentuk pertemuan monev yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (64,4%) dan supervisi oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas (64,3%) kemudian umpan balik (51,7%). Secara nasional perentase Puskesmas menerima lengkap (dalam bentuk kunjungan supervise, umpan balik dan pertemuan monev oleh Dinas Kesehatan) Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan adalah sebesar 40,7 persen sementara 58,1 persen tidak menerima lengkap (Tabel 4.8.2.4.a-b).

Secara nasional persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan adalah sebesar 64,3 persen, sedangkan 34,6 persen tidak menerima. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Lingkungan ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (89,9%) kemudian diikuti oleh Provinsi Gorontalo (83,8%) dan Provinsi Banten (81,1%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Lingkungan di Puskesmas ditemukan pada Provinsi Papua (13,6%) kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku (14,9%) dan Provinsi Sumatera Utara (15,6%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Lingkungan hampir sama dengan Puskesmas perdesaan yaitu 64,6 persenpada puskesmas perkotaan dan 64,2 persenpada puskesmas perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk umpan balikadalah sebesar 51,7 persen, sedangkan 47,0 persen tidak menerima. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Lingkungan ditemukan pada Provinsi Jawa Tengah (75,5%) kemudian diikuti oleh Provinsi DI. Yogyakarta (74,4%) dan Provinsi Jawa Barat (73,2%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Lingkungan ditemukan pada Provinsi Papua (14,6%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua Barat (15,4%) dan Provinsi Maluku (22,4%).Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Lingkungan hampir sama dengan Puskesmas pedesaan yaitu 51,7 persen pada puskesmas perdesaan dan 51,8 persen pada Puskesmas perkotaan.

Tabel 4.8.2.4.a
Persentase Puskesmasmenurut Pengawasan, Evaluasi dan BimbinganProgram Kesehatan Lingkungan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Supervisi Dinkes			Umpan Balik			Pertemuan Monev		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	42.8	55.9	1.3	27.7	71.1	1.3	40.8	57.6	1.6
2	Sumatera Utara	506	50.0	49.8	0.2	31.0	68.8	0.2	51.6	48.2	0.2
3	Sumatera Barat	248	69.8	30.2	0	56.0	44.0	0	82.3	17.7	0
4	Riau	195	64.1	33.3	2.6	57.9	40.0	2.1	60.0	37.9	2.1
5	Jambi	171	64.3	35.1	0.6	52.6	46.8	0.6	69.0	30.4	0.6
6	Sumatera Selatan	298	73.2	26.5	0.3	58.4	41.3	0.3	64.8	34.9	0.3
7	Bengkulu	173	48.0	48.6	3.5	36.4	60.1	3.5	36.4	59.5	4.0
8	Lampung	265	66.8	31.3	1.9	43.0	55.1	1.9	55.5	43.0	1.5
9	Bangka Belitung	57	66.7	33.3	0	52.6	47.4	0	70.2	29.8	0
10	Kepulauan Riau	65	46.2	53.8	0	33.8	66.2	0	38.5	61.5	0
11	DKI Jakarta	336	43.8	52.7	3.6	36.0	59.8	4.2	47.6	48.8	3.6
12	Jawa Barat	1031	77.1	21.7	1.2	73.2	25.6	1.2	86.3	12.4	1.3
13	Jawa Tengah	861	80.6	19.2	0.2	75.5	24.2	0.3	87.7	12.1	0.2
14	DI Yogyakarta	121	77.7	22.3	0	74.4	24.8	0.8	96.7	3.3	0
15	Jawa Timur	949	79.1	20.2	0.6	64.0	35.3	0.7	85.0	14.1	0.8
16	Banten	206	81.1	18.9	0	65.0	34.5	0.5	85.9	14.1	0
17	Bali	114	55.3	44.7	0	30.7	69.3	0	68.4	31.6	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	89.9	9.4	0.7	73.2	25.5	1.3	96.0	3.4	0.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	58.9	40.1	1.0	41.4	57.6	1.0	62.3	36.8	1.0
20	Kalimantan Barat	233	62.7	37.3	0	57.5	42.5	0	62.2	37.8	0
21	Kalimantan Tengah	176	46.6	50.0	3.4	30.1	66.5	3.4	29.5	66.5	4.0
22	Kalimantan Selatan	217	73.7	25.8	0.5	44.7	54.8	0.5	72.4	26.7	0.9
23	Kalimantan Timur	213	55.9	44.1	0	33.3	66.7	0	48.4	51.6	0
24	Sulawesi Utara	167	61.1	38.3	0.6	43.1	56.3	0.6	41.9	56.9	1.2
25	Sulawesi Tengah	163	48.5	50.3	1.2	38.7	60.1	1.2	41.1	57.7	1.2
26	Sulawesi Selatan	406	76.8	22.4	0.7	54.7	44.6	0.7	72.2	26.8	1.0
27	Sulawesi Tenggara	233	54.5	45.5	0	46.4	53.6	0	33.0	67.0	0
28	Gorontalo	74	83.8	14.9	1.4	63.5	35.1	1.4	83.8	14.9	1.4
29	Sulawesi Barat	81	71.6	27.2	1.2	54.3	44.4	1.2	67.9	30.9	1.2
30	Maluku	161	26.7	67.7	5.6	22.4	72.0	5.6	11.2	82.6	6.2
31	Maluku Utara	101	36.6	57.4	5.9	26.7	67.3	5.9	19.8	74.3	5.9
32	Papua Barat	104	26.9	71.2	1.9	15.4	82.7	1.9	19.2	78.8	1.9
33	Papua	294	18.4	77.6	4.1	14.6	81.3	4.1	13.3	82.7	4.1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	64.6	34.1	1.3	51.8	46.7	1.5	65.5	33.2	1.3
2	Perdesaan	6660	64.2	34.7	1.1	51.7	47.2	1.1	64.1	34.7	1.2
	INDONESIA	**8981**	**64.3**	**34.6**	**1.1**	**51.7**	**47.0**	**1.2**	**64.4**	**34.3**	**1.2**

Secara nasional persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk pertemuan monitoring dan evaluasi adalah sebesar 64,4 persen, sedangkan 34,3 persen tidak menerima. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (96,7%) kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (96,0%) dan Provinsi Jawa Tengah (87,7%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi Maluku

(11,2%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua (13,3%) dan Provinsi Papua Barat (19,2%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan sedikit lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 65,5 persen di perkotaan dibandingkan dengan 64,1 persen di perdesaan.

Tabel 4.8.2.4.b
Persentase Puskesmasmenurut Pengawasan, Evaluasi dan BimbinganProgram Kesehatan Lingkungan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan BimbinganLengkap		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	16.7	82.0	1.3
2	Sumatera Utara	506	22.9	76.9	0.2
3	Sumatera Barat	248	46.8	53.2	0
4	Riau	195	40.5	57.4	2.1
5	Jambi	171	33.9	65.5	0.6
6	Sumatera Selatan	298	46.0	53.7	0.3
7	Bengkulu	173	23.1	73.4	3.5
8	Lampung	265	31.7	66.8	1.5
9	Bangka Belitung	57	40.4	59.6	0
10	Kepulauan Riau	65	20.0	80.0	0
11	DKI Jakarta	336	29.5	66.7	3.9
12	Jawa Barat	1031	62.5	36.4	1.2
13	Jawa Tengah	861	66.6	33.1	0.3
14	DI Yogyakarta	121	60.3	38.8	0.8
15	Jawa Timur	949	55.8	43.5	0.6
16	Banten	206	59.7	39.8	0.5
17	Bali	114	25.4	74.6	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	66.4	32.9	0.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	25.2	73.8	1.0
20	Kalimantan Barat	233	41.2	58.8	0
21	Kalimantan Tengah	176	17.0	79.5	3.4
22	Kalimantan Selatan	217	37.3	62.2	0.5
23	Kalimantan Timur	213	22.1	77.9	0
24	Sulawesi Utara	167	25.7	73.7	0.6
25	Sulawesi Tengah	163	20.2	78.5	1.2
26	Sulawesi Selatan	406	45.1	54.2	0.7
27	Sulawesi Tenggara	233	20.2	79.8	0
28	Gorontalo	74	54.1	44.6	1.4
29	Sulawesi Barat	81	43.2	55.6	1.2
30	Maluku	161	6.8	87.0	6.2
31	Maluku Utara	101	13.9	80.2	5.9
32	Papua Barat	104	2.9	95.2	1.9
33	Papua	294	8.8	87.1	4.1
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	42.6	56.1	1.4
2	Perdesaan	6660	40.0	58.9	1.1
	INDONESIA	**8981**	**40.7**	**58.1**	**1.2**

Secara nasional persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap (ketiga jenis) adalah sebesar 40,7 persen, sedangkan 58,1 persen tidak menerima lengkap. Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Program Kesehatan Lingkungan ditemukan pada Provinsi Jawa Tengah (66,6%) kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (66,4%) dan Provinsi Jawa Barat (62,5%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap

ditemukan pada Provinsi Papua Barat (2,9%) kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku (6,8%) dan Provinsi Papua (8,8%).Secara nasional presentasi Puskesmas perkotaan menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 42,6 persen di perkotaan dibandingkan dengan 40, persen di perdesaan.

4.8.3. PROGRAM KESEHATAN IBU

4.8.3.1. Kegiatan Program Kesehatan Ibu

Kegiatan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Ibu yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas, Kelas Ibu (Hamil dan Nifas), dan Pelayanan Antenatal Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas pada tahun 2010. Secara nasional, dari keempat jenis kegiatan kesehatan ibu, kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (92,9%) dan disusul oleh Pelayanan Antenatal Terintegrasi (82,4%), dan Kemitraan Bidan dan Dukun (78,3%). Secara nasional sebesar 20,8 persen Puskesmas melakukan keempat kegiatan dalam Program Kesehatan Ibu, sementara 78,9 persen tidak lengkap keempat kegiatan (Tabel 4.8.3.1.a-b).

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) adalah sebesar 92,9 persen, persentase puskesmas tidak melakukan sebesar 6,9 persen. Terdapat tiga Provinsi yang seluruh Puskesmasnya melaksanakan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yaitu di Provinsi Bangka Belitung, DI Yogyakarta dan Bali (100%). Persentase puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)ditemukan pada Provinsi Papua (48%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (69,2%) dan Provinsi Maluku (77,6%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih rendah melakukan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dibandingan pada Puskesmas perdesaan, yaitu 91,9 persen pada perkotaan dan 93,3 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun di puskesmas adalah sebesar 78,3 persen, persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 21,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun di puskesmas terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (98%), kemudian diikuti oleh Provinsi Gorontalo (97,3%), dan Provinsi Sulawesi Tenggara (91,8%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas ditemukan pada Provinsi Bali (24,6%), diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta (28,3%)dan Provinsi Sumatera Utara (54,0%). Secara nasional, persentase puskesmas perdesaan lebih tinggi melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas dibandingan pada Puskesmas perkotaan yaitu 84,3 persen pada perdesaan dan 61,1 persen pada perkotaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas adalah sebesar 52,4 persen, persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 47,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas terdapat di Provinsi Sumatera Barat (91,9%), kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara

Barat (85,9%), dan Provinsi DI Yogyakarta (82,6%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas ditemukan pada Provinsi Papua (23,1%), diikuti oleh Provinsi Maluku (26,1%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (28,4%).Secara nasional, persentase Puskesmas dalam melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas lebih tinggi di puskesmas perkotaan dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 55,3 persen pada perkotaan dan 51,4 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.3.1.a
Persentase Puskesmas menurut KegiatanProgram Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	P4K			Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas			Kelas Ibu (Hamil dan Nifas)		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	88.4	11.6	0	68.2	31.8	0	36.0	64.0	0
2	Sumatera Utara	506	88.7	11.3	0	54.0	46.0	0	50.8	49.2	0
3	Sumatera Barat	248	96.0	4.0	0	57.3	42.7	0	91.9	8.1	0
4	Riau	195	96.9	2.6	0.5	77.9	21.5	0.5	41.5	57.9	0.5
5	Jambi	171	96.5	3.5	0	85.4	14.6	0	32.2	66.7	1.2
6	Sumatera Selatan	298	92.6	7.4	0	84.9	15.1	0	54.0	46.0	0
7	Bengkulu	173	89.0	10.4	0.6	81.5	17.9	0.6	39.3	60.1	0.6
8	Lampung	265	92.5	7.2	0.4	81.5	18.5	0	74.7	25.3	0
9	Bangka Belitung	57	100.0	0	0	78.9	21.1	0	75.4	24.6	0
10	Kepulauan Riau	65	92.3	7.7	0	60.0	40.0	0	29.2	70.8	0
11	DKI Jakarta	336	81.0	19.0	0	28.3	71.7	0	38.1	61.9	0
12	Jawa Barat	1031	97.3	2.5	0.2	91.8	8.0	0.3	62.4	37.2	0.4
13	Jawa Tengah	861	99.4	0.6	0	86.1	13.9	0	59.6	40.4	0
14	DI Yogyakarta	121	100.0	0	0	89.3	10.7	0	82.6	17.4	0
15	Jawa Timur	949	97.5	2.4	0.1	81.5	18.4	0.1	61.1	38.8	0.1
16	Banten	206	97.6	2.4	0	87.9	12.1	0	78.6	21.4	0
17	Bali	114	100.0	0	0	24.6	75.4	0	38.6	61.4	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	98.0	2.0	0	98.0	2.0	0	85.9	14.1	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	96.4	3.3	0.3	90.7	8.9	0.3	46.7	53.0	0.3
20	Kalimantan Barat	233	96.6	3.4	0	82.4	17.6	0	43.8	56.2	0
21	Kalimantan Tengah	176	93.8	6.3	0	79.0	21.0	0	28.4	71.6	0
22	Kalimantan Selatan	217	99.5	0.5	0	90.3	9.7	0	47.9	52.1	0
23	Kalimantan Timur	213	92.5	7.0	0.5	81.2	18.8	0	35.7	64.3	0
24	Sulawesi Utara	167	95.2	4.8	0	82.6	17.4	0	43.1	56.9	0
25	Sulawesi Tengah	163	96.3	3.1	0.6	87.7	11.7	0.6	60.7	39.3	0
26	Sulawesi Selatan	406	95.6	4.4	0	88.4	11.6	0	44.3	55.7	
27	Sulawesi Tenggara	233	97.9	2.1	0	91.8	8.2	0	41.2	58.4	0.4
28	Gorontalo	74	98.6	1.4	0	97.3	2.7	0	67.6	32.4	
29	Sulawesi Barat	81	97.5	1.2	1.2	90.1	8.6	1.2	49.4	49.4	1.2
30	Maluku	161	77.6	19.3	3.1	72.7	24.2	3.1	26.1	70.8	3.1
31	Maluku Utara	101	84.2	15.8	0	75.2	24.8	0	30.7	69.3	0
32	Papua Barat	104	69.2	30.8	0	68.3	31.7	0	36.5	63.5	0
33	Papua	294	48.0	51.4	0.7	54.1	45.6	0.3	23.1	76.5	0.3
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	91.9	7.9	0.2	61.1	38.8	0.1	55.3	44.5	0.2
2	Perdesaan	6660	93.3	6.5	0.2	84.3	15.5	0.2	51.4	48.4	0.2
	INDONESIA	**8981**	**92.9**	**6.9**	**0.2**	**78.3**	**21.5**	**0.2**	**52.4**	**47.4**	**0.2**

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi di puskesmas adalah sebesar 82,4 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 17,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi terdapat di Provinsi Bangka Belitung (94,7%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (94,4%), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (94%).

Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi ditemukan pada Provinsi Papua (45,2%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (59,6%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (69,3%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 83,5 persen pada perkotaan dan 82,0 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.3.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelayanan Antenatal Terintegrasi			Kegiatan Lengkap Kesehatan Ibu		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	83.9	16.1	0	26,0	74,0	
2	Sumatera Utara	506	75.1	24.9	0	26,5	73,5	
3	Sumatera Barat	248	94.4	5.2	0.4	50,0	49,6	,4
4	Riau	195	83.1	16.4	0.5	31,8	67,7	,5
5	Jambi	171	81.9	17.5	0.6	25,1	73,7	1,2
6	Sumatera Selatan	298	83.2	16.8	0	43,0	57,0	
7	Bengkulu	173	79.2	20.2	0.6	27,7	71,7	,6
8	Lampung	265	84.5	15.1	0.4	54,0	45,3	,8
9	Bangka Belitung	57	94.7	5.3	0	57,9	42,1	
10	Kepulauan Riau	65	78.5	21.5	0	16,9	83,1	
11	DKI Jakarta	336	74.1	25.9	0	12,8	87,2	
12	Jawa Barat	1031	88.2	11.6	0.2	51,0	48,6	,4
13	Jawa Tengah	861	87.0	12.9	0.1	46,8	53,1	,1
14	DI Yogyakarta	121	88.4	11.6	0	66,9	33,1	
15	Jawa Timur	949	86.1	13.5	0.4	44,9	54,7	,4
16	Banten	206	86.9	13.1	0	57,3	42,7	
17	Bali	114	88.6	11.4	0	7,0	93,0	
18	Nusa Tenggara Barat	149	94.0	6.0	0	80,5	19,5	
19	Nusa Tenggara Timur	302	91.1	8.6	0.3	41,4	58,3	,3
20	Kalimantan Barat	233	85.0	15.0	0	32,2	67,8	
21	Kalimantan Tengah	176	69.3	30.7	0	20,5	79,5	
22	Kalimantan Selatan	217	75.1	24.9	0	37,8	62,2	
23	Kalimantan Timur	213	81.2	18.8	0	24,4	75,1	,5
24	Sulawesi Utara	167	88.6	10.8	0.6	32,9	66,5	,6
25	Sulawesi Tengah	163	78.5	21.5	0	44,8	54,6	,6
26	Sulawesi Selatan	406	88.4	11.6	0	36,9	63,1	
27	Sulawesi Tenggara	233	73.0	27.0	0	31,3	68,2	,4
28	Gorontalo	74	83.8	16.2	0	56,8	43,2	
29	Sulawesi Barat	81	80.2	18.5	1.2	43,2	55,6	1,2
30	Maluku	161	73.3	23.6	3.1	17,4	79,5	3,1
31	Maluku Utara	101	81.2	18.8	0	22,8	77,2	
32	Papua Barat	104	59.6	40.4	0	25,0	75,0	
33	Papua	294	45.2	54.4	0.3	12,6	87,1	,3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	83.5	16.4	0.1	32.0	67.7	0.3
2	Perdesaan	6660	82.0	17.7	0.3	40.6	59.1	0.3
	INDONESIA	**8981**	**82.4**	**17.4**	**0.2**	**38.3**	**61.3**	**0.3**

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan lengkap terkait dengan Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 38,3 persen, persentase puskesmas tidak melakukan secara lengkap sebesar 61,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Kesehatan Ibu (seluruh kegiatan tersebut di atas dilakukan) terdapat

di Provinsi Nusa Tenggara Barat (80,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (66,9%), dan Provinsi Bangka Belitung (57,9%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan lengkap dalam Program Kesehatan Ibu (seluruh kegiatan tersebut di atas dilakukan) dapat ditemukan pada Bali (7,0%), diikuti oleh Provinsi Papua (12,6%) dan Provinsi DKI Jakarta (12,8%). Secara nasional, persentase Puskesmas perdesaan lebih tinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Kesehatan Ibu dibandingan dengan Puskesmas perkotaan yaitu 40,6 persen pada perdesaan dan 32,0 persen pada perkotaan.

4.8.3.2. Pelayanan Pertolongan Persalinan Dalam Gedung Puskesmas

Disamping kegiatan pelayanan seperti tersebut pada 4.8.3.1. dikumpulkan juga pelaksanaan Pelayanan Pertolongan Persalinan Dalam gedung sesuai himbauan Kementerian Kesehatan, dimana semua Puskesmas, baik Puskesmas Perawatan maupun Puskesmas Non Perawatan dihimbau untuk memberikan Pelayanan Persalinan Dalam gedung Puskesmas.

Tabel 4.8.3.2
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pelayanan Persalinan di Dalam Gedung Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelayanan Persalinan Dalam Gedung Puskesmas		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	48.9	51.1	0
2	Sumatera Utara	506	44.3	55.7	0
3	Sumatera Barat	248	44.0	56.0	0
4	Riau	195	43.6	55.9	0.5
5	Jambi	171	44.4	55.6	0
6	Sumatera Selatan	298	46.3	53.7	0
7	Bengkulu	173	37.0	62.4	0.6
8	Lampung	265	30.9	69.1	0
9	Bangka Belitung	57	43.9	56.1	0
10	Kepulauan Riau	65	49.2	50.8	0
11	DKI Jakarta	336	18.2	81.5	0.3
12	Jawa Barat	1031	41.8	57.9	0.3
13	Jawa Tengah	861	36.2	63.8	0
14	DI Yogyakarta	121	36.4	63.6	0
15	Jawa Timur	949	56.3	43.6	0.1
16	Banten	206	54.4	45.6	0
17	Bali	114	29.8	70.2	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	97.3	2.7	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	92.7	7.0	0.3
20	Kalimantan Barat	233	57.9	42.1	0
21	Kalimantan Tengah	176	42.6	57.4	0
22	Kalimantan Selatan	217	41.9	58.1	0
23	Kalimantan Timur	213	56.8	43.2	0
24	Sulawesi Utara	167	59.3	40.7	0
25	Sulawesi Tengah	163	62.0	38.0	0
26	Sulawesi Selatan	406	62.8	36.9	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	42.9	57.1	0
28	Gorontalo	74	59.5	39.2	1.4
29	Sulawesi Barat	81	66.7	32.1	1.2
30	Maluku	161	42.2	54.7	3.1
31	Maluku Utara	101	52.5	47.5	0
32	Papua Barat	104	53.8	46.2	0
33	Papua	294	49.7	50.0	0.3
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	30.6	69.3	0.1
2	Perdesaan	6660	54.5	45.3	0.2
	INDONESIA	**8981**	**48.3**	**51.5**	**0.2**

Tabel 4.8.3.2. menunjukkan, bahwa secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan melayani Persalinan Dalam gedung Puskesmas adalah 48,3 persen, persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 51,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan melayani Persalinan Dalam Gedung Puskesmas terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (97,3%), kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (92,7%), dan Provinsi Sulawesi Barat (66,7%). Secara nasional, persentase Puskesmas perdesaan lebih tinggi dalam melakukan kegiatan melayani Persalinan Dalam gedung Puskesmas dibandingkan dengan Puskesmas perkotaan yaitu 54,5 persen pada perdesaan dan 30,6 persen pada perkotaan.

4.8.3.3. Pelatihan Program Kesehatan Ibu

Pelatihan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Ibu yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelatihan Pemantauan Wilayah Setempat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) yang diikuti tenaga Puskesmaspada tahun 2009 dan 2010. Secara nasional, dari ketiga jenis pelatihan Program Kesehatan Ibu, pelatihan APN merupakan persentase tertinggi yang diikuti oleh Puskesmas (52,4%) disusul oleh pelatihan PWS KIA (41,5%), dan pelatihan PONED (0,2%). Secara nasional sebesar 10,1 persen Puskesmas mengikuti lengkap ketiga jenis pelatihan tersebut, sementara 89,6 persen tidak lengkap (Tabel 4.8.3.3.a-b).

Secara nasional, persentase Puskesmas mengikuti pelatihan APN adalah 52,4 persen, persentase puskesmas tidak mengikuti sebesar 47,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan APN terdapat di Provinsi Kepulauan Riau (92,3%), kemudian diikuti oleh Provinsi Gorontalo (81,1%), dan Provinsi Sulawesi Barat (75,3%). Sementara persentase Puskesmas terendah ditemukan pada Provinsi Bali (20,2%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (26,9%) dan Provinsi Bengkulu (27,2%).Secara nasional, persentase Puskesmasperdesaan mengikuti pelatihan APN lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perkotaan yaitu 53,4 persen pada perdesaan dan 49,6 persen pada perkotaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas mengikuti pelatihan PONED adalah sebesar 19,5 persen, persentase Puskesmastidak mengikuti sebesar 80,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan PONED terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (47,0%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (40,7%), dan Provinsi DI Yogyakarta (37,2%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pelatihan PONED ditemukan pada Provinsi Bengkulu (6,9%), diikuti oleh Provinsi Maluku (11,8%) dan Provinsi Lampung (12,5%). Secara nasional, persentase Puskesmas perdesaan mengikuti pelatihan PONED lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perkotaan yaitu 19,9 persen pada perdesaan dan 18,4 pada perkotaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas mengikuti pelatihan PWS KIA adalah sebesar 41,5 persen, persentase Puskesmastidak mengikuti sebesar 58,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan PWS KIA terdapat di Provinsi Gorontalo (63,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (56,2%), dan Provinsi Jambi (55,0%). Persentase puskesmas terendah mengikuti pelatihan PWS KIA ditemukan pada Provinsi Bengkulu (26,6%), diikuti oleh Provinsi Jawa Timur(30,0%) dan Provinsi Papua (26,6%).Secara nasional,

persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi mengikuti pelatihan PWS KIA dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 44,9 persen pada perkotaan dan 40,3 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas mengikuti pelatihan lengkap terkait dengan Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 10,1 persen, persentase Puskesmas tidak mengikuti sebesar 89,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan secara lengkap (ketiga jenis pelatihan tersebut di atas) dalam Program Kesehatan Ibu terdapat di Provinsi Sulawesi Barat (23,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (22,3%), dan Provinsi Kepulauan Riau (21,5%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pelatihan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu ditemukan pada Provinsi Bengkulu (5,2%), diikuti oleh Provinsi Lampung (5,3%) dan Provinsi Sumatera Utara (5,9%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan dan perdesaan hampir sama dalam mengikuti pelatihan lengkap dalam Program Kesehatan Ibu yaitu 10,3 persen pada perkotaan dan 10,0 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.3.3.a
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Program Kesehatan Ibu pada Tahun 2009-2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan APN			Pelatihan PONED			Pelatihan PWS-KIA		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	47.6	52.4	0	13.2	86.8	0	49.5	50.5	0
2	Sumatera Utara	506	41.7	58.3	0	13.4	86.6	0	38.9	61.1	0
3	Sumatera Barat	248	58.1	41.9	0	22.2	77.8	0	35.9	64.1	0
4	Riau	195	46.7	52.8	0.5	19.5	80.0	0.5	40.0	59.5	0.5
5	Jambi	171	49.1	50.9	0	17.5	82.5	0	55.0	45.0	0
6	Sumatera Selatan	298	60.4	39.6	0	24.5	75.5	0	52.0	48.0	0
7	Bengkulu	173	27.2	71.7	1.2	6.9	91.9	1.2	26.6	72.3	1.2
8	Lampung	265	41.1	58.5	0.4	12.5	86.8	0.8	33.6	65.7	0.8
9	Bangka Belitung	57	43.9	56.1	0	24.6	75.4	0	54.4	45.6	0
10	Kepulauan Riau	65	92.3	7.7	0	36.9	63.1	0	49.2	50.8	0
11	DKI Jakarta	336	34.2	65.8	0	12.5	87.5	0	43.8	56.3	0
12	Jawa Barat	1031	59.7	40.1	0.2	20.9	79.0	0.2	48.5	51.3	0.2
13	Jawa Tengah	861	65.2	34.8	0	21.1	78.9	0	33.0	67.0	0
14	DI Yogyakarta	121	60.3	39.7	0	37.2	62.8	0	56.2	43.8	0
15	Jawa Timur	949	57.4	42.5	0.1	14.8	85.0	0.2	30.0	69.9	0.1
16	Banten	206	65.5	34.5	0	27.2	72.8	0	51.0	49.0	0
17	Bali	114	20.2	79.8	0	25.4	74.6	0	54.4	45.6	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	60.4	39.6	0	47.0	53.0	0	32.9	65.1	2.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	71.5	27.8	0.7	25.8	73.5	0.7	46.4	53.0	0.7
20	Kalimantan Barat	233	54.1	45.9	0	18.5	81.5	0	40.8	59.2	0
21	Kalimantan Tengah	176	51.7	48.3	0	29.0	70.5	0.6	52.8	47.2	0
22	Kalimantan Selatan	217	44.7	55.3	0	20.3	79.3	0.5	47.9	51.6	0.5
23	Kalimantan Timur	213	57.7	42.3	0	21.6	78.4	0	45.5	54.5	0
24	Sulawesi Utara	167	26.9	73.1	0	16.8	83.2	0	37.1	62.9	0
25	Sulawesi Tengah	163	51.5	48.5	0	22.7	76.7	0.6	41.7	57.7	0.6
26	Sulawesi Selatan	406	45.1	54.9	0	19.7	80.3	0	34.2	65.5	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	44.2	55.4	0.4	14.6	85.0	0.4	51.5	48.1	0.4
28	Gorontalo	74	81.1	18.9	0	24.3	74.3	1.4	63.5	36.5	0
29	Sulawesi Barat	81	75.3	23.5	1.2	40.7	58.0	1.2	49.4	49.4	1.2
30	Maluku	161	32.3	64.6	3.1	11.8	85.1	3.1	49.7	47.2	3.1
31	Maluku Utara	101	50.5	49.5	0	19.8	80.2	0	46.5	53.5	0
32	Papua Barat	104	40.4	58.7	1.0	14.4	83.7	1.9	34.6	63.5	1.9
33	Papua	294	39.8	59.9	0.3	13.6	86.1	0.3	32.0	67.7	0.3
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	49.6	50.3	0.1	18.4	81.5	0.1	44.9	54.9	0.1
2	Perdesaan	6660	53.4	46.4	0.2	19.9	79.8	0.3	40.3	59.4	0.3
	INDONESIA	**8981**	**52.4**	**47.4**	**0.2**	**19.5**	**80.2**	**0.3**	**41.5**	**58.2**	**0.3**

Tabel 4.8.3.3.b
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Program Kesehatan Ibu pada Tahun 2009-2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Lengkap Kesehatan Ibu		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	7.7	92.3	0
2	Sumatera Utara	506	5.9	94.1	0
3	Sumatera Barat	248	10.1	89.9	0
4	Riau	195	9.7	89.7	0.5
5	Jambi	171	8.2	91.8	0
6	Sumatera Selatan	298	14.1	85.9	0
7	Bengkulu	173	5.2	93.6	1.2
8	Lampung	265	5.3	94.0	0.8
9	Bangka Belitung	57	8.8	91.2	0
10	Kepulauan Riau	65	21.5	78.5	0
11	DKI Jakarta	336	7.7	92.3	0
12	Jawa Barat	1031	11.4	88.4	0.2
13	Jawa Tengah	861	11.3	88.7	0
14	DI Yogyakarta	121	22.3	77.7	0
15	Jawa Timur	949	7.3	92.5	0.2
16	Banten	206	13.6	86.4	0
17	Bali	114	7.9	92.1	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	20.8	77.2	2.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	10.3	89.1	0.7
20	Kalimantan Barat	233	8.6	91.4	0
21	Kalimantan Tengah	176	12.5	86.9	0.6
22	Kalimantan Selatan	217	10.6	88.9	0.5
23	Kalimantan Timur	213	11.7	88.3	0
24	Sulawesi Utara	167	7.8	92.2	0
25	Sulawesi Tengah	163	12.9	86.5	0.6
26	Sulawesi Selatan	406	10.3	89.4	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	7.7	91.8	0.4
28	Gorontalo	74	16.2	82.4	1.4
29	Sulawesi Barat	81	23.5	75.3	1.2
30	Maluku	161	9.9	87.0	3.1
31	Maluku Utara	101	10.9	89.1	0
32	Papua Barat	104	8.7	89.4	1.9
33	Papua	294	7.5	92.2	0.3
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	10.3	89.5	0.1
2	Perdesaan	6660	10.0	89.6	0.4
	INDONESIA	**8981**	**10.1**	**89.6**	**0.3**

4.8.3.4. Pedoman Program Kesehatan Ibu

Pedoman Program Kesehatan Ibu diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Program Kesehatan Ibu,buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi, AcuanAsuhan Persalinan Normal (APN), Buku Kesehatan Ibu dan anak(KIA), Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Pedoman Kelas Ibu, Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil, Pedoman *Prevention of Mother To Child Transmission* (PMTCT), dan Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi, yang dimiliki oleh puskesmas.

Tabel 4.8.3.4.a-b-c-d menunjukkan, secara nasional pedoman Program Kesehatan Ibu terbanyak dimiliki oleh puskesmas adalah Buku KIA (88,2%) kemudian berturut turut Pedoman PWS-KIA (73,9%) dan Pedoman APN (69,5%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki keseluruhan jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 19,6 persen.

Tabel 4.8.3.4.a
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman untuk Melaksanakan Program Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman APN			Buku KIA			Pedoman P4K		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	53.7	46.3	0	85.2	14.8	0	40.8	59.2	0
2	Sumatera Utara	506	56.1	43.9	0	85.8	14.2	0	53.2	46.8	0
3	Sumatera Barat	248	70.2	29.8	0	94.4	5.6	0	56.5	43.5	0
4	Riau	195	63.1	36.4	0.5	85.1	14.4	0.5	61.5	37.4	1.0
5	Jambi	171	57.3	42.7	0	92.4	7.6	0	52.0	48.0	0
6	Sumatera Selatan	298	65.1	34.9	0	90.9	9.1	0	59.7	40.3	0
7	Bengkulu	173	42.2	57.2	0.6	79.8	19.7	0.6	39.9	59.5	0.6
8	Lampung	265	78.1	21.9	0	88.7	11.3	0	57.4	41.5	1.1
9	Bangka Belitung	57	77.2	22.8	0	98.2	1.8	0	63.2	36.8	0
10	Kepulauan Riau	65	81.5	18.5	0	93.8	6.2	0	58.5	41.5	0
11	DKI Jakarta	336	49.4	50.6	0	83.3	16.7	0	53.6	46.4	0
12	Jawa Barat	1031	83.9	15.8	0.3	88.7	11.2	0.2	71.6	28.1	0.3
13	Jawa Tengah	861	82.7	17.3	0	93.3	6.7	0	75.0	24.7	0.2
14	DI Yogyakarta	121	81.8	18.2	0	95.0	5.0	0	92.6	7.4	
15	Jawa Timur	949	84.3	15.4	0.3	94.4	5.5	0.1	67.5	32.0	0.4
16	Banten	206	81.6	18.4	0	87.4	12.6	0	73.3	26.7	0
17	Bali	114	46.5	53.5	0	96.5	3.5	0	98.2	1.8	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	83.9	16.1	0	91.3	8.7	0	66.4	33.6	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	78.1	21.5	0.3	90.1	9.6	0.3	61.3	38.4	0.3
20	Kalimantan Barat	233	82.0	18.0	0	94.4	5.6	0	70.8	29.2	0
21	Kalimantan Tengah	176	69.9	30.1	0	90.3	9.7	0	80.1	19.9	0
22	Kalimantan Selatan	217	54.8	45.2	0	85.7	14.3	0	55.3	44.7	0
23	Kalimantan Timur	213	79.8	20.2	0	90.6	9.4	0	67.1	32.9	0
24	Sulawesi Utara	167	33.5	66.5	0	74.9	25.1	0	37.7	62.3	0
25	Sulawesi Tengah	163	62.6	37.4	0	90.8	9.2	0	78.5	21.5	0
26	Sulawesi Selatan	406	56.2	43.8	0	89.7	10.3	0	56.9	42.9	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	70.4	29.6	0	90.6	9.4	0	54.1	45.9	0
28	Gorontalo	74	70.3	29.7	0	91.9	8.1	0	52.7	47.3	0
29	Sulawesi Barat	81	81.5	17.3	1.2	81.5	17.3	1.2	59.3	39.5	1.2
30	Maluku	161	42.2	54.7	3.1	73.3	23.6	3.1	37.9	58.4	3.7
31	Maluku Utara	101	49.5	49.5	1.0	75.2	23.8	1.0	49.5	49.5	1.0
32	Papua Barat	104	58.7	41.3	0	75.0	25.0	0	54.8	45.2	0
33	Papua	294	52.7	46.6	0.7	61.9	37.8	0.3	40.1	59.2	0.7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	65.7	34.3	0.1	89.1	10.8	0.1	63.0	36.8	0.1
2	Perdesaan	6660	70.9	28.9	0.2	87.8	12.0	0.2	61.7	37.9	0.4
	INDONESIA	**8981**	**69.5**	**30.3**	**0.2**	**88.2**	**11.7**	**0.2**	**62.0**	**37.7**	**0.3**

Secara nasional, persentase Puskesmasme milikipedoman APN adalah sebesar 69,5 persen, persentase puskesmas tidak memiliki sebesar 30,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman APN dapat ditemukan pada Provinsi Jawa Timur (84,3%) dan diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Barat (83,9%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman APN ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (33,5%) dan diikuti oleh Provinsi Bengkulu dan Provinsi Maluku (42,2%). Secara nasional persentase kepemilikan Pedoman APN di perdesaan lebih tinggi dibandingan dengan

Puskesmasperkotaan, yaitu 70,9 persen di puskemas perdesaan dan 65,7 persen di puskesmas perkotaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki pedoman P4K adalah sebesar 62,0 persen, persentase Puskesmastidak memiliki sebesar 37,7 persen. Persentase tertinggi puskesmas memiliki Pedoman P4K dapat ditemukan pada Provinsi Bali (98,2%) dan diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (92,6%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (80,1%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman P4K dapat ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (37,7%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku (37,9%) dan Provinsi Bengkulu (39,9%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman P4K di Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan, yaitu 63,0 persen di Puskesmas perkotaan dan 61,7 persen di puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.3.4.b
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman untuk Melaksanakan Program Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kes Maternal dan Neonatal			Pedoman Kelas Ibu		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	34.1	65.9	0	20.6	79.4	0
2	Sumatera Utara	506	41.7	58.3	0	29.1	70.9	0
3	Sumatera Barat	248	48.4	51.6	0	89.9	10.1	0
4	Riau	195	43.1	56.4	0.5	56.4	43.1	0,5
5	Jambi	171	58.5	41.5	0	44.4	55.6	0
6	Sumatera Selatan	298	49.3	50.7	0	39.3	60.4	0,3
7	Bengkulu	173	37.6	61.8	0.6	27.2	72.3	0,6
8	Lampung	265	44.2	55.5	0.4	63.4	36.6	0
9	Bangka Belitung	57	70.2	29.8	0	73.7	26.3	0
10	Kepulauan Riau	65	53.8	46.2	0	61.5	38.5	0
11	DKI Jakarta	336	45.5	54.5	0	44.6	55.4	0
12	Jawa Barat	1031	65.6	34.2	0.2	67.4	32.4	0,2
13	Jawa Tengah	861	62.5	37.5	0	58.7	41.2	0,1
14	DI Yogyakarta	121	66.1	33.9	0	95.0	5.0	0
15	Jawa Timur	949	72.3	27.2	0.5	63.1	36.5	0,4
16	Banten	206	55.8	44.2	0	73.8	26.2	0
17	Bali	114	47.4	52.6	0	74.6	25.4	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	63.8	36.2	0	82.6	17.4	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	63.6	36.1	0.3	36.8	62.6	0,7
20	Kalimantan Barat	233	59.2	40.8	0	64.8	35.2	0
21	Kalimantan Tengah	176	41.5	58.5	0	58.0	41.5	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	39.6	60.4	0	58.5	41.5	0
23	Kalimantan Timur	213	59.6	40.4	0	65.7	34.3	0
24	Sulawesi Utara	167	24.6	75.4	0	47.9	52.1	0
25	Sulawesi Tengah	163	60.7	39.3	0	71.2	28.8	0
26	Sulawesi Selatan	406	47.8	52.2	0	48.3	51.7	0
27	Sulawesi Tenggara	233	49.8	50.2	0	56.7	43.3	0
28	Gorontalo	74	50.0	50.0	0	66.2	33.8	0
29	Sulawesi Barat	81	49.4	49.4	1.2	53.1	45.7	1,2
30	Maluku	161	24.2	72.0	3.7	28.0	68.3	3,7
31	Maluku Utara	101	27.7	72.3	0	26.7	73.3	0
32	Papua Barat	104	43.3	56.7	0	38.5	61.5	0
33	Papua	294	40.1	58.8	1.0	27.6	71.4	1,0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	51.6	48.3	0.1	57.0	43.0	0.1
2	Perdesaan	6660	54.0	45.7	0.3	53.7	46.0	0.3
	INDONESIA	**8981**	**53.4**	**46.4**	**0.2**	**54.5**	**45.2**	**0.3**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki buku pegangan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal adalah sebesar 53,4 persen, persentase puskesmas tidak memiliki sebesar 46,4 persen.Persentase tertinggi puskesmas memiliki Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal dapat ditemukan pada Provinsi Jawa Timur (72,3%) dan diikuti oleh Provinsi Bangka Belitung (70,2%) dan Provinsi DI Yogyakarta (66,1%). Persentase terendah puskesmas memiliki Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal dapat ditemukan pada Provinsi Maluku (24,2%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi (24,6%) dan Provinsi Maluku Utara (27,7%). Secara nasional persentase ketersediaan Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal di perdesaan lebih tinggi dibandingan Puskesmasperkotaan yaitu 54,0 persen di puskemas perdesaan dan 51,6 persen di puskesmas perkotaan.

Tabel 4.8.3.4.c
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman dan Juknis dalam Melaksanakan Program Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman PWS-KIA			Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil			Pedoman PMTCT		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	64,3	35,4	0,3	36.7	63.3	0	20.9	79.1	0
2	Sumatera Utara	506	69,6	30,2	0,2	33.2	66.6	0.2	29.8	70.0	0.2
3	Sumatera Barat	248	64,9	35,1	0	32.7	67.3	0	31.0	69.0	0
4	Riau	195	69,7	29,7	0,5	39.0	60.5	0.5	31.3	68.2	0.5
5	Jambi	171	78,4	21,6	0	33.9	66.1	0	21.6	78.4	0
6	Sumatera Selatan	298	68,8	30,5	0,7	34.9	64.1	1.0	28.5	70.8	0.7
7	Bengkulu	173	46,2	53,2	0,6	42.2	57.2	0.6	27.7	71.7	0.6
8	Lampung	265	65,3	34,3	0,4	42.3	57.7	0	21.5	78.5	0
9	Bangka Belitung	57	82,5	17,5	0	63.2	36.8	0	35.1	64.9	0
10	Kepulauan Riau	65	81,5	18,5	0	49.2	50.8	0	47.7	52.3	0
11	DKI Jakarta	336	74,7	25,0	0,3	30.7	69.3	0	31.8	68.2	0
12	Jawa Barat	1031	79,0	20,7	0,3	33.0	66.5	0.5	36.4	63.2	0.4
13	Jawa Tengah	861	81,0	19,0	0	30.4	69.6	0	36.6	63.4	0
14	DI Yogyakarta	121	98,3	1,7	0	33.9	66.1	0	50.4	49.6	0
15	Jawa Timur	949	78,3	21,3	0,4	30.3	69.2	0.4	43.7	55.7	0.5
16	Banten	206	68,9	31,1	0	31.6	68.0	0.5	29.1	70.9	0
17	Bali	114	99,1	,9	0	27.2	72.8	0	37.7	62.3	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	75,8	24,2	0	75.8	23.5	0.7	41.6	56.4	2.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	74,2	25,5	0,3	60.3	39.4	0.3	32.5	67.2	0.3
20	Kalimantan Barat	233	82,8	17,2	0	63.5	36.5	0	34.3	65.7	0
21	Kalimantan Tengah	176	77,8	22,2	0	64.2	35.8	0	23.3	76.1	0.6
22	Kalimantan Selatan	217	77,4	22,6	0	41.5	58.5	0	17.1	82.9	0
23	Kalimantan Timur	213	79,3	20,7	0	54.5	45.5	0	41.3	58.7	0
24	Sulawesi Utara	167	62,3	37,7	0	50.9	49.1	0	15.0	85.0	0
25	Sulawesi Tengah	163	79,1	20,9	0	60.7	39.3	0	32.5	67.5	0
26	Sulawesi Selatan	406	80,3	19,7	0	38.7	61.3	0	24.9	75.1	0
27	Sulawesi Tenggara	233	76,0	24,0	0	62.2	37.8	0	28.8	71.2	0
28	Gorontalo	74	75,7	24,3	0	40.5	59.5	0	24.3	75.7	0
29	Sulawesi Barat	81	75,3	23,5	1,2	50.6	46.9	2.5	35.8	61.7	2.5
30	Maluku	161	55,3	41,6	3,1	45.3	51.6	3.1	21.7	75.8	2.5
31	Maluku Utara	101	47,5	52,5	0	52.5	47.5	0	18.8	81.2	0
32	Papua Barat	104	60,6	38,5	1,0	60.6	38.5	1.0	39.4	59.6	1.0
33	Papua	294	54,1	45,2	0,7	40.1	58.8	1.0	34.0	65.0	1.0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	76.0	23.7	0.3	36.8	62.9	0.3	34.8	65.0	0.2
2	Perdesaan	6660	73.2	26.5	0.3	41.4	58.3	0.3	31.5	68.2	0.4
	INDONESIA	**8981**	**73.9**	**25.8**	**0.3**	**40.2**	**59.5**	**0.3**	**32.3**	**67.4**	**0.3**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki pedoman Kelas Ibu adalah sebesar 54,5 persen, persentase Puskesmastidak memiliki sebesar 45,2 persen.Persentase tertinggi puskesmas memiliki Buku Pedoman Kelas Ibu dapat ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (95,0%) dan diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (89,9%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (82,6%). Persentase terendah Puskesmasmemiliki Buku Pedoman Kelas Ibu dapat ditemukan pada Provinsi DI Aceh (20,6%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku Utara (26,7%) dan Provinsi Bengkulu (27,2%). Secara nasional persentase ketersediaan Buku Pedoman Kelas Ibu lebih tinggi pada puskesmas perkotaan dibandingan pada Puskesmasperdesaan, yaitu 57,0persen di puskemas perkotaan dan 53,7persen di Puskesmasperdesaan.

Tabel 4.8.3.4.d
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman dan Juknis dalam Melaksanakan Program Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kespro			Pedoman Lengkap Kesehatan Ibu		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	26.7	73.3	0	11.6	88.4	0
2	Sumatera Utara	506	31.2	68.6	0.2	19.2	80.8	0
3	Sumatera Barat	248	52.4	47.6	0	21.0	79.0	0
4	Riau	195	35.4	64.1	0.5	22.6	76.9	0.5
5	Jambi	171	31.6	68.4	0	17.0	83.0	0
6	Sumatera Selatan	298	39.9	59.4	0.7	20.1	79.9	0
7	Bengkulu	173	27.7	71.7	0.6	13.3	86.7	0
8	Lampung	265	25.3	74.7	0	12.8	87.2	0
9	Bangka Belitung	57	43.9	56.1	0	15.8	84.2	0
10	Kepulauan Riau	65	47.7	52.3	0	33.8	66.2	0
11	DKI Jakarta	336	39.9	60.1	0	17.3	82.7	0
12	Jawa Barat	1031	49.5	50.1	0.4	23.7	75.8	0.5
13	Jawa Tengah	861	38.3	61.6	0.1	18.9	81.1	0
14	DI Yogyakarta	121	63.6	36.4	0	24.8	75.2	0
15	Jawa Timur	949	50.7	48.9	0.4	22.1	77.3	0.5
16	Banten	206	33.0	67.0	0	22.3	77.7	0
17	Bali	114	37.7	62.3	0	21.1	78.9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	53.0	45.0	2.0	34.9	63.1	2.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	44.0	55.6	0.3	22.2	77.5	0.3
20	Kalimantan Barat	233	58.4	41.6	0	22.3	77.7	0
21	Kalimantan Tengah	176	26.1	73.9	0	14.2	84.7	1.1
22	Kalimantan Selatan	217	24.4	75.6	0	11.1	88.9	0
23	Kalimantan Timur	213	45.1	54.5	0.5	22.1	77.9	0
24	Sulawesi Utara	167	16.2	83.8	0	7.8	92.2	0
25	Sulawesi Tengah	163	42.9	57.1	0	21.5	78.5	0
26	Sulawesi Selatan	406	29.8	70.2	0	16.3	83.5	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	28.3	71.7	0	16.7	83.3	0
28	Gorontalo	74	33.8	66.2	0	16.2	83.8	0
29	Sulawesi Barat	81	38.3	58.0	3.7	30.9	67.9	1.2
30	Maluku	161	25.5	72.0	2.5	11.8	85.7	2.5
31	Maluku Utara	101	26.7	73.3	0	11.9	88.1	0
32	Papua Barat	104	42.3	56.7	1.0	31.7	67.3	1.0
33	Papua	294	33.3	65.6	1.0	19.7	78.9	1.4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	41.7	58.1	0.3	18.8	80.9	0.3
2	Perdesaan	6660	38.3	61.3	0.4	19.9	79.8	0.3
	INDONESIA	**8981**	**39.2**	**60.5**	**0.3**	**19.6**	**80.1**	**0.3**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki pedoman PWS - KIA adalah sebesar 73,9 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 25,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman PWS KIA dapat ditemukan pada Provinsi Bali (99,1%) dan diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (98,3%) dan Provinsi Kalimantan Barat (82,8%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman PWS KIA dapat ditemukan pada Provinsi Bengkulu (46,2%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku Utara (47,5%) dan Provinsi Papua (54,1%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman PWS KIA di perkotaan lebih tinggi dibandingan pada Puskesmas perdesaan, yaitu 76,0 persen di puskemas perkotaan dan 73,2 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil adalah sebesar 40,2 persen, persentase puskesmas tidak memiliki sebesar 59,5 persen. Persentase tertinggi puskesmas memiliki Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil dapat ditemukan pada Provinsi Bali (99,1%) dan diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (98,3%) dan Provinsi Kalimantan Barat (82,8%). Persentase terendah Puskesmasmemiliki Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil dapat ditemukan pada Provinsi Bengkulu (46,2%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku Utara (47,5%) dan Provinsi Papua (54,1%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil di perkotaan lebih tinggi dibandingan pada Puskesmas perdesaan, yaitu 76,0persen di Puskesmas perkotaan dan 73,2persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki pedoman PMTCT adalah sebesar 32,3 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 67,4 persen.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman PMTCT dapat ditemukan pada DI Yogyakarta (50,4%) diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau (47,7%) dan Provinsi Jawa Timur (43,7%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman PMTCT dapat ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (15,0%) dan diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan (17,1%) dan Provinsi Maluku Utara (18,8%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman PMTCT di perkotaan lebih tinggi dibandingan pada Puskesmas perdesaan, yaitu 34,8 persen di Puskesmas perkotaan dan 31,5 persen di puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki pedoman operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi adalah sebesar 39,2 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 60,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi dapat ditemukan pada DI Yogyakarta (63,6%) diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat (58,4%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (53,0%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi dapat ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (16,2%) dan diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan (24,2%) dan Provinsi Lampung (25,3%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi di perkotaan lebih tinggi dibandingan pada Puskesmas perdesaan, yaitu 41,7 persen di puskemas perkotaan dan 38,3 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki pedoman secara lengkap(yaitu memiliki keseluruhan jenis pedoman yang disebutkan di atas) untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 19,6 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki lengkap sebesar 80,1 persen. Persentase tertinggi puskesmas memiliki pedoman Program Kesehatan Ibu secara lengkap ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (34,9%) dan diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau (33,8%) dan Provinsi Papua Barat (31,7%). Persentase terendah Puskesmas memiliki pedoman Program Kesehatan Ibu secara lengkap ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (7,8%) dan diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan (11,1%) dan Provinsi DI Aceh (11,6%). Secara nasional persentase ketersediaan pedoman Program Kesehatan Ibu secara lengkap di perdesaan lebih tinggi dibandingan pada Puskesmas perkotaan, yaitu 19,9 persen di Puskesmas perdesaan dan 18,8 persen di Puskesmas perkotaan.

4.8.3.5. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingandiperlukan dalam Program Kesehatan Ibuuntuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Kesehatan Ibu. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan, penerimaan umpan balik dalam bentuk tertulis, pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Audit Maternal Perinatal (AMP) serta supervisi fasilitatif yang dilakukan oleh bidan kordinator. Secara nasional bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Program Kesehatan Ibu adalah dalam bentuk pertemuan monev yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (80,4%) kemudian kunjungan supervisi dan monitoring oleh Dinas Kesehatan (79,4%), umpan balik (68,5%) dan audit perinatal dan maternal (61,7%). Secara nasional perentase Puskesmas lengkap menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan adalah sebesar 42,3 persen sementara 51,4 persen tidak tersedia lengkap (Tabel 4.8.3.5.a-c).

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan ke Puskesmasuntuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 79,4 persen, persentase Puskesmas tidak menerima kunjungan sebesar 20,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Ibu ditemukan pada Provinsi Banten (97,1%) kemudian diikuti oleh ProvinsiNusa Tenggara Barat (95,3%) dan Provinsi DI Yogyakarta (93,4%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk program kesehatan ibu ditemukan pada Provinsi Papua Barat (35,6%) kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku (37,3%) dan Provinsi Papua (40,8%). Secara nasional persentase Puskesmas perdesaan menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Ibu lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perkotaan, yaitu 78,8 persen di perkotaan dan 79,6 persen di perdesaan.

Tabel 4.8.3.5.a
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Supervisi Dinas Kesehatan			Umpan balik			Pertemuan Monev		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	73.3	26.7	0	60.1	39.9	0	83.0	17.0	0
2	Sumatera Utara	506	62.6	37.2	0.2	47.8	52.0	0.2	67.6	32.2	0.2
3	Sumatera Barat	248	83.9	16.1	0	72.6	27.0	0.4	87.5	12.5	0
4	Riau	195	82.6	16.9	0.5	75.9	23.6	0.5	84.1	15.4	0.5
5	Jambi	171	74.3	25.7	0	62.0	38.0	0	74.3	25.7	0
6	Sumatera Selatan	298	79.5	20.5	0	71.5	28.5	0	81.2	18.8	0
7	Bengkulu	173	76.3	23.7	0	63.0	36.4	0.6	68.8	31.2	0
8	Lampung	265	87.9	12.1	0	70.9	29.1	0	87.9	12.1	0
9	Bangka Belitung	57	87.7	12.3	0	86.0	14.0	0	84.2	15.8	0
10	Kepulauan Riau	65	67.7	32.3	0	75.4	24.6	0	76.9	23.1	0
11	DKI Jakarta	336	65.8	34.2	0	50.6	49.1	0.3	71.1	28.6	0.3
12	Jawa Barat	1031	89.6	10.2	0.2	88.3	11.4	0.3	93.4	6.4	0.2
13	Jawa Tengah	861	90.7	9.1	0.2	80.3	19.6	0.1	94.7	5.2	0.1
14	DI Yogyakarta	121	93.4	6.6	0	86.0	14.0	0	95.9	3.3	0.8
15	Jawa Timur	949	92.5	7.4	0.1	81.5	18.4	0.1	93.5	6.3	0.2
16	Banten	206	97.1	2.9	0	83.5	15.5	1.0	92.2	7.8	0
17	Bali	114	81.6	18.4	0	50.9	49.1	0	86.8	13.2	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	95.3	4.7	0	82.6	17.4	0	96.0	4.0	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	86.1	13.2	0.7	54.6	44.0	1.3	79.5	19.5	1.0
20	Kalimantan Barat	233	77.7	22.3	0	80.7	19.3	0	85.4	14.6	0
21	Kalimantan Tengah	176	67.0	32.4	0.6	66.5	33.5	0	62.5	37.5	0
22	Kalimantan Selatan	217	85.7	14.3	0	69.1	30.9	0	90.8	9.2	0
23	Kalimantan Timur	213	67.6	32.4	0	59.6	40.4	0	70.9	29.1	0
24	Sulawesi Utara	167	71.3	28.7	0	60.5	39.5	0	68.9	30.5	0.6
25	Sulawesi Tengah	163	62.0	38.0	0	60.1	39.9	0	66.9	33.1	0
26	Sulawesi Selatan	406	86.7	13.3	0	61.3	38.7	0	83.3	16.7	0
27	Sulawesi Tenggara	233	74.7	25.3	0	61.8	38.2	0	67.0	33.0	0
28	Gorontalo	74	93.2	6.8	0	66.2	33.8	0	95.9	4.1	0
29	Sulawesi Barat	81	84.0	13.6	2.5	70.4	27.2	2.5	76.5	21.0	2.5
30	Maluku	161	37.3	60.2	2.5	33.5	64.0	2.5	31.1	66.5	2.5
31	Maluku Utara	101	52.5	47.5	0	62.4	37.6	0	41.6	58.4	0
32	Papua Barat	104	35.6	64.4	0	33.7	66.3	0	36.5	63.5	0
33	Papua	294	40.8	58.8	0.3	28.6	70.7	0.7	29.6	69.7	0.7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	78.8	21.2	0.1	67.7	32.1	0.2	81.4	18.4	0.2
2	Perdesaan	6660	79.6	20.2	0.2	68.8	30.9	0.3	80.0	19.7	0.3
	INDONESIA	**8981**	**79.4**	**20.4**	**0.2**	**68.5**	**31.2**	**0.3**	**80.4**	**19.4**	**0.2**

Secara nasional, persentase Puskesmas menerimaPengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Program Kesehatan Ibuadalah sebesar 68,5 persen, persentase Puskesmas tidak menerima umpan balik sebesar 31,2 persen.Persentase puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Ibu ditemukan pada Provinsi Jawa Barat (88,3%) kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bangka Belitung (86,0%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Ibu ditemukan pada Provinsi Papua (28,6%) kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku (33,5%) dan Provinsi Papua Barat (33,7%).Secara nasional presentasi puskesmas perkotaan menerima umpan balik Program Kesehatan Ibu dari Dinas Kesehatanlebih rendah dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 67,7 persen di perkotaan dan 68,8 persen di perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk pertemuan monev di Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Ibuadalah sebesar 80,4 persen, persentase Puskesmas tidak menerima kunjungan sebesar 19,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (96,0%) kemudian diikuti oleh Provinsi Gorontalo dan Provinsi DI Yogyakarta (95,9%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi Papua (29,6%) kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku (31,1%) dan Provinsi Papua Barat (36,5%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Ibudi Dinas Kesehatan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan, yaitu 81,4 persen di perkotaan dan 80,0 persen di perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk Audit Maternal Perinatal untuk Program Kesehatan Ibuadalah sebesar 61,7 persen, persentase Puskesmastidak menerima kunjungan sebesar 25,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti Audit Maternal dan Perinatal untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi DI Yogyakarta (86,0%) kemudian diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau (84,6%). Sedangkan persentase puskesmas terendah mengikuti Audit Maternal dan Perinatal untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi Papua (17,0%) kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku (26,1%) dan Provinsi Papua Barat (27,9%). Secara nasional persentasePuskesmasperkotaan mengikuti Audit Maternal dan Perinatal untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan lebih rendah dibandingkan puskesmas perdesaan yaitu 62,1 persendi perdesaandan 60,7 persen di perkotaan.

Secara nasional, persentase tertinggi frekuensi Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan untuk Program Kesehatan Ibu dalam bentuk supervisi fasilititaif berturut-turut adalah dengan frekuensi tidak menentu (27,0%), setiap bulan (20,7%), setiap tiga bulan (20,5%), tidak ada (17,0%), dan setiap enam bulan (13,8%). Tiga provinsi tertinggi dengan supervisi fasilitatif setiap bulan adalah DI Aceh (43,4%), Sumatera Utara (33,6%) dan Jawa Barat (30,4%), sedangkan tiga provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua Barat (3,8%), Nusa Tenggara Timur (5,6%) dan Papua (7,1%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan menerima supervisi fasilitatif setiap bulan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 21,8persen di perkotaan dan 20,4persen di perdesaan.

Tabel 4.8.3.5.b
Persentase Puskesmas menurutPengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Audit Maternal Perinatal				Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Teknis Lengkap		
			% Ya	% Tidak ada	% Tdk ada kasus kematian	%TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi								
1	DI Aceh	311	74,3	17,4	8,0	0,3	48,9	51,1	0,0
2	Sumatera Utara	506	50,8	25,3	22,9	1,0	38,3	61,5	0,2
3	Sumatera Barat	248	76,6	15,7	7,7	0,0	64,5	35,1	0,4
4	Riau	195	76,9	9,7	12,3	1,0	63,1	36,4	0,5
5	Jambi	171	67,3	17,5	15,2	0,0	43,9	56,1	0,0
6	Sumatera Selatan	298	54,0	32,2	13,1	0,7	58,4	41,6	0,0
7	Bengkulu	173	46,2	38,7	15,0	0,0	53,8	46,2	0,0
8	Lampung	265	72,5	19,2	7,9	0,4	62,6	37,4	0,0
9	Bangka Belitung	57	86,0	7,0	7,0	0,0	71,9	28,1	0,0
10	Kepulauan Riau	65	84,6	7,7	7,7	0,0	53,8	46,2	0,0
11	DKI Jakarta	336	32,1	46,1	21,4	0,3	44,6	55,1	0,3
12	Jawa Barat	1031	74,8	17,4	7,7	0,2	80,8	18,9	0,3
13	Jawa Tengah	861	71,7	15,2	13,1	0,0	75,7	24,2	0,1
14	DI Yogyakarta	121	86,0	9,1	5,0	0,0	81,8	18,2	0,0
15	Jawa Timur	949	65,0	21,8	13,0	0,2	76,0	23,9	0,1
16	Banten	206	66,5	28,2	5,3	0,0	75,7	23,3	1,0
17	Bali	114	73,7	11,4	14,9	0,0	46,5	53,5	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	83,2	12,8	4,0	0,0	79,9	20,1	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	69,2	20,5	8,9	1,3	50,0	48,7	1,3
20	Kalimantan Barat	233	65,2	24,0	10,7	0,0	67,0	33,0	0,0
21	Kalimantan Tengah	176	48,9	33,5	17,0	0,6	42,6	56,8	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	65,4	27,2	6,9	0,5	65,0	35,0	0,0
23	Kalimantan Timur	213	58,2	29,1	12,7	0,0	47,9	52,1	0,0
24	Sulawesi Utara	167	55,1	27,5	16,8	0,6	45,5	53,9	0,6
25	Sulawesi Tengah	163	74,2	18,4	7,4	0,0	44,2	55,8	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	56,7	27,3	16,0	0,0	55,9	44,1	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	44,6	36,9	17,6	0,9	42,9	57,1	0,0
28	Gorontalo	74	67,6	17,6	14,9	0,0	64,9	35,1	0,0
29	Sulawesi Barat	81	44,4	48,1	4,9	2,5	58,0	39,5	2,5
30	Maluku	161	26,1	57,1	14,3	2,5	14,9	82,6	2,5
31	Maluku Utara	101	31,7	57,4	9,9	1,0	27,7	72,3	0,0
32	Papua Barat	104	27,9	65,4	6,7	0,0	17,3	82,7	0,0
33	Papua	294	17,0	65,6	16,3	1,0	20,7	78,9	0,3
	Lokasi								
1	Perkotaan	2321	60,7	26,8	12,3	0,3	59,8	40,1	0,1
2	Perdesaan	6660	62,1	25,2	12,3	0,4	59,1	40,6	0,3
	INDONESIA	**8981**	**61,7**	**25,6**	**12,3**	**0,4**	**59,3**	**40,5**	**0,3**

Secara nasional, tiga provinsi dengan persentase tertinggi yang Puskesmasnya menerima supervisi fasilititif setiap tiga bulan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (41,6%), Bangka Belitung (33,3%) dan Sumatera Selatan (28,5%). Sedangkan tiga provinsi dengan persentase terendah yang Puskesmasnya menerima supervise fasilitatif setiap tiga bulan adalah Provinsi Papua Barat (4,8%), Di Yogyakarta (6,6%), dan Sulawesi Utara (7,2%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan menerima supervisi fasilitatif setiap tiga bulanlebih rendah dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 17,6persen di perkotaan dan 21,5persen di perdesaan.

Tabel 4.8.3.5.c
Persentase Puskesmas menurutPengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Supervisi Fasilitatif					
			% Setiap bulan	% Setiap 3 bl	% Setiap 6 bl	% Tidak menentu	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	43,4	13,2	2,6	24,8	15,8	0,3
2	Sumatera Utara	506	33,6	10,9	5,1	24,9	23,9	1,6
3	Sumatera Barat	248	22,2	27,4	14,1	26,6	9,7	0,0
4	Riau	195	20,0	25,1	11,3	32,3	9,7	1,5
5	Jambi	171	24,0	22,2	7,6	29,8	14,0	2,3
6	Sumatera Selatan	298	16,8	28,5	15,4	27,9	10,4	1,0
7	Bengkulu	173	16,2	12,1	10,4	39,9	21,4	0,0
8	Lampung	265	23,8	21,1	18,9	28,3	7,9	0,0
9	Bangka Belitung	57	19,3	33,3	15,8	22,8	8,8	0,0
10	Kepulauan Riau	65	13,8	24,6	16,9	33,8	10,8	0,0
11	DKI Jakarta	336	9,2	11,6	16,7	28,0	31,8	2,7
12	Jawa Barat	1031	30,4	24,2	14,6	22,4	8,0	0,4
13	Jawa Tengah	861	18,0	25,8	22,1	27,1	6,5	0,6
14	DI Yogyakarta	121	27,3	6,6	11,6	34,7	19,8	0,0
15	Jawa Timur	949	20,9	28,0	22,9	21,4	6,2	0,6
16	Banten	206	23,3	22,8	19,4	27,7	6,3	0,5
17	Bali	114	21,1	19,3	9,6	32,5	17,5	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	16,1	41,6	15,4	22,8	4,0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	5,6	22,5	20,5	27,2	22,5	1,7
20	Kalimantan Barat	233	18,0	14,2	17,2	38,2	12,4	0,0
21	Kalimantan Tengah	176	13,1	15,9	6,8	35,8	27,3	1,1
22	Kalimantan Selatan	217	18,9	20,3	16,1	24,4	19,4	0,9
23	Kalimantan Timur	213	16,4	10,3	5,6	32,9	34,3	0,5
24	Sulawesi Utara	167	25,7	7,2	10,2	24,6	31,7	0,6
25	Sulawesi Tengah	163	28,2	19,6	5,5	34,4	11,7	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	19,2	21,4	11,3	34,0	14,0	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	15,5	21,9	9,9	28,3	24,0	0,4
28	Gorontalo	74	20,3	17,6	8,1	41,9	10,8	1,4
29	Sulawesi Barat	81	11,1	17,3	8,6	42,0	18,5	2,5
30	Maluku	161	9,9	19,9	6,8	16,8	42,9	3,7
31	Maluku Utara	101	8,9	13,9	4,0	22,8	48,5	2,0
32	Papua Barat	104	3,8	4,8	2,9	23,1	63,5	1,9
33	Papua	294	7,1	8,5	4,1	18,4	59,2	2,7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	21,8	17,6	12,5	27,5	19,8	0,7
2	Perdesaan	6660	20,4	21,5	14,2	26,8	16,1	0,9
	INDONESIA	**8981**	**20,7**	**20,5**	**13,8**	**27,0**	**17,0**	**0,9**

Secara nasional, tiga provinsi dengan persentase tertinggi yang Puskesmasnya menerima supervisi fasilititif setiap enam bulan adalah Provinsi Jawa Timur (22,9%), Jawa Tengah (22,1%) dan Nusa Tenggara Timur (20,5%). Sedangkan tiga provinsi dengan persentase terendah yang Puskesmasnya menerima supervise fasilitatif setiap enam bulan adalah Provinsi DI Aceh (2,6%), Maluku Utara (4,0%) dan Papua (4,1%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan menerima supervisi fasilitatif setiap enam bulan lebih rendah dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 12,5persen di perkotaan dan 14,2persen di perdesaan.

Secara nasional, tiga provinsi dengan persentase tertinggi yang Puskesmasnya menerima supervisi fasilititif tidak menentu adalah Provinsi Sulawesi Barat (42,0%), Gorontalo (41,9%) dan Bengkulu (39,9%). Sedangkan tiga provinsi dengan persentase terendah yang Puskesmasnya menerima supervise fasilitatif tidak menentu adalah Provinsi Maluku (16,8%), Papua Barat (18,4%) dan Jawa Timur (21,4%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan menerima supervisi fasilitatif tidak menentulebih tinggidibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 27,5persen di perkotaan dan 26,8persen di perdesaan.

Secara nasional, tiga provinsi dengan persentase tertinggi yang Puskesmasnyatidak menerima supervisi fasilititif adalah Provinsi Papua Barat (63,5%), Papua (59,2%) dan Maluku Utara (48,5%). Sedangkan tiga provinsi dengan persentase terendah yang Puskesmasnya tidak menerima supervise fasilitatif adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (4,0%), Jawa Timur (6,2%) dan Banten (6,3%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan tidak menerima supervisi fasilitatif lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 19,8persen di perkotaan dan 16,1persen di perdesaan.

4.8.4. PROGRAM KESEHATAN BAYI DAN ANAK

4.8.4.1. Kegiatan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Kegiatan dalam pelaksanaan Pelayanan kesehatan bayi dan Anak yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi Manajemen Asfiksia, Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Kelas Ibu Balita, Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), dan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat. Secara nasional, dari keselurahan jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di atas, kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (79,6%) dan disusul oleh Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat (76,1%), Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) (75,7%), Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) (69,0%), Manajemen Asfiksia (58,2%), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (49,1%), Kelas Ibu Balita (30,1%) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) (18,3%). Secara nasional sebesar 5,4 persen Puskesmas melakukan keseluruhan kegiatan di atas dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, sedangkan 94,1 persen tidak lengkap seluruh kegiatan (Tabel 4.8.4.1.a-b-c).

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia adalah sebesar 58,2 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 41,4persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang melakukan Manajemen Asfiksia dapat ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (94,6%), diikuti oleh Provinsi Gorontalo (74,3%) dan Provinsi Jawa Tengah (73,4%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia dapat ditemukan pada Provinsi DKI Jakarta (17,6%), diikuti oleh Provinsi Papua (25,5%) dan Provinsi DI Aceh (35,7%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih rendah melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 43,1persen pada perkotaan dan 63,4persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.4.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Manajemen Asfiksia			Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)			Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	35,7	64,0	0,3	55,9	43,7	0,3	71,4	28,3	0,3
2	Sumatera Utara	506	47,2	52,8	0	54,5	45,5	0	74,1	25,9	0
3	Sumatera Barat	248	58,9	41,1	0	89,5	10,5	0	91,5	8,5	0
4	Riau	195	52,3	46,2	1,5	67,2	31,3	1,5	84,6	13,8	1,5
5	Jambi	171	57,9	42,1	0	87,7	12,3	0	94,7	5,3	0
6	Sumatera Selatan	298	57,7	42,3	0	69,1	30,9	0	87,9	12,1	0
7	Bengkulu	173	63,6	36,4	0	76,3	23,7	0	85,0	15,0	0
8	Lampung	265	65,7	34,0	0,4	75,1	24,9	0	90,2	9,8	0
9	Bangka Belitung	57	70,2	29,8	0	93,0	7,0	0	96,5	3,5	0
10	Kepulauan Riau	65	46,2	53,8	0	64,6	35,4	0	78,5	21,5	0
11	DKI Jakarta	336	17,6	78,3	4,2	37,5	58,3	4,2	69,3	26,5	4,2
12	Jawa Barat	1031	68,2	31,6	0,2	84,5	15,3	0,2	89,0	10,8	0,2
13	Jawa Tengah	861	73,4	26,6	0	91,5	8,5	0	95,9	4,1	0
14	DI Yogyakarta	121	38,8	60,3	0,8	72,7	26,4	0,8	81,0	18,2	0,8
15	Jawa Timur	949	72,8	27,0	0,2	86,9	12,9	0,2	86,9	12,9	0,2
16	Banten	206	63,6	36,4	0	68,4	31,6	0	77,7	22,3	0
17	Bali	114	44,7	55,3	0	98,2	1,8	0	98,2	1,8	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	94,6	5,4	0	89,3	10,7	0	87,9	11,4	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	68,9	30,5	0,7	56,0	43,4	0,7	69,9	29,5	0,7
20	Kalimantan Barat	233	57,9	42,1	0	68,7	31,3	0	82,4	17,6	0
21	Kalimantan Tengah	176	44,9	55,1	0	44,3	55,7	0	58,0	42,0	0
22	Kalimantan Selatan	217	66,4	33,6	0	77,4	22,6	0	84,8	15,2	0
23	Kalimantan Timur	213	46,5	53,5	0	58,2	41,8	0	76,1	23,9	0
24	Sulawesi Utara	167	43,7	56,3	0	37,1	62,9	0	50,9	49,1	0
25	Sulawesi Tengah	163	71,8	28,2	0	84,7	15,3	0	93,3	6,7	0
26	Sulawesi Selatan	406	54,2	45,3	0,5	54,4	45,3	0,2	71,2	28,6	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	65,7	34,3	0	44,6	55,4	0	60,9	39,1	0
28	Gorontalo	74	74,3	25,7	0	59,5	40,5	0	82,4	17,6	0
29	Sulawesi Barat	81	40,7	56,8	2,5	43,2	54,3	2,5	53,1	44,4	2,5
30	Maluku	161	42,2	54,0	3,7	29,2	67,1	3,7	54,7	41,6	3,7
31	Maluku Utara	101	45,5	53,5	1,0	57,4	41,6	1,0	66,3	32,7	1,0
32	Papua Barat	104	40,4	59,6	0	33,7	66,3	0	51,9	48,1	0
33	Papua	294	25,5	74,1	0,3	29,9	69,7	0,3	38,4	61,2	0,3
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	43,1	56,2	0,7	68,5	30,8	0,7	82,7	16,6	0,7
2	Perdesaan	6660	63,4	36,2	0,3	69,2	30,5	0,3	78,6	21,1	0,3
	INDONESIA	**8981**	**58,2**	**41,4**	**0,4**	**69,0**	**30,6**	**0,4**	**79,6**	**19,9**	**0,4**

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) adalah sebesar 69,0persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 30,6persen.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) terdapat di Provinsi Bali (98,2%), kemudian diikuti oleh Provinsi Bangka Belitung (93,0%), dan Provinsi Jawa Tengah (91,5%). Persentase puskesmas terendah melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) ditemukan pada Provinsi Maluku (29,2%), diikuti oleh Provinsi Papua (29,9%) dan Provinsi Papua Barat (33,7%). Secara nasional, persentase Puskesmas perdesaan lebih tinggi melakukan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dibandingkan denganPuskesmas perkotaan yaitu 69,2persen pada perdesaan dan 68,5persen pada perkotaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah sebesar 79,6persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 19,9persen.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) terdapat di Provinsi Bali (98,2%), kemudian diikuti oleh Provinsi Bangka Belitung (96,5%), dan Provinsi Jawa Tengah (95,9%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) ditemukan pada Provinsi Papua (38,4%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (50,9%) dan Provinsi Papua Barat (51,9%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yaitu 82,7persen pada perkotaan dan 78,6persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita adalah sebesar 30,1persen, persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 69,4persen.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita terdapat di Provinsi Sumatera Barat (78,6%), kemudian diikuti oleh Provinsi Banten (68,0%), dan Provinsi Lampung (57,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita ditemukan pada Provinsi Kalimantan Tengah (8,0%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (9,9%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (10,1%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 31,5 persen pada perkotaan dan 29,6persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) adalah sebesar 75,7persen, sedangkan persentase puskesmas tidak melakukan sebesar 23,8persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (96,7%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (95,3%), dan Provinsi Bali (94,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) ditemukan pada Provinsi Papua Barat (27,7%), diikuti oleh Provinsi Papua (34,4%) dan Provinsi DI Aceh (42,4%).Secara nasional, persentase puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), yaitu 77,3persen pada perkotaan dan 75,2persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) adalah sebesar 18,3persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 81,2persen.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) terdapat di Provinsi Di Yogyakarta (43,8%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (42,3%), dan Provinsi Bangka Belitung (31,6%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan PelayananKekerasan Terhadap Anak (KTA) ditemukan pada Provinsi Papua (5,1%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (5,8%) dan Provinsi Maluku (6,2%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam melakukan kegiatan PelayananKekerasan Terhadap Anak (KTA),yaitu 23,3 persen pada perkotaan dan 16,2 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) adalah sebesar 49,1persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 50,5 persen.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) terdapat di Provinsi Bali (84,2%), ditemukan pada Provinsi Papua (8,8%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (15,4%) dan Provinsi Maluku Utara (17,8%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), yaitu 56,7 persen pada perkotaan dan 46,5 persen pada perdesaan

Tabel 4.8.4.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kelas Ibu Balita			Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)			Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	13,8	85,9	0,3	42,4	57,2	0,3	16,4	83,0	0,6
2	Sumatera Utara	506	31,2	68,8	0	73,9	26,1	0,0	10,7	89,3	0,0
3	Sumatera Barat	248	78,6	21,4	0	94,0	6,0	0,0	15,3	84,7	0,0
4	Riau	195	18,5	80,0	1,5	78,5	20,0	1,5	13,3	85,1	1,5
5	Jambi	171	19,9	80,1	0	83,0	17,0	0,0	16,4	83,0	0,6
6	Sumatera Selatan	298	41,9	58,1	0	85,9	14,1	0,0	24,5	75,5	0,0
7	Bengkulu	173	19,7	80,3	0	67,6	32,4	0,0	27,7	72,3	0,0
8	Lampung	265	57,0	43,0	0	83,8	16,2	0,0	13,6	86,4	0,0
9	Bangka Belitung	57	29,8	70,2	0	93,0	7,0	0,0	31,6	68,4	0,0
10	Kepulauan Riau	65	21,5	78,5	0	56,9	43,1	0,0	15,4	84,6	0,0
11	DKI Jakarta	336	21,1	74,7	4,2	51,2	44,3	4,5	17,9	78,0	4,2
12	Jawa Barat	1031	42,9	56,8	0,3	77,7	22,1	0,2	17,7	82,0	0,3
13	Jawa Tengah	861	33,4	66,6	0	93,7	6,3	0,0	42,3	57,7	0,0
14	DI Yogyakarta	121	36,4	62,0	1,7	96,7	2,5	0,8	43,8	54,5	1,7
15	Jawa Timur	949	33,7	66,0	0,3	95,3	4,5	0,2	16,9	82,9	0,2
16	Banten	206	68,0	32,0	0	83,0	17,0	0,0	19,4	80,6	0,0
17	Bali	114	20,2	79,8	0	94,7	5,3	0,0	20,2	79,8	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	38,9	59,7	1,3	80,5	19,5	0,0	26,8	71,8	1,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	28,1	70,9	1,0	72,8	26,2	1,0	10,9	88,4	0,7
20	Kalimantan Barat	233	24,9	75,1	0	65,7	34,3	0,0	17,6	82,0	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	8,0	92,0	0	58,0	42,0	0,0	8,0	92,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	10,1	89,9	0	71,4	28,6	0,0	8,3	91,7	0,0
23	Kalimantan Timur	213	13,1	86,9	0	81,7	18,3	0,0	8,5	91,5	0,0
24	Sulawesi Utara	167	19,2	80,8	0	57,5	42,5	0,0	13,8	86,2	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	23,3	76,7	0	74,2	25,8	0,0	22,1	77,9	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	23,2	76,4	0,5	84,5	15,3	0,2	12,8	86,9	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	9,9	90,1	0	61,8	38,2	0,0	15,5	84,5	0,0
28	Gorontalo	74	24,3	75,7	0	43,2	56,8	0,0	12,2	87,8	0,0
29	Sulawesi Barat	81	24,7	72,8	2,5	72,8	24,7	2,5	21,0	76,5	2,5
30	Maluku	161	10,6	85,7	3,7	57,1	39,1	3,7	6,2	90,1	3,7
31	Maluku Utara	101	10,9	87,1	2,0	61,4	37,6	1,0	10,9	88,1	1,0
32	Papua Barat	104	17,3	82,7	0	27,9	72,1	0,0	5,8	94,2	0,0
33	Papua	294	10,9	88,8	0,3	34,4	65,3	0,3	5,1	94,6	0,3
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	31,5	67,7	0,8	77,3	21,9	0,7	23,3	76,0	0,7
2	Perdesaan	6660	29,6	70,0	0,4	75,2	24,5	0,3	16,6	83,0	0,4
	INDONESIA	**8981**	**30,1**	**69,4**	**0,5**	**75,7**	**23,8**	**0,4**	**18,3**	**81,2**	**0,5**

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat adalah sebesar 76,1persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 23,4persen.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat

terdapat di Provinsi Sumatera Barat (87,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi Banten (86,9%), dan Provinsi Sulawesi Tengah (85,9%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat ditemukan pada Provinsi Papua Barat (847,1), diikuti oleh Provinsi Papua (48,3%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (58,5%). Secara nasional, persentase Puskesmas perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perkotaan dalam melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat yaitu, 73,5 persen pada perkotaan dan 77,0 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.4.1.c
Persentase Puskesmasmenurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)			Penanganan kasus diare pada balita dengan dehidrasi sedang			Kegiatan Lengkap Kesehatan Bayi dan Anak		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	40,8	58,8	0,3	77,5	22,2	0,3	2,3	97,4	0,3
2	Sumatera Utara	506	29,8	70,2	0,0	67,2	32,6	0,2	1,0	99,0	0,0
3	Sumatera Barat	248	66,1	33,9	0,0	87,5	12,5	0,0	8,5	91,5	0,0
4	Riau	195	54,4	44,1	1,5	76,4	22,1	1,5	5,6	92,8	1,5
5	Jambi	171	45,6	53,8	0,6	81,9	18,1	0,0	5,3	94,2	0,6
6	Sumatera Selatan	298	62,8	37,2	0,0	82,2	17,8	0,0	9,7	90,3	0,0
7	Bengkulu	173	47,4	52,6	0,0	80,3	19,7	0,0	4,6	95,4	0,0
8	Lampung	265	44,2	55,8	0,0	72,5	27,5	0,0	9,4	90,6	0,0
9	Bangka Belitung	57	82,5	17,5	0,0	73,7	26,3	0,0	5,3	94,7	0,0
10	Kepulauan Riau	65	50,8	49,2	0,0	73,8	26,2	0,0	3,1	96,9	0,0
11	DKI Jakarta	336	34,2	61,6	4,2	62,2	33,6	4,2	3,0	92,9	4,2
12	Jawa Barat	1031	56,2	43,5	0,3	82,4	17,3	0,3	6,2	93,4	0,4
13	Jawa Tengah	861	76,1	23,9	0,0	82,5	17,4	0,1	12,9	87,1	0,0
14	DI Yogyakarta	121	80,2	19,0	0,8	67,8	31,4	0,8	5,8	92,6	1,7
15	Jawa Timur	949	62,8	37,0	0,2	81,3	18,3	0,3	6,5	93,3	0,2
16	Banten	206	58,7	41,3	0,0	86,9	13,1	0,0	7,3	92,7	0,0
17	Bali	114	84,2	15,8	0,0	64,0	36,0	0,0	4,4	95,6	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	53,7	45,6	0,7	76,5	22,8	0,7	12,1	85,9	2,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	46,0	53,3	0,7	84,1	14,9	1,0	3,6	95,7	0,7
20	Kalimantan Barat	233	46,4	53,6	0,0	76,8	22,3	0,9	5,6	94,4	0,0
21	Kalimantan Tengah	176	29,0	71,0	0,0	58,5	40,9	0,6	0,6	99,4	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	57,1	42,9	0,0	67,3	32,7	0,0	1,4	98,6	0,0
23	Kalimantan Timur	213	41,8	58,2	0,0	80,3	18,8	0,9	2,3	97,7	0,0
24	Sulawesi Utara	167	24,6	75,4	0,0	70,1	29,9	0,0	1,8	98,2	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	38,0	62,0	0,0	85,9	14,1	0,0	4,3	95,7	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	37,9	61,8	0,2	76,4	23,4	0,2	3,0	96,8	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	21,0	79,0	0,0	74,7	25,3	0,0	1,7	98,3	0,0
28	Gorontalo	74	27,0	73,0	0,0	79,7	20,3	0,0	0,0	100,0	0,0
29	Sulawesi Barat	81	34,6	63,0	2,5	70,4	25,9	3,7	4,9	92,6	2,5
30	Maluku	161	34,2	62,1	3,7	66,5	29,8	3,7	0,6	95,7	3,7
31	Maluku Utara	101	17,8	81,2	1,0	80,2	18,8	1,0	3,0	96,0	1,0
32	Papua Barat	104	15,4	84,6	0,0	47,1	52,9	0,0	0,0	100,0	0,0
33	Papua	294	8,8	90,8	0,3	48,3	51,0	0,7	2,4	97,3	0,3
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	56,7	42,6	0,7	73,5	25,7	0,8	6,2	93,0	0,8
2	Perdesaan	6660	46,5	53,2	0,3	77,0	22,6	0,5	5,1	94,5	0,4
	INDONESIA	**8981**	**49,1**	**50,5**	**0,4**	**76,1**	**23,4**	**0,5**	**5,4**	**94,1**	**0,5**

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan lengkap terkait dengan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah sebesar 5,4 persen, persentase Puskesmas tidak melakukan secara lengkap sebesar 94,1 persen.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan

kegiatan lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (seluruh kegiatan tersebut di atas dilakukan) terdapat di Provinsi Jawa Tengah (12,9%), kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (12,1%), dan Provinsi Sumatera Selatan (9,7). Tidak satupun Puskesmas di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua Barat melakukan kegiatan terkait dengan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap dan angka terendah berikutnya adalah Provinsi Kalimantan Tengah (0,5%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (seluruh kegiatan tersebut di atas dilakukan) dibandingkan pada Puskesmas perdesaan, yaitu 6,2 persen pada perkotaan dan 5,1 persen pada perdesaan.

4.8.4.2. Pelatihan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi Pelatihan Manajemen Asfiksia, Pelatihan Manajemen Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Pelatihan Kelas Ibu Balita, Pelatihan pelayanan KTA, Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), dan Pelatihan Manajemen Terpada Balita Sakit (MTBS) yang diikuti petugas puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Secara nasional, dari keseluruhan pelatihan Pelayanan kesehatan bayi dan Anak yang tersebut di atas, pelatihan Manajemen Asfiksia merupakan presentasi tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (51,5%) dan disusul oleh pelatihan Manajemen BBLR (46,5%), dan pelatihan MTBS (42,6%). Secara nasional sebesar 2,0 persen Puskesmas menerima keseluruhan pelatihan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, sementara 97,5 persen tidak lengkap ketujuh jenis pelatihan (Tabel 4.8.4.2.a-b-c).

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan Manajemen Asfiksia adalah sebesar 51,5 persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 48,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan Manajemen Asfiksia terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (85,2%), kemudian diikuti oleh Provinsi Gorontalo (75,7%), dan Provinsi Banten dan Jawa Tengah (71,8%). Persentase Puskesmas terendah menerima pelatihan Manajemen Asfiksia ditemukan pada Provinsi Papua (19,4%), diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta (20,2%) dan Provinsi Sulawesi Utara (35,3%).Secara nasional, persentase Puskesmas perdesaan lebih tinggi menerima pelatihan Manajemen Asfiksia dibandingkan dengan Puskesmas perkotaan, yaitu 54,2persen pada perdesaan dan 43,9persen pada perkotaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan Manajemen Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah sebesar 46,5 persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 53,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan Manajemen Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (80,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi Gorontalo (75,7%), dan Provinsi Sulawesi Tengah (68,1%). Persentase Puskesmas terendah menerima pelatihan Manajemen Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) ditemukan pada Provinsi Papua (21,1%), diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta (23,8%) dan Provinsi DI Aceh (24,4%).Secara nasional, persentase Puskesmas perdesaan lebih tinggi menerima pelatihan Manajemen Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dibandingkan denganPuskesmas perkotaan, yaitu 48,3persen pada perdesaan dan 41,1persen pada perkotaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) adalah sebesar 36,7 persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 62,8 persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (67,8%), kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (62,8%), dan Provinsi Kalimantan Selatan (52,5%). Persentase Puskesmas terendah menerima pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) ditemukan pada Provinsi Kepulauan Riau (12,3%), diikuti oleh Provinsi DI Aceh (14,1%) dan Provinsi DI Aceh (14,1%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi menerima pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 39,1 persen pada perkotaan dan 35,9 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.4.2.a
Persentase Puskesmasmenurut Keikutsertaan PelatihanPelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Manajemen Asfiksia			Pelatihan Manajemen BBLR			Pelatihan SDIDTK		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provisi										
1	DI Aceh	311	37.6	62.1	0.3	24.4	75.2	0.3	14.1	85.5	0.3
2	Sumatera Utara	506	38.3	61.7	0	37.5	62.5	0	29.6	70.4	0
3	Sumatera Barat	248	49.2	50.8	0	35.5	64.5	0	36.3	63.3	0.4
4	Riau	195	43.6	54.9	1.5	33.8	64.6	1.5	30.3	68.2	1.5
5	Jambi	171	44.4	55.6	0	48.0	52.0	0	39.8	60.2	0
6	Sumatera Selatan	298	47.7	52.3	0	58.4	41.6	0	48.0	52.0	0
7	Bengkulu	173	42.2	57.8	0	37.6	62.4	0	29.5	70.5	0
8	Lampung	265	50.9	49.1	0	41.5	58.1	0.4	33.6	66.0	0.4
9	Bangka Belitung	57	64.9	35.1	0	56.1	43.9	0	29.8	70.2	0
10	Kepulauan Riau	65	55.4	44.6	0	41.5	58.5	0	12.3	87.7	0
11	DKI Jakarta	336	20.2	75.0	4.8	23.8	71.4	4.8	23.5	71.4	5.1
12	Jawa Barat	1031	64.3	35.5	0.2	56.5	43.4	0.2	45.0	54.8	0.2
13	Jawa Tengah	861	71.8	28.2	0	57.4	42.6	0	49.1	50.9	0
14	DI Yogyakarta	121	52.1	47.1	0.8	43.0	56.2	0.8	62.8	36.4	0.8
15	Jawa Timur	949	53.0	46.7	0.3	50.9	48.8	0.3	47.4	52.3	0.3
16	Banten	206	71.8	28.2	0	55.8	44.2	0	48.1	51.9	0
17	Bali	114	45.6	54.4	0	48.2	51.8	0	33.3	66.7	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	85.2	14.8	0	80.5	19.5	0	67.8	32.2	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	50.7	48.7	0.7	36.8	62.6	0.7	25.5	73.8	0.7
20	Kalimantan Barat	233	42.5	57.5	0	37.8	61.8	0.4	29.2	70.4	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	38.1	61.9	0	38.1	61.9	0	22.2	77.8	0
22	Kalimantan Selatan	217	68.7	31.3	0	67.7	32.3	0	52.5	47.5	0
23	Kalimantan Timur	213	44.1	55.9	0	42.7	57.3	0	31.0	69.0	0
24	Sulawesi Utara	167	35.3	64.7	0	40.7	59.3	0	20.4	79.6	0
25	Sulawesi Tengah	163	71.2	28.8	0	68.1	31.9	0	33.7	66.3	0
26	Sulawesi Selatan	406	42.4	57.4	0.2	40.9	58.9	0.2	34.2	65.5	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	64.8	35.2	0	63.1	36.9	0	27.5	72.5	0
28	Gorontalo	74	75.7	24.3	0	75.7	24.3	0	41.9	58.1	0
29	Sulawesi Barat	81	39.5	58.0	2.5	33.3	64.2	2.5	42.0	55.6	2.5
30	Maluku	161	46.6	49.7	3.7	37.9	58.4	3.7	23.6	72.7	3.7
31	Maluku Utara	101	44.6	54.5	1.0	42.6	56.4	1.0	20.8	78.2	1.0
32	Papua Barat	104	40.4	59.6	0	36.5	63.5	0	13.5	86.5	0
33	Papua	294	19.4	79.3	1.4	21.1	77.2	1.7	18.0	80.6	1.4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	43.9	55.3	0.8	41.1	58.0	0.9	39.1	60.0	0.9
2	Perdesaan	6660	54.2	45.5	0.3	48.3	51.3	0.4	35.9	63.8	0.4
	INDONESIA	**8981**	**51.5**	**48.0**	**0.5**	**46.5**	**53.0**	**0.5**	**36.7**	**62.8**	**0.5**

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan Kelas Ibu Balita adalah sebesar 15,9 persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 83,6 persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan Kelas Ibu Balita terdapat di Provinsi Banten (62,6%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (37,1%), dan Provinsi DI Yogyakarta (33,1%). Persentase Puskesmas terendah menerima Pelatihan Kelas Ibu Balita ditemukan pada Provinsi Papua (2,7%), diikuti oleh Provinsi Bengkulu (2,9%) dan Provinsi DI Aceh (3,9%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi menerima Pelatihan Kelas Ibu Balita dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 18,5 persen pada perkotaan dan 15,0 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.4.2.b
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Kelas Ibu Balita			Pelatihan KTA			Pelatihan PKPR		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provisi										
1	DI Aceh	311	3.9	95.8	0.3	9.3	90.4	0.3	27.7	72.0	0.3
2	Sumatera Utara	506	5.5	94.5	0	7.1	92.9	0	19.6	80.4	0
3	Sumatera Barat	248	37.1	62.9	0	2.4	97.2	0.4	21.0	78.6	0.4
4	Riau	195	6.7	91.8	1.5	9.7	88.7	1.5	21.5	76.4	2.1
5	Jambi	171	5.8	93.6	0.6	8.2	91.2	0.6	23.4	76.6	0
6	Sumatera Selatan	298	18.1	81.9	0	11.4	88.6	0	32.2	67.8	0
7	Bengkulu	173	2.9	97.1	0	6.9	93.1	0	11.6	88.4	0
8	Lampung	265	20.8	78.9	0.4	4.2	95.5	0.4	9.1	90.6	0.4
9	Bangka Belitung	57	17.5	82.5	0	7.0	93.0	0	33.3	66.7	0
10	Kepulauan Riau	65	15.4	84.6	0	13.8	86.2	0	16.9	83.1	0
11	DKI Jakarta	336	13.4	81.8	4.8	14.0	81.0	5.1	13.7	81.5	4.8
12	Jawa Barat	1031	26.8	73.0	0.2	7.3	92.4	0.3	22.3	77.5	0.2
13	Jawa Tengah	861	14.5	85.5	0	16.5	83.5	0	26.8	73.2	0
14	DI Yogyakarta	121	33.1	66.1	0.8	19.8	79.3	0.8	31.4	67.8	0.8
15	Jawa Timur	949	22.8	77.0	0.2	7.2	92.6	0.2	24.4	75.2	0.3
16	Banten	206	62.6	37.4	0	14.1	85.9	0	24.3	75.7	0
17	Bali	114	15.8	84.2	0	14.9	85.1	0	46.5	53.5	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	27.5	72.5	0	26.8	73.2	0	36.9	63.1	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	7.3	92.1	0.7	7.3	92.1	0.7	13.9	85.4	0.7
20	Kalimantan Barat	233	18.9	80.7	0.4	9.9	89.7	0.4	22.7	76.8	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	4.5	95.5	0	8.0	92.0	0	11.9	88.1	0
22	Kalimantan Selatan	217	5.5	94.5	0	3.7	96.3	0	40.1	59.4	0.5
23	Kalimantan Timur	213	5.2	94.8	0	4.7	95.3	0	18.3	81.7	0
24	Sulawesi Utara	167	13.2	86.8	0	7.8	92.2	0	17.4	82.6	0
25	Sulawesi Tengah	163	17.2	82.8	0	10.4	89.6	0	16.6	83.4	0
26	Sulawesi Selatan	406	6.2	93.6	0.2	7.1	92.6	0.2	14.3	85.2	0.5
27	Sulawesi Tenggara	233	5.6	94.4	0	9.9	90.1	0	21.5	78.5	0
28	Gorontalo	74	23.0	77.0	0	4.1	95.9	0	27.0	73.0	0
29	Sulawesi Barat	81	9.9	87.7	2.5	7.4	90.1	2.5	19.8	77.8	2.5
30	Maluku	161	11.2	85.1	3.7	3.1	93.2	3.7	16.1	80.1	3.7
31	Maluku Utara	101	5.9	93.1	1.0	9.9	89.1	1.0	7.9	91.1	1.0
32	Papua Barat	104	5.8	94.2	0	6.7	93.3	0	6.7	93.3	0
33	Papua	294	2.7	95.6	1.7	3.4	94.9	1.7	4.8	93.5	1.7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	18.5	80.6	0.9	14.1	84.8	1.0	27.8	71.3	0.9
2	Perdesaan	6660	15.0	84.7	0.4	7.3	92.3	0.4	19.2	80.4	0.4
	INDONESIA	**8981**	**15.9**	**83.6**	**0.5**	**9.1**	**90.4**	**0.5**	**21.4**	**78.1**	**0.5**

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan pelayanan KTA adalah sebesar 9,1 persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 90,4 persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan pelayanan KTA terdapat di Provinsi Banten (62,6%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (37,1%), dan Provinsi DI Yogyakarta (33,1%). Persentase Puskesmas terendah menerima pelatihan pelayanan KTA ditemukan pada Provinsi Papua (2,7%), diikuti oleh Provinsi Bengkulu (2,9%) dan Provinsi DI Aceh (3,9%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi menerima Pelatihan pelayanan KTA dibandingkandengan Puskesmas perdesaan, yaitu 14,1persen pada perkotaan dan 7,3 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.4.2.c
Persentase Puskesmasmenurut Keikutsertaan PelatihanPelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan MTBS			Pelatihan Lengkap Kesehatan Bayi dan Anak		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provisi							
1	DI Aceh	311	37.9	61.7	0.3	1.3	98.4	0.3
2	Sumatera Utara	506	38.9	61.1	0.0	1.0	99.0	0
3	Sumatera Barat	248	27.0	73.0	0.0	1.2	98.4	0.4
4	Riau	195	33.8	64.6	1.5	2.6	95.9	1.5
5	Jambi	171	59.6	40.4	0.0	2.3	97.1	0.6
6	Sumatera Selatan	298	45.6	54.4	0.0	4.7	95.3	0
7	Bengkulu	173	36.4	63.6	0.0	0.6	99.4	0
8	Lampung	265	40.4	58.9	0.8	1.1	98.5	0.4
9	Bangka Belitung	57	61.4	36.8	1.8	1.8	98.2	0
10	Kepulauan Riau	65	56.9	43.1	0.0	0	100.0	0
11	DKI Jakarta	336	36.0	59.2	4.8	2.1	93.2	4.8
12	Jawa Barat	1031	56.9	42.9	0.2	2.5	97.3	0.2
13	Jawa Tengah	861	48.2	51.8	0.0	3.1	96.9	0
14	DI Yogyakarta	121	41.3	57.9	0.8	5.0	94.2	0.8
15	Jawa Timur	949	46.2	53.6	0.2	2.1	97.7	0.2
16	Banten	206	54.4	45.6	0.0	4.4	95.6	0
17	Bali	114	62.3	37.7	0.0	2.6	97.4	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	57.0	43.0	0.0	8.1	91.9	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	38.1	61.3	0.7	1.7	97.7	0.7
20	Kalimantan Barat	233	48.9	50.6	0.4	2.1	97.4	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	37.5	62.5	0.0	0.6	99.4	0
22	Kalimantan Selatan	217	42.9	57.1	0.0	1.8	98.2	0
23	Kalimantan Timur	213	24.4	75.6	0.0	0.5	99.5	0
24	Sulawesi Utara	167	26.3	73.7	0.0	1.2	98.8	0
25	Sulawesi Tengah	163	72.4	27.6	0.0	1.8	98.2	0
26	Sulawesi Selatan	406	27.1	72.7	0.2	0.5	99.3	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	30.9	69.1	0.0	0.4	99.6	0
28	Gorontalo	74	55.4	44.6	0.0	0	100.0	0
29	Sulawesi Barat	81	30.9	66.7	2.5	1.2	96.3	2.5
30	Maluku	161	29.8	66.5	3.7	0.6	95.7	3.7
31	Maluku Utara	101	38.6	60.4	1.0	2.0	97.0	1.0
32	Papua Barat	104	31.7	68.3	0.0	0	100.0	0
33	Papua	294	16.3	82.0	1.7	1.4	97.3	1.4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	45.5	53.6	0.9	2.8	96.3	0.9
2	Perdesaan	6660	41.6	58.0	0.4	1.8	97.9	0.3
	INDONESIA	**8981**	**42.6**	**56.9**	**0.5**	**2.0**	**97.5**	**0.5**

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan (PKPR) adalah sebesar 21,4 persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 78,1 persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan PKPR terdapat di Provinsi Bali (46,5%), kemudian diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan (40,1%), dan Provinsi DI Yogyakarta (36,9%). Persentase Puskesmas terendah menerima pelatihan PKPR dapat ditemukan pada Provinsi Papua (4,8%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (6,7%) dan Provinsi Maluku Utara (7,9%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi menerima pelatihan PKPR dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu, 27,8 persen pada perkotaan dan 19,2 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah sebesar 42,6 persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 56,9 persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan MTBS terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah (72,4%), kemudian diikuti oleh Provinsi Bali (62,3%), dan Provinsi Bangka Belitung (61,4%). Persentase Puskesmas terendah menerima Pelatihan MTBS ditemukan pada Provinsi Papua (16,3%), diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur (24,4%) dan Provinsi Sulawesi Utara (26,3%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi menerima Pelatihan (MTBS dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu, 45,2 persen pada perkotaan dan 41,6 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan lengkap (keseluruhan jenis pelatihan tersebut di atas) terkait dengan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah sebesar 2,0 persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 97,5 persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan secara lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (8,1%), kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (5,0%), dan Provinsi Sumatera Selatan (4,7%). Terdapat tiga provinsi dimana tidak satupun puskemas menerima pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap, yaitu pada Provinsi Kepulauan Riau dan Papua Barat. Terdapat dua belas provinsi dari tiga puluh tiga provinsi dimana persentase Puskesmas menerima pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap di atas persentase nasional yaitu pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Tengah, Bali, Riau, Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Barat,Jawa Timur dan DKI Jakarta. Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan dalam menerima pelatihan lengkap Pelayanan kesehatan bayi dan Anak, yaitu 2,8 persen pada perkotaan dan 1,8 persen pada perdesaan.

4.8.4.3. Pedoman Program Kesehatan Bayi dan Anak

Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Buku Pedoman yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi, Pedoman Manajemen Asfiksia, Buku KIA, Pedoman SDIDTK, Pedoman Kelas Ibu Balita, Modul BBLR, Modul MTBS, Pedoman pelayanan KTA, dan Pedoman PKPR. Secara nasional Pedoman upaya Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalah Buku KIA (84,4%) kemudian Modul MTBS (71,8%) dan Pedoman SDIDTK (61,8%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki seluruh Pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 20,5 persen sementara 78,8 persen memiliki Pedoman yang tidak lengkap (Tabel 4.8.4.3.a-b-c).

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia adalah sebesar 60,8 persen, sedangkan 38,7 persen tidak memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia dapat ditemukan pada Provinsi Bangka Belitung (89,5%) dan diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (78,5%) dan Provinsi Jawa Tengah (76,3%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia dapat ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (32,9%) dan diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta (34,2%) dan Provinsi Papua (36,1%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman Manajemen Asfiksia di perdesaan lebih tinggi dibandingkan pada Puskesmas perkotaan yaitu 63,2 persen di puskemas perdesaan dan 53,6 persen di Puskesmas perkotaan.

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Buku KIA adalah sebesar 84,4 persen, sedangkan 15,1 persen tidak memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku KIA dapat ditemukan pada Provinsi Bangka Belitung (94,7%) dan diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (93,4%) dan Provinsi Jawa Timur (92,9%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku KIA dapat ditemukan pada Provinsi Papua (56,1%) dan diikuti oleh Provinsi Papua Barat (70,2%) dan Provinsi Maluku Utara (73,1%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman Buku KIA di perdesaan lebih tinggi dibandingkan pada Puskesmas perkotaan, yaitu 84,6 persen di puskemas perdesaan dan 83,6 persen di Puskesmas perkotaan.

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK adalah sebesar 61,4 persen, sedangkan 38,0 persen tidak memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK dapat ditemukan pada Provinsi Bali (88,6%), kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (86,8%) dan Provinsi Jawa Tengah (85,0%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK dapat ditemukan pada Provinsi DI Aceh (22,5%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (22,8%) dan Provinsi Papua (39,1%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman SDIDTK di Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 64,0 persen di puskemas perkotaan dan 60,5 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita adalah sebesar 61,4 persen, sedangkan 56,8 persen tidak memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita dapat ditemukan pada Provinsi Sumatera Barat (76,2%), kemudian diikuti oleh Provinsi Banten (74,8%) dan Provinsi DI Yogyakarta (85,0%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita dapat ditemukan pada Provinsi DI Aceh (15,8%) dan diikuti oleh Provinsi Papua (26,5%) dan Provinsi Maluku (26,7%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman Kelas Ibu Balita di Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 44,2 persen di puskemas perkotaan dan 42,1 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional persentase Puskesmas memilikiModul BBLR adalah sebesar 57,1persen, sedangkan 42,3persen tidak memiliki.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Modul BBLR dapat ditemukan pada Provinsi Bangka Belitung (91,2%),kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (77,9%) dan Provinsi Sumatera Barat (77,0%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Modul BBLR dapat ditemukan pada Provinsi DI Aceh (35,7%) dan diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta (36,9%) dan Provinsi Papua (38,1%). Secara nasional persentase ketersediaan Modul BBLR di Puskesmas perdesaan lebih tinggi dibandingkan

dengan Puskesmas perkotaan, yaitu 57,9 persen di puskemas perdesaan dan 54,8 persen di Puskesmas perkotaan.

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Modul MTBS adalah sebesar 71,8persen, sedangkan 27,7persen tidak memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Modul MTBS dapat ditemukan pada Provinsi Bali (92,1%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (90,4%) dan Provinsi Di Yogyakarta (90,1%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Modul MTBS dapat ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (35,9%) dan diikuti oleh Provinsi Papua (37,1%) dan Provinsi Maluku (51,6%). Secara nasional persentase ketersediaan Modul MTBS di Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 73,9 persen di puskemas perkotaan dan 71,0 persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.4.3.a
Persentase Puskesmasmenurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Manajemen Asfiksia			Buku KIA			Pedoman SDIDTK		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	37.6	62.1	0.3	78.1	21.5	0.3	22.5	77.2	0.3
2	Sumatera Utara	506	49.8	50.2	0	82.0	18.0	0	50.4	49.4	0.2
3	Sumatera Barat	248	66.9	33.1	0	87.9	12.1	0	84.7	15.3	0
4	Riau	195	53.8	44.6	1.5	74.9	23.6	1.5	53.8	44.6	1.5
5	Jambi	171	45.0	55.0	0	87.1	12.9	0	57.3	42.7	0
6	Sumatera Selatan	298	57.4	42.3	0.3	84.2	15.4	0.3	65.4	33.6	1.0
7	Bengkulu	173	63.6	36.4	0	75.7	24.3	0	54.3	45.7	0
8	Lampung	265	64.9	35.1	0	83.4	16.2	0.4	52.8	46.8	0.4
9	Bangka Belitung	57	89.5	10.5	0	94.7	5.3	0	80.7	19.3	0
10	Kepulauan Riau	65	64.6	35.4	0	89.2	10.8	0	61.5	38.5	0
11	DKI Jakarta	336	34.2	61.3	4.5	72.3	23.2	4.5	41.1	54.5	4.5
12	Jawa Barat	1031	73.7	26.0	0.3	85.0	14.8	0.2	63.9	35.9	0.2
13	Jawa Tengah	861	76.3	23.7	0	92.3	7.7	0	85.0	15.0	0
14	DI Yogyakarta	121	63.6	35.5	0.8	93.4	5.8	0.8	86.8	12.4	0.8
15	Jawa Timur	949	72.5	27.1	0.4	92.9	6.6	0.4	80.5	18.9	0.6
16	Banten	206	65.5	34.0	0.5	87.9	12.1	0	64.6	35.4	0
17	Bali	114	70.2	29.8	0	90.4	9.6	0	88.6	11.4	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	78.5	21.5	0	88.6	11.4	0	73.2	26.8	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	58.9	40.1	1.0	83.1	16.2	0.7	50.0	49.0	1.0
20	Kalimantan Barat	233	55.4	44.6	0	89.7	10.3	0	60.9	39.1	0
21	Kalimantan Tengah	176	51.1	48.9	0	89.8	10.2	0	54.0	46.0	0
22	Kalimantan Selatan	217	56.2	43.8	0	84.3	15.7	0	57.1	42.9	0
23	Kalimantan Timur	213	53.1	46.9	0	85.9	13.6	0.5	70.0	29.1	0.9
24	Sulawesi Utara	167	32.9	67.1	0	73.1	26.9	0	22.8	77.2	0
25	Sulawesi Tengah	163	73.0	27.0	0	87.7	12.3	0	58.9	41.1	0
26	Sulawesi Selatan	406	49.5	50.2	0.2	88.7	11.1	0.2	58.6	41.1	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	70.0	30.0	0	88.0	12.0	0	49.4	50.6	0
28	Gorontalo	74	63.5	36.5	0	87.8	12.2	0	51.4	48.6	0
29	Sulawesi Barat	81	58.0	40.7	1.2	77.8	21.0	1.2	56.8	42.0	1.2
30	Maluku	161	47.2	49.7	3.1	71.4	25.5	3.1	44.1	52.8	3.1
31	Maluku Utara	101	54.5	44.6	1.0	71.3	27.7	1.0	55.4	43.6	1.0
32	Papua Barat	104	60.6	39.4	0	70.2	29.8	0	46.2	53.8	0
33	Papua	294	36.1	62.2	1.7	56.1	42.5	1.4	39.1	59.5	1.4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	53.6	45.6	0.8	83.6	15.5	0.9	64.0	35.1	0.9
2	Perdesaan	6660	63.2	36.4	0.4	84.6	15.0	0.3	60.5	39.1	0.4
	INDONESIA	**8981**	**60.8**	**38.7**	**0.5**	**84.4**	**15.1**	**0.5**	**61.4**	**38.0**	**0.6**

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Pedoman KTA adalah sebesar 31,6 persen, sedangkan 67,8 persen tidak memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman KTA dapat ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (65,3%), kemudian diikuti oleh Provinsi Bali (53,5%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (46,3%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman KTA dapat ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (16,2%) dan diikuti oleh Provinsi Aceh (18,6%) dan Provinsi Gorontalo (20,3%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman KTA di Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 34,3 persen di puskemas perkotaan dan 30,7 persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.4.3.b
Persentase Puskesmasmenurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jml Pusk	Pedoman Kelas Ibu Balita			Modul BBLR			Modul MTBS		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	15,8	83,9	0,3	35,7	63,7	0,6	58,8	40,8	0,3
2	Sumatera Utara	506	29,6	70,4	0	45,5	54,5	0	64,4	35,6	0
3	Sumatera Barat	248	76,2	23,8	0	77,0	23,0	0	76,2	23,8	0
4	Riau	195	33,8	64,6	1,5	44,1	54,4	1,5	67,2	31,3	1,5
5	Jambi	171	28,7	71,3	0	48,0	52,0	0	81,3	18,7	0
6	Sumatera Selatan	298	38,9	60,4	0,7	62,1	37,6	0,3	71,5	28,2	0,3
7	Bengkulu	173	27,2	72,8	0	59,5	40,5	0	66,5	33,5	0
8	Lampung	265	55,1	44,9	0	60,0	39,6	0,4	80,8	18,9	0,4
9	Bangka Belitung	57	42,1	57,9	0	91,2	8,8	0	84,2	15,8	0
10	Kepulauan Riau	65	44,6	55,4	0	56,9	43,1	0	83,1	16,9	0
11	DKI Jakarta	336	33,9	61,6	4,5	36,9	58,6	4,5	59,2	36,3	4,5
12	Jawa Barat	1031	56,2	43,5	0,3	65,8	33,8	0,5	79,3	20,5	0,2
13	Jawa Tengah	861	47,2	52,8	0	63,5	36,5	0	90,4	9,6	0
14	DI Yogyakarta	121	62,0	37,2	0,8	58,7	40,5	0,8	90,1	9,1	0,8
15	Jawa Timur	949	51,4	47,9	0,6	69,9	29,7	0,4	82,9	16,5	0,5
16	Banten	206	74,8	24,8	0,5	57,8	41,7	0,5	76,7	22,8	0,5
17	Bali	114	42,1	57,9	0	65,8	34,2	0	92,1	7,9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	45,0	54,4	0,7	77,9	22,1	0	77,2	22,1	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	33,4	65,6	1,0	50,3	48,7	1,0	63,2	35,8	1,0
20	Kalimantan Barat	233	46,4	53,6	0	53,6	45,5	0,9	76,0	23,6	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	31,3	68,8	0	43,2	56,8	0	73,3	26,7	0
22	Kalimantan Selatan	217	28,6	71,4	0	50,2	49,8	0	68,7	31,3	0
23	Kalimantan Timur	213	33,3	66,2	0,5	62,9	36,2	0,9	77,9	21,6	0,5
24	Sulawesi Utara	167	33,5	66,5	0	40,1	59,9	0	35,9	64,1	0
25	Sulawesi Tengah	163	44,8	54,6	0,6	70,6	28,8	0,6	83,4	16,0	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	41,1	58,6	0,2	44,8	54,9	0,2	55,9	43,6	0,5
27	Sulawesi Tenggara	233	35,6	64,4	0	69,5	30,0	0,4	59,7	40,3	0
28	Gorontalo	74	40,5	59,5	0	66,2	33,8	0	54,1	45,9	0
29	Sulawesi Barat	81	35,8	63,0	1,2	55,6	43,2	1,2	51,9	46,9	1,2
30	Maluku	161	26,7	70,2	3,1	42,2	54,0	3,7	51,6	45,3	3,1
31	Maluku Utara	101	32,7	66,3	1,0	50,5	48,5	1,0	58,4	40,6	1,0
32	Papua Barat	104	43,3	56,7	0	51,0	49,0	0	53,8	46,2	0
33	Papua	294	26,5	72,1	1,4	38,1	60,9	1,0	37,1	61,9	1,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	44,2	54,8	1,0	54,8	44,0	1,2	73,9	25,2	0,9
2	Perdesaan	6660	42,1	57,5	0,4	57,9	41,7	0,4	71,0	28,6	0,4
	INDONESIA	**8981**	**42,6**	**56,8**	**0,6**	**57,1**	**42,3**	**0,6**	**71,8**	**27,7**	**0,5**

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Pedoman PKPR adalah sebesar 42,2persen, sedangkan 57,1persen tidak memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman PKPR dapat ditemukan pada Provinsi Bali (82,5%),kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (64,9%) dan DI Yogyakarta (62,8%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman PKPR dapat ditemukan pada Provinsi DI Aceh (20,9%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (22,2%) dan Provinsi Maluku Utara (26,7%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman PKPR di Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 45,6 persen di puskemas perkotaan dan 41,1 persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.4.3.c
Persentase Puskesmasmenurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jml Pusk	Pedoman KTA			Pedoman PKPR			Pedoman Lengkap Kesehatan Bayi dan Anak		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	18,6	80,7	0,6	20,9	78,5	0,6	9,6	90,0	0,3
2	Sumatera Utara	506	25,7	74,3	0	35,6	64,4	0	19,4	80,6	0
3	Sumatera Barat	248	39,9	60,1	0	64,9	35,1	0	27,4	72,6	0
4	Riau	195	29,2	69,2	1,5	38,5	59,5	2,1	20,0	78,5	1,5
5	Jambi	171	24,0	76,0	0	33,3	66,7	0	17,5	82,5	0
6	Sumatera Selatan	298	29,9	69,8	0,3	43,3	56,0	0,7	19,5	79,9	0,7
7	Bengkulu	173	27,2	72,8	0	32,9	65,9	1,2	19,7	80,3	0
8	Lampung	265	24,2	75,1	0,8	28,7	70,9	0,4	17,4	82,3	0,4
9	Bangka Belitung	57	38,6	61,4	0	59,6	40,4	0	28,1	71,9	0
10	Kepulauan Riau	65	41,5	58,5	0	49,2	50,8	0	26,2	73,8	0
11	DKI Jakarta	336	32,7	62,8	4,5	32,4	63,1	4,5	18,8	76,8	4,5
12	Jawa Barat	1031	32,8	66,8	0,4	46,0	53,7	0,3	23,8	75,8	0,4
13	Jawa Tengah	861	38,3	61,7	0	51,2	48,8	0	23,5	76,5	0
14	DI Yogyakarta	121	65,3	33,9	0,8	62,8	36,4	0,8	28,1	71,1	0,8
15	Jawa Timur	949	34,8	64,7	0,5	53,4	46,0	0,5	23,4	76,0	0,6
16	Banten	206	35,4	64,6	0	36,9	62,6	0,5	19,4	80,1	0,5
17	Bali	114	53,5	45,6	0,9	82,5	16,7	0,9	28,1	71,1	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	46,3	53,0	0,7	49,0	51,0	0	28,2	71,1	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	31,1	67,5	1,3	40,4	57,9	1,7	21,2	77,5	1,3
20	Kalimantan Barat	233	30,0	69,5	0,4	46,8	52,8	0,4	15,9	83,7	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	24,4	75,6	0	27,3	72,2	0,6	11,9	88,1	0
22	Kalimantan Selatan	217	23,0	77,0	0	41,5	58,1	0,5	13,4	86,6	0
23	Kalimantan Timur	213	38,0	61,5	0,5	44,6	54,0	1,4	17,8	80,8	1,4
24	Sulawesi Utara	167	16,2	83,8	0	22,2	77,8	0	8,4	91,6	0
25	Sulawesi Tengah	163	38,7	60,7	0,6	57,7	41,7	0,6	27,6	71,8	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	24,6	74,9	0,5	35,2	64,3	0,5	17,2	82,5	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	30,5	69,5	0	38,6	60,9	0,4	19,7	80,3	0
28	Gorontalo	74	20,3	79,7	0	37,8	60,8	1,4	14,9	83,8	1,4
29	Sulawesi Barat	81	30,9	67,9	1,2	37,0	61,7	1,2	21,0	77,8	1,2
30	Maluku	161	23,6	73,3	3,1	28,6	68,3	3,1	17,4	79,5	3,1
31	Maluku Utara	101	25,7	72,3	2,0	26,7	72,3	1,0	19,8	79,2	1,0
32	Papua Barat	104	38,5	61,5	0	37,5	62,5	0	30,8	69,2	0
33	Papua	294	25,2	73,8	1,0	27,2	71,8	1,0	19,0	79,6	1,4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	34,3	64,6	1,1	45,6	53,2	1,2	19,8	79,1	1,1
2	Perdesaan	6660	30,7	68,9	0,5	41,1	58,4	0,5	20,8	78,7	0,5
	INDONESIA	**8981**	**31,6**	**67,8**	**0,6**	**42,2**	**57,1**	**0,7**	**20,5**	**78,8**	**0,6**

Secara nasional persentase Puskesmas memilikiPedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah sebesar 20,5 persen, sedangkan 78,8 persen tidak memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas tersedia Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap (yaitu memiliki seluruh jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) dapat ditemukan pada Provinsi Papua Barat (30,8%) dan diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (28,2%) dan Provinsi DI Yogyakarta (28,1%). Persentase terendah Puskesmas tersedia Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap (yaitu memiliki ketiga jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas dapat ditemukan pada Provinsi Kalimantan Tengah (11,9%) dan diikuti oleh Provinsi DI Aceh (9,6%) dan Provinsi Sulawesi Utara (8,4%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman Pelayanan kesehatan bayi dan Anak secara lengkap (yaitu memiliki seluruh jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) di Puskesmas perdesaan lebih tinggi dibandingkan pada Puskesmas perkotaan, yaitu 20,8 persen di Puskesmas perdesaan dan 19,8 persen di Puskesmas perkotaan.

4.8.4.4 Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan ke Puskesmas untuk Pelayanan kesehatan bayi dan Anak adalah sebesar 69,6 persen, persentase Puskesmas tidak menerima kunjungan sebesar 29,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Pelayanan kesehatan bayi dan anak ditemukan pada Provinsi Jawa Timur (91,3%) kemudian diikuti oleh Provinsi Banten (87,9%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (85,9%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak ditemukan pada Provinsi Maluku (24,8%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua (27,9%) dan Provinsi Papua Barat (30,8%). Secara nasional persentase menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak diPuskesmas perdesaan dan perkotaan hampir tidak berbedadimana 69,2 persen pada Puskesmas perkotaan dan 69,8 persen pada perdesaan(Tabel 4.8.4.4).

Secara nasional bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah dalam bentuk pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan (73,1%) dan diikuti oleh supervise oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas (69,6%) kemudian umpan balik (61,9%). Secara nasional persentase Puskesmas lengkap menerima Pengawasan, Evaluasi danBimbingan dalam bentuk kunjungan monev, umpan balik dan pertemuan monev di Dinas Kesehatan adalah sebesar 51,0 persen sementara 48,0 persen tidak tersedia lengkap.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah sebesar 61,9 persen, persentase Puskesmas tidak menerima umpan balik sebesar 37,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak ditemukan pada Provinsi Jawa Barat (83,4%) kemudian diikuti oleh ProvinsiJawa Timur (81,2%) dan Provinsi DI Yogyakarta (79,3%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Pelayanan kesehatan bayi dan Anak dapat ditemukan pada Provinsi Maluku (24,8%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua (25,5%) dan Provinsi Papua Barat (30,8%). Secara nasional presentasi Puskesmas perkotaan menerima umpan balik Program Kesehatan Bayi dan Anak oleh Dinas Kesehatan lebih rendah dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 61,2 persen di perkotaan dan 62,2 persen di perdesaan.

Tabel 4.8.4.4.a
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi danBimbinganPelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jml Pusk	Supervisi dinkes			Umpan Balik			Pertemuan monev		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	55,6	44,1	0,3	37,3	62,1	0,6	53,4	46,3	0,3
2	Sumatera Utara	506	49,6	50,2	0,2	41,7	57,7	0,6	62,5	37,2	0,4
3	Sumatera Barat	248	75,4	24,6	0,0	69,0	31,0	0,0	82,7	17,3	0
4	Riau	195	67,2	31,3	1,5	61,0	37,4	1,5	73,8	24,6	1,5
5	Jambi	171	60,2	39,8	0	52,6	47,4	0	67,8	32,2	0
6	Sumatera Selatan	298	68,5	31,5	0	61,1	38,9	0	71,1	28,9	0
7	Bengkulu	173	67,1	32,9	0	57,2	42,8	0	66,5	33,5	0
8	Lampung	265	80,8	19,2	0	69,4	30,2	0,4	82,6	17,4	0
9	Bangka Belitung	57	80,7	19,3	0	70,2	29,8	0	80,7	19,3	0
10	Kepulauan Riau	65	56,9	43,1	0	58,5	41,5	0	63,1	36,9	0
11	DKI Jakarta	336	50,3	45,2	4,5	42,3	53,3	4,5	55,4	40,2	4,5
12	Jawa Barat	1031	82,0	17,8	0,2	83,4	16,3	0,3	88,8	11,0	0,2
13	Jawa Tengah	861	85,5	14,5	0	78,9	21,1	0	91,9	7,9	0,2
14	DI Yogyakarta	121	81,0	18,2	0,8	79,3	19,8	0,8	92,6	6,6	0,8
15	Jawa Timur	949	91,3	8,4	0,3	81,2	18,4	0,3	92,4	7,3	0,3
16	Banten	206	87,9	11,7	0,5	77,7	21,4	1,0	85,0	14,6	0,5
17	Bali	114	70,2	29,8	0	51,8	48,2	0	75,4	24,6	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	85,9	14,1	0	71,1	28,9	0	87,9	12,1	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	73,8	25,2	1,0	47,0	52,0	1,0	70,9	28,1	1,0
20	Kalimantan Barat	233	66,5	33,0	0,4	71,2	28,3	0,4	79,4	20,2	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	55,1	44,9	0	59,7	40,3	0	52,8	47,2	0
22	Kalimantan Selatan	217	76,5	23,5	0	58,1	41,9	0	75,1	24,9	0
23	Kalimantan Timur	213	51,2	47,9	0,9	40,4	59,2	0,5	50,7	48,8	0,5
24	Sulawesi Utara	167	61,1	38,9	0	49,7	50,3	0	61,7	38,3	0
25	Sulawesi Tengah	163	49,1	50,9	0	50,9	49,1	0	54,0	46,0	0
26	Sulawesi Selatan	406	74,9	24,9	0,2	53,9	45,8	0,2	76,1	23,2	0,7
27	Sulawesi Tenggara	233	58,8	41,2	0	55,8	44,2	0	59,7	39,9	0,4
28	Gorontalo	74	85,1	14,9	0	62,2	37,8	0	86,5	13,5	0
29	Sulawesi Barat	81	61,7	35,8	2,5	59,3	38,3	2,5	58,0	39,5	2,5
30	Maluku	161	24,8	72,0	3,1	24,8	72,0	3,1	24,2	72,7	3,1
31	Maluku Utara	101	46,5	52,5	1,0	55,4	43,6	1,0	41,6	56,4	2,0
32	Papua Barat	104	30,8	69,2	0	30,8	69,2	0	29,8	70,2	0
33	Papua	294	27,9	71,1	1,0	25,5	73,5	1,0	29,6	69,4	1,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	69,2	30,0	0,8	61,2	38,0	0,9	72,1	27,0	0,9
2	Perdesaan	6660	69,8	29,8	0,4	62,2	37,4	0,5	73,5	26,1	0,5
	INDONESIA	**8981**	**69,6**	**29,9**	**0,5**	**61,9**	**37,5**	**0,6**	**73,1**	**26,3**	**0,6**

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi danBimbingan dalam bentuk pertemuan monev di Dinas Kesehatan untuk Pelayanan kesehatan bayi dan Anak adalah sebesar 73,1 persen, persentase Puskesmas tidak menerima kunjungan sebesar 26,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Bayi dan anak di Dinas Kesehatan dapat ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (92,6%) kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (92,4%) dan Provinsi Jawa Tengah (91,9%).

Sedangkan persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untukpelayanan kesehatan bayi dan anak di Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi Maluku (24,2%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua (29,6%) dan Provinsi Papua Barat (29,8%). Secara nasional presentasi Puskesmas perkotaan mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Pelayanan kesehatan bayi dan Anak di Dinas Kesehatan lebih rendah dibandingkan Puskesmas perdesaan, yaitu 72,1 persen di perkotaan dan 73,7 persen di perdesaan.

Tabel 4.8.4.4.b
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi danBimbinganPelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jml Pusk	Bimtek lengkap		
			% TAD	% ada	% tdk ada
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	0,3	25,1	74,3
2	Sumatera Utara	506	0,4	31,8	68,0
3	Sumatera Barat	248	0	60,5	39,5
4	Riau	195	1,5	50,8	47,7
5	Jambi	171	0	34,5	65,5
6	Sumatera Selatan	298	0	50,7	49,3
7	Bengkulu	173	0	46,8	53,2
8	Lampung	265	0	58,9	40,8
9	Bangka Belitung	57	0	61,4	38,6
10	Kepulauan Riau	65	0	38,5	61,5
11	DKI Jakarta	336	4,5	35,1	60,4
12	Jawa Barat	1031	0,2	74,1	25,6
13	Jawa Tengah	861	0,2	71,2	28,8
14	DI Yogyakarta	121	0,8	69,4	29,8
15	Jawa Timur	949	0,3	76,0	23,7
16	Banten	206	0,5	68,4	30,6
17	Bali	114	0	39,5	60,5
18	Nusa Tenggara Barat	149	0	66,4	33,6
19	Nusa Tenggara Timur	302	1,0	40,1	58,9
20	Kalimantan Barat	233	0,4	56,2	43,3
21	Kalimantan Tengah	176	0	30,1	69,9
22	Kalimantan Selatan	217	0	51,2	48,8
23	Kalimantan Timur	213	0,5	30,5	69,0
24	Sulawesi Utara	167	0	36,5	63,5
25	Sulawesi Tengah	163	0	33,1	66,9
26	Sulawesi Selatan	406	0,7	43,6	56,2
27	Sulawesi Tenggara	233	0,4	36,1	63,9
28	Gorontalo	74	0	59,5	40,5
29	Sulawesi Barat	81	2,5	37,0	60,5
30	Maluku	161	3,1	11,2	85,7
31	Maluku Utara	101	2,0	27,7	71,3
32	Papua Barat	104	0	13,5	86,5
33	Papua	294	1,0	18,7	80,3
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	0,9	52,2	47,0
2	Perdesaan	6660	0,5	51,3	48,3
	INDONESIA	**8981**	**0,6**	**51,5**	**48,0**

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah sebesar 51,5 persen, persentase Puskesmas tidak menerima kunjungan sebesar 48,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap (ketiga jenis Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diterima oleh Puskesmas) untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dari Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi Jawa Timur (76,0%) kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (74,1%) dan Provinsi Jawa Tengah (71,2%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi danBimbingan secara lengkap (ketiga jenis Pengawasan, Evaluasi danBimbingan diterima oleh Puskesmas) ditemukan pada Provinsi Maluku (11,2%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua Barat (13,5%) dan Provinsi Papua (18,7%).Secara nasional presentasi Puskesmas perkotaan menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap) lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan, yaitu 52,2 persen di perkotaan dan 51,3 persen di perdesaan.

4.8.5. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

4.8.5.1 Kegiatan Program Keluarga Berencana

Kegiatan dalam pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi mantap (IUD, Susuk, Vasektomi), Penanganan Komplikasi Kontrasepsi, dan Konsultasi KB (Keluarga Berencana). Secara nasional, dari ketiga jenis kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana, kegiatan Konsultasi KB merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (95,8%) dan disusul oleh Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) (88,0%), dan Penanganan komplikasi Kontrasepsi (64,5%). Secara nasional sebesar 61,3 persenPuskesmas melakukan ketiga kegiatan dalam Pelayanan Keluarga Berencana, sementara 34,8 persen tidak lengkap seluruh kegiatan (Tabel 4.8.5.1.a-b).

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi), adalah sebesar 88,0persenPuskesmas tidak melakukan sebesar 11,7persen. Persentase Puskesmas tertinggi melaksanakan kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) dijumpai pada Provinsi DI Yogyakarta (99,2%) kemudian diikuti oleh Provinsi Bali (99,1%) dan Provinsi Sumatera Barat (98,4%). Persentase Puskesmas terendah ditemukan pada Provinsi Papua (38,4%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (43,3%) dan Provinsi Maluku (57,1%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 92,4 persen pada perkotaan dan 86,5 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Penanganan KomplikasiKontrasepsi adalah sebesar 64,5 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 35,2 persen.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Penanganan KomplikasiKontrasepsiterdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (87,9%), kemudian diikuti oleh Provinsi Banten (83,0%), dan Provinsi Jawa Barat (77,3%). Persentase Puskesmas terendah ditemukan pada Provinsi Papua Barat (25,0%), diikuti oleh Provinsi Papua (25,2%) dan Provinsi Maluku (26,7%). Secara nasional, persentase Puskesmas

perkotaan melaksanakan kegiatan penanganan kontrasepsi hampir sama dengan Puskesmas perdesaan yaitu 64,8 persen pada perkotaan dan 64,4 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan pelayanan konsultasi KB adalah sebesar 95,8%, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 4,0%. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanankonsultasi KB terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan (100,0%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (99,4%), dan Provinsi Jawa Barat (99,1%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pelayanankonsultasi KB ditemukan pada Provinsi Maluku (83,2%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (82,7%) dan Provinsi Papua (57,8%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanankonsultasi KB yaitu 98,2% pada perkotaan dan 94,9% pada perdesaan.

Tabel 4.8.5.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana, RIFASKES 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi			Penanganan komplikasi kontrasepsi		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	62.7	37.0	0.3	50.2	49.5	0.3
2	Sumatera Utara	506	88.1	11.3	0.6	54.2	45.3	0.6
3	Sumatera Barat	248	98.4	1.6	0	69.4	30.6	0
4	Riau	195	84.6	14.9	0.5	68.2	31.3	0.5
5	Jambi	171	83.0	16.4	0.6	77.2	22.2	0.6
6	Sumatera Selatan	298	89.3	10.7	0	63.4	36.2	0.3
7	Bengkulu	173	96.0	3.5	0.6	65.9	34.1	0
8	Lampung	265	85.7	13.6	0.8	59.6	40.0	0.4
9	Bangka Belitung	57	86.0	14.0	0	49.1	50.9	0
10	Kepulauan Riau	65	87.7	12.3	0	61.5	38.5	0
11	DKI Jakarta	336	89.3	10.4	0.3	47.0	52.7	0.3
12	Jawa Barat	1031	98.0	1.8	0.2	77.3	22.5	0.2
13	Jawa Tengah	861	98.0	2.0	0	76.4	23.6	0
14	DI Yogyakarta	121	99.2	0	0.8	66.9	32.2	0.8
15	Jawa Timur	949	97.3	2.5	0.2	73.8	26.0	0.2
16	Banten	206	94.7	5.3	0	83.0	17.0	0
17	Bali	114	99.1	0.9	0	60.5	39.5	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	96.0	4.0	0	87.9	12.1	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	93.4	6.3	0.3	69.9	29.8	0.3
20	Kalimantan Barat	233	80.7	19.3	0	63.5	36.5	0
21	Kalimantan Tengah	176	84.7	15.3	0	63.1	36.9	0
22	Kalimantan Selatan	217	88.5	11.5	0	72.8	27.2	0
23	Kalimantan Timur	213	83.1	16.4	0.5	60.1	39.0	0.9
24	Sulawesi Utara	167	91.0	9.0	0	53.3	46.7	0
25	Sulawesi Tengah	163	90.2	9.8	0	71.2	28.8	0
26	Sulawesi Selatan	406	92.4	7.6	0	66.3	33.7	0
27	Sulawesi Tenggara	233	73.4	26.6	0	51.9	48.1	0
28	Gorontalo	74	97.3	2.7	0	62.2	37.8	0
29	Sulawesi Barat	81	82.7	16.0	1.2	63.0	35.8	1.2
30	Maluku	161	57.1	39.1	3.7	26.7	69.6	3.7
31	Maluku Utara	101	76.2	23.8	0	38.6	61.4	0
32	Papua Barat	104	43.3	56.7	0	25.0	75.0	0
33	Papua	294	38.4	60.9	0.7	25.2	74.5	0.3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	92.4	7.4	0.3	64.8	34.9	0.3
2	Perdesaan	6660	86.5	13.2	0.3	64.4	35.4	0.3
	INDONESIA	**8981**	**88.0**	**11.7**	**0.3**	**64.5**	**35.2**	**0.3**

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan lengkap (seluruh kegiatan tersebut di atas dilakukan)terkait dengan Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 61,3 persen, persentase Puskesmas tidak melakukan secara lengkap sebesar 38,4 persen.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Pelayanan Keluarga Berencana terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (86,6%), kemudian diikuti oleh Provinsi Banten (79,6%), dan Provinsi Jawa Barat (76,2%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan lengkap dalam Pelayanan Keluarga Berencana ditemukan pada Provinsi Papua Barat (18,3%), diikuti oleh Provinsi Papua (19,4%) dan Provinsi Maluku (21,7%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Pelayanan Keluarga Berencana (keempat kegiatan tersebut di atas dilakukan) dibandingan denganPuskesmas perdesaan yaitu 62,3 persen perkotaan pada dan 61,0 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.5.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana, RIFASKES 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Konsultasi KB (Keluarga Berencana)			Kegiatan Lengkap Keluarga Berencana		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	94.9	4.8	0.3	41.2	58.5	0.3
2	Sumatera Utara	506	93.9	5.5	0.6	51.8	47.6	0.6
3	Sumatera Barat	248	98.4	1.6	0	69.0	31.0	0
4	Riau	195	96.9	2.6	0.5	61.0	38.5	0.5
5	Jambi	171	98.2	1.2	0.6	69.6	29.8	0.6
6	Sumatera Selatan	298	98.3	1.7	0	58.1	41.6	0.3
7	Bengkulu	173	96.0	4.0	0	63.6	36.4	0
8	Lampung	265	96.6	3.0	0.4	54.7	44.5	0.8
9	Bangka Belitung	57	96.5	3.5	0	45.6	54.4	0
10	Kepulauan Riau	65	96.9	3.1	0	60.0	40.0	0
11	DKI Jakarta	336	98.2	1.5	0.3	45.5	54.2	0.3
12	Jawa Barat	1031	99.1	0.7	0.2	76.2	23.6	0.2
13	Jawa Tengah	861	99.4	0.6	0	75.5	24.5	0
14	DI Yogyakarta	121	98.3	0.8	0.8	66.1	33.1	0.8
15	Jawa Timur	949	98.3	1.5	0.2	71.1	28.7	0.2
16	Banten	206	97.1	2.9	0	79.6	20.4	0
17	Bali	114	98.2	1.8	0	59.6	40.4	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	97.3	2.7	0	86.6	13.4	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	96.7	3.0	0.3	68.2	31.5	0.3
20	Kalimantan Barat	233	95.3	4.7	0	58.4	41.6	0
21	Kalimantan Tengah	176	96.6	3.4	0	59.1	40.9	0
22	Kalimantan Selatan	217	100.0	0	0	67.3	32.7	0
23	Kalimantan Timur	213	99.1	0.5	0.5	56.8	42.3	0.9
24	Sulawesi Utara	167	95.8	4.2	0	50.3	49.7	0
25	Sulawesi Tengah	163	96.9	3.1	0	66.9	33.1	0
26	Sulawesi Selatan	406	99.0	1.0	0	63.8	36.2	0
27	Sulawesi Tenggara	233	94.0	6.0	0	45.9	54.1	0
28	Gorontalo	74	97.3	2.7	0	60.8	39.2	0
29	Sulawesi Barat	81	98.8	0	1.2	58.0	40.7	1.2
30	Maluku	161	83.2	13.0	3.7	21.7	74.5	3.7
31	Maluku Utara	101	87.1	12.9	0	36.6	63.4	0
32	Papua Barat	104	82.7	17.3	0	18.3	81.7	0
33	Papua	294	57.8	41.8	0.3	19.4	80.3	0.3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	98.2	1.6	0.3	62.3	37.4	0.3
2	Perdesaan	6660	94.9	4.8	0.3	61.0	38.7	0.3
	INDONESIA	**8981**	**95.8**	**4.0**	**0.3**	**61.3**	**38.4**	**0.3**

4.8.5.2 Pelatihan Program Keluarga Berencana

Pelatihan dalam pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana yang dikumpulkan Rifaskes 2011 meliputi pelatihan program KB, pelatihan pemasangan alat kontrasepsi, dan pelatihan penanganan komplikasi kontrasepsi yang diikuti tenaga puskesmas pada tahun 2009 dan tahun 2010. Secara nasional, dari ketiga jenis pelatihan Pelayanan Keluarga Berencana, pelatihan penanganan komplikasi kontrasepsi merupakan presentasi tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (50,8%) dan disusul oleh pelatihan pemasangan alat kontrasepsi (45,4%), dan pelatihan Program KB (24,6%). Secara nasional sebesar 22,1 persen Puskesmas mengikuti ketiga pelatihan dalam Pelayanan Keluarga Berencana, sedangkan sebesar 77,5 persen tidak lengkap mengikuti ketiga jenis pelatihan (Tabel 4.8.5.2.a-b).

Tabel 4.8.5.2.a

Persentase Puskesmas menurut Keikut sertaan Pelatihan Pelayanan Keluarga Berencana pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Program KB			Pemasangan alat kontrasepsi			Penanganan komplikasi kontrasepsi		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	47.3	52.4	0.3	56.6	43.1	0.3	16.7	83.0	0.3
2	Sumatera Utara	506	50.4	48.8	0.8	55.1	44.1	0.8	22.5	76.7	0.8
3	Sumatera Barat	248	56.0	44.0	0	61.7	38.3	0	24.2	75.8	0
4	Riau	195	64.1	35.4	0.5	70.3	29.2	0.5	32.8	66.7	0.5
5	Jambi	171	58.5	40.4	1.2	66.7	32.2	1.2	31.0	67.8	1.2
6	Sumatera Selatan	298	61.7	38.3	0	59.7	40.3	0	27.5	72.5	0
7	Bengkulu	173	31.8	68.2	0	38.7	61.3	0	13.3	86.7	0
8	Lampung	265	27.2	72.5	0.4	29.1	70.6	0.4	14.7	84.9	0.4
9	Bangka Belitung	57	59.6	40.4	0	59.6	40.4	0	22.8	77.2	0
10	Kepulauan Riau	65	58.5	41.5	0	43.1	56.9	0	7.7	92.3	0
11	DKI Jakarta	336	32.1	67.6	0.3	28.6	71.1	0.3	15.8	83.9	0.3
12	Jawa Barat	1031	54.9	44.9	0.2	62.3	37.5	0.2	33.6	66.1	0.3
13	Jawa Tengah	861	38.2	61.8	0	53.8	46.2	0	25.8	74.2	0
14	DI Yogyakarta	121	54.5	44.6	0.8	67.8	31.4	0.8	23.1	76.0	0.8
15	Jawa Timur	949	43.3	56.1	0.6	53.2	46.3	0.5	30.3	69.0	0.6
16	Banten	206	56.8	43.2	0	60.7	39.3	0	37.4	62.6	0
17	Bali	114	48.2	51.8	0	68.4	31.6	0	27.2	71.1	1.8
18	Nusa Tenggara Barat	149	51.7	48.3	0	51.0	49.0	0	38.9	61.1	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	57.6	42.1	0.3	67.9	31.8	0.3	36.8	62.9	0.3
20	Kalimantan Barat	233	57.5	42.1	0.4	56.7	42.9	0.4	25.8	73.8	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	32.4	67.6	0	34.1	65.9	0	12.5	87.5	0
22	Kalimantan Selatan	217	37.3	62.7	0	42.4	57.6	0	25.3	74.7	0
23	Kalimantan Timur	213	44.1	55.4	0.5	46.9	52.6	0.5	15.0	84.5	0.5
24	Sulawesi Utara	167	29.9	70.1	0	31.7	68.3	0	14.4	85.6	0
25	Sulawesi Tengah	163	45.4	54.6	0	46.0	54.0	0	25.2	74.8	0
26	Sulawesi Selatan	406	36.2	63.8	0	44.8	55.2	0	19.0	81.0	0
27	Sulawesi Tenggara	233	38.6	61.4	0	35.2	64.8	0	18.9	80.7	0.4
28	Gorontalo	74	68.9	29.7	1.4	68.9	31.1	0	36.5	62.2	1.4
29	Sulawesi Barat	81	60.5	38.3	1.2	60.5	38.3	1.2	24.7	72.8	2.5
30	Maluku	161	23.0	73.3	3.7	21.7	74.5	3.7	7.5	88.8	3.7
31	Maluku Utara	101	42.6	57.4	0	26.7	73.3	0	12.9	87.1	0
32	Papua Barat	104	39.4	60.6	0	34.6	65.4	0	14.4	85.6	0
33	Papua	294	25.2	74.1	0.7	24.8	74.1	1.0	15.0	84.0	1.0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	49.9	49.8	0.3	54.2	45.5	0.3	24.9	74.7	0.3
2	Perdesaan	6660	43.8	55.8	0.4	49.6	50.0	0.4	24.4	75.1	0.5
	INDONESIA	**8981**	**45.4**	**54.3**	**0.4**	**50.8**	**48.9**	**0.3**	**24.6**	**75.0**	**0.4**

Secara nasional, persentase Puskesmas mengikuti pelatihan Pelayanan KB adalah sebesar 45,4 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak mengikuti sebesar 54,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan Pelayanan KB terdapat di Provinsi Gorontalo (92,3%), kemudian diikuti oleh Provinsi Riau (64,1%) dan Provinsi Sumatera Selatan (61,7%), dan Persentase Puskesmas terendah mengikuti pelatihan Pelayanan KB ditemukan pada Provinsi Maluku (23,0%), diikuti oleh Provinsi Papua (25,2%) dan Provinsi Lampung (27,2%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi mengikuti pelatihan PelayananKB dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 49,9 persen pada perkotaan dan 43,8 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.5.2.b
Persentase Puskesmas menurut Keikut sertaan Pelatihan Pelayanan Keluarga Berencana pada Tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan lengkap Pelayanan KB		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	15.8	83.9	0.3
2	Sumatera Utara	506	20.0	79.2	0.8
3	Sumatera Barat	248	23.0	77.0	0
4	Riau	195	31.3	68.2	0.5
5	Jambi	171	28.1	70.8	1.2
6	Sumatera Selatan	298	25.5	74.5	0
7	Bengkulu	173	11.6	88.4	0
8	Lampung	265	12.8	86.8	0.4
9	Bangka Belitung	57	19.3	80.7	0
10	Kepulauan Riau	65	7.7	92.3	0
11	DKI Jakarta	336	15.2	84.5	0.3
12	Jawa Barat	1031	31.2	68.6	0.2
13	Jawa Tengah	861	22.2	77.8	0
14	DI Yogyakarta	121	20.7	78.5	0.8
15	Jawa Timur	949	27.0	72.4	0.6
16	Banten	206	34.0	66.0	0
17	Bali	114	23.7	74.6	1.8
18	Nusa Tenggara Barat	149	36.2	63.8	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	32.8	66.9	0.3
20	Kalimantan Barat	233	24.5	75.1	0.4
21	Kalimantan Tengah	176	11.4	88.6	0
22	Kalimantan Selatan	217	22.1	77.9	0
23	Kalimantan Timur	213	14.6	85.0	0.5
24	Sulawesi Utara	167	12.6	87.4	0
25	Sulawesi Tengah	163	22.7	77.3	0
26	Sulawesi Selatan	406	14.8	85.2	0
27	Sulawesi Tenggara	233	16.7	82.8	0.4
28	Gorontalo	74	32.4	66.2	1.4
29	Sulawesi Barat	81	19.8	77.8	2.5
30	Maluku	161	5.6	90.7	3.7
31	Maluku Utara	101	12.9	87.1	0
32	Papua Barat	104	13.5	86.5	0
33	Papua	294	13.3	85.7	1.0
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	22.9	76.8	0.3
2	Perdesaan	6660	21.8	77.7	0.4
	INDONESIA	**8981**	**22.1**	**77.5**	**0.4**

Secara nasional, persentase Puskesmas mengikuti pelatihan pemasangan alat kontrasepsi adalah sebesar 50,8 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak mengikuti sebesar 48,9 persen.Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan pemasangan alat kontrasepsi terdapat di Provinsi Riau (70,3%), kemudian diikuti oleh Provinsi Gorontalo

(68,9%), dan Provinsi Bali (68,4%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pelatihan pemasangan alat kontrasepsi ditemukan pada Provinsi Maluku (21,7%), diikuti oleh Provinsi Papua(24,8%) dan Provinsi Maluku Utara (26,7%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi mengikuti pelatihan pemasangan alat kontrasepsi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 54,2 persen pada perkotaan dan 49,6 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas mengikuti pelatihan penanganan komplikasi kontrasepsi adalah sebesar 24,6 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak mengikuti sebesar 75,0 persen.Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan penanganan komplikasi kontrasepsi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (38,9%), kemudian diikuti oleh Provinsi Banten (37,4%), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (36,8%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pelatihan penanganan komplikasi kontrasepsi ditemukan pada Provinsi Maluku (7,5%), diikuti oleh Provinsi Riau (7,7%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (26,6%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi mengikuti pelatihan penanganan komplikasi kontrasepsi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 24,9 persen pada perkotaan dan 24,4 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas mengikuti pelatihan lengkap terkait dengan Pelayanan Keluarga Berencana(ketiga jenis pelatihan tersebut di atas) adalah sebesar 22,1 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak mengikuti sebesar 77,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan secara lengkap dalam Pelayanan Keluarga Berencana terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (36,2%), kemudian diikuti oleh Provinsi Banten (34,0%), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (32,8%). PersentasePuskesmas terendah mengikuti pelatihan secara lengkap dalam Pelayanan Keluarga Berencana ditemukan pada Provinsi Maluku (5,6%), diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau (7,7%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (11,4%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan dalam mengikuti pelatihan lengkap Pelayanan Keluarga Berencana yaitu 22,9 persen pada perkotaan dan 21,8 persen pada perdesaan.

4.8.5.3. Pedoman Program Keluarga Berencana

Pedoman dalam Pelayanan kKluarga Berencana diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Pelayanan Keluarga Berencana,buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi, Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, Panduan Audit Medik Pelayanan KB, Panduan Baku Klinis KB, Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Yankespro) Terpadu, Panduan Kontrasepsi Darurat, dan Panduan Penanggulangan Efek Samping/komplikasi Kontrasepsi. Secara nasional pedoman Pelayanan Keluarga Berencana terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalah Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (61,9%) kemudian berturut turut Panduan Baku Klinis KB (40,2%) dan Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi (36,9%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki keseluruhan jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 22,0 persen sedangkan sebesar 77,5persen memiliki pedoman yang tidak lengkap (Tabel 4.8.5.3.a-b-c).

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi adalah sebesar 61,9 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 37,8 persen.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Panduan Praktis Pelayanan

Kontrasepsi ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (90,9%) dan diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (84,2%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (79,9%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi ditemukan pada Provinsi Maluku (16,8%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (28,7%) dan Provinsi Papua (33,7%). Secara nasional persentase ketersediaan Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi di perkotaan lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 65,1 persen di puskemas perkotaan dan 60,7 persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.5.3.a
Persentase Puskesmasmenurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana, RIFASKES 2011

No	Provinsi	Jml Pusk	Panduan Pelayanan Kontrasepsi			Panduan Audit Medik Pelayanan KB		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	48.6	51.1	0.3	27.7	71.7	0.6
2	Sumatera Utara	506	49.6	49.8	0.6	33.0	66.4	0.6
3	Sumatera Barat	248	54.0	46.0	0	35.1	64.9	0
4	Riau	195	50.8	48.7	0.5	26.2	73.3	0.5
5	Jambi	171	51.5	47.4	1.2	34.5	64.3	1.2
6	Sumatera Selatan	298	60.7	39.3	0	28.5	71.1	0.3
7	Bengkulu	173	46.2	53.8	0	25.4	74.6	0
8	Lampung	265	48.3	51.3	0.4	32.1	67.5	0.4
9	Bangka Belitung	57	78.9	21.1	0	42.1	57.9	0
10	Kepulauan Riau	65	58.5	41.5	0	30.8	69.2	0
11	DKI Jakarta	336	53.6	46.1	0.3	35.4	64.3	0.3
12	Jawa Barat	1031	74.9	24.8	0.3	43.5	56.2	0.3
13	Jawa Tengah	861	75.8	24.2	0	37.5	62.5	0
14	DI Yogyakarta	121	90.9	8.3	0.8	50.4	48.8	0.8
15	Jawa Timur	949	84.2	15.2	0.6	42.5	56.7	0.8
16	Banten	206	73.8	26.2	0	34.0	66.0	0
17	Bali	114	43.9	56.1	0	28.1	71.9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	79.9	20.1	0	41.6	58.4	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	77.8	21.9	0.3	40.4	59.3	0.3
20	Kalimantan Barat	233	70.0	30.0	0	41.6	58.4	0
21	Kalimantan Tengah	176	45.5	54.5	0	15.9	84.1	0
22	Kalimantan Selatan	217	55.3	44.7	0	23.0	77.0	0
23	Kalimantan Timur	213	70.9	28.6	0.5	35.2	64.3	0.5
24	Sulawesi Utara	167	28.7	71.3	0	13.2	86.8	0
25	Sulawesi Tengah	163	55.8	43.6	0.6	48.5	50.9	0.6
26	Sulawesi Selatan	406	50.7	49.3	0	24.9	75.1	0
27	Sulawesi Tenggara	233	51.1	48.9	0	23.2	76.8	0
28	Gorontalo	74	47.3	52.7	0	28.4	71.6	0
29	Sulawesi Barat	81	61.7	37.0	1.2	29.6	69.1	1.2
30	Maluku	161	16.8	79.5	3.7	11.2	85.1	3.7
31	Maluku Utara	101	56.4	43.6	0	23.8	76.2	0
32	Papua Barat	104	42.3	57.7	0	26.9	73.1	0
33	Papua	294	33.7	65.3	1.0	21.4	77.2	1.4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	65.1	34.5	0.3	36.0	63.6	0.4
2	Perdesaan	6660	60.7	38.9	0.4	33.0	66.6	0.4
	INDONESIA	**8981**	**61.9**	**37.8**	**0.4**	**33.8**	**65.8**	**0.4**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Panduan Audit Medik Pelayanan KB adalah sebesar 33,8 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 65,8 persen.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Panduan Audit Medik Pelayanan KB ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (50,4%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah (48,5%) dan Provinsi Jawa Barat (43,5%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Panduan

Audit Medik Pelayanan KB ditemukan pada Provinsi Maluku (11,2%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (13,2%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (15,9%). Secara nasional persentase ketersediaan Panduan Audit Medik Pelayanan KB di perkotaan lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 36,0 persen di puskemas perkotaan dan 33,0 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase PuskesmasmemiliKi PanduanBaku KlinisPelayanan KB adalah sebesar 40,2 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 59,4 persen.Persentase tertinggi PuskesmasmemiliKi Panduan Baku Klinis Pelayanan KB ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (62,0%) dan diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (54,9%) dan Provinsi Bangka Belitung (54,4%). Persentase terendah ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (11,4%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku (11,8%) dan Provinsi Papua (23,1%). Secara nasional persentase ketersediaan Panduan Baku Klinis Pelayanan KB di Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 44,4 persen di puskemas perkotaan dan 38,7 persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.5.3.b
Persentase Puskesmasmenurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana, RIFASKES 2011

No	Provinsi	Jml Pusk	Panduan Klinis KB			Pedoman Yankespro Terpadu		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	26.0	73.3	0.6	20.6	78.8	0.6
2	Sumatera Utara	506	33.2	66.2	0.6	27.7	71.7	0.6
3	Sumatera Barat	248	34.3	65.7	0	37.1	62.9	0
4	Riau	195	32.8	66.7	0.5	24.6	74.9	0.5
5	Jambi	171	33.3	65.5	1.2	29.2	69.6	1.2
6	Sumatera Selatan	298	39.6	60.4	0	34.6	65.4	0
7	Bengkulu	173	30.1	69.9	0	26.6	73.4	0
8	Lampung	265	31.7	67.9	0.4	29.4	70.2	0.4
9	Bangka Belitung	57	54.4	45.6	0	40.4	59.6	0
10	Kepulauan Riau	65	32.3	67.7	0	29.2	70.8	0
11	DKI Jakarta	336	40.8	58.9	0.3	37.8	61.9	0.3
12	Jawa Barat	1031	52.6	47.1	0.3	48.2	51.5	0.3
13	Jawa Tengah	861	54.9	45.1	0	41.8	58.2	0
14	DI Yogyakarta	121	62.0	37.2	0.8	58.7	40.5	0.8
15	Jawa Timur	949	52.8	46.5	0.7	52.6	46.8	0.6
16	Banten	206	46.1	53.9	0	34.0	66.0	0
17	Bali	114	42.1	57.9	0	24.6	75.4	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	48.3	51.7	0	38.3	61.7	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	43.7	56.0	0.3	37.4	61.9	0.7
20	Kalimantan Barat	233	45.1	54.9	0	52.4	47.6	0
21	Kalimantan Tengah	176	26.7	73.3	0	21.0	79.0	0
22	Kalimantan Selatan	217	38.2	61.8	0	28.6	71.0	0.5
23	Kalimantan Timur	213	38.0	61.5	0.5	32.4	67.1	0.5
24	Sulawesi Utara	167	11.4	88.6	0	14.4	85.6	0
25	Sulawesi Tengah	163	41.7	57.1	1.2	32.5	65.6	1.8
26	Sulawesi Selatan	406	26.8	73.2	0	22.2	77.8	0
27	Sulawesi Tenggara	233	26.6	73.4	0	23.2	76.8	0
28	Gorontalo	74	32.4	67.6	0	31.1	68.9	0
29	Sulawesi Barat	81	39.5	59.3	1.2	35.8	63.0	1.2
30	Maluku	161	11.8	84.5	3.7	11.8	84.5	3.7
31	Maluku Utara	101	25.7	74.3	0	26.7	73.3	0
32	Papua Barat	104	28.8	71.2	0	26.9	73.1	0
33	Papua	294	23.1	75.5	1.4	21.8	76.9	1.4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	44.4	55.3	0.3	38.3	61.4	0.3
2	Perdesaan	6660	38.7	60.9	0.4	34.5	65.0	0.5
	INDONESIA	**8981**	**40.2**	**59.4**	**0.4**	**35.5**	**64.1**	**0.4**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Yankespro) Terpaduadalah sebesar 35,5 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 64,1 persen. Persentase tertinggi Puskesmasmemiliki Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Yankespro) Terpaduditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (58,7%) dan diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (52,6%) dan Provinsi Kalimantan Barat (52,4%). Persentase terendah Puskesmasmemiliki pedoman yankespro terpadu ditemukan pada Provinsi Maluku (11,8%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (14,4%) dan Provinsi DI Aceh (20,6%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Yankespro) Terpadudi perkotaan lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 38,3 persen di Puskemas perkotaan dan 34,5 persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.5.3.c
Persentase Puskesmasmenurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana, RIFASKES 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Panduan Kontrasepsi Darurat			Panduan Penanggulangan Efek Samping Kontrasepsi			Pedoman Lengkap Keluarga Berencana		
			% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD	% ada	% tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	19.6	79.7	0.6	22.5	76.8	0.6	12.5	86.8	0.6
2	Sumatera Utara	506	26.1	73.3	0.6	29.4	70.0	0.6	20.0	79.4	0.6
3	Sumatera Barat	248	44.0	56.0	0	34.3	65.7	0	21.0	79.0	0
4	Riau	195	28.2	71.3	0.5	30.8	68.7	0.5	20.0	79.5	0.5
5	Jambi	171	23.4	75.4	1.2	27.5	71.3	1.2	17.0	81.9	1.2
6	Sumatera Selatan	298	28.9	71.1	0	31.2	67.8	1.0	17.8	81.9	0.3
7	Bengkulu	173	20.8	79.2	0	24.9	75.1	0	16.8	83.2	0
8	Lampung	265	28.3	71.3	0.4	29.1	70.6	0.4	17.4	82.3	0.4
9	Bangka Belitung	57	43.9	56.1	0	45.6	54.4	0	24.6	75.4	0
10	Kepulauan Riau	65	32.3	67.7	0	33.8	66.2	0	21.5	78.5	0
11	DKI Jakarta	336	34.2	65.5	0.3	33.0	66.7	0.3	25.3	74.4	0.3
12	Jawa Barat	1031	48.2	51.5	0.3	49.2	50.4	0.4	29.2	70.4	0.4
13	Jawa Tengah	861	49.4	50.6	0	52.1	47.9	0	28.1	71.9	0
14	DI Yogyakarta	121	71.9	27.3	0.8	67.8	31.4	0.8	29.8	69.4	0.8
15	Jawa Timur	949	50.5	48.8	0.7	50.7	48.4	0.9	28.6	70.3	1.2
16	Banten	206	41.3	58.7	0	42.7	57.3	0	22.3	77.7	0
17	Bali	114	31.6	68.4	0	28.9	71.1	0	18.4	81.6	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	38.9	61.1	0	45.6	54.4	0	26.8	73.2	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	34.4	65.2	0.3	40.1	59.6	0.3	26.2	73.5	0.3
20	Kalimantan Barat	233	39.5	60.5	0	39.5	60.5	0	22.7	77.3	0
21	Kalimantan Tengah	176	15.3	84.7	0	21.6	78.4	0	11.9	88.1	0
22	Kalimantan Selatan	217	26.3	73.7	0	32.7	67.3	0	15.2	84.3	0.5
23	Kalimantan Timur	213	31.9	67.6	0.5	36.2	63.4	0.5	24.4	75.1	0.5
24	Sulawesi Utara	167	9.6	90.4	0	12.6	87.4	0	7.8	92.2	0
25	Sulawesi Tengah	163	33.1	65.6	1.2	24.5	74.2	1.2	15.3	83.4	1.2
26	Sulawesi Selatan	406	25.6	74.4	0	26.1	73.9	0	15.8	84.2	0
27	Sulawesi Tenggara	233	26.2	73.8	0	27.5	72.1	0.4	15.9	84.1	0
28	Gorontalo	74	29.7	70.3	0	29.7	70.3	0	17.6	82.4	0
29	Sulawesi Barat	81	34.6	64.2	1.2	37.0	61.7	1.2	23.5	75.3	1.2
30	Maluku	161	8.7	87.6	3.7	9.3	87.0	3.7	6.8	89.4	3.7
31	Maluku Utara	101	22.8	77.2	0	26.7	73.3	0	18.8	81.2	0
32	Papua Barat	104	26.0	74.0	0	26.9	73.1	0	21.2	78.8	0
33	Papua	294	22.8	75.9	1.4	22.8	75.5	1.7	19.4	79.3	1.4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	38.7	61.0	0.3	38.1	61.5	0.4	23.4	76.2	0.4
2	Perdesaan	6660	34.4	65.2	0.4	36.4	63.1	0.5	21.5	78.0	0.5
	INDONESIA	**8981**	**35.5**	**64.1**	**0.4**	**36.9**	**62.7**	**0.5**	**22.0**	**77.5**	**0.5**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Panduan Kontrasepsi Darurat adalah sebesar 35,5 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 64,1 persen.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Panduan Kontrasepsi Darurat ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (71,9%) dan diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (50,5%) dan Provinsi Jawa Tengah (49,4%). Persentase ditemukan pada Provinsi Maluku (8,7%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (9,6%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (15,3%). Secara nasional persentase ketersediaan Panduan Kontrasepsi Darurat di perdesaan lebih tinggi pada Puskesmas perkotaan dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 38,7 persen di Puskemas perkotaan dan 34,4 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmasmemiliki Panduan Penanggulangan Efek Samping Kontrasepsi adalah sebesar 36,9 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 62,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Panduan Penanggulangan Efek Samping Kontrasepsi ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (67,8%) dan diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (52,1%) dan Provinsi Jawa Timur (50,7%). Persentase terendah ditemukan pada Provinsi Maluku (9,3%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (12,6%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (21,6%). Secara nasional persentase ketersediaan Panduan Penanggulangan Efek Samping Kontrasepsi di perkotaan lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 38,1 persen di Puskemas perkotaan dan 36,4 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki pedoman secara lengkap(yaitu memiliki keseluruhan jenis pedoman yang disebutkan di atas) untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 22,0 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak memiliki lengkap sebesar 77,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki pedoman Pelayanan Keluarga Berencana secara lengkap dapat ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (29,8%) dan diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (29,2%) dan Provinsi Jawa Timur (28,6%). Persentase terendah Puskesmas memiliki pedoman Pelayanan Keluarga Berencana secara lengkap ditemukan pada Provinsi Maluku (6,8%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (7,8%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (11,9%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana secara lengkap di perkotaan lebih tinggi dibandingan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 23,4 persen di puskemas perkotaan dan 21,5 persen di Puskesmas perdesaan.

4.8.4.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Keluarga Berencana

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingandiperlukan dalam Pelayanan Keluarga Berencana untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingandapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Secara nasional bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbinganyang paling banyak diterima Puskesmas dalam Pelayanan Keluarga Berencana adalah dalam bentuk pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan (57,0%) kemudian kunjungan supervisi dan monitoring oleh Dinas Kesehatan (56,0%), dan umpan balik (49,5%). Secara nasional perentase Puskesmas lengkap menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan monev, umpan balik dan pertemuan monev di Dinas

Kesehatan adalah sebesar 36,5 persen sementara 63,1 persen tidak menerima lengkap (Tabel 4.8.5.4. a-b).

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingandalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan ke Puskesmas untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 56,0 persen, persentase Puskesmas tidak menerima kunjungan sebesar 43,6 persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Pelayanan Keluarga Berencana dapat ditemukan pada Provinsi Banten (97,1%) kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (95,3%) dan Provinsi DI Yogyakarta (93,4%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Pelayanan Keluarga Berencana ditemukan pada Provinsi Papua Barat (35,6%) kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku (37,3%) dan Provinsi Papua (40,8%).Secara nasional presentase Puskesmas perdesaan menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan untuk PelayananKeluarga Berencana lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perkotaan yaitu 59,2 persen di perkotaan dan 54,9 persen di perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingandalam bentuk umpan balik untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 49,5 persen, persentase Puskesmas tidak menerima umpan balik sebesar 50,0 persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Pelayanan Keluarga Berencana ditemukan pada Provinsi Jawa Timur (77,1%) kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (69,6%) dan Provinsi DI Yogyakarta (62,0%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Pelayanan Keluarga Berencana ditemukan pada Provinsi Papua (16,7%) kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku (19,3%) dan Provinsi Papua Barat (24,0%). Secara nasional presentasi Puskesmas perkotaan menerima umpan balik Pelayanan Keluarga Berencanadari Dinas Kesehatan lebih rendah dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 51,7 persen di perkotaan dan 48,7 persen di perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingandalam bentuk pertemuan monev di Dinas Kesehatan untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 57,0 persen, persentase Puskesmas tidak mengikuti pertemuan Monev 42,6 persen.Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Pelayanan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (88,7%) kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (87,6%) dan Provinsi Jawa Barat (73,2%) dan Sedangkan persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Pelayanan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi Maluku (6,2%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua (16,3%) dan Provinsi Papua Barat (18,3%). Secara nasional presentasi Puskesmas perkotaan mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Pelayanan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan, yaitu 61,5 persen di perkotaan dan 55,4 persen di perdesaan.

Tabel 4.8.5.4.a
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan BimbinganPelayanan Keluarga Berencana, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Supervisi Dinkes			Umpan balik			Pertemuan Monitoring		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	42.8	56.6	0.6	33.4	65.6	1.0	48.6	50.8	0.6
2	Sumatera Utara	506	39.7	59.3	1.0	29.4	69.4	1.2	43.1	55.9	1.0
3	Sumatera Barat	248	51.2	48.8	0.0	41.9	57.7	0.4	54.8	45.2	0.0
4	Riau	195	52.8	45.6	1.5	51.3	46.7	2.1	62.6	35.4	2.1
5	Jambi	171	50.3	49.1	0.6	39.2	60.2	0.6	55.0	44.4	0.6
6	Sumatera Selatan	298	64.1	35.9	0.0	55.4	44.6	0.0	64.4	35.6	0.0
7	Bengkulu	173	60.7	39.3	0.0	51.4	48.6	0.0	38.7	61.3	0.0
8	Lampung	265	53.2	46.4	0.4	50.6	49.1	0.4	52.1	47.5	0.4
9	Bangka Belitung	57	61.4	38.6	0.0	54.4	45.6	0.0	49.1	50.9	0.0
10	Kepulauan Riau	65	53.8	46.2	0.0	55.4	44.6	0.0	61.5	38.5	0.0
11	DKI Jakarta	336	46.1	53.3	0.6	35.4	63.4	1.2	56.8	42.3	0.9
12	Jawa Barat	1031	65.9	33.9	0.2	69.6	30.2	0.2	73.2	26.6	0.2
13	Jawa Tengah	861	64.6	35.2	0.2	53.8	45.6	0.6	67.6	32.1	0.3
14	DI Yogyakarta	121	65.3	33.9	0.8	62.0	37.2	0.8	87.6	11.6	0.8
15	Jawa Timur	949	84.8	14.9	0.3	77.1	22.6	0.3	88.7	10.7	0.5
16	Banten	206	67.0	33.0	0.0	59.2	40.8	0.0	62.1	37.9	0.0
17	Bali	114	54.4	45.6	0.0	39.5	60.5	0.0	68.4	31.6	0.0
18	Nusa Tenggara Barat	149	71.8	28.2	0.0	57.0	42.3	0.7	67.8	32.2	0.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	52.0	47.7	0.3	40.7	58.9	0.3	52.0	47.7	0.3
20	Kalimantan Barat	233	55.4	44.6	0.0	54.9	44.6	0.4	52.4	47.6	0.0
21	Kalimantan Tengah	176	26.1	73.9	0.0	30.1	69.9	0.0	30.1	69.9	0.0
22	Kalimantan Selatan	217	57.1	42.9	0.0	47.0	53.0	0.0	53.5	46.5	0.0
23	Kalimantan Timur	213	40.4	59.2	0.5	31.5	68.1	0.5	33.8	65.7	0.5
24	Sulawesi Utara	167	44.3	55.7	0.0	37.1	62.9	0.0	35.9	63.5	0.6
25	Sulawesi Tengah	163	31.3	68.7	0.0	26.4	73.6	0.0	28.2	71.8	0.0
26	Sulawesi Selatan	406	67.2	32.8	0.0	46.8	53.2	0.0	57.9	42.1	0.0
27	Sulawesi Tenggara	233	50.2	49.8	0.0	45.9	54.1	0.0	40.3	59.7	0.0
28	Gorontalo	74	75.7	24.3	0.0	58.1	41.9	0.0	73.0	27.0	0.0
29	Sulawesi Barat	81	45.7	51.9	2.5	40.7	56.8	2.5	33.3	64.2	2.5
30	Maluku	161	16.1	80.7	3.1	19.3	77.0	3.7	6.2	90.1	3.7
31	Maluku Utara	101	43.6	56.4	0.0	50.5	49.5	0.0	35.6	64.4	0.0
32	Papua Barat	104	19.2	80.8	0.0	24.0	76.0	0.0	18.3	81.7	0.0
33	Papua	294	17.3	81.6	1.0	16.7	82.3	1.0	16.3	82.7	1.0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	59.2	40.5	0.3	51.7	47.9	0.5	61.5	38.1	0.4
2	Perdesaan	6660	54.9	44.7	0.4	48.7	50.7	0.5	55.4	44.1	0.5
	INDONESIA	**8981**	**56.0**	**43.6**	**0.4**	**49.5**	**50.0**	**0.5**	**57.0**	**42.6**	**0.5**

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Keluarga Berencana(ketiga jenis bimbingan diterima oleh Puskesmas) adalah sebesar 36,5 persen, persentase Puskesmas menerima tidak lengkap sebesar 63,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Keluarga Berencana dari Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi Jawa Timur (67,5%) kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (53,7%) dan Provinsi Gorontalo (52,7%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerimaPengawasan, Evaluasi dan Bimbingansecara lengkap ditemukan pada Provinsi Maluku (2,5%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua Barat (8,7%) dan Provinsi Papua (9,2%).Secara nasional presentase Puskesmas perkotaan menerimaPengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap (ketiga jenis bimbingan diterima oleh Puskesmas) lebih tinggi

dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 40,4 persen di perkotaan dibandingkan dengan 35,2 persen di perdesaan.

Tabel 4.8.5.4.b
Persentase Puskesmasmenurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan BimbinganPelayanan Keluarga Berencana, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap Keluarga Berencana		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	20.3	79.1	0.6
2	Sumatera Utara	506	19.8	79.1	1.2
3	Sumatera Barat	248	28.2	71.4	0.4
4	Riau	195	37.4	61.0	1.5
5	Jambi	171	26.3	73.1	0.6
6	Sumatera Selatan	298	44.3	55.7	0.0
7	Bengkulu	173	26.0	74.0	0.0
8	Lampung	265	34.3	65.3	0.4
9	Bangka Belitung	57	35.1	64.9	0.0
10	Kepulauan Riau	65	41.5	58.5	0.0
11	DKI Jakarta	336	29.2	70.2	0.6
12	Jawa Barat	1031	53.7	46.1	0.2
13	Jawa Tengah	861	44.6	55.1	0.3
14	DI Yogyakarta	121	48.8	50.4	0.8
15	Jawa Timur	949	67.5	32.0	0.4
16	Banten	206	49.5	50.5	0.0
17	Bali	114	32.5	67.5	0.0
18	Nusa Tenggara Barat	149	45.6	54.4	0.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	27.5	72.2	0.3
20	Kalimantan Barat	233	34.8	65.2	0.0
21	Kalimantan Tengah	176	11.4	88.6	0.0
22	Kalimantan Selatan	217	34.6	65.4	0.0
23	Kalimantan Timur	213	19.7	79.8	0.5
24	Sulawesi Utara	167	24.0	76.0	0.0
25	Sulawesi Tengah	163	11.7	88.3	0.0
26	Sulawesi Selatan	406	34.2	65.8	0.0
27	Sulawesi Tenggara	233	26.6	73.4	0.0
28	Gorontalo	74	52.7	47.3	0.0
29	Sulawesi Barat	81	16.0	81.5	2.5
30	Maluku	161	2.5	94.4	3.1
31	Maluku Utara	101	17.8	82.2	0.0
32	Papua Barat	104	8.7	91.3	0.0
33	Papua	294	9.2	89.8	1.0
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	40.3	59.3	0.4
2	Perdesaan	6660	35.2	64.4	0.4
	INDONESIA	**8981**	**36.5**	**63.1**	**0.4**

4.8.6. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

4.8.6.1. Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan dalam pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif, Pemberian MP-ASI Anak Umur 6-24 bulan, Pemberian Kapsul Vit-A pada Balita, Pemberian Tablet Besi (90 tablet) pada Ibu Hamil, Pemberian PMT Pemulihan Balita pada Gakin dan Penimbangan Balita. Secara nasional, dari keselurahan jenis kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di atas, kegiatan penimbangan balita merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (98,1%) dan disusul oleh pemberian kapsul vitamin A pada Balita (97,9%), dan pemberian tablet besi pada ibu hamil (96,9%), peningkatan pemberian ASI eksklusif (83,4%), Pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan (83,2%), danpemberian PMT pemulihan balita pada Gakin (78,5%). Secara nasional sebesar 61,9 persen Puskesmas melakukan lengkap keseluruhan kegiatan di atas dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat, sedangkan 37,8 persen tidak lengkap seluruh kegiatan (Tabel 4.8.6.1. a-b-c).

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan peningkatan pemberian ASI eksklusif adalah sebesar 83,4persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 16,2persen.Persentase Puskesmas melakukan kegiatan peningkatan pemberian ASI eksklusif tertinggi ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (97,5%) dan diikuti dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (96,0%) dan Provinsi Riau (91,3%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan peningkatan pemberian ASI eksklusif ditemukan pada Provinsi Papua (51,0%), diikuti oleh Provinsi Kalimantan Tengah (59,7%) dan Provinsi Maluku Utara (61,4%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan peningkatan pemberian ASI eksklusif dibandingkan dan Puskesmas perdesaan, yaitu 85,9 persen pada perkotaan dan 82,5 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan adalah sebesar 83,2persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 16,5persen.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan terdapat di Provinsi Banten (98,1%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (97,6%), dan Provinsi Sumatera Selatan (97,3%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan ditemukan pada Provinsi Bali (53,5%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (60,9%) dan Provinsi Papua (63,9%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 87,7 persen pada perkotaan dan 81,6 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan pemberian kapsul Vit-A pada balita adalah sebesar 97,9persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 1,8persen.Seluruh Puskesmas melakukan pemberian kapsul vitamin A pada balita dapat ditemukan pada delapan provinsi dari tiga puluh tiga provinsi di Indonesia. Provinsi-Provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Banten, Bali Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian kapsul Vit-A pada balita ditemukan pada Provinsi Papua (77,6%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (84,6%) dan Provinsi Maluku (85,7%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas

perdesaan dalam melakukan kegiatan pemberian kapsul Vit-A pada balita, yaitu 99,0 persen pada perkotaan dan 97,6 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan pemberian tablet besi (90 tablet) pada ibu hamil adalah sebesar 96,9persen, persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 2,7persen.Terdapat tiga Provinsi dimana seluruh Puskesmas melakukan pemberian tablet besi pada ibu hamil, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Bangka Belitung dan Sulawesi Utara. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian tablet besi (90 tablet) pada ibu hamil ditemukan pada Provinsi Papua (77,2%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (83,7%) dan Provinsi Maluku (85,7%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan pemberian tablet besi (90 tablet) pada ibu hamil dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 97,5 persen pada perkotaan dan 96,8 persenpada perdesaan.

Tabel 4.8.6.1. a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifakes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Peningkatan ASI eksklusif			Pemberian MP-ASI		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	74,9	25,1	0,0	81,4	18,6	0,0
2	Sumatera Utara	506	73,9	25,9	0,2	89,7	10,1	0,2
3	Sumatera Barat	248	83,1	16,5	0,4	97,6	2,4	0,0
4	Riau	195	91,3	8,2	0,5	91,8	7,7	0,5
5	Jambi	171	89,5	9,4	1,2	97,1	1,8	1,2
6	Sumatera Selatan	298	89,6	10,4	0,0	97,3	2,7	0,0
7	Bengkulu	173	87,3	12,7	0,0	65,9	34,1	0,0
8	Lampung	265	81,5	18,5	0,0	71,7	28,3	0,0
9	Bangka Belitung	57	86,0	14,0	0,0	89,5	10,5	0,0
10	Kepulauan Riau	65	86,2	13,8	0,0	86,2	13,8	0,0
11	DKI Jakarta	336	89,6	9,8	0,6	93,8	6,0	0,3
12	Jawa Barat	1031	88,8	10,8	0,4	73,4	26,3	0,3
13	Jawa Tengah	861	90,6	9,3	0,1	83,4	16,6	0,0
14	DI Yogyakarta	121	97,5	2,5	0,0	88,4	11,6	0,0
15	Jawa Timur	949	89,3	10,3	0,4	88,6	11,0	0,4
16	Banten	206	88,8	11,2	0,0	98,1	1,9	0,0
17	Bali	114	91,2	8,8	0,0	53,5	46,5	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	96,0	3,4	0,7	93,3	6,7	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	83,4	15,9	0,7	78,5	21,2	0,3
20	Kalimantan Barat	233	78,5	20,6	0,9	87,1	12,0	0,9
21	Kalimantan Tengah	176	59,7	39,8	0,6	89,2	10,8	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	86,6	12,9	0,5	93,1	6,5	0,5
23	Kalimantan Timur	213	73,7	24,9	1,4	82,6	16,4	0,9
24	Sulawesi Utara	167	85,0	14,4	0,6	77,8	22,2	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	85,3	14,1	0,6	81,0	18,4	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	83,0	16,7	0,2	88,7	11,3	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	81,5	18,5	0,0	60,9	39,1	0,0
28	Gorontalo	74	90,5	8,1	1,4	97,3	1,4	1,4
29	Sulawesi Barat	81	81,5	17,3	1,2	65,4	33,3	1,2
30	Maluku	161	63,4	33,5	3,1	64,6	32,3	3,1
31	Maluku Utara	101	61,4	37,6	1,0	89,1	9,9	1,0
32	Papua Barat	104	72,1	27,9	0,0	86,5	13,5	0,0
33	Papua	294	51,0	48,0	1,0	63,9	35,7	0,3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	85,9	13,7	0,4	87,7	12,1	0,3
2	Perdesaan	6660	82,5	17,0	0,5	81,6	18,0	0,3
	INDONESIA	**8981**	**83,4**	**16,2**	**0,4**	**83,2**	**16,5**	**0,3**

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin adalah sebesar 78,5persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 21,2 persen.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin terdapat di Provinsi Di Yogyakarta (93,4%), kemudian diikuti oleh Provinsi Banten (92,7%), dan Provinsi Sumatera Selatan (91,9%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin ditemukan pada Provinsi Maluku (47,2%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (54,5%) dan Provinsi Bali (56,1%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin, yaitu 84,4 persen pada perkotaan dan 76,4 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.6.1. b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifakes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pemberian vitamin A			Pemberian tablet besi		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	98,4	1,6	0,0	95,5	4,5	0,0
2	Sumatera Utara	506	97,6	2,2	0,2	96,6	3,2	0,2
3	Sumatera Barat	248	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
4	Riau	195	98,5	1,0	0,5	97,9	1,5	0,5
5	Jambi	171	98,8	0,0	1,2	98,8	0,0	1,2
6	Sumatera Selatan	298	99,0	1,0	0,0	99,0	1,0	0,0
7	Bengkulu	173	98,3	1,7	0,0	97,7	2,3	0,0
8	Lampung	265	98,9	1,1	0,0	97,4	2,6	0,0
9	Bangka Belitung	57	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	65	100,0	0,0	0,0	96,9	3,1	0,0
11	DKI Jakarta	336	98,2	1,5	0,3	94,6	5,1	0,3
12	Jawa Barat	1031	99,5	0,2	0,3	99,2	0,5	0,3
13	Jawa Tengah	861	99,9	0,1	0,0	98,6	1,4	0,0
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0,0	0,0	97,5	2,5	0,0
15	Jawa Timur	949	99,4	0,2	0,4	99,2	0,4	0,4
16	Banten	206	100,0	0,0	0,0	99,0	1,0	0,0
17	Bali	114	100,0	0,0	0,0	98,2	1,8	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	100,0	0,0	0,0	99,3	0,7	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	98,3	1,3	0,3	97,4	2,0	0,7
20	Kalimantan Barat	233	99,1	0,4	0,4	97,4	2,1	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	99,4	0,6	0,0	98,3	1,7	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	99,5	0,0	0,5	98,6	0,9	0,5
23	Kalimantan Timur	213	98,6	0,5	0,9	96,7	2,3	0,9
24	Sulawesi Utara	167	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	97,5	1,8	0,6	97,5	1,8	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	99,0	1,0	0,0	96,3	3,7	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	97,0	3,0	0,0	96,6	3,4	0,0
28	Gorontalo	74	98,6	0,0	1,4	98,6	0,0	1,4
29	Sulawesi Barat	81	98,8	0,0	1,2	96,3	2,5	1,2
30	Maluku	161	85,7	11,2	3,1	85,7	11,2	3,1
31	Maluku Utara	101	97,0	2,0	1,0	98,0	1,0	1,0
32	Papua Barat	104	84,6	15,4	0,0	83,7	16,3	0,0
33	Papua	294	77,6	22,1	0,3	77,2	22,1	0,7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	99,0	0,8	0,3	97,5	2,2	0,3
2	Perdesaan	6660	97,6	2,1	0,3	96,8	2,9	0,3
	INDONESIA	**8981**	**97,9**	**1,8**	**0,3**	**96,9**	**2,7**	**0,3**

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan penimbangan bayi adalah sebesar 98,1persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 1,5persen.Seluruh Puskesmas melakukan penimbangan bayi ditemukan pada delapan provinsi di Indonesia yaitu, Provinsi Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan penimbangan bayi ditemukan pada Provinsi Papua (78,6%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (87,5%) dan Provinsi Maluku (90,1%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam melakukan kegiatan penimbangan bayi, yaitu 99,1 persen pada perkotaan dan 97,8 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.6.1. c
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifakes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pemberian PMT balita gizi buruk			Penimbangan Balita			Kegiatan Lengkap Gizi Masyarakat		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	77,5	22,5	0,0	99,4	0,6	0,0	53,4	46,6	0,0
2	Sumatera Utara	506	78,7	21,1	0,2	97,6	2,2	0,2	60,1	39,7	0,2
3	Sumatera Barat	248	85,9	14,1	0,0	100,0	0,0	0,0	72,2	27,4	0,4
4	Riau	195	83,6	15,9	0,5	97,9	1,5	0,5	77,4	22,1	0,5
5	Jambi	171	84,2	14,6	1,2	98,8	0,0	1,2	77,2	21,6	1,2
6	Sumatera Selatan	298	91,9	8,1	0,0	99,7	0,3	0,0	80,2	19,8	0,0
7	Bengkulu	173	71,7	28,3	0,0	99,4	0,6	0,0	53,2	46,8	0,0
8	Lampung	265	61,1	38,9	0,0	99,2	0,8	0,0	46,4	53,6	0,0
9	Bangka Belitung	57	89,5	10,5	0,0	100,0	0,0	0,0	73,7	26,3	0,0
10	Kepulauan Riau	65	81,5	18,5	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	35,4	0,0
11	DKI Jakarta	336	89,3	10,4	0,3	97,9	1,8	0,3	78,6	21,1	0,3
12	Jawa Barat	1031	86,1	13,6	0,3	99,5	0,2	0,3	61,8	37,8	0,4
13	Jawa Tengah	861	79,1	20,9	0,0	99,5	0,5	0,0	63,9	36,1	0,0
14	DI Yogyakarta	121	93,4	6,6	0,0	100,0	0,0	0,0	80,2	19,8	0,0
15	Jawa Timur	949	90,6	8,9	0,5	99,5	0,1	0,4	74,5	25,0	0,5
16	Banten	206	92,7	7,3	0,0	100,0	0,0	0,0	80,1	19,9	0,0
17	Bali	114	56,1	43,9	0,0	100,0	0,0	0,0	30,7	69,3	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	90,6	9,4	0,0	100,0	0,0	0,0	81,9	17,4	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	71,9	27,5	0,7	99,0	0,3	0,7	52,6	47,0	0,3
20	Kalimantan Barat	233	68,2	31,3	0,4	99,1	0,4	0,4	51,9	47,6	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	64,2	35,2	0,6	98,3	1,7	0,0	38,1	61,4	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	89,9	9,7	0,5	99,5	0,0	0,5	75,6	24,0	0,5
23	Kalimantan Timur	213	72,3	26,8	0,9	97,7	1,4	0,9	55,4	43,7	0,9
24	Sulawesi Utara	167	64,1	35,9	0,0	100,0	0,0	0,0	52,7	46,7	0,6
25	Sulawesi Tengah	163	77,9	21,5	0,6	98,2	1,2	0,6	62,0	37,4	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	74,1	25,9	0,0	99,3	0,7	0,0	59,4	40,4	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	54,5	45,5	0,0	97,0	3,0	0,0	42,5	57,5	0,0
28	Gorontalo	74	81,1	17,6	1,4	98,6	0,0	1,4	75,7	23,0	1,4
29	Sulawesi Barat	81	61,7	37,0	1,2	98,8	0,0	1,2	45,7	53,1	1,2
30	Maluku	161	47,2	49,7	3,1	90,1	6,8	3,1	31,1	65,8	3,1
31	Maluku Utara	101	66,3	32,7	1,0	99,0	0,0	1,0	40,6	58,4	1,0
32	Papua Barat	104	68,3	31,7	0,0	87,5	12,5	0,0	49,0	51,0	0,0
33	Papua	294	57,1	42,2	0,7	78,6	20,7	0,7	39,1	60,2	0,7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	84,4	15,3	0,3	99,1	0,6	0,3	68,2	31,5	0,3
2	Perdesaan	6660	76,4	23,2	0,4	97,8	1,8	0,3	59,6	39,9	0,4
	INDONESIA	**8981**	**78,5**	**21,2**	**0,3**	**98,1**	**1,5**	**0,3**	**61,9**	**37,8**	**0,4**

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan lengkap terkait dengan Program Perbaikan Gizi Masyarakat(seluruh kegiatan tersebut di atas dilakukan) adalah sebesar 61,9persen, persentase Puskesmas tidak melakukan secara lengkap sebesar 37,8persen.

Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (81,9%), kemudian diikuti oleh Provinsi Suamtera Selatan dan Provinsi DI Yogyakarta (80,2%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan lengkap dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat ditemukan pada Provinsi Bali (30,7%), diikuti oleh Provinsi Maluku (31,1%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (38,1%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 68,2 persen pada perkotaan dan 59,6 persen pada perdesaan.

4.8.6.2. Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pelatihan dalam pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang telah dikumpulkan dalam Rifaskes 2012 meliputi patihan konseling ASI, pelatihan pemantauan pertumbuhan, pelatihan konseling MP-ASI, dan pelatihan tata laksana gizi burukyang diikuti oleh tenaga Puskesmas tahun 2009 dan 2010.Secara nasional, dari keseluruhan pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakatyang tersebut di atas, pelatihan pemantauan pertumbuhan merupakan presentasi tertinggi yang diterima oleh Puskesmas (36,8%) dan disusul oleh Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk (36,7%) dan Pelatihan Konseling ASI (27,7%). Secara nasional sebesar 12,1 persen Puskesmas menerima lengkap keseluruhan pelatihan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat, sementara 87,5 persentidak lengkap (Tabel 4.8.6.2.a-b).

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan konseling ASI adalah sebesar 27,7persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 71,9persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan konseling ASI terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (66,9%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan (46,3%), dan Provinsi DKI Jakarta (44,3%). Persentase Puskesmas terendah menerima pelatihan konseling ASI ditemukan pada Provinsi Bengkulu (9,2%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (10,7%) dan Provinsi Maluku (11,8%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi menerima pelatihan konseling ASI dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 35,4persen pada perkotaan dan 25,0persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan pemantauan pertumbuhanadalah sebesar 36,8persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 62,9persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan pemantauan pertumbuhan terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (61,7%), kemudian diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau (58,5%), dan Provinsi Bali (57,9%). Persentase Puskesmas terendah menerima pelatihan pemantauan pertumbuhan ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (16,2%), diikuti oleh Provinsi Bengkulu (17,3%) dan Provinsi Papua (19,7%).Secara nasional, persentase Puskesmas

perkotaan lebih tinggi menerima pelatihan pemantauan pertumbuhan dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 41,5persen pada perkotaan dan 35,1persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan konseling MP-ASI adalah sebesar 22,6persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 77,0persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan konseling MP-ASI terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (43,6%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan (34,9%), dan Provinsi DKI Jakarta (30,4%). Persentase Puskesmas terendah menerima pelatihan konseling MP-ASI ditemukan pada Provinsi Bengkulu (5,8%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (8,4%) dan Provinsi Sulawesi Barat (9,9%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi menerima pelatihan konseling MP-ASI dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 25,9persen pada perkotaan dan 21,4persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.6.2.a

Persentase Puskesmas menurut KeikutsertaandalamPelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Konseling ASI			Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan			Pelatihan Konseling MP-ASI		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	36,7	63,0	0,3	50,5	49,5	0,0	28,6	71,4	0,0
2	Sumatera Utara	506	19,2	80,6	0,2	31,2	68,6	0,2	21,3	78,5	0,2
3	Sumatera Barat	248	37,5	62,5	0,0	42,7	57,3	0,0	25,0	75,0	0,0
4	Riau	195	32,8	66,7	0,5	39,0	60,5	0,5	26,7	72,8	0,5
5	Jambi	171	26,9	71,9	1,2	44,4	54,4	1,2	26,9	71,9	1,2
6	Sumatera Selatan	298	46,3	53,7	0,0	45,3	54,7	0,0	34,9	65,1	0,0
7	Bengkulu	173	9,2	90,2	0,6	17,3	82,7	0,0	5,8	93,6	0,6
8	Lampung	265	17,7	82,3	0,0	34,3	65,7	0,0	17,4	82,6	0,0
9	Bangka Belitung	57	40,4	59,6	0,0	52,6	47,4	0,0	22,8	77,2	0,0
10	Kepulauan Riau	65	33,8	66,2	0,0	58,5	41,5	0,0	23,1	76,9	0,0
11	DKI Jakarta	336	44,3	55,4	0,3	35,1	64,6	0,3	30,4	69,3	0,3
12	Jawa Barat	1031	31,9	67,6	0,5	43,5	56,2	0,4	28,5	71,1	0,4
13	Jawa Tengah	861	29,4	70,5	0,1	36,9	63,1	0,0	20,3	79,6	0,1
14	DI Yogyakarta	121	66,9	33,1	0,0	34,7	65,3	0,0	22,3	77,7	0,0
15	Jawa Timur	949	17,6	81,8	0,6	29,1	70,3	0,6	18,8	80,7	0,5
16	Banten	206	39,3	60,7	0,0	36,4	63,6	0,0	29,6	70,4	0,0
17	Bali	114	19,3	80,7	0,0	57,9	42,1	0,0	10,5	89,5	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	43,0	56,4	0,7	61,7	37,6	0,7	43,6	55,7	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	43,7	56,0	0,3	47,4	52,3	0,3	28,5	70,9	0,7
20	Kalimantan Barat	233	34,3	65,2	0,4	48,1	51,5	0,4	26,2	73,4	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	12,5	87,5	0,0	30,7	69,3	0,0	14,2	85,8	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	26,7	73,3	0,0	41,9	58,1	0,0	27,2	72,8	0,0
23	Kalimantan Timur	213	24,4	74,6	0,9	40,8	58,2	0,9	28,2	70,9	0,9
24	Sulawesi Utara	167	14,4	85,6	0,0	16,2	83,8	0,0	8,4	91,6	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	25,2	74,2	0,6	30,7	68,7	0,6	21,5	77,9	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	26,8	73,2	0,0	33,5	66,5	0,0	22,2	77,8	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	10,7	89,3	0,0	27,5	72,5	0,0	14,2	85,8	0,0
28	Gorontalo	74	20,3	78,4	1,4	43,2	55,4	1,4	16,2	82,4	1,4
29	Sulawesi Barat	81	25,9	72,8	1,2	37,0	61,7	1,2	9,9	88,9	1,2
30	Maluku	161	11,8	85,1	3,1	23,0	73,9	3,1	14,9	82,0	3,1
31	Maluku Utara	101	19,8	78,2	2,0	25,7	72,3	2,0	12,9	85,1	2,0
32	Papua Barat	104	21,2	78,8	0,0	23,1	76,9	0,0	12,5	87,5	0,0
33	Papua	294	13,9	85,4	0,7	19,7	79,6	0,7	12,2	87,1	0,7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	35,4	64,3	0,3	41,5	58,3	0,3	25,9	73,9	0,3
2	Perdesaan	6660	25,0	74,6	0,4	35,1	64,5	0,4	21,4	78,1	0,4
	INDONESIA	**8981**	**27,7**	**71,9**	**0,4**	**36,8**	**62,9**	**0,4**	**22,6**	**77,0**	**0,4**

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan tata laksana gizi buruk adalah sebesar 36,7persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 62,9persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan tata laksana gizi buruk terdapat di Provinsi Sumatera Selatan (54,7%), kemudian diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat (50,2%), dan Provinsi Jawa Barat (47,6%). Persentase Puskesmas terendah menerima pelatihan tata laksana gizi buruk ditemukan pada Provinsi Papua (5,8%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (18,0%) dan Provinsi Bengkulu (19,7%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi menerima pelatihan tata laksana gizi buruk dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 41,5 persen pada perkotaan dan 35,0 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.6.2.b
Persentase Puskesmas menurut keikutsertaandalamPelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat tahun 2009 dan 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk			Pelatihan Lengkap Gizi Masyarakat		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	37,3	62,7	0,0	14,1	85,5	0,3
2	Sumatera Utara	506	28,9	70,9	0,2	9,9	89,9	0,2
3	Sumatera Barat	248	46,4	53,6	0,0	9,7	90,3	0,0
4	Riau	195	42,1	57,4	0,5	17,4	82,1	0,5
5	Jambi	171	41,5	57,3	1,2	14,0	84,8	1,2
6	Sumatera Selatan	298	54,7	45,3	0,0	23,2	76,8	0,0
7	Bengkulu	173	19,7	80,3	0,0	2,3	97,1	0,6
8	Lampung	265	23,4	76,6	0,0	7,2	92,8	0,0
9	Bangka Belitung	57	24,6	75,4	0,0	8,8	91,2	0,0
10	Kepulauan Riau	65	43,1	56,9	0,0	10,8	89,2	0,0
11	DKI Jakarta	336	34,8	64,9	0,3	16,7	83,0	0,3
12	Jawa Barat	1031	47,6	52,1	0,3	16,6	83,0	0,4
13	Jawa Tengah	861	36,7	63,2	0,1	13,5	86,4	0,1
14	DI Yogyakarta	121	43,8	56,2	0,0	13,2	86,8	0,0
15	Jawa Timur	949	40,9	58,6	0,5	9,8	89,6	0,6
16	Banten	206	45,6	54,4	0,0	16,0	84,0	0,0
17	Bali	114	22,8	77,2	0,0	7,0	93,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	44,3	55,0	0,7	20,1	79,2	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	31,8	67,5	0,7	14,2	85,1	0,7
20	Kalimantan Barat	233	50,2	49,4	0,4	16,3	83,3	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	22,7	77,3	0,0	7,4	92,6	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	41,0	59,0	0,0	13,4	86,6	0,0
23	Kalimantan Timur	213	38,0	61,0	0,9	12,7	86,4	0,9
24	Sulawesi Utara	167	18,0	82,0	0,0	5,4	94,6	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	30,1	69,3	0,6	9,2	90,2	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	32,8	67,2	0,0	10,1	89,9	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	32,2	67,8	0,0	6,9	93,1	0,0
28	Gorontalo	74	32,4	66,2	1,4	8,1	90,5	1,4
29	Sulawesi Barat	81	32,1	66,7	1,2	3,7	95,1	1,2
30	Maluku	161	26,1	70,8	3,1	3,1	93,8	3,1
31	Maluku Utara	101	33,7	64,4	2,0	5,9	92,1	2,0
32	Papua Barat	104	26,0	74,0	0,0	7,7	92,3	0,0
33	Papua	294	18,0	81,3	0,7	7,5	91,8	0,7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	41,5	58,2	0,3	13,9	85,9	0,3
2	Perdesaan	6660	35,0	64,6	0,4	11,4	88,1	0,5
	INDONESIA	**8981**	**36,7**	**62,9**	**0,4**	**12,1**	**87,5**	**0,4**

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pelatihan lengkap(keseluruhan jenis pelatihan tersebut di atas) terkait dengan Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 12,1persen, persentase Puskesmas tidak menerima sebesar 87,5persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan secara lengkap Program Perbaikan Gizi Masyrakat terdapat di Provinsi Sumatera Selatan (23,2%), kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (20,1%), dan Provinsi Riau (17,4%).

Persentase Puskesmas terendah menerima pelatihan secara lengkap dalam Program Perbaikan Gizi Masyrakat terdapat di Provinsi Bengkulu (2,3%), kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku (3,1%), dan Provinsi Sulawesi Barat (3,7%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan dalam menerima pelatihan lengkap Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu 13,9 persen pada perkotaan dan 11,4 persen pada perdesaan.

4.8.6.3. Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat,buku Pedoman yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi, Buku Surveilans Gizi, Buku Pegangan Kader, Buku Manajemen Pemberian Vitamin A, Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe, Buku Pedoman ASI, Buku Pedoman Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium, Buku StandarPemantauan Pertumbuhan, dan Buku Pengelolaan MP-ASI untuk anak usia 6-24 bulan.Secara nasional Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalahBuku Pegangan Kader (72,2%) kemudian berturut turut Buku StandarPemantauan Pertumbuhan (66,8%) dan Buku Pedoman MP-ASI (58,0%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki keseluruhan jenis Pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 24,0 persen sementara 75,4 persen memiliki Pedoman yang tidak lengkap (Tabel 4.8.6.3.a-b-c-d-e).

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Buku Surveilans Gizi,adalah sebesar 48,2persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 51,4persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Surveilans Gizi dapat ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (81,0%) dan diikuti oleh Provinsi Lampung (62,3%) dan Provinsi Jawa Barat (58,1%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku SurveilansGizi ditemukan pada Provinsi Maluku (19,3%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (22,2%) dan Provinsi Papua (28,6%). Secara nasional persentase ketersediaan Buku Surveilans Gizi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 50,2persen di puskemas perkotaan dan 47,5persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Buku Pegangan Kader adalah sebesar 72,2persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 27,4persen.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pegangan Kader ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (94,2%) dan diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (92,6%) dan Provinsi Jawa Timur (92,2%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pegangan Kader ditemukan pada Provinsi Papua (39,1%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (41,3%) dan Provinsi Papua Barat (48,1%). Secara nasional persentase ketersediaan Buku Pegangan Kader di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 76,3persen di puskemas perkotaan dan 70,8persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.6.3.a
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Buku surveilans Gizi			Buku Pegangan Kader			Buku Manajemen Pemberian Vit A		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	38,3	61,7	0,0	76,2	23,8	0,0	40,8	59,2	0,0
2	Sumatera Utara	506	44,3	55,5	0,2	69,8	30,0	0,2	40,5	59,3	0,2
3	Sumatera Barat	248	53,6	46,4	0,0	69,4	30,6	0,0	58,9	41,1	0,0
4	Riau	195	48,7	50,8	0,5	74,4	25,1	0,5	54,9	44,6	0,5
5	Jambi	171	45,0	53,8	1,2	58,5	40,4	1,2	45,0	53,8	1,2
6	Sumatera Selatan	298	58,1	41,9	0,0	73,2	26,8	0,0	59,4	40,6	0,0
7	Bengkulu	173	49,1	50,3	0,6	60,7	39,3	0,0	41,0	59,0	0,0
8	Lampung	265	62,3	37,7	0,0	66,4	33,6	0,0	49,4	50,2	0,4
9	Bangka Belitung	57	33,3	66,7	0,0	71,9	28,1	0,0	59,6	40,4	0,0
10	Kepulauan Riau	65	52,3	47,7	0,0	78,5	21,5	0,0	72,3	27,7	0,0
11	DKI Jakarta	336	39,0	60,7	0,3	61,9	37,8	0,3	48,2	51,5	0,3
12	Jawa Barat	1031	58,1	41,6	0,3	72,5	27,2	0,4	65,4	34,3	0,3
13	Jawa Tengah	861	53,3	46,7	0,0	78,9	21,1	0,0	68,5	31,5	0,0
14	DI Yogyakarta	121	81,0	19,0	0,0	94,2	5,8	0,0	72,7	27,3	0,0
15	Jawa Timur	949	55,3	44,2	0,5	92,2	7,4	0,4	74,2	25,4	0,4
16	Banten	206	40,3	59,2	0,5	71,8	27,7	0,5	67,5	32,5	0,0
17	Bali	114	56,1	43,9	0,0	91,2	8,8	0,0	74,6	25,4	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	55,0	45,0	0,0	92,6	7,4	0,0	77,9	22,1	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	50,3	49,3	0,3	75,8	23,8	0,3	49,3	50,3	0,3
20	Kalimantan Barat	233	49,8	49,8	0,4	83,7	15,9	0,4	62,2	37,3	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	39,8	60,2	0,0	69,9	30,1	0,0	45,5	54,5	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	49,8	49,3	0,9	82,5	16,6	0,9	59,9	39,2	0,9
23	Kalimantan Timur	213	38,0	60,6	1,4	73,2	25,8	0,9	53,1	45,1	1,9
24	Sulawesi Utara	167	22,2	77,8	0,0	41,3	58,7	0,0	24,0	76,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	35,6	63,8	0,6	62,0	37,4	0,6	39,3	59,5	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	41,9	57,9	0,2	70,7	29,3	0,0	53,4	46,3	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	51,1	48,9	0,0	58,8	41,2	0,0	49,4	50,6	0,0
28	Gorontalo	74	41,9	56,8	1,4	54,1	44,6	1,4	55,4	43,2	1,4
29	Sulawesi Barat	81	29,6	69,1	1,2	55,6	43,2	1,2	27,2	71,6	1,2
30	Maluku	161	19,3	77,6	3,1	50,3	46,6	3,1	32,9	64,0	3,1
31	Maluku Utara	101	40,6	57,4	2,0	67,3	31,7	1,0	47,5	51,5	1,0
32	Papua Barat	104	38,5	61,5	0,0	48,1	51,9	0,0	40,4	59,6	0,0
33	Papua	294	28,6	70,4	1,0	39,1	60,5	0,3	33,3	66,3	0,3
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	50,2	49,5	0,3	76,3	23,4	0,3	60,6	39,1	0,3
2	Perdesaan	6660	47,5	52,1	0,4	70,8	28,9	0,3	54,5	45,1	0,4
	INDONESIA	**8981**	**48,2**	**51,4**	**0,4**	**72,2**	**27,4**	**0,3**	**56,1**	**43,5**	**0,4**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A adalah sebesar 56,1persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 43,5persen.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (77,9%) dan diikuti oleh Provinsi Bali (74,6%) dan Provinsi Jawa Timur (74,2%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (24,0%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (27,2%) dan Provinsi Maluku (32,9%). Secara nasional persentase ketersediaan Buku Manajemen Pemberian Vit A di Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmasperdesaan, yaitu 60,6persen di puskemas perkotaan dan 54,5persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe adalah sebesar 40,9persen, persentase Puskesmas tidak memilikisebesar 40,1persen.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe dapat ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (66,9%) dan diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (62,0%) dan Provinsi Jawa Tengah (49,1%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe ditemukan pada Provinsi Maluku (13,7%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (14,4%) dan Provinsi Sulawesi Barat (21,0%). Secara nasional persentase ketersediaan Buku ManajemenPemberian Tablet Fe di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 43,1persen di puskemas perkotaan dan 40,1persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Buku Pedoman ASI adalah sebesar 51,4persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 48,1persen.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pedoman ASIditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (84,6%) dan diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (82,6%) dan Provinsi Sumatera Barat (68,1%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pedoman ASI ditemukan pada Provinsi Maluku (24,2%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (26,9%) dan Provinsi Sulawesi Barat (27,2%). Secara nasional persentase ketersediaan Buku Pedoman ASI di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 56,2 persen di puskemas perkotaan dan 49,8 persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.6.3.b
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Buku Manajemen PemberianTablet Fe			Buku Pedoman ASI		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	26,4	73,3	0,3	37,9	62,1	0,0
2	Sumatera Utara	506	32,6	67,2	0,2	38,1	61,7	0,2
3	Sumatera Barat	248	35,5	64,1	0,4	68,1	31,9	0,0
4	Riau	195	36,9	62,6	0,5	60,0	39,5	0,5
5	Jambi	171	33,9	64,9	1,2	36,8	62,0	1,2
6	Sumatera Selatan	298	46,0	54,0	0,0	61,1	38,9	0,0
7	Bengkulu	173	30,1	69,9	0,0	40,5	59,5	0,0
8	Lampung	265	35,5	64,5	0,0	47,9	51,7	0,4
9	Bangka Belitung	57	43,9	56,1	0,0	50,9	49,1	0,0
10	Kepulauan Riau	65	47,7	52,3	0,0	60,0	40,0	0,0
11	DKI Jakarta	336	36,0	63,7	0,3	51,8	47,9	0,3
12	Jawa Barat	1031	45,1	54,6	0,3	51,9	47,7	0,4
13	Jawa Tengah	861	49,1	50,9	0,0	59,1	40,9	0,0
14	DI Yogyakarta	121	66,9	33,1	0,0	82,6	17,4	0,0
15	Jawa Timur	949	62,0	37,3	0,7	67,7	31,7	0,6
16	Banten	206	43,2	56,8	0,0	53,9	45,6	0,5
17	Bali	114	39,5	60,5	0,0	52,6	47,4	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	46,3	53,0	0,7	84,6	15,4	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	37,1	62,6	0,3	50,0	49,7	0,3
20	Kalimantan Barat	233	43,3	56,2	0,4	64,4	35,2	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	29,5	70,5	0,0	44,3	55,7	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	38,2	61,3	0,5	54,4	45,2	0,5
23	Kalimantan Timur	213	45,5	52,6	1,9	49,8	48,4	1,9
24	Sulawesi Utara	167	14,4	85,6	0,0	26,9	73,1	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	28,2	69,3	2,5	39,9	58,9	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	34,7	65,0	0,2	45,8	53,9	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	40,3	59,7	0,0	39,1	60,9	0,0
28	Gorontalo	74	43,2	55,4	1,4	45,9	52,7	1,4
29	Sulawesi Barat	81	21,0	77,8	1,2	27,2	71,6	1,2
30	Maluku	161	13,7	83,2	3,1	24,2	72,7	3,1
31	Maluku Utara	101	34,7	64,4	1,0	44,6	54,5	1,0
32	Papua Barat	104	35,6	64,4	0,0	38,5	61,5	0,0
33	Papua	294	31,0	68,7	0,3	29,3	70,1	0,7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	43,1	56,6	0,3	56,2	43,4	0,4
2	Perdesaan	6660	40,1	59,5	0,5	49,8	49,8	0,4
	INDONESIA	**8981**	**40,9**	**58,7**	**0,4**	**51,4**	**48,1**	**0,4**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Buku Pedoman MP-ASI adalah sebesar 60,5 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 57,1persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pedoman MP-ASI ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (88,4%) dan diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (87,2%) dan Provinsi Jawa TImur (79,8%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pedoman MP-ASI ditemukan pada Provinsi Maluku (26,1%) dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (26,9%) dan Provinsi Papua (32,3%). Secara nasional persentase ketersediaan Buku Pedoman MP-ASI di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 60,5persen di puskemas perkotaan dan 57,1persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.6.3.c
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Buku Manajemen PemberianTablet Fe			Buku Pedoman ASI		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	26,4	73,3	0,3	37,9	62,1	0,0
2	Sumatera Utara	506	32,6	67,2	0,2	38,1	61,7	0,2
3	Sumatera Barat	248	35,5	64,1	0,4	68,1	31,9	0,0
4	Riau	195	36,9	62,6	0,5	60,0	39,5	0,5
5	Jambi	171	33,9	64,9	1,2	36,8	62,0	1,2
6	Sumatera Selatan	298	46,0	54,0	0,0	61,1	38,9	0,0
7	Bengkulu	173	30,1	69,9	0,0	40,5	59,5	0,0
8	Lampung	265	35,5	64,5	0,0	47,9	51,7	0,4
9	Bangka Belitung	57	43,9	56,1	0,0	50,9	49,1	0,0
10	Kepulauan Riau	65	47,7	52,3	0,0	60,0	40,0	0,0
11	DKI Jakarta	336	36,0	63,7	0,3	51,8	47,9	0,3
12	Jawa Barat	1031	45,1	54,6	0,3	51,9	47,7	0,4
13	Jawa Tengah	861	49,1	50,9	0,0	59,1	40,9	0,0
14	DI Yogyakarta	121	66,9	33,1	0,0	82,6	17,4	0,0
15	Jawa Timur	949	62,0	37,3	0,7	67,7	31,7	0,6
16	Banten	206	43,2	56,8	0,0	53,9	45,6	0,5
17	Bali	114	39,5	60,5	0,0	52,6	47,4	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	46,3	53,0	0,7	84,6	15,4	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	37,1	62,6	0,3	50,0	49,7	0,3
20	Kalimantan Barat	233	43,3	56,2	0,4	64,4	35,2	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	29,5	70,5	0,0	44,3	55,7	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	38,2	61,3	0,5	54,4	45,2	0,5
23	Kalimantan Timur	213	45,5	52,6	1,9	49,8	48,4	1,9
24	Sulawesi Utara	167	14,4	85,6	0,0	26,9	73,1	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	28,2	69,3	2,5	39,9	58,9	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	34,7	65,0	0,2	45,8	53,9	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	40,3	59,7	0,0	39,1	60,9	0,0
28	Gorontalo	74	43,2	55,4	1,4	45,9	52,7	1,4
29	Sulawesi Barat	81	21,0	77,8	1,2	27,2	71,6	1,2
30	Maluku	161	13,7	83,2	3,1	24,2	72,7	3,1
31	Maluku Utara	101	34,7	64,4	1,0	44,6	54,5	1,0
32	Papua Barat	104	35,6	64,4	0,0	38,5	61,5	0,0
33	Papua	294	31,0	68,7	0,3	29,3	70,1	0,7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	43,1	56,6	0,3	56,2	43,4	0,4
2	Perdesaan	6660	40,1	59,5	0,5	49,8	49,8	0,4
	INDONESIA	**8981**	**40,9**	**58,7**	**0,4**	**51,4**	**48,1**	**0,4**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium adalah sebesar 51,9 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 47,7persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium ditemukan pada Provinsi Jawa Timur (80,5%) dan diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (67,8%) dan Provinsi Jawa Timur (66,8%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (21,0%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku (26,7%) dan Provinsi Sulawesi Barat (28,4%). Secara nasional persentase ketersediaan Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 54,4persen di puskemas perkotaan dan 51,1persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.6.3.d
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Buku Pedoman MP-ASI			Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	39,9	60,1	0,0	30,2	69,5	0,3
2	Sumatera Utara	506	45,8	54,0	0,2	35,4	64,4	0,2
3	Sumatera Barat	248	70,6	29,4	0,0	62,9	37,1	0,0
4	Riau	195	55,4	44,1	0,5	50,3	49,2	0,5
5	Jambi	171	48,5	50,3	1,2	42,1	56,7	1,2
6	Sumatera Selatan	298	66,4	33,6	0,0	48,3	51,7	0,0
7	Bengkulu	173	41,6	58,4	0,0	38,2	61,3	0,6
8	Lampung	265	57,4	42,6	0,0	41,5	58,5	0,0
9	Bangka Belitung	57	63,2	36,8	0,0	64,9	35,1	0,0
10	Kepulauan Riau	65	60,0	40,0	0,0	55,4	44,6	0,0
11	DKI Jakarta	336	42,9	56,8	0,3	35,4	64,3	0,3
12	Jawa Barat	1031	63,5	36,2	0,3	59,3	40,3	0,4
13	Jawa Tengah	861	65,6	34,4	0,0	60,7	39,1	0,1
14	DI Yogyakarta	121	88,4	11,6	0,0	65,3	34,7	0,0
15	Jawa Timur	949	79,8	19,5	0,7	80,5	19,0	0,5
16	Banten	206	55,3	44,2	0,5	51,5	48,5	0,0
17	Bali	114	53,5	46,5	0,0	57,9	42,1	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	87,2	12,8	0,0	67,8	32,2	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	52,3	47,4	0,3	49,7	50,0	0,3
20	Kalimantan Barat	233	66,5	33,0	0,4	58,4	41,2	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	55,1	44,3	0,6	46,0	54,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	59,0	40,6	0,5	66,8	32,7	0,5
23	Kalimantan Timur	213	60,6	38,0	1,4	54,5	44,1	1,4
24	Sulawesi Utara	167	26,9	73,1	0,0	21,0	79,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	51,5	47,9	0,6	35,6	63,8	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	63,8	36,2	0,0	52,0	48,0	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	48,9	51,1	0,0	43,3	56,7	0,0
28	Gorontalo	74	54,1	44,6	1,4	52,7	45,9	1,4
29	Sulawesi Barat	81	33,3	65,4	1,2	28,4	70,4	1,2
30	Maluku	161	26,1	70,8	3,1	26,7	70,2	3,1
31	Maluku Utara	101	44,6	54,5	1,0	46,5	52,5	1,0
32	Papua Barat	104	36,5	63,5	0,0	31,7	68,3	0,0
33	Papua	294	32,3	67,3	0,3	28,9	70,1	1,0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	60,5	39,0	0,4	54,4	45,2	0,4
2	Perdesaan	6660	57,1	42,6	0,3	51,1	48,5	0,4
	INDONESIA	**8981**	**58,0**	**41,6**	**0,4**	**51,9**	**47,7**	**0,4**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan adalah sebesar 66,8persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 32,8 persen.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku StandarPemantauan Pertumbuhan ditemukan pada DI Yogyakarta (93,4%) diikuti oleh Provinsi Bangka Belitung (89,5%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (84,6%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku StandarPemantauan Pertumbuhan ditemukan pada Provinsi Papua (36,7%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku (38,5%) dan Provinsi Sulawesi Utara (40,1%). Secara nasional persentase ketersediaan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhandi perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 70,2 persen di puskemas perkotaan dan 65,6 persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.6.3.e
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan			Buku Pengelolaan MP-ASI			Pedoman Lengkap Prog Perbaikan Gizi Masyarakat		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	62,7	37,3	0,0	37,3	61,7	1,0	16,1	83,6	0,3
2	Sumatera Utara	506	56,5	43,3	0,2	38,3	61,3	0,4	22,1	77,7	0,2
3	Sumatera Barat	248	77,0	23,0	0,0	62,9	36,7	0,4	23,4	76,2	0,4
4	Riau	195	72,3	27,2	0,5	45,6	52,3	2,1	25,1	73,3	1,5
5	Jambi	171	69,0	29,8	1,2	47,4	50,9	1,8	18,1	80,7	1,2
6	Sumatera Selatan	298	70,1	29,9	0,0	59,4	40,6	0,0	30,2	69,8	0,0
7	Bengkulu	173	60,1	39,9	0,0	39,9	59,5	0,6	20,2	79,8	0,0
8	Lampung	265	69,4	30,6	0,0	54,7	45,3	0,0	17,7	81,9	0,4
9	Bangka Belitung	57	89,5	10,5	0,0	57,9	42,1	0,0	21,1	78,9	0,0
10	Kepulauan Riau	65	70,8	29,2	0,0	55,4	44,6	0,0	33,8	66,2	0,0
11	DKI Jakarta	336	55,4	44,3	0,3	38,7	60,4	0,9	20,5	79,2	0,3
12	Jawa Barat	1031	72,3	27,4	0,3	58,8	40,6	0,6	26,7	72,7	0,6
13	Jawa Tengah	861	75,7	24,3	0,0	61,1	38,7	0,2	26,8	73,1	0,1
14	DI Yogyakarta	121	93,4	6,6	0,0	81,0	19,0	0,0	50,4	49,6	0,0
15	Jawa Timur	949	73,4	26,0	0,5	69,5	29,8	0,6	32,6	66,6	0,8
16	Banten	206	70,4	29,1	0,5	50,5	48,5	1,0	25,2	74,8	0,0
17	Bali	114	78,9	21,1	0,0	46,5	53,5	0,0	26,3	73,7	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	84,6	15,4	0,0	76,5	23,5	0,0	36,2	63,1	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	61,3	38,4	0,3	50,7	48,7	0,7	23,2	76,5	0,3
20	Kalimantan Barat	233	81,1	18,5	0,4	59,7	39,9	0,4	25,8	73,8	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	72,7	27,3	0,0	52,8	47,2	0,0	19,9	80,1	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	78,8	20,7	0,5	56,2	43,3	0,5	24,9	74,7	0,5
23	Kalimantan Timur	213	63,8	34,7	1,4	46,0	51,6	2,3	16,4	81,7	1,9
24	Sulawesi Utara	167	40,1	59,9	0,0	22,8	76,6	0,6	7,8	92,2	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	60,7	38,7	0,6	46,6	52,1	1,2	16,6	82,2	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	59,6	39,9	0,5	52,5	47,3	0,2	19,0	80,8	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	58,4	41,6	0,0	43,8	56,2	0,0	24,9	75,1	0,0
28	Gorontalo	74	68,9	29,7	1,4	43,2	55,4	1,4	21,6	77,0	1,4
29	Sulawesi Barat	81	45,7	53,1	1,2	27,2	71,6	1,2	12,3	86,4	1,2
30	Maluku	161	38,5	58,4	3,1	24,2	72,0	3,7	8,1	88,8	3,1
31	Maluku Utara	101	64,4	34,7	1,0	45,5	53,5	1,0	21,8	77,2	1,0
32	Papua Barat	104	40,4	59,6	0,0	33,7	66,3	0,0	26,0	74,0	0,0
33	Papua	294	36,7	62,2	1,0	30,3	69,0	0,7	18,0	80,3	1,7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	70,2	29,4	0,3	54,3	45,0	0,6	24,0	75,5	0,5
2	Perdesaan	6660	65,6	34,0	0,4	51,4	48,0	0,6	24,0	75,4	0,6
	INDONESIA	**8981**	**66,8**	**32,8**	**0,4**	**52,2**	**47,2**	**0,6**	**24,0**	**75,4**	**0,5**

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI adalah sebesar 52,2persen, persentase Puskesmas tidak memiliki sebesar 47,2persen.Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI ditemukan pada DI Yogyakarta (81,0%) diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (76,5%) dan Provinsi Jawa Timur (69,5%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (22,8%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku (24,2%) dan Provinsi Sulawesi Barat (27,2%). Secara nasional persentase ketersediaan Buku Pengelolaan MP-ASI di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 54,3 persen di puskemas perkotaan dan 51,4 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas memiliki pedoman secara lengkap untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat(yaitu memiliki keseluruhan jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) adalah sebesar 24,0 persen, persentase Puskesmas tidak memiliki lengkap sebesar 75,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (50,4%) dan diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (36,2%) dan Provinsi Kepulauan Riau (34,8%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap ditemukan pada Provinsi Sulawesi Utara (7,8%) dan diikuti oleh Provinsi Maluku (8,1%) dan Provinsi Sulawesi Barat (12,3%). Secara nasional persentase ketersediaan Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap tidak berbeda antara Puskesmas perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 24,0 persen.

4.8.6.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pengawasan, Evaluasi danBimbingan diperlukan dalam Program Perbaikan Gizi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan ,evaluasi dan bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Secara nasional bentuk pengawasan,evaluasi dan bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah dalam bentuk pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan (77,4%) dan diikuti oleh supervisi oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas (74,2%) kemudian umpan balik (65,5%). Secara nasional persentase Puskesmas lengkap menerima pengawasan,evaluasi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan monev, umpan balik dan pertemuan monev di Dinas Kesehatan adalah sebesar 54,1 persen sementara 45,5 persen tidak tersedia lengkap(Tabel 4.8.6.4. a-b).

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pengawasan,evaluasi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisiDinas Kesehatan ke Puskesmas untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 74,2persen, persentase Puskesmas tidak menerima kunjungan sebesar 25,5persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk program perbaikan gizi masyarakat ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (89,3%) kemudian diikuti oleh Provinsi Gorontalo (89,2%) dan Provinsi Banten (87,9%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk perbaikan gizi masyarakat ditemukan pada Provinsi Maluku (29,8%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua (33,7%) dan Provinsi Papua Barat (34,6%). Secara nasional persentase menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakatdi Puskesmas perkotaanlebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 75,1persen pada Puskesmas perkotaan dan 73,9persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pengawasan,evaluasi dan bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 65,5persen, persentase Puskesmas tidak menerima umpan balik sebesar 34,1persen.Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk program perbaikan gizi masyarakat ditemukan pada Provinsi Jawa Barat (86,5%)

kemudian diikuti oleh ProvinsiDI Yogyakarta(86,0%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (85,2%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat ditemukan pada Provinsi Papua (26,5%) kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku (6,75%) dan Provinsi Papua Barat (34,6%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan menerima umpan balik Program Perbaikan Gizi Masyarakat dari Dinas Kesehatan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan, yaitu 66,0 persen di perkotaan dibandingkan dengan 65,3persen di perdesaan.

Tabel 4.8.6.4.a
Persentase Puskesmasmenurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan petugas Dinas Kesehatan untuk supervisi atau bimbi			Umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010)			Dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program gizi tah		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD	% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	68,2	31,8	0,0	50,2	49,8	0,0	73,6	26,4	0,0
2	Sumatera Utara	506	63,0	36,8	0,2	49,4	49,8	0,8	68,8	30,8	0,4
3	Sumatera Barat	248	80,2	19,8	0,0	67,3	32,7	0,0	85,1	14,9	0,0
4	Riau	195	73,8	25,6	0,5	68,2	30,8	1,0	78,5	20,5	1,0
5	Jambi	171	65,5	32,7	1,8	49,7	49,1	1,2	71,3	26,9	1,8
6	Sumatera Selatan	298	84,2	15,8	0,0	76,8	23,2	0,0	80,5	19,1	0,3
7	Bengkulu	173	74,0	26,0	0,0	57,8	42,2	0,0	80,3	19,1	0,6
8	Lampung	265	75,8	24,2	0,0	61,1	38,9	0,0	84,2	15,5	0,4
9	Bangka Belitung	57	77,2	22,8	0,0	61,4	38,6	0,0	73,7	26,3	0,0
10	Kepulauan Riau	65	67,7	32,3	0,0	69,2	30,8	0,0	72,3	27,7	0,0
11	DKI Jakarta	336	59,2	40,5	0,3	49,7	49,4	0,9	68,2	31,5	0,3
12	Jawa Barat	1031	86,1	13,6	0,3	86,5	13,2	0,3	94,1	5,6	0,3
13	Jawa Tengah	861	87,3	12,7	0,0	79,7	20,3	0,0	96,1	3,8	0,1
14	DI Yogyakarta	121	87,6	12,4	0,0	86,0	14,0	0,0	97,5	2,5	0,0
15	Jawa Timur	949	84,2	15,4	0,4	76,5	23,1	0,4	92,0	7,5	0,5
16	Banten	206	87,9	12,1	0,0	76,7	23,3	0,0	92,7	7,3	0,0
17	Bali	114	82,5	17,5	0,0	55,3	44,7	0,0	84,2	15,8	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	89,3	10,1	0,7	85,2	14,8	0,0	94,6	5,4	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	76,5	22,8	0,7	56,0	43,0	1,0	76,8	22,2	1,0
20	Kalimantan Barat	233	72,1	27,5	0,4	76,4	23,2	0,4	82,4	16,7	0,9
21	Kalimantan Tengah	176	54,0	46,0	0,0	50,0	49,4	0,6	53,4	46,6	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	79,3	20,3	0,5	65,9	33,6	0,5	85,3	14,3	0,5
23	Kalimantan Timur	213	63,8	35,2	0,9	59,2	39,4	1,4	69,0	30,0	0,9
24	Sulawesi Utara	167	61,7	38,3	0,0	52,7	47,3	0,0	48,5	51,5	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	54,6	44,2	1,2	50,3	48,5	1,2	38,0	60,7	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	83,3	16,7	0,0	61,3	38,4	0,2	83,0	16,7	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	73,8	26,2	0,0	63,5	36,1	0,4	58,4	41,6	0,0
28	Gorontalo	74	89,2	10,8	0,0	74,3	25,7	0,0	95,9	4,1	0,0
29	Sulawesi Barat	81	60,5	38,3	1,2	65,4	33,3	1,2	56,8	42,0	1,2
30	Maluku	161	29,8	67,1	3,1	26,7	70,2	3,1	20,5	76,4	3,1
31	Maluku Utara	101	54,5	44,6	1,0	59,4	39,6	1,0	36,6	62,4	1,0
32	Papua Barat	104	34,6	65,4	0,0	34,6	65,4	0,0	29,8	70,2	0,0
33	Papua	294	33,7	65,6	0,7	26,5	72,8	0,7	23,8	75,2	1,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	75,1	24,5	0,3	66,0	33,3	0,6	78,9	20,6	0,5
2	Perdesaan	6660	73,9	25,8	0,3	65,3	34,3	0,4	76,9	22,7	0,4
	INDONESIA	**8981**	**74,2**	**25,5**	**0,3**	**65,5**	**34,1**	**0,4**	**77,4**	**22,1**	**0,5**

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pengawasan,evaluasi dan bimbingan dalam bentuk mengikuti pertemuan monev di Dinas Kesehatan untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 77,4 persen, persentase Puskesmas tidak mengikuti sebesar 22,1 persen.Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatandapat ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (97,5%) kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (96,1%) dan Provinsi Gorontalo (95,9%).

Tabel 4.8.6.4.b
Persentase Puskesmasmenurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pengawasan ,evaluasi dan bimbingan Lengkap Gizi Masyarakat		
			% Ada	% Tdk ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	39,2	60,8	0,0
2	Sumatera Utara	506	39,1	60,1	0,8
3	Sumatera Barat	248	59,3	40,7	0,0
4	Riau	195	55,4	44,1	0,5
5	Jambi	171	37,4	60,8	1,8
6	Sumatera Selatan	298	64,8	34,9	0,3
7	Bengkulu	173	46,8	53,2	0,0
8	Lampung	265	49,8	50,2	0,0
9	Bangka Belitung	57	40,4	59,6	0,0
10	Kepulauan Riau	65	55,4	44,6	0,0
11	DKI Jakarta	336	42,6	56,5	0,9
12	Jawa Barat	1031	77,1	22,6	0,3
13	Jawa Tengah	861	72,6	27,4	0,0
14	DI Yogyakarta	121	78,5	21,5	0,0
15	Jawa Timur	949	68,4	31,2	0,4
16	Banten	206	70,4	29,6	0,0
17	Bali	114	48,2	51,8	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	77,9	21,5	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	45,7	53,6	0,7
20	Kalimantan Barat	233	57,1	42,5	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	26,1	73,9	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	59,0	40,6	0,5
23	Kalimantan Timur	213	42,3	56,8	0,9
24	Sulawesi Utara	167	31,1	68,9	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	23,9	74,8	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	53,9	45,8	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	40,3	59,7	0,0
28	Gorontalo	74	71,6	28,4	0,0
29	Sulawesi Barat	81	37,0	61,7	1,2
30	Maluku	161	9,9	87,0	3,1
31	Maluku Utara	101	27,7	71,3	1,0
32	Papua Barat	104	14,4	85,6	0,0
33	Papua	294	16,0	83,0	1,0
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	56,8	42,7	0,5
2	Perdesaan	6660	53,1	46,5	0,4
	INDONESIA	**8981**	**54,1**	**45,5**	**0,4**

Sedangkan persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi Maluku (20,5%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua (23,8%) dan Provinsi Papua Barat (29,8%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan, yaitu 78,9 persen di perkotaan dibandingkan dengan 76,9 persen di perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pengawasan,evaluasi dan bimbingan secara lengkap (ketiga jenis bimbingan diterima oleh Puskesmas) untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 54,1 persen, persentase Puskesmas tidak menerima lengkap sebesar 45,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima pengawasan,evaluasi dan bimbingan secara lengkap untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat dari Dinas Kesehatan ditemukan pada Provinsi DI Yogyakarta (78,5%) kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (77,9%) dan Provinsi Jawa Barat (77,1%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima pengawasan,evaluasi dan bimbingan secara lengkap ditemukan pada Provinsi Maluku (9,9%) kemudian diikuti oleh Provinsi Papua Barat (14,4%) dan Provinsi Papua (16,0%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan menerima pengawasan,evaluasi dan bimbingan secara lengkap lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan, yaitu 56,8 persen di perkotaan dan 53,1 persen di perdesaan.

4.8.7. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

4.8.7.1. Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular

Kegiatan dalam pelaksanaanUpaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi: Program TB paru, Program ISPA, Program Diare, Program DBD, Program Malaria, Program Kusta, Program Schistosomiasis, Program HIV-AIDS, Program Filariasis, Surveilans Terpadu, dan Program Rabies.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Program TB Paru adalah sebesar 95,9%, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan kegiatan Program TB Paru sebesar 3,8%.Terdapat lima provinsi dari 33 provinsi yang semua puskesmasnya melakukan Program TB Paru, yaitu pada Provinsi Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta dan Bali. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program TB Paruadalah Provinsi Papua (50,0%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (71,2%) dan Provinsi Maluku (83,9%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam melakukan kegiatan Program TB Paru yaitu 98,4 persen pada perkotaan dan 95,0 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Program ISPA/Pneumonia adalah sebesar 94,4 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan kegiatan Program ISPA/Pneumonia sebesar 5,2 persen.Terdapat dua provinsi dari 33 provinsi yang semua Puskesmasnya melakukan Program ISPA/Pneumonia, yaitu Provinsi Banten dan Bali. Persentase puskesmas terendah melakukan kegiatanProgram ISPA/Pneumonia adalah Provinsi Papua (53,1%), Provinsi Papua Barat (68,3%) dan Provinsi Maluku (83,2%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam melakukan kegiatan Program ISPA/Pneumonia yaitu 95,9 persen pada perkotaan dan 93,9 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentasePuskesmas melakukan kegiatan Program Diare adalah sebesar 96,4 persen, sedangkan persentase Puskesmastidak melakukan Program Diare sebesar3,3 persen. Terdapat empat provinsi dari 33 provinsi yang semua Puskesmasnya melakukan Program Diare, yaitu Provinsi Jambi, DI Yogyakarta, Banten dan Bali. Persentase Puskesmasterendah melakukan kegiatan Program diare dapat ditemukan pada Provinsi Papua (58,8%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (76,0%) dan Provinsi Maluku (85,7%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmasperdesaan dalam melakukan kegiatan Program Diare yaitu 97,7 persen pada perkotaan dan 95,9 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmasmelakukan kegiatan Program DBD adalah sebesar 80,3 persen, sedangkan persentasePuskesmastidak melakukan kegiatan Program DBD sebesar 19,3 persen.Terdapat dua provinsi dari 33 provinsi yang semua Puskesmasnya melakukan Program DBD, yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Bali.Persentase Puskesmasterendah melakukan kegiatan Program DBD adalah Provinsi Papua (9,5%), Provinsi Maluku (16,8%) dan Provinsi Papua Barat (21,2%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan puskesmas perdesaan dalam melakukan kegiatan Program DBD yaitu 92,0 persen pada perkotaan dan 76,3 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.7.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan UpayaPengendalian Penyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jml Pusk	Program TB Paru			Program ISPA/Pneumonia			Program Diare		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	98,7	1,3	0,0	94,5	5,5	0,0	98,4	1,6	0,0
2	Sumatera Utara	506	96,6	3,4	0,0	93,7	6,3	0,0	97,0	3,0	0,0
3	Sumatera Barat	248	99,6	0,4	0,0	98,4	1,6	0,0	99,6	0,4	0,0
4	Riau	195	98,5	1,5	0,0	93,3	6,7	0,0	95,4	4,1	0,5
5	Jambi	171	98,2	1,8	0,0	98,8	1,2	0,0	100,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	298	98,0	1,7	0,3	97,3	2,3	0,3	98,0	1,7	0,3
7	Bengkulu	173	97,7	2,3	0,0	91,9	8,1	0,0	96,0	4,0	0,0
8	Lampung	265	100,0	0,0	0,0	97,7	2,3	0,0	98,1	1,9	0,0
9	Bangka Belitung	57	100,0	0,0	0,0	98,2	1,8	0,0	96,5	3,5	0,0
10	Kepulauan Riau	65	100,0	0,0	0,0	93,8	6,2	0,0	98,5	1,5	0,0
11	DKI Jakarta	336	98,2	1,5	0,3	92,6	7,1	0,3	97,0	2,7	0,3
12	Jawa Barat	1031	99,5	0,2	0,3	99,1	0,6	0,3	99,3	0,3	0,4
13	Jawa Tengah	861	99,8	0,2	0,0	97,9	2,1	0,0	99,0	1,0	0,0
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0,0	0,0	98,3	1,7	0,0	100,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	949	99,5	0,3	0,2	98,1	1,6	0,3	99,2	0,6	0,2
16	Banten	206	99,5	0,5	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
17	Bali	114	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	97,3	2,0	0,7	97,3	0,7	2,0	97,3	0,0	2,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	94,0	5,6	0,3	98,0	1,7	0,3	99,3	0,3	0,3
20	Kalimantan Barat	233	95,7	3,9	0,4	91,4	8,2	0,4	93,6	6,0	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	94,9	4,5	0,6	96,6	3,4	0,0	97,7	2,3	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	98,6	0,9	0,5	97,2	2,3	0,5	97,7	1,8	0,5
23	Kalimantan Timur	213	96,7	3,3	0,0	92,5	7,5	0,0	94,4	5,6	0,0
24	Sulawesi Utara	167	89,8	10,2	0,0	90,4	9,6	0,0	95,8	4,2	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	97,5	2,5	0,0	99,4	0,6	0,0	99,4	0,6	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	98,5	1,5	0,0	95,6	4,4	0,0	98,8	1,2	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	96,6	3,0	0,4	94,4	4,7	0,9	97,9	1,7	0,4
28	Gorontalo	74	98,6	0,0	1,4	94,6	4,1	1,4	97,3	1,4	1,4
29	Sulawesi Barat	81	93,8	4,9	1,2	90,1	8,6	1,2	93,8	4,9	1,2
30	Maluku	161	83,2	11,8	5,0	83,2	11,8	5,0	85,7	9,3	5,0
31	Maluku Utara	101	86,1	13,9	0,0	90,1	9,9	0,0	94,1	5,9	0,0
32	Papua Barat	104	71,2	28,8	0,0	68,3	31,7	0,0	76,0	24,0	0,0
33	Papua	294	50,0	48,0	2,0	53,1	44,9	2,0	58,8	39,1	2,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	98,4	1,3	0,2	95,9	3,9	0,3	97,7	2,1	0,2
2	Perdesaan	6660	95,0	4,6	0,4	93,9	5,7	0,4	95,9	3,7	0,4
	INDONESIA	**8981**	**95,9**	**3,8**	**0,3**	**94,4**	**5,2**	**0,4**	**96,4**	**3,3**	**0,4**

Tabel 4.8.7.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Upaya Pengendalian Penyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Program DBD			Program Malaria		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	81,0	18,6	0,3	99,0	1,0	0,0
2	Sumatera Utara	506	81,8	18,2	0,0	80,0	20,0	0,0
3	Sumatera Barat	248	91,1	8,9	0,0	89,5	10,5	0,0
4	Riau	195	94,4	5,6	0,0	95,4	4,6	0,0
5	Jambi	171	80,1	19,9	0,0	95,3	4,7	0,0
6	Sumatera Selatan	298	82,9	16,8	0,3	87,2	12,4	0,3
7	Bengkulu	173	72,8	26,6	0,6	96,0	4,0	0,0
8	Lampung	265	95,1	4,9	0,0	90,6	9,4	0,0
9	Bangka Belitung	57	98,2	1,8	0,0	100,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	65	84,6	15,4	0,0	96,9	3,1	0,0
11	DKI Jakarta	336	95,5	3,9	0,6	17,9	81,8	0,3
12	Jawa Barat	1031	87,5	12,2	0,3	39,9	59,7	0,4
13	Jawa Tengah	861	96,6	3,4	0,0	79,1	20,9	0,0
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0,0	0,0	72,7	27,3	0,0
15	Jawa Timur	949	98,1	1,7	0,2	66,9	32,8	0,3
16	Banten	206	89,8	10,2	0,0	40,8	59,2	0,0
17	Bali	114	100,0	0,0	0,0	93,0	6,1	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	83,2	14,8	2,0	98,7	0,7	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	38,7	60,9	0,3	99,3	0,3	0,3
20	Kalimantan Barat	233	67,8	31,8	0,4	99,1	0,4	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	61,9	38,1	0,0	97,2	2,8	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	90,8	8,8	0,5	99,1	0,5	0,5
23	Kalimantan Timur	213	85,0	15,0	0,0	93,9	6,1	0,0
24	Sulawesi Utara	167	74,3	25,7	0,0	96,4	3,6	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	57,1	42,9	0,0	100,0	0,0	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	90,6	9,4	0,0	94,8	5,2	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	75,1	24,5	0,4	96,1	3,4	0,4
28	Gorontalo	74	67,6	31,1	1,4	97,3	1,4	1,4
29	Sulawesi Barat	81	61,7	37,0	1,2	97,5	1,2	1,2
30	Maluku	161	16,8	78,3	5,0	88,8	6,2	5,0
31	Maluku Utara	101	36,6	62,4	1,0	94,1	5,9	0,0
32	Papua Barat	104	21,2	78,8	0,0	88,5	11,5	0,0
33	Papua	294	9,5	88,4	2,0	68,7	29,3	2,0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	92,0	7,7	0,3	67,3	32,4	0,2
2	Perdesaan	6660	76,3	23,3	0,4	81,9	17,7	0,4
	INDONESIA	**8981**	**80,3**	**19,3**	**0,4**	**78,1**	**21,5**	**0,3**

Tabel 4.8.7.1.c
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Upaya Pengendalian Penyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Program Kusta			Program HIV-AIDS			Program Filariasis		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	89,4	10,3	0,3	21,5	78,5	0,0	57,9	41,8	0,3
2	Sumatera Utara	506	69,8	30,2	0,0	33,8	66,2	0,0	34,8	65,2	0,0
3	Sumatera Barat	248	85,5	14,5	0,0	31,0	69,0	0,0	66,9	33,1	0,0
4	Riau	195	84,1	15,9	0,0	46,7	53,3	0,0	65,1	34,9	0,0
5	Jambi	171	81,3	18,7	0,0	29,8	70,2	0,0	60,8	39,2	0,0
6	Sumatera Selatan	298	71,8	27,5	0,7	33,6	65,8	0,7	37,6	61,7	0,7
7	Bengkulu	173	53,2	46,2	0,6	24,9	74,0	1,2	29,5	69,4	1,2
8	Lampung	265	82,3	17,7	0,0	34,3	65,7	0,0	36,2	63,8	0,0
9	Bangka Belitung	57	91,2	8,8	0,0	73,7	26,3	0,0	89,5	10,5	0,0
10	Kepulauan Riau	65	58,5	41,5	0,0	44,6	55,4	0,0	40,0	60,0	0,0
11	DKI Jakarta	336	53,6	45,8	0,6	38,7	61,0	0,3	26,5	73,2	0,3
12	Jawa Barat	1031	82,2	17,6	0,3	47,2	52,5	0,3	55,2	44,5	0,3
13	Jawa Tengah	861	90,2	9,8	0,0	62,7	37,3	0,0	42,0	58,0	0,0
14	DI Yogyakarta	121	77,7	22,3	0,0	71,1	28,9	0,0	44,6	55,4	0,0
15	Jawa Timur	949	96,9	2,8	0,2	65,1	34,7	0,2	42,7	56,9	0,4
16	Banten	206	92,7	7,3	0,0	68,0	32,0	0,0	55,8	44,2	0,0
17	Bali	114	97,4	2,6	0,0	84,2	15,8	0,0	31,6	67,5	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	87,2	12,1	0,7	32,9	64,4	2,7	13,4	85,2	1,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	75,5	24,2	0,3	34,1	65,6	0,3	39,7	59,9	0,3
20	Kalimantan Barat	233	54,9	44,6	0,4	30,9	68,7	0,4	40,3	59,2	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	60,8	39,2	0,0	13,6	86,4	0,0	46,0	54,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	94,9	4,6	0,5	31,3	68,2	0,5	59,0	40,1	0,9
23	Kalimantan Timur	213	73,2	26,8	0,0	29,6	70,4	0,0	32,4	67,6	0,0
24	Sulawesi Utara	167	88,0	12,0	0,0	18,6	81,4	0,0	7,2	92,8	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	89,0	11,0	0,0	36,2	63,8	0,0	38,0	62,0	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	94,8	5,2	0,0	41,6	58,1	0,2	36,0	63,8	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	91,0	8,6	0,4	32,2	67,4	0,4	62,7	36,9	0,4
28	Gorontalo	74	94,6	4,1	1,4	18,9	79,7	1,4	77,0	21,6	1,4
29	Sulawesi Barat	81	80,2	18,5	1,2	9,9	88,9	1,2	44,4	54,3	1,2
30	Maluku	161	69,6	25,5	5,0	12,4	82,0	5,6	19,9	74,5	5,6
31	Maluku Utara	101	89,1	10,9	0,0	4,0	96,0	0,0	12,9	86,1	1,0
32	Papua Barat	104	62,5	37,5	0,0	37,5	62,5	0,0	26,9	73,1	0,0
33	Papua	294	38,1	59,9	2,0	37,8	60,2	2,0	29,9	68,0	2,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	80,7	19,1	0,3	49,4	50,3	0,3	43,8	55,8	0,4
2	Perdesaan	6660	80,6	19,0	0,4	39,4	60,2	0,4	42,6	57,0	0,5
	INDONESIA	**8981**	**80,6**	**19,1**	**0,4**	**42,0**	**57,6**	**0,4**	**42,9**	**56,7**	**0,4**

Tabel 4.8.7.1.d
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan UpayaPengendalian Penyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Surveilans Terpadu			Program Rabies		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	84,6	15,4	0,0	53,1	46,9	0,0
2	Sumatera Utara	506	73,1	26,7	0,2	64,6	35,2	0,2
3	Sumatera Barat	248	93,5	6,5	0,0	95,2	4,8	0,0
4	Riau	195	86,2	13,3	0,5	86,2	13,8	0,0
5	Jambi	171	83,0	17,0	0,0	90,6	9,4	0,0
6	Sumatera Selatan	298	81,9	17,8	0,3	61,7	37,9	0,3
7	Bengkulu	173	75,7	24,3	0,0	74,0	26,0	0,0
8	Lampung	265	90,6	9,1	0,4	79,6	20,4	0,0
9	Bangka Belitung	57	98,2	1,8	0,0	10,5	89,5	0,0
10	Kepulauan Riau	65	75,4	24,6	0,0	23,1	76,9	0,0
11	DKI Jakarta	336	70,5	28,3	1,2	11,9	87,5	0,6
12	Jawa Barat	1031	88,9	10,8	0,3	39,2	60,3	0,5
13	Jawa Tengah	861	82,0	18,0	0,0	25,7	74,2	0,1
14	DI Yogyakarta	121	94,2	5,8	0,0	48,8	51,2	0,0
15	Jawa Timur	949	92,0	7,8	0,2	31,5	68,3	0,2
16	Banten	206	92,7	7,3	0,0	21,8	78,2	0,0
17	Bali	114	97,4	2,6	0,0	98,2	1,8	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	76,5	22,1	1,3	4,7	93,3	2,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	81,5	18,2	0,3	40,7	58,9	0,3
20	Kalimantan Barat	233	75,5	24,0	0,4	12,0	87,6	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	61,4	37,5	1,1	48,3	51,7	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	89,4	10,1	0,5	63,1	35,9	0,9
23	Kalimantan Timur	213	75,1	24,9	0,0	34,3	65,7	0,0
24	Sulawesi Utara	167	82,0	18,0	0,0	82,0	18,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	95,7	4,3	0,0	57,1	42,9	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	89,2	10,8	0,0	74,6	25,4	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	85,8	13,7	0,4	72,5	27,0	0,4
28	Gorontalo	74	91,9	6,8	1,4	87,8	10,8	1,4
29	Sulawesi Barat	81	77,8	21,0	1,2	66,7	32,1	1,2
30	Maluku	161	49,7	44,1	6,2	23,0	71,4	5,6
31	Maluku Utara	101	77,2	21,8	1,0	10,9	89,1	0,0
32	Papua Barat	104	38,5	61,5	0,0	2,9	97,1	0,0
33	Papua	294	28,2	69,7	2,0	1,4	96,6	2,0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	84,0	15,6	0,5	44,8	54,9	0,3
2	Perdesaan	6660	80,5	19,1	0,4	46,0	53,5	0,5
	INDONESIA	**8981**	**81,4**	**18,2**	**0,4**	**45,7**	**53,9**	**0,4**

Secara nasional, persentase Puskesmasmelakukan kegiatan Program Malaria adalah sebesar 78,1 persen, sedangkan persentase Puskesmastidak melakukan kegiatan Program Malaria sebesar 21,5 persen. Terdapat dua provinsi dari 33 provinsi yang keseluruhan Puskesmasnya melakukan Program Malaria, yaitu Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah.Persentase Puskesmasterendah melakukan kegiatan Program Malaria adalah Provinsi DKI Jakarta (17,9%), Provinsi Jawa Barat (39,9%) dan Provinsi Banten (40,8%).Secara nasional, persentase Puskesmasperdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmasperkotaan dalam melakukan kegiatan Program Malaria yaitu 81,9 persen pada perdesaan dan 67,3 persen pada perkotaan.

Secara nasional, persentasePuskesmasmelakukan kegiatan Program Kusta adalah sebesar 80,6 persen, sedangkan persentase Puskesmastidak melakukan kegiatan Program Kusta sebesar 19,1 persen. Persentase Puskesmastertinggi melakukan kegiatan Program Kusta ditemukan pada Provinsi Bali (97,4%), diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (96,9%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (94,9%). Persentase Puskesmasterendah melakukan kegiatan Program Kusta adalah Provinsi Papua (38,1%), Provinsi Bengkulu (53,2%) dan Provinsi DKI Jakarta (53,6%).Secara nasional, persentase antara Puskesmasperdesaan dan perkotaan hampir sama dalam melakukan kegiatan Program Kusta yaitu 80,7 persen pada perkotaan dan 80,6 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmasmelakukan kegiatan Program HIV-AIDS adalah sebesar 42,0 persen, sedangkan persentase Puskesmastidak melakukan kegiatan Program HIV-AIDSsebesar 57,6 persen. Persentase Puskesmastertinggi melakukan kegiatan Program HIV-AIDS adalah Provinsi Bali (84,2%), Provinsi Bangka Belitung (73,7%) dan Provinsi DI Yogyakarta (71,1%).Persentase Puskesmasterendah melakukan kegiatan Program HIV-AIDS adalah Provinsi Maluku Utara (4,0%), Provinsi Sulawesi Barat (9,9%) dan Provinsi Papua Maluku (12,4%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmasperdesaan dalam melakukan kegiatan Program HIV-AIDS yaitu 49,4 persen pada perkotaan dan 39,4 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmasmelakukan kegiatan Program Filariasis adalah sebesar 42,0 persen, sedangkan persentase Puskesmastidak melakukan kegiatan Program Filariasis sebesar 57,6 persen. Persentase Puskesmastertinggi melakukan kegiatan Program Filariasis ditemukan pada Provinsi Bangka Belitung (89,5%), diikuti oleh Provinsi Gorontalo (77,0%) dan Provinsi Sumatera Barat (66,9%).Persentase Puskesmasterendah melakukan kegiatan Program Filariasis adalah Provinsi Sulawesi Utara (7,2%), Provinsi Maluku Utara (12,9%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (13,4%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmasperdesaan dalam melakukan kegiatan Program Filariasis yaitu 43,8 persen pada perkotaan dan 42,6 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmasmelakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu adalah sebesar 81,4 persen, sedangkan persentase Puskesmastidak melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu sebesar 18,2 persen. Persentase Puskesmastertinggi melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu adalah Provinsi Bangka Belitung (98,2%), Provinsi Bali (97,4%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (95,7%).Persentase Puskesmasterendah melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu adalah pada Provinsi Papua (28,2%),

Provinsi Papua Barat (38,5%) dan Provinsi Maluku (49,7%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmasperdesaan dalam melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu yaitu 84,0 persen pada perkotaan dan 80,5 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Program Rabies adalah sebesar 45,7 persen, sedangkan persentase Puskesmastidak melakukan kegiatan Program Rabiessebesar 53,9 persen. Persentase Puskesmastertinggi melakukan kegiatan Program Rabies ditemukan pada Provinsi Bangka Belitung (98,2%), diikuti oleh Provinsi Bali (97,4%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (95,7%).Persentase Puskesmasterendah melakukan kegiatan Program Rabies adalah Provinsi Papua (28,2%), Provinsi Papua Barat (38,5%) dan Provinsi Maluku (49,7%).Secara nasional, persentase Puskesmasperdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmasperkotaan dalam melakukan kegiatan Program Rabies yaitu 46,0 persen pada perdesaan dan 44,8 persen pada perkotaan.

4.8.7.2. Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan TB Paru, ISPA/Pneumonia, Diare, DBD, Malaria, Kusta, Pencegahan HIV-AIDS, Pengenalan HIV-AIDS (konseling dan VCT) di RS dan Puskesmas, Filariasis, Rabies dan Tim Gerak Cepat yang diikuti oleh tenaga puskesmas pada tahun 2009 dan 2010.Secara nasional, dari keseluruhan pelatihan UpayaPengendalianPenyakit Menular yang tersebut di atas, pelatihan dengan persentase tertinggi yang diikuti oleh puskesmas adalah pelatihan TB Paru (53,6%), disusul oleh pelatihan Malaria (38,5%), dan pelatihan Kusta (32,2%).

Secara nasional, Puskesmasyang mengikutiPelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru adalah sebesar 53,6 persen, Puskesmasyang tidak mengikuti pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru adalah sebesar 46,0 persen. Persentase Puskesmastertinggi mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru adalah Provinsi Kepulauan Riau (87,7%), Provinsi Bangka Belitung (77,2%), dan Provinsi DI Yogyakarta (76,0%). Persentase Puskesmasterendah mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru adalah Provinsi Sulawesi Selatan (39,7%), Provinsi Bali (41,2%) dan Provinsi Sumatera Utara (41,5%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dalam mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Tb Paru dibandingkan denganPuskesmasperdesaan yaitu 56,3 persen pada perkotaan dan 52,7 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmasyang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia adalah sebesar26,8 persen, persentase Puskesmasyang tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumoniasebesar 72,8 persen. Persentase Puskesmastertinggi yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia adalah Provinsi Banten (56,8%), Provinsi Sumatera Selatan (44,0%), dan Provinsi Sulawesi Tengah (43,6%). Persentase Puskesmasterendah yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia adalah Provinsi Bali (8,8%), Provinsi Maluku (9,9%) dan Provinsi Maluku Utara (12,9%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dalam mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia

dibandingkan denganPuskesmasperdesaan, yaitu 30,9 persen pada perkotaan dan 25,4 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.7.2.a
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dalam UpayaPengendalianPenyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan TB Paru			Pelatihan ISPA/Pneumonia			Pelatihan Diare		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	54,3	45,3	0,3	21,9	77,8	0,3	23,5	76,2	0,3
2	Sumatera Utara	506	41,5	58,5	0,0	16,6	83,4	0,0	16,8	83,2	0,0
3	Sumatera Barat	248	51,6	48,4	0,0	22,2	77,8	0,0	24,2	75,8	0,0
4	Riau	195	68,7	31,3	0,0	33,8	66,2	0,0	31,3	68,7	0,0
5	Jambi	171	69,6	30,4	0,0	31,6	68,4	0,0	30,4	69,6	0,0
6	Sumatera Selatan	298	68,1	31,2	0,7	44,0	55,4	0,7	43,0	56,4	0,7
7	Bengkulu	173	64,2	35,3	0,6	13,3	86,1	0,6	13,3	86,1	0,6
8	Lampung	265	61,9	38,1	0,0	26,0	74,0	0,0	20,8	79,2	0,0
9	Bangka Belitung	57	77,2	22,8	0,0	31,6	68,4	0,0	40,4	59,6	0,0
10	Kepulauan Riau	65	87,7	12,3	0,0	18,5	81,5	0,0	16,9	83,1	0,0
11	DKI Jakarta	336	61,3	38,1	0,6	39,0	60,4	0,6	34,2	65,2	0,6
12	Jawa Barat	1031	55,0	44,7	0,3	38,9	60,8	0,3	34,9	64,8	0,3
13	Jawa Tengah	861	41,7	58,3	0,0	24,7	75,3	0,0	22,3	77,7	0,0
14	DI Yogyakarta	121	76,0	24,0	0,0	38,0	62,0	0,0	30,6	69,4	0,0
15	Jawa Timur	949	45,5	54,3	0,2	25,9	73,9	0,2	23,1	76,7	0,2
16	Banten	206	73,3	26,7	0,0	56,8	43,2	0,0	55,3	44,7	0,0
17	Bali	114	41,2	58,8	0,0	8,8	91,2	0,0	8,8	91,2	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	57,7	42,3	0,0	31,5	68,5	0,0	32,9	66,4	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	49,3	50,3	0,3	17,9	81,8	0,3	21,9	77,8	0,3
20	Kalimantan Barat	233	55,4	44,2	0,4	34,8	64,8	0,4	34,3	65,2	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	50,6	49,4	0,0	19,3	80,7	0,0	18,8	81,3	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	52,5	47,5	0,0	28,1	71,9	0,0	26,3	73,7	0,0
23	Kalimantan Timur	213	62,9	37,1	0,0	23,0	77,0	0,0	23,5	76,5	0,0
24	Sulawesi Utara	167	60,5	39,5	0,0	15,6	84,4	0,0	15,6	84,4	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	58,3	41,1	0,6	43,6	55,8	0,6	38,7	60,7	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	39,7	59,9	0,5	21,4	78,3	0,2	22,7	77,1	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	63,9	35,6	0,4	14,6	85,0	0,4	18,9	80,7	0,4
28	Gorontalo	74	73,0	25,7	1,4	21,6	77,0	1,4	16,2	82,4	1,4
29	Sulawesi Barat	81	63,0	35,8	1,2	21,0	77,8	1,2	19,8	79,0	1,2
30	Maluku	161	50,3	44,7	5,0	9,9	85,1	5,0	8,7	86,3	5,0
31	Maluku Utara	101	53,5	46,5	0,0	12,9	87,1	0,0	16,8	83,2	0,0
32	Papua Barat	104	51,0	49,0	0,0	17,3	82,7	0,0	21,2	78,8	0,0
33	Papua	294	41,8	55,8	2,4	13,3	84,4	2,4	15,6	82,0	2,4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	56,3	43,5	0,2	30,9	68,8	0,3	29,5	70,2	0,3
2	Perdesaan	6660	52,7	46,9	0,4	25,4	74,2	0,4	24,3	75,3	0,4
	INDONESIA	**8981**	**53,6**	**46,0**	**0,4**	**26,8**	**72,8**	**0,4**	**25,7**	**74,0**	**0,4**

Tabel 4.8.7.2.b
Persentase Puskesmas menurutPelatihan dalam Upaya PengendalianPenyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan DBD			Pelatihan Malaria		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	26,4	73,6	0,0	73,3	26,7	0,0
2	Sumatera Utara	506	19,0	81,0	0,0	23,7	76,3	0,0
3	Sumatera Barat	248	14,5	85,5	0,0	23,4	76,6	0,0
4	Riau	195	28,7	71,3	0,0	39,5	60,5	0,0
5	Jambi	171	16,4	83,6	0,0	46,2	53,8	0,0
6	Sumatera Selatan	298	31,5	67,8	0,7	35,9	63,4	0,7
7	Bengkulu	173	5,8	93,6	0,6	49,7	49,7	0,6
8	Lampung	265	16,2	83,4	0,4	41,5	58,5	0,0
9	Bangka Belitung	57	21,1	78,9	0,0	43,9	56,1	0,0
10	Kepulauan Riau	65	15,4	84,6	0,0	63,1	36,9	0,0
11	DKI Jakarta	336	32,1	67,3	0,6	9,5	89,9	0,6
12	Jawa Barat	1031	23,7	76,0	0,3	8,4	91,3	0,3
13	Jawa Tengah	861	24,6	75,4	0,0	13,9	86,1	0,0
14	DI Yogyakarta	121	29,8	70,2	0,0	7,4	92,6	0,0
15	Jawa Timur	949	23,8	75,9	0,3	12,0	87,6	0,4
16	Banten	206	38,3	61,7	0,0	12,1	87,9	0,0
17	Bali	114	10,5	89,5	0,0	4,4	95,6	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	21,5	77,2	1,3	59,1	39,6	1,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	4,3	95,4	0,3	52,0	47,7	0,3
20	Kalimantan Barat	233	24,5	75,1	0,4	88,4	11,2	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	8,0	92,0	0,0	81,8	18,2	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	19,8	80,2	0,0	83,4	16,6	0,0
23	Kalimantan Timur	213	24,9	75,1	0,0	64,8	35,2	0,0
24	Sulawesi Utara	167	10,8	89,2	0,0	74,9	25,1	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	18,4	81,6	0,0	87,7	12,3	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	23,9	76,1	0,0	74,9	25,1	0,0
27	Sulawesi Tenggara	233	9,0	90,6	0,4	81,1	18,5	0,4
28	Gorontalo	74	9,5	89,2	1,4	89,2	9,5	1,4
29	Sulawesi Barat	81	16,0	82,7	1,2	88,9	9,9	1,2
30	Maluku	161	2,5	92,5	5,0	50,9	44,1	5,0
31	Maluku Utara	101	3,0	96,0	1,0	60,4	39,6	0,0
32	Papua Barat	104	5,8	94,2	0,0	69,2	30,8	0,0
33	Papua	294	3,7	93,9	2,4	35,0	62,6	2,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	27,8	71,8	0,3	32,6	67,2	0,2
2	Perdesaan	6660	17,4	82,2	0,4	40,5	59,1	0,4
	INDONESIA	**8981**	**20,1**	**79,5**	**0,4**	**38,5**	**61,2**	**0,4**

Tabel 4.8.7.2.c
Persentase Puskesmas menurutPelatihan dalam UpayaPengendalianPenyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Kusta			Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS			Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	37,9	62,1	0,0	8,4	91,6	0,0	6,8	92,6	0,6
2	Sumatera Utara	506	20,4	79,6	0,0	8,5	91,3	0,2	6,3	93,5	0,2
3	Sumatera Barat	248	32,3	67,7	0,0	10,9	88,3	0,8	11,3	87,9	0,8
4	Riau	195	26,7	73,3	0,0	19,5	80,5	0,0	13,8	86,2	0,0
5	Jambi	171	25,1	74,9	0,0	10,5	89,5	0,0	10,5	89,5	0,0
6	Sumatera Selatan	298	31,2	68,1	0,7	14,4	84,9	0,7	13,4	85,9	0,7
7	Bengkulu	173	11,0	88,4	0,6	1,2	98,3	0,6	1,7	97,7	0,6
8	Lampung	265	18,1	81,9	0,0	4,9	95,1	0,0	6,4	93,6	0,0
9	Bangka Belitung	57	26,3	73,7	0,0	26,3	73,7	0,0	28,1	71,9	0,0
10	Kepulauan Riau	65	16,9	83,1	0,0	21,5	78,5	0,0	16,9	83,1	0,0
11	DKI Jakarta	336	28,6	70,8	0,6	25,3	74,1	0,6	22,3	77,1	0,6
12	Jawa Barat	1031	32,0	67,7	0,3	21,0	78,7	0,3	19,1	80,6	0,3
13	Jawa Tengah	861	29,5	70,5	0,0	17,3	82,7	0,0	16,4	83,6	0,0
14	DI Yogyakarta	121	24,0	76,0	0,0	41,3	58,7	0,0	37,2	62,8	0,0
15	Jawa Timur	949	43,2	56,5	0,3	20,3	79,2	0,4	16,8	82,8	0,4
16	Banten	206	57,8	42,2	0,0	32,0	68,0	0,0	22,3	77,7	0,0
17	Bali	114	7,9	92,1	0,0	18,4	81,6	0,0	21,1	78,9	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	36,9	63,1	0,0	9,4	89,3	1,3	11,4	87,9	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	22,5	77,2	0,3	9,6	90,1	0,3	9,9	89,7	0,3
20	Kalimantan Barat	233	24,9	74,7	0,4	16,3	83,3	0,4	12,4	87,1	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	13,1	86,9	0,0	3,4	96,6	0,0	4,5	95,5	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	43,8	56,2	0,0	6,5	93,5	0,0	7,8	92,2	0,0
23	Kalimantan Timur	213	28,2	71,8	0,0	18,3	81,7	0,0	18,8	81,2	0,0
24	Sulawesi Utara	167	50,3	49,7	0,0	6,0	94,0	0,0	4,2	95,8	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	48,5	51,5	0,0	6,7	93,3	0,0	3,7	96,3	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	39,2	60,1	0,7	11,8	88,2	0,0	11,1	88,7	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	42,9	56,7	0,4	4,3	95,3	0,4	3,9	95,7	0,4
28	Gorontalo	74	51,4	47,3	1,4	2,7	95,9	1,4	1,4	97,3	1,4
29	Sulawesi Barat	81	33,3	65,4	1,2	1,2	97,5	1,2	1,2	97,5	1,2
30	Maluku	161	36,0	59,0	5,0	0,6	94,4	5,0	0,0	95,0	5,0
31	Maluku Utara	101	48,5	50,5	1,0	1,0	99,0	0,0	3,0	97,0	0,0
32	Papua Barat	104	41,3	58,7	0,0	31,7	68,3	0,0	23,1	76,9	0,0
33	Papua	294	22,4	75,2	2,4	29,3	68,4	2,4	27,6	70,1	2,4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	33,1	66,6	0,3	22,4	77,3	0,3	20,7	79,1	0,3
2	Perdesaan	6660	31,9	67,7	0,4	12,7	86,9	0,5	11,1	88,4	0,5
	INDONESIA	**8981**	**32,2**	**67,4**	**0,4**	**15,2**	**84,4**	**0,4**	**13,6**	**86,0**	**0,4**

Tabel 4.8.7.2.d
Persentase Puskesmas menurutPelatihan dalam UpayaPengendalianPenyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Filariasis			Pelatihan Rabies			Pelatihan Tim Gerak Cepat'		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	8,0	91,6	0,3	11,6	88,1	0,3	6,1	93,6	0,3
2	Sumatera Utara	506	5,3	94,5	0,2	11,1	88,7	0,2	3,0	96,8	0,2
3	Sumatera Barat	248	15,3	83,9	0,8	16,9	83,1	0,0	12,9	87,1	0,0
4	Riau	195	13,8	86,2	0,0	19,0	81,0	0,0	7,2	92,3	0,5
5	Jambi	171	9,4	90,1	0,6	14,0	86,0	0,0	5,3	94,7	0,0
6	Sumatera Selatan	298	7,7	91,6	0,7	13,1	86,2	0,7	10,7	87,9	1,3
7	Bengkulu	173	4,0	95,4	0,6	5,8	93,6	0,6	3,5	96,0	0,6
8	Lampung	265	3,4	96,6	0,0	7,2	92,8	0,0	6,8	93,2	0,0
9	Bangka Belitung	57	17,5	82,5	0,0	0,0	100,0	0,0	7,0	93,0	0,0
10	Kepulauan Riau	65	4,6	95,4	0,0	7,7	92,3	0,0	1,5	98,5	0,0
11	DKI Jakarta	336	11,6	87,8	0,6	5,1	94,3	0,6	11,9	87,5	0,6
12	Jawa Barat	1031	21,6	78,1	0,3	8,1	91,6	0,3	17,7	82,1	0,3
13	Jawa Tengah	861	5,5	94,5	0,0	3,6	96,4	0,0	16,6	83,4	0,0
14	DI Yogyakarta	121	5,8	94,2	0,0	5,8	94,2	0,0	28,9	71,1	0,0
15	Jawa Timur	949	5,2	94,3	0,5	3,0	96,5	0,5	17,9	81,5	0,6
16	Banten	206	23,8	76,2	0,0	8,3	91,7	0,0	17,5	82,0	0,5
17	Bali	114	0,0	100,0	0,0	34,2	65,8	0,0	2,6	97,4	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	0,7	98,7	0,7	0,7	98,7	0,7	12,8	86,6	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	5,3	94,0	0,7	6,3	93,4	0,3	4,6	94,7	0,7
20	Kalimantan Barat	233	9,9	89,7	0,4	3,0	96,6	0,4	4,3	95,3	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	17,6	82,4	0,0	6,3	93,8	0,0	0,6	99,4	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	13,8	86,2	0,0	11,5	88,5	0,0	9,7	90,3	0,0
23	Kalimantan Timur	213	11,7	88,3	0,0	8,5	91,5	0,0	14,1	85,4	0,5
24	Sulawesi Utara	167	0,0	100,0	0,0	12,0	88,0	0,0	8,4	91,6	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	14,1	85,9	0,0	17,2	82,8	0,0	11,7	88,3	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	5,2	94,8	0,0	10,8	89,2	0,0	11,1	88,4	0,5
27	Sulawesi Tenggara	233	9,4	90,1	0,4	7,3	92,3	0,4	3,9	95,7	0,4
28	Gorontalo	74	9,5	89,2	1,4	9,5	89,2	1,4	5,4	93,2	1,4
29	Sulawesi Barat	81	7,4	91,4	1,2	6,2	92,6	1,2	12,3	86,4	1,2
30	Maluku	161	0,6	94,4	5,0	3,7	91,3	5,0	1,2	93,8	5,0
31	Maluku Utara	101	3,0	97,0	0,0	0,0	100,0	0,0	1,0	99,0	0,0
32	Papua Barat	104	2,9	97,1	0,0	0,0	100,0	0,0	1,9	98,1	0,0
33	Papua	294	5,4	92,2	2,4	1,4	95,9	2,7	2,7	94,6	2,7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	10,2	89,5	0,3	8,1	91,6	0,3	13,4	86,2	0,4
2	Perdesaan	6660	8,9	90,6	0,5	7,7	91,8	0,5	9,9	89,6	0,6
	INDONESIA	**8981**	**9,2**	**90,3**	**0,4**	**7,8**	**91,8**	**0,4**	**10,8**	**88,7**	**0,5**

Secara nasional, persentase Puskesmasyang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diare adalah sebesar25,7 persen, persentase Puskesmasyang tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diaresebesar 74,0 persen.Persentase Puskesmastertinggi yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diareadalah Provinsi Banten (55,3%), diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan (43,0%), dan Provinsi Bangka Belitung (40,4%). Persentase Puskesmasterendah yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diareadalah Provinsi Maluku (8,7%), diikuti Provinsi Bali (8,8%) dan Provinsi Bengkulu (13,3%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dalam mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diare dibandingkan denganPuskesmasperdesaan, yaitu 29,5 persen pada perkotaan dan 24,3 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmasyang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD adalah sebesar 20,1 persen, persentase Puskesmasyang tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD sebesar 79,5 persen. Persentase Puskesmastertinggi yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBDadalah Provinsi Banten (38,3%), Provinsi DKI Jakarta (32,1%), dan Provinsi Sumatera Selatan (31,5%). Persentase Puskesmasterendah yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBDadalah Provinsi Maluku (2,5%), Provinsi Maluku Utara (3,0%) dan Provinsi Papua (3,7%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dibandingkan denganPuskesmasperdesaan dalam mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD, yaitu 27,8 persen pada perkotaan dan 17,4 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmasyang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria adalah sebesar 38,5 persen, persentase Puskesmasyang tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria sebesar 61,2 persen. Persentase Puskesmastertinggi yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria adalah Provinsi Gorontalo(89,2%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (88,9%), dan Provinsi Kalimantan Barat (88,4%). Persentase Puskesmasterendah yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria adalah Provinsi Bali (4,4%), diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (7,4%) dan Provinsi Jawa Barat (8,4%).Secara nasional, persentase Puskesmasperdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmasperkotaan dalam mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria, yaitu 32,6 persen pada perkotaan dan 40,5 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmasyang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta adalah sebesar 32,2 persen, persentase Puskesmastidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta sebesar 67,4 persen. Persentase Puskesmastertinggi yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta adalah Provinsi Banten (57,8%), diikuti oleh Provinsi Gorontalo (51,4%), dan Provinsi Sulawesi Utara (50,3%). Persentase Puskesmasterendah yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kustaadalah Provinsi Bali (7,9%), diikuti oleh Provinsi Bengkulu (11,0%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (13,1%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dibandingkan denganPuskesmasperdesaandalam mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta, yaitu 33,1 persen pada perkotaan dan 31,9 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmasyang mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDSadalah sebesar 15,2 persen, persentase Puskesmasyang tidak mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS sebesar 84,4 persen.Persentase Puskesmastertinggi yang mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (41,357,8%), diikuti oleh Provinsi Banten (32,0%), dan Provinsi Papua Barat (31,7%). Persentase Puskesmasterendah yang mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS adalah Provinsi Maluku (0,6%), Provinsi Maluku Utara (1,0%) dan Provinsi Bengkulu (1,2%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dibandingkan denganPuskesmasperdesaan dalam mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS, yaitu 22,4 persen pada perkotaan dan 12,7 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentasePuskesmasmenerima Pelatihan Pengenalan HIV-AIDSadalah sebesar 13,6 persen, persentase Puskesmasyang tidak mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDSsebesar 86,0 persen. Persentase Puskesmastertinggi yang mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS adalah Provinsi DI Yogyakarta (37,2%), diikuti oleh Provinsi Bangka Belitung (28,1%), dan Provinsi Papua (27,6%). Persentase Puskesmasterendah yang mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS adalah Provinsi Maluku (0,0%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (1,2%) dan Provinsi Gorontalo (1,4%).Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dibandingkan denganPuskesmasperdesaan dalam mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS, yaitu 20,7 persen pada perkotaan dan 11,1 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmasyang mengikuti Pelatihan Filariasis adalah sebesar 9,2 persen, persentase Puskesmasyang tidak mengikuti Pelatihan Filariasis sebesar 90,3 persen. Persentase Puskesmastertinggi yang mengikuti Pelatihan Filariasis adalah Provinsi Banten (23,8%), diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (21,6%), dan Provinsi Kalimantan Tengah (17,6%). Terdapat dua provinsi yang tidak satupun PuskesmasmengikutiPelatihan Filariasis yaitu Provinsi Bali dan Sulawesi Utara. Secara nasional, persentase Puskesmasperkotaan lebih tinggi dibandingkan denganPuskesmasperdesaan dalam mengikuti Pelatihan Filariasis yaitu 10,2 persen pada perkotaan dan 8,9 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti Pelatihan Rabies adalah sebesar 7,8 persen, persentase Puskesmas yang tidakmengikuti Pelatihan Rabies sebesar 91,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mengikuti Pelatihan Rabies terdapat di Provinsi Bali (34,2%), diikuti oleh Provinsi Riau (19,0%), dan Provinsi Sulawesi Tengah (17,2%). Terdapat tiga provinsi yang tidak satupun Puskesmasnyamengikuti Pelatihan Rabies yaitu Provinsi Bangka Belitung, Maluku Utara dan Papua Barat. Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan dalam mengikuti Pelatihan Rabies yaitu8,1 persen pada perkotaan dan 7,7 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat adalah sebesar 10,8 persen, persentasePuskesmas yang tidak mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat sebesar 88,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (28,9%), diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (17,9%), dan Provinsi Jawa Barat (17,7%). Persentase Puskesmas terendahyang mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah (0,6%), diikuti oleh

Provinsi Maluku Utara (1,0%), dan Provinsi Kalimantan Tengah (0,6%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dalam mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat dibandingkan denganPuskesmas perdesaan, yaitu 13,4 persen pada perkotaan dan 9,9 persen pada perdesaan

4.8.7.3. Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular

Pedoman pelaksanaanUpaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi: Penanggulangan TB paru, Penanggulangan ISPA, Penanggulangan Diare, Penanggulangan DBD, Penanggulangan Malaria, Penanggulangan Kusta, Penanggulangan Schistosomiasis,Pencegahan HIV-AIDS, Penanggulangan Filariasis, pedoman KLB, dan Penanggulangan Rabies, dan Pedoman Surveilans integrasi Avian Influenza.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru adalah sebesar 83,6 persen, dan persentase Puskesmas yang tidak memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru sebesar 16,0 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru adalah Provinsi DI Yogyakarta (94,2%), diikuti oleh Provinsi Lampung (93,6%) dan Provinsi Bangka Belitung (93,0%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru adalah Provinsi Papua (51,7%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (63,5%) dan Provinsi Sumatera Utara (67,8%). Secara nasional persentase dengan ketersediaan Pedoman Penanggulangan TB Paru di puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 87,6 persen di Puskesmas perkotaan dan 82,2 persen di puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA adalah sebesar 58,3 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA sebesar 41,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA adalah Provinsi DI Yogyakarta (81,8%) diikuti oleh Provinsi Bali (78,9%) dan Provinsi Jawa Timur (76,9%). Persentase terendah puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA adalah Provinsi Papua (32,0%) diikuti oleh Provinsi Maluku (31,7%) dan Provinsi Sulawesi Utara (26,9%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPAdi Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan denganPuskesmas perdesaan, yaitu 62,1 persen di Puskesmas perkotaan dan 57,0 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentasePuskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare adalah sebesar 57,7 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare sebesar 41,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare adalah Provinsi DI Yogyakarta (81,8%) diikuti oleh Provinsi Bangka Belitung (78,9%) dan Provinsi Banten (77,2%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare adalah Provinsi Sulawesi Utara (20,4%) diikuti oleh Provinsi Maluku (34,8%) dan Provinsi Papua (35,4%).Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diaredi Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan,yaitu 62,6 persen di Puskesmas perkotaan dan 56,1 persen di puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.7.3.a
Persentase Puskesmas menurut Pedoman Upaya Pengendalian Penyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Penanggulangan TB Paru			Pedoman Penanggulangan ISPA			Pedoman Penanggulangan Diare		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	77,5	22,5	0,0	34,1	65,9	0,0	40,2	59,5	0,3
2	Sumatera Utara	506	67,8	32,2	0,0	37,9	61,7	0,4	35,6	64,2	0,2
3	Sumatera Barat	248	85,9	14,1	0,0	50,4	49,6	0,0	54,0	46,0	0,0
4	Riau	195	79,0	20,5	0,5	48,2	51,3	0,5	50,3	49,2	0,5
5	Jambi	171	80,1	19,3	0,6	57,9	41,5	0,6	52,0	47,4	0,6
6	Sumatera Selatan	298	81,5	17,8	0,7	66,4	32,9	0,7	59,4	39,9	0,7
7	Bengkulu	173	79,2	20,8	0,0	43,9	56,1	0,0	39,3	60,7	0,0
8	Lampung	265	93,6	6,4	0,0	63,8	36,2	0,0	70,6	29,4	0,0
9	Bangka Belitung	57	93,0	7,0	0,0	70,2	29,8	0,0	78,9	21,1	0,0
10	Kepulauan Riau	65	89,2	10,8	0,0	63,1	36,9	0,0	58,5	41,5	0,0
11	DKI Jakarta	336	83,9	15,5	0,6	60,1	39,3	0,6	63,7	36,0	0,3
12	Jawa Barat	1031	91,7	8,1	0,3	72,8	26,8	0,4	72,1	27,5	0,4
13	Jawa Tengah	861	92,0	8,0	0,0	74,3	25,7	0,0	72,1	27,9	0,0
14	DI Yogyakarta	121	94,2	5,8	0,0	81,8	18,2	0,0	81,8	18,2	0,0
15	Jawa Timur	949	92,6	7,2	0,2	76,9	22,9	0,2	72,7	27,0	0,3
16	Banten	206	90,3	9,7	0,0	75,2	24,8	0,0	77,2	22,8	0,0
17	Bali	114	92,1	7,9	0,0	78,9	21,1	0,0	73,7	26,3	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	89,3	10,7	0,0	69,1	30,9	0,0	59,7	40,3	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	78,8	20,9	0,3	42,4	57,0	0,7	44,7	55,0	0,3
20	Kalimantan Barat	233	86,7	12,9	0,4	56,7	42,9	0,4	58,4	41,2	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	84,1	15,9	0,0	63,1	36,4	0,6	63,6	35,8	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	86,2	13,8	0,0	63,6	36,4	0,0	62,7	37,3	0,0
23	Kalimantan Timur	213	89,7	10,3	0,0	54,0	45,5	0,5	54,0	45,5	0,5
24	Sulawesi Utara	167	73,7	26,3	0,0	26,9	73,1	0,0	20,4	79,6	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	76,1	23,3	0,6	56,4	42,9	0,6	50,3	48,5	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	74,4	25,1	0,5	43,3	56,2	0,5	46,8	53,0	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	82,4	17,2	0,4	36,5	62,7	0,9	42,1	57,1	0,9
28	Gorontalo	74	82,4	16,2	1,4	52,7	45,9	1,4	47,3	51,4	1,4
29	Sulawesi Barat	81	80,2	18,5	1,2	46,9	51,9	1,2	40,7	58,0	1,2
30	Maluku	161	71,4	23,0	5,6	31,7	62,1	6,2	34,8	59,0	6,2
31	Maluku Utara	101	78,2	21,8	0,0	37,6	62,4	0,0	35,6	64,4	0,0
32	Papua Barat	104	63,5	35,6	1,0	43,3	55,8	1,0	41,3	57,7	1,0
33	Papua	294	51,7	45,9	2,4	32,0	65,0	3,1	35,4	61,6	3,1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	87,6	12,2	0,2	62,1	37,6	0,3	62,6	37,1	0,3
2	Perdesaan	6660	82,2	17,3	0,5	57,0	42,4	0,6	56,1	43,4	0,6
	INDONESIA	**8981**	**83,6**	**16,0**	**0,4**	**58,3**	**41,2**	**0,5**	**57,7**	**41,8**	**0,5**

Tabel 4.8.7.3.b
Persentase Puskesmas menurutPedoman UpayaPengendalianPenyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Penanggulangan DBD			Pedoman Penanggulangan Malaria			Pedoman Penanggulangan Kusta		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	38,9	60,8	0,3	65,0	35,0	0,0	57,2	42,8	0,0
2	Sumatera Utara	506	42,3	57,7	0,0	38,7	61,3	0,0	37,7	62,3	0,0
3	Sumatera Barat	248	47,6	52,4	0,0	47,2	52,8	0,0	56,9	43,1	0,0
4	Riau	195	53,8	45,1	1,0	59,0	40,0	1,0	47,7	51,8	0,5
5	Jambi	171	45,6	53,8	0,6	58,5	41,5	0,0	52,6	46,8	0,6
6	Sumatera Selatan	298	54,0	45,3	0,7	52,3	47,0	0,7	53,0	46,3	0,7
7	Bengkulu	173	32,9	67,1	0,0	61,3	38,7	0,0	32,4	67,1	0,6
8	Lampung	265	59,6	40,0	0,4	73,6	26,4	0,0	59,2	40,8	0,0
9	Bangka Belitung	57	59,6	40,4	0,0	89,5	10,5	0,0	70,2	29,8	0,0
10	Kepulauan Riau	65	58,5	41,5	0,0	81,5	16,9	1,5	52,3	46,2	1,5
11	DKI Jakarta	336	61,3	38,1	0,6	40,5	58,9	0,6	52,7	47,0	0,3
12	Jawa Barat	1031	64,7	35,0	0,3	38,9	60,8	0,3	69,4	30,4	0,3
13	Jawa Tengah	861	74,3	25,7	0,0	66,0	33,9	0,1	75,5	24,5	0,0
14	DI Yogyakarta	121	77,7	22,3	0,0	61,2	38,8	0,0	68,6	31,4	0,0
15	Jawa Timur	949	67,7	32,1	0,2	45,0	54,7	0,3	84,6	15,1	0,3
16	Banten	206	69,9	30,1	0,0	42,2	57,8	0,0	75,2	24,8	0,0
17	Bali	114	68,4	31,6	0,0	72,8	27,2	0,0	78,1	21,9	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	58,4	40,9	0,7	75,8	23,5	0,7	63,8	36,2	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	27,5	72,2	0,3	67,9	31,5	0,7	45,4	54,3	0,3
20	Kalimantan Barat	233	48,5	51,1	0,4	79,0	20,6	0,4	44,6	54,9	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	55,1	44,3	0,6	82,4	17,0	0,6	54,0	45,5	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	49,3	50,7	0,0	81,1	18,9	0,0	67,7	31,8	0,5
23	Kalimantan Timur	213	56,3	43,2	0,5	80,3	19,7	0,0	58,2	41,8	0,0
24	Sulawesi Utara	167	24,6	74,9	0,6	67,7	32,3	0,0	62,9	37,1	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	28,8	70,6	0,6	73,6	25,8	0,6	63,2	36,2	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	48,5	51,5	0,0	70,7	29,3	0,0	69,2	30,5	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	29,6	69,1	1,3	74,2	25,3	0,4	60,1	39,5	0,4
28	Gorontalo	74	39,2	59,5	1,4	83,8	14,9	1,4	71,6	25,7	2,7
29	Sulawesi Barat	81	39,5	59,3	1,2	79,0	19,8	1,2	58,0	40,7	1,2
30	Maluku	161	23,0	70,8	6,2	61,5	32,3	6,2	55,9	37,9	6,2
31	Maluku Utara	101	26,7	73,3	0,0	68,3	31,7	0,0	64,4	35,6	0,0
32	Papua Barat	104	39,4	59,6	1,0	62,5	36,5	1,0	52,9	46,2	1,0
33	Papua	294	28,2	68,7	3,1	48,0	49,3	2,7	41,2	55,8	3,1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	62,9	36,8	0,4	55,8	43,9	0,3	64,9	34,9	0,2
2	Perdesaan	6660	49,6	49,8	0,6	59,4	40,0	0,5	61,1	38,4	0,6
	INDONESIA	**8981**	**53,1**	**46,4**	**0,5**	**58,5**	**41,0**	**0,5**	**62,0**	**37,5**	**0,5**

Tabel 4.8.7.3.c
Persentase Puskesmas menurutPedoman UpayaPengendalianPenyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS			Pedoman Penanggulangan Filariasis			Pedoman Penanggulangan KLB		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	18,6	81,4	0,0	19,6	80,4	0,0	33,4	66,2	0,3
2	Sumatera Utara	506	25,9	73,9	0,2	21,3	78,5	0,2	25,3	74,5	0,2
3	Sumatera Barat	248	32,7	66,9	0,4	37,5	62,1	0,4	36,3	63,7	0,0
4	Riau	195	40,5	59,0	0,5	39,0	60,5	0,5	37,9	61,0	1,0
5	Jambi	171	31,6	67,8	0,6	35,1	63,2	1,8	42,1	57,9	0,0
6	Sumatera Selatan	298	30,2	69,1	0,7	27,2	72,1	0,7	47,0	52,3	0,7
7	Bengkulu	173	25,4	74,6	0,0	25,4	74,6	0,0	34,7	64,7	0,6
8	Lampung	265	33,2	66,8	0,0	28,3	71,7	0,0	52,5	47,5	0,0
9	Bangka Belitung	57	43,9	56,1	0,0	57,9	42,1	0,0	70,2	29,8	0,0
10	Kepulauan Riau	65	44,6	53,8	1,5	35,4	63,1	1,5	47,7	50,8	1,5
11	DKI Jakarta	336	52,1	47,6	0,3	35,7	63,7	0,6	40,2	59,2	0,6
12	Jawa Barat	1031	45,7	54,0	0,3	44,4	55,2	0,4	56,1	43,6	0,3
13	Jawa Tengah	861	49,9	50,1	0,0	36,8	63,2	0,0	69,8	30,2	0,0
14	DI Yogyakarta	121	70,2	29,8	0,0	37,2	62,8	0,0	76,9	23,1	0,0
15	Jawa Timur	949	51,1	48,5	0,4	30,6	69,1	0,3	53,6	46,2	0,2
16	Banten	206	48,5	51,5	0,0	48,1	51,9	0,0	51,9	48,1	0,0
17	Bali	114	61,4	38,6	0,0	28,1	71,9	0,0	50,0	50,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	35,6	63,8	0,7	24,8	74,5	0,7	41,6	57,7	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	25,5	74,2	0,3	24,5	75,2	0,3	23,2	76,5	0,3
20	Kalimantan Barat	233	31,3	68,2	0,4	31,3	68,2	0,4	39,5	59,7	0,9
21	Kalimantan Tengah	176	38,1	61,4	0,6	45,5	54,0	0,6	42,6	56,8	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	32,7	67,3	0,0	39,2	60,8	0,0	42,4	57,1	0,5
23	Kalimantan Timur	213	33,8	66,2	0,0	34,7	65,3	0,0	48,4	51,6	0,0
24	Sulawesi Utara	167	20,4	79,6	0,0	12,0	88,0	0,0	21,6	78,4	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	19,0	80,4	0,6	19,0	79,8	1,2	28,2	69,9	1,8
26	Sulawesi Selatan	406	31,5	68,5	0,0	26,6	72,9	0,5	50,2	49,5	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	24,0	75,5	0,4	24,5	75,1	0,4	23,2	76,0	0,9
28	Gorontalo	74	24,3	74,3	1,4	35,1	63,5	1,4	25,7	73,0	1,4
29	Sulawesi Barat	81	23,5	75,3	1,2	30,9	67,9	1,2	29,6	69,1	1,2
30	Maluku	161	21,1	72,7	6,2	20,5	73,3	6,2	21,1	72,7	6,2
31	Maluku Utara	101	23,8	76,2	0,0	22,8	76,2	1,0	31,7	68,3	0,0
32	Papua Barat	104	46,2	52,9	1,0	36,5	62,5	1,0	32,7	66,3	1,0
33	Papua	294	42,9	54,1	3,1	30,6	66,3	3,1	28,2	68,4	3,4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	44,9	54,9	0,3	34,9	64,8	0,4	48,2	51,4	0,4
2	Perdesaan	6660	35,8	63,6	0,6	31,2	68,2	0,6	43,5	55,9	0,6
	INDONESIA	**8981**	**38,1**	**61,4**	**0,5**	**32,2**	**67,3**	**0,6**	**44,7**	**54,7**	**0,6**

Tabel 4.8.7.3.d
Persentase Puskesmas menurutPedoman UpayaPengendalianPenyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Penanggulangan Rabies			Pedoman Penanggulangan Avian Influenza		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	22,8	77,2	0,0	25,7	74,0	0,3
2	Sumatera Utara	506	23,5	76,3	0,2	27,7	71,9	0,4
3	Sumatera Barat	248	46,4	53,6	0,0	43,1	56,5	0,4
4	Riau	195	40,5	59,0	0,5	45,6	52,8	1,5
5	Jambi	171	36,8	62,6	0,6	38,6	60,8	0,6
6	Sumatera Selatan	298	32,2	67,1	0,7	39,6	59,1	1,3
7	Bengkulu	173	26,6	73,4	0,0	30,6	69,4	0,0
8	Lampung	265	41,1	58,9	0,0	60,0	39,6	0,4
9	Bangka Belitung	57	17,5	82,5	0,0	59,6	40,4	0,0
10	Kepulauan Riau	65	36,9	61,5	1,5	50,8	47,7	1,5
11	DKI Jakarta	336	28,6	71,1	0,3	42,3	57,4	0,3
12	Jawa Barat	1031	34,6	65,1	0,3	58,0	41,6	0,4
13	Jawa Tengah	861	33,2	66,7	0,1	64,6	35,2	0,2
14	DI Yogyakarta	121	38,8	61,2	0,0	84,3	15,7	0,0
15	Jawa Timur	949	27,1	72,6	0,3	57,2	42,5	0,3
16	Banten	206	29,1	70,9	0,0	58,3	41,3	0,5
17	Bali	114	64,9	35,1	0,0	58,8	41,2	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	22,8	76,5	0,7	31,5	67,1	1,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	20,2	79,5	0,3	20,5	78,8	0,7
20	Kalimantan Barat	233	17,6	82,0	0,4	43,8	55,8	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	35,8	63,6	0,6	39,2	60,2	0,6
22	Kalimantan Selatan	217	36,9	63,1	0,0	31,8	68,2	0,0
23	Kalimantan Timur	213	26,3	73,7	0,0	40,8	59,2	0,0
24	Sulawesi Utara	167	21,0	79,0	0,0	20,4	79,6	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	21,5	77,3	1,2	22,7	75,5	1,8
26	Sulawesi Selatan	406	30,3	69,7	0,0	64,3	35,5	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	22,3	76,8	0,9	18,5	80,7	0,9
28	Gorontalo	74	32,4	66,2	1,4	25,7	73,0	1,4
29	Sulawesi Barat	81	24,7	74,1	1,2	27,2	71,6	1,2
30	Maluku	161	23,6	70,2	6,2	19,3	74,5	6,2
31	Maluku Utara	101	20,8	79,2	0,0	24,8	75,2	0,0
32	Papua Barat	104	27,9	71,2	1,0	31,7	67,3	1,0
33	Papua	294	22,4	74,5	3,1	23,1	73,8	3,1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	31,6	68,1	0,3	48,0	51,4	0,5
2	Perdesaan	6660	29,3	70,1	0,6	43,6	55,7	0,7
	INDONESIA	**8981**	**29,9**	**69,6**	**0,5**	**44,7**	**54,6**	**0,7**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD adalah sebesar 53,1 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD sebesar 46,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD adalah Provinsi DI Yogyakarta(77,7%) diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (74,3%) dan Provinsi Banten (69,9%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD adalah Provinsi Maluku (23,0%) diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (24,6%) dan Provinsi Maluku Utara (26,7%).Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBDdi Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan,yaitu 62,9 persen di Puskesmas perkotaan dan 49,6 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Malaria adalah sebesar 58,5 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Malaria sebesar 41,0 persen. Persentase tertinggi Puskesmas dengan ketersediaan Buku Pedoman Penanggulangan Malaria adalah Provinsi Bangka Belitung (89,5%) diikuti oleh Provinsi Gorontalo (83,8%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (82,4%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Malariaadalah Provinsi Sumatera Utara (38,7%) diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (38,9%) dan Provinsi DKI Jakarta (40,5%).Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Malariadi Puskesmas perdesaanlebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perkotaan,yaitu 55,8 persen di Puskesmas perkotaan dan 59,4 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Kusta adalah sebesar 62,0 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak memilikiBuku Pedoman Penanggulangan Kusta sebesar 37,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas dengan ketersediaan Buku Pedoman Penanggulangan Kusta adalah Provinsi Jawa Timur (84,6%) diikuti oleh Provinsi Bali (78,1%) dan Provinsi Jawa Tengah (75,5%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Kustaadalah Provinsi Bengkulu (32,4%) diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (37,7%) dan Provinsi Bengkulu (32,4%).Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Kusta di Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan,yaitu 64,9 persen di Puskesmas perkotaan dan 61,1 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memilikiBuku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDSadalah sebesar 38,1 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak memilikiBuku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS sebesar 61,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS adalah Provinsi DI Yogyakarta (70,2%) diikuti oleh Provinsi Bali (61,4%) dan Provinsi DKI Jakarta (52,1%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS adalah Provinsi DI Aceh (18,6%) diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah (19,0%) dan Provinsi Sulawesi Utara (20,4%).Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDSdi Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan,yaitu 44,9 persen di Puskesmas perkotaan dan 35,8 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Filariasis adalah sebesar 32,2 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak tersedia Buku Pedoman Penanggulangan Filariasissebesar 67,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Filariasisadalah Provinsi Bangka Belitung (57,9%) diikuti oleh Provinsi Banten (48,1%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (45,4%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Filariasisadalah Provinsi Sulawesi Utara (12,0%) diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah (19,0%) dan Provinsi DI Aceh (19,6%).Secara nasional persentase Puskesmas memilikiBuku Pedoman Penanggulangan Filariasis di Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan,yaitu 34,9 persen di Puskesmas perkotaan dan 31,2 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB adalah sebesar 44,7 persen, sedangkan persentase Puskesmas yang tidak memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB sebesar 54,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB adalah Provinsi DI Yogyakarta (76,9%) diikuti oleh Provinsi Bangka Belitung (70,2%) dan ProvinsiJawa Tengah (69,8%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB adalah Provinsi Maluku (21,1%) diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (21,6%) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (23,2%).Secara nasional persentase Puskesmas memilikiBuku Pedoman Penanggulangan KLBdi Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan,yaitu 48,2 persen di Puskesmas perkotaan dan 43,5 persen di Puskesmas perdesaan

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies adalah sebesar 29,9 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies sebesar 69,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies adalah Provinsi Bali (64,9%) diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (46,4%) dan Provinsi Lampung (41,1%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies adalah Provinsi Bangka Belitung (17,5%) diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat (17,6%) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (20,2%).Secara nasional persentase Puskesmas memilikiBuku Pedoman Penanggulangan Rabiesdi Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan,yaitu 31,6 persen di Puskesmas perkotaan dan 29,3 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza adalah sebesar 44,7 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak memiliki Buku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza sebesar 54,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza adalah Provinsi DI Yogyakarta (84,3%) diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (64,6%) dan Provinsi Sulawesi Selatan (64,3%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza adalah Provinsi Sulawesi Tenggara (18,5%) diikuti oleh Provinsi Maluku (19,3%) dan Provinsi Sulawesi Utara (20,4%).Secara nasional persentase Puskesmas memilikiBuku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenzadi Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan,yaitu 48,0 persen di Puskesmas perkotaan dan 43,6 persen di Puskesmas perdesaan.

4.8.7.4. Pengawasan, Evalusi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular

Pengawasan, evalusi dan bimbingan diperlukan dalam Upaya PengendalianPenyakit Menular untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, evalusi dan bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh dinas kesehatan.

Secara nasional bentuk Pengawasan, evalusi dan bimbingan yang paling banyak diterima puskesmas dalam Upaya PengendalianPenyakit Menular adalah dalam bentuk kunjungan supervisi oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas (79,5%) dan diikuti oleh pertemuan monitoring dan evaluasi di Dinas Kesehatan(79,3%) kemudian umpan balik (67,1%). Secara nasional persentase puskesmas lengkap menerima Pengawasan, evalusi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan monev, umpan balik dan pertemuan monev di Dinas Kesehatan adalah sebesar 59,0 persen, sementara 40,4 persen tidak tersedia lengkap.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, evalusi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisiDinas Kesehatan ke Puskesmas untuk UpayaPengendalianPenyakit Menularadalah sebesar 79,5 persen, dan persentase Puskesmas tidak menerima kunjungan sebesar 20,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Upaya PengendalianPenyakit Menular adalah Provinsi Gorontalo (93,2%) diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (90,6%) dan Provinsi Banten (90,3%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan untuk Upaya PengendalianPenyakit Menular adalah Provinsi Papua (38,8%) diikuti oleh Provinsi Maluku (46,0%) dan Provinsi Papua Barat (48,1%).Secara nasional persentase menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan untuk UpayaPengendalianPenyakit Menular diPuskesmas perkotaanlebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 80,1 persen pada Puskesmas perkotaan dan 79,3 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase puskesmas menerima Pengawasan, evalusi dan bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Upaya PengendalianPenyakit Menularadalah sebesar 67,1 persen, dan persentase puskesmas yang tidak menerima umpan balik sebesar 32,4 persen. Persentase puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk UpayaPengendalianPenyakit Menular adalah Provinsi DI Yogyakarta (87,6%) diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (84,0%) dan Provinsi Jawa Tengah (83,5%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk UpayaPengendalianPenyakit Menular adalah Provinsi Maluku (26,7%) diikuti oleh Provinsi Papua (31,6%) dan Provinsi Maluku Utara (37,6%). Secara nasional persentasePuskesmas perkotaan menerima umpan balik UpayaPengendalianPenyakit Menular dariDinas Kesehatan hampir sama dengan puskesmas perdesaan yaitu 67,4 persen di perkotaan dan67,0 persen di perdesaan.

Tabel 4.8.7.4
Persentase Puskesmas menurutPengawasan, Evalusi dan Bimbingan dalam UpayaProgram PengendalianPenyakit Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Supervisi DINKES			Umpan balik			Pertemuan Monev			Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi													
1	DI Aceh	311	72,3	27,3	0,3	51,4	47,3	1,3	74,0	25,1	1,0	46,0	52,7	1,3
2	Sumatera Utara	506	64,4	35,4	0,2	47,0	52,8	0,2	67,4	32,4	0,2	40,5	59,3	0,2
3	Sumatera Barat	248	84,3	15,7	0,0	70,6	29,4	0,0	79,8	20,2	0,0	62,9	37,1	0,0
4	Riau	195	82,6	17,4	0,0	77,9	22,1	0,0	81,5	18,5	0,0	64,1	35,9	0,0
5	Jambi	171	83,6	16,4	0,0	80,7	19,3	0,0	84,8	15,2	0,0	70,8	29,2	0,0
6	Sumatera Selatan	298	74,2	25,2	0,7	62,4	36,6	1,0	68,8	30,5	0,7	52,0	47,0	1,0
7	Bengkulu	173	79,2	19,7	1,2	61,3	37,6	1,2	71,7	27,2	1,2	48,0	50,9	1,2
8	Lampung	265	87,5	12,5	0,0	70,2	29,8	0,0	84,5	15,5	0,0	63,0	37,0	0,0
9	Bangka Belitung	57	77,2	22,8	0,0	66,7	33,3	0,0	73,7	26,3	0,0	59,6	40,4	0,0
10	Kepulauan Riau	65	84,6	15,4	0,0	81,5	18,5	0,0	76,9	23,1	0,0	56,9	43,1	0,0
11	DKI Jakarta	336	69,0	30,7	0,3	54,8	44,9	0,3	71,4	28,3	0,3	49,4	50,3	0,3
12	Jawa Barat	1031	86,4	13,3	0,3	84,0	15,6	0,4	92,7	7,0	0,3	75,6	24,1	0,4
13	Jawa Tengah	861	90,2	9,8	0,0	83,5	16,4	0,1	93,4	6,5	0,1	77,8	22,1	0,1
14	DI Yogyakarta	121	81,8	18,2	0,0	87,6	12,4	0,0	90,9	9,1	0,0	71,9	28,1	0,0
15	Jawa Timur	949	89,0	10,7	0,2	77,9	21,8	0,3	92,3	7,4	0,3	71,7	27,9	0,4
16	Banten	206	90,3	9,7	0,0	82,0	18,0	0,0	93,7	6,3	0,0	76,2	23,8	0,0
17	Bali	114	89,5	10,5	0,0	57,0	43,0	0,0	86,0	13,2	0,9	52,6	47,4	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	90,6	9,4	0,0	78,5	21,5	0,0	85,2	14,8	0,0	73,2	26,8	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	78,8	20,5	0,7	47,0	52,0	1,0	71,2	27,8	1,0	41,4	57,6	1,0
20	Kalimantan Barat	233	79,8	19,7	0,4	72,1	27,5	0,4	77,3	22,3	0,4	58,4	41,2	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	69,3	30,7	0,0	62,5	37,5	0,0	59,1	40,9	0,0	39,8	60,2	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	87,1	12,9	0,0	70,0	29,5	0,5	84,3	15,2	0,5	65,4	34,1	0,5
23	Kalimantan Timur	213	77,5	22,5	0,0	59,6	40,4	0,0	70,0	30,0	0,0	50,7	49,3	0,0
24	Sulawesi Utara	167	84,4	15,6	0,0	64,1	35,9	0,0	76,6	23,4	0,0	57,5	42,5	0,0
25	Sulawesi Tengah	163	62,6	36,8	0,6	62,6	36,2	1,2	68,1	31,3	0,6	46,6	52,1	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	85,5	14,5	0,0	60,6	39,2	0,2	85,7	14,3	0,0	54,7	45,1	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	80,7	18,9	0,4	64,8	34,8	0,4	78,5	21,0	0,4	54,5	45,1	0,4
28	Gorontalo	74	93,2	5,4	1,4	64,9	33,8	1,4	86,5	12,2	1,4	62,2	36,5	1,4
29	Sulawesi Barat	81	90,1	7,4	2,5	74,1	23,5	2,5	79,0	18,5	2,5	65,4	32,1	2,5
30	Maluku	161	46,0	49,1	5,0	26,7	68,3	5,0	44,1	50,9	5,0	19,9	75,2	5,0
31	Maluku Utara	101	59,4	40,6	0,0	37,6	62,4	0,0	48,5	51,5	0,0	28,7	71,3	0,0
32	Papua Barat	104	48,1	51,0	1,0	39,4	59,6	1,0	42,3	55,8	1,9	28,8	70,2	1,0
33	Papua	294	38,8	58,5	2,7	31,6	65,6	2,7	35,4	61,9	2,7	25,5	71,8	2,7
	Lokasi													
1	Perkotaan	2321	80,1	19,6	0,3	67,4	32,2	0,4	79,4	20,2	0,4	60,4	39,2	0,4
2	Perdesaan	6660	79,3	20,3	0,4	67,0	32,4	0,6	79,2	20,3	0,5	58,5	40,9	0,6
	INDONESIA	**8981**	**79,5**	**20,1**	**0,4**	**67,1**	**32,4**	**0,5**	**79,3**	**20,2**	**0,5**	**59,0**	**40,4**	**0,5**

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, evalusi dan bimbingan dalam bentuk mengikuti pertemuan monev di Dinas Kesehatan untukUpayaPengendalianPenyakit Menularadalah sebesar 79,3 persen dan persentase Puskesmas tidak mengikuti sebesar 20,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk UpayaPengendalianPenyakit Menulardi Dinas Kesehatan adalah Provinsi Banten (93,7%) diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (93,4%) dan Provinsi Jawa Barat (92,7%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Upaya PengendalianPenyakit Menulardi Dinas Kesehatan adalah Provinsi Papua (35,4%) diikuti oleh Provinsi Papua Barat (42,3%) dan Provinsi Maluku (44,1%). Secara nasional persentasePuskesmas perkotaan mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Upaya PengendalianPenyakit Menulardi Dinas Kesehatan hampir sama denganPuskesmas perdesaan yaitu 79,4 persen di perkotaan dan 79,2 persen di perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pengawasan, evalusi dan bimbingan secaralengkap (menerima ketiga bentuk pengawasan, evalusi dan bimbingan) untuk UpayaPengendalianPenyakit Menularadalah sebesar 59,0 persen, dan persentase Puskesmas tidak menerima secara lengkap sebesar 40,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima pengawasan, evalusi dan bimbingan secara lengkap Upaya PengendalianPenyakit Menular dari Dinas Kesehatan adalah Provinsi Jawa Tengah (77,8%) diikuti oleh Provinsi Banten (76,2%) dan Provinsi Jawa Barat (75,6%). Persentase Puskesmas terendah menerima pengawasan, evalusi dan bimbingan secara lengkap adalah Provinsi Maluku (19,9%) diikuti oleh Provinsi Papua(25,5%) dan Provinsi Maluku Utara (28,7%).Secara nasional persentasePuskesmas perkotaan menerima pengawasan, evalusi dan bimbingan secara lengkap lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 60,4 persen di perkotaan dan58,1 persen di perdesaan.

4.8.8. PROGRAM IMUNISASI

4.8.8.1. Program Imunisasi di Puskesmas

Pada Rifaskes 2011 Pelayanan Imunisasi yang dikumpulkan meliputi Pelayanan Imunisasi dalam gedung Puskesmas dan Pelayanan Imunisasi di luar gedung Puskesmas.Secara nasional, persentase Puskesmas melaksanakaan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas yang paling banyak adalah dengan frekuensi setiap hari (38,3%), diikuti frekuensi seminggu sekali (37,6%), dua hari dalam seminggu (11,9%), dan tiga hari dalam seminggu (5,0%). Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi setiap hari terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah (57,4%), diikuti oleh Provinsi Bengkulu (56,6%), dan Provinsi Sulawesi Utara (53,3%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih rendah melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi setiap hari dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan, yaitu 30,7 persen pada perkotaan dan 40,9 persen pada perdesaan.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung puskesmas dengan frekuensi 3 hari dalam satu minggu terdapat di Provinsi Sulawesi Barat (9,9%), diikuti oleh Provinsi Bali (8,8%), dan Provinsi Sulawesi Tenggara (8,6%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi 3 hari dalam satu

minggu dibandingan denganPuskesmas perdesaan yaitu 6,8 persen pada perkotaan dan 4,3 persen pada perdesaan.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi 2 hari dalam satu minggu terdapat di Provinsi Bali (33,3%), diikuti oleh Provinsi Banten (32,5%), dan Provinsi Jawa Barat (25,6%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung puskemas dengan frekuensi 2 hari dalam satu minggu dibandingan denganPuskesmas perdesaan, yaitu 18,2 persen pada perkotaan dan 9,7 persen pada perdesaan.Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi seminggu sekali terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (74,4%), diikuti oleh Provinsi Gorontalo (56,8%), dan Provinsi Lampung (55,1%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi seminggu sekali dibandingan denganPuskesmas perdesaan yaitu 39,5 persen pada perkotaan dan 37,0 persen pada perdesaan.

Secara nasional, sebesar 95,4 persenPuskesmas di Indonesia memberikan pelayanan imunisasi di luar gedung dan 4,0 persen tidak memberikan pelayanan imunisasi di luar gedung. Hanya satu provinsi yang semua Puskesmas melakukan pelayanan imunisasi di luar gedung Puskesmas yaitu Provinsi Bangka Belitung. Secara nasional, persentase Puskesmas tertinggi yang tidak melaksanakan pelayanan imunisasi luar gedung adalah Provinsi Papua(24,5%) diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta(23,1%) dan Provinsi Bali (23,1%) serta Provinsi Papua Barat(15,4%).Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan yang melaksanakan kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedungsama dengan Puskesmas perdesaan yaitu 95,3 persen.

Tabel 4.8.8.1
Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Pelayanan Imunisasi di Dalam dan Luar Gedung Pelayanan Imunisasi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Frekuensi pelayanan imunisasi dalam gedung puskesmas					Kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung puskesmas		
			% Setiap hari	% Tiga hr/mg	% Dua hr/mg	% Seminggu sekali	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi									
1	DI Aceh	311	41.5	4.2	21.5	29.9	2.9	97.1	2.9	0
2	Sumatera Utara	506	37.9	2.6	4.0	43.1	12.5	98.4	1.2	0.4
3	Sumatera Barat	248	43.5	4.0	11.3	33.5	7.7	97.6	1.6	0.8
4	Riau	195	47.2	2.6		39.0	11.3	97.9	1.0	1.0
5	Jambi	171	44.4	6.4	12.9	22.8	13.5	96.5	3.5	0
6	Sumatera Selatan	298	47.0	4.7	10.4	34.2	3.7	96.6	3.0	0.3
7	Bengkulu	173	56.6	5.2	5.2	16.8	16.2	98.8	0.6	0.6
8	Lampung	265	28.3	4.2	7.5	55.1	4.9	98.1	1.5	0.4
9	Bangka Belitung	57	47.4	3.5	3.5	35.1	10.5	100.0	0	0
10	Kepulauan Riau	65	52.3	3.1	6.2	27.7	10.8	92.3	6.2	1.5
11	DKI Jakarta	336	31.8	7.1	19.6	39.9	1.5	94.3	5.4	0.3
12	Jawa Barat	1031	25.6	6.1	25.6	41.5	1.2	97.9	1.6	0.6
13	Jawa Tengah	861	41.6	4.1	10.8	39.0	4.5	96.4	3.5	0.1
14	DI Yogyakarta	121	9.9	0.8	14.0	74.4	0.8	76.9	23.1	0
15	Jawa Timur	949	45.9	4.1	10.1	37.2	2.6	96.4	3.3	0.3
16	Banten	206	31.6	8.3	32.5	26.7	1.0	98.1	1.9	0
17	Bali	114	21.9	8.8	33.3	34.2	1.8	81.6	18.4	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	51.7	6.7	12.1	26.8	2.7	97.3	2.7	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	40.1	4.0	7.0	37.4	11.6	97.4	2.0	0.7
20	Kalimantan Barat	233	39.5	6.0	8.6	33.9	12.0	96.6	2.1	1.3
21	Kalimantan Tengah	176	57.4	2.8	5.1	27.8	6.8	95.5	3.4	1.1
22	Kalimantan Selatan	217	44.2	3.2	11.5	39.6	1.4	98.6	1.4	0
23	Kalimantan Timur	213	53.1	8.5	13.1	21.6	3.8	93.4	6.6	0
24	Sulawesi Utara	167	53.3	6.0	6.6	24.0	10.2	98.2	1.8	0
25	Sulawesi Tengah	163	45.4	4.9	4.3	34.4	11.0	99.4	0.6	0
26	Sulawesi Selatan	406	36.5	3.9	6.9	44.3	8.4	97.3	2.0	0.7
27	Sulawesi Tenggara	233	38.6	8.6	3.9	29.6	19.3	97.0	2.6	0.4
28	Gorontalo	74	27.0	5.4	2.7	56.8	8.1	98.6	1.4	0
29	Sulawesi Barat	81	43.2	9.9	3.7	32.1	11.1	92.6	3.7	3.7
30	Maluku	161	33.5	2.5	9.9	30.4	23.6	82.0	9.9	8.1
31	Maluku Utara	101	16.8	4.0	5.0	47.5	26.7	98.0	1.0	1.0
32	Papua Barat	104	16.3	2.9	3.8	49.0	27.9	83.7	15.4	1.0
33	Papua	294	18.4	7.8	6.5	49.3	18.0	72.8	24.5	2.7
	Lokasi									
1	Perkotaan	2321	30.7	6.8	18.2	39.5	4.9	95.3	4.3	0.4
2	Perdesaan	6660	40.9	4.3	9.7	37.0	8.1	95.4	3.9	0.7
	INDONESIA	**8981**	**38.3**	**5.0**	**11.9**	**37.6**	**7.3**	**95.4**	**4.0**	**0.6**

4.8.8.2. Pelatihan Program Imunisasi

Pelatihan dalam pelaksanaan pelayanan imunisasi yang telah dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Tatalaksana Imunisasi dan Pelatihan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi(KIPI) yang diikuti oleh petugas Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010.Dari kedua jenis pelatihan tersebut, Pelatihan Tatalaksana Imunisasi merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (45%) dan disusul oleh Pelatihan KIPI (24,5%).

Tabel 4.8.8.2
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Pelayanan Imunisasi tahun 2009-2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Tatalaksana Imunisasi			Pelatihan KIPI			Pelatihan Lengkap Pelayanan Imunisasi		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	64.3	35.7	0	42.8	57.2	0	39.5	60.5	0
2	Sumatera Utara	506	41.1	58.9	0	16.4	83.6	0	15.0	85.0	0
3	Sumatera Barat	248	37.9	62.1	0	21.4	78.6	0	20.6	79.4	0
4	Riau	195	40.5	58.5	1.0	30.3	68.2	1.5	27.7	71.3	1.0
5	Jambi	171	43.9	56.1	0	27.5	72.5	0	24.6	75.4	0
6	Sumatera Selatan	298	49.3	50.7	0	33.2	66.8	0	29.2	70.8	0
7	Bengkulu	173	19.1	80.9	0	6.4	93.6	0	5.8	94.2	0
8	Lampung	265	48.3	51.7	0	27.9	72.1	0	24.5	75.5	0
9	Bangka Belitung	57	28.1	71.9	0	12.3	87.7	0	10.5	89.5	0
10	Kepulauan Riau	65	35.4	64.6	0	24.6	75.4	0	18.5	81.5	0
11	DKI Jakarta	336	53.0	47.0	0	37.8	62.2	0	33.9	66.1	0
12	Jawa Barat	1031	55.8	44.0	0.2	31.1	68.7	0.2	29.1	70.7	0.2
13	Jawa Tengah	861	42.9	57.1	0	23.6	76.4	0	21.4	78.6	0
14	DI Yogyakarta	121	51.2	48.8	0	25.6	74.4	0	23.1	76.9	0
15	Jawa Timur	949	41.5	58.2	0.3	23.7	75.6	0.7	21.4	78.0	0.6
16	Banten	206	66.5	33.5	0	38.8	61.2	0	35.9	64.1	0
17	Bali	114	15.8	84.2	0	14.0	86.0	0	12.3	87.7	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	38.9	61.1	0	17.4	81.2	1.3	16.8	83.2	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	51.0	48.7	0.3	26.8	72.2	1.0	23.5	75.5	1.0
20	Kalimantan Barat	233	55.8	43.3	0.9	27.0	72.1	0.9	23.6	75.5	0.9
21	Kalimantan Tengah	176	38.6	61.4	0	18.8	81.3	0	18.2	81.8	0
22	Kalimantan Selatan	217	27.6	72.4	0	19.4	80.6	0	14.3	85.7	0
23	Kalimantan Timur	213	42.7	57.3	0	21.6	78.4	0	18.8	81.2	0
24	Sulawesi Utara	167	25.7	74.3	0	16.2	83.8	0	12.6	87.4	0
25	Sulawesi Tengah	163	36.2	63.8	0	19.0	81.0	0	17.8	82.2	0
26	Sulawesi Selatan	406	54.9	44.8	0.2	27.1	72.7	0.2	24.1	75.6	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	32.6	67.4	0	9.9	89.7	0.4	9.9	89.7	0.4
28	Gorontalo	74	59.5	40.5	0	29.7	70.3	0	28.4	71.6	0
29	Sulawesi Barat	81	79.0	18.5	2.5	37.0	60.5	2.5	37.0	60.5	2.5
30	Maluku	161	21.7	72.0	6.2	9.9	83.2	6.8	9.3	84.5	6.2
31	Maluku Utara	101	59.4	40.6	0	27.7	72.3	0	26.7	73.3	0
32	Papua Barat	104	46.2	53.8	0	7.7	92.3	0	7.7	92.3	0
33	Papua	294	31.3	68.0	0.7	9.5	89.8	0.7	9.2	90.1	0.7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	45.4	54.5	0.1	27.6	72.3	0.2	24.9	75.0	0.2
2	Perdesaan	6660	44.8	54.8	0.3	23.4	76.1	0.5	21.3	78.3	0.4
	INDONESIA	**8981**	**45.0**	**54.7**	**0.3**	**24.5**	**75.1**	**0.4**	**22.2**	**77.4**	**0.3**

Secara nasional, sebesar 45,0 persen Puskesmas di Indonesia mengikutiPelatihan Tatalaksana Imunisasi, sedangkan 54,7 persenPuskesmas tidak mengikuti pelatihan.Persentase Puskesmas tertinggi mengikutiPelatihan Tatalaksana Imunisasiadalah Provinsi Sulawesi Barat(79%), diikuti oleh Provinsi Banten (66,5%), dan Provinsi DI Aceh (64,3%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti Pelatihan Tatalaksana Imunisasiadalah Provinsi Bali (15,8%), diikuti oleh Provinsi Bengkulu (19,1%) dan Provinsi Maluku (21,7%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi dalam mengikutiPelatihan Tatalaksana Imunisasidibandingan pada Puskesmas perdesaan, yaitu 45,4 persen pada perkotaan dan 44,8 persen pada perdesaan.

Secara nasional, sebesar 24,5 persenPuskesmas di Indonesia mengikuti Pelatihan KIPI, sedangkan 75,1 persenPuskesmas tidak mengikuti. Persentase Puskesmas tertinggi

mengikutiPelatihan KIPIterdapat di Provinsi DI Aceh (42,8%), diikuti oleh Provinsi Banten (38,8%), dan Provinsi DKI Jakarta (37,8%). Persentase Puskesmas terendah mengikutiPelatihan KIPIadalah Provinsi Bengkulu (6,4%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (7,7%) dan Provinsi Papua (9,5%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi mengikuti pelatihan KIPI dibandingkan padaPuskesmas perdesaan yaitu 27,6 persen pada perkotaan dan 23,4 persen pada perdesaan.

Secara nasional, sebesar 22,2 persenPuskesmas di Indonesia mengikutikedua jenis pelatihan lengkap pelayanan imunisasi, sedangkan 77,4 persenPuskesmas tidak mengikuti. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan lengkap terdapat di Provinsi DI Aceh (39,5%), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (37%), dan Provinsi Banten (35,9%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pelatihan lengkap adalah Provinsi Bengkulu (5,8%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (7,7%) dan Provinsi Papua (9,2%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan mengikuti pelatihan lengkaplebih tinggi dibandingan dengana Puskesmas perdesaan, yaitu 24,9 persen pada perkotaan dan 21,3 persen pada perdesaan.

4.8.8.3. Pedoman Program Imunisasi

Pedoman pelayanan imunisasi diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam pelayanan imunisasi buku pedoman yang telah dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi,Pedoman Penanganan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Imunisasi.

Secara nasional pedoman pelayanan imunisasi terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalah Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia (71,3%), Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi (67,4%), Pedoman Penanganan KIPI (55,6%), SOP Pelayanan Imunisasi (49,9%) dan Lengkap (mempunyai keempat jenis) Pedoman Pelayanan Imunisasi (39,4%). Secara nasional, sebesar 71,3 persenPuskesmas di Indonesia memilikiPedoman Pelaksanaan Program Imunisasi, sedangkan 28,4 persen tidak memiliki pedoman tersebut. Persentase tertinggi Puskesmas yang memilikiPedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia adalah Provinsi DI Yogyakarta (91,7%) diikuti oleh Provinsi Bangka Belitung (89,5%) dan Provinsi Kalimantan Timur (85,9%). Persentase terendah Puskesmas yang memilikiPedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia adalah Provinsi Papua (39,5%) diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (43,7%) dan Provinsi Maluku (45,3%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia di perdesaan lebih tinggi dibandingan denganPuskesmas perkotaan yaitu 70,2 persen di Puskesmas perdesaan dan 74,6 persen di Puskesmas perkotaan.

Secara nasional, sebesar 67,4 persenPuskesmas di Indonesia memiliki Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, sedangkan 32,2 persen tidak memiliki pedoman tersebut. Persentase tertinggi Puskesmas yang memilikiPedoman Penyelenggaraan Imunisasi adalah Provinsi DI Yogyakarta (88,4%) dan diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (81,8%) dan Provinsi Kalimantan Timur (80,8%). Persentase terendah Puskesmas yang memilikiPedoman Penyelenggaraan Imunisasi adalah Provinsi Papua (38,1%) diikuti oleh Provinsi Maluku (38,5%) dan Provinsi Sulawesi Barat (40,7%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi di perkotaan lebih tinggi dibandingan dengan

Puskesmas perdesaan yaitu 70,6 persen di Puskesmas perkotaan dan 66,3 persen di Puskesmas perdesaan.

Tabel 4.8.8.3.a
Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Imunisasi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia			Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi			Pedoman Penanganan KIPI		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	70.1	29.9	0	69.8	30.2	0	50.8	49.2	0
2	Sumatera Utara	506	67.0	33.0	0	58.7	41.3	0	45.8	54.0	0.2
3	Sumatera Barat	248	70.6	29.0	0.4	71.8	27.8	0.4	58.5	41.1	0.4
4	Riau	195	64.6	34.9	0.5	61.5	37.4	1.0	56.9	42.6	0.5
5	Jambi	171	64.3	35.7	0	57.9	42.1	0	49.1	50.9	0
6	Sumatera Selatan	298	72.8	27.2	0	69.8	30.2	0	61.7	38.3	0
7	Bengkulu	173	59.0	41.0	0	49.7	50.3	0	45.1	54.9	0
8	Lampung	265	69.1	30.9	0	67.2	32.8	0	55.1	44.9	0
9	Bangka Belitung	57	89.5	10.5	0	73.7	26.3	0	61.4	38.6	0
10	Kepulauan Riau	65	61.5	38.5	0	56.9	43.1	0	55.4	44.6	0
11	DKI Jakarta	336	75.9	24.1	0	65.2	34.8	0	49.7	50.0	0.3
12	Jawa Barat	1031	81.2	18.6	0.2	76.5	23.3	0.2	65.4	34.4	0.2
13	Jawa Tengah	861	83.3	16.7	0	81.8	18.1	0.1	72.8	26.9	0.2
14	DI Yogyakarta	121	91.7	8.3	0	88.4	11.6	0	76.9	23.1	0
15	Jawa Timur	949	81.6	18.1	0.3	78.3	21.1	0.6	63.0	36.2	0.7
16	Banten	206	75.7	24.3	0	77.2	22.8	0	63.1	36.9	0
17	Bali	114	60.5	39.5	0	76.3	23.7	0	75.4	24.6	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	76.5	22.8	0.7	69.8	30.2	0	53.7	45.6	0.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	61.9	37.4	0.7	56.0	43.4	0.7	44.0	55.3	0.7
20	Kalimantan Barat	233	78.1	21.0	0.9	71.7	27.5	0.9	63.5	35.2	1.3
21	Kalimantan Tengah	176	58.5	41.5	0	57.4	42.6	0	55.1	44.9	0
22	Kalimantan Selatan	217	65.9	34.1	0	63.6	36.4	0	47.5	52.5	0
23	Kalimantan Timur	213	85.9	14.1	0	80.8	19.2	0	69.0	31.0	0
24	Sulawesi Utara	167	43.7	56.3	0	40.7	59.3	0	29.9	70.1	0
25	Sulawesi Tengah	163	61.3	38.7	0	58.3	41.7	0	44.2	55.8	0
26	Sulawesi Selatan	406	66.0	33.7	0.2	61.1	38.7	0.2	48.3	51.5	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	59.7	40.3	0	53.2	46.8	0	36.1	63.9	0
28	Gorontalo	74	70.3	29.7	0	68.9	31.1	0	55.4	44.6	0
29	Sulawesi Barat	81	70.4	27.2	2.5	72.8	24.7	2.5	61.7	35.8	2.5
30	Maluku	161	45.3	47.8	6.8	38.5	55.3	6.2	29.2	64.6	6.2
31	Maluku Utara	101	75.2	24.8	0	63.4	36.6	0	51.5	48.5	0
32	Papua Barat	104	54.8	44.2	1.0	48.1	51.0	1.0	30.8	68.3	1.0
33	Papua	294	39.5	59.9	0.7	38.1	61.2	0.7	26.5	72.8	0.7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	74.6	25.2	0.2	70.6	29.2	0.2	58.5	41.3	0.2
2	Perdesaan	6660	70.2	29.5	0.4	66.3	33.3	0.4	54.6	44.9	0.5
	INDONESIA	**8981**	**71.3**	**28.4**	**0.3**	**67.4**	**32.2**	**0.4**	**55.6**	**44.0**	**0.4**

Tabel 4.8.8.3.b
Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Imunisasi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	SOP Pelayanan Imunisasi			Lengkap Pedoman Pelayanan Imunisasi		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	50.5	49.5	0	33.8	66.2	0
2	Sumatera Utara	506	37.0	62.5	0.6	31.8	67.6	0.6
3	Sumatera Barat	248	46.4	53.2	0.4	37.1	62.5	0.4
4	Riau	195	50.3	47.7	2.1	41.5	56.9	1.5
5	Jambi	171	41.5	58.5	0	34.5	65.5	0
6	Sumatera Selatan	298	53.7	46.3	0	43.6	56.4	0
7	Bengkulu	173	37.0	63.0	0	28.9	71.1	0
8	Lampung	265	51.7	47.9	0.4	35.5	64.2	0.4
9	Bangka Belitung	57	57.9	42.1	0	47.4	52.6	0
10	Kepulauan Riau	65	38.5	61.5	0	35.4	64.6	0
11	DKI Jakarta	336	51.8	47.6	0.6	36.9	62.8	0.3
12	Jawa Barat	1031	59.4	40.3	0.3	50.0	49.8	0.3
13	Jawa Tengah	861	71.5	28.2	0.2	54.9	44.8	0.2
14	DI Yogyakarta	121	86.8	12.4	0.8	68.6	30.6	0.8
15	Jawa Timur	949	57.0	42.4	0.6	45.0	54.3	0.7
16	Banten	206	56.3	43.7	0	46.1	53.9	0
17	Bali	114	64.9	34.2	0.9	40.4	59.6	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	53.7	45.6	0.7	43.0	55.7	1.3
19	Nusa Tenggara Timur	302	35.1	64.2	0.7	28.1	71.2	0.7
20	Kalimantan Barat	233	53.6	45.5	0.9	39.9	59.2	0.9
21	Kalimantan Tengah	176	36.4	62.5	1.1	30.1	68.8	1.1
22	Kalimantan Selatan	217	42.4	57.6	0	32.7	67.3	0
23	Kalimantan Timur	213	56.3	43.7	0	47.9	52.1	0
24	Sulawesi Utara	167	25.1	74.9	0	17.4	82.6	0
25	Sulawesi Tengah	163	33.1	66.9	0	28.8	71.2	0
26	Sulawesi Selatan	406	42.9	56.7	0.5	34.7	64.8	0.5
27	Sulawesi Tenggara	233	38.6	61.4	0	28.8	71.2	0
28	Gorontalo	74	48.6	51.4	0	36.5	63.5	0
29	Sulawesi Barat	81	45.7	51.9	2.5	40.7	56.8	2.5
30	Maluku	161	18.0	75.8	6.2	16.8	77.0	6.2
31	Maluku Utara	101	32.7	67.3	0	29.7	70.3	0
32	Papua Barat	104	33.7	65.4	1.0	26.9	72.1	1.0
33	Papua	294	26.9	72.4	0.7	20.7	78.6	0.7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	55.8	43.6	0.6	43.0	56.4	0.5
2	Perdesaan	6660	47.8	51.7	0.5	38.2	61.3	0.5
	INDONESIA	**8981**	**49.9**	**49.6**	**0.5**	**39.4**	**60.0**	**0.5**

Secara nasional, sebesar 55,6 persenPuskesmas memilikiPedoman Penanganan KIPI, sedangkan 44,0 persen tidak memiliki pedoman tersebut. Persentase tertinggi Puskesmas yang memilikiPedoman Penanganan KIPI adalah Provinsi DI Yogyakarta (76,9%) diikuti oleh Provinsi Bali (75,4%) dan Provinsi Jawa Tengah (72,8%). Persentase terendah Puskesmas yang memilikiPedoman Penanganan KIPI adalah Provinsi Papua (26,5%) diikuti oleh Provinsi Maluku (29,2%) dan Provinsi Sulawesi Utara (29,9%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Pedoman Penanganan KIPI di perkotaan lebih tinggi dibandingan denganPuskesmas perdesaan yaitu 58,5 persen di Puskesmas perkotaan dan 54,6 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, sebesar 49,9 persenPuskesmas di Indonesia memiliki SOP Pelayanan Imunisasi, sedangkan 49,6 persen tidak memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki SOP Pelayanan Imunisasi adalah Provinsi DI Yogyakarta (86,8%) diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (71,5%) dan Provinsi Bali (64,9%). Persentase terendah Puskesmas memiliki SOP Pelayanan Imunisasi adalah Provinsi Maluku (18%) diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (25,1%) dan Provinsi Papua (26,9%). Secara nasional persentase Puskesmas menurut SOP Pelayanan Imunisasi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan denganPuskesmas perdesaan yaitu 55,8 persen di Puskesmas perkotaan dan 47,8 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, sebesar 39,4 persenPuskesmas di Indonesia memiliki lengkap keempat jenis pedoman untuk pelayanan imunisasi, sedangkan 60,0 persen tidak lengkap memiliki. Persentase tertinggi Puskesmas yang memilikiLengkap Pedoman Pelayanan Imunisasi(memiliki 4 jenis Pedoman tersebut diatas)adalah Provinsi DI Yogyakarta (68,6%) diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah(54,9%) dan Provinsi Jawa Barat (50%). Persentase terendah Puskesmas yang memilikiPedoman Lengkap Pelayanan Imunisasi adalah Provinsi Maluku (16,8%) diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara (17,4%) dan Provinsi Papua (20,7%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Pedoman Lengkap Pelayanan Imunisasi di perkotaan lebih tinggi dibandingan denganPuskesmas perdesaan yaitu 43,0 persen di Puskesmas perkotaan dan 38,2 persen di Puskesmas perdesaan.

4.8.8.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan diperlukan dalam pelayanan imunisasi untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan pelayanan imunisasi. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa kunjungan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk supervisi, umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan Kab/Kota, maupunikutserta pada pertemuan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Tabel 4.8.8.4
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Supervisi dinas kesehatan			Umpan balik			Pertemuan monitoring dan evaluasi			Pengawasan, **evaluasi** dan bimbingan Lengkap		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi													
1	DI Aceh	311	85.9	14.1	0	81.7	18.3	0	87.8	12.2	0	70.1	29.9	0
2	Sumatera Utara	506	67.6	32.4	0	58.3	41.7	0	67.8	32.2	0	47.4	52.6	0
3	Sumatera Barat	248	81.0	19.0	0	70.2	29.8	0	81.9	17.7	0.4	57.3	42.3	0.4
4	Riau	195	79.5	20.0	0.5	85.1	14.4	0.5	74.4	25.1	0.5	61.5	37.9	0.5
5	Jambi	171	84.2	15.8	0	80.7	19.3	0	84.8	15.2	0	65.5	34.5	0
6	Sumatera Selatan	298	78.2	21.8	0	74.8	25.2	0	81.2	18.8	0	59.7	40.3	0
7	Bengkulu	173	62.4	37.6	0	54.3	45.7	0	53.8	46.2	0	32.9	67.1	0
8	Lampung	265	79.6	20.4	0	76.6	23.4	0	81.5	18.5	0	62.3	37.7	0
9	Bangka Belitung	57	84.2	15.8	0	84.2	15.8	0	80.7	19.3	0	77.2	22.8	0
10	Kepulauan Riau	65	87.7	12.3	0	95.4	4.6	0	80.0	20.0	0	70.8	29.2	0
11	DKI Jakarta	336	68.5	31.5	0	59.2	40.8	0	73.2	26.8	0	51.8	48.2	0
12	Jawa Barat	1031	89.4	10.4	0.2	88.8	11.0	0.2	91.5	8.3	0.2	79.1	20.7	0.2
13	Jawa Tengah	861	92.5	7.5	0	86.4	13.6	0	93.7	6.3	0	81.8	18.2	0
14	DI Yogyakarta	121	97.5	2.5	0	96.7	3.3	0	100.0	0	0	95.0	5.0	0
15	Jawa Timur	949	90.9	8.9	0.2	81.9	17.8	0.3	92.0	7.8	0.2	74.8	24.9	0.3
16	Banten	206	96.1	3.9	0	82.0	17.5	0.5	89.3	10.7	0	74.3	25.2	0.5
17	Bali	114	78.1	21.9	0	78.9	20.2	0.9	86.0	14.0	0	67.5	31.6	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	89.3	10.7	0	87.2	12.8	0	83.9	16.1	0	75.8	24.2	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	70.2	29.1	0.7	51.7	47.7	0.7	65.9	33.4	0.7	34.4	64.9	0.7
20	Kalimantan Barat	233	78.5	20.6	0.9	88.8	10.3	0.9	77.3	21.9	0.9	64.4	34.8	0.9
21	Kalimantan Tengah	176	53.4	46.6	0	69.9	30.1	0	55.1	44.9	0	32.4	67.6	0
22	Kalimantan Selatan	217	77.4	22.6	0	71.9	28.1	0	80.2	19.8	0	58.1	41.9	0
23	Kalimantan Timur	213	69.5	30.5	0	64.3	35.2	0.5	67.6	31.9	0.5	45.5	54.5	0
24	Sulawesi Utara	167	80.8	19.2	0	64.1	35.9	0	63.5	36.5	0	46.7	53.3	0
25	Sulawesi Tengah	163	50.3	49.7	0	55.8	44.2	0	55.2	44.8	0	38.0	62.0	0
26	Sulawesi Selatan	406	77.1	22.7	0.2	63.5	36.2	0.2	76.4	23.4	0.2	52.7	47.0	0.2
27	Sulawesi Tenggara	233	70.4	29.6	0	66.1	33.9	0	58.8	41.2	0	37.3	62.7	0
28	Gorontalo	74	86.5	13.5	0	71.6	28.4	0	81.1	18.9	0	60.8	39.2	0
29	Sulawesi Barat	81	77.8	19.8	2.5	72.8	24.7	2.5	77.8	19.8	2.5	58.0	39.5	2.5
30	Maluku	161	28.6	65.2	6.2	21.7	72.0	6.2	21.1	72.7	6.2	8.1	85.7	6.2
31	Maluku Utara	101	54.5	45.5	0	46.5	53.5	0	43.6	56.4	0	27.7	72.3	0
32	Papua Barat	104	45.2	54.8	0	41.3	58.7	0	44.2	55.8	0	24.0	76.0	0
33	Papua	294	34.7	64.6	0.7	33.0	66.3	0.7	33.3	66.0	0.7	21.8	77.6	0.7
	Lokasi													
1	Perkotaan	2321	77.9	22.0	0.1	73.5	26.4	0.2	78.7	21.1	0.2	62.8	37.1	0.1
2	Perdesaan	6660	77.8	21.8	0.3	72.3	27.3	0.4	76.7	22.9	0.3	58.9	40.7	0.4
	INDONESIA	**8981**	**77.8**	**21.9**	**0.3**	**72.6**	**27.1**	**0.3**	**77.2**	**22.5**	**0.3**	**59.9**	**39.8**	**0.3**

Secara nasional bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam pelayanan imunisasi adalah dalam bentuk kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk supervisi (77,8%), umpan balik dari Dinas Kesehatan Kab/Kota (72,6%) kemudian pertemuan monitoring dan evaluasi program (77,2%) dan lengkap (menerima ketiga bentuk)pengawasan, evaluasi dan bimbinganpelayanan imunisasi(59,9%).Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan pelayanan imunisasi dalam bentuk kunjungan supervisi oleh DinasKesehatanadalah sebesar 77,8 persen, sedangkan 21,9 persen tidak menerima. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk supervisi adalah Provinsi DI Yogyakarta (97,5%) diikuti oleh Provinsi Banten (96,1%) dan Provinsi Jawa Tengah (92,5%). Persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk supervisi adalah Provinsi Maluku (28,6%) diikuti oleh Provinsi Papua (34,7%) dan Provinsi Papua Barat (45,2%). Secara nasional persentasePuskesmas perkotaan menerima kunjungan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk supervisi sama denganPuskesmas perdesaan yaitu 77,9 persen di perkotaan dan 77,8 persen di perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, evaluasi dan bimbingan pelayanan imunisasi dalam bentuk umpan balik dari Dinas Kesehatan adalah sebesar 72,6 persen, sedangkan 21,9 persen tidak menerima.Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah Provinsi DI Yogyakarta (96,7%), Provinsi Kepulauan Riau(95,4%) dan Provinsi Jawa Barat (88,8%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah Provinsi Maluku (21,7%) diikuti oleh Provinsi Papua (33,0%) dan Provinsi Papua Barat (41,3%). Secara nasional persentasePuskesmas perkotaan menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kab/Kota pada Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan, yaitu 73,5 persen di perkotaan dibandingkan dengan 72,3 persen di perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan pelayanan imunisasi dalam bentuk keikutsertaan pada pertemuan monitoring dan evaluasi di Dinas Kesehatan adalah sebesar 77,2 persen, sedangkan 22,5 persen tidak ikut. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program adalah Provinsi DI Yogyakarta (100,0%) diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (93,7%) dan Provinsi Jawa Timur (92,0%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program adalah Provinsi Maluku (21,1%) diikuti oleh Provinsi Papua (33,3%) dan Provinsi Maluku Utara (43,6%). Secara nasional persentasePuskesmas perkotaan mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program Puskesmas perkotaan lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 78,7 persen di perkotaan dan 76,7 persen di perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima secara lengkap(menerima ketiga bentuk)pengawasan, evaluasi dan bimbingan pelayanan imunisasi adalah sebesar 59,9 persen, sedangkan 39,8 persen tidak menerima lengkap. Persentase Puskesmas tertinggi menerima lengkap pengawasan, evaluasi dan bimbingan pelayanan imunisasi adalah Provinsi DI Yogyakarta (95%) diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah(81,8%)dan Provinsi Jawa Barat(79,1%). Persentase Puskesmas terendah menerimalengkappengawasan, evalusi dan bimbingan pelayanan imunisasi adalah Provinsi Maluku (8,1%) diikuti oleh Provinsi Papua (21,8%) dan Provinsi Papua Barat (24%).Secara nasional persentasePuskesmas perkotaan menerima

lengkap pengawasan, evalusi dan bimbingan pelayanan imunisasi lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 62,8 persen di perkotaan dan 58,9 persen di perdesaan.

4.8.9 PELAYANAN PENGOBATAN

4.8.9.1 Kegiatan Pelayanan Pengobatan

Kegiatan Program Pengobatan yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Pelayanan Pengobatan dan Surveilans Penyakit Tidak Menular. Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Pengobatanadalah sebesar 99,2 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 0,5 persen. Terdapat sembilan provinsi yang seluruh puskesmasnya melaksanakan kegiatan Pelayanan Pengobatan yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Gorontalo, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pelayanan Pengobatan ditemukan pada Provinsi Papua Barat (92,3%), diikuti oleh Provinsi Maluku (95,7%) dan Provinsi Papua (92,3%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan hampir sama dengan Puskesmas perdesaan dalam kegiatan Pelayanan Pengobatan, yaitu 99,1 persen pada perkotaan dan 99,2 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas melakukan kegiatan Surveilans Penyakit Tidak Menular adalah sebesar61,3 persen, sedangkan persentase Puskesmas tidak melakukan sebesar 37,6 persen. Persentase puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Surveilans Penyakit Tidak Menular terdapat di Provinsi Bali (98,2%), diikuti oleh Provinsi Bangka Beitung (93,0%), dan Provinsi Jawa Tengah (91,5%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Surveilans Penyakit Tidak Menular adalah Provinsi Maluku (29,2%), diikuti oleh Provinsi Papua (29,9%) dan Provinsi Papua Barat (33,7%).Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi melakukan Surveilans Penyakit Tidak Menular dibandingkan pada Puskesmas perdesaan yaitu 69,2 persen pada perkotaan dan 58,5 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.9.1
Persentase Puskesmas menurut KegiatanPelayanan Pengobatan dan Surveilans Penyakit Tidak Menular, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelayanan pengobatan			Surveilans penyakit tidak menular		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	99,0	0,3	0,6	45,3	52,1	2,6
2	Sumatera Utara	506	99,6	0,2	0,2	57,1	42,3	0,6
3	Sumatera Barat	248	100,0	0,0	0,0	69,8	29,8	0,4
4	Riau	195	99,5	0,0	0,5	62,1	37,4	0,5
5	Jambi	171	100,0	0,0	0,0	62,0	37,4	0,6
6	Sumatera Selatan	298	99,0	0,3	0,7	67,8	31,2	1,0
7	Bengkulu	173	99,4	0,0	0,6	47,4	51,4	1,2
8	Lampung	265	100,0	0,0	0,0	54,7	44,9	0,4
9	Bangka Belitung	57	100,0	0,0	0,0	70,2	28,1	1,8
10	Kepulauan Riau	65	98,5	1,5	0,0	60,0	40,0	0,0
11	DKI Jakarta	336	98,5	1,2	0,3	81,5	16,7	1,8
12	Jawa Barat	1031	99,6	0,2	0,2	69,2	30,4	0,5
13	Jawa Tengah	861	99,5	0,2	0,2	77,9	21,1	0,9
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0,0	0,0	73,6	26,4	0,0
15	Jawa Timur	949	99,5	0,2	0,3	64,8	34,5	0,7
16	Banten	206	100,0	0,0	0,0	65,0	34,5	0,5
17	Bali	114	100,0	0,0	0,0	49,1	50,9	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	100,0	0,0	0,0	65,1	30,9	4,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	99,3	0,0	0,7	40,4	57,0	2,6
20	Kalimantan Barat	233	99,1	0,9	0,0	58,4	41,2	0,4
21	Kalimantan Tengah	176	98,9	0,6	0,6	38,6	60,2	1,1
22	Kalimantan Selatan	217	99,5	0,0	0,5	65,9	33,2	0,9
23	Kalimantan Timur	213	98,6	1,4	0,0	53,1	46,9	0,0
24	Sulawesi Utara	167	99,4	0,0	0,6	49,1	49,7	1,2
25	Sulawesi Tengah	163	100,0	0,0	0,0	48,5	50,9	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	99,0	0,7	0,2	82,5	16,5	1,0
27	Sulawesi Tenggara	233	99,6	0,4	0,0	51,9	47,6	0,4
28	Gorontalo	74	98,6	1,4	0,0	54,1	44,6	1,4
29	Sulawesi Barat	81	97,5	0,0	2,5	64,2	33,3	2,5
30	Maluku	161	95,7	3,1	1,2	35,4	62,1	2,5
31	Maluku Utara	101	97,0	1,0	2,0	59,4	35,6	5,0
32	Papua Barat	104	92,3	5,8	1,9	30,8	66,3	2,9
33	Papua	294	96,6	3,1	0,3	26,5	71,8	1,7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	99,1	0,6	0,3	69,2	29,6	1,2
2	Perdesaan	6660	99,2	0,5	0,4	58,5	40,4	1,0
	INDONESIA	**8981**	**99,2**	**0,5**	**0,3**	**61,3**	**37,6**	**1,1**

4.8.9.2. Pelatihan Pelayanan Pengobatan

Jenis pelatihan program Pengobatan di Puskesmas yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pelatihan Penggunaan Obat Rasional,Pelatihan Gawat Darurat dan Pelatihan Saintifikasi Jamuyang diikuti oleh Petugas Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Hasilnya seperti terlihat pada tabel 4.8.9.2

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pelatihan Penggunaan Obat Rasional adalah sebesar 25,1 persen dan persentase Puskesmas tidak menerima pelatihan sebesar 74,6 persen. Persentase puskesmas tertinggi menerima pelatihan Penggunaan Obat Rasional terdapat di Provinsi Banten (47,6%), diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (42,9%), dan Provinsi Kalimantan Selatan (42,9%). Persentase Puskesmas terendah menerima Pelatihan Penggunaan Obat Rasional adalah Provinsi Papua Barat (6,7%), diikuti oleh Provinsi Maluku (8,1%) dan Provinsi Bali (9,6%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi menerima Pelatihan Penggunaan Obat Rasional dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 30,9 persen pada perkotaan dan 23,0 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pelatihan Gawat Darurat adalah sebesar 28,8 persen dan persentase Puskesmas tidak menerima pelatihan sebesar 70,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan Pelatihan Gawat Darurat adalah Provinsi DI Yogyakarta (48,8%), diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau (44,6%), dan Provinsi Kalimantan Timur (42,7%). Persentase Puskesmas terendah menerima Pelatihan Gawat Darurat ditemukan pada Provinsi Bengkulu (4,6%), diikuti oleh ProvinsiPapua Barat (4,8%) dan Provinsi Papua (10,5%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi menerima Pelatihan Gawat Darurat dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 32,3 persen pada perkotaan dan 27,6 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pelatihan Saintifikasi Jamu adalah sebesar 4,4 persen dan persentase puskesmas tidak menerima pelatihan sebesar 95,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima pelatihan Saintifikasi Jamu terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (18,2%), diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (8,0%), dan Provinsi Jawa Barat (7,6%). Persentase Puskesmas terendah menerima Pelatihan Saintifikasi Jamu ditemukan pada Provinsi Bengkulu (4,6%), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (4,8%) dan Provinsi Papua (10,5%). Secara nasional, persentase Puskesmas perkotaan lebih tinggi menerima Pelatihan Saintifikasi Jamu dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 5,9 persen pada perkotaan dan 3,9 persen pada perdesaan.

Tabel 4.8.9.2
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Program Pengobatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Penggunaan Obat Rasional			Pelatihan Gawat Darurat			Pelatihan Saintifikasi Jamu		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	15,8	83,9	0,3	25,1	74,6	0,3	2,9	96,8	0,3
2	Sumatera Utara	506	14,4	85,4	0,2	18,8	81,0	0,2	2,8	97,0	0,2
3	Sumatera Barat	248	32,3	67,7	0,0	26,6	73,4	0,0	2,8	97,2	0,0
4	Riau	195	29,7	70,3	0,0	25,6	74,4	0,0	5,1	94,9	0,0
5	Jambi	171	35,7	63,2	1,2	15,8	83,0	1,2	4,1	94,7	1,2
6	Sumatera Selatan	298	22,1	77,2	0,7	28,9	70,5	0,7	4,0	95,0	1,0
7	Bengkulu	173	12,1	87,9	0,0	4,6	95,4	0,0	0,0	100,0	0,0
8	Lampung	265	17,7	82,3	0,0	20,0	80,0	0,0	5,7	94,3	0,0
9	Bangka Belitung	57	40,4	59,6	0,0	22,8	77,2	0,0	5,3	94,7	0,0
10	Kepulauan Riau	65	27,7	72,3	0,0	44,6	55,4	0,0	0,0	100,0	0,0
11	DKI Jakarta	336	21,4	77,7	0,9	24,4	74,7	0,9	6,0	93,2	0,9
12	Jawa Barat	1031	42,9	56,9	0,2	39,8	60,0	0,2	7,6	92,2	0,2
13	Jawa Tengah	861	25,3	74,6	0,1	41,5	58,4	0,1	8,0	91,8	0,2
14	DI Yogyakarta	121	42,1	57,9	0,0	48,8	51,2	0,0	18,2	81,8	0,0
15	Jawa Timur	949	21,3	78,5	0,2	39,6	60,2	0,2	3,9	95,5	0,6
16	Banten	206	47,6	52,4	0,0	35,9	64,1	0,0	7,3	92,7	0,0
17	Bali	114	9,6	90,4	0,0	12,3	87,7	0,0	4,4	95,6	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	37,6	61,7	0,7	32,9	66,4	0,7	4,7	94,6	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	16,9	82,5	0,7	20,2	79,1	0,7	0,7	98,7	0,7
20	Kalimantan Barat	233	29,2	70,8	0,0	35,6	64,4	0,0	3,9	96,1	0,0
21	Kalimantan Tengah	176	38,6	61,4	0,0	26,7	73,3	0,0	4,0	96,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	42,9	56,7	0,5	28,1	71,4	0,5	6,0	93,5	0,5
23	Kalimantan Timur	213	24,4	75,6	0,0	42,7	56,8	0,5	3,3	96,2	0,5
24	Sulawesi Utara	167	11,4	88,0	0,6	16,2	83,2	0,6	0,6	98,8	0,6
25	Sulawesi Tengah	163	19,0	81,0	0,0	21,5	78,5	0,0	2,5	97,5	0,0
26	Sulawesi Selatan	406	20,9	78,8	0,2	29,6	70,2	0,2	4,2	95,6	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	12,4	87,6	0,0	13,7	85,8	0,4	1,3	98,3	0,4
28	Gorontalo	74	33,8	66,2	0,0	14,9	85,1	0,0	0,0	100,0	0,0
29	Sulawesi Barat	81	28,4	69,1	2,5	33,3	64,2	2,5	1,2	96,3	2,5
30	Maluku	161	8,1	90,1	1,9	11,2	87,0	1,9	0,0	98,1	1,9
31	Maluku Utara	101	9,9	90,1	0,0	13,9	85,1	1,0	1,0	98,0	1,0
32	Papua Barat	104	6,7	91,3	1,9	4,8	93,3	1,9	0,0	98,1	1,9
33	Papua	294	10,9	88,8	0,3	10,5	89,1	0,3	1,0	98,6	0,3
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	30,9	68,7	0,4	32,3	67,3	0,4	5,9	93,6	0,5
2	Perdesaan	6660	23,0	76,7	0,3	27,6	72,1	0,3	3,9	95,7	0,4
	INDONESIA	**8981**	**25,1**	**74,6**	**0,3**	**28,8**	**70,8**	**0,3**	**4,4**	**95,2**	**0,4**

4.8.9.3. Pedoman Pelayanan Pengobatan

Jenis pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 adalah Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas dan Pedoman Kegawatdaruratan. Hasilnya seperti terlihat pada Tabel 4.8.9.3.

Tabel 4.8.9.3
Persentase Puskesmas menurut Pedoman Program Pengobatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pengobatan Dasar di Puskesmas			Kegawatdaruratan		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	19,3	79,7	1,0	14,1	84,9	1,0
2	Sumatera Utara	506	23,7	76,1	0,2	11,3	88,5	0,2
3	Sumatera Barat	248	44,0	56,0	0,0	15,7	84,3	0,0
4	Riau	195	46,7	53,3	0,0	21,0	79,0	0,0
5	Jambi	171	32,7	65,5	1,8	15,2	83,6	1,2
6	Sumatera Selatan	298	39,3	59,7	1,0	23,2	75,8	1,0
7	Bengkulu	173	18,5	80,9	0,6	2,9	96,5	0,6
8	Lampung	265	48,3	51,7	0,0	18,1	81,5	0,4
9	Bangka Belitung	57	43,9	54,4	1,8	17,5	80,7	1,8
10	Kepulauan Riau	65	29,2	70,8	0,0	20,0	80,0	0,0
11	DKI Jakarta	336	47,0	51,5	1,5	20,2	78,3	1,5
12	Jawa Barat	1031	56,7	42,8	0,5	30,0	69,4	0,6
13	Jawa Tengah	861	59,1	40,8	0,1	32,6	67,2	0,1
14	DI Yogyakarta	121	81,8	18,2	0,0	51,2	48,8	0,0
15	Jawa Timur	949	66,3	33,4	0,3	29,2	70,4	0,4
16	Banten	206	50,5	49,5	0,0	24,3	75,7	0,0
17	Bali	114	48,2	51,8	0,0	12,3	87,7	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	60,4	38,9	0,7	24,2	75,2	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	31,8	66,9	1,3	16,6	82,1	1,3
20	Kalimantan Barat	233	51,9	48,1	0,0	23,2	76,8	0,0
21	Kalimantan Tengah	176	46,6	53,4	0,0	19,9	80,1	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	57,6	41,9	0,5	20,7	78,8	0,5
23	Kalimantan Timur	213	64,3	35,7	0,0	31,5	68,5	0,0
24	Sulawesi Utara	167	13,8	85,6	0,6	8,4	91,0	0,6
25	Sulawesi Tengah	163	18,4	81,6	0,0	8,6	90,8	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	26,1	73,6	0,2	14,0	85,5	0,5
27	Sulawesi Tenggara	233	28,8	71,2	0,0	9,9	90,1	0,0
28	Gorontalo	74	17,6	82,4	0,0	12,2	87,8	0,0
29	Sulawesi Barat	81	33,3	64,2	2,5	16,0	81,5	2,5
30	Maluku	161	14,3	83,9	1,9	5,0	92,5	2,5
31	Maluku Utara	101	29,7	70,3	0,0	7,9	92,1	0,0
32	Papua Barat	104	19,2	78,8	1,9	6,7	91,3	1,9
33	Papua	294	29,6	69,7	0,7	12,9	86,4	0,7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	50,2	49,3	0,6	22,7	76,6	0,7
2	Perdesaan	6660	42,2	57,4	0,5	20,5	79,1	0,5
	Jenis Puskesmas							
	INDONESIA	8981	**44,2**	**55,3**	**0,5**	**21,1**	**78,4**	**0,5**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memilikiPedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas adalah sebesar 44,2 persen sedangkan persentase Puskesmas yang tidak memiliki pedoman tersebut sebesar 55,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memilikiPedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas adalah Provinsi DI Yogyakarta (81,8%) diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (66,3%) dan Provinsi Kalimantan Timur (64,1%). Persentase terendah Puskesmas yang memilikiPedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas adalah Provinsi Sulawesi Utara (13,8%) diikuti oleh Provinsi Maluku (14,3%) dan Provinsi Gorontalo (17,6%).

Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan denganPuskesmas perdesaan yaitu 50,2 persen di Puskesmas perkotaan dan 42,2 persen di Puskesmas perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki Pedoman Kegawat daruratan adalah sebesar 21,1 persen dan persentase Puskesmas yang tidak memiliki Pedoman Kegawatdaruratan sebesar 78,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Kegawatdaruratan adalah Provinsi DI Yogyakarta (51,2%) diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (32,6%) dan Provinsi Kalimantan Timur (31,5%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Kegawatdaruratan adalah Provinsi Bengkulu (2,9%) diikuti oleh Provinsi Maluku (5,0%) dan Provinsi Papua Barat (6,7%). Secara nasional persentase Puskesmas memiliki Pedoman Kegawatdaruratan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 22,7 persen di Puskesmas perkotaan dan 20,5 persen di Puskesmas perdesaan.

4.8.9.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Pengobatan

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan diperlukan dalam Program Pengobatan untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan programPengobatan. Hasilnya seperti terlihat pada Tabel 4.8.9.4.

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang diterima Puskesmas dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan, umpan balik tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, seperti tersaji pada tabel 4.8.9.4.Secara nasional bentuk pengawasan, evalusi dan bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Upaya Program Pengobatan adalah dalam bentuk kunjungan supervisi oleh Dinas Kesehatan ke puskesmas (51,4%) dan diikuti oleh pertemuan monitoring dan evaluasi di Dinas Kesehatan(50,8%) kemudian umpan balik (45,2%). Secara nasional persentase Puskesmas lengkap menerima pengawasan, evalusi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan monev, umpan balik dan pertemuan monev dari Dinas Kesehatan adalah sebesar 32,0 persen sementara 67,6 persen tidak menerima lengkap.

Tabel 4.8.9.4
Persentase Puskesmas menurutPengawasan, Evalusi Dan Bimbingan Program Pengobatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Supervisi DINKES			Umpan balik laporan			Pertemuan Monev			Pengawasan, evaluasi dan bimbingan Lengkap		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi													
1	DI Aceh	311	29,6	70,1	0,3	21,5	77,8	0,6	25,4	73,6	1,0	10,6	88,4	1,0
2	Sumatera Utara	506	42,3	57,5	0,2	31,0	68,6	0,4	47,0	52,8	0,2	22,7	76,9	0,4
3	Sumatera Barat	248	36,3	63,7	0	34,3	65,7	0	39,1	60,9	0	21,0	79,0	0
4	Riau	195	43,1	56,9	0	41,0	59,0	0	53,3	46,7	0	28,7	71,3	0
5	Jambi	171	45,6	53,8	0,6	41,5	57,3	1,2	47,4	52,0	0,6	24,6	74,9	0,6
6	Sumatera Selatan	298	60,7	38,6	0,7	49,3	49,7	1,0	49,0	50,0	1,0	35,6	63,8	0,7
7	Bengkulu	173	41,0	59,0	0	35,3	64,7	0	28,9	71,1	0	19,1	80,9	0
8	Lampung	265	58,1	41,9	0	39,2	60,8	0	45,7	54,3	0	27,5	72,5	0
9	Bangka Belitung	57	43,9	56,1	0	35,1	64,9	0	36,8	63,2	0	21,1	78,9	0
10	Kepulauan Riau	65	33,8	66,2	0	29,2	70,8	0	36,9	63,1	0	18,5	81,5	0
11	DKI Jakarta	336	47,0	52,1	0,9	39,9	59,2	0,9	51,8	47,3	0,9	32,4	66,7	0,9
12	Jawa Barat	1031	62,9	37,0	0,2	65,9	33,8	0,4	70,1	29,6	0,3	50,3	49,4	0,3
13	Jawa Tengah	861	65,3	34,6	0,1	60,5	39,4	0,1	61,9	38,0	0,1	45,9	54,0	0,1
14	DI Yogyakarta	121	59,5	40,5	0	65,3	34,7	0	70,2	29,8	0	46,3	53,7	0
15	Jawa Timur	949	73,0	27,0	0	61,3	38,7	0	64,9	35,1	0	46,5	53,5	0
16	Banten	206	71,8	28,2	0	57,3	42,7	0	70,9	29,1	0	50,5	49,5	0
17	Bali	114	41,2	58,8	0	14,0	86,0	0	30,7	68,4	0,9	8,8	91,2	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	60,4	39,6	0	56,4	43,6	0	53,0	47,0	0	35,6	64,4	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	49,3	49,7	1,0	36,1	62,9	1,0	46,0	52,6	1,3	22,8	76,2	1,0
20	Kalimantan Barat	233	50,6	49,4	0	48,9	51,1	0	55,8	44,2	0	36,9	63,1	0
21	Kalimantan Tengah	176	34,1	65,9	0	33,5	66,5	0	42,0	58,0	0	18,8	81,3	0
22	Kalimantan Selatan	217	52,5	47,0	0,5	38,7	60,4	0,9	50,7	48,8	0,5	29,0	70,0	0,9
23	Kalimantan Timur	213	37,1	62,9	0	27,7	72,3	0	38,5	61,5	0	19,7	80,3	0
24	Sulawesi Utara	167	54,5	44,9	0,6	38,9	60,5	0,6	37,7	61,7	0,6	22,8	76,6	0,6
25	Sulawesi Tengah	163	25,2	74,2	0,6	23,3	76,1	0,6	31,9	67,5	0,6	12,9	86,5	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	51,2	48,5	0,2	42,9	56,7	0,5	54,4	45,3	0,2	29,8	70,0	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	40,8	59,2	0	40,3	59,7	0	38,6	61,4	0	22,7	77,3	0
28	Gorontalo	74	52,7	47,3	0	45,9	54,1	0	63,5	36,5	0	43,2	56,8	0
29	Sulawesi Barat	81	60,5	37,0	2,5	53,1	44,4	2,5	60,5	37,0	2,5	35,8	61,7	2,5
30	Maluku	161	19,9	78,9	1,2	22,4	75,8	1,9	9,3	89,4	1,2	3,7	95,0	1,2
31	Maluku Utara	101	30,7	69,3	0	24,8	75,2	0	32,7	67,3	0	12,9	87,1	0
32	Papua Barat	104	21,2	76,9	1,9	26,9	71,2	1,9	27,9	70,2	1,9	8,7	89,4	1,9
33	Papua	294	20,7	78,9	0,3	23,8	75,9	0,3	25,2	74,5	0,3	13,6	86,1	0,3
	Lokasi													
1	Perkotaan	2321	52,4	47,3	0,3	46,1	53,5	0,4	55,4	44,2	0,4	36,3	63,3	0,4
2	Perdesaan	6660	51,1	48,7	0,3	44,8	54,8	0,4	49,2	50,5	0,3	30,5	69,2	0,3
	INDONESIA	**8981**	51,4	48,3	0,3	45,2	54,5	0,4	50,8	48,9	0,3	32,0	67,6	0,3

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pengawasan, evalusi dan bimbingandalam bentuk kunjungan supervisiDinas Kesehatan ke puskesmas untuk Program Pengobatanadalah sebesar 51,4 persen dan persentase Puskesmas tidak menerima kunjungan sebesar 48,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Program Pengobatan ditemukan pada Provinsi Jawa Timur (73,0%) diikuti oleh Provinsi Banten (71,8%) dan Provinsi Jawa Tengah (65,3%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Program Pengobatan adalah Provinsi Maluku (19,9%) diikuti oleh Provinsi Papua (20,7%) dan Provinsi Papua Barat (21,2%). Secara nasional persentase menerima kunjungan supervisi

dariDinas Kesehatan untuk program Program Pengobatan diPuskesmas perkotaanlebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 52,4 persen pada Puskesmas perkotaan dan 51,1 persen pada perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pengawasan, evalusi dan bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Program Pengobatan sebesar 45,2 persen dan persentase puskesmas tidak menerima umpan balik sebesar 54,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Pengobatan adalah Provinsi Jawa Barat (65,9%) diikuti oleh ProvinsiDI Yogyakarta(65,3%) dan Provinsi Jawa Timur (61,3%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Pengobatan adalah Provinsi Bali (14,0%) diikuti oleh Provinsi DI Aceh (21,5%) dan Provinsi Maluku (22,4%). Secara nasional persentasePuskesmas perkotaan menerima umpan balik Program Pengobatan dari Dinas Kesehatanlebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas perdesaan yaitu 46,1 persen di perkotaan dibandingkan dengan 44,8 persen di perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima Pengawasan, evalusi dan bimbingan dalam bentuk keikutsertaan dalam pertemuan monitoring dan evaluasi di Dinas Kesehatan untuk Program Pengobatanadalah sebesar 50,8 persen sedangkan persentase Puskesmas tidak mengikuti sebesar 48,9 persen. Persentase puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Pengobatandi Dinas Kesehatan adalah Provinsi Banten (70,9%) diikuti oleh Provinsi Di Yogyakarta (70,2%) dan Provinsi Jawa Barat (70,1%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Pengobatandi Dinas Kesehatan adalah Provinsi Maluku (9,3%) diikuti oleh Provinsi Papua (25,2%) dan Provinsi DI Aceh(25,4%). Secara nasional persentase Puskesmas perkotaan mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Pengobatandi Dinas Kesehatan lebih tinggi dibandingkanPuskesmas perdesaan yaitu 55,4 persen di perkotaan dan49,2 persen di perdesaan.

Secara nasional, persentase Puskesmas menerima pengawasan, evalusi dan bimbingan secara lengkap(ketiga jenis bimbingan diterima oleh Puskesmas) untuk Upaya Pelayanan Pengobatanadalah sebesar 32,0 persen sedangkan persentase Puskesmas tidak lengkap menerima sebesar 67,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima pengawasan, evalusi dan bimbingan secara lengkap dari Dinas Kesehatan adalah Provinsi Banten (50,5%) diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (50,3%) dan Provinsi JawaTimur (46,5%). Persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, evalusi dan bimbingan secara lengkap adalah Provinsi Maluku (3,7%) diikuti oleh Provinsi Papua Barat (8,7%) dan Provinsi Bali (8,8%).Secara nasional persentasePuskesmas perkotaan menerima Pengawasan, evalusi dan bimbingan secara lengkap lebih tinggi dibandingkan Puskesmas perdesaan yaitu 36,3 persen di perkotaan dan 30,5 persen di perdesaan.

4.8.10. PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)

4.8.10.1. Kegiatan Program UKS

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya pembinaan kesehatan masyarakat yang dilakukan petugas Puskesmas di sekolah-sekolah dalam wilayah kerja Puskesmas. Kegiatan UKS yang dikumpulkan pada Rifas 2011 adalah yang dilakukan oleh tenaga Puskesmas tahun 2010, terdiri dari Kegiatan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Dasar kelas 1, Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Anak SD, Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Anak SLTP dan atau SMU, Kegiatan Pelatihan Guru UKS, serta Kegiatan Pelatihan Dokter Kecil.

Tabel 4.8.10.1.a. menunjukkan persentase Puskesmas yang melakukan Kegiatan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Dasar kelas 1, Pemeriksaan Kesehatan Anak SD dan Pemeriksaan Kesehatan Anak SLTP dan atau SMU.

Tabel 4.8.10.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Usaha Kesehatan Sekolah, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Penjaringan Kesehatan anak SD Kelas 1			Pemeriksaan kesehatan anak SD			Pemeriksaan kesehatan anak SLTP dan atau SMU		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	85.2	11.6	3.2	81.7	15.1	3.2	27.7	69.1	3.2
2	Sumatera Utara	506	77.9	16.0	6.1	78.1	15.8	6.1	45.8	48.0	6.1
3	Sumatera Barat	248	94.4	4.8	0.8	94.4	4.8	0.8	71.8	27.4	0.8
4	Riau	195	93.3	5.6	1.0	92.8	6.2	1.0	62.6	36.4	1.0
5	Jambi	171	93.6	2.9	3.5	88.3	8.2	3.5	52.6	43.9	3.5
6	Sumatera Selatan	298	85.9	10.1	4.0	87.2	8.7	4.0	58.1	37.9	4.0
7	Bengkulu	173	76.9	13.9	9.2	74.0	16.8	9.2	45.1	45.7	9.2
8	Lampung	265	81.9	11.3	6.8	77.4	15.8	6.8	44.5	48.7	6.8
9	Bangka Belitung	57	98.2	1.8	0	94.7	5.3	0	47.4	52.6	0
10	Kepulauan Riau	65	78.5	16.9	4.6	81.5	13.8	4.6	38.5	56.9	4.6
11	DKI Jakarta	336	95.2	3.6	1.2	94.9	4.2	0.9	73.2	25.9	0.9
12	Jawa Barat	1031	97.9	0.9	1.3	96.8	1.9	1.3	72.2	26.6	1.3
13	Jawa Tengah	861	99.4	0.5	0.1	98.0	1.9	0.1	71.5	28.3	0.1
14	DI Yogyakarta	121	99.2	0	0.8	98.3	0.8	0.8	76.9	22.3	0.8
15	Jawa Timur	949	99.3	0.3	0.4	98.7	0.8	0.4	91.4	8.2	0.4
16	Banten	206	96.1	2.9	1.0	94.7	4.4	1.0	59.2	39.8	1.0
17	Bali	114	99.1	0.9	0	98.2	1.8	0	81.6	18.4	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	93.3	5.4	1.3	92.6	6.0	1.3	53.7	45.0	1.3
19	Nusa Tenggara Timur	302	89.4	6.0	4.6	88.4	7.0	4.6	56.0	39.4	4.6
20	Kalimantan Barat	233	79.8	7.7	12.4	77.3	9.9	12.9	47.6	39.5	12.9
21	Kalimantan Tengah	176	69.9	14.8	15.3	68.8	15.9	15.3	34.7	50.0	15.3
22	Kalimantan Selatan	217	92.2	6.9	0.9	91.7	7.4	0.9	65.4	32.7	1.8
23	Kalimantan Timur	213	85.0	11.7	3.3	82.6	14.1	3.3	44.6	52.1	3.3
24	Sulawesi Utara	167	78.4	12.6	9.0	78.4	12.6	9.0	27.5	63.5	9.0
25	Sulawesi Tengah	163	72.4	12.3	15.3	69.3	14.7	16.0	30.1	54.0	16.0
26	Sulawesi Selatan	406	89.7	6.9	3.4	92.1	4.7	3.2	51.0	45.8	3.2
27	Sulawesi Tenggara	233	48.9	19.7	31.3	48.5	20.2	31.3	22.7	45.9	31.3
28	Gorontalo	74	93.2	1.4	5.4	89.2	5.4	5.4	56.8	37.8	5.4
29	Sulawesi Barat	81	64.2	8.6	27.2	64.2	8.6	27.2	40.7	32.1	27.2
30	Maluku	161	54.0	23.6	22.4	55.9	21.7	22.4	37.3	40.4	22.4
31	Maluku Utara	101	57.4	5.9	36.6	52.5	10.9	36.6	23.8	39.6	36.6
32	Papua Barat	104	39.4	37.5	23.1	42.3	34.6	23.1	31.7	44.2	24.0
33	Papua	294	29.3	59.9	10.9	29.3	59.9	10.9	15.6	73.5	10.9
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	92.4	5.3	2.3	92.3	5.4	2.3	68.1	29.6	2.3
2	Perdesaan	6660	83.8	9.7	6.5	82.6	10.9	6.5	53.8	39.7	6.6
	INDONESIA	**8981**	**86.0**	**8.6**	**5.4**	**85.1**	**9.5**	**5.4**	**57.5**	**37.1**	**5.5**

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Penjaringan kesehatan anak SD kelas 1 secara nasional adalah 86,0 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Tengah (99,4%), Jawa Timur (99,3%) dan DIY (99,2%). Sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Papua (29,3%), Papua Barat (39,4%) dan Sulawesi Tenggara (48,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Penjaringan kesehatan anak SD kelas 1 ada sebanyak 92,4 persen, sementara di perdesaan 83,8 persen.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan kesehatan anak SD secara nasional adalah 85,1 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (98,7%), DIY (98,3%) dan Bali (98,2%). Sedangkan terendah di Provinsi Papua (29,3%), Papua Barat (42,3%) dan Sulawesi Tenggara (48,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan kesehatan anak SD oleh tenaga kesehatan ada sebanyak 92,3 persen, sementara di perdesaan 82,6 persen.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan kesehatan anak SLTP dan atau SMU oleh tenaga kesehatan secara nasional adalah 57,5 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (91,4%), Bali (81,6%) dan DIY (76,9%). Sedangkan terendah di Provinsi Papua (15,6%), Sulawesi Tenggara (22,7%) dan Maluku Utara (23,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan kesehatan anak SLTP dan atau SMU oleh tenaga kesehatan ada sebanyak 68,1 persen, sementara di perdesaan 53,8 persen.

Tabel 4.8.10.1.b menunjukkan persentase Puskesmas melakukan Kegiatan Pelatihan Guru UKS, Kegiatan Pelatihan Dokter Kecil serta yang lengkap mengikuti kelima jenis kegiatan program UKS tersebut. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelatihan guru UKS secara nasional hanya 29,1 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Banten (51,0%), DIY (48,8%) dan Jawa Tengah (46,5%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Papua (15,6%), Sulawesi Utara (6,0%) dan Sulawesi Tenggara (7,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pelatihan guru UKS ada sebanyak 36,5 persen, sementara di perdesaan 26,5 persen.

Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan Pelatihan dokter kecil secara nasional adalah 46,5 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Banten (80,6%), Nusa Tenggara Barat (77,2%) dan Jawa Tengah (72,6%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Papua (3,7%), Sulawesi Utara (6,0%) dan Maluku Utara (7,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pelatihan dokter kecil ada sebanyak 59,0 persen, sementara di perdesaan 42,1 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan lengkap untuk program UKS, yaitu melaksanakan kelima kegiatan tersebut diatas hanya sebanyak 18,7 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (42,1%), Banten (37,9%) dan Jawa Tengah (32,8%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Papua (0,7%), Sulawesi Tenggara (1,7%) dan Kalimantan Tengah (4,0). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan lengkap untuk program UKS ada sebanyak 26,6 persen, sementara di perdesaan 15,9 persen.

Tabel 4.8.10.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Usaha Kesehatan Sekolah, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Guru UKS			Pelatihan Dokter kecil			Kegiatan Lengkap UKS		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	18.6	78.1	3.2	29.6	67.2	3.2	5.1	91.6	3.2
2	Sumatera Utara	506	20.4	73.5	6.1	37.7	56.1	6.1	12.5	81.4	6.1
3	Sumatera Barat	248	28.2	70.6	1.2	70.6	28.6	0.8	21.4	77.4	1.2
4	Riau	195	25.6	73.3	1.0	64.1	34.9	1.0	18.5	80.5	1.0
5	Jambi	171	33.9	62.0	4.1	67.3	28.7	4.1	21.1	75.4	3.5
6	Sumatera Selatan	298	35.9	60.1	4.0	38.9	57.0	4.0	21.1	74.8	4.0
7	Bengkulu	173	20.8	69.9	9.2	30.1	60.7	9.2	12.7	78.0	9.2
8	Lampung	265	20.8	72.5	6.8	40.0	53.2	6.8	9.4	83.8	6.8
9	Bangka Belitung	57	45.6	54.4	0	70.2	29.8	0	17.5	82.5	0
10	Kepulauan Riau	65	29.2	66.2	4.6	64.6	30.8	4.6	12.3	83.1	4.6
11	DKI Jakarta	336	31.3	67.9	0.9	62.8	36.0	1.2	22.6	76.2	1.2
12	Jawa Barat	1031	38.5	60.2	1.3	52.5	46.3	1.3	25.0	73.7	1.3
13	Jawa Tengah	861	46.5	53.3	0.2	72.6	27.2	0.2	32.8	67.0	0.2
14	DI Yogyakarta	121	48.8	50.4	0.8	71.1	28.1	0.8	42.1	57.0	0.8
15	Jawa Timur	949	43.5	56.1	0.4	51.7	47.8	0.4	31.6	68.0	0.4
16	Banten	206	51.0	48.1	1.0	80.6	18.4	1.0	37.9	61.2	1.0
17	Bali	114	18.4	81.6	0	67.5	32.5	0	17.5	82.5	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	28.2	69.8	2.0	77.2	20.8	2.0	20.1	78.5	1.3
19	Nusa Tenggara Timur	302	8.9	86.1	5.0	14.2	80.5	5.3	4.6	90.1	5.3
20	Kalimantan Barat	233	23.2	63.9	12.9	28.8	58.4	12.9	11.2	76.4	12.4
21	Kalimantan Tengah	176	9.1	75.6	15.3	25.0	59.7	15.3	4.0	80.7	15.3
22	Kalimantan Selatan	217	37.3	61.8	0.9	63.1	35.9	0.9	28.1	71.0	0.9
23	Kalimantan Timur	213	30.5	66.2	3.3	52.1	44.6	3.3	15.0	81.7	3.3
24	Sulawesi Utara	167	6.0	85.0	9.0	6.0	85.0	9.0	0	91.0	9.0
25	Sulawesi Tengah	163	14.1	69.9	16.0	43.6	40.5	16.0	6.1	78.5	15.3
26	Sulawesi Selatan	406	27.6	69.2	3.2	46.6	50.2	3.2	14.3	82.5	3.2
27	Sulawesi Tenggara	233	7.3	60.9	31.8	17.2	51.1	31.8	1.7	66.5	31.8
28	Gorontalo	74	9.5	85.1	5.4	17.6	77.0	5.4	6.8	87.8	5.4
29	Sulawesi Barat	81	29.6	43.2	27.2	32.1	40.7	27.2	18.5	54.3	27.2
30	Maluku	161	13.7	64.0	22.4	14.3	63.4	22.4	4.3	73.3	22.4
31	Maluku Utara	101	9.9	53.5	36.6	7.9	54.5	37.6	0	63.4	36.6
32	Papua Barat	104	14.4	61.5	24.0	13.5	62.5	24.0	8.7	68.3	23.1
33	Papua	294	2.4	86.7	10.9	3.7	85.4	10.9	0.7	88.4	10.9
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	36.5	61.1	2.4	59.0	38.6	2.5	26.6	70.9	2.5
2	Perdesaan	6660	26.5	66.9	6.6	42.1	51.3	6.6	15.9	77.6	6.5
	INDONESIA	**8981**	**29.1**	**65.4**	**5.5**	**46.5**	**48.0**	**5.5**	**18.7**	**75.8**	**5.5**

4.8.10.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program UKS

Tabel 4.8.10.2.1 menunjukan bahwa persentase Puskesmas menurut keberadaan dan jumlah tenaga pelaksana Kegiatan program UKS. Secara nasional persentase Puskesmas yang mempunyai tenaga pelaksana sebanyak 88,9 persen dengan jumlah 1 sampai lebih dari 20 orang dengan rincian persentase Puskesmas yang memiliki jumlah petugas pelaksana UKS 1-5 orang sebanyak 67,8 persen, jumlah petugas pelaksana UKS 6-10 orang sebanyak 10,8

persen, jumlah petugas pelaksana UKS 11-20 orang sebanyak 6,1 persen, dan jumlah petugas pelaksana UKS >20 orang sebanyak 4,2 persen, sementara secara nasional hanya 5,0 persen Puskesmas yang tidak memiliki petugas pelaksana untuk program UKS. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana UKS adalah Provinsi Bali (100%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (99,1%), dan Provinsi DIY (98,3%). Sedangkan terendah di Provinsi Papua (29,9%), Papua Barat (49,0%) dan Sulawesi Tenggara (55,4%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang ada petugas pelaksana kegiatan UKS ada sebanyak 94,2 persen, sementara di perdesaan 87,0 persen.

Tabel 4.8.10.2.1

Persentase Puskesmas menurut Jumlah Petugas pelaksana Program Usaha Kesehatan Sekolah, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana UKS					
			% Tidak Ada	% 1- 5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	3.2	88.7	3.9	0.3	1.0	2.9
2	Sumatera Utara	506	7.9	74.1	4.3	2.4	4.0	7.3
3	Sumatera Barat	248	2.4	55.2	14.9	14.1	12.5	0.8
4	Riau	195	2.6	61.5	11.8	11.3	11.3	1.5
5	Jambi	171	3.5	73.7	8.2	5.3	4.7	4.7
6	Sumatera Selatan	298	1.7	82.2	8.7	2.0	1.3	4.0
7	Bengkulu	173	6.4	74.0	6.4	4.0	0	9.2
8	Lampung	265	3.4	69.8	12.5	4.5	2.6	7.2
9	Bangka Belitung	57	5.3	87.7	5.3	1.8	0	0
10	Kepulauan Riau	65	3.1	61.5	10.8	12.3	7.7	4.6
11	DKI Jakarta	336	3.3	88.7	5.7	1.2	0	1.2
12	Jawa Barat	1031	0.7	78.2	11.5	6.4	1.7	1.5
13	Jawa Tengah	861	0.6	69.0	14.3	9.8	6.0	0.3
14	DI Yogyakarta	121	0.8	20.7	21.5	32.2	24.0	0.8
15	Jawa Timur	949	1.3	53.4	25.1	11.9	7.5	0.8
16	Banten	206	1.5	73.8	9.2	10.2	4.4	1.0
17	Bali	114	0	60.5	19.3	6.1	14.0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	2.7	91.3	4.7	0	0	1.3
19	Nusa Tenggara Timur	302	4.6	63.9	10.6	7.6	6.6	6.6
20	Kalimantan Barat	233	1.7	69.5	7.7	4.3	3.4	13.3
21	Kalimantan Tengah	176	8.5	51.1	13.1	5.1	5.7	16.5
22	Kalimantan Selatan	217	4.1	67.7	11.1	6.0	8.8	2.3
23	Kalimantan Timur	213	3.8	76.5	8.5	4.2	1.9	5.2
24	Sulawesi Utara	167	3.0	80.2	4.2	2.4	0.6	9.6
25	Sulawesi Tengah	163	4.3	73.0	4.3	1.8	0.6	16.0
26	Sulawesi Selatan	406	1.5	86.0	6.2	1.2	1.5	3.7
27	Sulawesi Tenggara	233	12.4	51.1	3.4	0.9	0	32.2
28	Gorontalo	74	1.4	85.1	5.4	2.7	0	5.4
29	Sulawesi Barat	81	4.9	48.1	17.3	1.2	1.2	27.2
30	Maluku	161	12.4	49.7	9.3	1.9	1.2	25.5
31	Maluku Utara	101	4.0	47.5	6.9	3.0	2.0	36.6
32	Papua Barat	104	25.0	44.2	3.8	1.0	0	26.0
33	Papua	294	52.0	22.8	2.0	3.1	2.0	18.0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	2.7	71.0	11.8	6.2	5.1	3.1
2	Perdesaan	6660	5.7	66.7	10.5	6.0	3.9	7.3
	INDONESIA	**8981**	**5.0**	**67.8**	**10.8**	**6.1**	**4.2**	**6.2**

Pada tabel 4.8.10.2.2 menunjukkan persentase Puskesmas menurut keikutsertaan Pelatihan dan keberadaan Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan UKS

Tabel 4.8.10.2.2
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan dan keberadaan Pedoman Program Usaha Kesehatan Sekolah, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Keikut sertaan pada Pelatihan UKS			Keberadaan Pedoman UKS		
			%Ada	%Tidak ada	% TAD	%Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	54.3	42.1	3.5	35.0	61.7	3.2
2	Sumatera Utara	506	34.2	58.9	6.9	41.7	51.8	6.5
3	Sumatera Barat	248	40.3	56.9	2.8	75.8	23.4	0.8
4	Riau	195	51.8	45.1	3.1	54.9	44.1	1.0
5	Jambi	171	35.7	57.9	6.4	49.1	46.2	4.7
6	Sumatera Selatan	298	50.3	44.3	5.4	73.5	22.5	4.0
7	Bengkulu	173	30.1	60.7	9.2	41.6	49.1	9.2
8	Lampung	265	42.6	50.6	6.8	47.9	45.3	6.8
9	Bangka Belitung	57	77.2	22.8	0	78.9	21.1	0
10	Kepulauan Riau	65	35.4	58.5	6.2	63.1	32.3	4.6
11	DKI Jakarta	336	41.4	54.5	4.2	73.2	25.3	1.5
12	Jawa Barat	1031	54.2	43.7	2.0	84.2	14.5	1.3
13	Jawa Tengah	861	45.2	54.1	0.7	90.8	9.1	0.1
14	DI Yogyakarta	121	43.0	54.5	2.5	92.6	6.6	0.8
15	Jawa Timur	949	41.8	56.0	2.2	83.9	15.5	0.6
16	Banten	206	52.9	45.1	1.9	82.0	17.0	1.0
17	Bali	114	23.7	76.3	0	87.7	12.3	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	63.8	34.2	2.0	83.9	14.1	2.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	29.8	62.3	7.9	40.4	54.0	5.6
20	Kalimantan Barat	233	45.5	40.8	13.7	48.5	37.8	13.7
21	Kalimantan Tengah	176	23.3	58.0	18.8	42.6	42.0	15.3
22	Kalimantan Selatan	217	47.5	51.2	1.4	64.1	35.0	0.9
23	Kalimantan Timur	213	45.5	50.2	4.2	60.1	36.6	3.3
24	Sulawesi Utara	167	30.5	59.9	9.6	18.6	72.5	9.0
25	Sulawesi Tengah	163	33.1	50.9	16.0	41.7	41.7	16.6
26	Sulawesi Selatan	406	36.5	60.3	3.2	58.4	38.4	3.2
27	Sulawesi Tenggara	233	15.5	52.4	32.2	14.6	53.2	32.2
28	Gorontalo	74	40.5	54.1	5.4	51.4	43.2	5.4
29	Sulawesi Barat	81	35.8	37.0	27.2	34.6	38.3	27.2
30	Maluku	161	20.5	49.1	30.4	11.8	65.2	23.0
31	Maluku Utara	101	28.7	29.7	41.6	25.7	37.6	36.6
32	Papua Barat	104	26.0	48.1	26.0	21.2	54.8	24.0
33	Papua	294	9.9	71.1	19.0	13.3	75.2	11.6
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	46.4	49.5	4.1	70.1	27.3	2.6
2	Perdesaan	6660	38.7	53.3	8.0	58.4	34.8	6.7
	INDONESIA	**8981**	**40.7**	**52.3**	**7.0**	**61.5**	**32.9**	**5.7**

Persentase Puskesmas yang petugasnya menerima pelatihan berkaitan dengan program UKS pada tahun 2009 dan 2010 secara nasional hanya sebanyak 40,7 persen, sementara persentase Puskesmas yang petugasnya tidak ada yang menerima pelatihan berkaitan dengan program UKS sebesar 52,3 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Bangka

Belitung (77,2%), diikuti Provinsi NTB (63,8%), dan DI Aceh (54,3%). Sedangkan terendah Provinsi Papua (9,9%), diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara (15,5%), dan Provinsi Maluku (20,5%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang petugas pelaksana kegiatan UKS nya telah mengikuti pelatihan ada sebanyak 46,4 persen, sementara di perdesaan 38,7 persen.

Persentase Puskesmas menurut keberadaan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan UKS secara nasional adalah 61,5 persen. Jika dibandingkan menurut lokasi menunjukkan bahwa persentase puskesmas perkotaan yang mempunyai pedoman lebih tinggi dari di perdesaan, yaitu 70,1% di perkotaan dan 58,4% diperdesaan. Provinsi dengan persentase tertinggi mempunyai pedoman adalah Provinsi DIY (92,6%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (90,8%), dan Bali (87,7%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Maluku (11,8%), diikuti Papua (13,3%), dan Sulawesi Tenggara (14,6%).

4.8.10.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program UKS

Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Usaha Kesehatan Sekolah yang dikumpulkan pada Rifas 2011 terdiri dari bimbingan Teknis dalam bentuk kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Puskesmas, Umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan kab/Kota terhadap laporan kegiatan UKS, dan keikutsertaan Puskesmas pada pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program UKS yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010 seperti terlihat pada tabel 4.8.10.3 a dan tabel 4.8.10.3 b.

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan Bimbingan teknis dalam bentuk kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota adalah 47,5 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan 55,8 persen, sementara di perdesaan 44,6 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (78,7 %), Jawa Barat (73,9 %) dan Jawa Tengah (70,8 %). Sementara provinsi terendah adalah Maluku (4,3%), Papua (4,4%), dan Papua Barat (9,6%).

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan Umpan balik laporan program UKS dari Dinas kesehatan Kab/Kota adalah 39,7 persen, dengan persentase puskesmas di perkotaan lebih tinggi dari persentase di derdesaan, yaitu sebanyak 43,9 persen di perkotaan ,dan di perdesaan 38,2 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Barat (69,8 %), Jawa Timur (65,4 %) dan DIY (62,8 %). Sementara provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (4,4%), Maluku (6,2%), dan Papua Barat (7,7%).

Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Usaha Kesehatan Sekolah dalam bentuk Pertemuan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kab/ Kota, dengan mengundang petugas Puskesmas, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kab/ Kota atau tempat lain. secara Nasional, pada tahun 2010 persentase Puskesmas yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program adalah 47,6 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 55,9 persen, sementara di perdesaan 44,8 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (86,0 %), Jawa Barat (81,0 %) dan Jawa Tengah (80,7 %). Sementara provinsi terendah adalah Maluku (1,9 %), Papua (2,4%), dan Sulawesi Tenggara (7,7%).

Persentase Puskesmas yang mendapatkan monitoring dan bimbingan teknis lengkap untuk program UKS secara nasional adalah sebanyak 30,5 persen, di perkotaan 36,6% dan di perdesaan 28,4%. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Barat (59,4 %), Jawa Timur (56,1 %) dan Banten (51,0%). Sementara provinsi terendah adalah Maluku (1,2 %), Kalimantan Tengah (2,3%) dan Papua (2,4%).

Tabel 4.8.10.3.a
Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Usaha Kesehatan Sekolah, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Bimbingan teknis program UKS dari dinkes tahun 2010			Umpan balik dari dinkes kab/kota terhadap laporan UKS tahun 2010		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	38.3	58.8	2.9	26.7	70.1	3.2
2	Sumatera Utara	506	34.0	59.9	6.1	19.8	73.9	6.3
3	Sumatera Barat	248	47.2	52.0	0.8	38.7	60.5	0.8
4	Riau	195	38.5	60.0	1.5	38.5	59.5	2.1
5	Jambi	171	31.6	64.3	4.1	28.7	67.3	4.1
6	Sumatera Selatan	298	45.3	50.7	4.0	37.2	58.7	4.0
7	Bengkulu	173	31.8	58.4	9.8	20.8	69.4	9.8
8	Lampung	265	32.1	61.1	6.8	23.0	70.2	6.8
9	Bangka Belitung	57	61.4	38.6	0	42.1	57.9	0
10	Kepulauan Riau	65	35.4	60.0	4.6	33.8	61.5	4.6
11	DKI Jakarta	336	60.7	38.1	1.2	46.7	52.1	1.2
12	Jawa Barat	1031	73.9	24.7	1.4	69.8	28.8	1.4
13	Jawa Tengah	861	70.8	29.0	0.1	59.6	40.3	0.1
14	DI Yogyakarta	121	65.3	33.9	0.8	62.8	36.4	0.8
15	Jawa Timur	949	78.7	20.8	0.5	65.4	33.9	0.6
16	Banten	206	67.0	31.6	1.5	56.8	41.7	1.5
17	Bali	114	47.4	52.6	0	24.6	75.4	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	67.1	31.5	1.3	58.4	37.6	4.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	21.5	72.8	5.6	18.2	75.8	6.0
20	Kalimantan Barat	233	32.2	54.5	13.3	31.8	54.9	13.3
21	Kalimantan Tengah	176	10.2	74.4	15.3	10.8	73.9	15.3
22	Kalimantan Selatan	217	55.8	43.3	0.9	37.3	61.8	0.9
23	Kalimantan Timur	213	29.1	67.6	3.3	21.1	75.6	3.3
24	Sulawesi Utara	167	19.8	71.3	9.0	17.4	73.7	9.0
25	Sulawesi Tengah	163	18.4	63.2	18.4	19.0	62.6	18.4
26	Sulawesi Selatan	406	42.1	54.7	3.2	31.5	65.3	3.2
27	Sulawesi Tenggara	233	12.0	56.2	31.8	14.6	53.6	31.8
28	Gorontalo	74	45.9	48.6	5.4	36.5	58.1	5.4
29	Sulawesi Barat	81	23.5	49.4	27.2	22.2	50.6	27.2
30	Maluku	161	4.3	72.7	23.0	6.2	70.8	23.0
31	Maluku Utara	101	12.9	49.5	37.6	16.8	45.5	37.6
32	Papua Barat	104	9.6	66.3	24.0	7.7	68.3	24.0
33	Papua	294	4.4	84.4	11.2	4.4	84.4	11.2
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	55.8	41.7	2.5	43.9	53.6	2.5
2	Perdesaan	6660	44.6	48.7	6.7	38.2	54.9	6.9
	INDONESIA	**8981**	**47.5**	**46.9**	**5.6**	**39.7**	**54.6**	**5.7**

Tabel 4.8.10.3.b
Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Usaha Kesehatan Sekolah, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Monitoring dan evaluasi tahun 2010			Bimbingan Teknis Lengkap Program UKS tahun 2010		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	35.0	61.7	3.2	16.4	80.7	2.9
2	Sumatera Utara	506	34.0	59.9	6.1	13.8	80.0	6.1
3	Sumatera Barat	248	49.6	49.6	0.8	31.0	68.1	0.8
4	Riau	195	36.4	62.1	1.5	24.1	74.4	1.5
5	Jambi	171	35.1	60.8	4.1	18.7	77.2	4.1
6	Sumatera Selatan	298	36.2	59.7	4.0	26.8	69.1	4.0
7	Bengkulu	173	19.7	70.5	9.8	12.1	78.0	9.8
8	Lampung	265	21.1	72.1	6.8	12.8	80.4	6.8
9	Bangka Belitung	57	42.1	57.9	0	22.8	77.2	0
10	Kepulauan Riau	65	36.9	58.5	4.6	23.1	72.3	4.6
11	DKI Jakarta	336	59.8	38.7	1.5	42.3	56.5	1.2
12	Jawa Barat	1031	81.0	17.6	1.5	59.4	39.2	1.5
13	Jawa Tengah	861	80.7	19.0	0.2	50.4	49.5	0.1
14	DI Yogyakarta	121	86.0	13.2	0.8	49.6	49.6	0.8
15	Jawa Timur	949	80.2	19.2	0.6	56.1	43.2	0.7
16	Banten	206	76.7	21.4	1.9	51.0	47.6	1.5
17	Bali	114	36.8	62.3	0.9	13.2	86.0	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	67.8	30.2	2.0	48.3	48.3	3.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	18.5	75.8	5.6	7.6	86.8	5.6
20	Kalimantan Barat	233	27.9	58.8	13.3	16.3	70.4	13.3
21	Kalimantan Tengah	176	8.5	75.6	15.9	2.3	82.4	15.3
22	Kalimantan Selatan	217	48.8	50.2	0.9	27.6	71.4	0.9
23	Kalimantan Timur	213	23.9	72.8	3.3	12.7	84.0	3.3
24	Sulawesi Utara	167	13.2	77.8	9.0	9.0	82.0	9.0
25	Sulawesi Tengah	163	14.7	66.9	18.4	8.0	73.6	18.4
26	Sulawesi Selatan	406	42.6	54.2	3.2	21.7	75.1	3.2
27	Sulawesi Tenggara	233	7.7	60.5	31.8	6.4	61.8	31.8
28	Gorontalo	74	31.1	63.5	5.4	23.0	71.6	5.4
29	Sulawesi Barat	81	19.8	53.1	27.2	12.3	60.5	27.2
30	Maluku	161	1.9	75.2	23.0	1.2	75.8	23.0
31	Maluku Utara	101	9.9	52.5	37.6	5.9	56.4	37.6
32	Papua Barat	104	11.5	64.4	24.0	5.8	70.2	24.0
33	Papua	294	2.4	86.4	11.2	2.4	86.4	11.2
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	55.9	41.5	2.6	36.6	60.9	2.5
2	Perdesaan	6660	44.8	48.4	6.8	28.4	64.7	6.8
	INDONESIA	**8981**	**47.6**	**46.6**	**5.7**	**30.5**	**63.7**	**5.7**

4.8.11. PROGRAM KESEHATAN OLAHRAGA

4.8.11.1. Kegiatan Program Kesehatan Olahraga

Kegiatan program kesehatan olahraga yang dilaksanakan di Puskesmas, yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011, terdiri dari 1) kegiatan Pembinaan kelompok potensial yaitu pembinaan klub-klub olahraga, misalnya kelompok senam ibu hamil, kelompok kebugaran calon jemaah haji, kelompok olahraga penderita penyakit tidak menular (diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dsb.), kelompok olahraga anak sekolah, dll. 2). Pelatihan instruktur kesehatan olahraga 3). Pemeriksaan kesegaran jasmani anak sekolah,

Tabel 4.8.11.1.a-b menunjukkan pesentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut

Tabel 4.8.11.1.a

Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Olahraga, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pembinaan kelompok potensial/klub olahraga masyarakat			Pelatihan instruktur kesehatan olahraga		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	0.6	53.1	46.3	0.3	53.4	46.3
2	Sumatera Utara	506	2.0	21.3	76.7	0.6	22.3	77.1
3	Sumatera Barat	248	21.0	37.9	41.1	6.0	52.4	41.5
4	Riau	195	9.2	44.6	46.2	5.1	48.7	46.2
5	Jambi	171	2.9	27.5	69.6	2.3	26.9	70.8
6	Sumatera Selatan	298	12.4	30.5	57.0	9.7	32.9	57.4
7	Bengkulu	173	3.5	28.9	67.6	1.2	30.6	68.2
8	Lampung	265	8.3	10.6	81.1	3.0	15.1	81.9
9	Bangka Belitung	57	14.0	56.1	29.8	5.3	64.9	29.8
10	Kepulauan Riau	65	1.5	33.8	64.6	1.5	33.8	64.6
11	DKI Jakarta	336	8.9	63.4	27.7	4.8	67.6	27.7
12	Jawa Barat	1031	21.2	33.9	44.8	12.8	42.4	44.8
13	Jawa Tengah	861	6.0	59.7	34.3	3.6	61.0	35.4
14	DI Yogyakarta	121	20.7	19.0	60.3	5.0	34.7	60.3
15	Jawa Timur	949	21.7	27.8	50.5	12.8	36.5	50.8
16	Banten	206	6.8	33.5	59.7	4.4	35.9	59.7
17	Bali	114	26.3	62.3	11.4	7.0	81.6	11.4
18	Nusa Tenggara Barat	149	7.4	53.0	39.6	2.0	57.7	40.3
19	Nusa Tenggara Timur	302	0.3	26.5	73.2	0.3	26.5	73.2
20	Kalimantan Barat	233	6.0	14.2	79.8	3.9	15.5	80.7
21	Kalimantan Tengah	176	4.0	22.2	73.9	0.6	25.6	73.9
22	Kalimantan Selatan	217	7.4	61.8	30.9	1.8	66.8	31.3
23	Kalimantan Timur	213	3.3	29.1	67.6	0.9	31.5	67.6
24	Sulawesi Utara	167	0.6	14.4	85.0	0.6	14.4	85.0
25	Sulawesi Tengah	163	2.5	14.7	82.8	1.2	16.0	82.8
26	Sulawesi Selatan	406	3.0	11.3	85.7	2.0	10.8	87.2
27	Sulawesi Tenggara	233	0	20.2	79.8	0	20.2	79.8
28	Gorontalo	74	0	1.4	98.6	0	1.4	98.6
29	Sulawesi Barat	81	2.5	2.5	95.1	0	4.9	95.1
30	Maluku	161	1.2	43.5	55.3	0	44.7	55.3
31	Maluku Utara	101	0	10.9	89.1	0	10.9	89.1
32	Papua Barat	104	0	55.8	44.2	0	55.8	44.2
33	Papua	294	0.7	78.2	21.1	0.3	78.6	21.1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	14.6	38.5	47.0	7.8	44.9	47.3
2	Perdesaan	6660	7.2	34.2	58.7	3.7	37.2	59.0
	INDONESIA	**8981**	**9.1**	**35.3**	**55.6**	**4.8**	**39.2**	**56.0**

Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok potensial/ klub olahraga secara nasional hanya 9,1 persen, di perkotaan 14,6 persen, sementara di perdesaan hanya 7,2 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Bali (26,3%), Jawa Timur (21,7%), dan Jawa Barat (21,2%). Sementara itu ada 4 provinsi yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan pembinaan potensial/klub olahraga masyarakat (0%) yaitu Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.

Secara nasional, persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan pelatihan instruktur kesehatan olahraga hanya 4,8 persen, sebanyak 7,8 persen di Puskesmas perkotaan dan di perdesaan 3,7 persen. Provinsi yang tertinggi melaksanakan kegiatan pelatihan instruktur kesehatan olahraga adalah Jawa Barat (12,8%), Jawa Timur (12,8%), dan Sumatera Selatan (9,7%). Sementara itu ada 6 provinsi yang seluruh Puskesmasnya belum melakukan kegiatan pelatihan instruktur kesehatan olahraga (0%), yaitu provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.

Tabel 4.8.11.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Olahraga, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pemeriksaan kesegaran jasmani anak sekolah			Kegiatan Lengkap Kesehatan Olahraga		
			%Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	2.3	51.4	46.3	0.3	53.4	46.3
2	Sumatera Utara	506	2.2	20.8	77.1	0	23.3	76.7
3	Sumatera Barat	248	15.3	43.1	41.5	2.8	56.0	41.1
4	Riau	195	12.8	41.0	46.2	2.6	51.3	46.2
5	Jambi	171	4.1	25.1	70.8	1.2	29.2	69.6
6	Sumatera Selatan	298	12.4	30.2	57.4	3.7	39.3	57.0
7	Bengkulu	173	3.5	28.3	68.2	0	32.4	67.6
8	Lampung	265	8.7	9.4	81.9	2.3	16.6	81.1
9	Bangka Belitung	57	17.5	52.6	29.8	3.5	66.7	29.8
10	Kepulauan Riau	65	6.2	29.2	64.6	0	35.4	64.6
11	DKI Jakarta	336	8.0	64.3	27.7	3.3	69.0	27.7
12	Jawa Barat	1031	19.1	36.0	44.9	6.6	48.7	44.7
13	Jawa Tengah	861	8.4	56.2	35.4	1.9	64.0	34.1
14	DI Yogyakarta	121	13.2	26.4	60.3	2.5	37.2	60.3
15	Jawa Timur	949	29.6	19.6	50.8	9.4	40.1	50.5
16	Banten	206	13.1	27.2	59.7	2.4	37.9	59.7
17	Bali	114	20.2	68.4	11.4	1.8	86.8	11.4
18	Nusa Tenggara Barat	149	11.4	48.3	40.3	1.3	59.1	39.6
19	Nusa Tenggara Timur	302	1.7	24.8	73.5	0	26.8	73.2
20	Kalimantan Barat	233	4.3	15.0	80.7	1.7	18.5	79.8
21	Kalimantan Tengah	176	6.3	19.9	73.9	0.6	25.6	73.9
22	Kalimantan Selatan	217	11.5	57.1	31.3	1.4	67.7	30.9
23	Kalimantan Timur	213	3.3	29.1	67.6	0.5	31.9	67.6
24	Sulawesi Utara	167	0.6	14.4	85.0	0	15.0	85.0
25	Sulawesi Tengah	163	1.8	15.3	82.8	1.2	16.0	82.8
26	Sulawesi Selatan	406	3.0	9.9	87.2	0.5	13.8	85.7
27	Sulawesi Tenggara	233	0.4	19.7	79.8	0	20.2	79.8
28	Gorontalo	74	1.4	0	98.6	0	1.4	98.6
29	Sulawesi Barat	81	2.5	2.5	95.1	0	4.9	95.1
30	Maluku	161	2.5	42.2	55.3	0	44.7	55.3
31	Maluku Utara	101	0	10.9	89.1	0	10.9	89.1
32	Papua Barat	104	0	55.8	44.2	0	55.8	44.2
33	Papua	294	0.7	78.2	21.1	0.3	78.6	21.1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	13.8	38.9	47.3	4.1	48.9	47.0
2	Perdesaan	6660	8.9	32.0	59.1	2.2	39.1	58.6
	INDONESIA	**8981**	**10.2**	**33.8**	**56.0**	**2.7**	**41.7**	**55.6**

Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan Pemeriksaan kesegaran jasmani anak sekolah secara nasional hanya 10,2 persen, di perkotaan 13,8 persen, sementara di perdesaan hanya 8,9 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Jawa Timur (29,6%), Bali (20,2%), dan Jawa Barat (19,1%). Sementara itu ada 2 provinsi yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan Pemeriksaan kesegaran jasmani anak sekolah (0%) yaitu Papua Barat, dan Maluku Utara.

Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan lengkap untuk program kesehatan olahraga secara nasional hanya 2,7 persen, di perkotaan 4,1 persen dan di perdesaan 2,2 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (9,4%), Jawa Barat (6,6%), dan Sumatera Selatan (3,7%). Sementara itu, ada 11 provinsi yang belum melakukan kegiatan lengkap program kesehatan olahraga (0%) yaitu Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Bengkulu dan Sumatera Utara.

4.8.11.2. Petugas pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Kes Olahraga

Tabel 4.8.11.2.1 menunjukan persentase Puskesmas menurut keberadaan dan jumlah tenaga pelaksana Kegiatan program kesehatan olahraga.

Secara nasional persentase puskesmas yang mempunyai tenaga pelaksana Kesehatan Olahraga sebanyak 18,3 persen, dengan jumlah petugas pelaksana 1 sampai lebih dari 20 orang, dengan rincian persentase 1-5 orang sebanyak 16,9 persen, 6-10 orang sebanyak 0,5 persen, 11-20 orang sebanyak 0,4 persen, dan >20 orang sebanyak 0,5 persen.

Sementara secara nasional ada 23,3 persen Puskesmas yang tidak memiliki petugas pelaksana untuk program kesehatan olahraga. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana kesehatan olahraga adalah Provinsi Bali (85,1 %), diikuti Provinsi Bangka Belitung (42,1 %), dan Provinsi Sumatera Barat (39,9 %). Sedangkan terendah di Provinsi Papua Barat (1,0 %), Maluku Utara (1,0%) dan Gorontalo (1,4%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang ada petugas pelaksana kegiatan program kesehatan olahraga lebih tinggi dari di perdesaan, yaitu di perkotaan 26,9 persen, sementara di perdesaan 15,3 persen.

Tabel 4.8.11.2.1
Persentase Puskesmas menurut Petugas Program Kesehatan Olahraga, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana Kesehatan Olahraga					
			% Tidak Ada	% 1- 5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	47.9	5.1	0	0	0	46.9
2	Sumatera Utara	506	16.2	3.6	0	0	1.6	78.7
3	Sumatera Barat	248	17.7	37.9	0.8	0	1.2	42.3
4	Riau	195	26.7	20.5	0.5	0	1.0	51.3
5	Jambi	171	19.3	5.8	0	0	0	74.9
6	Sumatera Selatan	298	11.4	29.5	0.7	0	0	58.4
7	Bengkulu	173	19.1	11.0	0	0	0.6	69.4
8	Lampung	265	5.3	11.7	1.1	0	0	81.9
9	Bangka Belitung	57	28.1	38.6	0	0	3.5	29.8
10	Kepulauan Riau	65	26.2	3.1	0	0	0	70.8
11	DKI Jakarta	336	54.2	12.2	0.3	0	0.3	33.0
12	Jawa Barat	1031	16.2	36.0	0.7	0.1	0.4	46.7
13	Jawa Tengah	861	50.3	10.6	0.3	0.9	0.2	37.6
14	DI Yogyakarta	121	7.4	28.1	1.7	2.5	0	60.3
15	Jawa Timur	949	10.1	31.2	2.3	2.1	1.6	52.7
16	Banten	206	18.9	19.4	0	0	0	61.7
17	Bali	114	2.6	84.2	0.9	0	0	12.3
18	Nusa Tenggara Barat	149	43.6	12.1	0	0	0	44.3
19	Nusa Tenggara Timur	302	21.5	2.0	0	0	0	76.5
20	Kalimantan Barat	233	5.6	12.4	0	0	0	82.0
21	Kalimantan Tengah	176	17.6	6.8	0.6	0	0.6	74.4
22	Kalimantan Selatan	217	39.2	26.7	0	0	1.4	32.7
23	Kalimantan Timur	213	16.4	9.9	0	0	0	73.7
24	Sulawesi Utara	167	9.6	4.8	0	0	0	85.6
25	Sulawesi Tengah	163	7.4	3.1	0.6	0	0	89.0
26	Sulawesi Selatan	406	4.4	5.7	0	0	0	89.9
27	Sulawesi Tenggara	233	16.3	3.0	0	0	0.4	80.3
28	Gorontalo	74	0	1.4	0	0	0	98.6
29	Sulawesi Barat	81	0	2.5	1.2	0	0	96.3
30	Maluku	161	29.8	3.1	0	0	0	67.1
31	Maluku Utara	101	6.9	1.0	0	0	0	92.1
32	Papua Barat	104	53.8	0	0	0	1.0	45.2
33	Papua	294	67.3	5.1	0	0	0	27.6
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	23.2	25.2	0.7	0.3	0.6	49.9
2	Perdesaan	6660	23.3	14.0	0.5	0.4	0.5	61.4
	INDONESIA	**8981**	**23.3**	**16.9**	**0.5**	**0.4**	**0.5**	**58.4**

Tabel 4.8.11.2.2 menunjukan bahwa persentase Puskesmas menurut keberadaan Pelatihan dan Pedoman Proram kesehatan Olahraga.

Tabel 4.8.11.2.2
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Olahraga, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Kesehatan Olahraga			Pedoman Kesehatan Olahraga		
			%Ya	%Tidak	% TAD	%Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	4.5	48.6	46.9	0.6	52.7	46.6
2	Sumatera Utara	506	3.2	18.6	78.3	1.2	21.3	77.5
3	Sumatera Barat	248	16.9	40.7	42.3	8.5	50.0	41.5
4	Riau	195	10.8	39.0	50.3	5.1	48.7	46.2
5	Jambi	171	3.5	23.4	73.1	2.3	26.9	70.8
6	Sumatera Selatan	298	24.5	17.1	58.4	17.4	24.2	58.4
7	Bengkulu	173	3.5	27.2	69.4	1.2	30.1	68.8
8	Lampung	265	6.0	12.1	81.9	4.9	13.2	81.9
9	Bangka Belitung	57	3.5	66.7	29.8	3.5	66.7	29.8
10	Kepulauan Riau	65	3.1	24.6	72.3	0	35.4	64.6
11	DKI Jakarta	336	8.0	58.3	33.6	3.6	67.6	28.9
12	Jawa Barat	1031	20.5	32.9	46.7	15.8	38.2	46.0
13	Jawa Tengah	861	8.1	53.9	38.0	4.3	59.5	36.2
14	DI Yogyakarta	121	11.6	28.1	60.3	6.6	33.1	60.3
15	Jawa Timur	949	17.4	30.1	52.5	17.4	31.0	51.6
16	Banten	206	9.7	29.1	61.2	5.3	35.0	59.7
17	Bali	114	28.1	59.6	12.3	24.6	63.2	12.3
18	Nusa Tenggara Barat	149	8.1	47.7	44.3	4.0	53.0	43.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	1.3	22.2	76.5	0	24.8	75.2
20	Kalimantan Barat	233	8.2	9.9	82.0	5.6	13.3	81.1
21	Kalimantan Tengah	176	4.5	21.0	74.4	2.3	23.9	73.9
22	Kalimantan Selatan	217	16.1	51.6	32.3	9.2	59.4	31.3
23	Kalimantan Timur	213	6.6	19.7	73.7	2.8	23.5	73.7
24	Sulawesi Utara	167	3.0	12.0	85.0	0.6	14.4	85.0
25	Sulawesi Tengah	163	1.8	9.2	89.0	0.6	11.0	88.3
26	Sulawesi Selatan	406	2.2	7.6	90.1	2.2	8.9	88.9
27	Sulawesi Tenggara	233	1.7	18.0	80.3	0	19.7	80.3
28	Gorontalo	74	0.0	1.4	98.6	0	1.4	98.6
29	Sulawesi Barat	81	0.0	3.7	96.3	1.2	2.5	96.3
30	Maluku	161	3.7	31.1	65.2	0.6	44.1	55.3
31	Maluku Utara	101	2.0	5.9	92.1	0	10.9	89.1
32	Papua Barat	104	1.0	52.9	46.2	0	54.8	45.2
33	Papua	294	4.4	68.0	27.6	0	78.6	21.4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	14.6	35.4	50.0	11.1	40.9	48.0
2	Perdesaan	6660	8.0	30.7	61.3	5.1	34.8	60.0
	INDONESIA	**8981**	**9.7**	**31.9**	**58.4**	**6.7**	**36.4**	**56.9**

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan petugas pada pelatihan berkaitan dengan program kesehatan olahraga secara nasional hanya sebanyak 9,7 persen, sementara secara nasional persentase Puskesmas yang petugasnya tidak pernah mengikuti pelatihan sebanyak 31,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya menerima pelatihan kesehatan olahraga yaitu di Provinsi Bali (28,1 %), diikuti Provinsi Sumatera Selatan (24,5 %), dan Jawa Barat (20,5 %). Sementara provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya belum menerima pelatihan terkait program kesehatan olahraga adalah Provinsi Papua (68,0%), Bangka Belitung (66,7%) dan Bali (59,6%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas,

persentase Puskesmas di perkotaan yang petugas pelaksana kegiatan Kesehatan Olahraganya telah mengikuti pelatihan ada sebanyak 14,6 persen, sementara di perdesaan 8,0 persen.

Persentase Puskesmas menurut keberadaan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan program kesehatan olahraga secara nasional hanya 6,7 persen (di perkotaan 11,1%, diperdesaan 5,1%). Tertinggi di Provinsi Bali (24,6 %), diikuti Provinsi Sumatera Selatan (17,4 %), dan Jawa Timur (17,4%). Sementara itu masih ada 7 provinsi yang seluruh puskesmasnya tidak memiliki pedoman pelaksanaan kegiatan program kesehatan olahraga (0%) yaitu Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

4.8.11.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Olahraga

Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Olahraga yang dikumpulkan pada Rifas 2011 terdiri dari bimbingan Teknis dalam bentuk kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Puskesmas, Umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan kab/Kota terhadap laporan Program Kesehatan Olahraga, dan keikutsertaan Puskesmas pada pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program Kesehatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010 seperti terlihat pada tabel 4.8.11.3 a dan tabel 4.8.11.3 b.

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan Monitoring dan Bimbingan teknis dalam bentuk adalah kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota untuk program kesehatan olahraga selama tahun 2010 hanya 5,3 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 8,1 persen, sementara di perdesaan 4,3 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang dikunjungi adalah Jawa Timur (17,0 %), Bali (16,7 %) dan Sumatera Selatan (14,4 %). Sementara itu ada 13 provinsi yang seluruh Puskesmasnya tidak mendapat bimbingan teknis (0%) yaitu Bangka Belitung, Kepulauan Riau, NTT, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan Umpan balik laporan pada tahun 2010 adalah 4,4 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 6,6 persen, sementara di perdesaan 3,6 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik adalah Jawa Timur Barat (14,4 %), Jawa Barat (12,8 %) dan Sumatera Selatan (12,1 %). Sementara itu ada 13 provinsi yang seluruh Puskesmasnya tidak mendapat umpan balik dari dinas kesehatan Kab/Kota (0%) yaitu Bangka Belitung, Kepulauan Riau, NTT,NTB,Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Tabel 4.8.11.3.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Olahraga, Rifaskes 2011

No.	Provinsi	Jml Pusk	Bimbingan teknis Kesehatan Olahraga dari dinkes tahun			Umpan balik dari dinkes kab/kota terhadap laporan Kesehatan Olahraga		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	0.6	52.7	46.6	0.6	52.7	46.6
2	Sumatera Utara	506	1.0	21.9	77.1	0.8	22.1	77.1
3	Sumatera Barat	248	7.7	50.8	41.5	5.2	53.2	41.5
4	Riau	195	1.0	52.8	46.2	1.0	52.8	46.2
5	Jambi	171	2.3	26.9	70.8	0.6	28.7	70.8
6	Sumatera Selatan	298	14.4	27.2	58.4	12.1	29.5	58.4
7	Bengkulu	173	1.7	29.5	68.8	1.2	30.1	68.8
8	Lampung	265	2.3	15.8	81.9	1.9	16.2	81.9
9	Bangka Belitung	57	0	70.2	29.8	0	70.2	29.8
10	Kepulauan Riau	65	0	35.4	64.6	0	35.4	64.6
11	DKI Jakarta	336	3.3	68.5	28.3	2.4	69.3	28.3
12	Jawa Barat	1031	14.1	39.7	46.3	12.8	40.7	46.5
13	Jawa Tengah	861	1.6	62.0	36.4	1.5	61.8	36.7
14	DI Yogyakarta	121	2.5	37.2	60.3	0.8	38.8	60.3
15	Jawa Timur	949	17.0	31.4	51.6	14.4	33.7	51.8
16	Banten	206	4.4	35.4	60.2	3.4	36.4	60.2
17	Bali	114	16.7	71.1	12.3	11.4	76.3	12.3
18	Nusa Tenggara Barat	149	0	55.7	44.3	0.	55.7	44.3
19	Nusa Tenggara Timur	302	0	25.2	74.8	0	25.2	74.8
20	Kalimantan Barat	233	4.7	14.2	81.1	3.4	15.5	81.1
21	Kalimantan Tengah	176	0.6	25.6	73.9	0.6	25.6	73.9
22	Kalimantan Selatan	217	4.6	64.1	31.3	2.3	66.4	31.3
23	Kalimantan Timur	213	1.4	24.9	73.7	0.5	25.8	73.7
24	Sulawesi Utara	167	0	15.0	85.0	0	15.0	85.0
25	Sulawesi Tengah	163	0	9.2	90.8	0	9.2	90.8
26	Sulawesi Selatan	406	0.2	10.6	89.2	0.5	10.3	89.2
27	Sulawesi Tenggara	233	0	19.7	80.3	0	19.7	80.3
28	Gorontalo	74	0	1.4	98.6	0	1.4	98.6
29	Sulawesi Barat	81	0	3.7	96.3	0	3.7	96.3
30	Maluku	161	0	44.7	55.3	0	44.7	55.3
31	Maluku Utara	101	0	10.9	89.1	0	9.9	90.1
32	Papua Barat	104	0	54.8	45.2	0	54.8	45.2
33	Papua	294	0	78.9	21.1	0	78.9	21.1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	8.1	43.8	48.1	6.6	45.2	48.2
2	Perdesaan	6660	4.3	35.7	60.1	3.6	36.2	60.2
	INDONESIA	**8981**	**5.3**	**37.8**	**57.0**	**4.4**	**38.5**	**57.1**

Pertemuan monitoring dan evaluasi program adalah pertemuan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/ Kota dengan mengundang petugas Puskesmas. Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program adalah 5,1 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 8,1 persen, sementara di perdesaan 4,1 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan

Monitoring dan evaluasi adalah Jawa Timur (16,6 %), Jawa Barat (13,7 %) dan Sumatera Selatan (12,8 %). Sementara itu ada provinsi yang seluruh Puskesmasnya tidak mengikuti pertemuan Monitoring dan evaluasi (0%) yaitu Bangka Belitung, Kepulauan Riau NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Tabel 4.8.11.3.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Olahraga, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pertemuan Monitoring dan evaluasi tahun 2010			Monitoring dan Bimbingan Teknis Lengkap Program Kesehatan Olahraga tahun 2010		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	0.6	52.7	46.6	0.6	52.7	46.6
2	Sumatera Utara	506	1.0	21.9	77.1	0.6	22.3	77.1
3	Sumatera Barat	248	8.5	49.2	42.3	4.4	54.0	41.5
4	Riau	195	1.5	51.8	46.7	0.5	53.3	46.2
5	Jambi	171	1.2	28.1	70.8	0.6	28.7	70.8
6	Sumatera Selatan	298	12.8	28.5	58.7	9.1	32.6	58.4
7	Bengkulu	173	1.2	29.5	69.4	1.2	30.1	68.8
8	Lampung	265	2.3	15.8	81.9	1.5	16.6	81.9
9	Bangka Belitung	57	0	70.2	29.8	0	70.2	29.8
10	Kepulauan Riau	65	0	35.4	64.6	0	35.4	64.6
11	DKI Jakarta	336	2.7	68.8	28.6	2.1	69.6	28.3
12	Jawa Barat	1031	13.7	39.9	46.5	9.4	44.3	46.3
13	Jawa Tengah	861	2.1	61.0	36.9	1.2	62.5	36.4
14	DI Yogyakarta	121	1.7	38.0	60.3	0.8	38.8	60.3
15	Jawa Timur	949	16.6	31.5	51.8	11.7	36.7	51.6
16	Banten	206	3.4	36.4	60.2	2.9	36.9	60.2
17	Bali	114	10.5	77.2	12.3	4.4	83.3	12.3
18	Nusa Tenggara Barat	149	1.3	53.0	45.6	0	55.7	44.3
19	Nusa Tenggara Timur	302	0	25.2	74.8	0	25.2	74.8
20	Kalimantan Barat	233	3.4	15.5	81.1	3.0	15.9	81.1
21	Kalimantan Tengah	176	0.6	25.6	73.9	0.6	25.6	73.9
22	Kalimantan Selatan	217	9.2	59.0	31.8	2.3	66.4	31.3
23	Kalimantan Timur	213	0.9	25.4	73.7	0.5	25.8	73.7
24	Sulawesi Utara	167	0	15.0	85.0	0	15.0	85.0
25	Sulawesi Tengah	163	0	9.2	90.8	0	9.2	90.8
26	Sulawesi Selatan	406	0.2	10.6	89.2	0	10.8	89.2
27	Sulawesi Tenggara	233	0	19.7	80.3	0	19.7	80.3
28	Gorontalo	74	0	1.4	98.6	0	1.4	98.6
29	Sulawesi Barat	81	0	3.7	96.3	0	3.7	96.3
30	Maluku	161	0	44.7	55.3	0	44.7	55.3
31	Maluku Utara	101	0	9.9	90.1	0	10.9	89.1
32	Papua Barat	104	0	54.8	45.2	0	54.8	45.2
33	Papua	294	0.3	78.6	21.1	0	78.9	21.1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	8.1	43.5	48.4	5.0	46.8	48.1
2	Perdesaan	6660	4.1	35.6	60.3	2.8	37.1	60.1
	INDONESIA	**8981**	**5.1**	**37.7**	**57.2**	**3.4**	**39.7**	**57.0**

Persentase Puskesmas yang mendapatkan kegiatan monitoring dan bimbingan teknis lengkap untuk program kesehatan olahraga secara nasional adalah sebanyak 3,4 persen (di perkotaan 5,0% dan di perdesaan 2,8%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi mendapatkan kegiatan monitoring dan bimbingan teknis lengkap adalah Jawa Timur (11,7 %), Jawa Barat (9,4%) dan Sumatera Selatan (9,1%). Sementara itu ada provinsi yang seluruh Puskesmasnya tidak mendapat Monitoring dan bimbingan teknis lengkap dari dinas kesehatan Kab/Kota (0%) yaitu Bangka Belitung, Kepulauan Riau,NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

4.8.12. PROGRAM PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS)

4.8.12.1. Kegiatan Program Perkesmas

Kegiatan Program Perkesmas yang dikumpulkan pada Rifas 2011 adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga Puskesmas tahun 2010, yang terdiri dari Konsultasi Perawatan di dalam gedung Puskesmas, Kunjungan rumah kepada keluarga rawan kesehatan, Kunjungan dan pembinaan kepada kelompok resiko tinggi, serta Kunjungan dan pembinaan kepada masyarakat rentan.

Tabel 4.8.12.1.a menunjukkan Kegiatan Program Perkesmas yang dilakukan Puskesmas, dalam bentuk Konsultasi Perawatan di dalam gedung Puskesmas, Kunjungan rumah kepada keluarga rawan kesehatan dan Kunjungan dan pembinaan kepada kelompok resiko tinggi. Tabel 4.8.12.1.b menunjukkan kegiatan Program perkesmas dalam bentuk Kegiatan Kunjungan dan Pembinaan Kepada Masyarakat Rentan Kesehatan dan Keempat bentuk Kegiatan Program Perkesmas secara lengkap dilaksanakan oleh puskesmas.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan konsultasi keperawatan di dalam gedung Puskesmas secara nasional adalah 46,3 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (79,3%), DKI Jakarta (70,5%), dan Bali (70,2%). Sedangkan terendah di Provinsi Maluku utara (10,9%), Papua Barat (12,5%) dan Sulawesi Barat (13,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan konsultasi keperawatan di dalam gedung Puskesmas lebih tinggi dari yang di perdesaan, yaitu 56,4 persen di perkotaan dan di perdesaan 42,8 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan kunjungan rumah kepada keluarga rawan kesehatan secara nasional adalah 51,9 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi melakukan kunjungan rumah pada keluarga rawan kesehatan adalah Bali (93,9%), DIY (90,9%) dan DKI Jakarta (79,2%). Sedangkan terendah di Provinsi DI Aceh (12,9%), Maluku Utara (12,9%) dan Papua Barat (14,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan kunjungan rumah pada keluarga rawan kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu di perkotaan sebanyak 64,6 persen, dan di perdesaan 47,5 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan kunjungan dan pembinaan kepada kelompok resiko tinggi secara nasional adalah 46,6 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi melaksanakan kegiatan tersebut adalah DIY (81,8%), DKI Jakarta (79,2%) dan Bali (71,9%) Sedangkan terendah di Provinsi Papua Barat (7,7%), DI Aceh (12,9%), dan Maluku

Utara (12,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan kunjungan dan pembinaan kepada kelompok resiko tinggi lebih tinggi dari di perdesaan, yaitu sebanyak 60,1 persen, di perkotaan dan di perdesaan 41,9 persen.

Tabel 4.8.12.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Konsultasi keperawatan di dalam gedung Puskesmas			Kunjungan rumah kepada keluarga rawan kesehatan			Kunjungan dan pembinaan kepada kelompok risiko tinggi		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	17.4	41.5	41.2	12.9	46.0	41.2	12.9	46.0	41.2
2	Sumatera Utara	506	25.5	22.9	51.6	21.7	26.5	51.8	20.4	27.9	51.8
3	Sumatera Barat	248	58.9	29.0	12.1	67.3	20.6	12.1	62.5	25.4	12.1
4	Riau	195	48.2	26.7	25.1	56.4	18.5	25.1	51.3	23.6	25.1
5	Jambi	171	35.1	25.1	39.8	46.2	14.0	39.8	35.7	24.0	40.4
6	Sumatera Selatan	298	51.3	20.1	28.5	52.3	19.1	28.5	48.7	22.8	28.5
7	Bengkulu	173	35.3	26.0	38.7	32.4	28.9	38.7	30.1	31.2	38.7
8	Lampung	265	49.4	17.0	33.6	56.6	9.8	33.6	49.4	17.0	33.6
9	Bangka Belitung	57	52.6	43.9	3.5	70.2	26.3	3.5	64.9	31.6	3.5
10	Kepulauan Riau	65	32.3	20.0	47.7	30.8	21.5	47.7	29.2	23.1	47.7
11	DKI Jakarta	336	70.5	25.3	4.2	79.2	16.7	4.2	79.2	16.7	4.2
12	Jawa Barat	1031	64.8	20.0	15.2	75.5	9.3	15.2	68.9	15.9	15.2
13	Jawa Tengah	861	61.0	26.9	12.1	69.5	18.0	12.5	61.6	25.7	12.8
14	DI Yogyakarta	121	79.3	17.4	3.3	90.9	5.8	3.3	81.8	14.9	3.3
15	Jawa Timur	949	56.4	20.4	23.2	64.1	12.8	23.2	58.7	18.1	23.2
16	Banten	206	45.1	30.6	24.3	55.3	20.4	24.3	51.9	23.8	24.3
17	Bali	114	70.2	28.9	0.9	93.9	5.3	0.9	71.9	26.3	1.8
18	Nusa Tenggara Barat	149	44.3	35.6	20.1	43.0	36.9	20.1	38.3	41.6	20.1
19	Nusa Tenggara Timur	302	33.1	21.9	45.0	35.1	19.9	45.0	30.8	24.2	45.0
20	Kalimantan Barat	233	38.2	13.7	48.1	33.0	18.0	48.9	31.3	19.7	48.9
21	Kalimantan Tengah	176	28.4	15.3	56.3	25.0	18.8	56.3	19.9	23.9	56.3
22	Kalimantan Selatan	217	61.3	29.0	9.7	72.4	18.0	9.7	57.6	32.7	9.7
23	Kalimantan Timur	213	23.9	29.1	46.9	28.6	24.4	46.9	25.8	27.2	46.9
24	Sulawesi Utara	167	38.9	16.8	44.3	39.5	16.2	44.3	39.5	16.2	44.3
25	Sulawesi Tengah	163	39.3	23.3	37.4	43.6	19.6	36.8	42.3	20.9	36.8
26	Sulawesi Selatan	406	55.9	26.4	17.7	72.9	9.9	17.2	59.1	23.6	17.2
27	Sulawesi Tenggara	233	19.3	22.7	57.9	21.0	21.0	57.9	18.5	23.6	57.9
28	Gorontalo	74	35.1	16.2	48.6	31.1	20.3	48.6	31.1	20.3	48.6
29	Sulawesi Barat	81	13.6	11.1	75.3	16.0	8.6	75.3	18.5	6.2	75.3
30	Maluku	161	23.0	39.1	37.9	29.2	32.9	37.9	23.6	38.5	37.9
31	Maluku Utara	101	10.9	15.8	73.3	12.9	13.9	73.3	12.9	13.9	73.3
32	Papua Barat	104	12.5	49.0	38.5	14.4	46.2	39.4	7.7	52.9	39.4
33	Papua	294	20.4	63.3	16.3	18.4	65.3	16.3	13.9	69.7	16.3
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	56.4	24.9	18.8	64.6	16.6	18.8	60.1	21.0	18.8
2	Perdesaan	6660	42.8	25.9	31.3	47.5	21.1	31.4	41.9	26.7	31.4
	INDONESIA	**8981**	**46.3**	**25.6**	**28.1**	**51.9**	**19.9**	**28.1**	**46.6**	**25.2**	**28.2**

Tabel 4.8.12.1.b menunjukkan Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kunjungan dan pembinaan kepada masyarakat rentan kesehatan secara nasional adalah 43,7 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi melaksanakan kegiatan kunjungan dan pembinaan kepada masyarakat rentan kesehatan adalah DIY (76,9%), Bali (72,8%), dan DKI Jakarta (72,3%). Sedangkan yang terendah ada di Provinsi Papua Barat (10,6%), Maluku Utara (10,9%) dan DI Aceh (7,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan kunjungan dan pembinaan kepada masyarakat rentan

kesehatan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yaitu 54,6 persen di perkotaaan , sementara di perdesaan hanya 39,9 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan program Perkesmas secara lengkap, yaitu melaksanakan keempat bentuk kegiatan tersebut diatas hanya sebanyak 33,0 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (60,3%), DKI Jakarta (56,5%) dan Jawa Barat (51,4%). Sedangkan terendah di Provinsi Papua Barat (5,8%), Maluku Utara (5,9%) dan DI Aceh (8,0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan lengkap untuk program PERKESMAS ada sebanyak 42,4 persen, sementara di perdesaan 29,8 persen.

Tabel 4.8.12.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat), Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan dan pembinaan kepada masyarakat rentan kesehatan			Kegiatan Lengkap PERKESMAS		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	10.9	47.9	41.2	8.0	50.8	41.2
2	Sumatera Utara	506	19.8	28.5	51.8	13.8	34.6	51.6
3	Sumatera Barat	248	58.5	29.4	12.1	41.9	46.0	12.1
4	Riau	195	49.2	25.6	25.1	34.4	40.5	25.1
5	Jambi	171	28.7	31.6	39.8	23.4	36.8	39.8
6	Sumatera Selatan	298	46.0	24.8	29.2	37.6	33.2	29.2
7	Bengkulu	173	26.0	35.3	38.7	17.3	43.9	38.7
8	Lampung	265	41.5	24.5	34.0	32.5	33.6	34.0
9	Bangka Belitung	57	42.1	54.4	3.5	29.8	66.7	3.5
10	Kepulauan Riau	65	27.7	24.6	47.7	23.1	29.2	47.7
11	DKI Jakarta	336	72.3	23.2	4.5	56.5	39.0	4.5
12	Jawa Barat	1031	64.3	20.4	15.3	51.4	33.3	15.3
13	Jawa Tengah	861	59.5	27.8	12.8	46.6	41.3	12.1
14	DI Yogyakarta	121	76.9	19.8	3.3	60.3	36.4	3.3
15	Jawa Timur	949	56.4	20.3	23.3	42.7	34.0	23.3
16	Banten	206	51.5	24.3	24.3	38.8	36.9	24.3
17	Bali	114	72.8	25.4	1.8	47.4	50.9	1.8
18	Nusa Tenggara Barat	149	35.6	43.6	20.8	29.5	49.7	20.8
19	Nusa Tenggara Timur	302	26.5	28.5	45.0	22.2	32.8	45.0
20	Kalimantan Barat	233	25.3	25.8	48.9	18.9	33.0	48.1
21	Kalimantan Tengah	176	16.5	27.3	56.3	12.5	31.3	56.3
22	Kalimantan Selatan	217	55.3	35.0	9.7	43.3	47.0	9.7
23	Kalimantan Timur	213	22.1	31.0	46.9	16.9	36.2	46.9
24	Sulawesi Utara	167	35.3	19.8	44.9	24.0	31.7	44.3
25	Sulawesi Tengah	163	36.8	26.4	36.8	24.5	38.0	37.4
26	Sulawesi Selatan	406	63.5	19.2	17.2	39.2	43.1	17.7
27	Sulawesi Tenggara	233	16.7	25.3	57.9	12.9	29.2	57.9
28	Gorontalo	74	29.7	21.6	48.6	23.0	28.4	48.6
29	Sulawesi Barat	81	17.3	7.4	75.3	11.1	13.6	75.3
30	Maluku	161	16.8	45.3	37.9	13.7	48.4	37.9
31	Maluku Utara	101	10.9	15.8	73.3	5.9	20.8	73.3
32	Papua Barat	104	10.6	50.0	39.4	5.8	55.8	38.5
33	Papua	294	14.3	69.4	16.3	10.9	72.8	16.3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	54.6	26.5	19.0	42.4	38.6	18.9
2	Perdesaan	6660	39.9	28.6	31.5	29.8	38.9	31.4
	INDONESIA	**8981**	**43.7**	**28.1**	**28.2**	**33.0**	**38.8**	**28.1**

4.8.12.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Perkesmas

Tabel 4.8.12.2.1 menunjukan keberadaan dan jumlah petugas pelaksana Kegiatan program Perkesmas. Secara nasional persentase Puskesmas yang ada petugas pelaksana kegiatan program perkesmas adalah sebanyak 58,2 persen, dengan rincian persentase Puskesmas yang memiliki jumlah petugas pelaksana Perkesmas 1-5 orang sebanyak 25,6 persen, 6-10 orang sebanyak 28,1 persen, 11-20 orang sebanyak 51,9 persen, dan yang memiliki jumlah petugas pelaksana Perkesmas >20 orang sebanyak 19,9 persen. Sementara secara nasional ada 12,2 persen Puskesmas yang tidak memiliki petugas pelaksana untuk program Perkesmas.

Tabel 4.8.12.2.1
Persentase Puskesmas menurut Petugas Program Perawatan Kesehatan Masyarakat Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana Program PERKESMAS					
			% Tidak Ada	% 1 - 5 org	% 6 -10 org	% 11 -20 org	% >20 org	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	42.1	9.3	2.6	1.3	2.6	42.1
2	Sumatera Utara	506	14.2	27.5	2.4	2.0	1.6	52.4
3	Sumatera Barat	248	8.5	50.0	10.5	8.9	7.7	14.5
4	Riau	195	9.2	44.6	7.7	2.6	7.7	28.2
5	Jambi	171	8.8	40.4	2.9	2.9	1.8	43.3
6	Sumatera Selatan	298	7.7	57.7	3.7	1.0	0.7	29.2
7	Bengkulu	173	11.6	45.1	1.2	3.5	0.6	38.2
8	Lampung	265	3.0	43.4	10.9	7.5	1.5	33.6
9	Bangka Belitung	57	12.3	80.7	1.8	0	1.8	3.5
10	Kepulauan Riau	65	13.8	16.9	3.1	9.2	1.5	55.4
11	DKI Jakarta	336	9.5	80.1	4.2	1.2	0.3	4.8
12	Jawa Barat	1031	4.1	60.8	11.5	7.0	0.8	15.8
13	Jawa Tengah	861	13.8	44.5	11.7	13.4	3.5	13.1
14	DI Yogyakarta	121	0.8	27.3	24.8	33.9	7.4	5.8
15	Jawa Timur	949	6.1	35.8	12.8	16.0	5.4	23.9
16	Banten	206	15.5	42.7	7.8	3.4	3.9	26.7
17	Bali	114	2.6	57.9	21.1	12.3	5.3	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	26.2	44.3	4.0	4.7	0.7	20.1
19	Nusa Tenggara Timur	302	10.9	20.9	9.6	7.3	4.0	47.4
20	Kalimantan Barat	233	4.3	33.9	3.9	6.0	1.3	50.6
21	Kalimantan Tengah	176	10.8	22.7	6.3	1.1	1.7	57.4
22	Kalimantan Selatan	217	12.0	51.2	10.6	11.5	2.8	12.0
23	Kalimantan Timur	213	13.1	30.5	4.2	0.9	0.9	50.2
24	Sulawesi Utara	167	6.6	41.9	3.6	3.0	0	44.9
25	Sulawesi Tengah	163	4.3	43.6	3.7	4.3	1.8	42.3
26	Sulawesi Selatan	406	2.7	63.8	6.7	5.2	2.0	19.7
27	Sulawesi Tenggara	233	14.6	24.9	0.4	1.7	0	58.4
28	Gorontalo	74	0	44.6	4.1	2.7	0	48.6
29	Sulawesi Barat	81	3.7	13.6	4.9	2.5	0	75.3
30	Maluku	161	21.7	23.6	3.7	3.1	1.9	46.0
31	Maluku Utara	101	7.9	13.9	2.0	0	0	76.2
32	Papua Barat	104	45.2	9.6	4.8	1.0	0	39.4
33	Papua	294	58.2	14.6	2.7	1.0	1.0	22.4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	9.5	52.3	9.7	5.5	2.7	20.3
2	Perdesaan	6660	13.1	37.4	7.0	7.2	2.3	32.9
	INDONESIA	**8981**	**12.2**	**41.3**	**7.7**	**6.8**	**2.4**	**29.7**

Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana Perkesmas adalah Provinsi Bali (96,5 %), diikuti Provinsi DIY (93,4%), dan Provinsi DKI Jakarta (85,7%). Sedangkan terendah di Provinsi Papua Barat (15,4%), DI Aceh (15,8%) dan Maluku Utara (15,8%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang ada petugas pelaksana kegiatan program Perkesmas sebanyak 70,2 persen, sementara di perdesaan hanya 54,0 persen.

Tabel 4.8.12.2.2. menunjukkan Persentase Puskesmas yang petugasnya menerima pelatihan berkaitan dengan program Perkesmas pada tahun 2009 dan 2010. Secara nasiona persentase puskesmas yang tenaganya mengikuti pelatihan hanya sebanyak 24,1 persen, sementara secara nasional persentase Puskesmas yang petugasnya tidak ada yang mengikuti pelatihan sebanyak 45,8 persen.

Tabel 4.8.12.2.2
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Perawatan Kesehatan Masyarakat , Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Perkesmas			Pedoman Perkesmas		
			%Ya	%Tidak	% TAD	%Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	8.4	49.5	42.1	3.9	55.0	41.2
2	Sumatera Utara	506	12.3	35.8	52.0	6.3	41.9	51.8
3	Sumatera Barat	248	29.4	55.2	15.3	31.0	56.9	12.1
4	Riau	195	35.4	36.9	27.7	30.8	43.1	26.2
5	Jambi	171	18.1	39.8	42.1	18.7	40.4	40.9
6	Sumatera Selatan	298	36.2	33.2	30.5	27.5	43.6	28.9
7	Bengkulu	173	8.1	53.2	38.7	9.2	52.0	38.7
8	Lampung	265	21.1	43.8	35.1	24.9	41.1	34.0
9	Bangka Belitung	57	43.9	52.6	3.5	47.4	49.1	3.5
10	Kepulauan Riau	65	13.8	29.2	56.9	10.8	41.5	47.7
11	DKI Jakarta	336	44.6	49.4	6.0	52.4	43.5	4.2
12	Jawa Barat	1031	42.5	41.5	16.0	55.4	29.0	15.6
13	Jawa Tengah	861	23.2	63.0	13.8	37.6	48.9	13.5
14	DI Yogyakarta	121	56.2	37.2	6.6	68.6	26.4	5.0
15	Jawa Timur	949	25.7	49.3	25.0	28.0	48.6	23.4
16	Banten	206	23.3	51.0	25.7	24.3	51.0	24.8
17	Bali	114	24.6	74.6	0.9	45.6	53.5	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	33.6	46.3	20.1	28.9	49.0	22.1
19	Nusa Tenggara Timur	302	12.9	39.1	48.0	13.9	39.4	46.7
20	Kalimantan Barat	233	19.7	29.6	50.6	21.5	29.2	49.4
21	Kalimantan Tengah	176	13.1	29.5	57.4	11.9	31.3	56.8
22	Kalimantan Selatan	217	21.7	65.9	12.4	44.2	45.2	10.6
23	Kalimantan Timur	213	10.8	39.0	50.2	15.5	34.7	49.8
24	Sulawesi Utara	167	10.2	45.5	44.3	10.8	44.9	44.3
25	Sulawesi Tengah	163	24.5	33.1	42.3	14.1	44.2	41.7
26	Sulawesi Selatan	406	35.5	44.3	20.2	41.1	40.6	18.2
27	Sulawesi Tenggara	233	4.7	36.5	58.8	3.9	37.8	58.4
28	Gorontalo	74	16.2	35.1	48.6	14.9	36.5	48.6
29	Sulawesi Barat	81	6.2	18.5	75.3	3.7	21.0	75.3
30	Maluku	161	11.8	40.4	47.8	3.7	58.4	37.9
31	Maluku Utara	101	3.0	17.8	79.2	5.0	21.8	73.3
32	Papua Barat	104	7.7	52.9	39.4	4.8	56.7	38.5
33	Papua	294	8.8	67.7	23.5	6.8	76.9	16.3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	31.5	47.3	21.2	38.0	42.7	19.3
2	Perdesaan	6660	21.5	45.3	33.2	24.1	44.0	32.0
	INDONESIA	**8981**	**24.1**	**45.8**	**30.1**	**27.7**	**43.6**	**28.7**

Persentase tertinggi yang mengikuti pelatihan ada di Provinsi DIY (56,2%), diikuti Provinsi DKI Jakarta (44,6%), dan Bangka Belitung (43,9%). Sementara provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya tidak mengikuti pelatihan adalah Provinsi Bali (74,6%), Papua (67,7%) dan Kalimantan Selatan (65,9%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang petugas pelaksana kegiatan PERKESMAS nya mengikuti pelatihan ada sebanyak 31,5 persen, sementara di perdesaan 21,5 persen.

Tabel 4.8.12.2.2. juga memperlihatkan Persentase Puskesmas menurut keberadaan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan program Perkesmas. Secara nasional hanya 27,7 persen (di perkotaan 38,0%, di perdesaan 24,1%) yang mempunyai Pedoman. Persentase tertinggi ada di Provinsi DIY (68,6 %), diikuti Provinsi Jawa Barat (55,4%), dan DKI Jakarta (52,4%). Sementara persentase terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat (3,7%), Maluku (3,7%), DI Aceh (3,9%) dan Sulawesi Tenggara (3,9%).

4.8.12.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perkesmas

Bimbingan Teknis dan Monitoring Program Perkesmas yang dikumpulkan pada Rifas 2011 meliputi kunjungan dari petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk melakukan supervisi program Perkesmas, keberadaan Umpan balik laporan cakupan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas dan keikutsertaan puskesmas pada Pertemuan monitoring dan evaluasi program perkesmas yang di diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota selama tahun 2010.

Tabel 4.8.12.3.a memperlihatkan persentase puskesmas yang mendapat Bimbingan Teknis dan Monitoring dalam bentuk Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dalam bentuk Umpan balik laporan cakupan Program Perkesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Tabel 4.8.12.3.b menunjukkan persentase Puskesmas yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program Perkesmas dan persentase Puskesmas yang lengkap menerima ketiga bentuk Bimbingan Teknis dan Monitoring program Perkesmas..

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mendapat Bimbingan Teknis dan Monitoring dalam bentuk Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah 25,7 persen, dimana persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 35,2 persen, dan di perdesaan 22,4 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi menerima Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah DKI Jakarta (54,8%), DIY (52,1%) dan Jawa Barat (46,7%). Sementara provinsi terendah adalah Maluku (0,6 %), Maluku Utara (2,0 %), dan Sulawesi Tenggara (2,6%).

Persentase Puskesmas yang mendapatkan Bimbingan Teknis dan Monitoring dalam bentuk Umpan balik laporan cakupan Program Perkesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota selama tahun 2010 secara Nasional adalah sebesar 21,2 persen, di perkotaan sebanyak 29,6 persen, dan di perdesaan 18,2 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Barat (50,8%), DKI Jakarta (45,5%) dan DIY (43,8%). Sementara persentase terendah adalah Maluku Utara (1,0%), Sulawesi Tenggara (1,3%), dan Kalimantan Tengah (2,8%).

Tabel 4.8.12.3.a
Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Perawatan Kesehatan Masyarakat , Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan petugas Dinkes Kab/Kota untuk supervisi/bimbingan Perkesmas			Umpan balik laporan cakupan program Perkesmas selama tahun 2010		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	5.5	53.4	41.2	2.9	55.9	41.2
2	Sumatera Utara	506	9.3	38.5	52.2	4.9	42.9	52.2
3	Sumatera Barat	248	22.2	65.7	12.1	19.0	69.0	12.1
4	Riau	195	19.5	54.4	26.2	17.4	56.4	26.2
5	Jambi	171	15.8	42.7	41.5	8.8	49.7	41.5
6	Sumatera Selatan	298	29.2	41.9	28.9	26.2	45.0	28.9
7	Bengkulu	173	15.6	45.7	38.7	9.8	51.4	38.7
8	Lampung	265	23.0	43.0	34.0	12.8	53.2	34.0
9	Bangka Belitung	57	43.9	52.6	3.5	29.8	66.7	3.5
10	Kepulauan Riau	65	16.9	35.4	47.7	12.3	40.0	47.7
11	DKI Jakarta	336	54.8	41.1	4.2	45.5	50.0	4.5
12	Jawa Barat	1031	46.7	37.8	15.5	50.8	33.6	15.6
13	Jawa Tengah	861	31.7	55.2	13.1	25.4	61.4	13.1
14	DI Yogyakarta	121	52.1	43.0	5.0	43.8	52.1	4.1
15	Jawa Timur	949	39.4	37.3	23.3	30.1	46.6	23.3
16	Banten	206	29.6	46.1	24.3	26.2	49.5	24.3
17	Bali	114	38.6	59.6	1.8	17.5	81.6	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	28.2	51.0	20.8	20.8	58.4	20.8
19	Nusa Tenggara Timur	302	10.6	42.4	47.0	7.0	46.0	47.0
20	Kalimantan Barat	233	15.5	34.8	49.8	12.9	37.3	49.8
21	Kalimantan Tengah	176	5.7	37.5	56.8	2.8	40.3	56.8
22	Kalimantan Selatan	217	26.3	63.1	10.6	22.1	67.3	10.6
23	Kalimantan Timur	213	9.4	40.8	49.8	6.1	44.1	49.8
24	Sulawesi Utara	167	16.2	39.5	44.3	12.6	43.1	44.3
25	Sulawesi Tengah	163	7.4	50.3	42.3	4.3	53.4	42.3
26	Sulawesi Selatan	406	36.5	45.1	18.5	22.4	59.1	18.5
27	Sulawesi Tenggara	233	2.6	39.1	58.4	1.3	40.3	58.4
28	Gorontalo	74	23.0	28.4	48.6	17.6	33.8	48.6
29	Sulawesi Barat	81	7.4	17.3	75.3	7.4	17.3	75.3
30	Maluku	161	0.6	61.5	37.9		62.1	37.9
31	Maluku Utara	101	2.0	24.8	73.3	1.0	25.7	73.3
32	Papua Barat	104	3.8	57.7	38.5	4.8	56.7	38.5
33	Papua	294	5.1	78.6	16.3	4.1	79.6	16.3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	35.2	45.5	19.3	29.6	51.1	19.4
2	Perdesaan	6660	22.4	45.6	32.0	18.2	49.8	32.0
	INDONESIA	**8981**	**25.7**	**45.6**	**28.7**	**21.2**	**50.1**	**28.7**

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program Perkesmas yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kab/ Kota, adalah 26,2 persen, (di perkotaan sebanyak 37,9 persen, sementara di perdesaan 22,1 persen). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring evaluasi perkesmas adalah DIY (68,6%), DKI Jakarta (60,4%) dan Jawa Barat (59,0%). Sementara presetase terendah adalah Maluku Utara (1,0%), Maluku (1,2%), dan Sulawesi Tenggara (2,1%).

Persentase Puskesmas yang mendapatkan monitoring dan bimbingan teknis lengkap untuk program Perkesmas secara nasional adalah sebanyak 16,3 persen (persentase di perkotaan 24,9% dan di perdesaan 13,3%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DKI Jakarta (42,3%), Jawa Barat (39,7 %), dan DIY (32,2%). Sementara ada dua provinsi yang seluruh Puskesmasnya tidak mendapatkan monitoring dan bimbingan teknis lengkap untuk program Perkesmas (0%) yaitu Maluku Utara dan Maluku, sementara provinsi Sulawesi Tenggara hanya 0,4 persen.

Tabel 4.8.12.3.b
Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Perawatan Kesehatan Masyarakat Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pertemuan monev program Perkesmas			Bimbingan Teknis Lengkap Program Perkesmas		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	4.2	54.7	41.2	2.3	56.6	41.2
2	Sumatera Utara	506	13.2	34.6	52.2	3.6	44.3	52.2
3	Sumatera Barat	248	20.2	67.7	12.1	13.3	74.6	12.1
4	Riau	195	20.5	53.3	26.2	13.8	60.0	26.2
5	Jambi	171	12.9	45.6	41.5	4.7	53.8	41.5
6	Sumatera Selatan	298	24.2	47.0	28.9	17.4	53.7	28.9
7	Bengkulu	173	6.9	54.3	38.7	4.0	57.2	38.7
8	Lampung	265	13.6	52.5	34.0	8.7	57.4	34.0
9	Bangka Belitung	57	43.9	52.6	3.5	14.0	82.5	3.5
10	Kepulauan Riau	65	13.8	38.5	47.7	12.3	40.0	47.7
11	DKI Jakarta	336	60.4	34.8	4.8	42.3	53.6	4.2
12	Jawa Barat	1031	59.0	25.2	15.8	39.7	44.7	15.6
13	Jawa Tengah	861	30.5	56.2	13.2	18.7	68.3	13.0
14	DI Yogyakarta	121	68.6	27.3	4.1	32.2	63.6	4.1
15	Jawa Timur	949	39.0	37.6	23.4	26.0	50.6	23.4
16	Banten	206	29.6	46.1	24.3	23.3	52.4	24.3
17	Bali	114	28.9	70.2	0.9	14.9	84.2	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	30.9	48.3	20.8	17.4	61.7	20.8
19	Nusa Tenggara Timur	302	9.6	43.4	47.0	4.3	48.7	47.0
20	Kalimantan Barat	233	13.3	36.9	49.8	11.6	38.6	49.8
21	Kalimantan Tengah	176	3.4	39.8	56.8	2.3	40.9	56.8
22	Kalimantan Selatan	217	30.9	57.6	11.5	15.7	73.7	10.6
23	Kalimantan Timur	213	8.5	41.8	49.8	4.2	46.0	49.8
24	Sulawesi Utara	167	9.6	46.1	44.3	5.4	50.3	44.3
25	Sulawesi Tengah	163	6.7	50.3	42.9	1.8	55.8	42.3
26	Sulawesi Selatan	406	28.8	52.7	18.5	14.0	67.5	18.5
27	Sulawesi Tenggara	233	2.1	39.5	58.4	0.4	41.2	58.4
28	Gorontalo	74	21.6	29.7	48.6	13.5	37.8	48.6
29	Sulawesi Barat	81	6.2	18.5	75.3	4.9	19.8	75.3
30	Maluku	161	1.2	60.9	37.9	0	62.1	37.9
31	Maluku Utara	101	1.0	25.7	73.3	0	26.7	73.3
32	Papua Barat	104	5.8	54.8	39.4	3.8	57.7	38.5
33	Papua	294	4.1	79.6	16.3	3.4	80.3	16.3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	37.9	42.7	19.4	24.9	55.8	19.3
2	Perdesaan	6660	22.1	45.8	32.1	13.3	54.7	32.0
	INDONESIA	**8981**	**26.2**	**45.0**	**28.8**	**16.3**	**55.0**	**28.7**

4.8.13. PROGRAM KESEHATAN KERJA

4.8.13.1. Kegiatan Program Kesehatan Kerja

Kegiatan UKS yang dikumpulkan pada Rifas 2011 adalah yang dilakukan oleh tenaga Puskesmas tahun 2010, terdiri dari Kunjungan/pemeriksaan ke tempat kerja, dan Pembinaan pos upaya kesehatan kerja.

Tabel 4.8.13.1 menunjukkan Persentase Puskesmas melaksanakan kunjungan/ pemeriksaan ke tempat kerja secara nasional hanya 20,8 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Bali (52,6%), Jawa Tengah (38,9%) dan Jawa Timur (36,0%). Sedangkan terendah adalah Provinsi Papua Barat (1,0%), Maluku Utara (1,0%) dan Papua (3,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan kunjungan/pemeriksaan ke tempat kerja hanya sebanyak 26,0 persen, sementara di perdesaan 19,0 persen.

Tabel 4.8.13.1
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Kerja, Rifaskes 2011

No.	Provinsi	Jml Pusk	Kunjungan/ pemeriksaan ke tempat kerja			Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja			Kegiatan Lengkap Program Kesehatan Kerja		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	4.5	48.2	47.3	1.9	50.8	47.3	1.9	50.8	47.3
2	Sumatera Utara	506	6.1	22.9	70.9	4.3	24.7	70.9	3.8	25.3	70.9
3	Sumatera Barat	248	25.4	37.9	36.7	16.9	46.4	36.7	14.9	48.4	36.7
4	Riau	195	25.6	41.0	33.3	20.5	46.2	33.3	19.5	47.2	33.3
5	Jambi	171	15.2	25.7	59.1	8.8	32.2	59.1	8.2	32.7	59.1
6	Sumatera Selatan	298	21.1	23.5	55.4	16.4	27.5	56.0	14.1	30.5	55.4
7	Bengkulu	173	10.4	28.3	61.3	4.0	34.7	61.3	4.0	34.7	61.3
8	Lampung	265	15.5	13.2	71.3	8.3	19.2	72.5	8.3	20.0	71.7
9	Bangka Belitung	57	26.3	61.4	12.3	19.3	68.4	12.3	12.3	75.4	12.3
10	Kepulauan Riau	65	29.2	40.0	30.8	26.2	43.1	30.8	21.5	47.7	30.8
11	DKI Jakarta	336	8.3	63.4	28.3	7.1	64.6	28.3	5.7	66.1	28.3
12	Jawa Barat	1031	28.4	28.8	42.8	19.8	37.3	42.9	18.2	39.0	42.8
13	Jawa Tengah	861	38.9	36.9	24.2	28.7	46.5	24.9	27.1	48.8	24.2
14	DI Yogyakarta	121	35.5	28.9	35.5	23.1	41.3	35.5	19.0	45.5	35.5
15	Jawa Timur	949	36.0	22.8	41.2	25.7	32.7	41.6	23.1	35.7	41.2
16	Banten	206	32.5	32.0	35.4	15.5	48.5	35.9	13.6	51.0	35.4
17	Bali	114	52.6	43.0	4.4	19.3	76.3	4.4	14.9	80.7	4.4
18	Nusa Tenggara Barat	149	28.2	44.3	27.5	22.8	49.7	27.5	22.1	50.3	27.5
19	Nusa Tenggara Timur	302	3.6	24.5	71.9	2.3	25.8	71.9	2.3	25.8	71.9
20	Kalimantan Barat	233	12.0	12.4	75.5	6.4	17.2	76.4	6.4	18.0	75.5
21	Kalimantan Tengah	176	9.7	19.3	71.0	6.8	22.7	70.5	6.3	22.7	71.0
22	Kalimantan Selatan	217	15.2	53.0	31.8	7.4	60.8	31.8	6.9	61.3	31.8
23	Kalimantan Timur	213	5.6	25.4	69.0	2.3	28.2	69.5	2.3	28.6	69.0
24	Sulawesi Utara	167	10.8	13.8	75.4	4.2	20.4	75.4	4.2	20.4	75.4
25	Sulawesi Tengah	163	16.6	17.2	66.3	8.0	25.8	66.3	6.7	27.0	66.3
26	Sulawesi Selatan	406	29.6	18.0	52.5	22.4	23.2	54.4	19.7	27.6	52.7
27	Sulawesi Tenggara	233	4.3	22.3	73.4	2.6	24.0	73.4	2.6	24.0	73.4
28	Gorontalo	74	23.0	32.4	44.6	14.9	41.9	43.2	12.2	44.6	43.2
29	Sulawesi Barat	81	7.4	2.5	90.1	7.4	2.5	90.1	6.2	3.7	90.1
30	Maluku	161	6.8	41.0	52.2	5.0	42.9	52.2	3.7	44.1	52.2
31	Maluku Utara	101	1.0	16.8	82.2	0	17.8	82.2	0	17.8	82.2
32	Papua Barat	104	1.0	52.9	46.2	0	53.8	46.2	0	53.8	46.2
33	Papua	294	3.1	75.9	21.1	1.4	77.6	21.1	1.4	77.6	21.1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	26.0	34.8	39.2	17.0	43.7	39.3	15.2	45.6	39.2
2	Perdesaan	6660	19.0	30.3	50.6	13.1	35.9	51.0	11.9	37.4	50.6
	INDONESIA	**8981**	**20.8**	**31.5**	**47.7**	**14.1**	**37.9**	**48.0**	**12.8**	**39.5**	**47.7**

Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan pembinaan pos upaya kesehatan kerja secara nasional hanya 14,1 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Tengah (28,7%), Kepulauan Riau (26,2%) dan Jawa Timur (25,7%). Masih ada 2 provinsi yang tidak ada kegiatan pembinaan pos upaya kesehatan kerja (0%), yaitu Papua Barat dan Maluku Utara. Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan pembinaan pos upaya kesehatan ada sebanyak 17,0 persen, sementara di perdesaan 13,1 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan lengkap program Kesehatan kerja, yaitu melaksanakan kedua kegiatan tersebut diatas hanya sebanyak 12,8 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Tengah (27,1%), Jawa Timur (23,1%) dan NTB (22,1%). Ada 2 provinsi yang tidak ada kegiatan pembinaan pos upaya kesehatan kerja (0%), yaitu Papua Barat dan Maluku Utara. Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan lengkap program Kesehatan kerja ada sebanyak 15,2 persen, sementara di perdesaan 11,9 persen.

4.8.13.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Kerja

Tabel 4.8.13.2.1 menunjukan bahwa persentase Puskesmas menurut keberadaan tenaga pelaksana Kegiatan program kesehatan kerja.

Secara nasional hanya 30,8 persen, Puskesmas yang mempunyai petugas pelaksana kesehatan kerja dengan rincian 1- 5 orang sebanyak 25,9 persen, 6-10 orang sebanyak 0,7 persen, 11-20 orang sebanyak 0,3 persen, dan >20 orang sebanyak 0,2 persen. Sementara secara nasional ada 19,3 persen Puskesmas yang tidak memiliki petugas pelaksana untuk program kesehatan kerja. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana kesehatan kerja adalah Provinsi Bali (93,0 %), diikuti Provinsi Bangka Belitung (77,2 %), dan Provinsi DIY (57,0 %). Sedangkan terendah di Provinsi Papua Barat (1,0%), Papua (4,1 %), dan NTT (4,3%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang ada petugas pelaksana kegiatan Kesehatan Kerja ada sebanyak 38,6 persen, sementara di perdesaan 28,1 persen.

Tabel 4.8.13.2.1
Persentase Puskesmas menurut Petugas Program Kesehatan Kerja, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana Program Kesehatan Kerja					
			% Tidak Ada	% 1 - 5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	43.7	8.4	0	0	0.6	47.3
2	Sumatera Utara	506	16.6	10.3	0.2	0.2	0.8	71.9
3	Sumatera Barat	248	20.6	40.7	0.8	0.4	0.4	37.1
4	Riau	195	27.2	32.8	1.5	0	0.5	37.9
5	Jambi	171	14.6	24.0	0	0	0	61.4
6	Sumatera Selatan	298	10.4	31.5	0	0	0.7	57.4
7	Bengkulu	173	20.8	17.3	0	0	0	61.8
8	Lampung	265	4.5	22.6	0.4	0	0	72.5
9	Bangka Belitung	57	10.5	75.4	0	0	1.8	12.3
10	Kepulauan Riau	65	13.8	49.2	1.5	3.1	0	32.3
11	DKI Jakarta	336	52.4	14.9	0.3	0	0	32.4
12	Jawa Barat	1031	13.1	42.1	0.6	0	0.1	44.1
13	Jawa Tengah	861	23.3	47.5	1.4	0.8	0.2	26.7
14	DI Yogyakarta	121	7.4	50.4	4.1	2.5	0	35.5
15	Jawa Timur	949	9.0	45.3	1.3	1.4	0.1	43.0
16	Banten	206	15.5	45.1	1.5	0	0.5	37.4
17	Bali	114	1.8	88.6	0.9	0.9	2.6	5.3
18	Nusa Tenggara Barat	149	31.5	40.3	0	0	0	28.2
19	Nusa Tenggara Timur	302	21.5	4.3	0	0	0	74.2
20	Kalimantan Barat	233	6.0	16.3	0	0	0	77.7
21	Kalimantan Tengah	176	11.4	15.9	1.1	0	0	71.6
22	Kalimantan Selatan	217	39.2	24.9	1.8	0	0.5	33.6
23	Kalimantan Timur	213	16.0	9.4	0.9	0	0	73.7
24	Sulawesi Utara	167	11.4	12.6	0	0	0	76.0
25	Sulawesi Tengah	163	7.4	22.1	0	0	0	70.6
26	Sulawesi Selatan	406	3.7	37.7	1.2	0	0	57.4
27	Sulawesi Tenggara	233	16.7	9.4	0	0	0	73.8
28	Gorontalo	74	1.4	54.1	0	0	0	44.6
29	Sulawesi Barat	81		9.9	0	0	0	90.1
30	Maluku	161	27.3	9.9	0.6	0	0	62.1
31	Maluku Utara	101	3.0	12.9	0	0	0	84.2
32	Papua Barat	104	51.0	1.0	0	0	0	48.1
33	Papua	294	68.4	3.1	0.7	0.3	0	27.6
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	19.9	37.1	0.8	0.3	0.5	41.5
2	Perdesaan	6660	19.1	26.9	0.7	0.3	0.1	52.8
	INDONESIA	**8981**	**19.3**	**29.5**	**0.7**	**0.3**	**0.2**	**49.9**

Pada Tabel 4.8.13.2.2 terlihat Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan petugas pada pelatihan berkaitan dengan program Kesehatan kerja pada tahun 2009 dan 2010.

Tabel 4.8.13.2.2
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Kerja, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Petugas			Pedoman Kesehatan Kerja		
			%Ya	%Tidak	% TAD	%Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	6.1	46.3	47.6	1.0	51.4	47.6
2	Sumatera Utara	506	6.5	21.5	71.9	4.0	24.9	71.1
3	Sumatera Barat	248	14.1	48.0	37.9	15.3	48.0	36.7
4	Riau	195	24.6	37.4	37.9	15.9	49.2	34.9
5	Jambi	171	17.0	22.8	60.2	8.2	32.2	59.6
6	Sumatera Selatan	298	21.5	21.1	57.4	18.8	24.8	56.4
7	Bengkulu	173	4.0	34.1	61.8	1.7	36.4	61.8
8	Lampung	265	13.2	14.3	72.5	15.5	12.1	72.5
9	Bangka Belitung	57	45.6	42.1	12.3	56.1	31.6	12.3
10	Kepulauan Riau	65	47.7	20.0	32.3	41.5	26.2	32.3
11	DKI Jakarta	336	14.0	53.6	32.4	10.1	61.3	28.6
12	Jawa Barat	1031	24.6	31.1	44.2	24.0	32.1	43.9
13	Jawa Tengah	861	22.8	49.8	27.4	30.7	43.2	26.1
14	DI Yogyakarta	121	31.4	33.1	35.5	34.7	29.8	35.5
15	Jawa Timur	949	21.6	34.5	43.9	25.5	32.6	41.9
16	Banten	206	36.9	25.7	37.4	31.6	31.6	36.9
17	Bali	114	50.0	44.7	5.3	56.1	39.5	4.4
18	Nusa Tenggara Barat	149	25.5	45.6	28.9	24.2	47.7	28.2
19	Nusa Tenggara Timur	302	0.7	24.8	74.5	1.3	25.2	73.5
20	Kalimantan Barat	233	12.4	9.9	77.7	9.4	13.7	76.8
21	Kalimantan Tengah	176	12.5	15.3	72.2	10.8	18.8	70.5
22	Kalimantan Selatan	217	16.6	49.8	33.6	13.4	54.8	31.8
23	Kalimantan Timur	213	5.2	21.6	73.2	4.7	22.1	73.2
24	Sulawesi Utara	167	4.8	19.8	75.4	3.6	21.0	75.4
25	Sulawesi Tengah	163	11.0	18.4	70.6	11.0	19.0	69.9
26	Sulawesi Selatan	406	19.7	22.2	58.1	16.3	26.8	56.9
27	Sulawesi Tenggara	233	3.0	23.2	73.8	1.7	24.5	73.8
28	Gorontalo	74	18.9	36.5	44.6	5.4	50.0	44.6
29	Sulawesi Barat	81	6.2	3.7	90.1	6.2	3.7	90.1
30	Maluku	161	3.7	34.8	61.5	0.6	47.2	52.2
31	Maluku Utara	101	9.9	4.0	86.1	8.9	8.9	82.2
32	Papua Barat	104	1.0	51.0	48.1	0	52.9	47.1
33	Papua	294	4.1	68.0	27.9	1.0	77.9	21.1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	23.6	34.6	41.8	22.0	38.2	39.9
2	Perdesaan	6660	14.3	32.7	53.0	14.2	33.9	51.9
	INDONESIA	**8981**	**16.7**	**33.2**	**50.1**	**16.2**	**35.0**	**48.8**

Secara nasional hanya sebanyak 16,7 persen Puskesmas yang mengikuti pelatihan Program kesehatan kerja , sementara puskesmas yang petugasnya tidak mengikuti pelatihan sebanyak 33,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ada di Provinsi Provinsi Bali (50,0 %), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (47,7 %), dan Bangka Belitung (45,6 %). Sedangkan terendah diProvinsi Provinsi NTT (0,7 %), diikuti Papua Barat (1,0 %), dan Sulawesi Tenggara (3,0 %). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang petugas pelaksana kegiatan Kesehatan kerja nya mengikuti pelatihan pada tahun 2009 dan atau 2010 ada sebanyak 23,6 persen, sementara di perdesaan 14,3 persen.

Persentase Puskesmas menurut keberadaan pedoman Program Kesehatan kerja secara nasional hanya 16,2 persen (di perkotaan 22,0%, di perdesaan 14,2%). Tertinggi di Provinsi DI Aceh (56,1%), Sumatera Utara (56,1 %), dan Sumatera Barat (41,5 %). Seluruh

Puskesmas di Provinsi Papua tidak memiliki pedoman program kesehatan kerja (0%), sementara provinsi terendah lainnya yaitu Papua Barat (0,6 %), dan Maluku Utara (1,0 %).

4.8.13.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Kerja

Monitoring dan Bimbingan Teknis Program kesehatan Kerja yang dikumpulkan pada Rifas 2011 terdiri dari bimbingan Teknis dalam bentuk kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Puskesmas, Umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan kab/Kota terhadap laporan kegiatankesehatan Kerja, dan keikutsertaan Puskesmas pada pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program kesehatan Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010 seperti terlihat pada tabel 4.8.13.3.a dan tabel 4.8.13.3 b.

Monitoring dan Bimbingan teknis yang diterima puskesmas dalam bentuk kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota program kesehatan kerja selama tahun 2010 secara nasional, hanya 13,3 persen, di perkotaan sebanyak 17,6 persen, sementara di perdesaan 11,8 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Bali (54,4 %), Banten (35,0%) dan Jawa Timur (27,4 %),. Sementara itu masih ada provinsi yang seluruh Puskesmasnya tidak mendapat kunjungan supervise program kesehatan kerja (0%) yaitu Maluku dan Papua Barat, sementara terendah provinsi NTT (0,7%) dan Papua (1,4%).

Secara Nasional persentase Puskesmas yang mendapatkan Bimbingan Teknis dan Monitoring dalam bentuk Umpan balik laporan cakupan Program Kesehatan Kerja dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota selama tahun 2010, hanya 9,8 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 12,3 persen, sementara di perdesaan 9,0 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik adalah Banten (27,7 %), Jawa Timur (21,3 %) dan Bangka Belitung (21,1 %). Sementara itu ada provinsi yang seluruh Puskesmasnya tidak mendapat umpan balik dari dinas kesehatan Kab/Kota (0%) yaitu Provinsi Maluku, sedangkan NTT dan Sulawesi Tenggara menerima umpan balik masing-masing hanya 0,7 dan 0,9 persen.

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program Kesehatan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kab/ Kota, adalah 12,8 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 16,9 persen, sementara di perdesaan 11,4 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Banten (35,0 %), Bali (28,9 %) dan Jawa Timur (26,6 %). Sementara itu masih ada provinsi yang seluruh Puskesmasnya tidak mengikuti Monitoring dan evaluasi (0%) yaitu Papua Barat dan Maluku.

Persentase Puskesmas yang mendapatkan monitoring dan bimbingan teknis lengkap (menerima ketiga bentuk Monitoring dan Bimbingan teknis) program kesehatan kerja secara nasional adalah sebanyak 7,5 persen (persentase di perkotaan 9,9% dan di perdesaan 6,7%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Banten (25,2 %), Jawa Timur (17,7%) dan Jawa Barat (14,7%). Sementara itu masih ada provinsi yang seluruh Puskesmasnya tidak mendapat Monitoring dan bimbingan teknis lengkap dari dinas kesehatan Kab/Kota (0%) yaitu Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat.

Tabel 4.8.13.3.a
Persentase Puskesmas menurut Bimbingan Teknis Program Kesehatan Kerja, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan petugas Dinkes Kab/Kota untuk supervisi/bimbingan			Umpan balik laporan cakupan program Kesehatan Kerja		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	1.3	51.4	47.3	1.6	51.1	47.3
2	Sumatera Utara	506	3.2	25.7	71.1	2.6	26.3	71.1
3	Sumatera Barat	248	8.5	54.8	36.7	4.8	58.5	36.7
4	Riau	195	10.3	55.4	34.4	10.3	55.4	34.4
5	Jambi	171	8.2	31.6	60.2	4.7	35.1	60.2
6	Sumatera Selatan	298	14.1	29.9	56.0	12.8	31.2	56.0
7	Bengkulu	173	12.7	25.4	61.8	5.8	32.4	61.8
8	Lampung	265	8.3	19.2	72.5	4.2	23.4	72.5
9	Bangka Belitung	57	21.1	66.7	12.3	21.1	66.7	12.3
10	Kepulauan Riau	65	20.0	47.7	32.3	9.2	58.5	32.3
11	DKI Jakarta	336	4.5	67.0	28.6	3.3	68.2	28.6
12	Jawa Barat	1031	20.3	35.9	43.8	19.1	37.0	43.9
13	Jawa Tengah	861	22.6	51.5	25.9	17.5	56.3	26.1
14	DI Yogyakarta	121	18.2	46.3	35.5	9.9	54.5	35.5
15	Jawa Timur	949	27.4	30.2	42.4	21.3	36.1	42.6
16	Banten	206	35.0	28.6	36.4	27.7	35.9	36.4
17	Bali	114	54.4	41.2	4.4	15.8	79.8	4.4
18	Nusa Tenggara Barat	149	13.4	58.4	28.2	8.1	63.8	28.2
19	Nusa Tenggara Timur	302	0.7	25.8	73.5	0.7	25.8	73.5
20	Kalimantan Barat	233	4.7	18.5	76.8	3.4	19.7	76.8
21	Kalimantan Tengah	176	5.1	24.4	70.5	1.7	27.8	70.5
22	Kalimantan Selatan	217	8.8	59.4	31.8	5.5	62.7	31.8
23	Kalimantan Timur	213	5.2	21.6	73.2	2.3	24.4	73.2
24	Sulawesi Utara	167	4.8	19.8	75.4	3.0	21.6	75.4
25	Sulawesi Tengah	163	4.3	23.9	71.8	1.8	26.4	71.8
26	Sulawesi Selatan	406	12.1	31.0	56.9	6.2	36.9	56.9
27	Sulawesi Tenggara	233	1.7	24.5	73.8	0.9	24.9	74.2
28	Gorontalo	74	23.0	32.4	44.6	13.5	41.9	44.6
29	Sulawesi Barat	81	6.2	3.7	90.1	4.9	4.9	90.1
30	Maluku	161	0	47.8	52.2	0	47.8	52.2
31	Maluku Utara	101	5.9	11.9	82.2	5.0	12.9	82.2
32	Papua Barat	104		52.9	47.1	1.0	51.9	47.1
33	Papua	294	1.4	77.6	21.1	1.4	77.6	21.1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	17.6	42.5	39.9	12.3	47.7	40.0
2	Perdesaan	6660	11.8	36.4	51.9	9.0	39.1	51.9
	INDONESIA	8981	13.3	37.9	48.8	9.8	41.3	48.8

Tabel 4.8.13.3.b
Persentase Puskesmas menurut Bimbingan Teknis Program Kesehatan Kerja, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pertemuan monev program Kesehatan Kerja			Bimbingan Teknis Lengkap Program Kesehatan Kerja		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	1.9	50.8	47.3	0.6	52.1	47.3
2	Sumatera Utara	506	3.0	25.9	71.1	1.6	27.3	71.1
3	Sumatera Barat	248	9.3	54.0	36.7	4.4	58.9	36.7
4	Riau	195	14.4	51.3	34.4	6.7	59.0	34.4
5	Jambi	171	7.6	32.2	60.2	3.5	36.3	60.2
6	Sumatera Selatan	298	11.1	32.6	56.4	8.1	35.9	56.0
7	Bengkulu	173	0.6	37.6	61.8	0.6	37.6	61.8
8	Lampung	265	6.4	21.1	72.5	2.6	24.9	72.5
9	Bangka Belitung	57	26.3	61.4	12.3	10.5	77.2	12.3
10	Kepulauan Riau	65	15.4	52.3	32.3	6.2	61.5	32.3
11	DKI Jakarta	336	6.0	65.5	28.6	3.0	68.5	28.6
12	Jawa Barat	1031	22.7	33.1	44.2	14.7	41.3	43.9
13	Jawa Tengah	861	23.8	49.6	26.6	13.8	60.2	26.0
14	DI Yogyakarta	121	15.7	48.8	35.5	7.4	57.0	35.5
15	Jawa Timur	949	26.6	30.7	42.8	17.7	39.8	42.5
16	Banten	206	35.0	28.6	36.4	25.2	38.3	36.4
17	Bali	114	28.9	66.7	4.4	10.5	85.1	4.4
18	Nusa Tenggara Barat	149	9.4	61.7	28.9	4.0	67.8	28.2
19	Nusa Tenggara Timur	302	0.7	25.8	73.5	0.3	26.2	73.5
20	Kalimantan Barat	233	5.2	17.6	77.3	3.0	20.2	76.8
21	Kalimantan Tengah	176	3.4	25.6	71.0	0.6	29.0	70.5
22	Kalimantan Selatan	217	12.0	56.2	31.8	5.1	63.1	31.8
23	Kalimantan Timur	213	3.8	23.0	73.2	2.3	24.4	73.2
24	Sulawesi Utara	167	4.8	19.8	75.4	2.4	22.2	75.4
25	Sulawesi Tengah	163	1.2	27.0	71.8	0.6	27.6	71.8
26	Sulawesi Selatan	406	13.3	29.8	56.9	4.4	38.7	56.9
27	Sulawesi Tenggara	233	0.9	24.9	74.2	0	26.2	73.8
28	Gorontalo	74	20.3	35.1	44.6	12.2	43.2	44.6
29	Sulawesi Barat	81	2.5	7.4	90.1	2.5	7.4	90.1
30	Maluku	161	0	47.8	52.2		47.8	52.2
31	Maluku Utara	101	2.0	15.8	82.2	2.0	15.8	82.2
32	Papua Barat	104		52.9	47.1		52.9	47.1
33	Papua	294	1.0	77.9	21.1	1.0	77.9	21.1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	16.9	43.0	40.1	9.9	50.2	39.9
2	Perdesaan	6660	11.4	36.5	52.1	6.7	41.4	51.9
	INDONESIA	8981	12.8	38.2	49.0	7.5	43.7	48.8

4.8.14. PROGRAM KESEHATAN GIGI DAN MULUT

4.8.14.1. Kegiatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut

Kegiatan Kesehatan Gigi dan Mulut yang dikumpulkan pada Rifas 2011 adalah yang dilakukan oleh tenaga Puskesmas tahun 2010, terdiri dari Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan di dalam Puskesmas (poliklinik gigi), Kegiatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan) Kegiatan UKGMD (Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa). Tabel 4.8.14.1a menunjukan keberadaan dan frekuensi kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam puskesmas.

Tabel 4.8.14.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Puskesmas						
			% Setiap hari	% 2-4x Seminggu	% 1x Seminggu	% 1-3x Sebulan	% Tidak Menentu	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi								
1	DI Aceh	311	72.0	1.0	0.3	0	5.1	11.9	9.6
2	Sumatera Utara	506	68.8	3.4	1.2	0.8	7.1	9.5	9.3
3	Sumatera Barat	248	94.0	0	0.4	0.4	2.8	2.0	0.4
4	Riau	195	85.1	1.0	0.5	1.5	4.1	2.1	5.6
5	Jambi	171	84.2	0.6	0.6	1.2	2.3	4.1	7.0
6	Sumatera Selatan	298	66.8	2.7	0.7	1.7	5.7	8.1	14.4
7	Bengkulu	173	52.0	3.5	0	0.6	6.4	12.1	25.4
8	Lampung	265	70.6	5.7	0.4	0.8	3.4	2.6	16.6
9	Bangka Belitung	57	93.0	1.8	0	0	1.8	3.5	0
10	Kepulauan Riau	65	87.7	0	0	1.5	1.5	4.6	4.6
11	DKI Jakarta	336	83.6	5.1	0.6	1.5	3.3	3.6	2.4
12	Jawa Barat	1031	76.1	5.3	0.8	0.8	1.1	5.3	10.6
13	Jawa Tengah	861	86.9	5.3	0.8	0.1	0.9	3.9	2.0
14	DI Yogyakarta	121	99.2	0.8	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	949	91.5	2.3	0.7	0.4	1.8	0.7	2.5
16	Banten	206	79.1	5.8	0.5	0	1.5	5.8	7.3
17	Bali	114	97.4	0.9	0	0.9	0.9	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	85.2	0	0.7	0	0.7	9.4	4.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	80.1	1.0	0	1.3	6.0	5.3	6.3
20	Kalimantan Barat	233	79.0	2.6	0	0	6.0	4.7	7.7
21	Kalimantan Tengah	176	63.6	2.3	0.6	1.1	8.0	5.1	19.3
22	Kalimantan Selatan	217	94.0	0	0.5	0.9	3.2	0.9	0.5
23	Kalimantan Timur	213	78.4	0.9	0	0.5	2.8	5.6	11.7
24	Sulawesi Utara	167	58.1	8.4	1.8	0	4.2	8.4	19.2
25	Sulawesi Tengah	163	51.5	3.7		1.2	7.4	4.9	31.3
26	Sulawesi Selatan	406	84.7	1.0	0.5	1.0	3.0	1.5	8.4
27	Sulawesi Tenggara	233	46.4	5.2	1.3	0.9	4.7	9.9	31.8
28	Gorontalo	74	50.0	4.1	0	0	1.4	5.4	39.2
29	Sulawesi Barat	81	70.4	1.2	1.2	0	3.7	1.2	22.2
30	Maluku	161	44.7	3.7	1.9	0.6	3.1	16.1	29.8
31	Maluku Utara	101	24.8	1.0	0	1.0	5.9	7.9	59.4
32	Papua Barat	104	22.1	2.9	0	1.0	5.8	33.7	34.6
33	Papua	294	19.7	2.0	0.3		4.4	58.5	15.0
	Lokasi								
1	Perkotaan	2321	87.8	2.3	0.3	0.7	2.4	2.8	3.7
2	Perdesaan	6660	70.3	3.4	0.7	0.6	3.6	8.6	12.8
	INDONESIA	**8981**	**74.8**	**3.1**	**0.6**	**0.6**	**3.3**	**7.1**	**10.4**

Secara nasional, persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam Puskesmas setiap hari sebanyak 74,8 persen (87,8 persen Puskesmas di perkotaan dan 70,3 persen di perdesaan). Sementara persentase Puskesmas yang tidak ada kegiatan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam Puskesmas ada 7,1 persen (2,8 % di

Puskesmas perkotaan dan 8,6% di perdesaan). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam Puskesmas setiap hari DIY (99,2%), Bali (97,4%), dan Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat (94,0%). Sementara yang terendah adalah Papua (19,7%), Papua Barat (22,1%) dan Maluku Utara (24,8%).

Sedangkan secara nasional yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2-4 kali seminggu sebanyak 3,1%, 1 kali seminggu 0,6% dan 1-3 kali sebulan 0,6%.

Tabel 4.8.14.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Kegiatan UKGS						
			% Setiap hari	% 2-4x Seminggu	% 1x Seminggu	% 1-3x Sebulan	% Tidak Menentu	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi								
1	DI Aceh	311	2.9	2.6	2.3	10.6	46.0	26.4	9.3
2	Sumatera Utara	506	4.7	4.0	3.6	20.0	34.8	23.1	9.9
3	Sumatera Barat	248	3.6	5.2	5.6	32.7	45.2	7.3	0.4
4	Riau	195	4.1	3.1	4.1	23.1	49.2	8.7	7.7
5	Jambi	171	8.8	6.4	3.5	19.3	44.4	8.8	8.8
6	Sumatera Selatan	298	5.7	2.0	2.3	21.5	37.6	14.8	16.1
7	Bengkulu	173	4.0	2.3	1.2	9.2	34.7	23.7	24.9
8	Lampung	265	4.2	1.9	0.8	17.0	46.8	14.3	15.1
9	Bangka Belitung	57	5.3	1.8	1.8	12.3	66.7	8.8	3.5
10	Kepulauan Riau	65	3.1	3.1	3.1	21.5	58.5	9.2	1.5
11	DKI Jakarta	336	6.3	6.8	7.1	19.9	46.1	10.1	3.6
12	Jawa Barat	1031	4.4	8.2	10.1	26.0	33.3	7.5	10.6
13	Jawa Tengah	861	3.5	7.3	10.7	17.2	50.9	8.2	2.2
14	DI Yogyakarta	121	8.3	3.3	2.5	14.0	70.2	1.7	0
15	Jawa Timur	949	3.6	9.1	5.5	18.2	56.3	4.2	3.2
16	Banten	206	4.4	9.2	9.2	29.1	31.1	9.7	7.3
17	Bali	114	2.6	13.2	7.0	40.4	36.8	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	3.4	10.1	7.4	22.8	36.2	16.8	3.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	4.0	2.6	3.6	23.8	53.3	6.0	6.6
20	Kalimantan Barat	233	8.6	3.9	3.4	14.2	48.5	12.9	8.6
21	Kalimantan Tengah	176	3.4	0.6	1.1	9.1	46.6	21.0	18.2
22	Kalimantan Selatan	217	4.1	7.4	6.0	30.4	44.2	6.9	0.9
23	Kalimantan Timur	213	6.1	4.7	0.5	12.7	53.5	10.3	12.2
24	Sulawesi Utara	167	1.2	4.2	1.8	15.6	38.9	19.2	19.2
25	Sulawesi Tengah	163	3.7	2.5	1.2	8.0	36.2	15.3	33.1
26	Sulawesi Selatan	406	5.9	6.7	3.9	22.7	44.8	7.1	8.9
27	Sulawesi Tenggara	233	3.9	1.3	0.9	8.6	27.5	25.3	32.6
28	Gorontalo	74	0	1.4	0	9.5	37.8	10.8	40.5
29	Sulawesi Barat	81	2.5	3.7	1.2	16.0	35.8	18.5	22.2
30	Maluku	161	1.2	0.6	1.2	6.8	29.2	31.1	29.8
31	Maluku Utara	101	2.0	0	1.0	5.9	13.9	17.8	59.4
32	Papua Barat	104	2.9	2.9	1.0	1.9	17.3	37.5	36.5
33	Papua	294	2.0	0.3	0.7	2.4	10.2	69.4	15.0
	Lokasi								
1	Perkotaan	2321	4.9	6.0	4.7	21.9	50.2	8.3	4.0
2	Perdesaan	6660	4.0	5.1	5.1	17.3	39.4	15.9	13.2
	INDONESIA	**8981**	**4.2**	**5.3**	**5.0**	**18.5**	**42.2**	**14.0**	**10.8**

Tabel 4.8.14.1.b menunjukkan Persentase Puskesmas secara nasional yang melaksanakan kegiatan UKGS setiap hari hanya 4,2 persen (perkotaan 4,9%, Perdesaan 4,0%), sementara yang melaksanakan kegiatan UKGS 2-4 kali seminggu hanya 5,3 persen (perkotaan 6,0%, Perdesaan 5,1%), yang melaksanakan satu kali seminggu hanya 5,0 persen (perkotaan 4,7%, Perdesaan 5,1%), yang melaksanakan 1-3 kali sebulan ada 18,5 persen (perkotaan 21,9%, Perdesaan 17,3%), yang melaksanakan kegiatan UKGS namun dengan frekuensi tidak menentu ada 42,2 persen (perkotaan 50,2%, Perdesaan 39,4%), sementara

persentase Puskesmas yang tidak ada kegiatan UKGS ada 14,0 persen (perkotaan 8,3%, Perdesaan 15,9%).

Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang melaksanakan kegiatan UKGS rutin (frekuensi setiap hari sampai 1-3 kali sebulan) adalah Bali (63,2%), Banten (51,9,%) dan Jawa Barat (48,7%). Sementara Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang melaksanakan kegiatan UKGS dengan frekuensi tidak menentu adalah DIY (70,2%), Bangka Belitung (66,7%) dan Kepulauan Riau (58,5%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang tidak ada kegiatan UKGS adalah Papua (69,4%), Papua Barat (37,5%) dan Maluku (31,1%).

Tabel 4.8.14.1.c
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Kegiatan UKGMD						
			% Setiap hari	% 2-4x Seminggu	% 1x Seminggu	% 1-3x Sebulan	% Tidak Menentu	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi								
1	DI Aceh	311	0.6	1.0	0.3	1.9	6.4	79.7	10.0
2	Sumatera Utara	506	1.8	1.6	1.4	11.9	12.6	61.3	9.5
3	Sumatera Barat	248	2.0	5.2	3.2	31.9	35.1	20.2	2.4
4	Riau	195	2.6	1.5	1.0	14.4	26.2	46.2	8.2
5	Jambi	171	5.3	4.1	1.2	11.1	15.8	52.0	10.5
6	Sumatera Selatan	298	2.3	2.3	2.0	12.8	18.8	44.3	17.4
7	Bengkulu	173	0.6	1.2	0.6	5.8	15.0	51.4	25.4
8	Lampung	265	1.5	0.8	0.8	10.2	23.4	47.9	15.5
9	Bangka Belitung	57	0	3.5	1.8	5.3	38.6	49.1	1.8
10	Kepulauan Riau	65	1.5	0	0	10.8	12.3	73.8	1.5
11	DKI Jakarta	336	5.4	2.7	3.6	25.6	36.9	22.9	3.0
12	Jawa Barat	1031	3.1	5.7	6.5	30.0	24.8	19.0	10.9
13	Jawa Tengah	861	1.6	2.2	3.1	15.2	29.6	45.5	2.7
14	DI Yogyakarta	121	5.0	2.5	0.8	21.5	43.8	26.4	0
15	Jawa Timur	949	2.8	3.4	3.7	20.9	33.9	31.3	4.0
16	Banten	206	2.9	4.4	3.4	29.6	26.2	25.2	8.3
17	Bali	114	1.8	6.1	3.5	30.7	16.7	39.5	1.8
18	Nusa Tenggara Barat	149	2.0	8.7	12.8	14.1	22.1	36.9	3.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	2.0	0	0.7	6.3	19.5	63.9	7.6
20	Kalimantan Barat	233	3.0	0.9	3.0	9.0	15.9	58.8	9.4
21	Kalimantan Tengah	176	1.1	0	0	2.3	12.5	65.9	18.2
22	Kalimantan Selatan	217	2.8	5.1	3.7	32.7	29.0	25.3	1.4
23	Kalimantan Timur	213	2.3	1.9	0.9	8.0	31.5	42.3	13.1
24	Sulawesi Utara	167	2.4	1.8	0.6	10.8	13.2	52.1	19.2
25	Sulawesi Tengah	163	1.2	1.2	0	2.5	5.5	57.1	32.5
26	Sulawesi Selatan	406	3.7	4.7	2.2	15.3	21.4	43.8	8.9
27	Sulawesi Tenggara	233	0.9	0.9	0.9	4.7	10.7	48.5	33.5
28	Gorontalo	74	2.7	2.7	0	8.1	12.2	35.1	39.2
29	Sulawesi Barat	81	0	0	0	16.0	21.0	37.0	25.9
30	Maluku	161	0	0.6	0	3.1	9.9	55.9	30.4
31	Maluku Utara	101	1.0	0	0	2.0	7.9	29.7	59.4
32	Papua Barat	104	0	1.9	0	1.0	7.7	54.8	34.6
33	Papua	294	1.0	0	0.7	0	2.7	81.3	14.3
	Lokasi								
1	Perkotaan	2321	3.6	4.8	2.8	22.9	26.5	35.2	4.2
2	Perdesaan	6660	1.8	2.0	2.6	13.0	20.7	46.2	13.7
	INDONESIA	**8981**	**2.3**	**2.7**	**2.6**	**15.6**	**22.2**	**43.3**	**11.2**

Dari tabel 4.8.14.1.c terlihat Persentase Puskesmas secara nasional melaksanakan kegiatan UKGMD setiap hari hanya 2,3 persen (perkotaan 3,6%, Perdesaan 1,8%), yang melakukan kegiatan UKGMD 2-4 kali seminggu hanya 2,7 persen (perkotaan 4,8%, Perdesaan

2,0%), yang melaksanakan satu kali seminggu hanya 2,6 persen (perkotaan 2,8%, Perdesaan 2,0%), yang melaksanakan 1-3 kali sebulan ada 15,6 persen (perkotaan 22,9%, Perdesaan 13,0%), yang melaksanakan kegiatan UKGMD namun dengan frekuensi tidak menentu ada 22,2 persen (perkotaan 26,5%, Perdesaan 20,7%), sementara persentase Puskesmas yang tidak ada kegiatan UKGMD ada 43,3 persen (perkotaan 35,2%, Perdesaan 46,2%).

Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang melaksanakan kegiatan UKGMD rutin (frekuensi setiap hari sampai 1-3 kali sebulan) adalah Jawa Barat (45,3%), Kalimantan Selatan (44,2,%) dan Sumatera Barat (42,3%). Sementara Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang melaksanakan kegiatan UKGMD dengan frekuensi tidak menentu adalah DIY (43,8%), Bangka Belitung (38,6%) dan DKI Jakarta (36,9%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang tidak ada kegiatan UKGMD adalah Papua (81,3%), DI Aceh (79,7%) dan Kepulauan Riau (73,8%).

Tabel 4.8.14.1.d
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Kegiatan Lengkap Kesehatan Gigi dan Mulut		
			% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	0.6	90.0	9.3
2	Sumatera Utara	506	3.2	88.1	8.7
3	Sumatera Barat	248	6.5	93.1	0.4
4	Riau	195	3.6	90.8	5.6
5	Jambi	171	5.8	87.1	7.0
6	Sumatera Selatan	298	4.4	81.2	14.4
7	Bengkulu	173	1.7	73.4	24.9
8	Lampung	265	1.1	83.8	15.1
9	Bangka Belitung	57	1.8	98.2	0
10	Kepulauan Riau	65	1.5	96.9	1.5
11	DKI Jakarta	336	7.7	90.2	2.1
12	Jawa Barat	1031	11.1	78.7	10.3
13	Jawa Tengah	861	3.6	94.8	1.6
14	DI Yogyakarta	121	5.8	94.2	0
15	Jawa Timur	949	5.8	92.1	2.1
16	Banten	206	7.3	85.4	7.3
17	Bali	114	3.5	96.5	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	14.1	82.6	3.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	1.0	92.7	6.3
20	Kalimantan Barat	233	6.0	86.3	7.7
21	Kalimantan Tengah	176	0.6	81.8	17.6
22	Kalimantan Selatan	217	5.5	94.0	0.5
23	Kalimantan Timur	213	3.8	84.5	11.7
24	Sulawesi Utara	167	2.4	79.0	18.6
25	Sulawesi Tengah	163	2.5	67.5	30.1
26	Sulawesi Selatan	406	8.1	83.5	8.4
27	Sulawesi Tenggara	233	1.3	67.0	31.8
28	Gorontalo	74	0	60.8	39.2
29	Sulawesi Barat	81	0	77.8	22.2
30	Maluku	161	0	70.8	29.2
31	Maluku Utara	101	1.0	40.6	58.4
32	Papua Barat	104	1.0	64.4	34.6
33	Papua	294	0.7	85.0	14.3
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	6.2	90.5	3.3
2	Perdesaan	6660	4.3	83.3	12.4
	INDONESIA	**8981**	**4.8**	**85.1**	**10.1**

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan lengkap (melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam Puskesmas, UKGS dan UKGMD) secara nasional hanya 4,8 persen, di perkotaan 6,2 persen dan di perdesaan 4,3 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah NTB (14,1%), Jawa Barat (11,1%), dan Sulawesi Selatan (8,1%). Sementara itu, ada 3 provinsi yang belum melaksanakan kegiatan lengkap program kesehatan gigi dan mulut (0%) yaitu Maluku, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.

4.8.14.2. Pelatihan Program Kesehatan Gigi dan Mulut

Jenis pelatihan Pelatihan Program Kesehatan Gigi dan Mulut yang dikumpulkan pada Rifaskes adalah pelatihan yang diikuti petugas Puskesmas pada tahun 2009 atau tahun 2010, yang meliputi Pelatihan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut didalam Puskesmas, Pelatihan UKGS dan pelatihan UKGMD. Pelatihan Kesehatan gigi dan mulut lengkap adalah bila ketiga jenis pelatihan Pelatihan Program Kesehatan Gigi dan Mulut tersebut diikuti oleh puskesmas.

Tabel 4.8.14.2.a menampilkan keberadaan Pelatihan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut didalam Puskesmas, serta Pelatihan UKGS. Sedangkan Tabel 4.8.14.2.b menampilkan keberadaan dan pelatihan UKGMD dan Pelatihan lengkap Kesehatan gigi dan mulut

Tabel 4.8.14.2.a
Persentase Puskesmas Mengikuti Pelatihan Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut			Pelatihan UKGS		
			% Ada	%Tidak	% TAD	% Ada	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	9.3	81.0	9.6	11.6	78.8	9.6
2	Sumatera Utara	506	15.2	75.9	8.9	11.5	79.6	8.9
3	Sumatera Barat	248	8.5	91.1	0.4	10.9	88.7	0.4
4	Riau	195	20.5	73.8	5.6	21.5	72.8	5.6
5	Jambi	171	10.5	82.5	7.0	18.7	74.3	7.0
6	Sumatera Selatan	298	21.5	63.8	14.8	22.1	63.1	14.8
7	Bengkulu	173	11.0	64.2	24.9	9.2	65.9	24.9
8	Lampung	265	8.7	76.2	15.1	11.3	73.2	15.5
9	Bangka Belitung	57	7.0	93.0	0	5.3	94.7	0
10	Kepulauan Riau	65	20.0	78.5	1.5	9.2	89.2	1.5
11	DKI Jakarta	336	36.6	61.3	2.1	25.6	72.3	2.1
12	Jawa Barat	1031	23.4	66.1	10.5	21.9	67.7	10.4
13	Jawa Tengah	861	17.5	80.8	1.6	12.8	85.6	1.6
14	DI Yogyakarta	121	30.6	69.4	0	12.4	87.6	0
15	Jawa Timur	949	22.9	75.1	2.0	15.9	82.1	2.0
16	Banten	206	22.3	70.4	7.3	24.3	68.0	7.8
17	Bali	114	6.1	93.9	0	5.3	94.7	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	16.8	79.9	3.4	14.8	81.9	3.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	7.6	85.8	6.6	6.0	87.4	6.6
20	Kalimantan Barat	233	29.2	61.8	9.0	25.3	65.7	9.0
21	Kalimantan Tengah	176	5.7	76.1	18.2	4.0	77.8	18.2
22	Kalimantan Selatan	217	10.6	88.9	0.5	13.4	85.7	0.9
23	Kalimantan Timur	213	12.7	74.6	12.7	12.2	75.1	12.7
24	Sulawesi Utara	167	3.6	77.8	18.6	3.6	77.8	18.6
25	Sulawesi Tengah	163	4.3	63.2	32.5	7.4	60.1	32.5
26	Sulawesi Selatan	406	19.2	71.9	8.9	17.2	73.9	8.9
27	Sulawesi Tenggara	233	3.4	64.8	31.8	3.0	65.2	31.8
28	Gorontalo	74	8.1	54.1	37.8	8.1	54.1	37.8
29	Sulawesi Barat	81	8.6	69.1	22.2	12.3	65.4	22.2
30	Maluku	161	5.0	65.8	29.2	0.6	70.2	29.2
31	Maluku Utara	101	2.0	38.6	59.4	5.0	35.6	59.4
32	Papua Barat	104	2.9	62.5	34.6	2.9	62.5	34.6
33	Papua	294	3.4	82.3	14.3	2.4	83.3	14.3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	22.1	74.5	3.4	19.5	77.2	3.4
2	Perdesaan	6660	13.9	73.4	12.7	12.0	75.4	12.7
	INDONESIA	**8981**	**16.0**	**73.7**	**10.3**	**13.9**	**75.8**	**10.3**

Tabel 4.8.14.2.b
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan UKGMD			Pelatihan Lengkap Kesehatan Gigi dan Mulut		
			% Ada	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	1.6	88.7	9.6	1.3	89.1	9.6
2	Sumatera Utara	506	4.7	86.4	8.9	4.2	87.0	8.9
3	Sumatera Barat	248	5.6	94.0	0.4	4.4	95.2	0.4
4	Riau	195	10.3	84.1	5.6	8.7	85.6	5.6
5	Jambi	171	5.3	87.7	7.0	3.5	89.5	7.0
6	Sumatera Selatan	298	9.1	76.2	14.8	8.1	77.2	14.8
7	Bengkulu	173	4.6	69.9	25.4	4.0	70.5	25.4
8	Lampung	265	2.6	81.9	15.5	2.6	81.9	15.5
9	Bangka Belitung	57	5.3	94.7	0	1.8	98.2	0
10	Kepulauan Riau	65	4.6	93.8	1.5	3.1	95.4	1.5
11	DKI Jakarta	336	15.8	82.1	2.1	14.3	83.6	2.1
12	Jawa Barat	1031	16.6	73.0	10.4	11.3	78.4	10.4
13	Jawa Tengah	861	5.9	92.5	1.6	4.5	93.8	1.6
14	DI Yogyakarta	121	9.9	90.1	0	5.0	95.0	0
15	Jawa Timur	949	9.9	88.1	2.0	8.0	90.0	2.0
16	Banten	206	15.0	77.2	7.8	12.6	79.6	7.8
17	Bali	114	1.8	98.2	0	1.8	98.2	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	6.0	89.9	4.0	5.4	90.6	4.0
19	Nusa Tenggara Timur	302	2.0	91.4	6.6	1.3	92.1	6.6
20	Kalimantan Barat	233	7.3	83.7	9.0	6.0	85.0	9.0
21	Kalimantan Tengah	176	1.7	80.1	18.2	1.7	80.1	18.2
22	Kalimantan Selatan	217	10.1	89.4	0.5	7.4	92.2	0.5
23	Kalimantan Timur	213	5.2	82.2	12.7	3.8	83.6	12.7
24	Sulawesi Utara	167	1.2	80.2	18.6	0.6	80.8	18.6
25	Sulawesi Tengah	163	2.5	65.0	32.5	1.8	65.6	32.5
26	Sulawesi Selatan	406	5.7	85.5	8.9	4.9	86.2	8.9
27	Sulawesi Tenggara	233	0.9	67.4	31.8	0.4	67.8	31.8
28	Gorontalo	74	4.1	58.1	37.8	4.1	58.1	37.8
29	Sulawesi Barat	81	3.7	74.1	22.2	3.7	74.1	22.2
30	Maluku	161	0	70.8	29.2	0	70.8	29.2
31	Maluku Utara	101	3.0	37.6	59.4	2.0	38.6	59.4
32	Papua Barat	104	0	65.4	34.6	0	65.4	34.6
33	Papua	294	0	85.7	14.3	0	85.7	14.3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	10.3	86.3	3.4	8.3	88.3	3.4
2	Perdesaan	6660	6.1	81.2	12.7	4.6	82.7	12.7
	INDONESIA	**8981**	**7.1**	**82.6**	**10.3**	**5.6**	**84.2**	**10.3**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang petugasnya pernah mengikuti pelatihan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada tahun 2009 atau tahun 2010 hanya 16,0 persen (22,1% di perkotaan dan 13,9% di perdesaan). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan pelayanan kesehatan gigi yaitu DKI Jakarta (36,6%), DIY (30,6%) dan Jawa Barat (29,2%). Sementara yang terendah adalah Maluku Utara (2,0%), Papua Barat (2,9%), dan Papua (3,4%).

Secara nasional, persentase Puskesmas yang petugasnya pernah mengikuti pelatihan UKGS pada tahun 2009 atau tahun 2010 hanya 13,9 persen (19,5% di perkotaan dan 12,0% di perdesaan). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan UKGS yaitu DKI Jakarta (25,6%), Kalimantan Barat (25,3%) dan Banten (24,3%). Sementara yang terendah adalah Maluku (0,6%), Papua (2,4%), dan Papua Barat (2,9%).

Secara nasional, persentase Puskesmas yang petugasnya pernah mengikuti pelatihan UKGMD pada tahun 2009 atau tahun 2010 hanya 7,1 persen (10,3% di perkotaan dan 6,1% di perdesaan). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti

pelatihan UKGMD yaitu Jawa Barat (16,6%), DKI Jakarta (15,8%), dan Banten (15,0%). Sementara itu, masih ada 3 provinsi yang petugas diseluruh Puskesmasnya belum mengikuti pelatihan UKGMD (0%) yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Pelatihan lengkap kesehatan gigi dan mulut adalah persentase Puskesmas yang petugasnya pernah mengikuti pelatihan Pelayanan gigi dan mulut, pelatihan UKGS dan UKGMD pada tahun 2009 atau tahun 2010. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti pelatihan lengkap kesehatan gigi dan mulut hanya 5,6 persen (8,3% diperkotaan dan 4,6% di perdesaan). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap yaitu DKI Jakarta (14,3%), Banten (12,6%), dan Jawa Barat (11,3%). Sementara itu, masih ada 3 provinsi yang petugas diseluruh Puskesmasnya tidak mengikuti pelatihan Lengkap program kesehatan gigi dan mulut (0%) yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua.

4.8.14.3. Pedoman Program Kesehatan Gigi dan Mulut

Pedoman Program Kesehatan Gigi dan Mulut yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi dari pedoman Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas, pedoman UKGS, pedoman UKGMD. Tabel 4.8.14.3a menunjukkan persentase Puskesmas dengan ketersediaan pedoman pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas, dan pedoman UKGS. Tabel 4.8.14.3b menunjukkan persentase Puskesmas dengan ketersediaan pedoman UKGMD dan pedoman lengkap kesehatan gigi dan mulut (mempunyai ketiga jenis pedoman tersebut).

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah 41,9 persen (51,2% di perkotaan dan 38,6% di perdesaan), Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yaitu DIY (86,0%), Jawa TImur (68,7%) dan Jawa Tengah (61,6%), sementara provinsi dengan persentase Puskesmas terendah yaitu Maluku (10,6%), Sulawesi Utara (14,4%), dan Maluku Utara (17,8%).

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki pedoman UKGS adalah 40,0 persen (48,2% di perkotaan dan 37,1% di perdesaan), Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yaitu DIY (74,4%), Jawa Tengah (58,9%) dan Jawa TImur (56,6%), sementara provinsi dengan persentase Puskesmas terendah yaitu Maluku (9,9%), Sulawesi Utara (14,4%), dan Maluku Utara (16,8%).

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki pedoman UKGMD adalah 33,2 persen (40,8% di perkotaan dan 30,6% di perdesaan), Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yaitu DIY (72,7%), Jawa Timur (51,2%) dan Jawa Tengah (47,4%), sementara provinsi dengan persentase Puskesmas terendah yaitu Maluku (9,3%), Sulawesi Utara (10,2%), dan Kalimantan Tengah (14,2%).

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki pedoman lengkap program kesehatan gigi dan mulut adalah 30,3 persen (36,9% di perkotaan dan 28,0% di perdesaan), Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yaitu DIY (64,5%), Jawa TImur (48,2%) dan Jawa Tengah (42,7%), sementara provinsi dengan persentase Puskesmas terendah yaitu Maluku (8,1%), Sulawesi Utara (9,0%), dan Kalimantan Tengah (13,1%).

Tabel 4.8.14.3.a
Persentase Puskesmas menurut Pedoman untuk Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas			Pedoman UKGS		
			% Ada	%Tidak	% TAD	% Ada	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	18.3	72.0	9.6	18.0	72.3	9.6
2	Sumatera Utara	506	28.3	62.8	8.9	27.3	63.8	8.9
3	Sumatera Barat	248	42.7	56.9	0.4	45.2	54.4	0.4
4	Riau	195	29.7	64.6	5.6	36.4	57.9	5.6
5	Jambi	171	28.1	64.9	7.0	34.5	58.5	7.0
6	Sumatera Selatan	298	32.6	52.7	14.8	37.2	48.0	14.8
7	Bengkulu	173	24.9	50.3	24.9	24.9	50.3	24.9
8	Lampung	265	30.9	54.0	15.1	31.7	53.2	15.1
9	Bangka Belitung	57	50.9	49.1	0	50.9	47.4	1.8
10	Kepulauan Riau	65	40.0	58.5	1.5	44.6	53.8	1.5
11	DKI Jakarta	336	55.7	42.3	2.1	52.7	45.2	2.1
12	Jawa Barat	1031	56.1	33.5	10.5	50.6	39.0	10.4
13	Jawa Tengah	861	61.6	36.8	1.6	58.9	39.5	1.6
14	DI Yogyakarta	121	86.0	14.0	0	74.4	24.8	0.8
15	Jawa Timur	949	68.7	29.2	2.1	56.6	41.1	2.3
16	Banten	206	42.7	50.0	7.3	46.1	46.6	7.3
17	Bali	114	47.4	52.6	0	42.1	57.9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	36.9	59.7	3.4	42.3	54.4	3.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	31.8	61.6	6.6	32.1	61.3	6.6
20	Kalimantan Barat	233	42.9	48.1	9.0	44.2	46.8	9.0
21	Kalimantan Tengah	176	20.5	60.8	18.8	20.5	60.8	18.8
22	Kalimantan Selatan	217	41.9	57.6	0.5	36.9	62.7	0.5
23	Kalimantan Timur	213	46.5	40.8	12.7	44.1	43.2	12.7
24	Sulawesi Utara	167	14.4	67.1	18.6	14.4	67.1	18.6
25	Sulawesi Tengah	163	24.5	41.7	33.7	26.4	39.9	33.7
26	Sulawesi Selatan	406	34.7	56.4	8.9	38.7	52.2	9.1
27	Sulawesi Tenggara	233	19.7	48.9	31.3	18.5	50.2	31.3
28	Gorontalo	74	20.3	41.9	37.8	17.6	44.6	37.8
29	Sulawesi Barat	81	24.7	53.1	22.2	30.9	45.7	23.5
30	Maluku	161	10.6	60.2	29.2	9.9	60.9	29.2
31	Maluku Utara	101	17.8	22.8	59.4	16.8	23.8	59.4
32	Papua Barat	104	20.2	44.2	35.6	19.2	45.2	35.6
33	Papua	294	20.4	65.3	14.3	18.0	67.7	14.3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	51.2	45.4	3.4	48.2	48.3	3.4
2	Perdesaan	6660	38.6	48.7	12.7	37.1	50.1	12.8
	INDONESIA	**8981**	**41.9**	**47.8**	**10.3**	**40.0**	**49.6**	**10.4**

Tabel 4.8.14.3.b
Persentase Puskesmas menurut Pedoman Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pedoman UKGMD			Pedoman Lengkap Kesehatan Gigi dan Mulut		
			% Ada	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	15.4	74.6	10.0	14.8	75.6	9.6
2	Sumatera Utara	506	22.3	68.8	8.9	21.1	70.0	8.9
3	Sumatera Barat	248	39.1	60.5	0.4	33.1	66.5	0.4
4	Riau	195	26.7	67.7	5.6	21.0	73.3	5.6
5	Jambi	171	19.3	73.7	7.0	17.0	76.0	7.0
6	Sumatera Selatan	298	27.2	57.7	15.1	25.2	59.7	15.1
7	Bengkulu	173	21.4	53.8	24.9	20.2	54.9	24.9
8	Lampung	265	23.0	61.5	15.5	20.8	63.8	15.5
9	Bangka Belitung	57	36.8	61.4	1.8	33.3	66.7	0
10	Kepulauan Riau	65	33.8	64.6	1.5	33.8	64.6	1.5
11	DKI Jakarta	336	44.6	53.0	2.4	42.0	56.0	2.1
12	Jawa Barat	1031	43.2	46.5	10.4	40.1	49.6	10.4
13	Jawa Tengah	861	47.4	50.9	1.7	42.7	55.5	1.7
14	DI Yogyakarta	121	72.7	26.4	0.8	64.5	34.7	0.8
15	Jawa Timur	949	51.2	46.5	2.3	48.2	49.6	2.2
16	Banten	206	38.8	53.9	7.3	33.5	59.2	7.3
17	Bali	114	32.5	67.5	0	27.2	72.8	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	29.5	67.1	3.4	26.2	70.5	3.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	23.5	69.9	6.6	22.8	70.5	6.6
20	Kalimantan Barat	233	31.3	59.2	9.4	28.8	61.8	9.4
21	Kalimantan Tengah	176	14.2	67.0	18.8	13.1	68.2	18.8
22	Kalimantan Selatan	217	34.1	65.4	0.5	30.0	69.6	0.5
23	Kalimantan Timur	213	45.1	42.3	12.7	39.0	48.4	12.7
24	Sulawesi Utara	167	10.2	71.3	18.6	9.0	72.5	18.6
25	Sulawesi Tengah	163	16.6	49.7	33.7	14.7	51.5	33.7
26	Sulawesi Selatan	406	30.3	60.8	8.9	25.9	65.3	8.9
27	Sulawesi Tenggara	233	16.7	51.9	31.3	16.3	52.4	31.3
28	Gorontalo	74	14.9	47.3	37.8	13.5	48.6	37.8
29	Sulawesi Barat	81	23.5	53.1	23.5	23.5	54.3	22.2
30	Maluku	161	9.3	61.5	29.2	8.1	62.7	29.2
31	Maluku Utara	101	16.8	23.8	59.4	15.8	24.8	59.4
32	Papua Barat	104	19.2	45.2	35.6	18.3	46.2	35.6
33	Papua	294	17.3	68.4	14.3	16.3	69.4	14.3
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	40.8	55.7	3.5	36.9	59.7	3.4
2	Perdesaan	6660	30.6	56.6	12.8	28.0	59.2	12.8
	INDONESIA	**8981**	**33.2**	**56.4**	**10.4**	**30.3**	**59.3**	**10.4**

4.8.14.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kes Gigi dan Mulut

Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Gigi dan Mulut yang dikumpulkan pada Rifas 2011 terdiri dari bimbingan Teknis dalam bentuk kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Puskesmas, Umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan kab/Kota terhadap laporan Program Kesehatan Gigi dan Mulut, dan keikutsertaan Puskesmas pada pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program Kesehatan Gigi dan Mulut yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010 seperti terlihat pada tabel 4.8.14.4 a dan tabel 4.8.14.4 b.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan Monitoring dan Bimbingan teknis dalam bentuk kunjungan dari petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota untuk melakukan supervisi adalah 33,1 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 43,6 persen, sementara di perdesaan 29,5 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (67,1 %), DKI Jakarta (57,1 %) dan Banten (48,5 %).

Sementara provinsi terendah adalah Maluku Utara (1,0%), Maluku (1,9%), dan Papua Barat (1,9%).

Persentase Puskesmas yang mendapatkan Umpan balik laporan cakupan dari Dinas kesehatan Kab/Kota adalah 27,8 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 34,7 persen, sementara di perdesaan 25,4 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (52,5 %), Jawa Barat (49,5%), dan DKI Jakarta (43,8 %). Sementara provinsi terendah adalah Papua Barat (1,9%), Maluku Utara dan Papua (2,0%).

Tabel 4.8.14.4.a
Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan bimbingan teknis untuk Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan petugas Dinkes Kab/ Kota untuk supervisi/bimbingan			Umpan balik laporan cakupan program Kesehatan Gigi dan Mulut		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	9.0	81.4	9.6	6.8	83.6	9.6
2	Sumatera Utara	506	24.1	67.0	8.9	18.2	72.9	8.9
3	Sumatera Barat	248	29.4	70.2	0.4	24.2	75.4	0.4
4	Riau	195	21.5	72.8	5.6	20.0	74.4	5.6
5	Jambi	171	27.5	65.5	7.0	26.9	66.1	7.0
6	Sumatera Selatan	298	29.9	55.7	14.4	22.8	62.8	14.4
7	Bengkulu	173	19.1	55.5	25.4	11.6	63.0	25.4
8	Lampung	265	28.3	56.2	15.5	18.1	66.4	15.5
9	Bangka Belitung	57	36.8	63.2	00	29.8	70.2	0
10	Kepulauan Riau	65	21.5	76.9	1.5	20.0	78.5	1.5
11	DKI Jakarta	336	57.1	40.8	2.1	43.8	53.9	2.4
12	Jawa Barat	1031	48.3	41.2	10.5	49.5	40.1	10.5
13	Jawa Tengah	861	47.0	51.3	1.6	41.6	56.8	1.6
14	DI Yogyakarta	121	44.6	55.4	0	42.1	57.9	0
15	Jawa Timur	949	67.1	30.9	2.0	52.5	45.5	2.0
16	Banten	206	48.5	44.7	6.8	38.8	54.4	6.8
17	Bali	114	39.5	60.5	0	14.0	86.0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	37.6	59.1	3.4	34.2	62.4	3.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	14.2	79.1	6.6	13.2	80.1	6.6
20	Kalimantan Barat	233	27.0	64.4	8.6	26.2	65.2	8.6
21	Kalimantan Tengah	176	5.1	76.7	18.2	7.4	74.4	18.2
22	Kalimantan Selatan	217	36.9	62.7	0.5	24.4	75.1	0.5
23	Kalimantan Timur	213	22.1	65.3	12.7	13.1	74.2	12.7
24	Sulawesi Utara	167	14.4	67.1	18.6	11.4	70.1	18.6
25	Sulawesi Tengah	163	3.1	62.6	34.4	7.4	58.3	34.4
26	Sulawesi Selatan	406	30.0	61.1	8.9	20.2	70.9	8.9
27	Sulawesi Tenggara	233	6.9	61.8	31.3	8.6	60.1	31.3
28	Gorontalo	74	17.6	44.6	37.8	17.6	44.6	37.8
29	Sulawesi Barat	81	11.1	66.7	22.2	9.9	67.9	22.2
30	Maluku	161	1.9	68.9	29.2	2.5	68.3	29.2
31	Maluku Utara	101	1.0	40.6	58.4	2.0	39.6	58.4
32	Papua Barat	104	1.9	62.5	35.6	1.9	62.5	35.6
33	Papua	294	3.1	82.3	14.6	2.0	83.3	14.6
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	43.6	53.0	3.4	34.7	61.8	3.5
2	Perdesaan	6660	29.5	57.8	12.7	25.4	61.9	12.7
	INDONESIA	**8981**	**33.1**	**56.6**	**10.3**	**27.8**	**61.9**	**10.3**

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program adalah 33,6 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 42,8 persen, sementara di perdesaan 30,5 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (61,6 %), Jawa Barat (61,4%), dan DKI Jakarta (58,6 %).

Sementara provinsi terendah adalah Papua Barat (1,0%), Maluku Utara (1,0%) dan Sulawesi Tengah (1,2%).

Persentase Puskesmas yang mendapatkan monitoring dan bimbingan teknis lengkap untuk program Kesehatan gigi dan mulut secara nasional adalah sebanyak 19,1 persen (persentase di perkotaan 26,5% dan di perdesaan 16,5%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (40,0 %), DKI Jakarta (39,0%), dan Jawa Barat (36,1 %). Sementara provinsi terendah adalah Maluku (0,6%), Papua Barat dan Maluku Utara (1,0%).

Tabel 4.8.14.4.b
Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan bimbingan teknis untuk Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Rifaskes 2011

No.	Provinsi	Jml Pusk	Pertemuan monev program Kesehatan Gigi dan Mulut			Bimbingan Teknis Lengkap Program Kesehatan Gigi dan Mulut		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	12.2	77.8	10.0	3.2	87.1	9.6
2	Sumatera Utara	506	25.1	66.0	8.9	8.7	82.4	8.9
3	Sumatera Barat	248	23.0	76.6	0.4	14.5	85.1	0.4
4	Riau	195	16.4	77.9	5.6	8.2	86.2	5.6
5	Jambi	171	20.5	72.5	7.0	10.5	82.5	7.0
6	Sumatera Selatan	298	23.5	62.1	14.4	16.4	69.1	14.4
7	Bengkulu	173	11.6	62.4	26.0	6.9	67.6	25.4
8	Lampung	265	15.5	69.1	15.5	10.6	74.0	15.5
9	Bangka Belitung	57	28.1	71.9	0	15.8	84.2	0
10	Kepulauan Riau	65	13.8	84.6	1.5	9.2	89.2	1.5
11	DKI Jakarta	336	58.6	39.3	2.1	39.0	58.9	2.1
12	Jawa Barat	1031	61.4	28.1	10.5	36.1	53.4	10.5
13	Jawa Tengah	861	54.4	44.0	1.6	30.3	68.1	1.6
14	DI Yogyakarta	121	57.9	42.1	0	27.3	72.7	0
15	Jawa Timur	949	61.6	36.4	2.0	40.4	57.6	2.0
16	Banten	206	51.9	41.3	6.8	35.4	57.8	6.8
17	Bali	114	30.7	69.3	0	8.8	91.2	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	38.9	57.7	3.4	21.5	75.2	3.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	17.5	75.8	6.6	4.6	88.7	6.6
20	Kalimantan Barat	233	26.6	64.8	8.6	15.0	76.4	8.6
21	Kalimantan Tengah	176	2.3	79.5	18.2	1.1	80.7	18.2
22	Kalimantan Selatan	217	35.5	63.6	0.9	16.1	83.4	0.5
23	Kalimantan Timur	213	16.0	71.4	12.7	8.0	79.3	12.7
24	Sulawesi Utara	167	10.2	71.3	18.6	4.8	76.6	18.6
25	Sulawesi Tengah	163	1.2	64.4	34.4	0	65.6	34.4
26	Sulawesi Selatan	406	31.0	60.1	8.9	11.1	80.0	8.9
27	Sulawesi Tenggara	233	6.4	61.8	31.8	4.3	64.4	31.3
28	Gorontalo	74	21.6	40.5	37.8	16.2	45.9	37.8
29	Sulawesi Barat	81	7.4	70.4	22.2	6.2	71.6	22.2
30	Maluku	161	2.5	68.3	29.2	0.6	70.2	29.2
31	Maluku Utara	101	1.0	40.6	58.4	1.0	40.6	58.4
32	Papua Barat	104	1.0	63.5	35.6	1.0	63.5	35.6
33	Papua	294	1.7	83.7	14.6	1.4	84.0	14.6
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	42.8	53.8	3.4	26.5	70.0	3.4
2	Perdesaan	6660	30.5	56.8	12.7	16.5	70.9	12.7
	INDONESIA	**8981**	**33.6**	**56.0**	**10.3**	**19.1**	**70.6**	**10.3**

4.8.15. PROGRAM KESEHATAN JIWA

4.8.15.1. Kegiatan Program Kesehatan Jiwa

Kegiatan Program Kesehatan Jiwa yang dikumpulkan pada Rifas 2011 adalah yang dilakukan oleh tenaga Puskesmas tahun 2010, terdiri dari Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk penemuan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial, Kegiatan penemuan dan penanganan kasus gangguan jiwa dan masalah adalah Upaya penemuan dan penanganan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial, Kegiatan Rujukan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial ke RS, Kegiatan Konseling masalah psikososial kenakalan remaja, problem rumahtangga, keluarga, dan lain-lain serta Kegiatan Pembinaan kesehatan jiwa ke sekolah.

Tabel 4.8.15.1.a menunjukkan persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk penemuan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial serta Kegiatan Rujukan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial ke RS.

Tabel 4.8.15.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Jiwa, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pemberdayaan masyarakat untuk penemuan kasus gangguan jiwa dan Masalah Psikososial			Penemuan dan penanganan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial			Rujukan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial ke Rumah Sakit		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	70.1	28.6	1.3	91.3	7.4	1.3	90.4	8.4	1.3
2	Sumatera Utara	506	7.1	42.5	50.4	12.8	36.6	50.6	18.2	31.2	50.6
3	Sumatera Barat	248	55.6	42.7	0	85.1	14.9	0	91.2	8.8	0
4	Riau	195	17.4	56.9	25.6	42.6	31.8	25.6	49.7	24.6	25.6
5	Jambi	171	17.0	42.7	40.4	36.3	22.8	40.9	44.4	14.0	41.5
6	Sumatera Selatan	298	23.5	48.3	28.2	46.3	25.5	28.2	55.0	16.8	28.2
7	Bengkulu	173	12.7	48.6	38.7	28.9	32.4	38.7	31.8	29.5	38.7
8	Lampung	265	11.3	30.9	57.7	29.1	12.5	58.5	36.2	4.9	58.9
9	Bangka Belitung	57	40.4	57.9	1.8	63.2	35.1	1.8	78.9	19.3	1.8
10	Kepulauan Riau	65	12.3	32.3	55.4	13.8	30.8	55.4	15.4	29.2	55.4
11	DKI Jakarta	336	54.2	39.9	6.0	60.4	33.6	6.0	67.0	27.1	6.0
12	Jawa Barat	1031	43.7	41.3	14.9	68.6	16.5	14.9	71.8	13.2	15.0
13	Jawa Tengah	861	31.5	54.6	13.9	52.5	32.6	14.9	66.6	18.5	15.0
14	DI Yogyakarta	121	69.4	27.3	3.3	92.6	4.1	3.3	92.6	4.1	3.3
15	Jawa Timur	949	57.1	40.9	2.0	88.9	9.1	2.0	86.4	11.6	2.0
16	Banten	206	27.7	43.2	29.1	47.6	23.3	29.1	48.1	22.8	29.1
17	Bali	114	42.1	57.9	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	22.8	60.4	16.8	50.3	32.2	17.4	53.0	29.5	17.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	2.6	27.2	70.2	5.3	24.5	70.2	3.3	26.5	70.2
20	Kalimantan Barat	233	13.7	26.6	59.7	27.9	11.2	60.9	28.8	10.3	60.9
21	Kalimantan Tengah	176	9.1	38.6	52.3	29.5	18.2	52.3	27.3	20.5	52.3
22	Kalimantan Selatan	217	18.0	65.0	17.1	47.9	35.0	17.1	50.7	32.3	17.1
23	Kalimantan Timur	213	14.1	40.4	45.5	27.7	26.8	45.5	31.9	22.5	45.5
24	Sulawesi Utara	167	12.0	28.1	59.9	19.2	21.0	59.9	21.6	18.6	59.9
25	Sulawesi Tengah	163	20.2	38.7	41.1	41.1	17.8	41.1	44.2	14.7	41.1
26	Sulawesi Selatan	406	30.8	43.6	25.6	56.9	17.2	25.9	58.4	15.5	26.1
27	Sulawesi Tenggara	233	8.6	30.5	60.9	15.9	23.2	60.9	16.3	22.7	60.9
28	Gorontalo	74	14.9	33.8	51.4	37.8	10.8	51.4	17.6	31.1	51.4
29	Sulawesi Barat	81	16.0	12.3	71.6	25.9	2.5	71.6	19.8	8.6	71.6
30	Maluku	161	10.6	50.9	38.5	29.8	31.7	38.5	24.2	37.3	38.5
31	Maluku Utara	101	5.0	23.8	71.3	12.9	15.8	71.3	1.0	27.7	71.3
32	Papua Barat	104	0	54.8	45.2	1.0	53.8	45.2	0	54.8	45.2
33	Papua	294	1.7	77.2	21.1	3.1	75.9	21.1	1.4	77.6	21.1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	35.6	46.8	17.6	57.8	24.5	17.7	64.7	17.6	17.8
2	Perdesaan	6660	27.4	41.9	30.7	45.7	23.4	30.9	47.1	21.9	31.0
	INDONESIA	**8981**	**29.5**	**43.2**	**27.3**	**48.8**	**23.7**	**27.5**	**51.7**	**20.8**	**27.6**

Secara nasional pada tahun 2010 hanya 29,5 persen Puskesmas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk penemuan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial, di perkotaan 35,6 persen, sementara di perdesaan hanya 27,4 persen.

Provinsi dengan persentase tertinggi adalah DI Aceh (70,1%), DI Yogyakarta (69,4%) dan Jawa Timur (57,1%). Sementara itu di provinsi Papua Barat seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk penemuan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial (0%), selanjutnya di Provinsi Papua hanya 1,7 persen dan di NTT sebanyak 2,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penemuan dan penanganan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial pada tahun 2010 hanya 48,8 persen (57,8% di perkotaan, 45,7% di perdesaan). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (92,6%), DI Aceh (91,3%) dan Jawa Timur (88,9%). Sementara Provinsi terendah adalah Papua Barat (1,0%), Papua (3,1%) dan NTT (5,3%).

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan rujukan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial ke rumah sakit secara nasional pada tahun 2010 adalah 51,7 persen (64,7% di perkotaan dan 47,1% di perdesaan).

Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (92,6%), Bali (91,2%) dan DI Aceh (90,4%). Sementara itu di provinsi Papua Barat seluruh Puskesmasnya tidak melaksanakan kegiatan rujukan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial ke rumah sakit (0%), persentase Puskesmas terendah selanjutnya adalah Maluku Utara (1,0%), Papua (1,4%) dan NTT (3,3%).

Tabel 4.8.15.1.b menunjukkan Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Konseling masalah psikososial secara nasional pada tahun 2010 adalah 29,5 persen (39,9% di perkotaan dan 25,9% di perdesaan). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (71,9%), Jawa Timur (54,1%) dan Jawa Barat (49,7%). Sementara Provinsi terendah adalah Papua (1,0%), NTT (2,3%) dan Sumatera Utara (6,7%).

Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan jiwa ke sekolah dan Puskesmas secara nasional pada tahun 2010 hanya 17,8 persen, di perkotaan 22,7 persen dan di perdesaan 16,1 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (48,9%), DIY (38,0%), dan DKI Jakarta (35,4%). Sementara Provinsi terendah adalah NTT (0,3%), Papua (1,0%) dan Sulawesi Utara (3,0%).

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan lengkap untuk program kesehatan jiwa secara nasional pada tahun 2010 hanya 8,5 persen, di perkotaan 11,7 persen dan di perdesaan 7,3 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (26,4%), Jawa Timur (23,7%), dan DKI Jakarta (18,8%). Sementara itu, ada 3 provinsi yang belum melaksanakan kegiatan lengkap program kesehatan jiwa (0%) yaitu Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara.

Tabel 4.8.15.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Kesehatan Jiwa, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Konseling masalah psikososial			Pembinaan kesehatan jiwa ke sekolah oleh Puskesmas			Kegiatan Lengkap Program Kesehatan Jiwa		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	48.9	49.5	1.6	20.9	77.8	1.3	11.9	86.8	1.3
2	Sumatera Utara	506	6.7	42.7	50.6	5.1	44.3	50.6	1.0	48.6	50.4
3	Sumatera Barat	248	44.0	54.4	1.6	33.1	65.3	1.6	17.3	81.0	1.6
4	Riau	195	23.1	50.8	26.2	16.9	57.4	25.6	4.1	70.3	25.6
5	Jambi	171	12.3	46.2	41.5	7.0	51.5	41.5	4.7	55.0	40.4
6	Sumatera Selatan	298	26.8	45.0	28.2	18.1	53.7	28.2	7.0	64.8	28.2
7	Bengkulu	173	13.9	47.4	38.7	9.8	50.9	39.3	3.5	57.8	38.7
8	Lampung	265	15.1	26.0	58.9	7.5	33.6	58.9	3.4	38.9	57.7
9	Bangka Belitung	57	35.1	63.2	1.8	10.5	87.7	1.8	3.5	94.7	1.8
10	Kepulauan Riau	65	13.8	30.8	55.4	4.6	40.0	55.4	3.1	41.5	55.4
11	DKI Jakarta	336	46.4	47.6	6.0	35.4	58.6	6.0	18.8	75.3	6.0
12	Jawa Barat	1031	49.7	35.4	14.9	23.0	61.7	15.3	12.0	73.0	14.9
13	Jawa Tengah	861	37.3	47.7	15.0	19.0	66.0	15.0	9.1	77.0	13.9
14	DI Yogyakarta	121	71.9	24.8	3.3	38.0	58.7	3.3	26.4	70.2	3.3
15	Jawa Timur	949	54.1	43.9	2.0	48.9	49.0	2.1	23.7	74.3	2.0
16	Banten	206	36.4	34.5	29.1	13.1	57.8	29.1	7.3	63.6	29.1
17	Bali	114	41.2	58.8	0	15.8	84.2	00	7.0	93.0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	22.1	60.4	17.4	10.1	72.5	17.4	2.0	81.2	16.8
19	Nusa Tenggara Timur	302	2.3	27.5	70.2	0.3	29.5	70.2	0.3	29.5	70.2
20	Kalimantan Barat	233	15.5	23.6	60.9	6.9	32.2	60.9	3.0	37.3	59.7
21	Kalimantan Tengah	176	9.7	38.1	52.3	6.3	41.5	52.3	1.1	46.6	52.3
22	Kalimantan Selatan	217	28.1	54.8	17.1	17.5	65.4	17.1	7.4	75.6	17.1
23	Kalimantan Timur	213	16.4	38.0	45.5	7.0	47.4	45.5	4.2	50.2	45.5
24	Sulawesi Utara	167	10.2	29.9	59.9	3.0	37.1	59.9	1.8	38.3	59.9
25	Sulawesi Tengah	163	21.5	37.4	41.1	5.5	53.4	41.1	2.5	56.4	41.1
26	Sulawesi Selatan	406	23.9	50.2	25.9	15.3	58.6	26.1	4.7	69.7	25.6
27	Sulawesi Tenggara	233	7.3	31.8	60.9	3.0	35.6	61.4	0.9	38.2	60.9
28	Gorontalo	74	10.8	37.8	51.4	9.5	39.2	51.4	4.1	44.6	51.4
29	Sulawesi Barat	81	11.1	17.3	71.6	4.9	22.2	72.8	2.5	24.7	72.8
30	Maluku	161	14.9	46.6	38.5	5.0	56.5	38.5	1.2	60.2	38.5
31	Maluku Utara	101	7.9	20.8	71.3	5.9	22.8	71.3	0	28.7	71.3
32	Papua Barat	104	0	54.8	45.2	0	54.8	45.2	0	54.8	45.2
33	Papua	294	1.0	77.9	21.1	1.0	77.9	21.1	0	78.9	21.1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	39.9	42.3	17.8	22.7	59.5	17.8	11.7	70.7	17.6
2	Perdesaan	6660	25.9	43.1	31.0	16.1	52.8	31.1	7.3	62.0	30.7
	INDONESIA	**8981**	**29.5**	**42.9**	**27.6**	**17.8**	**54.5**	**27.6**	**8.5**	**64.2**	**27.3**

4.8.15.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Jiwa

Tabel 4.8.15.2.1 menunjukan bahwa persentase Puskesmas menurut keberadaan dan jumlah tenaga pelaksana Kegiatan Program Kesehatan Jiwa. Secara nasional persentase Puskesmas yang mempunyai tenaga pelaksana Kegiatan Program Kesehatan Jiwa sebanyak 58,5 persen, dengan rincian yang memiliki jumlah petugas pelaksana 1-5 orang sebanyak 55,2 persen, 6-10 orang sebanyak 1,7 persen, 11-20 orang sebanyak 1,1 persen, dan >20 orang sebanyak 0,5 persen. Sementara secara nasional 12,6 persen Puskesmas tidak memiliki petugas pelaksana program Kesehatan jiwa. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana Kesehatan jiwa adalah Provinsi Bali (97,4 %), diikuti Provinsi DI Aceh (95,8 %), dan Provinsi Jawa Timur (95,4 %). Sedangkan terendah di Provinsi Papua Barat (1,9 %), Papua (5,1 %) dan NTT (7,3%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di

perkotaan yang ada petugas pelaksana kegiatan program Kesehatan jiwa ada sebanyak 71,2 persen, sementara di perdesaan 54,1 persen.

Tabel 4.8.15.2.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Petugas Program Kesehatan Jiwa, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana Program Kesehatan Jiwa					
			% Tidak Ada	% 1- 5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	2.9	95.2	0.3	0.3	0	1.3
2	Sumatera Utara	506	15.6	30.8	0.4	0.2	0.8	52.2
3	Sumatera Barat	248	4.8	87.9	3.2	0.4	2.0	1.6
4	Riau	195	13.8	54.9	1.0	1.0	1.0	28.2
5	Jambi	171	8.2	46.8	1.2	0	0.6	43.3
6	Sumatera Selatan	298	9.1	60.7	0.3	0	0	29.9
7	Bengkulu	173	18.5	41.6	0	0.6	0	39.3
8	Lampung	265	4.2	35.1	1.1	1.1	0.4	58.1
9	Bangka Belitung	57	7.0	89.5	1.8	0	0	1.8
10	Kepulauan Riau	65	20.0	21.5	0	0	0	58.5
11	DKI Jakarta	336	17.6	74.1	1.8	0.3	0	6.3
12	Jawa Barat	1031	6.4	76.3	1.2	0.7	0.1	15.3
13	Jawa Tengah	861	18.6	59.5	3.5	2.1	0.5	15.9
14	DI Yogyakarta	121	0.8	73.6	13.2	5.8	2.5	4.1
15	Jawa Timur	949	2.4	84.6	4.7	4.3	1.7	2.2
16	Banten	206	9.7	58.3	1.5	1.0	0	29.6
17	Bali	114	2.6	86.0	4.4	4.4	2.6	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	22.8	57.7	0.7	0	0	18.8
19	Nusa Tenggara Timur	302	20.2	6.6	0	0.7	0	72.5
20	Kalimantan Barat	233	6.0	31.3	0.9	0.4	0	61.4
21	Kalimantan Tengah	176	10.2	34.1	1.1	0.6	1.1	52.8
22	Kalimantan Selatan	217	25.3	53.0	1.8	0.5	0	19.4
23	Kalimantan Timur	213	12.7	36.2	0.5	0	0	50.7
24	Sulawesi Utara	167	11.4	28.1	0	0	0	60.5
25	Sulawesi Tengah	163	4.3	51.5	0	0	0	44.2
26	Sulawesi Selatan	406	3.0	67.7	0.5	0.2	0	28.6
27	Sulawesi Tenggara	233	15.0	23.6	0	0	0	61.4
28	Gorontalo	74	1.4	45.9	1.4	0	0	51.4
29	Sulawesi Barat	81	0	24.7	1.2	0	0	74.1
30	Maluku	161	14.9	37.3	0.6	0	0.6	46.6
31	Maluku Utara	101	9.9	13.9	1.0	0	1.0	74.3
32	Papua Barat	104	51.9	1.9	0	0	0	46.2
33	Papua	294	67.3	4.4	0.3	0	0.3	27.6
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	10.0	67.4	2.6	0.6	0.6	18.8
2	Perdesaan	6660	13.5	51.0	1.4	1.2	0.5	32.4
	INDONESIA	**8981**	**12.6**	**55.2**	**1.7**	**1.1**	**0.5**	**28.9**

Tabel 4.8.15.2.2
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Jiwa, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Kesehatan Jiwa			Pedoman Kesehatan Jiwa		
			%Ya	%Tidak	% TAD	%Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	72.3	26.0	1.6	71.1	27.0	1.9
2	Sumatera Utara	506	9.9	38.9	51.2	4.2	45.1	50.8
3	Sumatera Barat	248	41.1	56.0	2.8	33.9	64.5	1.6
4	Riau	195	26.2	46.2	27.7	9.7	63.6	26.7
5	Jambi	171	13.5	43.3	43.3	9.9	47.4	42.7
6	Sumatera Selatan	298	31.9	36.9	31.2	29.2	42.6	28.2
7	Bengkulu	173	5.8	54.9	39.3	4.0	57.2	38.7
8	Lampung	265	18.1	23.8	58.1	11.7	29.4	58.9
9	Bangka Belitung	57	45.6	52.6	1.8	28.1	70.2	1.8
10	Kepulauan Riau	65	9.2	24.6	66.2	4.6	38.5	56.9
11	DKI Jakarta	336	45.2	47.3	7.4	48.5	45.5	6.0
12	Jawa Barat	1031	40.7	43.5	15.7	47.4	37.5	15.0
13	Jawa Tengah	861	27.5	55.6	16.8	23.5	61.3	15.2
14	DI Yogyakarta	121	63.6	33.1	3.3	65.3	31.4	3.3
15	Jawa Timur	949	39.8	57.4	2.7	50.2	47.5	2.3
16	Banten	206	33.5	36.9	29.6	23.8	47.1	29.1
17	Bali	114	30.7	68.4	0.9	44.7	55.3	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	28.2	53.0	18.8	23.5	57.0	19.5
19	Nusa Tenggara Timur	302	1.3	26.2	72.5	1.7	26.2	72.2
20	Kalimantan Barat	233	15.5	22.7	61.8	10.7	27.9	61.4
21	Kalimantan Tengah	176	19.3	27.3	53.4	12.5	35.2	52.3
22	Kalimantan Selatan	217	20.3	61.8	18.0	20.3	62.7	17.1
23	Kalimantan Timur	213	19.7	29.6	50.7	14.6	35.2	50.2
24	Sulawesi Utara	167	8.4	31.7	59.9	3.6	35.9	60.5
25	Sulawesi Tengah	163	26.4	30.1	43.6	20.9	35.6	43.6
26	Sulawesi Selatan	406	27.1	44.3	28.6	26.1	45.8	28.1
27	Sulawesi Tenggara	233	8.2	30.9	60.9	7.3	31.3	61.4
28	Gorontalo	74	9.5	39.2	51.4	9.5	39.2	51.4
29	Sulawesi Barat	81	18.5	7.4	74.1	12.3	13.6	74.1
30	Maluku	161	23.6	29.8	46.6	10.6	50.9	38.5
31	Maluku Utara	101	7.9	14.9	77.2	5.0	23.8	71.3
32	Papua Barat	104	0.0	53.8	46.2	0	54.8	45.2
33	Papua	294	3.4	69.0	27.6	0.3	78.2	21.4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	37.7	42.5	19.7	37.2	44.6	18.2
2	Perdesaan	6660	23.9	43.6	32.5	22.8	45.6	31.6
	INDONESIA	**8981**	**27.5**	**43.3**	**29.2**	**26.5**	**45.4**	**28.1**

Persentase Puskesmas yang petugasnya menerima pelatihan berkaitan dengan program Kesehatan jiwa pada tahun 2009 atau tahun 2010 secara nasional hanya sebanyak 27,5 persen (di perkotaan 37,7%, di perdesaan 23,9%). Sementara secara nasional persentase Puskesmas yang petugasnya tidak ada yang mengikuti pelatihan sebanyak 43,3 persen (di perkotaan 42,5%, diperdesaan 43,6%).

Persentase tertinggi ada di Provinsi DI Aceh (72,3%), Provinsi DIY (63,6 %),dan Bangka Belitung (45,6 %). Sementara provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan adalah Papua (69,0%), Bali (68,4%) dan Kalimantan Selatan (61,8%).

Persentase Puskesmas menurut keberadaan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan program kesehatan jiwa secara nasional hanya 26,5 persen (di perkotaan 37,2%, diperdesaan 22,8%). Persentase tertinggi ada di Provinsi DI Aceh (71,1%), DIY (65,3 %), diikuti Provinsi Jawa Timur (50,2 %).Sementara presentase terendah yaitu Provinsi Papua (0,3%), NTT (1,7%) dan Sulawesi Utara (3,6%).

4.8.15.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Jiwa

Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Jiwa yang dikumpulkan pada Rifas 2011 terdiri dari bimbingan Teknis dalam bentuk kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Puskesmas, Umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan kab/Kota terhadap laporan kegiatan Kesehatan Jiwa, dan keikutsertaan Puskesmas pada pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program Kesehatan Jiwa yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010 seperti terlihat pada tabel 4.8.15.3 a dan tabel 4.8.15.3 b.

Persentase Puskesmas yang mendapat Monitoring dan Bimbingan teknis dalam bentuk kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota selama tahun 2010. sebesar 22,4 persen, di perkotaan sebanyak 26,9 persen, dan di perdesaan 20,8 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (57,0 %), DI Aceh (54,0 %) dan Jawa Timur (53,3 %). Sementara persentase terendah adalah Papua Barat (0%), Sulawesi Tenggara (0,9%) dan NTT (1,0%)

Tabel 4.8.15.3.a
Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Jiwa, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan petugas Dinkes Kab/Kota untuk supervisi/bimbingan			Umpan balik laporan cakupan program Kesehatan Jiwa		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	54.0	44.7	1.3	47.3	51.4	1.3
2	Sumatera Utara	506	7.1	41.9	51.0	2.4	46.6	51.0
3	Sumatera Barat	248	27.4	71.0	1.6	21.0	77.4	1.6
4	Riau	195	3.1	70.8	26.2	7.2	66.7	26.2
5	Jambi	171	8.2	49.7	42.1	6.4	51.5	42.1
6	Sumatera Selatan	298	22.5	49.3	28.2	20.5	51.3	28.2
7	Bengkulu	173	11.0	50.3	38.7	5.2	56.1	38.7
8	Lampung	265	6.8	34.7	58.5	3.4	38.1	58.5
9	Bangka Belitung	57	49.1	49.1	1.8	22.8	75.4	1.8
10	Kepulauan Riau	65	3.1	41.5	55.4	1.5	43.1	55.4
11	DKI Jakarta	336	31.3	62.8	6.0	28.0	65.8	6.3
12	Jawa Barat	1031	36.6	48.1	15.3	37.6	46.8	15.6
13	Jawa Tengah	861	19.7	65.0	15.2	19.0	65.4	15.6
14	DI Yogyakarta	121	57.0	39.7	3.3	50.4	46.3	3.3
15	Jawa Timur	949	53.3	44.6	2.1	46.3	51.4	2.3
16	Banten	206	29.6	41.3	29.1	24.8	46.1	29.1
17	Bali	114	34.2	65.8	0	21.1	78.9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	19.5	61.7	18.8	16.1	65.1	18.8
19	Nusa Tenggara Timur	302	1.0	26.5	72.5	0.7	26.8	72.5
20	Kalimantan Barat	233	9.0	30.0	60.9	8.6	30.0	61.4
21	Kalimantan Tengah	176	1.7	46.0	52.3	1.7	45.5	52.8
22	Kalimantan Selatan	217	11.1	71.9	17.1	14.7	67.7	17.5
23	Kalimantan Timur	213	7.5	41.8	50.7	5.6	43.7	50.7
24	Sulawesi Utara	167	6.0	34.1	59.9	4.8	35.3	59.9
25	Sulawesi Tengah	163	9.8	46.6	43.6	9.8	46.6	43.6
26	Sulawesi Selatan	406	22.7	49.3	28.1	11.8	60.1	28.1
27	Sulawesi Tenggara	233	0.9	37.8	61.4	0.9	37.8	61.4
28	Gorontalo	74	23.0	24.3	52.7	17.6	29.7	52.7
29	Sulawesi Barat	81	17.3	8.6	74.1	16.0	9.9	74.1
30	Maluku	161	2.5	58.4	39.1	3.7	57.1	39.1
31	Maluku Utara	101	2.0	26.7	71.3	2.0	26.7	71.3
32	Papua Barat	104	0	53.8	46.2	0	53.8	46.2
33	Papua	294	1.0	77.6	21.4	1.0	77.6	21.4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	26.9	54.9	18.2	23.4	58.2	18.4
2	Perdesaan	6660	20.8	47.7	31.5	18.2	50.2	31.7
	INDONESIA	**8981**	**22.4**	**49.5**	**28.1**	**19.5**	**52.2**	**28.2**

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan Umpan balik laporan cakupan Kesehatan jiwa dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota adalah 19,5 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 23,4 persen, sementara di perdesaan 18,2 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (50,4 %), DI Aceh (47,3%), dan Jawa Timur (46,3 %). Sementara presentase terendah adalah Papua Barat (0 %), NTT (0,7%) dan Sulawesi Tenggara (0,9%).

Tabel 4.8.15.3.b menunjukkan secara nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program yang diselenggarakan oleh Dinas kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010 adalah 24,5 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 32,1 persen, sementara di perdesaan 21,8 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (72,7 %), DI Aceh (67,5%), dan Jawa Timur (55,7 %). Sementara provinsi terendah adalah Papua Barat dan Sulawesi Tenggara (0%), dan Maluku (0,6%)

Tabel 4.8.15.3.b
Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Jiwa, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pertemuan monev program Kesehatan jiwa			Bimbingan Teknis Lengkap Program Kesehatan Jiwa		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	67.5	31.2	1.3	34.7	64.0	1.3
2	Sumatera Utara	506	9.3	39.5	51.2	1.6	47.4	51.0
3	Sumatera Barat	248	25.8	71.8	2.4	13.7	84.7	1.6
4	Riau	195	6.2	67.7	26.2	2.6	71.3	26.2
5	Jambi	171	9.9	48.0	42.1	4.7	53.2	42.1
6	Sumatera Selatan	298	14.4	57.4	28.2	10.7	61.1	28.2
7	Bengkulu	173	3.5	57.8	38.7	1.7	59.5	38.7
8	Lampung	265	4.2	37.0	58.9	2.3	39.2	58.5
9	Bangka Belitung	57	38.6	59.6	1.8	19.3	78.9	1.8
10	Kepulauan Riau	65	1.5	43.1	55.4	1.5	43.1	55.4
11	DKI Jakarta	336	41.4	52.4	6.3	23.2	70.5	6.3
12	Jawa Barat	1031	44.3	40.3	15.4	27.1	57.5	15.4
13	Jawa Tengah	861	23.2	61.0	15.8	11.8	72.8	15.3
14	DI Yogyakarta	121	72.7	24.0	3.3	31.4	65.3	3.3
15	Jawa Timur	949	55.7	42.1	2.1	34.9	62.9	2.2
16	Banten	206	30.1	40.8	29.1	20.4	50.5	29.1
17	Bali	114	25.4	74.6	0	10.5	89.5	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	26.8	53.7	19.5	11.4	69.8	18.8
19	Nusa Tenggara Timur	302	1.3	26.2	72.5	0.3	27.2	72.5
20	Kalimantan Barat	233	6.9	31.8	61.4	5.6	33.5	60.9
21	Kalimantan Tengah	176	4.0	43.8	52.3	1.1	46.6	52.3
22	Kalimantan Selatan	217	21.7	60.8	17.5	6.9	76.0	17.1
23	Kalimantan Timur	213	6.1	43.2	50.7	4.2	45.1	50.7
24	Sulawesi Utara	167	4.2	35.9	59.9	3.6	36.5	59.9
25	Sulawesi Tengah	163	13.5	42.9	43.6	3.7	52.8	43.6
26	Sulawesi Selatan	406	17.2	54.7	28.1	5.9	66.0	28.1
27	Sulawesi Tenggara	233	0	38.6	61.4	0	38.6	61.4
28	Gorontalo	74	21.6	25.7	52.7	16.2	31.1	52.7
29	Sulawesi Barat	81	14.8	11.1	74.1	9.9	16.0	74.1
30	Maluku	161	0.6	60.2	39.1	0	60.9	39.1
31	Maluku Utara	101	2.0	26.7	71.3	1.0	27.7	71.3
32	Papua Barat	104	0	53.8	46.2	0	53.8	46.2
33	Papua	294	0.7	77.9	21.4	0.7	77.9	21.4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	32.1	49.5	18.4	17.4	64.4	18.3
2	Perdesaan	6660	21.8	46.5	31.7	12.2	56.2	31.6
	INDONESIA	**8981**	**24.5**	**47.3**	**28.3**	**13.5**	**58.3**	**28.1**

Persentase Puskesmas yang mendapatkan monitoring dan bimbingan teknis lengkap (menerima ketiga bentuk kegiatan monitoring dan bimbingan teknis) program Kesehatan jiwa secara nasional adalah sebanyak 13,5 persen (persentase di perkotaan 17,4% dan di perdesaan 12,2%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (34,9 %), DI Aceh (34,7%), dan DIY (31,4 %). Sementara provinsi terendah adalah Papua Barat, Maluku dan Sulawesi Tenggara (0%).

4.8.16. PROGRAM KESEHATAN MATA

4.8.16.1. Kegiatan Program Kesehatan Mata

Kegiatan Program Kesehatan Mata yang dikumpulkan pada Rifas 2011 adalah yang dilakukan oleh tenaga Puskesmas tahun 2010, terdiri dari Kegiatan penjaringan gangguan penglihatan pada anak sekolah, Kegiatan penyuluhan kesehatan mata kepada kelompok masyarakat, Kegiatan deteksi dini penyakit glaucoma dan katarak pada usia > 45 tahun, Kegiatan Rujukan kasus gangguan penglihatan

Tabel 4.8.16.1.a menunjukkan Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan penjaringan gangguan penglihatan pada anak sekolah secara nasional hanya 35,5 persen, di perkotaan 44,6 persen, sementara di perdesaan hanya 32,3 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah DI Yogyakarta (81,8%), Jawa Timur (76,1%), dan Bali (63,2%). Sementara persentase terendah ada di Provinsi Maluku Utara (1,0%), Papua Barat (1,9%) dan Papua (2,7%).

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan kesehatan mata kepada kelompok masyarakat hanya 25,4 persen (31,2% di perkotaan, 23,4% di perdesaan). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Barat (52,8%), Jawa Timur (52,4%) dan Sumatera Barat (51,2%). Sementara Presentase terendah adalah Maluku Utara (0%), NTT (0,7%) dan Papua Barat (1,0%).

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit glaucoma dan katarak pada usia lebih dari 45 tahun adalah 34,1 persen ,(40,7% di perkotaan dan 31,8% di perdesaan). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Bali (82,5%), Jawa Barat (67,0%), dan Jawa Timur (65,5%). Sementara itu di provinsi Maluku Utara seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan deteksi dini penyakit glaucoma dan katarak pada usila (0%), persentase Puskesmas terendah selanjutnya adalah Kepulauan Riau (1,5%), Papua Barat (1,9%) dan NTT (2,0%).

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Rujukan kasus gangguan penglihatan secara nasional adalah 44,9 persen (56,2% di perkotaan dan 41,0% di perdesaan). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Bali (92,1%), DIY (86,0%), dan Jawa Timur (82,8%). Sementara Provinsi terendah adalah Maluku Utara (1,0%), Papua Barat (2,9%) dan Papua (3,7%).

Tabel 4.8.16.1.a
Persentase Puskesmas menurut Program Kesehatan Mata, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Penjaringan gangguan penglihatan pada anak sekolah			Penyuluhan kesehatan mata pada kelompok masyarakat			Deteksi dini penyakit glaucoma dan katarak pada usila		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	3.2	52.7	44.1	2.3	53.4	44.4	5.8	49.8	44.4
2	Sumatera Utara	506	19.6	42.7	37.7	19.8	42.5	37.7	27.7	34.6	37.7
3	Sumatera Barat	248	62.5	26.6	10.9	51.2	37.9	10.9	62.9	26.2	10.9
4	Riau	195	41.0	29.2	29.7	25.6	44.6	29.7	33.3	36.9	29.7
5	Jambi	171	27.5	25.1	47.4	18.7	33.3	48.0	21.1	31.0	48.0
6	Sumatera Selatan	298	36.6	35.9	27.5	32.6	39.9	27.5	45.3	27.2	27.5
7	Bengkulu	173	13.9	30.6	55.5	8.7	35.8	55.5	10.4	34.1	55.5
8	Lampung	265	14.7	17.4	67.9	7.2	24.2	68.7	12.5	18.9	68.7
9	Bangka Belitung	57	36.8	50.9	12.3	17.5	70.2	12.3	35.1	52.6	12.3
10	Kepulauan Riau	65	10.8	32.3	56.9	3.1	40.0	56.9	1.5	41.5	56.9
11	DKI Jakarta	336	25.9	56.3	17.9	18.8	62.8	18.5	17.3	64.3	18.5
12	Jawa Barat	1031	61.8	23.2	15.0	52.8	32.2	15.0	67.0	17.9	15.0
13	Jawa Tengah	861	44.9	31.5	23.6	23.3	52.7	23.9	35.7	40.4	23.9
14	DI Yogyakarta	121	81.8	7.4	10.7	43.0	46.3	10.7	50.4	38.8	10.7
15	Jawa Timur	949	76.1	14.8	9.2	52.4	38.5	9.2	65.5	25.1	9.4
16	Banten	206	53.4	20.4	26.2	36.9	36.9	26.2	46.6	27.2	26.2
17	Bali	114	63.2	36.0	0.9	45.6	53.5	0.9	82.5	16.7	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	32.2	55.0	12.8	30.2	57.0	12.8	46.3	40.9	12.8
19	Nusa Tenggara Timur	302	3.0	26.8	70.2	0.7	29.1	70.2	2.0	27.8	70.2
20	Kalimantan Barat	233	17.6	15.5	67.0	11.2	21.5	67.4	16.7	15.9	67.4
21	Kalimantan Tengah	176	17.6	23.3	59.1	10.2	30.7	59.1	15.9	25.0	59.1
22	Kalimantan Selatan	217	33.6	44.2	22.1	19.8	57.6	22.6	35.0	42.4	22.6
23	Kalimantan Timur	213	33.3	31.9	34.7	22.5	42.3	35.2	40.4	24.9	34.7
24	Sulawesi Utara	167	11.4	35.3	53.3	22.2	24.6	53.3	18.6	28.1	53.3
25	Sulawesi Tengah	163	4.3	23.9	71.8	5.5	22.7	71.8	8.6	19.6	71.8
26	Sulawesi Selatan	406	31.8	25.4	42.9	17.7	38.9	43.3	27.6	29.1	43.3
27	Sulawesi Tenggara	233	6.0	24.5	69.5	2.6	27.9	69.5	6.4	24.0	69.5
28	Gorontalo	74	8.1	10.8	81.1	6.8	12.2	81.1	6.8	12.2	81.1
29	Sulawesi Barat	81	11.1	12.3	76.5	12.3	11.1	76.5	13.6	9.9	76.5
30	Maluku	161	8.7	41.0	50.3	5.0	44.7	50.3	6.8	42.9	50.3
31	Maluku Utara	101	1.0	10.9	88.1	0	11.9	88.1	0	11.9	88.1
32	Papua Barat	104	1.9	51.9	46.2	1.0	52.9	46.2	1.9	51.9	46.2
33	Papua	294	2.7	77.6	19.7	3.1	76.9	20.1	2.4	77.6	20.1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	44.6	31.1	24.3	31.2	44.2	24.6	40.7	34.8	24.5
2	Perdesaan	6660	32.3	30.8	36.9	23.4	39.5	37.0	31.8	31.1	37.1
	INDONESIA	**8981**	**35.5**	**30.9**	**33.6**	**25.4**	**40.8**	**33.8**	**34.1**	**32.1**	**33.8**

Tabel 4.8.16.1.b
Persentase Puskesmas menurut Program Kesehatan Mata, Rifaskes 2011

No.	Provinsi	Jml Pusk	Rujukan kasus gangguan penglihatan			Kegiatan Lengkap Kesehatan Mata		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
1	DI Aceh	311	14.1	41.5	44.4	1.3	54.3	44.4
2	Sumatera Utara	506	35.4	26.9	37.7	7.5	54.7	37.7
3	Sumatera Barat	248	81.5	7.7	10.9	33.1	56.0	10.9
4	Riau	195	47.2	23.1	29.7	13.8	56.4	29.7
5	Jambi	171	33.9	18.1	48.0	11.1	41.5	47.4
6	Sumatera Selatan	298	55.4	17.1	27.5	19.5	53.0	27.5
7	Bengkulu	173	19.1	25.4	55.5	3.5	41.0	55.5
8	Lampung	265	25.7	5.7	68.7	4.5	27.5	67.9
9	Bangka Belitung	57	57.9	29.8	12.3	12.3	75.4	12.3
10	Kepulauan Riau	65	21.5	21.5	56.9	0	43.1	56.9
11	DKI Jakarta	336	31.5	50.3	18.2	8.3	73.5	18.2
12	Jawa Barat	1031	74.4	10.6	15.0	38.8	46.2	15.0
13	Jawa Tengah	861	50.6	25.3	24.0	16.5	59.9	23.6
14	DI Yogyakarta	121	86.0	3.3	10.7	30.6	58.7	10.7
15	Jawa Timur	949	82.8	7.8	9.4	39.9	50.9	9.2
16	Banten	206	59.7	14.1	26.2	27.2	46.6	26.2
17	Bali	114	92.1	7.0	0.9	30.7	68.4	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	61.1	25.5	13.4	14.1	73.2	12.8
19	Nusa Tenggara Timur	302	5.3	24.5	70.2	0.3	29.5	70.2
20	Kalimantan Barat	233	22.3	10.3	67.4	7.7	25.3	67.0
21	Kalimantan Tengah	176	22.2	18.8	59.1	4.0	36.9	59.1
22	Kalimantan Selatan	217	50.7	26.7	22.6	8.3	69.6	22.1
23	Kalimantan Timur	213	40.8	24.4	34.7	13.1	52.1	34.7
24	Sulawesi Utara	167	30.5	16.2	53.3	4.2	42.5	53.3
25	Sulawesi Tengah	163	13.5	14.7	71.8	1.2	27.0	71.8
26	Sulawesi Selatan	406	41.9	14.8	43.3	9.6	47.5	42.9
27	Sulawesi Tenggara	233	11.2	19.3	69.5	1.3	29.2	69.5
28	Gorontalo	74	13.5	5.4	81.1	2.7	16.2	81.1
29	Sulawesi Barat	81	16.0	7.4	76.5	6.2	17.3	76.5
30	Maluku	161	11.8	37.9	50.3	3.1	46.6	50.3
31	Maluku Utara	101	1.0	10.9	88.1	0	11.9	88.1
32	Papua Barat	104	2.9	51.0	46.2	1.0	52.9	46.2
33	Papua	294	3.7	76.2	20.1	1.4	78.9	19.7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	56.2	19.3	24.5	21.2	54.4	24.4
2	Perdesaan	6660	41.0	21.9	37.1	15.0	48.1	36.9
	INDONESIA	**8981**	**44.9**	**21.2**	**33.8**	**16.6**	**49.7**	**33.7**

Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan lengkap kegiatan untuk program kesehatan Mata(melaksanakan kelima jenis kegiatan seperti tersebut diatas) secara nasional hanya 16,6 persen, di perkotaan 21,2 persen dan di perdesaan 15,0 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (39,9%), Jawa Barat (38,8%) dan Sumatera Barat (33,1%). Sementara itu, ada 2 provinsi yang belum melakukan lengkap kegiatan program kesehatan Mata (0%) yaitu Maluku Utara dan Kepulauan Riau.

4.8.16.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Mata

Tabel 4.8.16.2.1 menunjukan bahwa persentase Puskesmas yang ada tenaga pelaksana Kegiatan Program Kesehatan Mata secara nasional sebanyak 49,0 persen, dengan rincian yang memiliki jumlah petugas 1-5 orang sebanyak 44,5 persen, 6-10 orang sebanyak 2,5 persen, 11-20 orang sebanyak 1,2 persen, dan >20 orang sebanyak 0,7 persen. Sementara secara nasional 15,4 persen Puskesmas tidak memiliki petugas pelaksana untuk program Kesehatan mata. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana Kesehatan mata adalah Provinsi Bali (96,5 %), diikuti Provinsi Jawa Timur (87,4%) dan DI Yogyakarta (85,1 %). Sedangkan terendah di Provinsi Maluku Utara (1,0 %), PapuaBarat (5,8 %) dan Papua (6,1%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang ada petugas pelaksana kegiatan program Kesehatan mata ada sebanyak 58,4 persen, sementara di perdesaan 45,7 persen.

Tabel 4.8.16.2.1
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Mata, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana Program Kesehatan Mata					
			% Tidak Ada	% 1 - 5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	44.1	8.0	1.3	0	0	46.6
2	Sumatera Utara	506	13.8	44.1	1.0	0.4	1.2	39.5
3	Sumatera Barat	248	7.7	74.6	3.2	1.6	2.0	10.9
4	Riau	195	13.3	50.8	0.5	1.5	0	33.8
5	Jambi	171	11.1	33.3	1.8	0.6	0.6	52.6
6	Sumatera Selatan	298	8.4	63.1	0.3	0	0	28.2
7	Bengkulu	173	21.4	23.1	0	0	0	55.5
8	Lampung	265	4.2	24.5	1.1	0.8	0.8	68.7
9	Bangka Belitung	57	17.5	64.9	0	1.8	1.8	14.0
10	Kepulauan Riau	65	26.2	9.2	0	4.6	0	60.0
11	DKI Jakarta	336	43.2	34.5	0.3	0.3	0.3	21.4
12	Jawa Barat	1031	5.9	75.3	2.6	0.7	0.3	15.2
13	Jawa Tengah	861	22.8	43.2	5.5	1.9	1.0	25.7
14	DI Yogyakarta	121	4.1	50.4	18.2	10.7	5.8	10.7
15	Jawa Timur	949	2.8	75.2	7.0	3.9	1.3	9.8
16	Banten	206	8.7	58.7	2.9	1.0	1.0	27.7
17	Bali	114	2.6	77.2	9.6	7.0	2.6	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	16.8	65.1	0.7	0	1.3	16.1
19	Nusa Tenggara Timur	302	20.5	5.6	0.3	0.3	0	73.2
20	Kalimantan Barat	233	6.9	23.6	0	0.4	0.4	68.7
21	Kalimantan Tengah	176	12.5	21.0	4.0	1.7	1.1	59.7
22	Kalimantan Selatan	217	23.0	51.2	0.5	1.4	0	24.0
23	Kalimantan Timur	213	13.6	48.4	2.3	0	0	35.7
24	Sulawesi Utara	167	4.8	40.7	0	0	0	54.5
25	Sulawesi Tengah	163	5.5	16.0	0	0	0.6	77.9
26	Sulawesi Selatan	406	2.0	50.5	0.7	0	0.2	46.6
27	Sulawesi Tenggara	233	15.5	15.0	0	0	0	69.5
28	Gorontalo	74	1.4	17.6	1.4	0	0	79.7
29	Sulawesi Barat	81	0	21.0	0	0	0	79.0
30	Maluku	161	26.1	13.7	1.2	0.6	0	58.4
31	Maluku Utara	101	5.9	1.0	0	0	0	93.1
32	Papua Barat	104	47.1	4.8	0	0	1.0	47.1
33	Papua	294	67.0	5.1	0.7	0	0.3	26.9
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	15.4	52.8	3.7	1.4	0.5	26.2
2	Perdesaan	6660	15.5	41.7	2.1	1.1	0.8	38.9
	INDONESIA	**8981**	**15.4**	**44.5**	**2.5**	**1.2**	**0.7**	**35.6**

Tabel 4.8.16.2.2 menunjukkan persentase Puskesmas yang petugasnya menerima pelatihan berkaitan dengan Program Kesehatan Mata pada tahun 2009 atau tahun 2010, secara nasional hanya sebanyak 20,9 persen (di perkotaan 25,1%, di perdesaan 19,4%), sementara yang petugasnya tidak mengikuti pelatihan sebanyak 43,3 persen (di perkotaan 48,1%, diperdesaan 41,6%).

Tabel 4.8.16.2.2
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Program Kesehatan Mata, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Kesehatan Mata			Pedoman Kesehatan Mata		
			%Ya	%Tidak	% TAD	%Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	2.9	52.4	44.7	0.6	54.7	44.7
2	Sumatera Utara	506	16.4	45.5	38.1	7.5	54.7	37.7
3	Sumatera Barat	248	33.5	53.6	12.9	27.4	60.9	11.7
4	Riau	195	25.6	39.5	34.9	10.3	59.5	30.3
5	Jambi	171	15.8	35.1	49.1	15.2	35.7	49.1
6	Sumatera Selatan	298	35.6	34.6	29.9	29.5	42.6	27.9
7	Bengkulu	173	4.6	39.9	55.5	4.0	40.5	55.5
8	Lampung	265	10.2	21.1	68.7	8.7	22.3	69.1
9	Bangka Belitung	57	24.6	61.4	14.0	14.0	73.7	12.3
10	Kepulauan Riau	65	1.5	36.9	61.5	1.5	41.5	56.9
11	DKI Jakarta	336	13.7	64.3	22.0	11.9	69.0	19.0
12	Jawa Barat	1031	44.7	39.9	15.4	44.8	40.0	15.2
13	Jawa Tengah	861	18.9	55.2	25.9	18.6	56.9	24.5
14	DI Yogyakarta	121	33.9	55.4	10.7	49.6	39.7	10.7
15	Jawa Timur	949	32.9	55.6	11.5	32.8	57.1	10.1
16	Banten	206	33.0	39.8	27.2	26.7	46.6	26.7
17	Bali	114	37.7	59.6	2.6	32.5	66.7	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	37.6	47.7	14.8	27.5	57.0	15.4
19	Nusa Tenggara Timur	302	2.0	24.8	73.2	0.3	27.5	72.2
20	Kalimantan Barat	233	15.0	16.3	68.7	9.0	22.3	68.7
21	Kalimantan Tengah	176	9.1	31.3	59.7	8.5	32.4	59.1
22	Kalimantan Selatan	217	15.2	60.4	24.4	21.2	56.2	22.6
23	Kalimantan Timur	213	17.4	45.5	37.1	14.6	49.3	36.2
24	Sulawesi Utara	167	11.4	35.3	53.3	9.6	37.1	53.3
25	Sulawesi Tengah	163	4.3	17.2	78.5	3.1	17.8	79.1
26	Sulawesi Selatan	406	20.2	32.8	47.0	10.1	44.1	45.8
27	Sulawesi Tenggara	233	4.3	26.6	69.1	2.1	28.3	69.5
28	Gorontalo	74	5.4	14.9	79.7	2.7	17.6	79.7
29	Sulawesi Barat	81	7.4	12.3	80.2	8.6	12.3	79.0
30	Maluku	161	6.8	34.8	58.4	0	49.7	50.3
31	Maluku Utara	101	0.0	6.9	93.1	0	10.9	89.1
32	Papua Barat	104	2.9	50.0	47.1	1.0	51.9	47.1
33	Papua	294	3.1	69.7	27.2	0.3	78.9	20.7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	25.1	48.1	26.8	22.7	52.0	25.2
2	Perdesaan	6660	19.4	41.6	39.0	16.7	45.5	37.9
	INDONESIA	**8981**	**20.9**	**43.3**	**35.8**	**18.2**	**47.2**	**34.6**

Persentase tertinggi puskesmas mengikuti pelatihan kesehatan mata ada di Provinsi Jawa Barat (44,7%), Bali (37,7%), dan NTB (37,6 %). Sementara provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya tidak mengikuti pelatihan terkait program kesehatan mata pada tahun 2009 atau tahun 2010 adalah Papua (69,7%), DKI (64,3%) dan Bangka Belitung (61,4%).

Terlihat juga pada Tabel 4.8.16.2.2 bahwa Persentase Puskesmas menurut keberadaan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan program kesehatan mata secara nasional hanya 18,2 persen (di perkotaan 22,7%, diperdesaan 16,7%). Tertinggi di Provinsi DI

Yogyakarta (49,6%), Jawa Barat (44,8 %), diikuti Provinsi Jawa Timur (32,8 %). Sementara itu Provinsi terendah yaitu Provinsi NTT (0,3%), Papua (0,3%) dan DI Aceh (0,6%).

4.8.16.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Mata

Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Mata yang dikumpulkan pada Rifas 2011 terdiri dari bimbingan Teknis dalam bentuk kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Puskesmas, Umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan kab/Kota terhadap laporan kegiatan program Kesehatan Mata, dan keikutsertaan Puskesmas pada pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program Kesehatan Mata yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010 seperti terlihat pada tabel 4.8.16.3 a dan tabel 4.8.16.3 b.

Tabel 4.8.16.3.a
Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Mata, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan petugas Dinkes Kab/Kota untuk supervisi/bimbingan			Umpan balik laporan cakupan program Kesehatan Mata		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	0.3	54.7	45.0	0.6	54.3	45.0
2	Sumatera Utara	506	13.2	49.0	37.7	9.1	53.2	37.7
3	Sumatera Barat	248	19.0	69.4	11.7	16.9	71.0	12.1
4	Riau	195	5.6	64.1	30.3	8.7	61.0	30.3
5	Jambi	171	7.6	42.7	49.7	8.2	42.1	49.7
6	Sumatera Selatan	298	25.8	46.0	28.2	21.8	50.0	28.2
7	Bengkulu	173	8.7	35.8	55.5	4.0	40.5	55.5
8	Lampung	265	3.4	27.5	69.1	2.3	28.7	69.1
9	Bangka Belitung	57	10.5	77.2	12.3	10.5	77.2	12.3
10	Kepulauan Riau	65	0	43.1	56.9	0	43.1	56.9
11	DKI Jakarta	336	7.1	73.5	19.3	7.4	73.2	19.3
12	Jawa Barat	1031	39.9	44.9	15.2	42.5	42.3	15.2
13	Jawa Tengah	861	15.9	59.5	24.6	15.7	59.6	24.7
14	DI Yogyakarta	121	28.9	60.3	10.7	28.9	60.3	10.7
15	Jawa Timur	949	48.5	41.9	9.6	40.7	49.7	9.6
16	Banten	206	39.3	33.5	27.2	35.4	36.9	27.7
17	Bali	114	38.6	60.5	0.9	21.1	78.1	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	20.1	65.8	14.1	17.4	68.5	14.1
19	Nusa Tenggara Timur	302	0.3	27.2	72.5	0.3	27.2	72.5
20	Kalimantan Barat	233	4.3	27.5	68.2	4.3	27.5	68.2
21	Kalimantan Tengah	176	2.3	38.6	59.1	1.7	39.2	59.1
22	Kalimantan Selatan	217	5.5	71.9	22.6	11.1	66.4	22.6
23	Kalimantan Timur	213	15.5	48.8	35.7	10.8	53.5	35.7
24	Sulawesi Utara	167	10.8	35.9	53.3	10.2	36.5	53.3
25	Sulawesi Tengah	163	4.3	15.3	80.4	1.2	18.4	80.4
26	Sulawesi Selatan	406	15.0	39.4	45.6	8.1	46.3	45.6
27	Sulawesi Tenggara	233	0.9	29.6	69.5	1.7	28.8	69.5
28	Gorontalo	74	4.1	16.2	79.7	1.4	18.9	79.7
29	Sulawesi Barat	81	9.9	11.1	79.0	8.6	12.3	79.0
30	Maluku	161	0	49.7	50.3	0	49.7	50.3
31	Maluku Utara	101	0	10.9	89.1	0	10.9	89.1
32	Papua Barat	104	1.0	51.9	47.1	0	52.9	47.1
33	Papua	294	0.3	78.9	20.7	0.3	78.9	20.7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	20.9	53.8	25.3	18.5	56.2	25.3
2	Perdesaan	6660	17.2	45.0	37.8	15.7	46.5	37.9
	INDONESIA	**8981**	**18.1**	**47.3**	**34.6**	**16.4**	**49.0**	**34.6**

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota sebesar 18,1 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 20,9 persen, sementara di perdesaan 17,2 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (48,5%), Jawa Barat (39,9 %), dan Banten (39,3%). Sementara presentase terendah adalah Maluku Utara, Maluku dan Kepulauan Riau (0%)

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan Umpan balik laporan cakupan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah 16,4 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 18,5 persen, sementara di perdesaan 15,7 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Barat (42,59%), Jawa Timur (40,7%), dan Banten (35,4 %). Sementara presentase terendah adalah Papua Barat, Maluku Utara, Maluku dan Kepulauan Riau (0%)

Tabel 4.8.16.3.b
Persentase Puskesmas menurut Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Mata, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pertemuan monev program Kesehatan Mata			Bimbingan Teknis Lengkap Program Kesehatan		
			% Ya	%Tidak	% TAD	% Ya	%Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	0.6	54.3	45.0	0.3	54.7	45.0
2	Sumatera Utara	506	17.0	45.1	37.9	4.7	57.5	37.7
3	Sumatera Barat	248	17.7	70.2	12.1	10.9	77.4	11.7
4	Riau	195	6.2	63.6	30.3	3.1	66.7	30.3
5	Jambi	171	7.0	42.7	50.3	3.5	46.2	50.3
6	Sumatera Selatan	298	18.5	53.0	28.5	13.8	57.7	28.5
7	Bengkulu	173	4.0	40.5	55.5	2.3	42.2	55.5
8	Lampung	265	2.6	28.3	69.1	1.9	29.1	69.1
9	Bangka Belitung	57	15.8	71.9	12.3	3.5	84.2	12.3
10	Kepulauan Riau	65	0	43.1	56.9	0	43.1	56.9
11	DKI Jakarta	336	8.6	71.7	19.6	6.5	74.1	19.3
12	Jawa Barat	1031	50.3	34.2	15.4	30.7	54.0	15.2
13	Jawa Tengah	861	17.9	57.4	24.7	10.0	65.4	24.6
14	DI Yogyakarta	121	43.8	45.5	10.7	19.0	70.2	10.7
15	Jawa Timur	949	47.3	42.7	10.0	29.4	60.7	9.9
16	Banten	206	37.9	34.0	28.2	27.7	44.7	27.7
17	Bali	114	30.7	68.4	0.9	12.3	86.8	0.9
18	Nusa Tenggara Barat	149	23.5	62.4	14.1	10.1	75.8	14.1
19	Nusa Tenggara Timur	302	0.3	27.2	72.5	0.3	27.2	72.5
20	Kalimantan Barat	233	4.3	27.5	68.2	3.0	28.8	68.2
21	Kalimantan Tengah	176	2.3	38.6	59.1	1.7	39.2	59.1
22	Kalimantan Selatan	217	17.1	60.4	22.6	2.3	75.1	22.6
23	Kalimantan Timur	213	7.5	56.8	35.7	5.2	59.2	35.7
24	Sulawesi Utara	167	8.4	38.3	53.3	5.4	41.3	53.3
25	Sulawesi Tengah	163	1.2	18.4	80.4	1.2	18.4	80.4
26	Sulawesi Selatan	406	12.8	41.6	45.6	4.4	50.0	45.6
27	Sulawesi Tenggara	233	0.4	29.6	70.0	0.4	30.0	69.5
28	Gorontalo	74	5.4	14.9	79.7	1.4	18.9	79.7
29	Sulawesi Barat	81	7.4	13.6	79.0	7.4	13.6	79.0
30	Maluku	161	0	49.7	50.3	0	49.7	50.3
31	Maluku Utara	101	0	10.9	89.1	0	10.9	89.1
32	Papua Barat	104	0	52.9	47.1	0	52.9	47.1
33	Papua	294	0.7	78.6	20.7	0.3	78.9	20.7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	23.8	50.8	25.4	13.4	61.2	25.4
2	Perdesaan	6660	17.7	44.3	38.0	10.3	51.9	37.9
	INDONESIA	**8981**	**19.3**	**45.9**	**34.7**	**11.1**	**54.3**	**34.6**

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program adalah 19,3 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 23,8 persen, sementara di perdesaan 17,7 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Barat (50,3 %), Jawa Timur (47,3%) dan DIY (43,8%). Sementara presentase terendah ada di Papua Barat, Maluku Utara, Maluku dan Kepulauan Riau (0%)

Persentase Puskesmas yang mendapatkan monitoring dan bimbingan teknis lengkap untuk program Kesehatan mata (menerima ketiga bentuk Monitoring dan Bimbingan Teknis seperti tersebut diatas) secara nasional adalah sebanyak 13,5 persen (persentase di perkotaan 17,4% dan di perdesaan 12,2%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Barat (30,7%), Jawa Timur (29,4 %), dan Banten (27,7%). Sementara presentase terendah ada di Papua Barat, Maluku Utara, Maluku dan Kepulauan Riau (0%).

4.8.17. PROGRAM KESEHATAN USIA LANJUT

4.8.17.1. Kegiatan Program Kesehatan Usia Lanjut

Program Kesehatan Usia lanjut adalah upaya pelayanan kesehatan berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan status kesehatan lanjutusia. Kegiatan program kesehatan usia lanjut yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga Puskesmas pada tahun 2010, yang terdiri dari: 1) Kegiatan Promotif Penyuluhan tentang Perilaku Hidup Sehat dan Gizi Lanjut Usia 2) Deteksi Dini dan Pemantauan Kesehatan Lanjut Usia 3) Pengobatan Ringan bagi Lanjut Usia dan 4) Kegiatan Rehabilitatif berupa Upaya Medis, Psikososial, dan edukatif.Tabel 4.8.17.1.a dan Tabel 4.8.17.1.b menunjukkan kegiatan program kesehatan usia lanjut yang dilakukan Puskesmas pada tahun 2010.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan promotif penyuluhan tentang perilaku hidup sehat dan gizi lanjut usia secara nasional 75,7 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (93,8%), Jawa Tengah (93,6%) dan DIY (93,4%). Sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Papua (6,5%), Papua Barat (10,6%) dan Sulawesi Tenggara (31,8%).Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan promotif penyuluhan tentang perilaku hidup sehat dan gizi lanjut usia85,1 persen,sementara di perdesaan 72,4 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan Deteksi Dini dan Pemantauan Kesehatan Lanjut Usia secara nasional 73,6 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (95,0%), Jawa Tengah (93,6%) dan Jawa Timur (92,1%). Sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Papua (5,4%), Papua Barat (8,7%) dan Sulawesi Tenggara (30,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dan Pemantauan KesehatanLanjut Usia 83,6 persen, sementara di perdesaan 70,2 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pengobatan Ringan bagi Lanjut Usia, secara nasional 80,2 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (98,3%), Bali (97,4%) dan Jawa Timur (96,8%). Sedangkan terendah ada di Provinsi Papua (7,5 %), Papua Barat (13,5 %) dan Sulawesi Tenggara (39,9%).Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pengobatan Ringan 87,9 persen, sementara di perdesaan 77,5 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan rehabilitatif bagi lanjut usia secara nasional 46,7 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (81,8%), Jawa Timur (62,8%) dan Jawa Tengah (61,9%). Sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Papua (3,4%), Papua Barat (6,7%) dan Sulawesi Tenggara (15,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan rehabilitatif 55,0 persen, sementara di perdesaan 43,8 persen.

Tabel 4.8.17.1.a
Persentase Puskesmas menurutJenis Kegiatan Program Kesehatan Usia Lanjut, Rifaskes2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kegiatan Promotif Penyuluhan			Deteksi Dini dan Pemantauan Kes			Pengobatan Ringan		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	51,8	33,4	14,8	48,6	36,7	14,8	67,2	18,0	14,8
2	Sumatera Utara	506	81,2	13,2	5,5	77,1	17,4	5,5	82,4	12,1	5,5
3	Sumatera Barat	248	91,9	6,5	1,6	85,9	12,5	1,6	93,5	4,8	1,6
4	Riau	195	81,0	10,8	8,2	80,5	11,3	8,2	86,7	5,1	8,2
5	Jambi	171	73,1	14,6	12,3	69,6	18,1	12,3	81,3	6,4	12,3
6	Sumatera Selatan	298	81,2	10,1	8,7	79,2	12,1	8,7	86,6	4,7	8,7
7	Bengkulu	173	62,4	24,9	12,7	59,5	27,7	12,7	74,6	12,7	12,7
8	Lampung	265	78,9	8,7	12,5	77,4	9,8	12,8	83,4	3,8	12,8
9	Bangka Belitung	57	87,7	12,3	0	91,2	8,8	0	96,5	3,5	0
10	Kepulauan Riau	65	81,5	16,9	1,5	81,5	16,9	1,5	90,8	7,7	1,5
11	DKI Jakarta	336	82,7	14,0	3,3	82,1	14,6	3,3	83,0	13,7	3,3
12	Jawa Barat	1031	89,9	6,8	3,3	88,1	8,6	3,3	93,1	3,6	3,3
13	Jawa Tengah	861	93,6	5,2	1,2	93,6	5,3	1,0	95,0	3,9	1,0
14	DI Yogyakarta	121	93,4	6,6	0	95,0	5,0	0	98,3	1,7	0
15	Jawa Timur	949	93,8	5,0	1,3	92,1	6,6	1,3	96,8	1,9	1,3
16	Banten	206	84,5	5,8	9,7	81,6	8,7	9,7	86,4	3,9	9,7
17	Bali	114	88,6	10,5	0,9	89,5	10,5	0	97,4	2,6	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	77,2	15,4	7,4	73,8	18,8	7,4	77,2	15,4	7,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	53,6	16,2	30,1	51,0	18,9	30,1	56,0	13,9	30,1
20	Kalimantan Barat	233	66,1	9,9	24,0	64,4	11,2	24,5	71,7	3,9	24,5
21	Kalimantan Tengah	176	59,7	15,3	25,0	52,8	22,2	25,0	65,3	9,7	25,0
22	Kalimantan Selatan	217	83,4	12,9	3,7	81,1	15,2	3,7	91,7	4,6	3,7
23	Kalimantan Timur	213	71,4	18,8	9,9	73,2	16,9	9,9	79,8	10,3	9,9
24	Sulawesi Utara	167	76,0	7,8	16,2	65,3	18,6	16,2	78,4	5,4	16,2
25	Sulawesi Tengah	163	76,1	11,7	12,3	73,0	14,7	12,3	81,6	6,1	12,3
26	Sulawesi Selatan	406	82,3	9,6	8,1	80,0	11,8	8,1	87,9	3,9	8,1
27	Sulawesi Tenggara	233	31,8	23,2	45,1	30,9	24,0	45,1	39,9	15,0	45,1
28	Gorontalo	74	50,0	24,3	25,7	50,0	24,3	25,7	67,6	6,8	25,7
29	Sulawesi Barat	81	53,1	11,1	35,8	46,9	17,3	35,8	59,3	4,9	35,8
30	Maluku	161	46,6	21,7	31,7	46,0	22,4	31,7	52,2	16,1	31,7
31	Maluku Utara	101	47,5	20,8	31,7	46,5	21,8	31,7	59,4	8,9	31,7
32	Papua Barat	104	10,6	48,1	41,3	8,7	50,0	41,3	13,5	45,2	41,3
33	Papua	294	6,5	73,8	19,7	5,4	74,8	19,7	7,5	72,8	19,7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	85,1	10,2	4,7	83,6	11,7	4,7	87,9	7,4	4,7
2	Perdesaan	6660	72,4	15,3	12,4	70,2	17,5	12,4	77,5	10,2	12,4
	INDONESIA	**8981**	**75,7**	**14,0**	**10,4**	**73,6**	**16,0**	**10,4**	**80,2**	**9,5**	**10,4**

Secara nasional,persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan lengkap program Kesehatan Usia Lanjut(melaksanakan seluruh kegiatan tersebut diatas) 42,3 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (71,9%), Jawa Timur (59,4%) dan Sumatera Barat (57,3%). Sedangkan persentase terendah di Provinsi Papua (3,1%), Papua Barat (5,8%) dan Sulawesi Tenggara (12,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan lengkap untuk program Kesehatan usia lanjut ada sebanyak 50,4 persen, sementara di perdesaan 39,5 persen.

Tabel 4.8.17.1.b
Persentase Puskesmas menurutJenis Kegiatan Program Kesehatan Usia Lanjut, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kegiatan Rehabilitatif			Kegiatan Lengkap		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	33,4	50,8	15,8	23,5	61,1	15,4
2	Sumatera Utara	506	42,7	51,6	5,7	37,5	56,7	5,7
3	Sumatera Barat	248	60,5	37,9	1,6	57,3	41,1	1,6
4	Riau	195	50,8	40,5	8,7	45,6	45,6	8,7
5	Jambi	171	40,9	46,8	12,3	36,3	51,5	12,3
6	Sumatera Selatan	298	50,0	41,3	8,7	45,6	45,6	8,7
7	Bengkulu	173	34,7	52,6	12,7	29,5	57,8	12,7
8	Lampung	265	46,0	41,1	12,8	40,8	47,2	12,1
9	Bangka Belitung	57	57,9	42,1	0	56,1	43,9	0
10	Kepulauan Riau	65	55,4	43,1	1,5	50,8	47,7	1,5
11	DKI Jakarta	336	56,0	40,8	3,3	51,8	44,9	3,3
12	Jawa Barat	1031	61,2	35,3	3,5	56,2	40,3	3,5
13	Jawa Tengah	861	61,9	37,0	1,0	56,6	42,3	1,2
14	DI Yogyakarta	121	81,8	18,2	0	71,9	28,1	0
15	Jawa Timur	949	62,8	35,9	1,3	59,4	39,3	1,3
16	Banten	206	41,3	49,0	9,7	38,8	51,5	9,7
17	Bali	114	51,8	47,4	0,9	47,4	50,9	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	44,3	47,7	8,1	43,0	49,0	8,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	25,8	44,0	30,1	22,8	47,0	30,1
20	Kalimantan Barat	233	43,8	31,8	24,5	39,9	36,1	24,0
21	Kalimantan Tengah	176	31,3	42,6	26,1	26,7	47,2	26,1
22	Kalimantan Selatan	217	51,6	44,7	3,7	47,5	48,8	3,7
23	Kalimantan Timur	213	42,7	46,9	10,3	40,4	49,3	10,3
24	Sulawesi Utara	167	34,7	49,1	16,2	32,3	51,5	16,2
25	Sulawesi Tengah	163	33,7	54,0	12,3	31,3	56,4	12,3
26	Sulawesi Selatan	406	48,0	43,8	8,1	42,1	49,8	8,1
27	Sulawesi Tenggara	233	15,9	39,1	45,1	12,9	42,1	45,1
28	Gorontalo	74	23,0	51,4	25,7	17,6	56,8	25,7
29	Sulawesi Barat	81	27,2	37,0	35,8	19,8	44,4	35,8
30	Maluku	161	21,1	47,2	31,7	19,3	49,1	31,7
31	Maluku Utara	101	26,7	41,6	31,7	18,8	49,5	31,7
32	Papua Barat	104	6,7	51,9	41,3	5,8	52,9	41,3
33	Papua	294	3,4	76,9	19,7	3,1	77,2	19,7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	55,0	40,2	4,9	50,4	44,7	4,9
2	Perdesaan	6660	43,8	43,7	12,5	39,5	48,0	12,5
	INDONESIA	**8981**	**46,7**	**42,8**	**10,5**	**42,3**	**47,2**	**10,5**

4.8.17.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Program Kes Usia Lanjut

Tabel 4.8.17.2.1
Persentase Puskesmas menurut Petugas Program Kesehatan Usila Lanjut, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana Program Kesehatan Usia Lanjut					
			% Tidak Ada	% 1- 5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	8,4	73,3	1,0	0,3	0,3	16,7
2	Sumatera Utara	506	6,7	72,5	6,7	5,9	2,2	5,9
3	Sumatera Barat	248	4,4	65,7	10,5	12,9	4,4	2,0
4	Riau	195	2,1	63,1	12,3	6,7	6,7	9,2
5	Jambi	171	4,7	67,8	7,6	2,3	3,5	14,0
6	Sumatera Selatan	298	2,3	77,5	6,0	3,4	1,3	9,4
7	Bengkulu	173	8,7	74,0	1,7	2,3	0,6	12,7
8	Lampung	265	2,6	54,7	15,8	11,7	2,6	12,5
9	Bangka Belitung	57	1,8	78,9	12,3	5,3	1,8	0
10	Kepulauan Riau	65	6,2	61,5	10,8	12,3	7,7	1,5
11	DKI Jakarta	336	10,4	81,8	2,4	0,6	0,6	4,2
12	Jawa Barat	1031	1,4	85,8	6,8	2,4	0,2	3,4
13	Jawa Tengah	861	2,0	44,1	18,0	27,9	6,9	1,2
14	DI Yogyakarta	121	0	33,1	11,6	28,1	26,4	0,8
15	Jawa Timur	949	0,9	49,7	22,8	20,8	4,0	1,8
16	Banten	206	2,4	76,7	6,8	2,4	1,0	10,7
17	Bali	114	2,6	68,4	10,5	7,9	10,5	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	11,4	77,9	2,0	0	0	8,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	10,3	34,8	9,3	10,6	2,3	32,8
20	Kalimantan Barat	233	2,6	52,4	12,4	6,9	0,4	25,3
21	Kalimantan Tengah	176	5,1	52,3	9,7	3,4	3,4	26,1
22	Kalimantan Selatan	217	4,6	62,2	12,9	8,8	6,5	5,1
23	Kalimantan Timur	213	8,0	68,1	7,5	4,2	1,9	10,3
24	Sulawesi Utara	167	1,8	76,6	4,8	0,6	0	16,2
25	Sulawesi Tengah	163	2,5	81,0	0,6	1,8	0	14,1
26	Sulawesi Selatan	406	0,7	86,7	2,7	1,5	0,2	8,1
27	Sulawesi Tenggara	233	12,9	38,2	2,6	0,9	0	45,5
28	Gorontalo	74	2,7	70,3	0	2,7	0	24,3
29	Sulawesi Barat	81	0	59,3	3,7	1,2	0	35,8
30	Maluku	161	8,7	46,0	3,1	2,5	1,2	38,5
31	Maluku Utara	101	4,0	50,5	5,0	4,0	1,0	35,6
32	Papua Barat	104	45,2	10,6	1,9	0	0	42,3
33	Papua	294	64,6	7,1	1,4	0	0,7	26,2
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	4,2	72,3	9,2	6,0	2,7	5,7
2	Perdesaan	6660	7,4	58,1	9,3	9,2	2,7	13,3
	INDONESIA	8981	**6,5**	**61,8**	**9,3**	**8,4**	**2,7**	**11,3**

Tabel 4.8.17.2.2
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Petugas dan Pedoman Program Kesehatan Usila Lanjut, Rifaskes2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Petugas Ikut Pelatihan Program Kesehatan Usia Lanjut			Pedoman Program Kesehatan Usia Lanjut		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	38,9	44,7	16,4	32,5	52,4	15,1
2	Sumatera Utara	506	50,0	44,1	5,9	47,4	46,8	5,7
3	Sumatera Barat	248	35,5	61,7	2,8	45,2	53,2	1,6
4	Riau	195	43,6	47,2	9,2	49,7	42,1	8,2
5	Jambi	171	41,0	46,2	12,9	40,9	46,2	12,9
6	Sumatera Selatan	298	48,0	41,3	10,7	54,7	36,2	9,1
7	Bengkulu	173	22,6	62,4	15,0	19,1	67,6	13,3
8	Lampung	265	36,6	50,6	12,8	43,4	43,8	12,8
9	Bangka Belitung	57	40,4	59,6	0	66,7	33,3	0
10	Kepulauan Riau	65	29,2	63,1	7,7	47,7	50,8	1,5
11	DKI Jakarta	336	38,1	56,3	5,7	59,8	36,0	4,2
12	Jawa Barat	1031	53,0	43,3	3,8	75,7	21,0	3,4
13	Jawa Tengah	861	39,7	58,3	2,0	60,9	38,0	1,2
14	DI Yogyakarta	121	79,3	20,7	0	90,1	9,9	0
15	Jawa Timur	949	46,5	49,2	3,9	69,5	28,7	1,8
16	Banten	206	49,5	40,3	10,2	64,6	25,2	10,2
17	Bali	114	35,1	64,0	0,9	84,2	15,8	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	45,0	45,0	10,1	57,7	32,9	9,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	13,6	52,6	33,8	17,5	51,0	31,5
20	Kalimantan Barat	233	31,3	42,9	25,8	41,2	33,9	24,9
21	Kalimantan Tengah	176	34,7	39,2	26,1	40,9	33,5	25,6
22	Kalimantan Selatan	217	43,8	51,6	4,6	54,4	41,9	3,7
23	Kalimantan Timur	213	35,2	54,5	10,3	55,4	33,8	10,8
24	Sulawesi Utara	167	26,3	57,5	16,2	23,4	59,9	16,8
25	Sulawesi Tengah	163	44,8	41,7	13,5	40,5	46,6	12,9
26	Sulawesi Selatan	406	38,2	53,7	8,1	44,8	47,0	8,1
27	Sulawesi Tenggara	233	11,2	42,9	45,9	12,9	41,6	45,5
28	Gorontalo	74	17,6	58,1	24,3	23,0	52,7	24,3
29	Sulawesi Barat	81	28,4	35,8	35,8	22,2	42,0	35,8
30	Maluku	161	25,5	34,2	40,4	16,1	52,2	31,7
31	Maluku Utara	101	21,8	37,6	40,6	19,8	48,5	31,7
32	Papua Barat	104	4,8	52,9	42,3	8,7	50,0	41,3
33	Papua	294	6,5	67,3	26,2	3,1	76,9	20,1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	45,7	47,5	6,8	61,1	33,8	5,2
2	Perdesaan	6660	36,3	50,0	13,8	45,7	41,6	12,7
	INDONESIA	8981	**38,6**	**49,4**	**12,0**	**49,7**	**39,6**	**10,7**

Tabel 4.8.17.2.1 menunjukan bahwa secara nasional ada 6,5 persen Puskesmas yang tidak memiliki petugas pelaksana program kesehatan usia lanjut. Sedangkan persentase Puskesmas yang mempunyai tenaga pelaksana Kegiatan program kesehatan usia lanjut 1- 5 orang adalah sebesar 61,8 persen. Ada dua provinsi yang semua Puskesmas memiliki petugas pelaksana program kesehatan usila lanjut yaitu Provinsi DIY dan Sulawesi Barat. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana kesehatan usia lanjut 1-5 orang adalah Provinsi Sulawesi Selatan (86,7%), diikuti Provinsi Jawa Barat (85,8%), dan Provinsi DKI (81,8%). Sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Papua Barat (7,1%), Papua Barat (10,6 %). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang ada petugas pelaksana kegiatan Kesehatan usia lanjut 1-5 orang adalah 72,3 persen,sementara di perdesaan 58,1 persen.

Tabel 4.8.17.2.2 menunjukkan Persentase Puskesmas menurut keikutsertaan petugas pada pelatihan program kesehatan usia lanjut pada tahun 2009 atau tahun 2010 secara nasional ada 38,0 persen yang mengikuti pelatihan. Persentase tertinggi di Provinsi DIY (79,3%), diikuti Jawa Barat (53,0%), dan Banten (49,5%). Sedangkan terendah Provinsi Papua Barat (4,8%), diikuti Papua (6,5%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang petugas pelaksana kegiatan Kesehatan usia lanjut mengikuti pelatihan 45,7 persen ,sementara di perdesaan 36,3 persen.

Persentase Puskesmas yang mempunyai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesehatan usia lanjut secara nasional 49,7 persen (di perkotaan 61,1%, diperdesaan 45,7%). Persentase tertinggi di Provinsi DIY (90,1%), Bali (84,2%), dan Jawa Timur (69,5%). Sedangkan persentase terendah Provinsi Papua (3,1%), diikuti Papua Barat (8,7%) dan Sulawesi Tenggara (12,9%).

4.8.17.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Usia Lanjut

Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Usia Lanjut yang dikumpulkan pada Rifas 2011 terdiri dari bimbingan Tehnis dalam bentuk kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Puskesmas, Umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan kab/Kota terhadap laporan kegiatan Program Kesehatan Usia Lanjut, dan keikutsertaan Puskesmas pada pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program Program Kesehatan Usia Lanjut yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010 seperti terlihat pada tabel 4.8.17.3a dan tabel 4.8.17.3b.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan kunjungan supervisi Program Kesehatan Usia Lanjut dari petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota hanya 26,7 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 34,7 persen, sementara di perdesaan 23,9 persen. Persentase tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat (51,6%), Jawa Timur (50,9%) dan Banten (50,5%). Sementara presentase terendah ada di Provinsi Maluku (0,6%), diikuti Papua (1,4%), Maluku Utara (3,0%).

Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Usia Lanjut yang diterima Puskesmas dalam bentuk umpan balik tertulis laporan program dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota,secara nasional, hanya 36,1 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 43,4 persen, sementara di perdesaan 33,6 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Barat (64,2%), Jawa Timur (60,7%) dan DIY (56,2%).

Sementara presentase terendah Provinsi Papua (2,4%), selanjutnya Papua (7,7%) dan Maluku (8,1%).

Persentase Puskesmas yang mengikuti Pertemuan Monitoring atau Evaluasi (Monev)program kesehatan usia lanjut diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kab/ Kota, secara nasional, adalah 44,6 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 55,3 persen, sementara di perdesaan 40,9 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (89,3%), Jawa Timur (78,8%) dan Jawa Barat (75,6%). Sementara terendah Provinsi Papua (1,4%), Maluku (4,3%), dan Papua Barat (4,8%).

Persentase Puskesmas yang mendapatkan monitoring dan bimbingan teknis lengkap program kesehatan usia lanjut (menerima ketiga bentuk monitoring dan bimbingan teknis seperti tersebut diatas) secara nasional adalah sebanyak 26,7 persen (persentase di perkotaan 34,7% dan di perdesaan 23,9%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Barat (51,6%), Jawa Timur (50,9%) dan Banten (50,5%). Sementara presentase terendah adalah Provinsi Maluku (0,6 %).Papua (1,4%), dan maluku Utara (3,0%)

Tabel4.8.17.3.a

Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Monitoring dan Bimbingan Teknis Program KesehatanUsia Lanjut, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan supervisi Dinkes			Umpan Balik		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	21,9	63,0	15,1	17,7	67,2	15,1
2	Sumatera Utara	506	37,2	57,1	5,7	26,5	67,8	5,7
3	Sumatera Barat	248	46,8	51,6	1,6	33,9	64,5	1,6
4	Riau	195	28,7	63,1	8,2	27,2	64,6	8,2
5	Jambi	171	31,6	55,6	12,9	24,0	63,2	12,9
6	Sumatera Selatan	298	42,3	48,7	9,1	36,2	54,7	9,1
7	Bengkulu	173	25,4	61,3	13,3	17,3	69,4	13,3
8	Lampung	265	37,7	49,4	12,8	29,4	57,7	12,8
9	Bangka Belitung	57	49,1	50,9	0	31,6	68,4	0
10	Kepulauan Riau	65	38,5	60,0	1,5	35,4	63,1	1,5
11	DKI Jakarta	336	45,5	50,6	3,9	37,8	58,3	3,9
12	Jawa Barat	1031	63,1	33,6	3,3	64,2	32,5	3,3
13	Jawa Tengah	861	52,6	46,3	1,0	48,8	50,1	1,2
14	DI Yogyakarta	121	56,2	43,8	0	56,2	43,8	0
15	Jawa Timur	949	68,8	29,8	1,4	60,7	37,7	1,6
16	Banten	206	60,2	30,1	9,7	54,4	35,4	10,2
17	Bali	114	45,6	54,4	0	33,3	66,7	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	45,6	45,0	9,4	41,6	49,0	9,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	12,9	55,6	31,5	11,9	56,6	31,5
20	Kalimantan Barat	233	29,2	45,9	24,9	33,9	41,2	24,9
21	Kalimantan Tengah	176	19,3	55,1	25,6	15,3	59,1	25,6
22	Kalimantan Selatan	217	46,5	49,8	3,7	32,7	63,6	3,7
23	Kalimantan Timur	213	27,7	62,0	10,3	20,2	69,5	10,3
24	Sulawesi Utara	167	30,5	52,1	17,4	27,5	55,1	17,4
25	Sulawesi Tengah	163	20,9	66,3	12,9	16,6	70,6	12,9
26	Sulawesi Selatan	406	47,5	44,3	8,1	29,6	62,3	8,1
27	Sulawesi Tenggara	233	10,3	44,2	45,5	10,3	43,8	45,9
28	Gorontalo	74	37,8	37,8	24,3	27,0	48,6	24,3
29	Sulawesi Barat	81	27,2	37,0	35,8	25,9	38,3	35,8
30	Maluku	161	8,7	59,6	31,7	8,1	60,2	31,7
31	Maluku Utara	101	10,9	57,4	31,7	12,9	55,4	31,7
32	Papua Barat	104	7,7	50,0	42,3	7,7	50,0	42,3
33	Papua	294	1,7	78,2	20,1	2,4	77,6	20,1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	51,3	43,8	5,0	43,4	51,5	5,1
2	Perdesaan	6660	38,0	49,4	12,6	33,6	53,8	12,7
	INDONESIA	**8981**	**41,4**	**48,0**	**10,6**	**36,1**	**53,2**	**10,7**

Tabel 4.8.17.3.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Usia Lanjut, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pertemuan Monev			Monitoring dan Bimbingan Teknis lengkap		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	26,0	58,8	15,1	8,7	76,2	15,1
2	Sumatera Utara	506	40,9	53,6	5,5	18,0	76,5	5,5
3	Sumatera Barat	248	43,1	55,2	1,6	26,6	71,8	1,6
4	Riau	195	29,7	62,1	8,2	19,5	72,3	8,2
5	Jambi	171	30,4	56,1	13,5	11,7	75,4	12,9
6	Sumatera Selatan	298	37,9	52,7	9,4	29,2	61,4	9,4
7	Bengkulu	173	16,2	69,4	14,5	6,4	79,8	13,9
8	Lampung	265	32,5	54,7	12,8	22,3	64,9	12,8
9	Bangka Belitung	57	36,8	63,2	0	19,3	80,7	0
10	Kepulauan Riau	65	27,7	70,8	1,5	20,0	78,5	1,5
11	DKI Jakarta	336	56,0	39,9	4,2	34,2	61,6	4,2
12	Jawa Barat	1031	75,6	20,8	3,7	51,6	44,8	3,6
13	Jawa Tengah	861	63,4	35,3	1,3	35,8	63,1	1,2
14	DI Yogyakarta	121	89,3	10,7	0	39,7	60,3	0
15	Jawa Timur	949	78,8	19,5	1,7	50,9	47,5	1,6
16	Banten	206	69,4	20,4	10,2	50,5	39,8	9,7
17	Bali	114	53,5	45,6	0,9	26,3	72,8	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	40,9	49,0	10,1	28,2	61,7	10,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	13,9	54,6	31,5	6,0	62,6	31,5
20	Kalimantan Barat	233	24,9	50,2	24,9	17,2	57,9	24,9
21	Kalimantan Tengah	176	12,5	61,9	25,6	5,1	69,3	25,6
22	Kalimantan Selatan	217	53,5	42,9	3,7	27,2	69,1	3,7
23	Kalimantan Timur	213	33,8	55,4	10,8	13,6	76,1	10,3
24	Sulawesi Utara	167	20,4	62,3	17,4	12,6	70,1	17,4
25	Sulawesi Tengah	163	16,6	69,9	13,5	6,7	80,4	12,9
26	Sulawesi Selatan	406	37,9	53,9	8,1	19,2	72,7	8,1
27	Sulawesi Tenggara	233	5,6	48,5	45,9	2,6	51,5	45,9
28	Gorontalo	74	27,0	48,6	24,3	21,6	54,1	24,3
29	Sulawesi Barat	81	22,2	40,7	37,0	11,1	51,9	37,0
30	Maluku	161	4,3	64,0	31,7	0,6	67,7	31,7
31	Maluku Utara	101	7,9	59,4	32,7	3,0	65,3	31,7
32	Papua Barat	104	4,8	52,9	42,3	4,8	52,9	42,3
33	Papua	294	1,4	78,6	20,1	1,4	78,6	20,1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	55,3	39,5	5,3	34,7	60,1	5,2
2	Perdesaan	6660	40,9	46,3	12,8	23,9	63,4	12,7
	INDONESIA	**8981**	**44,6**	**44,5**	**10,9**	**26,7**	**62,6**	**10,8**

4.8.18. PEMBINAAN PENGOBATAN TRADISIONAL

4.8.18.1. Kegiatan Pembinaan Pengobatan Tradisional

Kegiatan Program Pengobatan Tradisional yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011adalah kegiatan yang dilaksanakan petugas Puskesmas pada tahun 2010 ,yang terdiri dari 1) Pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), 2) Pembinaan Pengobat Tradisional. 3) Pelayanan Akupuntur di Puskesmasdan 4) Pelayanan Djamoe di Puskesmas

Tabel 4.8.18.1.a dan Tabel 4.8.18.1.b menunjukkan kegiatan Program Pembinaan Pengobatan Tradisional yang dilakukan tenaga Puskesmas pada tahun 2010. Persentase Puskesmas dengan kegiatan pembinaan TOGA secara nasional hanya 26,7 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Bali (72,8%), Lampung (55,1%) dan DIY (54,0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan TOGA 33,6 persen, sementara di perdesaan 24,3 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pembinaan Pengobat Tradisional secara nasional hanya 26,7 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Bali (67,5 %), Jawa Timur (51,1 %), Jawa Tengah (51,0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengobat Tradisional 33,2 persen, sementara di perdesaan 24,4 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pelayanan Akupuntur di Puskesmas secara nasional hanya 2,3 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (6,2%), Banten (5,3%) dan DKI Jakarta (5,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Akupuntur di Puskesmas sebesar 3,6 persen, sementara di perdesaan 1,8 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pelayanan Djamoe di Puskesmas secara nasional hanya 2,7 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (6,6%), Jawa Tengah (6,5%) dan DIY (5,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan Pelayanan Djamoe 3,5 persen, sementara di perdesaan 2,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan lengkap untuk program Pembinaan Pengobatan Tradisional, yaitu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut diatas hanya sebanyak 1,0 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (2,5 %) dan Jawa Tengah (2,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan lengkap untuk program Pembinaan Pengobatan Tradisional 1,4 persen, sementara di perdesaan 0, 8 persen.

Tabel 4.8.18.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pembinaan Pengobatan Tradisional, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pembinaan TOGA			Pembinaan Pengobat Tradisional			Pembinaan Pelayanan Akupunktur		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	2,6	53,4	44,1	1,6	54,3	44,1	0	55,9	44,1
2	Sumatera Utara	506	13,8	26,5	59,7	9,7	30,4	59,9	0,4	39,7	59,9
3	Sumatera Barat	248	49,2	23,8	27,0	33,9	38,7	27,4	2,0	70,6	27,4
4	Riau	195	40,0	31,3	28,7	33,3	37,9	28,7	0,5	70,8	28,7
5	Jambi	171	34,5	22,8	42,7	24,0	33,3	42,7	2,3	55,0	42,7
6	Sumatera Selatan	298	37,6	21,8	40,6	27,2	31,9	40,9	0,7	58,4	40,9
7	Bengkulu	173	20,8	33,5	45,7	13,3	41,0	45,7	1,2	53,2	45,7
8	Lampung	265	55,1	16,2	28,7	42,3	28,3	29,4	3,4	67,2	29,4
9	Bangka Belitung	57	29,8	70,2	0	42,1	57,9	0	0	100,0	0
10	Kepulauan Riau	65	23,1	40,0	36,9	26,2	36,9	36,9	1,5	61,5	36,9
11	DKI Jakarta	336	15,8	63,4	20,8	12,5	66,1	21,4	5,1	73,5	21,4
12	Jawa Barat	1031	33,3	32,2	34,5	31,7	33,7	34,6	3,2	62,2	34,6
13	Jawa Tengah	861	32,8	50,2	17,1	51,0	31,1	17,9	4,1	78,0	17,9
14	DI Yogyakarta	121	54,5	16,5	28,9	47,1	24,0	28,9	2,5	68,6	28,9
15	Jawa Timur	949	40,1	35,0	24,9	51,1	23,7	25,2	6,2	68,6	25,2
16	Banten	206	39,3	31,1	29,6	38,8	31,6	29,6	5,3	65,0	29,6
17	Bali	114	72,8	22,8	4,4	67,5	28,1	4,4	1,8	93,9	4,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	14,1	51,7	34,2	11,4	53,7	34,9	0,7	63,8	35,6
19	Nusa Tenggara Timur	302	1,7	25,2	73,2	2,0	24,8	73,2	0	26,8	73,2
20	Kalimantan Barat	233	12,4	14,6	73,0	10,7	15,5	73,8	1,7	24,5	73,8
21	Kalimantan Tengah	176	16,5	18,8	64,8	6,8	28,4	64,8	0	35,2	64,8
22	Kalimantan Selatan	217	42,4	33,2	24,4	35,0	40,6	24,4	0,5	75,1	24,4
23	Kalimantan Timur	213	12,7	23,5	63,8	8,5	27,2	64,3	2,8	32,9	64,3
24	Sulawesi Utara	167	16,8	24,0	59,3	19,2	21,6	59,3	0,6	40,1	59,3
25	Sulawesi Tengah	163	11,0	15,3	73,6	4,9	21,5	73,6	0	26,4	73,6
26	Sulawesi Selatan	406	30,5	24,6	44,8	31,0	22,9	46,1	1,0	53,0	46,1
27	Sulawesi Tenggara	233	6,9	18,5	74,7	4,3	21,0	74,7	0	25,3	74,7
28	Gorontalo	74	28,4	27,0	44,6	35,1	20,3	44,6	0	55,4	44,6
29	Sulawesi Barat	81	4,9	2,5	92,6	1,2	6,2	92,6	0	7,4	92,6
30	Maluku	161	16,1	37,9	46,0	14,9	39,1	46,0	0	54,0	46,0
31	Maluku Utara	101	3,0	14,9	82,2	2,0	15,8	82,2	0	17,8	82,2
32	Papua Barat	104	1,0	52,9	46,2	1,0	52,9	46,2	0	53,8	46,2
33	Papua	294	0,7	78,2	21,1	1,4	77,6	21,1	0,7	78,2	21,1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	33,6	36,3	30,1	33,2	36,4	30,4	3,6	66,0	30,4
2	Perdesaan	6660	24,3	33,0	42,7	24,4	32,6	43,0	1,8	55,2	43,0
	INDONESIA	**8981**	**26,7**	**33,9**	**39,4**	**26,7**	**33,6**	**39,7**	**2,3**	**58,0**	**39,7**

Tabel 4.8.18.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pembinaan Pengobatan Tradisional, RIFASKES 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pembinaan Pelayanan Djamoe			Kegiatan Lengkap Batra		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	0	55,9	44,1	0	55,9	44,1
2	Sumatera Utara	506	0,6	39,3	60,1	0,2	39,9	59,9
3	Sumatera Barat	248	3,2	69,4	27,4	1,6	71,4	27,0
4	Riau	195	2,6	68,7	28,7	0,5	70,8	28,7
5	Jambi	171	1,2	56,1	42,7	1,2	56,1	42,7
6	Sumatera Selatan	298	3,4	55,7	40,9	0,7	58,7	40,6
7	Bengkulu	173	2,9	51,4	45,7	0,6	53,8	45,7
8	Lampung	265	4,2	66,0	29,8	1,9	69,4	28,7
9	Bangka Belitung	57	5,3	94,7	0	0	100,0	0
10	Kepulauan Riau	65	0	63,1	36,9	0	63,1	36,9
11	DKI Jakarta	336	2,7	75,6	21,7	1,8	77,4	20,8
12	Jawa Barat	1031	2,7	62,7	34,6	1,3	64,2	34,5
13	Jawa Tengah	861	6,5	75,6	17,9	1,6	81,3	17,1
14	DI Yogyakarta	121	5,8	65,3	28,9	2,5	68,6	28,9
15	Jawa Timur	949	6,6	68,1	25,3	2,1	72,9	25,0
16	Banten	206	3,4	67,0	29,6	1,9	68,4	29,6
17	Bali	114	1,8	93,9	4,4	0,9	94,7	4,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	0,7	63,8	35,6	0,7	65,1	34,2
19	Nusa Tenggara Timur	302	0,3	26,5	73,2	0	26,8	73,2
20	Kalimantan Barat	233	1,7	24,5	73,8	1,3	25,8	73,0
21	Kalimantan Tengah	176	0	35,2	64,8	0	35,2	64,8
22	Kalimantan Selatan	217	2,3	73,3	24,4	0	75,6	24,4
23	Kalimantan Timur	213	1,4	34,3	64,3	0,9	35,2	63,8
24	Sulawesi Utara	167	0	40,7	59,3	0	40,7	59,3
25	Sulawesi Tengah	163	0	23,9	76,1	0	26,4	73,6
26	Sulawesi Selatan	406	1,7	52,2	46,1	0,5	54,7	44,8
27	Sulawesi Tenggara	233	0	25,3	74,7	0	25,3	74,7
28	Gorontalo	74	1,4	54,1	44,6	0	55,4	44,6
29	Sulawesi Barat	81	0	7,4	92,6	0	7,4	92,6
30	Maluku	161	2,5	51,6	46,0	0	54,0	46,0
31	Maluku Utara	101	0	17,8	82,2	0	17,8	82,2
32	Papua Barat	104	0	53,8	46,2	0	53,8	46,2
33	Papua	294	0,3	78,2	21,4	0,3	78,6	21,1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	3,5	66,0	30,5	1,4	68,5	30,1
2	Perdesaan	6660	2,5	54,4	43,1	0,8	56,5	42,7
	INDONESIA	**8981**	**2,7**	**57,4**	**39,8**	**1,0**	**59,6**	**39,4**

4.8.18.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Pembinaan Pengobatan Tradisional

Tabel 4.8.18.2.1menunjukkan bahwa persentase Puskesmas yang tidak memiliki tenaga pelaksana program Pembinaan Pengobatan Tradisional ada 18,8 persen, sementara secara nasional Puskesmas yang memiliki petugas pelaksana untuk program Pembinaan Pengobatan Tradisional ada 39,3 persen, dengan rincian yang memiliki 1 -5 orang sebesar 37,3 persen,6-10 orang sebesar 1,0 persen, 11-20 orang sebesar 0,7 persen, dan lebih dari 20 orang sebesar 0,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana Pembinaan Pengobatan Tradisional 1-5 orang adalah Provinsi Bali (82,5%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (80,7%), dan Provinsi DIY (64,5%). Sedangkanpersentase terendah di Provinsi Papua Barat (1,0%), NTT (2,6%) dan Papua (2,7%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang ada petugas pelaksana kegiatan Pembinaan Pengobatan Tradisional 1-5 orang sebesar 46,2 persen, sementara di perdesaan 34,2 persen.

Tabel 4.8.18.2.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan PetugasProgram Pembinaan Pengobatan Tradisional, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana Program Pembinaan Pengobatan Tradisional					
			% Tidak Ada	% 1-5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	49,5	5,5	0,3	0	0,3	44,4
2	Sumatera Utara	506	18,0	17,0	1,0	0,8	1,0	62,3
3	Sumatera Barat	248	15,7	50,4	2,8	1,6	0,8	28,6
4	Riau	195	19,5	43,6	2,6	1,0	0,5	32,8
5	Jambi	171	15,8	38,0	0,6	0	0	45,6
6	Sumatera Selatan	298	9,1	46,3	0,7	0	0	44,0
7	Bengkulu	173	15,6	38,2	0	0	0	46,2
8	Lampung	265	6,4	60,0	2,3	1,5	0,4	29,4
9	Bangka Belitung	57	19,3	80,7	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	65	21,5	35,4	0	1,5	0	41,5
11	DKI Jakarta	336	48,5	23,5	0,9	0,3	0	26,8
12	Jawa Barat	1031	14,3	49,4	0,4	0,1	0	35,9
13	Jawa Tengah	861	20,6	56,7	1,9	1,7	0,6	18,6
14	DI Yogyakarta	121	4,1	64,5	2,5	0	0	28,9
15	Jawa Timur	949	7,6	61,4	2,1	2,2	0,3	26,3
16	Banten	206	17,0	50,5	1,5	0,5	0,5	30,1
17	Bali	114	6,1	82,5	4,4	1,8	0,9	4,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	36,9	20,8	0	0	0	42,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	20,9	2,6	0	0	0	76,5
20	Kalimantan Barat	233	6,0	19,3	0	0	0	74,7
21	Kalimantan Tengah	176	14,8	17,6	0	0	1,7	65,9
22	Kalimantan Selatan	217	27,6	45,2	0,5	0	0,5	26,3
23	Kalimantan Timur	213	16,0	15,5	0	0	0	68,5
24	Sulawesi Utara	167	8,4	31,7	0,6	0	0	59,3
25	Sulawesi Tengah	163	6,1	11,7	0,6	0	0,6	81,0
26	Sulawesi Selatan	406	3,7	45,6	0,2	0,5	0,2	49,8
27	Sulawesi Tenggara	233	15,9	9,0	0,4	0	0	74,7
28	Gorontalo	74	8,1	47,3	0	0	0	44,6
29	Sulawesi Barat	81	0	4,9	0	0	0	95,1
30	Maluku	161	24,2	20,5	0	0,6	0	54,7
31	Maluku Utara	101	8,9	3,0	0	0	0	88,1
32	Papua Barat	104	50,0	1,0	0	0	0	49,0
33	Papua	294	69,7	2,7	0	0	0	27,6
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	19,6	46,2	0,8	0,3	0,3	32,7
2	Perdesaan	6660	18,5	34,2	1,0	0,8	0,3	45,2
	INDONESIA	**8981**	**18,8**	**37,3**	**1,0**	**0,7**	**0,3**	**41,9**

Tabel 4.8.18.2.2
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Petugasdan Pedoman Pengobatan Tradisional, Rifaskes2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Petugas Ikut Pelatihan Pembinaan Pengobatan Tradisional			Pedoman Pengobatan Tradisional		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	%Ada	%Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	3,2	52,4	44,4	0,3	55,3	44,4
2	Sumatera Utara	506	8,5	30,4	61,1	4,0	36,0	60,1
3	Sumatera Barat	248	17,7	51,6	30,6	12,9	59,3	27,8
4	Riau	195	22,0	46,2	31,8	11,3	59,0	29,7
5	Jambi	171	15,2	39,8	45,0	14,0	41,5	44,4
6	Sumatera Selatan	298	30,5	25,2	44,3	17,4	41,3	41,3
7	Bengkulu	173	12,1	41,6	46,2	4,0	49,7	46,2
8	Lampung	265	30,6	40,4	29,1	26,4	43,8	29,8
9	Bangka Belitung	57	35,1	64,9	0	24,6	75,4	0
10	Kepulauan Riau	65	15,4	40,0	44,6	3,1	60,0	36,9
11	DKI Jakarta	336	15,2	57,4	27,4	11,3	66,4	22,3
12	Jawa Barat	1031	22,8	41,6	35,6	18,9	45,6	35,5
13	Jawa Tengah	861	20,7	59,6	19,6	22,4	59,7	17,9
14	DI Yogyakarta	121	26,4	44,6	28,9	28,9	41,3	29,8
15	Jawa Timur	949	22,9	49,8	27,3	23,5	50,6	25,9
16	Banten	206	27,2	42,7	30,1	20,9	49,5	29,6
17	Bali	114	36,9	58,8	4,4	38,6	57,0	4,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	12,1	45,6	42,3	5,4	54,4	40,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	1,3	22,2	76,5	0,3	24,8	74,8
20	Kalimantan Barat	233	9,9	15,5	74,7	6,4	19,3	74,2
21	Kalimantan Tengah	176	10,2	24,4	65,3	5,7	29,5	64,8
22	Kalimantan Selatan	217	23,5	50,7	25,8	18,0	57,6	24,4
23	Kalimantan Timur	213	8,0	23,5	68,5	4,7	26,3	69,0
24	Sulawesi Utara	167	12,0	28,7	59,3	10,2	30,5	59,3
25	Sulawesi Tengah	163	6,7	12,3	81,0	4,3	14,7	81,0
26	Sulawesi Selatan	406	20,0	30,3	49,8	11,6	40,1	48,3
27	Sulawesi Tenggara	233	4,3	21,0	74,7	1,3	24,0	74,7
28	Gorontalo	74	10,8	44,6	44,6	1,4	54,1	44,6
29	Sulawesi Barat	81	1,2	3,7	95,1	1,2	4,9	93,8
30	Maluku	161	6,2	39,1	54,7	2,5	51,6	46,0
31	Maluku Utara	101	0	11,9	88,1	2,0	11,9	86,1
32	Papua Barat	104	1,0	50,0	49,0	1,0	51,9	47,1
33	Papua	294	2,0	70,1	27,9	0	78,6	21,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	21,6	44,9	33,4	17,5	51,4	31,1
2	Perdesaan	6660	14,7	40,2	45,1	11,6	44,4	44,0
	INDONESIA	**8981**	**16,4**	**41,4**	**42,1**	**13,1**	**46,2**	**40,6**

Tabel 4.8.18.2.2menunjukkan Persentase Puskesmas menurut keikutsertaan petugas pada pelatihan pada tahun 2009 atau 2010 dan ketersediaan pedoman berkaitan dengan program Pembinaan Pengobatan Tradisional.Secara nasional persentase Puskesmas yang mengikuti pelatihan sebanyak 16,4 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Bali (36,0%), diikuti Bangka Belitung (35,1%), dan Sumatera Selatan (30,5%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang petugas pelaksana kegiatan Pembinaan Pengobatan Tradisional yang mengikuti pelatihan ada sebanyak 21,6 persen, sementara di perdesaan 14,7 persen.

Persentase Puskesmas menurut keberadaan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengobatan Tradisional secara nasional hanya 13,1 persen (di perkotaan 17,5%, diperdesaan 11,6%). Persentase tertinggi di Provinsi Bali (38,6%), DIY (28,9%), dan Lampung (26,4%). Seluruh Puskesmas di Provinsi Papua tidak memiliki pedoman untuk program Pembinaan Pengobatan Tradisional (0%), sementara provinsi terendah lainnya yaitu DI Aceh diikuti NTT masing- masing 0,3%.

4.8.18.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pembinaan Pengobatan Tradisional

Monitoring dan Bimbingan Teknis ProgramPembinaan Pengobatan Tradisionalyang dikumpulkan pada Rifas 2011 terdiri dari Kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Puskesmas, Umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan kab/Kota terhadap laporan, dan keikutsertaan Puskesmas pada pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010 seperti terlihat pada table 4.8.18.3 a dan table 4.8.18.3 b.

Tabel 4.8.18.3.a menunjukkan secara Nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan kunjungan supervisi ProgramPembinaan Pengobatan Tradisional dari petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota hanya 14,3 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 18,6 persen, sementara di perdesaan 12,9 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Bali (35,1%), Banten (35,0%) dan Gorontalo (32,4%). Secara nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan umpan balik laporan ProgramPembinaan Pengobatan Tradisionalsebesar 11,8 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 14,9 persen, sementara di perdesaan 10,8 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Banten (27,2 %), Gorontalo (25,7 %), Jawa Timur (25,4 %).

Pada Tabel 4.8.18.3.b terlihat secara Nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti pertemuanmonev program Pembinaan Pengobatan Tradisionaladalah 14,6 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 18,1 persen, sementara di perdesaan 13,4 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (35,6%), Banten (30,1%), dan Jawa Tengah (26,4%). Persentase Puskesmas yang mendapatkan monitoring dan bimbingan teknis lengkap (memperoleh ketiga bentuk monitoring dan pembinaan teknis seperti tersebut diatas)program Pengobatan Tradisional secara nasional hanya sebanyak 8,0 persen (persentase di perkotaan 10,6% dan di perdesaan 7,1%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Banten (22,3%), Jawa Timur (19,1%) dan Jawa Tengah (14,5%).

Tabel4.8.18.3.a
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Pembinaan Pengobatan Tradisional, Rifaskes2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan Petugas DKK			Umpan Balik		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	0,6	55,3	44,1	0,3	55,6	44,1
2	Sumatera Utara	506	4,9	35,0	60,1	3,4	36,6	60,1
3	Sumatera Barat	248	12,5	59,7	27,8	11,7	60,5	27,8
4	Riau	195	9,2	61,0	29,7	9,2	61,0	29,7
5	Jambi	171	11,1	44,4	44,4	7,6	48,0	44,4
6	Sumatera Selatan	298	17,8	40,6	41,6	16,1	42,6	41,3
7	Bengkulu	173	10,4	43,9	45,7	4,0	50,3	45,7
8	Lampung	265	25,7	44,5	29,8	17,0	53,2	29,8
9	Bangka Belitung	57	29,8	70,2	0	24,6	75,4	0
10	Kepulauan Riau	65	6,2	56,9	36,9	3,1	60,0	36,9
11	DKI Jakarta	336	6,3	71,7	22,0	4,8	72,9	22,3
12	Jawa Barat	1031	19,2	45,5	35,3	19,6	45,0	35,4
13	Jawa Tengah	861	23,9	58,0	18,1	20,3	61,2	18,5
14	DI Yogyakarta	121	17,4	52,9	29,8	15,7	54,5	29,8
15	Jawa Timur	949	29,3	44,7	26,0	25,4	48,6	26,0
16	Banten	206	35,0	35,4	29,6	27,2	42,7	30,1
17	Bali	114	35,1	60,5	4,4	12,3	83,3	4,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	2,7	56,4	40,9	1,3	57,7	40,9
19	Nusa Tenggara Timur	302	1,0	24,2	74,8	0,3	24,8	74,8
20	Kalimantan Barat	233	5,6	20,2	74,2	6,4	19,3	74,2
21	Kalimantan Tengah	176	3,4	31,8	64,8	2,3	33,0	64,8
22	Kalimantan Selatan	217	21,2	54,4	24,4	15,7	59,9	24,4
23	Kalimantan Timur	213	4,7	26,8	68,5	3,8	27,7	68,5
24	Sulawesi Utara	167	8,4	32,3	59,3	8,4	32,3	59,3
25	Sulawesi Tengah	163	1,8	14,7	83,4	1,2	15,3	83,4
26	Sulawesi Selatan	406	17,0	34,7	48,3	9,6	42,1	48,3
27	Sulawesi Tenggara	233	1,7	23,6	74,7	2,1	23,2	74,7
28	Gorontalo	74	32,4	23,0	44,6	25,7	29,7	44,6
29	Sulawesi Barat	81	1,2	4,9	93,8	0	6,2	93,8
30	Maluku	161	0	54,0	46,0	0,6	53,4	46,0
31	Maluku Utara	101	0	13,9	86,1	0	13,9	86,1
32	Papua Barat	104	0	52,9	47,1	0	52,9	47,1
33	Papua	294	0	78,6	21,4	0	78,2	21,8
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	18,6	50,3	31,1	14,9	53,9	31,2
2	Perdesaan	6660	12,9	43,1	44,0	10,8	45,2	44,1
	INDONESIA	**8981**	**14,3**	**45,0**	**40,7**	**11,8**	**47,4**	**40,7**

Tabel4.8.18.3.b
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Monitoring dan Bimbingan Teknis Program Pembinaan Pengobatan Tradisional, Rifaskes2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pertemuan Monev			Monitoring dan Bimbingan Teknis lengkap		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	0	55,9	44,1	0	55,9	44,1
2	Sumatera Utara	506	4,5	35,4	60,1	1,4	38,5	60,1
3	Sumatera Barat	248	16,5	55,6	27,8	8,5	63,7	27,8
4	Riau	195	8,7	61,5	29,7	4,6	65,6	29,7
5	Jambi	171	11,1	44,4	44,4	5,8	49,7	44,4
6	Sumatera Selatan	298	14,4	44,0	41,6	7,7	51,0	41,3
7	Bengkulu	173	1,7	52,6	45,7	1,7	52,6	45,7
8	Lampung	265	17,7	52,5	29,8	10,6	59,6	29,8
9	Bangka Belitung	57	19,3	80,7	0	10,5	89,5	0
10	Kepulauan Riau	65	4,6	58,5	36,9	3,1	60,0	36,9
11	DKI Jakarta	336	7,4	70,2	22,3	3,9	74,1	22,0
12	Jawa Barat	1031	21,7	42,8	35,5	14,0	50,7	35,3
13	Jawa Tengah	861	26,4	55,2	18,5	14,5	67,2	18,2
14	DI Yogyakarta	121	23,1	47,1	29,8	8,3	62,0	29,8
15	Jawa Timur	949	35,6	38,1	26,2	19,1	55,0	25,9
16	Banten	206	30,1	40,3	29,6	22,3	47,6	30,1
17	Bali	114	13,2	80,7	6,1	4,4	91,2	4,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	2,0	56,4	41,6	0	59,1	40,9
19	Nusa Tenggara Timur	302	0,7	24,5	74,8	0,3	24,8	74,8
20	Kalimantan Barat	233	6,4	19,3	74,2	3,4	22,3	74,2
21	Kalimantan Tengah	176	3,4	31,8	64,8	1,1	34,1	64,8
22	Kalimantan Selatan	217	24,0	51,6	24,4	12,4	63,1	24,4
23	Kalimantan Timur	213	4,2	27,2	68,5	2,3	29,1	68,5
24	Sulawesi Utara	167	6,6	34,1	59,3	5,4	35,3	59,3
25	Sulawesi Tengah	163	1,8	14,7	83,4	0	16,6	83,4
26	Sulawesi Selatan	406	15,8	36,0	48,3	4,9	46,8	48,3
27	Sulawesi Tenggara	233	1,3	24,0	74,7	0,9	24,5	74,7
28	Gorontalo	74	23,0	32,4	44,6	20,3	35,1	44,6
29	Sulawesi Barat	81	0	6,2	93,8	0	6,2	93,8
30	Maluku	161	0,6	53,4	46,0	0	54,0	46,0
31	Maluku Utara	101	0	13,9	86,1	0	13,9	86,1
32	Papua Barat	104	0	52,9	47,1	0	52,9	47,1
33	Papua	294	0	78,6	21,4	0	78,6	21,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	18,1	50,8	31,2	10,6	58,3	31,2
2	Perdesaan	6660	13,4	42,4	44,1	7,1	48,9	44,0
	INDONESIA	**8981**	**14,6**	**44,6**	**40,8**	**8,0**	**51,3**	**40,7**

4.8.19. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

4.8.19.1. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji

Kegiatan Program Kesehatan Hajiyang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011adalah kegiatan yang dilaksanakan petugas Puskesmas pada tahun 2010,yang terdiri dari 1) Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji, 2) Pembinaan KebugaranCalon Jemaah Haji. 3) Pelayanan Akupuntur di Puskesmasdan 4) Pemantauan Kesehatan Jemaah Haji yang sudah pulang. Tabel 4.8.19.1.a menunjukkan Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan calon jemaah hajisecara nasional 52,4 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Banten (99,0%), Jawa Tengah (94,2%) dan Jawa Timur (92,0%). Sedangkan terendah di Provinsi Maluku(3,7%), NTT(3,6%) dan Papua (3,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan hanya sebanyak 61,6 persen,sementara di perdesaan 49,1 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pembinaan Kebugaran calon jemaah haji secara nasional hanya 24,6 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (49,6%), Banten (46,1%) dan Jawa Tengah (44,1%). Sedangkan terendah Provinsi Papua (1,0%), NTT (1,7%), Maluku dan Papua Barat (1,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan Kebugaran 27,7 persen, sementara di perdesaan 23,5 persen.

Tabel 4.8.19.1.b menunjukkan Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pemantauan Kesehatan jemaah haji secara nasional 45,1 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Tengah (90,5%), DIY (86,8%) dan Jawa Timur (86,2%). Sedangkan terendah Provinsi NTT(1,3%), diikuti Papua(1,4%), Papua Barat (1,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pemantauan Kesehatan 51,9 persen, sementara di perdesaan 42,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan lengkap program Kesehatan Haji, yaitu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut diatas 22,1 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (47,0%), Banten (43,2%) dan Jawa Tengah (42,9%). Sedangkan terendah Provinsi Papua dan Papua Barat (1,0%), (1,0%), NTT (1,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan lengkap untuk program Kesehatan Haji ada sebanyak 24,6 persen, sementara di perdesaan 21,2 persen.

Tabel 4.8.19.1.a
Persentase Puskesmas menurut Jenis Kegiatan Program Kesehatan Haji, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji			Pembinaan Kebugaran Calon Jemah Haji		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	58,5	20,6	20,9	21,9	57,2	20,9
2	Sumatera Utara	506	18,4	16,4	65,2	7,9	26,9	65,2
3	Sumatera Barat	248	82,3	11,3	6,5	47,2	46,4	6,5
4	Riau	195	57,4	17,9	24,6	21,5	53,3	25,1
5	Jambi	171	62,0	8,8	29,2	25,7	45,0	29,2
6	Sumatera Selatan	298	28,5	12,8	58,7	20,8	19,1	60,1
7	Bengkulu	173	44,5	9,8	45,7	9,2	45,1	45,7
8	Lampung	265	32,1	7,2	60,8	15,8	22,6	61,5
9	Bangka Belitung	57	66,7	19,3	14,0	28,1	57,9	14,0
10	Kepulauan Riau	65	53,8	4,6	41,5	23,1	35,4	41,5
11	DKI Jakarta	336	12,5	58,6	28,9	8,6	62,5	28,9
12	Jawa Barat	1031	73,1	7,6	19,3	36,7	44,1	19,2
13	Jawa Tengah	861	94,2	4,5	1,3	44,1	54,6	1,3
14	DI Yogyakarta	121	84,3	10,7	5,0	30,6	64,5	5,0
15	Jawa Timur	949	92,0	2,0	6,0	49,6	44,3	6,1
16	Banten	206	99,0	1,0	0	46,1	53,9	0
17	Bali	114	20,2	19,3	60,5	4,4	35,1	60,5
18	Nusa Tenggara Barat	149	89,3	6,0	4,7	43,6	51,7	4,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	3,6	24,2	72,2	1,7	26,2	72,2
20	Kalimantan Barat	233	30,5	8,2	61,4	15,5	21,9	62,7
21	Kalimantan Tengah	176	21,6	16,5	61,9	4,5	33,5	61,9
22	Kalimantan Selatan	217	51,6	33,2	15,2	15,7	69,1	15,2
23	Kalimantan Timur	213	42,7	12,7	44,6	14,1	41,3	44,6
24	Sulawesi Utara	167	13,8	12,0	74,3	10,8	15,0	74,3
25	Sulawesi Tengah	163	43,6	11,7	44,8	17,2	38,7	44,2
26	Sulawesi Selatan	406	53,4	5,9	40,6	20,7	38,2	41,1
27	Sulawesi Tenggara	233	17,6	16,3	66,1	4,7	29,2	66,1
28	Gorontalo	74	28,4	2,7	68,9	13,5	17,6	68,9
29	Sulawesi Barat	81	21,0	1,2	77,8	11,1	11,1	77,8
30	Maluku	161	3,1	42,2	54,7	1,9	43,5	54,7
31	Maluku Utara	101	6,9	10,9	82,2	4,0	14,9	81,2
32	Papua Barat	104	6,7	50,0	43,3	1,9	54,8	43,3
33	Papua	294	3,7	75,5	20,7	1,0	78,6	20,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	61,6	15,3	23,1	27,7	49,1	23,2
2	Perdesaan	6660	49,1	15,2	35,6	23,5	40,8	35,8
	INDONESIA	**8981**	**52,4**	**15,2**	**32,4**	**24,6**	**42,9**	**32,5**

Tabel 4.8.19.1.b
Persentase Puskesmas menurutJenis Kegiatan Program Kesehatan Haji, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pemantauan KesehatanJemaah Haji			Kegiatan Lengkap Program Kesehatan Haji		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	49,2	29,9	20,9	19,6	59,5	20,9
2	Sumatera Utara	506	12,6	22,1	65,2	6,1	28,7	65,2
3	Sumatera Barat	248	67,3	25,8	6,9	38,7	54,8	6,5
4	Riau	195	35,9	39,0	25,1	15,9	59,5	24,6
5	Jambi	171	46,2	24,6	29,2	19,3	51,5	29,2
6	Sumatera Selatan	298	24,5	15,4	60,1	18,8	22,5	58,7
7	Bengkulu	173	32,4	22,0	45,7	7,5	46,8	45,7
8	Lampung	265	30,2	8,3	61,5	14,3	24,9	60,8
9	Bangka Belitung	57	56,1	29,8	14,0	22,8	63,2	14,0
10	Kepulauan Riau	65	27,7	30,8	41,5	16,9	41,5	41,5
11	DKI Jakarta	336	10,7	60,4	28,9	8,0	63,1	28,9
12	Jawa Barat	1031	64,7	16,1	19,2	33,1	47,6	19,3
13	Jawa Tengah	861	90,5	8,2	1,3	42,9	55,9	1,3
14	DI Yogyakarta	121	86,8	8,3	5,0	30,6	64,5	5,0
15	Jawa Timur	949	86,2	7,8	6,0	47,0	46,9	6,1
16	Banten	206	85,9	14,1	0	43,2	56,8	0
17	Bali	114	19,3	20,2	60,5	4,4	35,1	60,5
18	Nusa Tenggara Barat	149	71,1	24,2	4,7	34,9	60,4	4,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	1,3	26,2	72,5	1,3	26,2	72,5
20	Kalimantan Barat	233	21,5	15,9	62,7	13,3	25,3	61,4
21	Kalimantan Tengah	176	11,4	26,7	61,9	2,3	35,8	61,9
22	Kalimantan Selatan	217	47,9	36,9	15,2	15,2	69,6	15,2
23	Kalimantan Timur	213	33,8	21,6	44,6	11,3	44,1	44,6
24	Sulawesi Utara	167	8,4	17,4	74,3	8,4	17,4	74,3
25	Sulawesi Tengah	163	33,7	22,1	44,2	13,5	41,7	44,8
26	Sulawesi Selatan	406	42,6	16,3	41,1	18,5	40,9	40,6
27	Sulawesi Tenggara	233	9,4	24,5	66,1	3,4	30,5	66,1
28	Gorontalo	74	24,3	6,8	68,9	10,8	20,3	68,9
29	Sulawesi Barat	81	3,7	18,5	77,8	3,7	18,5	77,8
30	Maluku	161	2,5	42,9	54,7	1,9	43,5	54,7
31	Maluku Utara	101	2,0	16,8	81,2	0	18,8	81,2
32	Papua Barat	104	1,9	54,8	43,3	1,0	55,8	43,3
33	Papua	294	1,4	78,2	20,4	1,0	78,6	20,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	51,9	24,9	23,3	24,6	52,3	23,1
2	Perdesaan	6660	42,7	21,5	35,7	21,2	43,2	35,6
	INDONESIA	**8981**	**45,1**	**22,4**	**32,5**	**22,1**	**45,5**	**32,4**

4.8.19.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Pelayanan Kesehatan Haji

Tabel 4.8.19.2.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan PetugasPelaksana Program Kesehatan Haji, Rifaskes2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana Program Kesehatan Haji					
			% Tidak Ada	% 1- 5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	18,0	58,5	1,0	1,0	0	21,5
2	Sumatera Utara	506	13,8	18,0	1,4	0	0,6	66,2
3	Sumatera Barat	248	7,3	82,7	2,4	1,2	0	6,5
4	Riau	195	11,8	53,8	7,2	0,5	0	26,7
5	Jambi	171	5,3	57,3	4,1	0,6	0	32,7
6	Sumatera Selatan	298	8,7	25,8	3,7	0,7	0	61,1
7	Bengkulu	173	8,1	43,4	1,7	0	0	46,8
8	Lampung	265	2,6	27,9	7,5	0,4	0,4	61,1
9	Bangka Belitung	57	15,8	56,1	10,5	0	1,8	15,8
10	Kepulauan Riau	65	6,2	43,1	6,2	3,1	0	41,5
11	DKI Jakarta	336	52,4	4,8	5,7	3,3	0,9	33,0
12	Jawa Barat	1031	5,5	67,0	6,4	0,8	0,6	19,7
13	Jawa Tengah	861	4,2	80,3	13,1	0,8	0,2	1,4
14	DI Yogyakarta	121	4,1	63,6	18,2	7,4	0,8	5,8
15	Jawa Timur	949	2,2	78,4	10,2	2,4	0,3	6,4
16	Banten	206	0,5	78,6	16,0	3,9	0	1,0
17	Bali	114	14,9	22,8	0,9	0	0	61,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	4,0	80,5	8,1	1,3	0	6,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	20,5	4,0	0	0	0	75,5
20	Kalimantan Barat	233	4,7	30,0	1,3	0	0	63,9
21	Kalimantan Tengah	176	12,5	19,3	2,3	0,6	1,7	63,6
22	Kalimantan Selatan	217	27,2	42,9	9,7	3,7	0,5	16,1
23	Kalimantan Timur	213	9,4	41,8	1,9	0	0,5	46,5
24	Sulawesi Utara	167	10,2	15,6	0	0	0	74,3
25	Sulawesi Tengah	163	4,3	45,4	1,2	0	0	49,1
26	Sulawesi Selatan	406	2,0	52,7	2,5	0,2	0,5	42,1
27	Sulawesi Tenggara	233	15,0	15,9	2,6	0,4	0	66,1
28	Gorontalo	74	2,7	27,0	1,4	0	0	68,9
29	Sulawesi Barat	81	0	21,0	1,2	0	0	77,8
30	Maluku	161	30,4	4,3	1,9	0	0	63,4
31	Maluku Utara	101	5,9	6,9	0	0	0	87,1
32	Papua Barat	104	48,1	4,8	1,0	1,0	0	45,2
33	Papua	294	68,7	4,4	0	0	0	26,9
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	12,7	51,1	8,8	2,0	0,5	24,9
2	Perdesaan	6660	12,2	45,4	4,4	0,7	0,2	37,0
	INDONESIA	**8981**	**12,3**	**46,9**	**5,6**	**1,0**	**0,3**	**33,9**

Tabel 4.8.19.2.2
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Petugas dan Pedoman Program Kesehatan Haji, Rifaskes 2011

No.	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Petugas Kesehatan Haji			Pedoman Kesehatan Haji		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	27,3	51,4	21,2	37,0	42,1	20,9
2	Sumatera Utara	506	9,5	24,5	66,0	10,5	24,1	65,4
3	Sumatera Barat	248	49,6	41,5	8,9	61,7	31,9	6,5
4	Riau	195	39,0	33,3	27,7	36,4	38,5	25,1
5	Jambi	171	32,8	34,5	32,7	32,2	35,7	32,2
6	Sumatera Selatan	298	22,7	15,1	62,1	24,5	15,1	60,4
7	Bengkulu	173	23,7	28,3	48,0	28,3	24,9	46,8
8	Lampung	265	26,8	11,7	61,5	29,1	9,1	61,9
9	Bangka Belitung	57	40,4	43,9	15,8	52,6	33,3	14,0
10	Kepulauan Riau	65	44,6	13,8	41,5	46,2	12,3	41,5
11	DKI Jakarta	336	14,0	52,7	33,3	12,5	58,3	29,2
12	Jawa Barat	1031	49,5	30,6	20,0	61,1	19,2	19,7
13	Jawa Tengah	861	54,8	43,4	1,9	83,9	14,9	1,3
14	DI Yogyakarta	121	61,2	32,2	6,6	74,4	20,7	5,0
15	Jawa Timur	949	41,9	50,1	8,0	76,3	17,4	6,3
16	Banten	206	66,0	33,0	1,0	84,5	15,5	0
17	Bali	114	14,9	23,7	61,4	17,5	20,2	62,3
18	Nusa Tenggara Barat	149	57,7	34,9	7,4	73,2	21,5	5,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	2,0	22,2	75,8	2,0	23,8	74,2
20	Kalimantan Barat	233	22,7	13,3	63,9	24,5	11,6	63,9
21	Kalimantan Tengah	176	14,2	22,7	63,1	17,0	20,5	62,5
22	Kalimantan Selatan	217	29,9	54,8	15,2	43,8	41,0	15,2
23	Kalimantan Timur	213	30,5	23,0	46,5	34,7	18,8	46,5
24	Sulawesi Utara	167	10,2	15,6	74,3	10,2	15,6	74,3
25	Sulawesi Tengah	163	25,1	25,8	49,1	25,8	25,8	48,5
26	Sulawesi Selatan	406	34,4	23,2	42,4	36,9	21,4	41,6
27	Sulawesi Tenggara	233	11,6	21,0	67,4	9,9	23,6	66,5
28	Gorontalo	74	20,3	10,8	68,9	23,0	8,1	68,9
29	Sulawesi Barat	81	16,0	6,2	77,8	16,0	6,2	77,8
30	Maluku	161	6,2	30,4	63,4	4,3	41,0	54,7
31	Maluku Utara	101	6,9	5,9	87,1	5,9	8,9	85,1
32	Papua Barat	104	5,8	49,0	45,2	6,7	50,0	43,3
33	Papua	294	4,8	68,4	26,9	2,7	76,5	20,7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	39,7	34,7	25,5	50,5	25,9	23,7
2	Perdesaan	6660	29,1	33,5	37,4	39,0	24,7	36,3
	INDONESIA	**8981**	**31,9**	**33,8**	**34,3**	**42,0**	**25,0**	**33,1**

Tabel 4.8.19.2.1 menunjukkan bahwa persentase Puskesmas yang tidak memiliki tenaga pelaksana program Kesehatan Haji secara nasional 12,3 persen, sementara persentase Puskesmas yang memiliki petugas pelaksana untuk program Kesehatan Hajisebesar 53,8 persen, dengan rincian1-5 orang 46,9 persen, 6-10 orang 5,6 persen, 11-20 orang 1,0 persen dan lebih dari 20 orang sebesar 0,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana Kesehatan Haji 1-5 orang adalah Provinsi Sumatera Barat (82,7%), diikuti Provinsi NTB (80,5%), dan Provinsi Jateng (80,3%). Sedangkan terendah di Provinsi NTT (4,0%), Maluku (4,3%), dan NTT (4,4%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan dengan petugas pelaksana kegiatan Kesehatan Haji 1-5 orang 51,1 persen ,sementara di perdesaan 45,4 persen.

Tabel 4.8.19.2.2menunjukkan Persentase Puskesmas menurut keikutsertaan petugas dalam pelatihan Program Kesehatan Haji pada tahun 2009 atau 2010 dan ketersediaan Pedoman berkaitan dengan Program Kesehatan Haji.Persentase Puskesmas menurut petugas program Kesehatan Haji yang ikut pelatihan secara nasional 31,9 persen. Persentase tertinggi ada di Provinsi Banten (66,0%), diikuti DIY (61,2%), dan NTB (57,7%). Sedangkan persentase terendah Provinsi NTT (2,0%), diikuti Papua (4,8%), dan Papua Barat (5,8%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang petugas pelaksana kegiatan Kesehatan Haji mengikuti pelatihan 39,7 persen,sementara di perdesaan 29,1 persen.Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kesehatan Haji secara nasional 42,0 persen (di perkotaan 50,5%, diperdesaan 39,0%). Persentase tertinggi ada di Provinsi Banten (84,5%), Jawa Tengah (83,9%), dan Jawa Timur (76,3%). Sementara persentase terendah ada di Provinsi NTT (2,0%), diikuti Papua (2,7), dan Maluku (4,3 %).

4.8.19.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kesehatan Haji

Monitoring dan Bimbingan Teknis ProgramKesehatan Haji yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 terdiri dari Kunjungan supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Puskesmas, Umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan kab/Kota terhadap laporan, dan keikutsertaan Puskesmas pada pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010 seperti terlihat pada tabel 4.8.19.3.a dan table 4.8.19.3.b.

Tabel 4.8.19.3.a menunjukkan persentase Puskesmas yang mendapatkan kunjungan supervisi dari Dinas kesehatan kab/Kota hanya25,6 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 33,0 persen, sementara di perdesaan 23,5 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Banten (55,8%), Jawa Tengah (49,5%), dan Jawa Timur (46,9%) Sementara terendah ada di Provinsi Maluku (1,2%), Papua (1,4%), dan Papua Barat (2,9%).

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan Umpan balik laporan ProgramKesehatan Haji hanya 24,8 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan 28,7 persen, sementara di perdesaan 23,5 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas yang mendapat umpan balik tertinggi adalah Banten (55,3%), Jawa Tengah (50,9%) dan Jawa Timur (46,3%). Sementara terendah adalah Provinsi Papua (1,0%), Maluku (1,2%), dan Papua Barat (1,9%).

Tabel 4.8.19.3.a
Persentase Puskesmas menurut Bimbingan Teknis Program Kesehatan Haji, Rifaskes2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan Supervisi DKK			Umpan Balik		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	21,2	57,6	21,2	15,1	64,0	20,9
2	Sumatera Utara	506	7,3	27,3	65,4	4,7	29,8	65,4
3	Sumatera Barat	248	29,8	63,3	6,9	31,0	62,1	6,9
4	Riau	195	18,5	56,4	25,1	14,9	60,0	25,1
5	Jambi	171	24,0	43,9	32,2	19,9	48,0	32,2
6	Sumatera Selatan	298	16,8	22,8	60,4	14,4	25,2	60,4
7	Bengkulu	173	18,5	34,7	46,8	16,8	36,4	46,8
8	Lampung	265	17,0	21,1	61,9	13,2	24,9	61,9
9	Bangka Belitung	57	38,6	47,4	14,0	29,8	56,1	14,0
10	Kepulauan Riau	65	29,2	29,2	41,5	23,1	35,4	41,5
11	DKI Jakarta	336	10,4	60,4	29,2	9,5	61,3	29,2
12	Jawa Barat	1031	40,0	40,4	19,6	45,9	34,5	19,6
13	Jawa Tengah	861	49,5	49,2	1,3	50,9	47,9	1,3
14	DI Yogyakarta	121	27,3	67,8	5,0	39,7	55,4	5,0
15	Jawa Timur	949	46,9	46,6	6,5	46,3	47,2	6,5
16	Banten	206	55,8	43,7	0,5	55,3	44,2	0,5
17	Bali	114	9,6	28,1	62,3	7,0	30,7	62,3
18	Nusa Tenggara Barat	149	50,3	44,3	5,4	40,3	53,7	6,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	0,3	25,5	74,2	0	25,8	74,2
20	Kalimantan Barat	233	16,3	19,7	63,9	13,3	22,7	63,9
21	Kalimantan Tengah	176	5,1	33,0	61,9	4,5	33,5	61,9
22	Kalimantan Selatan	217	24,9	59,9	15,2	23,0	61,8	15,2
23	Kalimantan Timur	213	16,9	36,6	46,5	8,9	44,6	46,5
24	Sulawesi Utara	167	7,8	17,4	74,9	4,2	21,0	74,9
25	Sulawesi Tengah	163	14,1	36,8	49,1	11,0	39,9	49,1
26	Sulawesi Selatan	406	29,3	29,1	41,6	20,9	37,2	41,9
27	Sulawesi Tenggara	233	9,4	24,5	66,1	7,7	26,2	66,1
28	Gorontalo	74	23,0	6,8	70,3	17,6	12,2	70,3
29	Sulawesi Barat	81	9,9	12,3	77,8	8,6	13,6	77,8
30	Maluku	161	1,2	44,1	54,7	1,2	44,1	54,7
31	Maluku Utara	101	5,0	8,9	86,1	3,0	10,9	86,1
32	Papua Barat	104	2,9	53,8	43,3	1,9	54,8	43,3
33	Papua	294	1,4	78,2	20,4	1,0	78,6	20,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	33,0	43,3	23,7	28,7	47,7	23,7
2	Perdesaan	6660	23,5	40,1	36,4	23,5	40,1	36,4
	INDONESIA	**8981**	**25,9**	**41,0**	**33,1**	**24,8**	**42,1**	**33,1**

Tabel 4.8.19.3.b
Persentase Puskesmas menurut Bimbingan Teknis Program Kesehatan Haji, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Ikut Pertemuan Monitoring			Monitoring dan Bimbingan Teknis lengkap		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	20,9	58,2	20,9	9,6	69,1	21,2
2	Sumatera Utara	506	7,3	27,1	65,6	3,2	31,4	65,4
3	Sumatera Barat	248	38,3	55,2	6,5	20,2	73,0	6,9
4	Riau	195	15,9	59,0	25,1	9,2	65,6	25,1
5	Jambi	171	28,1	39,2	32,7	13,5	54,4	32,2
6	Sumatera Selatan	298	14,8	24,8	60,4	11,1	28,5	60,4
7	Bengkulu	173	10,4	42,8	46,8	6,9	46,2	46,8
8	Lampung	265	16,2	21,9	61,9	11,7	26,4	61,9
9	Bangka Belitung	57	42,1	43,9	14,0	26,3	59,6	14,0
10	Kepulauan Riau	65	26,2	30,8	43,1	13,8	44,6	41,5
11	DKI Jakarta	336	11,0	59,5	29,5	9,2	61,6	29,2
12	Jawa Barat	1031	58,2	22,1	19,7	32,8	47,5	19,7
13	Jawa Tengah	861	67,0	31,7	1,3	37,7	61,0	1,3
14	DI Yogyakarta	121	65,3	29,8	5,0	18,2	76,9	5,0
15	Jawa Timur	949	64,5	28,9	6,6	32,8	60,7	6,5
16	Banten	206	81,6	18,0	0,5	43,2	56,3	0,5
17	Bali	114	7,9	29,8	62,3	5,3	32,5	62,3
18	Nusa Tenggara Barat	149	45,0	49,0	6,0	27,5	67,1	5,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	0,3	25,5	74,2	0	25,8	74,2
20	Kalimantan Barat	233	14,6	21,5	63,9	9,4	26,6	63,9
21	Kalimantan Tengah	176	5,1	33,0	61,9	2,3	35,8	61,9
22	Kalimantan Selatan	217	35,9	48,8	15,2	16,1	68,7	15,2
23	Kalimantan Timur	213	18,8	34,7	46,5	5,6	47,9	46,5
24	Sulawesi Utara	167	8,4	16,8	74,9	4,2	21,0	74,9
25	Sulawesi Tengah	163	8,6	42,3	49,1	5,5	45,4	49,1
26	Sulawesi Selatan	406	28,1	30,3	41,6	15,8	42,6	41,6
27	Sulawesi Tenggara	233	6,4	27,5	66,1	4,7	29,2	66,1
28	Gorontalo	74	17,6	12,2	70,3	14,9	14,9	70,3
29	Sulawesi Barat	81	8,6	13,6	77,8	6,2	16,0	77,8
30	Maluku	161	0,6	44,7	54,7	0,6	44,7	54,7
31	Maluku Utara	101	4,0	9,9	86,1	2,0	11,9	86,1
32	Papua Barat	104	1,0	55,8	43,3	0	56,7	43,3
33	Papua	294	1,4	78,2	20,4	0,7	78,9	20,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	38,7	37,5	23,7	21,7	54,5	23,7
2	Perdesaan	6660	30,3	33,2	36,5	16,2	47,4	36,4
	INDONESIA	**8981**	**32,5**	**34,3**	**33,2**	**17,6**	**49,2**	**33,1**

Tabel 4.8.19.3.b menunjukkan bahwa secara nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti Pertemuan Monev program Kesehatan Haji adalah 32,5 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 38,7 persen, sementara di perdesaan 30,3 persen.Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi mendapat monitoring adalah Banten (81,6%), Jawa Tengah (67,0%) dan DIY (65,3%). Sementara persentase terendah yaitu Provinsi NTT (0,3%), Maluku (0,6%)dan Papua Barat (1,0%).

Persentase Puskesmas yang mendapatkan monitoring dan bimbingan teknis lengkap (memperoleh ketiga bentuk monitoring dan pembinaan teknis seperti tersebut diatas)Program Kesehatan Haji secara nasional 17,6 persen (persentase di perkotaan 21,7% dan di perdesaan 16,2%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi mendapat Monitoring dan Bimbingan teknis lengkap adalah Banten (43,2%), Jawa Timur dan Jawa Barat (32,8%) dan Jawa Tengah (37,7%). Sementara terendah adalah Provinsi NTT dan Papua barat (0%) Maluku (0,6%), diikuti, Papua (0,7%).

4.8.20. PELAYANAN LABORATORIUM

4.8.20.1. Kegiatan Pelayanan Laboratorium

Kegiatan Pelayanan Laboratorium yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011adalah kegiatan yang dilaksanakan petugas Puskesmas pada tahun 2010 ,yang terdiri dari Pemeriksaan Darah Rutin, Pemeriksaan Urine Rutin, Pemeriksaan Kadar Gula Darah, Pemeriksaan Kolesterol, Pemeriksaan Feses, Pemeriksaan Darah Malaria, Pemeriksaan Sputum dan Pemeriksaan lainnya.Tabel 4.8.20.1.a menunjukkan Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pemeriksaan Darah Rutin secara nasional 45,9 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (99,2%), NTB (75,8%) dan Kalimantan Selatan (74,7%). Sedangkan persentase terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara (8,6%), Sulawesi Utara (9,0%) dan Gorontalo (10,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Darah Rutin 55,7 persen,sementara di perdesaan 42,5 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pemeriksaan Urine Rutin secara nasional 46,8 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (100,0%), NTB (79,2%) dan Jawa Timur (77,1%). Sementara terandah Provinsi Gorontalo (2,7%), diikuti Sulawesi Utara (5,4%) dan Sulawesi Tenggara (6,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Urine Rutin 57,4 persen, sementara di perdesaan 43,0 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pemeriksaan Kadar Gula Darah secara nasional 54,3 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (100,0%), Jawa Tengah (88,2%) dan Kalimantan Selatan (86,6%). Sementara persentase terendah adalah Provinsi Gorontalo (12,2%), diikuti Papua (13,3%) dan Sulawesi Tenggara (14,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yangmelaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kadar Gula Darah 63,9 persen, sementara di perdesaan 50,9 persen.

Tabel4.8.20.1.a
Persentase Puskesmas menurut Jenis Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Darah Rutin, Urine Rutin, Kadar Gula Darah, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pemeriksaan Darah Rutin			Pemeriksaan Urine Rutin			Pemeriksaan Kadar Gula Darah		
			% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD	% Ada	% Tidak ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	48,6	45,7	5,8	49,2	45,3	5,5	53,7	40,8	5,5
2	Sumatera Utara	506	15,2	73,9	10,9	16,0	73,1	10,9	33,8	55,3	10,9
3	Sumatera Barat	248	64,9	34,3	0,8	68,5	30,6	0,8	82,7	16,5	0,8
4	Riau	195	57,4	40,0	2,6	56,4	41,0	2,6	60,5	36,4	3,1
5	Jambi	171	58,5	33,9	7,6	60,8	31,0	8,2	52,6	38,6	8,8
6	Sumatera Selatan	298	49,0	42,6	8,4	46,6	45,0	8,4	43,6	47,7	8,7
7	Bengkulu	173	17,9	72,8	9,2	16,2	74,6	9,2	27,2	63,6	9,2
8	Lampung	265	40,0	54,3	5,7	43,0	51,7	5,3	49,8	44,5	5,7
9	Bangka Belitung	57	64,9	35,1	0	56,1	43,9	0	57,9	42,1	0
10	Kepulauan Riau	65	63,1	36,9	0	60,0	40,0	0	64,6	35,4	0
11	DKI Jakarta	336	15,5	60,1	24,4	17,3	58,6	24,1	25,0	51,2	23,8
12	Jawa Barat	1031	47,9	40,7	11,3	52,3	36,4	11,3	53,5	35,2	11,3
13	Jawa Tengah	861	66,2	31,9	1,9	72,1	26,0	1,9	88,2	10,2	1,6
14	DI Yogyakarta	121	99,2	0,8	0	100,0	0	0	100,0	0	0
15	Jawa Timur	949	72,9	20,3	6,7	77,1	16,3	6,5	83,5	10,1	6,4
16	Banten	206	31,1	62,6	6,3	35,4	58,3	6,3	66,5	27,2	6,3
17	Bali	114	44,7	54,4	0,9	44,7	54,4	0,9	82,5	16,7	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	75,8	22,8	1,3	79,2	19,5	1,3	72,5	25,5	2,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	37,1	55,0	7,9	21,5	70,9	7,6	16,6	75,8	7,6
20	Kalimantan Barat	233	52,8	45,1	2,1	49,4	48,9	1,7	60,5	37,8	1,7
21	Kalimantan Tengah	176	25,0	66,5	8,5	31,8	59,7	8,5	39,2	52,3	8,5
22	Kalimantan Selatan	217	74,7	23,0	2,3	72,8	24,9	2,3	86,6	11,1	2,3
23	Kalimantan Timur	213	46,9	48,8	4,2	47,4	48,4	4,2	68,5	27,2	4,2
24	Sulawesi Utara	167	9,0	76,0	15,0	5,4	79,6	15,0	16,2	68,9	15,0
25	Sulawesi Tengah	163	25,2	68,7	6,1	26,4	68,1	5,5	29,4	65,0	5,5
26	Sulawesi Selatan	406	57,1	26,8	16,0	61,6	22,9	15,5	59,1	25,4	15,5
27	Sulawesi Tenggara	233	8,6	76,4	15,0	6,4	78,1	15,5	14,6	70,0	15,5
28	Gorontalo	74	10,8	86,5	2,7	2,7	94,6	2,7	12,2	85,1	2,7
29	Sulawesi Barat	81	35,8	48,1	16,0	37,0	46,9	16,0	33,3	50,6	16,0
30	Maluku	161	23,0	59,6	17,4	7,5	75,2	17,4	15,5	67,1	17,4
31	Maluku Utara	101	15,8	65,3	18,8	12,9	69,3	17,8	30,7	52,5	16,8
32	Papua Barat	104	25,0	66,3	8,7	16,3	75,0	8,7	16,3	75,0	8,7
33	Papua	294	13,9	80,3	5,8	10,5	83,7	5,8	13,3	81,0	5,8
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	55,7	36,3	8,0	57,4	34,6	7,9	63,9	28,2	7,9
2	Perdesaan	6660	42,5	49,4	8,1	43,0	49,0	8,0	50,9	41,1	8,0
	INDONESIA	**8981**	**45,9**	**46,0**	**8,1**	**46,8**	**45,3**	**8,0**	**54,3**	**37,8**	**8,0**

Tabel 4.8.20.1.b
Persentase Puskesmas menurutJenis Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Kolesterol, Feses, Darah Malaria, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pemeriksaan Kolesterol			Pemeriksaan Feses			Pemeriksaan Darah Malaria		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	31,2	63,3	5,5	35,4	59,2	5,5	83,6	10,9	5,5
2	Sumatera Utara	506	17,6	71,5	10,9	14,4	74,7	10,9	27,7	61,5	10,9
3	Sumatera Barat	248	40,3	58,9	0,8	37,1	62,1	0,8	52,8	46,4	0,8
4	Riau	195	34,4	62,6	3,1	29,7	67,7	2,6	67,7	30,3	2,1
5	Jambi	171	24,0	66,7	9,4	28,7	62,0	9,4	71,3	19,9	8,8
6	Sumatera Selatan	298	18,5	73,2	8,4	25,8	65,8	8,4	47,7	44,0	8,4
7	Bengkulu	173	11,0	79,8	9,2	5,8	85,0	9,2	71,1	19,7	9,2
8	Lampung	265	23,4	71,3	5,3	15,8	78,9	5,3	59,2	35,5	5,3
9	Bangka Belitung	57	40,4	59,6	0	42,1	57,9	0	96,5	3,5	0
10	Kepulauan Riau	65	47,7	52,3	0	27,7	72,3	0	92,3	7,7	0
11	DKI Jakarta	336	20,2	56,0	23,8	5,4	70,5	24,1	3,9	72,0	24,1
12	Jawa Barat	1031	30,5	58,2	11,3	17,1	71,5	11,4	13,7	74,8	11,5
13	Jawa Tengah	861	67,6	30,8	1,6	38,3	59,9	1,7	53,4	44,8	1,7
14	DI Yogyakarta	121	95,0	5,0	0	92,6	7,4	0	86,8	13,2	0
15	Jawa Timur	949	62,4	31,1	6,5	38,0	55,3	6,6	43,7	49,6	6,6
16	Banten	206	41,7	51,9	6,3	14,1	79,6	6,3	14,6	79,1	6,3
17	Bali	114	21,1	78,1	0,9	28,1	71,1	0,9	53,5	45,6	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	26,2	71,8	2,0	51,0	47,7	1,3	93,3	5,4	1,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	7,6	84,8	7,6	15,2	77,2	7,6	87,4	5,0	7,6
20	Kalimantan Barat	233	43,8	54,5	1,7	30,5	67,8	1,7	91,8	6,9	1,3
21	Kalimantan Tengah	176	21,6	69,9	8,5	7,4	84,1	8,5	73,3	18,2	8,5
22	Kalimantan Selatan	217	57,1	40,6	2,3	47,5	50,2	2,3	91,7	6,0	2,3
23	Kalimantan Timur	213	52,1	43,7	4,2	25,4	70,0	4,7	77,9	17,8	4,2
24	Sulawesi Utara	167	13,2	71,9	15,0	1,2	83,2	15,6	64,7	20,4	15,0
25	Sulawesi Tengah	163	25,2	69,3	5,5	9,2	85,3	5,5	92,6	1,8	5,5
26	Sulawesi Selatan	406	35,0	49,5	15,5	34,5	50,0	15,5	64,5	20,0	15,5
27	Sulawesi Tenggara	233	8,2	76,4	15,5	2,1	82,4	15,5	53,6	31,3	15,0
28	Gorontalo	74	5,4	91,9	2,7	0	97,3	2,7	82,4	14,9	2,7
29	Sulawesi Barat	81	23,5	60,5	16,0	23,5	60,5	16,0	72,8	11,1	16,0
30	Maluku	161	5,0	77,6	17,4	2,5	80,1	17,4	66,5	16,8	16,8
31	Maluku Utara	101	21,8	61,4	16,8	4,0	78,2	17,8	74,3	8,9	16,8
32	Papua Barat	104	17,3	74,0	8,7	8,7	82,7	8,7	53,8	37,5	8,7
33	Papua	294	9,9	84,4	5,8	5,8	88,4	5,8	51,0	43,2	5,8
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	44,5	47,6	7,9	31,7	60,4	8,0	52,3	39,8	7,9
2	Perdesaan	6660	31,4	60,6	8,0	21,8	70,1	8,0	54,0	38,0	8,0
	INDONESIA	**8981**	**34,8**	**57,2**	**8,0**	**24,4**	**67,6**	**8,0**	**53,6**	**38,5**	**8,0**

Tabel 4.8.20.1.b memperlihatkan persentase Puskesmas dengan kegiatan Pemeriksaan Kolesterol secara nasional 34,8 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (95,0%), Jawa Tengah (67,6%) dan Jawa Timur (62,4%). Sedangkan persentase terendah di Provinsi Maluku (5,0%), Gorontalo (5,4%) dan NTT (7,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kolesterol 44,5 persen,sementara di perdesaan 31,4 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pemeriksaan Feses secara nasional hanya 24,4 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (92,6%), NTB (51,0%) dan Kalimantan Selatan (47,5%). Sedangkan terendah di Provinsi Gorontalo (0,0%), Sulawesi Utara (1,2%) dan Sulawesi Tenggara (2,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Feses ada sebanyak 31,7 persen, sementara di perdesaan 21,8 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pemeriksaan Darah Malaria secara nasional 53,6 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah NTB (93,3%), Sulawesi Tengah (92,6%) dan Kalimantan Barat (91,8%). Sedangkan terendah di Provinsi DKI (3,9%), Jawa Barat (13,7%) dan Banten (14,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Darah Malaria 52,3 persen, sementara di perdesaan 54,0 persen.

Tabel 4.8.20.1.c menunjukkan persentase Puskesmas dengan kegiatan Pemeriksaan Sputum secara nasional 73,5 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Jawa Tengah (92,1%), Kalimantan Selatan (91,7%) dan Sumateran Barat (90,7%). Sedangkan terendah di Provinsi DKI (22,0%), Papua (37,8%) dan Papua Barat (39,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Sputum 74,9 persen, sementara di perdesaan 73,0 persen.

Persentase Puskesmas dengan kegiatan Pemeriksaan Laboratorium lainnya secara nasional 31,3 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (83,5%), Bangka Belitung (61,4%) dan Bali (58,8%). Sedangkan terendah di Provinsi Maluku (6,2%), Sulawesi Utara (6,6%) dan Gorontalo (6,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Lainnya ada sebanyak 39,6 persen, sementara di perdesaan 28,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan lengkap untuk program Pelayanan Laboratorium, yaitu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut diatas hanya sebanyak 7,0 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (63,6%), Jawa Tengah (15,3%) dan NTB (14,1%). Sedangkan ada 3 provinsi yang tidak ada Puskesmas yang melakukan kegiatan lengkap yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku. Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan lengkap untuk program Pelayanan Laboratorium ada sebanyak 9,4 persen, sementara di perdesaan 6,2 persen.

Tabel 4.8.20.1.c
Persentase Puskesmas menurut Jenis Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Sputum, Pemeriksaan Lainnya, dan Kegiatan Lengkap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pemeriksaan Sputum			Pemeriksaan Lab Lainnya			Kegiatan Lengkap		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	65,9	28,6	5,5	32,2	57,6	10,3	7,7	86,5	5,8
2	Sumatera Utara	506	61,5	27,5	11,1	14,0	72,9	13,0	2,0	87,2	10,9
3	Sumatera Barat	248	90,7	8,5	0,8	33,5	63,3	3,2	7,3	91,9	0,8
4	Riau	195	85,1	12,8	2,1	29,7	55,4	14,9	3,6	91,8	4,6
5	Jambi	171	83,6	8,2	8,2	29,8	57,9	12,3	6,4	84,2	9,4
6	Sumatera Selatan	298	76,5	15,1	8,4	29,2	58,1	12,8	4,0	86,9	9,1
7	Bengkulu	173	79,2	11,6	9,2	29,5	57,8	12,7	1,2	89,0	9,8
8	Lampung	265	84,9	9,8	5,3	28,7	57,4	14,0	3,8	89,8	6,4
9	Bangka Belitung	57	89,5	10,5	0	61,4	36,8	1,8	7,0	93,0	0
10	Kepulauan Riau	65	83,1	16,9	0	43,1	53,8	3,1	6,2	93,8	0
11	DKI Jakarta	336	22,0	54,5	23,5	10,4	64,3	25,3	1,2	75,3	23,5
12	Jawa Barat	1031	74,6	14,1	11,3	25,5	58,9	15,6	2,6	85,7	11,6
13	Jawa Tengah	861	92,1	6,3	1,6	50,4	43,6	6,0	15,3	81,5	3,1
14	DI Yogyakarta	121	90,1	9,9	0	83,5	14,0	2,5	63,6	35,5	0,8
15	Jawa Timur	949	82,5	11,1	6,4	49,2	37,8	13,0	13,8	78,3	7,9
16	Banten	206	89,3	4,4	6,3	34,0	54,9	11,2	4,4	89,3	6,3
17	Bali	114	88,6	10,5	0,9	58,8	34,2	7,0	2,6	95,6	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	87,2	11,4	1,3	45,0	45,0	10,1	14,1	83,9	2,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	78,5	14,2	7,3	37,1	50,7	12,3	1,7	91,1	7,3
20	Kalimantan Barat	233	89,7	9,0	1,3	36,5	61,4	2,1	11,2	87,1	1,7
21	Kalimantan Tengah	176	68,8	23,3	8,0	23,9	57,4	18,8	0,6	90,9	8,5
22	Kalimantan Selatan	217	91,7	6,0	2,3	33,2	59,4	7,4	10,6	86,2	3,2
23	Kalimantan Timur	213	83,1	12,7	4,2	37,1	54,5	8,5	9,4	84,5	6,1
24	Sulawesi Utara	167	51,5	33,5	15,0	6,6	68,9	24,6	0	85,0	15,0
25	Sulawesi Tengah	163	67,5	26,4	6,1	12,3	71,2	16,6	2,5	91,4	6,1
26	Sulawesi Selatan	406	58,4	26,1	15,5	29,3	51,5	19,2	8,4	75,1	16,5
27	Sulawesi Tenggara	233	51,1	33,9	15,0	6,9	70,8	22,3	0,4	84,5	15,0
28	Gorontalo	74	64,9	32,4	2,7	6,8	79,7	13,5	0	97,3	2,7
29	Sulawesi Barat	81	63,0	21,0	16,0	12,3	66,7	21,0	4,9	79,0	16,0
30	Maluku	161	61,5	22,4	16,1	6,2	61,5	32,3	0	82,6	17,4
31	Maluku Utara	101	63,4	19,8	16,8	10,9	66,3	22,8	1,0	82,2	16,8
32	Papua Barat	104	39,4	51,9	8,7	12,5	73,1	14,4	1,9	89,4	8,7
33	Papua	294	37,8	56,5	5,8	20,1	72,4	7,5	1,0	93,2	5,8
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	74,9	17,3	7,8	39,6	48,6	11,8	9,4	82,3	8,3
2	Perdesaan	6660	73,0	19,2	7,9	28,4	58,1	13,5	6,2	85,2	8,6
	INDONESIA	**8981**	**73,5**	**18,7**	**7,8**	**31,3**	**55,7**	**13,0**	**7,0**	**84,5**	**8,5**

4.8.20.2. Petugas Pelaksana, Pelatihan dan Pedoman Pelayanan Laboratorium

Tabel 4.8.20.2.1 menunjukan secara nasional persentase Puskesmas yang mempunyai tenaga pelaksana Pelayanan Laboratorium sebanyak 58,5 persen, dengan rincian yang memiliki jumlah petugas pelaksana 1-5 orang sebanyak 55,2 persen, 6-10 orang sebanyak 1,7 persen, 11-20 orang sebanyak 1,1 persen, dan >20 orang sebanyak 0,5 persen.

Tabel 4.8.20.2.1. menunjukan bahwa persentase Puskesmas menurut keberadaan tenaga pelaksana Pelayanan Laboratorium sebanyak 83,7persen, dengan rincian yang memiliki jumlah petugas pelaksana 1-5 orang 82,9 persen,6-10 orang sebanyak 0,5 persen, 11-20 orang sebanyak 0,2 persen, dan >20 orang sebanyak 0,1 persen.Sementara secara nasional ada 7,8 persen puskesmas yang tidak memiliki petugas pelaksana. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana Pelayanan Laboratorium 1-5 orang adalah Provinsi DIY (100,0%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (98,2%), dan Provinsi Bali (97,4%). Sedangkan persentase terendah di Provinsi DKI (27,4%), Papua (51,7%), dan Papua Barat (53,8%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas diperkotaan yang ada petugas pelaksana kegiatan Pelayanan Laboratorium 1-5 orang 82,2 persen, sementara di perdesaan 83,1 persen.

Persentase Puskesmas menurut keikut sertaan dalam pelatihan Tata Laksana Laboratorium pada tahun 2009 atau tahun 2010, secara nasional hanya sebanyak 16,6 persen. Persentase tertinggi ada di Provinsi Kalimantan Barat (36,5%), diikuti Banten (28,6%), dan Jambi (27,5%). Sedangkan persentase terendah adalah Provinsi DKI (6,8%), diikuti Sumatera Utara (8,1%), dan Sulawesi Selatan (8,1%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang ikut pelatihan Tata Laksana Laboratorium ada sebanyak 18,2 persen, sementara di perdesaan 16,0 persen.

Tabel4.8.20.2.1
Persentase Puskesmas menurutJumlah Petugas Pelaksana Pelayanan Laboratorium dan yang ikut Pelatihan Tata Laksana Laboratorium, Rifaskes2011

No	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana						Ikut pelatihan Tata Laksana Lab		
			% Tidak Ada	% 1-5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD	% Ada	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	8,0	84,6	0,6	0	0	6,8	11,6	82,3	6,1
2	Sumatera Utara	506	16,2	71,5	0,8	0	0,2	11,3	8,1	81,0	10,9
3	Sumatera Barat	248	2,4	96,8	0	0	0	0,8	19,4	79,4	1,2
4	Riau	195	7,7	89,7	0,5	0	0	2,1	21,5	76,9	1,5
5	Jambi	171	4,1	87,1	1,2	0	0	7,6	27,5	64,9	7,6
6	Sumatera Selatan	298	7,4	82,2	0	0	0	10,4	26,2	63,4	10,4
7	Bengkulu	173	1,7	88,4	0	0	0	9,8	13,9	76,9	9,2
8	Lampung	265	3,8	90,2	0	0,4	0,8	4,9	13,2	81,1	5,7
9	Bangka Belitung	57	1,8	98,2	0	0	0	0	14,0	86,0	0
10	Kepulauan Riau	65	6,2	92,3	1,5	0	0	0	16,9	83,1	0
11	DKI Jakarta	336	43,5	27,4	0	0	0	29,2	6,8	67,3	25,9
12	Jawa Barat	1031	6,7	81,3	0,5	0,1	0	11,4	18,4	70,1	11,4
13	Jawa Tengah	861	1,3	94,4	0,7	0,5	0,5	2,7	15,7	82,7	1,6
14	DI Yogyakarta	121	0	100,0	0	0	0	0	19,0	81,0	0
15	Jawa Timur	949	2,0	90,7	0,2	0,3	0	6,7	17,5	76,0	6,5
16	Banten	206	2,9	90,8	0,5	0	0	5,8	28,6	65,5	5,8
17	Bali	114	1,8	97,4	0	0	0	0,9	14,9	84,2	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	5,4	89,9	1,3	0	0,7	2,7	22,8	75,2	2,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	1,7	89,4	1,0	0	0	7,9	14,2	77,5	8,3
20	Kalimantan Barat	233	3,4	94,0	0	0	0	2,6	36,5	61,8	1,7
21	Kalimantan Tengah	176	6,3	82,4	1,7	0,6	0	9,1	12,5	79,0	8,5
22	Kalimantan Selatan	217	3,2	92,6	0,9	0,9	0	2,3	13,4	84,3	2,3
23	Kalimantan Timur	213	2,3	93,0	0,5	0	0	4,2	14,1	80,8	5,2
24	Sulawesi Utara	167	7,2	77,2	0	0	0	15,6	15,0	68,9	16,2
25	Sulawesi Tengah	163	1,2	92,0	0	0	0,6	6,1	21,5	73,0	5,5
26	Sulawesi Selatan	406	4,2	78,6	0,2	0	0	17,0	8,1	75,4	16,5
27	Sulawesi Tenggara	233	7,3	76,0	0	0,9	0,4	15,5	20,2	64,4	15,5
28	Gorontalo	74	0	95,9	1,4	0	0	2,7	31,1	64,9	4,1
29	Sulawesi Barat	81	7,4	74,1	1,2	0	1,2	16,0	18,5	66,7	14,8
30	Maluku	161	8,7	74,5	0,6	0	0	16,1	11,2	72,7	16,1
31	Maluku Utara	101	2,0	78,2	0	1,0	0	18,8	15,8	65,3	18,8
32	Papua Barat	104	35,6	53,8	1,0	0	0	9,6	14,4	75,0	10,6
33	Papua	294	41,2	51,7	2,0	0	0	5,1	11,6	83,0	5,4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	8,4	82,2	0,4	0	0,1	8,9	18,2	73,3	8,4
2	Perdesaan	6660	7,6	83,1	0,5	0,2	0,1	8,4	16,0	75,9	8,1
	INDONESIA	**8981**	**7,8**	**82,9**	**0,5**	**0,2**	**0,1**	**8,5**	**16,6**	**75,2**	**8,2**

Tabel 4.8.20.2.2.menunjukkan bahwa persentase Puskesmas menurut keikutsertaan petugas pada pelatihan Mikroskopis Malaria, secara nasional hanya sebanyak 28,9 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Gorontalo (89,2%), diikuti Kalimantan Barat (84,1%), dan Sulawesi Tengah (75,5%). Sedangkan terendah Provinsi Banten (3,4%), DKI (3,6%), dan Jawa Barat (4,9%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang petugas mengikuti pelatihan Mikroskopis Malaria ada sebanyak 27,8 persen,sementara di perdesaan 29,3 persen.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan petugas pada Pelatihan Mikroskopis TB secara nasional 34,9 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Jambi (62,0%), diikuti Riau (57,9%), dan Banten (54,9%). Sedangkan persentase terendah Provinsi Provinsi DKI (11,0%), diikuti Sulawesi Selatan (17,2%), dan Sumatera Utara (19,2%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang petugas mengikuti Pelatihan Mikroskopis TB ada sebanyak 36,6 persen, sementara di perdesaan 34,3 persen.

Persentase Puskesmas menurut keberadaan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan Laboratorium secara nasional hanya 44,1 persen (di perkotaan 46,9%, di perdesaan 43,1%). Persentase tertinggi di Provinsi DIY (78,5%), Jawa Tengah (62,7%), dan Jawa Timur (62,7%). Sedangkan persentase terendah adalah Provinsi DKI (16,4%), dikuti Papua Barat (17,3%) dan DI Aceh (18,3%)

Tabel 4.8.20.2.2
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Laboratorium dan Keberadaan Pedoman , Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Keikutsertaan pada Pelatihan Mikroskopis Malaria			Keikutsertaan pada Pelatihan Mikroskopis TB			Pedoman Laboratorium		
			% Ada	% Tidak	% TAD	% Ada	% Tidak	% TAD	% Ada	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	57,9	36,0	6,1	29,6	64,3	6,1	18,3	75,6	6,1
2	Sumatera Utara	506	12,5	76,7	10,9	19,2	70,0	10,9	23,1	65,6	11,3
3	Sumatera Barat	248	19,8	79,0	1,2	33,9	64,9	1,2	56,5	41,9	1,6
4	Riau	195	33,8	64,6	1,5	57,9	40,5	1,5	32,3	65,6	2,1
5	Jambi	171	35,7	56,7	7,6	62,0	30,4	7,6	39,2	52,6	8,2
6	Sumatera Selatan	298	26,2	63,4	10,4	46,3	43,6	10,1	39,9	50,0	10,1
7	Bengkulu	173	44,5	46,2	9,2	35,3	55,5	9,2	39,9	49,7	10,4
8	Lampung	265	30,6	63,8	5,7	44,5	49,8	5,7	40,4	54,0	5,7
9	Bangka Belitung	57	29,8	70,2	0	42,1	57,9	0	54,4	45,6	0
10	Kepulauan Riau	65	43,1	56,9	0	56,9	43,1	0	49,2	50,8	0
11	DKI Jakarta	336	3,6	70,5	25,9	11,0	63,1	25,9	16,4	58,0	25,6
12	Jawa Barat	1031	4,9	83,7	11,3	37,9	50,7	11,3	47,2	40,7	12,0
13	Jawa Tengah	861	18,8	79,6	1,6	37,3	61,1	1,6	62,7	35,3	2,0
14	DI Yogyakarta	121	12,4	87,6	0	34,7	65,3	0	78,5	21,5	0
15	Jawa Timur	949	7,2	86,3	6,5	28,6	64,8	6,6	62,7	30,6	6,7
16	Banten	206	3,4	90,8	5,8	54,9	39,3	5,8	48,1	45,6	6,3
17	Bali	114	29,8	69,3	0,9	42,1	57,0	0,9	49,1	50,0	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	51,7	46,3	2,0	47,0	51,0	2,0	55,7	40,9	3,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	44,0	48,0	7,9	33,8	57,9	8,3	41,1	50,7	8,3
20	Kalimantan Barat	233	84,1	14,2	1,7	44,2	54,1	1,7	59,2	38,6	2,1
21	Kalimantan Tengah	176	51,1	40,9	8,0	34,1	57,4	8,5	34,7	57,4	8,0
22	Kalimantan Selatan	217	46,1	51,6	2,3	47,9	49,8	2,3	46,1	51,6	2,3
23	Kalimantan Timur	213	40,4	54,9	4,7	43,7	51,6	4,7	51,6	44,1	4,2
24	Sulawesi Utara	167	58,7	25,1	16,2	22,2	61,7	16,2	41,9	41,9	16,2
25	Sulawesi Tengah	163	75,5	19,0	5,5	28,2	66,3	5,5	38,0	55,8	6,1
26	Sulawesi Selatan	406	43,8	39,7	16,5	17,2	66,3	16,5	32,3	51,2	16,5
27	Sulawesi Tenggara	233	58,8	25,8	15,5	38,6	45,9	15,5	39,9	44,2	15,9
28	Gorontalo	74	89,2	8,1	2,7	51,4	44,6	4,1	63,5	32,4	4,1
29	Sulawesi Barat	81	66,7	18,5	14,8	25,9	59,3	14,8	49,4	34,6	16,0
30	Maluku	161	33,5	50,3	16,1	28,6	55,3	16,1	32,3	50,9	16,8
31	Maluku Utara	101	47,5	34,7	17,8	47,5	35,6	16,8	40,6	42,6	16,8
32	Papua Barat	104	37,5	51,9	10,6	28,8	60,6	10,6	17,3	73,1	9,6
33	Papua	294	23,1	71,4	5,4	29,3	65,6	5,1	19,7	74,5	5,8
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	27,8	63,8	8,4	36,6	55,0	8,4	46,9	44,5	8,5
2	Perdesaan	6660	29,3	62,7	8,1	34,3	57,6	8,1	43,1	48,5	8,4
	INDONESIA	**8981**	**28,9**	**62,9**	**8,2**	**34,9**	**56,9**	**8,2**	**44,1**	**47,5**	**8,4**

4.8.20.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Laboratorium

Tabel 4.8.20.3.a dan Tabel 4.8.20.3.b menunjukkan secara nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkanPengawasan,Evaluasi dan Bimbingan terhadap Pelayanan Laboratorium, berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota, umpan balik laporan Pelayanan Laboratorium dari Dinas kesehatan Kab/Kota, keikutsertaan pada Pertemuan Monitoring evaluasi (Monev) yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota serta

Persentase Puskesmas yang menerima kunjungan supervisi petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota sebesar 51,4 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 53,0 persen, sementara di perdesaan 50,8 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Banten (80,6%), Gorontalo (75,7%), dan NTB (72,5%). Sedangkan persentase terendah adalah Provinsi Papua Barat (21,2%), dikuti Papua (21,4%) dan Maluku (25,5%).

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan umpan balik laporan Pelayanan Laboratorium dari Dinas kesehatan Kab/Kota adalah 40,0persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 39,2 persen, sementara di perdesaan 40,2 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Banten (59,7%), Jawa Tengah (55,2%) dan DIY (54,5%). Sedangkan persentase terendah adalah Provinsi DKI (11,9%), dikuti Maluku (18,0%) dan Papua Barat (18,3%).

Tabel 4.8.20.3.b. menunjukkan secara Nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti Pertemuan Monev sebanyak 47,1 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 47,6 persen, sementara di perdesaan 47,0 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi adalah Banten (68,9%), Kalimantan Selatan (66,8%) dan Gorontalo (64,9%). Sedangkan persentase terendah adalah Provinsi DKI (12,2%), dikuti Papua (16,0%) dan Papua Barat (20,2%).

Persentase Puskesmas yang mendapatkan bimbingan teknis lengkap untuk program Pelayanan Laboratorium secara nasional adalah sebanyak 30,7 persen (persentase di perkotaan 31,5% dan di perdesaan 30,4%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah Banten (54,4%), Gorontalo (48,6%) dan Jawa Tengah (45,8%). Sedangkan persentase terendah adalah Provinsi DKI (9,2%), dikuti Maluku (11,2%) dan Papua (11,2%).

Tabel 4.8.20.3.a
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan,Evaluasi dan Bimbingan Terhadap Pelayanan Laboratorium, Rifaskes2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota			Umpan Balik dari Dinkes Kab/Kota		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	52,4	41,5	6,1	33,4	60,1	6,4
2	Sumatera Utara	506	30,4	58,5	11,1	24,3	64,6	11,1
3	Sumatera Barat	248	58,1	41,1	0,8	38,7	60,5	0,8
4	Riau	195	59,5	39,0	1,5	47,7	50,3	2,1
5	Jambi	171	60,2	31,6	8,2	42,7	49,1	8,2
6	Sumatera Selatan	298	49,7	40,3	10,1	43,0	47,0	10,1
7	Bengkulu	173	65,3	24,9	9,8	40,5	49,7	9,8
8	Lampung	265	60,4	33,6	6,0	43,0	50,9	6,0
9	Bangka Belitung	57	57,9	42,1	0	45,6	54,4	0
10	Kepulauan Riau	65	53,8	46,2	0	36,9	63,1	0
11	DKI Jakarta	336	12,5	61,6	25,9	11,9	62,2	25,9
12	Jawa Barat	1031	58,3	30,2	11,5	54,4	34,0	11,5
13	Jawa Tengah	861	67,1	31,2	1,6	55,2	43,2	1,6
14	DI Yogyakarta	121	58,7	41,3	0	54,5	45,5	0
15	Jawa Timur	949	60,6	32,8	6,6	46,2	47,2	6,6
16	Banten	206	80,6	13,6	5,8	59,7	34,0	6,3
17	Bali	114	50,0	48,2	1,8	31,6	66,7	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	72,5	25,5	2,0	54,4	43,6	2,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	55,3	36,8	7,9	37,7	54,0	8,3
20	Kalimantan Barat	233	56,2	42,1	1,7	46,8	51,5	1,7
21	Kalimantan Tengah	176	35,2	56,3	8,5	29,0	62,5	8,5
22	Kalimantan Selatan	217	67,7	29,5	2,8	43,8	53,5	2,8
23	Kalimantan Timur	213	46,9	48,8	4,2	30,0	65,7	4,2
24	Sulawesi Utara	167	56,9	26,9	16,2	41,9	41,9	16,2
25	Sulawesi Tengah	163	35,6	57,7	6,7	31,3	61,3	7,4
26	Sulawesi Selatan	406	31,3	52,2	16,5	20,4	63,1	16,5
27	Sulawesi Tenggara	233	42,9	42,1	15,0	32,6	52,4	15,0
28	Gorontalo	74	75,7	20,3	4,1	52,7	41,9	5,4
29	Sulawesi Barat	81	49,4	35,8	14,8	40,7	44,4	14,8
30	Maluku	161	25,5	58,4	16,1	18,0	65,8	16,1
31	Maluku Utara	101	38,6	45,5	15,8	27,7	55,4	16,8
32	Papua Barat	104	21,2	69,2	9,6	18,3	72,1	9,6
33	Papua	294	21,4	73,5	5,1	19,0	75,5	5,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	53,0	38,6	8,4	39,2	52,4	8,4
2	Perdesaan	6660	50,8	41,0	8,1	40,2	51,5	8,2
	INDONESIA	**8981**	**51,4**	**40,4**	**8,2**	**40,0**	**51,8**	**8,3**

Tabel 4.8.20.3.b
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan,Evaluasi dan Bimbingan terhadap Pelayanan Laboratorium, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Keikutsertaan dalam Pertemuan Monev			Keberadaan Monitoring dan Bimbingan Lengkap		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	46,3	47,3	6,4	26,7	67,2	6,1
2	Sumatera Utara	506	32,6	56,3	11,1	18,8	70,2	11,1
3	Sumatera Barat	248	50,8	48,4	,8	25,4	73,8	0,8
4	Riau	195	48,7	48,7	2,6	33,8	63,6	2,6
5	Jambi	171	54,4	37,4	8,2	28,7	63,2	8,2
6	Sumatera Selatan	298	51,7	38,3	10,1	36,2	53,7	10,1
7	Bengkulu	173	54,3	35,3	10,4	32,4	57,8	9,8
8	Lampung	265	47,2	46,8	6,0	35,8	58,1	6,0
9	Bangka Belitung	57	35,1	64,9	,0	28,1	71,9	0
10	Kepulauan Riau	65	29,2	70,8	,0	16,9	83,1	0
11	DKI Jakarta	336	12,2	61,9	25,9	9,2	64,9	25,9
12	Jawa Barat	1031	60,3	28,1	11,5	45,0	43,5	11,5
13	Jawa Tengah	861	64,6	33,8	1,6	45,8	52,6	1,6
14	DI Yogyakarta	121	64,5	35,5	,0	37,2	62,8	0
15	Jawa Timur	949	59,3	33,9	6,7	36,7	56,7	6,6
16	Banten	206	68,9	25,2	5,8	54,4	39,3	6,3
17	Bali	114	44,7	53,5	1,8	21,1	77,2	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	62,4	35,6	2,0	45,6	52,3	2,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	40,7	51,3	7,9	24,5	67,5	7,9
20	Kalimantan Barat	233	53,6	44,6	1,7	30,9	67,4	1,7
21	Kalimantan Tengah	176	28,4	63,1	8,5	15,9	75,6	8,5
22	Kalimantan Selatan	217	66,8	30,4	2,8	38,2	59,0	2,8
23	Kalimantan Timur	213	26,3	69,5	4,2	18,8	77,0	4,2
24	Sulawesi Utara	167	44,3	39,5	16,2	31,1	52,7	16,2
25	Sulawesi Tengah	163	33,7	58,3	8,0	20,9	71,2	8,0
26	Sulawesi Selatan	406	34,2	49,0	16,7	13,8	69,7	16,5
27	Sulawesi Tenggara	233	31,3	53,6	15,0	18,5	66,5	15,0
28	Gorontalo	74	64,9	31,1	4,1	48,6	47,3	4,1
29	Sulawesi Barat	81	42,0	43,2	14,8	33,3	51,9	14,8
30	Maluku	161	20,5	62,7	16,8	11,2	72,7	16,1
31	Maluku Utara	101	28,7	55,4	15,8	20,8	63,4	15,8
32	Papua Barat	104	20,2	69,2	10,6	11,5	78,8	9,6
33	Papua	294	16,0	78,9	5,1	11,2	83,7	5,1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	47,6	43,9	8,5	31,5	60,1	8,4
2	Perdesaan	6660	47,0	44,8	8,3	30,4	61,4	8,2
	INDONESIA	**8981**	47,1	44,5	8,3	30,7	61,0	8,3

4.8.21. PELAYANAN KEFARMASIAN

4.8.21.1. Petugas Pelaksana Pelayanan Kefarmasian

Tabel 4.8.21.1.1 menunjukkan bahwa persentase Puskesmas yang mempunyai tenaga pelaksana Pelayanan Kefarmasian secara nasionaladalah 98,5 persen dengan rincian persentase Puskesmas dengan jumlah tenaga pelaksana 1-5 orang sebesar 94,5 persen, 6-10 orang sebesar 3,0 persen,11-20 orang sebesar 0,8 persen, lebih dari 20 orang sebesar 0,2 persen.Sementara secara nasional hanya 1,0 persen Puskesmas yang tidak memiliki petugas pelaksana untuk Pelayanan Kefarmasian. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana Pelayanan Kefarmasian 1-5 orang adalah Provinsi Sumatera Barat (98,8%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (98,6%), dan Provinsi Kalimantan Selatan (98,6%). Sedangkan terendah di Provinsi Papua (76,5%), Papua Barat (86,5%), dan Maluku (87,6%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang ada petugas pelaksana kegiatan Pelayanan Kefarmasian 1-5orang sama banyaknya dengan yang di perdesaan

Tabel 4.8.21.1.2.a dan 4.8.21.1.2.b menunjukan bahwa persentase Puskesmas menurut pendidikan tenaga pelaksana Pelayanan Kefarmasian yaitusecaraa nasional Apoteker 14,3 persen, sementara S1 Farmasi hanya 7,5 persen, D3 Farmasi 26,7 persen, Asisten apoteker 37,6 persen. Disamping itu masih ada Puskesmas yang petugas pelaksana untuk Pelayanan Kefarmasian bukan tenaga kefarmasian yaitu perawat secara nasional 35,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugas pelaksana Pelayanan Kefarmasian berpendidikan perawat adalah Provinsi Maluku (78,3%), diikuti Provinsi Papua Barat (74,0%), dan Provinsi Papua (66,0%),sedangkan persentase terendah ada di Provinsi DIY (7,4%), Kalimantan Selatan (8,3%), dan Jawa Timur (10,2%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas di perkotaan yang ada petugas pelaksana kegiatan Pelayanan Kefarmasian berpendidikan perawat 29,6 persen, sementara di perdesaan 38,0 persen.

Tabel4.8.21.1.1
Persentase Puskesmas menurut Jumlah Petugas Pelaksana Pelayanan Kefarmasian, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana					
			% Tidak Ada	% 1-5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	0,6	81,0	14,8	2,6	0,6	0,3
2	Sumatera Utara	506	1,8	92,7	2,8	1,2	0,4	1,2
3	Sumatera Barat	248	0	98,8	1,2	0	0	0
4	Riau	195	0,5	94,4	3,1	0	0	2,1
5	Jambi	171	0,6	95,9	2,9	0	0	0,6
6	Sumatera Selatan	298	0,3	95,6	3,4	0	0	0,7
7	Bengkulu	173	0,6	98,3	0,6	0,6	0	0
8	Lampung	265	0	91,7	4,9	2,6	0,4	0,4
9	Bangka Belitung	57	0	98,2	1,8	0	0	0
10	Kepulauan Riau	65	0	90,8	0	7,7	1,5	0
11	DKI Jakarta	336	3,0	92,6	3,3	0,6	0	0,6
12	Jawa Barat	1031	0	98,4	0,9	0,3	0,1	0,4
13	Jawa Tengah	861	0	98,6	1,2	0,1	0,1	0
14	DI Yogyakarta	121	0	98,3	1,7	0	0	0
15	Jawa Timur	949	0,2	97,5	1,6	0,2	0,1	0,4
16	Banten	206	0	95,6	2,4	1,0	1,0	0
17	Bali	114	0	91,2	5,3	3,5	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	0	97,3	2,7	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	0	88,4	5,3	3,3	1,3	1,7
20	Kalimantan Barat	233	0	97,9	1,3	0,9	0	0
21	Kalimantan Tengah	176	0	97,2	1,1	1,1	0,6	0
22	Kalimantan Selatan	217	0	98,6	0,9	0	0,5	0
23	Kalimantan Timur	213	0	96,2	2,8	0	0	0,9
24	Sulawesi Utara	167	0	97,6	0,6	1,8	0	0
25	Sulawesi Tengah	163	0	94,5	4,3	0	0	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	0,7	94,1	3,9	0,2	1,0	0
27	Sulawesi Tenggara	233	0	92,7	6,4	0	0	0,9
28	Gorontalo	74	1,4	93,2	4,1	0	0	1,4
29	Sulawesi Barat	81	0	92,6	2,5	1,2	0	3,7
30	Maluku	161	1,9	87,6	5,6	1,9	0	3,1
31	Maluku Utara	101	0	92,1	5,9	0	1,0	1,0
32	Papua Barat	104	2,9	86,5	6,7	1,0	0	2,9
33	Papua	294	16,7	76,5	4,4	1,4	0	1,0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	0,6	94,1	4,3	0,5	0,1	0,4
2	Perdesaan	6660	1,1	94,6	2,5	0,9	0,3	0,6
	INDONESIA	**8981**	**1,0**	**94,5**	**3,0**	**0,8**	**0,2**	**0,6**

Tabel 4.8.21.1.2.a
Persentase Puskesmas menurut Pendidikan Petugas Pelaksana Pelayanan Kefarmasian, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Apoteker			S1 Farmasi			D 3 Farmasi		
			% Ada	% Tidak	% TAD	% Ada	% Tidak	% TAD	% Ada	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	4.2	95.2	0.6	3,5	95,8	0,6	49,2	50,2	0,6
2	Sumatera Utara	506	6.1	92.7	1.2	3,2	95,5	1,4	28,1	70,6	1,4
3	Sumatera Barat	248	12.1	87.5	0.4	2,4	97,2	0,4	47,6	52,0	0,4
4	Riau	195	19.5	77.9	2.6	6,7	90,8	2,6	35,4	62,1	2,6
5	Jambi	171	8.8	90.1	1.2	4,7	94,2	1,2	50,9	48,0	1,2
6	Sumatera Selatan	298	9.7	89.6	0.7	4,7	94,6	0,7	40,9	58,4	0,7
7	Bengkulu	173	11.6	86.7	1.7	5,8	92,5	1,7	12,7	85,0	2,3
8	Lampung	265	10.6	88.3	1.1	6,4	92,1	1,5	24,5	74,3	1,1
9	Bangka Belitung	57	12.3	87.7	0	5,3	94,7	0	61,4	38,6	0
10	Kepulauan Riau	65	26.2	73.8	0	4,6	95,4	0	27,7	72,3	0
11	DKI Jakarta	336	15.8	83	1.2	2,7	96,1	1,2	10,1	88,7	1,2
12	Jawa Barat	1031	9.3	90.2	0.5	7,2	92,3	0,5	11,3	88,2	0,5
13	Jawa Tengah	861	12.9	87	0.1	2,2	97,7	0,1	32,4	67,6	0
14	DI Yogyakarta	121	14.9	84.3	0.8	2,5	96,7	0,8	19,0	80,2	0,8
15	Jawa Timur	949	16	83.6	0.4	3,4	96,2	0,4	20,9	78,7	0,4
16	Banten	206	9.7	89.3	1	4,4	94,7	1,0	20,4	79,1	0,5
17	Bali	114	14.9	85.1	0	0	100,0	0	6,1	93,9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	16.8	82.6	0.7	8,1	91,3	0,7	20,8	78,5	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	8.3	90.1	1.7	12,6	85,8	1,7	46,0	52,3	1,7
20	Kalimantan Barat	233	15.9	84.1	0	3,4	96,6	0	51,5	48,5	0
21	Kalimantan Tengah	176	19.9	80.1	0	2,8	97,2	0	29,5	70,5	0
22	Kalimantan Selatan	217	22.6	77	0.5	1,8	97,7	0,5	18,0	81,6	0,5
23	Kalimantan Timur	213	28.6	70.4	0.9	5,2	93,9	0,9	30,0	69,0	0,9
24	Sulawesi Utara	167	11.4	88.6	0	13,8	86,2	0	29,3	70,7	0
25	Sulawesi Tengah	163	22.7	75.5	1.8	31,3	66,9	1,8	50,3	48,5	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	34.7	65.3	0	34,5	65,5	0	33,3	66,7	0
27	Sulawesi Tenggara	233	19.3	79.8	0.9	19,7	79,4	0,9	30,9	68,2	0,9
28	Gorontalo	74	18.9	79.7	1.4	14,9	83,8	1,4	14,9	83,8	1,4
29	Sulawesi Barat	81	18.5	77.8	3.7	23,5	72,8	3,7	23,5	72,8	3,7
30	Maluku	161	6.8	88.8	4.3	6,8	88,8	4,3	8,1	87,6	4,3
31	Maluku Utara	101	19.8	79.2	1	25,7	73,3	1,0	11,9	87,1	1,0
32	Papua Barat	104	18.3	78.8	2.9	10,6	86,5	2,9	8,7	88,5	2,9
33	Papua	294	10.9	87.4	1.7	2,4	95,9	1,7	7,1	91,2	1,7
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	23.5	75.8	0.7	7,5	91,7	0,8	29,3	70,1	0,7
2	Perdesaan	6660	11	88.1	0.9	7,5	91,7	0,9	25,8	73,3	0,9
	INDONESIA	**8981**	**14.3**	**84.9**	**0.8**	**7,5**	**91,7**	**0,9**	**26,7**	**72,5**	**0,8**

Tabel 4.8.21.1.2.b
Persentase Puskesmas menurut Pendidikan Petugas Pelaksana Pelayanan Kefarmasian, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Asisten Apoteker			Tenaga Perawat		
			% Ada	% Tidak	% TAD	% Ada	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	42,8	56,6	0,6	61,4	37,9	0,6
2	Sumatera Utara	506	38,3	60,3	1,4	38,1	60,5	1,4
3	Sumatera Barat	248	59,7	39,9	0,4	17,3	82,3	0,4
4	Riau	195	49,7	47,7	2,6	45,1	52,3	2,6
5	Jambi	171	36,8	62,0	1,2	40,4	58,5	1,2
6	Sumatera Selatan	298	37,6	61,7	0,7	41,9	57,4	0,7
7	Bengkulu	173	41,6	57,2	1,2	54,3	43,9	1,7
8	Lampung	265	24,5	74,3	1,1	38,5	60,4	1,1
9	Bangka Belitung	57	42,1	57,9	0	24,6	75,4	0
10	Kepulauan Riau	65	50,8	49,2	0	46,2	53,8	0
11	DKI Jakarta	336	24,7	74,1	1,2	56,8	42,0	1,2
12	Jawa Barat	1031	41,4	58,0	0,6	32,4	67,1	0,5
13	Jawa Tengah	861	48,4	51,6	0	18,2	81,6	0,1
14	DI Yogyakarta	121	75,2	24,8	0	7,4	90,9	1,7
15	Jawa Timur	949	54,2	45,3	0,5	10,2	89,4	0,4
16	Banten	206	20,4	78,6	1,0	48,1	51,5	0,5
17	Bali	114	77,2	22,8	0	43,0	57,0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	47,0	53,0	0	26,2	73,8	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	29,5	68,9	1,7	27,8	70,5	1,7
20	Kalimantan Barat	233	25,3	74,7	0	30,0	70,0	0
21	Kalimantan Tengah	176	23,9	76,1	0	51,1	48,9	0
22	Kalimantan Selatan	217	76,5	23,5	0	8,3	91,2	0,5
23	Kalimantan Timur	213	40,8	58,2	0,9	33,8	65,3	0,9
24	Sulawesi Utara	167	26,9	73,1	0	55,7	44,3	0
25	Sulawesi Tengah	163	11,7	86,5	1,8	35,6	62,6	1,8
26	Sulawesi Selatan	406	21,2	78,8	0	35,7	64,3	0
27	Sulawesi Tenggara	233	12,0	87,1	0,9	57,9	41,2	0,9
28	Gorontalo	74	6,8	91,9	1,4	35,1	63,5	1,4
29	Sulawesi Barat	81	12,3	84,0	3,7	49,4	46,9	3,7
30	Maluku	161	6,8	88,8	4,3	78,3	18,0	3,7
31	Maluku Utara	101	5,0	94,1	1,0	62,4	36,6	1,0
32	Papua Barat	104	15,4	81,7	2,9	74,0	23,1	2,9
33	Papua	294	13,3	85,0	1,7	66,0	32,7	1,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	54,2	45,1	0,6	29,6	69,7	0,7
2	Perdesaan	6660	31,8	67,3	0,9	38,0	61,2	0,8
	INDONESIA	**8981**	**37,6**	**61,6**	**0,8**	**35,8**	**63,4**	**0,8**

4.8.21.2. Pelatihan Petugas dan Pedoman Pelayanan Kefarmasian

Tabel 4.8.21.2.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut keikutsertaan petugas pada pelatihan berkaitan Pelayanan Obat, dan Pelatihan Pengelolaan Obat, dan lengkap mengikuti kedua jenis pelatihan tersebut pada tahun 2009 atau tahun 2010. Secara nasional persentase puskesmas yang mengikuti pelatihan Pelayananan Obat hanya sebanyak 27,5 persen. Persentase tertinggi ada di Provinsi Bangka Belitung (77,2%), diikuti NTB (71,8%), dan Gorontalo (56,8%). Sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Sulawesi Utara (10,2%), diikuti Bengkulu (13,3%), dan Bali (14,0%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas diperkotaan yang ikut pelatihan Pelayanan Obat ada sebanyak 34,4 persen, sementara di perdesaan 25,1 persen.

Persentase Puskesmas menurut keikutsertaan petugas pada pelatihan Pengelolaan Obat secara nasional 31,2 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (73,7%), diikuti Gorontalo (67,6%), dan NTB (67,1%). Sedangkan persentase terendah adalah Provinsi Provinsi Sulawesi Utara (11,4%), diikuti Bali (15,8%), dan Maluku (17,4%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas diperkotaan yang petugas mengikuti pelatihan Pengelolaan Obat ada sebanyak 36,8 persen, sementara di perdesaan 29,2.

Persentase Puskesmas menurut keikutsertaan petugas pada Pelatihan Lengkap secara nasional 23,7 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (68,4%), diikuti NTB (61,7%), dan Gorontalo (52,7%). Sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Bali dan Sulawesi Utara masing-masing 9,6 persen, diikuti Papua Barat (11,5%). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas diperkotaan yang petugas mengikuti Pelatihan Lengkap ada sebanyak 29,1 persen, sementara di perdesaan 21,8 persen.

Tabel 4.8.21.2.2.menunjukkan persentase Puskesmas menurut keberadaan Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, secara nasional 47,8 persen (di perkotaan 53,7%, diperdesaan 45,7%). Persentase tertinggi di Provinsi DIY (83,5%), NTB (79,2%), dan Bangka Belitung (77,2%). Sementara persentase terendah adalah Provinsi Papua Barat (21,2%), diikuti Papua (22,1%), dan DI Aceh (23,2%).

Persentase Puskesmas menurut keberadaan Pedoman Pengelolaan Obat secara nasional 52,9 persen (di perkotaan 56,6%, diperdesaan 51,6%). Tertinggi di Provinsi DIY (89,3%), NTB (79,2 %), dan Jawa Tengah (78,5 %). Sementara persentase terendah adalah Provinsi Papua Barat (22,1%), diikuti Papua (23,1%), dan Maluku (24,8%).

Persentase Puskesmas menurut keberadaan pedoman lengkap kefarmasian (mempunyai kedua jenis Pedoman tersebut diatas) secara nasional 43,5 persen (di perkotaan 48,4%, diperdesaan 41,7%). Persentas tertinggi di Provinsi DIY (80,2%), diikuti NTB (73,2%), dan Bangka Belitung (63,2%), sementara persentase terendah di Provinsi Papua (20,1%), diikuti Papua Barat (20,2%), dan Maluku (22,4%).

Tabel 4.8.21.2.1
Persentase Puskesmas menurut Jenis Pelatihan Petugas Kefarmasian, RIFASKES 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Pelayanan Obat			Pelatihan Pengelolaan Obat			Pelatihan Lengkap		
			% Ada	% Tidak	% TAD	% Ada	% Tidak	% TAD	% Ada	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	27,0	72,7	0,3	31,2	68,5	0,3	22,2	77,5	0,3
2	Sumatera Utara	506	17,8	81,0	1,2	19,0	79,8	1,2	13,8	85,0	1,2
3	Sumatera Barat	248	25,0	75,0	0	27,4	72,6	0	20,2	79,8	0
4	Riau	195	25,6	72,3	2,1	32,8	65,1	2,1	22,1	75,9	2,1
5	Jambi	171	47,4	52,0	0,6	46,2	53,2	0,6	42,1	57,3	0,6
6	Sumatera Selatan	298	27,5	72,1	0,3	28,2	71,5	0,3	21,8	77,9	0,3
7	Bengkulu	173	13,3	86,1	0,6	25,4	74,6	0	11,6	87,9	0,6
8	Lampung	265	26,0	73,6	0,4	31,3	68,3	0,4	23,4	76,2	0,4
9	Bangka Belitung	57	77,2	22,8	0	73,7	26,3	0	68,4	31,6	0
10	Kepulauan Riau	65	36,9	63,1	0	38,5	61,5	0	29,2	70,8	0
11	DKI Jakarta	336	23,8	75,6	0,6	23,2	76,2	0,6	21,1	78,3	0,6
12	Jawa Barat	1031	36,1	63,3	0,6	43,5	56,1	0,5	33,1	66,2	0,7
13	Jawa Tengah	861	21,1	78,9	0	25,0	75,0	0	19,3	80,7	0
14	DI Yogyakarta	121	27,3	72,7	0	38,0	62,0	0	24,0	76,0	0
15	Jawa Timur	949	25,1	74,6	0,3	27,5	72,2	0,3	21,5	78,2	0,3
16	Banten	206	36,9	63,1	0	37,9	62,1	0	30,6	69,4	0
17	Bali	114	14,0	86,0	0	15,8	84,2	0	9,6	90,4	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	71,8	27,5	0,7	67,1	31,5	1,3	61,7	36,9	1,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	23,5	74,5	2,0	28,8	69,2	2,0	21,9	76,2	2,0
20	Kalimantan Barat	233	33,0	67,0	0	39,5	60,5	0	30,0	70,0	0
21	Kalimantan Tengah	176	24,4	75,6	0	24,4	75,6	0	18,2	81,8	0
22	Kalimantan Selatan	217	38,2	61,8	0	43,3	56,7	0	32,7	67,3	0
23	Kalimantan Timur	213	27,7	71,4	0,9	34,3	64,8	0,9	22,5	76,5	0,9
24	Sulawesi Utara	167	10,2	89,8	0	11,4	88,6	0	9,6	90,4	0
25	Sulawesi Tengah	163	28,8	69,9	1,2	36,2	62,6	1,2	25,8	73,0	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	26,6	73,2	0,2	27,3	72,7	0	20,9	78,8	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	23,6	75,1	1,3	30,5	68,2	1,3	18,5	80,3	1,3
28	Gorontalo	74	56,8	40,5	2,7	67,6	29,7	2,7	52,7	44,6	2,7
29	Sulawesi Barat	81	55,6	39,5	4,9	53,1	43,2	3,7	40,7	54,3	4,9
30	Maluku	161	16,1	79,5	4,3	17,4	78,9	3,7	14,9	80,7	4,3
31	Maluku Utara	101	16,8	82,2	1,0	21,8	77,2	1,0	14,9	84,2	1,0
32	Papua Barat	104	15,4	81,7	2,9	19,2	77,9	2,9	11,5	85,6	2,9
33	Papua	294	18,0	81,3	0,7	21,1	77,9	1,0	15,6	83,3	1,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	34,4	65,1	0,5	36,8	62,7	0,5	29,1	70,4	0,5
2	Perdesaan	6660	25,1	74,1	0,7	29,2	70,1	0,7	21,8	77,4	0,8
	INDONESIA	**8981**	**27,5**	**71,8**	**0,7**	**31,2**	**68,2**	**0,6**	**23,7**	**75,6**	**0,7**

Tabel 4.8.21.2.2
Persentase Puskesmas menurut keberadaan Pedoman Pelayanan Kefarmasian, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman Pelayanan Kefarmasian			Pedoman Pengelolaan Obat			Pedoman Lengkap Pelayanan Kefarmasian		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	23,2	76,5	0,3	30,9	68,8	0,3	22,8	76,8	0,3
2	Sumatera Utara	506	35,0	63,6	1,4	39,7	58,9	1,4	31,0	67,6	1,4
3	Sumatera Barat	248	48,8	51,2	0	48,4	51,6	0	41,9	58,1	0
4	Riau	195	35,4	62,6	2,1	41,0	56,9	2,1	31,3	66,7	2,1
5	Jambi	171	40,9	58,5	0,6	43,9	55,6	0,6	39,2	60,2	0,6
6	Sumatera Selatan	298	39,3	60,4	0,3	40,6	59,1	0,3	35,2	64,4	0,3
7	Bengkulu	173	38,2	61,3	0,6	53,8	45,7	0,6	35,8	63,6	0,6
8	Lampung	265	47,5	52,1	0,4	46,8	52,8	0,4	40,0	59,6	0,4
9	Bangka Belitung	57	77,2	22,8	0	73,7	26,3	0	63,2	36,8	0
10	Kepulauan Riau	65	53,8	46,2	0	63,1	36,9	0	50,8	49,2	0
11	DKI Jakarta	336	46,4	53,0	0,6	47,9	51,5	0,6	43,5	56,0	0,6
12	Jawa Barat	1031	58,5	40,9	0,6	64,7	34,8	0,5	54,6	44,9	0,5
13	Jawa Tengah	861	64,5	35,5	0	78,5	21,4	0,1	62,4	37,6	0
14	DI Yogyakarta	121	83,5	16,5	0	89,3	10,7	0	80,2	19,8	0
15	Jawa Timur	949	60,6	38,8	0,6	67,4	32,1	0,4	55,3	44,0	0,6
16	Banten	206	53,4	46,6	0	60,2	39,8	0	47,1	52,9	0
17	Bali	114	43,0	57,0	0	57,9	42,1	0	40,4	59,6	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	79,2	20,8	0	79,2	20,8	0	73,2	26,8	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	38,4	58,9	2,6	43,7	53,6	2,6	33,4	63,9	2,6
20	Kalimantan Barat	233	47,2	52,8	0	58,8	41,2	0	42,9	57,1	0
21	Kalimantan Tengah	176	41,5	58,5	0	44,3	55,7	0	34,7	65,3	0
22	Kalimantan Selatan	217	59,4	40,6	0	59,4	40,6	0	50,7	49,3	0
23	Kalimantan Timur	213	51,2	47,9	0,9	53,1	46,0	0,9	43,7	55,4	0,9
24	Sulawesi Utara	167	26,9	72,5	0,6	28,7	71,3	0	24,0	75,4	0,6
25	Sulawesi Tengah	163	33,7	65,0	1,2	37,4	61,3	1,2	30,7	68,1	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	38,9	61,1	0	37,4	62,3	0,2	32,0	67,7	0,2
27	Sulawesi Tenggara	233	31,3	67,8	0,9	37,3	61,8	0,9	27,9	71,2	0,9
28	Gorontalo	74	68,9	28,4	2,7	54,1	43,2	2,7	51,4	45,9	2,7
29	Sulawesi Barat	81	56,8	39,5	3,7	70,4	25,9	3,7	56,8	39,5	3,7
30	Maluku	161	25,5	70,2	4,3	24,8	70,8	4,3	22,4	73,3	4,3
31	Maluku Utara	101	31,7	67,3	1,0	32,7	66,3	1,0	30,7	68,3	1,0
32	Papua Barat	104	21,2	76,0	2,9	22,1	75,0	2,9	20,2	76,9	2,9
33	Papua	294	22,1	76,5	1,4	23,1	75,5	1,4	20,1	78,6	1,4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	53,7	45,8	0,5	56,6	43,0	0,5	48,4	51,1	0,5
2	Perdesaan	6660	45,7	53,5	0,8	51,6	47,6	0,8	41,7	57,4	0,8
	INDONESIA	**8981**	**47,8**	**51,5**	**0,7**	**52,9**	**46,4**	**0,7**	**43,5**	**55,8**	**0,7**

4.8.21.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kefarmasian

Tabel 4.8.21.3.1 menunjukkan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kefarmasian dari petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Puskesmas selama tahun 2010. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan Kunjungan Supervisi dari petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota sebesar 67,9 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 67,2 persen, sementara di perdesaan 68,1 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi mendapat kunjungan supervisi petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah Jawa Tengah (86,8%), DIY (85,1%) dan Jawa Timur (84,2%). Sementara persentase terendah ada di Provinsi Papua (27,9%), diikuti Maluku (30,4%), dan Maluku Utara (36,6%).

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan umpanbaliklaporan Pelayanan Kefarmasian dari Dinas Kesehatan Kab/Kota sebesar 51,7 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 51,4 persen, sementara di perdesaan 51,9 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi mendapat umpan balik adalah Jawa Barat (74,9%), DIY (72,7%) dan Jawa Tengah (69,7%). Sementara persentase terendah adalah Provinsi Papua Barat (20,2%), diikuti Maluku (21,1%), dan Papua (24,5%).

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti Pertemuan Monev Pelayanan Kefarmasian yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah 57,2 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 59,8 persen, sementara di perdesaan 56,4 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (91,7%), Jawa Tengah (86,2%) dan Jawa Barat (83,0%). Sementara persentase terendah ada di Provinsi Maluku (7,5%), diikuti Papua Barat 15,4(%) dan Maluku Utara (16,8%).

Tabel 4.8.21.3.1
Persentase Puskesmas menurut KeberadaanPengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kefarmasian, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota			Umpan Balik laporan			Pertemuan Monev		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	58,8	40,8	0,3	40,8	58,8	0,3	34,7	64,6	0,6
2	Sumatera Utara	506	50,6	48,2	1,2	36,6	62,3	1,2	49,0	49,8	1,2
3	Sumatera Barat	248	78,6	21,4	0	54,0	46,0	0	56,5	43,5	0
4	Riau	195	62,6	35,4	2,1	46,7	51,3	2,1	41,0	56,9	2,1
5	Jambi	171	64,3	35,1	0,6	48,5	50,9	0,6	57,9	40,9	1,2
6	Sumatera Selatan	298	66,4	32,9	0,7	49,7	49,7	0,7	48,3	51,0	0,7
7	Bengkulu	173	56,6	43,4	0	40,5	59,0	0,6	37,0	63,0	0
8	Lampung	265	73,2	26,0	0,8	48,7	50,6	0,8	61,1	38,1	0,8
9	Bangka Belitung	57	70,2	29,8	0	45,6	54,4	0	43,9	56,1	0
10	Kepulauan Riau	65	69,2	30,8	0	40,0	60,0	0	49,2	50,8	0
11	DKI Jakarta	336	50,9	48,5	0,6	39,3	60,1	0,6	49,1	50,3	0,6
12	Jawa Barat	1031	80,1	19,5	0,4	74,9	24,7	0,4	83,0	16,6	0,4
13	Jawa Tengah	861	86,8	13,2	0	69,7	30,3	0	86,2	13,8	0
14	DI Yogyakarta	121	85,1	14,9	0	72,7	27,3	0	91,7	8,3	0
15	Jawa Timur	949	84,2	15,5	0,3	63,2	36,5	0,3	76,7	22,9	0,4
16	Banten	206	82,5	17,5	0	63,1	36,9	0	70,9	29,1	0
17	Bali	114	72,8	27,2	0	38,6	61,4	0	46,5	53,5	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	81,2	18,8	0	67,8	32,2	0	60,4	39,6	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	61,6	36,4	2,0	38,7	59,3	2,0	43,0	55,0	2,0
20	Kalimantan Barat	233	70,8	29,2	0	61,4	38,6	0	52,8	47,2	0
21	Kalimantan Tengah	176	50,0	50,0	0	32,4	67,6	0	19,3	80,7	0
22	Kalimantan Selatan	217	79,7	20,3	0	55,8	44,2	0	80,6	19,4	0
23	Kalimantan Timur	213	49,8	49,3	0,9	30,0	69,0	0,9	29,6	69,5	0,9
24	Sulawesi Utara	167	57,5	42,5	0	37,7	62,3	0	28,1	71,9	0
25	Sulawesi Tengah	163	44,2	54,6	1,2	30,1	68,7	1,2	33,7	65,0	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	70,0	30,0	0	46,6	53,4	0	58,1	41,9	0
27	Sulawesi Tenggara	233	62,7	36,5	0,9	51,9	47,2	0,9	41,2	57,9	0,9
28	Gorontalo	74	74,3	23,0	2,7	48,6	48,6	2,7	51,4	45,9	2,7
29	Sulawesi Barat	81	69,1	27,2	3,7	60,5	35,8	3,7	63,0	33,3	3,7
30	Maluku	161	30,4	64,6	5,0	21,1	73,9	5,0	7,5	87,6	5,0
31	Maluku Utara	101	36,6	62,4	1,0	24,8	74,3	1,0	16,8	82,2	1,0
32	Papua Barat	104	37,5	59,6	2,9	20,2	76,9	2,9	15,4	81,7	2,9
33	Papua	294	27,9	71,1	1,0	24,5	74,5	1,0	18,7	79,9	1,4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	67,2	32,4	0,4	51,4	48,2	0,4	59,8	39,8	0,4
2	Perdesaan	6660	68,1	31,2	0,7	51,9	47,4	0,7	56,4	42,9	0,8
	INDONESIA	**8981**	**67,9**	**31,5**	**0,6**	**51,7**	**47,6**	**0,6**	**57,2**	**42,1**	**0,7**

4.8.22. PELAYANAN PUSKESMAS KELILING

Di dalam Rifaskes 2011, dikumpulkan juga mengenai data Puskesmas Keliling (Pusling) yang dilaksanakan oleh puskesmas di Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi frekuensi dan jenis kegiatan apa saja yang dilakukan, berapa dan bagaimana komposisi tenaga pelaksana Pusling, dan bimbingan teknis serta monitoring evaluasi yang diberikan dalam pelaksanaaan Pusling.

4.8.22.1. Kegiatan Pelayanan Puskesmas Keliling

Tabel 4.8.22.1.
Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Kegiatan Pusling di Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Frekuensi Kegiatan Pusling di Puskesmas						
			% > 1x Sebulan	% 1 Bulan Sekali	% 2 Bulan Sekali	% 3 Bulan Sekali	% Tidak Tentu	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi								
1	DI Aceh	311	9,0	9,3	1,6	2,6	17,4	54,0	6,1
2	Sumatera Utara	506	19,2	7,7	1,0	1,6	17,4	51,2	2,0
3	Sumatera Barat	248	28,6	20,6	4,4	6,0	15,7	21,4	3,2
4	Riau	195	15,9	20,0	1,0	8,7	11,3	39,5	3,6
5	Jambi	171	24,0	30,4	2,9	9,4	19,9	7,0	6,4
6	Sumatera Selatan	298	16,8	22,5	2,0	2,7	16,8	29,9	9,4
7	Bengkulu	173	18,5	16,8	1,7	5,2	21,4	28,9	7,5
8	Lampung	265	23,0	21,9	1,1	5,7	21,5	22,6	4,2
9	Bangka Belitung	57	24,6	14,0	1,8	0,0	7,0	52,6	0,0
10	Kepulauan Riau	65	16,9	16,9	0,0	1,5	18,5	41,5	4,6
11	DKI Jakarta	336	3,3	1,5	0,0	0,0	0,9	83,3	11,0
12	Jawa Barat	1031	35,7	18,8	1,3	1,7	8,1	30,2	4,2
13	Jawa Tengah	861	45,9	16,0	0,7	0,6	10,2	23,6	3,0
14	DI Yogyakarta	121	53,7	23,1	3,3	1,7	8,3	9,9	0,0
15	Jawa Timur	949	23,4	11,9	1,6	2,8	18,7	31,9	9,7
16	Banten	206	58,3	21,8	0,5	1,0	4,4	12,6	1,5
17	Bali	114	72,8	9,6	0,0	0,9	9,6	5,3	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	37,6	11,4	2,0	2,7	15,4	25,5	5,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	24,5	25,5	2,0	10,3	21,9	14,6	1,3
20	Kalimantan Barat	233	13,3	18,0	0,4	6,0	24,5	33,0	4,7
21	Kalimantan Tengah	176	22,2	38,6	4,0	13,6	15,9	5,7	0,0
22	Kalimantan Selatan	217	55,3	24,4	2,3	2,3	7,4	7,8	0,5
23	Kalimantan Timur	213	24,4	26,3	4,7	6,1	7,5	24,9	6,1
24	Sulawesi Utara	167	36,5	22,2	1,2	1,8	9,6	26,9	1,8
25	Sulawesi Tengah	163	21,5	30,1	0,6	12,9	19,0	12,3	3,7
26	Sulawesi Selatan	406	45,1	20,7	2,0	5,7	16,7	8,6	1,2
27	Sulawesi Tenggara	233	19,3	25,3	0,9	6,0	9,9	33,9	4,7
28	Gorontalo	74	35,1	32,4	1,4	4,1	13,5	5,4	8,1
29	Sulawesi Barat	81	29,6	18,5	1,2	12,3	25,9	8,6	3,7
30	Maluku	161	20,5	31,7	3,1	8,1	21,1	14,3	1,2
31	Maluku Utara	101	7,9	58,4	3,0	3,0	13,9	10,9	3,0
32	Papua Barat	104	3,8	29,8	7,7	7,7	24,0	24,0	2,9
33	Papua	294	6,5	24,5	2,4	9,5	18,4	38,1	0,7
	Lokasi								
1	Perkotaan	2321	25,4	14,0	0,9	2,5	10,2	41,1	5,9
2	Perdesaan	6660	28,8	20,8	2,0	4,7	15,7	24,2	3,9
	INDONESIA	**8981**	27,9	19,1	1,7	4,1	14,3	28,6	4,4

Tabel 4.8.22.1. menunjukkan bahwa sebanyak 28,6% puskesmas di Indonesia tidak melakukan kegiatan puskesmas keliling. Sebanyak 27,9% melakukan Pusling dengan frekuensi lebih dari 1 bulan sekali, 19,1% sebanyak 1 bulan sekali, 1,7% sebanyak 2 bulan sekali, 4,1% sebanyak 3 bulan sekali, dan 14,3% dengan frekuensi yang tidak tentu.

Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi yang tidak ada kegiatan Pusling adalah DKI Jakarta (83,3%), DI Aceh (54,0%), dan Bangka Belitung (52,6%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah yang tidak ada pelayanan Pusling adalah Bali (5,3%), Gorontalo (5,4%), dan Kalimantan Tengah (5,7%).

Untuk beberapa provinsi, beberapa puskesmasnya melakukan kegiatan lebih dari 1 kali sebulan. Provinsi dengan persentase tertinggi menurut puskesmas yang melakukan kegiatan Pusling lebih dari 1 kali sebulan adalah Bali (72,8%), Banten (58,3%), dan DI Yogyakarta (53,7%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah menurut puskesmas yang melakukan kegiatan Pusling lebih dari 1 kali sebulan adalah DKI Jakarta (3,3%), Papua Barat (3,8%), dan Papua (6,5%).

4.8.22.2. Jenis Kegiatan Pelayanan Puskesmas Keliling

Jenis kegiatan atau jenis pelayanan yang ditanyakan pada Rifaskes 2011, adalah pelayanan pengobatan, KIA, KB, imunisasi, dan penyuluhan/konseling.

Pada tabel 4.8.22.2.a. dan 4.8.22.2.b. dapat dilihat bahwa secara Nasional, pelayanan pengobatan (65,2%), KIA (52,0%), KB (44,5%), imunisasi (41,1%), dan penyuluhan/konseling (58,9%), Dan hanya sebanyak 33,0% puskesmas yang melakukan lengkap kelima jenis pelayanan pelayanan tersebut (Pusling lengkap). Persentase tertinggi provinsi yang melaksanakan pelayanan Pusling lengkap adalah Sulawesi Barat (79,0%), Kalimantan Tengah (71,0%), dan Maluku Utara (68,3%). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pelayanan Pusling lebih banyak dilakukan di Puskesmas Perdesaan daripada Puskesmas Perkotaan.

Provinsi dengan persentase tertinggi yang Puslingnya melakukan pelayanan pengobatan adalah Bali (93,0%), Kalimantan Tengah (92,0%), dan Kalimantan Selatan (90,3%). Sedangkan provinsi dengan persentase tertinggi yang Puslingnya melakukan Pelayanan KIA adalah Kalimantan Tengah (92,0%), Sulawesi Barat (87,7%), dan Sulawesi Selatan (81,3%). Pelayanan KB di Pusling, secara persentase paling banyak dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah (88,1%), Sulawesi Barat (84,0%), dan Maluku Utara (77,2%).

Dapat dilihat pada tabel 4.8.22.2.b. bahwa provinsi dengan persentase tertinggi yang Puslingnya melakukan pelayanan imunisasi adalah Sulawesi Barat (84,0%), Kalimantan Tengah (80,7%), dan Maluku Utara (76,2%). Penyuluhan/konseling melalui Pusling secara persentase terbanyak dilakukan oleh Provinsi DI Yogyakarta (88,4%), Kalimantan Tengah (87,5%), dan Sulawesi Selatan (85,7%).

Tabel 4.8.22.2.a.
Persentase Puskesmas menurut Jenis Pelayanan Pusling, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelayanan Pengobatan			Pelayanan KIA			Pelayanan KB		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	38,9	1,9	59,2	36,0	4,5	59,5	28,6	11,9	59,5
2	Sumatera Utara	506	44,1	2,8	53,2	36,0	10,7	53,4	32,2	14,4	53,4
3	Sumatera Barat	248	71,8	3,6	24,6	62,1	13,3	24,6	41,1	34,3	24,6
4	Riau	195	56,4	1,0	42,6	45,1	11,8	43,1	35,9	21,0	43,1
5	Jambi	171	86,5	0,6	12,9	67,3	19,9	12,9	57,9	29,2	12,9
6	Sumatera Selatan	298	58,7	2,0	39,3	53,4	7,4	39,3	48,0	12,8	39,3
7	Bengkulu	173	59,5	4,6	35,8	49,7	14,5	35,8	46,2	17,9	35,8
8	Lampung	265	70,2	3,4	26,4	54,0	19,2	26,8	39,6	32,8	27,5
9	Bangka Belitung	57	45,6	1,8	52,6	24,6	22,8	52,6	19,3	28,1	52,6
10	Kepulauan Riau	65	52,3	1,5	46,2	46,2	7,7	46,2	43,1	10,8	46,2
11	DKI Jakarta	336	5,4	0,3	94,3	2,7	2,7	94,6	3,3	2,4	94,3
12	Jawa Barat	1031	64,9	0,8	34,3	47,2	18,4	34,3	42,5	23,1	34,4
13	Jawa Tengah	861	73,1	0,8	26,1	55,4	18,5	26,1	42,2	31,7	26,1
14	DI Yogyakarta	121	90,1	0,0	9,9	73,6	16,5	9,9	52,1	38,0	9,9
15	Jawa Timur	949	51,9	6,5	41,5	33,5	25,0	41,5	24,2	34,1	41,6
16	Banten	206	84,5	1,0	14,6	59,2	26,2	14,6	56,3	29,1	14,6
17	Bali	114	93,0	0,0	7,0	35,1	57,9	7,0	27,2	64,9	7,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	67,8	1,3	30,9	30,9	38,3	30,9	26,8	42,3	30,9
19	Nusa Tenggara Timur	302	84,1	0,7	15,2	77,8	7,0	15,2	71,2	13,6	15,2
20	Kalimantan Barat	233	61,8	0,4	37,8	58,8	3,4	37,8	54,5	7,7	37,8
21	Kalimantan Tengah	176	92,0	2,3	5,7	92,0	2,3	5,7	88,1	5,7	6,3
22	Kalimantan Selatan	217	90,3	0,5	9,2	66,4	24,4	9,2	56,2	34,6	9,2
23	Kalimantan Timur	213	67,1	2,3	30,5	62,9	6,6	30,5	51,6	17,8	30,5
24	Sulawesi Utara	167	64,1	7,2	28,7	62,3	9,0	28,7	58,7	12,6	28,7
25	Sulawesi Tengah	163	83,4	0,6	16,0	71,2	12,9	16,0	69,3	14,7	16,0
26	Sulawesi Selatan	406	90,1	0,2	9,6	81,3	9,1	9,6	73,6	16,7	9,6
27	Sulawesi Tenggara	233	60,9	0,4	38,6	42,1	19,3	38,6	39,5	21,9	38,6
28	Gorontalo	74	86,5	0,0	13,5	68,9	17,6	13,5	64,9	21,6	13,5
29	Sulawesi Barat	81	86,4	1,2	12,3	87,7	0,0	12,3	84,0	3,7	12,3
30	Maluku	161	83,9	0,6	15,5	76,4	8,1	15,5	74,5	9,9	15,5
31	Maluku Utara	101	85,1	0,0	14,9	80,2	4,0	15,8	77,2	6,9	15,8
32	Papua Barat	104	68,3	3,8	27,9	64,4	7,7	27,9	57,7	14,4	27,9
33	Papua	294	59,5	1,7	38,8	49,3	11,9	38,8	37,1	23,8	39,1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	51,1	1,9	47,0	36,5	16,4	47,1	30,7	22,1	47,1
2	Perdesaan	6660	70,1	2,0	27,9	57,4	14,7	28,0	49,3	22,7	28,0
	INDONESIA	**8981**	**65,2**	**2,0**	**32,8**	**52,0**	**15,1**	**32,9**	**44,5**	**22,5**	**33,0**

Tabel 4.8.22.2.b.
Persentase Puskesmas menurut Jenis Pelayanan Pusling, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelayanan Imunisasi			Penyuluhan/Konseling			Kegiatan Lengkap Pusling		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	34,4	6,4	59,2	37,6	2,9	59,5	25,4	15,1	59,5
2	Sumatera Utara	506	31,0	15,4	53,6	40,7	6,1	53,2	25,9	20,6	53,6
3	Sumatera Barat	248	35,9	39,5	24,6	67,3	8,1	24,6	27,8	47,6	24,6
4	Riau	195	21,5	35,4	43,1	50,3	7,2	42,6	19,0	37,9	43,1
5	Jambi	171	40,4	46,8	12,9	75,4	11,7	12,9	33,3	53,8	12,9
6	Sumatera Selatan	298	44,3	16,1	39,6	53,7	7,0	39,3	37,9	22,5	39,6
7	Bengkulu	173	51,4	12,7	35,8	46,2	17,3	36,4	38,2	25,4	36,4
8	Lampung	265	21,5	50,9	27,5	61,9	11,7	26,4	15,8	56,6	27,5
9	Bangka Belitung	57	26,3	21,1	52,6	35,1	12,3	52,6	15,8	31,6	52,6
10	Kepulauan Riau	65	30,8	23,1	46,2	47,7	6,2	46,2	20,0	33,8	46,2
11	DKI Jakarta	336	2,1	3,6	94,3	3,9	1,8	94,3	2,1	3,6	94,3
12	Jawa Barat	1031	33,7	31,7	34,6	57,3	8,2	34,4	27,5	37,8	34,6
13	Jawa Tengah	861	39,5	34,4	26,1	65,4	8,4	26,2	31,4	42,5	26,1
14	DI Yogyakarta	121	23,1	66,9	9,9	88,4	1,7	9,9	19,8	70,2	9,9
15	Jawa Timur	949	31,1	27,3	41,6	50,4	7,9	41,7	19,1	39,3	41,6
16	Banten	206	20,9	65,0	14,1	68,9	17,0	14,1	18,4	67,5	14,1
17	Bali	114	34,2	58,8	7,0	82,5	10,5	7,0	18,4	73,7	7,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	32,9	36,2	30,9	56,4	12,8	30,9	22,1	47,0	30,9
19	Nusa Tenggara Timur	302	64,9	19,9	15,2	78,5	5,6	15,9	56,3	27,8	15,9
20	Kalimantan Barat	233	45,9	16,3	37,8	56,7	5,6	37,8	42,1	20,2	37,8
21	Kalimantan Tengah	176	80,7	13,1	6,3	87,5	6,3	6,3	71,0	22,2	6,8
22	Kalimantan Selatan	217	51,6	39,2	9,2	82,5	8,3	9,2	43,3	47,5	9,2
23	Kalimantan Timur	213	52,1	17,4	30,5	61,5	8,0	30,5	40,4	29,1	30,5
24	Sulawesi Utara	167	59,9	11,4	28,7	61,1	10,2	28,7	51,5	19,8	28,7
25	Sulawesi Tengah	163	62,6	21,5	16,0	74,2	9,8	16,0	55,8	28,2	16,0
26	Sulawesi Selatan	406	70,7	19,7	9,6	85,7	4,7	9,6	63,3	27,1	9,6
27	Sulawesi Tenggara	233	39,1	22,3	38,6	51,9	9,4	38,6	31,8	29,6	38,6
28	Gorontalo	74	67,6	18,9	13,5	78,4	8,1	13,5	62,2	24,3	13,5
29	Sulawesi Barat	81	84,0	3,7	12,3	85,2	2,5	12,3	79,0	8,6	12,3
30	Maluku	161	66,5	18,0	15,5	74,5	9,3	16,1	57,1	26,7	16,1
31	Maluku Utara	101	76,2	7,9	15,8	77,2	7,9	14,9	68,3	15,8	15,8
32	Papua Barat	104	61,5	10,6	27,9	58,7	13,5	27,9	43,3	28,8	27,9
33	Papua	294	52,7	8,5	38,8	45,6	15,6	38,8	31,3	29,6	39,1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	29,5	23,5	47,0	46,1	6,8	47,1	23,1	29,8	47,1
2	Perdesaan	6660	45,2	26,7	28,1	63,3	8,7	28,0	36,5	35,4	28,2
	INDONESIA	**8981**	**41,1**	**25,9**	**33,0**	**58,9**	**8,2**	**32,9**	**33,0**	**33,9**	**33,1**

* Kegiatan Lengkap Pusling adalah apabila Pusling melakukan ke lima jenis pelayanan tsb

4.8.22.3. Petugas Pelayanan Puskesmas Keliling

Tabel 4.8.22.3.1.
Persentase Puskesmas menurut Jumlah Petugas Pelaksana Pusling, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana Puskesmas Keliling					
			% Tidak Ada	% 1-5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	0,0	13,2	18,6	5,5	3,5	59,2
2	Sumatera Utara	506	0,0	18,8	15,8	6,9	5,3	53,2
3	Sumatera Barat	248	0,4	30,2	33,9	5,6	5,2	24,6
4	Riau	195	0,0	24,6	19,0	6,2	7,7	42,6
5	Jambi	171	0,0	38,6	29,2	11,7	7,6	12,9
6	Sumatera Selatan	298	0,3	32,2	20,5	4,7	2,7	39,6
7	Bengkulu	173	0,0	39,3	17,9	6,4	0,6	35,8
8	Lampung	265	0,8	28,7	23,4	10,2	10,6	26,4
9	Bangka Belitung	57	0,0	31,6	14,0	1,8	0,0	52,6
10	Kepulauan Riau	65	0,0	10,8	26,2	12,3	4,6	46,2
11	DKI Jakarta	336	0,0	4,8	0,9	0,0	0,0	94,3
12	Jawa Barat	1031	0,0	37,5	17,0	8,9	2,2	34,3
13	Jawa Tengah	861	0,1	37,2	16,5	11,5	8,4	26,4
14	DI Yogyakarta	121	0,0	13,2	14,0	26,4	36,4	9,9
15	Jawa Timur	949	0,0	33,1	13,9	7,1	4,3	41,6
16	Banten	206	0,0	39,3	15,0	18,4	12,6	14,6
17	Bali	114	0,0	36,0	35,1	4,4	17,5	7,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	0,0	38,3	20,8	6,0	3,4	31,5
19	Nusa Tenggara Timur	302	0,0	19,2	36,4	19,2	9,6	15,6
20	Kalimantan Barat	233	0,0	15,9	21,9	17,6	6,9	37,8
21	Kalimantan Tengah	176	0,0	23,3	37,5	23,9	9,7	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	0,0	26,7	28,1	17,5	19,4	8,3
23	Kalimantan Timur	213	0,0	27,7	24,9	11,3	5,6	30,5
24	Sulawesi Utara	167	0,0	21,0	43,7	5,4	1,2	28,7
25	Sulawesi Tengah	163	0,0	30,1	45,4	6,1	2,5	16,0
26	Sulawesi Selatan	406	0,0	28,1	43,3	13,3	5,7	9,6
27	Sulawesi Tenggara	233	0,0	30,0	25,3	4,3	1,7	38,6
28	Gorontalo	74	0,0	32,4	29,7	14,9	9,5	13,5
29	Sulawesi Barat	81	0,0	17,3	50,6	11,1	8,6	12,3
30	Maluku	161	0,0	18,6	34,8	21,1	9,9	15,5
31	Maluku Utara	101	0,0	21,8	50,5	9,9	4,0	13,9
32	Papua Barat	104	0,0	27,9	38,5	4,8	1,0	27,9
33	Papua	294	0,3	30,6	20,1	6,5	3,4	39,1
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	0,1	24,3	15,9	7,2	5,4	47,1
2	Perdesaan	6660	0,1	29,8	25,3	10,6	6,3	27,9
	INDONESIA	**8981**	**0,1**	**28,4**	**22,8**	**9,7**	**6,1**	**32,9**

Pada tabel 4.8.22.3.1. dapat dilihat persentase puskesmas menurut jumlah petugas pelaksana Pusling. Secara Nasional, 28,4% Pusling di Indonesia mempunyai jumlah petugas pelaksana Pusling antara 1-5 orang dan sebanyak 22,8% antara 6-10 orang. Provinsi dengan persentase tertinggi yang petugas Puslingnya antara 1-5 orang adalah Bengkulu (39,3%), Banten (39,3%), dan Jambi (38,6%). Sedangkan provinsi dengan persentase tertinggi yang petugas Puslingnya antara 6-10 orang adalah Sulawesi Barat (50,6%), Maluku Utara (50,5%), dan Sulawesi Tengah (45,4%).

Tabel 4.8.22.3.2.a.
Persentase Puskesmas menurut Kategori Petugas Pelaksana Pusling, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Dokter di Pelayanan Pusling			Dokter Gigi di Pelayanan Pusling			Perawat di Pelayanan Pusling			Bidan di Pelayanan Pusling		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi													
1	DI Aceh	311	36,7	4,2	59,2	8,4	32,5	59,2	38,9	1,9	59,2	39,2	1,6	59,2
2	Sumatera Utara	506	41,9	4,7	53,4	15,4	31,4	53,2	42,7	4,2	53,2	41,3	5,5	53,2
3	Sumatera Barat	248	67,3	8,1	24,6	27,8	47,6	24,6	73,4	2,0	24,6	64,1	11,3	24,6
4	Riau	195	54,4	3,1	42,6	23,1	34,4	42,6	53,8	3,6	42,6	46,7	10,8	42,6
5	Jambi	171	81,9	5,3	12,9	21,1	66,1	12,9	86,5	0,6	12,9	80,7	6,4	12,9
6	Sumatera Selatan	298	40,3	20,1	39,6	5,0	55,0	39,9	55,7	4,7	39,6	47,0	13,4	39,6
7	Bengkulu	173	45,7	18,5	35,8	5,2	59,0	35,8	59,0	5,2	35,8	54,3	9,8	35,8
8	Lampung	265	63,0	10,2	26,8	10,6	62,3	27,2	70,9	2,3	26,8	64,5	8,7	26,8
9	Bangka Belitung	57	42,1	5,3	52,6	1,8	45,6	52,6	47,4	0,0	52,6	22,8	24,6	52,6
10	Kepulauan Riau	65	52,3	1,5	46,2	36,9	16,9	46,2	53,8	0,0	46,2	52,3	1,5	46,2
11	DKI Jakarta	336	3,6	2,1	94,3	0,3	5,4	94,3	5,7	0,0	94,3	2,1	3,6	94,3
12	Jawa Barat	1031	40,8	24,7	34,4	7,0	58,6	34,4	62,5	3,2	34,3	48,0	17,7	34,3
13	Jawa Tengah	861	47,9	25,8	26,4	8,5	65,0	26,5	69,5	4,2	26,4	59,2	14,4	26,4
14	DI Yogyakarta	121	67,8	22,3	9,9	42,1	47,9	9,9	87,6	2,5	9,9	85,1	5,0	9,9
15	Jawa Timur	949	38,8	19,3	41,9	12,2	45,7	42,0	53,5	4,6	41,8	39,0	19,2	41,8
16	Banten	206	52,4	32,5	15,0	11,2	74,3	14,6	81,6	3,9	14,6	68,9	16,0	15,0
17	Bali	114	88,6	3,5	7,9	30,7	61,4	7,9	91,2	1,8	7,0	80,7	12,3	7,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	34,9	34,2	30,9	8,7	59,7	31,5	66,4	2,7	30,9	32,2	36,2	31,5
19	Nusa Tenggara Timur	302	75,5	9,3	15,2	24,2	60,3	15,6	83,4	1,3	15,2	78,1	6,6	15,2
20	Kalimantan Barat	233	47,2	15,0	37,8	11,2	50,6	38,2	62,2	0,0	37,8	60,1	2,1	37,8
21	Kalimantan Tengah	176	85,2	9,1	5,7	15,3	79,0	5,7	93,2	1,1	5,7	90,9	3,4	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	82,9	8,8	8,3	24,9	66,8	8,3	91,2	0,5	8,3	74,7	17,1	8,3
23	Kalimantan Timur	213	64,8	4,2	31,0	16,9	52,6	30,5	68,5	0,9	30,5	62,4	7,0	30,5
24	Sulawesi Utara	167	64,7	6,6	28,7	3,0	67,7	29,3	70,1	1,2	28,7	65,9	5,4	28,7
25	Sulawesi Tengah	163	70,6	13,5	16,0	11,0	73,0	16,0	82,8	1,2	16,0	71,2	12,9	16,0
26	Sulawesi Selatan	406	75,6	14,8	9,6	27,6	62,8	9,6	88,2	2,2	9,6	79,3	11,1	9,6
27	Sulawesi Tenggara	233	44,2	17,2	38,6	7,3	54,1	38,6	60,9	0,4	38,6	42,1	19,3	38,6
28	Gorontalo	74	67,6	18,9	13,5	12,2	74,3	13,5	85,1	1,4	13,5	70,3	16,2	13,5
29	Sulawesi Barat	81	82,7	4,9	12,3	37,0	50,6	12,3	87,7	0,0	12,3	85,2	2,5	12,3
30	Maluku	161	70,8	13,7	15,5	20,5	64,0	15,5	82,0	2,5	15,5	75,2	9,3	15,5
31	Maluku Utara	101	68,3	17,8	13,9	7,9	78,2	13,9	84,2	2,0	13,9	84,2	2,0	13,9
32	Papua Barat	104	58,7	13,5	27,9	9,6	62,5	27,9	72,1	0,0	27,9	63,5	8,7	27,9
33	Papua	294	37,4	23,5	39,1	7,1	53,4	39,5	59,2	1,7	39,1	49,7	11,2	39,1
	Lokasi													
1	Perkotaan	2321	40,9	11,9	47,2	12,2	40,7	47,1	51,2	1,7	47,1	39,0	13,8	47,1
2	Perdesaan	6660	55,3	16,8	28,0	13,7	58,2	28,1	69,1	2,9	27,9	60,8	11,3	28,0
	INDONESIA	**8981**	**51,5**	**15,5**	**33,0**	**13,3**	**53,7**	**33,0**	**64,5**	**2,6**	**32,9**	**55,2**	**11,9**	**32,9**

Dari tabel 4.8.22.3.2.a. dapat dilihat bahwa sebesar 51,5% Puskesmas di Indonesia ada tenaga dokter di pelayanan Puslingnya, 13,3% dokter gigi, 64,5% perawat, dan 55,2% bidan. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi yang ada tenaga dokter di pelayanan Pusling adalah Bali (88,6%), Kalimantan Tengah (85,2%), dan Kalimantan Selatan (82,9%). Provinsi dengan persentase tertinggi yang ada tenaga dokter gigi di pelayanan Puslingnya adalah DI Yogyakarta (42,1%), Sulawesi Barat (37,0%), dan Kepulauan Riau (36,9%). Sedangkan provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi yang Puslingnya melibatkan tenaga bidan adalah Kalimantan Tengah (90,9%), Sulawesi Barat (85,2%), dan DI Yogyakarta (85,1%).

Tabel 4.8.22.3.2.b.
Persentase Puskesmas menurut Kategori Petugas Pelaksana Pusling, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Tenaga Kesling di Pelayanan Pusling			Tenaga Gizi di Pelayanan Pusling			Tenaga Kesmas di Pelayanan Pusling		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	25,4	15,4	59,2	24,1	16,7	59,2	11,9	28,9	59,2
2	Sumatera Utara	506	17,6	29,2	53,2	21,5	25,3	53,2	10,1	36,6	53,4
3	Sumatera Barat	248	30,6	44,8	24,6	37,5	37,9	24,6	19,4	56,0	24,6
4	Riau	195	23,6	33,8	42,6	20,5	36,9	42,6	10,8	46,7	42,6
5	Jambi	171	40,9	46,2	12,9	37,4	49,7	12,9	17,5	69,6	12,9
6	Sumatera Selatan	298	27,9	32,6	39,6	28,5	31,9	39,6	20,1	40,3	39,6
7	Bengkulu	173	13,9	50,3	35,8	16,8	47,4	35,8	11,0	53,2	35,8
8	Lampung	265	33,2	39,6	27,2	21,1	51,7	27,2	18,9	54,0	27,2
9	Bangka Belitung	57	12,3	35,1	52,6	15,8	31,6	52,6	7,0	40,4	52,6
10	Kepulauan Riau	65	26,2	27,7	46,2	26,2	27,7	46,2	9,2	44,6	46,2
11	DKI Jakarta	336	0,3	5,4	94,3	0,6	5,1	94,3	0,0	5,7	94,3
12	Jawa Barat	1031	20,6	45,0	34,4	21,0	44,6	34,3	10,6	55,1	34,3
13	Jawa Tengah	861	30,5	43,1	26,4	33,6	40,0	26,5	16,7	56,8	26,5
14	DI Yogyakarta	121	59,5	30,6	9,9	69,4	20,7	9,9	35,5	53,7	10,7
15	Jawa Timur	949	19,7	38,5	41,8	18,9	39,3	41,8	7,9	50,3	41,8
16	Banten	206	21,4	63,6	15,0	15,5	69,4	15,0	10,7	74,3	15,0
17	Bali	114	42,1	50,0	7,9	44,7	47,4	7,9	22,8	70,2	7,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	31,5	36,9	31,5	28,9	38,9	32,2	20,8	47,7	31,5
19	Nusa Tenggara Timur	302	61,9	22,8	15,2	48,0	36,8	15,2	23,2	61,6	15,2
20	Kalimantan Barat	233	39,9	22,3	37,8	40,8	21,5	37,8	14,6	47,6	37,8
21	Kalimantan Tengah	176	55,1	39,2	5,7	71,0	23,3	5,7	24,4	69,9	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	49,3	42,4	8,3	59,0	32,7	8,3	33,2	58,5	8,3
23	Kalimantan Timur	213	31,0	38,5	30,5	36,6	32,9	30,5	15,5	54,0	30,5
24	Sulawesi Utara	167	49,7	20,4	29,9	52,7	18,6	28,7	21,0	50,3	28,7
25	Sulawesi Tengah	163	39,9	44,2	16,0	44,2	39,9	16,0	26,4	57,1	16,6
26	Sulawesi Selatan	406	55,4	34,7	9,9	59,4	31,0	9,6	41,9	48,5	9,6
27	Sulawesi Tenggara	233	31,8	29,6	38,6	32,2	29,2	38,6	24,0	37,3	38,6
28	Gorontalo	74	54,1	32,4	13,5	63,5	23,0	13,5	52,7	33,8	13,5
29	Sulawesi Barat	81	63,0	24,7	12,3	66,7	21,0	12,3	45,7	42,0	12,3
30	Maluku	161	46,0	38,5	15,5	54,0	30,4	15,5	11,2	73,3	15,5
31	Maluku Utara	101	38,6	47,5	13,9	54,5	31,7	13,9	24,8	61,4	13,9
32	Papua Barat	104	32,7	39,4	27,9	42,3	29,8	27,9	18,3	53,8	27,9
33	Papua	294	18,0	42,5	39,5	25,9	35,0	39,1	8,2	52,4	39,5
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	22,8	30,0	47,2	25,9	27,0	47,2	12,8	40,1	47,1
2	Perdesaan	6660	33,2	38,8	28,0	34,3	37,7	28,0	18,0	54,0	28,0
	INDONESIA	**8981**	**30,5**	**36,5**	**33,0**	**32,1**	**34,9**	**33,0**	**16,6**	**50,4**	**33,0**

Secara Nasional, pelayanan Pusling yang melibatkan tenaga kesling sebanyak 30,5%, tenaga gizi 32,1%, dan tenaga kesmas 16,6%. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi yang melibatkan tenaga kesling adalah Sulawesi Barat (63,0%), NTT (61,9%), dan DI Yogyakarta (59,5%). Sedangkan provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi yang melibatkan tenaga gizi adalah Kalimantan Tengah (71,0%), DI Yogyakarta (69,4%), dan Sulawesi Barat (66,7%). Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi yang melibatkan tenaga kesmas adalah Gorontalo (52,7%), Sulawesi Barat (45,7%), dan Sulawesi Selatan (41,9%).

4.8.22.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Puskesmas Keliling

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Puskesmas Keliling, juga ditanyakan tentang tentang ada tidaknya kunjungan bimbingan teknis serta pertemuan monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Tabel 4.8.22.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Bimbingan Teknis Pusling dari Dinkes Kab/Kota, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Bimtek dari Dinas Kesehatan Kab/Kota		
			% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	4,5	36,3	59,2
2	Sumatera Utara	506	10,1	36,8	53,2
3	Sumatera Barat	248	10,5	64,9	24,6
4	Riau	195	7,2	50,3	42,6
5	Jambi	171	15,8	71,3	12,9
6	Sumatera Selatan	298	14,4	46,0	39,6
7	Bengkulu	173	13,3	50,9	35,8
8	Lampung	265	12,8	60,8	26,4
9	Bangka Belitung	57	8,8	38,6	52,6
10	Kepulauan Riau	65	3,1	50,8	46,2
11	DKI Jakarta	336	0,6	5,1	94,3
12	Jawa Barat	1031	17,5	48,2	34,3
13	Jawa Tengah	861	14,9	58,8	26,4
14	DI Yogyakarta	121	13,2	76,9	9,9
15	Jawa Timur	949	16,8	41,7	41,5
16	Banten	206	22,3	63,6	14,1
17	Bali	114	12,3	80,7	7,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	14,8	54,4	30,9
19	Nusa Tenggara Timur	302	13,9	70,9	15,2
20	Kalimantan Barat	233	14,2	48,1	37,8
21	Kalimantan Tengah	176	18,2	76,1	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	10,1	81,6	8,3
23	Kalimantan Timur	213	5,2	63,8	31,0
24	Sulawesi Utara	167	12,0	58,1	29,9
25	Sulawesi Tengah	163	6,7	77,3	16,0
26	Sulawesi Selatan	406	18,0	72,4	9,6
27	Sulawesi Tenggara	233	5,2	56,2	38,6
28	Gorontalo	74	25,7	60,8	13,5
29	Sulawesi Barat	81	27,2	60,5	12,3
30	Maluku	161	8,1	76,4	15,5
31	Maluku Utara	101	11,9	74,3	13,9
32	Papua Barat	104	7,7	65,4	26,9
33	Papua	294	10,9	50,3	38,8
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	11,2	41,8	47,0
2	Perdesaan	6660	13,6	58,4	27,9
	INDONESIA	**8981**	**13,0**	**54,1**	**32,8**

Pada tabel 4.8.22.4.1. dapat dilihat kunjungan dari petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan bimbingan teknis kegiatan Puskesmas Keliling ke Puskesmas selama tahun 2010. Secara Nasional, hanya sebesar 13,0% puskesmas mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada tahun 2010. Provinsi dengan persentase tertinggi puskesmas yang selama tahun 2010 mendapat bimbingan teknis pelaksanaan Pusling dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Sulawesi Barat (27,2%), Gorontalo (25,7%), dan Banten (22,3%).

Tabel 4.8.22.4.2.
Persentase Puskesmas menurut Pertemuan Monitoring Evaluasi Puslingdari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pertemuan Monitoring Evaluasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota		
			% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	2,9	37,9	59,2
2	Sumatera Utara	506	7,7	39,1	53,2
3	Sumatera Barat	248	10,9	64,5	24,6
4	Riau	195	8,7	48,7	42,6
5	Jambi	171	12,3	74,9	12,9
6	Sumatera Selatan	298	12,8	47,7	39,6
7	Bengkulu	173	7,5	56,6	35,8
8	Lampung	265	8,7	64,9	26,4
9	Bangka Belitung	57	12,3	35,1	52,6
10	Kepulauan Riau	65	4,6	49,2	46,2
11	DKI Jakarta	336	1,2	4,5	94,3
12	Jawa Barat	1031	16,6	49,0	34,4
13	Jawa Tengah	861	14,4	59,0	26,6
14	DI Yogyakarta	121	19,0	71,1	9,9
15	Jawa Timur	949	15,4	43,1	41,5
16	Banten	206	22,3	63,6	14,1
17	Bali	114	7,0	86,0	7,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	14,8	54,4	30,9
19	Nusa Tenggara Timur	302	10,6	74,2	15,2
20	Kalimantan Barat	233	11,6	50,6	37,8
21	Kalimantan Tengah	176	8,5	85,8	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	10,6	81,1	8,3
23	Kalimantan Timur	213	3,8	64,8	31,5
24	Sulawesi Utara	167	12,0	58,1	29,9
25	Sulawesi Tengah	163	4,3	79,8	16,0
26	Sulawesi Selatan	406	16,0	74,4	9,6
27	Sulawesi Tenggara	233	4,3	57,1	38,6
28	Gorontalo	74	25,7	60,8	13,5
29	Sulawesi Barat	81	25,9	61,7	12,3
30	Maluku	161	4,3	79,5	16,1
31	Maluku Utara	101	7,9	78,2	13,9
32	Papua Barat	104	10,6	61,5	27,9
33	Papua	294	12,6	48,6	38,8
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	11,0	41,9	47,1
2	Perdesaan	6660	11,9	60,1	28,0
	INDONESIA	**8981**	**11,7**	**55,4**	**32,9**

Pada tabel 4.8.22.4.2. dapat kita lihat bahwa secara Nasional, 11,7% Puskesmas pernah mengikuti pertemuan monitoring evaluasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada tahun 2010. Kegiatan monitoring atau evaluasi diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan mengundang petugas Puskesmas, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau tempat lain. Provinsi dengan persentase tertinggi menurut pertemuan monitoring evaluasi Pusling dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Sulawesi Barat (25,9%), Gorontalo (25,7%), dan Banten (22,3%).

4.8.23. PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA

4.8.23.1. Kegiatan Program Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan Program Tanggap Darurat Bencana yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga Puskesmas pada tahun 2010,yang meliputi: Pelatihan Tanggap Darurat kepada Masyarakat, Surveilans, dan Menyediakan Posko Pelayanan Kesehatan, Penyediaan Pelayanan Obat dan Pengawasan Makanan dan Minuman. Tabel 4.8.23.1.1 menunjukkan keberadaan Desa/Kelurahan Rawan Bencana, Program Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan Puskesmas serta jenis kegiatan Tanggap Darurat yang dilaksanakan Puskesmas pada tahun 2010.

Persentase Puskesmas yang mengatakan mempunyai desa/kelurahan rawan bencana secara nasional 31,4 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas yang mengatakan mempunyai desa/kelurahan rawan bencana tertinggi adalah Sulawesi Utara (68,9%), DIY (60,3%) dan Jawa Tengah (48,3%). Sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Bangka Belitung (1,8%), Papua Barat (3,8%) dan Kepulauan Riau (7,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang mengatakan mempunyai desa/kelurahan rawan bencana hanya sebanyak 31,0 persen,sementara di perdesaan 31,5 persen.

Persentase Puskesmas dengan mempuyai Program Tanggap Darurat secara nasional 28,3 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (67,8%), Jawa Timur (50,1%) dan Jawa Tengah (48,8%). Sementara persentase terendah ada di Provinsi Papua Barat (1,0%), diikuti Bangka Belitung (1,8%)dan Papua (2,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan Program Tanggap Darurat ada sebanyak 31,2 persen, sementara di perdesaan 27,2 persen.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelatihan Tanggap Darurat kepada masyarakat secara nasional hanya 10,1 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggiyang melaksanakan Pelatihan Tanggap Darurat kepada masyarakat adalah DIY (35,5%), Jawa Barat (28,2%) dan Jawa Timur (28,2%). Masih ada tiga provinsi yang tidak melaksanakan Pelatihan Tanggap Darurat kepada masyarakat, yaitu Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan Pelatihan Tanggap Daruratkepada masyarakat ada sebanyak 11,9 persen, sementara di perdesaan 9,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan surveilans Tanggap Darurat Bencana hanya sebanyak 20,8 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (53,7%), Jawa Timur (40,6%) dan Jawa Barat (36,4%). Masih

ada satu provinsi yang tidak ada kegiatan surveilans Tanggap Darurat Bencana yaitu Papua Barat.Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan surveilans Tanggap Darurat Bencana ada sebanyak 22,9 persen, sementara di perdesaan 20,1 persen.

Tabel4.8.23.1.1
Persentase Puskesmas menurut KeberadaanData Desa Rawan Bencana, Pelatihan Tanggap Darurat kepada Masyarakatdan Surveilans, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Desa/Kelurahan Rawan Bencana			Program Tanggap Darurat			Pelatihan Tanggap Darurat kpd Masy			Surveilans		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi													
1	DI Aceh	311	36,3	59,8	3,9	25,1	71,7	3,2	4,2	20,9	74,9	11,9	13,2	74,9
2	Sumatera Utara	506	16,0	78,1	5,9	12,1	82,0	5,9	3,4	8,7	87,9	5,9	6,1	87,9
3	Sumatera Barat	248	39,1	57,3	3,6	29,4	66,9	3,6	13,3	16,1	70,6	22,2	7,3	70,6
4	Riau	195	22,1	71,3	6,7	20,0	72,8	7,2	4,6	15,9	79,5	15,9	4,6	79,5
5	Jambi	171	26,9	63,7	9,4	22,8	67,8	9,4	4,1	18,7	77,2	18,1	4,7	77,2
6	Sumatera Selatan	298	12,1	74,2	13,8	15,1	70,1	14,8	5,4	9,7	84,9	11,1	4,0	84,9
7	Bengkulu	173	22,0	50,3	27,7	16,8	54,3	28,9	4,0	12,7	83,2	10,4	6,4	83,2
8	Lampung	265	20,8	69,4	9,8	19,6	69,4	10,9	3,8	15,8	80,4	15,1	4,5	80,4
9	Bangka Belitung	57	1,8	98,2	0	1,8	98,2	0	1,8	0	98,2	1,8	0	98,2
10	Kepulauan Riau	65	7,7	90,8	1,5	7,7	90,8	1,5	1,5	6,2	92,3	4,6	3,1	92,3
11	DKI Jakarta	336	29,8	58,6	11,6	31,0	59,2	9,8	13,4	17,6	69,0	19,6	11,3	69,0
12	Jawa Barat	1031	41,1	53,0	5,9	43,0	50,9	6,1	20,8	22,2	57,0	36,4	6,6	57,0
13	Jawa Tengah	861	48,3	46,6	5,1	48,8	45,3	5,9	17,9	31,0	51,1	34,7	14,3	51,0
14	DI Yogyakarta	121	60,3	24,8	14,9	67,8	16,5	15,7	35,5	32,2	32,2	53,7	14,0	32,2
15	Jawa Timur	949	46,8	42,9	10,3	50,1	38,8	11,2	20,8	29,2	50,1	40,6	9,5	49,9
16	Banten	206	35,9	63,1	1,0	41,3	57,3	1,5	12,6	28,6	58,7	35,9	5,3	58,7
17	Bali	114	25,4	70,2	4,4	21,9	70,2	7,9	7,0	14,9	78,1	12,3	9,6	78,1
18	Nusa Tenggara Barat	149	30,9	53,0	16,1	28,9	50,3	20,8	4,7	25,5	69,8	23,5	6,7	69,8
19	Nusa Tenggara Timur	302	13,6	74,2	12,3	7,6	80,5	11,9	1,7	6,0	92,4	6,0	1,7	92,4
20	Kalimantan Barat	233	20,6	75,5	3,9	15,5	80,3	4,3	5,2	9,9	85,0	8,6	6,4	85,0
21	Kalimantan Tengah	176	13,1	67,0	19,9	13,1	67,0	19,9	0,6	12,5	86,9	7,4	5,7	86,9
22	Kalimantan Selatan	217	22,6	71,4	6,0	21,2	70,0	8,8	4,1	17,1	78,8	15,7	5,1	79,3
23	Kalimantan Timur	213	23,0	64,8	12,2	18,8	70,0	11,3	5,2	13,6	81,2	8,9	9,9	81,2
24	Sulawesi Utara	167	68,9	25,1	6,0	29,3	63,5	7,2	4,8	23,4	71,9	15,0	12,6	72,5
25	Sulawesi Tengah	163	39,9	47,9	12,3	26,4	61,3	12,3	6,7	19,6	73,6	16,6	9,8	73,6
26	Sulawesi Selatan	406	32,5	64,3	3,2	28,8	67,7	3,4	8,1	20,9	70,9	20,2	8,9	70,9
27	Sulawesi Tenggara	233	14,6	76,0	9,4	6,0	85,4	8,6	1,7	4,3	94,0	4,7	1,3	94,0
28	Gorontalo	74	43,2	29,7	27,0	18,9	54,1	27,0	0	18,9	81,1	16,2	2,7	81,1
29	Sulawesi Barat	81	24,7	49,4	25,9	13,6	59,3	27,2	3,7	9,9	86,4	11,1	2,5	86,4
30	Maluku	161	14,9	82,6	2,5	4,3	93,2	2,5	0,6	3,7	95,7	1,2	3,1	95,7
31	Maluku Utara	101	14,9	38,6	46,5	7,9	45,5	46,5	0	6,9	93,1	5,9	2,0	92,1
32	Papua Barat	104	3,8	83,7	12,5	1,0	85,6	13,5	0	1,0	99,0	0	1,0	99,0
33	Papua	294	15,0	82,0	3,1	2,4	94,9	2,7	0,3	2,0	97,6	0,7	1,7	97,6
	Lokasi													
1	Perkotaan	2321	31,0	60,1	9,0	31,2	59,4	9,4	11,9	19,3	68,8	22,9	8,3	68,8
2	Perdesaan	6660	31,5	59,8	8,7	27,2	63,7	9,1	9,5	17,8	72,8	20,1	7,1	72,7
	INDONESIA	**8981**	**31,4**	**59,9**	**8,8**	**28,3**	**62,6**	**9,2**	**10,1**	**18,2**	**71,7**	**20,8**	**7,4**	**71,7**

Tabel 4.8.23.1.2
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Posko Pelayanan Kesehatan			Penyediaan Pelayanaan Obat			Pengawasan Makanan dan Minuman			Kegiatan Lengkap		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi													
1	DI Aceh	311	20,3	4,8	74,9	20,9	4,2	74,9	7,4	17,7	74,9	1,9	23,2	74,9
2	Sumatera Utara	506	9,9	2,2	87,9	10,5	1,6	87,9	5,5	6,5	87,9	1,6	10,5	87,9
3	Sumatera Barat	248	22,6	6,9	70,6	25,8	3,6	70,6	21,0	8,5	70,6	7,7	21,8	70,6
4	Riau	195	16,9	3,6	79,5	18,5	2,1	79,5	13,8	6,7	79,5	2,6	17,9	79,5
5	Jambi	171	20,5	2,3	77,2	20,5	2,3	77,2	12,9	9,9	77,2	2,3	20,5	77,2
6	Sumatera Selatan	298	11,7	3,4	84,9	12,8	2,3	84,9	10,4	4,7	84,9	4,0	11,1	84,9
7	Bengkulu	173	6,9	9,8	83,2	8,1	8,7	83,2	6,4	10,4	83,2	1,7	15,0	83,2
8	Lampung	265	13,6	6,0	80,4	14,7	4,9	80,4	12,8	6,8	80,4	2,6	17,0	80,4
9	Bangka Belitung	57	1,8	0	98,2	1,8	0	98,2	1,8	0	98,2	1,8	0	98,2
10	Kepulauan Riau	65	3,1	4,6	92,3	3,1	4,6	92,3	4,6	3,1	92,3	1,5	6,2	92,3
11	DKI Jakarta	336	28,3	2,7	69,0	28,3	2,7	69,0	18,8	12,2	69,0	8,9	22,0	69,0
12	Jawa Barat	1031	33,9	9,0	57,0	36,3	6,7	57,0	29,0	13,9	57,1	13,7	29,2	57,1
13	Jawa Tengah	861	38,4	10,6	51,0	41,2	7,8	51,0	32,6	16,4	51,0	11,5	37,4	51,1
14	DI Yogyakarta	121	57,0	10,7	32,2	57,9	9,9	32,2	43,8	24,0	32,2	21,5	46,3	32,2
15	Jawa Timur	949	39,7	10,3	49,9	43,9	6,1	49,9	33,5	16,3	50,2	14,0	35,8	50,2
16	Banten	206	35,4	5,8	58,7	36,9	4,4	58,7	24,8	16,5	58,7	10,7	30,6	58,7
17	Bali	114	7,9	14,0	78,1	9,6	12,3	78,1	7,0	14,9	78,1	4,4	17,5	78,1
18	Nusa Tenggara Barat	149	22,8	7,4	69,8	26,8	3,4	69,8	17,4	12,8	69,8	2,0	28,2	69,8
19	Nusa Tenggara Timur	302	5,6	2,0	92,4	7,0	0,7	92,4	4,6	3,0	92,4	0,7	7,0	92,4
20	Kalimantan Barat	233	12,4	2,6	85,0	13,3	1,7	85,0	10,3	4,7	85,0	3,4	11,6	85,0
21	Kalimantan Tengah	176	8,5	4,5	86,9	10,8	2,3	86,9	2,3	10,8	86,9	0	13,1	86,9
22	Kalimantan Selatan	217	17,5	3,2	79,3	18,0	2,8	79,3	13,8	6,9	79,3	2,8	18,4	78,8
23	Kalimantan Timur	213	14,1	4,7	81,2	15,5	3,3	81,2	9,9	8,9	81,2	1,4	17,4	81,2
24	Sulawesi Utara	167	21,6	6,6	71,9	22,2	6,0	71,9	13,8	14,4	71,9	2,4	25,1	72,5
25	Sulawesi Tengah	163	16,0	10,4	73,6	18,4	8,0	73,6	14,1	12,3	73,6	3,1	23,3	73,6
26	Sulawesi Selatan	406	23,6	5,4	70,9	25,1	3,9	70,9	17,0	12,1	70,9	4,7	24,4	70,9
27	Sulawesi Tenggara	233	4,3	1,7	94,0	4,7	1,3	94,0	3,0	3,0	94,0	1,3	4,7	94,0
28	Gorontalo	74	17,6	1,4	81,1	18,9	0	81,1	10,8	8,1	81,1	0	18,9	81,1
29	Sulawesi Barat	81	7,4	6,2	86,4	11,1	2,5	86,4	7,4	6,2	86,4	1,2	12,3	86,4
30	Maluku	161	3,1	1,2	95,7	3,7	0,6	95,7	2,5	1,9	95,7	0,6	3,7	95,7
31	Maluku Utara	101	5,0	3,0	92,1	5,9	1,0	93,1	3,0	5,0	92,1	0	6,9	93,1
32	Papua Barat	104	1,0	0	99,0	1,0	0	99,0	1,0	0	99,0	0	1,0	99,0
33	Papua	294	1,7	0,7	97,6	1,7	0,7	97,6	1,0	1,4	97,6	0,3	2,0	97,6
	Lokasi													
1	Perkotaan	2321	24,9	6,3	68,8	26,9	4,2	68,8	19,5	11,7	68,8	7,6	23,7	68,8
2	Perdesaan	6660	21,3	6,0	72,7	22,9	4,4	72,7	16,8	10,4	72,8	6,0	21,1	72,8
	INDONESIA	**8981**	**22,2**	**6,1**	**71,7**	**23,9**	**4,3**	**71,7**	**17,5**	**10,8**	**71,8**	**6,4**	**21,8**	**71,8**

Tabel 4.8.23.1.2 menunjukkan persentase Puskesmas dengan ketersediaan Posko Yankessecara nasional hanya22,2 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi ketersediaan Posko Yankes adalah DIY (57,0%), Jawa Timur (39,7%) dan Jawa Tengah (38,4%). Sedangkan terendah di Provinsi Papua Barat (1,0%), Papua (1,7%) dan Bangka Belitung (1,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang tersedia Posko Yankeshanya sebanyak 24,9 persen,sementara di perdesaan 21,3 persen.

Persentase Puskesmas dengan Penyediaan Pelayanan Obat Tanggap Darurat Bencana kegiatan secara nasional hanya 23,9 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (57,9%), Jawa Timur (43,9%) dan Jawa Tengah (41,2%). Sedangkan persentase terendah di Provinsi Papua Barat (1,0%), Papua (1,7%) dan Bangka Belitung (1,8%).Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan dengan Penyediaan Pelayanan Obat Tanggap Darurat Bencana ada sebanyak 26,9 persen, sementara di perdesaan 22,9 persen.

Persentase puskesmas dengan Penyediaan Pengawasan Makanan dan MinumanTanggap Darurat Bencanasecara nasional hanya 17,5 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (43,8%), Jawa Timur (33,5%) dan Jawa Tengah (32,6%). Sedangkan persentase terendah di Provinsi Papua Barat (1,0%), Papua (1,0%) dan Bangka Belitung (1,8%).Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatanPengawasan Makanan dan Minuman Tanggap Darurat Bencana ada sebanyak 19,5 persen, sementara di perdesaan 16,8 persen.

Secara nasional,persentase puskesmas dengan ketesediaan kegiatan lengkap untuk Tanggap Darurat Bencana, yaitu tersedia kelima kegiatan tersebut diatas(Pelatihan TanggapDarurat kepada Masyarakat, Surveilans, dan Menyediakan Posko Pelayanan Kesehatan, Penyediaan Pelayanan Obat dan Pengawasan Makanan dan Minuman)hanya sebanyak6,4 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (21,5%), Jawa Timur (14,0%) dan Jawa Barat (13,7%). Masih ada 4 provinsi yang tidak tersedia kegiatan lengkap Tanggap Darurat Bencana, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.Bila dilihat dari lokasi, persentase Puskesmas di perkotaan yang tersedia kegiatan lengkap untuk Tanggap Darurat Bencana ada sebanyak 7,6 persen, sementara di perdesaan 6,0 persen.

4.8.23.2. Petugas Pelaksana dan Pelatihan Program Tanggap Darurat Bencana

Tabel 4.8.23.2.1 menyajikan persentase Puskesmas mempunyai tenaga Pelaksana Program Tanggap Darurat Bencana dan yang ikut pelatihan Tanggap Darurat Bencana pada tahun 2009 atau tahun 2010.

Persentase Puskesmas yang tidak ada petugas pelaksana Tanggap Darurat Bencana secara nasional hanya 2,3 persen, sementara secara nasional ada 14,3 persen Puskesmas yang petugas pelaksana Tanggap Darurat Bencana berjumlah 1-5 orang. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki petugas pelaksana Tanggap Darurat Bencana 1-5 orang adalah Provinsi Jawa Barat (24,2 %), diikuti Provinsi Jawa Timur (23,8 %), dan Provinsi Jawa Tengah (21,8 %). Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas diperkotaan yang petugas pelaksanaTanggap Darurat Bencana 1-5 orang ada sebanyak 16,9 persen, sementara di perdesaan 13,3 persen.

Tabel 4.8.23.2.1
Persentase Puskesmas menurut Jumlah Petugas, dan keikutsertaan pada Pelatihan Tanggap Darurat Bencana,Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Jumlah Petugas Pelaksana						Petugas yang Dilatih		
			% Tidak Ada	% 1-5 org	% 6-10 org	% 11-20 org	% >20 org	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	2,6	10,6	7,4	2,6	0,6	76,2	13,5	10,6	75,9
2	Sumatera Utara	506	0,8	6,5	2,4	1,4	0,8	88,1	6,1	5,7	88,1
3	Sumatera Barat	248	1,2	16,1	3,6	1,6	6,9	70,6	19,4	9,3	71,4
4	Riau	195	2,1	11,3	2,1	2,1	2,1	80,5	10,3	10,3	79,5
5	Jambi	171	2,9	10,5	4,1	1,2	4,1	77,2	3,5	19,3	77,2
6	Sumatera Selatan	298	2,0	8,1	3,4	1,3	0,3	84,9	8,4	6,4	85,2
7	Bengkulu	173	2,3	9,8	1,7	1,7	1,2	83,2	5,8	11,0	83,2
8	Lampung	265	5,7	11,3	0,8	1,1	0,8	80,4	4,9	14,7	80,4
9	Bangka Belitung	57	0	1,8	0	,0	0	98,2	0,0	1,8	98,2
10	Kepulauan Riau	65	4,6	1,5	0	1,5	0	92,3	1,5	4,6	93,8
11	DKI Jakarta	336	2,4	18,2	6,3	1,2	2,7	69,3	16,4	13,7	69,9
12	Jawa Barat	1031	2,6	24,2	10,0	3,7	2,0	57,5	24,4	18,0	57,5
13	Jawa Tengah	861	3,9	21,8	11,8	4,3	7,0	51,1	27,4	21,5	51,1
14	DI Yogyakarta	121	5,0	16,5	10,7	16,5	19,0	32,2	41,3	26,4	32,2
15	Jawa Timur	949	2,5	23,8	10,4	7,5	5,4	50,4	29,1	19,9	51,0
16	Banten	206	3,9	15,5	8,7	4,4	8,7	58,7	19,9	21,4	58,7
17	Bali	114	3,5	11,4	3,5	,9	1,8	78,9	12,3	9,6	78,1
18	Nusa Tenggara Barat	149	4,7	16,8	7,4	1,3	0,7	69,1	10,1	20,8	69,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	0,3	4,3	1,3	1,3	0	92,7	4,6	2,6	92,7
20	Kalimantan Barat	233	2,1	6,9	3,0	2,6	0,9	84,5	6,9	8,6	84,5
21	Kalimantan Tengah	176	5,7	4,5	1,7	,6	0	87,5	6,8	5,7	87,5
22	Kalimantan Selatan	217	1,8	10,1	4,6	1,8	1,4	80,2	8,3	12,4	79,3
23	Kalimantan Timur	213	0	16,4	1,4	,0	0,9	81,2	11,3	7,5	81,2
24	Sulawesi Utara	167	3,0	15,6	6,6	,0	1,2	73,7	11,4	16,2	72,5
25	Sulawesi Tengah	163	1,8	15,3	7,4	,0	1,8	73,6	15,3	10,4	74,2
26	Sulawesi Selatan	406	1,7	17,5	5,7	1,7	2,2	71,2	13,3	15,5	71,2
27	Sulawesi Tenggara	233	0,4	4,3	0,4	,4	0	94,4	2,6	3,4	94,0
28	Gorontalo	74	0	6,8	8,1	1,4	2,7	81,1	5,4	13,5	81,1
29	Sulawesi Barat	81	1,2	11,1	1,2	,0	0	86,4	6,2	7,4	86,4
30	Maluku	161	0,6	1,9	0	,6	0,6	96,3	1,2	3,1	95,7
31	Maluku Utara	101	2,0	2,0	1,0	2,0	0	93,1	1,0	5,0	94,1
32	Papua Barat	104	0	0	0	1,0	0	99,0	0,0	1,0	99,0
33	Papua	294	0,3	1,4	0	,3	0	98,0	0,7	1,4	98,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	2,3	16,9	5,5	3,1	2,9	69,2	17,3	13,5	69,2
2	Perdesaan	6660	2,4	13,3	5,9	2,6	2,7	73,0	14,1	12,9	73,1
	INDONESIA	**8981**	**2,3**	**14,3**	**5,8**	**2,8**	**2,8**	**72,0**	14,9	**13,0**	**72,1**

Persentase Puskesmas menurut petugas yang dilatih Tanggap Darurat Bencana pada tahun 2009 atau 2010 secara nasional hanya sebanyak 14,9 persen. Persentase tertinggi di Provinsi DIY (41,3%), diikuti Jawa Timur (29,1%), dan Jawa Tengah (27,4%). Sementara ada dua provinsi yang tidak ada petugas yang dilatih Tanggap Darurat Bencana pada tahun 2009 atau tahun 2010 yaitu Provinsi Bangka Belitung dan Papua Barat. Bila dilihat dari lokasi Puskesmas, persentase Puskesmas diperkotaan yang petugas pelaksana Tanggap Darurat Bencana yang mengikuti pelatihan tahun 2009 atau tahun 2010 ada sebanyak 17,3 persen, sementara di perdesaan 14,1 persen.

4.8.23.3. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Tanggap Darurat Bencana

Tabel 4.8.23.3.1 menunjukkan secara nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota 13,0 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 13,8 persen, sementara di perdesaan 12,8 persen. Persentase Puskesmas yang mendapat kunjungan tertinggi adalah Provinsi DIY (31,4%), diikuti Provinsi Jawa Timur (25,6%) dan Jawa Barat (23,4%). Sementara persentase terendah adalah Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat masing-masing 1,0 persen diikuti Provinsi Maluku 1,2 persen.

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mendapatkan umpan balik laporan Tanggap Darurat Bencana hanya 10,4 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 11,5 persen, sementara di perdesaan 10,1 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (28,1%), Jawa Barat (20,8%) dan Jawa Tengah (19,5%). Sementara persentase terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau dan Maluku Utara masing-masing 0%, selanjutnya Provinsi Maluku 0,6%.

Secara Nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti pertemuan Monev program Tanggap Darurat Bencana sebesar 11,7 persen, dengan persentase Puskesmas di perkotaan sebanyak 13,7 persen, sementara di perdesaan 11,0 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (37,2%), Jawa Timur (23,5%) dan Jawa Tengah (23,2%). Sementara ada tiga provinsi yang tidak ada mengikuti pertemuan Monev program Tanggap Darurat Bencana pada tahun 2010 yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Maluku dan Papua Barat.

Persentase Puskesmas yang mendapatkan lengkap Monitoring dan Bimbingan Teknis Kegiatan Tanggap Darurat Bencana secara nasional adalah sebanyak 7,8 persen (persentase di perkotaan 8,8% dan di perdesaan 7,4%). Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggi adalah DIY (19,8 %), Jawa Barat (16,7%) dan Jawa Tengah (16,0%). Sementara ada 5 provinsi yang tidak mendapat Monitoring dan Bimbingan Teknis Kegiatan Tanggap Darurat Bencana lengkap yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

Tabel4.8.23.3.1
Persentase Puskesmas Menurut KeberadaanMonitoring dan Bimbingan Teknis KegiatanTanggap Darurat Bencana, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Kunjungan Petugas DKK			Umpan Balik			Pertemuan Monev			Monitoring dan Bimtek lengkap		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi													
1	DI Aceh	311	11,6	13,2	75,2	7,4	17,4	75,2	6,4	18,3	75,2	3,9	20,9	75,2
2	Sumatera Utara	506	4,2	7,9	87,9	2,6	9,5	87,9	3,6	8,5	87,9	1,8	10,3	87,9
3	Sumatera Barat	248	15,3	14,1	70,6	12,1	17,3	70,6	12,9	16,5	70,6	8,5	21,0	70,6
4	Riau	195	8,2	12,3	79,5	7,2	13,3	79,5	7,2	13,3	79,5	4,6	15,9	79,5
5	Jambi	171	6,4	16,4	77,2	6,4	16,4	77,2	2,3	20,5	77,2	1,2	21,6	77,2
6	Sumatera Selatan	298	6,0	9,1	84,9	4,7	10,4	84,9	5,7	9,4	84,9	3,4	11,7	84,9
7	Bengkulu	173	10,4	6,4	83,2	5,8	11,0	83,2	3,5	13,3	83,2	1,2	15,6	83,2
8	Lampung	265	3,4	16,2	80,4	3,4	16,2	80,4	3,8	15,8	80,4	1,5	18,1	80,4
9	Bangka Belitung	57	1,8	0	98,2	1,8	0	98,2	1,8	0	98,2	1,8	0	98,2
10	Kepulauan Riau	65	0	7,7	92,3	0	7,7	92,3	0	7,7	92,3	0	7,7	92,3
11	DKI Jakarta	336	17,0	14,0	69,0	14,9	16,1	69,0	17,3	13,7	69,0	11,9	19,0	69,0
12	Jawa Barat	1031	23,4	19,4	57,2	20,8	22,0	57,2	21,5	21,2	57,2	16,7	26,1	57,2
13	Jawa Tengah	861	23,3	25,3	51,3	19,5	29,2	51,3	23,2	25,4	51,3	16,0	32,6	51,3
14	DI Yogyakarta	121	31,4	36,4	32,2	28,1	39,7	32,2	37,2	30,6	32,2	19,8	47,9	32,2
15	Jawa Timur	949	25,6	24,3	50,1	19,2	30,7	50,2	23,5	26,3	50,2	15,2	34,8	50,1
16	Banten	206	18,4	22,3	59,2	16,5	24,3	59,2	19,4	21,4	59,2	12,1	28,6	59,2
17	Bali	114	1,8	20,2	78,1	0,9	21,1	78,1	3,5	18,4	78,1	0,9	21,1	78,1
18	Nusa Tenggara Barat	149	13,4	17,4	69,1	11,4	18,8	69,8	6,0	24,2	69,8	4,0	26,8	69,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	3,3	4,0	92,7	3,0	4,3	92,7	4,0	3,6	92,4	2,6	4,6	92,7
20	Kalimantan Barat	233	5,2	10,3	84,5	3,9	11,6	84,5	3,4	12,0	84,5	3,0	12,4	84,5
21	Kalimantan Tengah	176	2,3	10,2	87,5	1,1	11,4	87,5	0,6	11,9	87,5	0	12,5	87,5
22	Kalimantan Selatan	217	6,0	15,2	78,8	4,1	16,6	79,3	9,2	11,5	79,3	2,8	18,4	78,8
23	Kalimantan Timur	213	4,2	14,6	81,2	4,2	14,6	81,2	2,8	16,0	81,2	0,5	18,3	81,2
24	Sulawesi Utara	167	7,8	20,4	71,9	7,8	20,4	71,9	7,2	21,0	71,9	6,6	21,6	71,9
25	Sulawesi Tengah	163	9,8	16,6	73,6	6,1	19,6	74,2	9,2	17,2	73,6	4,9	21,5	73,6
26	Sulawesi Selatan	406	14,8	14,3	70,9	8,1	20,9	70,9	8,6	20,4	70,9	5,9	23,2	70,9
27	Sulawesi Tenggara	233	3,0	3,0	94,0	3,0	3,0	94,0	1,7	4,3	94,0	1,7	4,3	94,0
28	Gorontalo	74	8,1	10,8	81,1	4,1	14,9	81,1	6,8	12,2	81,1	2,7	16,2	81,1
29	Sulawesi Barat	81	7,4	6,2	86,4	6,2	7,4	86,4	7,4	6,2	86,4	4,9	8,6	86,4
30	Maluku	161	1,2	3,1	95,7	0,6	3,7	95,7	0	4,3	95,7	0	4,3	95,7
31	Maluku Utara	101	1,0	6,9	92,1	0	7,9	92,1	2,0	5,9	92,1	0	7,9	92,1
32	Papua Barat	104	1,0	0	99,0	1,0	0	99,0	0	1,0	99,0	0	1,0	99,0
33	Papua	294	1,0	1,4	97,6	0,7	1,7	97,6	1,0	1,4	97,6	0,7	1,7	97,6
	Lokasi													
1	Perkotaan	2321	13,8	17,3	68,9	11,5	19,5	69,0	13,7	17,3	69,0	8,8	22,3	68,9
2	Perdesaan	6660	12,8	14,4	72,8	10,1	17,1	72,8	11,0	16,2	72,8	7,4	19,8	72,8
	INDONESIA	**8981**	**13,0**	**15,2**	**71,8**	**10,4**	**17,7**	**71,8**	**11,7**	**16,5**	**71,8**	**7,8**	**20,4**	**71,8**

4.9. PELAYANAN RAWAT INAP

4.9.1. FASILITAS FISIK

Tabel 4.9.1.1.a dan Tabel 4.9.1.1.b menunjukkan keberadaan ruangan rawat inap pada puskesmas perawatan dengan tempat perawatan yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011.Jenis Ruangan rawat inap yang dimaksud meliputi ruangan rawat umum, ruangan rawat pasca persalinan,ruangan rawat bayi sakitdan ruangan rawat anak. Secara nasional, ruangan rawat inap yang paling banyak adalah ruangan rawat umum (92,1%), kemudian ruang rawat pasca persalinan (64,8%), ruang rawat anak (30,8%) dan ruang rawat bayi sakit (26,2%).

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang mempunyai ruangan rawat umum adalah 92,1 persendan tidak ada ruang rawat umum4,8 persen.Tertinggi memiliki ada di Provinsi Gorontalo (100%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (98,8%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (97,9%). Terendah di Provinsi DKI Jakarta (17,4%), diikuti Provinsi Bali (80%) dan Provinsi Sulawesi Utara (84,6%). Bila dilihat dari lokasi,persentase puskesmas perawatan di perkotaan yang memiliki ruang rawat umumada sebanyak 73,8 persen, sementara di perdesaan 95,5 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan mempunyai ruang rawat pasca persalinan 64,8 persen dan tidak ada ruang rawat pasca persalinan 31,9 persen.Persentase tertinggimempunyai di Provinsi Gorontalo (95,2%), diikuti Provinsi Bali (86,7%), dan Provinsi DI Yogyakarta (86%). Terendahdi Provinsi Maluku (37,9%), diikuti Provinsi Sumatera Utara (40%) dan Provinsi Jambi (48,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan di perkotaanyang memiliki ruang rawat pasca persalinan ada sebanyak 72,1 persen, sementara di perdesaan 63,5 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan memiliki ruang rawat bayi sakit 26,2 persen dan tidak ada ruang rawat bayi sakit70,3 persen.Tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (38,6%), diikuti oleh Provinsi Lampung (38,3%), dan Provinsi Riau (37,9%). Terendah di Provinsi Sulawesi Selatan (12,4%), diikuti Provinsi DKI Jakarta (15,2%) dan Provinsi Maluku (15,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan di perkotaan yang memiliki ruang rawat bayi sakit sebanyak 22,3 persen, sementara di perdesaan 27 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan memiliki ruang rawat anak 30,8 persen.Persentase tertinggi memiliki ada di Provinsi Bangka Belitung (45%),diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (42,9%), dan Provinsi Jawa Tengah (40,5%). Terendahdi Provinsi DKI Jakarta (10,9%), diikuti Provinsi Sumatera Utara (14,3%) dan Provinsi Kalimantan Timur dan DI Aceh (19,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan di perkotaan yang memiliki ruang rawat anak ada sebanyak 27,3 persen, sementara di perdesaan 31,4 persen.

Tabel 4.9.1.1.a
Persentase Puskesmas perawatan menurut Ruang Rawat Inap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Ruang Rawat Umum			Ruang Rawat Pasca Persalinan		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	126	94,4	3,2	2,4	54,0	42,1	4,0
2	Sumatera Utara	140	89,3	5,0	5,7	40,0	54,3	5,7
3	Sumatera Barat	87	89,7	10,3	0,0	72,4	27,6	0,0
4	Riau	58	94,8	3,4	1,7	63,8	34,5	1,7
5	Jambi	66	97,0	0,0	3,0	48,5	48,5	3,0
6	Sumatera Selatan	97	92,8	5,2	2,1	54,6	43,3	2,1
7	Bengkulu	40	92,5	5,0	2,5	55,0	42,5	2,5
8	Lampung	60	93,3	1,7	5,0	71,7	23,3	5,0
9	Bangka Belitung	20	95,0	5,0	0,0	65,0	35,0	0,0
10	Kepulauan Riau	24	95,8	0,0	4,2	50,0	45,8	4,2
11	DKI Jakarta	46	17,4	67,4	15,2	78,3	6,5	15,2
12	Jawa Barat	178	88,8	6,7	4,5	65,2	30,3	4,5
13	Jawa Tengah	294	95,6	2,0	2,4	65,0	32,7	2,4
14	DI Yogyakarta	43	88,4	9,3	2,3	86,0	11,6	2,3
15	Jawa Timur	475	95,2	2,3	2,5	62,3	35,2	2,5
16	Banten	50	92,0	6,0	2,0	72,0	26,0	2,0
17	Bali	30	80,0	13,3	6,7	86,7	6,7	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	98,8	0,0	1,2	68,7	30,1	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	134	91,8	3,7	4,5	76,1	19,4	4,5
20	Kalimantan Barat	92	91,3	5,4	3,3	68,5	28,3	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	92,7	1,8	5,5	61,8	32,7	5,5
22	Kalimantan Selatan	47	97,9	0,0	2,1	53,2	44,7	2,1
23	Kalimantan Timur	91	96,7	0,0	3,3	72,5	24,2	3,3
24	Sulawesi Utara	78	84,6	14,1	1,3	73,1	25,6	1,3
25	Sulawesi Tengah	75	97,3	1,3	1,3	80,0	18,7	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	94,5	3,7	1,8	75,1	22,6	2,3
27	Sulawesi Tenggara	64	96,9	0,0	3,1	76,6	20,3	3,1
28	Gorontalo	21	100,0	0,0	0,0	95,2	4,8	0,0
29	Sulawesi Barat	37	91,9	0,0	8,1	67,6	24,3	8,1
30	Maluku	58	87,9	3,4	8,6	37,9	53,4	8,6
31	Maluku Utara	29	96,6	3,4	0,0	58,6	41,4	0,0
32	Papua Barat	43	90,7	4,7	4,7	58,1	37,2	4,7
33	Papua	94	89,4	7,4	3,2	59,6	37,2	3,2
	Lokasi							
1	Perkotaan	480	73,8	19,0	7,3	72,1	20,8	7,1
2	Perdesaan	2.572	95,5	2,1	2,4	63,5	34,0	2,6
	INDONESIA	**3.052**	**92,1**	**4,8**	**3,2**	**64,8**	**31,9**	**3,3**

Tabel 4.9.1.1.b
Persentase Puskesmas perawatan menurut Ruang Rawat Inap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Ruang Rawat Bayi Sakit			Ruang Rawat Anak		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	126	25,4	70,6	4,0	19,8	76,2	4,0
2	Sumatera Utara	140	22,9	71,4	5,7	14,3	80,0	5,7
3	Sumatera Barat	87	31,0	69,0	0,0	28,7	71,3	0,0
4	Riau	58	37,9	60,3	1,7	37,9	60,3	1,7
5	Jambi	66	18,2	77,3	4,5	30,3	66,7	3,0
6	Sumatera Selatan	97	32,0	66,0	2,1	33,0	64,9	2,1
7	Bengkulu	40	32,5	65,0	2,5	32,5	65,0	2,5
8	Lampung	60	38,3	56,7	5,0	40,0	55,0	5,0
9	Bangka Belitung	20	35,0	65,0	0,0	45,0	55,0	0,0
10	Kepulauan Riau	24	37,5	58,3	4,2	25,0	70,8	4,2
11	DKI Jakarta	46	15,2	69,6	15,2	10,9	73,9	15,2
12	Jawa Barat	178	33,7	61,8	4,5	37,1	58,4	4,5
13	Jawa Tengah	294	25,5	72,1	2,4	40,5	57,1	2,4
14	DI Yogyakarta	43	27,9	69,8	2,3	34,9	62,8	2,3
15	Jawa Timur	475	29,9	67,4	2,7	42,9	54,3	2,7
16	Banten	50	28,0	70,0	2,0	32,0	66,0	2,0
17	Bali	30	23,3	70,0	6,7	20,0	73,3	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	38,6	60,2	1,2	34,9	63,9	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	134	23,9	71,6	4,5	23,9	71,6	4,5
20	Kalimantan Barat	92	30,4	66,3	3,3	26,1	69,6	4,3
21	Kalimantan Tengah	55	27,3	67,3	5,5	25,5	69,1	5,5
22	Kalimantan Selatan	47	23,4	74,5	2,1	31,9	66,0	2,1
23	Kalimantan Timur	91	18,7	78,0	3,3	19,8	76,9	3,3
24	Sulawesi Utara	78	17,9	80,8	1,3	20,5	78,2	1,3
25	Sulawesi Tengah	75	24,0	74,7	1,3	26,7	72,0	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	12,4	83,9	3,7	22,6	75,6	1,8
27	Sulawesi Tenggara	64	26,6	70,3	3,1	26,6	70,3	3,1
28	Gorontalo	21	28,6	71,4	0,0	28,6	71,4	0,0
29	Sulawesi Barat	37	21,6	70,3	8,1	21,6	70,3	8,1
30	Maluku	58	15,5	75,9	8,6	20,7	70,7	8,6
31	Maluku Utara	29	24,1	75,9	0,0	27,6	72,4	0,0
32	Papua Barat	43	30,2	65,1	4,7	32,6	62,8	4,7
33	Papua	94	23,4	73,4	3,2	31,9	64,9	3,2
	Lokasi							
1	Perkotaan	480	22,3	70,6	7,1	27,3	65,6	7,1
2	Perdesaan	2.572	27,0	70,3	2,8	31,4	66,0	2,6
	INDONESIA	**3.052**	**26,2**	**70,3**	**3,4**	**30,8**	**65,9**	**3,3**

Tabel 4.9.1.2 menunjukkan puskesmas perawatan menurut ruangan rawat inap lengkap. Ruang rawat inap lengkap adalah puskesmas perawatan yang memiliki ruang rawat umum, ruang rawat pasca persalinan, ruang rawat bayi sakit dan ruang rawat anak. Secara nasional persentase puskesmas perawatan perawatan memiliki ruang rawat inap lengkap 15,9 persen dan tidak ada ruang rawat inap lengkap 80,7 persen. Persentase tertinggi memiliki ruang rawat inap lengkap ada di Provinsi Riau (31%), diikuti oleh Provinsi Bengkulu (27,5%), dan Provinsi Bangka Belitung (25,0%). Terendah di Provinsi Sulawesi Selatan (5,5%), diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur (7,7%) dan Provinsi Kep Riau(8,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan di perkotaan yang memiliki ruangan rawat inap lengkap ada sebanyak 13,8 persen, sementara di perdesaan 16,3 persen.

Tabel 4.9.1.2
Persentase Puskesmas perawatan menurut Ruangan Rawat Inap Lengkap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Ruang Rawat Inap Lengkap		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	126	11,9	84,1	4,0
2	Sumatera Utara	140	10,7	83,6	5,7
3	Sumatera Barat	87	17,2	82,8	,0
4	Riau	58	31,0	67,2	1,7
5	Jambi	66	12,1	84,8	3,0
6	Sumatera Selatan	97	18,6	79,4	2,1
7	Bengkulu	40	27,5	70,0	2,5
8	Lampung	60	23,3	71,7	5,0
9	Bangka Belitung	20	25,0	75,0	,0
10	Kepulauan Riau	24	8,3	87,5	4,2
11	DKI Jakarta	46	10,9	73,9	15,2
12	Jawa Barat	178	19,1	76,4	4,5
13	Jawa Tengah	294	16,3	81,3	2,4
14	DI Yogyakarta	43	20,9	76,7	2,3
15	Jawa Timur	475	19,8	77,5	2,7
16	Banten	50	12,0	86,0	2,0
17	Bali	30	13,3	80,0	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	20,5	78,3	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	134	14,2	81,3	4,5
20	Kalimantan Barat	92	20,7	76,1	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	18,2	76,4	5,5
22	Kalimantan Selatan	47	12,8	85,1	2,1
23	Kalimantan Timur	91	7,7	89,0	3,3
24	Sulawesi Utara	78	11,5	87,2	1,3
25	Sulawesi Tengah	75	18,7	80,0	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	5,5	90,8	3,7
27	Sulawesi Tenggara	64	15,6	81,3	3,1
28	Gorontalo	21	14,3	85,7	,0
29	Sulawesi Barat	37	10,8	81,1	8,1
30	Maluku	58	8,6	82,8	8,6
31	Maluku Utara	29	10,3	89,7	,0
32	Papua Barat	43	23,3	72,1	4,7
33	Papua	94	17,0	79,8	3,2
	Lokasi				
1	Perkotaan	480	13,8	79,2	7,1
2	Perdesaan	2.572	16,3	81,0	2,7
	INDONESIA	**3.052**	**15,9**	**80,7**	**3,4**

Tabel 4.9.1.3 menunjukkan persentase puskesmas perawatan menurut ruangan petugas jaga pada puskesmas dengan tempat perawatan. Yang dimaksud denan ruang petugas jaga adalah tempat khusus yang digunakan tenaga kesehatan Puskesmas perawatan yang sedang bertugas jaga. Secara nasional persentase puskesmas perawatan memiliki ruangan petugas jaga 80,3 persen dan tidak ada ruanganpetugas jaga16,4 persen.Tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (97,7%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (93,5%), dan Provinsi Sumatera Barat (92%). Terendah di Provinsi Maluku (44,8%), diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara (52,1%) dan Provinsi Papua Barat (58,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan di perkotaan ada sebanyak 77,9 persen, sementara di perdesaan 80,8 persen.

Tabel 4.9.1.3
Persentase Puskesmas perawatanmenurut Ruangan Petugas Jaga, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Ruang Petugas Jaga		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	126	85,7	10,3	4,0
2	Sumatera Utara	140	52,1	42,9	5,0
3	Sumatera Barat	87	92,0	8,0	0,0
4	Riau	58	79,3	19,0	1,7
5	Jambi	66	84,8	12,1	3,0
6	Sumatera Selatan	97	72,2	25,8	2,1
7	Bengkulu	40	62,5	35,0	2,5
8	Lampung	60	86,7	8,3	5,0
9	Bangka Belitung	20	80,0	20,0	0,0
10	Kepulauan Riau	24	87,5	8,3	4,2
11	DKI Jakarta	46	65,2	19,6	15,2
12	Jawa Barat	178	88,8	6,7	4,5
13	Jawa Tengah	294	93,5	4,1	2,4
14	DI Yogyakarta	43	97,7	0,0	2,3
15	Jawa Timur	475	87,4	9,9	2,7
16	Banten	50	84,0	14,0	2,0
17	Bali	30	80,0	13,3	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	83,1	15,7	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	134	74,6	20,9	4,5
20	Kalimantan Barat	92	84,8	12,0	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	80,0	14,5	5,5
22	Kalimantan Selatan	47	78,7	19,1	2,1
23	Kalimantan Timur	91	70,3	26,4	3,3
24	Sulawesi Utara	78	76,9	21,8	1,3
25	Sulawesi Tengah	75	90,7	8,0	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	79,3	18,9	1,8
27	Sulawesi Tenggara	64	71,9	23,4	4,7
28	Gorontalo	21	76,2	23,8	0,0
29	Sulawesi Barat	37	73,0	18,9	8,1
30	Maluku	58	44,8	46,6	8,6
31	Maluku Utara	29	72,4	27,6	0,0
32	Papua Barat	43	58,1	37,2	4,7
33	Papua	94	70,2	26,6	3,2
	Lokasi				
1	Perkotaan	480	77,9	15,0	7,1
2	Perdesaan	2.572	80,8	16,6	2,6
	INDONESIA	**3.052**	**80,3**	**16,4**	**3,3**

4.9.2. PELAYANAN RAWAT INAP

Tabel 4.9.2.1.a dan Tabel 4.9.2.1.b menunjukkan jenis pelayanan rawat inap pada puskesmas perawatan yang dikumpulkan Rifaskes 2011,yang meliputi pelayanan asuhan keperawatan di ruang rawat inap, kegiatan home care, tata laksana kasus balita gizi buruk dan tata laksana kasus neonatal dengan komplikasi.Jenis pelayanan rawat inap terbanyak adalah pelayanan asuhan keperawatan di ruang rawat inap (81,7%), diikuti pelayanan tata laksana kasus balita gizi buruk (50,7%), pelayanan tata laksana kasus neonataldengan komplikasi (37,3%) dan kegiatan home care (33,8%).

Tabel 4.9.2.1.a
Persentase Puskesmas perawatanmenurut Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Pelayanan Asuhan Keperawatan			Kegiatan Home Care			Tata Laksana Kasus Balita Gizi Buruk		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	126	82,5	13,5	4,0	19,8	76,2	4,0	37,3	58,7	4,0
2	Sumatera Utara	140	75,0	20,0	5,0	27,1	67,9	5,0	45,7	49,3	5,0
3	Sumatera Barat	87	81,6	17,2	1,1	35,6	63,2	1,1	55,2	43,7	1,1
4	Riau	58	84,5	13,8	1,7	34,5	63,8	1,7	60,3	37,9	1,7
5	Jambi	66	78,8	18,2	3,0	25,8	71,2	3,0	37,9	59,1	3,0
6	Sumatera Selatan	97	81,4	14,4	4,1	33,0	62,9	4,1	58,8	37,1	4,1
7	Bengkulu	40	75,0	22,5	2,5	35,0	62,5	2,5	40,0	57,5	2,5
8	Lampung	60	90,0	5,0	5,0	26,7	66,7	6,7	50,0	43,3	6,7
9	Bangka Belitung	20	70,0	30,0	0,0	35,0	65,0	0,0	30,0	70,0	0,0
10	Kepulauan Riau	24	70,8	25,0	4,2	25,0	70,8	4,2	45,8	50,0	4,2
11	DKI Jakarta	46	67,4	17,4	15,2	30,4	54,3	15,2	37,0	45,7	17,4
12	Jawa Barat	178	89,3	6,2	4,5	46,1	49,4	4,5	60,1	35,4	4,5
13	Jawa Tengah	294	88,4	9,2	2,4	27,9	69,7	2,4	52,7	44,9	2,4
14	DI Yogyakarta	43	88,4	9,3	2,3	55,8	41,9	2,3	46,5	51,2	2,3
15	Jawa Timur	475	89,1	8,0	2,9	30,3	66,7	2,9	54,9	42,1	2,9
16	Banten	50	90,0	8,0	2,0	28,0	70,0	2,0	78,0	20,0	2,0
17	Bali	30	76,7	16,7	6,7	6,7	86,7	6,7	26,7	66,7	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	79,5	20,5	0,0	37,3	62,7	0,0	78,3	21,7	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	134	87,3	8,2	4,5	38,8	56,7	4,5	52,2	43,3	4,5
20	Kalimantan Barat	92	83,7	13,0	3,3	41,3	55,4	3,3	51,1	45,7	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	69,1	23,6	7,3	29,1	63,6	7,3	38,2	54,5	7,3
22	Kalimantan Selatan	47	89,4	8,5	2,1	38,3	59,6	2,1	55,3	42,6	2,1
23	Kalimantan Timur	91	75,8	20,9	3,3	36,3	60,4	3,3	41,8	54,9	3,3
24	Sulawesi Utara	78	66,7	25,6	7,7	32,1	60,3	7,7	39,7	52,6	7,7
25	Sulawesi Tengah	75	72,0	26,7	1,3	30,7	68,0	1,3	45,3	53,3	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	87,1	11,1	1,8	48,8	49,3	1,8	51,6	46,1	2,3
27	Sulawesi Tenggara	64	87,5	9,4	3,1	43,8	53,1	3,1	59,4	37,5	3,1
28	Gorontalo	21	81,0	19,0	0,0	14,3	85,7	0,0	52,4	47,6	0,0
29	Sulawesi Barat	37	89,2	2,7	8,1	37,8	54,1	8,1	51,4	40,5	8,1
30	Maluku	58	65,5	25,9	8,6	36,2	55,2	8,6	46,6	43,1	10,3
31	Maluku Utara	29	69,0	31,0	0,0	31,0	69,0	0,0	41,4	58,6	0,0
32	Papua Barat	43	44,2	48,8	7,0	34,9	58,1	7,0	30,2	62,8	7,0
33	Papua	94	56,4	40,4	3,2	34,0	62,8	3,2	38,3	58,5	3,2
	Lokasi										
1	Perkotaan	480	76,3	15,2	8,5	36,5	55,0	8,5	48,5	42,7	8,8
2	Perdesaan	2.572	82,7	14,6	2,6	33,3	64,0	2,7	51,0	46,2	2,8
	INDONESIA	**3.052**	**81,7**	**14,7**	**3,6**	**33,8**	**62,6**	**3,6**	**50,7**	**45,6**	**3,7**

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang melakukan pelayanan asuhan keperawatan di ruang rawat inap adalah 81,7 persen dan tidakmelakukan pelayanan 14,7 persen. Persentase tertinggi melaksankan di Provinsi Lampung (90%), diikuti Provinsi Kalimantan Selatan (89,4%), dan Provinsi Jawa Timur (89,1%). Sementara persentase terendah melaksanakan diProvinsi Papua Barat (44,2%), diikuti Provinsi Papua (56,4%) dan Provinsi Maluku (65,5%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas perawatan yang melakukan pelayanan asuhan keperawatan di perkotaan ada sebanyak 76,3 persen sementara di perdesaan 82,7 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang melakukan pelayanan home care adalah 33,8 persen dan tidak melakukan pelayanan 62,6 persen. Tertinggi yang melakukan pelayanan home care terdapat di Provinsi DIYogyakarta (55,8%), diikuti Provinsi Sulawesi Selatan (48,8%) dan Provinsi Jawa Barat (46,1%). Terendah di provinsi Bali (6,7%), diikuti provinsi Gorontalo (14,3%) dan provinsi DI Aceh (19,8%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas perawatan yang melakukan pelayanan home care di perkotaan ada sebanyak 36,5 persen, sementara di perdesaan 33,3 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang melakukan pelayanan tata laksana kasus balita gizi buruk adalah 50,7 persendan tidak melakukan pelayanan 45,6 persen. Tertinggi yang melakukan pelayanan tata laksana kasus balita gizi buruk tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (78,3%), diikuti Provinsi Banten (78%) dan Provinsi Riau (60,3%). Terendah di provinsi Bangka Belitung (30%), diikuti provinsi Papua Barat (30,2%) dan provinsi Bali (26,7%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas perawatan yang melakukan pelayanan tata laksana kasus balita gizi buruk di perkotaan ada sebanyak 48,5 persen, sementara di perdesaan 51 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang melakukan pelayanan tata laksana kasus neonataladalah 37,3 persen dan tidak melakukan pelayanan 45,6 persen. Tertinggi di Provinsi Gorontalo (57,1%), diikuti provinsi Nusa Tenggara Barat (56,6%) dan provinsi Nusa Tenggara Timur (55,2%). Terendah di provinsi Maluku (22,4%), diikuti provinsi Jambi (22,7%) dan provinsi Bali (23,3%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas perawatan yang melakukan pelayanan tata laksana kasus neonatal di perkotaan ada sebanyak 36,7 persen, sementara di perdesaan 37,4 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang melakukan kegiatan lengkap rawat inap(keempat jenis pelayanan rawat inap di atas) adalah sebesar 14,1 persen dan tidak melakukan pelayanan 82,2 persen. Tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (26,5%), diikuti provinsi Kalimantan Selatan (23,4%) dan provinsi Jawa Barat (22,5%). Terendah di provinsi Bali (3,3%), diikuti provinsi Jambi (4,5%) dan provinsi Gorontalo (4,8%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas perawatan yang melakukan kegiatan lengkap rawat inap di perkotaan ada sebanyak 13,9 persen, sementara di perdesaan 15,2 persen.

Tabel 4.9.2.1.b
Persentase Puskesmas perawatanMenurut Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Tata Laksana Kasus Neonatal			Kegiatan Lengkap Rawat Inap		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	126	29,4	66,7	4,0	7,9	88,1	4,0
2	Sumatera Utara	140	26,4	68,6	5,0	10,7	84,3	5,0
3	Sumatera Barat	87	46,0	52,9	1,1	18,4	80,5	1,1
4	Riau	58	51,7	46,6	1,7	20,7	77,6	1,7
5	Jambi	66	22,7	74,2	3,0	4,5	92,4	3,0
6	Sumatera Selatan	97	32,0	63,9	4,1	15,5	80,4	4,1
7	Bengkulu	40	32,5	65,0	2,5	7,5	90,0	2,5
8	Lampung	60	46,7	45,0	8,3	5,0	86,7	8,3
9	Bangka Belitung	20	40,0	60,0	0,0	5,0	95,0	0,0
10	Kepulauan Riau	24	33,3	62,5	4,2	8,3	87,5	4,2
11	DKI Jakarta	46	26,1	58,7	15,2	17,4	67,4	15,2
12	Jawa Barat	178	38,8	56,2	5,1	22,5	73,0	4,5
13	Jawa Tengah	294	32,0	65,6	2,4	11,2	86,4	2,4
14	DI Yogyakarta	43	39,5	58,1	2,3	20,9	76,7	2,3
15	Jawa Timur	475	34,3	62,5	3,2	12,0	85,1	2,9
16	Banten	50	48,0	50,0	2,0	14,0	84,0	2,0
17	Bali	30	23,3	70,0	6,7	3,3	90,0	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	56,6	41,0	2,4	26,5	73,5	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	134	55,2	40,3	4,5	22,4	73,1	4,5
20	Kalimantan Barat	92	42,4	54,3	3,3	15,2	81,5	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	41,8	49,1	9,1	9,1	81,8	9,1
22	Kalimantan Selatan	47	40,4	57,4	2,1	23,4	74,5	2,1
23	Kalimantan Timur	91	28,6	68,1	3,3	8,8	87,9	3,3
24	Sulawesi Utara	78	39,7	52,6	7,7	14,1	78,2	7,7
25	Sulawesi Tengah	75	42,7	56,0	1,3	8,0	90,7	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	40,6	57,6	1,8	18,9	78,8	2,3
27	Sulawesi Tenggara	64	42,2	54,7	3,1	20,3	76,6	3,1
28	Gorontalo	21	57,1	42,9	0,0	4,8	95,2	0,0
29	Sulawesi Barat	37	48,6	43,2	8,1	18,9	73,0	8,1
30	Maluku	58	22,4	67,2	10,3	8,6	82,8	8,6
31	Maluku Utara	29	41,4	58,6	0,0	10,3	89,7	0,0
32	Papua Barat	43	25,6	67,4	7,0	11,6	81,4	7,0
33	Papua	94	35,1	61,7	3,2	14,9	81,9	3,2
	Lokasi							
1	Perkotaan	480	36,7	54,4	9,0	15,2	76,0	8,8
2	Perdesaan	2.572	37,4	59,7	2,9	13,9	83,3	2,8
	INDONESIA	**3.052**	**37,3**	**58,9**	**3,8**	**14,1**	**82,2**	**3,7**

Tabel 4.9.2.2
Persentase Puskesmas Perawatanmenurut Jumlah Petugas Pelaksana Pelayanan Rawat Inap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Jumlah Petugas Pelaksana					
			Tidak Ada	1-5 org	6-10 org	11-20 org	>20 org	TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	126	1,6	6,3	11,1	23,8	53,2	4,0
2	Sumatera Utara	140	2,9	12,9	11,4	25,7	42,1	5,0
3	Sumatera Barat	87	2,3	6,9	8,0	39,1	41,4	2,3
4	Riau	58	3,4	5,2	19,0	51,7	19,0	1,7
5	Jambi	66	0,0	6,1	24,2	50,0	16,7	3,0
6	Sumatera Selatan	97	0,0	7,2	17,5	49,5	21,6	4,1
7	Bengkulu	40	5,0	15,0	20,0	32,5	20,0	7,5
8	Lampung	60	1,7	6,7	18,3	36,7	31,7	5,0
9	Bangka Belitung	20	0,0	10,0	5,0	70,0	10,0	5,0
10	Kepulauan Riau	24	8,3	8,3	8,3	33,3	37,5	4,2
11	DKI Jakarta	46	4,3	19,6	37,0	21,7	0,0	17,4
12	Jawa Barat	178	1,1	3,4	13,5	42,7	33,7	5,6
13	Jawa Tengah	294	0,7	1,0	8,5	45,9	40,5	3,4
14	DI Yogyakarta	43	0,0	0,0	2,3	25,6	69,8	2,3
15	Jawa Timur	475	0,0	1,7	17,1	45,9	31,6	3,8
16	Banten	50	0,0	8,0	6,0	22,0	62,0	2,0
17	Bali	30	3,3	3,3	10,0	46,7	30,0	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	0,0	6,0	10,8	42,2	37,3	3,6
19	Nusa Tenggara Timur	134	1,5	7,5	19,4	50,7	14,9	6,0
20	Kalimantan Barat	92	3,3	8,7	29,3	37,0	18,5	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	1,8	1,8	23,6	58,2	7,3	7,3
22	Kalimantan Selatan	47	0,0	2,1	25,5	29,8	38,3	4,3
23	Kalimantan Timur	91	0,0	7,7	17,6	56,0	15,4	3,3
24	Sulawesi Utara	78	3,8	9,0	10,3	38,5	29,5	9,0
25	Sulawesi Tengah	75	1,3	4,0	12,0	64,0	17,3	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	0,0	5,1	20,3	43,3	29,5	1,8
27	Sulawesi Tenggara	64	1,6	7,8	25,0	32,8	29,7	3,1
28	Gorontalo	21	0,0	0,0	14,3	47,6	38,1	0,0
29	Sulawesi Barat	37	0,0	8,1	13,5	37,8	32,4	8,1
30	Maluku	58	8,6	13,8	19,0	34,5	15,5	8,6
31	Maluku Utara	29	3,4	0,0	17,2	65,5	13,8	0,0
32	Papua Barat	43	11,6	18,6	25,6	25,6	14,0	4,7
33	Papua	94	9,6	22,3	27,7	26,6	9,6	4,3
	Lokasi							
1	Perkotaan	480	2,5	6,0	17,1	36,7	28,1	9,6
2	Perdesaan	2.572	1,6	6,2	16,2	42,5	30,2	3,3
	INDONESIA	**3.052**	**1,7**	**6,2**	**16,3**	**41,6**	**29,9**	**4,3**

Tabel 4.9.2.2 menunjukkan persentase puskesmas perawatan menurut jumlah petugas pelaksana rawat inap. Secara nasional persentase puskesmas perawatan menurut petugas pelaksana sebagai berikut: yang tidak ada petugas pelaksana 1,7%, 1-5 orang 6,2%, 6-10 orang 16,3%, 11-20 orang 41,6%, dan >20 orang 29,9%.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang tidak ada petugas pelaksana adalah sebesar 1,7 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggiyang tidak ada petugas pelaksananya adalah Provinsi Papua Barat 11,6%, diikuti Provinsi Papua 3,6% dan Provinsi Maluku 8,6%.. Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang tidak memiliki petugas pelaksana di perkotaan ada sebanyak 2,5 persen, sementara di perdesaan 1,6 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan menurut jumlah petugas pelaksana 1-5 orang adalah sebesar 6,2 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi mempunyai petugas pelaksana 1-5 orang adalah provinsi Papua (22,3%), diikuti provinsi DKI Jakarta (19,6%) dan provinsi Papua Barat (18,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan dengan jumlah petugas pelaksana 1-5 orang di di perdesaan ada sebanyak 6,2 persen, sementara di perdesaan 6 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan menurut jumlah petugas pelaksana6-10 orang adalah 16,3 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta (37%), diikuti provinsi Kalimantan Barat (29,3%) dan provinsi Papua (27,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan menurut jumlah petugas pelaksana 6-10 orang di perkotaan ada sebanyak 17,1 persen, sementara di perdesaan 16,2 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas menurut jumlah petugas pelaksana 11-20 orang adalah 41,6 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi mempunyaipetugas pelaksana 11-20 orangadalah provinsi Bangka Belitung (70%), diikuti provinsi Maluku Utara (65,5%) dan provinsi Sulawesi Tengah (64%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan menurut jumlah petugas pelaksana 11-20 orang di perkotaan ada sebanyak 36,7 persen, sementara di perdesaan 42,5 persen.

Secara nasional persentase puskesmas perawatan dengan jumlah petugas pelaksana >20 orang adalah 29,9%. Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi adalah provinsi DIY (69,8%), diikuti provinsi Banten (62%) dan provinsi DI Aceh (53,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang jumlah petugas pelaksana >20 orang di perkotaan ada sebanyak 36,7 persen, sementara di perdesaan 42,5 persen.

Tabel 4.9.2.3.a dan tabel 4.9.2.3.b menunjukkan jenis tenaga yang terlibat dalam pelayanan rawat inap di puskesmas perawatan yang dikumpulkan pada Risfaskes 2011 meliputi tenaga dokter, perawat, bidan dan tenaga gizi. Secara nasional jenis tenaga yang terlibat dalam pelayanan rawat inap terbanyak adalah tenaga perawat (90,8%), diikuti tenaga dokter (86%), tenaga bidan (71,6%) dan tenaga gizi (40,5).

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan dengan keterlibatan tenaga dokter adalah 86 persen dan tidak ada keterlibatan tenaga dokter 9,4 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas perawatantertinggi adalahProvinsi Gorontalo (100%), diikuti provinsi DIY (97,7%) dan provinsi Kalimantan Timur (96,7%). Sedang terendah adalah provinsi DKI Jakarta (43,5%), diikuti provinsi Papua (70,2%) dan provinsi Maluku (70,7%%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan menurut keterlibatan tenaga dokter di perkotaan ada sebanyak 73,5 persen, sementara di perdesaan 88,3 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan dengan keterlibatan tenaga perawat adalah90,8 persen dan tidak ada keterlibatan tenaga perawat 4,8 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi adalahprovinsi Jambi (97%), diikuti provinsi Maluku Utara (96,6%) dan provinsi Sulawesi Tengah (96%). Sedang terendah adalah provinsi DKI Jakarta (23,9%), diikuti provinsi Papua Barat (76,7%) dan provinsi Maluku (81%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan menurut keterlibatan tenaga perawat di perkotaan ada sebanyak 75,2 persen, sementara di perdesaan 93,7 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang ada keterlibatan tenaga bidan adalah71,6 persen dan tidak ada keterlibatan tenaga bidan 23,9 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah provinsi Gorontalo (95,2%), diikuti provinsi DIY (93%) dan provinsi Sumatera Barat (92%). Sedang terendah adalah provinsi Bangka Belitung (35%), diikuti provinsi Jawa Barat (47,2%) dan provinsi Jawa Timur (55,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan menurut keterlibatan tenaga bidan di perkotaan ada sebanyak 72,3 persen, sementara di perdesaan 71,4 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan dengan keterlibatan tenaga gizi sebesar 40,5% dan tidak ada keterlibatan tenaga gizi sebesar 54,7%. Provinsi dengan persentase tertinggi keterlibatan tenaga gizi adalahdi provinsi DIY (83,7%), diikuti provinsi Gorontalo (76,2%) dan provinsi Kalimantan Tengah (65,5%). Sedang terendah adalah provinsi DKI Jakarta (6,5%), diikuti provinsi Bengkulu (15%) dan provinsi Jambi (22,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang ada keterlibatan tenaga dokterdi perkotaan ada sebanyak 31,7 persen dan di perdesaan 42,1 persen.

Tabel 4.9.2.3.a
Persentase Puskesmas perawatanmenurut Jenis Tenaga yang Terlibat dalam Rawat Inap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Tenaga Dokter			Tenaga Perawat		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	126	90,5	5,6	4,0	89,7	5,6	4,8
2	Sumatera Utara	140	85,0	7,9	7,1	86,4	7,9	5,7
3	Sumatera Barat	87	88,5	8,0	3,4	93,1	3,4	3,4
4	Riau	58	91,4	6,9	1,7	93,1	5,2	1,7
5	Jambi	66	92,4	4,5	3,0	97,0	0,0	3,0
6	Sumatera Selatan	97	81,4	14,4	4,1	94,8	1,0	4,1
7	Bengkulu	40	87,5	5,0	7,5	87,5	5,0	7,5
8	Lampung	60	90,0	3,3	6,7	90,0	3,3	6,7
9	Bangka Belitung	20	80,0	15,0	5,0	95,0	0,0	5,0
10	Kepulauan Riau	24	87,5	8,3	4,2	87,5	8,3	4,2
11	DKI Jakarta	46	43,5	37,0	19,6	23,9	56,5	19,6
12	Jawa Barat	178	83,1	10,1	6,7	88,8	5,1	6,2
13	Jawa Tengah	294	89,8	6,5	3,7	94,6	1,7	3,7
14	DI Yogyakarta	43	97,7	0,0	2,3	90,7	7,0	2,3
15	Jawa Timur	475	88,6	7,8	3,6	94,9	1,7	3,4
16	Banten	50	86,0	12,0	2,0	92,0	6,0	2,0
17	Bali	30	80,0	10,0	10,0	83,3	10,0	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	92,8	4,8	2,4	95,2	1,2	3,6
19	Nusa Tenggara Timur	134	84,3	9,0	6,7	91,0	2,2	6,7
20	Kalimantan Barat	92	85,9	10,9	3,3	90,2	6,5	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	85,5	7,3	7,3	87,3	5,5	7,3
22	Kalimantan Selatan	47	91,5	4,3	4,3	93,6	2,1	4,3
23	Kalimantan Timur	91	96,7	0,0	3,3	95,6	1,1	3,3
24	Sulawesi Utara	78	79,5	11,5	9,0	85,9	5,1	9,0
25	Sulawesi Tengah	75	89,3	8,0	2,7	96,0	2,7	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	83,4	14,7	1,8	95,4	2,3	2,3
27	Sulawesi Tenggara	64	93,8	3,1	3,1	90,6	6,3	3,1
28	Gorontalo	21	100,0	0,0	0,0	95,2	4,8	0,0
29	Sulawesi Barat	37	81,1	10,8	8,1	89,2	2,7	8,1
30	Maluku	58	70,7	20,7	8,6	81,0	10,3	8,6
31	Maluku Utara	29	96,6	3,4	0,0	96,6	3,4	0,0
32	Papua Barat	43	72,1	23,3	4,7	76,7	18,6	4,7
33	Papua	94	70,2	25,5	4,3	85,1	11,7	3,2
	Lokasi							
1	Perkotaan	480	73,5	15,4	11,0	75,2	14,8	10,0
2	Perdesaan	2.572	88,3	8,3	3,4	93,7	2,9	3,4
	INDONESIA	**3.052**	**86,0**	**9,4**	**4,6**	**90,8**	**4,8**	**4,5**

Tabel 4.9.2.3.b
Persentase Puskesmas perawatanmenurut Jenis Tenaga yang Terlibat dalam Rawat Inap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Tenaga Bidan			Tenaga Gizi		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	126	73,8	21,4	4,8	30,2	65,1	4,8
2	Sumatera Utara	140	80,7	13,6	5,7	43,6	50,7	5,7
3	Sumatera Barat	87	92,0	4,6	3,4	39,1	57,5	3,4
4	Riau	58	82,8	15,5	1,7	37,9	60,3	1,7
5	Jambi	66	83,3	13,6	3,0	22,7	74,2	3,0
6	Sumatera Selatan	97	75,3	20,6	4,1	24,7	71,1	4,1
7	Bengkulu	40	62,5	30,0	7,5	15,0	77,5	7,5
8	Lampung	60	76,7	16,7	6,7	30,0	63,3	6,7
9	Bangka Belitung	20	35,0	60,0	5,0	25,0	70,0	5,0
10	Kepulauan Riau	24	75,0	20,8	4,2	45,8	50,0	4,2
11	DKI Jakarta	46	71,7	8,7	19,6	6,5	73,9	19,6
12	Jawa Barat	178	47,2	46,6	6,2	43,8	50,0	6,2
13	Jawa Tengah	294	69,7	26,5	3,7	59,9	35,4	4,8
14	DI Yogyakarta	43	93,0	4,7	2,3	83,7	14,0	2,3
15	Jawa Timur	475	55,2	41,1	3,8	39,6	56,2	4,2
16	Banten	50	82,0	16,0	2,0	42,0	56,0	2,0
17	Bali	30	86,7	6,7	6,7	23,3	70,0	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	59,0	37,3	3,6	44,6	50,6	4,8
19	Nusa Tenggara Timur	134	78,4	14,9	6,7	35,1	57,5	7,5
20	Kalimantan Barat	92	81,5	15,2	3,3	54,3	42,4	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	89,1	3,6	7,3	65,5	27,3	7,3
22	Kalimantan Selatan	47	80,9	14,9	4,3	61,7	34,0	4,3
23	Kalimantan Timur	91	89,0	7,7	3,3	38,5	58,2	3,3
24	Sulawesi Utara	78	78,2	12,8	9,0	34,6	56,4	9,0
25	Sulawesi Tengah	75	84,0	13,3	2,7	25,3	72,0	2,7
26	Sulawesi Selatan	217	73,3	24,4	2,3	33,2	64,5	2,3
27	Sulawesi Tenggara	64	76,6	20,3	3,1	40,6	56,3	3,1
28	Gorontalo	21	95,2	4,8	0,0	76,2	23,8	0,0
29	Sulawesi Barat	37	73,0	18,9	8,1	37,8	54,1	8,1
30	Maluku	58	74,1	17,2	8,6	39,7	50,0	10,3
31	Maluku Utara	29	89,7	10,3	0,0	75,9	20,7	3,4
32	Papua Barat	43	62,8	32,6	4,7	37,2	58,1	4,7
33	Papua	94	67,0	29,8	3,2	24,5	72,3	3,2
	Lokasi							
1	Perkotaan	480	72,3	17,5	10,2	31,7	58,1	10,2
2	Perdesaan	2.572	71,4	25,1	3,5	42,1	54,0	3,8
	INDONESIA	**3.052**	**71,6**	**23,9**	**4,6**	**40,5**	**54,7**	**4,8**

Tabel 4.9.2.4.a
Persentase Puskesmas perawatanmenurut Keikutsertaan pada Pelatihan Pelayanan Rawat Inap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Pelat Penatalaksanaan Puskesmas Perawatan			Pelat Tata Laksana Kasus Balita Gizi Buruk		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	126	13,5	82,5	4,0	21,4	74,6	4,0
2	Sumatera Utara	140	12,1	82,9	5,0	18,6	76,4	5,0
3	Sumatera Barat	87	17,2	81,6	1,1	37,9	60,9	1,1
4	Riau	58	15,5	82,8	1,7	37,9	60,3	1,7
5	Jambi	66	6,1	90,9	3,0	21,2	75,8	3,0
6	Sumatera Selatan	97	24,7	71,1	4,1	28,9	67,0	4,1
7	Bengkulu	40	15,0	80,0	5,0	22,5	72,5	5,0
8	Lampung	60	15,0	80,0	5,0	18,3	76,7	5,0
9	Bangka Belitung	20	5,0	95,0	0,0	25,0	75,0	0,0
10	Kepulauan Riau	24	16,7	79,2	4,2	29,2	66,7	4,2
11	DKI Jakarta	46	13,0	69,6	17,4	15,2	67,4	17,4
12	Jawa Barat	178	24,7	70,2	5,1	24,7	70,2	5,1
13	Jawa Tengah	294	20,4	76,9	2,7	22,1	75,2	2,7
14	DI Yogyakarta	43	20,9	76,7	2,3	34,9	62,8	2,3
15	Jawa Timur	475	18,3	78,7	2,9	23,6	73,3	3,2
16	Banten	50	42,0	56,0	2,0	44,0	54,0	2,0
17	Bali	30	6,7	86,7	6,7	6,7	86,7	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	15,7	83,1	1,2	37,3	61,4	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	134	8,2	85,8	6,0	20,9	72,4	6,7
20	Kalimantan Barat	92	17,4	78,3	4,3	39,1	57,6	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	14,5	76,4	9,1	16,4	76,4	7,3
22	Kalimantan Selatan	47	27,7	70,2	2,1	36,2	61,7	2,1
23	Kalimantan Timur	91	7,7	89,0	3,3	17,6	79,1	3,3
24	Sulawesi Utara	78	7,7	83,3	9,0	19,2	71,8	9,0
25	Sulawesi Tengah	75	14,7	84,0	1,3	29,3	69,3	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	9,2	88,9	1,8	22,1	75,6	2,3
27	Sulawesi Tenggara	64	14,1	82,8	3,1	23,4	73,4	3,1
28	Gorontalo	21	14,3	85,7	0,0	33,3	66,7	0,0
29	Sulawesi Barat	37	21,6	70,3	8,1	18,9	73,0	8,1
30	Maluku	58	5,2	86,2	8,6	27,6	63,8	8,6
31	Maluku Utara	29	13,8	86,2	0,0	13,8	86,2	0,0
32	Papua Barat	43	7,0	88,4	4,7	14,0	81,4	4,7
33	Papua	94	12,8	83,0	4,3	11,7	84,0	4,3
	Lokasi							
1	Perkotaan	480	18,1	72,5	9,4	26,7	64,0	9,4
2	Perdesaan	2.572	15,4	81,8	2,9	23,7	73,4	2,9
	INDONESIA	**3.052**	**15,8**	**80,3**	**3,9**	**24,1**	**71,9**	**3,9**

Tabel 4.9.2.4.b
Persentase Puskesmas perawatanmenurut Keikutsertaanpada Pelatihan Pelayanan Rawat Inap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Pelat Tata Laksana Kasus Neonatal dengan Komplikasi			Pelatihan Lengkap Rawat Inap		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	126	7,9	88,1	4,0	1,6	94,4	4,0
2	Sumatera Utara	140	13,6	81,4	5,0	4,3	90,7	5,0
3	Sumatera Barat	87	31,0	67,8	1,1	5,7	93,1	1,1
4	Riau	58	29,3	69,0	1,7	6,9	91,4	1,7
5	Jambi	66	19,7	77,3	3,0	3,0	93,9	3,0
6	Sumatera Selatan	97	26,8	69,1	4,1	13,4	82,5	4,1
7	Bengkulu	40	12,5	82,5	5,0	5,0	90,0	5,0
8	Lampung	60	21,7	73,3	5,0	10,0	85,0	5,0
9	Bangka Belitung	20	30,0	70,0	0,0	0,0	100,0	0,0
10	Kepulauan Riau	24	16,7	79,2	4,2	4,2	91,7	4,2
11	DKI Jakarta	46	26,1	56,5	17,4	4,3	78,3	17,4
12	Jawa Barat	178	21,3	73,6	5,1	9,6	85,4	5,1
13	Jawa Tengah	294	18,4	78,9	2,7	5,8	91,5	2,7
14	DI Yogyakarta	43	53,5	44,2	2,3	7,0	90,7	2,3
15	Jawa Timur	475	17,7	79,2	3,2	6,5	90,5	2,9
16	Banten	50	36,0	62,0	2,0	14,0	84,0	2,0
17	Bali	30	16,7	76,7	6,7	0,0	93,3	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	34,9	63,9	1,2	9,6	89,2	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	134	26,9	67,2	6,0	3,0	90,3	6,7
20	Kalimantan Barat	92	31,5	64,1	4,3	8,7	88,0	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	25,5	67,3	7,3	5,5	85,5	9,1
22	Kalimantan Selatan	47	23,4	74,5	2,1	8,5	89,4	2,1
23	Kalimantan Timur	91	14,3	82,4	3,3	2,2	94,5	3,3
24	Sulawesi Utara	78	16,7	74,4	9,0	5,1	85,9	9,0
25	Sulawesi Tengah	75	28,0	70,7	1,3	12,0	86,7	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	13,8	84,3	1,8	3,7	94,5	1,8
27	Sulawesi Tenggara	64	21,9	75,0	3,1	4,7	92,2	3,1
28	Gorontalo	21	23,8	76,2	0,0	9,5	90,5	0,0
29	Sulawesi Barat	37	10,8	81,1	8,1	0,0	91,9	8,1
30	Maluku	58	12,1	77,6	10,3	1,7	87,9	10,3
31	Maluku Utara	29	13,8	86,2	0,0	0,0	100,0	0,0
32	Papua Barat	43	14,0	81,4	4,7	0,0	95,3	4,7
33	Papua	94	14,9	80,9	4,3	6,4	89,4	4,3
	Lokasi							
1	Perkotaan	480	22,5	68,1	9,4	7,3	83,3	9,4
2	Perdesaan	2.572	20,1	77,0	2,9	5,6	91,4	2,9
	INDONESIA	**3.052**	**20,4**	**75,6**	**3,9**	**5,9**	**90,2**	**3,9**

Tabel 4.9.2.4.a dan tabel 4.9.2.4.b menunjukkan keikutsertaan puskesmasperawatan dalam pelatihan pelayanan rawat inap pada tahun 2009 dan 2010 yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011, meliputi pelatihan penatalaksanaan puskesmas perawatan, tata laksana kasus balita gizi buruk dan tata laksana kasus neonatal dengan komplikasi. Secara nasional dari ketiga jenis pelatihan, pelatihan tata laksana kasus balita gizi buruk adalah pelatihan dengan persentase tertinggi yang diikuti oleh puskesmas perawatan(24,1%), kemudian pelatihan tata laksana kasus neonatal dengan komplikasi (20,4%) dan pelatihan penatalaksanaan puskesmas perawatan (15,8%).

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang ikut pada pelatihan penatalaksanaan puskesmas perawatan adalah 15,8 persen.Tertinggi di Provinsi Banten (42%), diikuti Provinsi Kalimantan Selatan (27,7%), Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Barat (24,7%). Terendah di Provinsi Bangka Belitung (5%), diikuti Provinsi Maluku (5,2%) dan Provinsi Jambi (6,1%).Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mengikuti pelatihan penatalaksanaan puskesmas perawatan di perkotaan ada sebanyak 18,1 persen, sementara di perdesaan 15,4 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatanyang mengikutipelatihan tata laksana kasus balita gizi burukadalah 24,1 persen. Tertinggi diProvinsi Banten (44%), diikuti provinsi Kalimantan Barat (39,1%), provinsi Sumatera Barat dan Riau (37,9%). Terendah di Provinsi Bali (6,7%), provinsi Papua (11,7%) dan provinsi Maluku Utara(13,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mengikuti pelatihan tata laksana kasus balita gizi buruk di perkotaan ada sebanyak 26,7 persen, sementara di perdesaan 23,7 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang mengikuti pelatihan tata laksana kasus neonatal dengan komplikasiadalah 20,4. Tertinggi di Provinsi DIY (53,5%), diikuti provinsi Banten (36%), provinsi Nusa Tenggara Barat (34,9%). Terendah di provinsi DI Aceh (7,9%), provinsi Sulawesi Barat (10,8%) dan provinsi Maluku (12,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mengikuti pelatihan tata laksana kasus neonatal dengan komplikasi di perkotaan ada sebanyak 22,5 persen, sementaradi perdesaan 20,1 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang mengikuti lengkap pelatihan rawat inap,yaitu mengikuti seluruh pelatihan di atas hanya sebanyak 5,9 persen,. Tertinggidi provinsi Banten (14%), diikuti provinsi Sumatera Selatan (13,4%), dan provinsi Sulawesi Tengah (12%)..Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mengikuti pelatihan lengkap rawat inap di perkotaan ada sebanyak 7,3 persen, sementara di perdesaan 5,6 persen.

Tabel 4.9.2.5 menunjukkan ketersediaan pedoman pelayanan rawat inappada puskesmas perawatan yang dikumpulkan Rifaskes 2011yaitu Pedoman Asuhan Keperawatan dan Pedoman Home Care. Secara nasionalpersentase puskesmas perawatan yang memiliki Pedoman Asuhan Keperawatansebesar 39,7 persen dan Pedoman Home Care sebesar 28,4 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang memilikiPedoman Asuhan Keperawatan adalah 39,7 persen.Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi adalah diprovinsi Jawa Barat (56,7%), diikuti provinsi Jawa Tengah (55,8%) dan provinsi DKI Jakarta (50%). Sedang terendah di provinsi Sulawesi Utara (23,1%), diikuti provinsi Papua Barat (23,3%) dan provinsi Sumatera Utara (23,6%).Berdasarkan lokasi, puskesmas perawatan yang memiliki Pedoman Asuhan Keperawatan di perkotaan ada sebanyak 42,5 persen, sementara di perdesaan 39,2 persen.

Secara nasional, persentase puskesmasperawatan yang memiliki Pedoman Home Careadalah 28,4 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi adalahdi provinsi DIY (48,8%), diikuti provinsi DKI Jakarta (41,3%) dan provinsi Lampung (40%). Sedang terendah di provinsi Sulawesi Utara (17,9%), diikuti provinsi Sulawesi Utara (19,2%) dan provinsi Jambi (19,7%). Berdasarkan lokasi, puskesmas perawatan yang memiliki Pedoman Home Care di perkotaan ada sebanyak31,5 persen, sementara di perdesaan 27,8 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang memiliki lengkap keduapedoman di atas adalah sebanyak27,3%.Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggiadalah di di provinsi DIY (41,9%), diikuti provinsi Jawa Barat (37,6%) dan provinsi DKI Jakarta (39,1%). Sedang terendah di provinsi Kalimantan Selatan (17%), diikuti provinsi Sumatera Utara (17,9%) dan provinsi Maluku (19%). Berdasarkan lokasi, puskesmas perawatan yang memiliki lengkap kedua pedoman tersebut di perkotaan ada sebanyak 29,2 persen, sementara di perdesaan 26,9 persen.

Tabel 4.9.2.5
Persentase Puskesmas perawatanmenurut kepemilikan PedomanPelayanan Rawat Inap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Pedoman Asuhan Keperawatan			Pedoman Home Care			Pedoman Lengkap		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	126	31,0	65,1	4,0	28,6	67,5	4,0	28,6	67,5	4,0
2	Sumatera Utara	140	23,6	71,4	5,0	17,9	77,1	5,0	17,9	77,1	5,0
3	Sumatera Barat	87	43,7	55,2	1,1	35,6	63,2	1,1	33,3	65,5	1,1
4	Riau	58	37,9	58,6	3,4	25,9	70,7	3,4	24,1	72,4	3,4
5	Jambi	66	25,8	71,2	3,0	19,7	77,3	3,0	19,7	77,3	3,0
6	Sumatera Selatan	97	41,2	55,7	3,1	22,7	74,2	3,1	21,6	75,3	3,1
7	Bengkulu	40	35,0	60,0	5,0	32,5	62,5	5,0	32,5	62,5	5,0
8	Lampung	60	45,0	50,0	5,0	40,0	55,0	5,0	33,3	61,7	5,0
9	Bangka Belitung	20	35,0	65,0	0,0	35,0	65,0	0,0	30,0	70,0	0,0
10	Kepulauan Riau	24	41,7	54,2	4,2	25,0	70,8	4,2	25,0	70,8	4,2
11	DKI Jakarta	46	50,0	30,4	19,6	41,3	39,1	19,6	39,1	41,3	19,6
12	Jawa Barat	178	56,7	37,6	5,6	38,2	56,2	5,6	37,6	56,7	5,6
13	Jawa Tengah	294	55,8	41,5	2,7	33,3	63,9	2,7	32,7	64,6	2,7
14	DI Yogyakarta	43	48,8	48,8	2,3	48,8	48,8	2,3	41,9	55,8	2,3
15	Jawa Timur	475	45,5	51,2	3,4	30,3	66,5	3,2	28,6	68,2	3,2
16	Banten	50	42,0	56,0	2,0	32,0	66,0	2,0	32,0	66,0	2,0
17	Bali	30	40,0	53,3	6,7	36,7	56,7	6,7	36,7	56,7	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	45,8	53,0	1,2	38,6	60,2	1,2	36,1	62,7	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	134	27,6	66,4	6,0	20,1	73,9	6,0	19,4	74,6	6,0
20	Kalimantan Barat	92	44,6	52,2	3,3	28,3	68,5	3,3	28,3	68,5	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	36,4	56,4	7,3	21,8	69,1	9,1	21,8	69,1	9,1
22	Kalimantan Selatan	47	23,4	74,5	2,1	17,0	80,9	2,1	17,0	80,9	2,1
23	Kalimantan Timur	91	38,5	58,2	3,3	26,4	70,3	3,3	26,4	70,3	3,3
24	Sulawesi Utara	78	23,1	67,9	9,0	19,2	71,8	9,0	17,9	73,1	9,0
25	Sulawesi Tengah	75	26,7	72,0	1,3	20,0	78,7	1,3	20,0	78,7	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	37,3	60,8	1,8	25,8	72,4	1,8	24,4	73,7	1,8
27	Sulawesi Tenggara	64	35,9	60,9	3,1	23,4	73,4	3,1	23,4	73,4	3,1
28	Gorontalo	21	38,1	61,9	0,0	28,6	71,4	0,0	28,6	71,4	0,0
29	Sulawesi Barat	37	29,7	59,5	10,8	21,6	67,6	10,8	21,6	67,6	10,8
30	Maluku	58	27,6	63,8	8,6	22,4	69,0	8,6	19,0	72,4	8,6
31	Maluku Utara	29	34,5	65,5	0,0	20,7	75,9	3,4	20,7	79,3	0,0
32	Papua Barat	43	23,3	72,1	4,7	23,3	72,1	4,7	23,3	72,1	4,7
33	Papua	94	30,9	66,0	3,2	26,6	70,2	3,2	24,5	72,3	3,2
	Lokasi										
1	Perkotaan	480	42,5	47,9	9,6	31,5	59,0	9,6	29,2	61,3	9,6
2	Perdesaan	2.572	39,2	57,9	2,9	27,8	69,2	3,0	26,9	70,2	2,9
	INDONESIA	**3.052**	**39,7**	**56,3**	**4,0**	**28,4**	**67,6**	**4,0**	**27,3**	**68,8**	**4,0**

Tabel 4.9.2.6.a dan Tabel 4.9.2.6.b menunjukkan persentase puskesmas perawatan menurutPengawasan, Evaluasi dan bimbingan pelayanan rawat inap. Pengawasan, Evaluasi dan bimbingan diperlukan dalam pelayanan rawat inap untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan pelayanan rawat inap. Pengawasan, Evaluasi dan bimbingan yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 berupa kunjungan supervisi dari dinas kesehatan, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh dinas kesehatan.

Secara nasionalPengawasan, Evaluasi dan bimbingan yang paling banyak diterima puskesmas dalam pelayanan rawat inapadalah dalam bentuk kunjungan supervisi dinas kesehatan (43,9%), kemudian umpan balik (36,1%) danpertemuan monev yang dilakukan di dinas kesehatan (29,7%).

Secara nasional, sebesar 43,9 persen puskesmas perawatan menerima Pengawasan, Evaluasi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi dinas kesehatan.Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi adalah di Provinsi Jawa Timur (68,8%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (63,9%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (60,2%). Sedang terendah di provinsi Kepulauan Riau (12,5%), diikuti provinsi Maluku Utara (13,8%) dan provinsi Maluku (15,5%). Berdasarkan lokasi, puskesmas perawatan yang menerima kunjungan supervisi dari dinas kesehatan di perkotaan ada sebanyak 45 persen, sementara di perdesaan 43,7 persen.

Secara nasional, sebesar 36,1 persen puskesmas perawatan menerima umpan balik laporan secara tertulis dari dinas kesehatan. Provinsi denganpersentase puskesmas perawatan tertinggi adalah di Provinsi Jawa Timur (57,5%),diikuti Provinsi Jawa Barat (54,5%) dan Provinsi Jawa Tengah (53,1%). Sedang terendah di provinsi Kepulauan Riau (12,5%), diikuti provinsi Maluku dan Maluku Utara (13,8%) dan provinsi Kalimantan Tengah (14,5%). Berdasarkan lokasi, puskesmas perawatan yang menerima umpan balik laporan dari Dinas Kesehatan di perkotaan ada sebanyak 35 persen, sementara di perdesaan 36,3 persen.

Secara nasional, sebesar 29,7 persen puskesmas perawatan mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan.Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi adalah di provinsi Jawa Timur (54,1%), diikuti provinsi Banten (52%) dan provinsi Jawa Barat (47,8%). Sedang terendah di provinsi Kalimantan Tengah (1,8%), diikuti provinsi Maluku (6,9%) dan provinsi Kepulauan Riau (8,3%). Berdasarkan lokasi, puskesmas perawatan yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi di perkotaan ada sebanyak 31,7 persen, sementara di perdesaan 29,3 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas perawatan yang menerima lengkap Pengawasan, Evaluasi dan bimbingan, yaitu menerima kunjungan supervise,menerima umpan balik laporan dan ikut pertemuan Monev seperti tersebat di atas adalah 20,4 persen, .Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi menerima lengkap Pengawasan, Evaluasi dan bimbingan adalah di provinsi Jawa Timur (41,5%), diikuti provinsi Banten (36%) dan provinsi Jawa Barat (35,4%). Berdasarkan lokasi, puskesmas perawatan yangmenerima lengkapPengawasan, Evaluasi dan bimbingan dari dinas kesehatan di perkotaan ada sebanyak 22,9 persen, sementara perdesaan 20 persen.

Tabel 4.9.2.6.a
Persentase Puskesmas perawatanmenurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Rawat Inap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Supervisi Dinkes			Umpan Balik		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	126	19,8	76,2	4,0	15,1	81,0	4,0
2	Sumatera Utara	140	35,7	60,0	4,3	28,6	67,1	4,3
3	Sumatera Barat	87	31,0	66,7	2,3	18,4	79,3	2,3
4	Riau	58	32,8	63,8	3,4	34,5	62,1	3,4
5	Jambi	66	47,0	50,0	3,0	34,8	62,1	3,0
6	Sumatera Selatan	97	45,4	51,5	3,1	35,1	61,9	3,1
7	Bengkulu	40	42,5	52,5	5,0	30,0	65,0	5,0
8	Lampung	60	46,7	48,3	5,0	38,3	56,7	5,0
9	Bangka Belitung	20	25,0	75,0	0,0	20,0	80,0	0,0
10	Kepulauan Riau	24	12,5	83,3	4,2	12,5	83,3	4,2
11	DKI Jakarta	46	45,7	34,8	19,6	34,8	43,5	21,7
12	Jawa Barat	178	55,6	38,8	5,6	54,5	39,9	5,6
13	Jawa Tengah	294	63,9	33,3	2,7	53,1	44,2	2,7
14	DI Yogyakarta	43	53,5	44,2	2,3	46,5	51,2	2,3
15	Jawa Timur	475	68,8	27,8	3,4	57,5	39,2	3,4
16	Banten	50	60,0	38,0	2,0	48,0	50,0	2,0
17	Bali	30	40,0	53,3	6,7	20,0	73,3	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	60,2	38,6	1,2	47,0	51,8	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	134	29,9	64,2	6,0	14,2	79,9	6,0
20	Kalimantan Barat	92	44,6	52,2	3,3	46,7	50,0	3,3
21	Kalimantan Tengah	55	20,0	72,7	7,3	14,5	78,2	7,3
22	Kalimantan Selatan	47	38,3	59,6	2,1	19,1	78,7	2,1
23	Kalimantan Timur	91	22,0	74,7	3,3	18,7	78,0	3,3
24	Sulawesi Utara	78	26,9	64,1	9,0	23,1	67,9	9,0
25	Sulawesi Tengah	75	20,0	78,7	1,3	14,7	84,0	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	42,9	54,8	2,3	28,6	69,1	2,3
27	Sulawesi Tenggara	64	35,9	60,9	3,1	37,5	59,4	3,1
28	Gorontalo	21	38,1	61,9	0,0	33,3	66,7	0,0
29	Sulawesi Barat	37	37,8	54,1	8,1	35,1	56,8	8,1
30	Maluku	58	15,5	74,1	10,3	13,8	74,1	12,1
31	Maluku Utara	29	13,8	86,2	0,0	13,8	86,2	0,0
32	Papua Barat	43	16,3	79,1	4,7	20,9	74,4	4,7
33	Papua	94	19,1	77,7	3,2	25,5	71,3	3,2
	Lokasi							
1	Perkotaan	480	45,0	45,4	9,6	35,0	55,2	9,8
2	Perdesaan	2.572	43,7	53,3	3,0	36,3	60,7	3,0
	INDONESIA	**3.052**	**43,9**	**52,1**	**4,0**	**36,1**	**59,9**	**4,1**

Tabel 4.9.2.6.b
Persentase Puskesmas perawatanmenurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Rawat Inap, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	Pertemuan Monev			Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap		
			% Ya	% Tidak	% TAD	% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	126	9,5	86,5	4,0	3,2	92,9	4,0
2	Sumatera Utara	140	25,0	70,7	4,3	17,1	78,6	4,3
3	Sumatera Barat	87	17,2	79,3	3,4	9,2	88,5	2,3
4	Riau	58	25,9	69,0	5,2	15,5	79,3	5,2
5	Jambi	66	27,3	69,7	3,0	19,7	77,3	3,0
6	Sumatera Selatan	97	34,0	61,9	4,1	22,7	74,2	3,1
7	Bengkulu	40	25,0	70,0	5,0	15,0	80,0	5,0
8	Lampung	60	21,7	71,7	6,7	18,3	76,7	5,0
9	Bangka Belitung	20	15,0	85,0	0,0	5,0	95,0	0,0
10	Kepulauan Riau	24	8,3	87,5	4,2	0,0	95,8	4,2
11	DKI Jakarta	46	32,6	45,7	21,7	23,9	56,5	19,6
12	Jawa Barat	178	47,8	46,6	5,6	35,4	59,0	5,6
13	Jawa Tengah	294	43,2	54,1	2,7	33,7	63,6	2,7
14	DI Yogyakarta	43	44,2	51,2	4,7	27,9	69,8	2,3
15	Jawa Timur	475	54,1	42,3	3,6	41,5	54,9	3,6
16	Banten	50	52,0	46,0	2,0	36,0	62,0	2,0
17	Bali	30	10,0	83,3	6,7	3,3	90,0	6,7
18	Nusa Tenggara Barat	83	30,1	68,7	1,2	19,3	79,5	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	134	14,9	78,4	6,7	5,2	88,1	6,7
20	Kalimantan Barat	92	28,3	67,4	4,3	23,9	71,7	4,3
21	Kalimantan Tengah	55	1,8	90,9	7,3	0,0	92,7	7,3
22	Kalimantan Selatan	47	21,3	76,6	2,1	10,6	87,2	2,1
23	Kalimantan Timur	91	8,8	87,9	3,3	5,5	91,2	3,3
24	Sulawesi Utara	78	11,5	79,5	9,0	5,1	85,9	9,0
25	Sulawesi Tengah	75	9,3	88,0	2,7	5,3	93,3	1,3
26	Sulawesi Selatan	217	23,5	73,3	3,2	12,9	84,8	2,3
27	Sulawesi Tenggara	64	29,7	67,2	3,1	15,6	81,3	3,1
28	Gorontalo	21	42,9	57,1	0,0	28,6	71,4	0,0
29	Sulawesi Barat	37	16,2	75,7	8,1	10,8	81,1	8,1
30	Maluku	58	6,9	82,8	10,3	3,4	86,2	10,3
31	Maluku Utara	29	13,8	86,2	0,0	3,4	96,6	0,0
32	Papua Barat	43	11,6	83,7	4,7	4,7	90,7	4,7
33	Papua	94	14,9	80,9	4,3	9,6	87,2	3,2
	Lokasi							
1	Perkotaan	480	31,7	58,1	10,2	22,9	67,5	9,6
2	Perdesaan	2.572	29,3	67,3	3,3	20,0	76,9	3,1
	INDONESIA	**3.052**	**29,7**	**65,9**	**4,4**	**20,4**	**75,4**	**4,1**

4.9.3. PELAYANAN PONED

Tabel 4.9.3.1 menunjukkan ketersediaan PONED 24 jam, secara nasional persentase puskesmas PONEDyang memberikan pelayanan PONED 24 jam adalah 78,1 persen,. Tertinggi di Provinsi DIY (96,4%), diikuti Provinsi Sulawesi Tengah (89,1%) dan Provinsi Gorontalo (88,9%). Terendah di Provinsi Papua Barat (36,4%), diikuti Provinsi Papua (42,5%), Provinsi DKI (55,6%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas PONED menurut ketersediaan pelayanan PONED 24 jam di perkotaan ada sebanyak 66,1 persen, sementara di perdesaan 81,3 persen.

Tabel 4.9.3.1
Presentase Puskesmas PONEDmenurut Pelayanan PONED 24 Jam, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk PONED	Pelayanan PONED 24 Jam		
			% Ya	% Tidak	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	47	66,0	8,5	25,5
2	Sumatera Utara	68	76,5	11,8	11,8
3	Sumatera Barat	60	73,3	6,7	20,0
4	Riau	30	60,0	6,7	33,3
5	Jambi	39	82,1	5,1	12,8
6	Sumatera Selatan	50	80,0	6,0	14,0
7	Bengkulu	24	70,8	16,7	12,5
8	Lampung	42	73,8	7,1	19,0
9	Bangka Belitung	8	87,5	12,5	0,0
10	Kepulauan Riau	22	63,6	9,1	27,3
11	DKI Jakarta	36	55,6	11,1	33,3
12	Jawa Barat	148	77,7	2,0	20,3
13	Jawa Tengah	170	82,9	5,3	11,8
14	DI Yogyakarta	28	96,4	0,0	3,6
15	Jawa Timur	249	86,3	3,2	10,4
16	Banten	48	81,3	4,2	14,6
17	Bali	30	76,7	10,0	13,3
18	Nusa Tenggara Barat	56	85,7	1,8	12,5
19	Nusa Tenggara Timur	66	80,3	3,0	16,7
20	Kalimantan Barat	32	71,9	9,4	18,8
21	Kalimantan Tengah	26	84,6	3,8	11,5
22	Kalimantan Selatan	31	77,4	9,7	12,9
23	Kalimantan Timur	43	69,8	7,0	23,3
24	Sulawesi Utara	26	84,6	11,5	3,8
25	Sulawesi Tengah	55	89,1	7,3	3,6
26	Sulawesi Selatan	79	84,8	6,3	8,9
27	Sulawesi Tenggara	42	76,2	9,5	14,3
28	Gorontalo	18	88,9	0,0	11,1
29	Sulawesi Barat	18	61,1	5,6	33,3
30	Maluku	17	88,2	5,9	5,9
31	Maluku Utara	15	60,0	6,7	33,3
32	Papua Barat	11	36,4	18,2	45,5
33	Papua	40	42,5	20,0	37,5
	Lokasi				
1	Perkotaan	345	66,1	7,8	26,1
2	Perdesaan	1329	81,3	5,8	12,9
	INDONESIA	**1674**	**78,1**	**6,2**	**15,7**

Tabel 4.9.3.2 menunjukkan persentase puskesmas PONED menurut jumlah petugas pelaksana. Secara nasional, persentase puskemasPONEDyang tidak ada petugas pelaksanasebesar 2,0 persen, petugas pelaksana 1-5 orang sebesar 33,4persen, 6-10 orang sebesar15,5persen, 11-20 orang sebesar19,5persen dan lebih dari 20 orang sebesar12,0 persen.

Persentase puskesmas PONED yang memiliki 1-5 orang petugas pelaksana,secara nasional adalah 33,4 persen. Tertinggi di provinsi Jambi (64,1%), diikuti provinsi Kalimantan Timur (60,5%) dan provinsi Maluku Utara (60%). Sedang terendah di provinsi DIY (7,1%), diikuti provinsi Jawa Barat (7,4%) dan provinsi Banten (8,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONEDyang memiliki 1-5 orang petugas pelaksanadi perkotaan ada sebanyak 27,8 persen, sementara di perdesaan 34,8 persen.

Persentase puskesmas PONEDyang memiliki 6-10 orang petugas pelaksana, secara nasional adalah15,5 persen. Tertinggi di provinsi Gorontalo (33,3%), diikuti provinsi Nusa Tenggara Timur (30,3%) dan provinsi Maluku (29,4%). Terendah provinsi Kepulauan Riau (0%), diikuti provinsi Kalimantan Timur (4,7%) dan provinsi Sumatera Barat (5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONEDyang memiliki 6-10 orang petugas pelaksanadi perkotaan ada sebanyak 13,9 persen, sementara di perdesaan 16 persen.

Persentase puskesmas PONEDyang memiliki 11-20 orang petugas pelaksana, secara nasional adalah 19,5 persen. Tertinggi di provinsi Banten (41,7%), diikuti provinsi DIY (39,3%) dan provinsi Sulawesi Utara (38,5%). Terendah provinsi Bangka Belitung (0%), diikuti provinsi Maluku Utara (0%) dan provinsi Sumatera Utara (1%).Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONEDyang memiliki 11-20 orang petugas pelaksana di perkotaan ada sebanyak 18 persen, sementara di perdesaan 19,9 persen.

Persentase puskesmas PONEDyang memiliki >20 orang petugas pelaksana, secara nasional adalah 12 persen. Tertinggi di provinsi DIY (32,1%), diikuti provinsi Jawa Tengah (25,9%) dan provinsi lampung (19%). Terdapat 7 provinsi yang tidak memiliki >20 orang petugas pelaksana PONED.Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONEDyang memiliki >20 orang petugas pelaksana di perkotaan ada sebanyak 8,4 persen, sementara di perdesaan 12,9 persen.

Tabel 4.9.3.2
Persentase Puskesmas PONEDmenurut Jumlah Petugas Pelaksana, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk PONED	Jumlah Petugas Pelaksana					
			Tidak Ada	1-5 org	6-10 org	11-20 org	>20 org	TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	47	2,1	21,3	17,0	6,4	23,4	29,8
2	Sumatera Utara	68	1,5	54,4	14,7	1,5	11,8	16,2
3	Sumatera Barat	60	1,7	48,3	5,0	6,7	18,3	20,0
4	Riau	30	0,0	30,0	13,3	16,7	0,0	40,0
5	Jambi	39	2,6	64,1	7,7	7,7	7,7	10,3
6	Sumatera Selatan	50	6,0	44,0	18,0	12,0	6,0	14,0
7	Bengkulu	24	4,2	50,0	12,5	16,7	0,0	16,7
8	Lampung	42	0,0	33,3	14,3	11,9	19,0	21,4
9	Bangka Belitung	8	12,5	50,0	25,0	0,0	12,5	0,0
10	Kepulauan Riau	22	4,5	54,5	0,0	4,5	4,5	31,8
11	DKI Jakarta	36	2,8	30,6	8,3	16,7	0,0	41,7
12	Jawa Barat	148	2,0	7,4	18,2	34,5	17,6	20,3
13	Jawa Tengah	170	1,2	21,8	13,5	21,8	25,9	15,9
14	DI Yogyakarta	28	0,0	7,1	17,9	39,3	32,1	3,6
15	Jawa Timur	249	0,8	21,3	16,1	31,7	18,5	11,6
16	Banten	48	0,0	8,3	12,5	41,7	20,8	16,7
17	Bali	30	3,3	36,7	13,3	20,0	13,3	13,3
18	Nusa Tenggara Barat	56	1,8	48,2	21,4	12,5	1,8	14,3
19	Nusa Tenggara Timur	66	1,5	36,4	30,3	12,1	1,5	18,2
20	Kalimantan Barat	32	3,1	43,8	18,8	12,5	3,1	18,8
21	Kalimantan Tengah	26	0,0	53,8	19,2	11,5	3,8	11,5
22	Kalimantan Selatan	31	6,5	41,9	6,5	22,6	9,7	12,9
23	Kalimantan Timur	43	0,0	60,5	4,7	7,0	2,3	25,6
24	Sulawesi Utara	26	3,8	30,8	19,2	38,5	3,8	3,8
25	Sulawesi Tengah	55	1,8	41,8	25,5	23,6	3,6	3,6
26	Sulawesi Selatan	79	1,3	62,0	10,1	13,9	0,0	12,7
27	Sulawesi Tenggara	42	0,0	35,7	26,2	16,7	4,8	16,7
28	Gorontalo	18	0,0	27,8	33,3	22,2	5,6	11,1
29	Sulawesi Barat	18	5,6	50,0	5,6	5,6	0,0	33,3
30	Maluku	17	5,9	35,3	29,4	17,6	5,9	5,9
31	Maluku Utara	15	0,0	60,0	6,7	0,0	0,0	33,3
32	Papua Barat	11	0,0	18,2	27,3	9,1	0,0	45,5
33	Papua	40	12,5	30,0	7,5	5,0	2,5	42,5
	Lokasi							
1	Perkotaan	345	3,2	27,8	13,9	18,0	8,4	28,7
2	Perdesaan	1.329	1,7	34,8	16,0	19,9	12,9	14,7
	INDONESIA	**1.674**	**2,0**	**33,4**	**15,5**	**19,5**	**12,0**	**17,6**

Tabel4.9.3.3
Persentase Puskesmas PONEDmenurutKeterlibatan Tenaga,Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk PONED	Tenaga Dokter			Tenaga Bidan			Tenaga Perawat		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	47	51,1	21,3	27,7	70,2	2,1	27,7	19,1	53,2	27,7
2	Sumatera Utara	68	63,2	20,6	16,2	76,5	7,4	16,2	51,5	32,4	16,2
3	Sumatera Barat	60	60,0	20,0	20,0	76,7	3,3	20,0	66,7	13,3	20,0
4	Riau	30	53,3	6,7	40,0	56,7	3,3	40,0	40,0	20,0	40,0
5	Jambi	39	69,2	17,9	12,8	84,6	2,6	12,8	66,7	20,5	12,8
6	Sumatera Selatan	50	68,0	18,0	14,0	76,0	10,0	14,0	60,0	26,0	14,0
7	Bengkulu	24	54,2	29,2	16,7	75,0	8,3	16,7	41,7	41,7	16,7
8	Lampung	42	69,0	9,5	21,4	76,2	2,4	21,4	50,0	28,6	21,4
9	Bangka Belitung	8	87,5	12,5	0,0	87,5	12,5	0,0	62,5	37,5	0,0
10	Kepulauan Riau	22	50,0	18,2	31,8	63,6	4,5	31,8	27,3	40,9	31,8
11	DKI Jakarta	36	33,3	25,0	41,7	55,6	2,8	41,7	11,1	47,2	41,7
12	Jawa Barat	148	62,8	16,2	20,9	77,7	2,0	20,3	18,2	61,5	20,3
13	Jawa Tengah	170	70,6	14,1	15,3	81,8	2,9	15,3	44,1	40,6	15,3
14	DI Yogyakarta	28	82,1	14,3	3,6	92,9	3,6	3,6	71,4	25,0	3,6
15	Jawa Timur	249	66,7	21,3	12,0	86,7	1,6	11,6	36,1	52,2	11,6
16	Banten	48	62,5	20,8	16,7	83,3	0,0	16,7	29,2	54,2	16,7
17	Bali	30	53,3	30,0	16,7	80,0	6,7	13,3	50,0	36,7	13,3
18	Nusa Tenggara Barat	56	76,8	10,7	12,5	83,9	3,6	12,5	30,4	55,4	14,3
19	Nusa Tenggara Timur	66	72,7	9,1	18,2	80,3	1,5	18,2	63,6	18,2	18,2
20	Kalimantan Barat	32	65,6	15,6	18,8	78,1	3,1	18,8	40,6	40,6	18,8
21	Kalimantan Tengah	26	80,8	7,7	11,5	88,5	0,0	11,5	84,6	3,8	11,5
22	Kalimantan Selatan	31	71,0	16,1	12,9	77,4	9,7	12,9	51,6	35,5	12,9
23	Kalimantan Timur	43	60,5	14,0	25,6	69,8	4,7	25,6	60,5	14,0	25,6
24	Sulawesi Utara	26	76,9	19,2	3,8	92,3	3,8	3,8	61,5	34,6	3,8
25	Sulawesi Tengah	55	74,5	20,0	5,5	94,5	0,0	5,5	47,3	47,3	5,5
26	Sulawesi Selatan	79	67,1	20,3	12,7	81,0	6,3	12,7	19,0	68,4	12,7
27	Sulawesi Tenggara	42	69,0	14,3	16,7	83,3	0,0	16,7	40,5	42,9	16,7
28	Gorontalo	18	77,8	11,1	11,1	88,9	0,0	11,1	61,1	27,8	11,1
29	Sulawesi Barat	18	55,6	11,1	33,3	61,1	5,6	33,3	55,6	11,1	33,3
30	Maluku	17	52,9	41,2	5,9	88,2	5,9	5,9	35,3	58,8	5,9
31	Maluku Utara	15	60,0	6,7	33,3	66,7	0,0	33,3	53,3	13,3	33,3
32	Papua Barat	11	36,4	18,2	45,5	54,5	0,0	45,5	27,3	27,3	45,5
33	Papua	40	32,5	25,0	42,5	45,0	12,5	42,5	25,0	32,5	42,5
	Lokasi										
1	Perkotaan	345	50,7	20,0	29,3	67,0	4,1	29,0	35,4	35,7	29,0
2	Perdesaan	1.329	68,3	17,0	14,7	82,2	3,3	14,5	43,3	42,1	14,6
	INDONESIA	**1.674**	64,7	17,6	17,7	79,0	3,5	17,5	41,6	40,8	17,6

Tabel 4.9.3.3 menunjukkan jenis tenaga yang terlibat dalam PONEDyang dikumpulkan pada Risfaskes 2011, meliputi tenaga dokter, perawat, bidan dan tenaga gizi. Secara nasional jenis tenaga yang terlibat dalam pelayanan rawat inap terbanyak adalah tenaga bidan (79,0%), diikuti tenaga dokter (64,7%) dan tenaga perawat (41,6%).

Secara nasional, persentase puskesmas PONED menurut keterlibatan tenaga dokter adalah 64,7 persen, sementara 17,6 persen tidak ada tenaga dokter yang terlibat. Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi di provinsi Bangka Belitung (87,5%), diikuti provinsi DIY (82,1%) dan provinsi Kalimantan Tengah (80,8%). Sedang terendah di provinsi Papua (32,5%), diikuti provinsi DKI (33,3%) dan provinsi Papua Barat (36,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONEDyang memiliki tenaga dokter pada PONED di perkotaan 50,7 persen, sementara di perdesaan 68,3 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas PONEDyang memiliki tenaga bidan pada PONEDadalah 79 persen, sementara 3,5 persen tidak ada tenaga bidan yang terlibat. Provinsi dengan persentase puskesmas perawatan tertinggi di provinsi Sulawesi Tengah (94,5%), diikuti provinsi Sulawesi Utara (92,3%) dan provinsi Gorontalo (88,9%). Sedangkan terendah di provinsi Papua (45%), diikuti provinsi Papua Barat (54,5%) dan provinsi DKI (55,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang memiliki tenaga bidan pada PONED di perkotaan 67,0 persen, sementara di perdesaan 82,2 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas PONED yang memiliki tenaga perawat pada PONEDadalah 41,6 persen, sementara 40,8 persen tidak ada tenaga perawat yang terlibat. Provinsi dengan persentase tertinggi di provinsi Kalimantan Tengah (84,6%), diikuti provinsi Jambi dan Sumatera Barat (66,7%) dan provinsi Nusa Tenggara Timur (63,6%). Sedangkan terendah di provinsi DKI (11,1%), diikuti provinsi Jawa Barat (18,2%) dan provinsi Sulawesi Selatan (19,0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang memiliki tenaga dokter pada PONED di perkotaan 35,4 persen, sementara di perdesaan 43,3 persen.

Tabel 4.9.3.4 menunjukkan persentase puskesmas PONED menurut keberadaan pelatihan dan pedoman PONED. Secara nasional keikutsertaan pada pelatihan PONED pada tahun 2009 atau 2010 sebesar 57,4 persen,sedangkan ketersediaan pedoman PONED sebesar 43,1 persen. Sementara puskesmas PONED yang memiliki pedoman dan ikut pelatihan PONED pada tahun 2009 atau 2010hanya 34,6 persen.

Secara nasional persentase puskesmas PONEDyang mengikuti pelatihan PONED adalah 57,4,. Tertinggi di provinsi Bangka Belitung (87,5%), diikuti provinsi Gorontalo (83,3%) dan provinsi DIY (78,6%). Terendah di provinsi Papua (17,5%), diikuti provinsi Papua Barat (18,2%) dan provinsi DKI (30,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONEDyang mengikuti pelatihan PONED di perkotaan 51,0 persen, sementara di perdesaan 59,1 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas PONEDyang memiliki pedoman PONED adalah 43,1 persen. Tertinggi di provinsi Bangka Belitung (62,5%), diikuti provinsi Nusa Tenggara Timur (62,1%) dan provinsi DIY (60,7%). Terendah di provinsi Bengkulu (16,7%), diikuti provinsi Papua (20,0%) dan provinsi Kalimantan Selatan (22,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONEDyang memiliki pedoman PONED di perkotaan 34,8 persen, sementara di perdesaan 45,2 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas PONEDyang ikut pelatihan dan memiliki pedoman PONED adalah 34,6 persen.Tertinggi di provinsi Bangka Belitung (62,5%), diikuti provinsi Nusa Tenggara Timur (60,6%) dan provinsi Kalimantan Tengah (53,8%). Terendah di provinsi Papua Barat (0%), diikuti provinsi Bengkulu (8,3%), dan Papua (10,0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang ikut pelatihan dan memiliki pedoman PONED di perkotaan 30,1 persen, sementara di perdesaan 35,7 persen.

Tabel 4.9.3.4
Persentase Puskesmas PONEDmenurut keberadaan Pelatihan dan PedomanPONED, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk PONED	Keikutsertaan pada Pelatihan			Ketersediaan Pedoman			Ikut Pelatihan dan punya Pedoman		
			% Ya	% Tidak Ada	% TAD	% Ya	% Tidak Ada	% TAD	% Ya	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	47	57,4	14,9	27,7	31,9	14,9	53,2	29,8	27,7	42,6
2	Sumatera Utara	68	54,4	30,9	14,7	26,5	13,2	60,3	25,0	39,7	35,3
3	Sumatera Barat	60	60,0	20,0	20,0	43,3	15,0	41,7	40,0	28,3	31,7
4	Riau	30	50,0	10,0	40,0	23,3	20,0	56,7	20,0	30,0	50,0
5	Jambi	39	74,4	12,8	12,8	43,6	17,9	38,5	38,5	28,2	33,3
6	Sumatera Selatan	50	68,0	18,0	14,0	40,0	18,0	42,0	34,0	36,0	30,0
7	Bengkulu	24	33,3	54,2	12,5	16,7	33,3	50,0	8,3	70,8	20,8
8	Lampung	42	42,9	38,1	19,0	47,6	21,4	31,0	28,6	52,4	19,0
9	Bangka Belitung	8	87,5	12,5	0,0	62,5	12,5	25,0	62,5	12,5	25,0
10	Kepulauan Riau	22	63,6	4,5	31,8	36,4	22,7	40,9	36,4	27,3	36,4
11	DKI Jakarta	36	30,6	33,3	36,1	25,0	19,4	55,6	19,4	41,7	38,9
12	Jawa Barat	148	64,2	15,5	20,3	48,6	14,2	37,2	42,6	27,0	30,4
13	Jawa Tengah	170	50,0	35,9	14,1	46,5	16,5	37,1	28,8	45,9	25,3
14	DI Yogyakarta	28	78,6	17,9	3,6	60,7	17,9	21,4	50,0	35,7	14,3
15	Jawa Timur	249	52,6	35,7	11,6	55,0	13,7	31,3	38,2	42,6	19,3
16	Banten	48	70,8	12,5	16,7	43,8	18,8	37,5	41,7	22,9	35,4
17	Bali	30	50,0	36,7	13,3	43,3	16,7	40,0	30,0	46,7	23,3
18	Nusa Tenggara Barat	56	69,6	17,9	12,5	58,9	19,6	21,4	50,0	33,9	16,1
19	Nusa Tenggara Timur	66	75,8	6,1	18,2	62,1	12,1	25,8	60,6	16,7	22,7
20	Kalimantan Barat	32	56,3	25,0	18,8	40,6	25,0	34,4	31,3	40,6	28,1
21	Kalimantan Tengah	26	76,9	11,5	11,5	57,7	19,2	23,1	53,8	26,9	19,2
22	Kalimantan Selatan	31	61,3	25,8	12,9	22,6	25,8	51,6	16,1	45,2	38,7
23	Kalimantan Timur	43	60,5	14,0	25,6	37,2	18,6	44,2	32,6	30,2	37,2
24	Sulawesi Utara	26	53,8	42,3	3,8	53,8	11,5	34,6	42,3	46,2	11,5
25	Sulawesi Tengah	55	61,8	34,5	3,6	29,1	27,3	43,6	23,6	50,9	25,5
26	Sulawesi Selatan	79	54,4	34,2	11,4	39,2	15,2	45,6	31,6	41,8	26,6
27	Sulawesi Tenggara	42	61,9	23,8	14,3	23,8	28,6	47,6	23,8	50,0	26,2
28	Gorontalo	18	83,3	5,6	11,1	55,6	11,1	33,3	50,0	16,7	33,3
29	Sulawesi Barat	18	50,0	16,7	33,3	38,9	16,7	44,4	38,9	27,8	33,3
30	Maluku	17	76,5	17,6	5,9	35,3	29,4	35,3	35,3	41,2	23,5
31	Maluku Utara	15	53,3	13,3	33,3	40,0	6,7	53,3	40,0	13,3	46,7
32	Papua Barat	11	18,2	36,4	45,5	0,0	18,2	81,8	0,0	54,5	45,5
33	Papua	40	17,5	40,0	42,5	20,0	10,0	70,0	10,0	45,0	45,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	345	51,0	20,6	28,4	34,8	16,2	49,0	30,1	32,8	37,1
2	Perdesaan	1.329	59,1	27,0	13,9	45,2	17,3	37,5	35,7	38,7	25,6
	INDONESIA	**1.674**	**57,4**	**25,7**	**16,9**	**43,1**	**17,1**	**39,8**	**34,6**	**37,5**	**28,0**

Tabel 4.9.3.5
Persentase Puskesmas PONEDmenurut Pengawasan, Evaluasi dan BimbinganPONED, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk PONED	Supervisi Dinkes			Pertemuan Monev			Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap		
			% Ya	% Tidak Ada	% TAD	% Ya	% Tidak Ada	% TAD	% Ya	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	47	42,6	29,8	27,7	23,4	48,9	27,7	19,1	53,2	27,7
2	Sumatera Utara	68	32,4	54,4	13,2	25,0	61,8	13,2	20,6	66,2	13,2
3	Sumatera Barat	60	25,0	55,0	20,0	13,3	66,7	20,0	8,3	71,7	20,0
4	Riau	30	26,7	33,3	40,0	23,3	36,7	40,0	20,0	40,0	40,0
5	Jambi	39	41,0	48,7	10,3	28,2	61,5	10,3	20,5	69,2	10,3
6	Sumatera Selatan	50	30,0	56,0	14,0	26,0	60,0	14,0	22,0	64,0	14,0
7	Bengkulu	24	29,2	58,3	12,5	29,2	58,3	12,5	20,8	66,7	12,5
8	Lampung	42	35,7	42,9	21,4	19,0	57,1	23,8	16,7	61,9	21,4
9	Bangka Belitung	8	62,5	37,5	0,0	25,0	75,0	0,0	25,0	75,0	0,0
10	Kepulauan Riau	22	13,6	59,1	27,3	4,5	68,2	27,3	4,5	68,2	27,3
11	DKI Jakarta	36	27,8	36,1	36,1	25,0	36,1	38,9	22,2	41,7	36,1
12	Jawa Barat	148	62,8	16,9	20,3	56,8	23,0	20,3	52,7	27,0	20,3
13	Jawa Tengah	170	47,1	38,2	14,7	48,8	36,5	14,7	38,2	47,1	14,7
14	DI Yogyakarta	28	42,9	53,6	3,6	53,6	42,9	3,6	35,7	60,7	3,6
15	Jawa Timur	249	63,9	24,5	11,6	63,1	24,5	12,4	53,8	33,7	12,4
16	Banten	48	52,1	31,3	16,7	37,5	45,8	16,7	35,4	47,9	16,7
17	Bali	30	46,7	40,0	13,3	16,7	70,0	13,3	16,7	70,0	13,3
18	Nusa Tenggara Barat	56	60,7	26,8	12,5	46,4	41,1	12,5	42,9	44,6	12,5
19	Nusa Tenggara Timur	66	53,0	28,8	18,2	39,4	42,4	18,2	37,9	43,9	18,2
20	Kalimantan Barat	32	50,0	31,3	18,8	37,5	43,8	18,8	34,4	46,9	18,8
21	Kalimantan Tengah	26	15,4	73,1	11,5	7,7	80,8	11,5	7,7	80,8	11,5
22	Kalimantan Selatan	31	38,7	48,4	12,9	19,4	67,7	12,9	19,4	67,7	12,9
23	Kalimantan Timur	43	11,6	62,8	25,6	11,6	62,8	25,6	2,3	72,1	25,6
24	Sulawesi Utara	26	23,1	73,1	3,8	19,2	76,9	3,8	19,2	76,9	3,8
25	Sulawesi Tengah	55	25,5	69,1	5,5	16,4	78,2	5,5	12,7	81,8	5,5
26	Sulawesi Selatan	79	31,6	58,2	10,1	24,1	65,8	10,1	20,3	69,6	10,1
27	Sulawesi Tenggara	42	40,5	42,9	16,7	19,0	64,3	16,7	19,0	64,3	16,7
28	Gorontalo	18	66,7	22,2	11,1	50,0	38,9	11,1	44,4	44,4	11,1
29	Sulawesi Barat	18	16,7	50,0	33,3	5,6	61,1	33,3	5,6	61,1	33,3
30	Maluku	17	29,4	64,7	5,9	35,3	58,8	5,9	11,8	82,4	5,9
31	Maluku Utara	15	13,3	53,3	33,3	0,0	66,7	33,3	0,0	66,7	33,3
32	Papua Barat	11	9,1	45,5	45,5	18,2	36,4	45,5	9,1	45,5	45,5
33	Papua	40	10,0	50,0	40,0	5,0	55,0	40,0	2,5	57,5	40,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	345	33,3	38,3	28,4	28,1	43,2	28,7	24,3	47,2	28,4
2	Perdesaan	1.329	45,1	41,1	13,8	37,4	48,5	14,1	31,5	54,5	14,0
	INDONESIA	**1.674**	**42,7**	**40,5**	**16,8**	**35,5**	**47,4**	**17,1**	**30,0**	**53,0**	**17,0**

Tabel 4.9.3.5 menunjukkan persentase puskesmas PONEDmenurut Pengawasan, Evaluasi dan BimbinganPONED. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam PONEDuntuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan PONED. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011berupa kunjungan supervisi dari dinas kesehatandan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh dinas kesehatan. Secara nasional,Pengawasan, Evaluasi dan BimbinganPONED yang paling banyak diterima puskesmas PONEDadalah dalam bentuk kunjungan supervisi dari dinas kesehatan sebesar 42,7 persen, sementara pertemuan monev yang dilakukan di dinas kesehatan hanya sebesar 35,5 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas PONEDyang menerima kunjungan supervisi PONED dari Dinas Kesehatanpada adalah 42,7 persen. Tertinggi di provinsi Gorontalo (66,7%), diikuti provinsi Jawa Timur (63,9%) dan provinsi Jawa Barat (62,8%). Sedang terendah di provinsi Papua Barat (9,1%), diikuti provinsi Papua (10%) dan provinsi Kalimantan Timur (11,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONEDyang menerima kunjungan supervisi PONED dariDinas Kesehatandi perkotaan 33,3 persen, sementara di perdesaan 45,1 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas PONED yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi PONEDadalah 35,5 persen. Tertinggi di provinsi Jawa Timur (63,1%), diikuti provinsi Jawa Barat (56,8%) dan provinsi DIY (53,6%). Sedang terendah di provinsi Maluku Utara (0%), diikuti provinsi Kepulauan Riau (4,5%), dan provinsi Maluku (5,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasiPONED di perkotaan 28,1 persen, sementara di perdesaan 37,4 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas PONED yang menerimaPengawasan, Evaluasi dan Bimbinganlengkap, yaitu menerima kunjungan supervise dan mengikuti pertemuan Monitoring Evaluasi PONED adalah 30 persen. Tertinggi di provinsi Jawa Timur (53,8%), diikuti provinsi Jawa Barat (52,7%) dan provinsi Gorontalo (44,4%). Sedang terendah di provinsi Kalimantan Timur (2,3%), diikuti provinsi Papua (2,5%) dan provinsi Kepulauan Riau (4,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang menerima lengkap Pengawasan, Evaluasi dan BimbinganPONED di perkotaan 24,3 persen, sementara di perdesaan 31,5 persen.

4.10. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4.10.1. Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai SK Menkes no 128 tentang kebijakan dasar Puskesmas satu dari 3 fungsi puskesmas adalah sebagai Pusat Pemberdayaan masyarakat dibidang Kesehatan

Tabel 4.10.1.1
Persentase Puskesmas Menurut keberadaan Petugas Khusus Pemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Petugas Khusus		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	18,3	73,0	8,7
2	Sumatera Utara	506	39,1	60,7	0,2
3	Sumatera Barat	248	51,6	48,0	0,4
4	Riau	195	45,6	50,8	3,6
5	Jambi	171	55,6	40,4	4,1
6	Sumatera Selatan	298	54,7	43,6	1,7
7	Bengkulu	173	32,4	60,1	7,5
8	Lampung	265	43,4	56,2	,4
9	Bangka Belitung	57	64,9	33,3	1,8
10	Kepulauan Riau	65	61,5	38,5	0
11	DKI Jakarta	336	56,5	36,6	6,8
12	Jawa Barat	1031	60,9	37,8	1,3
13	Jawa Tengah	861	62,0	37,4	,6
14	DI Yogyakarta	121	66,9	32,2	,8
15	Jawa Timur	949	73,1	25,6	1,3
16	Banten	206	53,4	44,2	2,4
17	Bali	114	57,0	41,2	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	69,1	27,5	3,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	29,5	63,9	6,6
20	Kalimantan Barat	233	39,9	58,8	1,3
21	Kalimantan Tengah	176	19,9	74,4	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	54,8	45,2	0
23	Kalimantan Timur	213	40,8	52,1	7,0
24	Sulawesi Utara	167	40,7	59,3	0
25	Sulawesi Tengah	163	52,1	44,8	3,1
26	Sulawesi Selatan	406	41,9	55,7	2,5
27	Sulawesi Tenggara	233	38,6	59,7	1,7
28	Gorontalo	74	41,9	54,1	4,1
29	Sulawesi Barat	81	37,0	58,0	4,9
30	Maluku	161	23,6	73,3	3,1
31	Maluku Utara	101	27,7	62,4	9,9
32	Papua Barat	104	16,3	81,7	1,9
33	Papua	294	14,6	82,0	3,4
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	54,2	42,9	2,8
2	Perdesaan	6660	47,3	50,3	2,5
	INDONESIA	**8981**	**49,1**	**48,4**	**2,6**

Tabel 4.10.1.1 menunjukkan secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai petugas khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah 49,1 persen. Persentase tertinggi adalah di Provinsi Jawa Timur (73,1%) diikuti provinsi Nusa Tenggara Barat (69,1%), Provinsi DI Yogyakarta (66,9%) dan Provinsi Bangka Belitung (64,9%). Terendah di Provinsi Papua (14,6%), diikuti provinsi Papua Barat (16,3%) dan Provinsi DI Aceh (18,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas diperkotaan yang ada tenaga khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ada sebanyak 54,2 persen, sementara di perdesaan 47,3 persen.

Tabel 4.10.1.2.
Persentase Puskesmas menurut Petugas Yang Dilatih Pemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Petugas yang Dilatih		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	11,9	79,1	9,0
2	Sumatera Utara	506	18,2	81,6	0,2
3	Sumatera Barat	248	22,2	77,4	0,4
4	Riau	195	24,1	72,3	3,6
5	Jambi	171	35,7	60,2	4,1
6	Sumatera Selatan	298	24,8	73,5	1,7
7	Bengkulu	173	12,1	80,3	7,5
8	Lampung	265	22,6	77,0	0,4
9	Bangka Belitung	57	36,8	63,2	0
10	Kepulauan Riau	65	41,5	58,5	0
11	DKI Jakarta	336	24,1	69,0	6,8
12	Jawa Barat	1031	39,2	59,5	1,4
13	Jawa Tengah	861	26,8	72,6	0,6
14	DI Yogyakarta	121	43,8	54,5	1,7
15	Jawa Timur	949	31,7	66,4	1,9
16	Banten	206	30,1	67,5	2,4
17	Bali	114	28,9	69,3	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	30,9	65,1	4,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	13,6	79,1	7,3
20	Kalimantan Barat	233	21,5	76,8	1,7
21	Kalimantan Tengah	176	7,4	86,9	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	25,8	74,2	0
23	Kalimantan Timur	213	18,8	73,7	7,5
24	Sulawesi Utara	167	12,6	87,4	0
25	Sulawesi Tengah	163	25,8	69,9	4,3
26	Sulawesi Selatan	406	24,1	73,4	2,5
27	Sulawesi Tenggara	233	15,5	82,8	1,7
28	Gorontalo	74	21,6	74,3	4,1
29	Sulawesi Barat	81	14,8	79,0	6,2
30	Maluku	161	4,3	92,5	3,1
31	Maluku Utara	101	12,9	77,2	9,9
32	Papua Barat	104	10,6	87,5	1,9
33	Papua	294	4,1	92,9	3,1
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	26,6	70,5	2,9
2	Perdesaan	6660	23,4	74,0	2,7
	INDONESIA	**8981**	**24,2**	**73,1**	**2,7**

Tabel 4.10.1.2.menunjukkan ketersediaan petugas yang dilatih pada tahun 2009 dan 2010 yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Secara nasional persentase Puskesmas yang mengikuti pelatihan terkait fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan bidang Kesehatan hanya 24,2 persen, sementara 73,1 tidak ada petugas yang dilatih. Persentase tertinggi yang ikut pelatihan di Provinsi DI Yogyakarta (43,8%), diikuti Provinsi Kep Riau (41,5%), dan Provinsi Jawa Barat (39,2%). Terendah di Provinsi Papua (4,1%), diikuti Provinsi Maluku (4,3%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (7,4%). Bila dilihat dari lokasi persentase puskesmas diperkotaan yang ada tenaga dilatih untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2009 dan tahun 2010 ada sebanyak 26,6 persen, sementara di perdesaan 23,4 persen.

Tabel 4.10.1.3 menunjukkan tentang ketersediaan pedoman, Standard Operational Procedure (SOP)/Protap Peraturan tertulis yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten atau Puskesmas berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki pedoman pemberdayaan masyarakat hanya 33,7 persen. Persentase tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (64,5%), diikuti Provinsi Jawa Timur (52,3%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (51,7%). Terendah di Provinsi Maluku (4,3%), diikuti Papua (6,5%), dan Provinsi DI Aceh (7,7%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas menurut ketersediaan pedoman pemberdayaan masyarakat di Perkotaan 37,7 persen, sementara di Perdesaan 32,3 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai SOP/Protap pemberdayaan masyarakat hanya 20,2 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Jawa Barat (37,0%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (35,6%) dan Provinsi Jawa Timur (33,5%). Terendah di Provinsi Maluku (0,6%) dan Provinsi Maluku Utara (2,0%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai SOP/Protap pemberdayaan masyarakat di Perkotaan 24,3 persen dan di Perdesaan 18,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai peraturan tertulis pemberdayaan masyarakat hanya 20,2 persen. Persentase tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (38,0%), diikuti Provinsi Jawa Barat (35,1%) dan Provinsi Jawa Timur (31,6%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai peraturan tertulis pemberdayaan masyarakat di Perkotaan 24,9 persen dan di Perdesaan 18,6 persen.

Tabel 4.10.1.3
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pedoman,SOP dan Peraturantentang Pemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pedoman			SOP/Protap			Peraturan Tertulis		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	7,7	83,0	9,3	3,5	86,2	10,3	4,2	87,1	8,7
2	Sumatera Utara	506	24,9	74,5	0,6	12,3	86,6	1,2	16,4	83,4	0,2
3	Sumatera Barat	248	34,7	64,9	0,4	17,3	81,9	0,8	17,7	81,9	0,4
4	Riau	195	29,2	67,2	3,6	22,6	72,3	5,1	20,5	75,4	4,1
5	Jambi	171	37,4	57,9	4,7	16,4	78,9	4,7	24,0	71,9	4,1
6	Sumatera Selatan	298	33,6	64,8	1,7	24,2	73,5	2,3	21,8	76,5	1,7
7	Bengkulu	173	13,9	78,6	7,5	5,8	84,4	9,8	8,1	85,0	6,9
8	Lampung	265	32,8	64,9	2,3	13,2	84,5	2,3	20,0	78,1	1,9
9	Bangka Belitung	57	36,8	63,2	0	21,1	78,9	0	24,6	75,4	0
10	Kepulauan Riau	65	36,9	63,1	0	20,0	80,0	0	15,4	84,6	0
11	DKI Jakarta	336	36,3	56,3	7,4	24,4	67,6	8,0	25,6	67,3	7,1
12	Jawa Barat	1031	49,7	48,7	1,6	37,0	61,4	1,6	35,1	63,2	1,6
13	Jawa Tengah	861	49,4	49,7	0,9	31,4	67,9	0,7	28,3	70,8	0,8
14	DI Yogyakarta	121	64,5	33,1	2,5	31,4	66,1	2,5	38,0	60,3	1,7
15	Jawa Timur	949	52,3	45,9	1,8	33,5	64,6	1,9	31,6	66,5	1,9
16	Banten	206	33,5	63,6	2,9	22,8	74,3	2,9	25,2	72,3	2,4
17	Bali	114	35,1	63,2	1,8	14,9	83,3	1,8	8,8	89,5	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	51,7	43,6	4,7	35,6	59,7	4,7	24,2	71,1	4,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	19,5	72,5	7,9	9,3	82,5	8,3	9,9	82,5	7,6
20	Kalimantan Barat	233	27,5	70,8	1,7	14,6	83,7	1,7	18,0	80,3	1,7
21	Kalimantan Tengah	176	9,7	84,1	6,3	2,8	89,8	7,4	7,4	86,4	6,3
22	Kalimantan Selatan	217	35,9	63,6	0,5	14,3	85,3	0,5	12,0	88,0	0
23	Kalimantan Timur	213	28,2	64,3	7,5	12,2	80,3	7,5	14,6	77,5	8,0
24	Sulawesi Utara	167	16,2	83,8	0	9,0	90,4	0,6	12,6	87,4	0
25	Sulawesi Tengah	163	28,2	67,5	4,3	12,9	82,2	4,9	16,0	79,1	4,9
26	Sulawesi Selatan	406	28,8	68,2	3,0	16,3	80,5	3,2	15,0	82,0	3,0
27	Sulawesi Tenggara	233	18,9	79,0	2,1	7,3	89,7	3,0	7,3	90,6	2,1
28	Gorontalo	74	20,3	75,7	4,1	8,1	87,8	4,1	16,2	79,7	4,1
29	Sulawesi Barat	81	23,5	67,9	8,6	14,8	76,5	8,6	11,1	82,7	6,2
30	Maluku	161	4,3	90,7	5,0	,6	94,4	5,0	1,2	95,0	3,7
31	Maluku Utara	101	14,9	74,3	10,9	2,0	86,1	11,9	2,0	88,1	9,9
32	Papua Barat	104	8,7	87,5	3,8	2,9	92,3	4,8	1,9	96,2	1,9
33	Papua	294	6,5	89,5	4,1	3,4	92,9	3,7	2,4	94,2	3,4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	37,7	59,2	3,1	24,3	72,4	3,3	24,9	72,0	3,1
2	Perdesaan	6660	32,3	64,5	3,1	18,3	77,8	3,5	18,6	78,6	2,9
	INDONESIA	**8981**	**33,7**	**63,1**	**3,1**	**20,2**	**76,4**	**3,4**	**20,2**	**76,9**	**2,9**

Tabel 4.10.1.4.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan
Alokasi Dana Khusus Pemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Alokasi Dana Khusus		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	3,5	87,5	9,0
2	Sumatera Utara	506	10,3	89,5	0,2
3	Sumatera Barat	248	22,2	77,4	0,4
4	Riau	195	23,6	72,8	3,6
5	Jambi	171	25,7	70,2	4,1
6	Sumatera Selatan	298	15,1	82,9	2,0
7	Bengkulu	173	10,4	82,1	7,5
8	Lampung	265	10,2	87,5	2,3
9	Bangka Belitung	57	15,8	84,2	0
10	Kepulauan Riau	65	21,5	78,5	0
11	DKI Jakarta	336	15,8	75,9	8,3
12	Jawa Barat	1031	21,0	77,3	1,6
13	Jawa Tengah	861	24,9	74,0	1,2
14	DI Yogyakarta	121	54,5	44,6	0,8
15	Jawa Timur	949	31,1	66,8	2,1
16	Banten	206	13,6	84,0	2,4
17	Bali	114	15,8	81,6	2,6
18	Nusa Tenggara Barat	149	28,2	65,8	6,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	6,3	85,4	8,3
20	Kalimantan Barat	233	19,7	78,5	1,7
21	Kalimantan Tengah	176	10,8	83,5	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	16,6	83,4	0
23	Kalimantan Timur	213	25,4	66,7	8,0
24	Sulawesi Utara	167	6,0	94,0	0
25	Sulawesi Tengah	163	11,0	84,7	4,3
26	Sulawesi Selatan	406	12,8	84,5	2,7
27	Sulawesi Tenggara	233	11,6	86,3	2,1
28	Gorontalo	74	13,5	82,4	4,1
29	Sulawesi Barat	81	4,9	88,9	6,2
30	Maluku	161	0	96,3	3,7
31	Maluku Utara	101	8,9	81,2	9,9
32	Papua Barat	104	3,8	93,3	2,9
33	Papua	294	7,1	89,1	3,7
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	20,7	75,9	3,4
2	Perdesaan	6660	16,6	80,5	3,0
	INDONESIA	**8981**	**17,6**	**79,3**	**3,1**

Tabel 4.10.1.4 menunjukkan ketersediaan alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan hanya 17,6 persen. Persentase tertinggi ada di Provinsi DIY (54,5%), diikuti Provinsi Jawa Timur (31,1%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (28,2%). Sedangkan persentase terendah ada di provinsi Maluku (0%), diikuti Provinsi DI Aceh (3,5). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Perkotaan 20,7 persen dan di Perdesaan 16,6 persen.

Tabel 4.10.1.5.a, menunjukkan keberadaan Forum Masyarakat sebagai wadah Peran serta masyarakat di bidang Kesehatan. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai Forum Masyarakat sebagai wadah Peran serta masyarakat hanya 43,4 persen. Tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (89,3%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (76,5%) dan Provinsi Jawa Barat (68,5%). Terendah Provinsi Papua (6,1%), diikuti Provinsi Maluku (7,5%) dan Provinsi Papua Barat (7,7%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai forum masyarakat sebagai wadah Peran serta masyarakat di bidang kesehatan di Perkotaan 47,8 persen dan di Perdesaan 41,9 persen.

Tabel 4.10.1.5.a
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Forum Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Forum Masyarakat		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	8,4	83,0	8,7
2	Sumatera Utara	506	20,6	79,2	0,2
3	Sumatera Barat	248	40,3	58,9	0,8
4	Riau	195	35,4	61,0	3,6
5	Jambi	171	28,7	67,3	4,1
6	Sumatera Selatan	298	37,9	59,4	2,7
7	Bengkulu	173	21,4	71,1	7,5
8	Lampung	265	46,4	51,3	2,3
9	Bangka Belitung	57	45,6	54,4	0
10	Kepulauan Riau	65	53,8	46,2	0
11	DKI Jakarta	336	43,8	48,2	8,0
12	Jawa Barat	1031	68,5	29,8	1,7
13	Jawa Tengah	861	76,5	22,3	1,2
14	DI Yogyakarta	121	89,3	9,9	0,8
15	Jawa Timur	949	64,8	33,2	2,0
16	Banten	206	52,9	43,7	3,4
17	Bali	114	40,4	57,0	2,6
18	Nusa Tenggara Barat	149	57,0	38,3	4,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	22,5	69,5	7,9
20	Kalimantan Barat	233	24,0	74,2	1,7
21	Kalimantan Tengah	176	9,7	84,7	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	35,0	65,0	0
23	Kalimantan Timur	213	27,2	65,3	7,5
24	Sulawesi Utara	167	24,6	75,4	0
25	Sulawesi Tengah	163	53,4	42,3	4,3
26	Sulawesi Selatan	406	46,6	50,2	3,2
27	Sulawesi Tenggara	233	21,9	76,0	2,1
28	Gorontalo	74	50,0	45,9	4,1
29	Sulawesi Barat	81	17,3	76,5	6,2
30	Maluku	161	7,5	88,2	4,3
31	Maluku Utara	101	12,9	77,2	9,9
32	Papua Barat	104	7,7	89,4	2,9
33	Papua	294	6,1	89,8	4,1
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	47,8	48,6	3,6
2	Perdesaan	6660	41,9	55,1	3,0
	INDONESIA	**8981**	**43,4**	**53,4**	**3,1**

Tabel 4.10.1.5.b, menunjukkan bentuk forum masyarakat yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 yaitu meliputi Badan Penyantun Puskesmas (BPP) dan Forum Kecamatan Sehat.

Tabel 4.10.1.5.b
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Forum Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Badan Penyantun Puskesmas			Forum Kecamatan Sehat		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	26	38,5	46,2	15,4	15,4	73,1	11,5
2	Sumatera Utara	104	7,7	79,8	12,5	26,9	62,5	10,6
3	Sumatera Barat	100	36,0	56,0	8,0	27,0	67,0	6,0
4	Riau	69	14,5	78,3	7,2	27,5	65,2	7,2
5	Jambi	49	22,4	63,3	14,3	24,5	61,2	14,3
6	Sumatera Selatan	113	20,4	76,1	3,5	38,1	57,5	4,4
7	Bengkulu	37	16,2	64,9	18,9	48,6	45,9	5,4
8	Lampung	123	10,6	82,9	6,5	42,3	52,0	5,7
9	Bangka Belitung	26	11,5	84,6	3,8	57,7	38,5	3,8
10	Kepulauan Riau	35	0	94,3	5,7	20,0	77,1	2,9
11	DKI Jakarta	147	10,2	74,1	15,6	28,6	57,1	14,3
12	Jawa Barat	706	14,6	81,6	3,8	43,3	53,3	3,4
13	Jawa Tengah	659	9,7	85,6	4,7	29,7	66,8	3,5
14	DI Yogyakarta	108	13,9	82,4	3,7	50,9	47,2	1,9
15	Jawa Timur	615	14,6	77,2	8,1	27,2	66,0	6,8
16	Banten	109	14,7	77,1	8,3	50,5	43,1	6,4
17	Bali	46	6,5	78,3	15,2	60,9	32,6	6,5
18	Nusa Tenggara Barat	85	8,2	72,9	18,8	36,5	50,6	12,9
19	Nusa Tenggara Timur	68	23,5	72,1	4,4	32,4	64,7	2,9
20	Kalimantan Barat	56	16,1	78,6	5,4	16,1	78,6	5,4
21	Kalimantan Tengah	17	5,9	70,6	23,5	0	76,5	23,5
22	Kalimantan Selatan	76	34,2	65,8	0	26,3	73,7	0
23	Kalimantan Timur	58	10,3	79,3	10,3	39,7	53,4	6,9
24	Sulawesi Utara	41	19,5	75,6	4,9	58,5	36,6	4,9
25	Sulawesi Tengah	87	11,5	80,5	8,0	17,2	73,6	9,2
26	Sulawesi Selatan	189	14,8	76,7	8,5	42,9	50,3	6,9
27	Sulawesi Tenggara	51	2,0	96,1	2,0	35,3	64,7	0
28	Gorontalo	37	5,4	78,4	16,2	54,1	35,1	10,8
29	Sulawesi Barat	14	7,1	92,9	0	35,7	64,3	0
30	Maluku	12	8,3	91,7	0	16,7	83,3	0
31	Maluku Utara	13	7,7	92,3	0	0	100,0	0
32	Papua Barat	8	12,5	75,0	12,5	12,5	75,0	12,5
33	Papua	18	11,1	83,3	5,6	27,8	66,7	5,6
	Lokasi							
1	Perkotaan	1110	14,1	79,1	6,8	38,4	55,9	5,8
2	Perdesaan	2792	14,0	78,9	7,2	33,1	61,2	5,7
	INDONESIA	**3902**	**14,0**	**78,9**	**7,1**	**34,6**	**59,7**	**5,7**

Secara nasional, dari 3902 Puskesmas yang menyatakan ada forum masyarakat, persentase Puskesmas menurut ketersediaan Badan Penyantun Puskesmas hanya 14,0 persen, sementara 78,9 persen tidak tersedia Badan Penyantun Puskesmas. Tertinggi di Provinsi DI Aceh (38,5%), diikuti Provinsi Sumatra Barat (36%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (34,2%). Terdapat 1 provinsi yang tidak memiliki Badan Penyantun Puskesmas yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas menurut ketersediaan Badan penyantun Puskesmas di Perkotaan 14,1 persen dan di Perdesaan 14,0 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas menurut ketersediaan forum kecamatan sehat hanya 34,6, sementara 59,7 persen tidak tersedia forum kecamatan sehat. Tertinggi di Provinsi Bali (60,9%), diikuti Provinsi Sulawesi Utara (58,5%) dan Provinsi Bangka Belitung (57,7%). Terdapat 2 provinsi yang tidak memiliki forum kecamatan sehat, yaitu Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas menurut ketersediaan forum kecamatan sehat di Perkotaan 38,4 persen dan di Perdesaan 33,1 persen.

Tabel 4.10.1.6.a-d menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan puskesmas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pertemuan Tingkat Desa, Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), Pelatihan Kader Kesehatan Baru, Pertemuan Kader Kesehatan, Pelatihan Kader Lama, Pelatihan Bagi Tokoh Masyarakat, dan Pelatihan Bagi LSM/Ormas. Kegiatan pemberdayaan masyarakat terbanyak adalah Pertemuan Kader (67,1%), diikuti Pertemuan Tingkat Desa (61,8%), Musyawarah Masyarakat Desa (60,4%), Pertemuan lintas sektor terkait (56,3%), Pelatihan Kader Lama (54,4%), Survei Mawas Diri (50%), Pelatihan Kader (48,3%), Pelatihan Kader Baru (44,0%), Pelatihan Bagi Tokoh Masyarakat (29,5%), dan Pelatihan LSM/Ormas (9,6%).

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pertemuan tingkat desa adalah 61,8%. Persentase tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (95,9%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (85,8%) dan Provinsi Jawa Barat (85,3%). Persentase terendah di Provinsi Papua (9,9%), diikuti Provinsi Papua Barat (11,5%) dan Provinsi Maluku (15,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pertemuan Tingkat Desa, di Perkotaan 63,7 persen dan di Perdesaan 61,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Survei Mawas Diri adalah 50 persen. Persentase tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (87,6%), diikuti Provinsi Jawa Timur (77,3%) dan Provinsi Jawa Tengah (73,1%). Persentase terendah di Provinsi Papua Barat (2,9%), diikuti Provinsi Papua (3,4%) dan Provinsi Maluku (5,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan survei mawas diri, di Perkotaan 51,2 persen dan di Perdesaan 49,6 persen.

Tabel 4.10.1.6.a
Persentase Puskesmas menurut KegiatanPemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pertemuan Tingkat Desa			Survei Mawas Diri		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	33,4	57,9	8,7	18,0	73,3	8,7
2	Sumatera Utara	506	50,4	49,0	0,6	35,6	63,6	0,8
3	Sumatera Barat	248	65,7	33,9	0,4	56,5	43,1	0,4
4	Riau	195	62,1	31,3	6,7	44,6	48,7	6,7
5	Jambi	171	54,4	40,9	4,7	38,6	56,7	4,7
6	Sumatera Selatan	298	58,1	39,3	2,7	46,3	51,0	2,7
7	Bengkulu	173	46,2	45,7	8,1	29,5	62,4	8,1
8	Lampung	265	71,3	26,4	2,3	63,4	34,0	2,6
9	Bangka Belitung	57	73,7	26,3	0	63,2	36,8	0
10	Kepulauan Riau	65	78,5	21,5	0	70,8	29,2	0
11	DKI Jakarta	336	56,3	35,7	8,0	45,8	46,1	8,0
12	Jawa Barat	1031	85,3	13,0	1,7	71,9	26,4	1,7
13	Jawa Tengah	861	85,8	13,0	1,2	73,1	25,9	1,0
14	DI Yogyakarta	121	95,9	3,3	0,8	87,6	11,6	0,8
15	Jawa Timur	949	83,5	14,9	1,7	77,3	20,9	1,8
16	Banten	206	80,6	16,5	2,9	68,9	28,2	2,9
17	Bali	114	76,3	21,9	1,8	64,9	33,3	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	77,2	18,1	4,7	67,8	27,5	4,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	42,4	49,7	7,9	21,5	70,5	7,9
20	Kalimantan Barat	233	45,9	51,5	2,6	32,2	65,2	2,6
21	Kalimantan Tengah	176	23,3	70,5	6,3	17,0	77,3	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	66,4	33,2	0,5	53,5	46,5	0
23	Kalimantan Timur	213	46,0	46,0	8,0	19,2	72,8	8,0
24	Sulawesi Utara	167	46,1	53,9	0	27,5	72,5	0
25	Sulawesi Tengah	163	62,0	33,7	4,3	52,1	43,6	4,3
26	Sulawesi Selatan	406	57,6	37,7	4,7	53,9	41,1	4,9
27	Sulawesi Tenggara	233	38,2	59,7	2,1	30,5	67,4	2,1
28	Gorontalo	74	60,8	35,1	4,1	45,9	50,0	4,1
29	Sulawesi Barat	81	45,7	48,1	6,2	27,2	66,7	6,2
30	Maluku	161	15,5	79,5	5,0	5,6	88,8	5,6
31	Maluku Utara	101	30,7	58,4	10,9	17,8	71,3	10,9
32	Papua Barat	104	11,5	84,6	3,8	2,9	93,3	3,8
33	Papua	294	9,9	86,7	3,4	3,4	93,2	3,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	63,7	32,9	3,4	51,2	45,4	3,4
2	Perdesaan	6660	61,2	35,6	3,3	49,6	47,1	3,3
	INDONESIA	**8981**	**61,8**	**34,9**	**3,3**	**50,0**	**46,6**	**3,3**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan musyawarah masyarakat desa adalah 60,4. Persentase tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (90,1%), diikuti Provinsi Jawa Timur (85,6%) dan Provinsi Jawa Barat (82,4%). Persentase terendah di Provinsi Papua (8,2%), diikuti Provinsi Maluku (11,8%) dan Provinsi Papua Barat (12,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan musyawarah masyarakat desa, di Perkotaan 60,0 persen dan di Perdesaan 60,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan pelatihan kader kesehatan baru adalah 44,0%. Persentase tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (64,5%), diikuti Provinsi Jawa Timur (60,1%) dan ProvinsiBangka Belitung (59,6%). Persentase terendah di Provinsi Maluku (13%), diikuti Provinsi Papua Barat (16,3%) dan Provinsi Papua (18%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmasyang melaksanakan kegiatan pelatihan kader kesehatan, di Perkotaan 50,1 persen dan di Perdesaan 41,9 persen.

Tabel 4.10.1.6.b
Persentase Puskesmas Menurut KegiatanPemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Musyawarah Masyarakat Desa			Pelatihan Kader Kesehatan Baru		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	31,8	59,5	8,7	23,2	68,2	8,7
2	Sumatera Utara	506	51,0	48,4	0,6	40,7	58,3	1,0
3	Sumatera Barat	248	65,3	34,3	0,4	44,4	55,2	0,4
4	Riau	195	59,0	34,4	6,7	48,2	45,1	6,7
5	Jambi	171	53,8	41,5	4,7	42,7	52,6	4,7
6	Sumatera Selatan	298	58,4	38,9	2,7	50,3	47,0	2,7
7	Bengkulu	173	42,2	49,7	8,1	26,0	65,9	8,1
8	Lampung	265	70,2	27,5	2,3	46,8	50,6	2,6
9	Bangka Belitung	57	77,2	22,8	0	59,6	40,4	0
10	Kepulauan Riau	65	80,0	20,0	0	50,8	49,2	0
11	DKI Jakarta	336	56,3	35,7	8,0	48,8	43,2	8,0
12	Jawa Barat	1031	82,4	15,8	1,7	56,2	42,1	1,7
13	Jawa Tengah	861	82,0	17,0	1,0	55,7	43,2	1,0
14	DI Yogyakarta	121	90,1	9,1	0,8	64,5	34,7	0,8
15	Jawa Timur	949	85,6	12,6	1,8	60,1	38,1	1,8
16	Banten	206	77,7	19,4	2,9	55,8	41,3	2,9
17	Bali	114	75,4	22,8	1,8	41,2	57,0	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	80,5	14,8	4,7	56,4	38,9	4,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	36,8	55,0	8,3	24,2	67,5	8,3
20	Kalimantan Barat	233	42,5	54,9	2,6	40,3	57,1	2,6
21	Kalimantan Tengah	176	23,3	71,0	5,7	19,3	75,0	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	60,8	39,2	0	50,7	49,3	0
23	Kalimantan Timur	213	35,2	56,8	8,0	39,4	52,6	8,0
24	Sulawesi Utara	167	49,1	50,9	0	31,1	68,9	0
25	Sulawesi Tengah	163	59,5	36,2	4,3	37,4	58,3	4,3
26	Sulawesi Selatan	406	59,1	36,2	4,7	40,9	54,4	4,7
27	Sulawesi Tenggara	233	39,1	58,8	2,1	27,0	70,8	2,1
28	Gorontalo	74	66,2	29,7	4,1	35,1	60,8	4,1
29	Sulawesi Barat	81	43,2	50,6	6,2	27,2	66,7	6,2
30	Maluku	161	11,8	82,6	5,6	13,0	80,7	6,2
31	Maluku Utara	101	26,7	62,4	10,9	18,8	70,3	10,9
32	Papua Barat	104	12,5	83,7	3,8	16,3	79,8	3,8
33	Papua	294	8,2	88,4	3,4	18,0	78,6	3,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	60,0	36,5	3,5	50,1	46,3	3,6
2	Perdesaan	6660	60,5	36,2	3,3	41,9	54,8	3,3
	INDONESIA	**8981**	**60,4**	**36,3**	**3,3**	**44,0**	**52,6**	**3,4**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pertemuan kader kesehatan adalah 67,1%. Persentase tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (95,9%), diikuti Provinsi Jawa Timur (89,9%) dan Provinsi Jawa Tengah (89,4%). Persentase terendah di Provinsi Papua (25,2%), diikuti Provinsi Maluku (26,1%) dan Provinsi Papua Barat (26,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pertemuan kader kesehatan, di Perkotaan 73,9 persen dan di Perdesaan 64,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelatihan kader lama adalah 54,4%. Persentase tertinggi di Provinsi Banten (80,6%), diikuti Provinsi DI Yogyakarta (80,2%) dan Provinsi Jawa Tengah (77,4%). Persentase terendah di Provinsi Maluku (18,6%), Provinsi Papua (19%), dan Provinsi Kalimantan Tengah (20,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelatihan kader lama, di Perkotaan 62,1 persen dan di Perdesaan 51,8 persen.

Tabel 4.10.1.6.c
Persentase Puskesmas menurut KegiatanPemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pertemuan Kader Kesehatan			Pelatihan Kader Lama		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	43,1	48,2	8,7	25,4	65,9	8,7
2	Sumatera Utara	506	55,9	43,1	1,0	42,5	56,5	1,0
3	Sumatera Barat	248	72,2	27,4	0,4	50,8	48,8	0,4
4	Riau	195	63,1	29,7	7,2	56,9	36,9	6,2
5	Jambi	171	56,1	39,2	4,7	46,2	49,1	4,7
6	Sumatera Selatan	298	66,1	31,5	2,3	56,0	41,3	2,7
7	Bengkulu	173	40,5	51,4	8,1	27,2	64,7	8,1
8	Lampung	265	72,1	25,3	2,6	62,3	35,5	2,3
9	Bangka Belitung	57	86,0	14,0	0	66,7	33,3	0
10	Kepulauan Riau	65	72,3	27,7	0	58,5	41,5	0
11	DKI Jakarta	336	70,2	21,7	8,0	57,1	34,8	8,0
12	Jawa Barat	1031	87,2	11,1	1,7	68,8	29,5	1,7
13	Jawa Tengah	861	89,4	9,5	1,0	77,4	21,7	0,9
14	DI Yogyakarta	121	95,9	3,3	0,8	80,2	19,0	0,8
15	Jawa Timur	949	89,9	8,4	1,7	74,6	23,7	1,7
16	Banten	206	84,0	13,1	2,9	80,6	16,5	2,9
17	Bali	114	64,9	33,3	1,8	44,7	53,5	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	67,8	27,5	4,7	59,7	35,6	4,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	46,7	44,7	8,6	39,4	52,0	8,6
20	Kalimantan Barat	233	58,8	38,6	2,6	54,9	42,9	2,1
21	Kalimantan Tengah	176	28,4	65,9	5,7	20,5	73,9	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	72,8	27,2	0	60,4	39,6	0
23	Kalimantan Timur	213	64,8	27,2	8,0	52,6	39,4	8,0
24	Sulawesi Utara	167	65,3	34,7	0	48,5	51,5	0
25	Sulawesi Tengah	163	54,0	41,7	4,3	38,0	57,7	4,3
26	Sulawesi Selatan	406	59,1	36,2	4,7	48,0	47,5	4,4
27	Sulawesi Tenggara	233	43,3	54,5	2,1	33,5	64,4	2,1
28	Gorontalo	74	75,7	20,3	4,1	63,5	31,1	5,4
29	Sulawesi Barat	81	44,4	49,4	6,2	23,5	70,4	6,2
30	Maluku	161	26,1	68,9	5,0	18,6	76,4	5,0
31	Maluku Utara	101	38,6	50,5	10,9	28,7	60,4	10,9
32	Papua Barat	104	26,9	69,2	3,8	21,2	75,0	3,8
33	Papua	294	25,2	71,4	3,4	19,0	77,6	3,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	73,9	22,7	3,4	62,1	34,5	3,4
2	Perdesaan	6660	64,8	31,9	3,3	51,8	45,0	3,2
	INDONESIA	**8981**	**67,1**	**29,5**	**3,3**	**54,4**	**42,3**	**3,3**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelatihan bagi tokoh masyarakat hanya 29,5 persen. Persentase tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (61,2%), diikuti Provinsi Banten (51,5%), dan Provinsi Jawa Barat (48,9%). Persentase terendah di Provinsi Kalimantan Tengah (2,8%), diikuti Provinsi Papua Barat (2,9%) dan Provinsi Maluku (3,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelatihan kader lama, di Perkotaan 31,3 persen dan di Perdesaan 28,9 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelatihan bagi LSM/Ormas hanya 9,6 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (21,1%), diikuti Provinsi Banten (19,4%) dan Provinsi Jawa Barat (19,1%). Persentase terendah di Provinsi Kalimantan Tengah dan Maluku (0,6%) diikuti Provinsi Papua Barat (1%) dan Provinsi Papua (1,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelatihan bagi LSM/Ormas, di Perkotaan 12,0 persen dan di Perdesaan 8,7 persen.

Tabel 4.10.1.6.d
Persentase Puskesmas menurut KegiatanPemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan Bagi Tokoh Masyarakat			Pelatihan Bagi LSM/Ormas		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	11,6	79,7	8,7	2,3	89,1	8,7
2	Sumatera Utara	506	18,2	80,8	1,0	2,4	96,6	1,0
3	Sumatera Barat	248	24,2	75,4	0,4	9,3	90,3	0,4
4	Riau	195	30,8	63,1	6,2	6,7	87,2	6,2
5	Jambi	171	26,3	69,0	4,7	4,7	90,6	4,7
6	Sumatera Selatan	298	30,5	66,4	3,0	5,7	91,3	3,0
7	Bengkulu	173	13,9	78,0	8,1	1,7	90,2	8,1
8	Lampung	265	38,1	59,2	2,6	10,2	87,2	2,6
9	Bangka Belitung	57	35,1	64,9	0	21,1	78,9	0
10	Kepulauan Riau	65	26,2	73,8	0	3,1	96,9	0
11	DKI Jakarta	336	35,4	56,5	8,0	15,5	76,5	8,0
12	Jawa Barat	1031	48,9	49,4	1,7	19,1	79,0	1,8
13	Jawa Tengah	861	44,5	54,5	1,0	13,8	85,1	1,0
14	DI Yogyakarta	121	61,2	38,0	0,8	15,7	82,6	1,7
15	Jawa Timur	949	42,8	55,4	1,8	15,7	82,4	1,9
16	Banten	206	51,5	45,6	2,9	19,4	77,7	2,9
17	Bali	114	14,9	83,3	1,8	1,8	96,5	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	33,6	61,7	4,7	8,1	87,2	4,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	10,6	80,8	8,6	4,0	86,8	9,3
20	Kalimantan Barat	233	12,9	84,5	2,6	3,9	93,6	2,6
21	Kalimantan Tengah	176	2,8	91,5	5,7	0,6	93,8	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	31,3	68,7	0	8,3	91,2	0,5
23	Kalimantan Timur	213	16,0	76,1	8,0	6,6	85,4	8,0
24	Sulawesi Utara	167	18,6	81,4	0	10,2	89,8	0
25	Sulawesi Tengah	163	31,9	63,8	4,3	7,4	88,3	4,3
26	Sulawesi Selatan	406	27,1	68,5	4,4	8,4	87,2	4,4
27	Sulawesi Tenggara	233	10,7	87,1	2,1	3,4	94,4	2,1
28	Gorontalo	74	13,5	81,1	5,4	5,4	87,8	6,8
29	Sulawesi Barat	81	8,6	85,2	6,2	7,4	86,4	6,2
30	Maluku	161	3,7	90,7	5,6	0,6	93,8	5,6
31	Maluku Utara	101	14,9	74,3	10,9	4,0	85,1	10,9
32	Papua Barat	104	2,9	93,3	3,8	1,0	95,2	3,8
33	Papua	294	5,4	91,2	3,4	1,7	94,6	3,7
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	31,3	65,1	3,5	12,0	84,4	3,6
2	Perdesaan	6660	28,9	67,8	3,3	8,7	87,9	3,4
	INDONESIA	**8981**	**29,5**	**67,1**	**3,4**	**9,6**	**87,0**	**3,5**

Tabel 4.10.1.7 menunjukkan pembinaan dan pemantauan kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dilakukan petugas puskesmas berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Pembinaan dan pemantauan yang dilakukan dapat berupa pemberian umpan balik laporan kegiatan, melakukan supervisi kegiatan dan mengadakan pertemuan pembinaan. Pembinaan dan pemantauan yang sering dilakukan petugas puskesmas adalah melakukan pertemuan pembinaan sebesar 57,9 persen, diikuti melaksanakan supervisi sebesar 54,4 persen, dan memberikan umpan balik laporan kegiatan sebesar 44,1 persen.

Secara nasional Persentase Puskesmas yang memberikan umpan balik laporan kegiatan sebesar 44,1 persen. Persentase tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (86%), diikuti Provinsi Jawa Barat (69,7%) dan Provinsi Jawa Timur (64%). Persentase terendah di Provinsi Papua Barat (8,7%), Provinsi Kalimantan Tengah (9,7%), dan Provinsi Papua (9,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memberikan umpan balik laporan kegiatan di Perkotaan 52,3 persen dan di Perdesaan 41,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melakukan supervisi adalah 54,4 persen,. Persentase tertinggidi Provinsi DI Yogyakarta (93,4%), diikuti Provinsi Jawa Timur (79,3%), dan Provinsi Jawa Barat (74,8%). Terendah di Provinsi Papua (7,5%), diikuti Provinsi Papua Barat (10,6%) dan Provinsi Maluku (14,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang melakukan supervisi, di Perkotaan 61,2 persen dan di Perdesaan 52,0 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang melakukan pertemuan pembinaan adalah 57,9 persen. Persentase tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (95,9%), diikuti Provinsi Jawa Timur (82,6%) dan Provinsi Jawa Tengah (81,5%). Persentase terendah di Provinsi Papua (12,2%), diikuti Provinsi Papua Barat (12,5%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (20,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang melakukan pertemuan pembinaan di Perkotaan 65 persen dan di Perdesaan 55,4 persen.

Tabel 4.10.1.7
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan UKBM, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Umpan Balik			Supervisi			Pertemuan Pembinaan		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	11,9	79,1	9,0	22,2	68,8	9,0	21,5	69,5	9,0
2	Sumatera Utara	506	26,9	71,5	1,6	40,1	58,5	1,4	45,8	52,6	1,6
3	Sumatera Barat	248	49,2	50,4	0,4	62,1	37,5	0,4	59,3	40,3	0,4
4	Riau	195	49,7	43,1	7,2	54,9	37,9	7,2	59,0	34,9	6,2
5	Jambi	171	36,8	58,5	4,7	55,6	39,8	4,7	58,5	36,3	5,3
6	Sumatera Selatan	298	48,7	49,0	2,3	57,7	39,9	2,3	59,4	38,6	2,0
7	Bengkulu	173	25,4	65,9	8,7	30,6	60,7	8,7	32,9	58,4	8,7
8	Lampung	265	42,6	55,1	2,3	57,4	40,4	2,3	67,2	30,6	2,3
9	Bangka Belitung	57	52,6	47,4	0	71,9	28,1	0	64,9	35,1	0
10	Kepulauan Riau	65	38,5	61,5	0	56,9	43,1	0	63,1	36,9	0
11	DKI Jakarta	336	54,8	36,3	8,9	57,1	33,9	8,9	63,4	27,7	8,9
12	Jawa Barat	1031	69,7	28,5	1,7	74,8	23,5	1,7	78,1	20,2	1,7
13	Jawa Tengah	861	55,2	43,8	1,0	70,8	28,1	1,0	81,5	17,5	0,9
14	DI Yogyakarta	121	86,0	13,2	0,8	93,4	5,8	0,8	95,9	3,3	0,8
15	Jawa Timur	949	64,0	34,4	1,7	79,3	19,0	1,7	82,6	15,7	1,7
16	Banten	206	63,1	34,0	2,9	71,8	25,2	2,9	73,3	23,8	2,9
17	Bali	114	44,7	53,5	1,8	67,5	30,7	1,8	59,6	38,6	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	50,3	44,3	5,4	64,4	30,2	5,4	58,4	36,9	4,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	27,8	64,2	7,9	35,1	57,0	7,9	36,4	55,3	8,3
20	Kalimantan Barat	233	36,1	61,8	2,1	45,1	52,8	2,1	51,1	46,8	2,1
21	Kalimantan Tengah	176	9,7	84,7	5,7	19,9	74,4	5,7	20,5	73,3	6,3
22	Kalimantan Selatan	217	41,0	59,0	0	53,5	46,5	0	55,3	44,7	0
23	Kalimantan Timur	213	31,5	60,6	8,0	38,5	53,5	8,0	44,6	47,4	8,0
24	Sulawesi Utara	167	34,1	65,9	0	41,9	58,1	0	44,3	55,7	0
25	Sulawesi Tengah	163	28,2	67,5	4,3	55,8	39,9	4,3	52,8	42,9	4,3
26	Sulawesi Selatan	406	42,1	53,2	4,7	52,2	43,1	4,7	54,9	40,6	4,4
27	Sulawesi Tenggara	233	26,2	71,7	2,1	32,6	65,2	2,1	32,6	65,2	2,1
28	Gorontalo	74	32,4	63,5	4,1	41,9	54,1	4,1	50,0	45,9	4,1
29	Sulawesi Barat	81	39,5	53,1	7,4	46,9	45,7	7,4	42,0	50,6	7,4
30	Maluku	161	9,9	85,1	5,0	14,9	80,1	5,0	20,5	74,5	5,0
31	Maluku Utara	101	15,8	73,3	10,9	21,8	67,3	10,9	26,7	62,4	10,9
32	Papua Barat	104	8,7	86,5	4,8	10,6	84,6	4,8	12,5	82,7	4,8
33	Papua	294	9,9	86,4	3,7	7,5	88,8	3,7	12,2	83,7	4,1
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	52,3	44,2	3,6	61,2	35,2	3,6	65,0	31,3	3,7
2	Perdesaan	6660	41,2	55,4	3,4	52,0	44,6	3,4	55,4	41,3	3,3
	INDONESIA	**8981**	**44,1**	**52,5**	**3,4**	**54,4**	**42,2**	**3,4**	**57,9**	**38,7**	**3,4**

Tabel 4.10.1.8 menunjukkan kondisi input dan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Input dikategorikan baik bila tersedia sumber daya tenaga, pedoman dan dana khusus. Sedangkan proses dikategorikan baik bila ada kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, pelatihan kader kesehatan baru dan lama.

Secara nasional persentase puskesmas dengan kondisi input pemberdayaan masyarakat yang baik hanya 6,5 persen, sementara kondisi proses 40,9 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas dengan kondisi input pemberdayaan masyarakat yang baik hanya 6,5 persen. Provinsi dengan presentase puskesmas tertinggi mempunyai Input pemberdayaan Masyarakat yang baik adalah di Provinsi DI Yogyakarta (17,4%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (14,1%) dan Provinsi Jambi (12,9%). Terdapat 2 provinsi yang tidak ada input yang baik untuk pemberdayaan masyarakatnya yaitu Maluku dan Maluku Utara. Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas dengan input pemberdayaan masyarakat yang baik, di Perkotaan 8 persen dan di Perdesaan 5,9 persen.

Secara nasional persentase Puskesmas dengan proses yang baik dalam pemberdayaan masyarakat hanya 40,9 persen. Persentase puskesmas tertinggi dengan proses pemberdayaan masyarakat yang baik adalah di Provinsi DI Yogyakarta (75,2%), diikuti Provinsi Jawa Timur (67,4%) dan Provinsi Jawa Tengah (63,8%), sedang persentase terendah adalah di provinsi Papua Barat (1%), serta provinsi Provinsi Papua (2%). Berdasarkan lokasi persentase puskesmas dengan proses pemberdayaan masyarakat yang baik, di Perkotaan 42,5 persen dan di Perdesaan 40,3 persen.

Tabel 4.10.1.8
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Input dan Proses Pemberdayaan Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Input			Proses		
			% Baik	% Tidak Baik	% TAD	% Baik	% Tidak Baik	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	1,6	89,7	8,7	11,6	79,7	8,7
2	Sumatera Utara	506	2,4	97,4	0,2	27,7	71,7	0,6
3	Sumatera Barat	248	8,5	91,1	0,4	44,0	55,6	0,4
4	Riau	195	8,7	87,7	3,6	37,4	55,9	6,7
5	Jambi	171	12,9	83,0	4,1	29,2	66,1	4,7
6	Sumatera Selatan	298	6,7	91,6	1,7	40,9	56,4	2,7
7	Bengkulu	173	2,9	90,2	6,9	18,5	73,4	8,1
8	Lampung	265	2,6	97,0	0,4	53,6	44,2	2,3
9	Bangka Belitung	57	5,3	94,7	0	54,4	45,6	0
10	Kepulauan Riau	65	9,2	90,8	0	44,6	55,4	0
11	DKI Jakarta	336	8,0	85,4	6,5	38,4	53,6	8,0
12	Jawa Barat	1031	11,0	87,8	1,3	60,7	37,5	1,7
13	Jawa Tengah	861	7,7	91,8	0,6	63,8	35,2	1,0
14	DI Yogyakarta	121	17,4	81,8	0,8	75,2	24,0	0,8
15	Jawa Timur	949	10,4	88,3	1,3	67,4	30,9	1,7
16	Banten	206	5,3	92,2	2,4	60,2	36,9	2,9
17	Bali	114	3,5	94,7	1,8	43,0	55,3	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	14,1	82,6	3,4	57,0	38,3	4,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	3,3	90,1	6,6	15,6	76,5	7,9
20	Kalimantan Barat	233	6,9	91,8	1,3	24,9	72,5	2,6
21	Kalimantan Tengah	176	3,4	90,9	5,7	10,2	84,1	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	5,1	94,9	0	41,0	59,0	0
23	Kalimantan Timur	213	8,0	85,0	7,0	16,0	76,1	8,0
24	Sulawesi Utara	167	2,4	97,6	0	21,0	79,0	0
25	Sulawesi Tengah	163	2,5	94,5	3,1	36,8	58,9	4,3
26	Sulawesi Selatan	406	4,9	92,6	2,5	38,2	57,1	4,7
27	Sulawesi Tenggara	233	2,6	95,7	1,7	19,3	78,5	2,1
28	Gorontalo	74	2,7	93,2	4,1	39,2	56,8	4,1
29	Sulawesi Barat	81	2,5	92,6	4,9	21,0	72,8	6,2
30	Maluku	161	0	96,9	3,1	3,7	90,7	5,6
31	Maluku Utara	101	0	90,1	9,9	11,9	77,2	10,9
32	Papua Barat	104	1,0	97,1	1,9	1,0	95,2	3,8
33	Papua	294	0,7	96,3	3,1	2,0	94,6	3,4
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	8,0	89,3	2,8	42,5	54,0	3,4
2	Perdesaan	6660	5,9	91,6	2,4	40,3	56,5	3,2
	INDONESIA	**8981**	**6,5**	**91,0**	**2,5**	**40,9**	**55,9**	**3,3**

4.10.2. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Tabel 4.10.2.a, Tabel 4.10.2.b, dan Tabel 4.10.2.c menunjukkan keberadaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. UKBM yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pos Pelayanan terpadu (Posyandu), Pos Pelayanan terpadu bagi lanjut usia (Posyandu Lansia), Pos Obat desa (POD)/Warung Obat Desa (WOD), Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan pesantren (Poskestren), Dana Sehat, Kelompok Peduli Lansia, Kelompok Peduli HIV-AIDS dan Kelompok Peduli TB Paru. Secara nasional, persentase keberadaan UKBM yang terbanyak adalah Posyandu (97,5%), diikuti Posyandu Lansia (78,8%), Poskestren (32,1%), Dana Sehat (30,2%), Peduli Lansia (25,5%), TB Paru (20,4%), POD/WOD (15,3%) dan Peduli HIV-AIDS (12,9%).

Secara nasional persentase Puskesmas yang ada Posyandu adalah 97,5 persen,. Terdapat 14 provinsi dari 33 provinsi yang seluruh puskesmasnya mempunyai Posyandu (100%). Provinsi dengan persentase Puskesmas terendahyang ada posyandu adalah di Provinsi Papua 77,5%, Provinsi Sulawesi Barat 83,3 persen dan Provinsi Bengkulu 91,7 persen. Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang ada Posyandu, di Perkotaan 97,4 persen dan di Perdesaan 97,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmasyang ada Posyandu Lansia adalah 78,8 persen. Provinsi dengan persentase Puskesmas tertinggiyang ada Posyandu Lansia adalah di Provinsi DIYogyakarta (100%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (97,1%) dan Provinsi Jawa Timur (95,2%). Sedangpersentase puskesmas terendahyang ada Posyandu Lansia adalah di Provinsi Papua (15%), Provinsi Papua Barat (18,2%), dan Provinsi Sulawesi Barat (22,2%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang ada Posyandu Lansia, di Perkotaan 80,9 persen dan di Perdesaan 78,3 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang ada Pos Obat Desa (POD) dan Warung Obat Desa (WOD) hanya 15,3 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah di Provinsi Maluku Utara (46,7%), diikuti Provinsi Kalimantan Selatan (41,9%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (30,9%). Terdapat 3 provinsi dari 33 provinsi yang tidak ada POD/WOD (0%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang ada POD/WOD, di Perkotaan 13,9 persen dan di Perdesaan 15,7 persen.

Tabel 4.10.2.a
Persentase Puskesmas menurutKeberadaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Posyandu			Posyandu Lansia			POD/ WOD		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	93,6	0	6,4	36,2	57,4	6,4	4,3	89,4	6,4
2	Sumatera Utara	506	95,6	4,4	0	82,4	17,6	0	8,8	91,2	0
3	Sumatera Barat	248	98,3	1,7	0	88,3	11,7	0	3,3	96,7	0
4	Riau	195	93,3	3,3	3,3	80,0	16,7	3,3	20,0	76,7	3,3
5	Jambi	171	100,0	0	0	82,1	17,9	0	25,6	74,4	0
6	Sumatera Selatan	298	98,0	0	2,0	88,0	10,0	2,0	20,0	78,0	2,0
7	Bengkulu	173	91,7	0	8,3	70,8	20,8	8,3	25,0	66,7	8,3
8	Lampung	265	100,0	0	0	81,0	19,0	0	21,4	78,6	0
9	Bangka Belitung	57	100,0	0	0	62,5	37,5	0	0	100,0	0
10	Kepulauan Riau	65	100,0	0	0	86,4	13,6	0	18,2	81,8	0
11	DKI Jakarta	336	94,4	2,8	2,8	77,8	19,4	2,8	0	97,2	2,8
12	Jawa Barat	1031	98,0	0,7	1,4	82,4	16,2	1,4	20,3	78,4	1,4
13	Jawa Tengah	861	99,4	0	0,6	97,1	2,4	0,6	21,8	77,1	1,2
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0	0	100,0	0	0	10,7	89,3	0
15	Jawa Timur	949	98,8	0,4	0,8	95,2	4,0	0,8	11,6	87,6	0,8
16	Banten	206	95,8	2,1	2,1	79,2	18,8	2,1	14,6	83,3	2,1
17	Bali	114	100,0	0	0	86,7	13,3	0	3,3	96,7	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	98,2	1,8	0	83,9	16,1	0	26,8	73,2	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	100,0	0	0	66,7	33,3	0	13,6	86,4	0
20	Kalimantan Barat	233	100,0	0	0	78,1	21,9	0	6,3	93,8	0
21	Kalimantan Tengah	176	100,0	0	0	61,5	38,5	0	7,7	92,3	0
22	Kalimantan Selatan	217	100,0	0	0	90,3	9,7	0	41,9	58,1	0
23	Kalimantan Timur	213	95,3	0	4,70	81,4	14,0	4,7	14,0	81,4	4,7
24	Sulawesi Utara	167	100,0	0	0	76,9	23,1	0	7,7	92,3	0
25	Sulawesi Tengah	163	98,2	0	1,8	72,7	25,5	1,8	30,9	65,5	3,6
26	Sulawesi Selatan	406	100,0	0	0	65,8	34,2	0	6,3	93,7	0
27	Sulawesi Tenggara	233	97,6	2,4	0	47,6	52,4	0	9,5	90,5	0
28	Gorontalo	74	94,4	5,6	0	50,0	50,0	0	16,7	83,3	0
29	Sulawesi Barat	81	83,3	16,7	0	22,2	77,8	0	5,6	94,4	0
30	Maluku	161	94,1	5,9	0	82,4	17,6	0	0	100,0	0
31	Maluku Utara	101	100,0	0	0	80,0	20,0	0	46,7	53,3	0
32	Papua Barat	104	100,0	0	0	18,2	81,8	0	18,2	81,8	0
33	Papua	294	77,5	20,0	2,5	15,0	82,5	2,5	15,0	82,5	2,5
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	97,4	1,4	1,2	80,9	18,0	1,2	13,9	84,9	1,2
2	Perdesaan	6660	97,5	1,4	1,1	78,3	20,7	1,1	15,7	83,1	1,2
	INDONESIA	**8981**	**97,5**	**1,4**	**1,1**	**78,8**	**20,1**	**1,1**	**15,3**	**83,5**	**1,2**

Tabel 4.10.2.b
Persentase Puskesmas menurutKeberadaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	SBH			Poskestren			Dana Sehat		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	2,1	91,5	6,4	36,2	57,4	6,4	14,9	78,7	6,4
2	Sumatera Utara	506	8,8	91,2	0	8,8	91,2	0	16,2	83,8	0
3	Sumatera Barat	248	23,3	76,7	0	48,3	51,7	0	31,7	68,3	0
4	Riau	195	26,7	70,0	3,3	23,3	73,3	3,3	33,3	60,0	6,7
5	Jambi	171	2,6	97,4	0	48,7	51,3	0	46,2	53,8	0
6	Sumatera Selatan	298	14,0	84,0	2,0	22,0	76,0	2,0	28,0	70,0	2,0
7	Bengkulu	173	8,3	83,3	8,3	20,8	70,8	8,3	25,0	66,7	8,3
8	Lampung	265	52,4	47,6	0	66,7	33,3	0	28,6	71,4	0
9	Bangka Belitung	57	12,5	87,5	0	25,0	75,0	0	50,0	50,0	0
10	Kepulauan Riau	65	22,7	77,3	0	0	100,0	0	22,7	77,3	0
11	DKI Jakarta	336	19,4	77,8	2,8	16,7	80,6	2,8	47,2	50,0	2,8
12	Jawa Barat	1031	32,4	66,2	1,4	41,2	57,4	1,4	38,5	60,1	1,4
13	Jawa Tengah	861	43,5	55,3	1,2	54,7	44,7	0,6	40,0	59,4	0,6
14	DI Yogyakarta	121	14,3	85,7	0	42,9	57,1	0	57,1	42,9	0
15	Jawa Timur	949	41,8	57,4	0,8	50,2	49,0	0,8	37,3	61,8	0,8
16	Banten	206	43,8	54,2	2,1	54,2	43,8	2,1	43,8	54,2	2,1
17	Bali	114	20,0	80,0	0	0	100,0	0	10,0	90,0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	23,2	76,8	0	53,6	46,4	0	32,1	67,9	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	0	100,0	0	0	100,0	0	18,2	81,8	0
20	Kalimantan Barat	233	6,3	93,8	0	15,6	84,4	0	18,8	81,3	0
21	Kalimantan Tengah	176	7,7	92,3	0	3,8	96,2	0	11,5	88,5	0
22	Kalimantan Selatan	217	19,4	80,6	0	32,3	67,7	0	29,0	71,0	0
23	Kalimantan Timur	213	18,6	76,7	4,7	11,6	83,7	4,7	16,3	79,1	4,7
24	Sulawesi Utara	167	0	100,0	0	0	100,0	0	38,5	61,5	0
25	Sulawesi Tengah	163	9,1	87,3	3,6	14,5	81,8	3,6	38,2	58,2	3,6
26	Sulawesi Selatan	406	13,9	86,1	0	27,8	72,2	0	16,5	83,5	0
27	Sulawesi Tenggara	233	16,7	83,3	0	16,7	83,3	0	23,8	76,2	0
28	Gorontalo	74	22,2	77,8	0	11,1	88,9	0	5,6	94,4	0
29	Sulawesi Barat	81	5,6	94,4	0	5,6	94,4	0	22,2	77,8	0
30	Maluku	161	0	100,0	0	0	100,0	0	11,8	88,2	0
31	Maluku Utara	101	0	100,0	0	0	100,0	0	46,7	53,3	0
32	Papua Barat	104	0	100,0	0	0	100,0	0	0	100,0	0
33	Papua	294	0	97,5	2,5	0	97,5	2,5	2,5	95,0	2,5
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	15,9	82,9	1,2	27,5	71,3	1,2	30,1	68,7	1,2
2	Perdesaan	6660	25,2	73,6	1,2	33,3	65,5	1,1	30,2	68,6	1,2
	INDONESIA	**8981**	**23,3**	**75,5**	**1,2**	**32,1**	**66,7**	**1,1**	**30,2**	**68,6**	**1,2**

Tabel 4.10.2.c
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Peduli Lansia			Peduli HIV-AIDS			Peduli TB Paru		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	8,5	85,1	6,4	6,4	87,2	6,4	14,9	78,7	6,4
2	Sumatera Utara	506	22,1	76,5	1,5	8,8	89,7	1,5	14,7	83,8	1,5
3	Sumatera Barat	248	31,7	68,3	0	3,3	95,0	1,7	20,0	78,3	1,7
4	Riau	195	30,0	60,0	10,0	10,0	80,0	10,0	23,3	70,0	6,7
5	Jambi	171	25,6	74,4	0	15,4	84,6	0	23,1	76,9	0
6	Sumatera Selatan	298	44,0	52,0	4,0	20,0	76,0	4,0	36,0	60,0	4,0
7	Bengkulu	173	12,5	75,0	12,5	4,2	83,3	12,5	16,7	70,8	12,5
8	Lampung	265	21,4	78,6	0	9,5	90,5	0	23,8	76,2	0
9	Bangka Belitung	57	25,0	75,0	0	0	100,0	0	12,5	87,5	0
10	Kepulauan Riau	65	9,1	90,9	0	0	100,0	0	0	100,0	0
11	DKI Jakarta	336	41,7	52,8	5,6	44,4	50,0	5,6	38,9	58,3	2,8
12	Jawa Barat	1031	33,1	65,5	1,4	22,3	76,4	1,4	28,4	70,3	1,4
13	Jawa Tengah	861	32,9	65,9	1,2	14,7	84,1	1,2	22,9	75,9	1,2
14	DI Yogyakarta	121	53,6	46,4	0	14,3	85,7	0	25,0	75,0	0
15	Jawa Timur	949	33,7	64,7	1,6	12,9	85,5	1,6	20,1	78,3	1,6
16	Banten	206	33,3	64,6	2,1	18,8	77,1	4,2	41,7	56,3	2,1
17	Bali	114	20,0	80,0	0	36,7	63,3	0	10,0	90,0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	25,0	75,0	0	14,3	83,9	1,8	28,6	71,4	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	4,5	93,9	1,5	3,0	95,5	1,5	7,6	92,4	0
20	Kalimantan Barat	233	9,4	90,6	0	3,1	96,9	0	3,1	96,9	0
21	Kalimantan Tengah	176	11,5	88,5	0	0	100,0	0	3,8	96,2	0
22	Kalimantan Selatan	217	19,4	80,6	0	9,7	90,3	0	16,1	83,9	0
23	Kalimantan Timur	213	16,3	76,7	7,0	7,0	86,0	7,0	25,6	67,4	7,0
24	Sulawesi Utara	167	38,5	61,5	0	3,8	96,2	0	7,7	92,3	0
25	Sulawesi Tengah	163	10,9	83,6	5,5	3,6	90,9	5,5	5,5	90,9	3,6
26	Sulawesi Selatan	406	29,1	69,6	1,3	19,0	79,7	1,3	27,8	72,2	0
27	Sulawesi Tenggara	233	14,3	85,7	0	2,4	97,6	0	16,7	83,3	0
28	Gorontalo	74	11,1	88,9	0	5,6	94,4	0	16,7	83,3	0
29	Sulawesi Barat	81	22,2	77,8	0	5,6	94,4	0	11,1	88,9	0
30	Maluku	161	0	88,2	11,8	0	88,2	11,8	0	88,2	11,8
31	Maluku Utara	101	6,7	93,3	0	0	100,0	0	0	100,0	0
32	Papua Barat	104	18,2	81,8	0	18,2	81,8	0	18,2	81,8	0
33	Papua	294	2,5	95,0	2,5	27,5	70,0	2,5	20,0	77,5	2,5
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	32,2	66,1	1,7	22,6	75,4	2,0	27,2	71,3	1,4
2	Perdesaan	6660	23,8	74,1	2,1	10,4	87,4	2,3	18,6	79,5	1,9
	INDONESIA	**8981**	**25,5**	**72,5**	**2,0**	**12,9**	**84,9**	**2,2**	**20,4**	**77,8**	**1,8**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang ada Saka Bhakti Husada (SBH) hanya 23,3 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah di di Provinsi Lampung (52,4%), diikuti Provinsi Banten (43,8%), dan Provinsi Jawa Tengah (43,5%). Terdapat 6 provinsi dari 33 provinsi yang tidak ada Saka Bhakti Husada (0%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang ada Saka Bhakti Husada, di Perkotaan 15,9 persen dan di Perdesaan 25,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang ada Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) hanya 32,1 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah di Provinsi Lampung (66,7%), diikuti Provinsi Banten (54,2%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (53,6%). Terdapat 8 provinsi dari 33 provinsi yang tidak ada Poskestren (0%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang ada Poskestren, di Perkotaan 27,5persen dan di Perdesaan 33,3persen.

Secara nasional, persentase Puskesmasyang ada UKBM Dana Sehat hanya 30,2 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi adalah di Provinsi DIYogyakarta (57,1%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (50%) dan Provinsi DKI (47,2%). Sedang terendah adalah di Provinsi Papua Barat (0%), diikuti Provinsi Papua (2,5%), dan Provinsi Gorontalo (5,6%).Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang ada UKBM Dana Sehat, di Perkotaan sama dengan di Perdesaan yaitu 30,0 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang ada Kelompok Peduli Lansia hanya 25,5 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi adalah di Provinsi DIYogyakarta (53,6%), diikuti Provinsi Sumatera Selatan (44%) dan Provinsi DKI (41,7%). Sedang terendah adalah di Provinsi Maluku (0%), diikuti Provinsi Papua (2,5%), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,5%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang ada Kelompok Peduli Lansia, di Perkotaan 32,2 persen dan di Perdesaan 23,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang ada Kelompok Peduli HIV- AIDS hanya 12,9 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi adalahdi Provinsi DKI Jakarta (44,4%), diikuti Provinsi Bali (36,7%), dan Provinsi Papua (27,5%). Terdapat 5 provinsi dari 33 provinsi yang tidak ada Kelompok Peduli HIV-AIDS (0%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang ada Kelompok Peduli HIV-AIDS, di Perkotaan 22,6 persen dan di Perdesaan 10,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang ada Kelompok Peduli TB Paru hanya 20,4 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi adalah di ProvinsiDKI Jakarta (38,9%), diikuti Provinsi Sumatera Selatan (36,0%) dan Provinsi Banten (41,7%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang ada Kelompok Peduli TB Paru, di Perkotaan 27,2 persen dan di Perdesaan 18,6 persen.

4.11. KEGIATAN PENGGERAK PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN

Fungsi ketiga dari Puskesmas yaitu sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan.

4.11.1. Tenaga Pelaksana Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Tabel 4.11.1
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Petugas yang Menangani Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Petugas		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	4,2	81,4	14,5
2	Sumatera Utara	506	12,5	85,4	2,2
3	Sumatera Barat	248	34,3	61,3	4,4
4	Riau	195	31,3	61,0	7,7
5	Jambi	171	23,4	64,9	11,7
6	Sumatera Selatan	298	21,8	67,8	10,4
7	Bengkulu	173	8,1	64,7	27,2
8	Lampung	265	20,0	77,0	3,0
9	Bangka Belitung	57	47,4	52,6	0
10	Kepulauan Riau	65	24,6	69,2	6,2
11	DKI Jakarta	336	28,3	56,5	15,2
12	Jawa Barat	1031	43,5	49,9	6,6
13	Jawa Tengah	861	42,5	50,5	7,0
14	DI Yogyakarta	121	80,2	13,2	6,6
15	Jawa Timur	949	49,5	40,9	9,6
16	Banten	206	34,5	56,8	8,7
17	Bali	114	36,8	61,4	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	34,9	49,0	16,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	15,6	69,2	15,2
20	Kalimantan Barat	233	19,7	74,7	5,6
21	Kalimantan Tengah	176	7,4	77,3	15,3
22	Kalimantan Selatan	217	26,3	70,5	3,2
23	Kalimantan Timur	213	16,4	66,7	16,9
24	Sulawesi Utara	167	18,6	78,4	3,0
25	Sulawesi Tengah	163	19,0	62,6	18,4
26	Sulawesi Selatan	406	22,9	69,0	8,1
27	Sulawesi Tenggara	233	14,2	69,5	16,3
28	Gorontalo	74	37,8	48,6	13,5
29	Sulawesi Barat	81	17,3	56,8	25,9
30	Maluku	161	3,7	89,4	6,8
31	Maluku Utara	101	13,9	46,5	39,6
32	Papua Barat	104	2,9	89,4	7,7
33	Papua	294	4,8	88,8	6,5
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	30,5	60,1	9,4
2	Perdesaan	6660	27,6	62,8	9,6
	INDONESIA	**8981**	**28,3**	**62,1**	**9,6**

Tabel 4.11.1 menunjukkan keberadaan petugas yang menangani kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai petugas yang menangani kegiatanPenggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatanhanya 28,3 persen.Persentase tertinggi di Provinsi DIYogyakarta (80,2%), diikuti Provinsi Jawa Timur (49,5%) dan Provinsi Bangka Belitung (47,4%). Persentase terendah di Provinsi Papua Barat (2,9%), diikuti Provinsi Maluku (3,7%), Provinsi Aceh (4,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas diperkotaan yang ada petugas menangani kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan adalah sebanyak 30,5persen,sementara di perdesaan 27,6persen.

4.11.2 Pelatihan Tenaga dan Ketersediaan Pedoman Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Tabel 4.11.2 menunjukkan keikutsertaan tenaga pada pelatihandan ketersediaan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan. Keikutsertaan pada pelatihan yang dimaksud adalah keikutsertaan petugas puskesmas pada pelatihan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan pada tahun 2009 dan 2010.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mengikuti pelatihan kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatanhanya 9,9 persen. Persentase tertinggi di Provinsi DIYogyakarta (23,1%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (22,8%) dan Provinsi Jawa Barat (18%). Persentase terendah diprovinsi Maluku dan Maluku Utara (0%), diikuti Provinsi Papua (1,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas diperkotaan yang mengikuti pelatihan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan adalah sebanyak 10,9persen,sementara di perdesaan 9,6persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki pedoman kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatanhanya 14,6persen. Persentase tertinggi Provinsi DIYogyakarta (46,3%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (29,8%) dan Provinsi Jawa Barat (27,1%). Persentase terendah di Provinsi Maluku (0,6%), diikuti Provinsi Papua (1,4%) dan Provinsi Papua Barat (1,9%). Bila dilihat dari lokasi persentase puskesmas diperkotaan yang memiliki pedoman untuk Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan ada sebanyak 17,3persen,sementara di pedesaan 13,7 persen.

Tabel 4.11.2
Persentase Puskesmas menurut Pelatihan dan Pedoman Pada Kegiatan Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Pelatihan			Pedoman		
			% Ada	% Tidak Ada	% TAD	% Ada	% Tidak Ada	% TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	2,6	83,0	14,5	2,9	82,3	14,8
2	Sumatera Utara	506	5,7	91,3	3,0	7,1	89,5	3,4
3	Sumatera Barat	248	8,5	87,1	4,4	14,9	80,6	4,4
4	Riau	195	9,2	83,1	7,7	13,3	78,5	8,2
5	Jambi	171	11,1	74,9	14,0	18,1	67,3	14,6
6	Sumatera Selatan	298	6,4	82,9	10,7	13,1	75,5	11,4
7	Bengkulu	173	2,3	70,5	27,2	2,9	69,9	27,2
8	Lampung	265	6,8	90,2	3,0	7,9	88,7	3,4
9	Bangka Belitung	57	22,8	77,2	0,0	29,8	70,2	0,0
10	Kepulauan Riau	65	7,7	84,6	7,7	15,4	75,4	9,2
11	DKI Jakarta	336	10,4	74,1	15,5	14,9	68,5	16,7
12	Jawa Barat	1031	18,0	74,8	7,2	27,1	65,6	7,4
13	Jawa Tengah	861	12,5	80,0	7,4	21,6	70,7	7,7
14	DI Yogyakarta	121	23,1	70,2	6,6	46,3	47,1	6,6
15	Jawa Timur	949	17,2	71,8	11,1	25,0	64,3	10,7
16	Banten	206	17,0	72,8	10,2	17,0	70,4	12,6
17	Bali	114	8,8	89,5	1,8	17,5	79,8	2,6
18	Nusa Tenggara Barat	149	10,7	72,5	16,8	21,5	62,4	16,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	4,6	79,5	15,9	7,9	76,2	15,9
20	Kalimantan Barat	233	7,3	86,7	6,0	9,0	84,1	6,9
21	Kalimantan Tengah	176	1,1	83,5	15,3	3,4	81,8	14,8
22	Kalimantan Selatan	217	9,2	86,6	4,1	11,1	85,3	3,7
23	Kalimantan Timur	213	5,6	77,5	16,9	11,3	70,4	18,3
24	Sulawesi Utara	167	6,0	90,4	3,6	6,0	90,4	3,6
25	Sulawesi Tengah	163	6,7	71,8	21,5	6,1	69,9	23,9
26	Sulawesi Selatan	406	9,9	81,8	8,4	9,6	81,0	9,4
27	Sulawesi Tenggara	233	3,0	80,3	16,7	3,0	78,5	18,5
28	Gorontalo	74	16,2	68,9	14,9	9,5	75,7	14,9
29	Sulawesi Barat	81	6,2	67,9	25,9	4,9	67,9	27,2
30	Maluku	161	0,0	92,5	7,5	0,6	91,9	7,5
31	Maluku Utara	101	0,0	60,4	39,6	2,0	58,4	39,6
32	Papua Barat	104	2,9	89,4	7,7	1,9	89,4	8,7
33	Papua	294	1,4	92,2	6,5	1,4	92,2	6,5
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	10,9	79,0	10,2	17,3	71,9	10,9
2	Perdesaan	6660	9,6	80,2	10,2	13,7	75,9	10,5
	INDONESIA	**8981**	**9,9**	**79,9**	**10,2**	**14,6**	**74,8**	**10,6**

4.11.3 SOP dan Peraturan Tertulis Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Tabel 4.11.3 menunjukkan ketersediaanStandard Operational Procedur (SOP) dan Peraturan Tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan.

Secara nasional, persentase Puskesmas dengan yang mempunyaiSOP/Protap kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan hanya 12,1%Persentase tertinggi di Provinsi DIYogyakarta (28,1%), diikuti Provinsi Jawa Barat (25,3%) dan Provinsi Jawa Timur (20,5%). Persentase terendah diProvinsi Maluku dan Provinsi Papua Barat (0%), diikuti Provinsi Kalimantan Tengah (1,1%).Bila dilihat dari lokasi persentase puskesmas diperkotaan yang mempunyaiSOP/Protap kegiatan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan ada sebanyak 14,8 persen,sementara di perdesaan 11,1persen.

Secara nasional persentase Puskesmas yang mempunyai peraturan tertulis untuk kegiatan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan hanya 13,5 persen. Tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (29,8%), diikuti Provinsi Jawa Barat (24,3%) dan Provinsi Jambi (22,8%). Terendah di Provinsi Maluku dan Papua Barat (0%), diikuti Provinsi Papua (1,7%). Bila dilihat dari lokasi persentase puskesmas diperkotaan yang mempunyai peraturan tertulis untuk kegiatan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan ada sebanyak 16,5persen,sementara di perdesaan 12,4persen.

Tabel 4.11.3
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan SOP dan Peraturan tertulis Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	SOP/Protap			Peraturan Tertulis		
			Ada	Tidak Ada	TAD	Ada	Tidak Ada	TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	1,3	82,3	16,4	2,6	82,6	14,8
2	Sumatera Utara	506	7,1	89,1	3,8	6,1	90,7	3,2
3	Sumatera Barat	248	11,3	83,9	4,8	13,3	82,3	4,4
4	Riau	195	12,3	76,9	10,8	11,8	80,0	8,2
5	Jambi	171	10,5	69,6	19,9	22,8	62,0	15,2
6	Sumatera Selatan	298	10,1	76,8	13,1	11,4	77,2	11,4
7	Bengkulu	173	2,3	69,4	28,3	2,9	69,9	27,2
8	Lampung	265	4,5	91,3	4,2	7,5	89,4	3,0
9	Bangka Belitung	57	21,1	77,2	1,8	29,8	70,2	0
10	Kepulauan Riau	65	13,8	75,4	10,8	10,8	80,0	9,2
11	DKI Jakarta	336	13,7	68,8	17,6	17,9	66,1	16,1
12	Jawa Barat	1031	25,3	66,9	7,8	24,3	68,3	7,4
13	Jawa Tengah	861	17,9	73,1	9,1	19,7	72,8	7,4
14	DI Yogyakarta	121	28,1	63,6	8,3	47,1	46,3	6,6
15	Jawa Timur	949	20,5	67,0	12,4	21,4	67,5	11,1
16	Banten	206	18,4	68,0	13,6	20,4	67,5	12,1
17	Bali	114	11,4	83,3	5,3	11,4	85,1	3,5
18	Nusa Tenggara Barat	149	15,4	67,8	16,8	12,1	71,1	16,8
19	Nusa Tenggara Timur	302	7,3	76,5	16,2	9,6	74,5	15,9
20	Kalimantan Barat	233	6,4	86,3	7,3	8,6	85,4	6,0
21	Kalimantan Tengah	176	1,1	83,0	15,9	1,1	83,5	15,3
22	Kalimantan Selatan	217	6,9	86,6	6,5	7,8	88,5	3,7
23	Kalimantan Timur	213	8,5	72,8	18,8	10,3	70,9	18,8
24	Sulawesi Utara	167	4,8	88,6	6,6	6,0	90,4	3,6
25	Sulawesi Tengah	163	4,3	70,6	25,2	3,7	72,4	23,9
26	Sulawesi Selatan	406	8,6	80,3	11,1	9,6	80,8	9,6
27	Sulawesi Tenggara	233	3,4	76,8	19,7	2,6	79,0	18,5
28	Gorontalo	74	4,1	75,7	20,3	13,5	71,6	14,9
29	Sulawesi Barat	81	3,7	67,9	28,4	8,6	64,2	27,2
30	Maluku	161	0,0	91,3	8,7	0,0	92,5	7,5
31	Maluku Utara	101	3,0	55,4	41,6	5,0	55,4	39,6
32	Papua Barat	104	0,0	91,3	8,7	0,0	91,3	8,7
33	Papua	294	1,7	91,8	6,5	1,7	91,8	6,5
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	14,8	72,9	12,3	16,5	72,6	10,9
2	Perdesaan	6660	11,1	77,2	11,7	12,4	77,1	10,5
	INDONESIA	8981	12,1	76,1	11,8	13,5	76,0	10,6

4.11.4 Alokasi Dana Khusus Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Tabel 4.11.4 menunjukkan ketersediaan dana khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan.Secara nasional persentase Puskesmas yang mempunyai dana khusus untuk kegiatan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan hanya 10,4 persen. Tertinggi di Provinsi DIYogyakarta (38,8%), diikuti Provinsi Jawa Timur (19,2%) dan Provinsi Jawa Barat (18,1%). Terendah di Provinsi Maluku (0%), diikuti Provinsi Kalimantan Tengah (0,6%), dan Provinsi Papua (0,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas diperkotaan yang mempunyai dana khusus untuk kegiatan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan ada sebanyak 12,2 persen,sementara di pedesaan 9,7 persen.

Tabel 4.11.4
Persentase Puskesmas menurut ketersediaan Dana Khusus Untuk Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Dana Khusus		
			Ada	Tidak Ada	TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	1,6	83,6	14,8
2	Sumatera Utara	506	3,0	93,7	3,4
3	Sumatera Barat	248	11,3	84,3	4,4
4	Riau	195	15,4	75,9	8,7
5	Jambi	171	7,0	76,6	16,4
6	Sumatera Selatan	298	7,0	80,9	12,1
7	Bengkulu	173	1,2	71,7	27,2
8	Lampung	265	5,3	91,7	3,0
9	Bangka Belitung	57	14,0	86,0	0
10	Kepulauan Riau	65	10,8	80,0	9,2
11	DKI Jakarta	336	12,5	70,8	16,7
12	Jawa Barat	1031	18,1	74,5	7,4
13	Jawa Tengah	861	14,6	77,5	7,9
14	DI Yogyakarta	121	38,8	54,5	6,6
15	Jawa Timur	949	19,2	69,4	11,4
16	Banten	206	14,1	72,8	13,1
17	Bali	114	7,0	89,5	3,5
18	Nusa Tenggara Barat	149	15,4	67,1	17,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	7,3	76,8	15,9
20	Kalimantan Barat	233	7,7	86,7	5,6
21	Kalimantan Tengah	176	0,6	84,1	15,3
22	Kalimantan Selatan	217	7,4	88,9	3,7
23	Kalimantan Timur	213	6,6	75,1	18,3
24	Sulawesi Utara	167	3,6	92,8	3,6
25	Sulawesi Tengah	163	1,8	73,6	24,5
26	Sulawesi Selatan	406	9,6	80,3	10,1
27	Sulawesi Tenggara	233	3,9	77,3	18,9
28	Gorontalo	74	6,8	78,4	14,9
29	Sulawesi Barat	81	6,2	66,7	27,2
30	Maluku	161	0	92,5	7,5
31	Maluku Utara	101	4,0	56,4	39,6
32	Papua Barat	104	1,0	90,4	8,7
33	Papua	294	0,7	92,9	6,5
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	12,2	76,8	11,0
2	Perdesaan	6660	9,7	79,6	10,7
	INDONESIA	8981	10,4	78,9	10,8

4.11.5 Jenis Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Tabel 4.11.5 menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan. Kegiatan dalam rangka pembangunan berwawasan yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi kegiatan advokasi kesehatan, pertemuan dengan Lintas Sektor dan kemitraan dengan lintas sektor. Kegiatan dalam rangka pembangunan berwawasan terbanyak dilaksanakan adalah pertemuan dengan lintas sektor (44,5%), diikuti advokasi kesehatan (41,5%) dan kemitraan dengan lintas sektor (41,2%).

Secara nasional persentase Puskesmas yang melakukan advokasi kesehatandalam rangka Penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan hanya 41,5 persen. Tertinggi di Provinsi DIYogyakarta (86%), diikuti Provinsi Jawa Barat (63,5%) dan Provinsi Jawa Timur (59,6%). Terrendah di Provinsi Papua Barat (2,9%), diikuti Provinsi Papua (7,8%) dan Provinsi Maluku (9,9%).Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas diperkotaan yang melakukan advokasi kesehatan sebagai kegiatan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan adalah sebanyak 43,5 persen,sementara di pedesaan 40,8 persen.

Secara nasional persentase Puskesmas yang melakukan pertemuan dengan lintas sektorsebagai kegiatan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan adalah 44,5%,. Tertinggi di Provinsi DIYogyakarta (90,9%), diikuti Provinsi Jawa Barat (66,1%) dan Provinsi Jawa Timur (63,5%). Terendah di Provinsi Papua Barat (4,8%), diikuti Provinsi Papua (7,5%) dan Provinsi Maluku (11,8%).Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas diperkotaan yang melakukan pertemuandengan lintas sektor untuk kegiatan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan ada sebanyak 46,8 persen,sementara di pedesaan 43,8 persen.

Secara nasional persentase Puskesmas yang melakukan kemitraan dengan lintas sector untuk kegiatan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan hanya 41,2 persen. Tertinggi di Provinsi DIYogyakarta (85,1%), diikuti Provinsi Jawa Barat (60,5%) dan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur (57,1%). Terendah Provinsi Papua Barat (5,8%), diikuti Provinsi Papua (6,8%) dan Provinsi Maluku (11,2%).Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas diperkotaan yang melakukan kemitraan dengan lintas sector untuk kegiatan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan ada sebanyak 43,0 persen,sementara di pedesaan 40,6 persen.

Tabel 4.11.5
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Advokasi Kesehatan			Pertemuan Lintas Sektor			Kemitraan dg Lintas Sektor		
			%Ada	%Tidak Ada	%TAD	%Ada	%Tidak Ada	%TAD	%Ada	%Tidak Ada	%TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	13,8	71,4	14,8	15,4	69,5	15,1	14,1	71,1	14,8
2	Sumatera Utara	506	31,4	65,2	3,4	36,4	60,3	3,4	33,0	63,8	3,2
3	Sumatera Barat	248	52,0	43,5	4,4	51,2	44,4	4,4	49,2	46,4	4,4
4	Riau	195	46,2	45,6	8,2	49,2	42,6	8,2	47,2	44,1	8,7
5	Jambi	171	33,3	50,9	15,8	35,1	48,5	16,4	31,0	53,8	15,2
6	Sumatera Selatan	298	34,6	53,0	12,4	36,9	50,7	12,4	33,6	54,7	11,7
7	Bengkulu	173	16,2	56,6	27,2	16,8	56,1	27,2	15,6	57,2	27,2
8	Lampung	265	42,3	54,7	3,0	43,0	53,6	3,4	36,2	60,4	3,4
9	Bangka Belitung	57	56,1	43,9	0	56,1	43,9	0	56,1	43,9	0
10	Kepulauan Riau	65	38,5	52,3	9,2	46,2	44,6	9,2	36,9	53,8	9,2
11	DKI Jakarta	336	30,1	52,7	17,3	32,7	49,7	17,6	29,8	53,9	16,4
12	Jawa Barat	1031	63,5	29,0	7,5	66,1	26,4	7,6	60,5	32,0	7,5
13	Jawa Tengah	861	55,1	36,9	8,0	59,6	32,4	8,0	57,1	35,1	7,8
14	DI Yogyakarta	121	86,0	7,4	6,6	90,9	2,5	6,6	85,1	8,3	6,6
15	Jawa Timur	949	59,6	29,3	11,1	63,5	25,2	11,3	57,1	31,9	11,0
16	Banten	206	53,4	33,5	13,1	54,4	32,5	13,1	51,5	35,4	13,1
17	Bali	114	55,3	41,2	3,5	51,8	44,7	3,5	44,7	51,8	3,5
18	Nusa Tenggara Barat	149	50,3	32,2	17,4	52,3	30,2	17,4	53,0	28,9	18,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	32,1	51,7	16,2	36,8	47,0	16,2	36,1	47,4	16,6
20	Kalimantan Barat	233	33,9	60,5	5,6	36,9	57,5	5,6	36,9	57,1	6,0
21	Kalimantan Tengah	176	19,9	64,8	15,3	21,0	63,6	15,3	17,0	67,6	15,3
22	Kalimantan Selatan	217	36,4	59,9	3,7	46,1	50,2	3,7	40,1	56,2	3,7
23	Kalimantan Timur	213	28,2	53,5	18,3	35,2	46,5	18,3	30,5	51,2	18,3
24	Sulawesi Utara	167	44,9	50,9	4,2	50,9	44,9	4,2	48,5	47,3	4,2
25	Sulawesi Tengah	163	30,1	46,0	23,9	28,2	47,9	23,9	30,7	45,4	23,9
26	Sulawesi Selatan	406	37,7	52,2	10,1	40,6	48,8	10,6	35,5	54,2	10,3
27	Sulawesi Tenggara	233	20,6	60,1	19,3	26,6	54,1	19,3	25,8	55,4	18,9
28	Gorontalo	74	48,6	36,5	14,9	56,8	28,4	14,9	54,1	31,1	14,9
29	Sulawesi Barat	81	34,6	38,3	27,2	37,0	35,8	27,2	37,0	35,8	27,2
30	Maluku	161	9,9	82,6	7,5	11,8	80,7	7,5	11,2	81,4	7,5
31	Maluku Utara	101	18,8	41,6	39,6	19,8	40,6	39,6	20,8	39,6	39,6
32	Papua Barat	104	2,9	88,5	8,7	4,8	86,5	8,7	5,8	85,6	8,7
33	Papua	294	7,8	85,7	6,5	7,5	86,1	6,5	6,8	86,7	6,5
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	43,5	45,5	11,0	46,8	42,0	11,2	43,0	46,1	10,9
2	Perdesaan	6660	40,8	48,5	10,7	43,8	45,4	10,8	40,6	48,7	10,7
	INDONESIA	**8981**	**41,5**	**47,7**	**10,8**	**44,5**	**44,5**	**10,9**	**41,2**	**48,0**	**10,7**

4.11.6 Keberadaan Input dan Proses Kegiatan Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Tabel 4.11.6 menunjukkan kondisi input dan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan. Yang dimaksud dengan kondisi Input yang baik adalah tersedia sumber daya tenaga, pelatihan, pedoman dan dana khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan proses yang baik adalah tersedia kegiatan advokasi, pertemuan lintas sektor dan kemitraan.

Secara nasional, persentase Puskesmas dengan kondisi input yang baik untuk kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan hanya 3,6 persen. Tertinggi di Provinsi DIYogyakarta (13,2%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (10,5%) dan Provinsi Jawa Barat (7,5%). Terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara (0,4%), diikuti Provinsi Sulawesi Tengah (0,6%) dan Provinsi Papua (0,7%).Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas diperkotaan yang kondisi inputnya baik untuk kegiatan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan ada sebanyak 4,1 persen,sementara di pedesaan 3,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas dengan kondisi proses yang baik untuk kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan hanya 35,2 persen. Tertinggi di Provinsi DIYogyakarta (81,8%), diikuti Provinsi Jawa Barat (56,8%) dan Provinsi Jawa Timur (52,1%). Terendah di Provinsi Papua Barat (2,9%), diikuti Provinsi Papua (4,8%) dan Provinsi Maluku (5,6%).Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas diperkotaan yang kondisi prosesnya baik untuk kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan ada sebanyak 37,4 persen,sementara di pedesaan 34,4 persen.

Tabel 4.11.6
Persentase Puskesmas Dengan Keberadaan Input dan Proses Kegiatan
Penggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan

No	Uraian	Jml Pusk	Input			Proses		
			%Baik	%Tidak Baik	%TAD	%Baik	%Tidak Baik	%TAD
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	0,3	85,2	14,5	10,3	74,9	14,8
2	Sumatera Utara	506	1,6	96,4	2,0	27,5	69,4	3,2
3	Sumatera Barat	248	3,2	92,3	4,4	40,3	55,2	4,4
4	Riau	195	4,6	87,7	7,7	41,0	50,8	8,2
5	Jambi	171	3,5	84,8	11,7	25,1	59,6	15,2
6	Sumatera Selatan	298	2,0	87,6	10,4	28,5	59,7	11,7
7	Bengkulu	173	1,2	71,7	27,2	12,7	60,1	27,2
8	Lampung	265	1,5	95,5	3,0	29,4	67,5	3,0
9	Bangka Belitung	57	10,5	89,5	0	47,4	52,6	0
10	Kepulauan Riau	65	3,1	90,8	6,2	30,8	60,0	9,2
11	DKI Jakarta	336	4,2	80,7	15,2	25,9	58,0	16,1
12	Jawa Barat	1031	7,5	85,9	6,6	56,8	35,8	7,4
13	Jawa Tengah	861	4,4	88,6	7,0	47,9	44,4	7,8
14	DI Yogyakarta	121	13,2	80,2	6,6	81,8	11,6	6,6
15	Jawa Timur	949	6,1	84,4	9,5	52,1	37,0	11,0
16	Banten	206	5,3	85,9	8,7	47,1	39,8	13,1
17	Bali	114	1,8	96,5	1,8	36,8	59,6	3,5
18	Nusa Tenggara Barat	149	4,7	79,2	16,1	44,3	38,3	17,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	2,0	82,8	15,2	27,5	56,3	16,2
20	Kalimantan Barat	233	3,4	91,0	5,6	29,6	64,8	5,6
21	Kalimantan Tengah	176	0	85,2	14,8	12,5	72,2	15,3
22	Kalimantan Selatan	217	1,8	94,9	3,2	31,3	65,0	3,7
23	Kalimantan Timur	213	2,8	80,3	16,9	21,6	60,1	18,3
24	Sulawesi Utara	167	2,4	94,6	3,0	35,3	60,5	4,2
25	Sulawesi Tengah	163	0,6	81,0	18,4	20,9	55,2	23,9
26	Sulawesi Selatan	406	2,0	89,9	8,1	30,8	59,1	10,1
27	Sulawesi Tenggara	233	0,4	83,3	16,3	17,6	63,5	18,9
28	Gorontalo	74	4,1	82,4	13,5	45,9	39,2	14,9
29	Sulawesi Barat	81	2,5	71,6	25,9	30,9	42,0	27,2
30	Maluku	161	0	93,2	6,8	5,6	87,0	7,5
31	Maluku Utara	101	0	60,4	39,6	16,8	43,6	39,6
32	Papua Barat	104	1,0	91,3	7,7	2,9	88,5	8,7
33	Papua	294	0,7	92,9	6,5	4,8	88,8	6,5
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	4,1	86,5	9,4	37,4	51,8	10,8
2	Perdesaan	6660	3,4	87,1	9,6	34,4	55,0	10,6
	INDONESIA	**8981**	**3,6**	**86,9**	**9,5**	**35,2**	**54,2**	**10,7**

4.12. PUSKESMAS PEMBANTU DAN BIDAN DESA

Tabel 4.12.1 – 4.12.2 adalah tentang keberadaan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Bidan di desa (Bidan desa). Blok ini diisi dengan menanyakan kepada kepala Puskesmas atau Tata usaha di Puskesmas. Enumerator tidak mengunjungi Pustu atau Polindes atau Poskesdes. Jawaban diisi sesuai dengan pengakuan responden di Puskesmas.

4.12.1. PUSKESMAS PEMBANTU

Tabel 4.12.1 adalah persentase puskesmas yang memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu) dan kegiatan Bimbingan teknis yang dilaksanakan Petugas puskesmas ke Pustu pada tahun 2010. Persentase Puskesmas yang memiliki puskesmas pembantu (pustu) secara nasional adalah 86,0 persen. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi adalah Kalimantan Tengah (99,4%), Sulawesi Tengah (98,8%) dan Kepulauan Riau (98,5%). Sedangkan persentase terendah di Provinsi DKI Jakarta (2,7%), Banten (71,4%) dan Jawa Barat (72,0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai pustu di perkotaan sebanyak 66,0 persen, sementara di perdesaan 93,0 persen.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis ke puskesmas pembantu secara nasional adalah 56,1 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Sumatera Barat (83,1%), Jambi (81,3%) dan Nusa Tenggara Barat (79,2%). Sedangkan terendah di Provinsi DKI Jakarta (2,1%), Papua Barat (18,3%) dan Papua (26,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas di perkotaan yang ada kegiatan bimtek ke puskesmas pembantu ada sebanyak 44,6 persen, sementara di perdesaan 60,0 persen.

Tabel 4.12.1
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan
Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Kegiatan Bimtek ke Pustu, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jml Pusk	Pustu			Bimtek ke Pustu		
			% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab	% Ada	% Tidak Ada	% Tidak Menjawab
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	92.3	7.7	0	56.9	35.0	8.0
2	Sumatera Utara	506	88.1	11.7	0.2	56.7	31.2	12.1
3	Sumatera Barat	248	96.0	4.0	0	83.1	12.9	4.0
4	Riau	195	95.4	4.6	0	72.3	22.6	5.1
5	Jambi	171	96.5	3.5	0	81.3	15.2	3.5
6	Sumatera Selatan	298	88.6	10.1	1.3	67.8	20.8	11.4
7	Bengkulu	173	92.5	6.9	0.6	50.9	41.6	7.5
8	Lampung	265	94.3	5.7	0	64.9	28.7	6.4
9	Bangka Belitung	57	94.7	5.3	0	57.9	36.8	5.3
10	Kepulauan Riau	65	98.5	1.5	0	52.3	46.2	1.5
11	DKI Jakarta	336	2.7	85.1	12.2	2.1	0.6	97.3
12	Jawa Barat	1031	72.0	24.2	3.9	46.5	25.4	28.1
13	Jawa Tengah	861	92.0	7.7	0.3	59.0	32.9	8.1
14	DI Yogyakarta	121	90.9	7.4	1.7	47.1	43.8	9.1
15	Jawa Timur	949	95.2	4.5	0.3	68.0	26.9	5.2
16	Banten	206	71.4	28.6	0	29.6	41.7	28.6
17	Bali	114	98.2	1.8	0	78.1	19.3	2.6
18	Nusa Tenggara Barat	149	96.0	2.7	1.3	79.2	16.1	4.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	96.0	3.6	0.3	73.5	21.2	5.3
20	Kalimantan Barat	233	89.7	10.3	0	61.8	27.5	10.7
21	Kalimantan Tengah	176	99.4	0	0.6	72.7	26.7	0.6
22	Kalimantan Selatan	217	92.2	7.8	0	54.4	37.8	7.8
23	Kalimantan Timur	213	85.4	13.6	0.9	57.3	28.2	14.6
24	Sulawesi Utara	167	97.0	3.0	0	56.9	40.1	3.0
25	Sulawesi Tengah	163	98.8	1.2	0	63.8	35.0	1.2
26	Sulawesi Selatan	406	91.4	8.1	0.5	70.9	20.4	8.6
27	Sulawesi Tenggara	233	85.0	15.0	0	39.5	45.5	15.0
28	Gorontalo	74	90.5	9.5	0	55.4	35.1	9.5
29	Sulawesi Barat	81	81.5	18.5	0	59.3	22.2	18.5
30	Maluku	161	84.5	14.3	1.2	33.5	50.9	15.5
31	Maluku Utara	101	86.1	10.9	3.0	37.6	47.5	14.9
32	Papua Barat	104	92.3	7.7	0	18.3	74.0	7.7
33	Papua	294	85.4	14.3	0.3	26.5	58.5	15.0
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	66.0	30.2	3.8	44.6	21.2	34.2
2	Perdesaan	6660	93.0	6.7	0.3	60.0	32.7	7.3
	INDONESIA	**8981**	**86.0**	**12.8**	**1.2**	**56.1**	**29.7**	**14.2**

4.12.2. BIDAN DESA

Tabel 4.12.2 menggambarkan Persentase Puskesmas yang mempunyai Bidan Desa (bides), persentase puskesmas yang mempunyai bides dengan wilayah kerja lebih dari satu desa dan persentase puskesmas yang melakukan bimbingan teknis (bimtek) ke Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan atau ke Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Persentase Puskesmas yang mempunyai bidan di desa secara nasional adalah 84,1 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Bangka Belitung (100,0%), Lampung (98,5%) dan Kepulauan Riau (98,5%). Sedangkan terendah di Provinsi DKI Jakarta (1,8%), Papua (54,4%) dan Sulawesi Tengah (98,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas di perkotaan yang memiliki bidan desa ada sebanyak 54,0 persen, sementara di perdesaan 94,6 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki bidan desa yang mendapat tugas lebih dari 1 desa secara nasional adalah 20,3 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Gorontalo (83,8%), Maluku Utara (59,4%) dan Sulawesi Tenggara (47,2%). Sedangkan terendah di Provinsi DKI Jakarta (0,3%), DIY (3,3%) dan Banten (5,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas di perkotaan yang bidan di desa nya mendapat tugas lebih dari 1 desa ada sebanyak 11,1persen, sementara di perdesaan 23,5 persen.

Persentase puskesmas yang melakukan kegiatan bimbingan teknis ke polindes/poskesdes secara nasional adalah 52,1 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah DI Aceh (79,9%), Sumatera Utara (74,7%) dan Sumatera Barat (70,2%). Sedangkan terendah di Provinsi Papua (0,9%), Papua Barat (7,7%) dan Maluku Utara (10,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas di perkotaan yang melakukan kegiatan bimbingan teknis ke polindes/poskesdes ada sebanyak 32,6 persen, sementara di perdesaan 58,9 persen.

Tabel 4.12.2
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Bidan Desa,
Bides dengan wilayah kerja >1 desa, Bimtek ke Polindes/Poskesdes, Rifaskes 2011

No	Provinsi	Jml Pusk	Bidan di Desa			Bides dg wilayah kerja> 1 desa			Bintek ke Polindes/ Poskesdes		
			Ada	Tidak Ada	TAD	Ada	Tidak Ada	TAD	Ada	Tidak Ada	TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	98.1	1.6	0.3	43.1	55.0	1.9	55.9	42.8	1.3
2	Sumatera Utara	506	84.8	14.6	0.6	15.4	69.2	15.4	47.2	38.3	14.4
3	Sumatera Barat	248	94.8	5.2	0.0	43.1	51.6	5.2	70.2	25.8	4.0
4	Riau	195	91.8	7.7	0.5	10.3	81.0	8.7	62.6	30.3	7.2
5	Jambi	171	90.6	9.4	0.0	18.7	71.9	9.4	56.7	32.7	10.5
6	Sumatera Selatan	298	88.3	10.7	1.0	18.1	69.8	12.1	69.1	21.8	9.1
7	Bengkulu	173	85.0	14.5	0.6	30.1	54.9	15.0	43.9	42.8	13.3
8	Lampung	265	98.5	1.1	0.4	12.1	86.4	1.5	74.7	24.5	0.8
9	Bangka Belitung	57	100.0	0.0	0.0	14.0	86.0	0.0	68.4	31.6	0.0
10	Kepulauan Riau	65	92.3	7.7	0.0	16.9	73.8	9.2	53.8	40.0	6.2
11	DKI Jakarta	336	1.8	86.6	11.6	0.3	1.2	98.5	0.9	15.2	83.9
12	Jawa Barat	1031	78.1	17.6	4.4	7.6	70.4	22.0	39.1	41.8	19.1
13	Jawa Tengah	861	88.5	10.7	0.8	11.4	77.2	11.4	67.6	24.0	8.4
14	DI Yogyakarta	121	81.0	17.4	1.7	3.3	77.7	19.0	46.3	34.7	19.0
15	Jawa Timur	949	93.0	6.0	0.9	10.0	82.8	7.2	69.2	24.8	6.0
16	Banten	206	80.6	19.4	0.0	5.8	74.8	19.4	35.4	46.6	18.0
17	Bali	114	90.4	9.6	0.0	7.0	82.5	10.5	64.9	25.4	9.6
18	Nusa Tenggara Barat	149	97.3	0.7	2.0	20.1	77.2	2.7	79.9	17.4	2.7
19	Nusa Tenggara Timur	302	91.4	7.9	0.7	40.4	51.0	8.6	56.3	37.1	6.6
20	Kalimantan Barat	233	87.6	12.4	0.0	23.6	63.9	12.4	62.7	27.5	9.9
21	Kalimantan Tengah	176	94.3	5.1	0.6	35.8	58.5	5.7	50.6	44.3	5.1
22	Kalimantan Selatan	217	97.7	2.3	0.0	26.3	71.4	2.3	67.7	30.4	1.8
23	Kalimantan Timur	213	71.4	27.2	1.4	14.6	56.8	28.6	24.4	52.6	23.0
24	Sulawesi Utara	167	86.8	13.2	0.0	46.1	40.7	13.2	37.1	56.3	6.6
25	Sulawesi Tengah	163	98.2	1.2	0.6	41.1	57.1	1.8	62.6	35.6	1.8
26	Sulawesi Selatan	406	95.1	4.4	0.5	16.5	78.3	5.2	69.5	27.8	2.7
27	Sulawesi Tenggara	233	92.3	6.9	0.9	47.2	45.5	7.3	40.8	57.5	1.7
28	Gorontalo	74	95.9	4.1	0.0	83.8	12.2	4.1	68.9	31.1	0.0
29	Sulawesi Barat	81	93.8	6.2	0.0	25.9	67.9	6.2	61.7	35.8	2.5
30	Maluku	161	68.3	30.4	1.2	33.5	33.5	32.9	21.1	52.8	26.1
31	Maluku Utara	101	91.1	5.0	4.0	59.4	31.7	8.9	32.7	59.4	7.9
32	Papua Barat	104	67.3	31.7	1.0	33.7	33.7	32.7	7.7	76.9	15.4
33	Papua	294	54.4	44.2	1.4	30.3	24.1	45.6	10.2	79.3	10.5
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	54.0	41.8	4.2	11.1	42.7	46.2	32.6	28.3	39.0
2	Perdesaan	6660	94.6	4.8	0.6	23.5	71.0	5.5	58.9	38.3	2.8
	INDONESIA	**8981**	**84.1**	**14.4**	**1.5**	**20.3**	**63.7**	**16.0**	**52.1**	**35.8**	**12.1**

4.13. ALAT KESEHATAN DALAM GEDUNG

Ketersediaan alat kesehatan dianalisis menurut: 1. Kelengkapan jenis alat yang tersedia yaitu jenis alat yang ditunjukkan oleh petugas Puskesmas dan 2. Jenis alat yang baik dan digunakan yaitu jenis alat yang ditunjukkan dan diakui alat tersebut baik dan digunakan untuk pelayanan. Analisis dikelompokkan atas 5 yaitu : 80 persen atau lebih, 60-79 persen, 40-59 persen, 20-39 persen, kurang dari 20 persen.

4.13.1. POLIKLINIK UMUM

Pada Rifaskes 2011 Data jenis alat Poliklinik umum yang dikumpulkan sebanyak 56 jenis.

Tabel 4.13.1.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Poliklinik Umum, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	2,9	18,0	31,2	27,7	20,3
2	Sumatera Utara	506	10,1	27,7	34,8	23,1	4,3
3	Sumatera Barat	248	6,9	26,2	25,8	18,5	22,6
4	Riau	195	6,2	27,2	35,4	17,4	13,8
5	Jambi	171	8,2	35,1	30,4	18,7	7,6
6	Sumatera Selatan	298	9,7	30,5	36,2	18,5	5,0
7	Bengkulu	173	5,8	37,0	41,0	14,5	1,7
8	Lampung	265	4,9	26,4	39,2	23,4	6,0
9	Bangka Belitung	57	15,8	22,8	45,6	5,3	10,5
10	Kepulauan Riau	65	3,1	43,1	23,1	10,8	20,0
11	DKI Jakarta	336	8,0	36,9	37,5	12,2	5,4
12	Jawa Barat	1031	9,5	37,3	35,6	11,9	5,6
13	Jawa Tengah	861	10,8	42,3	30,2	11,7	5,0
14	DI Yogyakarta	121	11,6	52,9	14,0	14,9	6,6
15	Jawa Timur	949	11,8	40,7	24,9	15,5	7,2
16	Banten	206	7,3	39,8	30,6	12,1	10,2
17	Bali	114	13,2	42,1	30,7	11,4	2,6
18	Nusa Tenggara Barat	149	8,1	21,5	21,5	18,1	30,9
19	Nusa Tenggara Timur	302	10,3	36,8	33,1	14,2	5,6
20	Kalimantan Barat	233	10,7	31,3	35,6	16,3	6,0
21	Kalimantan Tengah	176	13,1	33,0	29,5	14,8	9,7
22	Kalimantan Selatan	217	11,5	40,1	33,6	9,7	5,1
23	Kalimantan Timur	213	5,2	41,3	30,5	15,5	7,5
24	Sulawesi Utara	167	6,6	19,8	37,1	26,9	9,6
25	Sulawesi Tengah	163	8,0	20,9	32,5	20,9	17,8
26	Sulawesi Selatan	406	8,6	29,6	26,1	21,9	13,8
27	Sulawesi Tenggara	233	19,3	28,3	24,0	20,2	8,2
28	Gorontalo	74	10,8	43,2	28,4	9,5	8,1
29	Sulawesi Barat	81	4,9	27,2	28,4	18,5	21,0
30	Maluku	161	6,2	24,8	37,3	16,1	15,5
31	Maluku Utara	101	9,9	31,7	32,7	17,8	7,9
32	Papua Barat	104	2,9	14,4	33,7	27,9	21,2
33	Papua	294	6,1	14,6	26,5	25,2	27,6
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	8,9	37,1	30,5	15,8	7,6
2	Perdesaan	6660	9,3	31,8	31,7	17,1	10,2
	INDONESIA	**8981**	**9,2**	**33,2**	**31,4**	**16,8**	**9,5**

*Jumlah item alat 56 jenis

Tabel 4.13.1.1 menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat poliklinik umum. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik umum hanya 9,2 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara (19,3%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (15,8%) dan Provinsi Bali (13,2%). Persentase terendah di Provinsi Aceh dan Papua Barat (2,9%), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (3,1%) dan Provinsi Lampung dan Sulawesi Barat (4,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik umum , di perkotaan 8,9 persen, sementara di perdesaan 9,3 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-80 persen jenis alat poliklinik umum adalah 33,2 persen. Tertinggi di Provinsi Gorontalo (43,2%), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (43,1%) dan Provinsi Jawa Tengah (42,3%). Persentase terendah di Provinsi Papua Barat (14,4%), diikuti Provinsi Papua (14,6%) dan Provinsi Aceh (18%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60 - 80 persen jenis alat poliklinik umum, di perkotaan 37,1 persen, sementara di perdesaan 31,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-60 persen jenis alat poliklinik umum adalah 31,4 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (45,6%), diikuti Provinsi Bengkulu (41%) dan Provinsi Lampung (39,2%). Persentase terendah di Provinsi DIY (14%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (21,5%) dan Provinsi Kepulauan Riau (23,1%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas yang mempunyai 60-80 persen jenis alat poliklinik umum, di perkotaan 30,5 persen, sementara di perdesaan 31,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-40 persen jenis alat poliklinik umum adalah 16,8 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Papua Barat (27,9%), diikuti Provinsi Aceh (27,7%) dan Provinsi Sulawesi Utara (26,9%). Persentase terendah di Provinsi Bangka Belitung (5,3%), diikuti Provinsi Gorontalo (9,5%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (9,7%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas yang mempunyai 20-40 persen jenis alat poliklinik umum, di perkotaan 15,8 persen, sementara di perdesaan 17,1 persen.

Secara nasional persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik umum adalah 9,5 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (30,9%), diikuti Provinsi Papua (27,6%) dan Provinsi Sumatera Barat (22,6%). Persentase terendah di Provinsi Bengkulu (1,7%), diikuti Provinsi Sumatera Utara (4,3%) dan Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Tengah (5%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik umum, di perkotaan 7,6 persen, sementara di perdesaan 10,2 persen.

Tabel 4.13.1.2

Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Jenis Alat Poliklinik Umum yang digunakan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	1,3	15,4	29,9	29,6	23,8
2	Sumatera Utara	506	5,5	20,2	36,6	30,8	6,9
3	Sumatera Barat	248	4,4	23,0	27,8	18,5	26,2
4	Riau	195	2,1	21,0	32,8	26,7	17,4
5	Jambi	171	4,7	26,3	38,0	21,1	9,9
6	Sumatera Selatan	298	7,0	26,5	34,6	24,8	7,0
7	Bengkulu	173	4,6	23,7	46,8	23,1	1,7
8	Lampung	265	3,4	15,5	41,5	31,7	7,9
9	Bangka Belitung	57	12,3	17,5	45,6	12,3	12,3
10	Kepulauan Riau	65	1,5	36,9	26,2	13,8	21,5
11	DKI Jakarta	336	7,1	31,0	40,2	15,2	6,5
12	Jawa Barat	1031	7,0	31,1	38,2	16,9	6,8
13	Jawa Tengah	861	8,2	35,8	36,1	14,1	5,8
14	DI Yogyakarta	121	6,6	47,1	23,1	14,0	9,1
15	Jawa Timur	949	8,3	35,0	30,5	17,7	8,5
16	Banten	206	4,9	35,0	33,5	15,0	11,7
17	Bali	114	10,5	32,5	40,4	12,3	4,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	6,7	16,1	24,8	18,1	34,2
19	Nusa Tenggara Timur	302	5,6	30,8	37,7	18,2	7,6
20	Kalimantan Barat	233	7,3	27,9	36,5	21,5	6,9
21	Kalimantan Tengah	176	4,5	29,0	34,1	22,7	9,7
22	Kalimantan Selatan	217	8,3	28,6	41,5	15,7	6,0
23	Kalimantan Timur	213	3,3	30,5	38,0	20,2	8,0
24	Sulawesi Utara	167	5,4	14,4	31,1	34,1	15,0
25	Sulawesi Tengah	163	3,7	16,6	37,4	19,6	22,7
26	Sulawesi Selatan	406	5,9	26,1	25,6	25,1	17,2
27	Sulawesi Tenggara	233	15,5	26,2	24,0	22,7	11,6
28	Gorontalo	74	8,1	37,8	32,4	13,5	8,1
29	Sulawesi Barat	81	3,7	18,5	27,2	21,0	29,6
30	Maluku	161	1,2	21,7	29,8	28,6	18,6
31	Maluku Utara	101	6,9	18,8	42,6	20,8	10,9
32	Papua Barat	104	0	5,8	35,6	31,7	26,9
33	Papua	294	3,1	9,9	23,1	25,5	38,4
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	6,1	30,2	34,9	19,3	9,4
2	Perdesaan	6660	6,2	25,9	33,9	21,3	12,7
	INDONESIA	**8981**	**6,2**	**27,0**	**34,1**	**20,8**	**11,8**

Tabel 4.13.1.2 menunjukkan persentase Puskesmas menurut kelengkapan jenis alat poliklinik umum yang digunakan Secara nasional persentase Puskesmas mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik umum yang digunakan adalah 6,2 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara (15,5%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (12,3%) dan Provinsi Bali (10,5%). Terendah di Provinsi Papua Barat (0%), diikuti Provinsi Maluku (1,2%), dan Provinsi DI Aceh (1,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik umum yang digunakan , di perkotaan 6,1 persen, sementara di perdesaan 6,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-80 persen jenis alat poliklinik umum yang digunakan adalah 27 persen. Tertinggi di Provinsi DIY (47,1%), diikuti Provinsi Gorontalo (37,8%) dan Provinsi Kepulauan Riau (36,9%). Terendah di Provinsi Papua Barat (5,8%), diikuti Provinsi Papua (9,9%) dan Provinsi Sulawesi Utara (14,4%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas yang mempunyai 60-80 persen jenis alat poliklinik umum yang digunakan, di perkotaan 30,2 persen, sementara di perdesaan 25,9 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-60 persen jenis alat poliklinik umum yang digunakan adalah 34,1 persen. Tertinggi di Proviinsi Bengkulu (46,8%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (45,6%) dan Provinsi Maluku Utara (42,6%). Terendah di Provinsi DIY dan Papua (23,1%), diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara (24%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (24,8%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas yang mempunyai 40-60 persen jenis alat poliklinik umum yang digunakan, di perkotaan 34,9 persen, smentara di perdesaan 33,9 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-40 persen jenis alat poliklinik umum yang digunakan adalah 20,8 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara (34,1%), diikuti Provinsi Lampung dan Papua Barat (31,7%) dan Provinsi Sumatera Utara (30,8%). Terendah di Provinsi Bali (12,3%), diikuti Provinsi Gorontalo (13,5%) dan Provinsi Kepulauan Riau (13,8%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas yang mempunyai 20-40 persen jenis alat poliklinik umum yang digunakan, di perkotaan 19,3 persen, sementara di perdesaan 21,3 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen alat poliklinik umum yang digunakan adalah 11,8 persen. Terbesar di Provinsi Papua (38,4%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (34,2%) dan Provinsi Sulawesi Barat (29,6%). Terendah di Provinsi Bengkulu (1,7%), diikuti Provinsi Bali (4,4%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (6%). Bila dilihat dari lokasi, puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen alat poliklinik umum yang digunakan, di perkotaan 9,4 persen, sementara di perdesaan 12,7 persen. yang mempunyai kurang dari 20 persen.

Tabel 4.13.1.3
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Esensial Poliklinik Umum, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Stetoskop		Tensimeter		Timbangan Dewasa		Tempat Tidur Periksa	
			% Ada	%Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada
	Provinsi									
1	DI Aceh	311	95,8	4,2	93,9	6,1	92,9	7,1	93,2	6,8
2	Sumatera Utara	506	97,2	2,8	93,5	6,5	92,7	7,3	95,5	4,5
3	Sumatera Barat	248	98,8	1,2	94,4	5,6	91,5	8,5	98,4	1,6
4	Riau	195	93,8	6,2	92,3	7,7	90,8	9,2	94,4	5,6
5	Jambi	171	98,8	1,2	94,2	5,8	96,5	3,5	93,6	6,4
6	Sumatera Selatan	298	98,0	2,0	91,6	8,4	95,3	4,7	98,7	1,3
7	Bengkulu	173	97,7	2,3	94,8	5,2	97,7	2,3	97,7	2,3
8	Lampung	265	94,7	5,3	91,3	8,7	92,1	7,9	96,6	3,4
9	Bangka Belitung	57	98,2	1,8	94,7	5,3	93,0	7,0	94,7	5,3
10	Kepulauan Riau	65	96,9	3,1	95,4	4,6	93,8	6,2	96,9	3,1
11	DKI Jakarta	336	96,4	3,6	95,2	4,8	95,5	4,5	92,6	7,4
12	Jawa Barat	1031	99,1	0,9	95,0	5,0	96,3	3,7	94,8	5,2
13	Jawa Tengah	861	98,3	1,7	96,3	3,7	97,4	2,6	97,7	2,3
14	DI Yogyakarta	121	97,5	2,5	98,3	1,7	97,5	2,5	97,5	2,5
15	Jawa Timur	949	99,3	0,7	97,8	2,2	96,3	3,7	97,5	2,5
16	Banten	206	98,1	1,9	97,6	2,4	96,6	3,4	94,7	5,3
17	Bali	114	97,4	2,6	96,5	3,5	97,4	2,6	97,4	2,6
18	Nusa Tenggara Barat	149	94,0	6,0	93,3	6,7	87,9	12,1	85,9	14,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	95,0	5,0	91,1	8,9	91,1	8,9	91,4	8,6
20	Kalimantan Barat	233	97,4	2,6	92,7	7,3	93,6	6,4	96,1	3,9
21	Kalimantan Tengah	176	97,7	2,3	94,9	5,1	96,0	4,0	96,0	4,0
22	Kalimantan Selatan	217	97,7	2,3	94,0	6,0	94,9	5,1	96,8	3,2
23	Kalimantan Timur	213	98,1	1,9	92,0	8,0	94,8	5,2	96,7	3,3
24	Sulawesi Utara	167	96,4	3,6	93,4	6,6	94,0	6,0	95,2	4,8
25	Sulawesi Tengah	163	96,3	3,7	95,7	4,3	94,5	5,5	92,6	7,4
26	Sulawesi Selatan	406	94,8	5,2	92,6	7,4	90,4	9,6	89,9	10,1
27	Sulawesi Tenggara	233	92,7	7,3	93,1	6,9	91,8	8,2	92,7	7,3
28	Gorontalo	74	97,3	2,7	95,9	4,1	94,6	5,4	94,6	5,4
29	Sulawesi Barat	81	93,8	6,2	93,8	6,2	92,6	7,4	87,7	12,3
30	Maluku	161	88,2	11,8	83,9	16,1	88,8	11,2	83,9	16,1
31	Maluku Utara	101	93,1	6,9	93,1	6,9	92,1	7,9	88,1	11,9
32	Papua Barat	104	78,8	21,2	84,6	15,4	86,5	13,5	78,8	21,2
33	Papua	294	79,3	20,7	77,6	22,4	79,9	20,1	60,2	39,8
	Lokasi									
1	Perkotaan	2321	97,1	2,9	94,7	5,3	94,6	5,4	94,3	5,7
2	Perdesaan	6660	96,0	4,0	93,3	6,7	93,6	6,4	93,3	6,7
	INDONESIA	**8981**	**96,3**	**3,7**	**93,7**	**6,3**	**93,9**	**6,1**	**93,6**	**6,4**

Tabel 4.13.1.3 menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan alat esensial poliklinik umum. Ketersediaan alat esensial poliklinik umum yang dimaksud pada laporan ini adalah stetoskop, tensimeter, timbangan dewasa dan tempat tidur periksa yang dimiliki oleh puskesmas tersebut untuk pelayanan Poliklinik umum.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai stetoskop untuk pelayanan poliklinik umum adalah 96,3 persen, sementara 3,7 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Jawa Timur (99,3%), diikuti Provinsi Jawa Barat (99,1%) dan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi (98,8%). Terendah di Provinsi Papua Barat (78,8%), diikuti Provinsi Papua (79,3%) dan Provinsi Maluku (88,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai stetoskop untuk pelayanan poliklinik umum di perkotaan 97,1 persen sementara di perdesaan 96 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai tensimeter untuk pelayanan poliklinik umum adalah 93,7 persen, sementara 6,3 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Bengkulu (97,7%), diikuti Provinsi DIY (97,5%) dan Provinsi Jawa Tengah (97,4%). Terendah di Provinsi Papua (79,9%), diikuti Provinsi Papua Barat (86,5%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (87,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai tensimeter untuk pelayanan poliklinik umum di perkotaan 94,7 persen, sementara di perdesaan 93,3 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai timbangan dewasa untuk pelayanan poliklinik umum adalah 93,9 persen, sementara 6,1 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Bengkulu (97,7%), diikuti Provinsi DIY (97,5%) dan Provinsi Jawa Tengah (97,4%). Terendah di Provinsi Papua (79,9%), diikuti Provinsi Papua Barat (86,5%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (87,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai timbangan dewasa untuk pelayanan poliklinik umum di perkotaan 94,6 persen, sementara di perdesaan 93,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai tempat tidur periksa untuk pelayanan poliklinik umum adalah 93,6 persen, sementara 6,4 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan (98,7%), diikuti Provinsi Sumatera Barat (98,4%) dan Provinsi Bengkulu dan Jawa Tengah (97,7%). Terendah di Provinsi Papua (60,2%), diikuti Provinsi Maluku (83,9%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (85,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai tempat tidur periksa untuk pelayanan poliklinik umum di perkotaan 94,3 persen, sementara di perdesaan 93,3 persen.

Tabel 4.13.1.4
Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Jenis Alat Esensial yang digunakan pada Pelayanan Poliklinik Umum , Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Stetoskop		Tensimeter		Timbangan Dewasa		Tempat Tidur Periksa	
			% Ada	% Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada
	Provinsi									
1	DI Aceh	311	92,3	7,7	81,7	18,3	89,1	10,9	91,3	8,7
2	Sumatera Utara	506	92,3	7,7	79,1	20,9	84,0	16,0	93,5	6,5
3	Sumatera Barat	248	96,4	3,6	88,3	11,7	83,5	16,5	97,2	2,8
4	Riau	195	88,7	11,3	79,0	21,0	85,1	14,9	90,3	9,7
5	Jambi	171	94,2	5,8	81,9	18,1	88,3	11,7	93,0	7,0
6	Sumatera Selatan	298	91,6	8,4	73,8	26,2	88,3	11,7	97,3	2,7
7	Bengkulu	173	94,2	5,8	85,0	15,0	93,1	6,9	96,5	3,5
8	Lampung	265	91,3	8,7	72,8	27,2	86,8	13,2	92,8	7,2
9	Bangka Belitung	57	98,2	1,8	87,7	12,3	82,5	17,5	94,7	5,3
10	Kepulauan Riau	65	93,8	6,2	87,7	12,3	89,2	10,8	95,4	4,6
11	DKI Jakarta	336	94,3	5,7	91,1	8,9	90,8	9,2	90,5	9,5
12	Jawa Barat	1031	96,8	3,2	88,1	11,9	93,8	6,2	93,1	6,9
13	Jawa Tengah	861	97,7	2,3	91,4	8,6	94,4	5,6	97,0	3,0
14	DI Yogyakarta	121	97,5	2,5	95,9	4,1	97,5	2,5	96,7	3,3
15	Jawa Timur	949	98,4	1,6	92,9	7,1	93,0	7,0	96,6	3,4
16	Banten	206	97,1	2,9	93,7	6,3	91,7	8,3	91,7	8,3
17	Bali	114	97,4	2,6	90,4	9,6	93,9	6,1	96,5	3,5
18	Nusa Tenggara Barat	149	90,6	9,4	86,6	13,4	81,9	18,1	81,9	18,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	90,4	9,6	78,5	21,5	84,1	15,9	89,4	10,6
20	Kalimantan Barat	233	95,3	4,7	84,1	15,9	90,1	9,9	95,3	4,7
21	Kalimantan Tengah	176	96,0	4,0	87,5	12,5	91,5	8,5	94,3	5,7
22	Kalimantan Selatan	217	96,8	3,2	86,6	13,4	91,7	8,3	95,9	4,1
23	Kalimantan Timur	213	96,7	3,3	86,4	13,6	89,7	10,3	95,8	4,2
24	Sulawesi Utara	167	88,6	11,4	78,4	21,6	83,8	16,2	94,6	5,4
25	Sulawesi Tengah	163	89,0	11,0	85,3	14,7	87,1	12,9	90,8	9,2
26	Sulawesi Selatan	406	92,6	7,4	84,2	15,8	86,2	13,8	87,7	12,3
27	Sulawesi Tenggara	233	85,8	14,2	82,8	17,2	82,8	17,2	90,6	9,4
28	Gorontalo	74	94,6	5,4	79,7	20,3	93,2	6,8	93,2	6,8
29	Sulawesi Barat	81	85,2	14,8	80,2	19,8	81,5	18,5	81,5	18,5
30	Maluku	161	77,0	23,0	63,4	36,6	80,1	19,9	80,1	19,9
31	Maluku Utara	101	86,1	13,9	80,2	19,8	85,1	14,9	86,1	13,9
32	Papua Barat	104	69,2	30,8	70,2	29,8	82,7	17,3	75,0	25,0
33	Papua	294	70,7	29,3	65,0	35,0	72,8	27,2	54,4	45,6
	Lokasi									
1	Perkotaan	2321	94,4	5,6	87,0	13,0	90,3	9,7	92,5	7,5
2	Perdesaan	6660	92,6	7,4	83,7	16,3	88,3	11,7	91,5	8,5
	INDONESIA	8981	93,0	7,0	84,5	15,5	88,8	11,2	91,7	8,3

Tabel 4.13.1.4 menunjukkan persentase Puskesmas yang memiliki jenis alat esensial poliklinik umum yang digunakan

Secara nasional persentase Puskesmas yang memiliki stetoskop dan digunakan pada pelayanan adalah 93 persen. Tertinggi di Provinsi Jawa Timur (98,4%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (98,2%) dan Provinsi Jawa Tengah (97,7%). Terendah di Provinsi Papua Barat (69,2%), diikuti Provinsi Papua (70,7%) dan Provinsi Maluku (77%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memiliki stetoskop dan digunakan pada pelayanan poliklinik umum di perkotaan 94,4 persen, sementara di perdesaan 92,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki tensimeter dan digunakan adalah 84,5 persen. Tertinggi di Provinsi DIY (95,9%), diikuti Provinsi Banten (93,7%) dan Provinsi Jawa Timur (92,9%). Terendah di Provinsi Maluku (63,4%), diikuti Provinsi Papua (65%) dan Provinsi Papua Barat (70,2%). Bila dilihat dari lokasi persentase puskesmas yang memiliki tensimeter dan digunakan di perkotaan 87 persen, sementara di perdesaan 83,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki timbangan dewasa dan digunakan adalah 88,8 persen. Terbesar di Provinsi DIY (97,5%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (94,4%) dan Provinsi Bali (93,9%). Terendah di Provinsi Papua (72,8%), diikuti Provinsi Maluku (80,1%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (81,9%). Bila dilihat dari lokasi persentase puskesmas yang memiliki timbangan dewasa dan digunakan di perkotaan 90,3 persen, sementara di perdesaan 88,3 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki tempat tidur periksa dan digunakan adalah 91,7persen. Terbesar di Provinsi Sumatera Selatan (97,3%), diikuti Provinsi Sumatera Barat (97,2%) dan Provinsi Jawa Tengah (97%). Terendah di Provinsi Papua (54,4%), diikuti Provinsi Papua Barat (75%) dan Provinsi Maluku (80,1%). Bila dilihat dari lokasi persentase puskesmas yang memiliki tempat tidur periksa dan digunakan di perkotaan 92,5 persen, sementara di perdesaan 91,5 persen.

4.13.2. POLIKLINIK GIGI

Pada Rifaskes 2011 data jenis alat Poliklinik Gigi yang dikumpulkan sebanyak 68 jenis. Tabel 4.13.2.1 menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat poliklinik gigi. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik gigi adalah 10 persen. Persentase tertinggi di Provinsi DKI (27,1%), diikuti Provinsi DIY (31,4%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (18%). Persentase terendah di Provinsi Maluku Utara (1%), diikuti Provinsi Papua (3,1%) dan Provinsi Kalimantan Barat (3,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik gigi, di perkotaan 15,8 persen, sementara di perdesaan 8 persen.

Tabel 4.13.2.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Poliklinik Gigi, RIFASKES 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	4,2	27,7	34,4	10,3	23,5
2	Sumatera Utara	506	6,5	25,5	26,5	14,4	27,1
3	Sumatera Barat	248	7,7	45,6	36,7	6,5	3,6
4	Riau	195	9,2	27,2	36,4	17,4	9,7
5	Jambi	171	6,4	34,5	42,7	8,8	7,6
6	Sumatera Selatan	298	7,0	27,5	19,8	9,7	35,9
7	Bengkulu	173	6,4	25,4	20,2	9,8	38,2
8	Lampung	265	6,4	28,3	32,5	12,5	20,4
9	Bangka Belitung	57	10,5	57,9	24,6	3,5	3,5
10	Kepulauan Riau	65	9,2	41,5	24,6	12,3	12,3
11	DKI Jakarta	336	27,1	50,9	17,0	0,9	4,2
12	Jawa Barat	1031	8,0	41,8	26,6	6,1	17,6
13	Jawa Tengah	861	12,1	57,0	22,1	2,8	6,0
14	DI Yogyakarta	121	31,4	62,8	5,8	0	0
15	Jawa Timur	949	14,4	59,5	19,9	3,3	2,8
16	Banten	206	9,7	59,7	15,0	4,4	11,2
17	Bali	114	12,3	71,1	15,8	0,9	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	11,4	53,7	22,8	2,0	10,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	8,6	33,1	30,5	11,6	16,2
20	Kalimantan Barat	233	3,4	30,9	30,5	20,6	14,6
21	Kalimantan Tengah	176	12,5	32,4	28,4	10,8	15,9
22	Kalimantan Selatan	217	18,0	53,5	20,7	5,1	2,8
23	Kalimantan Timur	213	11,3	43,7	23,5	8,9	12,7
24	Sulawesi Utara	167	7,2	22,2	28,1	13,2	29,3
25	Sulawesi Tengah	163	4,9	16,0	16,6	19,0	43,6
26	Sulawesi Selatan	406	9,4	42,4	29,3	6,9	12,1
27	Sulawesi Tenggara	233	10,3	12,9	12,9	15,9	48,1
28	Gorontalo	74	8,1	31,1	21,6	9,5	29,7
29	Sulawesi Barat	81	3,7	39,5	17,3	13,6	25,9
30	Maluku	161	6,8	14,9	21,1	11,8	45,3
31	Maluku Utara	101	1,0	15,8	9,9	5,0	68,3
32	Papua Barat	104	6,7	13,5	4,8	3,8	71,2
33	Papua	294	3,1	11,2	5,8	4,4	75,5
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	15,8	52,9	20,8	3,8	6,7
2	Perdesaan	6660	8,0	35,1	24,5	9,2	23,3
	INDONESIA	**8981**	**10,0**	**39,7**	**23,5**	**7,8**	**19,0**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik gigi adalah 39,7 persen. Tertinggi di Provinsi Bali (71,1%), diikuti Provinsi DIY (62,8%) dan Provinsi Banten (59,7%). Persentase terendah di Provinsi Papua (11,2%), diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara (12,9%) dan Provinsi Papua Barat (13,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik gigi, di perkotaan 32,9 persen, sementara di perdesaan 35,1 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik gigi adalah 23,5 persen. Tertinggi di Provinsi Jambi (42,7%), diikuti Provinsi Sumatera Barat (36,7%) dan Provinsi Riau (36,4%). Persentase terendah di Provinsi Papua Barat (4,8%), diikuti Provinsi DIY dan Papua (5,8%) dan Provinsi Maluku Utara (9,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik gigi, di perkotaan 20,8 persen, sementara di perdesaan 24,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik gigi adalah 7,8 persen. Tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat (20,6%), diikuti Provinsi Sulawesi Tengah (19%) dan Provinsi Riau (17,4%). Persentase terendah di Provinsi DKI dan Bali (0,9%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (2%) dan Provinsi Jawa Tengah (2,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik gigi, di perkotaan 3,8 persen, sementara di perdesaan 9,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik gigi adalah 19 persen. Tertinggi di Provinsi Papua (75,5%), diikuti Provinsi Papua Barat (71,2%) dan Provinsi Maluku Utara (68,3%). Persentase terendah di DI Yogyakarta dan Bali (0%), diikuti Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan (2,8%), kemudian Provinsi Sumatera Barat (3,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik gigi, di perkotaan 6,7 persen , sementara di perdesaan 23,3 persen.

Tabel 4.13.2.2
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Jenis Alat Poliklinik Gigi yang digunakan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	2,9	19,0	37,9	14,1	26,0
2	Sumatera Utara	506	4,3	17,8	26,9	17,8	33,2
3	Sumatera Barat	248	6,0	34,3	46,8	6,9	6,0
4	Riau	195	5,1	20,0	34,9	22,6	17,4
5	Jambi	171	5,3	24,6	40,4	19,9	9,9
6	Sumatera Selatan	298	4,4	23,8	20,5	10,7	40,6
7	Bengkulu	173	4,0	19,1	20,2	9,8	46,8
8	Lampung	265	2,6	24,5	32,5	16,6	23,8
9	Bangka Belitung	57	7,0	42,1	38,6	8,8	3,5
10	Kepulauan Riau	65	7,7	30,8	32,3	15,4	13,8
11	DKI Jakarta	336	24,1	48,8	20,5	1,2	5,4
12	Jawa Barat	1031	5,3	35,3	31,9	9,1	18,3
13	Jawa Tengah	861	8,0	53,1	27,2	5,1	6,6
14	DI Yogyakarta	121	19,0	72,7	8,3	0	0
15	Jawa Timur	949	9,3	55,1	27,0	4,7	3,9
16	Banten	206	7,8	47,6	23,8	7,8	13,1
17	Bali	114	6,1	69,3	21,9	2,6	
18	Nusa Tenggara Barat	149	9,4	45,6	28,2	2,7	14,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	5,3	23,5	36,4	14,2	20,5
20	Kalimantan Barat	233	1,3	23,6	30,0	27,9	17,2
21	Kalimantan Tengah	176	5,1	26,1	30,7	15,3	22,7
22	Kalimantan Selatan	217	11,1	46,1	32,3	6,5	4,1
23	Kalimantan Timur	213	9,4	31,5	29,1	13,6	16,4
24	Sulawesi Utara	167	4,8	16,8	27,5	15,0	35,9
25	Sulawesi Tengah	163	3,1	10,4	17,8	19,6	49,1
26	Sulawesi Selatan	406	4,2	36,7	33,3	12,3	13,5
27	Sulawesi Tenggara	233	5,2	14,2	10,7	17,6	52,4
28	Gorontalo	74	4,1	17,6	27,0	9,5	41,9
29	Sulawesi Barat	81	1,2	21,0	33,3	14,8	29,6
30	Maluku	161	5,6	10,6	19,3	12,4	52,2
31	Maluku Utara	101	0	14,9	10,9	4,0	70,3
32	Papua Barat	104	1,9	16,3	3,8	5,8	72,1
33	Papua	294	3,1	8,8	4,8	4,4	78,9
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	10,7	46,7	28,3	6,2	8,1
2	Perdesaan	6660	5,2	29,4	27,0	11,9	26,6
	INDONESIA	**8981**	**6,6**	**33,8**	**27,3**	**10,4**	**21,8**

Tabel 4.13.2.2 menunjukkan persentase Puskesmas menurut kelengkapan jenis alat poliklinik gigi yang digunakan. Secara nasional, persentase Puskesmas mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik gigi yang digunakan adalah 6,6 persen. Tertinggi di Provinsi DKI (24,1%), diikuti Provinsi DIY (19%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (11,1%). Terendah di Provinsi Maluku Utara (0%), diikuti Provinsi Sulawesi Barat (1,2%), dan Provinsi Kalimantan Barat (1,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik gigi yang digunakan, di perkotaan 10,7 persen, sementara di perdesaan 5,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik gigi yang digunakan adalah 33,8 persen. Tertinggi di Provinsi DIY (72,7%), diikuti Provinsi Bali (69,3%) dan Provinsi Jawa Timur (55,1%). Terendah di Provinsi Papua (8,8%), diikuti Provinsi Maluku (10,6%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (10,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik gigi yang digunakan, di perkotaan 46,7 persen, sementara di perdesaan 29,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik gigi yang digunakan adalah 27,3 persen. Tertinggi di Provinsi Sumatera Barat (46,8%), diikuti Provinsi Jambi (40,4%) dan Provinsi Bangka Belitung (38,6%). Terendah di Provinsi Papua (4,8%), diikuti Provinsi Papua Barat (3,8%) dan Provinsi DIY (8,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik gigi yang digunakan, di perkotaan 28,3 persen, sementara di perdesaan 27 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik gigi yang digunakan adalah 10,4 persen. Tertinggi di Provinsi Riau (22,6%), diikuti Provinsi Kalimantan Barat (27,9%) dan Provinsi Jambi (19,9%). Terendah di Provinsi DI Yogyakarta (0%), diikuti Provinsi DKI (1,2%) dan Provinsi Bali (2,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik gigi yang digunakan, di perkotaan 6,2 persen, sementara di perdesaan 11,9 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik gigi yang digunakan adalah 21,8 persen. Tertinggi di Provinsi Papua (78,9%), diikuti Provinsi Papua Barat (72,1%) dan Provinsi Maluku Utara (70,3%). Terendah di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali (0%), diikuti Bangka Belitung (3,5%), dan Provinsi Jawa Timur (3,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik gigi yang digunakan, di perkotaan 8,1 persen, sementara di perdesaan 26,6 persen.

4.13.3. POLIKLINIK KIA

Pada Rifaskes 2011 data jenis alat Poliklinik KIA yang dikumpulkan sebanyak 59 jenis. Tabel 4.13.3.1 menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat poliklinik KIA. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik KIA hanya 14,6 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (27,2%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (26,2%) dan Provinsi Banten (24,8%). Terendah di Provinsi Papua Barat (2,9%), diikuti Provinsi Maluku (3,1%) dan Provinsi Bali (4,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik KIA, di perkotaan 12,5 persen sementara di perdesaan 15,3 persen.

Tabel 4.13.3.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Poliklinik KIA, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	6,4	25,1	28,3	30,9	9,3
2	Sumatera Utara	506	9,5	26,9	32,8	18,8	12,1
3	Sumatera Barat	248	7,3	26,6	32,3	26,6	7,3
4	Riau	195	9,7	30,8	36,4	19,0	4,1
5	Jambi	171	9,4	38,6	42,1	8,8	1,2
6	Sumatera Selatan	298	14,8	40,6	29,9	10,7	4,0
7	Bengkulu	173	15,0	41,6	33,5	8,1	1,7
8	Lampung	265	13,6	37,7	31,3	14,0	3,4
9	Bangka Belitung	57	17,5	42,1	36,8	3,5	0
10	Kepulauan Riau	65	9,2	38,5	33,8	13,8	4,6
11	DKI Jakarta	336	6,5	37,5	38,4	14,6	3,0
12	Jawa Barat	1031	18,8	50,9	22,7	6,4	1,2
13	Jawa Tengah	861	16,8	51,6	25,1	5,6	0,9
14	DI Yogyakarta	121	8,3	60,3	28,1	3,3	0
15	Jawa Timur	949	24,1	54,0	18,4	3,0	0,5
16	Banten	206	24,8	46,6	20,4	6,8	1,5
17	Bali	114	4,4	49,1	37,7	7,0	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	26,2	51,0	18,8	4,0	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	27,2	51,3	15,9	3,3	2,3
20	Kalimantan Barat	233	12,4	40,8	33,5	11,2	2,1
21	Kalimantan Tengah	176	11,4	29,5	41,5	13,6	4,0
22	Kalimantan Selatan	217	16,6	47,5	28,1	5,5	2,3
23	Kalimantan Timur	213	6,1	35,7	37,1	16,4	4,7
24	Sulawesi Utara	167	16,8	34,7	32,3	14,4	1,8
25	Sulawesi Tengah	163	10,4	33,7	35,6	15,3	4,9
26	Sulawesi Selatan	406	8,6	40,6	33,0	14,8	3,0
27	Sulawesi Tenggara	233	18,0	28,8	28,3	17,2	7,7
28	Gorontalo	74	18,9	44,6	28,4	6,8	1,4
29	Sulawesi Barat	81	8,6	33,3	43,2	11,1	3,7
30	Maluku	161	3,1	28,0	24,2	21,1	23,6
31	Maluku Utara	101	14,9	37,6	19,8	13,9	13,9
32	Papua Barat	104	2,9	19,2	35,6	22,1	20,2
33	Papua	294	8,5	21,8	23,5	18,0	28,2
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	12,5	42,8	29,7	11,9	3,1
2	Perdesaan	6660	15,3	40,8	27,5	11,2	5,2
	INDONESIA	**8981**	**14,6**	**41,3**	**28,1**	**11,4**	**4,7**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 41,3 persen. Tertinggi di Provinsi DIY (60,3%), diikuti Provinsi Jawa Timur (54%) dan Provinsi Jawa Tengah (51,6%). Terendah di Provinsi Papua Barat (19,2%), diikuti Provinsi Papua (21,8%) dan Provinsi Aceh (25,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik KIA, di perkotaan 42,8 persen, sementara di perdesaan 40,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 28,1 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat (43,2%), diikuti Provinsi Jambi (42,1%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (41,5%). Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (15,9%), diikuti Provinsi Jawa Timur (18,4%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (18,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik KIA, di perkotaan 29,7 persen, sementara di perdesaan 27,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 11,4 persen. Tertinggi di Provinsi Aceh (30,9%), diikuti Provinsi Sumatera Barat (26,6%) dan Provinsi Papua Barat (22,1%). Terendah di Provinsi Jawa Timur (3%), diikuti Provinsi DIY dan Nusa Tenggara Timur (3,3%) dan Provinsi Bangka Belitung (3,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik KIA, di perkotaan 11,9 persen, sementara di perdesaan 11,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 4,7persen. Tertinggi di Provinsi Papua (28,2%), diikuti Provinsi Maluku (23,6%) dan Provinsi Papua Barat (20,2%). Terendah di Provinsi Jawa Timur (0,5%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (0,9%) dan Provinsi Jambi (1,2%). Terendah di Provinsi Bangka Belitung (0%), Provinsi DIY (0%) dan Nusa Tenggara Barat (0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik KIA, di perkotaan 3,1 persen dan sementara di perdesaan 5,2 persen.

Tabel 4.13.3.2 menunjukkan persentase Puskesmas menurut kelengkapan jenis alat poliklinik KIA yang digunakan. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik KIA yang digunakan adalah 9,9 persen. Tertinggi di Provinsi Banten (18,9%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur (18,2%) dan Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara (16,3%). Terendah di Provinsi Maluku (0,6%), diikuti Provinsi Papua Barat (1%) dan Provinsi Sulawesi Barat (1,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat poliklinik KIA yang digunakan, di perkotaan 8,7 persen, sementara di perdesaan 10,3 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik KIA yang digunakan adalah 36 persen. Tertinggi di Provinsi Jawa Timur (53,7%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (52,3%) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (52%). Terendah di Provinsi Papua Barat (12,5%), diikuti Provinsi Papua (13,9%) dan Provinsi Aceh (17%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik KIA yang digunakan, di perkotaan 35,8 persen, sementara di perdesaan 36 persen.

Tabel 4.13.3.2
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Jenis Alat Poliklinik KIA yang digunakan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	4,5	17,0	25,7	37,0	15,8
2	Sumatera Utara	506	6,9	20,4	33,0	23,7	16,0
3	Sumatera Barat	248	6,0	20,6	31,9	33,1	8,5
4	Riau	195	5,1	26,7	37,4	24,1	6,7
5	Jambi	171	7,6	32,2	39,2	19,3	1,8
6	Sumatera Selatan	298	10,7	32,2	35,6	15,1	6,4
7	Bengkulu	173	8,1	35,3	35,8	19,1	1,7
8	Lampung	265	7,9	29,4	35,1	21,5	6,0
9	Bangka Belitung	57	10,5	35,1	38,6	10,5	5,3
10	Kepulauan Riau	65	4,6	30,8	40,0	16,9	7,7
11	DKI Jakarta	336	5,4	31,3	39,3	19,9	4,2
12	Jawa Barat	1031	13,3	46,5	29,4	8,8	2,0
13	Jawa Tengah	861	11,8	46,6	33,0	7,2	1,4
14	DI Yogyakarta	121	5,0	49,6	41,3	4,1	0
15	Jawa Timur	949	16,3	53,7	23,9	5,1	0,9
16	Banten	206	18,9	45,1	25,7	8,3	1,9
17	Bali	114	2,6	40,4	46,5	8,8	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	149	14,1	52,3	24,8	6,7	2,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	18,2	52,0	23,2	3,3	3,3
20	Kalimantan Barat	233	7,3	33,9	37,8	17,6	3,4
21	Kalimantan Tengah	176	5,7	22,2	40,9	24,4	6,8
22	Kalimantan Selatan	217	11,5	37,3	29,5	17,1	4,6
23	Kalimantan Timur	213	5,2	25,8	38,0	24,4	6,6
24	Sulawesi Utara	167	11,4	27,5	33,5	20,4	7,2
25	Sulawesi Tengah	163	6,7	28,8	38,7	17,8	8,0
26	Sulawesi Selatan	406	5,2	35,7	35,2	19,2	4,7
27	Sulawesi Tenggara	233	16,3	20,6	31,3	20,2	11,6
28	Gorontalo	74	14,9	43,2	29,7	10,8	1,4
29	Sulawesi Barat	81	1,2	30,9	42,0	18,5	7,4
30	Maluku	161	0,6	20,5	27,3	19,3	32,3
31	Maluku Utara	101	6,9	27,7	23,8	22,8	18,8
32	Papua Barat	104	1,0	12,5	33,7	29,8	23,1
33	Papua	294	5,4	13,9	24,8	18,4	37,4
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	8,7	35,8	34,6	16,5	4,4
2	Perdesaan	6660	10,3	36,0	30,8	15,2	7,7
	INDONESIA	**8981**	**9,9**	**36,0**	**31,8**	**15,5**	**6,8**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik KIA yang digunakan adalah 31,8 persen. Tertinggi di Provinsi Bali (46,5%), diikuti Provinsi Sulawesi Barat (42%) dan Provinsi DIY (41,3%). Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (23,2%), diikuti Provinsi Maluku Utara (23,8%) dan Provinsi Jawa Timur (23,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik KIA yang digunakan, di perkotaan 34,6 persen, sementara di perdesaan 30,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik KIA yang digunakan adalah 15,5 persen. Tertinggi di Provinsi Aceh (37%), diikuti Provinsi Sumatera Barat (33,1%) dan Provinsi Papua Barat (29,8%). Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (3,3%), diikuti Provinsi DIY (4,1%) dan Provinsi Jawa Timur (5,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik KIA yang digunakan, di perkotaan 16,5 persen, sementara di perdesaan 15,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen alat poliklinik KIA yang digunakan adalah 6,8 persen. Tertinggi di Provinsi Papua (37,4%), diikuti Provinsi Maluku (32,3%) dan Provinsi Papua Barat (23,1%). Terendah di Provinsi DI Yogyakarta (0%), diikuti Provinsi Jawa Timur (0,9%), dan Provinsi Jawa Tengah dan Gorontalo (1,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik KIA yang digunakan, di perkotaan 4,4 persen, sementara di perdesaan 7,7 persen.

Tabel 4.13.3.3.a
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Esensial Poliklinik KIA, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Stetoskop		Tensimeter		Tempat Tidur Periksa		Termometer Klinis	
			% Ada	%Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada
	Provinsi									
1	DI Aceh	311	84,6	15,4	80,1	19,9	93,6	6,4	43,7	56,3
2	Sumatera Utara	506	72,1	27,9	71,9	28,1	88,3	11,7	53,0	47,0
3	Sumatera Barat	248	89,9	10,1	89,1	10,9	96,0	4,0	68,5	31,5
4	Riau	195	89,7	10,3	89,2	10,8	95,4	4,6	64,6	35,4
5	Jambi	171	90,6	9,4	87,7	12,3	93,0	7,0	64,3	35,7
6	Sumatera Selatan	298	87,2	12,8	81,5	18,5	94,0	6,0	60,4	39,6
, 7	Bengkulu	173	86,1	13,9	83,2	16,8	91,9	8,1	68,2	31,8
8	Lampung	265	89,8	10,2	83,0	17,0	94,0	6,0	64,9	35,1
9	Bangka Belitung	57	89,5	10,5	86,0	14,0	96,5	3,5	61,4	38,6
10	Kepulauan Riau	65	86,2	13,8	75,4	24,6	92,3	7,7	58,5	41,5
11	DKI Jakarta	336	89,6	10,4	91,1	8,9	94,6	5,4	63,4	36,6
12	Jawa Barat	1031	93,2	6,8	90,3	9,7	97,1	2,9	73,0	27,0
13	Jawa Tengah	861	95,6	4,4	94,3	5,7	97,9	2,1	75,8	24,2
14	DI Yogyakarta	121	99,2	0,8	97,5	2,5	96,7	3,3	72,7	27,3
15	Jawa Timur	949	95,0	5,0	95,3	4,7	98,2	1,8	80,8	19,2
16	Banten	206	93,7	6,3	92,2	7,8	98,1	1,9	73,8	26,2
17	Bali	114	93,9	6,1	93,0	7,0	97,4	2,6	64,0	36,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	94,0	6,0	91,3	8,7	96,0	4,0	72,5	27,5
19	Nusa Tenggara Timur	302	89,7	10,3	93,7	6,3	93,0	7,0	75,2	24,8
20	Kalimantan Barat	233	85,8	14,2	79,4	20,6	92,7	7,3	67,8	32,2
21	Kalimantan Tengah	176	88,6	11,4	82,4	17,6	94,9	5,1	60,2	39,8
22	Kalimantan Selatan	217	88,5	11,5	93,1	6,9	95,9	4,1	69,1	30,9
23	Kalimantan Timur	213	87,3	12,7	86,4	13,6	96,2	3,8	60,1	39,9
24	Sulawesi Utara	167	79,0	21,0	83,2	16,8	88,6	11,4	56,3	43,7
25	Sulawesi Tengah	163	80,4	19,6	83,4	16,6	87,1	12,9	51,5	48,5
26	Sulawesi Selatan	406	85,0	15,0	89,2	10,8	94,8	5,2	58,6	41,4
27	Sulawesi Tenggara	233	78,1	21,9	80,7	19,3	88,4	11,6	62,2	37,8
28	Gorontalo	74	93,2	6,8	94,6	5,4	97,3	2,7	68,9	31,1
29	Sulawesi Barat	81	82,7	17,3	84,0	16,0	85,2	14,8	58,0	42,0
30	Maluku	161	53,4	46,6	57,8	42,2	67,7	32,3	46,0	54,0
31	Maluku Utara	101	74,3	25,7	72,3	27,7	78,2	21,8	62,4	37,6
32	Papua Barat	104	63,5	36,5	69,2	30,8	76,9	23,1	47,1	52,9
33	Papua	294	68,7	31,3	65,0	35,0	63,3	36,7	51,7	48,3
	Lokasi									
1	Perkotaan	2321	90,6	9,4	89,7	10,3	95,2	4,8	66,4	33,6
2	Perdesaan	6660	86,2	13,8	85,2	14,8	92,1	7,9	65,8	34,2
	INDONESIA	**8981**	**87,3**	**12,7**	**86,4**	**13,6**	**92,9**	**7,1**	**66,0**	**34,0**

Tabel 4.13.3.3.b

Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Esensial Poliklinik KIA, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Timbangan Bayi		Timbangan Dewasa		Dopler		HB Sahli	
			%Ada	%Tidak Ada	%Ada	%Tidak Ada	%Ada	%Tidak Ada	%Ada	%Tidak Ada
	Provinsi									
1	DI Aceh	311	66,6	33,4	86,8	13,2	57,6	42,4	35,4	64,6
2	Sumatera Utara	506	80,6	19,4	75,7	24,3	39,9	60,1	27,7	72,3
3	Sumatera Barat	248	93,5	6,5	92,7	7,3	85,9	14,1	27,4	72,6
4	Riau	195	88,2	11,8	93,8	6,2	64,6	35,4	34,4	65,6
5	Jambi	171	81,9	18,1	95,9	4,1	69,0	31,0	44,4	55,6
6	Sumatera Selatan	298	85,9	14,1	91,6	8,4	45,6	54,4	51,3	48,7
7	Bengkulu	173	92,5	7,5	89,0	11,0	79,2	20,8	38,2	61,8
8	Lampung	265	92,8	7,2	89,8	10,2	68,3	31,7	54,3	45,7
9	Bangka Belitung	57	78,9	21,1	96,5	3,5	63,2	36,8	35,1	64,9
10	Kepulauan Riau	65	76,9	23,1	87,7	12,3	84,6	15,4	32,3	67,7
11	DKI Jakarta	336	94,6	5,4	94,6	5,4	73,5	26,5	31,0	69,0
12	Jawa Barat	1031	95,6	4,4	95,8	4,2	67,3	32,7	66,4	33,6
13	Jawa Tengah	861	93,8	6,2	97,2	2,8	82,1	17,9	41,9	58,1
14	DI Yogyakarta	121	96,7	3,3	97,5	2,5	94,2	5,8	12,4	87,6
15	Jawa Timur	949	97,4	2,6	98,4	1,6	71,2	28,8	54,9	45,1
16	Banten	206	91,7	8,3	97,6	2,4	92,2	7,8	60,7	39,3
17	Bali	114	88,6	11,4	94,7	5,3	89,5	10,5	45,6	54,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	87,9	12,1	94,6	5,4	90,6	9,4	51,0	49,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	92,7	7,3	94,7	5,3	70,5	29,5	61,6	38,4
20	Kalimantan Barat	233	80,3	19,7	89,7	10,3	76,8	23,2	44,2	55,8
21	Kalimantan Tengah	176	83,5	16,5	90,9	9,1	79,0	21,0	47,7	52,3
22	Kalimantan Selatan	217	83,9	16,1	94,9	5,1	93,1	6,9	48,8	51,2
23	Kalimantan Timur	213	81,7	18,3	93,0	7,0	73,7	26,3	43,7	56,3
24	Sulawesi Utara	167	92,2	7,8	87,4	12,6	64,7	35,3	38,3	61,7
25	Sulawesi Tengah	163	73,6	26,4	87,1	12,9	64,4	35,6	52,8	47,2
26	Sulawesi Selatan	406	82,3	17,7	93,1	6,9	52,2	47,8	39,4	60,6
27	Sulawesi Tenggara	233	85,0	15,0	82,8	17,2	56,7	43,3	48,1	51,9
28	Gorontalo	74	81,1	18,9	86,5	13,5	87,8	12,2	58,1	41,9
29	Sulawesi Barat	81	87,7	12,3	91,4	8,6	55,6	44,4	56,8	43,2
30	Maluku	161	74,5	25,5	65,8	34,2	44,1	55,9	34,8	65,2
31	Maluku Utara	101	82,2	17,8	80,2	19,8	69,3	30,7	65,3	34,7
32	Papua Barat	104	78,8	21,2	76,9	23,1	35,6	64,4	39,4	60,6
33	Papua	294	74,8	25,2	75,2	24,8	37,4	62,6	37,1	62,9
	Lokasi									
1	Perkotaan	2321	86,2	13,8	93,9	6,1	73,5	26,5	37,6	62,4
2	Perdesaan	6660	88,6	11,4	90,3	9,7	65,9	34,1	49,3	50,7
	INDONESIA	**8981**	**88,0**	**12,0**	**91,3**	**8,7**	**67,8**	**32,2**	**46,3**	**53,7**

Tabel 4.13.3.3.a. dan Tabel 4.13.3.3.b. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan alat esensial poliklinik KIA. Alat esensial poliklinik KIA yang dimaksud pada laporan ini adalah stetoskop, tensimeter, tempat tidur periksa, termometer klinis, timbangan bayi, timbangan dewasa, dopler dan HB Sahli yang dimiliki oleh puskesmas tersebut untuk pelayanan Poliklinik KIA.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai stetoskop untuk pelayanan poliklinik KIA adalah 87,3 persen, sementara 12,7 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi DIY (99,2%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (95,6%) dan Provinsi Jawa Timur (95%). Terendah di Provinsi Maluku (53,4%), diikuti Provinsi Papua Barat (63,5%) dan Provinsi Papua (68,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai stetoskop untuk pelayanan poliklinik KIA, di perkotaan 90,6 persen, sementara di perdesaan 86,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai tensimeter untuk pelayanan poliklinik KIA adalah 86,4 persen, sementara 13,6 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi DIY (97,5%), diikuti Provinsi Jawa Timur (95,3%) dan Provinsi Jawa Tengah (94,3%). Terendah di Provinsi Maluku (57,8%), diikuti Provinsi Papua (65%) dan Provinsi Papua Barat (69,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai tensimeter untuk pelayanan poliklinik KIA, di perkotaan 89,7 persen, sementara di perdesaan 85,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai tempat tidur periksa adalah 92,9 persen, sementara 7,1 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah (97,9%), diikuti Provinsi Gorontalo (97,3%) dan Provinsi Jawa Barat (97,1%). Terendah di Provinsi Papua (63,3%), diikuti Provinsi Maluku (67,7%) dan Provinsi Papua Barat (76,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai tempat tidur periksa, di perkotaan 95,2 persen , sementara di perdesaan 92,1 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai termometer klinis adalah 66 persen, sementara 34 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Jawa Timur (80,8%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur (75,2%) dan Provinsi Banten (73,8%). Terendah di Provinsi Aceh (43,7%), diikuti Provinsi Maluku (46%) dan Provinsi Papua Barat (47,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai termometer klinis, di perkotaan 66,4 persen, sementara di perdesaan 65,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai timbangan bayi adalah 88 persen, sementara 12 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Jawa Timur (97,4%), diikuti Provinsi DIY (96,7%) dan Provinsi Jawa Barat (95,6%). Terendah di Provinsi Aceh (66,6%), diikuti Provinsi Sulawesi Tengah (73,6%) dan Provinsi Maluku (74,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai timbangan bayi, di perkotaan 86,2 persen, sementara di perdesaan 88,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai timbangan dewasa adalah 91,3 persen, sementara 8,7 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Jawa Timur (98,4%), diikuti Provinsi Banten (97,6%) dan Provinsi DIY (97,5%). Terendah di Provinsi Maluku (65,8%), diikuti Provinsi Papua (75,2%) dan Provinsi Sumatera Utara (75,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai timbangan dewasa, di perkotaan 93,9 persen, sementara di perdesaan 90,3 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai dopler adalah 67,8 persen, sementara 32,2 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi DIY (94,2%), diikuti Provinsi Kalimantan Selatan (93,1%) dan Provinsi Banten (92,2%). Terendah di Provinsi Papua Barat (35,6%), diikuti Provinsi Papua (37,4%) dan Provinsi Sumatera Utara (39,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai dopler, di perkotaan 73,5 persen, sementara di perdesaan 65,9 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai HB Sahli adalah 46,3 persen, sementara 53,7 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Jawa Barat (66,4%), diikuti Provinsi Maluku Utara (65,3%) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (61,6%). Terendah di Provinsi DIY (12,4%), diikuti Provinsi Sumatera Barat (27,4%) dan Provinsi Sumatera Utara (27,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai HB Sahli, di perkotaan 37,6 persen, sementara di perdesaan 49,3 persen.

Tabel 4.13.3.4.a
Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Jenis Alat Esensial yang digunakan pada Pelayanan Poliklinik KIA, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Stetoskop		Tensimeter		Tempat Tidur Periksa		Termometer Klinis	
			%Ada	%Tidak Ada	%Ada	%Tidak Ada	%Ada	%Tidak Ada	%Ada	%Tidak Ada
	Provinsi									
1	DI Aceh	311	78,1	21,9	65,3	34,7	89,4	10,6	39,5	60,5
2	Sumatera Utara	506	66,2	33,8	54,7	45,3	84,2	15,8	47,2	52,8
3	Sumatera Barat	248	84,3	15,7	80,6	19,4	94,8	5,2	62,9	37,1
4	Riau	195	84,6	15,4	70,8	29,2	91,8	8,2	56,9	43,1
5	Jambi	171	88,3	11,7	72,5	27,5	91,2	8,8	57,3	42,7
6	Sumatera Selatan	298	83,2	16,8	66,4	33,6	90,6	9,4	53,0	47,0
7	Bengkulu	173	80,9	19,1	70,5	29,5	87,3	12,7	55,5	44,5
8	Lampung	265	84,5	15,5	61,9	38,1	89,8	10,2	56,2	43,8
9	Bangka Belitung	57	87,7	12,3	78,9	21,1	93,0	7,0	54,4	45,6
10	Kepulauan Riau	65	81,5	18,5	63,1	36,9	86,2	13,8	53,8	46,2
11	DKI Jakarta	336	88,1	11,9	87,2	12,8	91,4	8,6	61,3	38,7
12	Jawa Barat	1031	91,9	8,1	79,5	20,5	95,7	4,3	68,8	31,2
13	Jawa Tengah	861	94,0	6,0	87,6	12,4	96,7	3,3	71,7	28,3
14	DI Yogyakarta	121	98,3	1,7	95,0	5,0	95,9	4,1	71,1	28,9
15	Jawa Timur	949	93,9	6,1	90,1	9,9	97,0	3,0	78,0	22,0
16	Banten	206	92,7	7,3	85,0	15,0	97,6	2,4	70,9	29,1
17	Bali	114	92,1	7,9	86,0	14,0	96,5	3,5	58,8	41,2
18	Nusa Tenggara Barat	149	90,6	9,4	85,2	14,8	93,3	6,7	69,1	30,9
19	Nusa Tenggara Timur	302	87,1	12,9	83,4	16,6	91,7	8,3	70,5	29,5
20	Kalimantan Barat	233	83,3	16,7	67,8	32,2	90,6	9,4	63,9	36,1
21	Kalimantan Tengah	176	85,2	14,8	70,5	29,5	91,5	8,5	54,5	45,5
22	Kalimantan Selatan	217	82,9	17,1	77,9	22,1	94,0	6,0	62,7	37,3
23	Kalimantan Timur	213	85,0	15,0	76,5	23,5	93,4	6,6	55,9	44,1
24	Sulawesi Utara	167	75,4	24,6	64,7	35,3	87,4	12,6	50,9	49,1
25	Sulawesi Tengah	163	77,9	22,1	67,5	32,5	84,0	16,0	46,0	54,0
26	Sulawesi Selatan	406	81,3	18,7	77,8	22,2	93,3	6,7	53,4	46,6
27	Sulawesi Tenggara	233	71,2	28,8	62,7	37,3	87,1	12,9	56,7	43,3
28	Gorontalo	74	90,5	9,5	89,2	10,8	95,9	4,1	66,2	33,8
29	Sulawesi Barat	81	79,0	21,0	67,9	32,1	81,5	18,5	49,4	50,6
30	Maluku	161	44,7	55,3	44,1	55,9	63,4	36,6	36,0	64,0
31	Maluku Utara	101	66,3	33,7	49,5	50,5	76,2	23,8	58,4	41,6
32	Papua Barat	104	61,5	38,5	53,8	46,2	74,0	26,0	44,2	55,8
33	Papua	294	60,5	39,5	50,7	49,3	57,1	42,9	43,9	56,1
	Lokasi									
1	Perkotaan	2321	87,6	12,4	79,7	20,3	92,9	7,1	62,0	38,0
2	Perdesaan	6660	82,7	17,3	73,5	26,5	89,8	10,2	60,6	39,4
	INDONESIA	**8981**	**84,0**	**16,0**	**75,1**	**24,9**	**90,6**	**9,4**	**60,9**	**39,1**

Tabel 4.13.3.4.b
Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Jenis Alat Esensial yang digunakan pada Pelayanan Poliklinik KIA, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Timbangan Bayi		Timbangan Dewasa		Dopler		HB Sahli	
			% Ada	%Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada	% Ada	%Tidak Ada
	Provinsi									
1	DI Aceh	311	55,9	44,1	82,0	18,0	44,4	55,6	23,8	76,2
2	Sumatera Utara	506	70,4	29,6	65,2	34,8	31,2	68,8	21,3	78,7
3	Sumatera Barat	248	91,1	8,9	87,1	12,9	71,0	29,0	24,2	75,8
4	Riau	195	77,9	22,1	83,1	16,9	48,7	51,3	30,3	69,7
5	Jambi	171	68,4	31,6	87,7	12,3	47,4	52,6	36,8	63,2
6	Sumatera Selatan	298	75,5	24,5	82,9	17,1	36,2	63,8	44,6	55,4
7	Bengkulu	173	84,4	15,6	82,7	17,3	61,3	38,7	28,3	71,7
8	Lampung	265	82,6	17,4	84,5	15,5	50,6	49,4	47,2	52,8
9	Bangka Belitung	57	71,9	28,1	93,0	7,0	47,4	52,6	29,8	70,2
10	Kepulauan Riau	65	70,8	29,2	83,1	16,9	72,3	27,7	24,6	75,4
11	DKI Jakarta	336	92,3	7,7	92,0	8,0	70,2	29,8	21,4	78,6
12	Jawa Barat	1031	88,8	11,2	92,7	7,3	54,2	45,8	57,9	42,1
13	Jawa Tengah	861	90,1	9,9	95,1	4,9	64,0	36,0	35,2	64,8
14	DI Yogyakarta	121	95,0	5,0	96,7	3,3	78,5	21,5	9,1	90,9
15	Jawa Timur	949	94,2	5,8	95,7	4,3	52,5	47,5	49,3	50,7
16	Banten	206	89,3	10,7	95,1	4,9	80,1	19,9	54,9	45,1
17	Bali	114	86,8	13,2	90,4	9,6	61,4	38,6	38,6	61,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	83,2	16,8	91,3	8,7	75,2	24,8	37,6	62,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	87,1	12,9	88,1	11,9	54,3	45,7	52,0	48,0
20	Kalimantan Barat	233	67,4	32,6	79,8	20,2	60,1	39,9	35,6	64,4
21	Kalimantan Tengah	176	80,7	19,3	85,8	14,2	60,8	39,2	37,5	62,5
22	Kalimantan Selatan	217	81,1	18,9	93,1	6,9	78,8	21,2	31,8	68,2
23	Kalimantan Timur	213	75,1	24,9	87,3	12,7	59,6	40,4	33,3	66,7
24	Sulawesi Utara	167	86,2	13,8	73,7	26,3	43,7	56,3	25,7	74,3
25	Sulawesi Tengah	163	68,1	31,9	81,6	18,4	49,7	50,3	37,4	62,6
26	Sulawesi Selatan	406	77,6	22,4	89,2	10,8	41,4	58,6	33,0	67,0
27	Sulawesi Tenggara	233	76,4	23,6	70,0	30,0	41,2	58,8	42,5	57,5
28	Gorontalo	74	78,4	21,6	82,4	17,6	66,2	33,8	51,4	48,6
29	Sulawesi Barat	81	82,7	17,3	82,7	17,3	44,4	55,6	25,9	74,1
30	Maluku	161	64,6	35,4	54,7	45,3	35,4	64,6	24,8	75,2
31	Maluku Utara	101	73,3	26,7	72,3	27,7	52,5	47,5	33,7	66,3
32	Papua Barat	104	76,0	24,0	75,0	25,0	31,7	68,3	25,0	75,0
33	Papua	294	65,6	34,4	67,3	32,7	25,5	74,5	26,2	73,8
	Lokasi									
1	Perkotaan	2321	81,4	18,6	88,5	11,5	61,2	38,8	30,2	69,8
2	Perdesaan	6660	81,8	18,2	85,0	15,0	50,5	49,5	40,3	59,7
	INDONESIA	**8981**	**81,7**	**18,3**	**85,9**	**14,1**	**53,3**	**46,7**	**37,7**	**62,3**

Tabel 4.13.3.4.a dan Tabel 4.13.3.4.b, menunjukkan persentase Puskesmas yang memiliki jenis alat esensial poliklinik KIA dan digunakan. Yang dimaksud dengan jenis alat esensial poliklinik KIA yang digunakan pada laporan ini adalah stetoskop, tensimeter, tempat tidur periksa, termometer klinis, timbangan bayi, timbangan dewasa, dopler dan HB Sahli yang dimiliki Puskesmas dan digunakan pada pada pelayanan poliklinik KIA.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki stetoskop dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA adalah 84 persen, sementara 16 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (98,3%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (94%) dan Provinsi Jawa Timur (93,9%). Terendah di Provinsi Maluku (44,7%), diikuti Provinsi Papua (60,5%) dan Provinsi Papua Barat (61,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memiliki stetoskop dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA, di perkotaan 87,6 persen, sementara di perdesaan 82,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki tensimeter dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA adalah 75,1 persen, sementara 24,9 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi DIY (95%), diikuti Provinsi Jawa Timur (90,1%) dan Provinsi Gorontalo (89,2%). Terendah di Provinsi Maluku (44,1%), diikuti Provinsi Maluku Utara (49,5%) dan Provinsi Papua (50,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memiliki tensimeter dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA, di perkotaan 79,7 persen, sementara di perdesaan 73,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki tempat tidur periksa dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA adalah 90,6 persen, sementara 9,4 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Banten (97,6%), diikuti Provinsi Jawa Timur (97%) dan Provinsi Jawa Tengah (96,7%). Terendah di Provinsi Papua (57,1%), diikuti Provinsi Maluku (63,4%) dan Provinsi Papua Barat (74%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memiliki tempat tidur periksa dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA, di perkotaan 92,9 persen, sementara di perdesaan 89,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki termometer dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA adalah 60,9 persen, sementara 39,1 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Jawa Timur (78%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (71,7%) dan Provinsi DIY (71,1%). Terendah di Provinsi Maluku (36%), diikuti Provinsi Aceh (39,5%) dan Provinsi Papua (43,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memiliki termometer dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA, di perkotaan 62 persen, sementara di perdesaan 60,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki timbangan bayi dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA adalah 81,7 persen, sementara 18,3 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi DIY (95%), diikuti Provinsi Jawa Timur (94,2%) dan Provinsi DKI (92,3%). Terendah di Provinsi Aceh (55,9%), diikuti Provinsi Maluku (64,6%) dan Provinsi Papua (65,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memiliki timbangan bayi dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA, di perkotaan 81,4 persen, sementara di perdesaan 81,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki timbangan dewasa dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA adalah 85,9 persen, sementara 14,1 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi DIY (96,7%), diikuti Provinsi Jawa Timur (95,7%) dan Provinsi Banten (95,1%). Terendah di Provinsi Maluku (54,7%), diikuti Provinsi Sumatera Utara (65,2%) dan Provinsi Papua (67,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memiliki timbangan dewasa dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA, di perkotaan 88,5 persen, sementara di perdesaan 85 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki dopler dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA adalah 53,3 persen, sementara 46,7 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Banten (80,1%), diikuti Provinsi Kalimantan Selatan (78,8%) dan Provinsi DIY (78,5%). Terendah di Provinsi Papua (25,5%), diikuti Provinsi Sumatera Utara (31,2%) dan Provinsi Papua Barat (31,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memiliki dopler dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA, di perkotaan 61,2 persen, sementara di perdesaan 50,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki HB Sahli dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA adalah 37,7 persen, sementara 62,3 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Jawa Barat (57,9%), diikuti Provinsi Banten (54,9%) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (52%). Terendah di Provinsi DIY (9,1%), diikuti Provinsi Sumatera Utara (21,3%) dan Provinsi DKI (21,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memiliki HB Sahli dan digunakan pada pelayanan poliklinik KIA, di perkotaan 30,2 persen, sementara di perdesaan 40,3 persen.

4.13.4. ALAT-ALAT LABORATORIUM

Pada Rifaskes 2011 data jenis alat Laboratorium yang dikumpulkan sebanyak 58 jenis. Tabel 4.13.4.1 menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat laboratorium. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat laboratorium hanya 0,9 persen. Tertinggi di Provinsi Jambi (2,3%), diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara (2,1%) dan Provinsi Riau (2,1%). Terendah di Provinsi Sulawesi Selatan (0,2%), diikuti Provinsi Kalimantan Barat (0,4%) dan Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Barat (0,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat laboratorium, di perkotaan 0,9 persen, sementara di perdesaan 0,9 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat laboratorium adalah 10,4 persen. Tertinggi di Provinsi DIY (24%), diikuti Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat (19,5%) dan Provinsi Sumatera Selatan (16,4%). Terendah di Provinsi Maluku (1,2%), diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara (2,1%) dan Provinsi Papua (2,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat laboratorium, di perkotaan 13,4 persen, sementara di perdesaan 9,3 persen.

Tabel 4.13.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Kesehatan Laboratorium, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	1,6	7,4	28,3	36,3	26,4
2	Sumatera Utara	506	0,8	5,7	18,6	26,7	48,2
3	Sumatera Barat	248	0,8	8,5	40,3	44,0	6,5
4	Riau	195	2,1	13,3	39,5	28,7	16,4
5	Jambi	171	2,3	9,4	38,6	38,6	11,1
6	Sumatera Selatan	298	1,3	16,4	33,9	22,1	26,2
7	Bengkulu	173	1,2	3,5	29,5	49,1	16,8
8	Lampung	265	0	9,1	29,8	41,1	20,0
9	Bangka Belitung	57	1,8	10,5	47,4	35,1	5,3
10	Kepulauan Riau	65	1,5	6,2	44,6	33,8	13,8
11	DKI Jakarta	336	1,2	4,2	10,4	3,9	80,4
12	Jawa Barat	1031	0,5	8,4	29,4	30,4	31,3
13	Jawa Tengah	861	0,7	19,5	43,1	28,5	8,2
14	DI Yogyakarta	121	0	24,0	63,6	11,6	0,8
15	Jawa Timur	949	1,2	15,4	46,2	21,3	16,0
16	Banten	206	0	4,9	25,2	38,3	31,6
17	Bali	114	0	8,8	26,3	50,9	14,0
18	Nusa Tenggara Barat	149	0,7	19,5	53,0	18,8	8,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	2,0	12,3	30,8	40,4	14,6
20	Kalimantan Barat	233	0,4	9,0	36,1	40,3	14,2
21	Kalimantan Tengah	176	0,6	10,8	30,7	40,9	17,0
22	Kalimantan Selatan	217	1,4	15,2	49,3	26,3	7,8
23	Kalimantan Timur	213	0,5	8,9	41,3	33,8	15,5
24	Sulawesi Utara	167	0	4,8	13,8	36,5	44,9
25	Sulawesi Tengah	163	0,6	5,5	24,5	42,3	27,0
26	Sulawesi Selatan	406	0,2	12,1	38,9	22,2	26,6
27	Sulawesi Tenggara	233	2,1	2,1	12,0	39,9	43,8
28	Gorontalo	74	0	2,7	17,6	27,0	52,7
29	Sulawesi Barat	81	0	8,6	21,0	44,4	25,9
30	Maluku	161	0	1,2	13,0	31,7	54,0
31	Maluku Utara	101	2,0	9,9	15,8	32,7	39,6
32	Papua Barat	104	0	4,8	13,5	29,8	51,9
33	Papua	294	1,4	2,4	12,2	20,4	63,6
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	0,9	13,4	38,2	22,6	24,9
2	Perdesaan	6660	0,9	9,3	30,1	32,6	27,2
	INDONESIA	**8981**	**0,9**	**10,4**	**32,2**	**30,0**	**26,6**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat laboratorium adalah 32,2 persen. Tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (63,6%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (53%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (49,3%). Terendah di Provinsi DKI (10,4%), diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara (12%) dan Provinsi Papua (12,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat laboratorium, di perkotaan 38,2 persen, sementara di perdesaan 30,1 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat laboratorium adalah 30 persen. Tertinggi di Provinsi Bali (50,9%), diikuti Provinsi Bengkulu (49,1%) dan Provinsi Sulawesi Barat (44,4%). Terendah di Provinsi DKI (3,9%), diikuti Provinsi DIY (11,6%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (18,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat laboratorium, di perkotaan 22,6 persen, sementara di perdesaan 32,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat laboratorium adalah 26,6 persen. Tertinggi di Provinsi DKI (80,4%), diikuti Provinsi Papua (63,6%) dan Provinsi Maluku (54%). Terendah di Provinsi DI Yogyakarta (0,8%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (5,3%) dan Provinsi Sumatera Barat (6,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat laboratorium , di perkotaan 24,9 persen, sementara di perdesaan 27,2 persen.

Tabel 4.13.4.2
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Jenis Alat Kesehatan Laboratorium yang digunakan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	1,0	2,9	21,5	39,2	35,4
2	Sumatera Utara	506	0,6	3,0	9,3	23,7	63,4
3	Sumatera Barat	248	0,4	6,9	29,4	49,2	14,1
4	Riau	195	0	5,6	28,7	41,0	24,6
5	Jambi	171	2,3	8,2	26,9	43,3	19,3
6	Sumatera Selatan	298	1,0	9,4	29,9	27,2	32,6
7	Bengkulu	173	0,6	2,3	17,3	49,7	30,1
8	Lampung	265	0	4,9	22,6	45,3	27,2
9	Bangka Belitung	57	1,8	5,3	21,1	63,2	8,8
10	Kepulauan Riau	65	0,0	4,6	24,6	52,3	18,5
11	DKI Jakarta	336	0,9	2,4	9,8	6,0	81,0
12	Jawa Barat	1031	0,4	4,5	22,7	36,1	36,4
13	Jawa Tengah	861	0,5	10,5	39,4	36,9	12,8
14	DI Yogyakarta	121	0	7,4	62,0	28,9	1,7
15	Jawa Timur	949	0,7	8,7	37,1	32,6	20,9
16	Banten	206	0	1,9	16,0	44,2	37,9
17	Bali	114	0	1,8	13,2	57,0	28,1
18	Nusa Tenggara Barat	149	0,7	9,4	40,9	38,9	10,1
19	Nusa Tenggara Timur	302	1,7	6,6	19,2	48,0	24,5
20	Kalimantan Barat	233	0,4	4,3	27,5	49,4	18,5
21	Kalimantan Tengah	176	0	4,5	20,5	41,5	33,5
22	Kalimantan Selatan	217	0,5	5,1	41,9	42,4	10,1
23	Kalimantan Timur	213	0,5	3,8	31,9	39,9	23,9
24	Sulawesi Utara	167	0	1,8	10,8	29,3	58,1
25	Sulawesi Tengah	163	0,6	1,2	14,7	45,4	38,0
26	Sulawesi Selatan	406	0,2	6,9	33,5	29,3	30,0
27	Sulawesi Tenggara	233	2,1	1,7	7,7	35,6	52,8
28	Gorontalo	74	0	2,7	10,8	31,1	55,4
29	Sulawesi Barat	81	0	1,2	19,8	43,2	35,8
30	Maluku	161	0	1,2	7,5	32,9	58,4
31	Maluku Utara	101	1,0	1,0	11,9	29,7	56,4
32	Papua Barat	104	0	1,0	12,5	24,0	62,5
33	Papua	294	1,4	1,4	9,2	18,4	69,7
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	0,6	6,7	31,2	32,4	29,0
2	Perdesaan	6660	0,6	4,8	22,7	36,7	35,1
	INDONESIA	**8981**	**0,6**	**5,3**	**24,9**	**35,6**	**33,5**

Tabel 4.13.4.2 menunjukkan persentase Puskesmas menurut kelengkapan jenis alat laboratorium yang digunakan. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat laboratorium yang digunakan hanya 0,6 persen. Tertinggi di Provinsi Jambi (2,3%), diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara (2,1%) dan Provinsi Bangka Belitung (1,8%). Terendah di Provinsi Sulawesi Selatan (0,2%), diikuti Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat (0,4%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (0,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat laboratorium yang digunakan, di perkotaan 0,6 persen, sementara di perdesaan 0,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat laboratorium yang digunakan adalah 5,3 persen. Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah (10,5%), diikuti Provinsi Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat (9,4%) dan Provinsi Jawa Timur (8,7%). Terendah di Provinsi Papua Barat dan Maluku (1%), diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku (1,2%) dan Provinsi Papua (1,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat laboratorium yang digunakan, di perkotaan 6,7 persen, sementara di perdesaan 4,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat laboratorium yang digunakan adalah 24,9 persen. Tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (62%), diikuti Provinsi Kalimantan Selatan (41,9%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (40,9%). Terendah di Provinsi Maluku (7,5%), diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara (7,7%) dan Provinsi Papua (9,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat laboratorium yang digunakan, di perkotaan 31,2 persen, sementara di perdesaan 22,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat laboratorium yang digunakan adalah 35,6 persen. Tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (63,2%), diikuti Provinsi Bali (57%) dan Provinsi Kepulauan Riau (52,3%). Terendah di Provinsi DKI (6%), diikuti Provinsi Papua (18,4%) dan Provinsi Sumatera Utara (23,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat laboratorium yang digunakan, di perkotaan 32,4 persen, sementara di perdesaan 36,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20persen jenis alat laboratorium yang digunakan adalah 33,5 persen. Tertinggi di Provinsi DKI (81 persen), diikuti Provinsi Papua (69,7%) dan Provinsi Sumatera Utara (63,4%). Terendah di Provinsi DIY (1,7%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (8,8%) dan Provinsi NTB dan Kalimantan Selatan (10,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20persen jenis alat laboratorium yang digunakan, di perkotaan 29 persen, sementara di perdesaan 35,1 persen.

4.13.5. ALAT-ALAT IMUNISASI

Tabel 4.13.5.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat imunisasi. Jenis alat kesehatan imunisasi yang dimaksud pada laporan ini adalah Cold Box, Vaccine Carier dan Kulkas yang dimiliki puskesmas tersebut untuk pelayanan imunisasi.

Tabel 4.13.5.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Alat Imunisasi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Cold Box			Vaccine Carier			Kulkas		
			% Ada	%Tidak Ada	% TAD	% Ada	%Tidak Ada	% TAD	% Ada	%Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	39,5	59,8	0,6	86,5	13,5	0	93,6	6,1	0,3
2	Sumatera Utara	506	44,3	55,1	0,6	85,2	14,8	0	87,0	12,5	0,6
3	Sumatera Barat	248	62,9	37,1	0	88,7	11,3	0	97,2	2,4	0,4
4	Riau	195	61,0	36,4	2,6	66,7	30,8	2,6	90,8	7,7	1,5
5	Jambi	171	63,7	35,1	1,2	74,9	24,0	1,2	84,2	14,6	1,2
6	Sumatera Selatan	298	58,1	41,6	0,3	79,9	19,8	0,3	91,9	7,4	0,7
7	Bengkulu	173	49,7	48,0	2,3	76,9	22,5	0,6	93,1	4,6	2,3
8	Lampung	265	86,4	12,8	0,8	82,6	16,2	1,1	92,5	6,0	1,5
9	Bangka Belitung	57	52,6	47,4	0	82,5	17,5	0	77,2	19,3	3,5
10	Kepulauan Riau	65	75,4	23,1	1,5	66,2	30,8	3,1	89,2	7,7	3,1
11	DKI Jakarta	336	69,3	29,5	1,2	70,2	28,3	1,5	93,8	3,9	2,4
12	Jawa Barat	1031	64,4	34,9	0,7	94,1	5,7	0,2	95,1	4,0	1,0
13	Jawa Tengah	861	57,5	41,8	0,7	94,3	5,5	0,2	98,0	1,3	0,7
14	DI Yogyakarta	121	43,0	57,0	0	95,0	5,0	0	91,7	5,0	3,3
15	Jawa Timur	949	69,4	30,2	0,3	88,0	11,7	0,3	94,7	3,4	1,9
16	Banten	206	83,5	16,5	0	96,6	3,4	0	90,8	8,7	0,5
17	Bali	114	88,6	11,4	0	91,2	8,8	0	89,5	6,1	4,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	67,1	32,2	0,7	79,2	18,1	2,7	92,6	6,7	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	65,9	33,4	0,7	75,8	23,2	1,0	86,4	12,9	0,7
20	Kalimantan Barat	233	63,5	36,5	0	73,4	26,2	0,4	92,7	5,6	1,7
21	Kalimantan Tengah	176	53,4	46,6	0	69,9	30,1	0	86,4	11,4	2,3
22	Kalimantan Selatan	217	65,0	35,0	0	87,1	12,9	0	94,0	6,0	0
23	Kalimantan Timur	213	60,6	39,4	0	77,0	23,0	0	95,8	3,8	0,5
24	Sulawesi Utara	167	46,1	53,3	0,6	72,5	26,3	1,2	88,6	10,8	0,6
25	Sulawesi Tengah	163	46,0	53,4	0,6	66,9	32,5	0,6	93,3	5,5	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	55,4	43,6	1,0	80,8	18,2	1,0	94,6	4,4	1,0
27	Sulawesi Tenggara	233	52,4	47,6	0	69,1	30,5	0,4	79,4	19,7	0,9
28	Gorontalo	74	58,1	41,9	0	64,9	35,1	0,0	81,1	12,2	6,8
29	Sulawesi Barat	81	56,8	42,0	1,2	58,0	40,7	1,2	95,1	3,7	1,2
30	Maluku	161	55,9	40,4	3,7	61,5	34,8	3,7	74,5	19,3	6,2
31	Maluku Utara	101	57,4	41,6	1,0	83,2	15,8	1,0	76,2	22,8	1,0
32	Papua Barat	104	56,7	42,3	1,0	51,0	48,1	1,0	54,8	45,2	0
33	Papua	294	45,2	53,1	1,7	38,1	59,5	2,4	44,9	54,1	1,0
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	63,0	36,2	0,8	83,3	15,9	0,9	91,9	6,3	1,8
2	Perdesaan	6660	59,3	40,0	0,7	80,4	19,1	0,6	89,3	9,6	1,1
	INDONESIA	**8981**	**60,3**	**39,0**	**0,7**	**81,1**	**18,2**	**0,6**	**90,0**	**8,7**	**1,3**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai cold box untuk pelayanan imunisasi adalah 60,3 persen, sementara 39 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Bali (88,6%), diikuti Provinsi Lampung (86,4%) dan Provinsi Banten (83,5%). Terendah di Provinsi Aceh (39,5%), diikuti Provinsi DIY (43%) dan Provinsi Sumatera Utara (44,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai cold box untuk pelayanan imunisasi, di perkotaan 63 persen, sementara di perdesaan 59,3 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai vaccine carier untuk pelayanan imunisasi adalah 81,1 persen, sementara 18,2 persen. Tertinggi di Provinsi Banten (96,6%), diikuti Provinsi DIY (95%) dan Provinsi Jawa Tengah (94,3%). Terendah di Provinsi Papua (38,1%), diikuti Provinsi Papua Barat (51%) dan Provinsi Sulawesi Barat (58%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai vaccine carier untuk pelayanan imunisasi, di perkotaan 83,3 persen, sementara di perdesaan 80,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kulkas untuk pelayanan imunisasi adalah 90 persen, sementara 8,7 persen tidak ada. Tertinggi di Provinsi Papua (44,9%), diikuti Provinsi Papua Barat (54,8%) dan Provinsi Maluku (74,5%). Terendah di Provinsi Jawa Tengah (98%), diikuti Provinsi Sumatera Barat (97,2%) dan Provinsi Kalimantan Timur (95,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kulkas untuk pelayanan imunisasi, di perkotaan 91,9 persen, sementara di perdesaan 89,3 persen.

Tabel 4.13.5.2, menunjukkan persentase Puskesmas yang mempunyai ketiga jenis alat immunisasi yaitu cold box, kulkas dan vaccine carier. Secara nasional, persentase Puskesmas mempunyai ketiga jenis alat kesehatan imunisasi hanya 45,5 persen,. Tertinggi di Provinsi Bali (72,8%), diikuti Provinsi Banten (72,3%) dan Provinsi Lampung (67,2%). Terendah di Provinsi Papua (17%), diikuti Provinsi Papua Barat (25%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (27,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas mempunyai ketiga jenis alat kesehatan imunisasi, di perkotaan 48,2 persen, sementara di perdesaan 44,6 persen

Tabel 4.13.5.2
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alat Kesehatan Imunisasi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Tersedia Cold Box, Kulkas dan Vaccine Carier		
			%ada	%Tidakada	%TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	33,8	66,2	0
2	Sumatera Utara	506	30,2	69,8	0
3	Sumatera Barat	248	52,4	47,6	0
4	Riau	195	41,0	57,9	1,0
5	Jambi	171	43,9	55,6	0,6
6	Sumatera Selatan	298	40,6	59,1	0,3
7	Bengkulu	173	32,9	67,1	0
8	Lampung	265	67,2	32,5	0,4
9	Bangka Belitung	57	29,8	70,2	0
10	Kepulauan Riau	65	47,7	50,8	1,5
11	DKI Jakarta	336	45,5	54,2	0,3
12	Jawa Barat	1031	57,1	42,7	0,2
13	Jawa Tengah	861	52,7	47,3	0
14	DI Yogyakarta	121	33,1	66,9	0
15	Jawa Timur	949	56,8	43,1	0,1
16	Banten	206	72,3	27,7	0
17	Bali	114	72,8	27,2	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	49,7	50,3	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	46,0	53,3	0,7
20	Kalimantan Barat	233	44,6	55,4	0
21	Kalimantan Tengah	176	27,8	72,2	0
22	Kalimantan Selatan	217	54,4	45,6	0
23	Kalimantan Timur	213	42,7	57,3	0
24	Sulawesi Utara	167	31,1	68,3	0,6
25	Sulawesi Tengah	163	33,7	65,6	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	40,1	59,4	0,5
27	Sulawesi Tenggara	233	31,3	68,7	0
28	Gorontalo	74	29,7	70,3	0
29	Sulawesi Barat	81	30,9	67,9	1,2
30	Maluku	161	30,4	65,8	3,7
31	Maluku Utara	101	43,6	56,4	0
32	Papua Barat	104	25,0	75,0	0
33	Papua	294	17,0	82,0	1,0
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	48,2	51,6	0,3
2	Perdesaan	6660	44,6	55,1	0,3
	INDONESIA	**8981**	**45,5**	**54,2**	**0,3**

Tabel 4.13.5.3, menunjukkan persentase Puskesmas yang memiliki jenis alat imunisasi yang berfungsi. Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki cold box yang berfungsi adalah 56,7 persen. Tertinggi di Provinsi Bali (87,7%), diikuti Provinsi Banten (83%) dan Provinsi Lampung (82,3%). Terendah di Provinsi Papua (34,7%), diikuti Provinsi Aceh (37,9%) dan Provinsi Sumatera Utara (41,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memiliki cold box yang berfungsi , di perkotaan 59,6 persen, sementara di perdesaan 55,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki vaccine carier yang berfungsi adalah 78 persen. Tertinggi di Provinsi Banten (95,1%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (92,3%) dan Provinsi Jawa Barat (92,2%). Terendah di Provinsi Papua (31,6%), diikuti Provinsi Papua Barat (45,2%) dan Provinsi Sulawesi Barat (54,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase

puskesmas yang memiliki vaccine carier yang berfungsi, di perkotaan 79,8 persen, sementara di perdesaan 77,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang memiliki kulkas yang berfungsi adalah 83,9 persen. Tertinggi di Provinsi Sumatera Barat (94,8%), diikuti Provinsi Jawa Tengah (94,2%) dan Provinsi Kalimantan Timur (93%). Terendah di Provinsi Papua (32%), diikuti Provinsi Papua Barat (44,2%) dan Provinsi Maluku (62,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang memiliki kulkas yang berfungsi, di perkotaan 85,6 persen, sementara di perdesaan 83,3 persen.

Tabel 4.13.5.3
Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Jenis Alat Imunisasi yang berfungsi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Cold Box			Vaccine Carier			Kulkas		
			% Ada	%Tidak Ada	% TAD	% Ada	%Tidak Ada	% TAD	% Ada	%Tidak Ada	% TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	37,9	60,8	1,3	85,5	13,5	1,0	90,4	8,4	1,3
2	Sumatera Utara	506	41,3	56,9	1,8	83,2	15,6	1,2	82,4	16,6	1,0
3	Sumatera Barat	248	59,7	39,9	0,4	87,9	11,7	0,4	94,8	4,4	0,8
4	Riau	195	57,9	37,9	4,1	62,6	32,3	5,1	84,1	9,7	6,2
5	Jambi	171	59,1	38,6	2,3	71,3	24,6	4,1	74,9	22,2	2,9
6	Sumatera Selatan	298	54,7	43,6	1,7	76,5	21,5	2,0	85,2	12,4	2,3
7	Bengkulu	173	46,8	48,0	5,2	71,7	23,7	4,6	82,1	8,7	9,2
8	Lampung	265	82,3	15,8	1,9	80,0	17,4	2,6	89,1	8,3	2,6
9	Bangka Belitung	57	50,9	49,1	0	82,5	17,5	0	71,9	22,8	5,3
10	Kepulauan Riau	65	69,2	24,6	6,2	64,6	30,8	4,6	80,0	12,3	7,7
11	DKI Jakarta	336	61,6	31,5	6,8	62,2	30,4	7,4	84,2	5,4	10,4
12	Jawa Barat	1031	62,8	36,0	1,3	92,2	6,4	1,4	91,1	5,5	3,4
13	Jawa Tengah	861	54,5	43,6	2,0	92,3	5,9	1,7	94,2	1,9	3,9
14	DI Yogyakarta	121	43,8	56,2	0	91,7	7,4	0,8	88,4	7,4	4,1
15	Jawa Timur	949	65,1	31,6	3,3	84,0	12,6	3,4	86,9	5,0	8,1
16	Banten	206	83,0	17,0	0	95,1	3,9	1,0	89,8	9,7	0,5
17	Bali	114	87,7	11,4	0,9	88,6	9,6	1,8	83,3	8,8	7,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	55,0	36,2	8,7	68,5	20,1	11,4	82,6	6,7	10,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	62,3	37,1	0,7	73,8	24,5	1,7	80,1	17,2	2,6
20	Kalimantan Barat	233	60,9	37,8	1,3	70,8	27,0	2,1	85,8	9,0	5,2
21	Kalimantan Tengah	176	48,3	50,0	1,7	65,3	34,1	0,6	80,1	16,5	3,4
22	Kalimantan Selatan	217	64,1	35,5	0,5	84,8	14,3	0,9	91,2	8,3	0,5
23	Kalimantan Timur	213	57,3	41,3	1,4	73,7	24,4	1,9	93,0	6,6	0,5
24	Sulawesi Utara	167	43,1	56,3	0,6	70,7	28,1	1,2	83,8	15,0	1,2
25	Sulawesi Tengah	163	45,4	53,4	1,2	64,4	34,4	1,2	82,2	11,7	6,1
26	Sulawesi Selatan	406	53,9	44,1	2,0	77,6	20,0	2,5	89,7	7,9	2,5
27	Sulawesi Tenggara	233	48,9	49,8	1,3	67,0	31,8	1,3	72,1	25,3	2,6
28	Gorontalo	74	54,1	44,6	1,4	62,2	37,8	0	79,7	12,2	8,1
29	Sulawesi Barat	81	53,1	43,2	3,7	54,3	40,7	4,9	81,5	14,8	3,7
30	Maluku	161	49,7	44,1	6,2	58,4	36,0	5,6	62,1	29,2	8,7
31	Maluku Utara	101	50,5	46,5	3,0	77,2	17,8	5,0	63,4	29,7	6,9
32	Papua Barat	104	47,1	45,2	7,7	45,2	50,0	4,8	44,2	53,8	1,9
33	Papua	294	34,7	58,2	7,1	31,6	61,6	6,8	32,0	59,9	8,2
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	59,6	37,8	2,6	79,8	17,0	3,2	85,6	8,6	5,8
2	Perdesaan	6660	55,7	41,9	2,4	77,4	20,2	2,4	83,3	12,9	3,8
	INDONESIA	**8981**	**56,7**	**40,9**	**2,4**	**78,0**	**19,4**	**2,6**	**83,9**	**11,8**	**4,3**

Tabel 4.13.5.4
Persentase Puskesmas menurut ketersediaan Alat Kesehatan Imunisasi yang berfungsi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Mempunyai Cold Box, Kulkas dan Vaccine Carier yg berfungsi		
			ada	Tidak ada	TAD
	Provinsi				
1	DI Aceh	311	32,8	67,2	0
2	Sumatera Utara	506	26,3	73,7	0
3	Sumatera Barat	248	48,4	51,6	0
4	Riau	195	35,9	61,5	2,6
5	Jambi	171	37,4	61,4	1,2
6	Sumatera Selatan	298	33,2	66,4	0,3
7	Bengkulu	173	29,5	69,9	0,6
8	Lampung	265	60,8	38,5	0,8
9	Bangka Belitung	57	24,6	75,4	0
10	Kepulauan Riau	65	41,5	56,9	1,5
11	DKI Jakarta	336	38,4	59,5	2,1
12	Jawa Barat	1031	52,8	46,9	0,3
13	Jawa Tengah	861	48,0	51,6	0,5
14	DI Yogyakarta	121	32,2	67,8	0
15	Jawa Timur	949	48,7	50,4	0,9
16	Banten	206	69,4	30,6	0
17	Bali	114	66,7	33,3	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	37,6	59,1	3,4
19	Nusa Tenggara Timur	302	39,4	59,9	0,7
20	Kalimantan Barat	233	39,5	60,5	0
21	Kalimantan Tengah	176	21,6	78,4	0
22	Kalimantan Selatan	217	50,7	49,3	0
23	Kalimantan Timur	213	38,5	61,5	0
24	Sulawesi Utara	167	26,9	72,5	0,6
25	Sulawesi Tengah	163	28,8	69,9	1,2
26	Sulawesi Selatan	406	36,0	63,5	0,5
27	Sulawesi Tenggara	233	28,3	71,7	0
28	Gorontalo	74	25,7	74,3	0
29	Sulawesi Barat	81	23,5	74,1	2,5
30	Maluku	161	23,6	72,7	3,7
31	Maluku Utara	101	30,7	69,3	0
32	Papua Barat	104	13,5	85,6	1,0
33	Papua	294	11,9	84,4	3,7
	Lokasi				
1	Perkotaan	2321	43,0	56,1	0,9
2	Perdesaan	6660	39,1	60,2	0,7
	INDONESIA	**8981**	**40,1**	**59,1**	**0,7**

Tabel 4.13.5.4, menunjukkan persentase Puskesmas yang mempunyai tiga jenis alat imunisasi (cold box, kulkas dan vaccine carier) yang berfungsi. Secara nasional, persentase Puskesmas mempunyai ketiga jenis alat imunisasi yang berfungsi hanya 40,1 persen,. Tertinggi di Provinsi Banten (69,4%), diikuti Provinsi Bali (66,7%) dan Provinsi Lampung (60,8%). Terendah di Provinsi Papua (11,9%), diikuti Provinsi Papua Barat (13,5%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (21,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai alat imunisasi yang berfungsi, di perkotaan 43 persen, sementara di perdesaan 39,1 persen.

4.13.6. ALAT-ALAT PUSKESMAS PERAWATAN

Ditanyakan khusus pada Puskesmas dengan tempat perawatan (DTP). Pada Rifaskes 2011 jenis alat Kesehatan DTP yang dikumpulkan sebanyak 52 jenis.

Tabel 4.13.6.1
Persentase Puskesmas Perawatan menurut Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan DTP, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk Prwtn	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	126	4,0	21,4	40,5	20,6	13,5
2	Sumatera Utara	140	6,4	27,1	30,7	15,0	20,7
3	Sumatera Barat	87	1,1	44,8	39,1	4,6	10,3
4	Riau	58	5,2	36,2	46,6	5,2	6,9
5	Jambi	66	9,1	40,9	36,4	6,1	7,6
6	Sumatera Selatan	97	15,5	38,1	30,9	9,3	6,2
7	Bengkulu	40	12,5	37,5	30,0	10,0	10,0
8	Lampung	60	10,0	35,0	31,7	5,0	18,3
9	Bangka Belitung	20	0	70,0	25,0	0	5,0
10	Kepulauan Riau	24	8,3	33,3	45,8	4,2	8,3
11	DKI Jakarta	46	13,0	45,7	13,0	0,0	28,3
12	Jawa Barat	178	12,4	36,0	37,1	6,2	8,4
13	Jawa Tengah	294	19,0	57,5	17,7	1,7	4,1
14	DI Yogyakarta	43	20,9	65,1	11,6	0	2,3
15	Jawa Timur	475	10,9	50,7	30,7	2,3	5,3
16	Banten	50	22,0	50,0	22,0	2,0	4,0
17	Bali	30	3,3	43,3	20,0	13,3	20,0
18	Nusa Tenggara Barat	83	1,2	18,1	51,8	22,9	6,0
19	Nusa Tenggara Timur	134	2,2	35,8	35,8	17,2	9,0
20	Kalimantan Barat	92	5,4	41,3	40,2	7,6	5,4
21	Kalimantan Tengah	55	9,1	50,9	34,5	1,8	3,6
22	Kalimantan Selatan	47	12,8	36,2	34,0	12,8	4,3
23	Kalimantan Timur	91	7,7	37,4	36,3	7,7	11,0
24	Sulawesi Utara	78	6,4	17,9	41,0	9,0	25,6
25	Sulawesi Tengah	75	4,0	18,7	62,7	10,7	4,0
26	Sulawesi Selatan	217	5,1	27,6	39,6	19,8	7,8
27	Sulawesi Tenggara	64	6,3	23,4	37,5	12,5	20,3
28	Gorontalo	21	14,3	14,3	47,6	9,5	14,3
29	Sulawesi Barat	37	0	21,6	35,1	29,7	13,5
30	Maluku	58	0	15,5	34,5	25,9	24,1
31	Maluku Utara	29	3,4	17,2	44,8	10,3	24,1
32	Papua Barat	43	0	7,0	39,5	20,9	32,6
33	Papua	94	5,3	14,9	26,6	19,1	34,0
	Lokasi						
1	Perkotaan	480	12,3	36,7	27,9	5,6	17,5
2	Perdesaan	2.572	8,1	37,2	34,9	10,4	9,4
	INDONESIA	**3.052**	**8,8**	**37,1**	**33,8**	**9,6**	**10,7**

Tabel 4.13.6.1, menunjukkan persentase Puskesmas perawatan menurut ketersediaan jenis alat kesehatan DTP. Secara nasional, persentase Puskesmas perawatan yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat kesehatan DTP hanya 8,8 persen. Tertinggi di Provinsi Banten (22%), diikuti Provinsi DIY (20,9%) dan Provinsi Jawa Tengah (19%). Terdapat 4 provinsi yang tidak mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat kesehatan (0%) yaitu provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua Barat. Bila dilihat berdasarkan lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat kesehatan DTP, di perkotaan 12,3 persen, sementara di perdesaan 8,1 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas perawatan yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan DTP adalah 37,1persen. Tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (70%), diikuti Provinsi DIY (65,1%) dan Provinsi Jawa Tengah (57,5%). Terendah di Provinsi Papua Barat (7%), diikuti Provinsi Gorontalo (14,3%) dan Provinsi Papua (14,9%). Bila dilihat berdasarkan lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan DTP, di perkotaan 36,7 persen, sementara di perdesaan 37,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas perawatan yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan DTP adalah 33,8 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah (62,7%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (51,8%) dan Provinsi Gorontalo (47,6%). Terendah di Provinsi DIY (11,6%), diikuti Provinsi DKI (13%) dan Provinsi Jawa Tengah (17,7%). Bila dilihat berdasarkan lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan DTP, di perkotaan 27,9 persen, sementara di perdesaan 34,9 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas perawatan yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan DTP adalah 9,6 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat (29,7%), diikuti Provinsi Maluku (25,9%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (22,9%). Terdapat 3 provinsi yang tidak mempunyai 20-39 persen alat kesehatan (0%) yaitu provinsi Bangka Belitung, provinsi DKI Jakarta dan provinsi DI Yogyakarta. Bila dilihat berdasarkan lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan DTP, di perkotaan 5,6 persen, sementara di perdesaan 10,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas perawatan yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan DTP adalah 10,7 persen. Tertinggi di Provinsi Papua (34%), diikuti Provinsi Papua Barat (32,6%) dan Provinsi DKI (28,3%). Terendah di Provinsi DIY (2,3%), diikuti Provinsi Kalimantan Tengah (3,6%) dan Provinsi Banten dan Sulawesi Tengah (4%). Bila dilihat berdasarkan lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan DTP, di perkotaan 17,5 persen, sementara di perdesaan 9,4 persen.

Tabel 4.13.6.2
Persentase Puskesmas Perawatan menurut Kelengkapan Jenis Alat Kesehatan DTP yang digunakan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	126	3,2	14,3	38,9	27,8	15,9
2	Sumatera Utara	140	5,7	22,1	27,9	17,9	26,4
3	Sumatera Barat	87	1,1	32,2	47,1	6,9	12,6
4	Riau	58	1,7	27,6	55,2	5,2	10,3
5	Jambi	66	9,1	27,3	47,0	9,1	7,6
6	Sumatera Selatan	97	10,3	30,9	40,2	11,3	7,2
7	Bengkulu	40	7,5	32,5	35,0	10,0	15,0
8	Lampung	60	5,0	30,0	38,3	8,3	18,3
9	Bangka Belitung	20	0	45,0	45,0	5,0	5,0
10	Kepulauan Riau	24	8,3	29,2	41,7	8,3	12,5
11	DKI Jakarta	46	4,3	45,7	10,9	6,5	32,6
12	Jawa Barat	178	9,6	36,0	37,6	7,9	9,0
13	Jawa Tengah	294	14,3	54,4	24,5	2,4	4,4
14	DI Yogyakarta	43	11,6	69,8	16,3	0	2,3
15	Jawa Timur	475	7,8	44,2	37,7	4,4	5,9
16	Banten	50	16,0	44,0	30,0	6,0	4,0
17	Bali	30	0	23,3	43,3	10,0	23,3
18	Nusa Tenggara Barat	83	1,2	15,7	49,4	24,1	9,6
19	Nusa Tenggara Timur	134	1,5	26,9	37,3	23,9	10,4
20	Kalimantan Barat	92	5,4	35,9	42,4	9,8	6,5
21	Kalimantan Tengah	55	5,5	36,4	45,5	7,3	5,5
22	Kalimantan Selatan	47	8,5	36,2	34,0	17,0	4,3
23	Kalimantan Timur	91	4,4	37,4	33,0	14,3	11,0
24	Sulawesi Utara	78	6,4	14,1	25,6	25,6	28,2
25	Sulawesi Tengah	75	1,3	13,3	64,0	17,3	4,0
26	Sulawesi Selatan	217	3,2	24,4	39,6	22,6	10,1
27	Sulawesi Tenggara	64	6,3	18,8	32,8	12,5	29,7
28	Gorontalo	21	14,3	9,5	47,6	14,3	14,3
29	Sulawesi Barat	37	0	16,2	32,4	35,1	16,2
30	Maluku	58	0	8,6	27,6	32,8	31,0
31	Maluku Utara	29	0	10,3	51,7	10,3	27,6
32	Papua Barat	43	0	2,3	32,6	30,2	34,9
33	Papua	94	3,2	11,7	22,3	24,5	38,3
	Lokasi						
1	Perkotaan	480	8,3	32,7	30,0	9,8	19,2
2	Perdesaan	2.572	5,9	31,6	37,5	13,7	11,4
	INDONESIA	3.052	6,3	31,7	36,3	13,1	12,6

Tabel 4.13.6.2, menunjukkan persentase Puskesmas perawatan menurut kelengkapan jenis alat kesehatan DTP yang digunakan. Secara nasional, persentase Puskesmas perawatan yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat kesehatan DTP yang digunakan adalah 6,3 persen. Tertinggi di Provinsi Banten (16%), diikuti Provinsi Jawa Tengah dan Gorontalo (14,3%) dan Provinsi DIY (11,6%). Terdapat 6 provinsi yang tidak memiliki 80 persen atau lebih jenis alat kesehatan DTP yaitu provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat kesehatan DTP yang digunakan, di perkotaan 8,3 persen, sementara di perdesaan 5,9 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas perawatan yang mempunyai 60-79% jenis alat kesehatan DTP yang digunakan adalah 31,7 persen. Tertinggi di Provinsi DIY (69,8 persen), diikuti Provinsi Jawa Tengah (54,4%) dan Provinsi DKI (54,4%). Terendah di Provinsi Papua Barat (2,3%), diikuti Provinsi Maluku (8,6%) dan Provinsi Gorontalo (9,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mempunyai 60-79% jenis alat kesehatan DTP yang digunakan, di perkotaan 32,7 persen, sementara di perdesaan 31,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas perawatan yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan DTP yang digunakan adalah 36,3 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah (64%), diikuti Provinsi Riau (55,2%) dan Provinsi Maluku Utara (51,7%). Terendah di Provinsi DKI (10,9%), diikuti Provinsi DIY (16,3%) dan Provinsi Papua (22,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan DTP yang digunakan, di perkotaan 30 persen, sementara di perdesaan 37,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas perawatan yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan DTP yang digunakan adalah 13,1 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat (35,1%), diikuti Provinsi Maluku (32,8%) dan Provinsi Papua Barat (30,2%). Terendah di Provinsi Jawa Tengah (2,4%), diikuti Provinsi Jawa Timur (4,4%) dan Provinsi Bangka Belitung (5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan DTP yang digunakan, di perkotaan 9,8 persen , sementara di perdesaan 13,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas perawatan yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan DTP yang digunakan adalah 12,6 persen. Terbesar di Provinsi Papua (38,3%), diikuti Provinsi Papua Barat (32,6%) dan Provinsi DKI (32,6%). Terendah di Provinsi DIY (2,3%), diikuti Provinsi Banten dan Sulawesi Tengah (4%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (4,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas perawatan yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan DTP yang digunakan, di perkotaan 19,2 persen, sementara di perdesaan 11,4 persen.

4.13.7. ALAT-ALAT PUSKESMAS PONED

Ditanyakan khusus pada Puskesmas PONED. Pada Rifaskes 2011 data Jenis Alat Poned yang dikumpulkan sebanyak 26 jenis.

Tabel 4.13.7.1
Persentase Puskesmas PONED menurut Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan PONED, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk PONED	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	47	17,0	27,7	25,5	12,8	17,0
2	Sumatera Utara	68	2,9	17,6	25,0	8,8	45,6
3	Sumatera Barat	60	16,7	28,3	23,3	8,3	23,3
4	Riau	30	3,3	43,3	16,7	10,0	26,7
5	Jambi	39	35,9	23,1	17,9	5,1	17,9
6	Sumatera Selatan	50	10,0	32,0	10,0	14,0	34,0
7	Bengkulu	24	29,2	25,0	29,2	8,3	8,3
8	Lampung	42	9,5	28,6	21,4	14,3	26,2
9	Bangka Belitung	8	25,0	0	62,5	0	12,5
10	Kepulauan Riau	22	9,1	27,3	13,6	4,5	45,5
11	DKI Jakarta	36	16,7	27,8	16,7	8,3	30,6
12	Jawa Barat	148	27,0	34,5	16,2	5,4	16,9
13	Jawa Tengah	170	11,2	29,4	27,6	14,7	17,1
14	DI Yogyakarta	28	35,7	21,4	25,0	10,7	7,1
15	Jawa Timur	249	31,3	32,9	17,7	4,4	13,7
16	Banten	48	20,8	39,6	22,9	6,3	10,4
17	Bali	30	10,0	33,3	16,7	23,3	16,7
18	Nusa Tenggara Barat	56	10,7	51,8	23,2	1,8	12,5
19	Nusa Tenggara Timur	66	19,7	25,8	16,7	4,5	33,3
20	Kalimantan Barat	32	31,3	28,1	6,3	9,4	25,0
21	Kalimantan Tengah	26	11,5	23,1	23,1	11,5	30,8
22	Kalimantan Selatan	31	12,9	22,6	19,4	6,5	38,7
23	Kalimantan Timur	43	4,7	25,6	27,9	9,3	32,6
24	Sulawesi Utara	26	0	11,5	34,6	3,8	50,0
25	Sulawesi Tengah	55	20,0	32,7	14,5	18,2	14,5
26	Sulawesi Selatan	79	6,3	30,4	16,5	11,4	35,4
27	Sulawesi Tenggara	42	26,2	21,4	21,4	11,9	19,0
28	Gorontalo	18	22,2	44,4	22,2	0	11,1
29	Sulawesi Barat	18	0	16,7	38,9	11,1	33,3
30	Maluku	17	5,9	47,1	11,8	0	35,3
31	Maluku Utara	15	20,0	13,3	6,7	6,7	53,3
32	Papua Barat	11	9,1	9,1	18,2	0	63,6
33	Papua	40	7,5	7,5	17,5	15,0	52,5
	Lokasi						
1	Perkotaan	345	15,4	26,7	20,6	5,8	31,6
2	Perdesaan	1329	18,4	29,9	20,2	9,6	21,7
	INDONESIA	1.674	17,8	29,3	20,3	8,8	23,8

Tabel 4.13.7.1, menunjukkan persentase Puskesmas PONED menurut ketersediaan jenis alat kesehatan PONED. Secara nasional, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 80% atau lebih jenis alat kesehatan PONED adalah 17,8 persen. Tertinggi di Provinsi Jambi (35,9%), diikuti Provinsi DI Yogyakarta (35,7%) serta Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Barat (31,3%). Terendah di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Barat (0%), dan Provinsi Sumatera Utara (2,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat kesehatan PONED, di perkotaan 15,4 persen, sementara di perdesaan 18,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED 29,3 persen. Tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (51,8%), diikuti Provinsi Maluku (47,1%) dan Provinsi Gorontalo (44,4%). Terendah di Provinsi Bangka Belitung (0%), diikuti Provinsi Papua (7,5%) dan Provinsi Papua Barat (9,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan PONED, di perkotaan 26,7 persen, sementara di perdesaan 29,9 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED adalah 20,3 persen. Tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (62,5%), diikuti Provinsi Sulawesi Barat (38,9%) dan Provinsi Sulawesi Utara (34,6%). Terendah di Provinsi Kalimantan Barat (6,3%), diikuti Provinsi Maluku Utara (6,7%) dan Provinsi Sulawesi Barat (11,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan PONED, di perkotaan 20,6 persen, sementara di perdesaan 20,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED adalah 8,8 persen. Tertinggi di Provinsi Bali (23,3%), diikuti Provinsi Sulawesi Tengah (18,2%), dan Provinsi Papua (15%). Terendah di Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua Barat (0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan PONED, di perkotaan 5,8 persen, sementara di perdesaan 9,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED adalah 23,8 persen. Tertinggi di Provinsi Papua Barat (63,6%), diikuti Provinsi Maluku Utara (53,3%) dan Provinsi Papua (52,5%). Terendah di Provinsi DI Yogyakarta (7,1%), diikuti Provinsi Bengkulu (8,3%) dan Provinsi Gorontalo (11,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan PONED, di perkotaan 31,6 persen, sementara di perdesaan 21,7 persen.

Tabel 4.13.7.2
Persentase Puskesmas PONED menurut Kelengkapan Jenis Alat Kesehatan PONED yang digunakan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk PONED	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	47	6,4	25,5	21,3	19,1	27,7
2	Sumatera Utara	68	2,9	13,2	22,1	8,8	52,9
3	Sumatera Barat	60	8,3	23,3	23,3	10,0	35,0
4	Riau	30	3,3	30,0	20,0	10,0	36,7
5	Jambi	39	25,6	15,4	23,1	10,3	25,6
6	Sumatera Selatan	50	6,0	22,0	20,0	16,0	36,0
7	Bengkulu	24	25,0	20,8	25,0	4,2	25,0
8	Lampung	42	4,8	19,0	31,0	16,7	28,6
9	Bangka Belitung	8	12,5	12,5	37,5	25,0	12,5
10	Kepulauan Riau	22	4,5	13,6	22,7	4,5	54,5
11	DKI Jakarta	36	8,3	30,6	19,4	11,1	30,6
12	Jawa Barat	148	15,5	34,5	25,7	6,8	17,6
13	Jawa Tengah	170	6,5	21,8	33,5	19,4	18,8
14	DI Yogyakarta	28	17,9	28,6	35,7	7,1	10,7
15	Jawa Timur	249	24,1	29,7	21,7	9,2	15,3
16	Banten	48	16,7	22,9	37,5	12,5	10,4
17	Bali	30	6,7	23,3	23,3	20,0	26,7
18	Nusa Tenggara Barat	56	7,1	44,6	30,4	5,4	12,5
19	Nusa Tenggara Timur	66	16,7	16,7	19,7	10,6	36,4
20	Kalimantan Barat	32	15,6	25,0	18,8	9,4	31,3
21	Kalimantan Tengah	26	11,5	7,7	19,2	26,9	34,6
22	Kalimantan Selatan	31	12,9	6,5	25,8	9,7	45,2
23	Kalimantan Timur	43	2,3	16,3	23,3	20,9	37,2
24	Sulawesi Utara	26	0,0	3,8	34,6	11,5	50,0
25	Sulawesi Tengah	55	5,5	32,7	16,4	21,8	23,6
26	Sulawesi Selatan	79	2,5	24,1	17,7	17,7	38,0
27	Sulawesi Tenggara	42	21,4	21,4	19,0	11,9	26,2
28	Gorontalo	18	11,1	44,4	22,2	11,1	11,1
29	Sulawesi Barat	18	0	16,7	16,7	27,8	38,9
30	Maluku	17	5,9	47,1	11,8	0	35,3
31	Maluku Utara	15	0	20,0	20,0	6,7	53,3
32	Papua Barat	11	9,1	9,1	0	18,2	63,6
33	Papua	40	2,5	5,0	17,5	10,0	65,0
	Lokasi						
1	Perkotaan	345	8,1	23,8	21,2	11,9	35,1
2	Perdesaan	1.329	12,4	24,2	24,6	12,8	26,0
	INDONESIA	**1.674**	**11,5**	**24,1**	**23,9**	**12,6**	**27,8**

Tabel 4.13.7.2, menunjukkan persentase Puskesmas PONED menurut kelengkapan jenis alat kesehatan PONED yang digunakan. Secara nasional, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat kesehatan PONED yang digunakan adalah 11,5 persen. Tertinggi di Provinsi Jambi (25,6%), diikuti Provinsi Bengkulu (25%) dan Provinsi Jatim (24,1%). Terdapat 3 provinsi yang tidak memiliki 80 persen atau lebih jenis alat kesehatan PONED yang digunakan yaitu provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat kesehatan PONED yang digunakan, di perkotaan 8,1 persen, sementara di perdesaan 12,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan PONED yang digunakan adalah 24,1 persen. Tertinggi di Provinsi Maluku (47,1%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (44,6%) dan Provinsi Gorontalo (44,4%).Terendah di Provinsi Sulawesi Utara (3,8%), diikuti Provinsi Papua (5%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (6,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan PONED yang digunakan di perkotaan 23,8 persen, sementara di perdesaan 24,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan PONED yang digunakan adalah 23,9 persen. Tertinggi di Provinsi Bangka Belitung dan Banten (37,5%), diikuti Provinsi DIY (35,7%) dan Provinsi Sulawesi Utara (34,6%). Terendah di Provinsi Papua Barat (0%), diikuti Provinsi Maluku (11,8%), diikuti Provinsi Sulawesi Tengah (16,4%) dan Provinsi Sulawesi Barat (16,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan PONED yang digunakan, di perkotaan 21,2 persen, sementara di perdesaan 24,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan PONED yang digunakan adalah 12,6 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat (27,8%), diikuti Provinsi Kalimantan Tengah (26,9%) dan Provinsi Bangka Belitung (25%). Terendah di Provinsi Maluku (0%), diikuti Provinsi Bengkulu (4,2%), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (4,5%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (5,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan PONED yang digunakan, di perkotaan 11,9 persen, sementara di perdesaan 12,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan PONED yang digunakan adalah 27,8 persen. Tertinggi di Provinsi Papua (65%), diikuti Provinsi Papua Barat (63,6%) dan Provinsi Kepulauan Riau (54,5%). Terendah di Provinsi Banten (10,4%), diikuti Provinsi DIY (10,7%) dan Provinsi Gorontalo (11,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas PONED yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan PONED yang digunakan, di perkotaan 35,1 persen, sementara di perdesaan 26 persen.

4.14. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN

Pada ketersedian obat di puskesmas, data yang dikumpulkan adalah ketersediaan 82 jenis obat pada tahun 2010 ,yang terdiri dari:

1. Obat Umum : terdiri dari 44 sediaan obat (35 sediaan obat indikator monitoring yang ditetapkan Bina Obat Publik Ditjen Binfar Alkes, 9 sediaan obat program KIA),
2. Obat Gigi : terdiri dari 10 sediaan untuk gigi yang terdapat pada daftar obat Pelayanan Kesehatan Dasar yang ditetapkan Ditjen Binfar Alkes.
3. Obat / Alat KB : terdiri dari 11 obat/ alat KB yang terdapat pada daftar obat Pelayanan Kesehatan Dasar yang ditetapkan Ditjen Binfar Alkes.
4. Obat khusus puskesmas poned : terdiri dari 17 sediaan obat yang diperlukan pada puskesmas PONED

Data diambil dari kartu stok tahun 2010, LP LPO atau file di komputer. Jenis obat dikatakan tersedia bila jenis obat tersebut ada di puskesmas pada tahun 2010, dan dikatakan cukup bila selama tahun 2010 stok obat tersebut tidak pernah kosong.

4.14.1. OBAT UMUM

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat umum yang dikumpulkan sebanyak 44 jenis. Tabel 4.14.1.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan obat umum. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis obat umum adalah 19,9 persen. Tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (36,9%), diikuti Provinsi Jawa Timur (36%) dan Provinsi Jambi (33,9%). Terendah di Provinsi Sulawesi Barat (3,7%), diikuti Provinsi Sumatera Utara (3,8%) dan Provinsi Sulawesi Utara (4,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis obat umum, di perkotaan 16,1 persen, sementara di perdesaan 21,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis obat umum adalah 65,9 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah (77,3%), diikuti Provinsi Sulawesi Selatan (76,8%) dan Provinsi Bali (76,3%). Terendah di Provinsi Papua (46,3%), diikuti Provinsi DKI (53,6%) dan Provinsi Kalimantan Timur (56,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79% jenis obat umum, di perkotaan 64,9 persen, sementara di perdesaan 66,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis obat umum adalah 13 persen. Tertinggi di Provinsi Sumatera Utara (30,8%), diikuti Provinsi DKI (27,1%) dan Provinsi Sulawesi Utara (25,7%). Terendah di Provinsi Kepulauan Riau (1,5%), diikuti Provinsi Riau (3,6%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (4,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis obat umum, di perkotaan 17,9 persen, sementara di perdesaan 11,3 persen.

Tabel 4.14.1.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Obat Umum, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	11,6	76,2	11,3	1,0	0
2	Sumatera Utara	506	3,8	63,4	30,8	1,8	0,2
3	Sumatera Barat	248	17,3	62,5	19,4	0,8	0
4	Riau	195	29,2	66,7	3,6	0	0,5
5	Jambi	171	33,9	59,6	5,8	0	0,6
6	Sumatera Selatan	298	18,1	65,8	15,8	0,3	0
7	Bengkulu	173	13,3	63,6	22,5	0,6	0
8	Lampung	265	25,3	68,7	5,7	0	0,4
9	Bangka Belitung	57	15,8	71,9	12,3	0	0
10	Kepulauan Riau	65	36,9	61,5	1,5	0	0
11	DKI Jakarta	336	16,1	53,6	27,1	2,1	1,2
12	Jawa Barat	1031	15,1	75,4	9,3	0,1	0,1
13	Jawa Tengah	861	27,2	60,6	12,0	0,1	0,1
14	DI Yogyakarta	121	22,3	72,7	5,0	0	0
15	Jawa Timur	949	36,0	58,6	5,1	0,2	0,1
16	Banten	206	13,1	76,2	10,2	0	0,5
17	Bali	114	14,0	76,3	9,6	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	149	26,2	69,1	4,7	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	302	19,2	72,2	7,3	0,7	0,7
20	Kalimantan Barat	233	22,3	59,7	15,9	2,1	0
21	Kalimantan Tengah	176	27,8	66,5	5,7	0,0	0
22	Kalimantan Selatan	217	29,0	65,9	4,6	0,5	0
23	Kalimantan Timur	213	19,2	56,8	22,5	1,4	0
24	Sulawesi Utara	167	4,8	68,9	25,7	0,6	0
25	Sulawesi Tengah	163	16,6	68,1	14,1	0,6	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	10,1	76,8	12,8	0,2	0
27	Sulawesi Tenggara	233	10,7	77,3	11,2	0	0,9
28	Gorontalo	74	10,8	66,2	23,0	0	0
29	Sulawesi Barat	81	3,7	70,4	21,0	3,7	1,2
30	Maluku	161	15,5	61,5	17,4	1,9	3,7
31	Maluku Utara	101	11,9	75,2	11,9	0,0	1,0
32	Papua Barat	104	21,2	58,7	17,3	1,0	1,9
33	Papua	294	23,5	46,3	19,4	4,4	6,5
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	16,1	64,9	17,9	0,8	0,3
2	Perdesaan	6660	21,2	66,2	11,3	0,6	0,6
	INDONESIA	**8981**	**19,9**	**65,9**	**13,0**	**0,7**	**0,5**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis obat umum adalah 0,7 persen. Tertinggi di Provinsi Papua (4,4%), diikuti Provinsi Sulawesi Barat (3,7%) dan Provinsi Kalimantan Barat dan DKI (2,1%). Terdapat 13 provinsi yang tidak memiliki ketersediaan jenis obat umum < 40% (0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis obat umum, di perkotaan 0,8 persen, sementara di perdesaan 0,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis obat umum adalah 0,5 persen. Tertinggi di Provinsi Papua (6,5%), diikuti Provinsi Maluku (3,7%) dan Provinsi Papua Barat (1,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis obat umum, di perkotaan 0,3 persen, sementara di perdesaan 0,6 persen.

Tabel 4.14.1.2, menunjukkan persentase Puskesmas menurut Kecukupan jenis obat umum yang tersedia. Dikatakan cukup bila selama tahun 2010 jenis obat tersebut tidak pernah kosong.

Tabel 4.14.1.2
Persentase Puskesmas menurut Kecukupan Jenis Obat Umum, Rifaskes 2011

No	Uraian	>= 80% cukup	60-79% cukup	40-59% cukup	20-39% cukup	< 20% cukup	>= 80% cukup
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	3,9	51,4	36,7	6,8	1,3
2	Sumatera Utara	506	1,2	44,9	42,1	7,9	4,0
3	Sumatera Barat	248	13,3	58,1	26,6	1,6	0,4
4	Riau	195	18,5	58,5	17,9	4,1	1,0
5	Jambi	171	21,1	61,4	14,0	1,8	1,8
6	Sumatera Selatan	298	11,7	55,7	26,8	4,4	1,3
7	Bengkulu	173	6,9	51,4	32,9	5,2	3,5
8	Lampung	265	15,1	66,8	14,7	1,9	1,5
9	Bangka Belitung	57	7,0	61,4	31,6	0	0
10	Kepulauan Riau	65	23,1	61,5	13,8	1,5	0
11	DKI Jakarta	336	11,9	50,0	29,2	5,1	3,9
12	Jawa Barat	1031	11,6	68,9	17,0	1,6	0,9
13	Jawa Tengah	861	20,8	60,7	17,2	0,9	0,3
14	DI Yogyakarta	121	19,0	73,6	7,4	0	0
15	Jawa Timur	949	29,0	56,8	12,3	1,1	0,8
16	Banten	206	7,8	68,4	18,9	3,9	1,0
17	Bali	114	9,6	69,3	18,4	1,8	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	20,1	64,4	11,4	1,3	2,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	10,6	51,7	29,5	5,6	2,6
20	Kalimantan Barat	233	12,0	50,6	27,9	8,2	1,3
21	Kalimantan Tengah	176	16,5	60,8	21,0	1,7	0
22	Kalimantan Selatan	217	18,0	68,2	12,4	0,9	0,5
23	Kalimantan Timur	213	9,9	54,0	30,5	4,7	0,9
24	Sulawesi Utara	167	1,2	38,3	50,9	6,6	3,0
25	Sulawesi Tengah	163	3,7	36,8	40,5	16,6	2,5
26	Sulawesi Selatan	406	5,4	62,6	27,6	3,7	0,7
27	Sulawesi Tenggara	233	6,4	58,4	29,6	3,9	1,7
28	Gorontalo	74	8,1	45,9	43,2	2,7	0
29	Sulawesi Barat	81	0	25,9	40,7	27,2	6,2
30	Maluku	161	7,5	40,4	28,6	14,9	8,7
31	Maluku Utara	101	3,0	52,5	37,6	5,0	2,0
32	Papua Barat	104	11,5	45,2	32,7	3,8	6,7
33	Papua	294	12,2	37,8	22,4	11,2	16,3
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	10,9	57,6	26,2	3,7	1,6
2	Perdesaan	6660	14,0	56,4	23,0	4,3	2,3
	INDONESIA	**8981**	**13,2**	**56,7**	**23,9**	**4,1**	**2,1**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis obat umum yang cukup selama tahun 2010 adalah 13,2 persen. Tertinggi di Provinsi Jawa Timur (29%), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (23,1%) dan Provinsi Jambi (21,1%). Terendah di Provinsi Sulawesi Barat (0%), diikuti Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara (1,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis obat umum yang cukup selama tahun 2010, di perkotaan 10,9 persen, sementara di perdesaan 14 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis obat umum yang cukup selama tahun 2010 adalah 56,7 persen. Tertinggi di Provinsi DIY (73,6%), diikuti Provinsi Bali (69,3%) dan Provinsi Jawa Barat (68,9%). Terendah di Provinsi Sulawesi Barat (25,9%), diikuti Provinsi Sulawesi Tengah (36,8%) dan Provinsi Papua (37,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis obat umum yang cukup selama tahun 2010 , di perkotaan 57,6 persen, sementara di perdesaan 56,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis obat umum yang cukup selama tahun 2010 adalah 23,9 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara (50,9%), diikuti Provinsi Gorontalo (43,2%) dan Provinsi Sumatera Utara (42,1%). Terendah di Provinsi DIY (7,4%), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (11,4%) dan Provinsi Jawa Timur (12,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis obat umum yang cukup selama tahun 2010 , di perkotaan 26,2 persen, sementara di perdesaan 23 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis obat umum yang cukup selama tahun 2010 adalah 4,1 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat (27,2%), diikuti Provinsi Sulawesi Tengah (16,6%) dan Provinsi Maluku (14,9%). Terendah di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi DI Yogyakarta (0%), dan Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah (0,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis obat umum yang cukup selama tahun 2010 , di perkotaan 3,7 persen, sementara di perdesaan 4,3 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis obat umum yang cukup selama tahun 2010 adalah 2,1 persen. Tertinggi di Provinsi Papua (16,3%), diikuti Provinsi Maluku (8,7%) dan Provinsi Papua Barat (6,7%). Terdapat 5 provinsi yang tidak memiliki kecukupan jenis obat umum < 20% lengkap (0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis obat umum yang cukup selama tahun 2010 , di perkotaan 1,6 persen, sementara di perdesaan 2,3 persen.

4.14.2. OBAT GIGI

Pada Rifaskes 2011 data jenis Obat Gigi yang dikumpulkan sebanyak 10 jenis.

Tabel 4.14.2.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Obat Gigi, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	9,3	13,8	10,6	17,0	49,2
2	Sumatera Utara	506	4,2	7,5	11,9	14,8	61,7
3	Sumatera Barat	248	14,5	21,0	19,8	14,5	30,2
4	Riau	195	11,8	8,2	16,9	10,8	52,3
5	Jambi	171	14,6	16,4	15,8	15,2	38,0
6	Sumatera Selatan	298	7,0	4,7	12,1	10,4	65,8
7	Bengkulu	173	3,5	5,2	5,8	13,3	72,3
8	Lampung	265	13,2	11,3	14,0	9,4	52,1
9	Bangka Belitung	57	1,8	15,8	17,5	17,5	47,4
10	Kepulauan Riau	65	15,4	18,5	18,5	24,6	23,1
11	DKI Jakarta	336	53,6	23,5	10,4	3,9	8,6
12	Jawa Barat	1031	27,7	21,5	14,8	8,8	27,1
13	Jawa Tengah	861	42,2	22,8	12,2	7,2	15,7
14	DI Yogyakarta	121	56,2	24,0	9,9	7,4	2,5
15	Jawa Timur	949	38,7	24,3	14,2	9,7	13,1
16	Banten	206	17,0	22,8	19,4	9,7	31,1
17	Bali	114	47,4	33,3	12,3	2,6	4,4
18	Nusa Tenggara Barat	149	25,5	16,8	11,4	12,8	33,6
19	Nusa Tenggara Timur	302	14,2	9,6	13,9	13,6	48,7
20	Kalimantan Barat	233	3,4	7,3	5,6	16,3	67,4
21	Kalimantan Tengah	176	18,8	11,4	10,2	10,8	48,9
22	Kalimantan Selatan	217	40,6	25,3	14,7	8,3	11,1
23	Kalimantan Timur	213	8,9	11,3	10,8	12,7	56,3
24	Sulawesi Utara	167	6,6	4,2	4,8	10,8	73,7
25	Sulawesi Tengah	163	2,5	4,3	5,5	12,3	75,5
26	Sulawesi Selatan	406	7,1	13,1	14,0	20,9	44,8
27	Sulawesi Tenggara	233	6,4	8,2	9,9	18,0	57,5
28	Gorontalo	74	2,7	4,1	6,8	13,5	73,0
29	Sulawesi Barat	81	3,7	3,7	2,5	9,9	80,2
30	Maluku	161	5,0	7,5	8,1	7,5	72,0
31	Maluku Utara	101	1,0	1,0	3,0	7,9	87,1
32	Papua Barat	104	3,8	4,8	3,8	5,8	81,7
33	Papua	294	5,8	3,1	2,7	5,1	83,3
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	30,8	19,3	14,3	12,6	23,0
2	Perdesaan	6660	17,5	14,0	11,2	10,5	46,7
	INDONESIA	**8981**	**21,0**	**15,4**	**12,0**	**11,0**	**40,6**

Tabel 4.14.2.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis obat gigi. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis obat gigi adalah 21 persen. Tertinggi di Provinsi DIY (56,2%), diikuti Provinsi DKI (53,6%) dan Provinsi Bali (47,4%). Terendah di Provinsi Maluku Utara (1%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (1,8%) dan Provinsi Papua Sulawesi Tengah (2,5%). Bila dillihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis obat gigi, di perkotaan 30,8 persen, sementara di perdesaan 17,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis obat gigi adalah 15,4 persen. Tertinggi di Provinsi Bali (33,3%), diikuti Provinsi Kalimantan Selatan (25,3%) dan Provinsi Jawa Timur (24,3%). Terendah di Provinsi Maluku Utara (1%), diikuti Provinsi Papua (3,1%) dan Provinsi Sulawesi Barat (3,7%). Bila dillihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis obat gigi, di perkotaan 19,3 persen, sementara di perdesaan 14 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis obat gigi adalah 12 persen. Tertinggi di Provinsi Sumatera Barat (19,8%), diikuti Provinsi Banten (19,4%) dan Provinsi Kepulauan Riau (18,5%). Terendah di Provinsi Sulawesi Barat (2,5%), diikuti Provinsi Papua (2,7%) dan Provinsi Maluku Utara (3%). Bila dillihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis obat gigi, di perkotaan 14,3 persen, sementara di perdesaan 11,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis obat gigi adalah 11 persen. Tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (24,6%), diikuti Provinsi Sulawesi Selatan (20,9%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (18%). Terendah di Provinsi Bali (2,6%), diikuti Provinsi DKI (3,9%) dan Provinsi Papua (5,1%). Bila dillihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis obat gigi, di perkotaan 12,6 persen, sementara di perdesaan 10,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis obat gigi adalah 40,6 persen. Tertinggi di Provinsi Maluku Utara (87,1%), diikuti Provinsi Papua (83,3%) dan Provinsi Papua Barat (81,7%). Terendah di Provinsi DIY (2,5%), diikuti Provinsi Bali (4,4%) dan Provinsi DKI (8,6%). Bila dillihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis obat gigi, di perkotaan 23 persen, sementara di perdesaan 46,7 persen.

Tabel 4.14.2.2
Persentase Puskesmas menurut Kecukupan Jenis Obat Gigi selama tahun 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% cukup	60-79% cukup	40-59% cukup	20-39% cukup	< 20% cukup
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	6,1	13,2	10,3	14,5	55,9
2	Sumatera Utara	506	3,4	6,9	9,5	13,8	66,4
3	Sumatera Barat	248	12,1	19,8	21,4	14,5	32,3
4	Riau	195	10,3	6,7	14,4	12,3	56,4
5	Jambi	171	12,3	13,5	14,6	17,5	42,1
6	Sumatera Selatan	298	6,7	4,4	10,1	8,7	70,1
7	Bengkulu	173	2,3	4,0	5,8	12,7	75,1
8	Lampung	265	10,6	10,2	14,0	10,6	54,7
9	Bangka Belitung	57	1,8	12,3	19,3	17,5	49,1
10	Kepulauan Riau	65	12,3	18,5	12,3	24,6	32,3
11	DKI Jakarta	336	48,8	24,4	9,5	5,7	11,6
12	Jawa Barat	1031	23,9	20,8	15,0	10,1	30,3
13	Jawa Tengah	861	36,7	23,6	13,6	8,6	17,5
14	DI Yogyakarta	121	54,5	24,8	9,9	7,4	3,3
15	Jawa Timur	949	33,6	23,8	15,4	11,1	16,1
16	Banten	206	12,1	24,3	16,0	12,6	35,0
17	Bali	114	40,4	29,8	16,7	7,9	5,3
18	Nusa Tenggara Barat	149	20,1	13,4	14,8	14,8	36,9
19	Nusa Tenggara Timur	302	10,3	10,9	11,9	11,9	55,0
20	Kalimantan Barat	233	2,1	5,6	5,6	12,0	74,7
21	Kalimantan Tengah	176	16,5	9,7	9,1	13,1	51,7
22	Kalimantan Selatan	217	32,7	28,6	16,6	9,2	12,9
23	Kalimantan Timur	213	7,5	9,9	9,4	11,3	62,0
24	Sulawesi Utara	167	4,2	4,2	5,4	7,8	78,4
25	Sulawesi Tengah	163	1,2	3,1	5,5	10,4	79,8
26	Sulawesi Selatan	406	5,9	11,3	12,8	20,0	50,0
27	Sulawesi Tenggara	233	4,7	7,7	8,6	14,2	64,8
28	Gorontalo	74	2,7	4,1	6,8	13,5	73,0
29	Sulawesi Barat	81	1,2	1,2	3,7	7,4	86,4
30	Maluku	161	3,1	4,3	8,1	6,8	77,6
31	Maluku Utara	101	0	1,0	0	7,9	91,1
32	Papua Barat	104	1,9	2,9	5,8	2,9	86,5
33	Papua	294	4,4	3,1	2,0	5,4	85,0
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	26,6	19,0	13,9	12,6	27,9
2	Perdesaan	6660	14,7	13,4	11,1	10,7	50,1
	INDONESIA	**8981**	**17,8**	**14,8**	**11,8**	**11,2**	**44,4**

Tabel 4.14.2.2, menunjukkan persentase Puskesmas menurut kecukupan jenis obat gigi selama tahun 2010. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis obat gigi yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 17,8 persen. Tertinggi di Provinsi DIY (54,5%), diikuti Provinsi DKI (48,8%) dan Provinsi Bali (40,4%). Terendah di Provinsi Maluku Utara (0%), diikuti Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat (1,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis obat gigi yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 26,6 persen, sementara di perdesaan 14,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis obat gigi yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 14,8 persen. Tertinggi di Provinsi Bali (29,8%), diikuti Provinsi Kalimantan Selatan (28,6%) dan Provinsi DIY (24,8%). Terendah di Provinsi Maluku Utara (1%), diikuti Provinsi Sulawesi Barat (1,2%) dan Provinsi Papua Barat (2,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79% jenis obat gigi yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 19 persen, sementara di perdesaan 13,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis obat gigi yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 11,8 persen. Tertinggi di Provinsi Sumatera Barat (21,4%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (19,3%) dan Provinsi Bali (16,7%). Terendah di Provinsi Maluku Utara (0%), diikuti Provinsi Papua (2%), serta Provinsi Sulawesi Barat (3,7%) dan Provinsi Sulawesi Utara (5,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis obat gigi yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 13,9 persen, sementara di perdesaan 11,1 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis obat gigi yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 11,2 persen. Tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (24,6%), diikuti Provinsi Sulawesi Selatan (20%) dan Provinsi Jambi dan Bangka Belitung (17,5%). Terendah di Provinsi Papua Barat (2,9%), diikuti Provinsi Papua (5,4%) dan Provinsi DKI (5,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis obat gigi yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 12,6 persen, sementara di perdesaan 10,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis obat gigi yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 44,4 persen. Tertinggi di Provinsi Maluku Utara (91,1%), diikuti Provinsi Papua Barat (86,5%) dan Provinsi Sulawesi Barat (86,4%). Terendah di Provinsi DIY (3,3%), diikuti Provinsi Bali (5,3%) dan Provinsi DKI (11,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis obat gigi yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 27,9 persen, sementara di perdesaan 50,1 persen.

4.14.3. OBAT / ALAT KB

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat/Alat KB yang dikumpulkan sebanyak 11 jenis. Tabel 4.14.3.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan Jenis Obat/Alat KB. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis Obat/Alat KB adalah 8,2 persen. Tertinggi di Provinsi DKI (17,9%), diikuti Provinsi Jawa Timur (13,8%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (12,8%). Terendah di Provinsi Bangka Belitung (1,8%), diikuti Provinsi Bali (2,6%) dan Provinsi Gorontalo (2,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis Obat/Alat KB, di perkotaan 9,6 persen, sementara di perdesaan 7,7 persen.

Tabel 4.14.3.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Obat/Alat KB, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	3,5	5,8	17,0	41,5	32,2
2	Sumatera Utara	506	4,9	3,8	18,0	40,5	32,8
3	Sumatera Barat	248	8,1	5,2	23,0	46,4	17,3
4	Riau	195	8,2	5,1	25,6	36,9	24,1
5	Jambi	171	11,7	1,2	14,0	46,2	26,9
6	Sumatera Selatan	298	11,7	8,1	25,5	27,9	26,8
7	Bengkulu	173	5,8	4,6	16,8	50,9	22,0
8	Lampung	265	6,0	4,2	14,0	38,5	37,4
9	Bangka Belitung	57	1,8	14,0	43,9	29,8	10,5
10	Kepulauan Riau	65	6,2	12,3	23,1	38,5	20,0
11	DKI Jakarta	336	17,9	7,4	33,6	29,5	11,6
12	Jawa Barat	1031	10,9	9,9	27,4	34,1	17,7
13	Jawa Tengah	861	8,7	7,5	26,0	44,5	13,2
14	DI Yogyakarta	121	4,1	1,7	34,7	56,2	3,3
15	Jawa Timur	949	13,8	11,6	31,2	31,5	11,9
16	Banten	206	6,8	11,7	25,2	43,2	13,1
17	Bali	114	2,6	2,6	12,3	56,1	26,3
18	Nusa Tenggara Barat	149	12,8	4,0	19,5	34,9	28,9
19	Nusa Tenggara Timur	302	6,6	8,6	20,9	48,0	15,9
20	Kalimantan Barat	233	12,4	6,0	27,5	27,9	26,2
21	Kalimantan Tengah	176	4,0	4,0	11,4	42,6	38,1
22	Kalimantan Selatan	217	7,8	11,5	21,7	34,6	24,4
23	Kalimantan Timur	213	3,8	5,6	21,1	39,0	30,5
24	Sulawesi Utara	167	4,2	6,0	18,0	31,1	40,7
25	Sulawesi Tengah	163	3,7	2,5	14,1	46,6	33,1
26	Sulawesi Selatan	406	5,9	8,6	25,6	40,6	19,2
27	Sulawesi Tenggara	233	3,4	2,1	12,9	30,0	51,5
28	Gorontalo	74	2,7	14,9	16,2	39,2	27,0
29	Sulawesi Barat	81	4,9	4,9	23,5	40,7	25,9
30	Maluku	161	3,7	0,6	8,1	29,2	58,4
31	Maluku Utara	101	5,0	1,0	8,9	23,8	61,4
32	Papua Barat	104	4,8	2,9	9,6	20,2	62,5
33	Papua	294	4,1	2,4	6,5	12,6	74,5
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	9,6	6,9	25,0	38,1	20,4
2	Perdesaan	6660	7,7	7,0	21,6	36,5	27,2
	INDONESIA	**8981**	**8,2**	**6,9**	**22,5**	**36,9**	**25,5**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 6,9 persen. Tertinggi di Provinsi Gorontalo (14,9%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (14%) dan Provinsi Kepulauan Riau (12,3%). Terendah di Provinsi Maluku (0,6%), diikuti Provinsi Maluku Utara (1%) dan Provinsi Jambi (1,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis Obat/Alat KB, di perkotaan 6,9 persen, sementara di perdesaan 7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 22,5 persen. Tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (43,9%), diikuti Provinsi DIY (34,7%) dan Provinsi DKI (33,6%). Terendah di Provinsi Papua (6,5%), diikuti Provinsi Maluku (8,1%) dan Provinsi Maluku Utara (8,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis Obat/Alat KB, di perkotaan 25 persen, sementara di perdesaan 21,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 36,9 persen. Tertinggi di Provinsi DIY (56,2%), diikuti Provinsi Bali (56,1%) dan Provinsi Bengkulu (50,9%). Terendah di Provinsi Papua (12,6%), diikuti Provinsi Papua Barat (20,2%) dan Provinsi Maluku Utara (23,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis Obat/Alat KB, di perkotaan 38,1 persen, sementara di perdesaan 36,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 25,5 persen. Tertinggi di Provinsi Papua (74,5%), diikuti Provinsi Papua Barat (62,5%) dan Provinsi Maluku Utara (61,4%). Terendah di Provinsi DIY (3,3%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (10,5%) dan Provinsi DKI (11,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen Jenis Obat/Alat KB, di perkotaan 20,4 persen, sementara di perdesaan 27,2 persen.

Tabel 4.14.3.2, menunjukkan persentase Puskesmas menurut kecukupan Jenis Obat/Alat KB selama tahun 2010 . Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis Obat/Alat KB yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 7,2 persen. Tertinggi di Provinsi DKI (17%), diikuti Provinsi Jawa Timur (12,2%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (12,1%). Terendah di Provinsi Bangka Belitung (1,8%), diikuti Provinsi Maluku Utara (2%) dan Provinsi Maluku (2,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis Obat/Alat KB yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 8,7 persen, sementara di perdesaan 6,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis Obat/Alat KB yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 6,4 persen. Tertinggi di Provinsi Gorontalo (13,5%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (12,3%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (12%). Terendah di Provinsi Jambi (0,6%), diikuti Provinsi Maluku Utara (1%) dan Provinsi Maluku (1,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis Obat/Alat KB yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 6,5 persen, sementara di perdesaan 6,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis Obat/Alat KB yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 20,2 persen. Tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (43,9%), diikuti Provinsi DKI (32,4%) dan Provinsi DIY (31,4%). Terendah di Provinsi Papua (4,8%), diikuti Provinsi Maluku (5,6%) dan Provinsi Maluku Utara (5,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis Obat/Alat KB yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 23,1 persen, sementara di perdesaan 19,2 persen.

Tabel 4.14.3.2
Persentase Puskesmas menurut Kecukupan Jenis Obat/Alat KB selama tahun 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% cukup	60-79% cukup	40-59% cukup	20-39% cukup	< 20% cukup
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	2,6	4,8	14,5	40,5	37,6
2	Sumatera Utara	506	3,4	3,2	16,6	39,7	37,2
3	Sumatera Barat	248	8,1	4,4	23,4	43,1	21,0
4	Riau	195	7,2	4,6	21,0	35,9	31,3
5	Jambi	171	10,5	0,6	14,6	41,5	32,7
6	Sumatera Selatan	298	10,7	7,4	20,8	30,5	30,5
7	Bengkulu	173	4,6	2,9	16,2	46,2	30,1
8	Lampung	265	4,9	3,4	12,5	36,2	43,0
9	Bangka Belitung	57	1,8	12,3	43,9	31,6	10,5
10	Kepulauan Riau	65	3,1	9,2	21,5	38,5	27,7
11	DKI Jakarta	336	17,0	6,8	32,4	29,2	14,6
12	Jawa Barat	1031	9,6	9,8	25,5	34,6	20,5
13	Jawa Tengah	861	8,1	7,8	23,9	45,1	15,1
14	DI Yogyakarta	121	4,1	1,7	31,4	57,0	5,8
15	Jawa Timur	949	12,2	10,7	29,0	33,4	14,6
16	Banten	206	6,8	10,2	23,8	44,7	14,6
17	Bali	114	2,6	1,8	12,3	48,2	35,1
18	Nusa Tenggara Barat	149	12,1	2,0	16,8	34,9	34,2
19	Nusa Tenggara Timur	302	5,0	7,6	18,5	46,4	22,5
20	Kalimantan Barat	233	11,6	5,6	20,2	30,0	32,6
21	Kalimantan Tengah	176	3,4	3,4	9,7	34,7	48,9
22	Kalimantan Selatan	217	5,5	12,0	20,3	34,6	27,6
23	Kalimantan Timur	213	3,8	5,2	16,4	39,0	35,7
24	Sulawesi Utara	167	3,6	6,0	13,8	26,9	49,7
25	Sulawesi Tengah	163	3,1	1,8	11,0	36,8	47,2
26	Sulawesi Selatan	406	5,2	7,6	24,4	40,1	22,7
27	Sulawesi Tenggara	233	3,4	1,7	9,0	26,2	59,7
28	Gorontalo	74	2,7	13,5	12,2	39,2	32,4
29	Sulawesi Barat	81	3,7	3,7	17,3	32,1	43,2
30	Maluku	161	2,5	1,2	5,6	21,7	68,9
31	Maluku Utara	101	2,0	1,0	5,9	15,8	75,2
32	Papua Barat	104	3,8	2,9	6,7	20,2	66,3
33	Papua	294	3,4	2,0	4,8	10,9	78,9
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	8,7	6,5	23,1	37,5	24,2
2	Perdesaan	6660	6,7	6,4	19,2	35,4	32,4
	INDONESIA	**8981**	**7,2**	**6,4**	**20,2**	**36,0**	**30,2**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis Obat/Alat KB yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 36 persen. Tertinggi di Provinsi DIY (57%), diikuti Provinsi Bali (48,2%) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (46,4%). Terendah di Provinsi Papua (10,9%), diikuti Provinsi Maluku Utara (15,8%) dan Provinsi Papua Barat (20,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis Obat/Alat KB yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 37,5 persen, sementara di perdesaan 35,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen Jenis Obat/Alat KB cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 30,2 persen. Tertinggi di Provinsi Papua (78,9%), diikuti Provinsi Maluku Utara (75,2%) dan Provinsi Maluku (68,9%). Terendah di Provinsi DIY (5,8%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (10,5%) dan Provinsi Banten, DKI dan Jawa Timur (14,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen Jenis Obat/Alat KB yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 24,2 persen, sementara di perdesaan 32,4 persen.

4.14.4. OBAT PONED

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat PONED yang dikumpulkan sebanyak 17 jenis.

Tabel.4.14.4.1
.Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Obat PONED, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	0,6	0,6	2,3	13,8	82,6
2	Sumatera Utara	506	0,2	0,4	1,0	10,9	87,5
3	Sumatera Barat	248	0	1,6	7,7	12,9	77,8
4	Riau	195	0,5	1,5	7,7	21,0	69,2
5	Jambi	171	1,8	5,3	7,6	20,5	64,9
6	Sumatera Selatan	298	0,7	0,7	4,7	17,4	76,5
7	Bengkulu	173	1,2	0,6	1,2	17,3	79,8
8	Lampung	265	0,4	1,5	7,9	15,8	74,3
9	Bangka Belitung	57	0	0	5,3	17,5	77,2
10	Kepulauan Riau	65	0	6,2	13,8	23,1	56,9
11	DKI Jakarta	336	1,2	0,6	2,1	5,7	90,5
12	Jawa Barat	1031	0,6	0,9	4,3	12,0	82,3
13	Jawa Tengah	861	0,8	3,1	6,0	16,3	73,8
14	DI Yogyakarta	121	0	0	6,6	21,5	71,9
15	Jawa Timur	949	1,3	3,4	11,0	14,3	70,1
16	Banten	206	0	0	5,8	17,5	76,7
17	Bali	114	0	2,6	4,4	18,4	74,6
18	Nusa Tenggara Barat	149	1,3	2,7	8,7	42,3	45,0
19	Nusa Tenggara Timur	302	1,3	1,3	7,0	17,9	72,5
20	Kalimantan Barat	233	0,4	0,9	6,9	18,0	73,8
21	Kalimantan Tengah	176	0	1,7	4,5	26,7	67,0
22	Kalimantan Selatan	217	0	0,9	6,0	12,4	80,6
23	Kalimantan Timur	213	0	0	8,0	18,3	73,7
24	Sulawesi Utara	167	0	0,6	0,6	13,2	85,6
25	Sulawesi Tengah	163	0,6	2,5	4,3	24,5	68,1
26	Sulawesi Selatan	406	0	0,5	1,5	14,0	84,0
27	Sulawesi Tenggara	233	0,9	0	1,7	17,6	79,8
28	Gorontalo	74	2,7	4,1	10,8	6,8	75,7
29	Sulawesi Barat	81	0	0	3,7	22,2	74,1
30	Maluku	161	0	0	1,9	4,3	93,8
31	Maluku Utara	101	0	0	4,0	23,8	72,3
32	Papua Barat	104	0,0	1,0	3,8	18,3	76,9
33	Papua	294	1,0	2,0	4,8	15,3	76,9
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	0,8	0,6	3,1	12,5	82,9
2	Perdesaan	6660	0,6	1,8	6,1	16,8	74,7
	INDONESIA	**8981**	**0,6**	**1,5**	**5,4**	**15,7**	**76,8**

Tabel 4.14.4.1 menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan Jenis obat PONED. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis obat PONED adalah 0,6 persen. Tertinggi di Provinsi Gorontalo (2,7%), diikuti Provinsi Jambi (1,8%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur (1,3%). Terdapat 15 provinsi yang tidak mempunyai 80 persen atau lebih Jenis obat PONED (0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis obat PONED, di perkotaan 0,8 persen, sementara di perdesaan 0,6 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis obat PONED adalah 1,5 persen. Tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (6,2%), diikuti Provinsi Jambi (5,3%) dan Provinsi Gorontalo (4,1%). Terdapat 8 provinsi yang tidak memiliki ketersediaan Jenis obat PONED < 80 persen (0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis obat PONED, di perkotaan 0,6 persen, sementara di perdesaan 1,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis obat PONED adalah 5,4 persen. Tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (13,8%), diikuti Provinsi Jawa Timur (11%) dan Provinsi Gorontalo (10,8%). Terendah di Provinsi Sulawesi Utara (0,6%), diikuti Provinsi Sumatera Utara (1%) dan Provinsi Bengkulu (1,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis obat PONED di perkotaan 3,1 persen, sementara di perdesaan 6,1 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis obat PONED adalah 15,7 persen. Tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (42,3%), diikuti Provinsi Kalimantan Tengah (26,7%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (24,5%). Terendah di Provinsi Maluku (4,3%), diikuti Provinsi DKI (5,7%) dan Provinsi Gorontalo (6,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis obat PONED, di perkotaan 12,5 persen, sementara di perdesaan 16,8 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen Jenis obat PONED adalah 76,8 persen. Tertinggi di Provinsi Maluku (93,8%), diikuti Provinsi DKI (90,5%) dan Provinsi Sumatera Utara (87,5%). Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (45%), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (56,9%) dan Provinsi Jambi (64,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen Jenis obat PONED, di perkotaan 82,9 persen, sementara di perdesaan 74,7 persen.

Tabel 4.14.4.2, menunjukkan persentase Puskesmas menurut kecukupan Jenis obat PONED yang digunakan. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 0,5 persen. Tertinggi di Provinsi Gorontalo (2,7%), diikuti Provinsi Jambi (1,8%) dan Provinsi DKI (1,2%). Terdapat 16 provinsi yang tidak mempunyai 80% atau lebih Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010 (0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 0,7 persen, sementara di perdesaan 0,4 persen.

Tabel 4.14.4.2
Persentase Puskesmas menurut Kecukupan Jenis Obat PONED yang tersedia selama tahun 2010, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% cukup	60-79% cukup	40-59% cukup	20-39% cukup	< 20% cukup
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	0,6	0,3	1,9	12,5	84,6
2	Sumatera Utara	506	0	0,4	0,2	9,5	89,9
3	Sumatera Barat	248	0	1,6	6,5	13,7	78,2
4	Riau	195	0,5	1,0	6,7	21,5	70,3
5	Jambi	171	1,8	3,5	5,8	21,6	67,3
6	Sumatera Selatan	298	0,7	0	2,7	16,8	79,9
7	Bengkulu	173	0,6	0	1,2	17,9	80,3
8	Lampung	265	0,4	0,8	7,2	15,1	76,6
9	Bangka Belitung	57	0	0	5,3	17,5	77,2
10	Kepulauan Riau	65	0	3,1	13,8	26,2	56,9
11	DKI Jakarta	336	1,2	0,6	1,8	5,4	91,1
12	Jawa Barat	1031	0,6	0,9	4,0	11,3	83,2
13	Jawa Tengah	861	0,7	2,8	5,5	15,3	75,7
14	DI Yogyakarta	121	0	0	5,8	22,3	71,9
15	Jawa Timur	949	0,9	2,8	9,9	14,2	72,1
16	Banten	206	0	0	4,9	15,0	80,1
17	Bali	114	0	1,8	5,3	18,4	74,6
18	Nusa Tenggara Barat	149	0,7	0,7	8,7	39,6	50,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	0,7	1,7	6,3	17,5	73,8
20	Kalimantan Barat	233	0,4	0	6,4	15,9	77,3
21	Kalimantan Tengah	176	0	1,1	3,4	23,3	72,2
22	Kalimantan Selatan	217	0	0,5	5,5	12,0	82,0
23	Kalimantan Timur	213	0	0	7,0	17,4	75,6
24	Sulawesi Utara	167	0	0,6	0,6	9,6	89,2
25	Sulawesi Tengah	163	0,6	0,6	5,5	17,8	75,5
26	Sulawesi Selatan	406	0	0,5	1,0	13,1	85,5
27	Sulawesi Tenggara	233	0,9	0	1,7	15,0	82,4
28	Gorontalo	74	2,7	4,1	10,8	5,4	77,0
29	Sulawesi Barat	81	0	0	2,5	16,0	81,5
30	Maluku	161	0	0	1,9	2,5	95,7
31	Maluku Utara	101	0	0	1,0	19,8	79,2
32	Papua Barat	104	0	0	4,8	15,4	79,8
33	Papua	294	0,7	1,7	3,4	11,6	82,7
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	0,7	0,5	2,7	11,9	84,2
2	Perdesaan	6660	0,4	1,4	5,5	15,5	77,3
	INDONESIA	**8981**	**0,5**	**1,2**	**4,7**	**14,5**	**79,1**

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 1,2 persen. Tertinggi di Provinsi Gorontalo (4,1%), diikuti Provinsi Jambi (3,5%) dan Provinsi Kepulauan Riau (3,1%). Terdapat 12 provinsi yang tidak mempunyai 60-79 persen Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010 (0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-

79 persen Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 0,5 persen, sementara di perdesaan 1,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 4,7 persen. Tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (13,8%), diikuti Provinsi Gorontalo (10,8%) dan Provinsi Jawa Timur (9,9%). Terendah di Provinsi Sumatera Utara (0,2%), diikuti Provinsi Sulawesi Utara (0,6%) dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 2,7 persen, sementara di perdesaan 5,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010 adalah 14,5 persen. Tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (39,6%), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (26,2%) dan Provinsi Kalimantan Tengah (23,3%). Terendah di Provinsi Maluku (2,5%), diikuti Provinsi DKI dan Gorontalo (5,4%) dan Provinsi Sumatera Utara (9,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 11,9 persen, sementara di perdesaan 15,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010 adaah 79,1 persen. Tertinggi di Provinsi Maluku (95,7%), diikuti Provinsi DKI (91,1%) dan Provinsi Sumatera Utara (89,9%). Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (50,3%), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (56,9%) dan Provinsi Jambi (67,3%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen Jenis obat PONED yang cukup tersedia selama tahun 2010, di perkotaan 84,2 persen, sementara di perdesaan 77,3 persen.

4.14.5. VAKSIN

Tabel 4.14.5.1 dan Tabel 4.14.5.2, menunjukkan persentase puskesmas menurut ketersediaan vaksin. Ketersediaan vaksin yang dimaksud dalam laporan ini adalah HB Uniject, BCG, DPT/HB, Campak, TT dan Polio. Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin HB Uniject adalah 91,8 persen. Tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (100%), diikuti Provinsi Bali (99,1%), dan Provinsi Sumatera Barat (98,8%). Terendah di Provinsi Papua (48,6%), diikuti Provinsi Papua Barat (55,8%), dan Provinsi Maluku Utara (85,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin HB Uniject, di perkotaan 93 persen, sementara di perdesaan 91,4 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin BCG adalah 94,4 persen. Tertinggi di Provinsi Bali (100%), diikuti Provinsi DI Yogyakarta (99,2%), dan Provinsi Jawa Tengah (98,8%). Terendah di Provinsi Papua (57,8%), diikuti Provinsi Papua Barat (63,5%), dan Provinsi Maluku Utara (87,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin BCG, di perkotaan 97,4 persen, sementara di perdesaan 93,4 persen.

Tabel 4.14.5.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Vaksin, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	HB Uniject		BCG		DPT/HB	
			%Ada	%Tidak Ada	%Ada	%Tidak Ada	%Ada	%Tidak Ada
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	95,2	4,8	96,8	3,2	96,5	3,5
2	Sumatera Utara	506	94,3	5,7	95,5	4,5	95,8	4,2
3	Sumatera Barat	248	98,8	1,2	98,4	1,6	95,2	4,8
4	Riau	195	91,3	8,7	91,8	8,2	90,8	9,2
5	Jambi	171	94,2	5,8	94,7	5,3	94,2	5,8
6	Sumatera Selatan	298	92,3	7,7	91,9	8,1	91,3	8,7
7	Bengkulu	173	85,0	15,0	95,4	4,6	94,2	5,8
8	Lampung	265	95,5	4,5	95,5	4,5	93,6	6,4
9	Bangka Belitung	57	100,0	0,0	98,2	1,8	100,0	0,0
10	Kepulauan Riau	65	90,8	9,2	92,3	7,7	95,4	4,6
11	DKI Jakarta	336	78,9	21,1	97,6	2,4	97,9	2,1
12	Jawa Barat	1031	97,1	2,9	98,4	1,6	98,1	1,9
13	Jawa Tengah	861	98,7	1,3	98,8	1,2	99,5	0,5
14	DI Yogyakarta	121	98,3	1,7	99,2	0,8	100,0	0,0
15	Jawa Timur	949	98,2	1,8	97,9	2,1	98,2	1,8
16	Banten	206	95,6	4,4	95,6	4,4	97,1	2,9
17	Bali	114	99,1	0,9	100,0	0,0	99,1	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	98,0	2,0	98,7	1,3	99,3	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	91,1	8,9	94,7	5,3	92,1	7,9
20	Kalimantan Barat	233	91,0	9,0	97,4	2,6	97,9	2,1
21	Kalimantan Tengah	176	85,8	14,2	94,3	5,7	97,2	2,8
22	Kalimantan Selatan	217	94,9	5,1	95,9	4,1	97,2	2,8
23	Kalimantan Timur	213	92,5	7,5	95,8	4,2	97,2	2,8
24	Sulawesi Utara	167	97,0	3,0	95,8	4,2	98,2	1,8
25	Sulawesi Tengah	163	92,6	7,4	95,1	4,9	96,3	3,7
26	Sulawesi Selatan	406	96,8	3,2	98,5	1,5	98,8	1,2
27	Sulawesi Tenggara	233	81,5	18,5	94,4	5,6	96,6	3,4
28	Gorontalo	74	95,9	4,1	98,6	1,4	98,6	1,4
29	Sulawesi Barat	81	90,1	9,9	95,1	4,9	95,1	4,9
30	Maluku	161	67,7	32,3	65,2	34,8	70,2	29,8
31	Maluku Utara	101	85,1	14,9	87,1	12,9	91,1	8,9
32	Papua Barat	104	55,8	44,2	63,5	36,5	61,5	38,5
33	Papua	294	48,6	51,4	57,8	42,2	56,5	43,5
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	93,0	7,0	97,4	2,6	97,5	2,5
2	Perdesaan	6660	91,4	8,6	93,4	6,6	93,6	6,4
	INDONESIA	**8981**	**91,8**	**8,2**	**94,4**	**5,6**	**94,6**	**5,4**

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin DPT/HB adalah 94,6 persen. Tertinggi di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi DI Yogyakarta (100%), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (99,3%). Terendah di Provinsi Papua (56,5%), diikuti Provinsi Papua Barat (61,5%), dan Provinsi Maluku (70,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin DPT/HB, di perkotaan 97,5 persen, sementara di perdesaan 93,6 persen.

Tabel 4.14.5.2
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Vaksin, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Campak		TT		Polio	
			%Ada	%Tidak Ada	%Ada	%Tidak Ada	%Ada	%Tidak Ada
	Provinsi							
1	DI Aceh	311	97,4	2,6	95,8	4,2	96,5	3,54
2	Sumatera Utara	506	96,8	3,2	94,7	5,3	92,3	7,71
3	Sumatera Barat	248	98,8	1,2	98,0	2,0	96,4	3,63
4	Riau	195	92,8	7,2	91,8	8,2	90,3	9,74
5	Jambi	171	93,6	6,4	93,0	7,0	93,0	7,02
6	Sumatera Selatan	298	93,6	6,4	91,6	8,4	90,9	9,06
7	Bengkulu	173	96,0	4,0	92,5	7,5	93,6	6,36
8	Lampung	265	95,5	4,5	94,7	5,3	87,5	12,45
9	Bangka Belitung	57	100,0	0,0	100,0	0,0	98,2	1,75
10	Kepulauan Riau	65	92,3	7,7	95,4	4,6	92,3	7,69
11	DKI Jakarta	336	98,2	1,8	96,7	3,3	97,9	2,08
12	Jawa Barat	1031	98,4	1,6	98,9	1,1	96,9	3,10
13	Jawa Tengah	861	99,4	0,6	99,2	0,8	98,5	1,51
14	DI Yogyakarta	121	100,0	0,0	99,2	0,8	98,3	1,65
15	Jawa Timur	949	97,4	2,6	98,0	2,0	95,6	4,43
16	Banten	206	95,1	4,9	97,1	2,9	91,7	8,25
17	Bali	114	100,0	0,0	100,0	0,0	97,4	2,63
18	Nusa Tenggara Barat	149	99,3	0,7	99,3	0,7	98,0	2,01
19	Nusa Tenggara Timur	302	96,0	4,0	94,7	5,3	94,4	5,63
20	Kalimantan Barat	233	98,7	1,3	98,7	1,3	97,9	2,15
21	Kalimantan Tengah	176	98,9	1,1	98,9	1,1	83,5	16,48
22	Kalimantan Selatan	217	97,7	2,3	97,7	2,3	97,2	2,76
23	Kalimantan Timur	213	98,1	1,9	96,7	3,3	97,7	2,35
24	Sulawesi Utara	167	97,0	3,0	98,2	1,8	94,0	5,99
25	Sulawesi Tengah	163	96,9	3,1	95,1	4,9	91,4	8,59
26	Sulawesi Selatan	406	98,8	1,2	97,3	2,7	96,3	3,69
27	Sulawesi Tenggara	233	96,6	3,4	97,0	3,0	95,3	4,72
28	Gorontalo	74	100,0	0,0	98,6	1,4	93,2	6,76
29	Sulawesi Barat	81	93,8	6,2	87,7	12,3	92,6	7,41
30	Maluku	161	70,8	29,2	69,6	30,4	68,9	31,06
31	Maluku Utara	101	91,1	8,9	89,1	10,9	88,1	11,88
32	Papua Barat	104	65,4	34,6	61,5	38,5	63,5	36,54
33	Papua	294	59,5	40,5	57,5	42,5	58,2	41,84
	Lokasi							
1	Perkotaan	2321	98,0	2,0	97,1	2,9	96,9	3,10
2	Perdesaan	6660	94,4	5,6	93,8	6,2	91,6	8,41
	INDONESIA	**8981**	**95,3**	**4,7**	**94,6**	**5,4**	**93,0**	**7,04**

.

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin Campak adalah 95,3 persen. Terdapat 4 Provinsi dengan ketersediaan vaksin Campaknya 100 persen. Terendah di Provinsi Papua (59,5%), diikuti Provinsi Papua Barat (65,4%), dan Provinsi Maluku (70,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin Campak, di perkotaan 98 persen, sementara di perdesaan 94,4 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin TT adalah 94,6 persen. Tertinggi di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Bali (100%), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (99,3%). Terendah di Provinsi Papua (57,5%), diikuti Provinsi Papua Barat (61,5%), dan Provinsi Maluku (69,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin TT, di perkotaan 97,1 persen, sementara di perdesaan 93,8 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin Polio adalah 93 persen,. Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah (98,5%), diikuti Provinsi DI Yogyakarta (98,3%), dan Provinsi Bangka Belitung (98,2%). Terendah di Provinsi Papua (58,2%), diikuti Provinsi Papua Barat (63,5%), dan Provinsi Maluku (68,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai vaksin Polio, di perkotaan 96,9%, sementara di perdesaan 91,6%.

4.15. ALAT KESEHATAN LUAR GEDUNG

4.15.1. KIT PELAYANAN PUSKESMAS KELILING (PUSLING)

Pada Rifaskes 2011 jenis alat Kit Puskesmas Keliling yang dikumpulkan berjumlah 102 jenis. Alat disebut Ada apabila saat kunjungan pengumpul data ke Puskesmas alatnya dapat diperlihatkan /ditunjukkan. Dan Alat disebut digunakan bila alat yang ditunjukkan petugas puskesmas diakui masih baik dan digunakan pada pelayanan.

Tabel 4.15.1.1
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Jenis Alat Kit Puskesmas Keliling, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	0,3	3,5	2,6	0,6	92,9
2	Sumatera Utara	506	0	0,4	0,8	1,8	97,0
3	Sumatera Barat	248	0,4	1,6	2,0	7,7	88,3
4	Riau	195	2,6	2,1	1,5	6,7	87,2
5	Jambi	171	1,2	2,9	2,9	2,9	90,1
6	Sumatera Selatan	298	1,0	1,7	3,7	5,0	88,6
7	Bengkulu	173	0	0,6	1,7	8,1	89,6
8	Lampung	265	0	0,8	3,4	5,3	90,6
9	Bangka Belitung	57	0	0	1,8	1,8	96,5
10	Kepulauan Riau	65	0	0	1,5	6,2	92,3
11	DKI Jakarta	336	0,6	0,3	0	1,8	97,3
12	Jawa Barat	1031	0,4	1,0	2,6	6,9	89,1
13	Jawa Tengah	861	0,8	1,0	2,0	7,3	88,9
14	DI Yogyakarta	121	0	0	0,8	5,8	93,4
15	Jawa Timur	949	0,5	0,8	1,3	6,4	90,9
16	Banten	206	0	0,5	1,0	5,8	92,7
17	Bali	114	0	0	0,9	2,6	96,5
18	Nusa Tenggara Barat	149	2,0	2,0	2,7	2,7	90,6
19	Nusa Tenggara Timur	302	0,7	1,3	1,3	2,3	94,4
20	Kalimantan Barat	233	0,4	3,0	1,3	4,3	91,0
21	Kalimantan Tengah	176	2,3	3,4	4,0	7,4	83,0
22	Kalimantan Selatan	217	1,4	2,8	2,3	3,2	90,3
23	Kalimantan Timur	213	1,9	0	2,8	2,8	92,5
24	Sulawesi Utara	167	0,0	0,6	0	1,2	98,2
25	Sulawesi Tengah	163	0,6	1,8	3,1	5,5	89,0
26	Sulawesi Selatan	406	0,2	0,2	1,0	3,9	94,6
27	Sulawesi Tenggara	233	1,3	0,9	2,6	4,7	90,6
28	Gorontalo	74	1,4	2,7	2,7	6,8	86,5
29	Sulawesi Barat	81	0	4,9	3,7	9,9	81,5
30	Maluku	161	0,6	0,6	4,3	2,5	91,9
31	Maluku Utara	101	0	2,0	2,0	4,0	92,1
32	Papua Barat	104	0	1,0	0	11,5	87,5
33	Papua	294	1,7	0,0	4,8	8,8	84,7
	Lokasi						
1	Perkotaan	2321	0,6	0,6	1,4	4,2	93,3
2	Perdesaan	6660	0,7	1,4	2,3	5,5	90,2
	INDONESIA	**8981**	**0,7**	**1,2**	**2,0**	**5,2**	**91,0**

Tabel 4.15.1.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat Kit Peralatan Pusling. Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80% atau lebih jenis alat Kit Peralatan Pusling hanya 0,7%. Tertinggi di Provinsi Riau (2,6%), diikuti Provinsi Kalimantan Tengah (2,3%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2%). Terdapat 12 provinsi yang tidak mempunyai 80% atau lebih jenis alat Kit Peralatan Pusling (0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat Kit Peralatan Pusling, di perkotaan 0,6 persen, sementara di perdesaan 0,7 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling adalah 1,2 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat (4,9 persen), diikuti Aceh (3,5 %) dan Provinsi Kalimantan Tengah (3,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling, di perkotaan 0,6 persen, sementara di perdesaan 1,4 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling adalah 2 persen. Tertinggi di Provinsi Papua (4,8%), diikuti Provinsi Maluku (4,3%) dan Kalimantan Tengah (4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling, di perkotaan 1,4 persen, sementara di perdesaan 2,3 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling adalah 5,2 persen. Tertinggi di Provinsi Papua Barat (11,5%), diikuti Provinsi Sulawesi Barat (9,9%) dan Provinsi Papua (8,8%). Terendah di Provinsi Aceh (0,6%), diikuti Provinsi Sulawesi Utara (1,2%) dan Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Utara dan DKI (1,8%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling, di perkotaan 4,2 persen, sementara di perdesaan 5,5 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen alat Kit Peralatan Pusling adalah 91 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara (98,2%), diikuti Provinsi DKI (97,3%) dan Provinsi Sumatera Utara (97%). Terendah di Provinsi Sulawesi Barat (81,5%), diikuti Provinsi Kalimantan Tengah (83%) dan Provinsi Papua (84,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen alat Kit Peralatan Pusling, di perkotaan 93,3 persen , sementara di perdesaan 90,2 persen.

Tabel 4.15.1.2, menunjukkan persentase Puskesmas menurut kelengkapan jenis alat Kit Peralatan Pusling yang digunakan. Alat disebut digunakan bila alat yang ditunjukkan petugas puskesmas diakui masih baik dan digunakan pada pelayanan.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat Kit Peralatan Pusling yang digunakan hanya 0,5 persen. Tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur (1,9%), diikuti Provinsi Kalimantan Tengah (1,7%) dan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Gorontalo (1,4%). Terdapat 12 provinsi yang tidak mempunyai 80 persen atau lebih alat Kit Peralatan Pusling yang digunakan (0%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat Kit Peralatan Pusling yang digunakan, di perkotaan 0,5 persen, sementara di perdesaan 0,6 persen.

Tabel 4.15.1.2
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Jenis Alat Kit Peralatan Pusling yang digunakan, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	>= 80% lengkap	60-79% lengkap	40-59% lengkap	20-39% lengkap	< 20% lengkap
	Provinsi						
1	DI Aceh	311	0,3	2,6	3,5	0,6	92,9
2	Sumatera Utara	506	0,0	0,2	0,4	1,6	97,8
3	Sumatera Barat	248	0,4	0,8	2,0	7,7	89,1
4	Riau	195	1,0	2,1	2,1	7,2	87,7
5	Jambi	171	1,2	1,8	2,9	2,9	91,2
6	Sumatera Selatan	298	1,0	1,7	3,0	4,4	89,9
7	Bengkulu	173	0	0,6	1,7	8,1	89,6
8	Lampung	265	0	0,4	2,6	4,9	92,1
9	Bangka Belitung	57	0	0	1,8	1,8	96,5
10	Kepulauan Riau	65	0	0	1,5	6,2	92,3
11	DKI Jakarta	336	0,6	0,3	0	1,5	97,6
12	Jawa Barat	1031	0,4	0,9	2,0	6,8	89,9
13	Jawa Tengah	861	0,8	0,9	1,9	6,7	89,7
14	DI Yogyakarta	121	0,0	0	0,8	5,0	94,2
15	Jawa Timur	949	0,4	0,7	1,2	5,3	92,4
16	Banten	206	0	0,5	0,5	5,3	93,7
17	Bali	114	0	0	0,9	2,6	96,5
18	Nusa Tenggara Barat	149	1,3	2,7	2,0	2,7	91,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	0,7	1,0	1,3	2,6	94,4
20	Kalimantan Barat	233	0,4	3,0	0,9	3,4	92,3
21	Kalimantan Tengah	176	1,7	2,8	4,0	7,4	84,1
22	Kalimantan Selatan	217	1,4	2,8	2,3	2,3	91,2
23	Kalimantan Timur	213	1,9	0	2,3	2,3	93,4
24	Sulawesi Utara	167	0	0,6	0	0,6	98,8
25	Sulawesi Tengah	163	0,6	1,2	3,7	4,3	90,2
26	Sulawesi Selatan	406	0,2	0,2	1,0	3,7	94,8
27	Sulawesi Tenggara	233	0,9	0,9	0,9	6,4	91,0
28	Gorontalo	74	1,4	1,4	4,1	6,8	86,5
29	Sulawesi Barat	81	0	2,5	3,7	11,1	82,7
30	Maluku	161	0,6	0,6	3,1	3,7	91,9
31	Maluku Utara	101	0	2,0	2,0	4,0	92,1
32	Papua Barat	104	0	0	1,0	10,6	88,5
33	Papua	294	0,7	0,7	4,1	6,1	88,4
	Lokasi						
1	Perkotaan	2.321	0,5	0,6	1,2	3,7	94,0
2	Perdesaan	6.660	0,6	1,2	2,0	5,2	91,1
	INDONESIA	**8.981**	**0,5**	**1,0**	**1,8**	**4,8**	**91,8**

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling yang digunakan adalah 1 persen. Tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat (3%), diikuti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan (2,8%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling, di perkotaan 0,6 persen, sementara di perdesaan 1,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling adalah 1,8 persen. Tertinggi di Provinsi Papua dan Gorontalo (4,1%), diikuti Provinsi Kalimantan Tengah (4%) dan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah (3,7%. Terendah di Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Utara (0%), serta Provinsi Sumatera Utara (0,4%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling, di perkotaan 1,2 persen, sementara di perdesaan 2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling adalah 4,8 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat (11,1%), diikuti Provinsi Papua Barat (10,6%) dan Provinsi Bengkulu (8,1%). Terendah di Provinsi Sulawesi Utara dan Aceh (0,6%), diikuti Provinsi DKI (1,5%) dan Provinsi Sumatera Utara (1,6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling, di perkotaan 3,7 persen, sementara dan di perdesaan 5,2 persen.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling adalah 91,8 persen. Tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara (98,8%), diikuti Provinsi Sumatera Utara (97,8%) dan Provinsi DKI (97,6%). Terendah di Provinsi Sulawesi Barat (82,7%), diikuti Provinsi Kalimantan Tengah (84,1%) dan Provinsi Gorontalo (86,5%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat Kit Peralatan Pusling, di perkotaan 94 persen, sementara di perdesaan 91,1 persen.

4.15.2. KIT PELAYANAN LUAR GEDUNG LAINNYA

Jenis Kit yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Kit Sanitasi/Kesehatan Lingkungan, Kit Penyuluhan/Promosi Kesehatan (Promkes), Kit Perkesmas, Kit Gizi, Kit Usaha kesehatan Sekolah (UKS) Dan Kit Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS).Kit pelayanan dikatakan ADA apabila pada waktu kunjungan pengumpulan data dapat ditunjukkan Kit tersebut

Tabel 4.15.2.1-2, menunjukkan persentase puskesmas menurut ketersediaan kit. Kit yang terbanyak dipunyai puskesmas adalah Kit Gizi (33,6%), Diikuti Kit UKS (32,2%), Kit Perkesmas (27,4%), Kit Promkes (26,6%), Kit UKGS (25,4%) dan Kit Sanitasi/Kesehatan Lingkungan (23,9%).

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai Kit Sanitasi /Kesehatan Lingkungan hanya 23,9 persen. Tertinggi di Provinsi Gorontalo (37,8%), diikuti Provinsi DI Yogyakarta (41,3%), dan Bangka Belitung (36,8%). Terendah di Provinsi Maluku (3,1%), diikuti Provinsi Papua (7,5%), dan Provinsi Sulawesi Tenggara (8,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai Kit Sanitasi Lingkungan di Perkotaan 30,5 persen, sementara di Perdesaan 21,6 persen

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai Kit Promkes hanya 26,6 persen. Tertinggi di Provinsi Jawa Timur (43,6%), diikuti Provinsi Banten (53,4%), dan Bangka Belitung dan DI Yogyakarta (42,1%). Terendah di Provinsi Sulawesi Utara (5,4%), diikuti Provinsi Papua (7,8%), dan Provinsi Maluku (9,9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase

puskesmas yang mempunyai Kit Promkes di Perkotaan 31,1 persen, sementara di Perdesaan 25,1 persen.

Tabel 4.15.2.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kit Pelayanan Luar Gedung, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Sanitasi Kesling			Penyuluhan Promkes			Perkesmas		
			%Ada	%Tidak Ada	%TAD	%Ada	%Tidak Ada	%TAD	%Ada	%Tidak Ada	%TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	11,3	78,5	10,3	10,0	80,1	10,0	5,5	84,2	10,3
2	Sumatera Utara	506	14,6	81,2	4,2	17,6	78,1	4,3	14,0	81,8	4,2
3	Sumatera Barat	248	29,4	70,2	0,4	29,8	69,4	0,8	37,9	61,3	0,8
4	Riau	195	12,8	76,9	10,3	24,6	64,6	10,8	21,0	68,2	10,8
5	Jambi	171	9,4	87,7	2,9	12,9	84,8	2,3	16,4	81,3	2,3
6	Sumatera Selatan	298	20,8	72,1	7,0	18,1	74,8	7,0	19,1	73,5	7,4
7	Bengkulu	173	17,3	74,6	8,1	13,3	79,2	7,5	15,6	76,9	7,5
8	Lampung	265	9,8	87,2	3,0	14,0	83,0	3,0	22,6	74,3	3,0
9	Bangka Belitung	57	36,8	61,4	1,8	42,1	56,1	1,8	45,6	52,6	1,8
10	Kepulauan Riau	65	21,5	76,9	1,5	30,8	67,7	1,5	24,6	73,8	1,5
11	DKI Jakarta	336	22,0	71,4	6,5	33,6	60,1	6,3	30,4	63,4	6,3
12	Jawa Barat	1031	32,3	65,5	2,2	36,3	61,7	2,0	47,1	50,7	2,1
13	Jawa Tengah	861	36,6	62,7	0,7	39,5	59,8	0,7	37,5	61,7	0,8
14	DI Yogyakarta	121	41,3	57,9	0,8	42,1	57,0	0,8	66,1	33,1	0,8
15	Jawa Timur	949	34,2	61,7	4,0	43,6	52,7	3,7	42,8	53,5	3,7
16	Banten	206	34,5	63,6	1,9	53,4	44,7	1,9	35,4	62,6	1,9
17	Bali	114	31,6	67,5	0,9	20,2	78,9	0,9	37,7	61,4	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	35,6	63,1	1,3	33,6	65,1	1,3	34,2	64,4	1,3
19	Nusa Tenggara Timur	302	20,2	70,9	8,9	14,9	76,2	8,9	14,9	76,2	8,9
20	Kalimantan Barat	233	17,6	81,1	1,3	18,9	79,8	1,3	16,3	82,4	1,3
21	Kalimantan Tengah	176	10,2	83,5	6,3	19,9	73,9	6,3	11,9	81,8	6,3
22	Kalimantan Selatan	217	30,4	68,2	1,4	31,8	66,8	1,4	27,2	71,4	1,4
23	Kalimantan Timur	213	33,8	62,9	3,3	18,8	77,9	3,3	23,9	72,8	3,3
24	Sulawesi Utara	167	10,2	87,4	2,4	5,4	92,2	2,4	6,6	91,0	2,4
25	Sulawesi Tengah	163	16,0	83,4	0,6	12,9	86,5	0,6	20,2	79,1	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	21,9	75,6	2,5	22,7	74,9	2,5	26,8	70,7	2,5
27	Sulawesi Tenggara	233	8,2	82,4	9,4	17,6	73,0	9,4	5,2	85,4	9,4
28	Gorontalo	74	37,8	60,8	1,4	10,8	87,8	1,4	12,2	86,5	1,4
29	Sulawesi Barat	81	19,8	66,7	13,6	13,6	74,1	12,3	12,3	75,3	12,3
30	Maluku	161	3,1	91,3	5,6	9,9	84,5	5,6	8,1	86,3	5,6
31	Maluku Utara	101	15,8	62,4	21,8	19,8	58,4	21,8	8,9	69,3	21,8
32	Papua Barat	104	14,4	83,7	1,9	21,2	76,9	1,9	14,4	83,7	1,9
33	Papua	294	7,5	88,8	3,7	7,8	87,8	4,4	7,1	88,4	4,4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	30,5	64,8	4,7	31,1	64,4	4,5	33,2	62,2	4,6
2	Perdesaan	6660	21,6	74,6	3,8	25,1	71,1	3,8	25,3	70,8	3,8
	INDONESIA	**8981**	**23,9**	**72,1**	**4,1**	**26,6**	**69,3**	**4,0**	**27,4**	**68,6**	**4,0**

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai Kit Perkesmas hanya 27,4 persen. Tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (66,1%), diikuti Provinsi Jawa Barat (47,1%), dan Bangka Belitung (45,6%). Terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara (5,2%), diikuti Provinsi Sulawesi Utara (6,6%), dan Provinsi Papua (7,1%). Bila dilihat dari lokasi, persentase

puskesmas yang mempunyai Kit Perkesmas di Perkotaan 33,2 persen, sementara di Perdesaan 25,3 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai Kit Gizi hanya 33,6 persen. Tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (57%), diikuti Provinsi Bangka Belitung (52,6%), dan Banten (55,8%). Terendah di Provinsi Maluku (8,1%), diikuti Provinsi Papua (8,8%), dan Provinsi Sulawesi Utara (9%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai Kit Gizi di Perkotaan 38,8 persen, sementara di Perdesaan 31,7 persen.

Tabel 4.15.2.2.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kit, Rifaskes 2011

No	Uraian	Jml Pusk	Gizi			UKS			UKGS		
			%Ada	%Tidak Ada	%TAD	%Ada	%Tidak Ada	%TAD	%Ada	%Tidak Ada	%TAD
	Provinsi										
1	DI Aceh	311	16,4	73,3	10,3	43,7	46,6	9,6	20,3	69,8	10,0
2	Sumatera Utara	506	25,3	70,6	4,2	21,7	74,1	4,2	15,4	80,4	4,2
3	Sumatera Barat	248	39,5	59,7	0,8	46,8	52,8	0,4	33,5	65,7	0,8
4	Riau	195	28,7	60,5	10,8	32,3	56,9	10,8	21,5	67,7	10,8
5	Jambi	171	21,6	76,0	2,3	19,3	78,4	2,3	15,8	81,9	2,3
6	Sumatera Selatan	298	29,2	63,4	7,4	25,2	67,4	7,4	18,5	74,2	7,4
7	Bengkulu	173	23,1	69,9	6,9	15,0	77,5	7,5	8,1	83,8	8,1
8	Lampung	265	24,9	72,1	3,0	16,2	80,8	3,0	12,1	84,9	3,0
9	Bangka Belitung	57	52,6	45,6	1,8	47,4	50,9	1,8	40,4	57,9	1,8
10	Kepulauan Riau	65	32,3	66,2	1,5	30,8	67,7	1,5	32,3	66,2	1,5
11	DKI Jakarta	336	29,2	64,3	6,5	36,9	57,4	5,7	34,2	59,8	6,0
12	Jawa Barat	1031	44,9	53,0	2,1	44,1	53,8	2,0	36,0	61,9	2,1
13	Jawa Tengah	861	45,8	53,5	0,7	44,3	55,2	0,6	36,1	63,2	0,7
14	DI Yogyakarta	121	50,4	48,8	0,8	49,6	49,6	0,8	37,2	62,0	0,8
15	Jawa Timur	949	51,1	45,2	3,7	52,9	43,4	3,7	42,0	54,3	3,7
16	Banten	206	55,8	42,2	1,9	62,1	35,9	1,9	49,5	48,5	1,9
17	Bali	114	27,2	71,1	1,8	43,0	56,1	0,9	31,6	67,5	0,9
18	Nusa Tenggara Barat	149	57,0	40,9	2,0	39,6	58,4	2,0	34,9	62,4	2,7
19	Nusa Tenggara Timur	302	26,2	64,9	8,9	22,5	68,5	8,9	23,2	67,9	8,9
20	Kalimantan Barat	233	37,3	61,4	1,3	18,5	80,3	1,3	22,3	76,4	1,3
21	Kalimantan Tengah	176	22,2	71,0	6,8	10,8	83,0	6,3	10,2	83,5	6,3
22	Kalimantan Selatan	217	26,7	71,9	1,4	26,3	72,4	1,4	27,2	71,4	1,4
23	Kalimantan Timur	213	22,5	74,2	3,3	23,5	73,2	3,3	18,3	78,4	3,3
24	Sulawesi Utara	167	9,0	88,6	2,4	8,4	89,2	2,4	6,0	91,6	2,4
25	Sulawesi Tengah	163	20,2	79,1	0,6	20,2	79,1	0,6	9,8	89,6	0,6
26	Sulawesi Selatan	406	37,9	59,6	2,5	24,6	72,9	2,5	20,0	77,6	2,5
27	Sulawesi Tenggara	233	25,3	65,2	9,4	13,7	76,8	9,4	6,4	84,1	9,4
28	Gorontalo	74	10,8	87,8	1,4	14,9	83,8	1,4	10,8	87,8	1,4
29	Sulawesi Barat	81	17,3	70,4	12,3	11,1	76,5	12,3	11,1	76,5	12,3
30	Maluku	161	8,1	86,3	5,6	3,1	91,3	5,6	1,9	92,5	5,6
31	Maluku Utara	101	20,8	57,4	21,8	16,8	61,4	21,8	10,9	67,3	21,8
32	Papua Barat	104	14,4	83,7	1,9	8,7	89,4	1,9	7,7	90,4	1,9
33	Papua	294	8,8	86,7	4,4	7,5	88,1	4,4	4,8	90,8	4,4
	Lokasi										
1	Perkotaan	2321	38,8	56,6	4,6	38,5	57,0	4,5	32,9	62,5	4,6
2	Perdesaan	6660	31,7	64,4	3,9	30,1	66,2	3,8	22,8	73,3	3,8
	INDONESIA	**8981**	**33,6**	**62,4**	**4,1**	**32,2**	**63,8**	**4,0**	**25,4**	**70,5**	**4,0**

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai Kit UKS hanya 32,2 persen. Tertinggi di Provinsi Jawa Timur (52,9%), diikuti Provinsi Banten (62,1%), dan DI Yogyakrta (49,6%). Terendah di Provinsi Papua (7,5%), diikuti Provinsi Maluku (3,1%), dan Provinsi Papua Barat (8,7%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai Kit UKS di Perkotaan 38,5 persen, sementara di Perdesaan 30,1 persen.

Secara nasional, persentase puskesmas yang mempunyai Kit UKGS hanya 25,4 persen. Tertinggi di Provinsi Banten (49,5%), diikuti Provinsi Jawa Timur (42%), dan Bangka Belitung (40,4%). Terendah di Provinsi Maluku (1,9%), diikuti Provinsi Papua (4,8%), dan Provinsi Sulawesi Utara (6%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas yang mempunyai Kit UKGS di Perkotaan 32,9 persen, sementara di Perdesaan 22,8 persen.

KESIMPULAN

Rifaskes Puskesmas 2011 telah menghasilkan gambaran input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang sangat kaya, rinci dan cukup valid untuk membuat gambaran atau potret fasilitas kesehatan di Puskesmas mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun individual Puskesmas.

Pada prinsipnya ditemukan bahwa komponen-komponen input (terutama SDM, sarana dan prasarana) dan proses (terutama kegiatan, pembinaan, supervisi dan monitoring) dari pelayanan kesehatan di Puskesmas masih belum seperti yang diharapkan. Unsur output sulit untuk dinilai karena validitas data output yang umumnya berdasarkan catatan dan laporan Puskesmas banyak yang kurang lengkap baik konsistensi bulan pelaporan maupun isi dari variabel yang dilaporakan.

Pada unsur input upaya kesehatan Puskesmas ditemukan bahwa baik kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta obat dan alat kesehatan yang saat ini ada di Puskesmas masih dibawah standar yang telah ditentukan. Ditemukan juga terjadi kesenjangan *supply* dan *demand* dari unsur input upaya kesehatan Puskesmas. Disamping itu digambarkan pula adanya disparitas unsur input upaya kesehatan Puskesmas antar Regional dan Provinsi, serta dimungkinkan juga antar Kabupaten/Kota maupun individual Puskesmas. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa penyediaan sarana, prasarana, dan SDM yang sesuai dengan ketiga fungsi Puskesmas (pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan pembangunan berwawasan kesehatan) masih belum diperhatikan dengan semestinya.

Dari sudut sarana prasarana, ditemukan bahwa 18,5% bangunan Puskesmas berada dalam kondisi rusak sedang dan berat, sarana air bersih hanya dimiliki oleh 71,7% Puskesmas, SPAL dengan saluran tertutup hanya terdapat pada 44,5% Puskesmas dan 17,7% Puskesmas tidak mempunyai listrik 24 jam.

Sebanyak 4,2% Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter, 39,4% tidak memiliki dokter gigi, 0,3% tidak memiliki perawat, dan 1,2% tidak memiliki tenaga bidan. Seperempat Puskesmas di Indonesia tidak memiliki tenaga gizi, 22,3% tidak memiliki sanitarian, dan 65,6% tidak memiliki tenaga promkes.

Sekitar 11,8% Puskesmas di Indonesia memiliki kelengkapan alkes poliklinik umum kurang dari 20% jumlah standar alkes poliklinik umum (56 alat). Pada poliklinik umum di Puskesmas, 3,7% tidak memiliki stetoskop, 6,3% tidak memiliki tensimeter, 6,1% tidak memiliki timbangan dewasa, dan 6,4% tidak memiliki tempat tidur periksa.

Sebanyak 76,8% Puskesmas PONED memiliki kelengkapan obat PONED kurang dari 20%. Hanya 0,6% Puskesmas PONED yang memiliki kelengkapan obat PONED ≥80% lengkap.

Pada unsur proses upaya kesehatan Puskesmas, terjadi kesenjangan kelengkapan dan kualitas kegiatan, pelaksana program, pembinaan, monitoring dan supervisi program Puskesmas dibanding dengan standar yang sudah ditentukan dan disepakati. Ditemukan juga disparitas proses upaya kesehatan Puskesmas tersebut diatas baik antar Regional maupun

Provinsi, serta dimungkinkan antar Kabupaten/Kota maupun individual Puskesmas. Sebagai contoh, walaupun sebanyak 89,3% Puskesmas telah memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan dan 82,9% telah melaksanakan Lokakarya Mini Bulanan, tetapi hanya 38,5% dari mereka yang melaksanakan Lokakarya Mini Tiga Bulanan.

Upaya Kesehatan Wajib yang sesuai dengan Permenkes No. 128/2004 wajib dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas di Indonesia, ternyata pada kenyataannya hanya dilakukan oleh 93,9% Puskesmas, dimana untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Upaya Kesehatan Wajib tersebut hanya dilakukan oleh kurang dari 60% Puskesmas dikedua Provinsi tersebut.

Secara berurutan, program Upaya Kesehatan Pengembangan yang banyak dilakukan oleh Puskesmas di Indonesia adalah : UKS (91,3%), Usila (84,2%), Kesehatan Gigi dan Mulut (84,0%), Kesehatan Jiwa (61,2%), Perkesmas (61,0%), Kesehatan Haji (54,7%), Kesehatan Mata (51,1%), Batra (41,9%), Kesehatan Kerja (32,5%), dan Kesehatan Olahraga (19,0%).

Dilihat dari input dan proses yang menunjang tiga fungsi Puskesmas, maka input dan proses yang mendukung keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan masih jauh dari harapan. Hanya 49,1% Puskesmas yang memiliki petugas didalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dan 28,3% Puskesmas yang memiliki petugas pembangunan berwawasan kesehatan. Disamping itu pelatihan yang dibutuhkan untuk ke dua fungsi tersebut kepada tenaga pelaksananya kurang sekali dilakukan.

Khusus untuk pencapaian MDG’s, maka input dan proses program wajib kesehatan ibu dan anak, terutama program PONED, masih jauh dibandingkan standar minimal yang harus dipenuhi. Hanya 18,6% Puskesmas di Indonesia yang merupakan Puskesmas PONED, dimana persentase untuk Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih dibawah 10%.

Selain disparitas input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang cukup tajam berdasarkan Regional dan Provinsi, disparitas input dan proses tersebut juga diketemukan berdasarkan geografi dan perdesaan atau perkotaan.

Dalam manajemen pelaksanaan Rifaskes Puskesmas 2011, telah pula dilakukan validasi proses dan substansi Rifaskes Puskesmas 2011 (bersama-sama dengan RSU Pemerintan dan Laboratorium Klinik Mandiri), oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, UNAIR dan UNHAS. Hasil validasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% langkah-langkah proses Rifaskes Puskesmas 2011 dilaksanakan sesuai proposal, pedoman, instrumen Rifaskes Piuskesmas 2011 dan Rifaskes 2011 secara umum. Demikian pula variabel yang dihasilkan oleh Rifaskes 2011, 80% sesuai dengan hasil validasi yang dilakukan oleh ketiga Universitas tersebut diatas.

Walaupun demikian, harus diakui bahwa cukup banyak hambatan yang dihadapi pada manajemen pelaksanaan Rifaskes 2011, terutama masalah standard, manajemen biaya, pengurangan pembiayaan, banyaknya variabel yang dikumpulkan, pelaksanaan kegiatan yang terlambat apabila dibandingkan dengan jadwal yang telah disepakati dan sebagainya.

SARAN-SARAN

1. Perlu dilakukan analisis lanjut terhadap data yang dihasilkan oleh Rifaskes Puskesmas 2011, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Dari hasil Rifaskes Puskesmas 2011, jelas sudah diketahui semua permasalahan dan kekurangan unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas di seluruh Indonesia. Dengan demikian intervensi dan perbaikan pada unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas telah tergambarkan secara jelas dan gamblang tanpa harus membuat intervensi baru.

3. Perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hasil Rifaskes 2011 untuk masukan perencanaan kesehatan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu sebaiknya ada perencanaan yang terpadu didalam penggunaan dana yang sudah tersedia,baik Dana Dekonsentrasi, DAK, DAU, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan BLN.

4. Untuk perencanaan Provinsi perlu memprioritaskan masalah-masalah input dan proses yang ditemukan dari hasil data Rifaskes 2011 sehingga spesifikasi daerah bisa nampak dan efisiensi penggunaan dana bisa terjadi. Prioritas input dan proses ini akan lebih baik lagi apabila dimulai dari tingkat Kabupaten/Kota.

5. Secara horisontal di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, perencanaan program-program Puskesmas tidak mungkin sempurna apabila tidak dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan terintegrasi antar Ditjen, Bidang dan unsur-unsur terkait yang kewenangannya secara berbeda-beda ada pada mereka, namun berhubungan erat sekali dengan program kesehatan prioritas.

6. Secara vertikal perlu kejelasan dan komitmen yang sungguh-sungguh terhadap kewenangan dan fungsi masing-masing level didalam pelaksanaan program-program kesehatan prioritas dengan integritas yang tinggi.

7. Khusus untuk pencapaian MDG's, perlu diprioritaskan, ditekankan, dan diperkuat program PONED di seluruh Indonesia, terutama daerah DTPK.

8. Pemenuhan dan pengembangan input dan proses upaya Puskesmas yang menunjang ke tiga fungsi utama Puskesmas yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan perlu mendapatkan prioritas tinggi.

9. Kesenjangan geografi, perdesaan/perkotaan dari input dan proses upaya kesehatan Puskesmas harus segera dipikirkan pemecahannya dengan meningkatkan integritas dan kejelasan pembagian peran antara Kementerian Kesehatan, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

10. Untuk kepentingan persiapan BPJS, maka sudah jelas bahwa dari hasil Rifaskes Puskesmas 2011, perlu segera memperbaiki atau memenuhi kekurangan unsur input dan proses upaya kesehatan Puskeamas dengan segera pada tahun 2013 seoptimal mungkin. Tanpa hal ini dilaksanakan, maka akan diragukan keberhasilan pelaksanaan BPJS yang akan dimulai pada tahun 2014 mendatang.

11. Menarik pelajaran dari manajemen pelaksanaan Rifaskes 2011, maka diperlukan pedoman standard manajemen dan anggaran pelaksanaan riset-riset nasional di bidang kesehatan.

12. Selain itu, dukungan manajemen, SDM, pelaksanaan dan pembiayaan riset-riset nasional harus menjadi prioritas utama dari Badan Litbangkes. Dengan demikian, ketika terjadi perubahan dan pengurangan anggaran penelitian dan kebutuhan SDM peneliti untuk penelitian kesehatan lainnya, riset=riset nasional tidak akan terpengaruh dan harus tetap mendapatkan pembiayaan dan SDM yang terbaik dari Badan Litbangkes.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengisian Kuesioner Puskesmas Riset Fasilitas Kesehatan, 2011

Badan Penelitian dan Pengembanan Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia (Riskesdas), 2007

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 2010*, 2010

Blum, H.L. *Planning for Health*, 2nd Edition. Human Sciences Press, 1981

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional, 2009

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, 2008

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, 2008

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, 2007

Donabedian, Avedis. *Explorations in Quality Assessment and Monitoring. Vol I. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment, 1980; Vol.II. The Criteria and Standards of Quality. 1982; Vol. III The Methods and Findings of Quality Assessment and Monitoring: An Illustrated Analysis. Ann Arbor: Health Administration Press, 1985.*

Jakab, M., Preker, A., Harding, A. and Hawkins, L. *The Introduction of Market Forces in The Public Hospital Sector*. From New Public Sector Management to Organizational Reform. Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper, the World Bank, 2002

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/160/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-1014, 2010

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, 2010

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, 2010

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2007

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, 2010

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009

LAMPIRAN

SUSUNAN TIM
RIFASKES 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 4261088 Faksimile: (021) 4243933
E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id, *Website:* http://www.litbang.depkes.go.id

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan
Nomor : HK.03.05/2/6865/2011
Tanggal : 23 Agustus 2011

SUSUNAN TIM TEKNIS DAN TIM MANAJEMEN
RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2011

1. TIM TEKNIS

Ketua	:	dr. Agus Suwandono, MPH, Dr. PH
Sekretaris	:	dr. Faizati Karim, MPH

A. Bidang Rumah Sakit

Koordinator	:	Dra. Anny Victor Purba, Apt. M.Sc, Ph.D
Wakil Koordinator	:	dr. Lusianawaty Tana, M.S., Sp.OK
Anggota	:	1. DR. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
		2. dr. Diding Sawaludin, M.Kes, Sp.KJ
		3. dr. Sri Idaiani, Sp.KJ
		4. dr. Lutfah Rif'ati, Sp.M
		5. dr. Bona Simanungkalit, DHSM
		6. drg. Yuyus Rusiawati S., MM
		7. Djazuly Chalidyanto, SKM, MARS
		8. Dr. drg. Indirawati T.N., Sp.Perio
		9. Dr. drg. Farida Soetiarto, M.S.
		10. Asep Hermawan, S.Kep, Ners.
		11. Dra. Selma A. Selta Siahaan, MHA
		12. dr. Wahyu Dwi Astuti, Sp.PK, M.Kes
		13. Dr.Dwi Susilowati, Sp.GK
		14. dr. Siti Nur Hasanah

B. Bidang Puskesmas

Koordinator	:	DR. Drs. Nana Mulyana, M.Kes
Wakil Koordinator	:	Heny Lestari, SKM, MKM

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 4261088 Faksimile: (021) 4243933
E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id, *Website:* http://www.litbang.depkes.go.id

Anggota	:	1. dr. Yuana Wiryawan, M.Kes
		2. dr. Yuslely Usman, M.Kes
		3. Ning Sulistyowati, SKM, M.Kes
		4. Dra. R.R. Rachmalina S.,M.Sc., PH
		5. Noor Eddy Sukotjo, M.Sc.,PH
		6. drh. Raflizar
		7. Dra. Rini Sasanti, Apt., M.Kes
		8. Maria Holly Herawati, SKM, MKM
		9. drg. Masagus Zainuri, M.Biomed
		10. Bryan Mario Isakh, SKM

C. Bidang Laboratorium

Koordinator	:	DR. Dra. Vivi Lisdawati, Apt., MS
Wakil Koordinator	:	dr. Frans X. Suharyanto, MS
Anggota	:	1. Dra. Pretty Multihartina, Ph.D
		2. Dra. Siti Isfandari, MA
		3. Sri Sugihati Slamet, SIP
		4. dr. Suhardi, MPH
		5. Kambang Sariadji, S.Si

D. Bidang Manajemen Data

Koordinator	:	Miko Hananto, SKM, M.Kes
Wakil Koordinator		Anna Maria Sirait, SKM, M.Kes
Anggota	:	1. Sumardiyanto, SE
		2. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes
		3. Rosita, SKM
		4. Doni Lasut, S.Si
		5. Dra. Woro Riyadina, M.Kes
		6. Sri Muljati, SKM, M.Kes
		7. Sugianto, S.Kom
		8. Ida Mufida, S.Si
		9. Sudiarso
		10. Rianto Purnama, S.Kom
		11. Edy Purwanto, ST, MKM
		12. Sudikno, SKM, MKM
		13. Agus Triwinarto, SKM, M.Kes

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 4261088 Faksimile: (021) 4243933
E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id, *Website:* http://www.litbang.depkes.go.id

14. drg. Tince Arniati Jovina
15 Andre Yunianto, S.Si
16. Narendro Arifia, S.Kom
17. Setyo Utomo Nugroho, S.Ant
18. Donny K. Mulyantoro, SKM, M.Kes
19. Happy Chandraleka, ST

E. Bidang Analisa Data

Koordinator : dr. Muhammad Karyana, M.Kes
Wakil Koordinator Atmarita, MPH,Dr.PH
Anggota :
1. Dr. Ekowati Rahajeng, SKM,M.Kes
2. Noviati Fuada, SP
3. Dr. Djoko Kartono, M.Sc
4. Ir. Basuki Budiman, M.Sc.PH
5. Dr. Fitrah Ernawati, M.Sc.
6. Nunik Kusumawardhani, SKM, M.Sc PH, Ph.D

2. TIM MANAJEMEN

Ketua : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
Sekretaris drg. Maya Laksmini

A. Bagian Keuangan

Koordinator : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
Wakil Koordinator : Elvira Eka Putri, SKM, M.Kes
Sekretaris : Subini
Anggota :
1. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
2. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
3. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
4. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Marullah
6. Bayu Ari Bowo, SE
7. Achmad Supi, SAP
8. Tulus Suroso

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 4261088 Faksimile: (021) 4243933
E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id, *Website:* http://www.litbang.depkes.go.id

9. Subagiyo
10. Kabul Purnomo
11. Sutarso
12. Eldo Andi Putra, Amd
13. Meli Damayanti, Amd. KL
14. Anis Anbarwati Eka Putri

B. Bagian Administrasi dan Kesekertariatan

Koordinator : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
Wakil Koordinator : R. Herry Bagdja, SH, M.Si
Sekretaris : Sri Rahayu, S.Sos
Anggota :

1. Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, M.E
2. dr. Nurbaiti, MKM
3. Ika Dharmayanti, SKM, M.Env
4. Mieska Despitasari, S.Si
5. Eva Laelasari, S.Si
6. Nisa Fitriyani, AMG
7. Sri Mulyani, Amd.TEM
8. Riski Kurniawan, SH
9. Gisty Restu, SH
10. Mujiati, SKM, M.Kes
11. Ahmad Reza Gumilar, Amd.
12. Muhammad Kamil, S.S

C. Bagian Perencanaan dan Logistik

Koordinator : R. Bimo Satrio Rahardjo, SH, M.Kes, MH
Wakil Koordinator : Bambang P. Cadrana, SKM, MKM
Sekretaris : Ida Ayu Made Rai Astuti
Anggota :

1. Isminah, SKM
2. Sugeng Basoeki, SKM
3. Yayan Herdiansyah, Amd
4. Agus Sawaludin Angkat, SE
5. Wisa Erlangga, S.AP
6. Ciptadi

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 4261088 Faksimile: (021) 4243933
E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id, *Website:* http://www.litbang.depkes.go.id

7. Yayan Sutaryana
8. Sarijo
9. Supriyono

D. Bagian Dokumentasi

Koordinator	:	Endang Sri Widyaningsih, SKM, M.Kes
Wakil Koordinator	:	Lenny Wulandari, SKM
Sekretaris	:	Bambang Widodo
Anggota	:	1. Dra. Siwi Wresniati, M.Si
		2. Indra Kurniawan, S.Kom, MKM
		3. Fachrudin Ali Ahmad, S.Sos
		4. Wiji Lestari, SKM
		5. Djunaedi, Amd
		6. Asrina Novianti, S.I.Kom

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN,

Dr. dr. TRIHONO, M.Sc.

LAMPIRAN

SUSUNAN TIM
RIFASKES 2012

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 4261088 Faksimile: (021) 4243933
E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id, *Website:* http://www.litbang.depkes.go.id

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Nomor : HK.03.05/4/1693/2012
Tanggal : 1 Maret 2012

SUSUNAN TIM TEKNIS DAN TIM MANAJEMEN
RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2011

PENANGGUNG JAWAB : Dr. dr. Trihono, MSc

PELAKSANA KEGIATAN

Ketua : Dede Anwar Musadad, SKM, MKes
Wakil : Ria Soekarno, SKM, MCN
Sekretaris : DR. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes

I. TIM TEKNIS

Koordinator : dr. Agus Suwandono, MPH, Dr.PH
Wakil : dr. Faizati Karim, MPH

A. Bidang Rumah Sakit

1. Prof. dr. Purnawan Djunadi, MPH, Ph.D
2. Prof. dr. Amal C. Sjaaf, SKM, DR.PH
3. Prof. dr. Wiku Adisasmito, MSc, Phd
4. Dra. Anny Victor Purba, Apt. M.Sc, Ph.D
5. Dr. Lusianawaty Tana, M.S., Sp.OK
6. Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
7. dr. Lutfah Rif'ati, Sp.M
8. dr. Siti Nur Hasanah
9. Asep Hermawan, S.Kep, Ners
10. dr. Sri Mardikani Nugraha

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 4261088 Faksimile: (021) 4243933
E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id, *Website:* http://www.litbang.depkes.go.id

B. Bidang Puskesmas

1. dr. Sandi Iljanto, MPH
2. dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc
3. DR. Drs. Nana Mulyana, M.Kes
4. Heny Lestari, SKM, MKM
5. dr. Yuana Wiryawan, M.Kes
6. dr. Yuslely Usman, M.Kes
7. drg. Masagus Zainuri, M.Biomed
8. Bryan Mario Isakh, SKM
9. Andy Leni Susyanti, SSi, Apt, MKM
10. Sugiharti, SKM, MKM

C. Bidang Laboratorium

1. DR. Dra. Vivi Lisdawati, Apt., MS
2. Dra. Siti Isfandari, MA
3. dr. Suhardi, MPH
4. dr. Abas Suherli, Sp.PK
5. Sri Sugihati Slamet, SIP
6. dr. Rini Rohaeni
7. dr. Armedy Ronny Hasugian, M.Biomed

D. Bidang Instalasi Farmasi Kabupaten

1. Suparmi, SKM, MKM
2. Dra. Rini Sasanti, Apt, M.Kes

E. Bidang Analisa Data

1. Dr. Iwan Ariawan, MSPH
2. Ir. Aryago Mulya, M.Si
3. dr. Muhammad Karyana, M.Kes
4. Atmarita, MPH, Dr.PH
5. Miko Hananto, SKM, M.Kes
6. Ir. Basuki Budiman, M.Sc.PH

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 4261088 Faksimile: (021) 4243933
E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id, *Website:* http://www.litbang.depkes.go.id

7. Agus Triwinarto, SKM, M.Kes
8. Narendro Arifia, S.Kom
9. Sri Muljati, SKM, M.Kes
10. Dr. Abas Basuni Jahari, M.Sc
11. Sandjaja, Dr.PH

F. TIM MANAJEMEN

1. Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
2. Ika Dharmayanti, SKM, M.Env
3. Mieska Despitasari, S.Si
4. Mujiati, SKM, M.Kes
5. Muhammad Kamil, S.S

KEPALA,

TRIHONO

LAMPIRAN

KUESIONER PUSKESMAS

RIFASKES 2011

Daftar Ralat Kuesioner Rifaskes Puskesmas

No	Blok, Bagian/No Pertanyaan, Halaman	Sebelumnya tertulis	Diganti menjadi
1	Blok VIII, No.19, Halaman 48	19.a. Kegiatan (tahun 2011) 19.b.1). Jumlah petugas tahun 2011 19.c.2). Pencatatan tahun 2011	19.a. Kegiatan (tahun 2010) 19.b.1). Jumlah petugas tahun 2010 19.c.2). Pencatatan tahun 2010
2	Blok VIII, No. 20, Halaman 49	20.a. Pelayanan 1) Kolesterol 2) Feses 3) Darah Malaria	20.a. Pelayanan 4) Kolesterol 5) Feses 6) Darah Malaria
3	Blok XIV, No.7, Halaman 63	2. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak
4	Blok XIV, No.7, Halaman 64	3. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak

Daftar Ralat Pedoman Pengisian Kuesioner Rifaskes Puskesmas

No	Blok, Bagian/No Pertanyaan, Halaman	Sebelumnya tertulis	Digantti menjadi atau Ditambahkan kalimat sebagai berikut :
1.	Blok III, No. 8, Halaman 11	-	Pada rincian no. 8, tambahkan kalimat sebagai berikut : Catatan untuk Pengisian Rincian No.8 : 1. Daftar sampel adalah daftar Puskesmas yang berasal dari Kemenkes (sebelum Rakornis Propinsi) 2. Data tambahan Puskesmas pada saat Rakornis disebut sebagai kelompok yang tidak ada di daftar sampel 3. Jika Puskesmas ada di daftar sampel Kemenkes dan tidak bisa dikunjungi karena lokasi geografis sulit, rusak (akibat gempa, kebakaran,dsb), maka diberikan kode “3” 4. Jika Puskesmas tidak ada di daftar sampel Kemenkes dan pada saat wawancara sudah tidak beroperasi atau lokasi geografis sulit atau rusak (akibat gempa, kebakaran, dsb), maka diberikan kode “6”.
2	Blok IV, Bagian A, Halaman 13	-	Tambahkan catatan sebagai berikut : Bila ada pegawai Puskesmas yang berpendidikan SMU pada saat pertama kali masuk Puskesmas, kemudian melanjutkan pendidikan kesehatan, maka masukkan pendidikan kesehatan tersebut sebagai pendidikan dasarnya. Jika pegawai tersebut tidak melanjutkan lagi pendidikannya, maka pendidikan dasar kesehatan sama dengan pendidikan akhirnya, namun apabila pegawai tersebut melanjutkan kembali pendidikannya, pendidikan lanjutan yang kedua tersebut dimasukkan sebagai pendidikan akhir. SMU tidak dimasukkan sebagai pendidikan dasar kesehatan.
3	Blok V, Bagian A, Halaman 28	-	Tambahkan catatan sebagai berikut : Jika fasilitas fisik bangunan Puskesmas pinjam / sewa / kontrak, berikan catatan/keterangan di lembar catatan kuesioner halaman 94.

No	Blok, Bagian/No Pertanyaan, Halaman	Sebelumnya tertulis	Ditambahkan kalimat sebagai berikut :
4	Blok VIII, Petunjuk Pengisian Kuesioner Blok VIII, No.3, Halaman 53	3. Data Output diambil dari LB bila yang ditanyakan berupa uraian yang ada di LB, jika tidak ada , maka datanya dicari pada Laporan Program atau Buku Register.	Tambahkan catatan sebagai berikut : 3. Data Output diambil dari LB bila yang ditanyakan berupa uraian yang ada di LB, jika tidak ada , maka datanya dicari pada Laporan Program atau Buku Register. Jika output laporan (LB/register/catatan) berupa data kumulatif, maka ambil data bulan terakhir. Jika output laporan (LB/register/catatan) bukan berupa data kumulatif, maka enumerator diharuskan menghitung data tersebut selama banyaknya jumlah bulan laporan.
5.	Blok XV dan XVI	-	Satuan dari alat kesehatan adalah “Buah”

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
RISET FASILITAS KESEHATAN 2011
PUSKESMAS

RAHASIA

RIFASKES-11.PKM

I. PENGENALAN TEMPAT			
1	Provinsi		☐☐
2	Kabupaten/Kota		☐☐
3	Kecamatan		☐☐☐
4	Alamat Puskesmas	a. Jalan ..... b. Desa/ Kelurahan..... c. Kode Desa/ Kelurahan:	☐☐☐
5	Lokasi Puskesmas	1. Perkotaan 2. Perdesaan	☐
6	Nomor Urut Puskesmas		☐☐☐
7	Nama dan ID Puskesmas	.....	P☐☐-☐☐-☐☐☐-☐☐☐
8	a. Nomor telepon		☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐
	b. HP		☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
	c. Nomor Fax		☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐
	d. Alamat email dan website	.....	
	e. Koordinat lokasi		☐☐°☐☐'☐☐,☐"LU ☐☐°☐☐'☐☐,☐"LS ☐☐☐°☐☐'☐☐,☐"BT

II. KETERANGAN PENGUMPUL DATA					
1.	Nama Enumerator	.....	5	Nama Ketua Tim Enumerator	.....
2.	Tgl. Pengumpulan data: (tgl-bln-thn)	☐☐-☐☐-☐☐☐☐	6	Tgl. Pengecekan: (tgl-bln-thn)	☐☐-☐☐-☐☐☐☐
3.	No. HP	.....	7	No. HP	.....
4.	Tanda tangan	.....	8	Tanda tangan	.....

III. KARAKTERISTIK PUSKESMAS				
1	Topografi Wilayah			
	a. Keterpencilan	1. Sangat Terpencil 2. Terpencil 3. Biasa		☐
	b. Kepulauan	1. Ya 2. Tidak		☐
	c. Perbatasan	1. Ya 2. Tidak		☐
2	Letak/posisi Puskesmas	1. Di sekitar permukiman penduduk 2. Jauh dari permukiman penduduk 3. Di luar wilayah kerja		☐
3	Luas Wilayah			☐☐☐.☐☐☐ km²
4	Bulan dan tahun Puskesmas berfungsi			☐☐-☐☐☐☐
5	Apakah Puskesmas masih berfungsi sebagai Puskesmas 1. Ya → 7 2. Tidak → 6			☐
6	Bulan dan Tahun Puskesmas berubah status Puskesmas			☐☐-☐☐☐☐
7	Jenis puskesmas	1. Puskesmas perawatan 2. Puskesmas non perawatan		☐
8	Status Puskesmas dalam daftar Sampel: 1. Ada di Daftar sampel, Dikunjungi → 9 2. Tidak ada di daftar sampel tetapi merupakan Puskesmas yang sudah beroperasi sebelum Februari 2010 → 9 3. Ada di daftar sampel, tidak dikunjungi → Selesai 4. Ada di daftar sampel tetapi Puskesmas sudah berganti fungsi menjadi Rumah Sakit → Selesai 5. Ada di daftar sampel tetapi Puskesmas mulai beroperasi setelah Januari 2010 → Selesai 6. Tidak ada di daftar sampel tetapi Puskesmas mulai beroperasi setelah Januari 2010 → Selesai			☐
9	Fasilitas pelayanan lain di puskesmas			
	a. Sentinel	1. Ya 2. Tidak →b		☐
	Jika Ya, jenis sentinel			
	1. STP (Surveilans Terpadu Penyakit)	1. Ya 2. Tidak		☐
	2. ILI (*Influenza Like Illness*)	1. Ya 2. Tidak		☐
	3. ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)	1. Ya 2. Tidak		☐
	b. PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar)	1. Ya 2. Tidak		☐
	c. Rujukan Mikroskopis Tuberculosis	1. Ya 2. Tidak		☐
	d. PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)	1. Ya 2. Tidak		☐
	e. VCT (*Voluntary Counselling and Testing*)	1. Ya 2. Tidak		☐
	f. KTA (Kekerasan Terhadap Anak)	1. Ya 2. Tidak		☐
	g. Lainnya ……	1. Ya 2. Tidak		☐
10	Wilayah Kerja Puskesmas			
	a. Jumlah kelurahan di wilayah kerja puskesmas			☐☐
	b. Jumlah RW			☐☐☐
	c. Jumlah desa di wilayah kerja puskesmas			☐☐
	d. Kriteria Desa	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Jumlah	

		(1)	(2)
	1) Desa Kriteria Biasa	☐	☐☐
	2) Desa KriteriaTerpencil	☐	☐☐
	3) Desa Kriteria Sangat Terpencil	☐	☐☐
	e. Unit terkecil wilayah binaan	1. Desa/Kelurahan 2. RW	☐
11	Jumlah Puskesmas Jejaring di wilayah kerja		☐☐
12	Jumlah Puskesmas Pembantu di wilayah kerja		☐☐
13	Jumlah Rumah Dinas yang dimiliki puskesmas		☐☐
14	Jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas		☐☐☐☐☐☐
15	Jumlah KK (Kepala Keluarga)		☐☐☐☐☐
16	Jumlah keluarga miskin		☐☐☐☐☐

IV. SUMBER DAYA MANUSIA

A. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Status Kepegawaian (termasuk tenaga Puskesmas Pembantu dan Bidan di desa)

1	Tenaga Medis		
A	Dokter	1. Ada 2. Tidak ada → 1.b	☐

Jumlah	Pendidikan Terakhir					Status Ketenagaan				
	FK	Dr. Spesialis	S2 Kes	S2 Non Kes	S3	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

B	Dokter Gigi	1. Ada 2. Tidak ada → 2.a	☐

Jumlah	Pendidikan Terakhir					Status Ketenagaan				
	FKG	Drg. Spesialis	S2 Kes	S2 Non Kes	S3	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

2	Tenaga Keperawatan		
A	Perawat	1. Ada 2. Tidak ada → 2.b	☐

Jumlah	Pendidikan Dasar Kesehatan			Pendidikan Terakhir								Status Ketenagaan				
	SPR/SPK	Akper	SKP	SPR/SPK	Akper	Akbid	SKP	S1 Kes lain	S1 Non Kes	S2 Kes	S2 Non Kes	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

B	Bidan	1. Ada 2. Tidak ada → 2c	☐

Jumlah	Pendidikan Dasar Kesehatan				Pendidikan Terakhir							Status Ketenagaan				
	SPR/SPK	D1 Keb	Akbid	D-IV Bidan	D1 Keb	Akbid	D-IV Bidan	S1 Kes lain	S1 Non Kes	S2 Kes	S2 Non Kes	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

C	Perawat Gigi	1. Ada 2. Tidak ada → 3	☐

Jumlah	Pendidikan Dasar Kesehatan		Pendidikan Terakhir								Status Ketenagaan				
	SPRG	AKG	SPRG	AKG	Akper	D-IV Kes.gigi	S1 Kes Lain	S1 Non Kes	S2 Kes	S2 Non Kes	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

3	Tenaga Kefarmasian		
A	Apoteker	1. Ada 2. Tidak ada → 3b	☐

Jumlah	Pendidikan Terakhir			Status Ketenagaan				
	Fakultas Farmasi	S2 Kesehatan	S2 Non Kesehatan	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

B	Tenaga Teknis Kefarmasian	1. Ada 2. Tidak ada → 4	☐

Jumlah	Pendidikan Dasar Kesehatan			Pendidikan Terakhir						Status Ketenagaan				
	SAA/ SMF	D3 Farmasi	S1 Farmasi	SAA/ SMF	D3 Farmasi	Fak. Farmasi	S1 Kesehatan	S1 Non Kesehatan	S2	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

4	Tenaga Gizi	1. Ada 2. Tidak ada → 5	☐

Jumlah	Pendidikan Dasar Kesehatan			Pendidikan Terakhir						Status Ketenagaan				
	SPAG	Akademi Gizi	D-IV Gizi/ S1 Gizi	SPAG	Akademi Gizi	DIV/ S1 Gizi	S1 Kes Lain	S1 Non Kes	S2	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

5	Sanitarian	1. Ada 2. Tidak ada → 6	☐

Jumlah	Pendidikan Dasar Kesehatan			Pendidikan Terakhir						Status Ketenagaan				
	SPPH	AKL	S1 Kes	SPPH	AKL	S1 Kes	S1 Non Kes	S2 Kes	S2 Non Kes	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

6	Tenaga Penyuluh Kesehatan/ Promkes	1. Ada 2. Tidak ada → 7	☐

Jumlah	Pendidikan Dasar Kesehatan			Pendidikan Terakhir					Status Ketenagaan				
	D3 Promkes	D3 Kes Lain	S1 Kes	D3 Promkes	D3 Kes Lain	S1 Kes	S1 Non Kes	S2 Kes	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

7	Tenaga Rekam Medis	1. Ada 2. Tidak ada → 8	☐

Jumlah	Pendidikan Dasar Kesehatan			Pendidikan Terakhir					Status Ketenagaan				
	D3 Rek Med	D3 Kes Lain	S1 Kes	D3 Rek Med	D3 Kes Lain	S1 Kes	S1 Non Kes	S2 Kes	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

8	Analis Kesehatan	1. Ada 2. Tidak ada → 9	☐

Jumlah	Pendidikan Dasar Kesehatan				Pendidikan Terakhir						Status Ketenagaan				
	SMAK	D3 Analis	D3 Kes Lain	S1 Kes	SMAK	D3 Analis	D3 Kes Lain	S1 Kes	S1 Non Kes	S2 Kes	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

9	Tenaga Kesehatan Lain	1. Ada 2. Tidak ada → 10	☐

Jumlah	Pendidikan Dasar Kesehatan		Pendidikan Terakhir				Status Ketenagaan				
	D3	S1	D3	S1 Kes	S1 Non Kes	S2 Kes	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

10	Tenaga Non Kesehatan		
	Tenaga Administrasi dan Pekarya	1. Ada 2. Tidak ada → 11	☐

Jumlah	Pendidikan Dasar				Pendidikan Terakhir						Status Ketenagaan				
	SMP	SMA	D3	S1	SMP	SMA	D3	S1 Kes	S1 Non Kes	S2 Kes	PNS/ CPNS	PTT	Penugasan Khusus	Honorer	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

11	Jumlah Seluruh Pegawai Puskesmas	☐☐☐

B. Penempatan/Rotasi			
1	a. Apakah ada tenaga Puskesmas yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan pendidikannya (tahun 2010) ?	1.Ya 2.Tidak → 2.a	☐
	b. Jumlah petugas	..... orang	☐☐
2	a. Apakah ada tenaga puskesmas yang telah dilatih tahun 2010 pindah ke tempat kerja lain?	1.Ya 2.Tidak → 3	☐
	b. Jumlah petugas	..... orang	☐☐
3	Apakah pada kurun waktu tiga tahun terakhir pernah terjadi pergantian kepala puskesmas sebelum bekerja satu tahun ?	1.Ya 2.Tidak	☐

C. Tunjangan/ Insentif Daerah			
1.	Apakah terdapat tunjangan/insentif daerah?	1. Ya 2. Tidak → V	☐
2.	Bila Ya (Ada), Apakah tunjangan berdasarkan:		
	a. Berdasarkan jenis profesi	1. Ya 2. Tidak	☐
	b. Berdasarkan golongan	1. Ya 2. Tidak	☐
	c. Berdasarkan jabatan	1. Ya 2. Tidak	☐
3.	Besar tunjangan tahun 2010 (dalam rupiah)	a. Terendah :	☐☐.☐☐☐.☐☐☐
		b. Tertinggi :	☐☐.☐☐☐.☐☐☐

V. FASILITAS FISIK (WAWANCARA DAN OBSERVASI)

A. Luas Tanah dan Bangunan

1	Luas tanah .....m^2	☐☐☐☐☐	2. Luas bangunan..... m^2	☐☐☐☐

B. Bangunan

1	Jumlah bangunan	☐

	Karakteristik bangunan:	Bangunan					
		Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6
2	a. Fungsi bangunan 1. Non perawatan 3.Gabungan perawatan dan non perawatan 2.Perawatan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	b. Jenis bangunan : 1. Permanen 2. Semi permanen 3. Tidak permanen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	c. Jumlah lantai bangunan : 1.Satu lantai 2. Dua lantai 3. Tiga lantai 4. Lebih dari 3 lantai	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	d. Kondisi bangunan : 1. Baik 2. Rusak ringan 3. Rusak sedang 4. Rusak berat	☐	☐	☐	☐	☐	☐

C. Ruangan (tidak termasuk Ruang Perawatan)

	1. Jumlah ruangan pelayanan :	☐☐

	2. Jenis Ruangan	Tersedia : 1.Ya 2.Tidak Jika jawaban "2" → baris berikutnya	Berfungsi: 1.Ya 2.Tidak	Ventilasi: 1. Ada, cukup 2. Ada, tidak cukup 3. Tidak ada	Tempat Cuci Tangan: 1. Ada, dengan sabun 2. Ada, tanpa sabun 3. Tidak ada	Kebersihan: 1. Bersih 2. Tidak bersih
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. Poliklinik umum	☐	☐	☐	☐	☐
	b. Poliklinik gigi	☐	☐	☐	☐	☐

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. Poliklinik KIA	☐	☐	☐	☐	☐
	d. Poliklinik KB	☐	☐	☐	☐	☐
	e. Imunisasi/Vaksinasi	☐	☐	☐	☐	☐
	f. Pelayanan farmasi/apotik	☐	☐	☐	☐	☐
	g. Laboratorium	☐	☐	☐	☐	☐
	h. Tindakan/ emergency/ gawat darurat	☐	☐	☐	☐	☐
	i. Ruang MTBS	☐	☐	☐	☐	☐
	j. Pertolongan persalinan	☐	☐	☐	☐	☐
	k. Pasca persalinan	☐	☐	☐	☐	☐
	l. Ruang menyusui	☐	☐	☐	☐	☐
	m. Klinik TB Paru	☐	☐	☐	☐	☐
	n. Ruang Konseling (gabungan program)	☐	☐	☐	☐	☐
	o. Klinik konsultasi gizi	☐	☐	☐	☐	☐
	p. Klinik konsultasi kesling	☐	☐	☐	☐	☐
	q. Klinik konsultasi keperawatan	☐	☐	☐	☐	☐
	r. Konseling lansia	☐	☐	☐	☐	☐
	s. Lainnya, sebutkan……	☐	☐	☐	☐	☐

	3. Ruangan Non Pelayanan			
	a. Ruang Rapat	1.Ada	2.Tidak ada	☐
	b. Ruang Tunggu	1.Ada	2.Tidak ada → c	☐
	1) Tersedia tempat duduk	1. Ada, Cukup	2. Ada, Tidak cukup	☐
	2) Tersedia papan informasi di ruang tunggu	1. Ada	2.Tidak ada	☐
	3) Tersedia ventilasi di ruang tunggu	1.Ada, cukup 3. Tidak ada	2.Ada, tidak cukup	☐
	4) Kebersihan ruang tunggu	1.Bersih	2.Tidak bersih	☐
	5) Tersedia bahan informasi di ruang tunggu	1.Ada	2.Tidak ada	☐
	6) Tersedia televisi di ruang tunggu	1.Ada	2.Tidak ada	☐
	7) Tersedia pengeras suara di ruang tunggu	1.Ada	2.Tidak ada	☐
	c. Gudang Obat (Penyimpanan obat/alkes)	1.Ada	2.Tidak ada → d	☐
	1) Ventilasi/sirkulasi udara	1.Ada	2.Tidak ada	☐
	2) Pencahayaan	1.Ada	2.Tidak ada	☐
	3) Tersedia rak/lemari obat	1.Ada, cukup 3. Tidak Ada	2.Ada, tidak cukup	☐
	4) Tersedia rak/lemari alkes	1.Ada, cukup 3. Tidak Ada	2.Ada, tidak cukup	☐
	5) Tersedia rak/lemari khusus narkotika dan psikotropika	1.Ada, dengan kunci dobel 2.Ada, tidak dengan kunci dobel 3. Tidak ada		☐

	6) Ada catatan obat rusak/ expired date	1. Ada 2.Tidak ada	☐
	7) Catatan keluar masuk obat tahun 2010	1.Ada, tercatat 2.Ada, tidak tercatat 3. Tidak ada	☐
	8) Cara penyimpanan obat menggunakan system FIFO (*First In First Out*)/ FEFO (*First Expire date First Out*)	1. Ada 2.Tidak ada	☐
	d. Jenis loket pendaftaran :		
	1) Askes / Gakin / Jamkesmas	1.Ada 2.Tidak ada	☐
	2) Lansia/ Penyandang Cacat	1.Ada 2.Tidak ada	☐
	3) Umum	1.Ada 2.Tidak ada	☐
	e. Loket pendaftaran	1.Digabung 2. Dipisah	☐
	f. Toilet		
	1) Ketersediaan toilet	1. Ada 2. Tidak ada → D.1	☐
	2) Kebersihan toilet	1.Bersih 2.Tidak bersih	☐
	3) Tersedia air di toilet	1. Ada 2.Tidak ada	☐

D. Air Bersih

1	Sumber air utama yang digunakan:	1. PAM 4. Mata air 2. Sumur bor 5. Penampungan Air Hujan (PAH) 3. Sumur gali 6. Lainnya	☐
2	Ketersediaan air sepanjang tahun	1.Ya 2.Tidak	☐
3	Kualitas air	1. Baik 2.Kurang baik	☐

E. Pembuangan Limbah

1	Ketersediaan Sarana Pembuangan Air Limbah	1.Ya 2.Tidak→3	☐
2	Jika ya, saluran Sarana Pembuangan Air Limbah	1.Tertutup 2. Terbuka	☐
3	Apakah dilakukan pemisahan limbah medis dan non medis	1.Ya 2.Tidak→F	☐
4	Jika ada pemisahan, penanganan limbah medis dilakukan dengan:	1.Incinerator 3.Dikubur→ F 2.Dibakar → F 4.Lain……→ F	☐
5	Jika menggunakan incinerator, apakah :	1.Milik sendiri 2.Bukan milik sendiri	☐

F. Sumber Daya Listrik yang Digunakan

	Jenis sumber listrik	1. Ya 2.Tidak → baris berikutnya	Ketersediaan : 1. Tersedia 24 jam, 3. Tersedia 6-11 jam, 2. Tersedia 12-23 jam, 4. Kurang dari 6 jam
	(1)	(2)	(3)
1	PLN	☐	☐
2	Generator milik Puskesmas	☐	☐
3	Tenaga surya milik Puskesmas	☐	☐
4	Listrik swadaya masyarakat	☐	☐

VI. KETATAUSAHAAN (TU)

A. Alat Kantor

	Alat Kantor	Jumlah Jika tidak ada isikan "00" → baris berikutnya	Tahun terakhir penerimaan	Jumlah menurut kondisi			
				Baik dan difungsikan	Rusak dan difungsikan	Baik tetapi tidak difungsikan	Rusak dan tidak berfungsi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Komputer	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
2	Printer	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
3	*Scanner*	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
4	Mesin fotokopi	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
5	Mesin ketik	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
6	AC	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
7	Kipas angin	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
8	Filling kabinet	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
9	Brankas	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
10	Lemari	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
11	Meja Kerja	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
12	Kursi	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
13	Lainnya, sebutkan ……	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

B. Alat Komunikasi

	Alat Komunikasi	Jumlah Jika tidak ada isikan "00" → baris berikutnya	Tahun terakhir pengadaan/penerimaan	Jumlah menurut kondisi			
				Baik dan difungsikan	Rusak dan difungsikan	Baik tetapi tidak difungsikan	Rusak dan tidak berfungsi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Telepon	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
2	Fax dan telepon	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
3	Radio Komunikasi	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
4	Handphone Dinas	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
5	Intercom	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
6	Koneksi Internet			1. Ada	2. Tidak ada		☐

C. Alat Transportasi

	Alat transportasi	Jumlah Jika tidak ada isikan "00" → baris berikutnya	Tahun terakhir penerimaan	Jumlah menurut kondisi			
				Baik dan difungsikan	Rusak dan difungsikan	Baik tetapi tidak difungsikan	Rusak dan tidak berfungsi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kendaraan bermotor roda dua	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kendaraan bermotor roda empat						
	a. Pusling	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
	b. Ambulan	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
	c. Lainnya	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
3	Perahu bermotor	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
4	Perahu tidak bermotor	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
5	Lainnya, sebutkan.....	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

D. Anggaran

1. Apakah ada pungutan restribusi pasien?	1.Ada 2. Tidak ada → 2	☐
a. Berapa rata-rata jumlah yang diterima per bulan dalam tahun 2010?	Rp. ☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐	
b. Sistem pengelolaan keuangan retribusi :	1. Semua disetor ke kabupaten/kota 2. Sebagian disetor ke kabupaten/kota 3. Tidak disetorkan ke Kab/ Kota (dikelola sendiri)	☐

2. Jenis anggaran :	Alokasi (dalam rupiah) tahun 2010 Jika tidak ada isikan "0000000000" → baris berikutnya	Realisasi (dalam rupiah) tahun 2010 Jika tidak ada isikan "0000000000" → baris berikutnya
	1	2
a. Biaya operasional dari APBD Kab/kota	☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐	☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐
b. Anggaran Jamkesmas	☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐	☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐
c. Anggaran Jamkesda		☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐
d. Anggaran BOK	☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐	☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐
e. Anggaran lainnya	☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐	☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐
f. Anggaran total (a + b + c + d + e)	☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐	☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐

3. Anggaran Jampersal 2011	1. Tahu 2. Tidak tahu → E	☐	Rp. ☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐

E. Organisasi dan Pedoman Kerja Puskesmas

1. Apakah Puskesmas memiliki struktur organisasi?	1. Ada, sesuai Perda/ Perbup/ SK Bupati/ SK Walikota 2. Ada, disusun sendiri oleh Puskesmas 3. Tidak ada → 3	☐
2. Apakah pengisian jabatan dalam struktur organisasi dididuduki oleh petugas yang sesuai dengan pendidikan?	1. Ya, seluruhnya 2. Ya, sebagian 3. Tidak	☐
3. Kepala Puskesmas a. Profesi: 01. Dokter Umum 03. Kesmas 05. Perawat 07. Ahli Gizi 09.Perawat gigi 02. Dokter gigi 04. Apoteker 06. Bidan 08. Sanitarian 10.Lainnya		☐☐
b. Pendidikan terakhir : 1. FK 3. S1 Kes 5.S2 Kes 7. D3 Kes 2. FKG 4. S1 Non Kes 6. S2 Non Kes 8. Lainnya, Sebutkan		☐

4. Pedoman Kerja Puskesmas	Ketersediaan : 1.Ada 2.Tidak ada
a. Kepmenkes 128/2004 (Kebijakan Dasar Puskesmas)	☐
b. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas	☐

	c. Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas	☐
	d. Pedoman Penilaian kinerja Puskesmas	☐
	e. Pedoman pelaksanaan jaminan mutu model evolusi pelayanan kesehatan dasar bagi Puskesmas	☐

VII. MANAJEMEN			
A. Perencanaan			
	1. Apakah ada rencana kerja tahunan (2010)?	1. Ya 2. Tidak → B	☐
	2. Apakah terdapat dokumen perencanaan tahunan (2010)?		
	a. RUK (Rencana Usulan Kegiatan)	1. Ya 2. Tidak	☐
	b. RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan)	1. Ya 2. Tidak	☐
	3. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut ? 1. Ya 2. Tidak		
	a. Data hasil analisis Puskesmas ☐	b. Data dari Dinas Kesehatan Kab/Kota	☐
	4. Apakah penanggungjawab program dilibatkan dalam penyusunan perencanaan tersebut ?	1. Ya 2. Tidak	☐
	5. Apakah perencanaan puskesmas dibahas dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) Kecamatan ?	1. Ya 2. Tidak	☐
	6. Apakah perencanaan puskesmas dibahas dalam rapat perencanaan Dinas Kesehatan Kab/Kota?	1. Ya 2. Tidak	☐

B. Penggerakan Pelaksanaan			
1. Lokakarya Mini Bulanan			
	a. Apakah ada lokakarya mini bulanan?	1. Ya, ada dokumen 2. Ya, tidak ada dokumen 3. Tidak → 2	☐
	b. Jika ya, berapa kali lokakarya mini dilakukan pada tahun 2010 ?	..... kali	☐☐
	c. Materi yang dibahas dalam lokakarya mini:		
	1) Laporan kegiatan bulan sebelumnya	1. Ya 2. Tidak	☐
	2) Rencana Pelaksanaan Kegiatan *Plan of Action* (POA) bulan berikutnya	1. Ya 2. Tidak	☐
	3) Lainnya, sebutkan	1. Ya 2. Tidak	☐
2. Lokakarya Mini Triwulan			
	a. Apakah ada lokakarya mini triwulan ?	1. Ya, ada dokumen 2. Ya, tidak ada dokumen 3. Tidak → C	☐
	b. Berapa kali dilakukan pada tahun 2010?	..... kali	☐
	c. Bahan/materi yang dibahas dalam lokakarya mini		
	1) Laporan kegiatan pelaksanaan program kesehatan dan dukungan sektor terkait	1. Ya 2. Tidak	☐
	2) Inventaris masalah/hambatan dari masing-masing sektor	1. Ya 2. Tidak	☐
	3) Informasi kebijakan program baru	1. Ya 2. Tidak	☐
	4) Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)	1. Ya 2. Tidak	☐
	5) Pembahasan rancangan POA bersama antara Puskesmas dengan lintas sector	1. Ya 2. Tidak	☐

C. Program yang Dilaksanakan dan Penanggung jawab Program

1. Upaya Kesehatan Wajib

	Program	1.Ada 2.Tidak ada → baris berikutnya	Penanggungjawab program: 01.Dokter 08. Apoteker/tenaga Farmasi 02.Dokter Gigi 09. Tenaga Promkes 03.Perawat 10. Sarjana Kesehatan Masy 04.Bidan 11. Analis Kesehatan 05.Perawat gigi 12. Tenaga Administrasi 06. Sanitarian 13. Lainnya 07. Tenaga Gizi
	(1)	(2)	(3)
	a. Promosi kesehatan	☐	☐☐
	b. Kesehatan lingkungan	☐	☐☐
	c. KIA/KB	☐	☐☐
	d. Perbaikan gizi masyarakat	☐	☐☐
	e. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	☐	☐☐
	f. Pengobatan	☐	☐☐
	2. Upaya Kesehatan Pengembangan		
	a. Usaha Kesehatan sekolah	☐	☐☐
	b. Kesehatan Olah Raga	☐	☐☐
	c. Perawatan Kesehatan Masyarakat	☐	☐☐
	d. Kesehatan Kerja	☐	☐☐
	e. Kesehatan Gigi dan Mulut	☐	☐☐
	f. Kesehatan Jiwa	☐	☐☐
	g. Kesehatan Mata	☐	☐☐
	h. Kesehatan Usia Lanjut	☐	☐☐
	i. Pembinaan Pengobatan Tradisional	☐	☐☐
	j. Kesehatan Haji	☐	☐☐
	k. Lainnya, ...	☐	☐☐

D. Pembagian Tugas dan Daerah Binaan

	1. Apakah ada petugas yang menjadi penanggung jawab program lebih dari satu program	1. Ada 2. Tidak ada → 3	☐
	2. Jika ada, berapa jumlah petugas yang mendapat tanggungjawab program lebih dari satu ?		☐☐
	3. Apakah ada penanggungjawab daerah binaan dari puskesmas selain bidan desa dan tenaga pustu?	1. Ada 2. Tidak ada	☐

E. Kendali Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Program jaminan mutu yang dijalankan Puskesmas : 1.Ya 2.Tidak

	a. Quality assurance (QA)	☐	d. Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) perawat dan bidan	☐
	b. *ISO* Pelayanan	☐	e. Akreditasi	☐
	c. Gugus kendali mutu	☐		

	2. Penilaian Kepuasan Pasien: a. Apakah ada penilaian kepuasan pasien?	1.Ya 2.Tidak → F	☐

	b. Jika ya, bagaimana caranya		
	1) Kotak saran	1. Ya 2. Tidak	☐
	2) Pengisian angket	1. Ya 2. Tidak	☐
	3) Survey	1. Ya 2. Tidak	☐
	4) Lainnya.....	1. Ya 2. Tidak	☐

F. Sistem Informasi Puskesmas			
1	Apakah Puskesmas memiliki arsip laporan tahun 2010 sebagai berikut:	1. Ya 2. Tidak	Jumlah
	a. Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB1)	☐	☐☐
	b. Laporan Bulanan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LP LPO atau LB2)	☐	☐☐
	c. Laporan Bulanan Gizi, KIA, Imunisasi, P2M (LB3)	☐	☐☐
	d. Laporan Bulanan Data Kegiatan Puskesmas (LB4)	☐	☐☐
	e. Laporan Tahunan Data Dasar Puskesmas (LT1)	☐	
	f. Laporan Tahunan Data Kepegawaian Puskesmas (LT2)	☐	
	g. Laporan Tahunan Data Peralatan Puskesmas (LT3)	☐	
2	Apakah Puskesmas telah menggunakan sistem komputer dalam memberikan pelayanan dalam gedung?	1. Ya, ada jaringan antar ruangan 2. Ya, menggunakan komputer tapi tidak ada jaringan antar ruangan 3. Tidak menggunakan komputer	☐
3	Apakah pada saat ini puskesmas menggunakan *International Classification of Diseases* (ICD) X untuk pengkodean penyakit?	1. Ya 2. Tidak	☐

G. Penilaian Kinerja Puskesmas			
1	Apakah ada penilaian kinerja?	1. Ada 2. Tidak ada → VIII	☐
2	Apakah ada pembahasan hasil penilaian kinerja dengan staf Puskesmas?	1. Ada 2. Tidak ada	☐
3	Apakah hasil penilaian kinerja puskesmas dikirim ke Dinas Kesehatan kabupaten/Kota?	1. Ada 2. Tidak ada→ VIII	☐
4	Apakah ada umpan balik dari penilaian kinerja Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota?	1. Ada 2. Tidak ada	☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM

Nama Puskesmas:	Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

1. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

a. Kegiatan (tahun 2010) — 1. Ada 2. Tidak ada

1)	Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	☐
2)	Pembinaan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	☐
3)	Pembinaan Forum Desa Siaga	☐
4)	Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya	☐

b. Jumlah petugas yang melaksanakan Promosi Kesehatan (tahun 2010)

Jumlah total petugas	Dokter	Drg	Perawat	Bidan	Sanitarian	Tenaga Promkes	Kesmas	Tenaga Gizi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
☐☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐☐	☐	☐

c. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga / Petugas Puskesmas (tahun 2009 dan 2010)

Jenis Pelatihan	1. Ada 2. Tdk ada → baris berikutnya	Jumlah tenaga yang ikut pelatihan								
		Dokter	Drg	Perawat	Bidan	Sanitarian	Tenaga Promkes	Kesmas	Tenaga Gizi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1) PHBS	☐	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐☐	☐	☐
2) Desa Siaga	☐	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐☐	☐	☐
3) Pemberdayaan masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐☐	☐	☐

d. Pedoman

	Pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3→ baris berikutnya	Tahun Pencetakan
	(1)	(2)	(3)
1)	Juknis pengembangan dan penyelenggaraan pos kesehatan desa	☐	☐☐☐☐
2)	Pedoman pelaksanaan pengembangan desa siaga	☐	☐☐☐☐
3)	Juknis penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa siaga	☐	☐☐☐☐

e.Pencatatan (tahun 2010) — 1. Ada, lengkap 2. Ada, tidak lengkap 3. Tidak ada

1)	Apakah ada Pencatatan tentang kegiatan Peran Serta Masyarakat?	☐

f. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota (tahun 2010)

1)	Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program promosi kesehatan pada tahun 2010?	1 Ya 2 Tidak →3)	☐
2)	Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐
3)	Apakah ada Umpan balik (*feedback*) laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1.Ada 2.Tidak ada → 5)	☐
4)	Bila ada, frekuensi umpan balik (*feedback*)?	1.Setiap bulan 2.Setiap tiga bulan 3. Setiap 6 bulan 4. Setahun sekali 5. Tidak menentu	☐

	5) Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1 Ada 2 . Tidak ada → g	☐
	6) Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐

g. Output (tahun 2010)			Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
	1a). Jumlah desa/RW siaga yang dibentuk sampai dengan tahun 2010	☐☐	☐☐	1b). Jumlah desa/RW siaga aktif pada tahun 2010	☐☐	☐☐
	2a). Jumlah rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas pada tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan penyuluhan PHBS pada tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM

Nama Puskesmas:	Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

2. PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN

a. Kegiatan (tahun 2010) — 1. Ada 2. Tidak ada

1.	Kunjungan/Pemeriksaan sanitasi lingkungan sekolah	☐
2.	Kunjungan/Pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum (TTU)	☐
3.	Kunjungan/Pemeriksaan sanitasi pengelola makanan/minuman (TPM)	☐
4.	Kunjungan/Pemeriksaan sanitasi rumah tangga	☐
5.	Kunjungan/Pemeriksaan sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah	☐
6.	Pemberantasan Sarang Nyamuk / Pemeriksaan jentik nyamuk	☐
7.	Pelayanan Klinik Sanitasi	☐

b. Jumlah petugas yang melaksanakan program Kesehatan Lingkungan (tahun 2010)

Jumlah total petugas	Dokter	Perawat	Bidan	Sanitarian	Tenaga Promkes	Kesmas	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
☐☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐☐	☐

c. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga / Petugas Puskesmas (tahun 2009 dan 2010)

Jenis pelatihan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Dokter	Perawat	Bidan	Sanitarian	Tenaga Promkes	Kesmas	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1) Air Minum / Air Bersih	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
2) Sanitasi Makanan/Minuman	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
3) Pengelolaan Sampah	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
4) Pengelolaan Air Limbah	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐

d. Pedoman

Pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3 → baris berikutnya	Tahun Pencetakan
(1)	(2)	(3)
1) Pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan di lingkungan sekolah	☐	☐☐☐☐
2) Pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan	☐	☐☐☐☐
3) Permenkes tentang Persyaratan kualitas air minum	☐	☐☐☐☐

e.Pencatatan (tahun 2010) — 1. Ada, lengkap 2. Ada, tidak lengkap 3. Tidak ada

1). Apakah ada Pencatatan Data Kesehatan Lingkungan?	☐

f. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota (tahun 2010)			
1)	Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program kesling pada tahun 2010?	1 Ya 2 Tidak →3)	☐
2)	Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐
3)	Apakah ada Umpan balik (*feedback*) laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1. Ada 2.Tidak ada → 5)	☐
4)	Bila ada, frekuensi umpan balik (*feedback*)?	1. Setiap bulan 2. Setiap tiga bulan 3. Setiap 6 bulan 4. Setahun sekali 5. Tidak menentu	☐
5)	Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program kesling di Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1. Ada 2. Tidak ada → g	☐
6)	Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐

g.Output (tahun 2010)			Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
	1a). Jumlah rumah di wilayah kerja Puskesmas	☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah rumah yang dilakukan pemeriksaan sanitasi	☐☐☐☐	☐☐
				1c). Jumlah rumah yang bebas jentik nyamuk	☐☐☐☐	☐☐
	2a). Jumlah TTU di wilayah kerja Puskesmas	☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah TTU yang dilakukan pemeriksaan sanitasi	☐☐☐	☐☐
	3a). Jumlah TPM di wilayah kerja Puskesmas	☐☐☐	☐☐	3b). Jumlah TPM yang dilakukan pemeriksaan sanitasi	☐☐☐	☐☐
	4a). Jumlah TPA di wilayah kerja Puskesmas	☐☐☐	☐☐	4b). Jumlah TPA yang dilakukan pemeriksaan sanitasi	☐☐☐	☐☐
	5a). Jumlah Sumber Air Bersih yang dilakukan pemeriksaan sanitasi	☐☐☐	☐☐	5b). Jumlah Sampel Pemeriksaan Air Bersih yang dikirim ke Laboratorium rujukan	☐☐☐	☐☐
	6a). Jumlah Kasus Diare dengan dehidrasi sedang dan berat	☐☐☐	☐☐	6b). Jumlah Penderita diare dengan dehidrasi sedang dan berat yang mendapatkan Konsultasi Kesehatan Lingkungan	☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM

Nama Puskesmas:	Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

3. PELAYANAN KESEHATAN IBU

a. Kegiatan (tahun 2010)

	1. Ada	2. Tidak ada
1) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)		☐
2) Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas		☐
3) Kelas Ibu (Hamil dan Nifas)		☐
4) Pelayanan antenatal terintegrasi		☐

b. Pelayanan Persalinan Dalam Gedung Puskesmas (tahun 2010)

1) Apakah puskesmas ini melayani pelayanan persalinan?	1. Ya 2. Tidak→ c	☐
2) Jika ya berapa jumlah pertolongan persalinan tahun 2010		☐☐☐☐

c. Frekuensi pelayanan kesehatan ibu di puskesmas (tahun 2010) :
1. Setiap hari 2. 3 hari/minggu 3. 2 hari/minggu 4. Seminggu sekali

1) Berapa hari frekuensi pelayanan ibu hamil dalam seminggu di dalam gedung puskesmas?	☐
2) Berapa hari frekuensi pelayanan ibu nifas dalam seminggu di dalam gedung puskesmas?	☐

d. Jumlah petugas yang melaksanakan program kesehatan ibu (tahun 2010)

Jumlah total petugas	Dokter	Perawat	Bidan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
☐☐	☐	☐☐	☐☐	☐

e. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas (tahun 2009 dan 2010)

Jenis pelatihan	Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Dokter	Bidan	Perawat	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1) Asuhan Persalinan Normal (APN)	☐	☐	☐☐	☐☐	☐☐
2) Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	☐	☐	☐☐	☐☐	☐☐
3) Pelatihan Pemantauan Wilayah Setempat Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak (PWS KIA)	☐	☐	☐☐	☐☐	☐☐
4) Lainnya, …….	☐	☐	☐☐	☐☐	☐☐
5) Lainnya, ...	☐	☐	☐☐	☐☐	☐☐

f. Pedoman

Pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3→ baris berikutnya	Tahun Pencetakan
(1)	(2)	(3)
1) Acuan Asuhan Persalinan Normal (APN)	☐	☐☐☐☐
2) Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	☐	☐☐☐☐
3) Buku pedoman program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	☐	☐☐☐☐
4) Buku pegangan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal	☐	☐☐☐☐
5) Pedoman Kelas Ibu	☐	☐☐☐☐

	6) Pedoman pemantauan wilayah setempat (PWS-KIA)	☐	☐☐☐☐
	7) Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil	☐	☐☐☐☐
	8) Pedoman *Prevention of Mother to Child Transmition* (PMTCT)	☐	☐☐☐☐
	9) Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi di Puskesmas (terintegratif)	☐	☐☐☐☐

g. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota (tahun 2010)

1)	Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program pelayanan kesehatan ibu pada tahun 2010?	1. Ada 2 .Tidak ada → 3)	☐
2)	Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐
3)	Apakah ada Umpan balik (*feedback*) laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1.Ada, 2.Tidak ada → 5)	☐
4)	Bila ada, frekuensi umpanbalik (*feedback*)?	1.Setiap bulan 2.Setiap tiga bulan 3. Setiap 6 bulan 4. Setahun sekali 5. Tidak menentu	☐
5)	Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan ibu di Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1 Ada 2 . Tidak ada → 7)	☐
6)	Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐
7)	Apakah ada Audit Maternal Perinatal (AMP) yang dilakukan pada tahun 2010 ?	1. Ada 2. Tidak ada 3.Tidak ada kasus kematian	☐
8)	Apakah ada supervisi fasilitatif yang dilakukan oleh bidan koordinator kepada bidan pelaksana pelayanan pada tahun 2010?	1.Setiap bulan 2.Setiap tiga bulan 3. Setiap 6 bulan 4. Tidak menentu 5. Tidak ada	☐

h. Pencatatan (tahun 2010)

1). Apakah ada rekapan kohor ibu dari seluruh desa/kelurahan/RW di tingkat Puskesmas ?	1. Ada, seluruh desa 2. Ada, sebagian desa 3. Tidak ada	☐
2). Apakah PWS KIA dilakukan?	1. Ada, seluruh desa 2. Ada, sebagian desa 3. Tidak ada	☐
3). Apakah pencatatan PWS KIA dilakukan secara manual atau komputerisasi?	1. Manual 2. Komputerisasi	☐

i.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah ibu hamil dengan K1	☐☐☐☐	☐☐
			1c). Jumlah ibu hamil dengan K4	☐☐☐☐	☐☐
			1d). Jumlah ibu hamil yang diperiksa khusus : (Hep B, HIV, Syphillis, Tb, Malaria, Thalasemia, kecacingan)	☐☐☐☐	
2a). Jumlah sasaran ibu hamil dengan komplikasi tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐
3a). Jumlah sasaran ibu bersalin tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐	3b). Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐

			Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
				3c). Jumlah ibu bersalin yang ditolong di fasilitas kesehatan pada tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐
				3d). Berapa jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas dari keluarga miskin tahun 2010?	☐☐☐☐	☐☐
				3e). Jumlah ibu bersalin dengan komplikasi yang dirujuk (ke puskesmas PONED / RS atau PONEK) pada tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐
	4a). Jumlah sasaran ibu nifas tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐	4b). Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐
				4c). Jumlah ibu nifas dengan komplikasi yang dirujuk (ke puskesmas PONED / RS atau PONEK) pada tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐
	5). Jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas tahun 2010				☐☐☐☐	☐☐

Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:						Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			
Nama Responden:			Jabatan:				No.HP:		

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

4. PELAYANAN BAYI DAN ANAK

a. Kegiatan (tahun 2010) — 1. Ada 2. Tidak ada

1)	Manajemen Asfiksia	☐
2)	Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	☐
3)	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	☐
4)	Kelas Ibu Balita	☐
5)	Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	☐
6)	Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	☐
7)	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	☐
8)	Penanganan kasus diare pada balita dengan dehidrasi sedang dan berat	☐

b. Jumlah petugas yang melaksanakan pelayanan bayi dan anak (tahun 2010)

Jumlah total petugas	Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Gizi	Tenaga Promkes	Kesmas	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
☐☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐☐	☐

c. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas (tahun 2009 dan 2010)

	Jenis pelatihan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Gizi	Tenaga Promkes	Kesmas	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1)	Manajemen asfiksia	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
2)	Manajemen BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
3)	SDIDTK (Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang)	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
4)	Kelas Ibu balita	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
5)	KTA (Kekerasan Terhadap Anak)	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
6)	PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
7a)	MTBS (Manajemen terpadu Balita Sakit) minimal 6 hari	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
7b)	Bila ada pelatihan MTBS, apakah dilakukan monitoring pasca pelatihan? 1. Ya 2. Tidak	☐							

d. Pedoman

	Nama buku pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3→ baris berikutnya	Tahun Pencetakan
	(1)	(2)	(3)
	1) Buku pedoman manajemen asfiksia	☐	☐☐☐☐
	2) Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	☐	☐☐☐☐
	3) Buku pedoman pelaksanaan SDIDTK anak	☐	☐☐☐☐
	4) Buku pedoman Kelas Ibu Balita	☐	☐☐☐☐
	5) Modul manajemen bayi berat lahir rendah (BBLR)	☐	☐☐☐☐
	6) Modul manajemen terpadu balita sakit (MTBS)	☐	☐☐☐☐
	7) Buku Pedoman tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi petugas kesehatan	☐	☐☐☐☐
	8) Buku Pedoman PKPR	☐	☐☐☐☐

e. Pencatatan (tahun 2010) 1. Ada, lengkap 2. Ada,tidak lengkap 3. Tidak ada

1)	Pencatatan kohor bayi	☐
2)	Pencatatan kohor anak balita dan prasekolah	☐
3)	Pencatatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda)	☐
4)	Pencatatan SDIDTK (Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang)	☐

f. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota (tahun 2010)

1)	Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program kesehatan bayi dan anak pada tahun 2010?	1. Ada 2 . Tidak ada → 3)	☐
2)	Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐
3)	Apakah ada Umpan balik (*feedback*)laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1.Ada, 2.Tidak ada → 5)	☐
4)	Bila ada, frekuensi umpanbalik (*feedback*) ?	1.Setiap bulan 4. Setahun sekali 2.Setiap tiga bulan 5. Tidak menentu 3. Setiap 6 bulan	☐
5)	Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program di Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1 Ada 2 . Tidak ada → g	☐
6)	Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐

g. Pengawasan & Bimbingan Teknis Internal (tahun 2010)

1)	Apakah ada supervisi fasilitatif yang dilakukan oleh bidan koordinator kepada bidan pelaksana pelayanan?	1 Ada 2. Tidak ada	☐

h.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah seluruh bayi lahir hidup	☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah neonatal yang mendapatkan pelayanan pada umur 6 – 48 jam	☐☐☐☐	☐☐
			1c). Jumlah neonatal yang mendapatkan pelayanan pada umur 3 – 7 hari	☐☐☐☐	☐☐
			1d). Jumlah neonatal yang mendapatkan pelayanan pada umur 8 – 28 hari	☐☐☐☐	☐☐
			1e). Jumlah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)	☐☐☐☐	☐☐
			1f). Jumlah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) yang ditangani	☐☐☐☐	☐☐

			Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
	2a). Jumlah sasaran bayi 1 – 11 bulan	☐☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar (imunisasi dasar lengkap, vitamin A 1 kali, pelayanan SDIDTK 4 kali dan penyuluhan) pada tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐
	3a). Jumlah neonatal dengan komplikasi	☐☐☐☐	☐☐	3b). Jumlah neonatal dengan komplikasi yang ditangani	☐☐☐☐	☐☐
	4a). Jumlah seluruh anak balita di wilayah kerja Puskesmas	☐☐☐☐	☐☐	4b). Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali, pelayanan SDIDTK 2 kali, dan vitamin A 2 kali di wilayah puskesmas tahun 2010	☐☐☐☐	☐☐
	5a). Jumlah balita penderita Diare	☐☐☐☐	☐☐	5b). Jumlah balita penderita diare yang diberi zinc	☐☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

5. PELAYANAN KB (KELUARGA BERENCANA)

a. Kegiatan (tahun 2010) — 1. Ada 2. Tidak ada

1)	Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi (IUD, Susuk, Vasektomi, Mini Laparatomi)	☐
2)	Penanganan komplikasi	☐
3)	Konsultasi KB (Keluarga Berencana)	☐

b. Frekuensi pelayanan KB di puskesmas (tahun 2010) :

1). Berapa hari frekuensi pelayanan KB dalam seminggu di puskesmas? ☐
1. Setiap hari 2. 3 hari /minggu 3. 2 hari/minggu 4. seminggu sekali

c. Jumlah petugas yang melaksanakan program KB sesuai kegiatan pelayanan (tahun 2010) :

Jumlah total petugas	Dokter	Perawat	Bidan	Kesmas	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
☐☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐

d. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas (tahun 2009 dan 2010)

	Jenis pelatihan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Dokter	Perawat	Bidan	Kesmas	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1)	Progam KB	☐	☐	☐	☐	☐	☐☐
2)	Pemasangan alat kontrasepsi	☐	☐	☐	☐	☐	☐☐
3)	Penanganan Komplikasi kontrasepsi	☐	☐	☐	☐	☐	☐☐
4)	Lainnya	☐	☐	☐	☐	☐	☐☐

e. Pedoman

	Pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3→ baris berikutnya	Tahun Pencetakan
	(1)	(2)	(3)
1)	Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi	☐	☐☐☐☐
2)	Panduan audit medik pelayanan KB	☐	☐☐☐☐
3)	Panduan baku klinis program pelayanan KB	☐	☐☐☐☐
4)	Pedoman pelayanan kesehatan reproduksi terpadu	☐	☐☐☐☐
5)	Pedoman pelayanan kontrasepsi darurat	☐	☐☐☐☐
6)	Pedoman penanggulangan efek samping/komplikasi kontrasepsi	☐	☐☐☐☐

f. Pencatatan (tahun 2010) — 1. Ada, lengkap 2. Ada, tidak lengkap 3. Tidak ada

1). Apakah ada pencatatan pelayanan KB?	☐	2). Apakah ada pencatatan hasil cakupan pelayanan KB?	☐

g. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota (tahun 2010)			
1)	Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program pelayanan keluarga berencana pada tahun 2010?	1. Ya 2. Tidak → 3)	☐
2)	Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐
3)	Apakah ada Umpan balik (*feedback*) laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1.Ada, 2.Tidak ada → 5)	☐
4)	Bila ada, frekuensi umpanbalik (*feedback*)?	1.Setiap bulan 4. Setahun sekali 2.Setiap tiga bulan 5. Tidak menentu 3. Setiap 6 bulan	☐
5)	Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program pelayanan keluarga berencana di Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1 Ada 2 . Tidak ada → h	☐
6)	Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐

h.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah pasangan usia subur tahun 2010	☐☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi tahun 2010	☐☐☐☐☐	☐☐
			1c). Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi MKET tahun 2010	☐☐☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

6. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

a. Kegiatan (tahun 2010) — 1. Ada 2. Tidak ada

1)	Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif	☐	4) Pemberian tablet besi (90 tablet) pada ibu hamil	☐
2)	Pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan	☐	5) Pemberian PMT pemulihan balita pada gakin	☐
3)	Pemberian kapsul vitamin A (dosis 200.000 SI) pada Balita	☐	6) Penimbangan Balita	☐

b. Jumlah petugas yang melaksanakan program perbaikan gizi masyarakat (tahun 2010)

Jumlah total petugas	Dokter umum	Ahli Gizi	Perawat	Bidan	Penyuluh	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
☐☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐☐

c. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas (tahun 2009 dan 2010)

Jenis Pelatihan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Jumlah tenaga yang ikut pelatihan					
		Dokter umum	Ahli Gizi	Perawat	Bidan	Penyuluh	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) Konseling ASI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2) Pemantauan pertumbuhan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3) Konseling MP-ASI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4) Tata laksana gizi buruk	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

d. Pedoman

Pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3→ baris berikutnya	Tahun Pencetakan
(1)	(2)	(3)
1) Buku surveilans gizi	☐	☐☐☐☐
2) Buku pegangan kader	☐	☐☐☐☐
3) Buku manajemen pemberian vitamin A	☐	☐☐☐☐
4) Buku manajemen pemberian tablet Fe	☐	☐☐☐☐
5) Buku pedoman ASI	☐	☐☐☐☐
6) Buku Pedoman MP-ASI	☐	☐☐☐☐
7) Buku pedoman pemberian garam beriodium	☐	☐☐☐☐
8) Buku standar pemantauan pertumbuhan	☐	☐☐☐☐
9) Pedoman pengelolaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk anak usia 6-24 bulan	☐	☐☐☐☐

e. Pencatatan dan Pelaporan (tahun 2010) — 1. Ada, lengkap 2. Ada,tidak lengkap 3. Tidak ada

1)	Buku register gizi	☐	3) Sistem Informasi Posyandu (SIP)	☐
2)	Surveilans Gizi	☐		

f. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota (tahun 2010)			
1)	Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program Gizi pada tahun 2010?	1 Ya 2 Tidak → 3)	☐
2)	Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐
3)	Apakah ada Umpan balik (*feedback*) laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1.Ada, 2.Tidak ada → 5)	☐
4)	Bila ada, frekuensi umpanbalik (*feedback*)?	1.Setiap bulan 2.Setiap tiga bulan 3. Setiap 6 bulan 4. Setahun sekali 5. Tidak menentu	☐
5)	Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program gizi di Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1 Ada 2 . Tidak ada → g	☐
6)	Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐

g.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin	☐☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	☐☐☐☐☐	☐☐
2a). Jumlah balita	☐☐☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah balita yang memiliki KMS	☐☐☐☐☐	☐☐
			2c). Jumlah balita ditimbang	☐☐☐☐☐	☐☐
			2d). Jumlah balita yang naik berat badannya	☐☐☐☐☐	☐☐
			2e). Jumlah balita bawah garis merah	☐☐☐☐☐	☐☐
			2f). Jumlah balita yang mendapat Vitamin A dosis tinggi 2 kali per tahun	☐☐☐☐☐	☐☐
3a). Jumlah ibu hamil	☐☐☐☐☐	☐☐	3b). Jumlah ibu hamil mendapatkan tablet Fe 90 butir	☐☐☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM

Nama Puskesmas:	Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

7. PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

a. Kegiatan (tahun 2010)

	1. Ada	2. Tidak ada
1) Program TB Paru	☐	
2) Program ISPA/Pneumonia	☐	
3) Program Diare	☐	
4) Program DBD	☐	
5) Program Malaria	☐	
6) Program Kusta	☐	
7) Program Schistosomiasis		☐
8) Program HIV-AIDS		☐
9) Program Filariasis		☐
10) Surveilans Terpadu		☐
11) Program Rabies		☐
12) Lainnya, …….		☐

b. Jumlah petugas yang melaksanakan Program Pengendalian Penyakit (tahun 2010)

Jumlah total petugas	Dokter umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Sanitarian	Tenaga Promkes	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
☐☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐

c. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas (tahun 2009 dan 2010)

Penatalaksanaan Penyakit Menular	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Jumlah tenaga yang ikut pelatihan						
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Sanitarian	Tenaga Promkes	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1) TB Paru	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
2) ISPA	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
3) Diare	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
4) DBD	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
5) Malaria	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
6) Kusta	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
7) Schistosomiasis	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
8) Pencegahan HIV-AIDS	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
9) Pengenalan HIV-AIDS (konseling dan VCT) di RS dan Puskesmas	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
10) Filariasis	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
11) Rabies	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
12) Tim Gerak Cepat	☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐

d.Pedoman

	Pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3→ baris berikutnya	Tahun Pencetakan
	(1)	(2)	(3)
	1) Penanggulangan TB Paru	☐	☐☐☐☐
	2) Penanggulangan ISPA	☐	☐☐☐☐
	3) Penanggulangan Diare	☐	☐☐☐☐
	4) Penanggulangan DBD	☐	☐☐☐☐
	5) Penanggulangan Malaria	☐	☐☐☐☐
	6) Penanggulangan Kusta	☐	☐☐☐☐
	7) Penanggulangan Schistosomiasis	☐	☐☐☐☐
	8) Pencegahan HIV-AIDS	☐	☐☐☐☐
	9) Penanggulangan Filariasis	☐	☐☐☐☐
	10) Pedoman KLB	☐	☐☐☐☐
	11) Pedoman Penanggulangan Rabies	☐	☐☐☐☐
	12) Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza	☐	☐☐☐☐

e. Pencatatan (tahun 2010) 1. Ada, lengkap 2. Ada, tidak lengkap 3. Tidak ada

	1) Program TB Paru	☐	7) Program Schistosomiasis	☐
	2) Program ISPA/Pneumonia	☐	8) Program HIV-AIDS	☐
	3) Program Diare	☐	9) Program Filariasis	☐
	4) Program DBD	☐	10) Surveilance Terpadu	☐
	5) Program Malaria	☐	11) Program Rabies	☐
	6) Program Kusta	☐	12) Lainnya……	☐

f. Pencatatan Kejadian Luar Biasa (tahun 2010) 1. Ada, lengkap 2. Ada, tidak lengkap 3. Tidak ada

	1) Pencatatan Kejadian Luar Biasa (W1)	☐	4) Pencatatan Surveilans Terpadu Puskesmas Sentinel	☐
	2) Pencatatan Sistem Kewaspadaan Dini (W2)	☐	5) Pencatatan Surveilans Terpadu Puskesmas Non Sentinel	☐
	3) Pencatatan Surveilance Terpadu Puskesmas KLB	☐		

g. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota (tahun 2010)

	1) Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis P2M pada tahun 2010?	1 Ya 2 Tidak → 3)	☐
	2) Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐
	3) Apakah ada Umpan balik (*feedback*)laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1.Ada, 2.Tidak ada → 5)	☐
	4) Bila ada, frekuensi umpanbalik (*feedback*)?	1.Setiap bulan 4. Setahun sekali 2.Setiap tiga bulan 5. Tidak menentu 3. Setiap 6 bulan	☐
	5) Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program P2M di Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1 Ada 2 . Tidak ada → g	☐
	6) Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐

h.Output (tahun 2010)			Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
	1a) Jumlah sasaran penderita TB	☐☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah pasien baru BTA positif dan diobati	☐☐☐	☐☐
				1c). Jumlah pasien baru BTA positif yang diobati dan sembuh	☐☐☐	☐☐
	2a) Jumlah sasaran penderita pneumonia balita	☐☐☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	☐☐☐	☐☐
				2c). Jumlah kasus pneumonia berat yang dirujuk	☐☐☐	☐☐
	3a) Jumlah sasaran penderita Diare	☐☐☐☐☐	☐☐	3b). Jumlah penderita Diare yang ditangani	☐☐☐	☐☐
				3c). Jumlah penderita Diare yang mendapat Oralit	☐☐☐	☐☐
	4a) Jumlah sasaran penderita DBD	☐☐☐☐☐	☐☐	4b). Jumlah penderita DBD yang ditangani	☐☐☐☐	☐☐
	5a). Jumlah penderita Malaria	☐☐☐☐☐	☐☐	5b). Jumlah penderita Malaria yang diobati	☐☐☐	☐☐
	6a). Jumlah penderita Kusta	☐☐☐☐	☐☐	6b). Jumlah penderita Kusta yang diobati dan sembuh	☐☐☐	☐☐
	7a). Jumlah penderita Sch,istosomiasis	☐☐☐☐	☐☐	7b). Jumlah penderita Schistosomiasis yang diobati	☐☐☐	☐☐
	8a). Jumlah sasaran yang beresiko tinggi terkena HIV	☐☐☐☐	☐☐	8b). Jumlah penderita HIV yang positif di wilayah kerja puskesmas	☐☐☐	☐☐
	9a). Jumlah penderita kronis Filariasis	☐☐☐☐	☐☐	9b). Jumlah penderita Filariasis yang ditangani	☐☐☐	☐☐
	10a). Jumlah penderita Rabies	☐☐☐☐	☐☐	10b). Jumlah penderita Rabies yang diobati	☐☐☐	☐☐
	11a). Jumlah Kejadian Luar Biasa	☐☐	☐☐	11b). Jumlah KLB yang ditanggulangi < 24 jam	☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

8.PELAYANAN IMUNISASI

a. Pelayanan Imunisasi di Puskesmas (tahun 2010)

	1). Frekuensi pelayanan imunisasi dalam gedung puskesmas : 1. Setiap hari 2. 3 hari/minggu 3. 2 hari/minggu 4. Seminggu sekali	☐
	2). Kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung puskesmas : 1. Ada 2. Tidak ada	☐

b. Jumlah petugas yang melaksanakan program imunisasi (tahun 2010)

Jumlah total petugas	Dokter umum	Bidan	Perawat	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

c. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas (tahun 2009 dan 2010)

	Jenis Pelatihan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Jumlah tenaga yang ikut pelatihan			
			Dokter	Bidan	Perawat	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1) Tata laksana imunisasi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
	2) KIPI	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

d. Pedoman

	Pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3→ baris berikutnya	Tahun Pencetakan
	(1)	(2)	(3)
	1) Pedoman pelaksanaan program imunisasi di Indonesia	☐	☐☐☐☐
	2) Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi	☐	☐☐☐☐
	3) Pedoman Penanganan KIPI	☐	☐☐☐☐
	4) Apakah puskesmas mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan Imunisasi	☐	☐☐☐☐

e. Pencatatan (tahun 2010) 1. Ada, lengkap 2. Ada, tidak lengkap 3. Tidak ada

	1) Apakah dilakukan pencatatan stok vaksin	☐
	2) Apakah dilakukan pencatatan grafik suhu lemari es	☐
	3) Apakah dilakukan pencatatan PWS Imunisasi	☐

f. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota (tahun 2010)

	1) Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/ Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program imunisasi pada tahun 2010?	1. Ada 2 . Tidak ada → 3)	☐
	2) Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐
	3) Apakah ada Umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1.Ada, 2.Tidak ada → 5)	☐
	4) Bila ada, frekuensi umpanbalik ?	1.Setiap bulan 4. Setahun sekali 2.Setiap tiga bulan 5. Tidak menentu 3. Setiap 6 bulan	☐
	5) Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program di Dinas Kesehatan Kab/ Kota?	1 Ada 2 . Tidak ada → g	☐

	6) Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐

g.Output (tahun 2010)			Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
	1a) Jumlah desa/RW	☐☐	☐☐	1b). Jumlah desa/RW UCI	☐☐	☐☐
	2a) Jumlah sasaran bayi	☐☐☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah Bayi yang mendapat imunisasi lengkap	☐☐☐☐	☐☐
				2c). Jumlah bayi yang mendapat imunisasi HB 0	☐☐☐☐	☐☐
				2d). Jumlah bayi yang mendapat imunisasi BCG	☐☐☐☐	☐☐
				2e). Jumlah bayi yang mendapat imunisasi DPT/HB 1	☐☐☐☐	☐☐
				2f). Jumlah bayi yang mendapat imunisasi DPT/HB 3	☐☐☐☐	☐☐
				2g). Jumlah bayi yang mendapat imunisasi Polio 4	☐☐☐☐	☐☐
				2h). Jumlah bayi yang mendapat imunisasi Campak	☐☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

9. PENGOBATAN

a. Kegiatan (tahun 2010) — 1. Ada 2. Tidak ada

1	Pelayanan pengobatan	☐	2	Surveilans Penyakit Tidak Menular	☐

b. Jumlah petugas yang melaksanakan program pengobatan (tahun 2010)

Jumlah total petugas	Dokter umum	Perawat	Bidan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

c. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas (tahun 2009 dan 2010)

Jenis Pelatihan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Dokter	Perawat	Bidan	Apoteker	Asisten Apoteker	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) Penggunaan Obat Rasional	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
2) Gawat Darurat	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐
3) Saintifikasi jamu	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐

d. Pedoman

1a). Pengobatan dasar di Puskesmas	1.Ada, 2.Tidak ada	☐	1b). Tahun pencetakan	☐☐☐☐
2a). Kegawatdaruratan	1.Ada, 2.Tidak ada	☐	2b). Tahun pencetakan	☐☐☐☐

e. Pencatatan (tahun 2010) — 1. Ada, lengkap 2. Ada,tidak lengkap 3. Tidak ada

1) Apakah ada pencatatan register Poliklinik Umum?	☐
2) Apakah ada pencatatan rujukan?	☐

f. Pengawasan, Evaluasi dan bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota (tahun 2010)

1) Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program pengobatan pada tahun 2010?	1 ada 2 . tidak ada → 3)	☐
2) Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐
3) Apakah ada Umpan balik (*feedback)*laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota?	1.Ada, 2.Tidak ada → 5)	☐
4) Bila ada, frekuensi umpanbalik *feedback)*?	1.Setiap bulan 4. Setahun sekali 2.Setiap tiga bulan 5. Tidak menentu 3. Setiap 6 bulan	☐
5) Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program di Dinas Kesehatan Kab/Kota?	1 Ada 2 . Tidak ada → g	☐
6) Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐

g.Output (tahun 2010)			Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
	1a) Jumlah kunjungan rawat jalan tahun 2010	☐☐☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah kunjungan rawat jalan tahun 2010 dalam wilayah kerja Puskesmas	☐☐☐☐☐☐	☐☐
				1c). Jumlah kunjungan rawat jalan Keluarga Miskin tahun 2010 dalam wilayah kerja Puskesmas	☐☐☐☐☐☐	
	2a) Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan BP Umum tahun 2010	☐☐☐☐☐☐		2b). Jumlah penderita hipertensi ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan dari Puskesmas	☐☐☐☐	
				2c). Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan dari Puskesmas	☐☐☐☐	

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

0

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

10. USAHA KESEHATAN SEKOLAH

a. Kegiatan (tahun 2010)	1. Ada	2. Tidak ada
1) . Penjaringan kesehatan anak sekolah dasar kelas 1	☐	
2). Pemeriksaan kesehatan anak SD oleh nakes	☐	
3).Pemeriksaan kesehatan anak SLTP dan atau SMU oleh nakes	☐	
4). Pelatihan Guru UKS	☐	
5). Pelatihan Dokter Kecil	☐	

b. Petugas dan Pelatihan	
1). Jumlah petugas yang melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah tahun 20110	☐☐
2). Jumlah petugas yang ikut pelatihan Usaha kesehatan sekolah pada tahun 2009 dan 2010	☐☐

c. Pedoman dan Pencatatan	1. Ada	2. Tidak ada
1) Apakah ada Buku Pedoman UKS ?	☐	
2). Apakah ada pencatatan kegiatan UKS pada tahun 2010 ?	☐	

d. Monitoring dan Bimbingan Teknis (tahun 2010)	1. Ya	2. Tidak
1). Apakah ada bimbingan teknis program UKS dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota pada tahun 2010?	☐	
2). Apakah ada umpan balik dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota terhadap laporan kegiatan UKS tahun 2010 ?	☐	
3). Apakah pada tahun 2010 pernah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program UKS?	☐	

e.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah anak Sekolah Dasar Kelas 1	☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah anak Sekolah Dasar kelas 1 yang dijaring (diperiksa)	☐☐☐☐	☐☐
2a). Jumlah Sekolah Dasar	☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah Sekolah Dasar yang melaksanakan UKS	☐☐☐	☐☐
3a). Jumlah Sekolah Lanjutan (SLTP dan SMU)	☐☐	☐☐	3b). Jumlah Sekolah Lanjutan (SLTP dan SMU) yang melaksanakan UKS	☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

11. KESEHATAN OLAHRAGA

a. Kegiatan (tahun 2010)	1. Ada	2. Tidak ada
1). Pembinaan kelompok potensial/ klub olahraga masyarakat		☐
2). Pelatihan instruktur kesehatan olahraga		☐
3). Pemeriksaan kesegaran jasmani anak sekolah		☐

b. Petugas dan Pelatihan	
1). Jumlah petugas yang melaksanakan program kesehatan olahraga tahun 2010	☐☐
2). Jumlah petugas yang ikut pelatihan kesehatan olahraga tahun 2009 dan 2010	☐☐

c. Pedoman dan Pencatatan	1. Ada	2. Tidak ada
1) Apakah ada pedoman kesehatan olahraga?		☐
2). Apakah ada pencatatan kegiatan kesehatan olahraga pada tahun 2010?		☐

d. Monitoring dan Bimbingan Teknis (tahun 2010)	1. Ya	2. Tidak
1). Apakah ada bimbingan teknis program kesehatan olahraga dari Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010?		☐
2). Apakah ada umpan balik dari Dinas Kesehatan Kab/Kota terhadap laporan kegiatan kesehatan olahraga tahun 2010		☐
3). Apakah pada tahun 2010 pernah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program kesehatan olahraga ?		☐

e.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1) Jumlah instruktur olahraga yang dilatih		☐☐			
2a).Jumlah kelompok potensial (kelompok senam ibu hamil, kelompok jantung sehat, kelompok penderita asma, dan sebagainya)	☐☐☐☐	☐☐	2b).Jumlah kelompok potensial (kelompok senam ibu hamil, kelompok jantung sehat, kelompok penderita asma, dan sebagainya)yang dibina	☐☐☐☐	☐☐
3a). Jumlah anak SLTP dan SMU	☐☐☐☐	☐☐	3b). Jumlah anak SLTP dan SMU yang diperiksa kesegaran jasmani	☐☐☐☐	☐☐
4a). Jumlah SLTP dan SMU	☐☐☐	☐☐	4b). Jumlah SLTP dan SMU yang melakukan tes kesegaran jasmani	☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

12. PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS)

a. Kegiatan (tahun 2010)	1. Ada	2. Tidak ada
1).Konsultasi keperawatan di dalam gedung Puskesmas		☐
2). Kunjungan rumah kepada keluarga rawan kesehatan		☐
3). Kunjungan dan pembinaan kepada kelompok risiko tinggi		☐
4). Kunjungan dan pembinaan kepada masyarakat rentan kesehatan		☐

b. Petugas dan Pelatihan	
1). Jumlah petugas yang melaksanakan Perkesmas tahun 2010?	☐☐
2). Jumlah petugas yang pernah mengikuti pelatihan Perkesmas tahun 2009 dan 2010?	☐☐

c. Pedoman dan Pencatatan	1. Ada	2. Tidak ada
1). Apakah ada Pedoman Perkesmas ?		☐
2). Apakah ada pencatatan kegiatan Perkesmas pada tahun 2010?		☐

d. Monitoring dan Bimbingan Teknis (tahun 2010)	1. Ya	2. Tidak
1). Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program Perkesmas pada tahun 2010?		☐
2). Apakah ada umpan balik laporan cakupan program Perkesmas selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota?		☐
3). Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program Program Perkesmas ?		☐

e.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a) Jumlah keluarga rawan kesehatan	☐☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah keluarga rawan kesehatan yang dikunjungi/ dibina	☐☐☐☐☐	☐☐
			1c). Jumlah keluarga rawan kesehatan yang mandiri	☐☐☐☐☐	☐☐
2a) Jumlah kelompok risiko tinggi	☐☐☐	☐☐	2b) Jumlah kelompok risiko tinggi yang dibina	☐☐☐	☐☐
3a) Jumlah masyarakat rentan kesehatan	☐☐☐	☐☐	3b) Jumlah masyarakat rentan kesehatan yang dibina	☐☐☐	☐☐

Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:						Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			
Nama Responden:			Jabatan:				No.HP:		

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

13. PROGRAM KESEHATAN KERJA

a. Kegiatan (tahun 2010)	1. Ada	2. Tidak ada
1). Kunjungan/ Pemeriksaan ke tempat kerja		☐
2). Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)		☐
b. Petugas dan Pelatihan		
1). Jumlah petugas yang melaksanakan Program Kesehatan Kerja pada tahun 2010?		☐☐
2). Jumlah petugas yang pernah mengikuti pelatihan Kesehatan Kerja pada tahun 2009 dan 2010?		☐☐
c. Pedoman dan Pencatatan	1. Ada	2. Tidak ada
1). Apakah ada Pedoman Pos Upaya Kesehatan Kerja?		☐
2). Apakah ada pencatatan kegiatan program kesehatan kerja pada tahun 2010?		☐
d. Monitoring dan Bimbingan Teknis (tahun 2010)	1. Ya	2. Tidak
1). Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program kesehatan kerja pada tahun 2010?		☐
2). Apakah ada umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota?		☐
3). Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program Kesehatan kerja ?		☐

e.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah seluruh pekerja formal di wilayah puskesmas	☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan kerja	☐☐☐	☐☐
2a). Jumlah seluruh industri/perusahaan di wilayah kerja puskesmas	☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah industri/perusahaan dengan Pos UKK	☐☐☐	☐☐
			2c). Jumlah Pos UKK yang berfungsi baik	☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

14. UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT

a. Kegiatan (tahun 2010)

	Kegiatan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Frekuensi : 1. Setiap hari kerja 2. Seminggu 2-4 kali 3. Seminggu sekali 4. Sebulan 1-3 kali 5. Tidak Menentu	
	(1)	(2)	(3)	
	1) Apakah ada pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam puskesmas	☐	Bila ada, berapa frekuensinya	☐
	2) Apakah ada Kegiatan UKGS ?	☐	Bila ada, berapa frekuensinya	☐
	3) Apakah ada Kegiatan UKGMD ?	☐	Bila ada, berapa frekuensinya	☐

b. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas tahun 2009 dan 2010

	Jenis pelatihan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Dokter gigi	Perawat gigi	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1) Pelatihan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	☐	☐	☐	☐
	2) UKGS	☐	☐	☐	☐
	3) UKGMD	☐	☐	☐	☐

c. Pedoman

	Pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3→ baris berikutnya	Tahun Pencetakan
	(1)	(2)	(3)
	1) Pedoman pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	☐	☐☐☐☐
	2) Pedoman upaya kesehatan gigi dan mulut di sekolah	☐	☐☐☐☐
	3) Pedoman upaya kesehatan gigi dan mulut di masyarakat	☐	☐☐☐☐

d. Pencatatan (tahun 2010) 1. Ada, lengkap 2. Ada, tidak lengkap 3. Tidak ada

	1) Apakah dilakukan pencatatan register Poliklinik Gigi	☐
	2) Apakah ada pencatatan rujukan?	☐

e. Pengawasan, Evaluasi dan bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota (tahun 2010)

	1) Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program pelayanan gigi dan mulut pada tahun 2010?	1. Ada 2 . Tidak ada	☐
	2) Apakah ada Umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota?	1. Ada 2 . Tidak ada	☐
	3) Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program kesehatan gigi dan mulut di Dinas Kesehatan Kab/Kota?	1. Ada 2 . Tidak ada	☐

f.Output (tahun 2010)			Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
	1a). Jumlah kunjungan rawat jalan gigi tahun 2010	☐☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah kasus gigi yang berlubang	☐☐☐☐☐	☐☐
				1c). Jumlah kasus gigi yang ditambal	☐☐☐☐☐	☐☐
				1d). Jumlah kasus gigi yang dicabut	☐☐☐☐☐	☐☐
	2a). Jumlah sekolah dasar	☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah sekolah dasar dengan UKGS	☐☐☐	☐☐
	3a). Jumlah Desa/RW	☐☐☐	☐☐	3b). Jumlah Desa/RW dengan UKGMD	☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

15. UPAYA KESEHATAN JIWA

a. Kegiatan (tahun 2010)	1. Ada	2. Tidak ada
1) Pemberdayaan masyarakat untuk penemuan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial		☐
2) Penemuan dan penanganan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial		☐
3) Rujukan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial ke RS		☐
4) Konseling masalah psikososial kenakalan remaja, problem rumahtangga, keluarga, dll.		☐
5) Pembinaan kesehatan jiwa ke sekolah oleh Puskesmas		☐

b. Petugas dan Pelatihan	
1). Jumlah petugas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa tahun 2010	☐☐
2). Jumlah petugas yang pernah mengikuti pelatihan Upaya Kesehatan Jiwa tahun 2009 dan 2010	☐☐

c. Pedoman dan Pencatatan	1. Ada	2. Tidak ada
1). Apakah ada Pedoman Upaya Kesehatan Jiwa?		☐
2). Apakah ada pencatatan kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa pada tahun 2010?		☐

d. Monitoring dan Bimbingan Teknis (tahun 2010)	1. Ya	2. Tidak
1). Apakah ada kunjungan petugas Dinas kesehatan untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program upaya kesehatan jiwa pada tahun 2010?		☐
2). Apakah ada umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kabupaten?		☐
3). Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program upaya kesehatan jiwa?		☐

e.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah kader kesehatan	☐☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah kader kesehatan yang diberikan pelatihan penemuan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial	☐☐☐☐☐	☐☐
2a). Jumlah kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial yang ditemukan oleh kader	☐☐☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial yang ditemukan oleh kader dan dirujuk ke puskesmas	☐☐☐☐☐	☐☐
3a). Jumlah pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial di puskesmas	☐☐☐☐☐	☐☐	3b). Jumlah pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial yang dirujuk ke rumah sakit	☐☐☐☐☐	☐☐

			Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
	4a). Jumlah Sekolah Dasar di wilayah puskesmas	☐☐☐☐☐	☐☐	4b). Jumlah Sekolah Dasar yang dibina oleh puskesmas mengenai kesehatan jiwa	☐☐☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:	Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

16. UPAYA KESEHATAN MATA

a. Kegiatan (tahun 2010)	1. Ada	2. Tidak ada
1) Kegiatan penjaringan gangguan penglihatan pada anak sekolah		☐
2) Kegiatan penyuluhan kesehatan mata kepada kelompok masyarakat		☐
3) Kegiatan deteksi dini penyakit glaucoma dan katarak pada usia > 45 tahun		☐
4) Kegiatan rujukan kasus gangguan penglihatan		☐

b. Petugas dan Pelatihan	
1). Jumlah petugas yang melaksanakan Upaya Kesehatan mata tahun 2010	☐☐
2). Jumlah petugas yang pernah mengikuti pelatihan Upaya Kesehatan mata tahun 2009 dan 2010	☐☐

c. Pedoman dan Pencatatan	1. Ada	2. Tidak ada
1). Apakah ada Pedoman Upaya Kesehatan mata?		☐
2). Apakah ada pencatatan kegiatan upaya kesehatan mata pada tahun 2010?		☐

d. Monitoring dan Bimbingan Teknis (tahun 2010)	1. Ya	2. Tidak
1). Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program upaya kesehatan mata pada tahun 2010?		☐
2). Apakah ada umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota?		☐
3). Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program upaya kesehatan mata?		☐

e.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah anak sekolah dasar di wilayah kerja puskesmas	☐☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah anak sekolah dasar yang diperiksa	☐☐☐☐☐	☐☐
			1c). Jumlah gangguan penglihatan pada anak sekolah dasar	☐☐☐☐☐	☐☐
2a). Jumlah penduduk wilayah puskesmas	☐☐☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah kelompok masyarakat yang diberi penyuluhan kesehatan mata	☐☐☐☐☐	☐☐
3a). Jumlah penduduk usia > 45 tahun	☐☐☐☐☐	☐☐	3b). Jumlah penemuan kasus glaucoma dan katarak pada usia > 45 tahun	☐☐☐☐☐	☐☐
4a). Jumlah kasus gangguan penglihatan	☐☐☐☐☐	☐☐	4b). Jumlah kasus gangguan penglihatan yang dirujuk	☐☐☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

17. UPAYA KESEHATAN USIA LANJUT

a. Kegiatan (tahun 2010)	1. Ada	2. Tidak ada
1) Kegiatan promotif penyuluhan tentang perilaku hidup sehat dan gizi lanjut usia		☐
2) Kegiatan deteksi dini dan pemantauan kesehatan lanjut usia		☐
3) Kegiatan pengobatan ringan bagi lanjut usia		☐
4) Kegiatan rehabilitatif berupa upaya medis, psikososial, dan edukatif		☐

b. Petugas dan Pelatihan	
1). Jumlah petugas yang melaksanakan Upaya Kesehatan usia lanjut tahun 2010	☐☐
2). Jumlah petugas yang pernah mengikuti pelatihan Upaya Kesehatan usia lanjut tahun 2009 dan 2010	☐☐

c. Pedoman dan Pencatatan	1. Ada	2. Tidak ada
1). Apakah ada Pedoman Upaya Kesehatan usia lanjut?		☐
2). Apakah ada pencatatan kegiatan upaya kesehatan usia lanjut pada tahun 2010?		☐

d. Monitoring dan Bimbingan Teknis (tahun 2010)	1. Ya	2. Tidak
1). Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program upaya kesehatan usia lanjut pada tahun 2010?		☐
2). Apakah ada umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota?		☐
3). Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program upaya kesehatan usia lanjut?		☐

e.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah kelompok usia lanjut	☐☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah kelompok usia lanjut yang diberi penyuluhan dan dibina	☐☐☐☐☐	☐☐
2a). Jumlah usia lanjut diwilayah kerja puskesmas	☐☐☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah usia lanjut yang dideteksi dini	☐☐☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM

Nama Puskesmas:	Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

18. UPAYA PEMBINAAN PENGOBATAN TRADISIONAL

a. Kegiatan (tahun 2010)	1. Ada	2. Tidak ada
1) Pembinaan taman obat keluarga		☐
2) Pembinaan pengobat tradisional		☐
3) Pelayanan akupuntur di puskesmas		☐
4) Pelayanan "djamoe" di puskesmas		☐

b. Petugas dan Pelatihan	
1). Jumlah petugas yang melaksanakan Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional tahun 2010	☐☐
2). Jumlah petugas yang pernah mengikuti pelatihan Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional tahun 2009 dan 2010	☐☐

c. Pedoman dan Pencatatan	1. Ada	2. Tidak ada
1). Apakah ada Pedoman Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional?		☐
2). Apakah ada pencatatan kegiatan upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional pada tahun 2010?		☐

d. Monitoring dan Bimbingan Teknis (tahun 2010)	1. Ya	2. Tidak
1). Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional pada tahun 2010?		☐
2). Apakah ada umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota?		☐
3). Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional?		☐

e.Output (tahun 2010)			Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah seluruh Taman Obat Keluarga (TOGA)	☐☐☐☐		☐☐	1b). Jumlah TOGA yang dibina	☐☐☐☐	☐☐
2a). Jumlah seluruh pengobat tradisional	☐☐☐☐		☐☐	2b). Jumlah pengobat tradisional yang dibina	☐☐☐☐	☐☐

Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:						Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			
Nama Responden:			Jabatan:				No.HP:		

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

19. UPAYA KESEHATAN HAJI

a. Kegiatan (tahun 2011)	1. Ada	2. Tidak ada
1). Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji?		☐
2). Pembinaan kebugaran calon jemaah haji?		☐
3). Pemantauan kesehatan jemaah haji yang kembali? (pulang haji)		☐

b. Petugas dan Pelatihan		
1). Jumlah petugas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Haji pada tahun 2011?		☐☐
2). Jumlah petugas yang pernah mengikuti pelatihan Upaya Kesehatan Haji tahun 2009 dan 2010?		☐☐

c. Pedoman dan Pencatatan	1. Ada	2. Tidak ada
1). Apakah ada Pedoman Upaya Kesehatan Haji?		☐
2). Apakah ada pencatatan kegiatan upaya kesehatan Haji pada tahun 2011?		☐

d. Monitoring dan Bimbingan Teknis	1. Ya	2. Tidak
1). Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program upaya kesehatan haji pada tahun 2010?		☐
2). Apakah ada umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota?		☐
3). Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program upaya kesehatan haji ?		☐

e.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah calon jemaah haji yang diperiksa kesehatannya	☐☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah calon jemaah haji risiko tinggi	☐☐☐☐☐	☐☐
			1c). Jumlah calon jemaah haji risiko tinggi yg dibina	☐☐☐☐☐	☐☐
2a). Jumlah Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH) paska haji yg kembali	☐☐☐☐☐	☐☐	2b). Jumlah jemaah haji yang dipantau	☐☐☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:	Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

20. PELAYANAN LABORATORIUM

a. Pelayanan Laboratorium (tahun 2010)

Apakah ada pemeriksaan : Isikan dengan : 1. Ada 2. Tidak ada

1)	Darah rutin	☐	1) Kolesterol	☐	7) Sputum	☐
2)	Urine rutin	☐	2) Feses	☐	8) Lainnya, ……	☐
3)	Kadar gula darah	☐	3) Darah Malaria	☐		

b. Jumlah petugas yang melaksanakan program pelayanan laboratorium (tahun 2010)

Jumlah total petugas	Analis	Perawat	Bidan	Dokter	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
☐☐	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐

c. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas tahun 2009 dan 2010

	Jenis Pelatihan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Analis	Perawat	Bidan	Dokter	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1)	Tata laksana laboratorium	☐	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
2)	Pelatihan Mikroskopis Malaria	☐	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
3)	Pelatihan Mikroskopis TB	☐	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐

d. Pedoman

1). Buku Pedoman Laboratorium	1.Ada, 2.Tidak ada → e	☐	2). Tahun pencetakan	☐☐☐☐	

e. Pencatatan (tahun 2010) 1. Ada, lengkap 2. Ada,tidak lengkap 3. Tidak ada

a.	Apakah ada pencatatan registrasi pelayanan laboratorium?	☐
b.	Apakah ada pencatatan rujukan mikroskopis?	☐

f. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota (tahun 2010)

1)	Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis pelayanan laboratorium pada tahun 2010?	1.Ada, 2.Tidak ada	☐
2)	Apakah ada Umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota?	1.Ada, 2.Tidak ada	☐
3)	Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi pelayanan laboratorium di Dinas Kesehatan Kab/Kota?	1. Ada 2.Tidak ada	☐

g.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah pasien yang mendapat pelayanan laboratorium	☐☐☐☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah pemeriksaan darah trombosit tersangka DBD	☐☐☐☐	☐☐
			1c). Jumlah pemeriksaan darah malaria	☐☐☐☐	☐☐

			Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
				1d). Jumlah pemeriksaan sputum TB	☐☐☐☐	☐☐
				1e). Jumlah kasus rujukan ke laboratorium lain	☐☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

21. PELAYANAN FARMASI

a. Jumlah petugas yang melaksanakan program pelayanan farmasi (tahun 2011)

Jumlah total petugas	Apoteker	S1 Farmasi	D3 Farmasi	Asisten Apoteker	Perawat	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
☐☐	☐	☐	☐	☐	☐☐	☐

b. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas tahun 2009 dan 2010

	Jenis Pelatihan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Apoteker	S1 Farmasi	D3 Farmasi	Asisten Apoteker	Perawat	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1) Pelayanan obat	☐	☐	☐	☐	☐	☐☐	☐
	2) Pengelolaan obat	☐	☐	☐	☐	☐	☐☐	☐

c. Pedoman

	Pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3→ baris berikutnya	Tahun Pencetakan
	(1)	(2)	(3)
	1) Pedoman pelayanan kefarmasian di puskesmas	☐	☐☐☐☐
	2) Pedoman pengelolaan obat	☐	☐☐☐☐

d. Pencatatan (tahun 2011) 1. Ada, lengkap 2. Ada,tidak lengkap 3. Tidak ada

	1) Catatan penerimaan obat dan alkes	☐
	2) Catatan pemakaian obat dan alkes	☐
	3) Catatan resep yang dilayani (umum, askes, gakin, dll.)	☐

e. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota (tahun 2010)

	4) Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis pelayanan farmasi pada tahun 2010?	1.Ada, 2.Tidak ada	☐
	5) Apakah ada Umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota?	1.Ada, 2.Tidak ada	☐
	6) Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program farmasi di Dinas Kesehatan Kab/Kota?	1.Ada, 2.Tidak ada	☐

f.Output (tahun 2011)

	1a). Jumlah resep pasien yang dilayani pada sebulan terakhir sebelum survei	☐☐☐☐	1b). Jumlah resep tidak lebih dari 3 jenis obat pada sebulan terakhir sebelum survei	☐☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

VIII. PELAYANAN KESEHATAN

22. PUSKESMAS KELILING (PUSLING)

a.Pelayanan (tahun 2010)

1	Apakah Puskesmas mempunyai Kegiatan Puskesmas Keliling (Pusling) ?	1. Ya 2. Tidak → VIII.23	☐
2	Jika ya, berapa kali frekuensi kegiatan Pusling selama tahun 2011?	1. > 1 kali dalam sebulan 2. Sebulan sekali 3. Dua bulan sekali 4. Tiga bulan sekali 5. Tidak tentu	☐

3	Jenis Pelayanan apa saja yang dilakukan pada Pusling :	Isikan dengan : 1. Ya 2. Tidak			
	a) Pelayanan pengobatan	☐	d) Pelayanan imunisasi	☐	
	b) Pelayanan KIA	☐	e) Penyuluhan/ Konseling	☐	
	c) Pelayanan KB	☐	f) Lainnya	☐	

b.Tenaga Puskesmas yang terlibat dalam Pusling (tahun 2010)

	Jumlah total petugas	dr	drg	Perawat	bidan	kesling	gizi	kesmas	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	☐☐	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐

c. Pencatatan (tahun 2010) 1. Ada 2. Tidak ada

	1). Apakah ada pencatatan terpisah untuk kegiatan puskesmas keliling?	☐

d.Bimbingan Teknis dan Evaluasi (tahun 2010)

		1.Ada 2.Tidak ada → baris berikutnya	Jumlah dalam tahun 2010
	1) Apakah ada bimbingan Teknis dari Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam kegiatan Pusling?	☐	☐☐
	2) Apakah ada evaluasi pertemuan untuk membahas cakupan Pusling di Dinas Kesehatan Kab/Kota?	☐	☐☐

e.Output (tahun 2010)		Jumlah Bulan Laporan			Jumlah Bulan Laporan
1a). Jumlah desa/kelurahan/RW di wilayah kerja puskesmas	☐☐☐	☐☐	1b). Jumlah desa/ kelurahan/RW yang dilayani dengan kegiatan Pusling	☐☐☐	☐☐
2). Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Pusling				☐☐☐☐☐	☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

23. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA		
a. Kegiatan (tahun 2010)		
1). Apakah di wilayah kerja, ada desa/ kelurahan rawan bencana? 1.Ada 2.Tidak ada → 3)		☐
2). Bila ada, jumlah desa/ kelurahan rawan bencana : ……		☐☐
3). Apakah ada program tanggap darurat yang dilaksanakan Puskesmas? 1.Ada 2.Tidak ada → Blok IX		☐
4). Kegiatan tanggap darurat bencana	1. Ada	2. Tidak
a). Pelatihan Tanggap Darurat kepada masyarakat		☐
b). Surveilans		☐
c). Menyediakan posko pelayanan kesehatan		☐
d). Penyediaan pelayanan obat		☐
e). Pengawasan makanan dan minuman		☐
b. Petugas dan Pelatihan		
1). Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana tahun 2010		☐☐
2). Jumlah petugas yang pernah mengikuti pelatihan kedaruratan medik tahun 2009 dan 2010		☐☐
c. Pedoman dan Pencatatan	1. Ada	2. Tidak ada
1). Apakah ada Pedoman Tanggap darurat bencana?		☐
2). Apakah ada pencatatan kegiatan tanggap darurat bencana pada tahun 2010 ?		☐
d. Monitoring dan Bimbingan teknis (tahun 2010)	1. Ya	2. Tidak
1). Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program tanggap darurat bencana pada tahun 2010?		☐
2). Apakah ada umpan balik dari Dinas Kesehatan Kab/Kota terhadap laporan cakupan selama setahun terakhir (2010)?		☐
3). Apakah Puskesmas pernah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program tanggap darurat bencana di Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tahun 2010?		☐

e. Output (tahun 2010)			
1a). Jumlah desa/kelurahan/RW yang rawan bencana	☐☐☐	1b) Jumlah desa/kelurahan/RW yang siaga bencana	☐☐☐
2a). Jumlah kelompok masyarakat di wilayah kerja puskesmas	☐☐☐	2b). Jumlah kelompok masyarakat yang menerima pelatihan siaga bencana	☐☐☐
3a). Jumlah penduduk yang berada di wilayah rawan bencana	☐☐☐☐☐☐		

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

IX. PELAYANAN RAWAT INAP (DITANYAKAN KHUSUS PADA PUSKESMAS PERAWATAN)

A. FASILITAS FISIK

	Jenis Ruangan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Jumlah tempat tidur	Berfungsi: 1.Ya 2.Tidak	Ventilasi: 1. Ada, cukup 2. Ada, tidak cukup 3. Tidak ada	Tempat Cuci Tangan: 1. Ada 2. Tidak Ada	Kebersihan: 1.Bersih 2. Tidak bersih
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1. Perawatan pasien umum	☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
	2. Perawatan Pasca Persalinan (Nifas)	☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
	3. Perawatan bayi sakit	☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
`	4. Perawatan anak	☐	☐☐	☐	☐	☐	☐
	5. Ruang petugas jaga	☐		☐	☐	☐	☐
	6. Dapur	☐		☐	☐	☐	☐
	7. Lainnya.....	☐		☐	☐	☐	☐

B. PELAYANAN RAWAT INAP

1. Jenis pelayanan (tahun 2010) — 1. Ada 2. Tidak ada

a.	Pelayanan/ asuhan keperawatan di ruang rawat inap	☐
b.	Melakukan kegiatan Home care (tindak lanjut pasien pasca rawat inap)	☐
c.	Tatalaksana kasus balita gizi buruk	☐
d.	Tatalaksana kasus neonatal dengan komplikasi	☐

2.Tenaga Puskesmas yang terlibat dalam Rawat Inap yang melaksanakan pelayanan sesuai IX.B.1 (Tahun 2010)

Jumlah total petugas	Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Gizi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
☐☐	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐

3. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas tahun 2009 dan 2010

	Jenis Pelatihan	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Jumlah tenaga yang ikut pelatihan				
			Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Gizi	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Penatalaksanaan Puskesmas perawatan	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐
	b. Tata laksana kasus balita gizi buruk	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐
	c. Tatalaksana kasus neonatal dengan komplikasi	☐	☐	☐☐	☐☐	☐	☐

4. Pedoman

	Pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3→ baris berikutnya	Tahun Pencetakan
	(1)	(2)	(3)
	a. Pedoman Asuhan Keperawatan	☐	☐☐☐☐
	b. Pedoman *home care*	☐	☐☐☐☐

5. Pencatatan (tahun 2010) 1. Ada 2.Tidak ada

	a. Apakah ada pencatatan rawat inap?	☐
	b. Apakah ada pencatatan kegiatan *home care*?	☐

6. Pengawasan, Evaluasi dan bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota (tahun 2010)

	a. Apakah ada kunjungan petugas Dinas Kesehatan kab/Kota untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis pelayanan rawat inap Puskesmas pada tahun 2010?	1 ya 2 Tidak → c	☐
	b. Jika ada, berapa kali?	..... kali	☐☐
	c. Apakah ada Umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2010) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota?	1.Ada, 2.Tidak ada → e	☐
	d. Bila ada, frekuensi umpanbalik ?	1. Setiap bulan 4. Setahun sekali 2. Setiap tiga bulan 5. Tidak tentu 3. Setiap 6 bulan	☐
	e. Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program rawat inap Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab/Kota?	1 Ada 2 . Tidak ada → 7	☐
	f. Jika ada, berapa kali?	..... kali	☐☐

7. Output (tahun 2010)

	1a) Jumlah pasien yang dirawat di Puskesmas selama tahun 2010	☐☐☐☐	1b) Jumlah pasien dari keluarga miskin yang dirawat di Puskesmas tahun 2010	☐☐☐☐
			1c) Jumlah pasien yang dilakukan kunjungan rumah pasca rawat inap (*follow up care*)	☐☐☐☐
	2) *Bed Occupancy Rate* (BOR) Puskesmas perawatan			☐☐☐,☐
	3) Hari rawat rata-rata atau *Average Length of Stay* (ALOS) Puskesmas perawatan (hari)			☐☐

C.Pelayanan PONED (ditanyakan pada puskesmas dengan PONED)

1. Pelayanan (tahun 2010)

	a. Apakah puskesmas memberikan pelayanan emergensi kebidanan dan neonatal dasar (PONED) 24 jam? 1.Ya 2. Tidak	☐
	b. Berapa menit waktu tempuh dari Puskesmas Non PONED terjauh dalam jejaring ke Puskesmas ini ?	☐☐☐
	c. Berapa menit waktu tempuh dari Puskesmas ini ke RS PONEK ?	☐☐☐

2.Tenaga Puskesmas yang terlibat dalam PONED (tahun 2010)

	Jumlah total petugas	Dokter	Bidan	Perawat	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	☐☐	☐	☐☐	☐☐	☐☐

3. Pelatihan yang Diikuti oleh Tenaga/ Petugas Puskesmas tahun 2009 dan 2010

	Jenis Pelatihan	1. Ada 2. Tidak ada → 4	Dokter	Bidan	Perawat	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Petugas yang sudah menerima pelatihan PONED	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

4. Pedoman			
	Pedoman	1. Ada buku pedoman 2. Ada materi pelatihan 3. Tidak ada sama sekali Jawaban 2 atau 3→ baris berikutnya	Tahun Pencetakan
	(1)	(2)	(3)
	a. Pedoman Pelayanan PONED	☐	☐☐☐☐

5. Pencatatan (tahun 2010)		1. Ada 2.Tidak ada
	a. Apakah ada register PONED?	☐
	b. Apakah ada pencatatan Asuhan kebidanan?	☐

6. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota (tahun 2010)			
	a. Apakah ada kunjungan petugas dinas kesehatan untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis pelayanan PONED pada tahun 2010 (fasilitatif)?	1 Ya 2 Tidak → c	☐
	b. Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐
	c. Apakah pada tahun 2010 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program PONED di dinas kesehatan?	1 Ada 2 . Tidak ada → 7	☐
	d. Jika ada berapa kali?	..... kali	☐☐

7. Output (tahun 2010)		
	a. Jumlah tindakan kuret yang dilakukan selama tahun 2010 di puskesmas	☐☐☐☐
	b. Jumlah tindakan plasenta manual yang dilakukan selama tahun 2010 di puskesmas	☐☐☐☐
	c. Jumlah tindakan vakum ekstraksi yang dilakukan selama tahun 2010 di puskesmas	☐☐☐☐
	d. Jumlah tindakan resusitasi bayi yang dilakukan selama tahun 2010 di puskesmas	☐☐☐☐
	e. Jumlah tindakan pemberian Magnesium Sulfat (MgSO4) yang dilakukan selama tahun 2010 di puskesmas	☐☐☐☐
	f. Jumlah kasus rujukan obstetri emergensi yang di rujuk tahun 2010	☐☐☐☐
	g. Jumlah kasus rujukan neonatal emergensi yang di rujuk tahun 2010	☐☐☐☐
	h. Jumlah rujukan obstetri yang diterima puskesmas ini tahun 2010	☐☐☐☐
	i. Jumlah rujukan neonatal yang diterima puskesmas ini tahun 2010	☐☐☐☐
	j. Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelayanan PONED tahun 2010	☐☐☐☐
	k. Jumlah kasus obstetri emergensi yang meninggal di puskesmas ini tahun 2010	☐☐☐☐
	l. Jumlah kasus neonatal emergensi yang meninggal di puskesmas ini tahun 2010	☐☐☐☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:	Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

X. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Sumberdaya tenaga

a. Apakah ada petugas Puskesmas yang secara khusus menangani bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan? 1. Ada 2. Tidak ada→2 ☐

b. Jumlah petugas ……. Orang ☐☐

2. Pelatihan tahun 2009 dan 2010

a. Apakah ada petugas Puskesmas yg telah mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ? 1.Ada 2. Tidak ada→3 ☐

b. Jumlah petugas ……. Orang ☐☐

3. Apakah ada pedoman pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ? 1. Ada 2. Tidak ada ☐

4. Apakah ada SOP/ Protap pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ? 1.Ada 2. Tidak ada ☐

5. Peraturan tertulis bidang pemberdayaan masyarakat

a. Apakah ada peraturan tertulis yang dibuat terkait dengan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan? 1. Ada 2. Tidak ada→6 ☐

b. Apabila ada, peraturan tersebut berupa : 1. Keputusan Pemda 2. Keputusan Kepala Puskesmas 3. Surat Edaran ☐

6.Alokasi dana pemberdayaan masyarakat

a. Apakah ada alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan? 1. Ada 2. Tidak ada →7 ☐

b. Apabila ada, berapa persen dana yang dialokasikan tersebut berasal dari dana operasional Puskesmas? ☐☐

7.Apakah ada forum masyarakat sebagai wadah peran serta masyarakat di bidang kesehatan ? 1. Ada 2. Tidak ada→ 9 ☐

8.Apabila ada, bentuk forum tersebut berupa : 1. Ya 2. Tidak

a. BPP	☐	b. Forum Kecamatan Sehat	☐	c. Lainnya	☐

9. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat : Isikan dengan : 1. Ya 2.Tidak

a. Pertemuan tingkat desa	☐	f. Pelatihan kader lama (refreshing)	☐
b. Survei Mawas Diri	☐	g. Pelatihan bagi tokoh masyarakat	☐
c. Musyawarah Masyarakat Desa	☐	h. Pelatihan bagi LSM / Ormas	☐
d. Pelatihan kader kesehatan baru	☐	i. Pertemuan lintas sektor terkait	☐
e. Pertemuan kader kesehatan	☐		

10. Pembinaan dan pemantauan kegiatan UKBM : Isikan dengan : 1. Ya 2.Tidak

a. Memberi umpan balik laporan kegiatan	☐	c. Melakukan pertemuan pembinaan	☐
b. Melakukan supervisi kegiatan	☐		

B. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)				
1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)			1. Ada 2. Tidak ada → 2	☐
	a. Jumlah Posyandu	☐☐	e. Jumlah Posyandu Purnama	☐☐
	b. Jumlah Posyandu memiliki bangunan sendiri	☐☐	f. Jumlah Posyandu Mandiri	☐☐
	c. Jumlah Posyandu Pratama	☐☐	g. Jumlah Posyandu yang memiliki peralatan	☐☐
	d. Jumlah Posyandu Madya	☐☐		
2. Pos Pelayanan Terpadu bagi Lanjut Usia (Posyandu Lansia)			1. Ada 2. Tidak ada → 3	☐
	a. Jumlah Posyandu Lansia	☐☐	c. Jumlah Posyandu Lansia yang memiliki peralatan	☐☐
	b. Jumlah Posyandu Lansia yang memiliki bangunan sendiri	☐☐		
3. Pos Obat Desa (POD) / Warung Obat Desa (WOD)			1. Ada 2. Tidak ada → 4	☐
	a. Jumlah POD/WOD	☐☐	c. Jumlah POD/WOD yang memiliki peralatan	☐☐
	b. Jumlah POD/WOD yang memiliki bangunan sendiri	☐☐		
4. Saka Bakti Husada (SBH)			1. Ada 2. Tidak ada → 5	☐
	a. Jumlah kelompok SBH	☐☐	c. Jumlah kader SBH yang dilatih	☐☐☐
	b. Jumlah kelompok SBH yang dibina	☐☐		
5. Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)			1. Ada 2. Tidak ada → 6	☐
	a. Jumlah Pondok Pesantren	☐☐	c. Jumlah Poskestren yang dibina	☐☐
	b. Jumlah Poskestren	☐☐	d. Jumlah kader Poskestren yang dilatih	☐☐☐
6. Dana Sehat				
	a. Apakah ada kelompok Dana Sehat ?		1. Ada 2. Tidak ada → 7	☐
	b. Berapa jumlah kelompok Dana Sehat ?			☐☐
7. Apakah ada kelompok-kelompok peduli (Peduli Lansia, Peduli HIV-AIDS, dan lain-lain) : Isikan dengan				1. Ya 2. Tidak
a. Peduli Lansia	☐	c. Peduli TB Paru		☐
b. Peduli HIV-AIDS	☐	d. Lainnya		☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

XI. PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PENGGERAK PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN			
A. Tenaga			
	1. Apakah ada petugas Puskesmas yang menangani kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan ? 1.Ada 2. Tidak ada→ 3		☐
	2. Jika ada, berapa jumlah petugas?	..... orang	☐☐
	3. Apakah ada petugas Puskesmas yg telah ikut pelatihan pembangunan berwawasan kesehatan pada tahun 2009 dan 2010 ? 1.Ada 2. Tidak ada→B		☐
	4. Jika ada, berapa jumlah petugas?	..... orang	☐☐
B. Pedoman dan SOP			
	1. Apakah ada pedoman pembangunan berwawasan kesehatan? 1. Ada 2. Tidak ada		☐
	2. Apakah ada SOP/ Protap pelaksanaan kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan ? 1. Ada 2. Tidak ada		☐
C. Peraturan Tertulis			
	1. Apakah ada peraturan tertulis yang dibuat terkait dengan pembangunan berwawasan kesehatan? 1. Ada 2. Tidak ada→D		☐
	2. Apabila ada, peraturan tersebut berupa : 1. Keputusan Pemda 2. Keputusan Kepala Puskesmas 3. Surat Edaran		☐
D. Dana dan data			
	1. Apakah ada alokasi dana khusus untuk kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan? 1. Ada 2. Tidak ada		☐
	2. Apakah ada data sasaran kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan? 1. Ada 2. Tidak ada		☐
E. Kegiatan dalam rangka mewujdukan pembangunan berwawasan kesehatan			
	1. Apakah Puskesmas melakukan advokasi kesehatan kepada lintas sektor? 1.Ya 2.Tidak		☐
	2. Apakah Puskesmas mengadakan pertemuan membahas kesehatan dengan lintas sektor? 1.Ya 2.Tidak		☐
	3. Apakah Puskesmas melakukan kemitraan bidang kesehatan dengan sektor lain ? 1.Ya 2.Tidak → XII		☐
	4. Apabila dilakukan kemitraan, apakah dilakukan kegiatan :		
	a. Merencanakan kegiatan bersama dengan lintas sektor ? 1. Ya 2. Tidak		☐
	b. Melakukan kegiatan bersama dengan lintas sektor ? 1. Ya 2. Tidak		☐
	c. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan lintas sektor ? 1. Ya 2. Tidak		☐

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	No. Urut PKM
Nama Puskesmas:		Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

XII. PUSTU DAN BIDAN DESA				
A.	Puskesmas Pembantu (Pustu)		1. Ada 2. Tidak ada→ B	☐
	1. Jumlah Puskesmas pembantu (Pustu)		…….. buah	☐☐
	2. Jumlah Pustu dengan petugas menetap di Pustu		…….. buah	☐☐
	3. Kondisi bangunan Pustu			
	a. Jumlah yang Baik	☐☐	c. Jumlah yang Rusak sedang	☐☐
	b. Jumlah yang Rusak ringan	☐☐	d. Jumlah yang Rusak berat	☐☐
	4. Apakah ada bimbingan teknis ke pustu pada tahun 2010?		1. Ada 2. Tidak ada→ B	☐
	5. Jika ya, berapa kali?		…….. kali	☐☐
B.	Bidan di desa		1. Ada 2. Tidak ada→ XIII	☐
	1. Jumlah desa yang memiliki bidan desa			☐☐
	2. Jumlah desa yang bidan desanya bertempat tinggal di desa tersebut			☐☐
	3. Apakah ada bidan yang mendapat tugas sebagai bidan desa lebih dari 1 desa? 1.Ada 2.Tidak ada			☐
	4. Jumlah desa dengan bangunan Polindes			☐☐
	5. Jumlah Polindes berdasarkan sumber dana pembangunan Polindes			
	a. Sumber dana dari Pemerintah			☐☐
	b. Sumber dana dari Swadaya masyarakat			☐☐
	c. Sumber dana dari Pemerintah dan Swadaya masyarakat			☐☐
	6. Jumlah Polindes yang memiliki peralatan (kit Polindes)			☐☐
	7. Jumlah desa dengan bangunan Poskesdes			☐☐
	8. Jumlah Poskesdes berdasarkan sumber dana Poskesdes			
	a. Sumber dana dari Pemerintah			☐☐
	b. Sumber dana dari Swadaya masyarakat			☐☐
	c. Sumber dana dari Pemerintah dan Swadaya masyarakat			☐☐
	9. Jumlah Poskesdes yang memiliki alat kesehatan (kit Poskesdes)			☐☐
	10. Apakah ada bimbingan teknis ke polindes dan poskesdes pada tahun 2010?		1 Ada 2 Tidak Ada→XIII	☐
	11. Jumlah pembinaan		..... kali	☐☐

Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:						Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			
Nama Responden:			Jabatan:				No.HP:		

XIII. JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR			
	Jenis pelayanan kesehatan dasar	Jumlah yang ada	Jumlah yang melapor ke Puskesmas
		(1)	(2)
1	Dokter umum praktek	☐☐	☐☐
2	Dokter gigi praktek	☐☐	☐☐
3	Bidan praktek	☐☐	☐☐
4	Perawat praktek	☐☐	☐☐
5	Dokter praktek bersama	☐☐	☐☐
6	Balai pengobatan	☐☐	☐☐
7	Rumah Bersalin	☐☐	☐☐
8	Balkesmas	☐☐	☐☐
9	Badan *home care*/klinik keperawatan	☐☐	☐☐
10	Apotek	☐☐	☐☐
11	Toko obat	☐☐	☐☐
12	Tempat pengobatan tradisional	☐☐	☐☐

XIV.KUESIONER RUMAH DINAS

RIFASKES-11.PKM.RUDIN

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kel/ Desa	No Urut PKM	Norut Rudin

NAMA PUSKESMAS			
ID PUSKESMAS			
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

1	Bangunan rumah dinas diperuntukan :	1. Kepala Puskesmas 2. Rumah dinas dokter / dokter gigi 3. Rumah dinas staf		☐
2	Pemanfaatan rumah dinas :	1. Dimanfaatkan kepala puskesmas 2. Dimanfaatkan oleh dokter / dokter gigi 3. Dimanfaatkan perawat 4. Dimanfaatkan bidan 5. Dimanfaatkan oleh staf lainnya 6. Tidak dimanfaatkan 7. Lainnya, ...		☐
3	Posisi/letak rumah :	1. Dalam halaman puskesmas 2. Di sekitar puskesmas 3. Jauh dari puskesmas		☐
4	Luas bangunan :	..... m^2		☐☐☐☐
5	Kondisi Bangunan :	1. Baik 2. Rusak ringan 3. Rusak sedang 4. Rusak berat		☐
6	Sumber air bersih utama :	1.PAM 2.Sumur bor 3.Sumur Gali	4.Mata air 5.PAH 6.Lainnya	☐
7	Apakah air bersih tersedia sepanjang tahun?	1. Ya 2. Tidak		☐
8	Sumber penerangan utama yang digunakan:	1. PLN 2. Generator 3.Tenaga matahari/solar cell 4.Listrik swadaya masyarakat		☐

XIV.KUESIONER RUMAH DINAS

RIFASKES-11.PKM.RUDIN

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kel/ Desa	No Urut PKM	Norut Rudin

NAMA PUSKESMAS			
ID PUSKESMAS			
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

1.	Bangunan rumah dinas diperuntukan :	1. Kepala Puskesmas 2. Rumah dinas dokter / dokter gigi 3. Rumah dinas staf		☐
2	Pemanfaatan rumah dinas :	1. Dimanfaatkan kepala puskesmas 2. Dimanfaatkan oleh dokter / dokter gigi 3. Dimanfaatkan perawat 4. Dimanfaatkan bidan 5. Dimanfaatkan oleh staf lainnya 6. Tidak dimanfaatkan 7. Lainnya, ...		☐
3	Posisi/letak rumah :	1. Dalam halaman puskesmas 2. Di sekitar puskesmas 3. Jauh dari puskesmas		☐
4	Luas bangunan :	..... m^2		☐☐☐☐
5	Kondisi Bangunan :	1. Baik 2. Rusak ringan 3. Rusak sedang 4. Rusak berat		☐
6	Sumber air bersih utama :	1.PAM 2.Sumur bor 3.Sumur Gali	4.Mata air 5.PAH 6.Lainnya	☐
7	Apakah air bersih tersedia sepanjang tahun?	2. Ya 2. Tidak		☐
8	Sumber penerangan utama yang digunakan:	1. PLN 2. Generator 3.Tenaga matahari/solar cell 4. Listrik swadaya masyarakat		☐

XIV.KUESIONER RUMAH DINAS

RIFASKES-11.PKM.RUDIN

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kel/ Desa	No Urut PKM	Norut Rudin

NAMA PUSKESMAS			
ID PUSKESMAS			
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

1.	Bangunan rumah dinas diperuntukan :	1. Kepala Puskesmas 2. Rumah dinas dokter / dokter gigi 3. Rumah dinas staf		☐
2	Pemanfaatan rumah dinas :	1. Dimanfaatkan kepala puskesmas 2. Dimanfaatkan oleh dokter / dokter gigi 3. Dimanfaatkan perawat 4. Dimanfaatkan bidan 5. Dimanfaatkan oleh staf lainnya 6. Tidak dimanfaatkan 7. Lainnya, ...		☐
3	Posisi/letak rumah :	1. Dalam halaman puskesmas 2. Di sekitar puskesmas 3. Jauh dari puskesmas		☐
4	Luas bangunan :	..... m^2		☐☐☐☐
5	Kondisi Bangunan :	1. Baik 2. Rusak ringan 3. Rusak sedang 4. Rusak berat		☐
6	Sumber air bersih utama :	1.PAM 2.Sumur bor 3.Sumur Gali	4.Mata air 5.PAH 6.Lainnya	☐
7	Apakah air bersih tersedia sepanjang tahun?	3. Ya 2. Tidak		☐
8	Sumber penerangan utama yang digunakan:	1. PLN 2. Generator 3.Tenaga matahari/solar cell 4.Listrik swadaya masyarakat		☐

XIV.KUESIONER RUMAH DINAS

RIFASKES-11.PKM.RUDIN

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kel/ Desa	No Urut PKM	Norut Rudin

NAMA PUSKESMAS			
ID PUSKESMAS			
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

1.	Bangunan rumah dinas diperuntukan :	1. Kepala Puskesmas 2. Rumah dinas dokter / dokter gigi 3. Rumah dinas staf		☐
2	Pemanfaatan rumah dinas :	1. Dimanfaatkan kepala puskesmas 2. Dimanfaatkan oleh dokter / dokter gigi 3. Dimanfaatkan perawat 4. Dimanfaatkan bidan 5. Dimanfaatkan oleh staf lainnya 6. Tidak dimanfaatkan 7. Lainnya, ...		☐
3	Posisi/letak rumah :	1. Dalam halaman puskesmas 2. Di sekitar puskesmas 3. Jauh dari puskesmas		☐
4	Luas bangunan :	..... m^2		☐☐☐☐
5	Kondisi Bangunan :	1. Baik 2. Rusak ringan 3. Rusak sedang 4. Rusak berat		☐
6	Sumber air bersih utama :	1.PAM 2.Sumur bor 3.Sumur Gali	4.Mata air 5.PAH 6.Lainnya	☐
7	Apakah air bersih tersedia sepanjang tahun?	1. Ya 2. Tidak		☐
8	Sumber penerangan utama yang digunakan:	1. PLN 2. Generator 3.Tenaga matahari/solar cell 4.Listrik swadaya masyarakat		☐

XIV.KUESIONER RUMAH DINAS

RIFASKES-11.PKM.RUDIN

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kel/ Desa	No Urut PKM	Norut Rudin

NAMA PUSKESMAS			
ID PUSKESMAS			
Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:	

1.	Bangunan rumah dinas diperuntukan :	1. Kepala Puskesmas 2. Rumah dinas dokter / dokter gigi 3. Rumah dinas staf		☐
2	Pemanfaatan rumah dinas :	1. Dimanfaatkan kepala puskesmas 2. Dimanfaatkan oleh dokter / dokter gigi 3. Dimanfaatkan perawat 4. Dimanfaatkan bidan 5. Dimanfaatkan oleh staf lainnya 6. Tidak dimanfaatkan 7. Lainnya, ...		☐
3	Posisi/letak rumah :	1. Dalam halaman puskesmas 2. Di sekitar puskesmas 3. Jauh dari puskesmas		☐
4	Luas bangunan :	..... m^2		☐☐☐☐
5	Kondisi Bangunan :	1. Baik 2. Rusak ringan 3. Rusak sedang 4. Rusak berat		☐
6	Sumber air bersih utama :	1.PAM 2.Sumur bor 3.Sumur Gali	4.Mata air 5.PAH 6.Lainnya	☐
7	Apakah air bersih tersedia sepanjang tahun?	1. Ya 2. Tidak		☐
8	Sumber penerangan utama yang digunakan:	1. PLN 2. Generator 3.Tenaga matahari/solar cell 4. Listrik swadaya masyarakat		☐

XIV.KUESIONER RUMAH DINAS

RIFASKES-11.PKM.RUDIN

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kel/ Desa	No Urut PKM	Norut Rudin

NAMA PUSKESMAS													
ID PUSKESMAS													

Nama Responden:	Jabatan:	No.HP:

1.	Bangunan rumah dinas diperuntukan :	1. Kepala Puskesmas 2. Rumah dinas dokter / dokter gigi 3. Rumah dinas staf		☐
2	Pemanfaatan rumah dinas :	1. Dimanfaatkan kepala puskesmas 2. Dimanfaatkan oleh dokter / dokter gigi 3. Dimanfaatkan perawat 4. Dimanfaatkan bidan 5. Dimanfaatkan oleh staf lainnya 6. Tidak dimanfaatkan 7. Lainnya, ...		☐
3	Posisi/letak rumah :	1. Dalam halaman puskesmas 2. Di sekitar puskesmas 3. Jauh dari puskesmas		☐
4	Luas bangunan :	..... m^2		☐☐☐☐
5	Kondisi Bangunan :	1. Baik 2. Rusak ringan 3. Rusak sedang 4. Rusak berat		☐
6	Sumber air bersih utama :	1.PAM 2.Sumur bor 3.Sumur Gali	4.Mata air 5.PAH 6.Lainnya	☐
7	Apakah air bersih tersedia sepanjang tahun?	1. Ya 2. Tidak		☐
8	Sumber penerangan utama yang digunakan:	1. PLN 2. Generator 3.Tenaga matahari/solar cell 4. Listrik swadaya masyarakat		☐

XV. KUESIONER ALAT KESEHATAN DALAM GEDUNG							RIFASKES-11.PKM.P-UMUM		
Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:							Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
Nama Responden:				Jabatan:			No.HP:		

A.	JENIS PELAYANAN: POLIKLINIK UMUM						
No. urut	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Digunakan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	D-5	Diagnostik set, lengkap	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
2.	D-7	Kaca Kepala	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
3.	D-8	Kaca Pembesar	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
4.	D-9	Kartu Tes Penglihatan dekat	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
5.	D-11	Manset Anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
6.	D-15	Palu pengukur refleks	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
7.	D-19	Pengukur waktu yang dapat diatur (stop watch)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
8.	D-22	Snellen, alat untuk pemeriksaan visus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
9.	D-30	Stetoskop	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
10.	D-32	Sudip Lidah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
11.	D-34	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
12.	D-35	Tensimeter air raksa	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
13.	D-37	Termometer klinis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
14.	D-38	Tes buta warna (ishihara)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
15.	D-41	Timbangan dewasa	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
16.	D-42	Tonometer, alat untuk mengukur tekanan bola mata	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
17.	M-1	Alat melebarkan puncrum lacrimalis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
18.	M-6	Alat untuk mengeluarkan benda asing	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
19.	M-11	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
20.	M-12	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tumpul	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
21.	M-13	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tumpul/tumpul	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
22.	M-15	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tajam	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
23.	M-16	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tumpul	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
24.	M-17	Gunting bedah standar, lurus, ujung tumpul/tumpul	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
25.	M-27	Gunting mayo untuk mata, lurus/lengkung	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
26.	M-28	Gunting pembalut (lister)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
27.	M-38	Jarum jahit, lengkung, penampang bulat	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
28.	M-39	Jarum jahit, lengkung, penampang segitiga	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

A.	JENIS PELAYANAN: POLIKLINIK UMUM						
No. urut	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	M-46	Jarum suntik hypodermis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
30.	M-47	Semprit hipodermis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
31.	M-59	Kateter karet	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
32.	M-62	Kateter Logam	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
33.	M-70	Klem arteri, lurus (kelly)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
34.	M-72/M-73	Klem/ pemegang jarum jahit	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
35.	M-79	Korentang, penjepit sponge (foerster)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
36.	M-83	Kuret untuk membersihkan hordeolum (meyerhooper)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
37.	M-95	Pinset anatomis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
38.	M-98	Pincet bedah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
39.	M-100	Pinset epilasi, untuk mencabut bulu mata	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
40.	M-126	Semprit untuk telinga dan luka	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
41.	M-131	Skalpel, tangkai dan mata pisau bedah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
42.	M-134	Sonde pengukur dalam luka	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
43.	M-138	Sterilisator (pemanas alkohol)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
44.	S-10	Duk bolong, sedang	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
45.	U-31	Lampu senter	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
46.	U-32	Lemari peralatan	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
47.	U-34	Mangkok untuk larutan	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
48.	U-37	Meja instrumen/alat	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
49.	U-52	Silinder korentang steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
50.	U-55	Standar dan waskomnya	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
51.	U-66	Toples kapas/ kasa steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
52.	U-68	Torniket karet	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
53.	U-69	Tromol kasa/ kain steril 25 x 120 mm	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
54.	U-72	Waskom bengkok	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
55.	U-73	Waskom cekung	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
56.	W-15	Tempat sampah basah dan kering, bertutup	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

No. urut	No. Kode	2. BAHAN HABIS PAKAI	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya	KECUKUPAN 1. Cukup 2. Tidak cukup
		(1)	(2)	(3)
1.	M-7	Benang cut gut	☐	☐
2.	M-8	Benang sutera	☐	☐
3.		Syringe disposable	☐	☐
4.	M-49	Jarum disposable	☐	☐
5.	S-22	Sarung tangan	☐	☐

XV. KUESIONER ALAT KESEHATAN DALAM GEDUNG							RIFASKES-11.PKM.P-GIGI		
Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:				Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐					
Nama Responden:			Jabatan:			No.HP:			

B.	JENIS PELAYANAN: POLIKLINIK GIGI						
No. URUT	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Digunakan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	G-1	Bein lurus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
2.	G-23	Pengungkit akar gigi kanan mesial (cryer mesial)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
3.	G-24	Pengungkit akar gigi kiri mesial (cryer distal)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
4.	G-42	Tang pencabut akar gigi depan (seri dan taring) atas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
5.	G-43	Tang pencabut gigi depan (seri dan taring) atas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
6.	G-44	Tang pencabut akar gigi geraham kecil atas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
7.	G-45	Tang pencabut gigi geraham kecil atas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
8.	G-46	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
9.	G-47	Tang pencabut gigi geraham atas kanan	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
10.	G-48	Tang pencabut gigi geraham atas kiri	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
11.	G-49	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
12.	G-50	Tang pencabut akar gigi bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
13.	G-51	Tang pencabut gigi depan(seri dan taring) bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
14.	G-52	Tang pencabut akar gigi geraham kecil bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
15.	G-53	Tang pencabut gigi geraham kecil bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
16.	G-54	Tang pencabut gigi geraham bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
17.	G-55	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
18.	G-56	Tang pencabut sisa akar gigi bawah anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
19.	G-57	Tang pencabut gigi depan bawah anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
20.	G-58	Tang pencabut gigi belakang bawah anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
21.	G-59	Tang pencabut sisa akar gigi depan atas anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
22.	G-60	Tang pencabut gigi depan atas anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
23.	G-61	Tang pencabut sisa akar gigi geraham atas anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
24.	G-62	Tang pencabut gigi geraham atas anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

B.	JENIS PELAYANAN: POLIKLINIK GIGI						
No. URUT	No. KODE	2. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Digunakan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	G-63	Tang pemotong tulang untuk anak (knabel tang)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
26.	G-11	Gunting operasi gusi (wagner)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
27.	M-47	Jarum suntik, hipodermis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
28.	M-42	Jarum jahit, lengkung	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
29.	M-8	Benang jahit silk	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
30.	M-74	Klem/ pemegang jarum jahit	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
31.	M-129	Skalpel. Mata pisau dan tangkainya	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
32.	M-79	Korentang	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
33.	U-52	Silinder korentang steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
34.	U-65	Toples kapas logam dengan pegas dan tutup	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
35.	U-67	Toples pembuangan kapas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
36.	U-72	Waskom bengkok (neirbeken)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
37.	G-9	Ekskavator	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
38.	G-13	Kaca mulut datar	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
39.	G-14	Tangkai kaca mulut → gambar mengganti kursi gigi lapangan	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
40.	G-29	Pinset gigi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
41.	G-38	Sonde lengkung	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
42.	G-39	Sonde lurus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
43.	G-15	Kursi gigi manual	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
44.	G- 65	Kursi gigi elektrik /semi elektrik	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
45.	G-4	Bor intan (diamond bur assorted) untuk air jet hand piece (kecepatan tinggi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
46.	G-5	Bor intan kontra anglehand piece konventional (kecepatan rendah)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
47.	G-6	Burniser	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
48.	G-16	Lempeng kaca pengaduk semen	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
49.	G-18	Pemegang matriks (matrix holder)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
50.	G-20	Pengaduk amalgam	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
51.	G-22	Penghembus angin	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
52.	G-25	Penumpat amalgam berujung dua	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
53.	G-27	Penumpat plastik	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
54.	G-28	Penumpat semen	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
55.	G-40	Spatula pengaduk semen	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
56.	G-41	Spatula pengaduk silikat / glasslonomer	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

B.	JENIS PELAYANAN: POLIKLINIK GIGI						
No. URUT	No. KODE	3. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Digunakan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57.	G-66	Mikromotor dengan straight dan contra angle hand piece (low speed micro motor)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
58.	G-33-36	Skeler	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
59.	M-121	Semprit air	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
60.	U-3	Tempat alkohol (dappen glas)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
61.	M-138	Sterilisator	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
62.	U-2	Baki logam tempat alat steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
63.	U-14	Generator listrik	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
64.	U-25	Lampu spiritus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
65.	W-15	Tempat sampah basah dan kering, bertutup	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
66.	U-32	Lemari peralatan	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
67.	D-35	Tensimeter air raksa	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
68.	D-30	Stetoskop	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

No. URUT	No. KODE	2. BAHAN HABIS PAKAI	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya	KECUKUPAN 1. Cukup 2. Tidak cukup
		(1)	(2)	(3)
1.	S-22	Sarung tangan	☐	☐
2.	S-17	Masker	☐	☐
3.	G-30	Pita matrik (matrix band)	☐	☐
4.	G-32	Seluloid kotak/strip	☐	☐
5.		Disposable syringe	☐	☐

XV. KUESIONER ALAT KESEHATAN DALAM GEDUNG							RIFASKES-11.PKM.P-KIA		
Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:				Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐					
Nama Responden:			Jabatan:				No.HP:		

C.	JENIS PELAYANAN: POLIKLINIK KIA						
No. URUT	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Digunakan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	D-14	Meteran	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
2.	D-15	Palu pengkur refleks	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
3.	D-16	Pelvimeter obstetrik untuk pengukur panggul	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
4.	D-26	Spekulum vagina (cocor bebek)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
5.	D-29	Spekulum vagina (sims)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
6.	D-30	Stetoskop bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
7.	D-31	Stetoskop janin	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
8.		Stetoskop	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
9.	D-33	Sudip lidah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
10.	D-34	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
11.	D-36	Tensimeter air raksa	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
12.	D-37	Termometer klinis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
13.	D-39	Timbangan, dacin	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
14.	D-40	Timbangan bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
15.	D-41	Timbangan dewasa	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
16.	M-14	Gunting bedah standar, lurus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
17.	M-28	Gunting pembalut (lister)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
18.	M-59	Kateter karet	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
19.	M-62	Kateter logam	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
20.	M-70	Klem arteri, lurus (kelly)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
21.	M-71	Klem tampon uterus 25 cm (bozeman)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
22.	M-77	Klem / penjepit porsio 25 cm (schroder)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
23.	M-78	Korentang, lengkung, penjepit alat steril (cheattle)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
24.	M-79	Korentang, penjepit sponge (foerster)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
25.	M-98	Pinset bedah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
26.	M-113	Semprit, gliserin	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
27.	M-135	Sonde uterus/penduga	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
28.	M-138	Sterilisator	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
29.	S-4	Celemek plastik (schort)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

C.	JENIS PELAYANAN: POLIKLINIK KIA						
No. URUT	No. KODE	2. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Digunakan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	S-19	Perlak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
31.	U-2	Baki logam tempat alat steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
32.	U-32	Lemari peralatan	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
33.	U-34	Mangkok untuk larutan	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
34.	U-44	Pompa payudara untuk ASI	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
35.	U-52	Silinder korentang steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
36.	U-54	Standar infus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
37.	U-66	Toples kapas/ kassa steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
38.	U-68	Torniket karet	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
39.	U-72	Waskom bengkok	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
40.	U-73	Waskom cekung	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
41.	U-74	Waskom cuci	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
42.	D-45	Dopler	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
43.	U-79	Ambu bag	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
44.	U-57	Tabung oksigen besar / kecil	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
45.	U-81	Lampu / spot light	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
46.	U-83	Tromol untuk alat steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
47.	U-37	Meja instrumen 2 rak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
48.	W-15	Tempat sampah basah dan kering, bertutup	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
49.	U-31	Lampu senter	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
50.	L-47	Alat pemeriksaan urine (urinometer)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
51.	M-159	Peralatan immunisasi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
52.	L-10	Hemoglobinnometer set (sahli)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
53.	D-17	Pengukur panjang bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
54.		Pengukur tinggi anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
55.	D-11/12	Manset anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
56.	M-2	Alat pemasangan IUD	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
57.	M-3	Alat pemasangan norplans	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
58.	M-4	Alat pengait IUD	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
59.	M-49	Jarum suntik hipodermis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

No. URUT	No. KODE	2. BAHAN HABIS PAKAI	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya	KECUKUPAN 1. Cukup 2. Tidak cukup
		(1)	(2)	(3)
1.	M-7	Benang cut gut	☐	☐
2.	M-8	Benang sutra	☐	☐
3.	S-22	Sarung tangan	☐	☐
4.	M-147	Jarum suntik, disposable	☐	☐
5.		Disposable syringe	☐	☐

XV. KUESIONER ALAT KESEHATAN DALAM GEDUNG							RIFASKES-11.PKM.P-LAB		
Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:				Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐					
Nama Responden:		Jabatan:				No.HP:			

D.	JENIS PELAYANAN: LABORATORIUM						
No. URUT	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETER-SEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Digunakan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	D-1	Alat hitung manual	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
2.	D-9	Pengukur waktu yang dapat diatur (stop watch)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
3.	D-32	Sudip lidah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
4.	L-1	Albumunometer (esbasch)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
5.	L-2	Beker gelas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
6.	L-3	Botol pencuci	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
7.	L-4	Corong kaca (5 cm)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
8.	L-5	Ember penutup plastik dengan penutup	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
9.	L-6	Erlenmeyer	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
10.	L-7	Gelas ukur	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
11.	L-10	Hemoglobinometer set (sahli)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
12.	L-11	Hemositometer set	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
13.	L-13	Kaca preparat	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
14.	L-15	Kaki tiga	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
15.	L-16	Kawat asbes	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
16.	L-23	Mikroskop binokuler	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
17.	L-24	Pemanas / penegas dengan air	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
18.	L-28	Penjepit tabung dari kayu	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
19.	L-29	Pensil kaca	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
20.	L-30	Pipet berskala	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
21.	L-25	Pengisap karet	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
22.		Tip mikropipet	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
23.	L-34	Pipet tetes	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
24.	L-35	Rak pengering	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
25.	L-36	Rak pewarna kaca preparat	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
26.	L-37	Rak tabung reaksi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
27.	L-38	Sengkelit	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
28.	L-41	Sikat tabung reaksi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

D.	JENIS PELAYANAN: LABORATORIUM						
No. URUT	No. KODE	2. ALAT KESEHATAN	KETER-SEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Diguna-kan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	L-42	Tabung laju endap darah (westergren)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
30.	L-44	Tabung reaksi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
31.	L-45	Tabung sentrifus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
32.	L-47	Urinometer	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
33.	M-97	Pinset anatomis (untuk specimen)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
34.	M-120	Semprit hipodermik	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
35.	M-138	Sterilisator	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
36.	L-55	Tabung / pipa kapiler untuk hematokrit	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
37.	U-2	Baki logam tempat alat steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
38.	U-6	Botol mulut sempit dengan tutup ulir	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
39.	U-10	Botol tetes 60 cc	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
40.	U-22	Kompor minyak tanah (portable)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
41.	U-25	Lampu spiritus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
42.	U-55	Waskom dan standarnya	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
43.	U-68	Tornikuet karet	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
44.	U-72	Waskom bengkok	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
45.	U-73	Waskom cekung	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
46.	U-74	Waskom cuci	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
47.	L-39	Sentrifus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
48.	U-29	Lemari es tipe kompresi (tenaga listrik)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
49.	L-46	Termometer 0 – 50^{0}C (skala ½ C)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
50.	D-13	Meja ginekologi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
51.	D-35	Tensimeter air raksa	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
52.	L-14	Kaca preparat untuk pemeriksaan gol. darah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
53.	U-25	Lampu spiritus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
54.	L-48	Jas laboratorium	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
55.	W-15	Peralatan untuk tempat pembuangan limbah, sisa spesimen (tempat sampah khusus)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
56.	L-58	Rotator	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
57.	L-59	Shaker	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
58.		Spektrofotometer	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

No.Urut	No. Kode	2. BAHAN HABIS PAKAI	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya		KECUKUPAN	
		(1)	(2)		(3)	
1.	L-12	Kaca penutup (dek glass)	1. Ada 2. Tidak ada	☐	1. Cukup 2. Tidak cukup	☐
2.	L-17	Kertas lakmus	1. Ada 2. Tidak ada	☐	1. Cukup 2. Tidak cukup	☐
3.	L-18	Kertas lensa	1. Ada 2. Tidak ada	☐	1. Cukup 2. Tidak cukup	☐
4.	L-19	Kertas saring	1. Ada 2. Tidak ada	☐	1. Cukup 2. Tidak cukup	☐
5.	L-23	Mikropipet	1. Ada 2. Tidak ada	☐	1. Cukup 2. Tidak cukup	☐
6.		Disposable syringe	1. Ada 2. Tidak ada	☐	1. Cukup 2. Tidak cukup	☐
7.	M-147	Jarum suntik disposable	1. Ada 2. Tidak ada	☐	1. Cukup 2. Tidak cukup	☐
8.	M-92	Penusuk jari untuk pengambilan darah	1. Ada 2. Tidak ada	☐	1. Cukup 2. Tidak cukup	☐
9.	M-131	Skalpel mata pisau bedah dan tangkainya	1. Ada 2. Tidak ada	☐	1. Cukup 2. Tidak cukup	☐
10.	S-22	Sarung tangan	1. Ada 2. Tidak ada	☐	1. Cukup 2. Tidak cukup	☐

XV. KUESIONER ALAT KESEHATAN DALAM GEDUNG							RIFASKES-11.PKM.APOTEK		
Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:						Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			
Nama Responden:			Jabatan:			No.HP:			

E.	JENIS PELAYANAN APOTEK				
NO	JENIS OBAT	KETERSEDIAAN OBAT DAN ALKES TAHUN 2010			
		KETERSEDIAAN 1.Ada 2.Tidak ada→baris berikutnya	KECUKUPAN 1.Cukup→kolom (4) 2.Tidak cukup	KECUKUPAN Jumlah Bulan Pernah Kosong	DALUWARSA 1. Ada 2.Tidak
	1. OBAT UMUM	(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACT (obat kombinasi terapi malaria)	☐	☐	☐☐	☐
2	Amoksisilin 500 mg	☐	☐	☐☐	☐
3	Amoksisilin sir kering 125 mg/ml (btl 60 ml)	☐	☐	☐☐	☐
4	Ampisilin 1000 mg inj	☐	☐	☐☐	☐
5	Antasida DOEN	☐	☐	☐☐	☐
6	Deksametason inj 5 mg/ml – 2 ml	☐	☐	☐☐	☐
7	Deksametason 0,5 mg	☐	☐	☐☐	☐
8	Dekstrometorfan sir 10 mg/5 ml (blt 60 ml)	☐	☐	☐☐	☐
9	Dekstrometorfan 15 mg	☐	☐	☐☐	☐
10	Diazepam 5 mg	☐	☐	☐☐	☐
11	Diazepam inj 5 mg/ml	☐	☐	☐☐	☐
12	Diazepam rectal	☐	☐	☐☐	☐
13	Dietilkarbamazin sitrat 100 mg	☐	☐	☐☐	☐
14	Difenhidramin HCl inj 10 mg/ml – 1 ml	☐	☐	☐☐	☐
15	Fenobarbital inj	☐	☐	☐☐	☐
16	FDC I dan III	☐	☐	☐☐	☐
17	FDC II	☐	☐	☐☐	☐
18	FDC Sisipan	☐	☐	☐☐	☐
19	Garam oralit	☐	☐	☐☐	☐
20	Gentamisin inj 80 mg	☐	☐	☐☐	☐
21	Gliseril Guaiakolat 100 mg	☐	☐	☐☐	☐
22	Glukosa larutan infuse 5 % steril , 500 ml	☐	☐	☐☐	☐
23	Ibuprofen 200 mg	☐	☐	☐☐	☐
24	Kaptopril 25 mg	☐	☐	☐☐	☐
25	Kloramfenikol 250 mg	☐	☐	☐☐	☐
26	Klorfeniramin maleat 4 mg	☐	☐	☐☐	☐

NO	JENIS OBAT	KETERSEDIAAN OBAT DAN ALKES TAHUN 2010			
		KETERSEDIAAN 1.Ada 2.Tidak ada→baris berikutnya	KECUKUPAN 1.Cukup→koloml (4) 2.Tidak cukup	Jumlah Bulan Pernah Kosong	DALUWARSA 1. Ada 2.Tidak
	1. OBAT UMUM	(1)	(2)	(3)	(4)
27	Klorpromazine 100 mg	☐	☐	☐☐	☐
28	Kodein 10 mg	☐	☐	☐☐	☐
29	Kotrimoksazol susp 240 mg	☐	☐	☐☐	☐
30	Kotrimoksazol 480 mg	☐	☐	☐☐	☐
31	Lidokain komp inj 2 %	☐	☐	☐☐	☐
32	Natrium Klorida inf 0,9 % steril, 500 ml	☐	☐	☐☐	☐
33	Parasetamol 500 mg	☐	☐	☐☐	☐
34	Prednison 5 mg	☐	☐	☐☐	☐
35	Ringer laktat inf steril, 500 ml	☐	☐	☐☐	☐
36	Retinol 100.000 IU	☐	☐	☐☐	☐
37	Retinol 200.000 IU	☐	☐	☐☐	☐
38	Salbutamol 2 mg	☐	☐	☐☐	☐
39	Tamiflu	☐	☐	☐☐	☐
40	Tetrasiklin 250 mg	☐	☐	☐☐	☐
41	Tetrasiklin HCl salep mata 1 %	☐	☐	☐☐	☐
42	Vitamin B kompleks	☐	☐	☐☐	☐
43	Vit K1 inj	☐	☐	☐☐	☐
44	Zinc	☐	☐	☐☐	☐
	2. OBAT GIGI				
45	Devitalisasi pasta (non arsen)	☐	☐	☐☐	☐
46	Etil klorida semprot	☐	☐	☐☐	☐
47	Eugenol cairan	☐	☐	☐☐	☐
48	Glass ionomer cement (GIC)	☐	☐	☐☐	☐
49	Kalsium Hlidroksida pasta	☐	☐	☐☐	☐
50	Klorfenol kamfer menthol (CHKM)	☐	☐	☐☐	☐
51	Mummifying pasta	☐	☐	☐☐	☐
52	Semen seng fosfat serbuk dan cairan	☐	☐	☐☐	☐
53	Temporary stopping fletcher (Fletcher) serbuk dan cairan	☐	☐	☐☐	☐
54	Tri kresol formalin	☐	☐	☐☐	☐

NO	JENIS OBAT	KETERSEDIAAN OBAT DAN ALKES TAHUN 2010			
		KETERSEDIAAN 1.Ada 2.Tidak ada→baris berikutnya	KECUKUPAN 1.Cukup→kolom (4) 2.Tidak cukup	Jumlah Bulan Pernah Kosong	DALUWARSA 1. Ada 2.Tidak
	3. OBAT /ALAT KB	(1)	(2)	(3)	(4)
55	Cooper T (380 A)	☐	☐	☐☐	☐
56	Fallope ring	☐	☐	☐☐	☐
57	Medroxy progesteronacetat 150 mg, 1 vial @ 3 ml (obat suntik)	☐	☐	☐☐	☐
58	Medroxy progesteronacetat 25 mg + estradiol cypionate 5 mg (obat suntik)	☐	☐	☐☐	☐
59	Ethinylestradiol 0,03 mg + levonorgestrel 0,15 mg (pil kab)	☐	☐	☐☐	☐
60	Lynestrenol 0,5 mg (pil KB)	☐	☐	☐☐	☐
61	Desogestrel 0,15 mg + ethinylestradiol 0,03 mg (pil KB)	☐	☐	☐☐	☐
62	Etonogestrel 68 mg (susuk KB)	☐	☐	☐☐	☐
63	Levonogestrel 75 mg (susuk KB)	☐	☐	☐☐	☐
64	Levonogestrel 75 mg + insrter (susuk KB)	☐	☐	☐☐	☐
65	Levonogestrel 36 mg (susuk KB)	☐	☐	☐☐	☐
	4. OBAT KHUSUS PUSKESMAS PONED				
66	ATS 10.000 IU	☐	☐	☐☐	☐
67	Bicarbonas	☐	☐	☐☐	☐
68	Cairan infus dektrose 5 %	☐	☐	☐☐	☐
69	Cairan infus larutan A2	☐	☐	☐☐	☐
70	Cairan infus NaCl 0,9 %	☐	☐	☐☐	☐
71	Cedilanide inj	☐	☐	☐☐	☐
72	Dextran 40 %	☐	☐	☐☐	☐
73	Ergometrin inj /Methilergometrin maleat inj 0,200 mg-ml	☐	☐	☐☐	☐
74	Furosemid inj i.v/im 10 mg/ml	☐	☐	☐☐	☐
75	Magnesium sulfat 20 %	☐	☐	☐☐	☐
76	Magnesium sulfat 40 %	☐	☐	☐☐	☐
77	Natrium bicarbonat 0,83 mEK/ml inj (Meylon)	☐	☐	☐☐	☐
78	Natricus	☐	☐	☐☐	☐
79	Oksitosin inj 10 IU/ml – 1 ml	☐	☐	☐☐	☐
80	Pethidin inj 50 mg/ml	☐	☐	☐☐	☐
81	PP 50.000 IU	☐	☐	☐☐	☐
82	Tramadol inj 100 mg/2 ml	☐	☐	☐☐	☐
	5. Tempat penyimpanan obat khusus	1. YA 2. TIDAK			
83	Tersedia lemari es untuk produk tertentu	☐			

XV. KUESIONER ALAT KESEHATAN DALAM GEDUNG							RIFASKES-11.PKM.IMUNISASI		
Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:				Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐					
Nama Responden:			Jabatan:				No.HP:		

F.	JENIS PELAYANAN: IMUNISASI					
No.	Jenis alat	1. Ada 2. Tidak →baris berikutnya	Jumlah	Tahun terakhir pengadaan	Kondisi alat	
					Berfungsi	Tidak Berfungsi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Freezer	☐	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐
2	Alat pembawa vaksin	☐	☐☐		☐☐	☐☐
	a. Cold Box	☐	☐☐		☐☐	☐☐
	b. Vaccin carier	☐	☐☐		☐☐	☐☐
	c. Termos	☐	☐☐		☐☐	☐☐
3	Cool pack (kotak dingin cair)	☐	☐☐		☐☐	☐☐
4	Alat suntik AD	☐	☐☐		☐☐	☐☐
5	KIPI Kit	☐	☐☐		☐☐	☐☐
6	Safety box	☐	☐☐		☐☐	☐☐
7	Refrigerator/ kulkas	☐	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐
	a. Buka atas	☐	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐
	b. Buka depan	☐	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐
	c. Thermometer	☐	☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐
	d. Grafik pencatatan suhu		Kulkas 1	Kulkas 2	Kulkas3	
			☐ ☐☐°C	☐ ☐☐°C	☐ ☐☐°C	
			Kulkas 1	1. √ 2. X	Kulkas 2	1. √ 2. X	Kulkas3	1. √ 2. X
	e. Freeze tag		☑ ☒	☐	☑ ☒	☐	☑ ☒	☐

F.	JENIS PELAYANAN: IMUNISASI

8	Jenis vaksin	Ketersediaan 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya	Tempat Penyimpanan 1. Refrigerator (dekat dari freezer) 2. Refrigerator (jauh dari freezer) 3. Dalam Freezer	Jumlah Vaksin	Jumlah Vaksin Kadaluarsa	Jumlah Vaksin Rusak (VCCM)	Jumlah Vaksin Rusak (VVM)
	a. HB Uniject	☐	☐	☐☐☐	☐☐☐		☐☐☐
	b. BCG	☐	☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	
	c. DPT/HB	☐	☐	☐☐☐	☐☐☐		☐☐☐
	d. Campak	☐	☐	☐☐☐	☐☐☐		☐☐☐
	e. TT	☐	☐	☐☐☐	☐☐☐		☐☐☐
	f. Polio	☐	☐	☐☐☐	☐☐☐		☐☐☐

9	Sumber Listrik untuk penyimpanan vaksin (freezer/refrigerator)	Jenis sumber listrik : 1.Ada, 2.tidak ada→baris berikutnya		Ketersediaan : 1= Tersedia 24 jam, 2= Tersedia 12-23 jam 3= Tersedia 6-11 jam 4= Tersedia kurang dari 6 jam
		a. Listrik PLN	☐	☐
		b.Generator	☐	☐
		c. Diesel	☐	☐
		d. Tenaga surya	☐	☐
		e.Gas	☐	☐
		f.Minyak Tanah	☐	☐

XV. KUESIONER ALAT KESEHATAN DALAM GEDUNG							RIFASKES-11.PKM.P-RAWAT INAP		
Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:				Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐					
Nama Responden:			Jabatan:				No.HP:		

G.	JENIS PELAYANAN: PERALATAN PERAWATAN (Khusus Puskesmas DTP)						
No. URUT	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Digunakan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	D-30	Stetoskop	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
2.	D-34	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
3.	D-35	Tensimeter air raksa	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
4.	M-5	Alat penghisap dengan pedal/portable suction	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
5.	M-47-M-50	Jarum suntik, hipodermis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
6.	M-57	Kanula hidung	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
7.	M-58	Kateter, selang penghisap lendir bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
8.	M-117 – M-120	Semprit, hipodermik	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
9.	S-2	Bantal	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
10.	S-11	Handuk kecil (60 x 40 cm)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
11.	S-15	Kasur	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
12.	S-16	Lap untuk mandi pasien	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
13.	S-19	Perlak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
14.	S-21	Sarung bantal	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
15.	S-25	Selimut	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
16.	S-26	Sprei	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
17.	U-1	Baki instrumen bertutup	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
18.	U-12	Dorongan untuk tabung oksigen	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
19.	U-17	Inkubator bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
20.	U-21	Klep pengatur oksigen dengan humadifier	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
21.	U-24	Kursi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
22.	U-30	Lemari kecil	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
23.	U-37	Meja instrumen / alat	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
24.	U-38	Pengukur aliran oksigen	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
25.	U-39	Penyekat ruangan	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
26.	U-40	Pispot anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
27.	U-41	Pispot dewasa	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
28.	U-42	Pispot fraktur / immobilisasi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

No. URUT	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Digunakan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	U-43	Pispot pria / urinal	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
30.	U-44	Pompa payudara untuk ASI	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
31.	U-49	Selang oksigen	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
32.	U-54	Standar infus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
33.	U-55 – U-56	Waskom dan standarnya	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
34.	U-57	Tabung oksigen	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
35.	U-62	Tempat tidur	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
36.	U-69 – U-70	Tromol kasa/kain steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
37.	U-71	Usungan (brankar)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
38.	U-72	Waskom bengkok	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
39.	U-73	Waskom cekung	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
40.	U-74	Waskom cuci	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
41.	D-20	Sound timer / pengukur waktu	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
42.	U-80	Kursi roda	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
43.	S-26	Sprei kecil / steek laken	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
44.	S-37	Penjepit formulir aslup/ set formulir aslup	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
45.	W-15	Tempat sampah tertutup	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
46.	W-20	Tempat sampah plastik untuk pasien	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
47.	N-12	Jet nebulizer	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
48.	D-44	Termometer for infant	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
49.	U-75	Resusitator for infant	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
50.	U-77	Tabung / sungkep untuk resusitasi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
51.	D-43	Ari sound timer	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
52.	S-29	Handuk bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

No. URUT	No. KODE	2. BAHAN HABIS PAKAI	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya	KECUKUPAN 1. Cukup 2. Tidak cukup
		(1)	(2)	(3)
1.	S-22 – S-24	Sarung tangan	☐	☐
2.	M-149 – M-152	Jarum suntik, disposable	☐	☐
3.		Disposable syringe	☐	☐

XV. KUESIONER ALAT KESEHATAN DALAM GEDUNG							RIFASKES-11.PKM.PONED		
Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:						Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			
Nama Responden:			Jabatan:			No.HP:			

H.	JENIS PELAYANAN: PONED						
No. URUT	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Digunakan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	D-26	Spekulum vagina (cocor bebek)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
2.		Spekulum sims besar	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
3.		Spekulum L (doyem)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
4.	D-40	Timbangan bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
5.	D-44	Termometer bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
6.		Stateskop bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
7.		Stateskop monoaurel	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
8.		Doppler	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
9.		Inkubator	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
10.	M-140	Tang jaringan plasenta/abortus, 32 cm (kelly)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
11.		Tenaculum (barrett/Braun)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
12.	M-143	Vakum ekstraktor	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
13.	M-154	Forcep/ aligator forceps	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
14.	M-58	Kateter, selang penghisap lendir bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
15.	M-58	Penghisap lendir	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
16.	M-71	Klem tampon uterus (bozeman)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
17.	M-82	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta (BUMM)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
18.	M-84	Kuret untuk uterus (BUMM)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
19.	M-85	Kuret untuk uterus (sims)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
20.	M-9	Dilatator, Komplet (hegar)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
21.		Baju kangguru	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
22.		Meja bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
23.	U-75	Resusitator bayi / ambu bag	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
24.	U-77	Tabung/ sungkup resusitator	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
25.		Lampu pemanas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
26.		Tabung oksigen dan regulator	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

No. URUT	No. KODE	2. BAHAN HABIS PAKAI	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya	KECUKUPAN 1. Cukup 2. Tidak cukup
		(1)	(2)	(3)
1.		Sarung tangan panjang	☐	☐
2.		Spuit 10 cc	☐	☐
3.		Infus set	☐	☐
4.		Plaster	☐	☐
5.		Abbocath vena kateter no 14	☐	☐
6.		Abbocath vena kateter no 16	☐	☐
7.		Kateter folley no 22	☐	☐
8.		Urine bag	☐	☐
9.		Transfusi set	☐	☐
10.		Infus set pediatric	☐	☐
11.		Wing needle no 27	☐	☐
12.		Sonde lambung (disposible)	☐	☐

XVI. KUESIONER ALAT KESEHATAN LUAR GEDUNG							RIFASKES-11.PKM.PUSLING		
Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:				Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐					
Nama Responden:			Jabatan:				No.HP:		

A.	JENIS PELAYANAN: KIT PERALATAN PUSKESMAS KELILING						
No. URUT	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
				Digunakan	Tidak digunakan		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	D-5	Diagnostik set, lengkap	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
2.	D-11	Manset Anak dengan Velecro	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
3.	D-14	Meteran	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
4.	D-15	Palu pengukur refleks	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
5.	D-26	Spekulum vagina (cocor bebek)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
6.	D-30	Stetoskop	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
7.	D-31	Stetoskop janin	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
8.	D-32	Sudip Lidah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
9.	D-35	Tensimeter air raksa	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
10.	D-37	Termometer klinis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
11.	D-41	Timbangan dewasa	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
12.	G-1	Bein lurus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
13.	G-9	Ekskavator	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
14.	G-12	Jarum semprit air	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
15.	G-13	Kaca mulut tanpa tangkai	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
16.	G-14	Tangkai untuk kaca mulut	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
17.	G-16	Lempeng kaca pengaduk semen (glass slab)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
18.	G-23	Pengungkit akar gigi kanan (mesial/cryer mesial)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
19.	G-24	Pengungkit akar gigi kiri (distal/cryer distal)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
20.	G-27	Penumpat plastik	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
21.	G-29	Pinset gigi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
22.	G-33	Skeler	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
23.	G-38	Sonde lengkung	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
24.	G-39	Sonde lurus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
25.	G-40	Spatula pengaduk semen	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
26.	G-42	Tang pencabut akar gigi depan (seri dan taring) atas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
27.	G-43	Tang pencabut gigi depan (seri dan taring) atas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

A.	JENIS PELAYANAN: KIT PERALATAN PUSKESMAS KELILING						
No. URUT	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
28.	G-44	Tang pencabut akar gigi geraham kecil atas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
29.	G-45	Tang pencabut gigi geraham kecil atas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
30.	G-46	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
31.	G-47	Tang pencabut gigi geraham atas kanan	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
32.	G-48	Tang pencabut gigi geraham atas kiri	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
33.	G-49	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
34.	G-50	Tang pencabut akar gigi bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
35.	G-51	Tang pencabut gigi depan(seri dan taring) bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
36.	G-52	Tang pencabut akar gigi geraham kecil bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
37.	G-53	Tang pencabut gigi geraham kecil bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
38.	G-54	Tang pencabut gigi geraham bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
39.	G-55	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
40.	G-56	Tang pencabut sisa akar gigi bawah anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
41.	G-57	Tang pencabut gigi depan bawah anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
42.	G-58	Tang pencabut gigi belakang bawah anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
43.	G-59	Tang pencabut sisa akar gigi depan atas anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
44.	G-60	Tang pencabut gigi depan atas anak	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
45.	U-3	Tempat alkohol (dappen glas)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
46.	L-8	Gelas pengukur	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
47.	L-10	Hemoglobinometer (sahli)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
48.	L-13	Kaca preparat	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
49.	L-28	Penjepit tabung tabung kayu	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
50.	L-34	Pipet tes	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
51.	L-44	Tabung reaksi (12 mm)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
52.	M-2	Alat pemasang IUD	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
53.	M-3	Alat pemasang, norplant	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
54.	M-10	Gunting bedah standar, standar	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
55.	M-28	Gunting pembalut (lister)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
56.	M-33	Irigator dengan konektor nilon, lurus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
57.	M-38	Jarum jahit	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
58.	M-46	Jarum suntik, hipodermis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

A.	JENIS PELAYANAN: KIT PERALATAN PUSKESMAS KELILING						
No. URUT	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
59.	M-59	Kateter karet	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
60.	M-62	Kateter Logam	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
61.	M-70	Klem arteri	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
62.	M-72	Klem/ pemegang jarum jahit	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
63.	M-77	Klem/ penjepit porsio	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
64.	M-78	Korentang, lengkung, penjepit alat steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
65.	M-79	Korentang, penjepit sponge (foerster)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
66.	M-95	Pinset anatomis	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
67.		Pinset bedah	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
68.	M-111	Selang karet untuk anus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
69.	M-113	Semprit, gliserin	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
70.	M-117	Semprit, hipodermik	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
71.	M-121	Semprit, air	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
72.	M-126	Semprit untuk telinga dan luka	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
73.	M-128	Sikat tangan	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
74.	M-131	Skalpel, mata pisau bedah dan tangkainya	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
75.	M-135	Sonde uterus/penduga	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
76.	M-138	Sterilisator (pemanas alkohol)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
77.	S-4	Celemek plastik (schort) panjang 52 inci	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
78.	U-2	Baki logam tempat alat steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
79.	U-5	Botol mulut besar	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
80.	U-6	Botol mulut sempit dgn tutup ulir	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
81.	U-18	Kain balut segitiga (mitela)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
82.	U-22	Kompor minyak tanah (portable)	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
83.	U-25	Lampu spiritus	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
84.	U-31	Lampu senter	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
85.	U-34	Mangkok untuk larutan	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
86.	U-44	Pompa payudara untuk ASI	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
87.	U-48	Sandaran kepala	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
88.	U-52	Silinder korentang steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
89.	U-53	Spalk	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
90.	U-55	Waskom dan standarnya	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
91.	U-57	Tabung oksigen	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
92.	U-59	Tas kanvas tahan air	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

A.	JENIS PELAYANAN: KIT PERALATAN PUSKESMAS KELILING						
No. URUT	No. KODE	1. ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern	JUMLAH			KALIBRASI
				Baik		Rusak	1. Ya 2. Tidak
93.	U-65	Toples kapas logam dengan pegas dan tutup	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
94.	U-66	Tempat kasa steril	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
95.	U-67	Toples pembuangan kapas	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
96.	U-68	Torniket karet	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
97.	U-72	Waskom bengkok	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
98.	U-73	Waskom cekung	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
99.	U-74	Waskom cuci	☐	☐☐	☐☐	☐☐	
100.	D-40	Timbangan bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
101.	D-17	Pengukur panjang bayi	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐
102.	D-44	Termometer for infant	☐	☐☐	☐☐	☐☐	

No. URUT	No. KODE	2. BAHAN HABIS PAKAI	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya	KECUKUPAN 1. Cukup 2. Tidak cukup
		(1)	(2)	(3)
1.	M-92	Penusuk jari untuk mengambil darah	☐	☐
2.	S-22	Sarung tangan	☐	☐
3.	M-148	Jarum suntik, disposable	☐	☐
4.	M-146	Disposable syringe	☐	☐

XVI. KUESIONER ALAT KESEHATAN LUAR GEDUNG							RIFASKES-11.PKM. KIT		
Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM		
Nama Puskesmas:						Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			
Nama Responden:			Jabatan:				No.HP:		

B	KIT		
No. URUT	No. KODE	ALAT KESEHATAN	KETERSEDIAAN 1. Ada 2. Tidak ada→baris berikutnya 3. Diganti alat lebih modern
		(1)	(2)
1		Kit Sanitasi/ Kesehatan lingkungan	☐
2		Kit Penyuluhan/ Promosi kesehatan	☐
3		Kit Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)/Public Health Nusring (PHN)	☐
4		Kit Gizi	☐
5		Kit Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	☐
6		Kit Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)	☐

							RIFASKES-11.PKM			
Provinsi		Kabupaten		Kecamatan			No. Urut PKM			
Nama Puskesmas:						Kode Puskesmas: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐				
Nama Responden:			Jabatan:				No.HP:			

CATATAN